# PROFIL SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Sosial
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Dinas Perikanan
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
20. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
21. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22. Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kecamatan Benteng
29. Kecamatan Bontomanai
30. Kecamatan Buki
31. Kecamatan Bontomatene
32. Kecamatan Bontoharu
33. Kecamatan Bontosikuyu
34. Kecamatan Takabonerate
35. Kecamatan Pasimasunggu
36. Kecamatan Pasimasunggu Timur
37. Kecamatan Pasimarannu
38. Kecamatan Pasilambena
39. RSUD K.H. Hayyung

# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL OPD

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## PROFIL SEKRETARIAT DAERAH

1.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah

Kedudukan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diatur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) selanjutnya diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif sesuai kententuan perundang-undangan, terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah Tipe A yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di koordinat 6.1208390 Lintang Selatan dan 120.4666590 Bujur Timur, dengan alamat email setda@kepulauanselayarkab.go.id.

**1.2.** Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

**1.** Sekretaris Daerah mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 19 penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Daerah mempunyai Fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

Untuk uraian Tugas, meliputi:

a. merencanakan program kerja lingkup Sekretariat Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian dan pembangunan, serta bidang administrasi umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan perumusan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman penyusunan kebijakan daerah;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta 20 pembinaan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;

h. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perekonomian dan pembangunan yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan

bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;

i. mengoordinasikan penyelenggaraan bidang administrasi umum meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan organisasi, perencanaan dan keuangan, serta umum dan protokol sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Tugas;
j. mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan berjalan 0sebagaimana mestinya;
k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah;
l. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan Tugas perangkat daerah; dan evaluasi m. menyelenggarakan pelaksanaan penegakan disiplin aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
o. menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintah kabupaten;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Seketariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat terkait bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat;
f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai rencana strategis untuk kelancaran pelaksanaan Tugas;
g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
i. mengoordinasikan penyusunan produk hukum daerah;

j. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana program jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
l. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan pelaporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa mendatang;
m. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
n. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
o. menyelenggarakan evalusi kinerja unit lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terhadap rencana kerja yang telah disusun sebagai bahan perbaikan kinerja dimasa mendatang;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1. Bagian Pemerintahan Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di administrasi kerjasama; bidang administrasi kewilayahan, otonomi pemerintahan, daerah dan
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerjasama; otonomi daerah dan
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Pemerintahan, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang Tugasnya;
f. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerja sama;
h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;

j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama;
k. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
l. memfasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
m. melakukan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah kecamatan dan/atau kelurahan;
n. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan, serta nama lain dan/atau pemindahan ibukota kecamatan;
o. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
p. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan;
q. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
r. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan;
s. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
t. menghimpun informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
u. memfasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal organisasi perangkat daerah;
v. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
w. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; x. mengoordinasikan penyusunan bahan laporan akhir masa jabatan Kepala Daerah;
y. melakukan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum;

z. melakukan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;
aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

bb. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, otonomi daerah dan kerjasama ;
cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ee.melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 28 Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar; dan
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
i. dan mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
k. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
l. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
m. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
n. melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan kerjasama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

o. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan serta kerjasama antar lembaga keagamaan;
p. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
q. melakukan koordinasi kerjasama sosial kemasyarakatan serta konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
r. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan;
s. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar meliputi kesehatan, sosial, dan pendidikan;
t. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesejahteraan rakyat nonpelayanan dasar meliputi kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja, komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat;
v. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar;
w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Kesejahteraan rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

2.3. Bagian Hukum Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat

daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Hukum melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang-undangan, bantuan dokumentasi dan informasi; dan hukum dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Hukum, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;

i. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang perundang undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi;
j. memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
k. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
l. menyiapkan bahan penjelasan Kepala Daerah dalam proses penetapan Peraturan Daerah; m. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah;
n. melakukan pembinaan penyusunan produk hukum daerah;
o. menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum daerah;
p. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah;
q. melakukan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
r. melakukan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
s. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum; melakukan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara hukum; melakukan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
u. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
v. melakukan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
w. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
x. melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
y. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
z. melakukan sosialisasi, penyuluhan dan deseminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang undangan lainnya;
aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Hukum;

bb. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi;
cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara di Bagian Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dd.menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Hukum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ee.melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan Fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
b. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, 35 administrasi barang/jasa; pembangunan, serta pengadaan
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan Tugasnya.

Uraian Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat terkait bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai rencana strategis untuk kelancaran pelaksanaan Tugas;
g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
i. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan yang menjadi visi dan misi Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta dokumen perencanaan lainnya dalam lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
k. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

m. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan aparatur di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, serta pengadaan barang/jasa;
n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan Fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah 38 dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian, dan sumber daya alam;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan

usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, perekonomian dan sumber daya alam;
h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
k. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, koordinasi penanaman modal, perizinan dan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;

l. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang sumber daya alam yang meliputi pertanian, pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan 40 perikanan dan lingkungan hidup, serta energi sumber daya mineral;
m. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
n. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
o. menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
p. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
q. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
r. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
s. melakukan fasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
t. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
v. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, kebijakan perekonomian dan sumber daya alam;
w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

3.2. Bagian Administrasi Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pembinaan administrasi dan pengembangan sember daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
h. melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang penyusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;
j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang penyusunan program, pengendalian program serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
k. melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas program pembangunan daerah;
l. melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah;
m. melakukan penyusunan program pembangunan dalam rangka mengembangkan akses pembangunan daerah;
n. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi risiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;
o. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah;
p. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat risiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
q. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta;
r. menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah;
s. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
t. mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah;
u. menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan program pembangunan daerah;

v. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan;
w. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang penyusunan program, pengendalian program, dan evaluasi dan pelaporan;
x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Administrasi Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
y. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
z. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan Fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Barang/Jasa lingkungan Bagian Pengadaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

k. melakukan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan
l. infrastrukturnya; melakukan pelayanan secara eletronik) pengadaan dan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
m. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
n. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
o. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa; p. melakukan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
q. mengelola informasi kontrak;
r. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
s. melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel unit kerja pengadaan barang/jasa;
t. melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
u. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
v. melakukan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa;
w. melakukan analisis beban kerja unit unit kerja pengadaan barang/jasa;
x. melakukan pengelolaan personil unit kerja pengadaan barang/jasa
y. melakukan pengembangan sistem insentif personel unit kerja pengadaan barang/jasa;

z. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
aa. melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
bb. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah;
cc. melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain sistem informasi rencana umum pengadaan, sistem pengadaan secara elektronik, e-katalog, e-monev, sistem informasi kinerja penyedia;
dd. melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;

ee. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
ff. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa
gg. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian pengadaan Barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 49 hh.menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ii.melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai Tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum melaksanakan Fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
c. pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
g. dan pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan yang berkaitan dengan Tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. merencanakan program kerja lingkup Asisten Administrasi Umum sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Asisten Administrasi Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat terkait bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
f. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Asisten Administrasi Umum;
g. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
h. mengoordinasikan pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang organisasi;
i. menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
j. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;
k. mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaporan capaian kinerja instansi serta penerapan reformasi birokrasi;
l. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
m. mengoordinasikan urusan umum dan protokol dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional Sekretariat Daerah;
n. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
o. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang organisasi, umum dan protokol, serta perencanaan dan keuangan;
p. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Asisten Administrasi Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Asisten Administrasi Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
r. menyelenggarakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.1. Bagian Organisasi Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Organisasi melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
d. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Organisasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi dan kinerja;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
i. mengoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
j. merumuskan dan menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
k. menyiapkan bahan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja;
l. mengoordinasikan perumusan dan penyusunan Tugas dan Fungsi jabatan perangkat daerah;
m. mengordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dan unit pelaksana teknis daerah;
n. menyusun standar kompetensi jabatan;
o. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
p. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat daerah;
q. menyusun profil kelembagaan perangkat daerah;
r. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;
s. melaksanakan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
t. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
u. menghimpun dan memfasilitasi standar operasional prosedur yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah;
v. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
w. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik;

x. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi;
y. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
z. menyusun road map reformasi birokrasi;
aa. melakukan fasilitasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
bb. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan budaya kerja;
cc. mengoordinasikan peningkatan budaya kerja;
dd. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi dan kinerja;
ee. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi Tugas dan Fungsi perangkat daerah;
ff. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan kinerja;
gg. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Organisasi;
hh. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
ii. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Organisasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan jj. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2. Bagian Umum dan Protokol Bagian Umum dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi, dan penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas

sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Umum dan Protokol melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan protokol;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait urusan umum dan protokol;
d. penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, protokol dan komunikasi pimpinan dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Protokol sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengeval
uasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Protokol untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan umum dan protokol yang meliputi tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan;
h. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang umum dan protokol;
i. melaksanakan kegiatan pengelolaan penghubung pemerintah daerah untuk kelancaran hubungan yang terkait dengan informasi dan komunikasi antar lembaga agar tercipta hubungan koordinasi singkronisasi pelaksanaan Tugas pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan pihak-pihak lainnya;
j. mengoordinasikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli

dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;

k. melaksanakan program dan kegiatan di bidang ketatausahaan pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta protokol dan komunikasi pimpinan;

l.` melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat daerah dan staf ahli;

m. memfasilitasi dan mengoordinasikan dengan perangkat daerah terhadap pemanfaatan ruang pertemuan/rapat;

n. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Umum dan Protokol;

o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Umum dan Protokol;

p. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta protokol dan komunikasi pimpinan;

q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Umum dan Protokol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Umum dan Protokol serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan kepegawaian yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangaan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat dinas;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat dinas;
h. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
i. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara lingkup sekretariat daerah dan staf ahli, antara lain data dan informasi manajemen kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penilaian kinerja aparatur sipil negara, kepangkatan, penegakan peraturan disiplin aparatur sipil negara/absensi aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian lainnya;

j. menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi kepegawaian, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan penegakan disiplin aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
k. melaksanakan dan/atau melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis aparatur sipil negara;
l. mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata usaha yang meliputi penerimaan, pencataan, pemeriksaan, pengaturan dan penyampaian naskah dinas, serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan Tugas yang terkait dengan Tugas dan tanggung jawab Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
m. menyiapkan bahan kebutuhan Sekretariat Daerah meliputi alat tulis kantor, penggandaan dan percetakan serta mengatur tamu yang

akan menghadap kepimpinan dan pelaksanaan suatu acara termasuk makan minum rapat dan tamu;

n. melakukan sosialisasi kepada aparatur sipil negara lingkup Sekretariat Daerah terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
o. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan tata usaha pimpinan, sekretariat daerah, staf ahli dan manajemen kepegawaian;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait urusan rumah tangga dan perlengkapan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan untuk pelaksanaan Tugas; mengetahui perkembangan
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan urusan rumah tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah;
g. melakukan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
h. melakukan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah;
i. melakukan kebijakan pengadaan barang/perlengkapan untuk kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekretariat Daerah;
j. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Sekretariat Daerah, serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan;
k. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati, serta rumah dinas Sekretaris Daerah;
l. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah;

m. mengoordinir kebersihan, keamanan dan ketertiban, kenyamanan, keserasian rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah, serta melaksanakan pemeliharaan pengawasan rumah jabatan pimpinan;
n. melaksanakan inventarisasi barang/perlengkapan pada gedung/kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya;
o. melakukan pengurusan dan penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan kendaraan dinas antara lain surat tanda nomor kendaraan, Pajak Kendaraan, Jasa Raharja dan kir kendaraan;
p. mengatur tempat dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan bagi rapat dan pertemuan lainnya pada Sekretariat Daerah;
q. menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan bakar minyak dan suku cadang kendaraan dinas agar setiap saat siap untuk dipergunakan;
r. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.2.3. Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Protokol dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan urusan protokol dan komunikasi pimpinan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol dan komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan serta dokumentasi;
h. melaksanakan tata cara protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
i. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
j. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;
k. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
l. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah;

m. memberikan masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi tertentu;
n. memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau arahan pimpinan;
o. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak sesuai kebutuhan Bupati dan Wakil Bupati;
p. menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat dan bahan materi kebijakan;
q. menyusun naskah sambutan pidato Bupati dan Wakil Bupati;
r. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta melakukan penyusunan notulen rapat Bupati dan Wakil Bupati;
s. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
t. melakukan pemberdayaan kantor penghubung pemda sebagai media penghubung antar kementerian/lembaga dan pihak terkait dalam rangka kelancaran informasi, komunikasi, koordinasi dan kerjasama serta singkronisasi pelaksanaan Tugas pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
u. mengoordinasikan penyiapan pelaksanaan perjalanan dinas pimpinan dan aparatur, serta melakukan inventarisasi pelaksanaan perjalanan dinas termasuk laporan perjalanan dinas, dokumentasi serta distribusi bahan perjalanan dinas pimpinan dan aparatur lingkup Sekretariat Daerah;
v. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan fungsi Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
x. melakukan penyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. melakukan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

4.3. Bagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai Tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan penyiapan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
d. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
g. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan Tugas Bagian lingkup Sekretariat Daerah;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelakasanaan perubahan anggaran Sekretariat Daerah;
j. melakukan pembuatan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup Sekretariat Daerah;
k. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, aset dan laporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
l. melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
m. melakukan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah;
n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
o. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyiapan bahan penyusunan, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan lingkup Sekretariat Daerah, penerapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan nota keuangan Pemerintah Daerah serta laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Daerah;
p. mengoordinasikan pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah lingkup Sekretariat Daerah;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pelaporan keuangan triwulan, semester dan laporan keuangan akhir tahun terkait kegiatan lingkup Sekretariat Daerah;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Tugas pemegang kas/pembantu pemegang kas bendahara dan bendahara pembantu;
s. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, verifikasi anggaran, akuntansi, aset dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Sekretariat Daerah;

t. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis tata kelola Bagian Perencanaan dan Keuangan;
u. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan;
v. menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, serta akuntansi, aset dan pelaporan;
w. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
x. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
y. melaksanakan Tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang Tugasnya.

5. Jabatan Fungsional

5.1. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yaitu jabatan Fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Pengangkatan Pejabat fungsional pada Sekretariat Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat membentuk Sub Koordinator Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dipaparkan dibawah ini :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesra, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator da Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator da Kelompok Jabatan Fungsional;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator da Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator da Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bagian Pengadaan barang/Jasa, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Organisasi, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari :
   a) Sub Bagian Tata Usaha Usaha Pimpinan, Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
   c) Sub Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

3. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
   a) Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai Sumber Daya Aparatur, PNS sebanyak 98 orang, PTT sebanyak 140 orang, yang dirinci berdasarkan golongan, eselon dan pendidikan sebagai berikut :

1. Klasifikasi menurut Golongan :

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Golongan IV | 21 Orang |
| 2 | Golongan III | 66 Orang |
| 3 | Golongan II | 11 Orang |
| 4 | Golongan I | - |
| 5 | PTT | 140 Orang |

2. Klasifikasi menurut jabatan

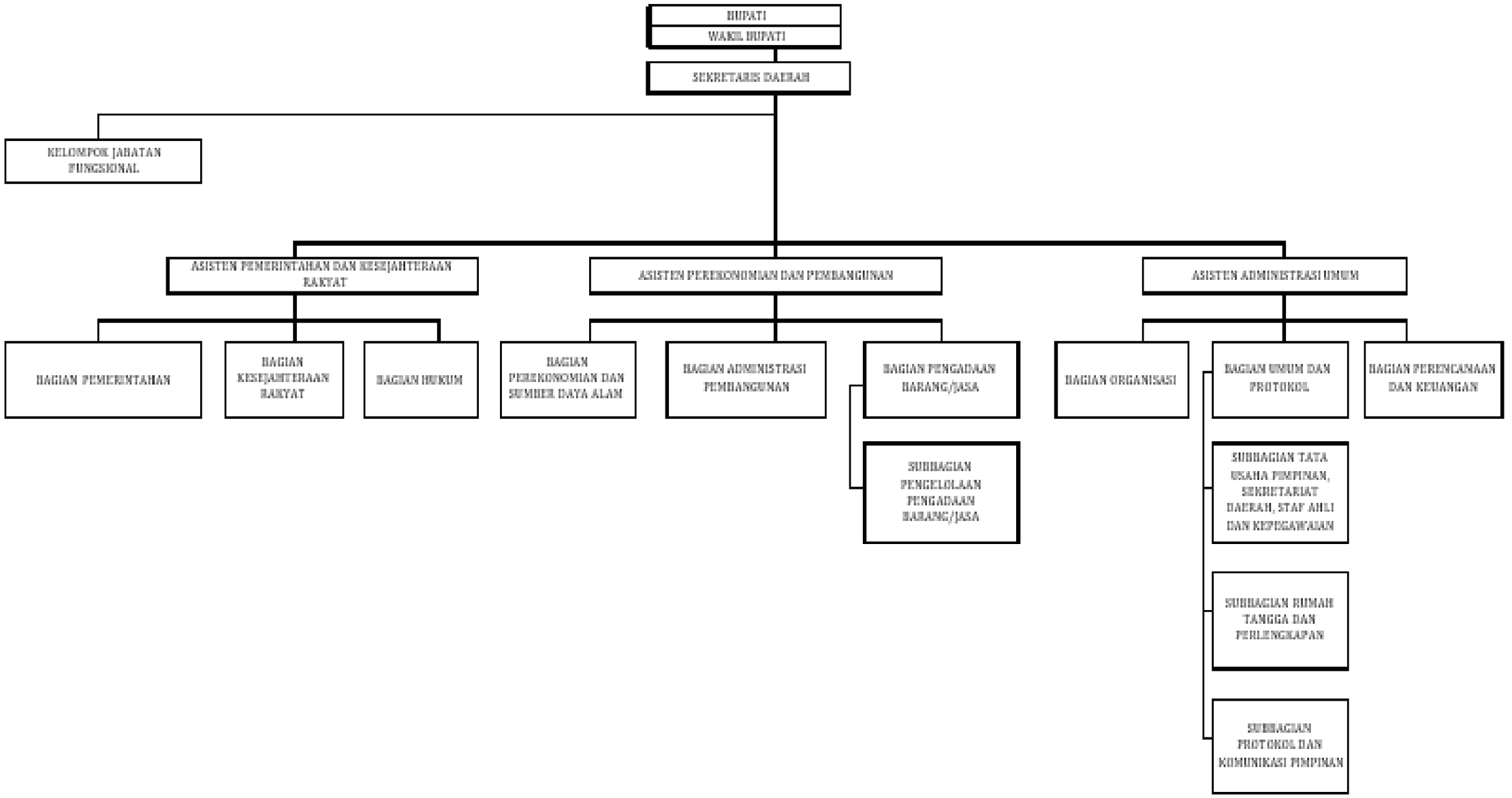
| NO | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Eselon II/A | 1 Orang |
| 2 | Eselon II/B | 5 Orang |
| 3 | Eselon III/A | 8 Orang |
| 4 | Eselon IV/A | 4 Orang |
| 5 | Staf | 80 Orang |

3. Klasifikasi menurut pendidikan;

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Strata 3 | 1 Orang |
| 2 | Strata 2 | 17 Orang |
| 3 | Strata 1 | 57 Orang |
| 4 | Sar Mud/DIII/DII/DI | 2 Orang |
| 5 | SLTA | 21 Orang |

Untuk tingkat Pendidikan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM dengan tingkat Pendidikan sebagai berikut : - Pendidikan S3 sebanyak 1 Orang atau 0,42%, - Pendidikan S2 sebanyak 17 Orang atau 7,14%, - Pendidikan S1 sebanyak 57 Orang atau 23,94%, Sarjana Muda/DIII/DII/DI sebanyak 2 Orang atau 0,84%,- dan Pendidikan SLTA sebanyak 21 Orang atau 8,82%,.

# SUSUNAN ORGANISASI
# SEKRETARIAT DAERAH



# PROFIL SEKRETARIAT DPRD

## 1.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. dan penjabarannya dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian dan Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah "*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD,* dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah".

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekratariat DPRD mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Permendagri NOmor 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Organisasi Perangjat Daerah Daerah Tipe C yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, Sekretariat DPRD memiliki laman website sebagai bahan informasi yaitu https://dprdkepulauanselayar .co.id

Gambar 1.

Foto Kantor Sekretariat DPRD










## 1.2. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi Sekretariat DPRD

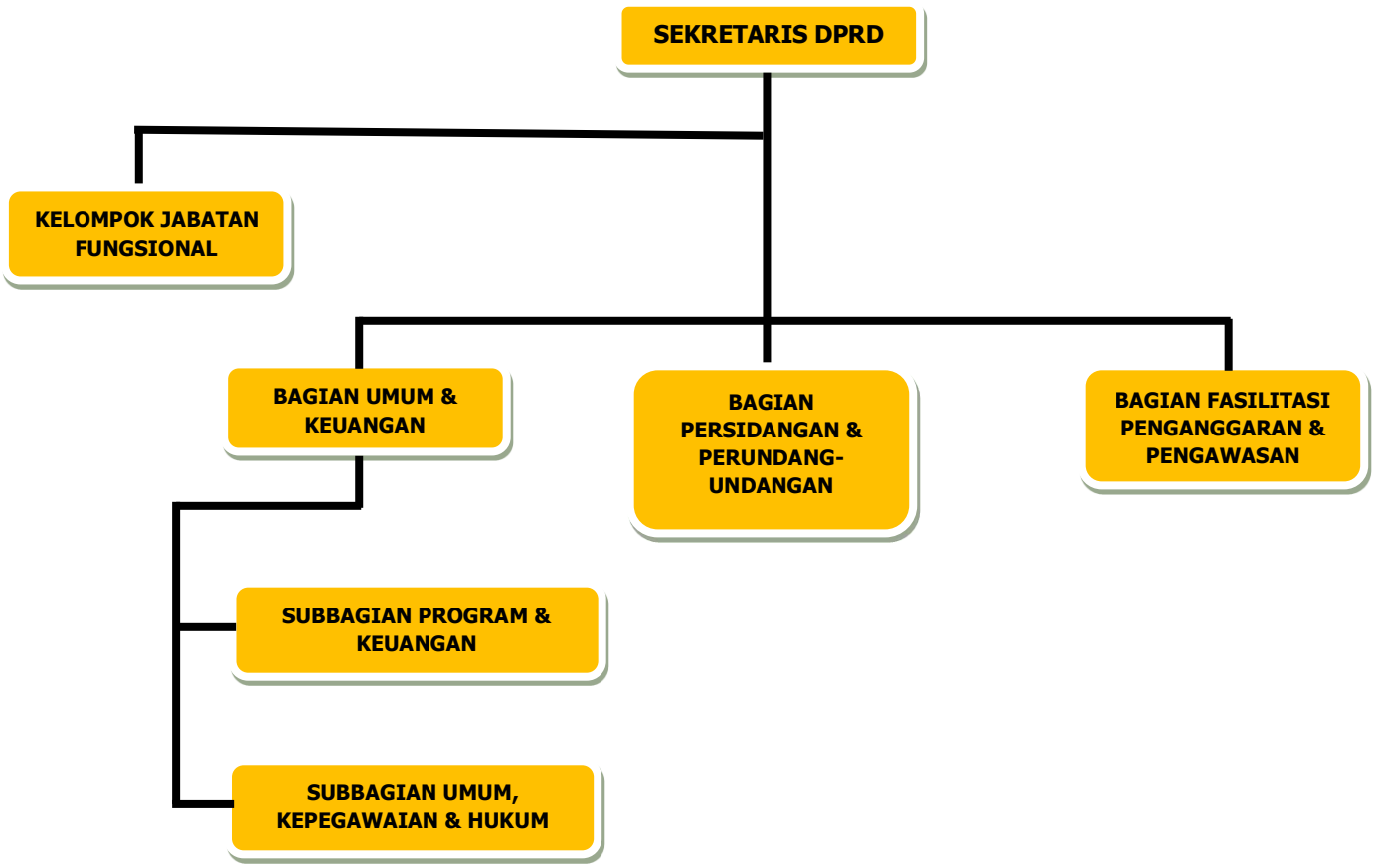
Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) bagian :

a. Bagian Umum dan keuangan terdiri dari :
   1. Sub. Bagian Program dan keuangan
   2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
b. Bagian Pengawasan dan penganggaran
c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.2

**Gambar 2**

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**




**1. Sekretaris DPRD**

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Didalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
c. Penyelenggaraan rapat – rapat DPRD
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

**2. Bagian Umum dan Keuangan**

Bagian umum dan keuangan merupakan unsur staf Sekretariat DPRD, dipimpin oleh seorang Kepala yang di sebut Kepala Bagian Umum dan keuangan , berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum perlengkapan, kepegawaian, protokoler dan mengkoordinasikan kegiatan internal maupun eksternal dengan lembaga lain.

Bagian yang memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD (Bagian Umum dan Keuangan), melaksanakan fungsi:

a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
f. menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
s. mengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD; dan
u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

3. **Bagian Persidangan dan Perundang-undangan** , melaksanakan fungsi:
   a. Menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
   b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
   c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
   d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
   e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
   f. memfasilitasi penyelengaraan persidangan;
   g. menyusun risalah rapat;
   h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;
   i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris Masalah (DIM);
   j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
   k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;

l. menyelenggarakan publikasi; dan

m. menyelenggarakan keprotokolan.

**4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan pengawasan**

Bagian yang menyelenggarakan Fungsi Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan (Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan), melaksanakan fungsi:

a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP;
c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertangung jawaban pelaksanaan APBD;
d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertangung jawaban kepala daerah;
f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
h. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinqasikan persetujuan kerjasama daerah.

## 2.1 Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 1. Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan tanggal bulan Agustus 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat ) Orang ASN dan 66 ( Enam Puluh Enam ) Orang yang berstatus PTT ddengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

| Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Golongan I | - | - | - |
| Golongan II | 4 | 1 | 5 |
| Golongan III | 4 | 9 | 13 |
| Golongan IV | 3 | 0 | 3 |
| Golongan V | 1 | | 1 |
| Golongan IX | | 2 | 2 |
| **Jumlah** | **12** | **12** | **24** |

.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai ASN Menurut Jabatan Sekretariat DPRD

| Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Eselon II | 1 | | 1 |
| Eselon III | 3 | - | 2 |
| Eselon IV | | 2 | 2 |
| Non Struktural (Staf) | 8 | 10 | 19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **JUMLAH** | **12** | **12** | **24** |

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| **No** | **PEGAWAI** | **PENDIDIKAN** | | | | | **JUMLAH** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMA | D2 | D3 | S1 | S2 | |
| **A.** | | | | | | | |
| 1. | Esalon II | | | | | 1 | 1 |
| 2. | Esalon III | | | | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Esalon IV | | | | | 2 | 2 |
| 4. | Non Struktural | 8 | - | - | 8 | 2 | 18 |
| | | | | | | | |
| | **TOTAL** | **8** | | | **10** | **6** | **24** |

# PROFIL INSPEKTORAT DAERAH
# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pengawasan umum di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Inspektorat Daerah merupakan pengawas internal yang berperan sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Paradigma Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat Daerah

lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Inspektorat Daerah adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja instansi pemerintah di tingkat daerah. Fungsi utama Inspektorat Daerah adalah memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inspektorat Daerah memiliki peran krusial dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di tingkat pemerintahan daerah. Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Inspektorat dapat membantu mencegah kecurangan, korupsi, dan pemborosan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah daerah.

Detail Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut berikut:

| | |
|---|---|
| ALAMAT | Jl. Bonto No. 1 Benteng, 92812 |
| EMAIL | itkabkepulauanselayar@gmail.com |
| TITIK KOORDINAT | -6.1125722; 120.4650815 |
| FOTO KANTOR |  |

## B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mengemban tugas di bidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah,

memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Perencanaan;
    b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
    c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi, terdiri dari;
    a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
    b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Penyelenggaraan administrasi Inspektorat Daerah;
6. Penyelenggaraan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dtindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, ruang lingkup dan sasaran

pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
    a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RENSTRA, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
    b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
    c. Pengawalan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
    d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasn korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan banturan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
3. Reviu DAK Fisik
4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

   Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

   a. audit kinerja;

   b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

   Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

   Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

   Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

   Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (*Assurance Activities*), terdiri atas:
    a. Audit, meliputi:
        1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
        2) Audit Kinerja
        3) Audit dengan tujuan tertentu
    b. Evaluasi;
    c. Reviu;
    d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
    a. Konsultasi;
    b. Sosialisasi;
    c. Asistensi.

## C. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

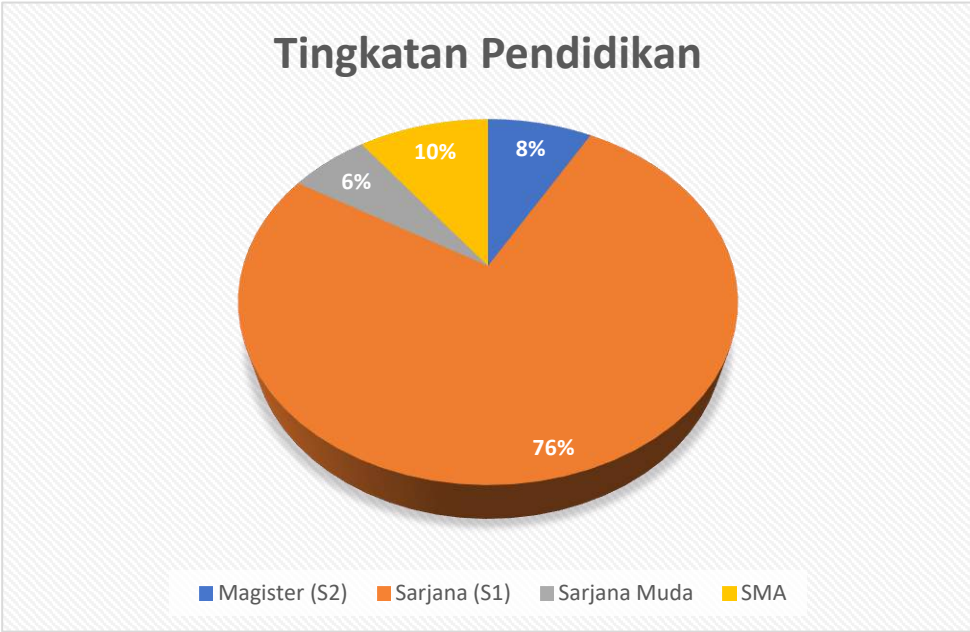
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 49 orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

### 1. Klasifikasi Menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

| JABATAN | JUMLAH |
|---|---|
| **MAGISTER (S2)** | 4 orang |
| **SARJANA (S1)** | 37 orang |
| **SARJANA MUDA** | 3 orang |
| **SMA** | 5 orang |
| JUMLAH | **49 orang** |

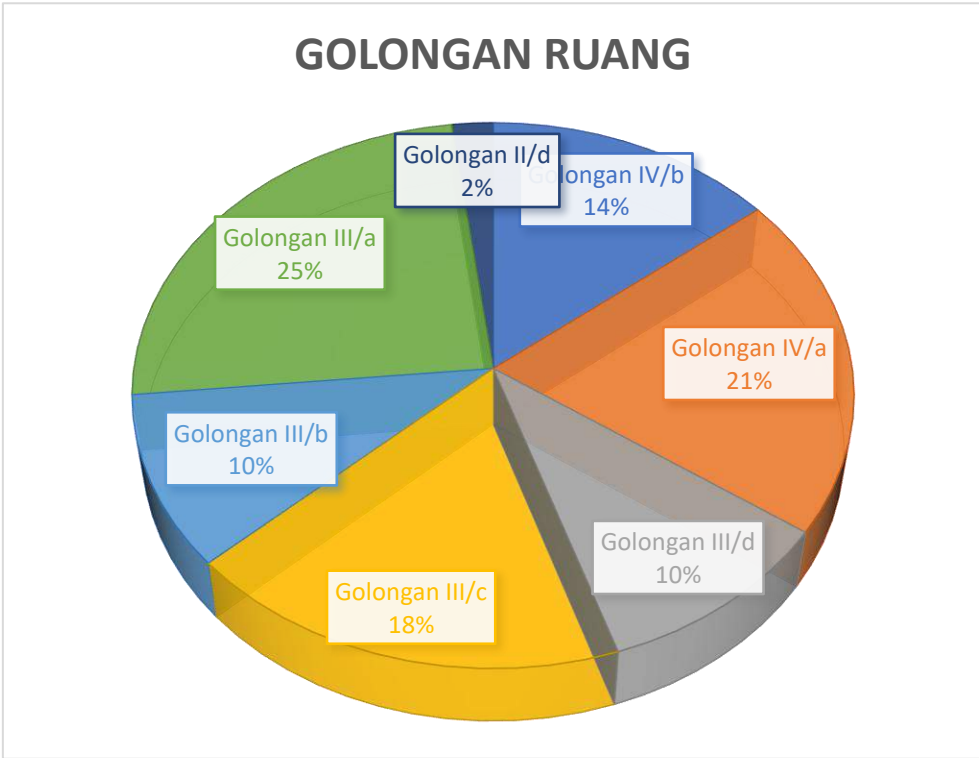


## 2. Klasifikasi Menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan/Ruang

| JABATAN | **JUMLAH** |
|---|---|
| **GOLONGAN IV/C** | - orang |
| **GOLONGAN IV/B** | 7 orang |
| **GOLONGAN IV/A** | 10 orang |
| **GOLONGAN III/D** | 5 orang |
| **GOLONGAN III/C** | 9 orang |
| **GOLONGAN III/B** | 5 orang |
| **GOLONGAN III/A** | 12 orang |
| **GOLONGAN II/D** | 1 orang |
| **GOLONGAN II/C** | - orang |
| **GOLONGAN II/B** | - orang |
| **GOLONGAN II/A** | - orang |
| JUMLAH | **49 orang** |

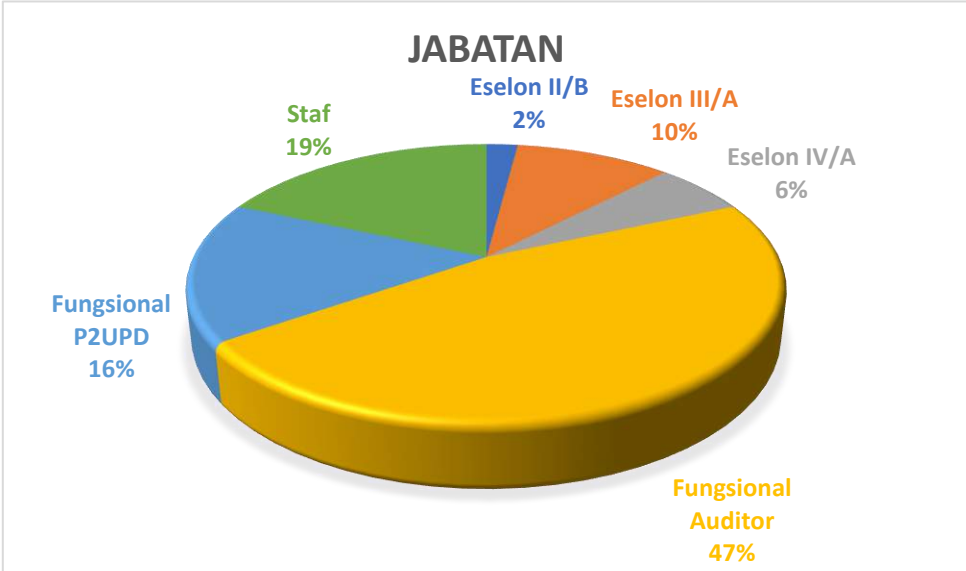


### 3. Klasifikasi Menurut Jabatan

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

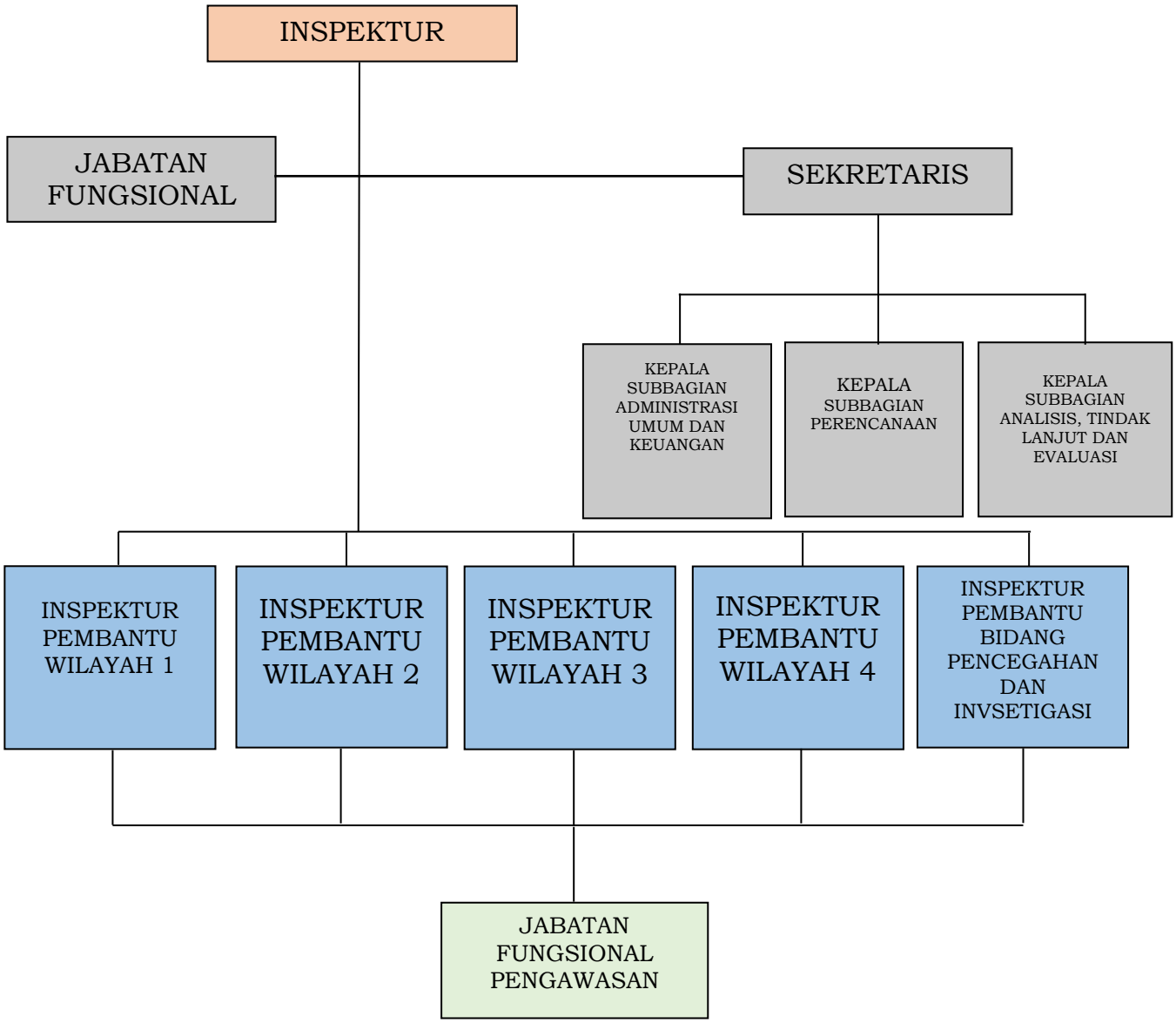
Tabel 1.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

| JABATAN | JUMLAH |
|---|---|
| **ESELON II/B** | 1 orang |
| **ESELON III/A** | 5 orang |
| **ESELON IV/A** | 3 orang |
| **FUNGSIONAL AUDITOR** | 23 orang |
| **FUNGSIONAL P2UPD** | 8 Orang |
| **STAF** | 9 orang |
| JUMLAH | **49 orang** |

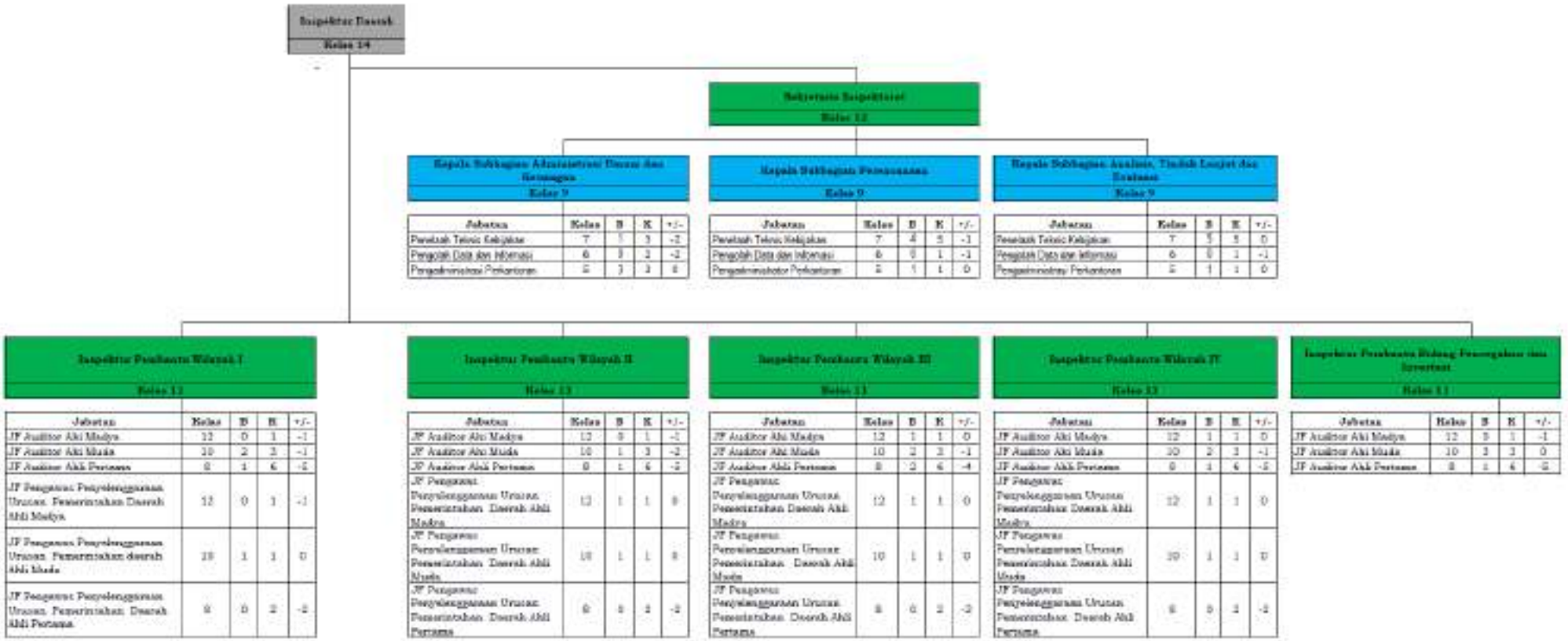


**Struktur Organisasi Inspektorat Daerah**

**Kabupaten Kepulauan Selayar**



# Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024




| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 5 | 6 | -1 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 4 | 4 | 0 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 4 | 5 | -1 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 5 | 5 | 0 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 1 | 0 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 2 | 3 | -1 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 1 | 6 | -5 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 1 | 3 | -2 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 1 | 6 | -5 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 2 | 3 | -1 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 2 | 6 | -4 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 2 | 3 | -1 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 2 | 6 | -4 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 2 | 3 | -1 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 2 | 6 | -4 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF Auditor Ahli Madya | 12 | 0 | 1 | -1 |
| JF Auditor Ahli Muda | 10 | 2 | 3 | -1 |
| JF Auditor Ahli Pertama | 8 | 2 | 6 | -4 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya | 12 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |

Benteng, 04 Januari 2025

**INSPEKTUR DAERAH**,

**IRWAN BASO, S.STP.**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP : 19800422 199912 1 003

# PROFIL

## DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR











# Daftar isi


Daftar Isi ..... i
Pengantar ..... ii
Pendahuluan ..... 1
Latar Belakang ..... 1
Landasan Hukum ..... 3
Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ..... 5
1. Kedududukan ..... 5
2. Struktur ..... 6
Sumber Daya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ..... 8
1. Kondisi Umum Pegawai ..... 8
2. Jumlah Pendidik ..... 12
3. Jumlah Tenaga Kependidikan ..... 13
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan ..... 14
Kondisi Pendidikan ..... 15
PAUD ..... 15
SD ..... 19
SMP ..... 21
PNF/Kesetaraan ..... 23
Kinerja Layanan Pendidikan ..... 25
Penutup ..... 37

# Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nya sehingga kami dapat menuntaskan penyusunan Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun. Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berisi tentang data serta informasi pendidikan, kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021. Penyusunan profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini merupakan langkah awal menuju sistem perencanaan yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data Pendidikan digunakan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD supaya pelaksanaan pembangunan daerah konsisten.



Data Pendidikan disusun berdasarkan hasil pendatan pendidikan yang berasal dari sekolah sekolah dan diolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kami berharap semoga profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembangunan pendidikan di masa mendatang.

Benteng, Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar

**DRS. MUSTAKIM KR, MM.Pd**
Nip. 196612311992031180
Pembina Utama Muda

# Pendahuluan

## Latar Belakang

Mencerdasarkan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu tujuan Negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya.Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas.

Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang bagaimana Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Melalui Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa keberadaan perpustakaan menjadi satu pilar penting bagi pendidikan.

Perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun regional/daerah mengharuskan birokrasi (pemerintah pusat dan daerah) untuk mengkaji ulang dasar pendekatan (paradigm) dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang demokratis, desentralisasi, partisipatif, transparan, professional, berkeadilan, menegakkan supremasi hukum dan HAM, bersih dan akuntabel, serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan orientasi turut serta mensukseskan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2026.

Peranan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mendukung mewujudkan Visi dan Misi Kepulauan Selayar perlu didukung dengan penjelasan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sehingga dapat disusun program kerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya kemudian secara mandiri Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menentukan Visi dan Misi yang sinergis dengan Visi dan Misi Kepulauan Selayar.

Sebagai gambaran upaya pencapaian Visi dan Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, maka disusunlah Profil Pendidikan Tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Selayar. Profil data Pendidikan 2021 ini berisi data dan informasi pendidikan yang dapat dijadikan sebagai acuan menuju sistem perencanaan yang baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Data Pendidikan digunakan untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keserasian, sinergisitas program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD supaya pelaksanaan pembangunan daerah dapat konsisten.

# Landasan Hukum
## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penyusunan profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu dan Penguatan tata Kelola dan Akuntabilitas dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Sistem Manajemen Strategis *(Strategic Management System).* Berikut ini acuan penyusunan profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga:

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor …?;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 505).

# Gambaran Pelayanan
## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

**Kedudukan Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang Kepemudaan dan olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tempat kedudukan :

Alamat : Jln Fatmawati No. 9 Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan
Kode Pos : 92812
Email : diknas_sly@yahoo.co.id
Telepon : 0414 21199
Fax : 0414 21199
Website : diknas.kepulauanselayarkab.go.id

**Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang pendidikan antara lain : menyelenggarakan kegiatan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, Kepemudaan, Olahraga, dan kegiatan kesekretariatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**Struktur Organisasi**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan organisasi perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati.

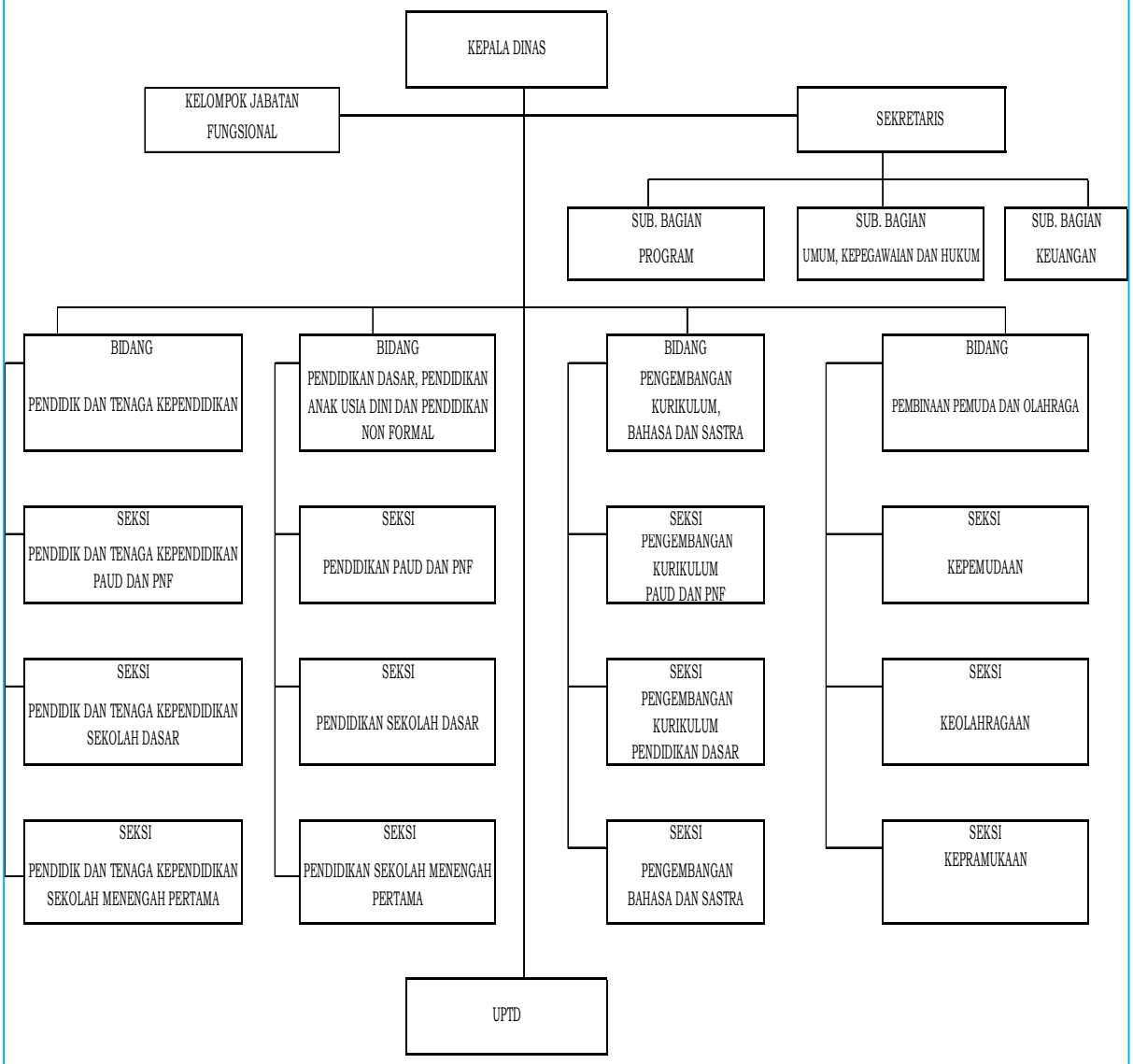
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretariat, 4(Empat) bidang, 3 (tiga) subbag, 12 (dua belas) seksi. Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
   - Sub Bagian Program
   - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
   - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
   - Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
   - Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
   - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
   - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
   - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF
5. Bidang Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra, terdiri dari:
   - Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
   - Seksi Kurikulum PAUD dan PNF
   - Seksi Pengembangan Bahasa dan Sastra
6. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
   - Seksi Kepemudaan
   - Seksi Keolahragaan
   - Seksi Kepemudaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu
8. Unit Pelaksana Teknis

Secara lengkap struktur organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam gambar berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**




Bagan 3. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MUH. BASLI ALI

# Sumber Daya
## Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga

**Kondisi Umum Pegawai**

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang ada terdiri dari Tenaga Administrasi/non teknis pendidikan dan Tenaga Fungsional/teknis pendidikan.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan kondisi pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar :

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan ,Pemuda dan Olahraga

| No | Nama/Nip | Pangkat/Gol | Jabatan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JPT | Adminis Trator | Pengawas | Pelaksana | Fungsional |
| 1 | Drs. MUSTAKIM. KR, MM.Pd<br>NIP. 196612311992031180 | Pembina Utama Muda, IV/c | √ | | | | |
| 2 | Drs. H. ANDI AGUS, MM<br>NIP. 196702202006041013 | Pembina, IV/a | | √ | | | |
| 3 | DEMPAK, S.Pd<br>NIP. 19690921 199203 1 010 | Pembina, IV/a | | √ | | | |
| 4 | ANDI BATARA GAU, SE<br>NIP. 19750529 201001 1 008 | Pembina, IV/a | | √ | | | |
| 5 | AKHMAD YANI, S.Pd<br>NIP. 19810308 200803 1 002 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 6 | PATTA ARIS, S.Pd<br>NIP. 19660206 199103 1 015 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 7 | ABDUL WAHAB, S.Sos<br>NIP. 19630602 198602 1 012 | Pembina, IV/a | | √ | | | √ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | UMMI SALMA, SE.,M.Si<br>NIP. 19670830 199403 2 011 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 9 | NUR HUDAYANA, S.Pd<br>NIP. 19751103 200604 2 015 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 10 | TOMPOBULU, S.Ap<br>NIP. 19680924 199303 1 012 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | √ |
| 11 | MUHAMMAD RIZAL, S.Pd<br>NIP. 19860911 200903 1 001 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | √ |
| 12 | MUSTAQIM, S.Pd<br>NIP. 19740129 200801 1 006 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 13 | Hj. SURIANI, S.Pd<br>NIP. 19681231 199303 2 093 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 14 | RATNAWATI, S.Sos<br>NIP. 19700321 199303 2 008 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 15 | ADNAN SYAH ASMAUN, SE<br>NIP. 19710516 200901 1 005 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 16 | MURLIANAH, AR, SP<br>NIP.19720521 199401 2 002 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | |
| 17 | AWALUDDIN, SE. Ak.,M.Si<br>NIP.19770627 201001 1 012 | Penata, III/c | | √ | | | |
| 18 | RAHMAT TAUFIK, SE<br>NIP.19800315 201101 1 006 | Penata, III/c | | √ | | | |
| 19 | NURSANG MUHTAR, S.Pd<br>NIP.19820603 200903 1 005 | Penata, III/c | | √ | | | |
| 20 | SUPRIADI, S.Sos<br>NIP.19850808 200903 1 003 | Penata, III/c | | √ | | | |
| 21 | ERNAWATI, S.Kom<br>NIP.19800713 201001 2 021 | Penata, III/c | | √ | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RISWAWAN IBRAHIM, ST.,MM<br>NIP.19840127 201407 1 002 | Penata Muda Tk.I, III/b | | √ | | | |
| 23 | H. ABD. HALIM, S.Pd<br>NIP.19631122 198411 1 002 | Pembina , IV/a | | | | √ | |
| 24 | HIKMAWATI<br>NIP.19660619 199003 2 009 | Penata Tk.I, III/d | | | | √ | |
| 25 | ROSNIAH<br>NIP. 19720510 199303 2 011 | Penata, III/c | | | | √ | |
| 26 | ABD. RAZAK, S.Pd<br>NIP. 19640508 198411 1 002 | Pembina , IV/a | | | | √ | |
| 27 | MUHAMMAD ANSAR, S.Pd<br>NIP. 19650909 198803 1 017 | Penata Tk.I, III/d | | | | √ | |
| 28 | RATNA, SE<br>NIP. 19790917 201407 2 003 | Penata Muda Tk.I, III/b | | | | √ | |
| 29 | NUR AENAH USMAN, A.Md<br>NIP. 19780327 200701 2 022 | Penata Muda Tk.I, III/b | | | | √ | |
| 30 | ROSMIATI, SE<br>NIP. 19770701 200701 2 021 | Penata Muda Tk.I, III/b | | | | √ | |
| 31 | SRI DEWI UTAMI, SE<br>NIP. 19860126 201502 2 001 | Penata Muda, III/a | | | | √ | |
| 32 | AHRIYANI, AR, SE<br>NIP. 19740608 201410 2 001 | Penata Muda, III/a | | | | √ | |
| 33 | ABD. RAHMAN, A.Md<br>NIP. 19820511 200604 1 017 | Penata Muda, III/a | | | | √ | |
| 34 | SUBHAN UNTUNG, A.Ma<br>NIP. 19820528 200903 1 004 | Pengatur TK.I, II/d | | | | √ | |
| 35 | PARIDAWATI<br>NIP. 19770224 200604 2 025 | Pengatur TK.I, II/d | | | | √ | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ANDI NURHAYATI<br>NIP. 19690624 200701 2 028 | Pengatur TK.I, II/d | | | | √ | |
| 37 | BAU ASMA<br>NIP. 19800830 200701 2 010 | Pengatur TK.I, II/d | | | | √ | |
| 38 | NURJANNAH<br>NIP. 19801229 201410 2 002 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | | | | √ | |
| 39 | MULIATI ALI<br>NIP. 19840201 201407 2 006 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | | | | √ | |
| 40 | FIRMANSYAH<br>NIP. 19850324 201407 1 001 | Pengatur Muda Tk.I, II/b | | | | √ | |
| 41 | IRWANSYAH<br>NIP. 19860404 201407 1 004 | Pengatur Muda, II/a | | | | √ | |
| 42 | MULYADING<br>NIP. 19640808 199003 1 019 | Juru Tk.I, I/d | | | | √ | |
| 43 | M. SYARIF<br>NIP. 19700310 199203 1 013 | Juru Muda Tk.I, I/b | | | | √ | |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

**Jumlah Pendidik**

Data jumlah guru/pendidik di Kabupaten Kepulauan Selayar pada jenjang SD dan SMP berdasarkan tingkat pendidikan per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pendidik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

| No | Kecamatan | SD | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | NON PNS | |
| | | S1 | SERDIK | S1 | SERDIK |
| 1 | Benteng | 113 | 95 | 85 | 3 |
| 2 | Bontoharu | 78 | 77 | 67 | 2 |
| 3 | Bontomatene | 101 | 100 | 82 | 6 |
| 4 | Bontosikuyu | 75 | 77 | 77 | 8 |
| 5 | Buki | 52 | 46 | 45 | 3 |
| 6 | Pasimasunggu | 44 | 40 | 32 | 7 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 35 | 29 | 45 | 0 |
| 8 | Pasimarannu | 22 | 14 | 54 | 0 |
| 9 | Pasilambena | 39 | 24 | 43 | 2 |
| 10 | Taka Bonerate | 83 | 43 | 130 | 6 |
| 11 | Bontomanai | 83 | 79 | 85 | 8 |
| TOTAL | | 725 | 624 | 745 | 45 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.3
Jumlah Pendidik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

| No | Kecamatan | SMP | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | | NON PNS | |
| | | S1 | SERDIK | S1 | SERDIK |
| 1 | Benteng | 82 | 73 | 41 | 3 |
| 2 | Bontoharu | 42 | 38 | 28 | 0 |
| 3 | Bontomatene | 55 | 44 | 48 | 7 |
| 4 | Bontosikuyu | 41 | 31 | 53 | 10 |
| 5 | Buki | 20 | 17 | 18 | 2 |
| 6 | Pasimasunggu | 32 | 19 | 20 | 4 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 19 | 10 | 26 | 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pasimarannu | 31 | 10 | 21 | 1 |
| 9 | Pasilambena | 30 | 10 | 32 | 0 |
| 10 | Taka Bonerate | 41 | 20 | 48 | 2 |
| 11 | Bontomanai | 40 | 31 | 34 | 1 |
| TOTAL | | 433 | 303 | 369 | 33 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Berdasarakan tabel –tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendidik pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berjumlah 2.193 orang, yang terdiri dari pendidik tingkat SD sebanyak 1.391 orang dan pendidik tingkat SMP sebanyak 802 orang.

**Jumlah Tenaga Kependidikan**

Data jumlah tenaga kependidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Tenaga Kependidikan

| No | Kecamatan | SD | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kepala Sekolah | Pengawas | Tenaga Administrasi |
| 1 | Benteng | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Bontoharu | 12 | 2 | 5 |
| 3 | Bontomatene | 15 | 3 | 0 |
| 4 | Bontosikuyu | 17 | 1 | 8 |
| 5 | Buki | 8 | 1 | 1 |
| 6 | Pasimasunggu | 10 | 0 | 6 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 9 | 1 | 6 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 1 | 7 |
| 9 | Pasilambena | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Taka Bonerate | 13 | 0 | 2 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 1 | 7 |
| TOTAL | | 131 | 12 | 51 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.5
Jumlah Tenaga Kependidikan

| No | Kecamatan | SMP | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Kepala Sekolah | Pengawas | Laboran | Pustakawan |
| 1 | Benteng | 4 | | | 1 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 20 | | |
| 3 | Bontomatene | 6 | | | |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | | | |
| 5 | Buki | 3 | | | |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | | | |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 3 | | | |
| 8 | Pasimarannu | 3 | | | |
| 9 | Pasilambena | 5 | | | |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | | | |
| 11 | Bontomanai | 5 | | | |
| TOTAL | | 52 | 20 | 0 | 1 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

**Kondisi Umum Saranan dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Begitupun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang membutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pokok dan fungsi. Adapun sarana dan prasarana dimaksud dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana Kerja
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Jenis asset | Volume | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah bangunan kantor pemerintah | 3600 $M^2$ | Jl. Fatmawati no.9 benteng |
| 2 | Gedung kantor | 1 unit | Baik |

| No | Jenis asset | Volume | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 3 | Gedung kantor UPT tk/SD | 8 Unit | Baik |
| 4 | Gedung kantor SKB | 2 unit | Baik |
| 5 | Gedung sekolah SD | 140 unit | Baik |
| 6 | Gedung sekolah SMP | 52 unit | Baik |
| 7 | Sepeda Motor | 70 buah | Baik |
| 8 | Mobil | 2 buah | Baik |
| 9 | Meja $^{1}\!/_{2}$ biro | 63 buah | Baik |
| 10 | Meja tamu | 1 buah | Baik |
| 11 | Meja Rapat | 2 buah | Baik |
| 12 | Meja kerja pejabat | 8 buah | Baik |
| 13 | Meja kerja kayu | 11 buah | Baik |
| 14 | Meja computer | 2 buah | Baik |
| 15 | Kursi kerja pejabat | 16 buah | Baik |
| 16 | Kusri tamu | 1 set | Baik |
| 17 | Kursi lipat | 18 buah | Baik |
| 18 | Kursi platik | 32 buah | Baik |
| 19 | Kursi besi/metal | 270 buah | Baik |
| 20 | Sofa | 2 set | Baik |
| 21 | Lemari kayu | 22 buah | Baik |
| 22 | Lemari besi/metal | 18 buah | Baik |
| 23 | Rak besi | 3 buah | Baik |

| No | Jenis asset | Volume | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 24 | Filling besi | 17 buah | Baik |
| 25 | Brankas | 1 buah | Baik |
| 26 | AC | 21 buah | Baik |
| 27 | Sound System | 4 unit | Baik |
| 28 | Fax mail | 1 unit | Baik |
| 29 | Tv | 2 unit | Baik |
| 30 | Computer PC | 3 Unit | Baik |
| 31 | Printer | 33 Unit | Baik |
| 31 | UPS | 1 unit | Baik |
| 32 | Kamera digital | 2 unit | Baik |
| 33 | Lattop | 59 buah | Baik |
| 34 | Server | 5 buah | Baik |
| 35 | Lemari es | 3 unit | Baik |
| 36 | Dispenser | 1 Unit | Baik |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

# Kondisi Pendidikan
## Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Berikut ini akan dijelaskan tentang keadaan pendidikan tingkat PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan.

### PAUD

Jumlah sekolah jenjang TK/KB/TPA tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Sekolah TK/KB/TPA

| No | Kecamatan | Lembaga | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TK | | KB | | TPA | | Jumlah |
| | | N | S | N | S | N | S | |
| 1 | Benteng | 3 | 9 | - | 8 | - | 5 | 25 |
| 2 | Bontoharu | 2 | 10 | - | 4 | - | - | 16 |
| 3 | Bontomatene | 4 | 12 | - | - | - | - | 16 |
| 4 | Bontosikuyu | 3 | 17 | 1 | 2 | - | - | 23 |
| 5 | Buki | 2 | 13 | - | 1 | - | - | 16 |
| 6 | Pasimasunggu | 1 | 8 | - | - | - | - | 9 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 2 | 8 | - | - | - | - | 10 |
| 8 | Pasimarannu | 1 | 10 | - | - | - | - | 11 |
| 9 | Pasilambena | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 |
| 10 | Taka Bonerate | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 10 |
| 11 | Bontomanai | 4 | 15 | - | 6 | - | - | 25 |
| TOTAL | | 25 | 115 | 1 | 22 | - | 5 | 167 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Dari tabel 1.7 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sekitar 167 lembaga. Dengan rincian untuk lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri sudah mencapai

25 lembaga dan TK Swasta sekitar 115 lembaga. Bila kita bandingkan dengan lembaga Kelompok Bermain (KB) Negeri hanya 1 lembaga dan KB Swasta sudah mencapai 22 lembaga. Sedangkan untuk lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) untuk Negeri juga belum ada tapi untuk swasta sudah sekitar 5 lembaga.

Kondisi siswa sekolah jenjang TK/RA/KB tahun 2021 per jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Jumlah siswa TK/KB/TPA

| No | Kecamatan | Sekolah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | |
| 1 | Benteng | 12 | 416 | 362 | 778 |
| 2 | Bontoharu | 12 | 180 | 127 | 307 |
| 3 | Bontomatene | 15 | 146 | 126 | 272 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 199 | 183 | 382 |
| 5 | Buki | 14 | 92 | 107 | 197 |
| 6 | Pasimasunggu | 9 | 100 | 99 | 199 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 10 | 135 | 107 | 242 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 145 | 135 | 280 |
| 9 | Pasilambena | 6 | 64 | 62 | 126 |
| 10 | Taka Bonerate | 9 | 241 | 230 | 471 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 172 | 153 | 325 |
| TOTAL | | 136 | 1.890 | 1.691 | 3.579 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Dari tabel 1.8 dapat kita lihat bahwa jumlah siswa untuk masing-masing lembaga dapat diuraikan berdasarkan kecamatan dengan jumlah siswa sebanyak 3.579 siswa dari 136 lembaga PAUD dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 1.890 siswa dan siswa perempuan sekitar 1.691 siswa.

Kondisi bangunan ruang kelas sekolah jenjang TK/RA/KB dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.9
Kondisi sarana sekolah TK/KB/KB

| No | Kecamatan | Jml Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusa Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 12 | 46 | 9 | 0 | 0 | 55 | 83,63 |
| 2 | Bontoharu | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 | 46,66 |
| 3 | Bontomatene | 15 | 13 | 23 | 0 | 0 | 36 | 36,11 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 27 | 16 | 0 | 0 | 43 | 62,79 |
| 5 | Buki | 14 | 20 | 12 | 0 | 0 | 32 | 62,50 |
| 6 | Pasimasunggu | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 71,21 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 10 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 80,95 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pasilambena | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Taka Bonerate | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 19 | 63,15 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 22 | 29 | 0 | 0 | 51 | 43,13 |
| TOTAL | | 136 | 186 | 126 | 0 | 0 | 312 | 59,61 |

Sumber : Dinas Pendidika n, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Dari jumlah keseluruhan siswa TK/KB/TPA adalah 3.579 siswa dengan jumlah sekolah sebanyak 136 sekolah terdapat ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang TK/KB/TPA sebanyak 186 ruang kelas dan rusak ringan 126 ruang kelas. Persentase ruang kelas dalam kondisi baik yaitu 59,61% sedangkan untuk ruang kelas kondisi rusak ringan mencapai 40,38%.

**SD**

Jumlah sekolah dan siswa jenjang SD/MI/SDLB dapat dilihat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.10
Jumlah sekolah dan siswa jenjang SD

| No | Kecamatan | Sekolah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | |
| 1 | Benteng | 10 | 1.289 | 1.138 | 2.427 |
| 2 | Bontoharu | 13 | 648 | 549 | 1.197 |
| 3 | Bontomatene | 17 | 598 | 542 | 1.140 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 801 | 754 | 1.555 |
| 5 | Buki | 10 | 288 | 201 | 489 |
| 6 | Pasimasunggu | 10 | 464 | 423 | 887 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pasimasunggu Timur | 9 | 409 | 357 | 766 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 628 | 554 | 1.192 |
| 9 | Pasilambena | 10 | 432 | 391 | 823 |
| 10 | Taka Bonerate | 13 | 815 | 730 | 1.545 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 632 | 553 | 1.185 |
| TOTAL | | 141 | 7.004 | 6.192 | 13.206 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Kondisi bangunan ruang kelas sekolah jenjang SD/SDLB dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.11
Kondisi Ruang Kelas Sekolah SD

| No | Kecamatan | Jmlh Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 10 | 22 | 69 | 0 | 0 | 91 | 24,19 |
| 2 | Bontoharu | 13 | 28 | 52 | 0 | 0 | 80 | 35 |
| 3 | Bontomatene | 17 | 45 | 61 | 0 | 0 | 106 | 42,45 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 40 | 83 | 0 | 0 | 123 | 32,52 |
| 5 | Buki | 10 | 15 | 45 | 0 | 0 | 60 | 25 |
| 6 | Pasimasunggu | 10 | 8 | 52 | 0 | 0 | 60 | 13,33 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 9 | 20 | 36 | 0 | 0 | 56 | 35,71 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 2 | 65 | 0 | 0 | 67 | 2,98 |
| 9 | Pasilambena | 10 | 5 | 39 | 0 | 0 | 44 | 11,26 |
| 10 | Taka Bonerate | 13 | 49 | 34 | 0 | 0 | 83 | 59,03 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 30 | 68 | 0 | 0 | 98 | 30,61 |
| TOTAL | | 141 | 264 | 604 | 0 | 0 | 868 | 30,41 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.12
Kondisi Perpustakaan Sekolah SD

| No | Kecamatan | Jmlh Sekolah | Kondisi Perpustakaan | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33,33 |
| 2 | Bontoharu | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | 45,45 |
| 3 | Bontomatene | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 23,52 |
| 5 | Buki | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 33,33 |
| 6 | Pasimasunggu | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 22,22 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | 18,18 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Pasilambena | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14,28 |
| 10 | Taka Bonerate | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 63,63 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 37,50 |
| TOTAL | | 141 | 51 | 67 | 0 | 0 | 118 | 43,22 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Berdasarkan dari tabel kondisi sekolah SD dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa jenjang siswa SD adalah 13.206 yang terdiri dari 7.004 siswa laki – laki dan 6.192 siswa perempuan dengan jumlah sekolah 141 sekolah.

Ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang SD sebanyak 264 ruang kelas dari total 868 ruang kelas atau 30,41 persen dalam kondisi baik dan 69,58 persen ruang kelas dalam kondisi rusak ringan.

Kondisi untuk perpustakaan SD sekitar 51 perpustakan dalam kondisi baik atau sekitar 43,22 persen dari total jumlah 118 ruang perpustakan di sekolah SD/MI ,itu berarti ada sekitar 56,77 persen dalam keadaan rusak ringan.

**SMP**

Jumlah sekolah dan siswa jenjang SMP/MTs tahun 2021 dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.13
Data Jumlah Sekolah dan Siswa SMP

| No | Kecamatan | Sekolah | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | |
| 1 | Benteng | 4 | 674 | 690 | 1.364 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 331 | 320 | 651 |
| 3 | Bontomatene | 5 | 239 | 246 | 485 |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | 336 | 313 | 649 |
| 5 | Buki | 3 | 71 | 53 | 124 |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | 234 | 283 | 517 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 4 | 192 | 165 | 357 |
| 8 | Pasimarannu | 3 | 232 | 269 | 501 |
| 9 | Pasilambena | 5 | 206 | 283 | 489 |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | 301 | 368 | 669 |
| 11 | Bontomanai | 5 | 220 | 208 | 428 |
| **TOTAL** | | **52** | **2.705** | **3.198** | **6.234** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Kondisi bangunan ruang kelas sekolah jenjang SMP dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.14
Jumlah Bangunan Ruang Kelas SMP

| No | Kecamatan | Jmlh Sekolah | Kondisi Ruang Kelas | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 4 | 56 | 2 | 0 | 0 | 58 | 96,55 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 28 | 39,28 |
| 3 | Bontomatene | 5 | 4 | 30 | 0 | 0 | 34 | 11,76 |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 | 44,73 |
| 5 | Buki | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | 11 | 17 | 0 | 0 | 28 | 39,28 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 4 | 3 | 17 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 8 | Pasimarannu | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 9,52 |
| 9 | Pasilambena | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 86,36 |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 | 64,28 |
| 11 | Bontomanai | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| **TOTAL** | | **52** | **141** | **185** | **0** | **0** | **326** | **43,25** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.15
Jumlah Ruang Perpustakaan SMP

| No | Kecamatan | Jmlh Sekolah | Kondisi Perpustakaan | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 3 | Bontomatene | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 28,57 |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 42,85 |
| 5 | Buki | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 40 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
| 8 | Pasimarannu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,66 |
| 9 | Pasilambena | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71,42 |
| 11 | Bontomanai | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 20 |
| **TOTAL** | | **52** | **22** | **32** | **0** | **0** | **54** | **40,74** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.16
Jumlah Ruang Laboratorium SMP

| No | Kecamatan | Jmlh Sekolah | Kondisi Laboratorium | | | | | % Kondisi Baik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Jml | |
| 1 | Benteng | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 3 | Bontomatene | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 66,66 |
| 5 | Buki | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,66 |
| 8 | Pasimarannu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,66 |
| 9 | Pasilambena | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 71,42 |
| 11 | Bontomanai | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| **TOTAL** | | **52** | **27** | **26** | **0** | **0** | **53** | **50,94** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Jumlah keseluruhan siswa jenjang SMP adalah 6.234 yang terdiri 2.705 siswa laki-laki dan 3.198 siswa perempuan dengan jumlah sekolah SMP keseluruhan di Kabupaten Kepualaun Selayar yaitu 52 . Ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang SMP sebanyak 22 ruang kelas.

**PNF/KESETARAAN**

Kondisi siswa sekolah jenjang PKBM/SKB tahun 2021 per jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.17
Jumlah siswa PKBM/SKB

| No | Kecamatan | Sekolah | | Jenis Kelamin | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PKBM | | SKB | | | |
| | | PKBM | SKB | L | P | L | P | PKBM | SKB |
| 1 | Benteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bontoharu | 1 | 1 | 276 | 215 | 117 | 80 | 491 | 197 |
| 3 | Bontomatene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bontosikuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Buki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasimasunggu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | Kecamatan | Sekolah | | Jenis Kelamin | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PKBM | | SKB | | | |
| | | PKBM | SKB | L | P | L | P | PKBM | SKB |
| 8 | Pasimarannu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pasilambena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Taka Bonerate | 0 | 1 | 0 | 0 | 350 | 394 | 0 | 744 |
| 11 | Bontomanai | 1 | 0 | 717 | 539 | 0 | 0 | 1.256 | 0 |
| **TOTAL** | | **2** | **2** | **993** | **754** | **467** | **474** | **1.747** | **941** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Berdasarkan Tabel 1.17 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan siswa PKBM adalah 1.747 yang terdiri 993 siswa laki-laki dan 754 siswa perempuan dengan jumlah sekolah PKBM keseluruhan di Kabupaten Kepualaun Selayar yaitu 2 PKBM, sedangkan untuk siswa SKB keseluruhan yaitu 941 yang terdiri dari 467 siswa laki-laki dan 474 siswa perempuan.

# Kinerja Layanan Pendidikan

Hingga akhir tahun 2021, pembangunan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menunjukkan banyak kemajuan dan hasil yang cukup menggembirakan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Interpretasi pelayanan yang belum/tercapai dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan**

Sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengemban amanat penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan penerapan SPM bidang pendidikan sebagaimana amanat permendagri 100 tahun 2018 dengan mendasari permendikbud nomor 32 tahun 2018 yang target dan indikator penerima layanan SPM bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota harus terpenuhi setiap tahunnya. Pada tabel bermerupakan gambaran capaian atas penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut :

Tabel 1.18
Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini

| N0 | Kecamatan | Jumlah siswa Anak Didik PAUD | Jumlah penduduk usia 5-6 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 280 | 317 | 88,33 |
| 2 | Pasilambena | 126 | 284 | 44,37 |
| 3 | Pasimasunggu | 199 | 288 | 69,1 |
| 4 | Takabonerate | 482 | 441 | 109,3 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 242 | 217 | 111,5 |
| 6 | Bontosikuyu | 440 | 480 | 91,67 |
| 7 | Bontoharu | 428 | 481 | 88,98 |
| 8 | Benteng | 1071 | 814 | 131,6 |
| 9 | Bontomanai | 478 | 417 | 114,6 |
| 10 | Bontomatene | 272 | 331 | 82,18 |
| 11 | Buki | 221 | 186 | 118,8 |
| **TOTAL** | | **4.239** | **4.256** | **99,6** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.19
Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Dasar

| No | Kecamatan | Jumlah siswa 7 – 12 Tahun | Jumlah penduduk usia 7-12 tahun | Persentase Warga Negara Usia 7 -12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI) | Jumlah siswa 13 – 15 Tahun | Jumlah penduduk usia 13-15 tahun | Persentase Warga Negara Usia 13 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs) | Persentase Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 2.292 | 2117 | 108,27 | 1.130 | 1459 | 77,45 | 95,69 |
| 2 | Bontoharu | 1.079 | 1335 | 80,82 | 512 | 870 | 58,85 | 72,15 |
| 3 | Bontomatene | 1.059 | 987 | 107,29 | 477 | 661 | 72,16 | 93,20 |
| 4 | Bontosikuyu | 1.284 | 1347 | 95,32 | 496 | 865 | 57,34 | 80,47 |
| 5 | Buki | 286 | 558 | 51,25 | 105 | 346 | 30,35 | 43,25 |
| 6 | Pasimasunggu | 911 | 797 | 114,30 | 409 | 636 | 64,31 | 92,11 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 669 | 658 | 101,67 | 277 | 513 | 54,00 | 80,79 |
| 8 | Pasimarannu | 1.032 | 950 | 108,63 | 390 | 621 | 62,80 | 90,52 |
| 9 | Pasilambena | 850 | 789 | 107,73 | 391 | 608 | 64,31 | 88,83 |
| 10 | Taka Bonerate | 1.494 | 1464 | 102,05 | 515 | 995 | 51,76 | 81,70 |
| 11 | Bontomanai | 843 | 1157 | 72,86 | 343 | 699 | 49,07 | 63,90 |
| TOTAL | | 11.799 | 12.159 | 97,04 | 5.045 | 8.273 | 60,98 | 82,44 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.20
Capaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

| Usia 7 - 18 tahun | | | | | | | | | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukcapil | Data Peserta Didik | | | | | | | | |
| | SD/MI | SMP/MTs | MAN | SMA | SMK | Paket A,B,C | Anak Putus Sekolah | Total | |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *E* | *F* | *G* | *H* | *I(A+B+C +D+E+F +G+H)* | |
| 29.453 | 13.206 | 6.234 | 432 | 3.788 | 2.094 | 1.369 | 220 | 27.343 | *92,84* |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

## 2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proprosi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf merupakan sasaran strategis untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan bebas buta aksara, maka dirasa penting untuk tetap melanjutkan program penuntasan wajib belajar bagi mereka yang sudah dewasa.

Tabel 1.21
Capaian Angka Melek Huruf Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2021

| Melek Huruf | Jumlah anak usia > 15 yg melek huruf | Jumlah anak usia > 15 tahun | % |
|---|---|---|---|
| | 108.082 | 107.002 | 98,20 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase capaian sebesar 98,20% di tahun 2021.

## 3. Angka Rata – Rata Lama Sekolah (RLS)

Angka Rata – Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi partisipasi sekolah jenjang pendidikan yang sedang dijalani,kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan atau rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Indikator Kinerja Utama Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Angka Rata – Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut :

Tabel 2.22
Capaian Rata – Rata Lama Sekolah

| JENJANG | JUMLAH PENDUDUK USIA 25 KE ATAS | INDIVIDU | LAMA SEKOLAH | RATA-RATA LAMA SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| SD | 78.113 | 47.996 | 6 | 3,68 |
| SMP | | 15.717 | 9 | 1,81 |
| SMA/SMK | | 21.622 | 12 | 3,32 |
| S1 | | 17.126 | 19 | 4,16 |
| TOTAL | | 102.461 | | 12,98 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Berdasarkan tabel 2.22 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat direalisasikan sebesar 8,08 tahun, hal ini diketahui bahwa rata rata pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelesaikan sekolah sampai lulus kelas 3 Sekolah Menengah Pertama.

**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD )**

Tabel 1.23
Pendidikan Anak Usia Dini

| No | Kecamatan | Jumlah siswa TK/RA/Penitipan Anak | Jumlah penduduk usia 3-6 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 280 | 636 | 44,02 |
| 2 | Pasilambena | 126 | 589 | 21,39 |
| 3 | Pasimasunggu | 199 | 561 | 35,47 |
| 4 | Takabonerate | 482 | 879 | 54,83 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 242 | 441 | 54,87 |
| 6 | Bontosikuyu | 440 | 963 | 45,69 |
| 7 | Bontoharu | 428 | 940 | 45,53 |
| 8 | Benteng | 1.071 | 1.529 | 70,04 |
| 9 | Bontomanai | 478 | 827 | 57,79 |
| 10 | Bontomatene | 272 | 623 | 43,65 |
| 11 | Buki | 221 | 371 | 59,56 |
| **TOTAL** | | **4.239** | **8.359** | **50,71** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

**SD**

Tabel 1.24
Angka Partisipasi Kasar

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SD/ Paket A | Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 2.427 | 2.117 | 114,64 |
| 2 | Bontoharu | 1.197 | 1.335 | 89,66 |
| 3 | Bontomatene | 1.140 | 987 | 115,50 |
| 4 | Bontosikuyu | 1.555 | 1.347 | 115,44 |
| 5 | Buki | 489 | 558 | 87,63 |
| 6 | Pasimasunggu | 887 | 797 | 111,29 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 766 | 658 | 116,41 |
| 8 | Pasimarannu | 1.192 | 950 | 125,47 |
| 9 | Pasilambena | 823 | 789 | 104,31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Taka Bonerate | 1.545 | 1.464 | 105,53 |
| 11 | Bontomanai | 1.185 | 1.157 | 102,42 |
| **TOTAL** | | **13.206** | **12.159** | **114,96** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.25
Angka Partisipasi Murni

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SD/ Paket A Usia 7-12 thn | Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 2.292 | 2.117 | 108,27 |
| 2 | Bontoharu | 1.079 | 1.335 | 80,82 |
| 3 | Bontomatene | 1059 | 987 | 107,29 |
| 4 | Bontosikuyu | 1.284 | 1.347 | 95,32 |
| 5 | Buki | 286 | 558 | 51,25 |
| 6 | Pasimasunggu | 911 | 797 | 114,30 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 669 | 658 | 101,67 |
| 8 | Pasimarannu | 1.032 | 950 | 108,63 |
| 9 | Pasilambena | 850 | 789 | 107,73 |
| 10 | Taka Bonerate | 1.494 | 1.464 | 102,05 |
| 11 | Bontomanai | 843 | 1.157 | 72,86 |
| **TOTAL** | | **11.799** | **12.159** | **100,60** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.26
Angka Partisipasi Sekolah

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SD/Paket A Usia 7-12 thn | Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun | X100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 2.292 | 2.117 | 92,36 |
| 2 | Bontoharu | 1.079 | 1.335 | 123,73 |
| 3 | Bontomatene | 1.059 | 987 | 93,20 |
| 4 | Bontosikuyu | 1.284 | 1.347 | 104,91 |
| 5 | Buki | 286 | 558 | 195,10 |
| 6 | Pasimasunggu | 911 | 797 | 87,49 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 669 | 658 | 98,36 |
| 8 | Pasimarannu | 1.032 | 950 | 92,05 |
| 9 | Pasilambena | 850 | 789 | 92,82 |
| 10 | Taka Bonerate | 1.494 | 1.464 | 97,99 |
| **TOTAL** | | **11.799** | **12.159** | **97,03** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun dan kelompok umur 13-15 tahun berbanding jumlah penduduk usia penduduk yang pernah/sedang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu di kali 100%. Persentase putus sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.27
Angka Putus Sekolah

| No | Kecamatan | Jumlah Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD Se-Kabupaten dan kota | Jumlah seluruh APS SD/MI Se-Kabupaten dan kota | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 1.192 | 11 | 0,92 |
| 2 | Pasilambena | 823 | 7 | 0,85 |
| 3 | Pasimasunggu | 887 | 6 | 0,67 |
| 4 | Takabonerate | 1.545 | 2 | 0,12 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 766 | 2 | 0,26 |
| 6 | Bontosikuyu | 1.555 | 21 | 1,35 |
| 7 | Bontoharu | 1.197 | 11 | 0,91 |
| 8 | Benteng | 2.427 | 19 | 0,78 |
| 9 | Bontomanai | 1.185 | 6 | 0,50 |
| 10 | Bontomatene | 1.140 | 9 | 0,78 |
| 11 | Buki | 489 | 0 | 0 |
| **Total** | | **13.978** | **94** | **0,67** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Untuk mengetahui mutu lulusan dan kualitas pendidikan siswa yang lulus dari jenjang pendidikan tertentu dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah lulusan suatu jenjang pendidikan dengan jumlah siswa tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Persentase angka kelulusan di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.28
Angka Kelulusan

| No | Kecamatan | Jumlah lulusan pada jenjang SD | Jumlah Siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD pd tahun sebelumnya | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 195 | 195 | 100 |
| 2 | Pasilambena | 194 | 194 | 100 |
| 3 | Pasimasunggu | 189 | 189 | 100 |
| 4 | Takabonerate | 308 | 308 | 100 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 140 | 140 | 100 |
| 6 | Bontosikuyu | 356 | 356 | 100 |
| 7 | Bontoharu | 220 | 220 | 100 |
| 8 | Benteng | 402 | 402 | 100 |
| 9 | Bontomanai | 208 | 208 | 100 |
| 10 | Bontomatene | 163 | 163 | 100 |
| 11 | Buki | 83 | 83 | 100 |
| **TOTAL** | | **2.458** | **2.458** | 100 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.29
Sekolah Pendidikan SD Kondisi Bangunan Baik

| No | Kecamatan | Jumlah sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik | Jumlah seluruh sekolah SD | Jumlah ruang kelas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 2 | 10 | 67 |
| 2 | Pasilambena | 5 | 10 | 44 |
| 3 | Pasimasunggu | 8 | 10 | 60 |
| 4 | Takabonerate | 49 | 13 | 83 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 20 | 9 | 56 |
| 6 | Bontosikuyu | 40 | 20 | 123 |
| 7 | Bontoharu | 28 | 13 | 80 |
| 8 | Benteng | 22 | 10 | 91 |
| 9 | Bontomanai | 30 | 19 | 98 |
| 10 | Bontomatene | 45 | 17 | 106 |
| 11 | Buki | 15 | 10 | 60 |
| **TOTAL** | | **265** | **141** | **868** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.30
Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah pendidik dasar

| No | Kecamatan | Jumlah sekolah SD | Jumlah penduduk usia 7 s.d 12 | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 10 | 2.117 | 1 : 21 |
| 2 | Bontoharu | 13 | 1.335 | 1 : 10 |
| 3 | Bontomatene | 17 | 987 | 1 : 58 |
| 4 | Bontosikuyu | 20 | 1.347 | 1 : 67 |
| 5 | Buki | 10 | 558 | 1 : 55 |
| 6 | Pasimasunggu | 10 | 797 | 1 : 79 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 9 | 658 | 1 : 73 |
| 8 | Pasimarannu | 10 | 950 | 1 : 95 |
| 9 | Pasilambena | 10 | 789 | 1 : 78 |
| 10 | Taka Bonerate | 13 | 1.464 | 1 : 112 |
| 11 | Bontomanai | 19 | 1.157 | 1 : 60 |
| **TOTAL** | | **141** | **12.159** | 1 : 86 |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.31
Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia
sekolah pendidik dasar

| No | Kecamatan | Jumlah sekolah SMP | Jumlah penduduk usia 13-15 thn | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 4 | 1.459 | 1 : 364 |
| 2 | Bontoharu | 4 | 870 | 1 : 217 |
| 3 | Bontomatene | 5 | 661 | 1 : 132 |
| 4 | Bontosikuyu | 7 | 865 | 1 : 123 |
| 5 | Buki | 3 | 346 | 1 : 115 |
| 6 | Pasimasunggu | 5 | 636 | 1 : 123 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 4 | 513 | 1 : 128 |
| 8 | Pasimarannu | 3 | 621 | 1 : 207 |
| 9 | Pasilambena | 5 | 608 | 1 : 121 |
| 10 | Taka Bonerate | 7 | 995 | 1 : 142 |
| 11 | Bontomanai | 5 | 699 | 1 : 139 |
| **TOTAL** | | **52** | **8.273** | **1 : 159** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.31
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar

| No | Kecamatan | Jumlah Guru SD | Jumlah Murid SD | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 84 | 1.192 | 1:07 |
| 2 | Pasilambena | 93 | 823 | 1:11 |
| 3 | Pasimasunggu | 104 | 887 | 1:11 |
| 4 | Takabonerate | 102 | 1.545 | 1:06 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 89 | 766 | 1:11 |
| 6 | Bontosikuyu | 209 | 1.555 | 1:13 |
| 7 | Bontoharu | 179 | 1.197 | 1:14 |
| 8 | Benteng | 215 | 2.427 | 1:08 |
| 9 | Bontomanai | 195 | 1.185 | 1:16 |
| 10 | Bontomatene | 223 | 1.140 | 1:19 |
| 11 | Buki | 115 | 489 | 1:23 |
| **TOTAL** | | **1.608** | **13.206** | **1:12** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.32
Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar

| No | Kecamatan | Jumlah Guru kelas | | Jumlah Murid pendidikan dasar | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | NON PNS | | |
| 1 | Benteng | 93 | 49 | 2.427 | 95,01 |
| 2 | Bontoharu | 180 | 24 | 1.197 | 182,00 |
| 3 | Bontomatene | 108 | 54 | 1.140 | 112,73 |
| 4 | Bontosikuyu | 86 | 54 | 1.555 | 89,47 |
| 5 | Buki | 53 | 29 | 489 | 58,93 |
| 6 | Pasimasunggu | 46 | 24 | 887 | 48,70 |
| 7 | Pasimasunggu Timur | 34 | 29 | 766 | 37,78 |
| 8 | Pasimarannu | 22 | 48 | 1.192 | 26,02 |
| 9 | Pasilambena | 34 | 43 | 823 | 39,22 |
| 10 | Taka Bonerate | 51 | 77 | 1.545 | 55,98 |
| 11 | Bontomanai | 80 | 62 | 1.185 | 85,23 |
| **TOTAL** | | **787** | **493** | **13.206** | **95,01** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

**SMP**

Angka Partisipasi Kasar (APK) dengan kelompok usia pada jenjang yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur jumlah anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa mempertimbangkan apakah anak berada dalam kelompok usia sekolah atau diluar kelompok usia sekolah. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya.

Persentase Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.33
Angka Partisipasi Kasar

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SMP/Paket B | Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 501 | 621 | 80,6763 |
| 2 | Pasilambena | 489 | 608 | 80,4276 |
| 3 | Pasimasunggu | 517 | 636 | 81,2893 |
| 4 | Takabonerate | 669 | 995 | 67,2362 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 357 | 513 | 80,6763 |
| 6 | Bontosikuyu | 649 | 865 | 75,0289 |
| 7 | Bontoharu | 651 | 870 | 74,8276 |
| 8 | Benteng | 1.364 | 1459 | 93,4887 |
| 9 | Bontomanai | 428 | 699 | 61,2303 |
| 10 | Bontomatene | 485 | 661 | 73,3737 |
| 11 | Buki | 124 | 346 | 35,8382 |
| **TOTAL** | | **6.234** | **8.273** | **75,35** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.34
Rasio Guru Per Murid

| No | Kecamatan | Jumlah Guru SMP | Jumlah Murid SMP | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 49 | 501 | 1:13 |
| 2 | Pasilambena | 60 | 489 | 1:12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Pasimasunggu | 52 | 517 | 1:10 |
| 4 | Takabonerate | 81 | 669 | 1:12 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 47 | 357 | 1:13 |
| 6 | Bontosikuyu | 95 | 649 | 1:14 |
| 7 | Bontoharu | 77 | 651 | 1:11 |
| 8 | Benteng | 138 | 1.364 | 1:10 |
| 9 | Bontomanai | 79 | 428 | 1:18 |
| 10 | Bontomatene | 110 | 485 | 1:22 |
| 11 | Buki | 41 | 124 | 1:33 |
| **TOTAL** | | **829** | **6.234** | **1:13** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat berskolah.

Tabel 1.35
Angka Partisipasi Murni

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SMP/Paket B Usia 13-15 tahun | Jumlah Penduduk Usia 13-15 tahun | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 390 | 621 | 62,802 |
| 2 | Pasilambena | 391 | 608 | 64,309 |
| 3 | Pasimasunggu | 409 | 636 | 64,308 |
| 4 | Takabonerate | 515 | 995 | 51,759 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 277 | 513 | 53,996 |
| 6 | Bontosikuyu | 496 | 865 | 57,341 |
| 7 | Bontoharu | 512 | 870 | 58,851 |
| 8 | Benteng | 1.130 | 1.459 | 77,45 |
| 9 | Bontomanai | 343 | 699 | 49,07 |
| 10 | Bontomatene | 477 | 661 | 72,163 |
| 11 | Buki | 105 | 346 | 30,347 |
| **TOTAL** | | **5.045** | **8.273** | **60,98** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

Tabel 1.35
Angka Partisipasi Sekolah

| No | Kecamatan | Jumlah siswa SMP/MTs/Paket B Usia 13-15 tahun | Jumlah Penduduk Usia 13- 15 tahun | X100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 390 | 621 | 62,802 |
| 2 | Pasilambena | 391 | 608 | 64,309 |
| 3 | Pasimasunggu | 409 | 636 | 64,308 |
| 4 | Takabonerate | 515 | 995 | 51,759 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 277 | 513 | 53,996 |
| 6 | Bontosikuyu | 496 | 865 | 57,341 |
| 7 | Bontoharu | 512 | 870 | 58,851 |
| 8 | Benteng | 1.130 | 1.459 | 77,45 |
| 9 | Bontomanai | 343 | 699 | 49,07 |
| 10 | Bontomatene | 477 | 661 | 72,163 |
| 11 | Buki | 105 | 346 | 30,347 |
| 12 | MTs | 674 | | |
| **TOTAL** | | **5.719** | **8.273** | **60,98** |

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Selayar 2021

# Penutup

Capaian indikator kinerja utama urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun anggaran 2021 secara umum capaian kinerja bidang pendidikan sebagian besar sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang termuat dalam profil pendidikan ini.

Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini dapat menjadi bahan untuk pengambilan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran urusan pendidikan pada masa yang akan dating,baik internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maupun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah.

# PROFIL KESEHATAN

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan keadaan lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan *softcopy* yang dapat diunduh melalui website http://dinkes.kepulauanselayarkab.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Benteng-Selayar, Maret 2023

**SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**

**MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, SKM., M.Kes**
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19690413 199402 1 002

## KATA SAMBUTAN

Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar ini berisi data tahun 2022 tentang demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan keadaan lingkungan. Penerbitan Buku Profil Kesehatan ini adalah yang ke-34 (Tiga Puluh Empat) dari rangkaian penyajian data/informasi yang dimulai sejak tahun 1989.

Dari proses penyusunan Buku Profil Kesehatan ini, digunakan data dari berbagai sumber, baik dari unit kerja lingkup kesehatan maupun di lintas sektor instansi terkait dengan program-program kesehatan, antara lain yang bersumber dari pengelola program dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maupun yang bersumber dari Instansi terkait seperti: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Rumah Sakit Umum K.H. Hayyung, UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Selayar, dan UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Kepulauan Selayar serta lainnya.

Pada dasarnya, Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan peremajaan dan perkembangan data dari tahun ke tahun sebelumnya sebagai perkembangan dari hasil upaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar senantiasa diharapkan saran, kritik, dan koreksi untuk perbaikan dan kelengkapannya serta partisiasi dari semua pihak, utamanya dalam rangka mendapatkan data yang akurat, valid, cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai Pembina Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Saya menyambut gembira atas penerbitan Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 ini serta menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berusaha dengan maksimal sehingga dapat terlaksana. Semoga Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 ini dapat bermanfaat dan datanya pun dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan untuk berbagai keperluan terutama untuk kemajuan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Wassalam,

Benteng-Selayar, Maret 2023
**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**dr. H. Husaini, M.Kes**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**

**KATA SAMBUTAN** ..... **iii**

**DAFTAR ISI** ..... **iv**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **vi**

**DAFTAR GRAFIK** ..... **vii**

**DAFTAR TABEL** ..... **x**

**BAB I GAMBARAN UMUM** ..... **1**

1.1. Kondisi Geografis ..... 1

1.2. Keadaan Penduduk ..... 3

**BAB II SARANA KESEHATAN** ..... **4**

1.1. Rumah Sakit ..... 4

1.2. Puskesmas dan Jaringannya ..... 6

1.3. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..... 7

1.4. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ..... 9

**BAB III TENAGA MASYARAKAT** ..... **12**

**BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN** ..... **14**

4.1. Alokasi dan Realiasai Anggaran ..... 14

4.2. Jaminan Kesehatan Nasional ..... 14

**BAB V KESEHATAN KELUARGA** ..... **16**

5.1. Kesehatan Ibu ..... 16

5.2. Kesehatan Anak ..... 25

5.3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut ..... 33

5.4. Imunisasi ..... 35

5.5. Gizi ..... 40

**BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT** ..... **45**

6.1. Penyakit Menular Langsung ..... 45

6.2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ..... 52

6.3. Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik ..... 55
6.4. Penyakit Tidak Menular ..... 58
**BAB VII KEADAAN LINGKUNGAN ..... 64**
7.1. Air Minum ..... 64
7.2. Akses Sanitasi Layak ..... 65
7.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ..... 66
7.4. Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) ..... 67
7.5. Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) ..... 68
**LAMPIRAN ..... 69**

# DAFTAR GAMBAR


| No. Gambar | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar | 2 |

## DAFTAR GRAFIK


| No. Grafik | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.2 | Piramida Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 3 |
| 2.1 | Jumlah Posyandu Balita Menurut Strata Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 10 |
| 2.2 | Jumlah Posbindu PTM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 11 |
| 4.1 | Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 15 |
| 5.1 | Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 17 |
| 5.2 | Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 17 |
| 5.3 | Perkembangan Capaian Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 19 |
| 5.4 | Tren Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasyankes dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 20 |
| 5.5 | Cakupan KB Aktif Menurut Metode Modern Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 25 |
| 5.6 | Grafik 5.6 Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 26 |
| 5.7 | Cakupan KN 1 dan KN Lengkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 28 |
| 5.8 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 30 |
| 5.9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | 31 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.10 | Persentase Capaian Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 32 |
| 5.11 | Persentase Pelayanan Skrining Usia Produktif Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 33 |
| 5.12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Menurut Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 | 35 |
| 5.13 | Cakupan Imunisasi pada Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 37 |
| 5.14 | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 37 |
| 5.15 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 39 |
| 5.16 | Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, Balita dan Ibu Nifas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 | 42 |
| 5.17 | Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | |
| 5.18 | Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan TTD 90 Tablet Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | |
| 6.1 | Jumlah Penemuan Kasus TB pada Anak Usia 0-14 Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022 | |
| 6.2 | Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022 | |
| 6.3 | Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2029-2022 | |
| 6.4 | Jumlah ODHIV Baru Mendapatkan ARV Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022 | |

6.5 Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

6.6 Cakupan Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

# DAFTAR TABEL


| No. Tabel | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 2 |
| 2.1 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 4 |
| 2.2 | Indikator Kinerja Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 6 |
| 2.3 | Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 9 |
| 3.1 | Jumlah Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 | 13 |

# BAB I
# GAMBARAN UMUM

## 1.1. Kondisi Geografis

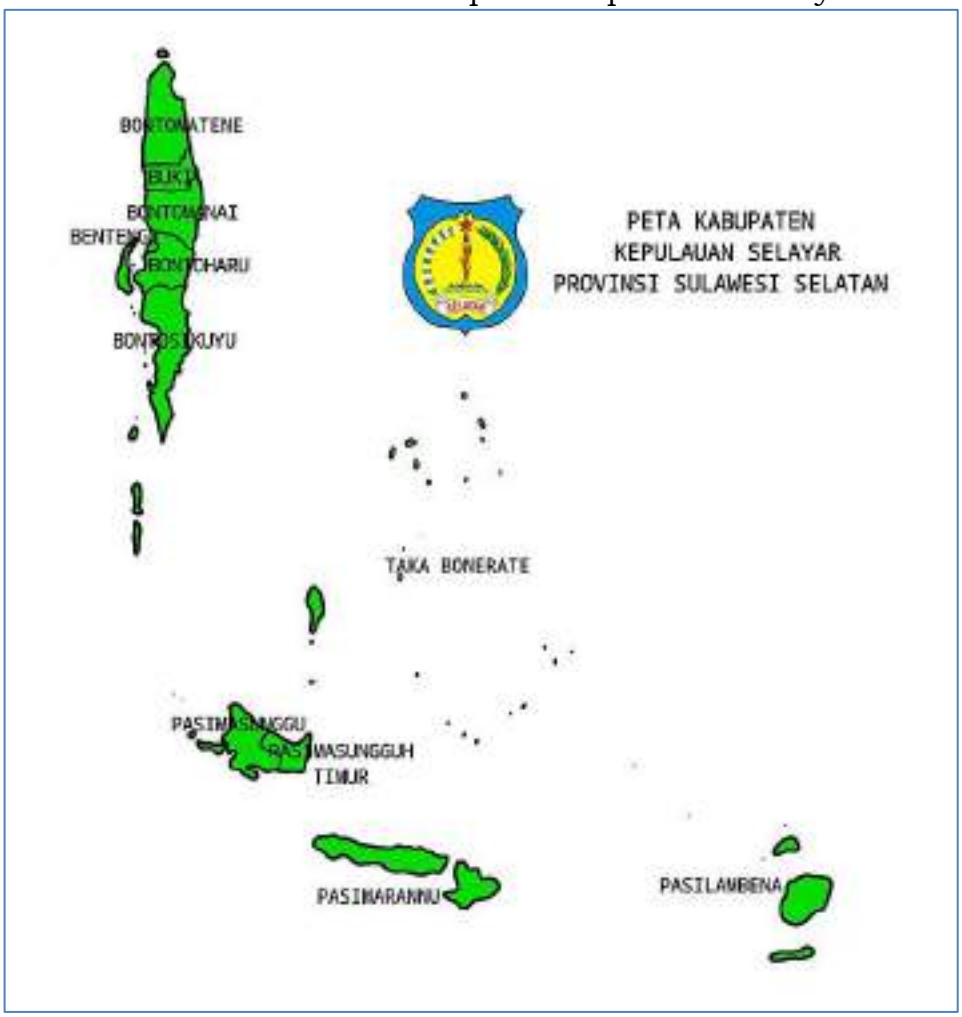
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5”42’ - 7°35’ Lintang Selatan dan 120°15’ - 122°15’ Bujur Timur yang berbatasan dengan kabupaten Bulukumba di sebelah Utara, Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 1.357.03 km$^2$ persegi dan luas wilayah lautan adalah 9.146,66 km$^2$, secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008 perubahan nama tentang perubahan nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km$^2$ (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 137.071 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar wilayah kecamatan pada area daratan terdiri dari 6 kecamatan yang meliputi Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Kabupaten Kepulauan Selayar terletaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan dan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km$^2$ wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km$^2$ wilayah lautan (87,09%). Secara astronomis, Kabupaten

Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur.

**Gambar 1.1**
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar



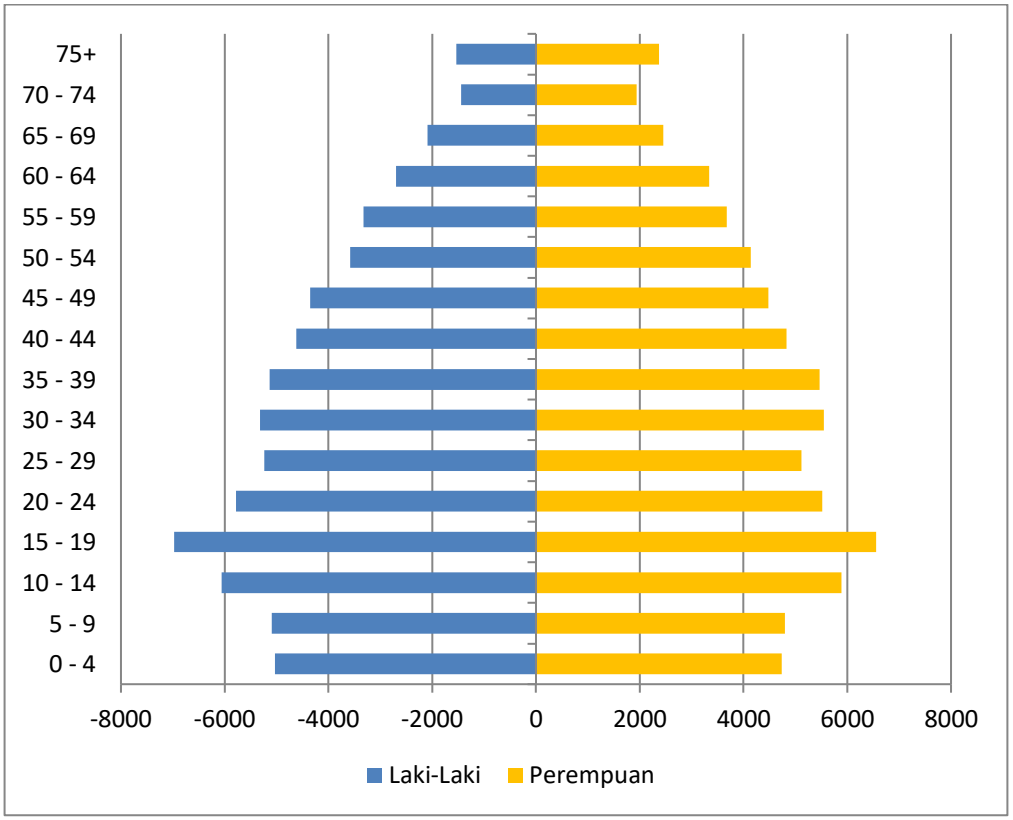

**Tabel 1.1**
Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Pasimarannu | 195,33 |
| 2. | Pasilambena | 114,88 |
| 3. | Pasimasunggu | 131,80 |
| 4. | Takabonerate | 49,30 |
| 5. | Pasimasunggu Timur | 67,14 |
| 6. | Bontosikuyu | 248,22 |
| 7. | Bontoharu | 128,12 |
| 8. | Benteng | 24,63 |
| 9. | Bontomanai | 136,42 |
| 10. | Bontomatene | 193,05 |
| 11. | Buki | 68,14 |
| Total | | 1.357,03 |

## 1.2. Keadaan Penduduk

Hasil estimasi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebesar 139.145 jiwa. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Hal ini memperlihatkan peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai Tahun 2020 hingga 2022 sebesar 0,75%. Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 103 jiwa per $km^2$, Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

**Grafik 1.2**
Piramida Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022



# BAB II
# SARANA KESEHATAN

## 2.1. Rumah Sakit

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Jumlah Rumah Sakit pada Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 2 Rumah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum. Hal ini diharapkan agar akses layanan rujukan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kepemilikan, jumlah Rumah Sakit pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No. | Kepemilikan | Jenis | |
|---|---|---|---|
| | | Umum | Khusus |
| 1. | Pemerintah Kabupaten | 2 | 0 |

*Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Pelayanan rumah sakit terdiri pelayanan dasar medik, pelayanan spesialis, dan pelayanan penunjang. Salah satu pelayanan dasar medik adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Jumlah kunjungan rawat jalan di 2 Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah 27.829, sedangkan jumlah kunjungan rawat inap sebesar 4.391 jiwa. (Tabel 5).

Jumlah pelayanan gawat darurat (gadar) level 1 untuk rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah 100% (tabel 6). Kapasitas tempat tidur (TT) yang mencukupi akan menunjang mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Jumlah tempat tidur (TT) dari 2 Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah 179 (Tabel 7).

Rata-rata jumlah kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit (GDR) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah 18,7. Sedangkan Rata-rata jumlah kematian 48 jam setelah di rawat untuk 1000 penderita keluar (NDR) tahun 2022 adalah 10. Berikut indikator pelayanan di Rumah Sakit antara lain:

1. BOR *(Bed Occupancy Ratio)* adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal menurut Kemenkes RI adalah 60-85%. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 2 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 179 tempat tidur dan capaian angka BOR RS Tahun 2022 adalah 60,2% (Tabel 8).
2. BTO *(Bed Turn Over)* adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Kondisi BTO RS di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2022 adalah 25, artinya rendahnya penggunaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel 8).
3. TOI *(Turn Over Interval)* adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah 6, artinya tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar kosong tidak digunakan rata-rata selama 6 hari tidak sesuai standar Kemenkes RI (Tabel 8).
4. ALOS *(Average Length of Stay)* adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang

ideal antara 6-9 hari. Di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah 7 hari, artinya memenuhi standar yang ditetapkan Kemenkes RI (Tabel 8). Nilai indikator rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dibanding dengan standar Kemenkes RI, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**
Indikator Kinerja Rumah Sakit
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No. | Indikator | Tahun 2022 | Standar Kemenkes |
|---|---|---|---|
| 1. | BOR | 60,2 % | 60-85% |
| 2. | BTO | 25 Kali | 40-50 Kali |
| 3. | TOI | 6 Hari | 1-3 Hari |
| 4. | ALOS | 7 Hari | 6-9 Hari |

*Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 2.2. Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai di tingkat Kecamatan.

Sampai dengan Tahun 2022, jumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 14 puskesmas, yang terdiri dari 13 puskesmas rawat inap dan 1 puskesmas rawat jalan (tabel 4).

Menurut WHO, perbandingan ideal antara puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Namun, jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2022 baru ada 14 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Artinya 1 puskesmas harus melayani 12.650 penduduk. Kondisi ini yang sangat tidak ideal. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan, memprogramkan penambahan jumlah puskesmas dari tahun ke tahun, yang telah dituangkan dalam grand design pembangunan puskesmas.

Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di puskesmas yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jika standar-standar tersebut terpenuhi, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas.

Upaya kesehatan perseorangan yang ada di puskesmas dilaksanakan dalam beberapa bentuk diantaranya rawat jalan dan rawat inap. Pada Tahun 2022 jumlah kunjungan pasien baru di puskesmas sebanyak 126.828 orang untuk rawat jalan dan 1.844 orang untuk rawat inap (tabel 5).

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan. Jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa. Sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 di lampiran ini.

## 2.3. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan

### 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan obat, sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat.

Persentase puskesmas dengen ketersediaan obat dan vaksin esensial adalah Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item obat indikator).

Berdasarkan ketersediaan obat esensial pada Tahun 2022, 100% obat esensial telah tersedia di Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Artinya kebutuhan obat untuk pelayanan

kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional (FORNAS), sudah 100% terpenuhi (tabel 9).

**2. Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Puskesmas**

Imunisasi dasar merupakan imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia satu tahun. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR.

Vaksin merupakan komponen utama dalam pelaksanaan imunisasi, untuk mencapai tujuan imunisasi secara maksimal, maka perlu ditunjang dengan pengelolaan dan ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup, berkualitas serta tepat waktu.

Berdasarkan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap, semua puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2022 sudah terpenuhi seluruhnya 100% (Tabel 11).

**3. Sarana Farmasi dan Perbekalan**

Sarana farmasi dan perbekalan kesehatan tergolong menjadi 3 (tiga) kategori antara lain:

a. Sarana produksi, yaitu sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika. Yang termasuk sarana produksi kefarmasian antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ektrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan.
b. Sarana distribusi, meliputi: Pedagang Besar Farmasi (PBF) pusat maupun cabang.
c. Sarana pelayanan kefarmasian, meliputi: apotek, apotek PRB, toko obat dan toko alkes.

Jumlah sarana farmasi dan perbekalan yang ada di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**
Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No. | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Industri Farmasi | 0 |
| 2. | Industri Tradisional | 0 |
| 3. | Usaha Mikro Obat Tradisional | 0 |
| 4. | Produksi Alat Kesehatan | 0 |
| 5. | Pedagang Besar Farmasi | 0 |
| 6. | Apotek | 16 |
| 7. | Toko Obat | 0 |
| 8. | Toko Alkes | 1 |

## 2.4. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

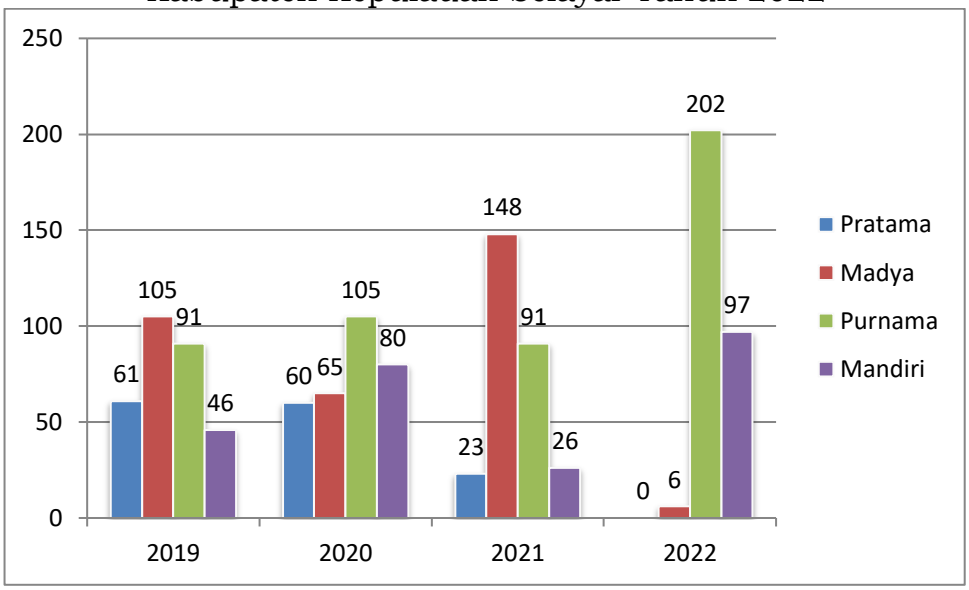
### 1. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan untuk masyarakat mulai bayi sampai dengan lansia. Posyandu Balita merupakan pos pelayanan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita, kesehatan dasar bagi para ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur.

Jumlah posyandu balita yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2022 adalah 305 dengan rincian 6 posyandu tingkat madya, 202 posyandu purnama dan 97 posyandu mandiri. Yang tercatat sebagai posyandu aktif (purnama

dan mandiri) pada tahun ini yaitu sebanyak 305 atau sebesar 100% (tabel 12). Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2021 (117 posyandu puri).

**Grafik 2.1**
Jumlah Posyandu Balita Menurut Strata
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

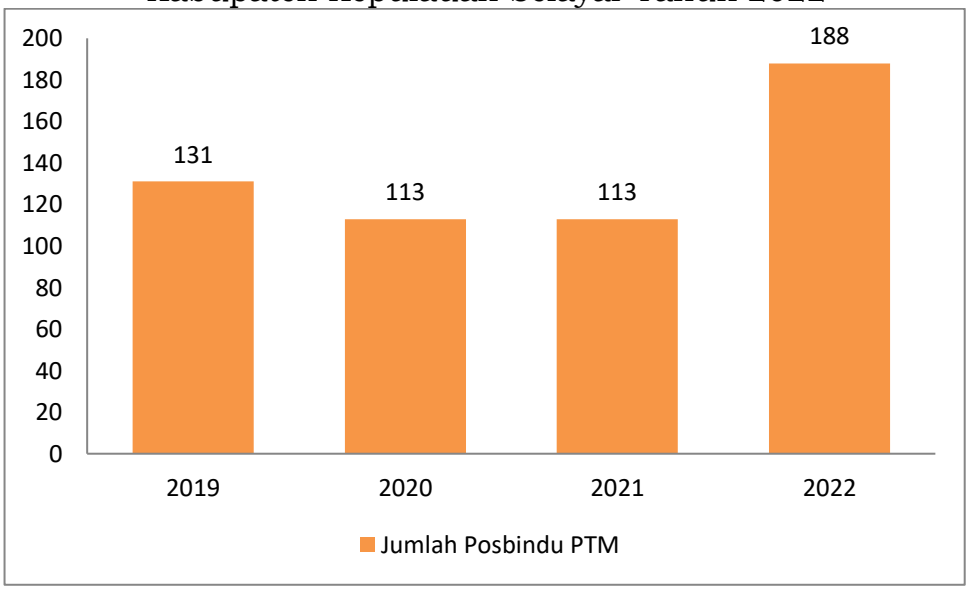
## 2. Posbindu

Masalah kesehatan yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis degeneratif, seperti penyakit jantung, Diabetes Melitus (DM), kanker, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), dan hipertensi. Upaya pengendalian PTM dibangun berdasarkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap ancaman PTM melalui Posbindu PTM.

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.

Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbentuk pada Tahun 2022 sejumlah 188 (tabel 12). Angka ini mengalami peningkatan 75 posbindu PTM dibanding tahun 2021 (113 posbindu).

**Grafik 2.2**
Jumlah Posbindu PTM
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB III
# TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI Nomor 36 Tahun 2014).

Sebelum tahun 2019, data jenis SDMK Kesehatan dicatat dari setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga dapat dimungkinkan terjadi pencatatan ganda *(double record)* mengingat tenaga kesehatan dapat praktek di lebih dari satu fasyankes. Oleh sebab itu, mulai tahun 2019 dilakukan metode penghitungan, dimana SDM kesehatan yang bekerja di lebih dari satu fasyankes atau institusi kesehatan hanya dihitung satu kali. Cara penghitungannya didasarkan pada nomor Induk Kependudukan (NIK) masing SDM Kesehatan.

Rekapitulasi SDM Kesehatan yang dihitung berdasarkan NIK di fasyankes Kabupaten Kepulauan Selayar, serta rasio tenaga kesehatan per 100.000 jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 13 – tabel 18 pada lampiran buku ini atau pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1**
Jumlah Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | | Total | Rasio per 100.000 Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | Dokter Spesialis dan Dokter Umum | 14 | 41 | 55 | 39,5 |
| 2. | Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi | 5 | 14 | 19 | 13,7 |
| 3. | Bidan | - | 711 | 711 | 511 |
| 4. | Perawat | 144 | 463 | 607 | 436,2 |
| 5. | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 20 | 61 | 81 | 58,2 |
| 6. | Tenaga Sanitasi | 8 | 31 | 39 | 28 |
| 7. | Tenaga Gizi | 4 | 32 | 36 | 25,9 |
| 8. | Tenaga Kefarmasian | 8 | 66 | 74 | 53,2 |

*Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB IV
# PEMBIAYAAN KESEHATAN

## 4.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Tahun 2022

Amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 171 berbunyi “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar Rp. 1.006.951.205.926,- Total APBD untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp. 255.013.959.116,- Total Anggaran APBD tersebut merupakan gabungan dari anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan Dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Sulawesi Selatan yang kesemuanya mekanisme pencairannya masuk melalui kas daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 20 lampiran buku ini.

## 4.2. Jaminan Kesehatan Nssional (JKN)

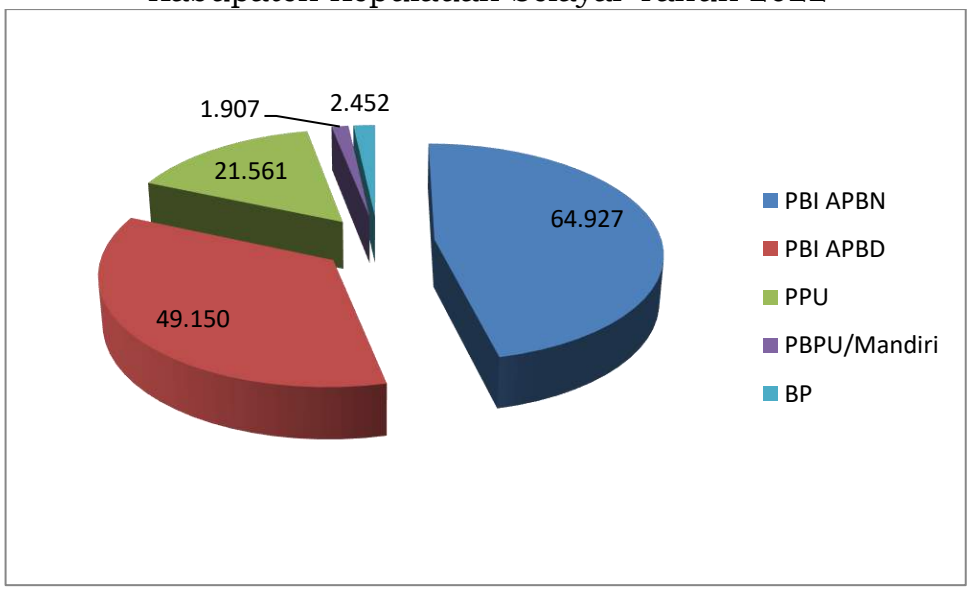
Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI). Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta non PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta

Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Adapun cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini atau tabel 19 pada lampiran buku ini.

**Grafik 4.1**
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Kab. Kep. Selayar*

# BAB V
# KESEHATAN KELUARGA

## 5.1. Kesehatan Ibu

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

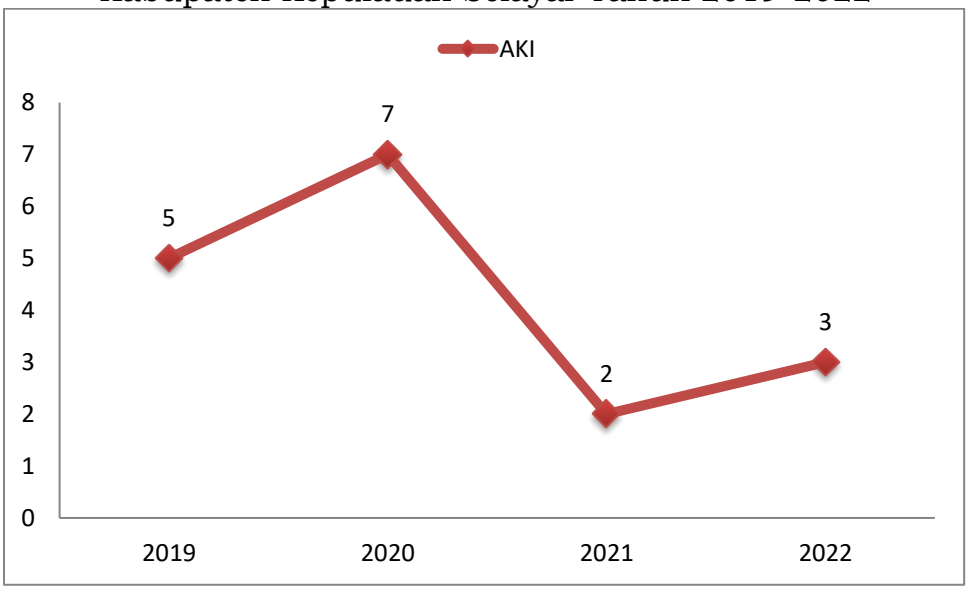
   Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Disebut demikian karena AKI dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan.

   Kematian Ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

   Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2022 sebesar 3, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 3 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 3 orang ibu. Jumlah tersebut terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 2 kematian ibu nifas. Perhitungan Angka Kematian Ibu dipengaruhi jumlah kelahiran hidup (tabel 22).

   Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.1**
Tren Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022

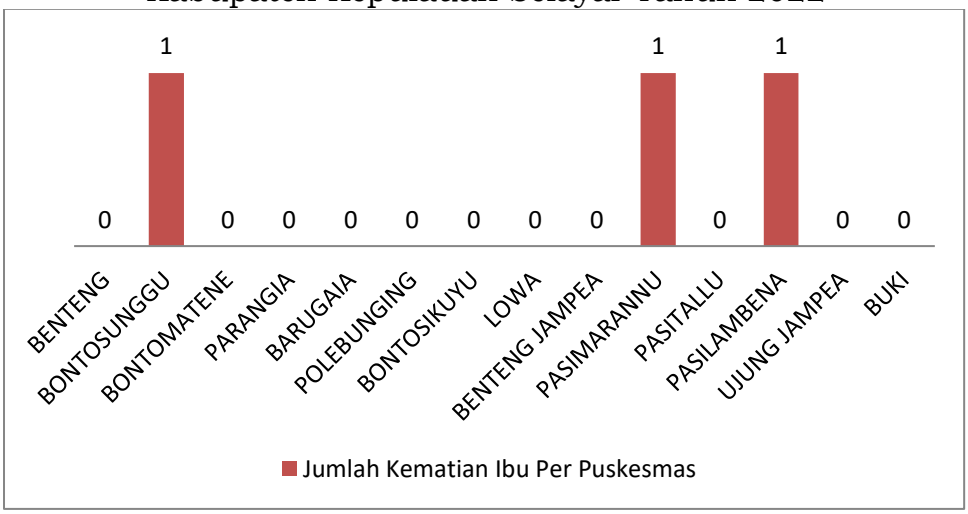



*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu 2 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat peningkatan angka dari tahun sebelumnya. Standar Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar berada jauh dibawah standar nasional.

Gambaran kematian ibu jika dilihat per puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Grafik 5.2**
Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per Puskesmas
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas, kematian ibu terjadi di wilayah kerja Puskesmas Bontosunggu, Pasimarannu dan Pasilambena. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya skrining risiko yang dilakukan pada ibu hamil. Sehingga dengan adanya risiko tinggi tersebut membuat kondisi ibu menjadi lebih berat atau mengalami komplikasi. Rujukan dini sebagai salah satu alternatif meminimalkan kematian juga belum dilakukan secara maksimal.

Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun penyebab kematian ibu pada Tahun 2022 terbesar adalah karena gangguan hipertensi 33,33%, disusul kematian ibu disebabkan karena perdarahan 33,33% dan sebanyak 33,33% karena lain-lain. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 23 pada lampiran buku ini.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kesehatan.

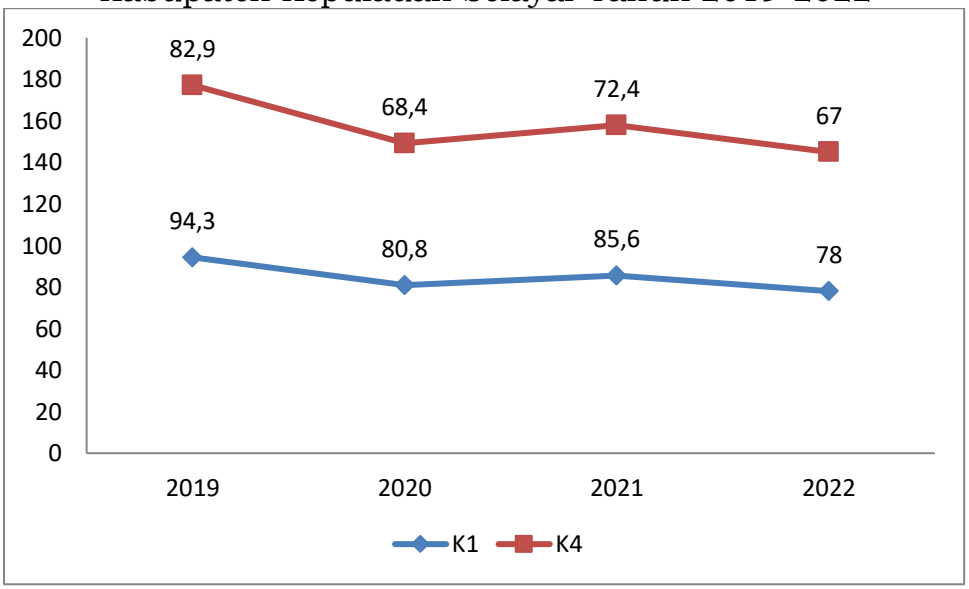
*Antenatal care* adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil untuk mengoptimalkan kesehatan fisik maupun mental ibu hamil, sehingga ibu hamil mampu menghadapi persalinan, saat nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara normal.

Pada Tahun 2022, jumlah ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan proyeksi estimasi yaitu sebanyak 2.591 ibu hamil. Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), capaian cakupan K1 di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebesar 78% dan capaian cakupan K4 sebesar 67%. Antara cakupan K1 dan K4 terdapat

perbedaan. Ini dapat diartikan bahwa ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal, pada trimester 3 tidak lagi melakukan kunjungan di fasyankes setempat atau bahkan melakukan persalinan di tempat lain. Mengingat bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang sifatnya mobile dan banyak pendatang, menjadikan salah satu alasan ibu hamil melakukan persalinan di kampung halamannya. Ini menjadikan pelaporan K1 dan K4 tidak sama (tabel 24).

Berikut tren grafik capaian K1 dan K4 pada tahun 2019 – 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Grafik 5.3**
Perkembangan Capaian Cakupan K1 dan K4
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, serta bidan, dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

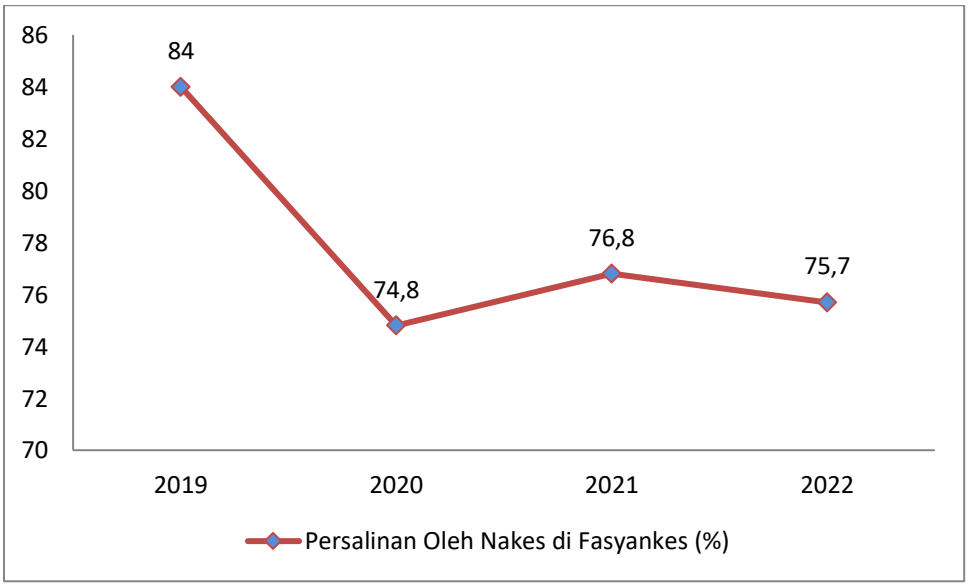
Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu indikator pelayanan wajib dasar dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada setiap warganya tanpa terkecuali.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih serta persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada Tahun 2022, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data yaitu 2.473 jiwa. Cakupan pertolongan persalinan di fasyankes dan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, yaitu sebesar 75,7% (1.873 persalinan) (tabel 24).

Gambaran cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan mulai tahun 2019 – 2022 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5.4**
Tren Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasyankes dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Kehamilan dan persalinan selalu mempunyai risiko, dengan kemungkinan bahaya terjadinya komplikasi kebidanan. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Risiko terjadinya komplikasi kebidanan meningkat salah satunya pada kehamilan di usia tua.

Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Berdasarkan laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, jumlah perkiraan ibu hamil resiko tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebanyak 518 orang (20% dari sasaran ibu hamil) dan 64,47% dari jumlah tersebut telah memperoleh penanganan sesuai prosedur (Tabel 32). Sedangkan jumlah komplikasi kebidanan (bisa dari ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) berdasarkan jenis komplikasi kebidanan paling tinggi disebabkan karena Kurang Energi Kronis (KEK) yaitu sebanyak 181, anemia sebanyak 82, penyebab lainnya sebanyak 14 (tabel 32).

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, bahwa ibu nifas mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas, yaitu 1 (satu) kali periode pada 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca persalinan, 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan

28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan, serta 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi :

- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu;
- Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- Pemeriksaan lokhia dan perdarahan;
- Pemeriksaan jalan lahir;
- Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
- Pemberian Kapsul vitamin A;
- Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
- Konseling; dan
- Penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.

Periode pasca persalinan meliputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi dan keluarganya secara fisiologis, emosional, dan sosial. Baik di negara maju maupun negara berkembang, perhatian utama bagi ibu dan bayi terlalu banyak tertuju pada masa kehamilan dan persalinan, sementara keadaan yang sebenarnya justru merupakan kebalikannya, oleh karena risiko kesakitan dan kematian ibu serta bayi lebih sering terjadi pada masa pascapersalinan. Keadaan ini terutama disebabkan oleh konsekuensi ekonomi, disamping ketidaktersediaan pelayanan atau rendahnya peranan fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup berkualitas. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan juga menyebabkan rendahnya keberhasilan promosi kesehatan dan deteksi dini serta penatalaksanaan yang adekuat terhadap masalah dan penyakit yang timbul pada masa pascapersalinan. (R.Soerjo Hadijono, 2016).

Pengertian diatas mendasari adanya layanan pasca persalinan atau masa nifas. Salah satunya adalah Kunjungan Nifas (KF). Kunjungan nifas atau postnatal care adalah suatu perawatan atau asuhan pencegahan dan penilaian rutin untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merujuk komplikasi pada ibu

nifas. Asuhan kunjungan nifas ini meliputi konseling Keluarga Berencana, kesehatan mental ibu, gizi dan kebersihan (WHO, 2015). Menurut Rukiyah & Yulianti (2018), kunjungan ibu nifas adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu nifas yang dilakukan selama 6 minggu setelah persalinan.

Pada tahun 2022 cakupan KF 1 di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 78% dan cakupan KF lengkap sebesar 56,2%. Angka ini masih belum memenuhi standar pemenuhan SPM. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 24 pada lampiran buku ini.

6. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen (Kementrian Kesehatan RI, 2015).

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kematian ibu dapat disebabkan oleh komplikasi obstetrik atau penyakit yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas (Heni, 2019). Selain itu masih banyak ditemukan kehamilan yang berisiko atau memiliki masalah (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan) yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu atau yang dikenal dengan “Empat Terlalu (4T)”.

Empat Terlalu (4-T) adalah terlalu muda usia ibu < 20 tahun, terlalu tua usia ibu > 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan atau persalinannya < dari 2 tahun, dan terlalu banyak jumlah anak > 4.

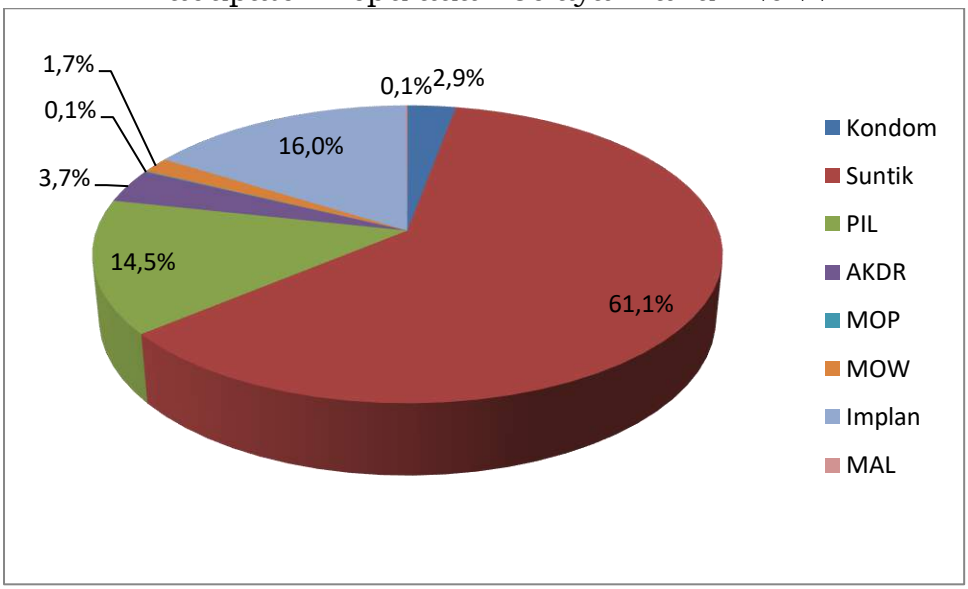
Berdasarkan data proyeksi, jumlah PUS pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 24.501, dengan PUS 4T sebesar 20,7% (5.075), PUS 4T pada KB aktif sebesar 39,9% (2.026), dan PUS ALKI pada KB aktif sebesar 0% (tabel 30).

Berdasarkan data laporan dari 14 Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar, cakupan peserta KB aktif metode modern tahun 2022 sebesar 73,2% dari 24.501 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Dari jumlah tersebut, 0,2% mengalami efek KB dan 7,7% melakukan dropout KB (tabel 29).

Berdasarkan jenis metode kontrasepsi yang digunakan, metode yang paling banyak dipilih dan digunakan dari tahun ke tahun adalah metode suntik, yaitu sebanyak 61,1% dan implan sebanyak 16% (tabel 29). Hal tersebut dikarenakan akses untuk memperoleh pelayanan suntikan relatif lebih mudah dan tersedian jaringan pelayanannya sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB.

Cakupan KB aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menurut metode yang digunakan dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

**Gambar 5.5**
Cakupan KB Aktif Menurut Metode Modern
Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 5.2. Kesehatan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

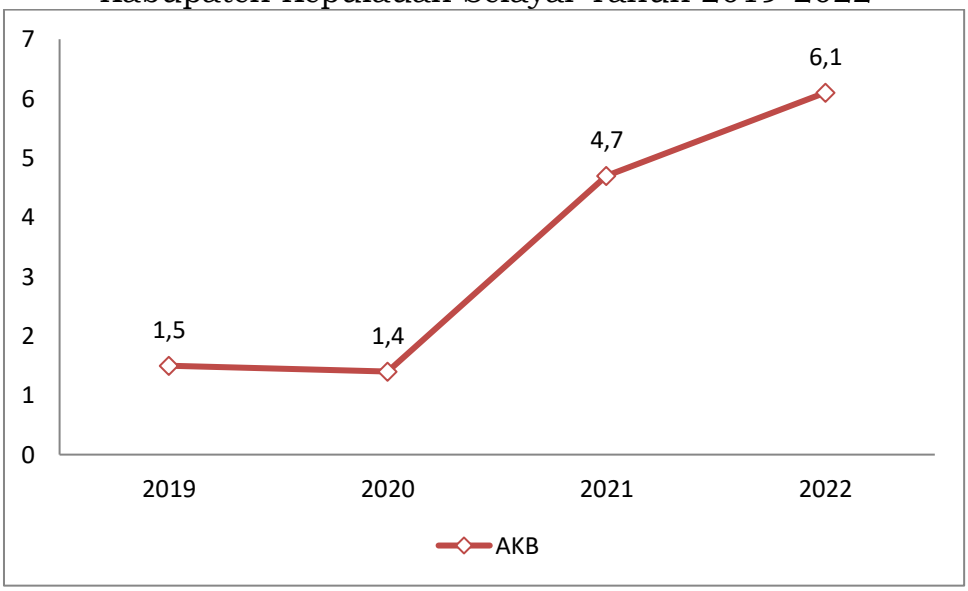
   Angka Kematian Bayi *(Infant Mortality Rate)* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi

merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Angka Kematian Neonatal yang dilaporkan pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 5,1 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah absolut sebanyak 10 neonatal. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan adalah 6,1 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah absolut 12 dari 1.980 kelahiran hidup (Tabel 34). Berikut tren Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

**Grafik 5.6**
Tren Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi Kesga & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

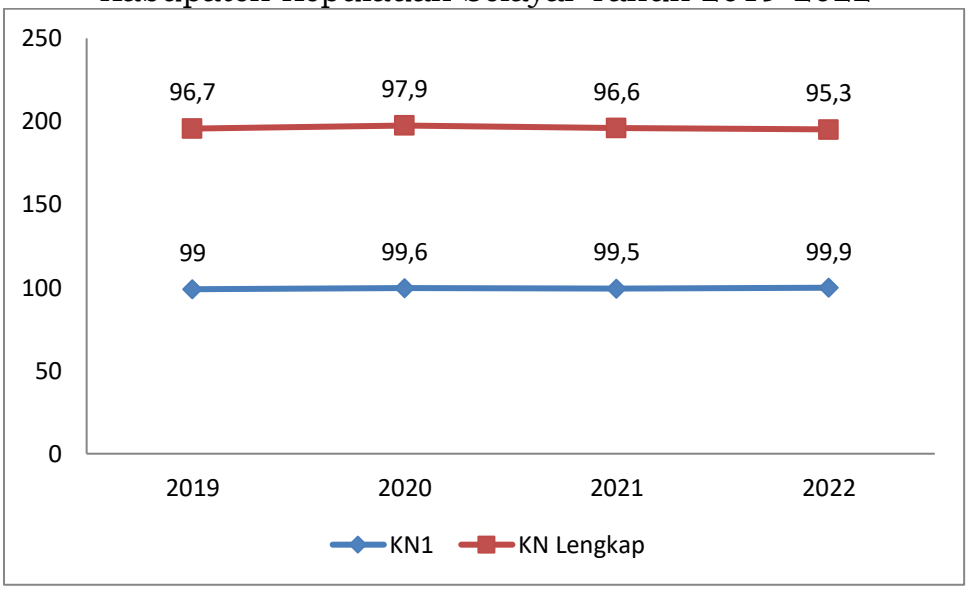
2. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan yang sebelumnya di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam (KN 1), umur 3-7 hari (KN2), dan umur 8- 28 hari (KN 3). Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN 1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Cakupan kunjungan neonatus 1 (KN-1) pada Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 99,9%. Sedangkan cakupan kunjungan neonatus lengkap 3 kali (KN lengkap) sebesar 95,3% (tabel 38). Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada neonatus yang belum mendapat pelayanan KN lengkap, dikarenakan baru mendapat pelayanan KN-2 atau adanya kematian neonatal.

Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019- 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5.7**
Cakupan KN 1 dan KN Lengkap
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Di Indonesia, diantara penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dengan skrining pada bayi baru lahir, Hipotiroid Kongenital (HK) merupakan penyakit yang cukup banyak ditemui. Kunci keberhasilan pengobatan anak dengan HK adalah dengan deteksi dini melalui pemeriksaan laboratorium dan pengobatan sebelum anak berumur 1 bulan. HK sendiri sangat jarang memperlihatkan gejala klinis pada awal kehidupan. Pada kasus dengan keterlambatan penemuan dan pengobatan dini, anak akan mengalami keterbelakangan mental dengan kemampuan IQ dibawah 70. Hal ini akan berdampak serius pada masalah sosial anak. Anak tidak mampu beradaptasi di sekolah formal dan menimbulkan beban ganda bagi keluarga dalam pengasuhannya. Bahkan negara akan mengalami kerugian dengan berkurangnya jumlah dan kualitas SDM pembangunan akibat masalah HK yang tidak tertangani secara dini pada bayi baru lahir.

Guna mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) neonatal, yang dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah ditimbang berat badannya. Cakupan bayi baru lahir ditimbang pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 100% dari jumlah 1.980 lahir hidup. Dari jumlah tersebut, 6,2% mengalami BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) (tabel 37).

3. Pelayanan Kesehatan Bayi

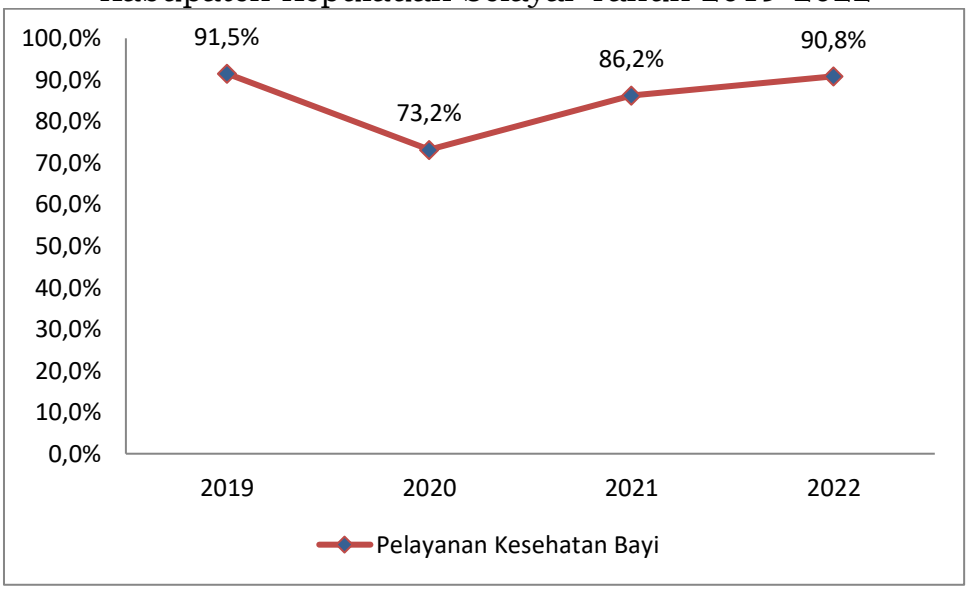
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi:

- Pemberian imunisasi dasar lengkap;
- Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi (SDIDTK);
- Pemberian Vitamin A 100.000 IU;
- Konseling ASI eksklusif;
- Pemberian makanan pendamping ASI;
- Tanda -tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA;
- Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Jumlah bayi di Kabupaten Sidoarjo Kepulauan Selayar 2022 menurut data yaitu sebanyak 2.355 jiwa. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan bayi Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 2.138 atau 90,8% (tabel 40).

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.8**
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Pada grafik diatas menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2022 meningkat. Hal tersebut terjadi karena adanya kesadaran masyarakat atas kebutuhan kesehatan dan dapat melakukan akses (sudah tidak pandemi covid-19) serta pembanding (denominator) nya dengan jumlah yang lebih kecil dari keadaan riil yang ada.

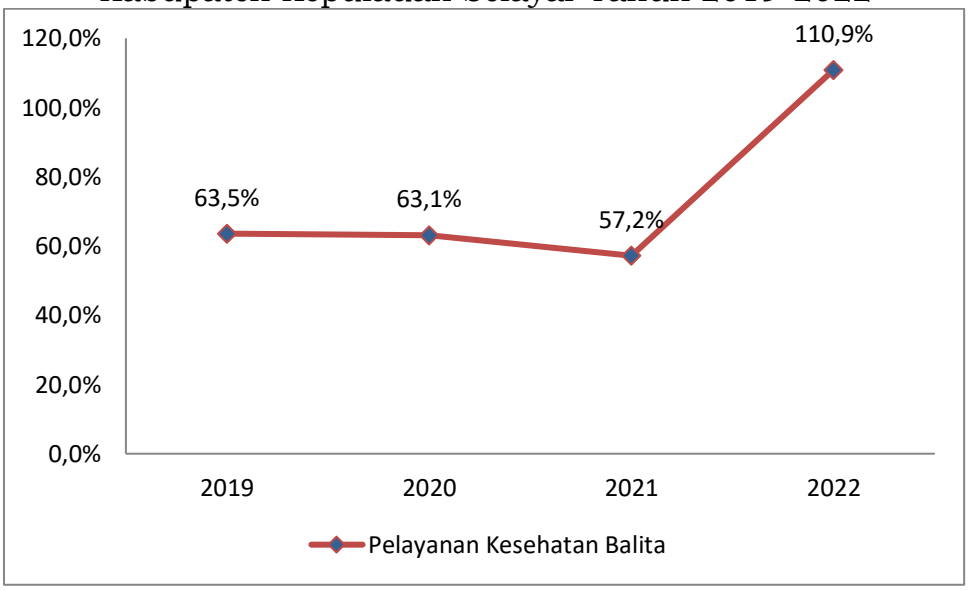
4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita yang dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan anak balita usia 12 – 59 bulan. Pelayanan kesehatan balita ini termasuk salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 4 tahun 2019 dan target pencapaiannya adalah 100%.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 adalah sebesar 110,9% dari 8.398 jumlah balita (tabel 46). Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2021 (57,2%) dan 2020 (63,1%).

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.9**
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

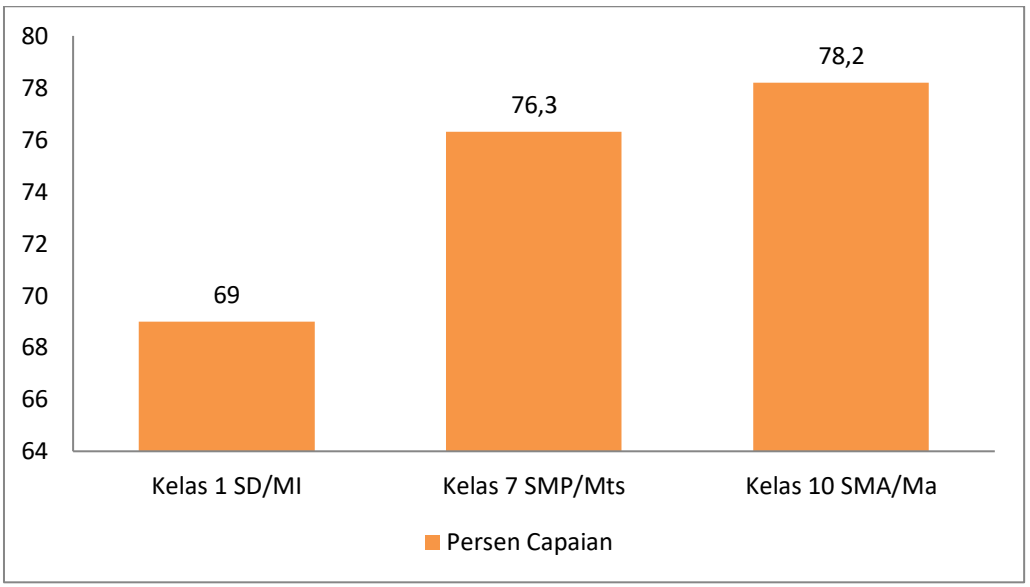
5. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada anak usia remaja adalah penjaringan kesehatan terhadap anak sekolah. Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran.

Adapun capaian kegiatan penjaringan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini atau pada lampiran 49 pada buku ini.

**Grafik 5.10**
Persen Capaian Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Jika dipersentasekan, maka cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 tercapai 69% (tabel 49). Ketercapaian ini belum maksimal dan belum memenuhi target yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus 100%. Ketidaktercapaian tersebut karena pada saat skrining kesehatan dilakukan, ada siswa yang tidak masuk karena sakit atau ijin lain, sedangkan petugas skiring harus terus melakukan kegiatan yang lain.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar pada Tahun 2022 meningkat tajam, karena di tahun 2022, sekolah sudah mulai aktif kembali.

Sedangkan cakupan Upaya Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) pada anak sekolah SD dan setingkat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 37,3% (tabel 51).

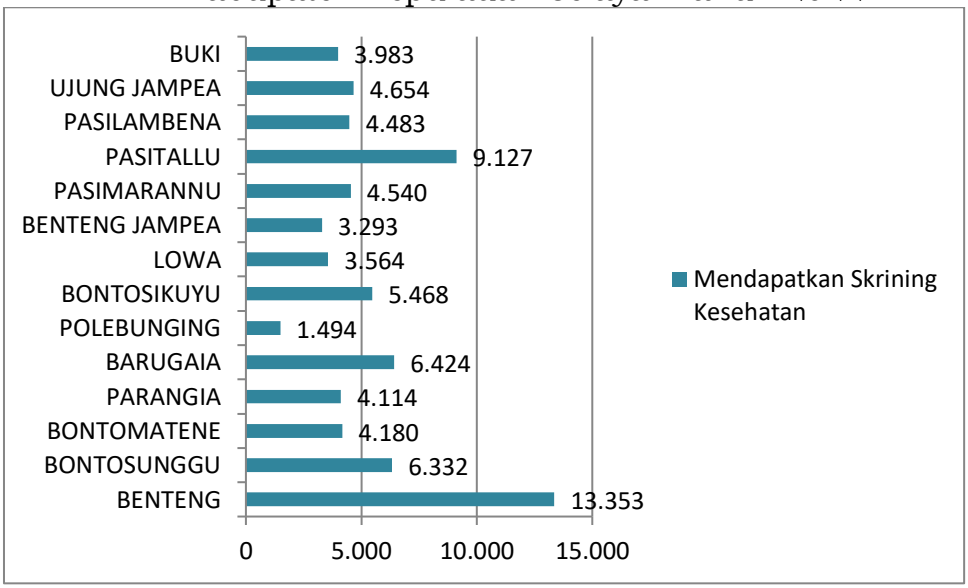
## 5.3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelayanan skrining usia produktif merupakan pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau UKBM. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun menggunakan yaitu sejumlah 75.009 jiwa.

Adapun Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah 100% (75.009) jiwa dan 12.3% (9.214) dari jumlah tersebut, diketahui beresiko terhadap penyakit tidak menular (Tabel 52).

**Grafik 5.11**
Persentase Pelayanan Skrining Usia Produktif Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi P2PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Skrining kesehatan pada usia produktif termasuk didalamnya adalah skrining kesehatan bagi calon pengantin. Jumlah calon pengantin yang terdaftar di KUA atau lembaga agama lainnya di

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah 940 dari jumlah tersebut sebesar 100% (940) telah mendapatkan skrining kesehatan dan 4% catin perempuannya diketahui anemia dan 11,7% kurang gizi (tabel 53).

2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Lanjut usia merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan penurunan pada daya tahan fisik sehingga rentan terhadap penyakit. Penurunan fungsi fisik yang terjadi pada lansia yakni penurunan sistem tubuh seperti sistem saraf, perut, limpa, dan hati, penurunan kemampuan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa, serta penurunan kemampuan motorik seperti kekuatan dan kecepatan. Berbagai penurunan ini berpengaruh terhadap kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan terhadap status kesehatannya. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas (lansia) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

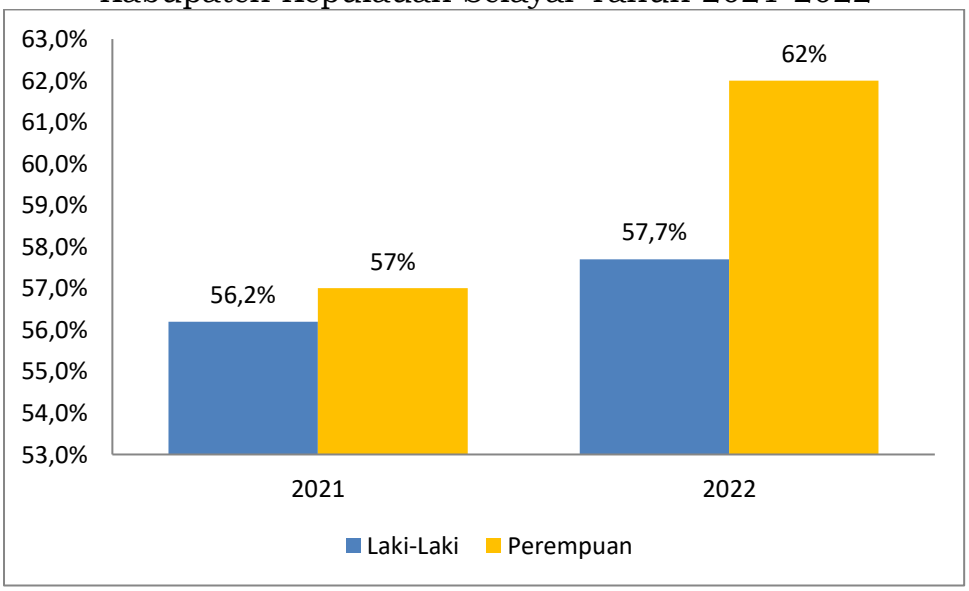
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah 60,1% dari 16.558 jiwa (Tabel 54). Meskipun masih belum dapat mencapai target 100% seperti yang diamanatkan dalam SPM, namun cakupan pelayanan ini meningkat jika dibanding tahun 2021 (56,73%). Ketidaktercapaian 100% karena belum maksimalnya kunjungan rumah oleh petugas pada lansia yang tidak beraktifitas secara mandiri dan aktifitasnya perlu bantuan (kemandirian C), selain itu

sosialisasi tentang pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) pada kader belum maksimal sehingga petugas harus melaksanakan sendiri skrining tersebut.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut gender, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.12**
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Menurut Gender
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 5.4. Imunisasi

Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi adalah angka UCI *(Universal Child Immunization)* dan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap).

Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Imunisasi program terdiri atas

imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/ wabah penyakit tertentu seperti covid-19 yang terjadi di dua tahun terakhir ini.

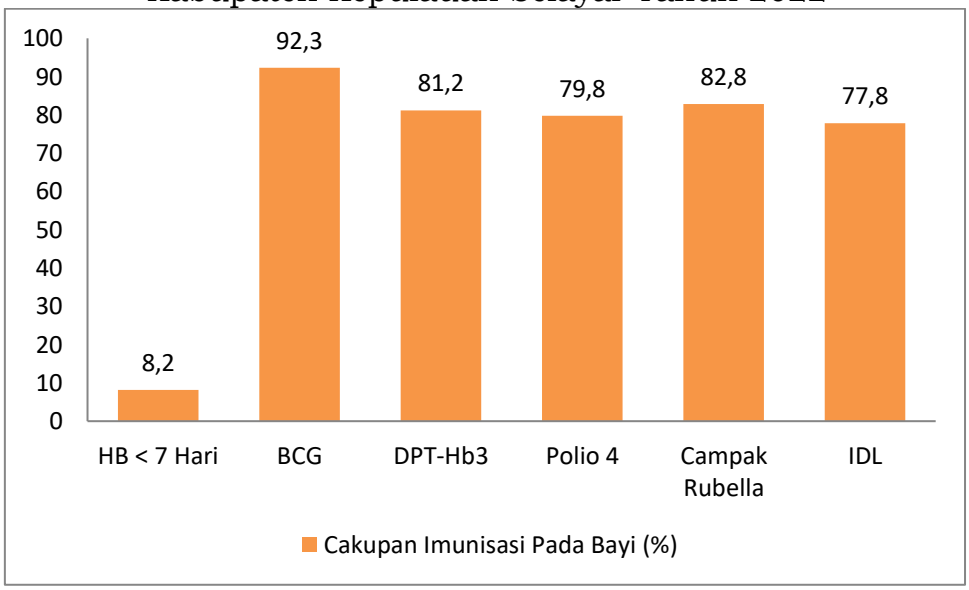
**1. Imunisasi Pada Bayi**

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib3, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/ MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul.

Jumlah lahir hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 berdasarkan proyeksi hitungan BPS yang telah diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI adalah 1.980 jiwa. Cakupan imunisasi dasar yang diberikan kepada bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

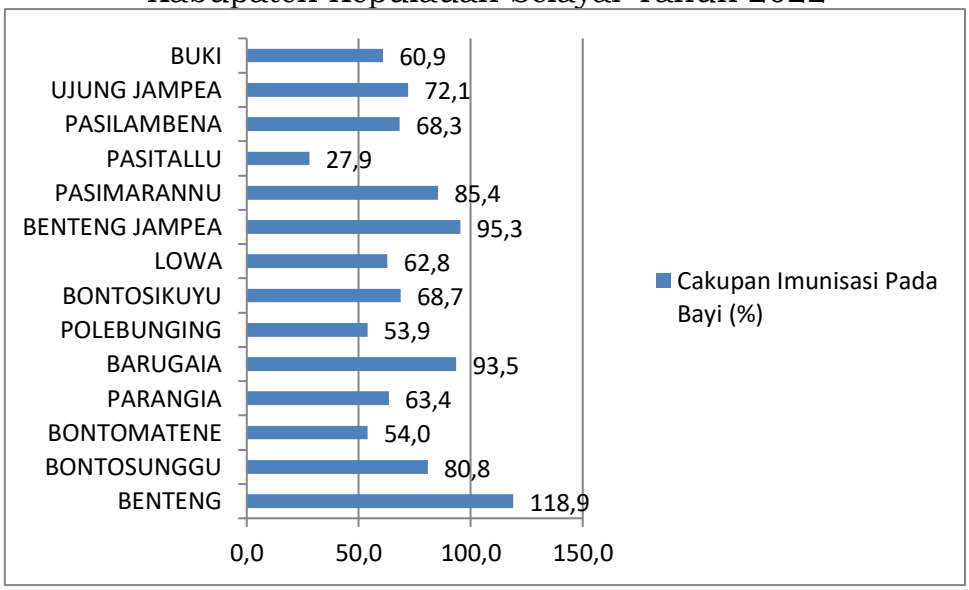
- Hb < 7 Hari sebesar 8,2% (Tabel 42);
- BCG sebesar 92,3% (Tabel 42);
- DPT-HB-Hib3 sebesar 81,2% (Tabel 43);
- Polio 4 sebesar 79,8% (Tabel 43);
- Campak Rubela sebesar 82,8% (Tabel 43); dan
- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 77,8% (tabel 43).

**Grafik 5.13**
Cakupan Imunisasi pada Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 5.14**
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**2. Imunisasi pada Baduta**

Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Salah satu sasaran imunisasi lanjutan adalah anak usia bawah dua tahun (baduta). Imunisasi lanjutan yang diberikan kepada baduta terdiri atas, imunisasi terhadap penyakit difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib), serta campak.

Cakupan imunisasi pada baduta yang dapat disajikan pada profil kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 adalah DPT-HB-Hib4 sebesar 61,6% dan Campak Rubela 2 sebesar 79%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 44 pada buku ini.

**3. Imunisasi pada Ibu**

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/ steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-49 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil.

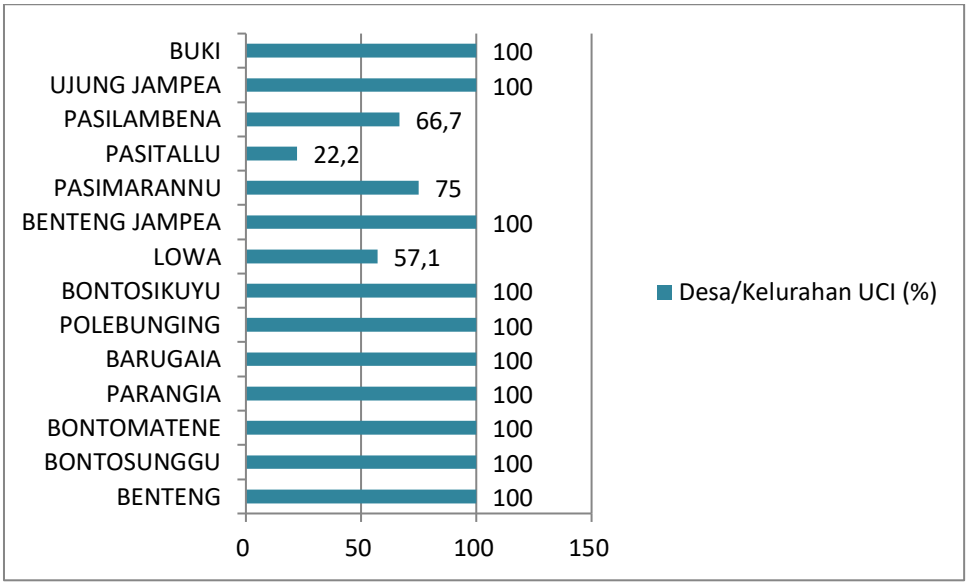
Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar 35,1%. Capaian ini menurun jika dibanding dengan tahun 2021 lalu (tabel 25).

Sedangkan cakupan imunisasi Td1 sampai dengan Td5 pada WUS tidak hamil dan WUS usia 15-39 tahun dapat dilihat pada tabel 26 dan 27 di lampiran ini.

## 4. UCI *(Universal Child Immunization)*

Indikator *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan desa/kelurahan yang 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat *(Herd Immunity)* terhadap penularan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi). Capaian UCI Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebesar 84,1%, yakni 74 desa dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar (tabel 41).

**Grafik 5.15**
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada desa/kelurahan di beberapa wilayah puskesmas yang belum 100%. Terutama di wilayah kerja Puskesmas Pasitallu, Lowa, Pasilambena dan Pasimarannu.

## 5.5. Gizi

### 1. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Perlunya perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak di usia balita didasarkan fakta bahwa kurang gizi pada masa emas ini bersifat irreversible (tidak dapat pulih), sedangkan kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.

Status gizi balita adalah cerminan ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian status gizi dapat diukur dengan antropometri atau pengukuran bagian tertentu dari tubuh. Indikator yang digunakan adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Jumlah balita sasaran berdasarkan data proyeksi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebanyak 9.486 balita, jumlah balita yang datang dan ditimbang sebanyak 7.672 balita (D/S: 80,9 %) (Tabel 47). Dari 7.672 balita yang ditimbang didapatkan hasil Balita Gizi Kurang (BB/U) sebanyak 320 balita (4,7%). Jumlah balita yang diukur tinggi badan sebanyak 6.773 balita dengan hasil Balita Pendek (TB/U) sebanyak 1.421 balita (21 %). Jumlah Balita yang diukur tinggi badan dan berat badan sebanyak 6.789 didapatkan hasil Balita gizi kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) sebanyak 320 balita (4,7%) serta balita gizi buruk (BB/TB : < - 3 SD) sebanyak 39 balita (0,6 %) (Tabel 48).

Upaya-upaya penanggulangan masalah gizi pada balita yang telah dijalankan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), perawatan gizi buruk, maupun intervensi tidak langsung seperti pendidikan gizi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas petugas gizi, pembentukan kelompok-kelompok pendukung ASI dan sebagainya.

## 2. Pemberian Kapsul Vitamin A

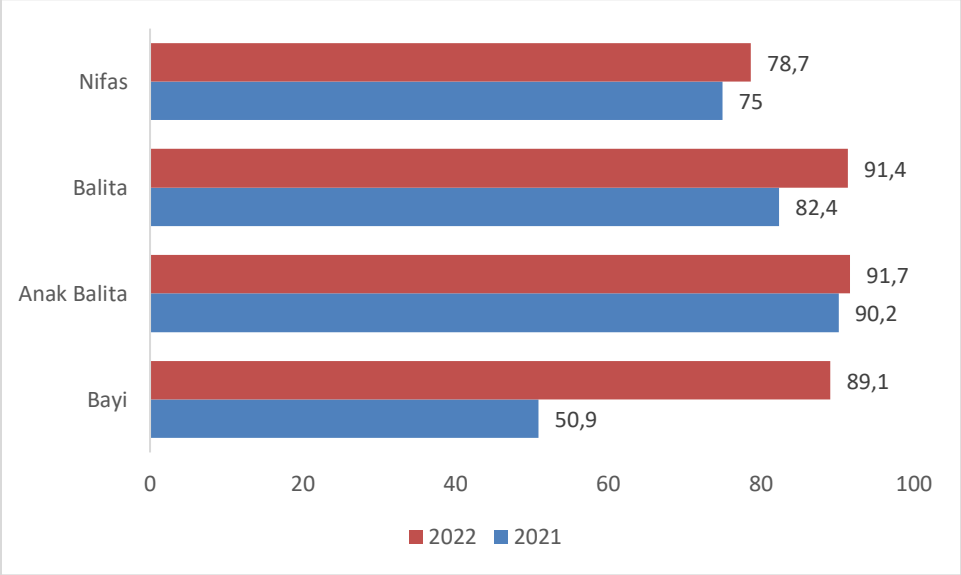
Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan dan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Kurang Vitamin A (KVA) merupakan masalah yang dapat terjadi pada semua umur terutama pada masa pertumbuhan. Salah satu dampak kurang vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan – 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan. Kurang Vitamin A pada anak biasanya terjadi pada anak yang menderita Kurang Energi Protein (KEP) atau gizi buruk sebagai akibat asupan zat gizi sangat kurang, termasuk zat gizi mikro dalam hal ini vitamin A. Anak yang menderita kurang vitamin A mudah sekali terserang infeksi seperti infeksi saluran pernafasan akut, campak, cacar air, diare dan infeksi lain karena daya tahan anak menurun. Namun masalah kekurangan vitamin A dapat juga terjadi pada keluarga dengan penghasilan cukup. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua terutama ibu tentang gizi yang baik. Gangguan penyerapan pada usus juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin A.

Cakupan pemberian vitamin A pada bayi usia 6-11 bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 89,1 dari 983 bayi. Sedangkan cakupan pemberian vitamin A pada anak balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 91,7 % dari 7.359 anak balita. Dan cakupan pemberian vitamin A pada balita usia 6-59 bulan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 sebesar 91,4 % dari 8.342 balita (tabel 45).

Untuk cakupan ibu nifas yang mendapatkan vitamin A pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 78,7% (tabel 24).

**Grafik 5.16**
Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, Balita dan Ibu Nifas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pemberian vitamin A pada semua sasaran yang harus diberikan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal Ini terjadi karena setelah pandemi, partisipasi balita untuk datang ke posyandu ikut meningkat sehingga lebih banyak sasaran yang datang dan diberikan vitamin A. Pemberian vitamin A pada ibu nifas meningkat tahun 2022 karena pelaporan dan koordinasi lintas program lebih dimaksimalkan dibanding tahun 2021.

**3. Pemberian ASI Eksklusif**

ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi dan menyediakan semua vitamin, nutrisi dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan enam bulan pertama, tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan. ASI terus tersedia hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak pada tahun pertama dan sampai tahun kedua kehidupan. Selain itu, ASI mengandung antibodi dari ibu yang membantu memerangi penyakit.

ASI Eksklusif artinya bahwa bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air

teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim, selama 6 bulan.

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan pada Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 48 %. Angka ini menurun jika dibanding capaian pada tahun 2021 (58,1 %.) (Tabel 39).

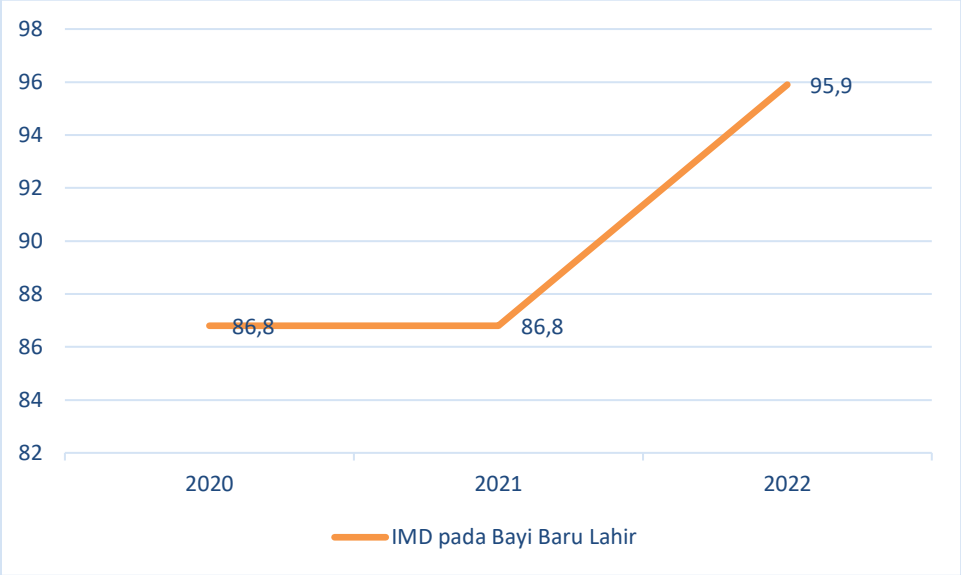
**4. Bayi Baru Lahir Mendapat IMD**

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu dari 4 pilar WHO untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan data dan laporan dari puskesmas, cakupan bayi baru lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 95,9% (Tabel 39). Angka ini meningkat dibanding tahun 2021 (86,8%) Hal ini menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan IMD oleh fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya puskesmas, sudah maksimal.

Gambaran cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Grafik. 5.17**
Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

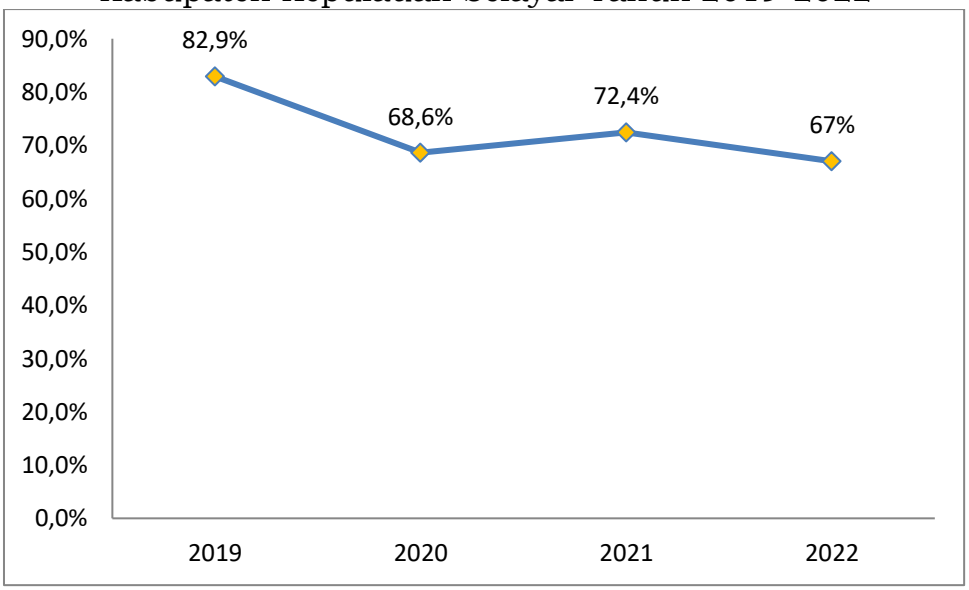
**5. Ibu Hamil Mendapatkan Fe 90 Tablet**

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/ bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Untuk mencegah anemia, setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan dan kemudian mengkonsumsi Tablet Tambah Daerah (TTD) 90 tablet di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar 67%. Angka ini menurun jika dibanding tahun 2021 (72,4%).

Gambaran cakupan ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet pada tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.18**
Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan TTD 90 Tablet
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2022




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB VI
# PENGENDALIAN PENYAKIT

## 6.1. Penyakit Menular Langsung

### 1. Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium Tuberculosis yang ditularkan melalui dahak (droplet) dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan.

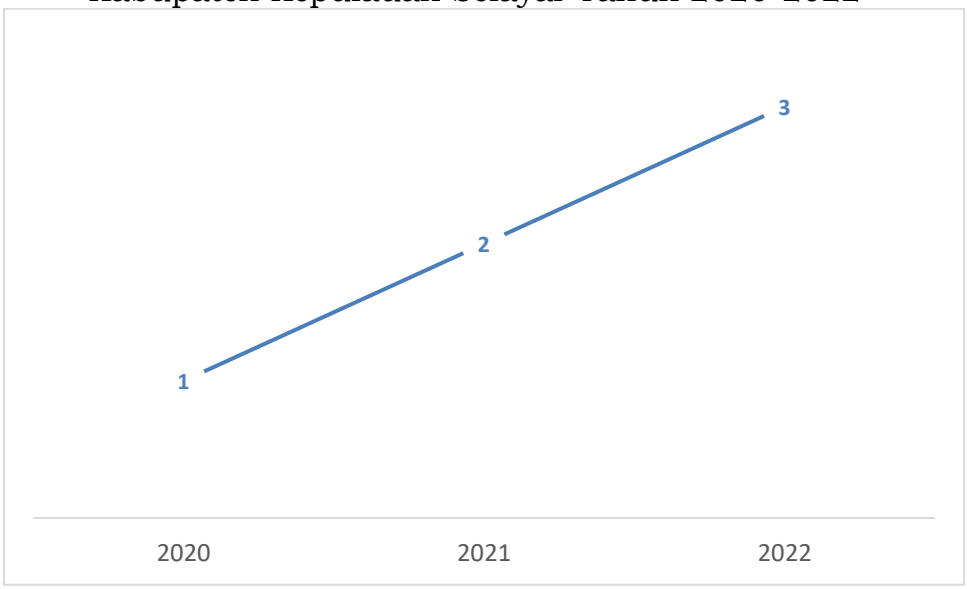
Strategi nasional, terdapat 6 indikator utama dan 11 indikator operasional program pengendalian TB. Antara lain:

- *Treatment coverage* (TC) jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Di kabupaten Kepulauan Selayar angka TC pada tahun 2022 sebesar 45,8% (tabel 56). Ini artinya bahwa capaian penemuan kasus TBC yang ditemukan dan diobati mencapai 227 (45,8%) dari estimasi kasus yang telah ditetapkan yakni sebesar 496 kasus TBC.
- Kasus TBC pada anak. Tuberkulosis anak mempunyai permasalahan khusus yang berbeda dengan TBC paru dewasa. Cakupan penemuan kasus TBC anak (0-14 tahun) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebanyak 3 kasus (Tabel 56).
- Angka kesembuhan *(Cure Rate)* Tuberkulosis, yaitu angka yang menunjukkan presentase pasien baru TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negative, dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya diantara pasien baru TB paru yang diobati dan tercatat. Angka kesembuhan *(Cure Rate)* tuberkolosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 29 jiwa (13,8%), dengan rincian 18 laki-laki (13,8%) dan 11 perempuan (13,8%) (tabel 57).

- Angka pengobatan lengkap *(Complete Rate),* yaitu pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap, dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. Cakupan angka pengobatan lengkap *(Complete Rate)* semua kasus tuberkulosis di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar 59,1% (136 jiwa) (tabel 57).
- Angka keberhasilan pengobatan TB *(Success Rate)* adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang di diobati dan dilaporkan, penderita TB yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TB). Sehingga data yang dievaluasi pada Tahun 2022 adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada tahun 2021, yaitu sebesar 71,7% atau sebesar 165 dari jumlah semua kasus tuberkulosis terdaftar dan diobati (Tabel 57).
- Jumlah kematian selama pengobatan TB. Jumlah kematian selama pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebanyak 12 jiwa (5,2%) dari semua kasus TB yang terdaftar dan terobati (tabel 57).

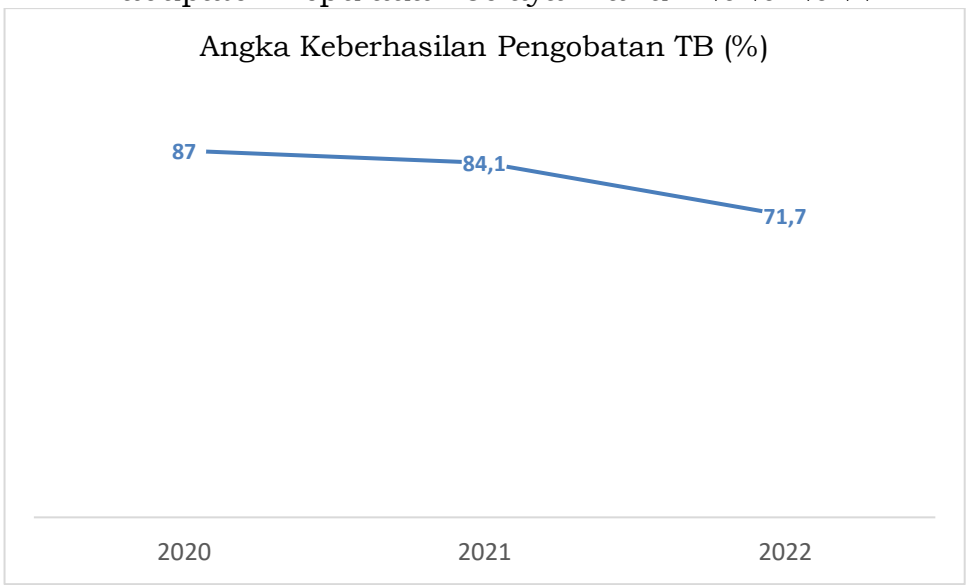
Berikut grafik jumlah penemuan TB pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 – 2022 dan Angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 – 2022.

**Grafik 6.1**
Jumlah Penemuan Kasus TB pada Anak Usia 0-14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 6.2**
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2022




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**2. Pneumonia Balita**

Pneumonia merupakan penyakit saluran pernapasan bawah akut yang mengenai parenkim paru meliputi alveolus dan jaringan interstisial. Sebagian besar pneumonia disebabkan oleh virus atau bakteri. Secara umum bakteri yang paling berperan penting dalam pneumonia adalah streptococcus pneumonia, Haemophillus influenza, staphylococcus aureus, serta kuman atipik chlamydia dan mikoplasma. Gambaran klinis pneumonia berupa demam, batuk, distress pernapasan, ronkhi, wheezing dan suara pernapasan menurun. Pemeriksaan saturasi oksigen penting dilakukan untuk menilai beratnya pneumonia pada anak. Diagnosis pneumonia ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan foto thoraks.

Prinsip dasar tatalaksana pneumonia anak adalah eliminasi mikroorganisme penyebab dengan antibiotik yang sesuai disertai dengan tatalaksana supportif lainnya.

Menurut laporan data puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, terdapat kunjungan balita dengan kondisi batuk atau kesukaran bernafas yang telah diberikan tata laksana standar sebesar 61% dari 2.780 balita yang berkunjung. Sedangkan temuan penderita pneumonia pada balita sebesar 25,5% dari 584 perkiraan balita dengan pneumonia (tabel 58).

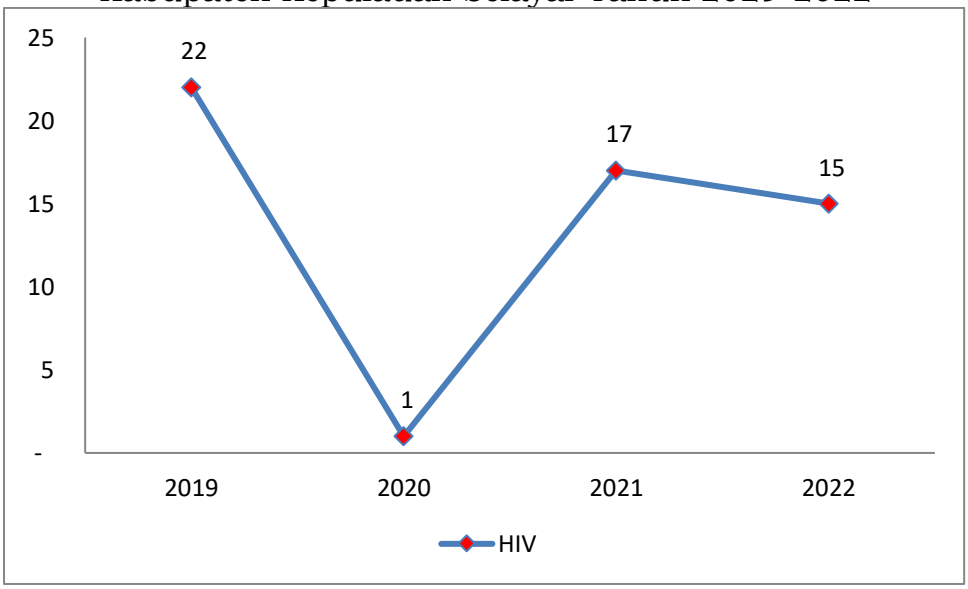
**3. HIV-AIDS**

HIV *(Human Immunodeficiency Virus)* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS *(Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Pada tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan penemuan kasus HIV baru sebanyak 15 kasus. Menurut kelompok umur, rentang terbanyak penemuan kasus HIV dari tahun ke tahun

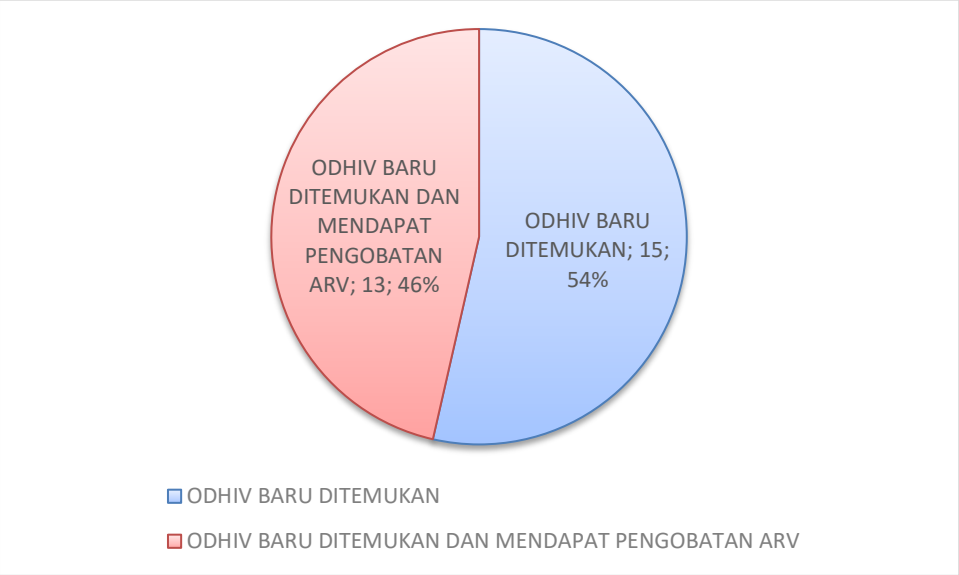
ada pada usia 25-49 tahun yaitu sebesar 86,7% atau sebanyak 13 kasus (tabel 59). Jumlah ini sebenarnya jauh lebih kecil dibanding kasus yang sebenarnya ada, namun tidak terlaporkan *(under reported).* Ibarat gunung es, data yang terlaporkan belum mewakili semua kasus yang ada. Hal ini disebabkan sulitnya menjangkau populasi kunci (populasi yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS) karena stigma negatif dari masyarakat. Dari sekian jumlah tersebut, yang mendapatkan ARV sebanyak 87% (tabel 60). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.3**
Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2029-2022




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 6.4**
Jumlah ODHIV Baru Mendapatkan ARV
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Berdasarkan amanat Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya direvisi menjadi Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang dengan resiko terinfeksi HIV-AIDS. Capaian SPM untuk indikator ini untuk Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 85,56%. Meski belum maksimal, namun berbagai upaya, baik promotif dan preventif telah dilakukan guna menekan laju perkembangan HIV-AIDS.

**4. Diare**

Di Indonesia, penyakit diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian.

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), Diare adalah penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara UNICEF

(Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan anak) memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena Diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar 1.466 kasus dari 3.698 perkiraan kasus diare atau sebesar 39,6%. Sedangkan Jumlah penderita Diare Balita yang di tangani di sarana kesehatan Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebesar 320 kasus dari 2.251 perkiraan kasus diare balita atau sebesar 14,2%. Cakupan pemberian oralit pada kasus diare semua umur sebesar 52,4% dan balita sebesar 4,7%. Sedangkan cakupan pemberian zinc pada kasus diare balita sebesar 17,2% (tabel 61).

**5. Kusta**

*Mycobacterium leprae* merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Secara umum Penyakit Kusta di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat karena sudah mencapai eliminasi kusta dengan angka kesakitan Tahun 2022 sebesar 0,2 per 10.000 penduduk (target angka kesakitan < 1 per 10.000 penduduk). Namun, jika tidak dilakukan upaya penekanan yang efektif maka dimungkinkan terjadi peningkatan kasus yang luar biasa. Untuk itu, pengendalian kasus kusta harus senantiasa diupayakan secara maksimal.

Pada tahun 2022 penemuan kasus baru kusta yang dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 11 kasus. Angka ini turun 10 kasus jika dibanding tahun 2021. Sedangkan NCDR *(New Case Detection Rate)* adalah sebesar 7,9 per 100.000 penduduk. Yang artinya setiap 100.000 penduduk ditemukan 7,9 kasus baru kusta (tabel 64).

## 6. Covid-19

*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang sebelumnya dikenal dengan nama 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS CoV-2) yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. COVID-19 berawal dari munculnya kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019, yang dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO) China Country Office. Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi dan mengumumkan bahwa kasus tersebut sebagai Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS CoV-2. Transmisi atau penularan COVID-19 berjalan sangat cepat, sehingga menjadi salah satu dasar WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian 2 bulan setelahnya atau pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pada kurun waktu 2022, jumlah kasus covid-19 yang terlaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 347 kasus terkonfirmasi, 339 sembuh dan 8 meninggal dengan angka kesembuhan sebesar 97,69% dan angka kematian 2,31% (Tabel 84). Jumlah kasus terbanyak masih tetap ada wilayah kerja Puskesmas Benteng (193 kasus terkonfirmasi). Ini dikarenakan wilayah kerja Puskesmas Benteng merupakan Puskesmas dengan penduduk terpadat di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Jika dilihat dari segmen umur, maka rentang usia 15 – 59 tahun merupakan rentang usia yang paling banyak untuk kasus covid-19 yaitu sebanyak 262 jiwa (Tabel 85).

## 6.2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas atau ditekan dengan imunisasi. Program imunisasi terbukti efektif untuk menekan angka kesakitan dan kematian.

### 1. Polio dan AFP

Penyakit polio adalah penyakit infeksi paralisis yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Penyakit polio dapat menyerang semua kelompok umur, namun kelompok umur paling rentan adalah kelompuk usia 1-15 tahun dari semua kasus polio. Polio termasuk dalam kategori Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari nonpolio AFP. Kementerian Kesehatan menetapkan non polio AFP rate minimal 2/100.000 populasi penduduk usia < 15 tahun. Kegiatan surveilans AFP menjadi salah satu kunci dalam mencapai Eradikasi Polio (Erapo), sehingga diharapkan suatu saat dunia ini akan bebas dari penyakit Polio.

Pada Tahun 2022 tercatat 1 penemuan kasus AFP. Sasaran penemuan kasus AFP adalah penduduk usia < 15 tahun yaitu sebesar 32.618 jiwa, sehingga AFP rate pada Tahun 2022 adalah sebesar 3,1 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi target AFP rate yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk sebaran kasus AFP per Puskesmas disajikan pada lampiran buku ini (tabel 68).

**2. Difteri**

Penyakit difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *corynebacterium diphtheriae* yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran udara bagian atas, dan menghasilkan racun yang mempengaruhi organ lain. Penyakit ini menyebar melalui kontak fisik langsung, atau melalui pernafasan di udara yang mengandung sekresi dari penderita yang batuk atau bersin. Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT 1, DPT 2 dan DPT 3. Upaya menurunkan kasus Difteri dan penyakit PD3I lainnya adalah dengan melakukan imunisasi dasar pada bayi dengan vaksin Difteri-Pertusis-Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB). Vaksin tersebut diberikan 4 (empat) kali yaitu pada umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan booster (lanjutan) usia 18 – 24 tahun. Selain itu, untuk antisipasi terjadi lonjakan kasus difteri pada umur anak sekolah maka imunisasi tambahan Tetanus Difteri (TD) juga diberikan pada anak Sekolah Dasar (SD) dan sederajat kelas 1 dari Td untuk kelas 2 dan 5.

Tidak ada kasus difteri yang dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 (tabel 69).

**3. Tetanus**

Tetanus neonatorum merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dapat terkena penyakit tetanus apabila basil clostridium tetani masuk ke dalam tubuhnya melalui luka. Infeksi ini dapat terjadi akibat pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat yang tidak steril.

Sama seperti tahun sebelumnya, Tahun 2022 ini tidak ditemukan kasus tetanus neonatorum di Kabupaten Kepulauan Selayar (tabel 69).

**4. Pertusis dan Hepatitis B**

Salah satu penyakit yang tergolong kedalam Penyakit menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) adalah penyakit pertusis. Istilah lain dari penyakit ini adalah batuk rejan atau sering juga dikenal dengan istilah batuk seratus hari yang sering menyerang anak-anak. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri Bordetella Pertusis. Imunisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi angka kejadian dan kematian yang disebabkan oleh pertusis. Pencegahan terhadap Pertusis dapat dilakukan dengan memberikan vaksin pertusis dalam jumlah 12 unit dibagi dalam 3 dosis dengan interval 8 minggu. Vaksin yang digunakan adalah vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus).

Sedangkan Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Hepatitis B dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin hepatitis B merupakan salah satu vaksin wajib yang diberikan kepada anak.

Tidak ditemukan kasus baik pertusis maupun hepatitis B di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 (Tabel 69).

**5. Campak**

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan Paramyxovirus. Campak disebut juga morbili atau measles. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk

demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Tidak ditemukan kasus campak di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 (tabel 69).

## 6.3. Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik

### 1. DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

Jumlah penderita DBD di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 sebanyak 5 penderita dan tidak ditemukan kasus kematian akibat DBD (tabel 72). Insiden rate *(Incidence Rate)* atau Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2022 sebesar 3,6 per 100.000 penduduk, yang berarti Insiden Rate tersebut sesuai dengan target nasional yang

sudah ditetapkan yaitu ≤ 49 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian atau case fatality rate sebesar 0% yang berarti sesuai dengan target angka kematian yang ditetapkan pusat yaitu <1%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk mencegah dan menanggulangi peningkatan kasus DBD sehingga angka kematian dapat ditekan.

**2. Malaria**

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan plasmodium yang terdiri dari banyak spesies, namun yang pada umumnya yang menyebabkan malaria adalah plasmodium vivax, plasmodium falciparum, plasmodium malariae, dan plasmodium ovale. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk anopheles yang di dalam tubuhnya mengandung plasmodium. Penyebaran dan endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh keberadaan tempat perindukan nyamuk anopheles sebagai vektor penular.

Pada Tahun 2022, ditemukan 837 kasus suspek dan kesemuanya positif terkonfirmasi dengan hasil lab mikroskopis. Namun dari semua kasus tersebut, tidak sampai ada yang meninggal (Tabel 73).

**3. Filariasis**

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular kronik yang disebabkan sumbatan cacing filaria di kelenjar/ saluran getah bening, menimbulkan gejala klinis akut berupa demam berulang, radang kelenjar/saluran getah bening, edema dan gejala kronik berupa elefantiasis. Seseorang tertular filariasis bila digigit nyamuk yang mengandung larva infektif cacing filaria. Nyamuk yang menularkan filariasis adalah anopheles, culex, mansonia, aedes dan armigeres. Nyamuk tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia sesuai dengan keadaan lingkungan habitatnya (got/saluran air, sawah, rawa, hutan).

Pada Tahun 2022, tidak ditemukan kasus baru untuk filariasis di Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel 74).

## 6.4. Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. PTM seperti penyakit diabetes mellitus, stroke, kanker, jantung, hipertensi, asma dan penyakit kronik lainnya merupakan penyebab kematian terbesar di dunia dan dari tahun ke tahun trendnya semakin meningkat. Hal ini salah satunya dikarenakan perubahan gaya hidup yang cenderung tidak berperilaku hidup bersih dan sehat.

Penyakit Tidak Menular merupakan penyakit yang diharapkan dapat ditekan angkanya dengan pelaksanaan program GERMAS melalui posbindu PTM. Program Pencegahan dan Pengendalian diprioritaskan pada upaya deteksi dini faktor risiko PTM.

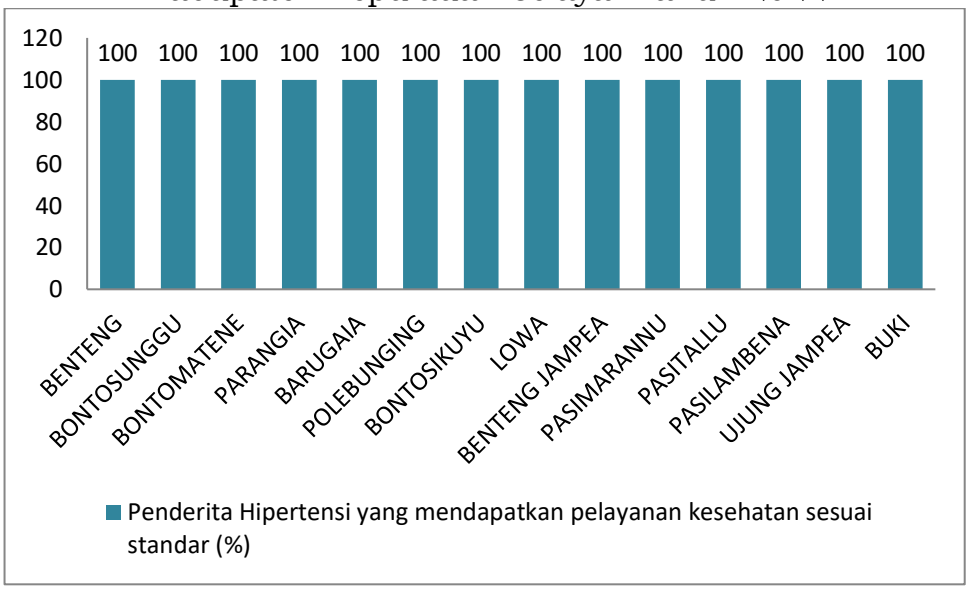
Beberapa penyakit tidak menular yang menjadi prioritas adalah :

### 1. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (*Joint National Committe on Prevention Detection, Evaluasi, and Treatment of High Pressure VII / JNC VII*, 2003).

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun Tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 20.073 penduduk, dengan proporsi laki-laki dan perempuan hampir seimbang, 49,4%-50,6%. Dari jumlah tersebut, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 20.073 atau 100% (Tabel 75). Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.5**
Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi P2PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 2. Diabetes Melitus

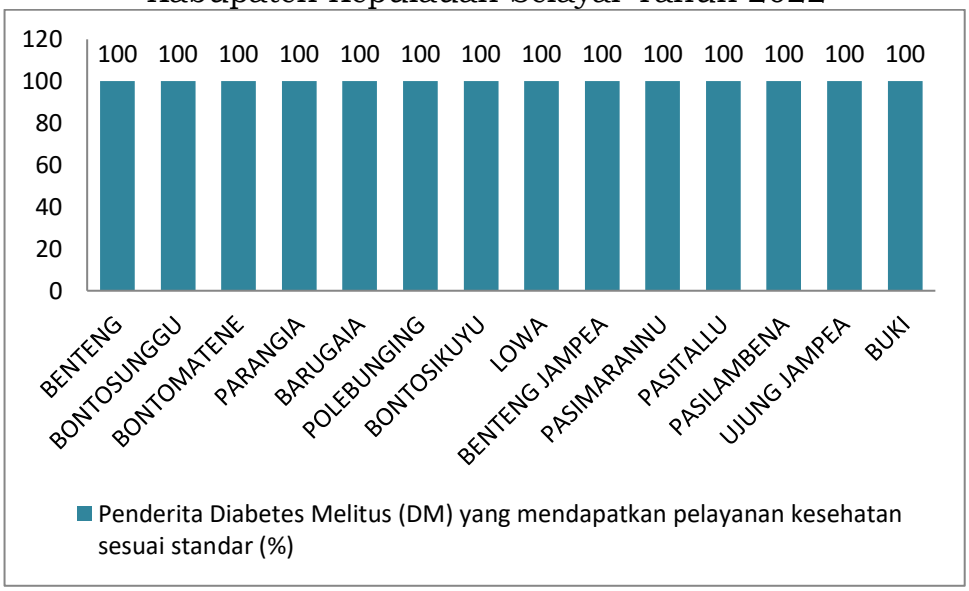
Diabetes Melitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah plasma vena yang melebihi nilai normal (GDP ≥ 126 mg/dl dan / atau GDS ≥ 200 mg/dl) yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Setiap penderita diabetes mellitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan standar sebagai upaya pencegahan sekunder.

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2022 adalah sebesar 1.481 dari 1.481 jumlah prediksi pasien DM atau sebesar 100% (Tabel 76).

Cakupan penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.6**
Cakupan Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022




*Sumber: Seksi P2PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

### 3. Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap prevalensi kanker pada perempuan di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Penyintas kanker payudara dan leher rahim pada umumya terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metoda IVA dan papsmear. Deteksi dini dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan.

Hasil pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menunjukkan dari 7.631 wanita usia 30-50 tahun yang diperiksa, 1 orang diantaranya menunjukkan IVA positif (1,9%), 2 orang (3,8%) curiga kanker leher rahim dan yang dirujuk sebanyak 2 orang (66,7). Sedangkan hasil pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dengan metode sadanis di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 menunjukkan dari 2.775 wanita usia 30-50 tahun yang diperiksa, terdapat tumor/benjolan sebesar 2 orang (0,1%), 3 orang (0,1%) curiga kanker payudara, dan dirujuk sebesar 2 orang (40%).

Hasil Pelayanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) per Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran Profil Tabel 77.

**4. ODGJ**

Pada bidang kesehatan, masalah kesehatan yang sering tidak menjadi prioritas dalam komitmen mutunya adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa telah dipandang dengan penuh stigma sejak lama. Kehadirannya dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kondisi kesehatan fisik. Padahal, WHO (2012) menyatakan bahwa kesehatan individu tidak hanya bergantung pada tiadanya penyakit tetapi juga keseimbangan psikologis dan fungsi sosialnya juga *(Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity).*

WHO telah memprediksikan bahwa pada tahun 2020 kasus depresi akan menjadi penyakit urutan kedua dalam menimbulkan beban kesehatan. Besarnya masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa di Indonesia mencapai 13,8% dari seluruh beban penyakit di Indonesia. Apabila dilihat dari prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, didapatkan data gangguan mental emosional sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 10 juta jiwa mengalami gejala-gejala depresi dan ansietas di Indonesia.

Dan untuk gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan gangguan psikosis prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk, atau diperkirakan lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis).

Di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, penemuan kasus ODGJ berat dan yang tertangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 139 dari 245 perkiraan kasus, atau sebesar 56,7%, yang terdiri dari skizofrenia sebesar 138 dan psikotik akut sebesar 1 (tabel 78). Ini menunjukkan bahwa kasus ODGJ banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

# BAB VII
# KEADAAN LINGKUNGAN

Teori klasik H.L. Blum yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan). Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak/ jamban sehat, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

## 7.1. Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan.

Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri E.Coli dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar gross alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Pada tahun 2022, jumlah sarana air minum di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 163. 112 (68,7%) diantaranya dinyatakan aman untuk dikonsumsi (tabel 79). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, bakteriologis dan kimia.

## 7.2. Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)/ sistem terpusat.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM untuk Masyarakat, jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Pada Tahun 2022, sudah 100% (37.450 keluarga) di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak. Dengan rincian 5.959 KK dengan akses sanitasi aman, 24.519 KK dengan akses sanitasi layak sendiri dan 6.972 KK dengan akses sanitasi layak bersama (tabel 80).

### 7.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes RI No. 3 Tahun 2014).

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada 5 pilar STBM, yakni:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/ kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/ kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/ kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/ kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan CLTS (Community-Led Total Sanitation).
2. Telah memiliki natural leader (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, 18 desa/kelurahan (20,45%) telah melaksanakan STBM, desa stop BABS sebanyak 88 desa/kelurahan (100%), sedangkan KK dengan akses rumah sehat sebesar 42,52% yaitu 15.924 KK (Tabel 81).

## 7.4. Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat umum atau sarana pelayanan umum adalah tempat yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit. Tempattempat umum merupakan suatu tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil maupun terusmenerus, baik secara membayar maupun tidak, atau suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengertian sanitasi tempat-tempat umum (STTU) adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempattempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. STTU dapat pula dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan.

Pada Tahun 2022, tercatat 249 TTU yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari jumlah tersebut 249 atau 100% telah dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL), baik itu dari komponen sarana pendidikan (SD,SMP/ MTs dan SMA/ MA), komponen sarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) serta komponen tempat ibadah dan pasar (Tabel 82).

## 7.5. Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang aman, akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh makanan yang tidak layak. Dalam rangka untuk mewujudkan keamanan makanan, dilakukan pengawasan terhadap semua Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). TPM yang dimaksud adalah produsen makanan/ minuman siap saji, seperti: Jasaboga/catering, rumah makan/ restoran, makanan jajanan/ kantin sentra makanan jajanan dan Depot Air Minum (DAM).

Pada tahun 2022, di Kabupaten Kepulauan Selayar terdaftar 461 Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Dari jumlah tersebut, baru 49,67% (229 TPP) yang memenuhi syarat kesehatan (Tabel 83).

# L A M P I R A N

**TABEL 1**

**LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | LUAS WILAYAH ($km^2$) | JUMLAH | | | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH RUMAH TANGGA | RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA | KEPADATAN PENDUDUK *per* $km^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESA | KELURAHAN | DESA + KELURAHAN | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | 24.63 | 0 | 3 | 3 | 25,397 | 7,441 | 3.4 | 1031.1 |
| 2 | BONTOHARU | 128.12 | 6 | 2 | 8 | 14,945 | 4,449 | 3.4 | 116.6 |
| 3 | BONTOMATENE | 193.05 | 10 | 2 | 12 | 13,441 | 4,751 | 2.8 | 69.6 |
| 4 | BONTOMANAI | 136.42 | 10 | 0 | 10 | 13,903 | 4,401 | 3.2 | 101.9 |
| 5 | BONTOSIKUYU | 248.22 | 12 | 0 | 12 | 15,381 | 5,104 | 3.0 | 62.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | 131.80 | 7 | 0 | 7 | 8,782 | 2,806 | 3.1 | 66.6 |
| 7 | PASIMARANNU | 195.33 | 8 | 0 | 8 | 10,736 | 3,464 | 3.1 | 55.0 |
| 8 | TAKABONERATE | 49.30 | 9 | 0 | 9 | 13,623 | 4,057 | 3.4 | 276.3 |
| 9 | PASILAMBENA | 114.88 | 6 | 0 | 6 | 8,202 | 2,381 | 3.4 | 71.4 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | 67.14 | 6 | 0 | 6 | 7,919 | 2,534 | 3.1 | 117.9 |
| 11 | BUKI | 68.14 | 7 | 0 | 7 | 6,816 | 2,203 | 3.1 | 100.0 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **1357.03** | **81** | **7** | **88** | **139,145** | **43,591** | **3.2** | **102.5** |

Sumber: - BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

**TABEL 2**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JUMLAH PENDUDUK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+PEREMPUAN | RASIO JENIS KELAMIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0 - 4 | 5,028 | 4,733 | 9,761 | 106.2 |
| 2 | 5 - 9 | 5,093 | 4,799 | 9,892 | 106.1 |
| 3 | 10 - 14 | 6,062 | 5,885 | 11,947 | 103.0 |
| 4 | 15 - 19 | 6,979 | 6,552 | 13,531 | 106.5 |
| 5 | 20 - 24 | 5,779 | 5,522 | 11,301 | 104.7 |
| 6 | 25 - 29 | 5,236 | 5,116 | 10,352 | 102.3 |
| 7 | 30 - 34 | 5,324 | 5,553 | 10,877 | 95.9 |
| 8 | 35 - 39 | 5,133 | 5,467 | 10,600 | 93.9 |
| 9 | 40 - 44 | 4,625 | 4,828 | 9,453 | 95.8 |
| 10 | 45 - 49 | 4,350 | 4,481 | 8,831 | 97.1 |
| 11 | 50 - 54 | 3,584 | 4,140 | 7,724 | 86.6 |
| 12 | 55 - 59 | 3,328 | 3,674 | 7,002 | 90.6 |
| 13 | 60 - 64 | 2,702 | 3,336 | 6,038 | 81.0 |
| 14 | 65 - 69 | 2,092 | 2,451 | 4,543 | 85.4 |
| 15 | 70 - 74 | 1,448 | 1,936 | 3,384 | 74.8 |
| 16 | 75+ | 1,533 | 2,376 | 3,909 | 64.5 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **68,296** | **70,849** | **139,145** | **96.4** |
| **ANGKA BEBAN TANGGUNGAN *(DEPENDENCY RATIO)*** | | | | **45** | |

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

**TABEL 3**

**PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF**
**DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | VARIABEL | JUMLAH | | | PERSENTASE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS | 52,113 | 55,432 | 107,545 | | | |
| 2 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | 49,325 | 50,776 | 100,101 | 94.7 | 91.6 | 93.1 |
| 3 | PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN: | | | | | | |
| | a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD | 8,366 | 7,912 | 16,278 | 16.1 | 14.3 | 15.1 |
| | b. SD/MI | 18,579 | 19,725 | 38,304 | 35.7 | 35.6 | 35.6 |
| | c. SMP/ MTs | 7,844 | 8,048 | 15,892 | 15.1 | 14.5 | 14.8 |
| | d. SMA/ MA | 11,517 | 10,243 | 21,760 | 22.1 | 18.5 | 20.2 |
| | e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | f. DIPLOMA I/DIPLOMA II | 325 | 684 | 1,009 | 0.6 | 1.2 | 0.9 |
| | g. AKADEMI/DIPLOMA III | 440 | 1,240 | 1,680 | 0.8 | 2.2 | 1.6 |
| | h. S1/DIPLOMA IV | 3,162 | 4,504 | 7,666 | 6.1 | 8.1 | 7.1 |
| | i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) | 184 | 136 | 320 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

**TABEL 4**

**JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | FASILITAS KESEHATAN | PEMILIKAN/PENGELOLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KEMENKES | PEM.PROV | PEM.KAB/KOTA | TNI/POLRI | BUMN | SWASTA | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | JUMLAH |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **RUMAH SAKIT** | | | | | | | | | |
| 1 | RUMAH SAKIT UMUM | | | 2 | | | | | 2 |
| 2 | RUMAH SAKIT KHUSUS | | | | | | | | - |
| **PUSKESMAS DAN JARINGANNYA** | | | | | | | | | |
| 1 | PUSKESMAS RAWAT INAP | | | 14 | | | | | 14 |
| | - JUMLAH TEMPAT TIDUR | | | 108 | | | | | 108 |
| 2 | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | | | 1 | | | | | 1 |
| 3 | PUSKESMAS KELILING | | | 13 | | | | | 13 |
| 4 | PUSKESMAS PEMBANTU | | | 71 | | | | | 71 |
| **SARANA PELAYANAN LAIN** | | | | | | | | | |
| 1 | KLINIK PRATAMA | | | | 2 | | 5 | | 7 |
| 2 | KLINIK UTAMA | | | | | | | | - |
| 3 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER | | | 13 | | | 15 | | 28 |
| 4 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI | | | 3 | | | | | 3 |
| 5 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS | | | | | | | | - |
| 6 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN | | | | | | | | - |
| 7 | TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT | | | | | | | | - |
| 8 | GRIYA SEHAT | | | | | | | | - |
| 9 | PANTI SEHAT | | | | | | | | - |
| 10 | UNIT TRANSFUSI DARAH | | | 1 | | | | | 1 |
| 11 | LABORATORIUM KESEHATAN | | | 1 | | | | | 1 |
| **SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | INDUSTRI FARMASI | | | | | | | | - |
| 2 | INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) | | | | | | | | - |
| 3 | USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) | | | | | | | | - |
| 4 | PRODUKSI ALAT KESEHATAN | | | | | | | | - |
| 5 | PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) | | | | | | | | - |
| 6 | INDUSTRI KOSMETIKA | | | | | | | | - |
| 7 | PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | | | | | | | | - |
| 8 | PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) | | | | | | | | - |
| 9 | APOTEK | | | | | | 16 | | 16 |
| 10 | TOKO OBAT | | | | | | | | - |
| 11 | TOKO ALKES | | | | | | 1 | | 1 |

Sumber: Seksi Alkes dan PIRT Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 5**

**JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | SARANA PELAYANAN KESEHATAN | JUMLAH KUNJUNGAN | | | | | | KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAWAT JALAN | | | RAWAT INAP | | | JUMLAH | | |
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| **JUMLAH KUNJUNGAN** | | **11.100** | **16.648** | **156.109** | **1.684** | **2.524** | **6.380** | **1** | **0** | **140** |
| **JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA** | | **68.296** | **70.849** | **139.145** | **68.296** | **70.849** | **139.145** | | | |
| **CAKUPAN KUNJUNGAN (%)** | | **16,3** | **23,5** | **112,2** | **2,5** | **3,6** | **4,6** | | | |
| **A** | **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama** | | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas | | | | | | | | | |
| | 1. BENTENG | | | 43.189 | | | 0 | | | 20 |
| | 2. BONTOSUNGGU | | | 2.847 | | | 114 | | | 14 |
| | 3. BONTOMATENE | | | 10.064 | | | 216 | | | 12 |
| | 4. PARANGIA | | | 8.526 | | | 179 | | | 18 |
| | 5. BARUGAIA | | | 4.824 | | | 109 | | | 10 |
| | 6. POLEBUNGING | | | 4.092 | | | 185 | | | 7 |
| | 7. BONTOSIKUYU | | | 11.363 | | | 245 | | | 12 |
| | 8. LOWA | | | 3.067 | | | 174 | | | 4 |
| | 9. BENTENG JAMPEA | | | 6.345 | | | 118 | | | 6 |
| | 10. PASIMARANNU | | | 9.560 | | | 135 | | | 6 |
| | 11. PASITALLU | | | 5.289 | | | 117 | | | 18 |
| | 12. PASILAMBENA | | | 4.391 | | | 0 | | | 4 |
| | 13. UJUNG JAMPEA | | | 4.920 | | | 77 | | | 6 |
| | 14. BUKI | | | 8.351 | | | 175 | | | 2 |
| 2 | Klinik Pratama | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Praktik Mandiri Dokter | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Praktik Mandiri Bidan | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SUB JUMLAH I | | 0 | 0 | 126.828 | 0 | 0 | 1.844 | 0 | 0 | 139 |
| **B** | **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut** | | | | | | | | | |
| 1 | Klinik Utama | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | RS Umum | | | | | | | | | |
| | 1. RSUD K.H. Hayyung | 11.100 | 16.648 | 27.748 | 1.684 | 2.524 | 4.208 | | | 0 |
| | 2. RS Pratama Jampea | | | 1.533 | | | 328 | 1 | | 1 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | RS Khusus | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SUB JUMLAH II | | 11.100 | 16.648 | 29.281 | 1.684 | 2.524 | 4.536 | 1 | 0 | 1 |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

**TABEL 6**

**PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR ) LEVEL I**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | RUMAH SAKIT | JUMLAH | MEMPUNYAI KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL I | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | RUMAH SAKIT UMUM | 2 | 2 | 100 |
| 2 | RUMAH SAKIT KHUSUS | 0 | | #DIV/0! |
| | | | | |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **2** | **2** | **100** |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 7**

**ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | NAMA RUMAH SAKIT[a] | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) | | | PASIEN KELUAR MATI | | | PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT | | | *Gross Death Rate* | | | *Net Death Rate* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 134 | 1,684 | 2,524 | 4,208 | 31 | 45 | 76 | 20 | 24 | 44 | 18.4 | 17.8 | 18.1 | 11.9 | 9.5 | 10.5 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 45 | 85 | 98 | 183 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 40.8 | 32.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **179** | **1,769** | **2,622** | **4,391** | **33** | **49** | **82** | **20** | **24** | **44** | **18.7** | **18.7** | **18.7** | **11.3** | **9.2** | **10.0** |

Sumber: - RSUD K.H. Hayyung
- RS Pratama Jampea

**TABEL 8**

**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | NAMA RUMAH SAKIT | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) | JUMLAH HARI PERAWATAN | JUMLAH LAMA DIRAWAT | BOR (%) | BTO (KALI) | TOI (HARI) | ALOS (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 134 | 4,208 | 29,809 | 29,145 | 60.9 | 31 | 5 | 7 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 45 | 183 | 9,550 | 549 | 58.1 | 4 | 2 | 3 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **179** | **4,391** | **39,359** | **29,694** | **60.2** | **25** | **6** | **7** |

Sumber: - RSUD K.H. Hayyung
- RS Pratama Jampea

**TABEL 9**

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PUSKESMAS DAN KECAMATAN**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | v |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | v |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | v |
| | | PARANGIA | v |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | v |
| | | POLEBUNGING | v |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | v |
| | | LOWA | v |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | v |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | v |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | v |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | v |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | v |
| 11 | BUKI | BUKI | v |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL | | | 14 |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR | | | 14 |
| **% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL** | | | **100%** |

Sumber: Instalasi Farmasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: *) beri tanda "V" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%

*) beri tanda "X" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial <80%

*) jika puskesmas tersebut tidak melapor, **mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"**

**TABEL 10**

**PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | NAMA OBAT | SATUAN | KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Albendazol /Pirantel Pamoat | Tablet | v |
| 2 | Alopurinol | Tablet | v |
| 3 | Amlodipin/Kaptopril | Tablet | v |
| 4 | Amoksisilin 500 mg | Tablet | v |
| 5 | Amoksisilin sirup | Botol | v |
| 6 | Antasida tablet kunyah/ antasida suspensi | Tablet/Botol | v |
| 7 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tablet | x |
| 8 | Asiklovir | Tablet | v |
| 9 | Betametason salep | Tube | x |
| 10 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Tablet/Vial/Ampul | v |
| 11 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ampul | v |
| 12 | Diazepam | Tablet | v |
| 13 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Tablet | x |
| 14 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ampul | x |
| 15 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ampul | x |
| 16 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ampul | v |
| 17 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Tablet | v |
| 18 | Garam Oralit serbuk | Kantong | v |
| 19 | Glibenklamid/Metformin | Tablet | v |
| 20 | Hidrokortison krim/salep | Tube | v |
| 21 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol su | Tablet/Botol | v |
| 22 | Lidokain inj | Vial | v |
| 23 | Magnesium Sulfat injeksi | Vial | v |
| 24 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ampul | v |
| 25 | Natrium Diklofenak | Tablet | v |
| 26 | OAT FDC Kat 1 | Paket | v |
| 27 | Oksitosin injeksi | Ampul | v |
| 28 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Botol | v |
| 29 | Parasetamol 500 mg | Tablet | v |
| 30 | Prednison 5 mg | Tablet | v |
| 31 | Ranitidin 150 mg | Tablet | v |
| 32 | Retinol 100.000/200.000 IU | Kapsul | v |
| 33 | Salbutamol | Tablet | v |
| 34 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Tube | v |
| 35 | Simvastatin | Tablet | v |
| 36 | Siprofloksasin | Tablet | v |
| 37 | Tablet Tambah Darah | Tablet | v |
| 38 | Triheksifenidil | Tablet | v |
| 39 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Tablet | v |
| 40 | Zinc 20 mg | Tablet | v |
| JUMLAH ITEM OBAT INDIKATOR YANG TERSEDIA DI KABUPATEN/KOTA | | | 35 |
| **% KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL** | | | **87.50%** |

Sumber: Instalasi Farmasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: *) beri tanda "V" jika kabupaten/kota memiliki obat esensial

*) beri tanda "X" jika kabupaten/kota tidak memiliki obat esensial

**TABEL 11**

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA** **KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN** **2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KETERSEDIAAN VAKSIN IDL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | v |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | v |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | v |
| | | PARANGIA | v |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | v |
| | | POLEBUNGING | v |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | v |
| | | LOWA | v |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | v |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | v |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | v |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | v |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | v |
| 11 | BUKI | BUKI | v |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 100% VAKSIN IDL | | | 14 |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR | | | 14 |
| **% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL** | | | **100.00%** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: *) beri tanda "V" jika Puskesmas memiliki 100% vaksin IDL

*) beri tanda "X" jika Puskesmas memiliki <100% vaksin IDL

*) jika Puskesmas tersebut tidak melapor, **mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"**

**TABEL 12**

**JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | STRATA POSYANDU | | | | | | | | JUMLAH | POSYANDU AKTIF* | | JUMLAH POSBINDU PTM** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRATAMA | | MADYA | | PURNAMA | | MANDIRI | | | | | |
| | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23 | 85.2 | 4 | 14.8 | 27 | 27 | 100.0 | 16 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 60.0 | 10 | 40.0 | 25 | 25 | 100.0 | 16 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | 21 | 21 | 100.0 | 7 |
| | | PARANGIA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 23.1 | 10 | 76.9 | 13 | 13 | 100.0 | 13 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0.0 | 1 | 4.5 | 14 | 63.6 | 7 | 31.8 | 22 | 21 | 95.5 | 14 |
| | | POLEBUNGING | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 31.6 | 13 | 68.4 | 19 | 19 | 100.0 | 10 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 17 | 70.8 | 7 | 29.2 | 24 | 24 | 100.0 | 19 |
| | | LOWA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 62.5 | 9 | 37.5 | 24 | 24 | 100.0 | 4 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 17 | 89.5 | 1 | 5.3 | 19 | 18 | 94.7 | 22 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 82.6 | 4 | 17.4 | 23 | 23 | 100.0 | 8 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0.0 | 4 | 16.0 | 13 | 52.0 | 8 | 32.0 | 25 | 21 | 84.0 | 9 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 95.0 | 1 | 5.0 | 20 | 20 | 100.0 | 20 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 80.0 | 4 | 20.0 | 20 | 20 | 100.0 | 20 |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 52.2 | 11 | 47.8 | 23 | 23 | 100.0 | 10 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0.0** | **6** | **2.0** | **202** | **66.2** | **97** | **31.8** | **305** | **299** | **98.0** | **188** |
| **RASIO POSYANDU PER 100 BALITA** | | | | | | | | | | | **3.1** | | | |

Sumber: Seksi KIA Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar
*Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri
**PTM: Penyakit Tidak Menular

**TABEL 13**

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | UNIT KERJA | DR SPESIALIS | | | DOKTER | | | TOTAL | | | DOKTER GIGI | | | DOKTER GIGI SPESIALIS | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 3 | 8 | 11 | 4 | 9 | 13 | 7 | 17 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA)[a] | | 3 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | 14 | 41 | 55 | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 19 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **7.9** | | | **31.6** | | | **39.5** | | | **12.9** | | | **0.7** | | | **13.7** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 14**

**JUMLAH TENAGA TENAGA KEPERAWATAN DAN TENAGA KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KEPERAWATAN | | | TENAGA KEBIDANAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | 7 | 30 | 37 | 43 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 14 | 30 | 44 | 83 |
| 3 | BONTOMATENE | 6 | 20 | 26 | 37 |
| 4 | PARANGIA | 6 | 20 | 26 | 36 |
| 5 | BARUGAIA | 9 | 33 | 42 | 47 |
| 6 | POLEBUNGING | 5 | 18 | 23 | 36 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 8 | 17 | 25 | 35 |
| 8 | LOWA | 6 | 18 | 24 | 42 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 6 | 18 | 24 | 38 |
| 10 | PASIMARANNU | 3 | 22 | 25 | 41 |
| 11 | PASITALLU | 7 | 17 | 24 | 48 |
| 12 | PASILAMBENA | 6 | 21 | 27 | 36 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 9 | 9 | 18 | 31 |
| 14 | BUKI | 5 | 16 | 21 | 50 |
| | | | | 0 | |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 32 | 160 | 192 | 89 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 15 | 14 | 29 | 19 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 144 | 463 | 607 | 711 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **436.2** | **511.0** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 15**

## JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2022

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | | | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | | | TENAGA GIZI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | BARUGAIA | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | POLEBUNGING | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | LOWA | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | PASITALLU | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 20 | 61 | 81 | 8 | 31 | 39 | 4 | 32 | 36 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **58.2** | | | **28.0** | | | **25.9** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 16**

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | UNIT KERJA | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | | | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA | | | KETERAPIAN FISIK | | | KETEKNISIAN MEDIS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PARANGIA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOWA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | PASITALLU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | PASILAMBENA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 3 | 21 | 24 | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 4 | 12 | 16 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | | | | 0 | 2 | 2 | | | | | | 0 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | | | | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 10 | 41 | 51 | 5 | 7 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 21 | 27 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **36.7** | | | **8.6** | | | **5.0** | | | **19.4** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 17**

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KEFARMASIAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | | | APOTEKER | | | TOTAL | | |
| | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | BONTOMATENE | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | PASITALLU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | BUKI | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 0 | 13 | 13 | 0 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 3 | 33 | 36 | 5 | 33 | 38 | 8 | 66 | 74 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **25.9** | | | **27.3** | | | **53.2** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 18**

**JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | UNIT KERJA | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN | | | | | | | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEJABAT STRUKTURAL | | | TENAGA PENDIDIK | | | TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | |
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 8 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 15 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 15 |
| 11 | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 14 | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. HAYYUNG | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 85 | 105 | 190 | 92 | 112 | 204 |
| 2 | RS PRATAMA JAMPEA | | | | | | | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT | | | | | | | | | | | | | |
| DINAS KESEHATAN KAB/KOTA | | 8 | 12 | 20 | | | | 23 | 35 | 58 | 31 | 47 | 78 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | **15** | **19** | **34** | **0** | **0** | **0** | **211** | **213** | **424** | **226** | **232** | **458** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Keterangan : - Pada penghitungan jumlah di tingkat kabupaten/kota, tenaga yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 19**

**CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS KEPESERTAAN**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | JENIS KEPESERTAAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |
|---|---|---|---|
| | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)** | | | |
| 1 | PBI APBN | 64,927 | 46.7% |
| 2 | PBI APBD | 49,150 | 35.3% |
| SUB JUMLAH PBI | | 114,077 | 82% |
| **NON PBI** | | | |
| 1 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 21,561 | 15.5% |
| 2 | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 1,907 | 1.4% |
| 3 | Bukan Pekerja (BP) | 2,452 | 1.8% |
| SUB JUMLAH NON PBI | | 25,920 | 18.6% |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | 139,997 | 100% |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 20**

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | SUMBER BIAYA | ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | **ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:** | | |
| 1 | APBD KAB/KOTA | Rp252,073,959,116.00 | 98.85 |
| | a. Belanja Langsung | Rp116,730,914,242.00 | |
| | b. Belanja Tidak Langsung | Rp34,475,365,000.00 | |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | Rp100,867,679,874.00 | |
| | - DAK fisik | Rp83,788,616,874.00 | |
| | 1. Reguler | | |
| | 2. Penugasan | | |
| | 3. Afirmasi | | |
| | - DAK non fisik | Rp17,079,063,000.00 | |
| | 1. BOK | | |
| | 2. Akreditasi | | |
| | 3. Jampersal | Rp115,272,000.00 | |
| 2 | APBD PROVINSI | Rp2,940,000,000.00 | 1.15 |
| | a. Belanja Langsung | | |
| | b. Belanja Tidak Langsung | | |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK | | |
| 3 | APBN : | Rp0.00 | 0.00 |
| | a. Dana Dekonsentrasi | | |
| | b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi | | |
| 4 | PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) | | 0.00 |
| | (sebutkan *project* dan sumber dananya) | | |
| 5 | SUMBER PEMERINTAH LAIN* | | 0.00 |
| TOTAL ANGGARAN KESEHATAN | | Rp255,013,959,116.00 | |
| TOTAL APBD KAB/KOTA | | Rp1,006,951,205,926.00 | |
| **% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA** | | | **25.3** |
| **ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA** | | **Rp220.538.594.116** | |

Sumber: Subbag Program Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 21**

**JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAKI-LAKI | | | PEREMPUAN | | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | |
| | | | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 3 | 253 | 205 | 3 | 208 | 455 | 6 | 461 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 74 | 2 | 76 | 68 | 4 | 72 | 142 | 6 | 148 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | 60 | 0 | 60 |
| | | PARANGIA | 41 | 0 | 41 | 22 | 0 | 22 | 63 | 0 | 63 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 0 | 53 | 46 | 1 | 47 | 99 | 1 | 100 |
| | | POLEBUNGING | 28 | 0 | 28 | 27 | 0 | 27 | 55 | 0 | 55 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 47 | 0 | 47 | 27 | 1 | 28 | 74 | 1 | 75 |
| | | LOWA | 49 | 0 | 49 | 33 | 0 | 33 | 82 | 0 | 82 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE | 51 | 0 | 51 | 68 | 1 | 69 | 119 | 1 | 120 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 107 | 1 | 108 | 103 | 1 | 104 | 210 | 2 | 212 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 173 | 4 | 177 | 117 | 1 | 118 | 290 | 5 | 295 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 77 | 4 | 81 | 65 | 1 | 66 | 142 | 5 | 147 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 59 | 2 | 61 | 47 | 1 | 48 | 106 | 3 | 109 |
| 11 | BUKI | BUKI | 40 | 0 | 40 | 43 | 0 | 43 | 83 | 0 | 83 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,078** | **16** | **1,094** | **902** | **14** | **916** | **1,980** | **30** | **2,010** |
| **NGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN** | | | | **14.6** | | | **15.3** | | | **14.9** | |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

**TABEL 22**

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | KEMATIAN IBU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL | JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN | JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS | JUMLAH KEMATIAN IBU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 142 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | POLEBUNGING | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LOWA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 142 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,980** | **1** | **0** | **2** | **3** |
| **ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)** | | | | | | | **151.52** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas
- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

**TABEL 23**

**JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN IBU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERDARAHAN | GANGGUAN HIPERTENSI | INFEKSI | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | GANGGUAN AUTOIMUN** | GANGGUAN CEREBROVASKULAR*** | COVID-19 | KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | LAIN-LAIN | JUMLAH KEMATIAN IBU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **3** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

* penyakit jantung kongenital, PPCM (Peripartum cardiomyopathy), aneurisma aorta, dll

** SLE (Systemic lupus erthematosus), dll

*** stroke, aneurisma otak, dll

**TABEL 24**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | IBU HAMIL | | | | | | | IBU BERSALIN/NIFAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | K1 | | K4 | | K6 | | JUMLAH | PERSALINAN DI FASYANKES | | KF1 | | KF LENGKAP | | IBU NIFAS MENDAPAT VIT A | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 517 | 394 | 76.2 | 424 | 82.0 | 460.0 | 89.0 | 494 | 460 | 93.1 | 460 | 93.1 | 460 | 93.1 | 460 | 93.1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 216 | 151 | 69.9 | 116 | 53.7 | 50.0 | 23.1 | 206 | 143 | 69.4 | 147 | 71.4 | 149 | 72.3 | 112 | 54.4 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 140 | 73 | 52.1 | 60 | 42.9 | 59.0 | 42.1 | 132 | 59 | 44.7 | 59 | 44.7 | 59 | 44.7 | 59 | 44.7 |
| | | PARANGIA | 112 | 66 | 58.9 | 68 | 60.7 | 65.0 | 58.0 | 106 | 63 | 59.4 | 63 | 59.4 | 63 | 59.4 | 63 | 59.4 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 152 | 112 | 73.7 | 79 | 52.0 | 78.0 | 51.3 | 146 | 99 | 67.8 | 99 | 67.8 | 83 | 56.8 | 99 | 67.8 |
| | | POLEBUNGING | 97 | 53 | 54.6 | 43 | 44.3 | 43.0 | 44.3 | 93 | 55 | 59.1 | 55 | 59.1 | 50 | 53.8 | 55 | 59.1 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 141 | 93 | 66.0 | 80 | 56.7 | 68.0 | 48.2 | 135 | 75 | 55.6 | 75 | 55.6 | 75 | 55.6 | 75 | 55.6 |
| | | LOWA | 151 | 122 | 80.8 | 85 | 56.3 | 87.0 | 57.6 | 143 | 82 | 57.3 | 82 | 57.3 | 77 | 53.8 | 75 | 52.4 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 165 | 122 | 73.9 | 116 | 70.3 | 66.0 | 40.0 | 158 | 103 | 65.2 | 112 | 70.9 | 119 | 75.3 | 118 | 74.7 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 204 | 200 | 98.0 | 121 | 59.3 | 122.0 | 59.8 | 195 | 202 | 103.6 | 211 | 108.2 | 211 | 108.2 | 208 | 106.7 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 269 | 269 | 100.0 | 268 | 99.6 | 184.0 | 68.4 | 259 | 218 | 84.2 | 290 | 112.0 | 238 | 91.9 | 290 | 112.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 155 | 155 | 100.0 | 127 | 81.9 | 118.0 | 76.1 | 149 | 125 | 83.9 | 145 | 97.3 | 140 | 94.0 | 142 | 95.3 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 152 | 125 | 82.2 | 69 | 45.4 | 18.0 | 11.8 | 144 | 108 | 75.0 | 108 | 75.0 | 108 | 75.0 | 108 | 75.0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 120 | 85 | 70.8 | 80 | 66.7 | 39.0 | 32.5 | 113 | 81 | 71.7 | 83 | 73.5 | 82 | 72.6 | 83 | 73.5 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,591** | **2,020** | **78.0** | **1,736** | **67.0** | **1,457** | **56.2** | **2,473** | **1,873** | **75.7** | **1,989** | **80.4** | **1,914** | **77.4** | **1,947** | **78.7** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 25**

**CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | | Td2+ | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 517 | 56 | 10.8 | 81 | 15.7 | 45 | 8.7 | 24 | 4.6 | 8 | 1.5 | 158 | 30.6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 194 | 128 | 66.0 | 91 | 46.9 | 13 | 6.7 | 9 | 4.6 | 15 | 7.7 | 128 | 66.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 128 | 16 | 12.5 | 6 | 4.7 | 4 | 3.1 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 | 12 | 9.4 |
| | | PARANGIA | 106 | 9 | 8.5 | 22 | 20.8 | 15 | 14.2 | 13 | 12.3 | 3 | 2.8 | 53 | 50.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 136 | 10 | 7.4 | 26 | 19.1 | 11 | 8.1 | 4 | 2.9 | 12 | 8.8 | 53 | 39.0 |
| | | POLEBUNGING | 90 | 7 | 7.8 | 5 | 5.6 | 6 | 6.7 | 4 | 4.4 | 3 | 3.3 | 18 | 20.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 133 | 29 | 21.8 | 14 | 10.5 | 7 | 5.3 | 1 | 0.8 | 2 | 1.5 | 24 | 18.0 |
| | | LOWA | 138 | 18 | 13.0 | 22 | 15.9 | 17 | 12.3 | 3 | 2.2 | 8 | 5.8 | 50 | 36.2 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 151 | 23 | 15.2 | 17 | 11.3 | 20 | 13.2 | 7 | 4.6 | 4 | 2.6 | 48 | 31.8 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 165 | 29 | 17.6 | 23 | 13.9 | 38 | 23.0 | 35 | 21.2 | 21 | 12.7 | 117 | 70.9 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 245 | 34 | 13.9 | 36 | 14.7 | 12 | 4.9 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 54 | 22.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 138 | 73 | 52.9 | 36 | 26.1 | 6 | 4.3 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 43 | 31.2 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 133 | 48 | 36.1 | 18 | 13.5 | 3 | 2.3 | 2 | 1.5 | 0 | 0.0 | 23 | 17.3 |
| 11 | BUKI | BUKI | 113 | 11 | 9.7 | 27 | 23.9 | 15 | 13.3 | 12 | 10.6 | 2 | 1.8 | 56 | 49.6 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,387** | **491** | **20.6** | **424** | **17.8** | **212** | **8.9** | **120** | **5.0** | **81** | **3.4** | **837** | **35.1** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 26**

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN) | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4,584 | 69 | 1.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1,802 | 91 | 5.0 | 11 | 0.6 | 6 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1,213 | 67 | 5.5 | 16 | 1.3 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 3 | 0.2 |
| | | PARANGIA | 1,006 | 31 | 3.1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1,301 | 8 | 0.6 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | POLEBUNGING | 859 | 18 | 2.1 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1,260 | 27 | 2.1 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | LOWA | 1,293 | 11 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,394 | 40 | 2.9 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1,573 | 19 | 1.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2,262 | 6 | 0.3 | 3 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1,255 | 8 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 1,277 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 1,085 | 14 | 1.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **22,164** | **409** | **1.8** | **57** | **0.3** | **17** | **0.1** | **17** | **0.1** | **11** | **0.0** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 27**

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) | IMUNISASI Td PADA WUS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5,101 | 125 | 2.5 | 81 | 1.6 | 45 | 0.9 | 24 | 0.5 | 8 | 0.2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1,996 | 219 | 11.0 | 102 | 5.1 | 19 | 1.0 | 12 | 0.6 | 18 | 0.9 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1,341 | 83 | 6.2 | 22 | 1.6 | 10 | 0.7 | 8 | 0.6 | 3 | 0.2 |
| | | PARANGIA | 1,112 | 40 | 3.6 | 26 | 2.3 | 16 | 1.4 | 15 | 1.3 | 3 | 0.3 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1,437 | 18 | 1.3 | 31 | 2.2 | 11 | 0.8 | 4 | 0.3 | 12 | 0.8 |
| | | POLEBUNGING | 949 | 25 | 2.6 | 8 | 0.8 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1,393 | 56 | 4.0 | 20 | 1.4 | 7 | 0.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 |
| | | LOWA | 1,431 | 29 | 2.0 | 22 | 1.5 | 17 | 1.2 | 3 | 0.2 | 8 | 0.6 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,545 | 63 | 4.1 | 24 | 1.6 | 21 | 1.4 | 7 | 0.5 | 4 | 0.3 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1,738 | 48 | 2.8 | 23 | 1.3 | 38 | 2.2 | 35 | 2.0 | 21 | 1.2 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2,507 | 40 | 1.6 | 39 | 1.6 | 13 | 0.5 | 6 | 0.2 | 5 | 0.2 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1,393 | 81 | 5.8 | 36 | 2.6 | 8 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | 0.1 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 1,410 | 48 | 3.4 | 18 | 1.3 | 3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 1,198 | 25 | 2.1 | 29 | 2.4 | 15 | 1.3 | 12 | 1.0 | 2 | 0.2 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **24,551** | **900** | **3.7** | **481** | **2.0** | **229** | **0.9** | **137** | **0.6** | **92** | **0.4** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 28**

**JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | TTD (90 TABLET) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN | % | IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 517 | 424 | 82.0 | 424 | 82.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 216 | 116 | 53.7 | 116 | 53.7 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 140 | 60 | 42.9 | 60 | 42.9 |
| | | PARANGIA | 112 | 68 | 60.7 | 68 | 60.7 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 152 | 79 | 52.0 | 79 | 52.0 |
| | | POLEBUNGING | 97 | 43 | 44.3 | 43 | 44.3 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 141 | 80 | 56.7 | 80 | 56.7 |
| | | LOWA | 151 | 85 | 56.3 | 85 | 56.3 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 165 | 116 | 70.3 | 116 | 70.3 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 204 | 121 | 59.3 | 121 | 59.3 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 269 | 268 | 99.6 | 268 | 99.6 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 155 | 127 | 81.9 | 127 | 81.9 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 152 | 69 | 45.4 | 69 | 45.4 |
| 11 | BUKI | BUKI | 120 | 80 | 66.7 | 80 | 66.7 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,591** | **1,736** | **67.0** | **1,736** | **67.0** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

## TABEL 29

# PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PUS | PESERTA KB AKTIF METODE MODERN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KONDOM | % | SUNTIK | % | PIL | % | AKDR | % | MOP | % | MOW | % | IMPLAN | % | MAL | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4,884 | 135 | 3.6 | 2,307 | 62.0 | 449 | 12.1 | 334 | 9.0 | 4 | 0.1 | 98 | 2.6 | 389 | 10.5 | 21 | 0.6 | 3,720 | 76.2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2,042 | 16 | 1.2 | 928 | 68.3 | 89 | 6.6 | 63 | 4.6 | 3 | 0.2 | 61 | 4.5 | 195 | 14.4 | 0 | 0.0 | 1,358 | 66.5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1,316 | 29 | 3.2 | 564 | 61.6 | 112 | 12.2 | 18 | 2.0 | 1 | 0.1 | 5 | 0.5 | 185 | 20.2 | 0 | 0.0 | 915 | 69.5 |
| | | PARANGIA | 1,054 | 73 | 8.7 | 422 | 50.1 | 118 | 14.0 | 28 | 3.3 | 0 | 0.0 | 18 | 2.1 | 184 | 21.8 | 0 | 0.0 | 843 | 80.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1,441 | 37 | 3.3 | 722 | 64.8 | 213 | 19.1 | 47 | 4.2 | 0 | 0.0 | 12 | 1.1 | 83 | 7.5 | 0 | 0.0 | 1,114 | 77.3 |
| | | POLEBUNGING | 923 | 43 | 6.5 | 408 | 61.8 | 128 | 19.4 | 31 | 4.7 | 0 | 0.0 | 7 | 1.1 | 43 | 6.5 | 0 | 0.0 | 660 | 71.5 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1,339 | 67 | 6.9 | 439 | 45.4 | 131 | 13.5 | 21 | 2.2 | 0 | 0.0 | 26 | 2.7 | 283 | 29.3 | 0 | 0.0 | 967 | 72.2 |
| | | LOWA | 1,421 | 62 | 5.7 | 595 | 55.0 | 232 | 21.5 | 14 | 1.3 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 171 | 15.8 | 0 | 0.0 | 1,081 | 76.1 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,553 | 3 | 0.3 | 510 | 46.9 | 222 | 20.4 | 9 | 0.8 | 0 | 0.0 | 7 | 0.6 | 336 | 30.9 | 0 | 0.0 | 1,087 | 70.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1,930 | 1 | 0.1 | 881 | 64.4 | 127 | 9.3 | 29 | 2.1 | 0 | 0.0 | 10 | 0.7 | 320 | 23.4 | 0 | 0.0 | 1,368 | 70.9 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2,568 | 5 | 0.3 | 1,160 | 62.5 | 430 | 23.2 | 22 | 1.2 | 0 | 0.0 | 23 | 1.2 | 215 | 11.6 | 0 | 0.0 | 1,855 | 72.2 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1,469 | 3 | 0.3 | 753 | 77.3 | 81 | 8.3 | 7 | 0.7 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 125 | 12.8 | 0 | 0.0 | 974 | 66.3 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 1,432 | 5 | 0.4 | 841 | 72.2 | 69 | 5.9 | 14 | 1.2 | 1 | 0.1 | 12 | 1.0 | 222 | 19.1 | 0 | 0.0 | 1,165 | 81.4 |
| 11 | BUKI | BUKI | 1,129 | 44 | 5.2 | 437 | 52.1 | 201 | 24.0 | 29 | 3.5 | 0 | 0.0 | 15 | 1.8 | 113 | 13.5 | 0 | 0.0 | 839 | 74.3 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **24,501** | **523** | **2.9** | **10,967** | **61.1** | **2,602** | **14.5** | **666** | **3.7** | **9** | **0.1** | **306** | **1.7** | **2,864** | **16.0** | **21** | **0.1** | **17,937** | **73.2** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amenore Laktasi

**TABEL 29**

## PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| EFEK SAMPING BER-KB | % | KOMPLIKASI BER-KB | % | KEGAGALAN BER-KB | % | DROP OUT BER-KB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 302 | 8.1 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 150 | 11.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.2 | 103 | 11.3 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 76 | 6.8 |
| 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 72 | 10.9 |
| 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.7 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 10.2 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 22 | 1.6 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 270 | 14.6 |
| 10 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 95 | 9.8 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 46 | 3.9 |
| 29 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 119 | 14.2 |
| **42** | **0.2** | **1** | **0.0** | **2** | **0.0** | **1,378** | **7.7** |

**TABEL 30**

**PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF**
**MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PUS | PUS 4T | % | PUS 4T PADA KB AKTIF | % | PUS ALKI | % | PUS ALKI PADA KB AKTIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4,884 | 950 | 19.5 | 567 | 59.7 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2,042 | 408 | 20.0 | 158 | 38.7 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1,316 | 151 | 11.5 | 44 | 29.1 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| | | PARANGIA | 1,054 | 211 | 20.0 | 46 | 21.8 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1,441 | 229 | 15.9 | 125 | 54.6 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| | | POLEBUNGING | 923 | 185 | 20.0 | 119 | 64.3 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1,339 | 268 | 20.0 | 67 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| | | LOWA | 1,421 | 284 | 20.0 | 17 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,553 | 311 | 20.0 | 154 | 49.5 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1,930 | 386 | 20.0 | 54 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2,568 | 514 | 20.0 | 86 | 16.7 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1,469 | 294 | 20.0 | 139 | 47.3 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 1,432 | 541 | 37.8 | 137 | 25.3 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| 11 | BUKI | BUKI | 1,129 | 343 | 30.4 | 313 | 91.3 | 0 | 0.0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **24,501** | **5,075** | 20.7 | **2,026** | 39.9 | **0** | 0.0 | **0** | #DIV/0! |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan :

ALKI : Anemia, LiLA<23,5, Penyakit Kronis, dan IMS

4 Terlalu (4T), yaitu : 1) berusia kurang dari 20 tahun; 2) berusia lebih dari 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang;anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun, atau 4) jarak kelahiran antara satu

**TABEL 31**

**CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU BERSALIN | PESERTA KB PASCA PERSALINAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KONDOM | % | SUNTIK | % | PIL | % | AKDR | % | MOP | % | MOW | % | IMPLAN | % | MAL | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 494 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 55 | 56.7 | 0 | 0.0 | 20 | 20.6 | 1 | 1.0 | 21 | 21.6 | 97 | 19.6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 206 | 0 | 0.0 | 16 | 30.8 | 0 | 0.0 | 4 | 7.7 | 0 | 0.0 | 5 | 9.6 | 27 | 51.9 | 0 | 0.0 | 52 | 25.2 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 132 | 0 | 0.0 | 10 | 40.0 | 0 | 0.0 | 2 | 8.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 12 | 48.0 | 0 | 0.0 | 25 | 18.9 |
| | | PARANGIA | 106 | 0 | 0.0 | 7 | 30.4 | 5 | 21.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 47.8 | 0 | 0.0 | 23 | 21.7 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 146 | 0 | 0.0 | 6 | 46.2 | 1 | 7.7 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 | 4 | 30.8 | 0 | 0.0 | 13 | 8.9 |
| | | POLEBUNGING | 93 | 1 | 10.0 | 3 | 30.0 | 2 | 20.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 2 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 10.8 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 135 | 0 | 0.0 | 11 | 28.2 | 5 | 12.8 | 4 | 10.3 | 0 | 0.0 | 2 | 5.1 | 17 | 43.6 | 0 | 0.0 | 39 | 28.9 |
| | | LOWA | 143 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 158 | 0 | 0.0 | 20 | 58.8 | 4 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 29.4 | 0 | 0.0 | 34 | 21.5 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 195 | 0 | 0.0 | 48 | 64.0 | 2 | 2.7 | 10 | 13.3 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3 | 14 | 18.7 | 0 | 0.0 | 75 | 38.5 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 259 | 0 | 0.0 | 47 | 66.2 | 3 | 4.2 | 2 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 26.8 | 0 | 0.0 | 71 | 27.4 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 149 | 0 | 0.0 | 45 | 81.8 | 0 | 0.0 | 1 | 1.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 16.4 | 0 | 0.0 | 55 | 36.9 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 144 | 0 | 0.0 | 106 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 106 | 73.6 |
| 11 | BUKI | BUKI | 113 | 0 | 0.0 | 4 | 23.5 | 1 | 5.9 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 | 4 | 23.5 | 7 | 41.2 | 0 | 0.0 | 17 | 15.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,473** | **1** | **0.2** | **323** | **54.2** | **23** | **3.9** | **82** | **13.8** | **0** | **0.0** | **36** | **6.0** | **131** | **22.0** | **21** | **3.5** | **596** | **24.1** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 32

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN | BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI | | JUMLAH KOMPLIKASI KEBIDANAN | | | | | | | | | | | JUMLAH KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN | JUMLAH KOMPLIKASI DALAM PERSALINAN | JUMLAH KOMPLIKASI PASCA PERSALINAN (NIFAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | KURANG ENERGI KRONIS (KEK) | ANEMIA | PERDARAHAN | TUBERKULOSIS | MALARIA | INFEKSI LAINNYA | PREKLAMPSIA/ EKLAMSIA | DIABETES MELITUS | JANTUNG | COVID-19 | PENYEBAB LAINNYA | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 517 | 103 | 103 | 100 | 77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 216 | 43 | 42 | 97 | 16 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 140 | 28 | 22 | 79 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 112 | 22 | 19 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 152 | 30 | 6 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | POLEBUNGING | 97 | 19 | 15 | 77 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 141 | 28 | 7 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LOWA | 151 | 30 | 37 | 123 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE/ | 165 | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 204 | 41 | 27 | 66 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 269 | 54 | 20 | 37 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 155 | 31 | 19 | 61 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 152 | 30 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 120 | 24 | 11 | 46 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,591** | **518** | **334** | **834** | **181** | **82** | **6** | **5** | **0** | **1** | **14** | **3** | **0** | **4** | **36** | **0** | **0** | **0** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 33**

**JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL**
**MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI | | | JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | BBLR | | ASFIKSIA | | INFEKSI | | TETANUS NEONATORUM | | KELAINAN KONGENITAL | | COVID-19 | | LAIN-LAIN | | TOTAL | |
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 205 | 455 | 38 | 31 | 68 | 23 | 33.7 | 3 | 4.4 | 38 | 55.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 64 | 93.8 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 74 | 68 | 142 | 11 | 10 | 21 | 13 | 61.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 61.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 29 | 31 | 60 | 4 | 5 | 9 | 4 | 44.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 44.4 |
| | | PARANGIA | 41 | 22 | 63 | 6 | 3 | 9 | 2 | 21.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 21.2 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 46 | 99 | 8 | 7 | 15 | 1 | 6.7 | 2 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 20.2 |
| | | POLEBUNGING | 28 | 27 | 55 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 47 | 27 | 74 | 7 | 4 | 11 | 6 | 54.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 54.1 |
| | | LOWA | 49 | 33 | 82 | 7 | 5 | 12 | 4 | 32.5 | 2 | 16.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 48.8 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE | 51 | 68 | 119 | 8 | 10 | 18 | 4 | 22.4 | 4 | 22.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 44.8 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 107 | 103 | 210 | 16 | 15 | 32 | 7 | 22.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 22.2 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 173 | 117 | 290 | 26 | 18 | 44 | 26 | 59.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 26 | 59.8 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 77 | 65 | 142 | 12 | 10 | 21 | 3 | 14.1 | 1 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 23.5 |
| 10 | PASIMASUNGGU | UJUNG JAMPEA | 59 | 47 | 106 | 9 | 7 | 16 | 3 | 18.9 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 25.2 |
| 11 | BUKI | BUKI | 40 | 43 | 83 | 6 | 6 | 12 | 2 | 16.1 | 2 | 16.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 32.1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,078** | **902** | **1,980** | **162** | **135** | **297** | **98** | **33.0** | **15** | **5.1** | **38** | **12.8** | **0** | **0.0** | **1** | **0.3** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **152** | **51.2** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 34**

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, POST NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KEMATIAN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAKI - LAKI | | | | | PEREMPUAN | | | | | LAKI - LAKI + PEREMPUAN | | | | |
| | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | |
| | | | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | LOWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | | 7 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 12 | 1 | 13 |
| **ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)** | | | **6.5** | | **7.4** | **0.9** | **8.3** | **3.3** | | **4.4** | **0.0** | **4.4** | **5.1** | | **6.1** | **0.5** | **6.6** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

**TABEL 35**

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) | | | | | | | | PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BBLR DAN PREMATURITAS | ASFIKSIA | TETANUS NEONATORUM | INFEKSI | KELAINAN KONGENITAL | COVID-19 | KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRATORI | LAIN-LAIN | KONDISI PERINATAL | PNEUMONIA | DIARE | KELAINAN KONGENITAL JANTUNG | KELAINAN KONGENITAL LANNYA | MENINGITIS | PENYAKIT SARAF | DEMAM BERDARAH | LAIN-LAIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **5** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 36**

**JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PNEUMONIA | KELAINAN KONGENITAL | PENYAKIT SARAF | DEMAM BERDARAH | KELAINAN KONGENITAL JANTUNG | KECELAKAAN LALU LINTAS | KELAINAN KONGENITAL LAINNYA | TENGGELAM | INFEKSI PARASIT | LAIN-LAIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 37

**BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | BAYI BARU LAHIR DITIMBANG | | | | | | BAYI BBLR | | | | | | PREMATUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 205 | 455 | 250 | 100 | 205 | 100 | 455 | 100 | 10 | 4.0 | 16 | 7.8 | 26 | 5.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 74 | 68 | 142 | 74 | 100 | 68 | 100 | 142 | 100 | 8 | 10.8 | 5 | 7.4 | 13 | 9.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 29 | 31 | 60 | 29 | 100 | 31 | 100 | 60 | 100 | 1 | 3.4 | 3 | 9.7 | 4 | 6.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | PARANGIA | 41 | 22 | 63 | 41 | 100 | 22 | 100 | 63 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 9.1 | 2 | 3.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 46 | 99 | 53 | 100 | 46 | 100 | 99 | 100 | 1 | 1.9 | 4 | 8.7 | 5 | 5.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | POLEBUNGING | 28 | 27 | 55 | 28 | 100 | 27 | 100 | 55 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 47 | 27 | 74 | 47 | 100 | 27 | 100 | 74 | 100 | 2 | 4.3 | 4 | 14.8 | 6 | 8.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | LOWA | 49 | 33 | 82 | 49 | 100 | 33 | 100 | 82 | 100 | 3 | 6.1 | 2 | 6.1 | 5 | 6.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 51 | 68 | 119 | 51 | 100 | 68 | 100 | 119 | 100 | 2 | 3.9 | 4 | 5.9 | 6 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 107 | 103 | 210 | 107 | 100 | 103 | 100 | 210 | 100 | 8 | 7.5 | 3 | 2.9 | 11 | 5.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 173 | 117 | 290 | 173 | 100 | 117 | 100 | 290 | 100 | 17 | 9.8 | 11 | 9.4 | 28 | 9.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 77 | 65 | 142 | 77 | 100 | 65 | 100 | 142 | 100 | 4 | 5.2 | 0 | 0.0 | 4 | 2.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 59 | 47 | 106 | 59 | 100 | 47 | 100 | 106 | 100 | 3 | 5.1 | 5 | 10.6 | 8 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 40 | 43 | 83 | 40 | 100 | 43 | 100 | 83 | 100 | 1 | 2.5 | 3 | 7.0 | 4 | 4.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,078** | **902** | **1,980** | **1,078** | **100** | **902** | **100** | **1,980** | **100** | **60** | **5.6** | **62** | **6.9** | **122** | **6.2** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 38**

**CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) | | | | | | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) | | | | | | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 205 | 455 | 250 | 100.0 | 205 | 100.0 | 455 | 100.0 | 249 | 99.6 | 205 | 100.0 | 454 | 99.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 74 | 68 | 142 | 73 | 98.6 | 68 | 100.0 | 141 | 99.3 | 70 | 94.6 | 68 | 100.0 | 138 | 97.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 29 | 31 | 60 | 29 | 100.0 | 31 | 100.0 | 60 | 100.0 | 29 | 100.0 | 31 | 100.0 | 60 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | PARANGIA | 41 | 22 | 63 | 41 | 100.0 | 22 | 100.0 | 63 | 100.0 | 41 | 100.0 | 22 | 100.0 | 63 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 46 | 99 | 53 | 100.0 | 46 | 100.0 | 99 | 100.0 | 43 | 81.1 | 32 | 69.6 | 75 | 75.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | POLEBUNGING | 28 | 27 | 55 | 28 | 100.0 | 27 | 100.0 | 55 | 100.0 | 28 | 100.0 | 26 | 96.3 | 54 | 98.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 47 | 27 | 74 | 47 | 100.0 | 27 | 100.0 | 74 | 100.0 | 47 | 100.0 | 24 | 88.9 | 71 | 95.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | | LOWA | 49 | 33 | 82 | 49 | 100.0 | 33 | 100.0 | 82 | 100.0 | 48 | 98.0 | 33 | 100.0 | 81 | 98.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 51 | 68 | 119 | 51 | 100.0 | 68 | 100.0 | 119 | 100.0 | 51 | 100.0 | 65 | 95.6 | 116 | 97.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 107 | 103 | 210 | 107 | 100.0 | 103 | 100.0 | 210 | 100.0 | 96 | 89.7 | 99 | 96.1 | 195 | 92.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 173 | 117 | 290 | 173 | 100.0 | 117 | 100.0 | 290 | 100.0 | 157 | 90.8 | 100 | 85.5 | 257 | 88.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 77 | 65 | 142 | 28 | 36.4 | 20 | 30.8 | 141 | 99.3 | 77 | 100.0 | 64 | 98.5 | 141 | 99.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 59 | 47 | 106 | 59 | 100.0 | 47 | 100.0 | 106 | 100.0 | 59 | 100.0 | 46 | 97.9 | 105 | 99.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 40 | 43 | 83 | 40 | 100.0 | 43 | 100.0 | 83 | 100.0 | 36 | 90.0 | 41 | 95.3 | 77 | 92.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,078** | **902** | **1,980** | **1,028** | **95.4** | **857** | **95.0** | **1,978** | **99.9** | **1,031** | **95.6** | **856** | **94.9** | **1,887** | **95.3** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 39**

**BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BAYI BARU LAHIR | | | BAYI USIA < 6 BULAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | MENDAPAT IMD | | JUMLAH | DIBERI ASI EKSKLUSIF | |
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 29 | 29 | 100,0 | 203 | 183 | 90,1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 6 | 100,0 | 72 | 3 | 4,2 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 6 | 6 | 100,0 | 21 | 4 | 19,0 |
| | | PARANGIA | 1 | 1 | 100,0 | 36 | 0 | 0,0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 7 | 7 | 100,0 | 43 | 43 | 100,0 |
| | | POLEBUNGING | 3 | 2 | 66,7 | 25 | 7 | 28,0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 9 | 4 | 44,4 | 36 | 4 | 11,1 |
| | | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 0 | 0,0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 3 | 3 | 100,0 | 49 | 47 | 95,9 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 18 | 18 | 100,0 | 54 | 50 | 92,6 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 27 | 27 | 100,0 | 79 | 12 | 15,2 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 28 | 28 | 100,0 | 21 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 5 | 5 | 100,0 | 46 | 0 | 0,0 |
| 11 | BUKI | BUKI | 5 | 5 | 100,0 | 35 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **147** | **141** | **95,9** | **736** | **353** | **48,0** |

Sumber: Seksi Pelayanan KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

**TABEL 40**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI | | | PELAYANAN KESEHATAN BAYI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 226 | 244 | 470 | 226 | 100.0 | 244 | 100.0 | 470 | 100.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 98 | 95 | 193 | 98 | 100.0 | 95 | 100.0 | 193 | 100.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 60 | 66 | 126 | 50 | 83.3 | 30 | 45.5 | 80 | 63.5 |
| | | PARANGIA | 48 | 53 | 101 | 44 | 91.7 | 32 | 60.4 | 76 | 75.2 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 69 | 70 | 139 | 69 | 100.0 | 70 | 100.0 | 139 | 100.0 |
| | | POLEBUNGING | 43 | 46 | 89 | 43 | 100.0 | 46 | 100.0 | 89 | 100.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 62 | 69 | 131 | 62 | 100.0 | 43 | 62.3 | 105 | 80.2 |
| | | LOWA | 67 | 70 | 137 | 51 | 76.1 | 53 | 75.7 | 104 | 75.9 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 72 | 77 | 149 | 72 | 100.0 | 65 | 84.4 | 137 | 91.9 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 84 | 101 | 185 | 84 | 100.0 | 99 | 98.0 | 183 | 98.9 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 125 | 122 | 247 | 125 | 100.0 | 122 | 100.0 | 247 | 100.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 69 | 73 | 142 | 41 | 59.4 | 37 | 50.7 | 78 | 54.9 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 68 | 68 | 136 | 63 | 92.6 | 64 | 94.1 | 127 | 93.4 |
| 11 | BUKI | BUKI | 55 | 55 | 110 | 55 | 100.0 | 55 | 100.0 | 110 | 100.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,146** | **1,209** | **2,355** | **1,083** | **94.5** | **1,055** | **87** | **2,138** | **90.8** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 41**

**CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (*UCI*) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | DESA/KELURAHAN *UCI* | % DESA/KELURAHAN *UCI* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 5 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 6 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 7 | 100 |
| | | PARANGIA | 5 | 5 | 100 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 5 | 100 |
| | | POLEBUNGING | 5 | 5 | 100 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 5 | 100 |
| | | LOWA | 7 | 4 | 57,1 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 7 | 100 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 6 | 75 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 2 | 22,2 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 4 | 66,7 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 6 | 100 |
| 11 | BUKI | BUKI | 7 | 7 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **88** | **74** | **84,1** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 42

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | BAYI DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | HB0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCG | | | | | |
| | | | | | | < 24 Jam | | | | | | 1 - 7 Hari | | | | | | HB0 Total | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L+P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 205 | 455 | 186 | 74.4 | 205 | 100.0 | 391 | 85.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 186 | 74.4 | 205 | 100.0 | 391 | 85.9 | 235 | 94.0 | 196 | 95.6 | 431 | 94.7 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 74 | 68 | 142 | 74 | 100.0 | 68 | 100.0 | 142 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 74 | 100.0 | 68 | 100.0 | 142 | 100.0 | 74 | 100.0 | 68 | 100.0 | 142 | 100.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 29 | 31 | 60 | 18 | 62.1 | 24 | 77.4 | 42 | 70.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 62.1 | 24 | 77.4 | 42 | 70.0 | 24 | 82.8 | 31 | 100.0 | 55 | 91.7 |
| | | PARANGIA | 41 | 22 | 63 | 41 | 100.0 | 22 | 100.0 | 63 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 41 | 100.0 | 22 | 100.0 | 63 | 100.0 | 41 | 100.0 | 22 | 100.0 | 63 | 100.0 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 46 | 99 | 53 | 100.0 | 46 | 100.0 | 99 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 53 | 100.0 | 46 | 100.0 | 99 | 100.0 | 53 | 100.0 | 46 | 100.0 | 99 | 100.0 |
| | | POLEBUNGING | 28 | 27 | 55 | 25 | 89.3 | 24 | 88.9 | 49 | 89.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 89.3 | 24 | 88.9 | 49 | 89.1 | 23 | 82.1 | 24 | 88.9 | 47 | 85.5 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 47 | 27 | 74 | 43 | 91.5 | 27 | 100.0 | 70 | 94.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 91.5 | 27 | 100.0 | 70 | 94.6 | 52 | 110.6 | 27 | 100.0 | 79 | 106.8 |
| | | LOWA | 49 | 33 | 82 | 43 | 87.8 | 33 | 100.0 | 76 | 92.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 43 | 87.8 | 33 | 100.0 | 76 | 92.7 | 54 | 110.2 | 33 | 100.0 | 87 | 106.1 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 51 | 68 | 119 | 51 | 100.0 | 67 | 98.5 | 118 | 99.2 | 0 | 0.0 | 1 | 1.5 | 1 | 0.8 | 51 | 100.0 | 68 | 100.0 | 119 | 100.0 | 51 | 100.0 | 68 | 100.0 | 119 | 100.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 107 | 103 | 210 | 107 | 100.0 | 95 | 92.2 | 202 | 96.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 107 | 100.0 | 95 | 92.2 | 202 | 96.2 | 100 | 93.5 | 80 | 77.7 | 180 | 85.7 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 173 | 117 | 290 | 85 | 49.1 | 44 | 37.6 | 129 | 44.5 | 75 | 43.4 | 52 | 44.4 | 127 | 43.8 | 160 | 92.5 | 96 | 82.1 | 256 | 88.3 | 173 | 100.0 | 117 | 100.0 | 290 | 100.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 77 | 65 | 142 | 28 | 36.4 | 20 | 30.8 | 48 | 33.8 | 14 | 18.2 | 20 | 30.8 | 34 | 23.9 | 42 | 54.5 | 40 | 61.5 | 82 | 57.7 | 28 | 36.4 | 20 | 30.8 | 48 | 33.8 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 59 | 47 | 106 | 50 | 84.7 | 36 | 76.6 | 86 | 81.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 50 | 84.7 | 36 | 76.6 | 86 | 81.1 | 65 | 110.2 | 45 | 95.7 | 110 | 103.8 |
| 11 | BUKI | BUKI | 40 | 43 | 83 | 32 | 80.0 | 40 | 93.0 | 72 | 86.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 32 | 80.0 | 40 | 93.0 | 72 | 86.7 | 40 | 100.0 | 38 | 88.4 | 78 | 94.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,078** | **902** | **1,980** | **836** | **77.6** | **751** | **83.3** | **1,587** | **80.2** | **89** | **8.3** | **73** | **8.1** | **162** | **8.2** | **925** | **85.8** | **824** | **91.4** | **1,749** | **88.3** | **1,013** | **94.0** | **815** | **90.4** | **1,828** | **92.3** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 43

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS

KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI (SURVIVING INFANT) | | | BAYI DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DPT-HB-Hib3 | | | | | | POLIO 4* | | | | | | CAMPAK RUBELA | | | | | | IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | | | |
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L+P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 226 | 244 | 470 | 282 | 124.8 | 224 | 91.8 | 506 | 107.7 | 261 | 115.5 | 221 | 90.6 | 482 | 102.6 | 275 | 121.7 | 284 | 116.4 | 559 | 118.9 | 275 | 121.7 | 284 | 116.4 | 559 | 118.9 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 98 | 95 | 193 | 72 | 73.5 | 90 | 94.7 | 162 | 83.9 | 71 | 72.4 | 92 | 96.8 | 163 | 84.5 | 70 | 71.4 | 91 | 95.8 | 161 | 83.4 | 67 | 68.4 | 89 | 93.7 | 156 | 80.8 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 60 | 66 | 126 | 36 | 60.0 | 31 | 47.0 | 67 | 53.2 | 35 | 58.3 | 29 | 43.9 | 64 | 50.8 | 40 | 66.7 | 28 | 42.4 | 68 | 54.0 | 40 | 66.7 | 28 | 42.4 | 68 | 54.0 |
| | | PARANGIA | 48 | 53 | 101 | 39 | 81.3 | 30 | 56.6 | 69 | 68.3 | 39 | 81.3 | 28 | 52.8 | 67 | 66.3 | 31 | 64.6 | 33 | 62.3 | 64 | 63.4 | 31 | 64.6 | 33 | 62.3 | 64 | 63.4 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 69 | 70 | 139 | 68 | 98.6 | 44 | 62.9 | 112 | 80.6 | 67 | 97.1 | 50 | 71.4 | 117 | 84.2 | 82 | 118.8 | 48 | 68.6 | 130 | 93.5 | 82 | 118.8 | 48 | 68.6 | 130 | 93.5 |
| | | POLEBUNGING | 43 | 46 | 89 | 34 | 79.1 | 18 | 39.1 | 52 | 58.4 | 37 | 86.0 | 21 | 45.7 | 58 | 65.2 | 28 | 65.1 | 20 | 43.5 | 48 | 53.9 | 28 | 65.1 | 20 | 43.5 | 48 | 53.9 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 62 | 69 | 131 | 50 | 80.6 | 29 | 42.0 | 79 | 60.3 | 50 | 80.6 | 29 | 42.0 | 79 | 60.3 | 49 | 79.0 | 41 | 59.4 | 90 | 68.7 | 49 | 79.0 | 41 | 59.4 | 90 | 68.7 |
| | | LOWA | 67 | 70 | 137 | 39 | 58.2 | 39 | 55.7 | 78 | 56.9 | 40 | 59.7 | 42 | 60.0 | 82 | 59.9 | 42 | 62.7 | 44 | 62.9 | 86 | 62.8 | 42 | 62.7 | 44 | 62.9 | 86 | 62.8 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 72 | 77 | 149 | 62 | 86.1 | 61 | 79.2 | 123 | 82.6 | 59 | 81.9 | 64 | 83.1 | 123 | 82.6 | 74 | 102.8 | 68 | 88.3 | 142 | 95.3 | 74 | 102.8 | 68 | 88.3 | 142 | 95.3 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 84 | 101 | 185 | 91 | 108.3 | 66 | 65.3 | 157 | 84.9 | 101 | 120.2 | 71 | 70.3 | 172 | 93.0 | 82 | 97.6 | 76 | 75.2 | 158 | 85.4 | 82 | 97.6 | 76 | 75.2 | 158 | 85.4 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 125 | 122 | 247 | 112 | 89.6 | 92 | 75.4 | 204 | 82.6 | 96 | 76.8 | 75 | 61.5 | 171 | 69.2 | 80 | 64.0 | 58 | 47.5 | 138 | 55.9 | 36 | 28.8 | 33 | 27.0 | 69 | 27.9 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 69 | 73 | 142 | 71 | 102.9 | 60 | 82.2 | 131 | 92.3 | 71 | 102.9 | 60 | 82.2 | 131 | 92.3 | 76 | 110.1 | 64 | 87.7 | 140 | 98.6 | 56 | 81.2 | 41 | 56.2 | 97 | 68.3 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 68 | 68 | 136 | 58 | 85.3 | 51 | 75.0 | 109 | 80.1 | 58 | 85.3 | 51 | 75.0 | 109 | 80.1 | 58 | 85.3 | 40 | 58.8 | 98 | 72.1 | 58 | 85.3 | 40 | 58.8 | 98 | 72.1 |
| 11 | BUKI | BUKI | 55 | 55 | 110 | 32 | 58.2 | 31 | 56.4 | 63 | 57.3 | 30 | 54.5 | 31 | 56.4 | 61 | 55.5 | 32 | 58.2 | 35 | 63.6 | 67 | 60.9 | 32 | 58.2 | 35 | 63.6 | 67 | 60.9 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **####** | **1,209** | **2,355** | **1,046** | **91.3** | **866** | **71.6** | **1,912** | **81.2** | **1,015** | **88.6** | **864** | **71.5** | **1,879** | **79.8** | **1,019** | **88.9** | **930** | **76.9** | **1,949** | **82.8** | **952** | **83.1** | **880** | **72.8** | **1,832** | **77.8** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3

**TABEL 44**

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)**
**MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BADUTA | | | BADUTA DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DPT-HB-Hib4 | | | | | | CAMPAK RUBELA 2 | | | | | |
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L+P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 208 | 226 | 434 | 92 | 44.2 | 58 | 25.7 | 150 | 34.6 | 206 | 99.0 | 117 | 51.8 | 323 | 74.4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 90 | 91 | 181 | 81 | 90.0 | 66 | 72.5 | 147 | 81.2 | 84 | 93.3 | 85 | 93.4 | 169 | 93.4 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 56 | 61 | 117 | 45 | 80.4 | 26 | 42.6 | 71 | 60.7 | 47 | 83.9 | 26 | 42.6 | 73 | 62.4 |
| | | PARANGIA | 44 | 50 | 94 | 33 | 75.0 | 34 | 68.0 | 67 | 71.3 | 39 | 88.6 | 32 | 64.0 | 71 | 75.5 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 63 | 65 | 128 | 56 | 88.9 | 52 | 80.0 | 108 | 84.4 | 55 | 87.3 | 52 | 80.0 | 107 | 83.6 |
| | | POLEBUNGING | 39 | 43 | 82 | 27 | 69.2 | 30 | 69.8 | 57 | 69.5 | 25 | 64.1 | 25 | 58.1 | 50 | 61.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 58 | 61 | 119 | 44 | 75.9 | 31 | 50.8 | 75 | 63.0 | 43 | 74.1 | 45 | 73.8 | 88 | 73.9 |
| | | LOWA | 62 | 64 | 126 | 34 | 54.8 | 25 | 39.1 | 59 | 46.8 | 63 | 101.6 | 59 | 92.2 | 122 | 96.8 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 66 | 72 | 138 | 61 | 92.4 | 49 | 68.1 | 110 | 79.7 | 60 | 90.9 | 47 | 65.3 | 107 | 77.5 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 78 | 93 | 171 | 67 | 85.9 | 83 | 89.2 | 150 | 87.7 | 72 | 92.3 | 92 | 98.9 | 164 | 95.9 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 116 | 113 | 229 | 36 | 31.0 | 30 | 26.5 | 66 | 28.8 | 71 | 61.2 | 46 | 40.7 | 117 | 51.1 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 64 | 67 | 131 | 53 | 82.8 | 61 | 91.0 | 114 | 87.0 | 70 | 109.4 | 50 | 74.6 | 120 | 91.6 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 63 | 64 | 127 | 58 | 92.1 | 53 | 82.8 | 111 | 87.4 | 58 | 92.1 | 54 | 84.4 | 112 | 88.2 |
| 11 | BUKI | BUKI | 49 | 51 | 100 | 24 | 49.0 | 31 | 60.8 | 55 | 55.0 | 50 | 102.0 | 47 | 92.2 | 97 | 97.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1,056** | **1,121** | **2,177** | **711** | **67.3** | **629** | **56.1** | **1,340** | **61.6** | **943** | **89.3** | **777** | **69.3** | **1,720** | **79.0** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 45**

## CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BAYI 6-11 BULAN | | | ANAK BALITA (12-59 BULAN) | | | BALITA (6-59 BULAN) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH BAYI | MENDAPAT VIT A | | JUMLAH | MENDAPAT VIT A | | JUMLAH | MENDAPAT VIT A | |
| | | | | S | % | | S | % | | S | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 250 | 250 | 100,0 | 2.035 | 2.016 | 99,1 | 2.285 | 2.266 | 99,2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 71 | 71 | 100,0 | 527 | 527 | 100,0 | 598 | 598 | 100,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 31 | 31 | 100,0 | 266 | 266 | 100,0 | 297 | 297 | 100,0 |
| | | PARANGIA | 28 | 19 | 67,9 | 215 | 212 | 98,6 | 243 | 231 | 95,1 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 59 | 59 | 100,0 | 422 | 422 | 100,0 | 481 | 481 | 100,0 |
| | | POLEBUNGING | 27 | 19 | 70,4 | 236 | 165 | 69,9 | 263 | 184 | 70,0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 30 | 30 | 100,0 | 397 | 390 | 98,2 | 427 | 420 | 98,4 |
| | | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 74 | 74 | 100,0 | 542 | 488 | 90,0 | 616 | 562 | 91,2 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 138 | 138 | 100,0 | 701 | 701 | 100,0 | 839 | 839 | 100,0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 123 | 60 | 48,8 | 750 | 450 | 60,0 | 873 | 510 | 58,4 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 66 | 63 | 95,5 | 546 | 539 | 98,7 | 612 | 602 | 98,4 |
| 10 | PASIMASUNGGU T | UJUNG JAMPEA | 59 | 39 | 66,1 | 411 | 327 | 79,6 | 470 | 366 | 77,9 |
| 11 | BUKI | BUKI | 27 | 23 | 85,2 | 311 | 243 | 78,1 | 338 | 266 | 78,7 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **983** | **876** | **89,1** | **7.359** | **6.746** | **91,7** | **8.342** | **7.622** | **91,4** |

Sumber: Seksi Pelayanan KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

TABEL 46

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN BALITA (USIA 0-59 BULAN) | SASARAN ANAK BALITA (USIA 12-59 BULAN) | BALITA MEMILIKI BUKU KIA | | BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | | BALITA DILAYANI SDIDTK | | BALITA DILAYANI MTBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2143 | 1673 | 1347 | 62.86 | 844 | 39.38 | 2117 | 98.79 | 2060 | 96.13 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 896 | 703 | 666 | 74.33 | 351 | 39.17 | 896 | 100 | 266 | 29.69 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 578 | 452 | 572 | 98.96 | 141 | 24.39 | 578 | 100 | 181 | 31.31 |
| | | PARANGIA | 463 | 362 | 275 | 59.40 | 271 | 58.53 | 463 | 100 | 217 | 46.87 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 634 | 495 | 535 | 84.38 | 634 | 100.00 | 634 | 100 | 341 | 53.79 |
| | | POLEBUNGING | 405 | 316 | 271 | 66.91 | 236 | 58.27 | 405 | 100 | 91 | 22.47 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 588 | 457 | 352 | 59.86 | 224 | 38.10 | 501 | 85.20 | 123 | 20.92 |
| | | LOWA | 624 | 487 | 307 | 49.20 | 238 | 38.14 | 624 | 100.00 | 368 | 58.97 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 680 | 531 | 665 | 97.79 | 518 | 76.18 | 366 | 53.82 | 362 | 53.24 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 846 | 661 | 664 | 78.49 | 781 | 92.32 | 514 | 60.76 | 71 | 8.39 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1127 | 880 | 916 | 81.28 | 956 | 84.83 | 1123 | 99.65 | 451 | 40.02 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 645 | 503 | 645 | 100.00 | 442 | 68.53 | | 0.00 | 173 | 26.82 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 628 | 492 | 396 | 63.06 | 211 | 33.60 | 601 | 95.70 | 272 | 43.31 |
| 11 | BUKI | BUKI | 496 | 386 | 382 | 77.02 | 271 | 54.64 | 496 | 100 | 238 | 47.98 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **10753** | **8398** | **7993** | **95.18** | **6118** | **56.90** | **9318** | **110.95** | **5214** | **48.49** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 47**

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BALITA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH SASARAN BALITA (S) | | | DITIMBANG | | | | | |
| | | | | | | JUMLAH (D) | | | % (D/S) | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | 2.184 | | | 2.184 | #DIV/0! | #DIV/0! | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | 755 | | | 616 | #DIV/0! | #DIV/0! | 81,6 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | 326 | | | 316 | #DIV/0! | #DIV/0! | 96,9 |
| | | PARANGIA | | | 270 | | | 264 | #DIV/0! | #DIV/0! | 97,8 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | 521 | | | 439 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,3 |
| | | POLEBUNGING | | | 295 | | | 242 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82,0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | 463 | | | 326 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70,4 |
| | | LOWA | | | 409 | | | 285 | #DIV/0! | #DIV/0! | 69,7 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | 658 | | | 595 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90,4 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | 856 | | | 732 | #DIV/0! | #DIV/0! | 85,5 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | 1.146 | | | 367 | #DIV/0! | #DIV/0! | 32,0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | 733 | | | 591 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80,6 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | 501 | | | 414 | #DIV/0! | #DIV/0! | 82,6 |
| 11 | BUKI | BUKI | | | 369 | | | 301 | #DIV/0! | #DIV/0! | 81,6 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **9.486** | **0** | **0** | **7.672** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **80,9** |

Sumber: Seksi Pelayanan KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 48**

**STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG | BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | | JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN | BALITA PENDEK (TB/U) | | JUMLAH BALITA YANG DIUKUR | BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) | | BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2.184 | 100 | 4,6 | 1.933 | 117 | 6,1 | 1.922 | 47 | 2,4 | 8 | 0,4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 616 | 122 | 19,8 | 565 | 183 | 32,4 | 562 | 31 | 5,5 | 8 | 1,4 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 316 | 33 | 10,4 | 271 | 36 | 13,3 | 270 | 9 | 3,3 | 1 | 0,4 |
| | | PARANGIA | 264 | 52 | 19,7 | 246 | 66 | 26,8 | 246 | 12 | 4,9 | 3 | 1,2 |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 439 | 72 | 16,4 | 423 | 97 | 22,9 | 420 | 27 | 6,4 | 3 | 0,7 |
| | | POLEBUNGING | 242 | 32 | 13,2 | 235 | 54 | 23,0 | 235 | 13 | 5,5 | 1 | 0,4 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 326 | 41 | 12,6 | 295 | 52 | 17,6 | 294 | 8 | 2,7 | 3 | 1,0 |
| | | LOWA | 285 | 54 | 18,9 | 266 | 68 | 25,6 | 264 | 11 | 4,2 | 0 | 0,0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 595 | 74 | 12,4 | 471 | 78 | 16,6 | 470 | 30 | 6,4 | 0 | 0,0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 732 | 60 | 8,2 | 508 | 187 | 36,8 | 500 | 23 | 4,6 | 2 | 0,4 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 367 | 124 | 33,8 | 546 | 211 | 38,6 | 545 | 45 | 8,3 | 8 | 1,5 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 591 | 29 | 4,9 | 398 | 111 | 27,9 | 397 | 11 | 2,8 | 1 | 0,3 |
| 10 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 414 | 115 | 27,8 | 411 | 112 | 27,3 | 460 | 44 | 9,6 | 1 | 0,2 |
| 11 | BUKI | BUKI | 301 | 24 | 8,0 | 205 | 49 | 23,9 | 204 | 9 | 4,4 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **7.672** | **932** | **12,1** | **6.773** | **1.421** | **21,0** | **6.789** | **320** | **4,7** | **39** | **0,6** |

Sumber: Seksi Pelayanan KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 49**

## CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PESERTA DIDIK SEKOLAH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KELAS 1 SD/MI | | | KELAS 7 SMP/MTS | | | KELAS 10 SMA/MA | | |
| | | | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 527 | 502 | 95.3 | 472 | 453 | 96.0 | 1,028 | 950 | 92.4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 182 | 169 | 92.9 | 271 | 229 | 84.5 | 123 | 99 | 80.5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 79 | 72 | 91.1 | 123 | 113 | 91.9 | 199 | 190 | 95.5 |
| | | PARANGIA | 90 | 77 | 85.6 | 60 | 58 | 96.7 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 131 | 0 | 0.0 | 82 | 0 | 0.0 | 49 | 0 | 0.0 |
| | | POLEBUNGING | 230 | 85 | 37.0 | 167 | 105 | 62.9 | 44 | 44 | 100.0 |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 132 | 121 | 91.7 | 119 | 97 | 81.5 | 126 | 42 | 33.3 |
| | | LOWA | 813 | 158 | 19.4 | 190 | 0 | 0.0 | 67 | 0 | 0.0 |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,028 | 1,028 | 100.0 | 271 | 271 | 100.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 186 | 0 | 0.0 | 160 | 0 | 0.0 | 138 | 0 | 0.0 |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1,704 | 1,678 | 98.5 | 512 | 501 | 97.9 | 184 | 184 | 100.0 |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 897 | 135 | 15.1 | 445 | 314 | 70.6 | 63 | 47 | 74.6 |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 294 | 282 | 95.9 | 175 | 168 | 96.0 | 55 | 48 | 87.3 |
| 11 | BUKI | BUKI | 108 | 108 | 100.0 | 68 | 68 | 100.0 | 88 | 88 | 100.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **6,401** | **4,415** | **69.0** | **3,115** | **2,377** | **76.3** | **2,164** | **1,692** | **78.2** |

Sumber: Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

| USIA PENDIDIKAN DASAR (KELAS 1-9) | | | SEKOLAH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SD/MI | | | SMP/MTS | | | SMA/MA | | |
| JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATA | % |
| *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| | | #DIV/0! | 15 | 15 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 14 | 14 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 13 | 13 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 9 | 9 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | #DIV/0! | 12 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | #DIV/0! | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 11 | 11 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 11 | 11 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | #DIV/0! | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | #DIV/0! | 10 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| | | #DIV/0! | 13 | 13 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 10 | 10 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 9 | 9 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| | | #DIV/0! | 14 | 14 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
| **0** | **0** | **#DIV/0!** | **161** | **139** | **86.3** | **60** | **52** | **86.7** | **20** | **16** | **80.0** |

**TABEL 50**

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TUMPATAN GIGI TETAP | PENCABUTAN GIGI TETAP | JUMLAH KUNJUNGAN | RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN | JUMLAH KASUS GIGI | JUMLAH KASUS DIRUJUK | % KASUS DIRUJUK |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 49 | 116 | 247 | 0.4 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 31 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | PARANGIA | 0 | 75 | 172 | 0.0 | 0 | 4 | #DIV/0! |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | POLEBUNGING | 0 | 12 | 81 | 0.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 9 | 31 | 157 | 0.3 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | LOWA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2 | 16 | 90 | 0.1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11 | BUKI | BUKI | 0 | 44 | 90 | 0.0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/ KOTA)** | | | **60** | **325** | **885** | **0.2** | **0** | **4** | **#DIV/0!** |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

**TABEL 51**

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH SD/MI | JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL | % | JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI | % | JUMLAH MURID SD/MI | | | MURID SD/MI DIPERIKSA | | | | | | MURID SD/MI PERLU PERAWATAN | | | MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN | | | | | |
| | | | | | | | | L | P | L + P | L | % | P | % | L + P | % | L | P | L + P | L | % | P | % | L + P | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 15 | 0 | 0.0 | 15 | 100.0 | 1,637 | 1,429 | 3,066 | 70 | 4.3 | 114 | 8.0 | 184 | 6.0 | 54 | 43 | 97 | 10 | 18.5 | 13 | 30.2 | 23 | 23.7 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| | | PARANGIA | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 4 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| | | POLEBUNGING | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 5 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| | | LOWA | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 6 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 10 | 0 | 0.0 | 10 | 100.0 | 659 | 671 | 1,330 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 12 | 21 | 9 | 100.0 | 12 | 100.0 | 21 | 100.0 |
| 7 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 8 | TAKABONERATE | PASITALLU | 13 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 9 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| 11 | BUKI | BUKI | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | 0 | ##### | 0 | ##### |
| **JUMLAH (KAB/ KOTA)** | | | **146** | **0** | **0.0** | **25** | **17.1** | **2,296** | **2,100** | **4,396** | **70** | **3.0** | **114** | **5.4** | **184** | **4.2** | **63** | **55** | **118** | **19** | **30.2** | **25** | **45.5** | **44** | **37.3** |

Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 52**

**PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | | | MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | | | | | | BERISIKO | | | | | | |
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6,269 | 7,084 | 13,353 | 6269 | 100.0 | 7,084 | 100.0 | 13,353 | 100.0 | 1,865 | 29.7 | 2,112 | 29.8 | 3,977 | 29.8 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3,081 | 3,251 | 6,332 | 3,081 | 100.0 | 3,251 | 100.0 | 6,332 | 100.0 | 38 | 1.2 | 273 | 8.4 | 311 | 4.9 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 2,088 | 2,092 | 4,180 | 2,088 | 100.0 | 2,092 | 100.0 | 4,180 | 100.0 | 50 | 2.4 | 100 | 4.8 | 150 | 3.6 |
| 4 | | PARANGIA | 1,451 | 2,663 | 4,114 | 1,451 | 100.0 | 2,663 | 100.0 | 4,114 | 100.0 | 89 | 6.1 | 179 | 6.7 | 268 | 6.5 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 3,169 | 3,255 | 6,424 | 3,169 | 100.0 | 3,255 | 100.0 | 6,424 | 100.0 | 685 | 21.6 | 1,369 | 42.1 | 2,054 | 32.0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 732 | 762 | 1,494 | 732 | 100.0 | 762 | 100.0 | 1,494 | 100.0 | 11 | 1.5 | 39 | 5.1 | 50 | 3.3 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 2,592 | 2,876 | 5,468 | 2,592 | 100.0 | 2,876 | 100.0 | 5,468 | 100.0 | 38 | 1.5 | 214 | 7.4 | 252 | 4.6 |
| 8 | | LOWA | 1,782 | 1,782 | 3,564 | 1,782 | 100.0 | 1,782 | 100.0 | 3,564 | 100.0 | 181 | 10.2 | 191 | 10.7 | 372 | 10.4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1,687 | 1,606 | 3,293 | 1,687 | 100.0 | 1,606 | 100.0 | 3,293 | 100.0 | 20 | 1.2 | 65 | 4.0 | 85 | 2.6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2,225 | 2,315 | 4,540 | 2,225 | 100.0 | 2,315 | 100.0 | 4,540 | 100.0 | 33 | 1.5 | 230 | 9.9 | 263 | 5.8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 4,533 | 4,594 | 9,127 | 4,533 | 100.0 | 4,594 | 100.0 | 9,127 | 100.0 | 8 | 0.2 | 42 | 0.9 | 50 | 0.5 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2,208 | 2,275 | 4,483 | 2,208 | 100.0 | 2,275 | 100.0 | 4,483 | 100.0 | 15 | 0.7 | 65 | 2.9 | 80 | 1.8 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 2,270 | 2,384 | 4,654 | 2,270 | 100.0 | 2,384 | 100.0 | 4,654 | 100.0 | 252 | 11.1 | 858 | 36.0 | 1,110 | 23.9 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1,959 | 2,024 | 3,983 | 1,959 | 100.0 | 2,024 | 100.0 | 3,983 | 100.0 | 28 | 1.4 | 164 | 8.1 | 192 | 4.8 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **36,046** | **38,963** | **75,009** | **36,046** | **100.0** | **38,963** | **100.0** | **75,009** | **100.0** | **3,313** | **9.2** | **5,901** | **15.1** | **9,214** | **12.3** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 53**

**CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINNYA | | | CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN | | | | | | CATIN PEREMPUAN ANEMIA | | CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | | | | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *15* | *16* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 55 | 55 | 110 | 55 | 100.0 | 55 | 100.0 | 110 | 100.0 | 0 | 0.0 | 9 | 16.4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 98 | 98 | 196 | 98 | 100.0 | 98 | 100.0 | 196 | 100.0 | 9 | 9.2 | 18 | 18.4 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 52 | 52 | 104 | 52 | 100.0 | 52 | 100.0 | 104 | 100.0 | 8 | 15.4 | 11 | 21.2 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 43 | 43 | 86 | 43 | 100.0 | 43 | 100.0 | 86 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 5 | 10 | 5 | 100.0 | 5 | 100.0 | 10 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 19 | 19 | 38 | 19 | 100.0 | 19 | 100.0 | 38 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 10.5 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 30 | 30 | 60 | 30 | 100.0 | 30 | 100.0 | 60 | 100.0 | 1 | 3.3 | 1 | 3.3 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ##### | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 36 | 36 | 72 | 36 | 100.0 | 36 | 100.0 | 72 | 100.0 | 1 | 2.8 | 1 | 2.8 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 60 | 60 | 120 | 60 | 100.0 | 60 | 100.0 | 120 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | ##### | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 35 | 35 | 70 | 35 | 100.0 | 35 | 100.0 | 70 | 100.0 | 0 | 0.0 | 7 | 20.0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 21 | 21 | 42 | 21 | 100.0 | 21 | 100.0 | 42 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 16 | 16 | 32 | 16 | 100.0 | 16 | 100.0 | 32 | 100.0 | 0 | 0.0 | 4 | 25.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **470** | **470** | **940** | **470** | **100.0** | **470** | **100.0** | **940** | **100.0** | **19** | **4.0** | **55** | **11.7** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 54**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA LANJUT (60TAHUN+) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | | | MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | | | | | |
| | | | L | P | L+P | L | % | P | % | L+P | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 903 | 1,182 | 2,085 | 729 | 80.7 | 910 | 77.0 | 1,639 | 78.6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 574 | 758 | 1,332 | 194 | 33.8 | 294 | 38.8 | 488 | 36.6 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 616 | 636 | 1,252 | 444 | 72.1 | 490 | 77.0 | 934 | 74.6 |
| 4 | | PARANGIA | 587 | 785 | 1,372 | 377 | 64.2 | 487 | 62.0 | 864 | 63.0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 529 | 706 | 1,235 | 299 | 56.5 | 382 | 54.1 | 681 | 55.1 |
| 6 | | POLEBUNGING | 361 | 501 | 862 | 323 | 89.5 | 410 | 81.8 | 733 | 85.0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 641 | 621 | 1,262 | 289 | 45.1 | 525 | 84.5 | 814 | 64.5 |
| 8 | | LOWA | 392 | 615 | 1,007 | 201 | 51.3 | 345 | 56.1 | 546 | 54.2 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 375 | 462 | 837 | 114 | 30.4 | 138 | 29.9 | 252 | 30.1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 593 | 810 | 1,403 | 423 | 71.3 | 560 | 69.1 | 983 | 70.1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 486 | 756 | 1,242 | 255 | 52.5 | 523 | 69.2 | 778 | 62.6 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 268 | 352 | 620 | 168 | 62.7 | 198 | 56.3 | 366 | 59.0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 337 | 506 | 843 | 188 | 55.8 | 173 | 34.2 | 361 | 42.8 |
| 14 | BUKI | BUKI | 532 | 674 | 1,206 | 146 | 27.4 | 369 | 54.7 | 515 | 42.7 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **7,194** | **9,364** | **16,558** | **4,150** | **57.7** | **5,804** | **62.0** | **9,954** | **60.1** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 55**

**PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL | MELAKSANAKAN ORIENTASI P4K | MELAKSANAKAN KELAS IBU BALITA | MELAKSANAKAN KELAS SDIDTK | MELAKSANAKAN MTBS | MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 7 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 10 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1, 7, 10 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | v | v | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 4 | 0 | PARANGIA | v | v | v | v | v | v | v | v | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | v | v | 0 | v | v | v | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | v | v | 0 | v | v | v | v | v | v | v |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 8 | 0 | LOWA | v | v | 0 | v | v | v | v | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | v | v | 0 | v | v | v | v | v | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | v | v | v | 0 | v | v | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | v | v | 0 | v | v | v | v | v | v | v |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | v | v | v | 0 | v | v | v | v | v | v |
| 13 | PASIMASUNGGU T | UJUNG JAMPEA | v | v | 0 | 0 | v | v | v | v | v | v |
| 14 | BUKI | BUKI | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **14** | **14** | **7** | **10** | **14** | **14** | **12** | **11** | **9** | **9** |
| **PERSENTASE** | | | **100.0** | **100.0** | **50.0** | **71.4** | **100.0** | **100.0** | **85.7** | **78.6** | **64.3** | **64.3** |

Sumber: Seksi KIA Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

catatan: diisi dengan tanda "V"

**TABEL 56**

**JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, DAN TREATMENT COVERAGE (TC) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | | | | | KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 174 | 39 | 57,4 | 29 | 42,6 | 68 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 49 | 8 | 47,1 | 9 | 52,9 | 17 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 42 | 12 | 80,0 | 3 | 20,0 | 15 | 1 |
| 4 | | PARANGIA | 39 | 8 | 66,7 | 4 | 33,3 | 12 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 36 | 6 | 54,5 | 5 | 45,5 | 11 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 28 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 54 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 0 |
| 8 | | LOWA | 7 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 25 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 | 8 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 30 | 11 | 50,0 | 11 | 50,0 | 22 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 61 | 25 | 78,1 | 7 | 21,9 | 32 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 102 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 10 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 53 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 10 | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **710** | **141** | **62,1** | **86** | **37,9** | **227** | **3** |
| **JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS** | | | **1.792** | | | | | | |
| **% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI ST** | | | | | | **39,6** | | | |
| **PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)** | | | | | | | | **496** | |
| ***TREATMENT COVERAGE (TC-%)*** | | | | | | | | **45,8** | |
| **CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)** | | | | | | | | | **5,0** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Jumlah pasien adalah seluruh pasien tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

**TABEL 57**

## ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI*) | | | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI*) | | | ANGKA KESEMBUHAN (*CURE RATE*) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 37 | 27 | 64 | 39 | 29 | 68 | 5 | 13,5 | 3 | 11,1 | 8 | 12,5 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 10 | 3 | 13 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | | PARANGIA | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 50,0 | 4 | 80,0 | 6 | 66,7 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 87,5 | 2 | 100,0 | 9 | 90,0 |
| 8 | | LOWA | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 50,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 9 | 10 | 19 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 21 | 5 | 26 | 25 | 7 | 32 | 1 | 4,8 | 0 | 0,0 | 1 | 3,8 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 10,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **130** | **80** | **210** | **144** | **86** | **230** | **18** | **13,8** | **11** | **13,8** | **29** | **13,8** |

| ANGKA PENGOBATAN LENGKAP *(COMPLETE RATE) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS* | | | | | | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN *(SUCCESS RATE/SR)* SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | | | | | | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | | |
| JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* |
| 14 | 35,9 | 18 | 62,1 | 32 | 47,1 | 19 | 48,7 | 21 | 72,4 | 40 | 58,8 | 3 | 4,4 |
| 8 | 100,0 | 9 | 100,0 | 17 | 100,0 | 8 | 100,0 | 9 | 100,0 | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | 75,0 | 3 | 100,0 | 12 | 80,0 | 9 | 75,0 | 3 | 100,0 | 12 | 80,0 | 1 | 6,7 |
| 6 | 75,0 | 4 | 100,0 | 10 | 83,3 | 6 | 75,0 | 4 | 100,0 | 10 | 83,3 | 1 | 8,3 |
| 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 3 | 50,0 | 4 | 80,0 | 7 | 63,6 | 0 | 0,0 |
| 1 | 100,0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 100,0 | 2 | 200,0 |
| 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 87,5 | 2 | 100,0 | 9 | 90,0 | 0 | 0,0 |
| 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 1 | 25,0 | 2 | 50,0 | 3 | 37,5 | 3 | 75,0 | 4 | 100,0 | 7 | 87,5 | 0 | 0,0 |
| 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 50,0 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 11 | 50,0 | 1 | 4,5 |
| 19 | 76,0 | 5 | 71,4 | 24 | 75,0 | 20 | 80,0 | 5 | 71,4 | 25 | 78,1 | 3 | 9,4 |
| 7 | 87,5 | 2 | 100,0 | 9 | 90,0 | 8 | 100,0 | 2 | 100,0 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 10 | 83,3 | 5 | 83,3 | 5 | 83,3 | 10 | 83,3 | 1 | 8,3 |
| 4 | 100,0 | 2 | 100,0 | 6 | 100,0 | 4 | 100,0 | 2 | 100,0 | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| **80** | **55,6** | **56** | **65,1** | **136** | **59,1** | **98** | **68,1** | **67** | **77,9** | **165** | **71,7** | **12** | **5,2** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 58**

**PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA | BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS | | | PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA | REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA | | | | | | | | BATUK BUKAN PNEUMONIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH KUNJUNGAN | DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*) | PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR | | PNEUMONIA | | PNEUMONIA BERAT | | JUMLAH | | | % | | | |
| | | | | | | | | L | P | L | P | L | P | L + P | | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2,768 | 1,144 | 541 | 47.3 | 105 | 72 | 66 | 0 | 0 | 72 | 66 | 138 | 131.4 | 561 | 497 | 1,058 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1,002 | 418 | 46 | 11.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 55 | 69 | 124 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 352 | 144 | 91 | 63.2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18 | 21 | 39 |
| 4 | | PARANGIA | 600 | 80 | 80 | 100.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 29 | 71 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 801 | 210 | 212 | 101.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 100 | 112 | 212 |
| 6 | | POLEBUNGING | 511 | 234 | 183 | 78.2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 52.6 | 124 | 101 | 225 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 740 | 191 | 190 | 99.5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.6 | 110 | 80 | 190 |
| 8 | | LOWA | 783 | 163 | 169 | 103.7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 85 | 81 | 166 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 835 | 0 | 6 | #DIV/0! | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64 | 59 | 123 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1,036 | 0 | 3 | #DIV/0! | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 16 | 38 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1,678 | 37 | 13 | 35.1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88 | 77 | 165 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 780 | 24 | 31 | 129.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 17 | 34 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 795 | 0 | 0 | #DIV/0! | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 50 | 41 | 91 |
| 14 | BUKI | BUKI | 671 | 135 | 132 | 97.8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71 | 111 | 182 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **13,352** | **2,780** | **1,697** | **61.0** | **584** | **83** | **66** | **0** | **0** | **83** | **66** | **149** | **25.5** | **1,407** | **1,311** | **2,718** |
| **Prevalensi pneumonia pada balita (%)** | | | **3.79** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%** | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | |
| **Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%** | | | | | | **72.7%** | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

**TABEL 59**

**JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KELOMPOK UMUR | KASUS H I V | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | PROPORSI KELOMPOK UMUR |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | ≤ 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 5 - 14 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 15 - 19 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 20 - 24 TAHUN | 2 | 0 | 2 | 13.3 |
| 5 | 25 - 49 TAHUN | 10 | 3 | 13 | 86.7 |
| 6 | ≥ 50 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | **12** | **3** | **15** | |
| **PROPORSI JENIS KELAMIN** | | **80.0** | **20.0** | | |
| **Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV** | | | | | **2854** |
| **Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar** | | | | | **2445** |
| **Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesu** | | | | | **85.7** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 60**

**PRESENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | ODHIV BARU DITEMUKAN | ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV | PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6 | 4 | 67 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1 | 1 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 2 | 2 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1 | 1 | 100 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 1 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1 | 1 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1 | 1 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 2 | 2 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **15** | **13** | **1** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 61**

**KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH TARGET PENEMUAN | | DIARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DILAYANI | | | | MENDAPAT ORALIT | | | | MENDAPAT ZINC | |
| | | | | | | SEMUA UMUR | | BALITA | | SEMUA UMUR | | BALITA | | BALITA | |
| | | | | SEMUA UMUR | BALITA | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 27,677 | 747 | 467 | 241 | 32.3 | 53 | 11.4 | 178 | 73.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 11,345 | 306 | 169 | 44 | 14.4 | 7 | 4.1 | 25 | 56.8 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7,225 | 195 | 59 | 70 | 35.9 | 14 | 23.6 | 56 | 80.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | | PARANGIA | 6,007 | 162 | 101 | 112 | 69.1 | 43 | 42.5 | 71 | 63.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 8,007 | 216 | 135 | 139 | 64.3 | 22 | 16.3 | 116 | 83.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 5,183 | 140 | 86 | 87 | 62.2 | 12 | 13.9 | 38 | 43.7 | 0 | 0.0 | 2 | 16.7 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 7,519 | 203 | 125 | 81 | 39.9 | 30 | 24.0 | 26 | 32.1 | 1 | 3.3 | 8 | 26.7 |
| 8 | | LOWA | 7,591 | 205 | 132 | 50 | 24.4 | 16 | 12.1 | 21 | 42.0 | 1 | 6.3 | 6 | 37.5 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 8,260 | 223 | 141 | 85 | 38.1 | 48 | 34.1 | 31 | 36.5 | 3 | 6.3 | 36 | 75.0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10,395 | 281 | 175 | 67 | 23.9 | 5 | 2.9 | 62 | 92.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 16,777 | 453 | 283 | 327 | 72.2 | 38 | 13.4 | 13 | 4.0 | 2 | 5.3 | 3 | 7.9 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 8,060 | 218 | 132 | 13 | 6.0 | 8 | 6.1 | 5 | 38.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 7,903 | 213 | 134 | 64 | 30.0 | 10 | 7.5 | 54 | 84.4 | 3 | 30.0 | 0 | 0.0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 5,029 | 136 | 113 | 86 | 63.3 | 14 | 12.4 | 72 | 83.7 | 4 | 28.6 | 0 | 0.0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **136,978** | **3,698** | **2,251** | **1,466** | **39.6** | **320** | **14.2** | **768** | **52.4** | **15** | **4.7** | **55** | **17.2** |
| **ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK** | | | | **270** | **843** | | | | | | | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

**TABEL 62**

**DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA | | | % BUMIL DIPERIKSA | % BUMIL REAKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REAKTIF | NON REAKTIF | TOTAL | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 152 | 7 | 87 | 94 | 61.8 | 7 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 217 | 13 | 175 | 188 | 86.6 | 7 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 140 | 1 | 76 | 77 | 55.0 | 1 |
| 4 | | PARANGIA | 112 | 0 | 67 | 67 | 59.8 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 152 | 0 | 107 | 107 | 70.4 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 97 | 3 | 96 | 99 | 102.1 | 3 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 141 | 2 | 72 | 74 | 52.5 | 3 |
| 8 | | LOWA | 151 | 6 | 96 | 102 | 67.5 | 6 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 165 | 6 | 102 | 108 | 65.5 | 6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 204 | 1 | 104 | 105 | 51.5 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 269 | 3 | 216 | 219 | 81.4 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 155 | 14 | 142 | 156 | 100.6 | 9 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 152 | 4 | 87 | 91 | 59.9 | 4 |
| 14 | BUKI | BUKI | 118 | 4 | 76 | 80 | 67.8 | 5 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2,225** | **64** | **1,503** | **1,567** | **70.4** | **4** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 63**

**JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU REAKTIF HBsAg dan MENDAPATKAN HBIG**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg Reaktif | JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg REAKTIF MENDAPAT HBIG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | < 24 Jam | | ≥ 24 Jam | | TOTAL | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 5 | 100 | 0 | 0.0 | 5 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 10 | 10 | 100 | 0 | 0.0 | 10 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
| 8 | | LOWA | 3 | 3 | 100 | 0 | 0.0 | 3 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 4 | 3 | 75 | 1 | 25.0 | 4 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 2 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 2 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1 | 1 | 100 | 0 | 0.0 | 1 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **35** | **34** | **97** | **1** | **2.9** | **35** | **100** |

Sumber: Seksi P2PM Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Selayar (sebutkan)

**TABEL 64**

**KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAUSI BASILER (PB)/ KUSTA KERING | | | MULTI BASILER (MB)/ KUSTA BASAH | | | PB + MB | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1** | **0** | **1** | **6** | **4** | **10** | **7** | **4** | **11** |
| **PROPORSI JENIS KELAMIN** | | | **100.0** | **0.0** | | **60.0** | **40.0** | | **63.6** | **36.4** | |
| **ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/*NEW CASE DETECTION RATE* ) PER 100.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | **10.2** | **5.6** | **7.9** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 65**

**KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PENDERITA KUSTA | CACAT TINGKAT 0 | | CACAT TINGKAT 2 | | PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN | | PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 8 | | LOWA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **11** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **0** |
| **ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK** | | | | | | **0.0** | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 66**

**JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, USIA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS TERDAFTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAUSI BASILER/KUSTA KERING | | | MULTI BASILER/KUSTA BASAH | | | JUMLAH | | |
| | | | ANAK | DEWASA | TOTAL | ANAK | DEWASA | TOTAL | ANAK | DEWASA | TOTAL |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1** | **9** | **10** | **0** | **25** | **25** | **1** | **34** | **35** |
| **ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | | | **2,5** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 67**

**PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT TIPE, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KUSTA (PB) TAHUN 2021 | | | KUSTA (MB) TAHUN 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JML PENDERITA BARU[a] | JML PENDERITA RFT | RFT RATE PB (%) | JML PENDERITA BARU[b] | JML PENDERITA RFT | RFT RATE MB (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 4 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0,0 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 7 | 1 | 14,3 | 7 | 15 | 214,3 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU T | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 200,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **8** | **1** | **12,5** | **13** | **24** | **184,6** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

**TABEL 68**

## JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN | JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5.847 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3640 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.295 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 1.257 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.574 | 1 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1.541 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.862 | 0 |
| 8 | | LOWA | 1.802 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2.143 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2.527 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3.666 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2.266 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 1.737 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.461 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **32.618** | **1** |
| **AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN** | | | | **3,1** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 69**

**JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS PD3I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIFTERI | | | | PERTUSIS | | | TETANUS NEONATORUM | | | | HEPATITIS B | | | SUSPEK CAMPAK | | |
| | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | JUMLAH KASUS | | | | | |
| | | | L | P | L+P | L | L | P | L+P | L | P | L+P | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 4 | | PARANGIA | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | | | 0 | | NIHIL | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 8 | | LOWA | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **CASE FATALITY RATE (%)** | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | | | |
| **INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 70**

## KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KLB DI DESA/KELURAHAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | DITANGANI <24 JAM | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | #DIV/0! |
| 4 | | PARANGIA | | | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | NIHIL | | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | #DIV/0! |
| 8 | | LOWA | | | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | | | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **#DIV/0!** |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 71**

**JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | JENIS KEJADIAN LUAR BIASA | YANG TERSERANG | | WAKTU KEJADIAN (TANGGAL) | | | JUMLAH PENDERITA | | | KELOMPOK UMUR PENDERITA | | | | | | | | | | | JUMLAH KEMATIAN | | | JUMLAH PENDUDUK TERANCAM | | | *ATTACK RATE (%)* | | | CFR (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JUMLAH KEC | JUMLAH DESA/KEL | DIKETAHUI | DITANGGU-LANGI | AKHIR | L | P | L+P | 0-7 HARI | 8-28 HARI | 1-11 BLN | 1-4 THN | 5-9 THN | 10-14 THN | 15-19 THN | 20-44 THN | 45-54 THN | 55-59 THN | 60-69 THN | 70+ THN | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* | *33* | *34* |
| 1 | | | | | | | | NIHIL | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 72**

## KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | | | *CFR* (%) | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **JUMLAH KASUS (KAB/KOTA)** | | | **1** | **4** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK*** | | | **3,6** | | | | | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 73**

**KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | MALARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSPEK | KONFIRMASI LABORATORIUM | | | % KONFIRMASI LABORATORIUM | POSITIF | | | PENGOBATAN STANDAR | % PENGOBATAN STANDAR | MENINGGAL | | | *CFR* | | |
| | | | | MIKROSKOPIS | *RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)* | TOTAL | | L | P | L+P | | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 65 | 33 | 32 | 65 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 120 | 0 | 120 | 120 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 53 | 53 | 0 | 53 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | | PARANGIA | 97 | 0 | 97 | 97 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 32 | 32 | 0 | 32 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 22 | 0 | 22 | 22 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 |
| 8 | | LOWA | 139 | 24 | 115 | 139 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 54 | 0 | 54 | 54 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 4 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 51 | 0 | 51 | 51 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 39 | 0 | 39 | 39 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 94 | 20 | 74 | 94 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 64 | 63 | 1 | 64 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **837** | **225** | **612** | **837** | **100,0** | **9** | **2** | **11** | **9** | **81,8** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ANGKA KESAKITAN (*ANNUAL PARASITE INCIDENCE*) PER 1.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | | **0,1** | | | | | | | | |

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 74**

**PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDERITA KRONIS FILARIASIS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA | | | KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN | | | KASUS KRONIS PINDAH | | | KASUS KRONIS MENINGGAL | | | JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | LOWA | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

NIHIL

Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar
Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 75**

**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN | | | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 669 | 894 | 1.563 | 669 | 100,0 | 894 | 100,0 | 1.563 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 153 | 263 | 416 | 153 | 100,0 | 263 | 100,0 | 416 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 806 | 825 | 1.631 | 806 | 100,0 | 825 | 100,0 | 1.631 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 441 | 779 | 1.220 | 441 | 100,0 | 779 | 100,0 | 1.220 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 976 | 1.062 | 2.038 | 976 | 100,0 | 1.062 | 100,0 | 2.038 | 100 |
| 6 | | POLEBUNGING | 223 | 232 | 455 | 223 | 100,0 | 232 | 100,0 | 455 | 100 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 784 | 852 | 1.636 | 784 | 100,0 | 852 | 100,0 | 1.636 | 100 |
| 8 | | LOWA | 1.721 | 432 | 2.153 | 1.721 | 100,0 | 432 | 100,0 | 2.153 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 673 | 727 | 1.400 | 673 | 100,0 | 727 | 100,0 | 1.400 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 92 | 250 | 342 | 92 | 100,0 | 250 | 100,0 | 342 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1.398 | 1.468 | 2.866 | 1.398 | 100,0 | 1.468 | 100,0 | 2.866 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 465 | 680 | 1.145 | 465 | 100,0 | 680 | 100,0 | 1.145 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 793 | 879 | 1.672 | 793 | 100,0 | 879 | 100,0 | 1.672 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 731 | 805 | 1.536 | 731 | 100,0 | 805 | 100,0 | 1.536 | 100 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **9.925** | **10.148** | **20.073** | **9.925** | **100,0** | **10.148** | **100,0** | **20.073** | **100** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 76**

**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 244 | 244 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 84 | 84 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 85 | 85 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 74 | 74 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 101 | 101 | 100 |
| 6 | | POLEBUNGING | 24 | 24 | 100 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 96 | 96 | 100 |
| 8 | | LOWA | 120 | 120 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 73 | 73 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 122 | 122 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 189 | 189 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 100 | 100 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 88 | 88 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 81 | 81 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.481** | **1.481** | **100** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 77**

## CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS* | PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN | PEMERIKSAAN IVA | | PEMERIKSAAN SADANIS | | IVA POSITIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | v | 903 | 9 | 1,0 | 894 | 99,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | v | 915 | 6 | 0,7 | 367 | 40,1 | 1 | 16,7 |
| 4 | | PARANGIA | v | 1.054 | 10 | 0,9 | 20 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | v | 1.881 | 0 | 0,0 | 425 | 22,6 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 8 | | LOWA | v | 1.175 | 0 | 0,0 | 325 | 27,7 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | v | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | v | 1.032 | 0 | 0,0 | 450 | 43,6 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | v | 671 | 27 | 4,0 | 294 | 43,8 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **14** | **7.631** | **52** | **0,7** | **2.775** | **0,4** | **1** | **1,9** |

| CURIGA KANKER LEHER RAHIM | | KRIOTERAPI | | IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK | | TUMOR/BENJOLAN | | CURIGA KANKER PAYUDARA | | TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* |
| 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 25,0 |
| 1 | 10,0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 1 | 100,0 |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| **2** | **3,8** | **0** | **0,0** | **2** | **66,7** | **2** | **0,1** | **3** | **0,1** | **2** | **40,0** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 78**

**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN ODGJ BERAT | PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SKIZOFRENIA | | | PSIKOTIK AKUT | | | TOTAL | | | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |
| | | | | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 20 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 20 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 46,7 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 25 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 48,0 |
| 4 | | PARANGIA | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 78,3 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 20 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50,0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 33,3 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 40,0 |
| 8 | | LOWA | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 33,3 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 300,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11,1 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 150,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **245** | **0** | **134** | **4** | **0** | **1** | **0** | **0** | **135** | **4** | **139** | **56,7** |

Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 79**

**PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 13 | 7 | 53,85 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 26 | 26 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 5 | 15 | 9 | 60 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 13 | 9 | 69,23 |
| 6 | | POLEBUNGING | 5 | 15 | 7 | 46,67 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 21 | 12 | 57,14 |
| 8 | | LOWA | 7 | 13 | 8 | 61,54 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 7 | 6 | 85,71 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 8 | 6 | 75 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 2 | 1 | 50 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 5 | 4 | 80 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 9 | 5 | 55,56 |
| 14 | BUKI | BUKI | 7 | 15 | 11 | 73,33 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | 88 | 163 | 112 | 68,71 |

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 80

JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KK | JUMLAH KK PENGGUNA | | | | | | KK SBS | | KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK | | PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKSES SANITASI AMAN | AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | AKSES LAYAK BERSAMA | AKSES BELUM LAYAK | BABS TERTUTUP | BABS TERBUKA | JUMLAH | % | JUMLAH | % | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6423 | 5959 | 439 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6423 | 100 | 6423 | 100 | 92,78 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2763 | 0 | 2182 | 581 | 0 | 0 | 0 | 2763 | 100 | 2763 | 100 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 2295 | 0 | 2101 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 100 | 2295 | 100 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 2101 | 0 | 2096 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 100 | 2101 | 100 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 2321 | 0 | 1711 | 610 | 0 | 0 | 0 | 2321 | 100 | 2321 | 100 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1535 | 0 | 1460 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 100 | 1535 | 100 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 2094 | 0 | 1735 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 100 | 2094 | 100 | 0 |
| 8 | | LOWA | 2209 | 0 | 1764 | 445 | 102 | 0 | 0 | 2209 | 100 | 2209 | 100 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2286 | 0 | 1279 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 100 | 2286 | 100 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 3325 | 0 | 3238 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 100 | 3325 | 100 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3771 | 0 | 2286 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 3771 | 100 | 3771 | 100 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2128 | 0 | 1011 | 1117 | 0 | 0 | 0 | 2128 | 100 | 2128 | 100 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 2179 | 0 | 1274 | 905 | 0 | 0 | 0 | 2179 | 100 | 2179 | 100 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 2020 | 0 | 1943 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 100 | 2020 | 100 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | 37450 | 5959 | 24519 | 6972 | 102 | 0 | 0 | 35164 | 93,89586115 | 37450 | 100 | 15,91 |

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan : KK = Kepala Keluarga, SBS = Stop Buang Air Besar Sembarangan

TABEL 81

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH KK | SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS) | | KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) | | KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT) | | KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) | | KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT) | | DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM | | KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT) | | KK AKSES RUMAH SEHAT | |
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 6423 | 5 | 100 | 5843 | 90,97 | 6423 | 100 | 5076 | 79,03 | 5076 | 79,03 | 0 | 0 | 6423 | 100 | 5234 | 81,49 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 2763 | 6 | 100 | 719 | 26,02 | 0 | 0 | 1602 | 57,98 | 955 | 34,56 | 6 | 100 | 0 | 0 | 139 | 5,03 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 2295 | 7 | 100 | 1962 | 85,49 | 1988 | 86,62 | 1819 | 79,26 | 1640 | 71,46 | 0 | 0 | 1924 | 83,83 | 1362 | 59,35 |
| 4 | | PARANGIA | 5 | 2101 | 5 | 100 | 2101 | 100 | 2101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 2321 | 5 | 100 | 2321 | 100 | 2321 | 100 | 2321 | 100 | 876 | 37,74 | 0 | 0 | 2081 | 89,66 | 876 | 37,74 |
| 6 | | POLEBUNGING | 5 | 1535 | 5 | 100 | 1397 | 91,01 | 1504 | 97,98 | 325 | 21,17 | 463 | 30,16 | 4 | 80 | 0 | 0 | 1245 | 81,11 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 2094 | 5 | 100 | 1567 | 74,83 | 2094 | 100 | 1401 | 66,91 | 1117 | 53,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 88,06 |
| 8 | | LOWA | 7 | 2209 | 7 | 100 | 1958 | 88,64 | 2021 | 91,49 | 1985 | 89,86 | 1567 | 70,94 | 7 | 100 | 1794 | 81,21 | 1794 | 81,21 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 2286 | 7 | 100 | 1832 | 80,14 | 2020 | 88,36 | 2020 | 88,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 3325 | 8 | 100 | 2659 | 79,97 | 2626 | 78,98 | 2399 | 72,15 | 2201 | 66,20 | 1 | 12,5 | 1898 | 57,08 | 2394 | 72,00 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 3771 | 9 | 100 | 3771 | 100 | 3394 | 90,00 | 972 | 25,78 | 2434 | 64,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 2128 | 6 | 100 | 782 | 36,75 | 1776 | 83,46 | 524 | 24,62 | 589 | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 2179 | 6 | 100 | 2179 | 100 | 2179 | 100 | 1036 | 47,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036 | 47,54 |
| 14 | BUKI | BUKI | 7 | 2020 | 7 | 100 | 1168 | 57,82 | 2020 | 100 | 2020 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **88** | **37450** | **88** | **100** | **30259** | **80,80** | **32467** | **86,69425901** | **23500** | **62,7503338** | **16918** | **45,17** | **18** | **20,4545455** | **14120** | **37,70** | **15924** | **42,52** |

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

**TABEL 82**

**PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TFU TERDAFTAR | | | | | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEKOLAH | | PUSKESMAS | PASAR | TOTAL | SARANA PENDIDIKAN | | | | PUSKESMAS | | PASAR | | TOTAL | |
| | | | | | | | | SD/MI | | SMP/MTs | | | | | | | |
| | | | SD/MI | SMP/MTs | | | | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 15 | 6 | 1 | 1 | 23 | 15 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 23 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 | 14 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 22 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 4 | 100 | 16 | 100 |
| 4 | | PARANGIA | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 14 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 7 | 100 |
| 6 | | POLEBUNGING | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 100 | 5 | 100 | 1 | 100 | - | #DIV/0! | 16 | 100 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 | 18 | 100 |
| 8 | | LOWA | 11 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 100 | 4 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 18 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 18 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 15 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 13 | 7 | 1 | 3 | 24 | 13 | 100 | 7 | 100 | 1 | 100 | 3 | 100 | 24 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 10 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 100 | 5 | 100 | 1 | 100 | 1 | 50 | 18 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 100 | 5 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 17 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 14 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 2 | 100 | 23 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **149** | **62** | **14** | **24** | **249** | **149** | **100** | **62** | **100** | **14** | **100** | **23** | **95,83** | **249** | **100,00** |

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

TABEL 83

## PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JASA BOGA | | | RESTORAN | | | TPP TERTENTU | | | DEPOT AIR MINUM | | | RUMAH MAKAN | | | KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN | | | SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN | | | TPP MEMENUHI SYARAT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | TPP Memenuhi Syarat | |
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 10 | 10 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25 | 21 | 84 | 37 | 16 | 43,24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 49 | 63,64 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 9 | 5 | 55,56 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | 9 | 7 | 77,78 | 27 | 23 | 85,19 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41 | 35 | 85,37 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 27 | 14 | 51,85 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50,00 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 5 | 83,33 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 50 | 43 | 37 | 86,05 | 0 | 0 | #DIV/0! | 51 | 43 | 84,31 |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 15 | 15 | 100,00 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18,18 | 12 | 1 | 8,33 | 0 | 0 | #DIV/0! | 39 | 5 | 12,82 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 63 | 0 | 0,00 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 9 | 5 | 55,56 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 49 | 5 | 10,20 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 52 | 33 | 63,46 | 0 | 0 | #DIV/0! | 53 | 33 | 62,26 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20 | 13 | 65,00 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 5 | 71,43 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **10** | **10** | **100** | **2** | **2** | **100** | **4** | **4** | **100** | **75** | **40** | **53,33** | **118** | **40** | **33,90** | **250** | **133** | **53,2** | **2** | **0** | **0** | **461** | **229** | **49,67** |

Sumber: Seksi Kesehatan Lingkungan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 84**

**KASUS COVID-19 MENURUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS KONFIRMASI | SEMBUH | MENINGGAL | ANGKA KESEMBUHAN (RR) | ANGKA KEMATIAN (CFR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 193 | 190 | 3 | 98,45 | 1,55 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 28 | 28 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 18 | 16 | 2 | 88,89 | 11,11 |
| 4 | | PARANGIA | 20 | 20 | 0 | 100 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 26 | 25 | 1 | 96,15 | 3,85 |
| 6 | | POLEBUNGING | 6 | 6 | 0 | 100 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 8 | 8 | 0 | 100 | 0 |
| 8 | | LOWA | 9 | 9 | 0 | 100 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 15 | 14 | 1 | 93,33 | 6,67 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 5 | 1 | 83,33 | 16,67 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 347 | 339 | 8 | 97,69 | 2,31 |

Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 85**

**KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2022**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | 0-4 TAHUN | | 5-6 TAHUN | | 7-14 TAHUN | | 15-59 TAHUN | | ≥ 60 TAHUN | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 51 | 97 | 14 | 16 | 73 | 120 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 0 | 13 | 15 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 13 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 1 | 8 | 18 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 5 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 83 | 179 | 26 | 27 | 126 | 221 |

Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 86**

## CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA 6-11 TAHUN | | | USIA 12-17 TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2677 | 1447 | 54,05 | 3182 | 2941 | 92,43 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1127 | 334 | 29,64 | 1339 | 1227 | 91,64 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 700 | 245 | 35,00 | 832 | 727 | 87,38 |
| 4 | | PARANGIA | 590 | 225 | 38,14 | 701 | 570 | 81,31 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 821 | 347 | 42,27 | 976 | 882 | 90,37 |
| 6 | | POLEBUNGING | 500 | 221 | 44,20 | 594 | 518 | 87,21 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 739 | 439 | 59,40 | 879 | 700 | 79,64 |
| 8 | | LOWA | 736 | 325 | 44,16 | 875 | 594 | 67,89 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 833 | 264 | 31,69 | 990 | 680 | 68,69 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1011 | 393 | 38,87 | 1203 | 949 | 78,89 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1300 | 197 | 15,15 | 1545 | 1057 | 68,41 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 772 | 322 | 41,71 | 917 | 725 | 79,06 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 758 | 250 | 32,98 | 902 | 626 | 69,40 |
| 14 | BUKI | BUKI | 650 | 184 | 28,31 | 773 | 553 | 71,54 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 13214 | 5193 | 39,30 | 15708 | 12749 | 81,16 |

Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

| USIA 18-59 TAHUN | | | USIA ≥ 60 TAHUN | | | CAKUPAN TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 16064 | 13780 | 85,78 | 2722 | 2709 | 99,52 | 24645 | 20877 | 84,71 |
| 6761 | 5773 | 85,39 | 1145 | 1134 | 99,04 | 10372 | 8468 | 81,64 |
| 4202 | 3529 | 83,98 | 712 | 695 | 97,61 | 6446 | 5196 | 80,61 |
| 3539 | 2881 | 81,41 | 600 | 581 | 96,83 | 5430 | 4257 | 78,40 |
| 4928 | 4011 | 81,39 | 835 | 808 | 96,77 | 7560 | 6048 | 80,00 |
| 2999 | 2337 | 77,93 | 508 | 483 | 95,08 | 4601 | 3559 | 77,35 |
| 4437 | 3139 | 70,75 | 752 | 716 | 95,21 | 6807 | 4994 | 73,37 |
| 4415 | 3176 | 71,94 | 748 | 698 | 93,32 | 6774 | 4793 | 70,76 |
| 4996 | 3415 | 68,35 | 847 | 743 | 87,72 | 7666 | 5102 | 66,55 |
| 6069 | 4169 | 68,69 | 1028 | 995 | 96,79 | 9311 | 6506 | 69,87 |
| 7800 | 4738 | 60,74 | 1322 | 1060 | 80,18 | 11967 | 7052 | 58,93 |
| 4630 | 3013 | 65,08 | 785 | 700 | 89,17 | 7104 | 4760 | 67,00 |
| 4550 | 3240 | 71,21 | 771 | 739 | 95,85 | 6981 | 4855 | 69,55 |
| 3899 | 2760 | 70,79 | 661 | 597 | 90,32 | 5983 | 4094 | 68,43 |
| 79289 | 59961 | 75,62 | 13436 | 12658 | 94,21 | 121647 | 90561 | 74,45 |

**TABEL 86**

## CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 2 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA 6-11 TAHUN | | | USIA 12-17 TAHUN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2677 | 924 | 34,52 | 3182 | 2575 | 80,92 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1127 | 155 | 13,75 | 1339 | 1079 | 80,58 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 700 | 168 | 24,00 | 832 | 594 | 71,39 |
| 4 | | PARANGIA | 590 | 168 | 28,47 | 701 | 454 | 64,76 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 821 | 337 | 41,05 | 976 | 664 | 68,03 |
| 6 | | POLEBUNGING | 500 | 134 | 26,80 | 594 | 407 | 68,52 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 739 | 272 | 36,81 | 879 | 590 | 67,12 |
| 8 | | LOWA | 736 | 179 | 24,32 | 875 | 574 | 65,60 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 833 | 144 | 17,29 | 990 | 384 | 38,79 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1011 | 18 | 1,78 | 1203 | 421 | 35,00 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1300 | 121 | 9,31 | 1545 | 389 | 25,18 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 772 | 157 | 20,34 | 917 | 284 | 30,97 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 758 | 1 | 0,13 | 902 | 388 | 43,02 |
| 14 | BUKI | BUKI | 650 | 110 | 16,92 | 773 | 330 | 42,69 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 13214 | 2888 | 21,86 | 15708 | 9133 | 58,14 |

Sumber : Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

| USIA 18-59 TAHUN | | | USIA ≥ 60 TAHUN | | | CAKUPAN TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 16064 | 12348 | 76,87 | 2722 | 1431 | 52,57 | 24645 | 17278 | 70,11 |
| 6761 | 4838 | 71,56 | 1145 | 286 | 24,98 | 10372 | 6358 | 61,30 |
| 4202 | 2469 | 58,76 | 712 | 390 | 54,78 | 6446 | 3621 | 56,17 |
| 3539 | 2193 | 61,97 | 600 | 431 | 71,83 | 5430 | 3246 | 59,78 |
| 4928 | 2214 | 44,93 | 835 | 173 | 20,72 | 7560 | 3388 | 44,81 |
| 2999 | 1948 | 64,95 | 508 | 231 | 45,47 | 4601 | 2720 | 59,12 |
| 4437 | 2329 | 52,49 | 752 | 291 | 38,70 | 6807 | 3482 | 51,15 |
| 4415 | 2338 | 52,96 | 748 | 302 | 40,37 | 6774 | 3393 | 50,09 |
| 4996 | 2131 | 42,65 | 847 | 244 | 28,81 | 7666 | 2903 | 37,87 |
| 6069 | 1863 | 30,70 | 1028 | 185 | 18,00 | 9311 | 2487 | 26,71 |
| 7800 | 1615 | 20,71 | 1322 | 112 | 8,47 | 11967 | 2237 | 18,69 |
| 4630 | 1357 | 29,31 | 785 | 55 | 7,01 | 7104 | 1853 | 26,08 |
| 4550 | 1593 | 35,01 | 771 | 149 | 19,33 | 6981 | 2131 | 30,53 |
| 3899 | 1919 | 49,22 | 661 | 205 | 31,01 | 5983 | 2564 | 42,85 |
| 79289 | 41155 | 51,91 | 13436 | 4485 | 33,38 | 121647 | 57661 | 47,40 |

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL KESEHATAN

## Tahun 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2023. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang berisi situasi dan kondisi kesehatan pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun berdasarkan ketersediaan data, informasi, dan indikator kesehatan yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2023 ini, pembaca dapat memperoleh data dan informasi mengenai demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan keadaan lingkungan. Data dan informasi yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat membantu dalam membandingkan capaian pembangunan kesehatan, mengukur capaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2023 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan *softcopy* yang dapat diunduh melalui website http://dinkes.kepulauanselayarkab.go.id. Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang.

Benteng-Selayar, Maret 2024

**SEKRETARIS DINAS KESEHATAN**

**MUHAMMAD IHSAN SIDJAL, SKM., M.Kes**
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19690413 199402 1 002

## KATA SAMBUTAN

Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar ini berisi data tahun 2023 tentang demografi, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, pengendalian penyakit, dan keadaan lingkungan. Penerbitan Buku Profil Kesehatan ini adalah yang ke-35 (Tiga Puluh Lima) dari rangkaian penyajian data/informasi yang dimulai sejak tahun 1989.

Dari proses penyusunan Buku Profil Kesehatan ini, digunakan data dari berbagai sumber, baik dari unit kerja lingkup kesehatan maupun di lintas sektor instansi terkait dengan program-program kesehatan, antara lain yang bersumber dari pengelola program dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, maupun yang bersumber dari Instansi terkait seperti: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, Rumah Sakit Umum K.H. Hayyung, UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Selayar, dan UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Kepulauan Selayar serta lainnya.

Pada dasarnya, Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan peremajaan dan perkembangan data dari tahun ke tahun sebelumnya sebagai perkembangan dari hasil upaya pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023.

Untuk meningkatkan mutu penyajian Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar senantiasa diharapkan saran, kritik, dan koreksi untuk perbaikan dan kelengkapannya serta partisiasi dari semua pihak, utamanya dalam rangka mendapatkan data yang akurat, valid, cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai Pembina Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Saya menyambut gembira atas penerbitan Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2023 ini serta menyampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berusaha dengan maksimal sehingga dapat terlaksana. Semoga Buku Profil Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2023 ini dapat bermanfaat dan datanya pun dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan untuk berbagai keperluan terutama untuk kemajuan pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Wassalam,

Benteng-Selayar, Maret 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN**

**dr. H. Husaini, M.Kes**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19651214 199803 1 005

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **ii**
**KATA SAMBUTAN** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **vi**
**DAFTAR GRAFIK** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **x**
**BAB I GAMBARAN UMUM** ..... **1**
1.1. Kondisi Geografis ..... 1
1.2. Keadaan Penduduk ..... 3
1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..... 4
**BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN** ..... **8**
2.1. Rumah Sakit ..... 8
2.2. Puskesmas dan Jaringannya ..... 10
2.3. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan ..... 11
2.4. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat ..... 13
**BAB III SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** ..... **16**
**BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN** ..... **18**
4.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran ..... 18
4.2. Jaminan Kesehatan Nasional ..... 18
**BAB V KESEHATAN KELUARGA** ..... **20**
5.1. Kesehatan Ibu ..... 20
5.2. Kesehatan Anak ..... 29
5.3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut ..... 37
5.4. Imunisasi ..... 39
5.5. Gizi ..... 44
**BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT** ..... **50**
6.1. Penyakit Menular Langsung ..... 50
6.2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) ..... 52
6.3. Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik ..... 61
6.4. Penyakit Tidak Menular ..... 63

**BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN ..... 68**
7.1. Air Minum ..... 68
7.2. Akses Sanitasi Layak ..... 69
7.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ..... 70
7.4. Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) ..... 71
7.5. Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) ..... 72

**LAMPIRAN ..... 73**

# DAFTAR GAMBAR


| No. Gambar | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar | 2 |

## DAFTAR GRAFIK


| No. Grafik | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Piramida Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 3 |
| 2.1 | Jumlah Posyandu Aktif Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 14 |
| 2.2 | Jumlah Posbindu PTM Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 15 |
| 4.1 | Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 19 |
| 5.1 | Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 21 |
| 5.2 | Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 21 |
| 5.3 | Perkembangan Capaian Cakupan K1 dan K4 Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 23 |
| 5.4 | Tren Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasyankes dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 24 |
| 5.5 | Cakupan KB Aktif Menurut Metode Modern Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 29 |
| 5.6 | Tren Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 30 |
| 5.7 | Cakupan KN 1 dan KN Lengkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 32 |
| 5.8 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 34 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.9 | Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 35 |
| 5.10 | Persentase Capaian Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 36 |
| 5.11 | Persentase Pelayanan Skrining Usia Produktif Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 37 |
| 5.12 | Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Menurut Gender Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023 | 39 |
| 5.13 | Cakupan Imunisasi pada Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 41 |
| 5.14 | Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 41 |
| 5.15 | Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 43 |
| 5.16 | Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, Balita dan Ibu Nifas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 46 |
| 5.17 | Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 | 48 |
| 5.18 | Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan TTD 90 Tablet Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 49 |
| 6.1 | Jumlah Penemuan Kasus TB pada Anak Usia 0-14 Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 | 52 |
| 6.2 | Angka Keberhasilan Pengobatan TB Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023 | 52 |
| 6.3 | Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023 | 54 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.4 | Jumlah ODHIV Baru Mendapatkan ARV Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 55 |
| 6.5 | Jumlah Kasus Penemuan Kasus Baru Kusta Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 57 |
| 6.6 | Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 64 |
| 6.7 | Cakupan Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 65 |

# DAFTAR TABEL


| No. Tabel | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 2 |
| 1.2 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar dan Komponen Tahun 2020-2023 | 6 |
| 2.1 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 8 |
| 2.2 | Indikator Kinerja Rumah Sakit Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 10 |
| 2.3 | Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 13 |
| 3.1 | Jumlah Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 | 17 |

# BAB I
# GAMBARAN UMUM

## 1.1. Kondisi Geografis

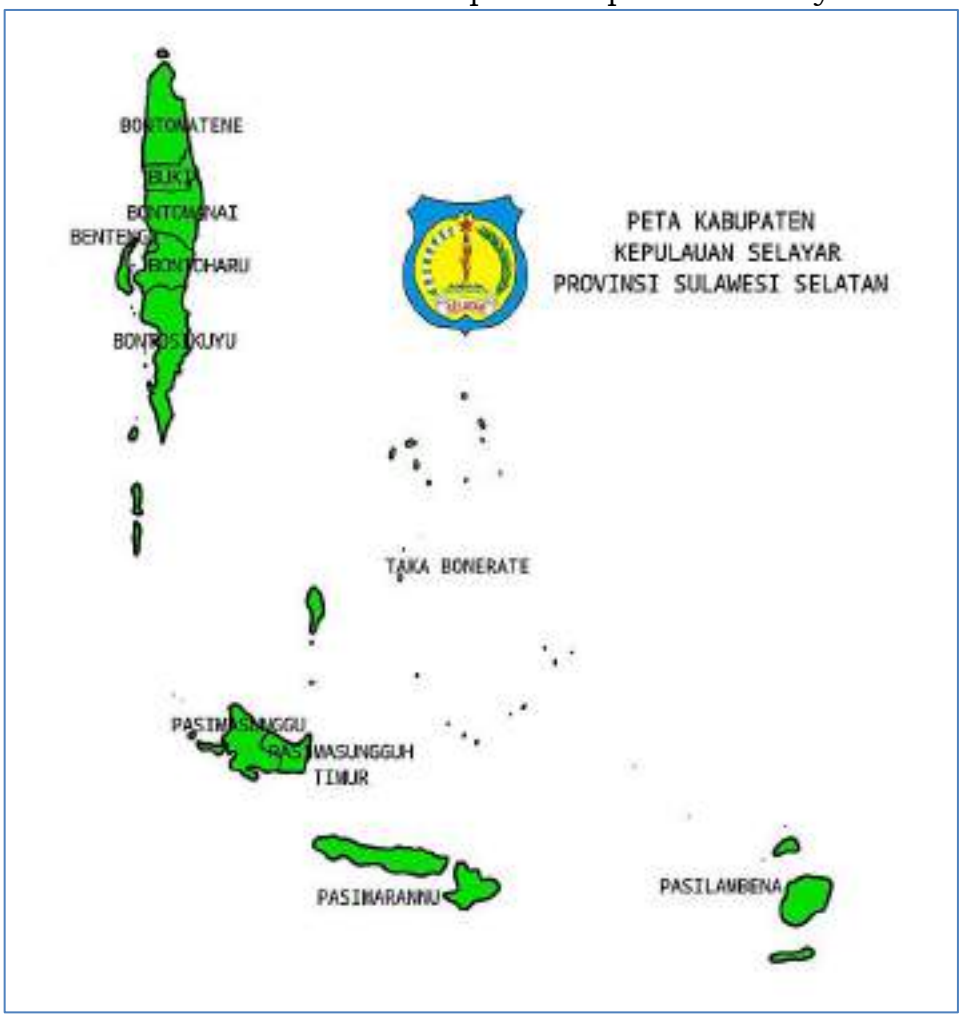
Secara geografis Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 5”42’ - 7°35’ Lintang Selatan dan 120°15’ - 122°15’ Bujur Timur yang berbatasan dengan kabupaten Bulukumba di sebelah Utara, Laut Flores sebelah Timur, Laut Flores dan Selat Makassar sebelah Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan luas Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 1.357.03 km$^2$ persegi dan luas wilayah lautan adalah 9.146,66 km$^2$, secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 Kecamatan dan 88 Desa/Kelurahan.

Berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008 perubahan nama tentang perubahan nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia dan Ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km$^2$ (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 137.071 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar wilayah kecamatan pada area daratan terdiri dari 6 kecamatan yang meliputi Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi 5 kecamatan yaitu Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena. Kabupaten Kepulauan Selayar terletaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan dan satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan berjumlah 130 buah, 7 di antaranya kadang tidak terlihat (tenggelam) pada saat air pasang. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 1.357,03 km$^2$ wilayah daratan (12,91%) dan 9.146,66 km$^2$ wilayah lautan (87,09%). Secara astronomis, Kabupaten

Kepulauan Selayar berada pada koordinat (letak astronomi) 5°42' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' bujur timur.

**Gambar 1.1**
Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar



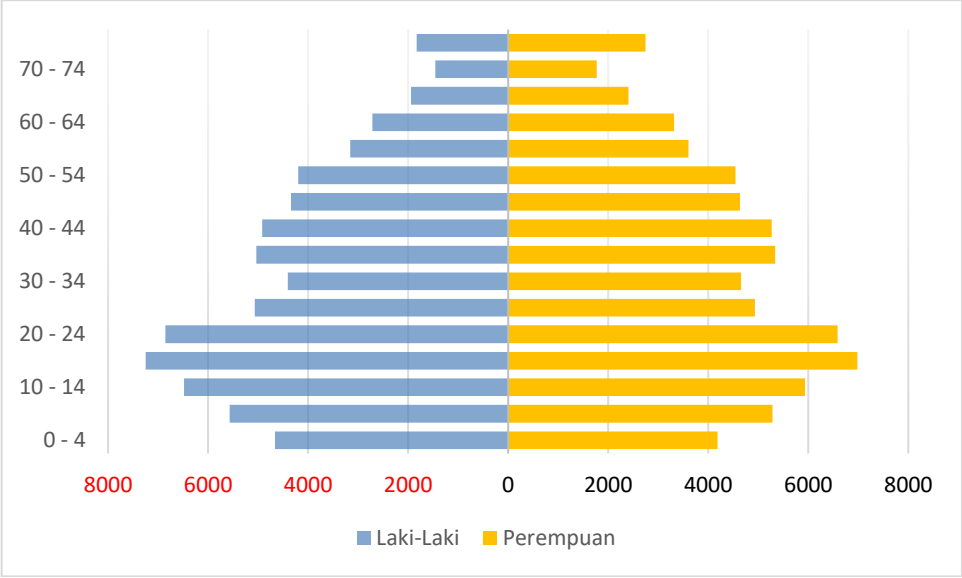

**Tabel 1.1**
Luas Wilayah Per Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023

| No. | Kecamatan | Luas Wilayah (km²) |
|---|---|---|
| 1. | Pasimarannu | 195,33 |
| 2. | Pasilambena | 114,88 |
| 3. | Pasimasunggu | 131,80 |
| 4. | Takabonerate | 49,30 |
| 5. | Pasimasunggu Timur | 67,14 |
| 6. | Bontosikuyu | 248,22 |
| 7. | Bontoharu | 128,12 |
| 8. | Benteng | 24,63 |
| 9. | Bontomanai | 136,42 |
| 10. | Bontomatene | 193,05 |
| 11. | Buki | 68,14 |
| Total | | 1.357,03 |

## 1.2. Keadaan Penduduk

Hasil estimasi jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 142.100 jiwa. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebesar 104 jiwa per $km^2$, Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.

**Grafik 1.1**
Piramida Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023



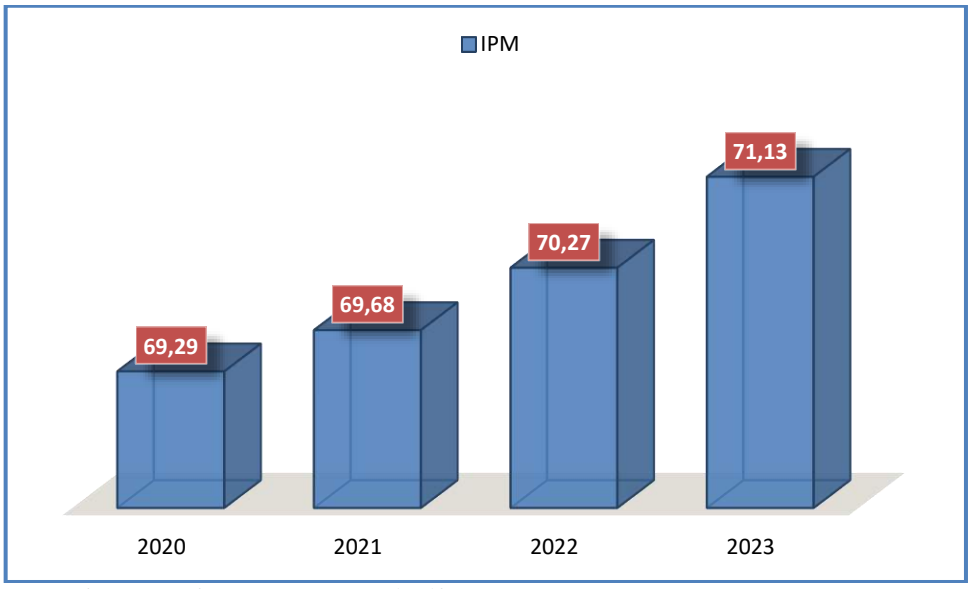
## 1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Berdasarkan konsep Badan Pusat Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Ada 4 (empat) Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu (1) Angka Harapan Hidup: Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup; (2) Angka Melek Huruf: Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat

membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya; (3) Rata-Rata Lama Sekolah: Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal; (4) Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

**Grafik 1.2**
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2023




*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 mencapai 71,13, meningkat 0,86 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,27). Selama 2020-2023, IPM Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata meningkat setiap tahunnya. Adapun indeks Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar menurut dimensi penyusunnya dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

**Tabel 1.2**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kepulauan Selayar dan Komponen Tahun 2020-2023

| Komponen | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Umur Panjang dan Hidup Sehat** | | | | | |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 72,71 | 72,77 | 73,05 | 73,27 |
| **Pengetahuan** | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 12,65 | 12,66 | 12,67 | 12,69 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 7,88 | 8,08 | 8,09 | 8,35 |
| **Standar Hidup Layak** | | | | | |
| Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (PPP) | Rp. 000 | 8.970 | 9.060 | 9.446 | 9.830 |
| **Indeks Pembangunan Manusia** | | **67,38** | **67,76** | **70,27** | **71,13** |

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024*

Pada tahun 2023 capaian Umur Harapan Hidup (UHH) Kepulauan Selayar sebesar 73,27 tahun. Meningkat 0,22 poin dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2020-2023 cenderung stabil pada kisaran 72-73 tahun dan meningkat setiap tahunnya.

Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian UHH Kepulauan Selayar yaitu kondisi kesehatan ibu hamil termasuk penolong kelahiran dan tempat melahirkan. Kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik pada periode 2023.

Persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 94,03 persen pada tahun 2023, menurun sebesar 0,86 poin persen dibandingkan tahun 2022 (94,89 persen). Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah dan lainnya pada tahun 2023 sebesar 5,97 persen, meningkat 0,86 persen dibandingkan tahun 2022 (5,11 persen). Hal ini menunjukkan semakin berkurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan sehingga menurunkan peluang keselamatan persalinan dan anak lahir hidup.

# BAB II
# FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

## 2.1. Rumah Sakit

Rumah Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Jumlah Rumah Sakit pada Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 2 Rumah Sakit, yang terdiri dari 2 Rumah Sakit Umum. Hal ini diharapkan agar akses layanan rujukan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan kepemilikan, jumlah Rumah Sakit pada Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kepemilikan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

| No. | Kepemilikan | Jenis | |
|---|---|---|---|
| | | Umum | Khusus |
| 1. | Pemerintah Kabupaten | 2 | 0 |

*Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Pelayanan rumah sakit terdiri pelayanan dasar medik, pelayanan spesialis, dan pelayanan penunjang. Salah satu pelayanan dasar medik adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Jumlah kunjungan rawat jalan di 2 Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah 27.194, sedangkan jumlah kunjungan rawat inap sebesar 5.661 jiwa (Tabel 5).

Jumlah pelayanan gawat darurat (gadar) level 1 untuk rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah 100% (tabel 6). Kapasitas tempat tidur (TT) yang mencukupi akan menunjang mutu pelayanan yang ada di rumah sakit. Jumlah tempat tidur (TT) dari 2 Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah 181 (Tabel 7).

Rata-rata jumlah kematian umum untuk setiap 1.000 penderita keluar rumah sakit (GDR) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah 19,2. Sedangkan Rata-rata jumlah kematian 48 jam setelah di rawat untuk 1.000 penderita keluar (NDR) tahun 2023 adalah 12,1. Berikut indikator pelayanan di Rumah Sakit antara lain:

1. BOR *(Bed Occupancy Ratio)* adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal menurut Kemenkes RI adalah 60-85%. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 2 rumah sakit dengan jumlah tempat tidur sebanyak 181 tempat tidur dan capaian angka BOR RS Tahun 2023 adalah 48,3% (Tabel 8).
2. BTO *(Bed Turn Over)* adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Kondisi BTO RS di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun 2023 adalah 35, artinya rendahnya penggunaan tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel 8).
3. TOI *(Turn Over Interval)* adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah 5, artinya tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar kosong tidak digunakan rata-rata selama 5 hari tidak sesuai standar Kemenkes RI (Tabel 8).
4. ALOS *(Average Length of Stay)* adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai ALOS yang

ideal antara 6-9 hari. Di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah 5 hari, artinya belum memenuhi standar yang ditetapkan Kemenkes RI (Tabel 8). Nilai indikator rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dibanding dengan standar Kemenkes RI, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**
Indikator Kinerja Rumah Sakit
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

| No. | Indikator | Tahun 2023 | Standar Kemenkes |
|---|---|---|---|
| 1. | BOR | 48,3 % | 60-85% |
| 2. | BTO | 35 Kali | 40-50 Kali |
| 3. | TOI | 5 Hari | 1-3 Hari |
| 4. | ALOS | 5 Hari | 6-9 Hari |

*Sumber: Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 2.2. Puskesmas dan Jaringannya

Puskesmas menurut Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan sampai di tingkat Kecamatan.

Sampai dengan Tahun 2023, jumlah puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 15 puskesmas, yang terdiri dari 12 puskesmas rawat inap dan 3 puskesmas rawat jalan (tabel 4).

Menurut WHO, perbandingan ideal antara puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1:30.000. Namun, jumlah puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2023 baru ada 15 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan. Artinya 1 puskesmas harus melayani 9.473 penduduk. Kondisi ini yang sangat tidak ideal. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan, memprogramkan penambahan jumlah puskesmas dari tahun ke tahun.

Sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, puskesmas dituntut untuk dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin pelayanan yang berkualitas dilakukan melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi puskesmas menilai tiga kelompok pelayanan di puskesmas yaitu administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Jika standar-standar tersebut terpenuhi, maka akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke puskesmas.

Upaya kesehatan perseorangan yang ada di puskesmas dilaksanakan dalam beberapa bentuk diantaranya rawat jalan dan rawat inap. Pada Tahun 2023 jumlah kunjungan pasien baru di puskesmas sebanyak 67.276 orang untuk rawat jalan dan 1.913 orang untuk rawat inap (tabel 5).

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan. Jaringan pelayanan puskesmas terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan desa. Sedangkan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas klinik, rumah sakit, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4 di lampiran ini.

## 2.3. Sarana Kefarmasian dan Alat Kesehatan

### 1. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan obat, sehingga pelayanan kesehatan tidak terhambat.

Persentase puskesmas dengen ketersediaan obat dan vaksin esensial adalah Persentase puskesmas yang memiliki 80% obat dan vaksin esensial (pemantauan dilaksanakan terhadap 40 item obat indikator).

Berdasarkan ketersediaan obat esensial pada Tahun 2023, 100% obat esensial telah tersedia di Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar. Artinya kebutuhan obat untuk pelayanan

kesehatan dasar esensial dan terdapat di dalam Formularium Nasional (FORNAS), sudah 100% terpenuhi (tabel 9).

**2. Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Puskesmas**

Imunisasi dasar merupakan imunisasi awal yang diberikan kepada bayi sebelum berusia satu tahun. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR.

Vaksin merupakan komponen utama dalam pelaksanaan imunisasi, untuk mencapai tujuan imunisasi secara maksimal, maka perlu ditunjang dengan pengelolaan dan ketersediaan vaksin dalam jumlah cukup, berkualitas serta tepat waktu.

Berdasarkan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap, semua puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2023 sudah terpenuhi seluruhnya 100% (Tabel 11).

**3. Sarana Farmasi dan Perbekalan**

Sarana farmasi dan perbekalan kesehatan tergolong menjadi 3 (tiga) kategori antara lain:

a. Sarana produksi, yaitu sarana yang digunakan untuk memproduksi obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetika. Yang termasuk sarana produksi kefarmasian antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ektrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan.
b. Sarana distribusi, meliputi: Pedagang Besar Farmasi (PBF) pusat maupun cabang.
c. Sarana pelayanan kefarmasian, meliputi: apotek, apotek PRB, toko obat dan toko alkes.

Jumlah sarana farmasi dan perbekalan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3**
Jumlah Sarana Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

| No. | Sarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Industri Farmasi | 0 |
| 2. | Industri Tradisional | 0 |
| 3. | Usaha Mikro Obat Tradisional | 0 |
| 4. | Produksi Alat Kesehatan | 0 |
| 5. | Pedagang Besar Farmasi | 0 |
| 6. | Apotek | 19 |
| 7. | Toko Obat | 0 |
| 8. | Toko Alkes | 0 |

## 2.4. Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)

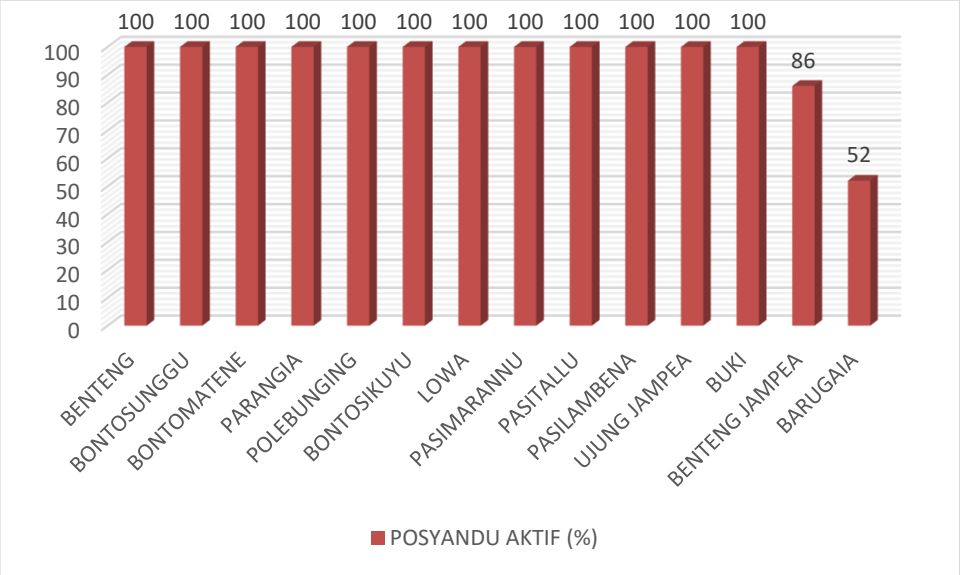
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) adalah suatu upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

### 1. Posyandu

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan untuk masyarakat mulai bayi sampai dengan lansia. Posyandu Balita merupakan pos pelayanan terpadu untuk masyarakat di suatu wilayah tertentu yang sudah disepakati, yang digerakkan oleh masyarakat dimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan terutama kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita, kesehatan dasar bagi para ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur.

Jumlah posyandu balita yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2023 adalah 307. Adapun yang tercatat sebagai posyandu aktif yaitu sebanyak 294 atau sebesar 95,8% (tabel 12).

**Grafik 2.1**
Jumlah Posyandu Aktif
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

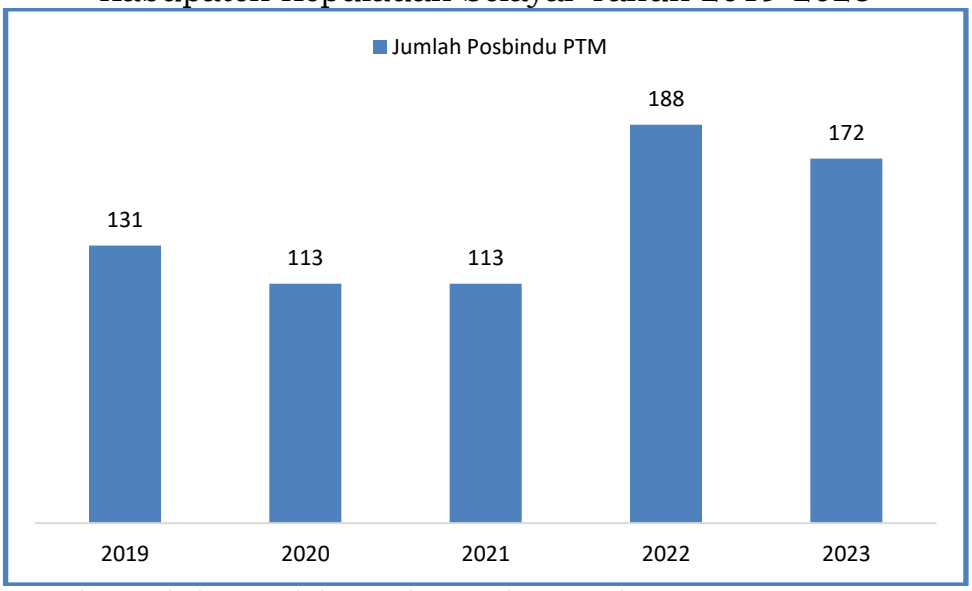
## 2. Posbindu

Masalah kesehatan yang dihadapi saat ini adalah semakin meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). PTM adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis degeneratif, seperti penyakit jantung, Diabetes Melitus (DM), kanker, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), dan hipertensi. Upaya pengendalian PTM dibangun berdasarkan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap ancaman PTM melalui Posbindu PTM.

Posbindu PTM merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik.

Jumlah Posbindu PTM di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terbentuk pada Tahun 2023 sejumlah 172 (tabel 12). Angka ini mengalami penurunan 16 posbindu PTM dibanding tahun 2022 (188 posbindu).

**Grafik 2.2**
Jumlah Posbindu PTM
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB III
# SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu sumber daya kesehatan, yang diharapkan dapat meningkatkan dejarat kesehatan masyarakat. Pesatnya pembangunan bidang kesehatan, salah satunya ditandai oleh makin meningkatnya peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan kesehatan.

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kesehatan. SDMK diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pada bab ini, pembahasan mengenai SDMK mencakup tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan.

**Tabel 3.1**
Jumlah Tenaga Kesehatan Per Jenis Tenaga Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

| No. | Jenis Tenaga Kesehatan | Jenis Kelamin | | Total | Rasio per 100.000 Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | | |
| 1. | Dokter Spesialis dan Dokter Umum | 17 | 50 | 67 | 47,1 |
| 2. | Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Gigi | 4 | 12 | 16 | 11,3 |
| 3. | Bidan | - | 625 | 625 | 439,8 |
| 4. | Perawat | 135 | 470 | 605 | 425,8 |
| 5. | Tenaga Kesehatan Masyarakat | 18 | 63 | 81 | 57 |
| 6. | Tenaga Sanitasi | 8 | 28 | 36 | 25,3 |
| 7. | Tenaga Gizi | 4 | 30 | 34 | 23,9 |
| 8. | Tenaga Kefarmasian | 12 | 65 | 77 | 54,2 |

*Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB IV
# PEMBIAYAAN KESEHATAN

## 4.1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kesehatan Tahun 2022

Amanat UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 171 berbunyi “Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar Rp. 1.028.401417.400,- Total APBD untuk Bidang Kesehatan sebesar Rp. 185.964.374.011,- Total Anggaran APBD tersebut merupakan gabungan dari anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik) dan Dana Bantuan Keuangan (BK) Provinsi Sulawesi Selatan yang kesemuanya mekanisme pencairannya masuk melalui kas daerah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 20 lampiran buku ini.

## 4.2. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

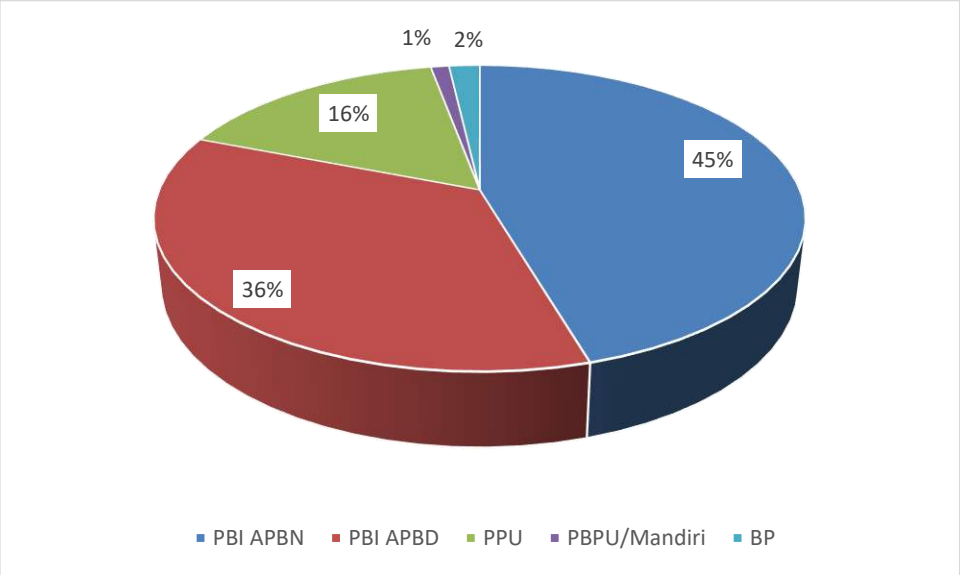
Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Peserta Program JKN terdiri atas 2 kelompok yaitu: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI). Peserta PBI Jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta non PBI adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) dan anggota keluarganya, Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan anggota keluarganya, serta

Bukan Pekerja (BP) dan anggota keluarganya. Adapun cakupan kepemilikan Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini atau tabel 19 pada lampiran buku ini.

**Grafik 4.1**
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinkes Kab. Kep. Selayar*

# BAB V
# KESEHATAN KELUARGA

## 5.1. Kesehatan Ibu

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator kesehatan umum dan kesejahteraan masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat.

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

   Angka Kematian Ibu (AKI) adalah salah satu indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Disebut demikian karena AKI dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas layanan kesehatan.

   Kematian Ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu pada masa kehamilan, bersalin atau nifas, bukan karena kecelakaan. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

   Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tahun 2023 sebesar 6, artinya terdapat kematian ibu sebanyak 6 ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Secara absolut jumlah kematian ibu sebanyak 6 orang ibu. Jumlah tersebut terdiri dari 4 kematian ibu hamil, 1 kematian ibu bersalin dan 1 kematian ibu nifas. Perhitungan Angka Kematian Ibu dipengaruhi jumlah kelahiran hidup (tabel 22).

   Tren Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.1**
Tren Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023

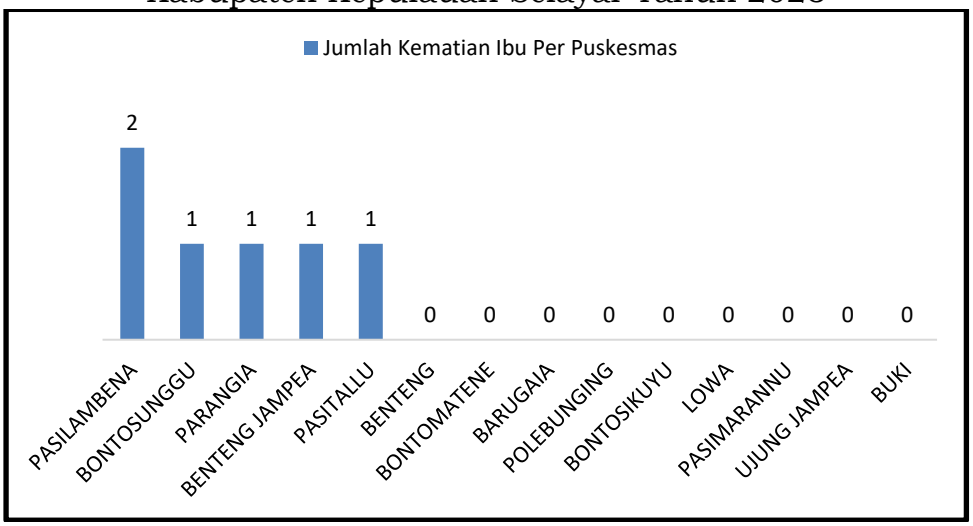



*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 3 per 100.000 kelahiran hidup, maka terdapat peningkatan angka dari tahun sebelumnya. Standar Nasional angka kematian ibu adalah 210 per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa angka kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar berada jauh dibawah standar nasional.

Gambaran kematian ibu jika dilihat per puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Grafik 5.2**
Jumlah Kematian Ibu (AKI) Per Puskesmas
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas, kematian ibu terjadi di wilayah kerja Puskesmas Pasilambena, Bontosunggu, Parangia, Benteng Jampea, dan Pasitallu. Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya skrining risiko yang dilakukan pada ibu hamil. Sehingga dengan adanya risiko tinggi tersebut membuat kondisi ibu menjadi lebih berat atau mengalami komplikasi. Rujukan dini sebagai salah satu alternatif meminimalkan kematian juga belum dilakukan secara maksimal.

Kematian ibu hamil dan bersalin dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pendidikan dan pengetahuan, sosial budaya, sosial ekonomi, geografi dan lingkungan, aksesabilitas ibu pada fasilitas kesehatan serta kebijakan makro dalam kualitas pelayanan kesehatan.

Adapun penyebab kematian ibu pada Tahun 2023 terbesar adalah karena perdarahan sebanyak 2 kasus, disusul kematian ibu disebabkan karena gangguan cerebrovascular sebanyak 1 kasus dan disebabkan karena lain-lain sebanyak 3 kasus. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 23 pada lampiran buku ini.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan kesehatan ibu hamil merupakan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan kesehatan.

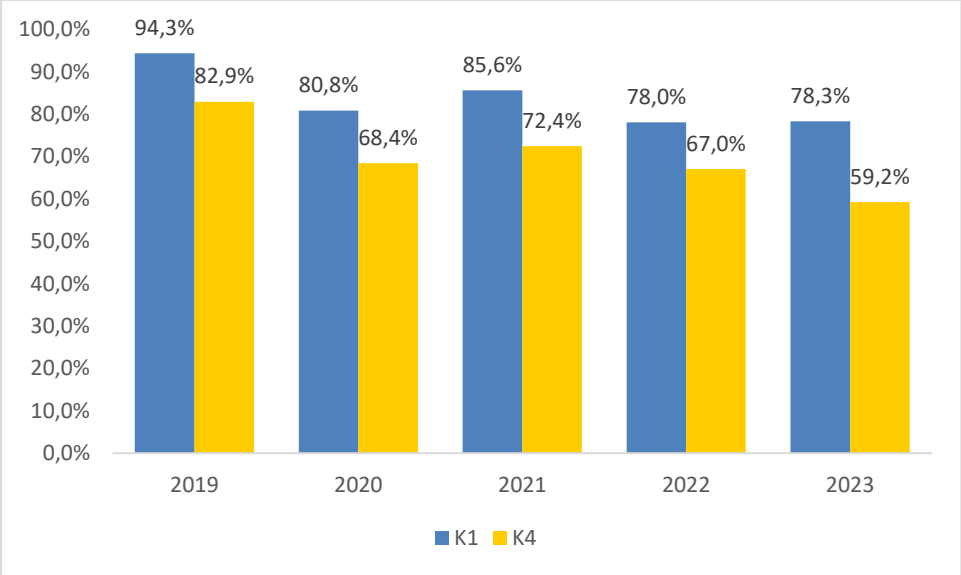
*Antenatal care* adalah pemeriksaan kehamilan yang diberikan oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil untuk mengoptimalkan kesehatan fisik maupun mental ibu hamil, sehingga ibu hamil mampu menghadapi persalinan, saat nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara normal.

Pada Tahun 2023, jumlah ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan proyeksi estimasi yaitu sebanyak 2.581 ibu hamil. Berdasarkan data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), capaian cakupan K1 di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 78,3% dan capaian

cakupan K4 sebesar 59,2%. Antara cakupan K1 dan K4 terdapat perbedaan. Ini dapat diartikan bahwa ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama pelayanan antenatal, pada trimester 3 tidak lagi melakukan kunjungan di fasyankes setempat atau bahkan melakukan persalinan di tempat lain. Mengingat bahwa penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar yang sifatnya mobile dan banyak pendatang, menjadikan salah satu alasan ibu hamil melakukan persalinan di kampung halamannya. Ini menjadikan pelaporan K1 dan K4 tidak sama (tabel 24).

Berikut tren grafik capaian K1 dan K4 pada tahun 2019 – 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Grafik 5.3**
Perkembangan Capaian Cakupan K1 dan K4
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, serta bidan, dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

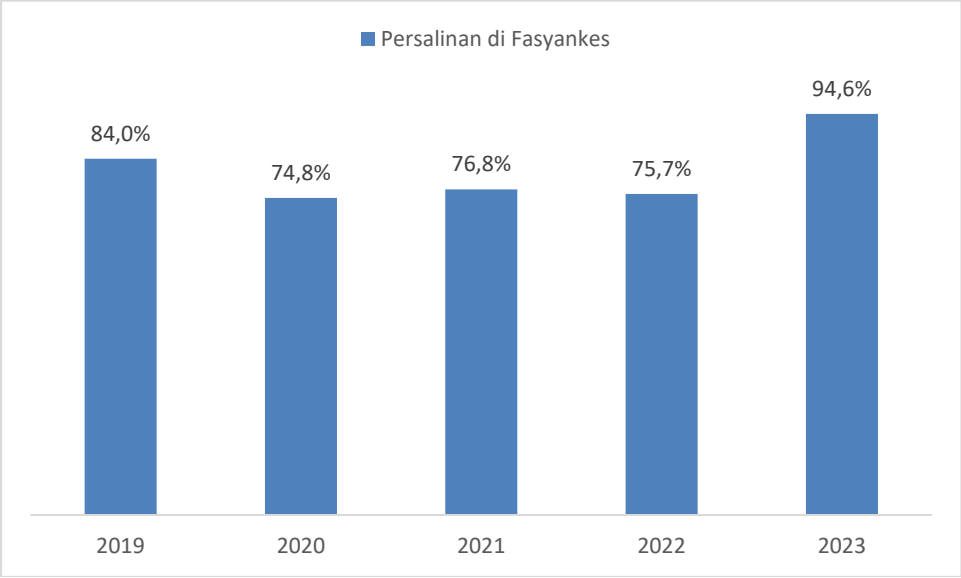
Pelayanan kesehatan ibu bersalin merupakan salah satu indikator pelayanan wajib dasar dalam Standar Pelayanan Kesehatan (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota kepada setiap warganya tanpa terkecuali.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih serta persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada Tahun 2023, jumlah ibu bersalin di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data yaitu 1.868 jiwa. Cakupan pertolongan persalinan di fasyankes dan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, yaitu sebesar 94,6% (1.767 persalinan) (tabel 24).

Gambaran cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan oleh tenaga kesehatan mulai tahun 2019 – 2023 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5.4**
Tren Cakupan Pertolongan Persalinan di Fasyankes dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

4. Pelayanan Komplikasi Kebidanan

Kehamilan dan persalinan selalu mempunyai risiko, dengan kemungkinan bahaya terjadinya komplikasi kebidanan. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin. Risiko terjadinya komplikasi kebidanan meningkat salah satunya pada kehamilan di usia tua.

Sebagai upaya menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, maka dilakukan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan pelayanan/penanganan komplikasi kebidanan. Penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu hamil, bersalin, atau nifas untuk memberikan perlindungan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan.

Berdasarkan laporan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, jumlah perkiraan ibu hamil resiko tinggi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 516 orang (20% dari sasaran ibu hamil) dan 58% dari jumlah tersebut telah memperoleh penanganan sesuai prosedur (Tabel 32). Sedangkan jumlah komplikasi kebidanan (bisa dari ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) berdasarkan jenis komplikasi kebidanan paling tinggi disebabkan karena Kurang Energi Kronis (KEK) yaitu sebanyak 434, anemia sebanyak 400, penyebab lainnya sebanyak 76 (tabel 32).

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, bahwa ibu nifas mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali selama masa nifas, yaitu 1 (satu) kali periode pada 6 (enam) jam sampai dengan 3 (tiga) hari pasca persalinan, 1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pasca persalinan, serta 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42

(empat puluh dua) hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi :

- Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu;
- Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
- Pemeriksaan lokhia dan perdarahan;
- Pemeriksaan jalan lahir;
- Pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI Eksklusif;
- Pemberian Kapsul vitamin A;
- Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
- Konseling; dan
- Penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.

Periode pasca persalinan meliputi masa transisi kritis bagi ibu, bayi dan keluarganya secara fisiologis, emosional, dan sosial. Baik di negara maju maupun negara berkembang, perhatian utama bagi ibu dan bayi terlalu banyak tertuju pada masa kehamilan dan persalinan, sementara keadaan yang sebenarnya justru merupakan kebalikannya, oleh karena risiko kesakitan dan kematian ibu serta bayi lebih sering terjadi pada masa pascapersalinan. Keadaan ini terutama disebabkan oleh konsekuensi ekonomi, disamping ketidaktersediaan pelayanan atau rendahnya peranan fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang cukup berkualitas. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan juga menyebabkan rendahnya keberhasilan promosi kesehatan dan deteksi dini serta penatalaksanaan yang adekuat terhadap masalah dan penyakit yang timbul pada masa pascapersalinan. (R.Soerjo Hadijono, 2016).

Pengertian diatas mendasari adanya layanan pasca persalinan atau masa nifas. Salah satunya adalah Kunjungan Nifas (KF). Kunjungan nifas atau postnatal care adalah suatu perawatan atau asuhan pencegahan dan penilaian rutin untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merujuk komplikasi pada ibu nifas. Asuhan kunjungan nifas ini meliputi konseling Keluarga Berencana, kesehatan mental ibu, gizi dan kebersihan (WHO,

2015). Menurut Rukiyah & Yulianti (2018), kunjungan ibu nifas adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medis pada ibu nifas yang dilakukan selama 6 minggu setelah persalinan.

Pada tahun 2023 cakupan KF 1 di wilayah kerja Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 100% dan cakupan KF lengkap sebesar 97,3%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 24 pada lampiran buku ini.

6. Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui pengatur waktu, jarak, dan jumlah kehamilan. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya yang dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen (Kementrian Kesehatan RI, 2015).

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. Pasangan Usia Subur bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB.

Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kematian ibu dapat disebabkan oleh komplikasi obstetrik atau penyakit yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas (Heni, 2019). Selain itu masih banyak ditemukan kehamilan yang berisiko atau memiliki masalah (terlalu banyak, terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kehamilan) yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu atau yang dikenal dengan “Empat Terlalu (4T)”.

Empat Terlalu (4-T) adalah terlalu muda usia ibu < 20 tahun, terlalu tua usia ibu > 35 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan atau persalinannya < dari 2 tahun, dan terlalu banyak jumlah anak > 4.

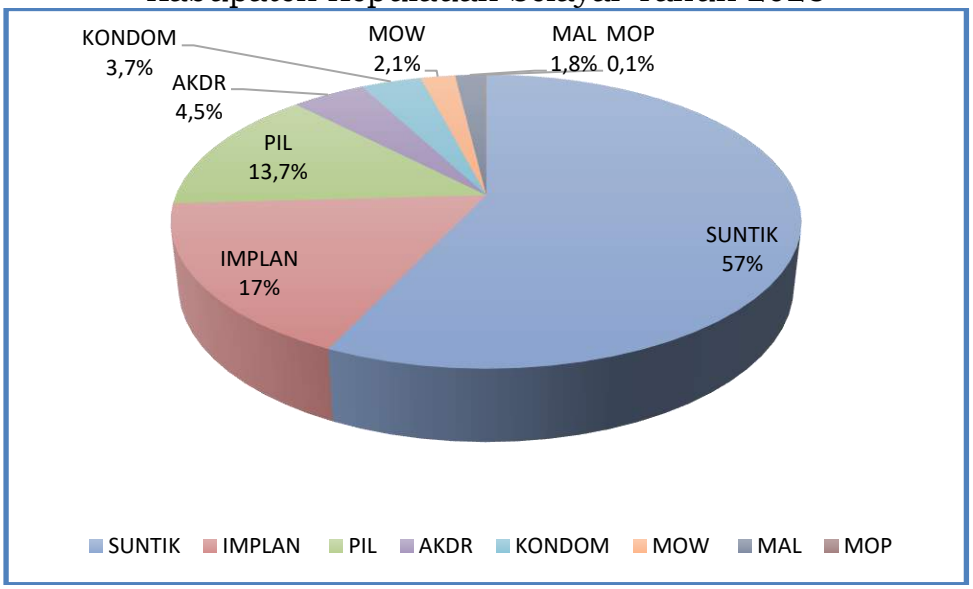
Berdasarkan data proyeksi, jumlah PUS pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 24.813, dengan PUS 4T sebesar 23,9% (5.929), PUS 4T pada KB aktif sebesar 32,6% (1.931), dan PUS ALKI pada KB aktif sebesar 0% (tabel 30).

Berdasarkan data laporan dari 14 Puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar, cakupan peserta KB aktif metode modern tahun 2023 sebesar 69,5% (17.244) dari 24.813 Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada. Dari jumlah tersebut, 0,1% mengalami efek KB, 0,01% mengalami komplikasi ber-KB dan 13,2% melakukan dropout KB (tabel 29).

Berdasarkan jenis metode kontrasepsi yang digunakan, metode yang paling banyak dipilih dan digunakan dari tahun ke tahun adalah metode suntik, yaitu sebanyak 57% dan implan sebanyak 17,1% (tabel 29). Hal tersebut dikarenakan akses untuk memperoleh pelayanan suntikan relatif lebih mudah dan tersedia jaringan pelayanannya sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga dekat dengan tempat tinggal peserta KB.

Cakupan KB aktif di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menurut metode yang digunakan dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

**Gambar 5.5**
Cakupan KB Aktif Menurut Metode Modern
Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 5.2. Kesehatan Anak

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilakukan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita. Tren angka kematian anak dari tahun ke tahun sudah menunjukkan penurunan.

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

   Angka Kematian Bayi *(Infant Mortality Rate)* adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang

sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Angka Kematian Neonatal yang dilaporkan pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 12,2 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah absolut sebanyak 23 neonatal. Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan adalah 14,8 per 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah absolut 28 dari 1.887 kelahiran hidup (Tabel 34). Berikut tren Angka Kematian Bayi (AKB) yang dilaporkan mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.

**Grafik 5.6**
Tren Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi Kesga & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

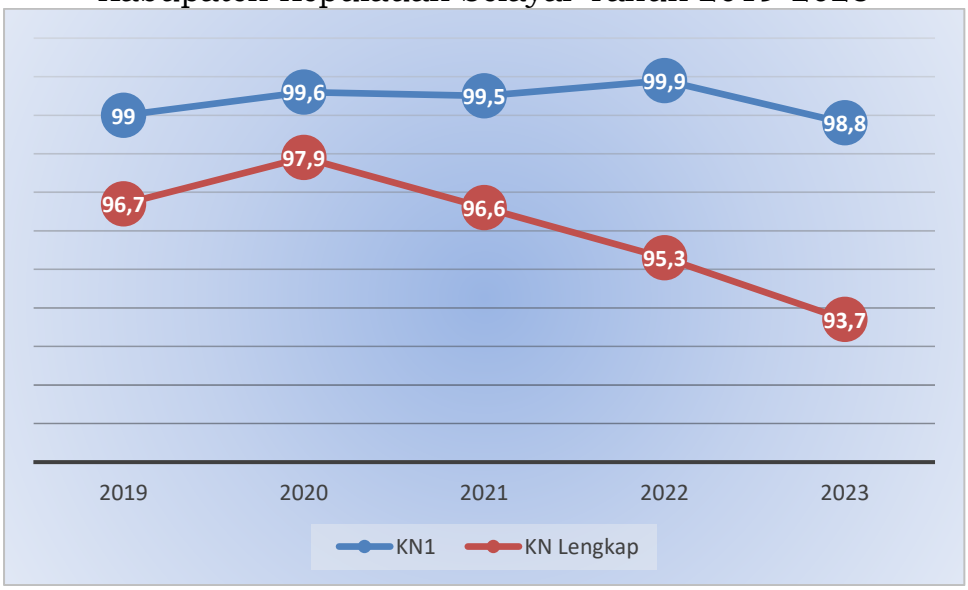
2. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan yang sebelumnya di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali yaitu pada umur 6-48 jam (KN 1), umur 3-7 hari (KN2), dan umur 8- 28 hari (KN 3). Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir adalah cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN 1. Pelayanan dalam kunjungan ini (Manajemen Terpadu Balita Muda) antara lain meliputi konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Cakupan kunjungan neonatus 1 (KN-1) pada Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 98,8%. Sedangkan cakupan kunjungan neonatus lengkap 3 kali (KN lengkap) sebesar 93,7% (tabel 38). Hal ini dapat diartikan bahwa masih ada neonatus yang belum mendapat pelayanan KN lengkap, dikarenakan baru mendapat pelayanan KN-2 atau adanya kematian neonatal.

Cakupan kunjungan neonatus di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019- 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 5.7**
Cakupan KN 1 dan KN Lengkap
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Di Indonesia, diantara penyakit-penyakit yang bisa dideteksi dengan skrining pada bayi baru lahir, Hipotiroid Kongenital (HK) merupakan penyakit yang cukup banyak ditemui. Kunci keberhasilan pengobatan anak dengan HK adalah dengan deteksi dini melalui pemeriksaan laboratorium dan pengobatan sebelum anak berumur 1 bulan. HK sendiri sangat jarang memperlihatkan gejala klinis pada awal kehidupan. Pada kasus dengan keterlambatan penemuan dan pengobatan dini, anak akan mengalami keterbelakangan mental dengan kemampuan IQ dibawah 70. Hal ini akan berdampak serius pada masalah sosial anak. Anak tidak mampu beradaptasi di sekolah formal dan menimbulkan beban ganda bagi keluarga dalam pengasuhannya. Bahkan negara akan mengalami kerugian dengan berkurangnya jumlah dan kualitas SDM pembangunan akibat masalah HK yang tidak tertangani secara dini pada bayi baru lahir.

Guna mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) neonatal, yang dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Skrining Hipotiroid Kongenital.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah ditimbang berat badannya. Cakupan bayi baru lahir ditimbang pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 47,3% dari jumlah 1.887 lahir hidup. Dari jumlah tersebut, 15,9% mengalami BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) (tabel 37).

3. Pelayanan Kesehatan Bayi

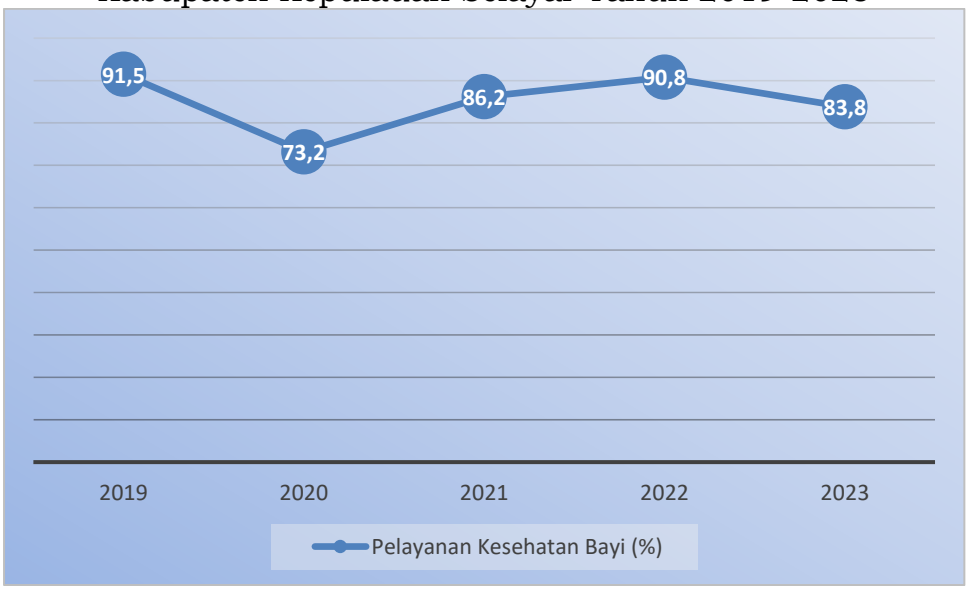
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi:

- Pemberian imunisasi dasar lengkap;
- Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi (SDIDTK);
- Pemberian Vitamin A 100.000 IU;
- Konseling ASI eksklusif;
- Pemberian makanan pendamping ASI;
- Tanda -tanda sakit dan perawatan kesehatan bayi di rumah menggunakan Buku KIA;
- Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

Jumlah bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar 2023 menurut data yaitu sebanyak 2.346 jiwa. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan bayi Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 1.966 atau 83,8% (tabel 40).

Cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar mulai tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.8**
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Pada grafik diatas menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan bayi pada tahun 2023 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan, sikap ibu yang negatif, keterbatasan waktu, tempat tinggal yang berpindah-pindah, kualitas pelayanan Kesehatan dapat mempengaruhi penurunan kunjungan bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan.

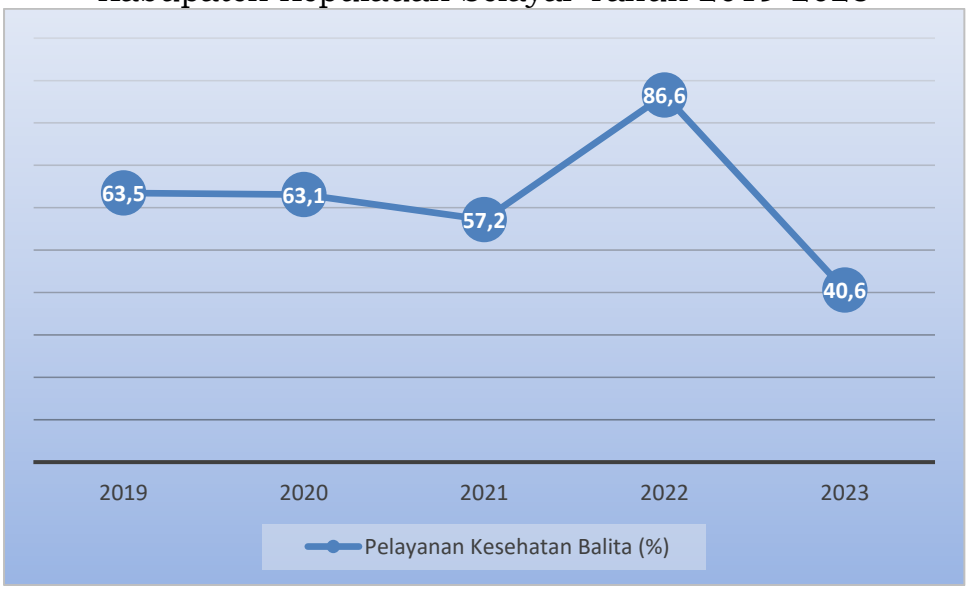
4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita yang dimaksud disini adalah pelayanan kesehatan anak balita usia 12 – 59 bulan. Pelayanan kesehatan balita ini termasuk salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 4 tahun 2019 dan target pencapaiannya adalah 100%.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 adalah sebesar 40,6% dari 7.714 jumlah balita (tabel 46). Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2022 (86,6%) dan 2021 (57,2%).

Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.9**
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

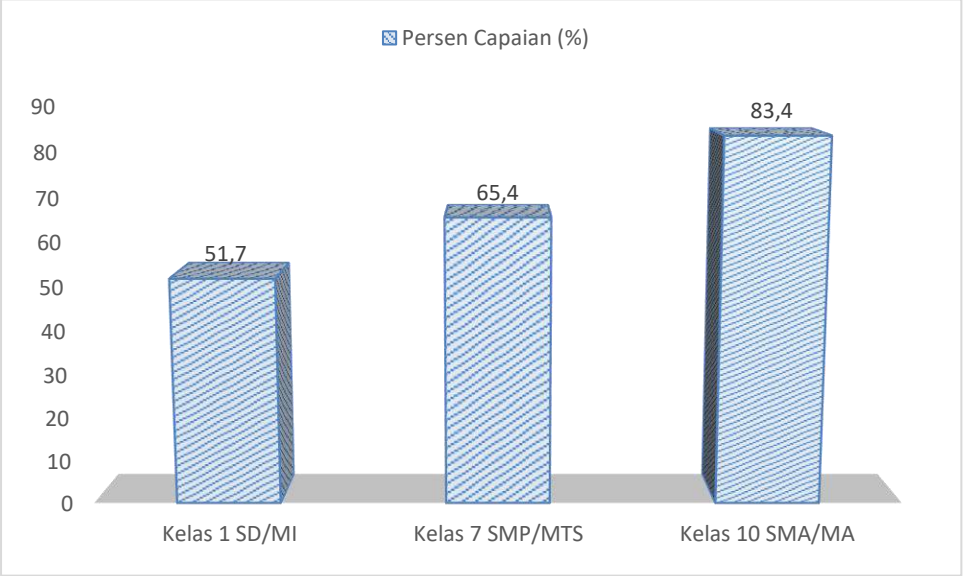
5. Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan kepada anak usia remaja adalah penjaringan kesehatan terhadap anak sekolah. Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan, dan tajam pendengaran.

Adapun capaian kegiatan penjaringan kesehatan pada usia pendidikan dasar Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini atau pada lampiran 49 pada buku ini.

**Grafik 5.10**
Persen Capaian Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Jika dipersentasekan, maka cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 tercapai 51,7% (tabel 49). Ketercapaian ini belum maksimal dan belum memenuhi target yang diamanatkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus 100%. Ketidaktercapaian tersebut karena pada saat skrining kesehatan dilakukan, ada siswa yang tidak masuk karena sakit atau ijin lain, sedangkan petugas skiring harus terus melakukan kegiatan yang lain.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, maka capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar pada Tahun 2023 mengalami penurunan.

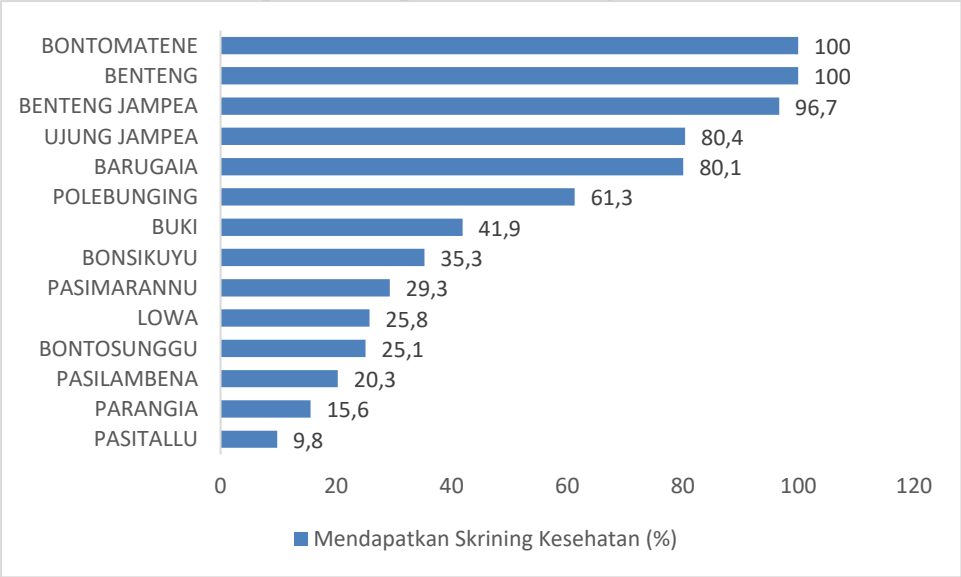
## 5.3. Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut

1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelayanan skrining usia produktif merupakan pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta anamnesa perilaku berisiko. Pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/ atau UKBM. Penetapan sasaran usia produktif (berusia 15-59 tahun) di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam satu tahun menggunakan yaitu sejumlah 76.973 jiwa.

Adapun Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 adalah 53% (40.824) jiwa yang mendapatkan skrining Kesehatan dan 32,1% (13.105) penduduk diketahui beresiko terhadap penyakit tidak menular (Tabel 52).

**Grafik 5.11**
Persentase Pelayanan Skrining Usia Produktif Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi P2PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Skrining kesehatan pada usia produktif termasuk didalamnya adalah skrining kesehatan bagi calon pengantin. Jumlah calon pengantin yang terdaftar di KUA atau lembaga agama lainnya di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah 858 dari jumlah tersebut sebesar 100% (858) telah mendapatkan skrining kesehatan dan 10% catin perempuannya diketahui anemia dan 11,4% gizi kurang (tabel 53).

2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Lanjut usia merupakan seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas. Berdasarkan aspek kesehatan, lansia akan mengalami proses penuaan yang ditandai dengan penurunan pada daya tahan fisik sehingga rentan terhadap penyakit. Penurunan fungsi fisik yang terjadi pada lansia yakni penurunan sistem tubuh seperti sistem saraf, perut, limpa, dan hati, penurunan kemampuan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasa, serta penurunan kemampuan motorik seperti kekuatan dan kecepatan. Berbagai penurunan ini berpengaruh terhadap kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan terhadap status kesehatannya. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap lanjut usia diperlukan untuk mewujudkan lansia yang sehat, berkualitas, dan produktif di masa tuanya.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut juga merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas (lansia) berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

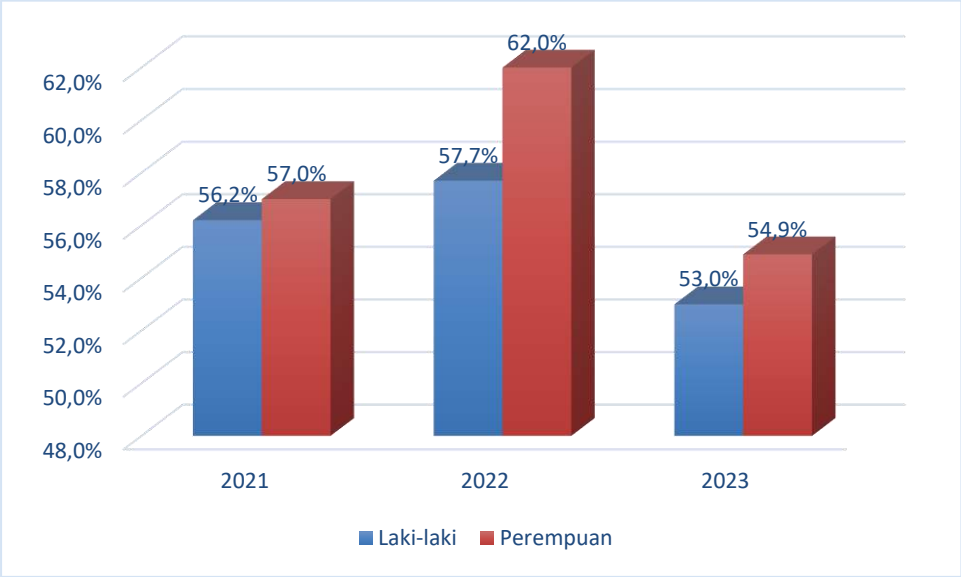
Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Adapun cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 adalah 54,1% dari 20.338 jiwa (Tabel 54). Ketidaktercapaian 100% karena belum maksimalnya kunjungan rumah oleh petugas pada lansia yang tidak beraktifitas secara mandiri dan aktifitasnya perlu bantuan

(kemandirian C), selain itu sosialisasi tentang pengkajian paripurna pasien geriatric (P3G) pada kader belum maksimal sehingga petugas harus melaksanakan sendiri skrining tersebut.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut gender, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.12**
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Menurut Gender
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 5.4. Imunisasi

Pelayanan imunisasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan program imunisasi adalah angka UCI *(Universal Child Immunization)* dan IDL (Imunisasi Dasar Lengkap).

Imunisasi dikelompokkan menjadi imunisasi program dan imunisasi pilihan. Imunisasi program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit tertentu. Imunisasi program terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, sedangkan imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun (baduta), anak usia sekolah dasar dan wanita usia subur (WUS). Imunisasi tambahan merupakan jenis Imunisasi tertentu yang diberikan pada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Imunisasi khusus dilaksanakan untuk melindungi seseorang dan masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu seperti persiapan keberangkatan calon jemaah haji/umroh, persiapan perjalanan menuju atau dari negara endemis penyakit tertentu, dan kondisi kejadian luar biasa/ wabah penyakit tertentu seperti covid-19 yang terjadi di dua tahun terakhir ini.

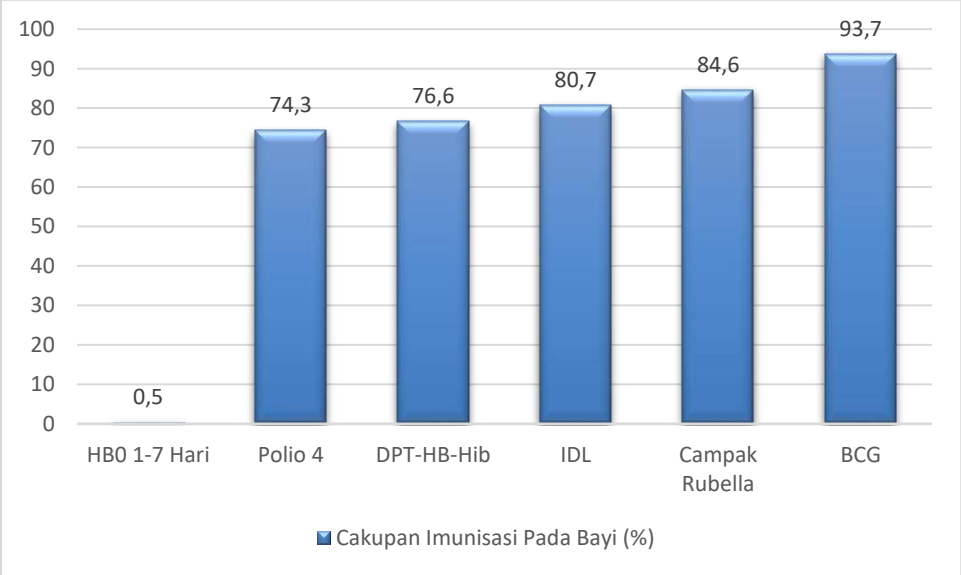
**1. Imunisasi Pada Bayi**

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib3, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/ MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul.

Jumlah lahir hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 berdasarkan proyeksi hitungan BPS yang telah diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI adalah 1.887 jiwa. Cakupan imunisasi dasar yang diberikan kepada bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

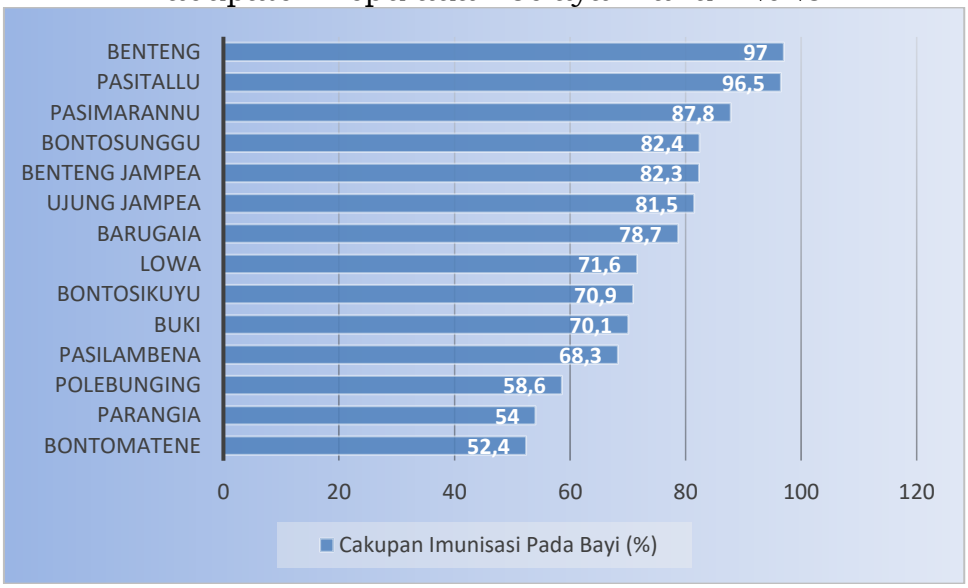
- Hb < 7 Hari sebesar 0,5% (Tabel 42);
- BCG sebesar 93,7% (Tabel 42);
- DPT-HB-Hib3 sebesar 76,6% (Tabel 43);
- Polio 4 sebesar 74,3% (Tabel 43);
- Campak Rubela sebesar 84,6% (Tabel 43); dan
- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 80,7% (tabel 43).

**Grafik 5.13**
Cakupan Imunisasi pada Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 5.14**
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**2. Imunisasi pada Baduta**

Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Salah satu sasaran imunisasi lanjutan adalah anak usia bawah dua tahun (baduta). Imunisasi lanjutan yang diberikan kepada baduta terdiri atas, imunisasi terhadap penyakit difteri, pertussis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh Hemophilus Influenza tipe b (Hib), serta campak.

Cakupan imunisasi pada baduta yang dapat disajikan pada profil kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 adalah DPT-HB-Hib4 sebesar 42,6% dan Campak Rubela 2 sebesar 45,6%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 44 pada buku ini.

**3. Imunisasi pada Ibu**

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/ steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan kematian bayi, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Toksoid Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan ibu hamil.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-49 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil.

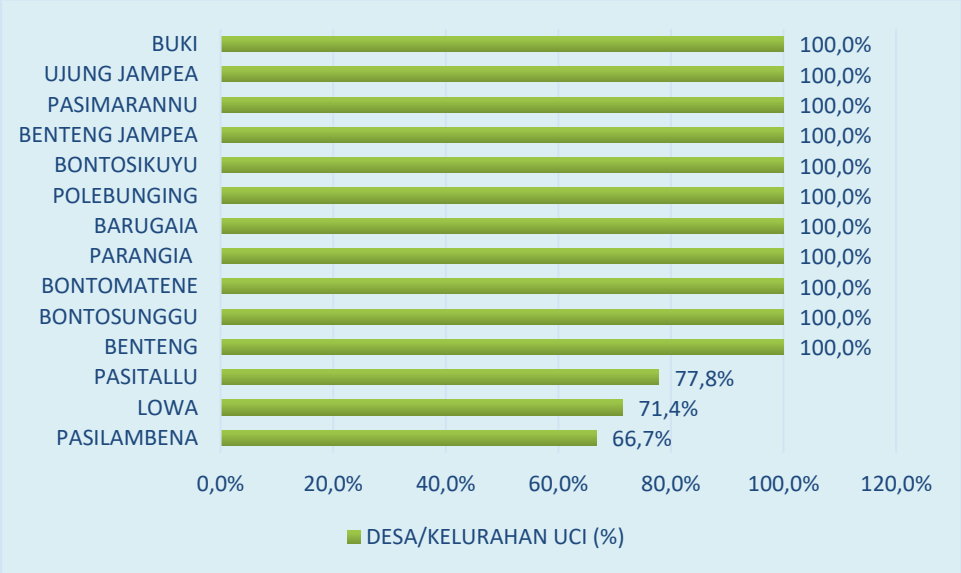
Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar 52,5%. Capaian ini meningkat jika dibanding dengan tahun 2022 lalu (tabel 25).

Sedangkan cakupan imunisasi Td1 sampai dengan Td5 pada WUS tidak hamil dan WUS usia 15-39 tahun dapat dilihat pada tabel 26 dan 27 di lampiran ini.

## 4. UCI *(Universal Child Immunization)*

Indikator *Universal Child Immunization* (UCI) menunjukkan desa/kelurahan yang 80% anak di desa tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Cakupan UCI menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat *(Herd Immunity)* terhadap penularan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi). Capaian UCI Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 93,2%, yakni 82 desa/kelurahan dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar (tabel 41).

**Grafik 5.15**
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023




*Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada desa/kelurahan di beberapa wilayah puskesmas yang belum 100%. Terutama di wilayah kerja Puskesmas Pasitallu, Lowa, dan Pasilambena.

## 5.5. Gizi

### 1. Status Gizi Balita

Status gizi balita merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang tua. Perlunya perhatian lebih terhadap tumbuh kembang anak di usia balita didasarkan fakta bahwa kurang gizi pada masa emas ini bersifat irreversible (tidak dapat pulih), sedangkan kekurangan gizi dapat mempengaruhi perkembangan otak anak.

Status gizi balita adalah cerminan ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi pada balita yang merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Penilaian status gizi dapat diukur dengan antropometri atau pengukuran bagian tertentu dari tubuh. Indikator yang digunakan adalah Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Umur (TB/U) dan Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

Jumlah balita sasaran berdasarkan data proyeksi di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 14.797 balita, jumlah balita yang datang dan ditimbang di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 12.596 balita (D/S: 85,1%) (Tabel 47). Dari 12.596 balita yang ditimbang didapatkan hasil Balita Gizi Kurang (BB/U) sebanyak 2.157 balita (17,1%). Jumlah balita yang diukur tinggi badan sebanyak 6.773 balita dengan hasil Balita Pendek (TB/U) sebanyak 1.253 balita (16,8%). Jumlah Balita yang diukur tinggi badan dan berat badan sebanyak 6.849 didapatkan hasil Balita gizi kurang (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) sebanyak 424 balita (6,2%) serta balita gizi buruk (BB/TB : < - 3 SD) sebanyak 95 balita (1,4 %) (Tabel 48).

Upaya-upaya penanggulangan masalah gizi pada balita yang telah dijalankan dari tahun ke tahun, baik dalam bentuk intervensi langsung seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), perawatan gizi buruk, maupun intervensi tidak langsung seperti pendidikan

gizi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas petugas gizi, pembentukan kelompok-kelompok pendukung ASI dan sebagainya.

**2. Pemberian Kapsul Vitamin A**

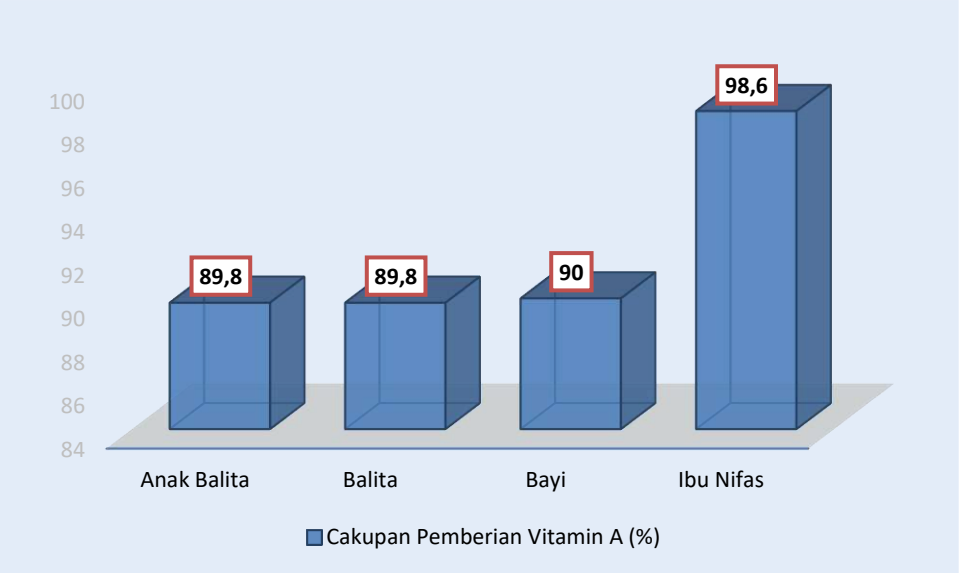
Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting, berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan dan dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Kurang Vitamin A (KVA) merupakan masalah yang dapat terjadi pada semua umur terutama pada masa pertumbuhan. Salah satu dampak kurang vitamin A adalah kelainan pada mata yang umumnya terjadi pada anak usia 6 bulan – 4 tahun yang menjadi penyebab utama kebutaan. Kurang Vitamin A pada anak biasanya terjadi pada anak yang menderita Kurang Energi Protein (KEP) atau gizi buruk sebagai akibat asupan zat gizi sangat kurang, termasuk zat gizi mikro dalam hal ini vitamin A. Anak yang menderita kurang vitamin A mudah sekali terserang infeksi seperti infeksi saluran pernafasan akut, campak, cacar air, diare dan infeksi lain karena daya tahan anak menurun. Namun masalah kekurangan vitamin A dapat juga terjadi pada keluarga dengan penghasilan cukup. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua terutama ibu tentang gizi yang baik. Gangguan penyerapan pada usus juga dapat menyebabkan kekurangan vitamin A.

Cakupan pemberian vitamin A pada bayi usia 6-11 bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 90% dari 773 bayi. Sedangkan cakupan pemberian vitamin A pada anak balita usia 12-59 bulan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 89,8% % dari 6.727 anak balita. Dan cakupan pemberian vitamin A pada balita usia 6-59 bulan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 sebesar 89,8% dari 6.735 balita (tabel 45).

Untuk cakupan ibu nifas yang mendapatkan vitamin A pada tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 98,6% (tabel 24).

**Grafik 5.16**
Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi, Anak Balita, Balita dan Ibu Nifas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa capaian pemberian vitamin A pada semua sasaran yang harus diberikan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal Ini terjadi karena setelah pandemi, partisipasi balita untuk datang ke posyandu ikut meningkat sehingga lebih banyak sasaran yang datang dan diberikan vitamin A.

**3. Pemberian ASI Eksklusif**

ASI adalah makanan alami pertama untuk bayi dan menyediakan semua vitamin, nutrisi dan mineral yang diperlukan bayi untuk pertumbuhan enam bulan pertama, tidak ada cairan atau makanan lain yang diperlukan. ASI terus tersedia hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak pada tahun pertama dan sampai tahun kedua kehidupan. Selain itu, ASI mengandung antibodi dari ibu yang membantu memerangi penyakit.

ASI Eksklusif artinya bahwa bayi hanya diberi ASI saja, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim, selama 6 bulan.

Cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi kurang dari 6 bulan pada Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 50,8 %. Angka ini meningkat jika dibanding capaian pada tahun 2022 (48 %) (Tabel 39).

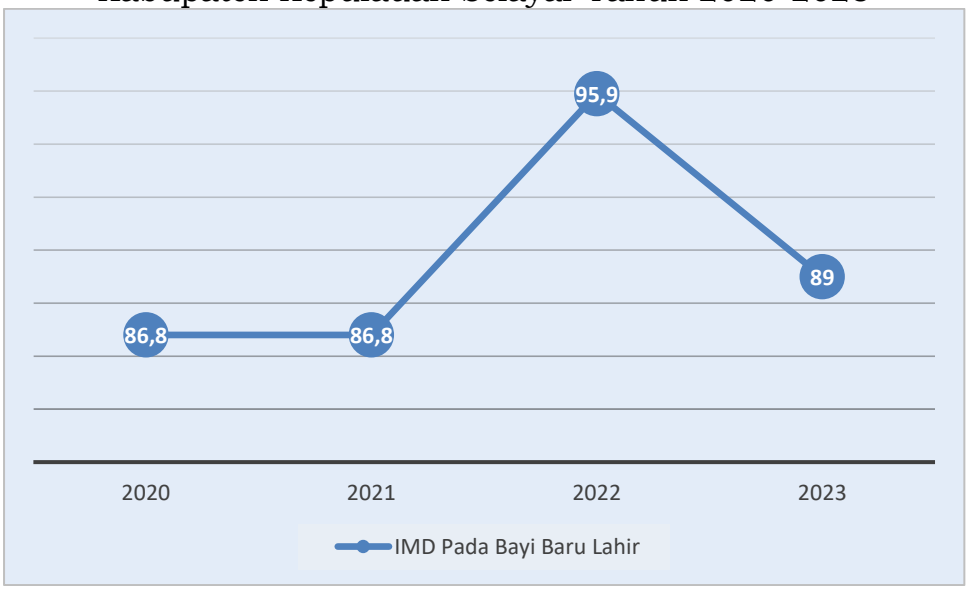
**4. Bayi Baru Lahir Mendapat IMD**

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi bersentuhan pada kulit ibu yang dilakukan sekurang-kurangnya satu jam segera setelah lahir. Jika kontak tersebut terhalang oleh kain atau dilakukan kurang dari satu jam maka dianggap belum sempurna dan tidak melakukan IMD. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan salah satu dari 4 pilar WHO untuk pencegahan stunting.

Berdasarkan data dan laporan dari puskesmas, cakupan bayi baru lahir mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada Tahun 202 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 89% (Tabel 39). Angka ini menurun dibanding tahun 2022 (95,9%) Hal ini menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan IMD oleh fasilitas pelayanan kesehatan, utamanya puskesmas, belum maksimal.

Gambaran cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat IMD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Grafik. 5.17**
Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapatkan IMD
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

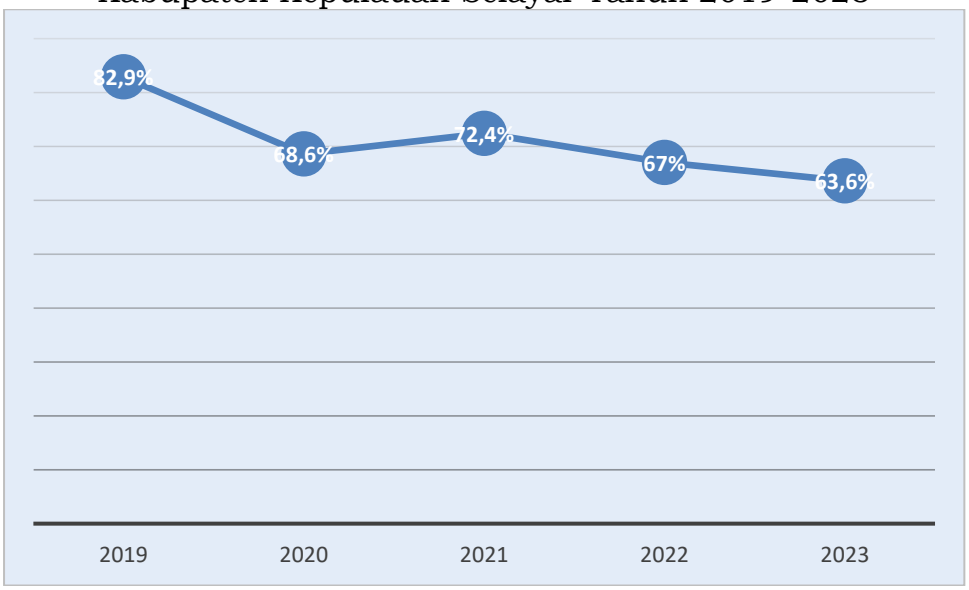
**5. Ibu Hamil Mendapatkan Fe 90 Tablet**

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/ bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Untuk mencegah anemia, setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan.

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan dan kemudian mengkonsumsi Tablet Tambah Daerah (TTD) 90 tablet di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar 63,6%. Angka ini menurun jika dibanding tahun 2022 (67%).

Gambaran cakupan ibu hamil mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet pada tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 5.18**
Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan TTD 90 Tablet
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2023




*Sumber: Seksi KIA & Gizi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

# BAB VI
# PENGENDALIAN PENYAKIT

## 6.1. Penyakit Menular Langsung

### 1. Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis atau biasa disingkat dengan TBC adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium Tuberculosis yang ditularkan melalui dahak (droplet) dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan.

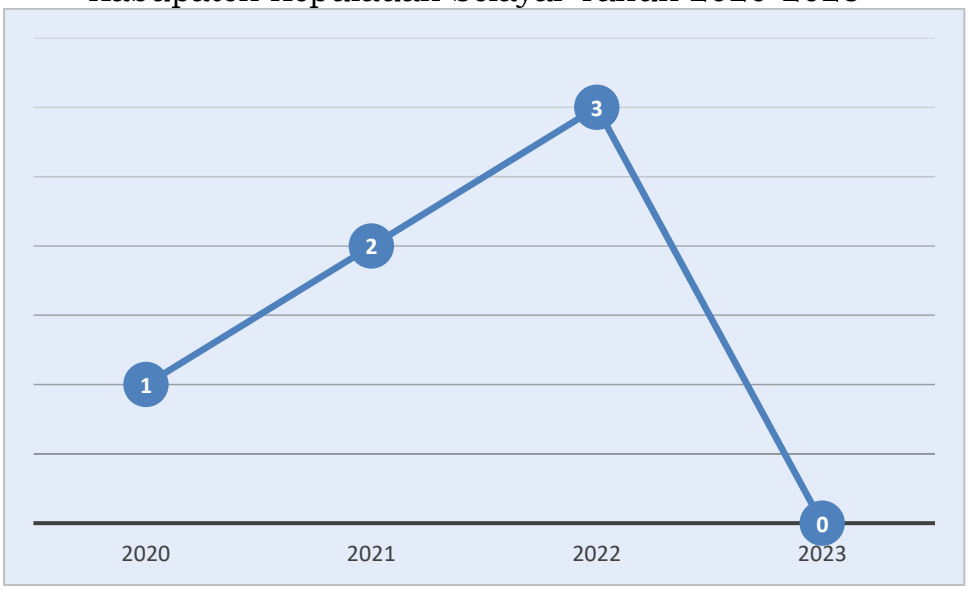
Strategi nasional, terdapat 6 indikator utama dan 11 indikator operasional program pengendalian TB. Antara lain:

- *Treatment coverage* (TC) jumlah kasus TB yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TB pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. Di kabupaten Kepulauan Selayar angka TC pada tahun 2023 sebesar 167,5% (tabel 56). Ini artinya bahwa capaian penemuan kasus TBC yang ditemukan dan diobati mencapai 831 (167,5%) dari estimasi kasus yang telah ditetapkan yakni sebesar 496 kasus TBC.
- Kasus TBC pada anak. Tuberkulosis anak mempunyai permasalahan khusus yang berbeda dengan TBC paru dewasa. Cakupan penemuan kasus TBC anak (0-14 tahun) di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 0 kasus (Tabel 56).
- Angka kesembuhan *(Cure Rate)* Tuberkulosis, yaitu angka yang menunjukkan presentase pasien baru TB paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan, yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negative, dan pada salah satu pemeriksaan sebelumnya diantara pasien baru TB paru yang diobati dan tercatat. Angka kesembuhan *(Cure Rate)* tuberkolosis paru terkonfirmasi bakteriologis pada Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 50 jiwa (14%), dengan rincian 29 laki-laki (14,9%) dan 21 perempuan (12,8%) (tabel 57).

- Angka pengobatan lengkap *(Complete Rate),* yaitu pasien yang telah menyelesaikan pengobatannya secara lengkap, dimana pada salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. Cakupan angka pengobatan lengkap *(Complete Rate)* semua kasus tuberkulosis di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar 46,8% (190 jiwa) (tabel 57).
- Angka keberhasilan pengobatan TB *(Success Rate)* adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang di diobati dan dilaporkan, penderita TB yang ditemukan dan diobati pada kurun waktu 10 – 15 bulan yang lalu (menurut Buku Pedoman Nasional Penanggulangan TB). Sehingga data yang dievaluasi pada Tahun 2023 adalah penderita TB yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022, yaitu sebesar 59,1% atau sebesar 240 dari jumlah semua kasus tuberkulosis terdaftar dan diobati (Tabel 57).
- Jumlah kematian selama pengobatan TB. Jumlah kematian selama pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebanyak 19 jiwa (4,7%) dari semua kasus TB yang terdaftar dan terobati (tabel 57).

Berikut grafik jumlah penemuan TB pada anak usia 0-14 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 – 2023 dan Angka keberhasilan pengobatan TB di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 – 2023.

**Grafik 6.1**
Jumlah Penemuan Kasus TB pada Anak Usia 0-14 Tahun
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 6.2**
Angka Keberhasilan Pengobatan TB
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2023




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**2. Pneumonia Balita**

Pneumonia merupakan penyakit saluran pernapasan bawah akut yang mengenai parenkim paru meliputi alveolus dan jaringan interstisial. Sebagian besar pneumonia disebabkan oleh virus atau bakteri. Secara umum bakteri yang paling berperan penting dalam pneumonia adalah streptococcus pneumonia, Haemophillus influenza, staphylococcus aureus, serta kuman atipik chlamydia dan mikoplasma. Gambaran klinis pneumonia berupa demam, batuk, distress pernapasan, ronkhi, wheezing dan suara pernapasan menurun. Pemeriksaan saturasi oksigen penting dilakukan untuk menilai beratnya pneumonia pada anak. Diagnosis pneumonia ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan foto thoraks.

Prinsip dasar tatalaksana pneumonia anak adalah eliminasi mikroorganisme penyebab dengan antibiotik yang sesuai disertai dengan tatalaksana supportif lainnya.

Menurut laporan data puskesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023, terdapat kunjungan balita dengan kondisi batuk atau kesukaran bernafas yang telah diberikan tata laksana standar sebesar 99,8% dari 1.788 balita yang berkunjung. Sedangkan temuan penderita pneumonia pada balita sebesar 10,4% dari 521 perkiraan balita dengan pneumonia (tabel 58).

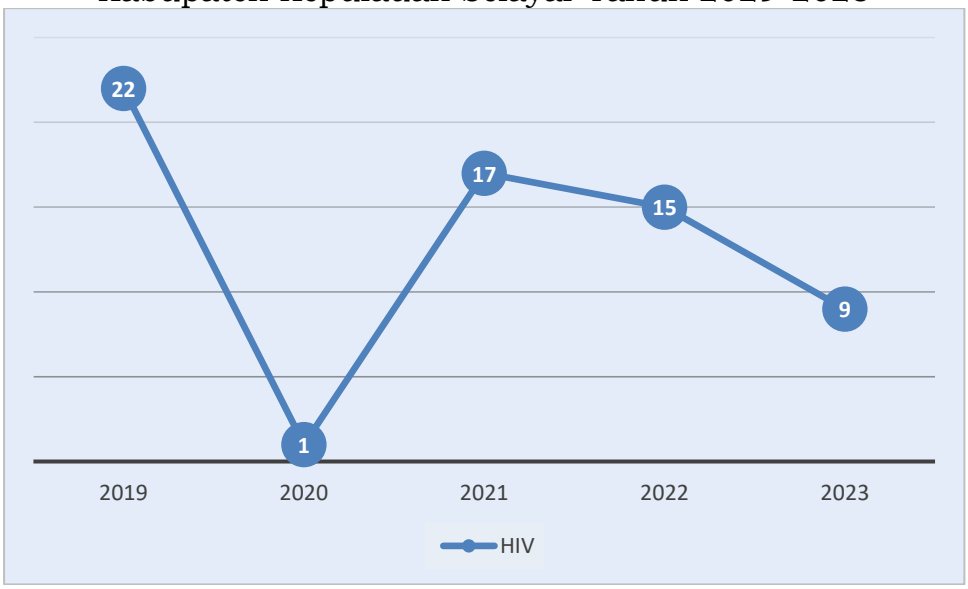
**3. HIV-AIDS**

HIV *(Human Immunodeficiency Virus)* adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan AIDS *(Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* yaitu sekumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV.

Pada tahun 2023, Kabupaten Kepulauan Selayar melaporkan penemuan kasus HIV baru sebanyak 9 kasus. Menurut kelompok umur, rentang terbanyak penemuan kasus HIV dari tahun ke tahun

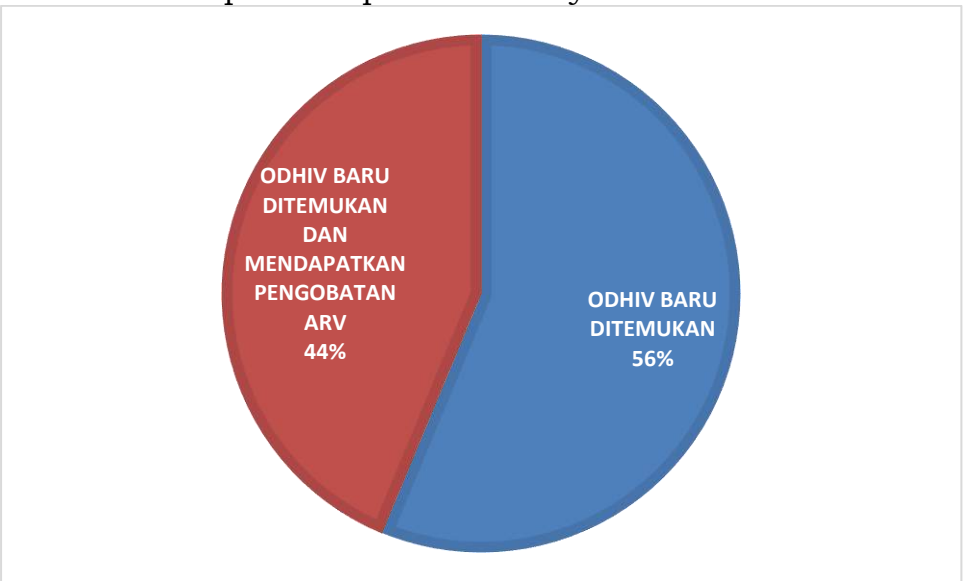
ada pada usia 25-49 tahun yaitu sebesar 100% atau sebanyak 9 kasus (tabel 59). Jumlah ini sebenarnya jauh lebih kecil dibanding kasus yang sebenarnya ada, namun tidak terlaporkan *(under reported).* Ibarat gunung es, data yang terlaporkan belum mewakili semua kasus yang ada. Hal ini disebabkan sulitnya menjangkau populasi kunci (populasi yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS) karena stigma negatif dari masyarakat. Dari sekian jumlah tersebut, yang mendapatkan ARV sebanyak 77,78% (tabel 60). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.3**
Jumlah Kasus HIV yang Dilaporkan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2029-2023




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

**Grafik 6.4**
Jumlah ODHIV Baru Mendapatkan ARV
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

Berdasarkan amanat Permenkes No 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya direvisi menjadi Permenkes No. 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang dengan resiko terinfeksi HIV-AIDS. Capaian SPM untuk indikator ini untuk Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 85,83%. Meski belum maksimal, namun berbagai upaya, baik promotif dan preventif telah dilakukan guna menekan laju perkembangan HIV-AIDS.

**4. Diare**

Di Indonesia, penyakit diare merupakan penyakit endemis potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Diare adalah penyebab nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, diare adalah pembunuh balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Sementara

UNICEF memperkirakan bahwa, setiap 30 detik ada satu anak yang meninggal dunia karena Diare.

Jumlah penderita diare semua umur yang ditangani di sarana kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar 2.293 kasus dari 3.741 perkiraan kasus diare atau sebesar 61,3%. Sedangkan Jumlah penderita Diare Balita yang di tangani di sarana kesehatan Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebesar 489 kasus dari 1.745 perkiraan kasus diare balita atau sebesar 28%. Cakupan pemberian oralit pada kasus diare semua umur sebesar 57,2% dan balita sebesar 1,8%. Sedangkan cakupan pemberian zinc pada kasus diare balita sebesar 8% (tabel 61).

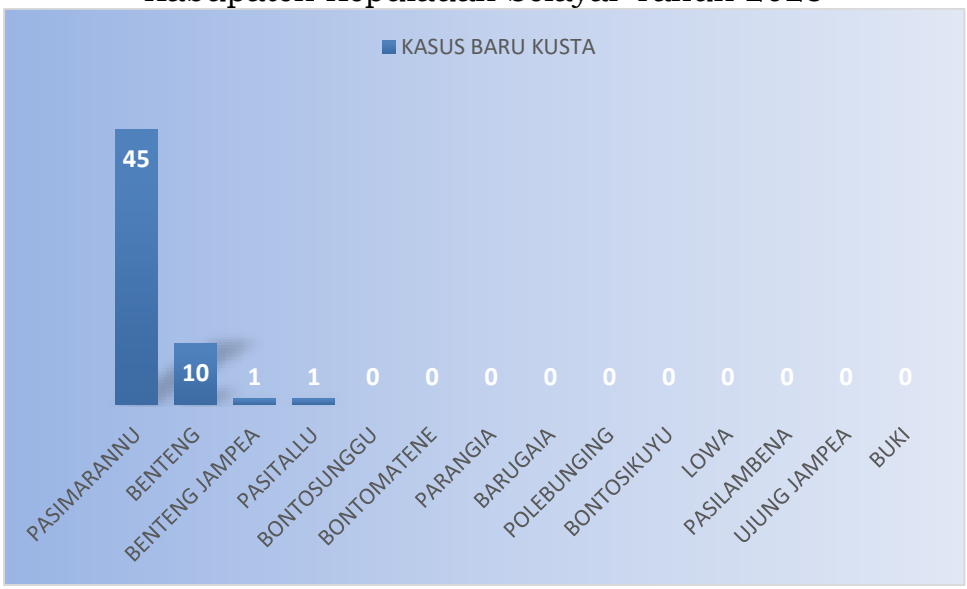
**5. Kusta**

*Mycobacterium leprae* merupakan bakteri penyebab penyakit kusta. Penyakit infeksi kronis ini menyerang kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas dan mata. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Pada tahun 2023 penemuan kasus baru kusta yang dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 57 kasus. Angka ini meningkat jika dibanding tahun 2022. Sedangkan NCDR *(New Case Detection Rate)* adalah sebesar 40,1 per 100.000 penduduk. Yang artinya setiap 100.000 penduduk ditemukan 40,1 kasus baru kusta (tabel 64).

Berikut grafik jumlah penemuan kusta baru di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023.

**Grafik 6.5**
Jumlah Penemuan Kasus Baru Kusta
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi P2PM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 6. Covid-19

*Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang sebelumnya dikenal dengan nama 2019 Novel Corona Virus (2019-nCoV) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS CoV-2) yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. COVID-19 berawal dari munculnya kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019, yang dilaporkan oleh *World Health Organization* (WHO) China Country Office. Tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi dan mengumumkan bahwa kasus tersebut sebagai Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS CoV-2. Transmisi atau penularan COVID-19 berjalan sangat cepat, sehingga menjadi salah satu dasar WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern*

(PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020. Kemudian 2 bulan setelahnya atau pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pada kurun waktu 2023, jumlah kasus covid-19 yang terlaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 0 kasus terkonfirmasi.

## 6.2. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) merupakan penyakit yang diharapkan dapat diberantas atau ditekan dengan imunisasi. Program imunisasi terbukti efektif untuk menekan angka kesakitan dan kematian.

### 1. Polio dan AFP

Penyakit polio adalah penyakit infeksi paralisis yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf, dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Penyakit polio dapat menyerang semua kelompok umur, namun kelompok umur paling rentan adalah kelompuk usia 1-15 tahun dari semua kasus polio. Polio termasuk dalam kategori Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari nonpolio AFP. Kementerian Kesehatan menetapkan non polio AFP rate minimal 2/100.000 populasi penduduk usia < 15 tahun. Kegiatan surveilans AFP menjadi salah satu kunci dalam mencapai Eradikasi Polio (Erapo), sehingga diharapkan suatu saat dunia ini akan bebas dari penyakit Polio.

Pada Tahun 2023 tercatat 2 penemuan kasus AFP. Sasaran penemuan kasus AFP adalah penduduk usia < 15 tahun yaitu sebesar 30.830 jiwa, sehingga AFP rate pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,5 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun. Dengan demikian, Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi target

AFP rate yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk sebaran kasus AFP per Puskesmas disajikan pada lampiran buku ini (tabel 68).

**2. Difteri**

Penyakit difteri merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *corynebacterium diphtheriae* yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran udara bagian atas, dan menghasilkan racun yang mempengaruhi organ lain. Penyakit ini menyebar melalui kontak fisik langsung, atau melalui pernafasan di udara yang mengandung sekresi dari penderita yang batuk atau bersin. Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT 1, DPT 2 dan DPT 3. Upaya menurunkan kasus Difteri dan penyakit PD3I lainnya adalah dengan melakukan imunisasi dasar pada bayi dengan vaksin Difteri-Pertusis-Tetanus dan Hepatitis B (DPTHB). Vaksin tersebut diberikan 4 (empat) kali yaitu pada umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan booster (lanjutan) usia 18 – 24 tahun. Selain itu, untuk antisipasi terjadi lonjakan kasus difteri pada umur anak sekolah maka imunisasi tambahan Tetanus Difteri (TD) juga diberikan pada anak Sekolah Dasar (SD) dan sederajat kelas 1 dari Td untuk kelas 2 dan 5.

Tidak ada kasus difteri yang dilaporkan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 (tabel 69).

**3. Tetanus**

Tetanus neonatorum merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir dapat terkena penyakit tetanus apabila basil clostridium tetani masuk ke dalam tubuhnya melalui luka. Infeksi ini dapat terjadi akibat pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat yang tidak steril.

Sama seperti tahun sebelumnya, Tahun 2023 ini tidak ditemukan kasus tetanus neonatorum di Kabupaten Kepulauan Selayar (tabel 69).

**4. Pertusis dan Hepatitis B**

Salah satu penyakit yang tergolong kedalam Penyakit menular yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) adalah penyakit pertusis. Istilah lain dari penyakit ini adalah batuk rejan atau sering juga dikenal dengan istilah batuk seratus hari yang sering menyerang anak-anak. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri Bordetella Pertusis. Imunisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi angka kejadian dan kematian yang disebabkan oleh pertusis. Pencegahan terhadap Pertusis dapat dilakukan dengan memberikan vaksin pertusis dalam jumlah 12 unit dibagi dalam 3 dosis dengan interval 8 minggu. Vaksin yang digunakan adalah vaksin DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus).

Sedangkan Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagi jarum suntik. Hal ini karena virus hepatitis B berada di dalam darah dan cairan tubuh, seperti sperma dan cairan vagina. Selain itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari wanita yang sedang hamil kepada bayi dalam kandungannya. Hepatitis B dapat dicegah dengan melakukan vaksinasi. Vaksin hepatitis B merupakan salah satu vaksin wajib yang diberikan kepada anak.

Pada Tahun 2023 ditemukan 44 kasus hepatitis B di Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel 69).

**5. Campak**

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari genus Morbillivirus dan termasuk golongan Paramyxovirus. Campak disebut juga morbili atau measles. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk

demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, ensefalitis (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti pneumonia. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada Tahun 2023 ditemukan 48 kasus campak di Kabupaten Kepulauan Selayar (tabel 69).

## 6.3. Penyakit Menular Vektor dan Zoonotik

### 1. DBD

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Peran vektor dalam penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD.

Jumlah penderita DBD di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 sebanyak 68 penderita dan tidak ditemukan kasus kematian akibat DBD (tabel 72). Insiden rate *(Incidence Rate)* atau Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023 sebesar 47,9 per 100.000 penduduk, yang berarti Insiden Rate tersebut sesuai dengan target nasional yang sudah ditetapkan yaitu ≤ 49 per 100.000 penduduk.

Sedangkan angka kematian atau *case fatality rate* sebesar 0% yang berarti sesuai dengan target angka kematian yang ditetapkan pusat yaitu <1%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Kesehatan terus berupaya untuk mencegah dan menanggulangi peningkatan kasus DBD sehingga angka kematian dapat ditekan.

**2. Malaria**

Malaria merupakan penyakit menular yang disebabkan plasmodium yang terdiri dari banyak spesies, namun yang pada umumnya yang menyebabkan malaria adalah plasmodium vivax, plasmodium falciparum, plasmodium malariae, dan plasmodium ovale. Penyakit malaria ditularkan oleh nyamuk anopheles yang di dalam tubuhnya mengandung plasmodium. Penyebaran dan endemisitas malaria sangat dipengaruhi oleh keberadaan tempat perindukan nyamuk anopheles sebagai vektor penular.

Pada Tahun 2023, ditemukan 751 kasus suspek dan kesemuanya positif terkonfirmasi dengan hasil lab mikroskopis. Namun dari semua kasus tersebut, tidak sampai ada yang meninggal (Tabel 73).

**3. Filariasis**

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular kronik yang disebabkan sumbatan cacing filaria di kelenjar/ saluran getah bening, menimbulkan gejala klinis akut berupa demam berulang, radang kelenjar/saluran getah bening, edema dan gejala kronik berupa elefantiasis. Seseorang tertular filariasis bila digigit nyamuk yang mengandung larva infektif cacing filaria. Nyamuk yang menularkan filariasis adalah anopheles, culex, mansonia, aedes dan armigeres. Nyamuk tersebut tersebar luas di seluruh Indonesia sesuai dengan keadaan lingkungan habitatnya (got/saluran air, sawah, rawa, hutan).

Pada Tahun 2023, tidak ditemukan kasus baru untuk filariasis di Kabupaten Kepulauan Selayar (Tabel 74).

## 6.4. Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan kepada orang lain. PTM seperti penyakit diabetes mellitus, stroke, kanker, jantung, hipertensi, asma dan penyakit kronik lainnya merupakan penyebab kematian terbesar di dunia dan dari tahun ke tahun trendnya semakin meningkat. Hal ini salah satunya dikarenakan perubahan gaya hidup yang cenderung tidak berperilaku hidup bersih dan sehat.

Penyakit Tidak Menular merupakan penyakit yang diharapkan dapat ditekan angkanya dengan pelaksanaan program GERMAS melalui posbindu PTM. Program Pencegahan dan Pengendalian diprioritaskan pada upaya deteksi dini faktor risiko PTM.

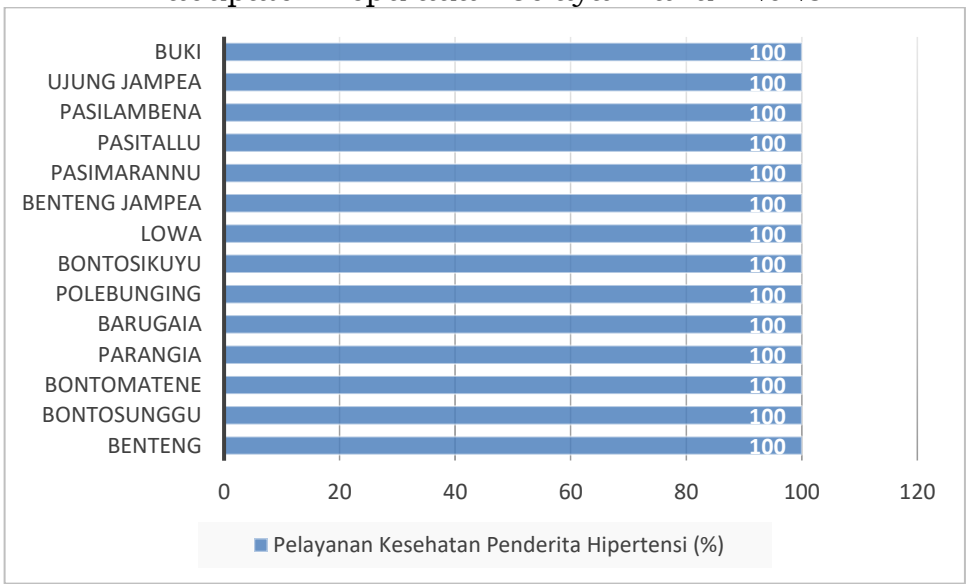
Beberapa penyakit tidak menular yang menjadi prioritas adalah :

### 1. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan dimana tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (*Joint National Committe on Prevention Detection, Evaluasi, and Treatment of High Pressure VII / JNC VII*, 2003).

Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun Tahun 2023 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 20.073 penduduk, dengan proporsi laki-laki dan Perempuan yaitu 49,4%-50,6%. Dari jumlah tersebut, yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 20.073 atau 100% (Tabel 75). Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.6**
Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

## 2. Diabetes Melitus

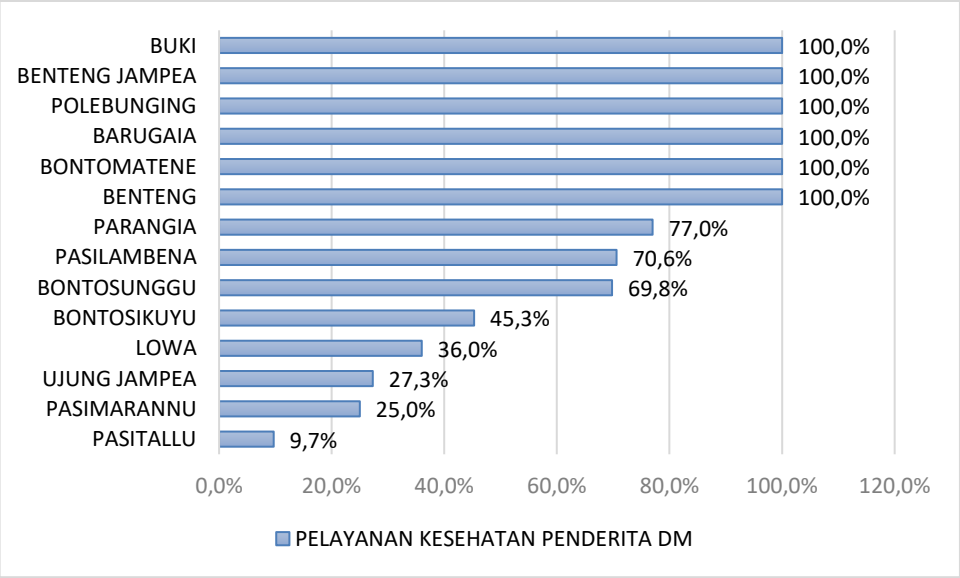
Diabetes Melitus adalah suatu penyakit gangguan metabolik menahun yang ditandai oleh kadar glukosa darah plasma vena yang melebihi nilai normal (GDP ≥ 126 mg/dl dan / atau GDS ≥ 200 mg/dl) yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Setiap penderita diabetes mellitus (DM) usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan standar sebagai upaya pencegahan sekunder.

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi: 1) Pengukuran gula darah; 2) Edukasi 3) Terapi farmakologi.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 1.748 dari 3.255 jumlah prediksi pasien DM atau sebesar 52,8% (Tabel 76).

Cakupan penderita Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menurut Puskesmas dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

**Grafik 6.7**
Cakupan Penderita Diabetes Mellitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Menurut Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023




*Sumber: Seksi P2PTM Dinkes Kab. Kepulauan Selayar*

### 3. Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan jenis kanker yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap prevalensi kanker pada perempuan di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Penyintas kanker payudara dan leher rahim pada umumya terdeteksi pada stadium lanjut. Kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metoda IVA dan papsmear. Deteksi dini dapat menekan angka kematian dan pembiayaan kesehatan.

Hasil pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menunjukkan dari 7.631 wanita usia 30-50 tahun yang diperiksa, 1 orang diantaranya menunjukkan IVA positif (1,9%), 2 orang (3,8%) curiga kanker leher rahim dan yang dirujuk sebanyak 2 orang (66,7). Sedangkan hasil pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dengan metode sadanis di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 menunjukkan dari 7.631 wanita usia 30-50 tahun yang diperiksa, terdapat tumor/benjolan sebesar 4 orang (0,1%), 3 orang (0,1%) curiga kanker payudara, dan dirujuk sebesar 4 orang (57,1%).

Hasil Pelayanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode IVA dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (Sadanis) per Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran Profil Tabel 77.

**4. ODGJ**

Pada bidang kesehatan, masalah kesehatan yang sering tidak menjadi prioritas dalam komitmen mutunya adalah kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa telah dipandang dengan penuh stigma sejak lama. Kehadirannya dianggap tidak lebih penting dibandingkan dengan kondisi kesehatan fisik. Padahal, WHO (2012) menyatakan bahwa kesehatan individu tidak hanya bergantung pada tiadanya penyakit tetapi juga keseimbangan psikologis dan fungsi sosialnya juga *(Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity).*

WHO telah memprediksikan bahwa pada tahun 2020 kasus depresi akan menjadi penyakit urutan kedua dalam menimbulkan beban kesehatan. Besarnya masalah kesehatan jiwa atau gangguan jiwa di Indonesia mencapai 13,8% dari seluruh beban penyakit di Indonesia. Apabila dilihat dari prevalensi gangguan jiwa di Indonesia, berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, didapatkan data gangguan mental emosional sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 10 juta jiwa mengalami gejala-gejala depresi dan ansietas di Indonesia.

Dan untuk gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dan gangguan psikosis prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk, atau diperkirakan lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikosis).

Di Kabupaten Kepulauan Selayar sendiri, penemuan kasus ODGJ berat dan yang tertangani pada tahun 2023 adalah sebanyak 196 dari 196 perkiraan kasus, atau sebesar 100%, yang terdiri dari skizofrenia sebesar 149 dan psikotik akut sebesar 47 (tabel 78). Ini menunjukkan bahwa kasus ODGJ banyak terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

# BAB VII
# KESEHATAN LINGKUNGAN

Teori klasik H.L. Blum yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan). Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak/ jamban sehat, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

## 7.1. Air Minum

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air minum yang dikonsumsi masyarakat perlu ditetapkan persyaratan kualitas air minum sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air minum yang sehat adalah tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna serta memiliki total zat padat terlarut, kekeruhan, dan suhu sesuai ambang batas yang ditetapkan.

Secara mikrobiologis, air minum yang sehat harus bebas dari bakteri E.Coli dan total bakteri koliform. Secara kimiawi, zat kimia yang terkandung dalam air minum seperti besi, aluminium, klor, arsen, dan lainnya harus di bawah ambang batas yang ditentukan. Secara radioaktif, kadar gross alpha activity tidak boleh melebihi 0,1 becquerel per liter (Bq/l) dan kadar gross beta activity tidak boleh melebihi 1 Bq/l.

Pada tahun 2023, jumlah sarana air minum di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 184 (33,15%) diantaranya dinyatakan aman untuk dikonsumsi (tabel 79). Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan fisik, bakteriologis dan kimia.

## 7.2. Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)/ sistem terpusat.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM untuk Masyarakat, jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Pada Tahun 2023, sudah 100% (38.283 keluarga) di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak. Dengan rincian 25.548 KK dengan akses sanitasi layak sendiri dan 12.735 KK dengan akses sanitasi layak bersama (tabel 80).

## 7.3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Permenkes RI No. 3 Tahun 2014).

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada 5 pilar STBM, yakni:

a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah jumlah kumulatif desa/ kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/ kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/ kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/ kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan CLTS (Community-Led Total Sanitation).
2. Telah memiliki natural leader (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, 18 desa/kelurahan (20,45%) telah melaksanakan STBM, desa stop BABS sebanyak 88 desa/kelurahan (100%), sedangkan KK dengan akses rumah sehat sebesar 42,52% yaitu 15.924 KK (Tabel 81).

## 7.4. Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU)

Tempat umum atau sarana pelayanan umum adalah tempat yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit. Tempattempat umum merupakan suatu tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil maupun terusmenerus, baik secara membayar maupun tidak, atau suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktivitas sehari-hari.

Pengertian sanitasi tempat-tempat umum (STTU) adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tidak terawatnya tempattempat umum tersebut yang mengakibatkan timbul menularnya berbagai jenis penyakit. STTU dapat pula dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan tempat-tempat yang sering digunakan untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari agar terhindar dari ancaman penyakit yang merugikan kesehatan.

Pada Tahun 2023, tercatat 259 TTU yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari jumlah tersebut 202 atau 77,99% telah dilakukan pengawasan sesuai standar (IKL), baik itu dari komponen sarana pendidikan (SD,SMP/ MTs dan SMA/ MA), komponen sarana kesehatan (puskesmas dan rumah sakit) serta komponen tempat ibadah dan pasar (Tabel 82).

## 7.5. Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

Keamanan makanan merupakan kebutuhan masyarakat, karena makanan yang aman, akan melindungi dan mencegah terjadinya penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh makanan yang tidak layak. Dalam rangka untuk mewujudkan keamanan makanan, dilakukan pengawasan terhadap semua Tempat Pengelolaan Makanan (TPM). TPM yang dimaksud adalah produsen makanan/ minuman siap saji, seperti: Jasaboga/catering, rumah makan/ restoran, makanan jajanan/ kantin sentra makanan jajanan dan Depot Air Minum (DAM).

Pada tahun 2023, di Kabupaten Kepulauan Selayar terdaftar 455 Tempat Pengolahan Pangan (TPP). Dari jumlah tersebut, baru 79,78% (363 TPP) yang memenuhi syarat kesehatan (Tabel 83).

# L A M P I R A N

**TABEL 1**

**LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KECAMATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | LUAS WILAYAH ($km^2$) | JUMLAH | | | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH RUMAH TANGGA | RATA-RATA JIWA/RUMAH TANGGA | KEPADATAN PENDUDUK per $km^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESA | KELURAHAN | DESA + KELURAHAN | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Pasimarannu | 195,3 | 8 | 0 | 8 | 10.915 | 3.529 | 3,1 | 55,9 |
| 2 | Pasilambena | 114,9 | 6 | 0 | 6 | 8.578 | 2.463 | 3,5 | 74,7 |
| 3 | Pasimasunggu | 131,8 | 7 | 0 | 7 | 9.261 | 2.871 | 3,2 | 70,3 |
| 4 | Takabonerate | 49,3 | 9 | 0 | 9 | 14.774 | 4.169 | 3,5 | 299,7 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 67,1 | 6 | 0 | 6 | 8.099 | 2.618 | 3,1 | 120,6 |
| 6 | Bontosikuyu | 248,2 | 12 | 0 | 12 | 16.030 | 5.208 | 3,1 | 64,6 |
| 7 | Bontoharu | 128,1 | 6 | 2 | 8 | 15.325 | 4.565 | 3,4 | 119,6 |
| 8 | Benteng | 24,6 | 0 | 3 | 3 | 24.514 | 7.574 | 3,2 | 995,3 |
| 9 | Bontomanai | 136,4 | 10 | 0 | 10 | 14.119 | 4.471 | 3,2 | 103,5 |
| 10 | Bontomatene | 193,1 | 10 | 2 | 12 | 13.565 | 4.825 | 2,8 | 70,3 |
| 11 | Buki | 68,1 | 7 | 0 | 7 | 6.920 | 2.263 | 3,1 | 101,6 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **1.357,0** | **81** | **7** | **88** | **142.100** | **44.556** | **3,2** | **104,7** |

Sumber: - BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 2**

**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JUMLAH PENDUDUK | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+PEREMPUAN | RASIO JENIS KELAMIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | 0 - 4 | 4.663 | 4.187 | 8.850 | 111,4 |
| 2 | 5 - 9 | 5.572 | 5.285 | 10.857 | 105,4 |
| 3 | 10 - 14 | 6.483 | 5.936 | 12.419 | 109,2 |
| 4 | 15 - 19 | 7.248 | 6.982 | 14.230 | 103,8 |
| 5 | 20 - 24 | 6.857 | 6.587 | 13.444 | 104,1 |
| 6 | 25 - 29 | 5.070 | 4.934 | 10.004 | 102,8 |
| 7 | 30 - 34 | 4.406 | 4.654 | 9.060 | 94,7 |
| 8 | 35 - 39 | 5.038 | 5.337 | 10.375 | 94,4 |
| 9 | 40 - 44 | 4.920 | 5.267 | 10.187 | 93,4 |
| 10 | 45 - 49 | 4.345 | 4.635 | 8.980 | 93,7 |
| 11 | 50 - 54 | 4.201 | 4.546 | 8.747 | 92,4 |
| 12 | 55 - 59 | 3.159 | 3.604 | 6.763 | 87,7 |
| 13 | 60 - 64 | 2.717 | 3.317 | 6.034 | 81,9 |
| 14 | 65 - 69 | 1.943 | 2.407 | 4.350 | 80,7 |
| 15 | 70 - 74 | 1.456 | 1.769 | 3.225 | 82,3 |
| 16 | 75+ | 1.829 | 2.746 | 4.575 | 66,6 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **69.907** | **72.193** | **142.100** | **96,8** |
| **ANGKA BEBAN TANGGUNGAN *(DEPENDENCY RATIO)*** | | | | **45** | |

Sumber: - BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 3**

**PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF**
**DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | VARIABEL | JUMLAH | | | PERSENTASE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+ PEREMPUAN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS | 53.189 | 56.785 | 109.974 | | | |
| 2 | PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF | 49.465 | 52.810 | 102.275 | 93,0 | 93,0 | 93,00 |
| 3 | PERSENTASE PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN: | | | | | | |
| | a. TIDAK MEMILIKI IJAZAH SD | 19.156 | 19.230 | 38.386 | 36,0 | 33,9 | 34,9 |
| | b. SD/MI | 18.527 | 19.668 | 38.195 | 34,8 | 34,6 | 34,7 |
| | c. SMP/ MTs | 7.848 | 8.064 | 15.912 | 14,8 | 14,2 | 14,5 |
| | d. SMA/ MA | 11.569 | 10.294 | 21.863 | 21,8 | 18,1 | 19,9 |
| | e. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | f. DIPLOMA I/DIPLOMA II | 327 | 676 | 1.003 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| | g. AKADEMI/DIPLOMA III | 440 | 1.261 | 1.701 | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| | h. S1/DIPLOMA IV | 3.223 | 4.627 | 7.850 | 6,1 | 8,1 | 7,1 |
| | i. S2/S3 (MASTER/DOKTOR) | 192 | 145 | 337 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

Sumber: - BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 4**

**JUMLAH FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | FASILITAS KESEHATAN | PEMILIKAN/PENGELOLA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KEMENKES | PEM.PROV | PEM.KAB/KOTA | TNI/POLRI | BUMN | SWASTA | ORGANISASI KEMASYARAKATAN | JUMLAH |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **RUMAH SAKIT** | | | | | | | | | |
| 1 | RUMAH SAKIT UMUM | | | 2 | | | | | 2 |
| 2 | RUMAH SAKIT KHUSUS | | | | | | | | - |
| **PUSKESMAS DAN JARINGANNYA** | | | | | | | | | |
| 1 | PUSKESMAS RAWAT INAP | | | 12 | | | | | 12 |
| | - JUMLAH TEMPAT TIDUR | | | 108 | | | | | 108 |
| 2 | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | | | 3 | | | | | 3 |
| 3 | PUSKESMAS KELILING | | | 13 | | | | | 13 |
| 4 | PUSKESMAS PEMBANTU | | | 77 | | | | | 77 |
| **SARANA PELAYANAN LAIN** | | | | | | | | | |
| 1 | KLINIK PRATAMA | | | | 2 | | 8 | | 10 |
| 2 | KLINIK UTAMA | | | | | | | | - |
| 3 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER | | | 13 | | | 15 | | 28 |
| 4 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI | | | 3 | | | | | 3 |
| 5 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER SPESIALIS | | | | | | | | - |
| 6 | TEMPAT PRAKTIK MANDIRI BIDAN | | | | | | | | - |
| 7 | TEMPAT PRAKTK MANDIRI PERAWAT | | | | | | | | - |
| 8 | GRIYA SEHAT | | | | | | | | - |
| 9 | PANTI SEHAT | | | | | | | | - |
| 10 | UNIT TRANSFUSI DARAH | | | 1 | | | 1 | | 2 |
| 11 | LABORATORIUM KESEHATAN | | | 1 | | | | | 1 |
| **SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN** | | | | | | | | | |
| 1 | INDUSTRI FARMASI | | | | | | | | - |
| 2 | INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/EKSTRAK BAHAN ALAM (IOT/IEBA) | | | | | | | | - |
| 3 | USAHA KECIL/MIKRO OBAT TRADISIONAL (UKOT/UMOT) | | | | | | | | - |
| 4 | PRODUKSI ALAT KESEHATAN | | | | | | | | - |
| 5 | PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) | | | | | | | | - |
| 6 | INDUSTRI KOSMETIKA | | | | | | | | - |
| 7 | PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) | | | | | | | | - |
| 8 | PENYALUR ALAT KESEHATAN (PAK) | | | | | | | | - |
| 9 | APOTEK | | | | | | 19 | | 19 |
| 10 | TOKO OBAT | | | | | | | | - |
| 11 | TOKO ALKES | | | | | | | | - |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 5**

## JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

| NO | SARANA PELAYANAN KESEHATAN | JUMLAH KUNJUNGAN | | | | | | KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RAWAT JALAN | | | RAWAT INAP | | | JUMLAH | | |
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **JUMLAH KUNJUNGAN** | | **39.930** | **54.540** | **94.470** | **3.407** | **4.167** | **7.574** | **1.783** | **1.590** | **3.373** |
| **JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA** | | **69.907** | **72.193** | **142.100** | **69.907** | **72.193** | **0** | | | |
| **CAKUPAN KUNJUNGAN (%)** | | **57,1** | **75,5** | **66,5** | **4,9** | **5,8** | **#DIV/0!** | | | |
| **A** | **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama** | | | | | | | | | |
| 1 | Puskesmas | | | | | | | | | |
| | Benteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bontosunggu | 1.141 | 1.914 | 3.055 | 64 | 82 | 146 | | | 0 |
| | Bontomatene | 1.400 | 2.598 | 3.998 | 80 | 116 | 196 | | | 0 |
| | Parangia | 1.962 | 3.572 | 5.534 | 107 | 115 | 222 | | | |
| | Barugaia | 2.250 | 2.739 | 4.989 | 78 | 88 | 166 | | | |
| | Polebunging | 1.659 | 2.545 | 4.204 | 73 | 138 | 211 | | | |
| | Bontosikuyu | 4.446 | 5.596 | 10.042 | 72 | 114 | 186 | | | |
| | Lowa | 629 | 876 | 1.505 | 35 | 46 | 81 | | | |
| | Benteng Jampea | 1.977 | 2.263 | 4.240 | 0 | 7 | 7 | | | |
| | Pasimarannu | 3.990 | 4.171 | 8.161 | 70 | 81 | 151 | | | 0 |
| | Pasitallu | 2.405 | 5.285 | 7.690 | 33 | 104 | 137 | | | |
| | Pasilambena | 1.412 | 3.654 | 5.066 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Ujung Jampea | 756 | 1.757 | 2.513 | 26 | 27 | 53 | | | |
| | Buki | 2.894 | 3.385 | 6.279 | 147 | 210 | 357 | | | |
| 2 | Klinik Pratama | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | Praktik Mandiri Dokter | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Praktik Mandiri Dokter Gigi | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5 | Praktik Mandiri Bidan | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SUB JUMLAH I | | 26.921 | 40.355 | 67.276 | 785 | 1.128 | 1.913 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut** | | | | | | | | | |
| 1 | Klinik Utama | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 2 | RS Umum | | | | | | | | | |
| | RSUD K.H. Hayyung | 12.675 | 13.644 | 26.319 | 2.565 | 2.896 | 5.461 | 1.783 | 1.590 | 3.373 |
| | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 334 | 541 | 875 | 57 | 143 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 3 | RS Khusus | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 4 | Praktik Mandiri Dokter Spesialis | | | | | | | | | |
| | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 2 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | 3 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | dst | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| SUB JUMLAH II | | 13.009 | 14.185 | 27.194 | 2.622 | 3.039 | 5.661 | 1.783 | 1.590 | 3.373 |

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan

**TABEL 6**

**PERSENTASE RUMAH SAKIT DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR ) LEVEL I**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | RUMAH SAKIT | JUMLAH | MEMPUNYAI KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT LEVEL I | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | RUMAH SAKIT UMUM | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | RUMAH SAKIT KHUSUS | 0 | | #DIV/0! |
| | | | | |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **2** | **2** | **100,0** |

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 7**

**ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | NAMA RUMAH SAKIT[a] | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) | | | PASIEN KELUAR MATI | | | PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT | | | *Gross Death Rate* | | | *Net Death Rate* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 136 | 1.976 | 3.831 | 5.807 | 52 | 67 | 119 | 33 | 41 | 74 | 26,3 | 17,5 | 20,5 | 16,7 | 10,7 | 12,7 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 45 | 283 | 280 | 563 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7,1 | 3,6 | 5,3 | 7,1 | 3,6 | 5,3 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **181** | **2.259** | **4.111** | **6.370** | **54** | **68** | **122** | **35** | **42** | **77** | **23,9** | **16,5** | **19,2** | **15,5** | **10,2** | **12,1** |

Sumber: Rumah Sakit Se-Kabupaten Selayar, 2024

Keterangan: [a] termasuk rumah sakit swasta

**TABEL 8**

**INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | NAMA RUMAH SAKIT[a] | JUMLAH TEMPAT TIDUR | PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) | JUMLAH HARI PERAWATAN | JUMLAH LAMA DIRAWAT | BOR (%) | BTO (KALI) | TOI (HARI) | ALOS (HARI) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 136 | 5.807 | 31.100 | 29.145 | 62,7 | 43 | 3 | 5 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 45 | 563 | 790 | 790 | 4,8 | 13 | 28 | 1 |
| **KABUPATEN/KOTA** | | **181** | **6.370** | **31.890** | **29.935** | **48,3** | **35** | **5** | **5** |

Sumber: Rumah Sakit Se-Kabupaten Selayar, 2024

Keterangan: [a] termasuk rumah sakit swasta

**TABEL 9**

**PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PUSKESMAS DAN KECAMATAN**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | V |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | V |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | V |
| 4 | | PARANGIA | V |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | V |
| 6 | | POLEBUNGING | V |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | V |
| 8 | | LOWA | V |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | V |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | V |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | V |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | V |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | V |
| 14 | BUKI | BUKI | V |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI 80% OBAT DAN VAKSIN ESENSIAL | | | 14 |
| JUMLAH PUSKESMAS YANG MELAPOR | | | 14 |
| **% PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL** | | | **100%** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: *) beri tanda "V" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%

*) beri tanda "X" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial <80%

*) jika puskesmas tersebut tidak melapor, **mohon dikosongkan atau tidak memberi tanda "V" maupun "X"**

**TABEL 10**

**KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | NAMA OBAT | SATUAN | KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Albendazol/Pirantel Pamoat | Tablet | v |
| 2 | Alopurinol | Tablet | v |
| 3 | Amlodipin/Kaptopril | Tablet | v |
| 4 | Amoksisilin 500 mg | Tablet | x |
| 5 | Amoksisilin sirup | Botol | v |
| 6 | Antasida tablet kunyah/antasida suspensi | Tablet/Botol | v |
| 7 | Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) | Tablet | v |
| 8 | Asam Askorbat (Vitamin C) | Tablet | v |
| 9 | Asiklovir | Tablet | x |
| 10 | Betametason salep | Tube | x |
| 11 | Deksametason tablet/deksametason injeksi | Tablet/Vial/Ampul | v |
| 12 | Diazepam injeksi 5 mg/ml | Ampul | v |
| 13 | Diazepam | Tablet | v |
| 14 | Dihidroartemsin+piperakuin (DHP) dan primaquin | Tablet | v |
| 15 | Difenhidramin Inj. 10 mg/ml | Ampul | v |
| 16 | Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1 % (sebagai HCl) | Ampul | x |
| 17 | Fitomenadion (Vitamin K) injeksi | Ampul | v |
| 18 | Furosemid 40 mg/Hidroklorotiazid (HCT) | Tablet | v |
| 19 | Garam Oralit serbuk | Kantong | v |
| 20 | Glibenklamid/Metformin | Tablet | v |
| 21 | Hidrokortison krim/salep | Tube | v |
| 22 | Kotrimoksazol (dewasa) kombinasi tablet/Kotrimoksazol susp | Tablet/Botol | v |
| 23 | Ketokonazol tablet 200 mg | Tablet | x |
| 24 | Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg | Tablet | x |
| 25 | Lidokain inj | Vial | x |
| 26 | Magnesium Sulfat injeksi | Vial | v |
| 27 | Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml | Ampul | x |
| 28 | Natrium Diklofenak | Tablet | x |
| 29 | OAT FDC Kat 1 | Paket | v |
| 30 | Oksitosin injeksi | Ampul | v |
| 31 | Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml | Botol | v |
| 32 | Parasetamol 500 mg | Tablet | x |
| 33 | Prednison 5 mg | Tablet | v |
| 34 | Retinol 100.000/200.000 IU | Kapsul | v |
| 35 | Salbutamol | Tablet | v |
| 36 | Salep Mata/Tetes Mata Antibiotik | Tube | v |
| 37 | Simvastatin | Tablet | v |
| 38 | Tablet Tambah Darah | Tablet | v |
| 39 | Vitamin B6 (Piridoksin) | Tablet | v |
| 40 | Zinc 20 mg | Tablet | v |
| JUMLAH ITEM OBAT INDIKATOR YANG TERSEDIA DI KABUPATEN/KOTA | | | 30 |
| JUMLAH ITEM OBAT INDIKATOR | | | 40 |
| **% KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL** | | | **75%** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: *) beri tanda "V" jika kabupaten/kota memiliki obat esensial
*) beri tanda "X" jika kabupaten/kota tidak memiliki obat esensial

**TABEL 11**

## KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | NAMA VAKSIN | SATUAN | KETERSEDIAAN VAKSIN IDL* |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Vaksin Hepatitis B | Vial | V |
| 2 | Vaksin BCG | Tablet | V |
| 3 | Vaksin DPT-HB-HIB | Vial | V |
| 4 | Vaksin Polio | Vial | V |
| 5 | Vaksin Campak/Vaksin Campak Rubella (MR) | Vial/Ampul | V |
| JUMLAH ITEM VAKSIN IDL YANG TERSEDIA DI KABUPATEN/KOTA | | | 5 |
| **% KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL** | | | **100%** |

Sumber: Seksi Surveilans & Imunisasi Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: *) beri tanda "V" jika kabupaten/kota memiliki vaksin IDL

*) beri tanda "X" jika kabupaten/kota tidak memiliki vaksin IDL

**TABEL 12**

## JUMLAH POSYANDU DAN POSBINDU PTM MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | POSYANDU | | | | | JUMLAH POSBINDU PTM* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AKTIF | | TIDAK AKTIF | | JUMLAH | |
| | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *12* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 27 | 100 | 0 | 0,0 | 27 | 14 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 15 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 21 | 100 | 0 | 0,0 | 21 | 7 |
| 4 | | PARANGIA | 13 | 100 | 0 | 0,0 | 13 | 13 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 11 | 52 | 10 | 47,6 | 21 | 12 |
| 6 | | POLEBUNGING | 19 | 100 | 0 | 0,0 | 19 | 10 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 19 |
| 8 | | LOWA | 24 | 100 | 0 | 0,0 | 24 | 7 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 19 | 86 | 3 | 13,6 | 22 | 22 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 23 | 100 | 0 | 0,0 | 23 | 8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 25 | 100 | 0 | 0,0 | 25 | 9 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 6 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 20 | 100 | 0 | 0,0 | 20 | 20 |
| 14 | BUKI | BUKI | 23 | 100 | 0 | 0,0 | 23 | 10 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **294** | **95,8** | **13** | **4,2** | **307** | **172** |
| **RASIO POSYANDU PER 100 BALITA** | | | | | | | **3,5** | |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

*PTM: Penyakit Tidak Menular

**TABEL 13**

**JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | UNIT KERJA | DR SPESIALIS | | | DOKTER | | | TOTAL | | | DOKTER GIGI | | | DOKTER GIGI SPESIALIS | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 6 | 8 | 14 | 7 | 14 | 21 | 13 | 22 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA)[a] | | 6 | 8 | 14 | 11 | 42 | 53 | 17 | 50 | 67 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 16 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **9,9** | | | **37,3** | | | **47,1** | | | **10,6** | | | **0,7** | | | **11,3** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 14**

## JUMLAH TENAGA TENAGA KEPERAWATAN DAN TENAGA KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KEPERAWATAN | | | TENAGA KEBIDANAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | 6 | 30 | 36 | 42 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 12 | 26 | 38 | 64 |
| 3 | BONTOMATENE | 5 | 23 | 28 | 33 |
| 4 | PARANGIA | 5 | 17 | 22 | 29 |
| 5 | BARUGAIA | 6 | 31 | 37 | 41 |
| 6 | POLEBUNGING | 5 | 17 | 22 | 31 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 7 | 15 | 22 | 33 |
| 8 | LOWA | 7 | 14 | 21 | 31 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 6 | 20 | 26 | 35 |
| 10 | PASIMARANNU | 4 | 17 | 21 | 27 |
| 11 | PASITALLU | 7 | 15 | 22 | 39 |
| 12 | PASILAMBENA | 7 | 22 | 29 | 36 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 7 | 9 | 16 | 21 |
| 14 | BUKI | 5 | 16 | 21 | 46 |
| | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 31 | 165 | 196 | 90 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 15 | 33 | 48 | 27 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 135 | 470 | 605 | 625 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **425,8** | **439,8** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 15**

## JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | | | TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN | | | TENAGA GIZI | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | BARUGAIA | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | POLEBUNGING | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | LOWA | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | PASITALLU | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | BUKI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 2 | 9 | 11 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 18 | 63 | 81 | 8 | 28 | 36 | 4 | 30 | 34 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **57,0** | | | **25,3** | | | **23,9** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor

a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 16**

**JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISIAN MEDIK DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | UNIT KERJA | AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | | | TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA | | | KETERAPIAN FISIK | | | KETEKNISIAN MEDIS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | PARANGIA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOWA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | PASITALLU | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | PASILAMBENA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 9 | 24 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 17 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 14 | 51 | 65 | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 9 | 23 | 32 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **45,7** | | | **3,5** | | | **4,9** | | | **22,5** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 17**

**JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | UNIT KERJA | TENAGA KEFARMASIAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN | | | APOTEKER | | | TOTAL | | |
| | | L | P | L + P | L | P | L + P | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | LOWA | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | PASITALLU | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 14 | BUKI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 1 | 9 | 10 | 0 | 14 | 14 | 1 | 23 | 24 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | 5 | 39 | 44 | 7 | 26 | 33 | 12 | 65 | 77 |
| **RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK** | | | | **31,0** | | | **23,2** | | | **54,2** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor
a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 18**

## JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

| NO | UNIT KERJA | TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN | | | | | | | | | TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PEJABAT STRUKTURAL | | | TENAGA PENDIDIK | | | TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | |
| | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 6 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 9 | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 |
| 10 | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 |
| 11 | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 12 | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 13 | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 14 | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | RSUD K.H. Hayyung | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 113 | 201 | 94 | 120 | 214 |
| 2 | RSUD Jampea Kelas D Pratama | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 9 | 16 | 25 |
| SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DINAS KESEHATAN KAB/KOTA | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | **7** | **11** | **18** | **0** | **0** | **0** | **179** | **193** | **372** | **186** | **204** | **390** |

Sumber: Bidang SDK Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : - Pada penghitungan jumlah di tingkat kabupaten/kota, tenaga yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali

**TABEL 19**

**CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN PENDUDUK MENURUT JENIS KEPESERTAAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | JENIS KEPESERTAAN | PESERTA JAMINAN KESEHATAN | |
|---|---|---|---|
| | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)** | | | |
| 1 | PBI APBN | 65.192 | 0,5 |
| 2 | PBI APBD | 50.936 | 0,4 |
| SUB JUMLAH PBI | | 116.128 | 0,8 |
| **NON PBI** | | | |
| 1 | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 23.204 | 0,2 |
| 2 | Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri | 1.547 | 0,0 |
| 3 | Bukan Pekerja (BP) | 2.614 | 0,0 |
| SUB JUMLAH NON PBI | | 27.365 | 0,2 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | 143.493 | 1,0 |

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 20**

**ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | SUMBER BIAYA | ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN | |
|---|---|---|---|
| | | Rupiah | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| | **ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:** | | |
| 1 | APBD KAB/KOTA | Rp185.964.374.011,00 | 100,00 |
| | a. Belanja Langsung | Rp125.243.149.389,00 | |
| | b. Belanja Tidak Langsung | Rp42.331.507.622,00 | |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | Rp18.389.717.000,00 | |
| | - DAK fisik | Rp2.352.692.000,00 | |
| | 1. Reguler | | |
| | 2. Penugasan | Rp2.352.692.000,00 | |
| | 3. Afirmasi | | |
| | - DAK non fisik | Rp16.037.025.000,00 | |
| | 1. BOK | | |
| | 2. Akreditasi | | |
| | 3. Jampersal | | |
| 2 | APBD PROVINSI | Rp0,00 | 0,00 |
| | a. Belanja Langsung | | |
| | b. Belanja Tidak Langsung | | |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) : BOK | | |
| 3 | APBN : | Rp0,00 | 0,00 |
| | a. Dana Dekonsentrasi | | |
| | b. Lain-lain (sebutkan), misal bansos kapitasi | | |
| 4 | PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) | | 0,00 |
| | (sebutkan *project* dan sumber dananya) | | |
| 5 | SUMBER PEMERINTAH LAIN* | | 0,00 |
| TOTAL ANGGARAN KESEHATAN | | Rp185.964.374.011,00 | |
| TOTAL APBD KAB/KOTA | | Rp1.028.401.417.400,00 | |
| **% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA** | | | **18,1** |
| **ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA** | | **Rp143.632.866.389,00** | |

Sumber: Subbag Program Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 21**

**JUMLAH KELAHIRAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELAHIRAN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAKI-LAKI | | | PEREMPUAN | | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | |
| | | | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI | HIDUP | MATI | HIDUP + MATI |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 216 | 3 | 219 | 192 | 1 | 193 | 408 | 4 | 412 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 81 | 1 | 82 | 76 | 1 | 77 | 157 | 2 | 159 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 49 | 0 | 49 | 26 | 0 | 26 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | | PARANGIA | 27 | 0 | 27 | 30 | 1 | 31 | 57 | 1 | 58 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 96 | 0 | 96 |
| 6 | | POLEBUNGING | 31 | 0 | 31 | 20 | 0 | 20 | 51 | 0 | 51 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 56 | 0 | 56 | 47 | 1 | 48 | 103 | 1 | 104 |
| 8 | | LOWA | 63 | 0 | 63 | 38 | 0 | 38 | 101 | 0 | 101 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 63 | 3 | 66 | 49 | 0 | 49 | 112 | 3 | 115 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 81 | 2 | 83 | 87 | 0 | 87 | 168 | 2 | 170 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 133 | 2 | 135 | 112 | 2 | 114 | 245 | 4 | 249 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 79 | 0 | 79 | 67 | 0 | 67 | 146 | 0 | 146 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 56 | 1 | 57 | 46 | 0 | 46 | 102 | 1 | 103 |
| 14 | BUKI | BUKI | 31 | 1 | 32 | 35 | 1 | 36 | 66 | 2 | 68 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.014** | **13** | **1.027** | **873** | **7** | **880** | **1.887** | **20** | **1.907** |
| **ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)** | | | | **12,7** | | | **8,0** | | | **10,5** | |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

**TABEL 22**

## JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
### KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
### TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | KEMATIAN IBU | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL | JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN | JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS | JUMLAH KEMATIAN IBU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 157 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | LOWA | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 112 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 245 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 146 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.887** | **4** | **1** | **1** | **6** |
| **ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)** | | | | | | | **317,97** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan:

- Jumlah kematian ibu = jumlah kematian ibu hamil + jumlah kematian ibu bersalin + jumlah kematian ibu nifas
- Angka Kematian Ibu (dilaporkan) tersebut di atas belum bisa menggambarkan AKI yang sebenarnya di populasi

**TABEL 23**

## JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
### KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
### TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN IBU | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERDARAHAN | GANGGUAN HIPERTENSI | INFEKSI | KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | GANGGUAN AUTOIMUN** | GANGGUAN CEREBROVASKULAR*** | COVID-19 | KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | LAIN-LAIN | JUMLAH KEMATIAN IBU |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **3** | **6** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

* penyakit jantung kongenital, PPCM (Peripartum cardiomyopathy), aneurisma aorta, dll

** SLE (Systemic lupus erthematosus), dll

*** stroke, aneurisma otak, dll

**TABEL 24**

## CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

### KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR

### TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | IBU HAMIL | | | | | | | IBU BERSALIN/NIFAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | K1 | | K4 | | K6 | | JUMLAH | PERSALINAN DI FASYANKES | | KF1 | | KF LENGKAP | | IBU NIFAS MENDAPAT VIT A | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 516 | 395 | 76,6 | 412 | 79,8 | 410 | 79,5 | 410 | 410 | 100,0 | 410 | 100,0 | 410 | 100,0 | 410 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 212 | 153 | 72,2 | 92 | 43,4 | 66 | 31,1 | 154 | 153 | 99,4 | 154 | 100,0 | 150 | 97,4 | 146 | 94,8 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 137 | 75 | 54,7 | 75 | 54,7 | 76 | 55,5 | 75 | 75 | 100,0 | 75 | 100,0 | 75 | 100,0 | 75 | 100,0 |
| 4 | | PARANGIA | 110 | 60 | 54,5 | 57 | 51,8 | 57 | 51,8 | 57 | 57 | 100,0 | 57 | 100,0 | 53 | 93,0 | 57 | 100,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 150 | 101 | 67,3 | 64 | 42,7 | 52 | 34,7 | 95 | 95 | 100,0 | 95 | 100,0 | 75 | 78,9 | 94 | 98,9 |
| 6 | | POLEBUNGING | 96 | 58 | 60,4 | 42 | 43,8 | 42 | 43,8 | 51 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 | 51 | 100,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 139 | 106 | 76,3 | 98 | 70,5 | 92 | 66,2 | 103 | 102 | 99,0 | 103 | 100,0 | 103 | 100,0 | 103 | 100,0 |
| 8 | | LOWA | 147 | 106 | 72,1 | 76 | 51,7 | 48 | 32,7 | 101 | 101 | 100,0 | 101 | 100,0 | 98 | 97,0 | 100 | 99,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 162 | 155 | 95,7 | 94 | 58,0 | 79 | 48,8 | 109 | 105 | 96,3 | 109 | 100,0 | 109 | 100,0 | 113 | 103,7 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 207 | 189 | 91,3 | 120 | 58,0 | 112 | 54,1 | 172 | 159 | 92,4 | 172 | 100,0 | 169 | 98,3 | 170 | 98,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 282 | 282 | 100,0 | 277 | 98,2 | 277 | 98,2 | 250 | 224 | 89,6 | 250 | 100,0 | 246 | 98,4 | 250 | 100,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 157 | 157 | 100,0 | 7 | 4,5 | 95 | 60,5 | 121 | 65 | 53,7 | 121 | 100,0 | 116 | 95,9 | 112 | 92,6 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 149 | 112 | 75,2 | 75 | 50,3 | 54 | 36,2 | 102 | 102 | 100,0 | 102 | 100,0 | 98 | 96,1 | 92 | 90,2 |
| 14 | BUKI | BUKI | 117 | 73 | 62,4 | 39 | 33,3 | 35 | 29,9 | 68 | 68 | 100,0 | 68 | 100,0 | 65 | 95,6 | 68 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2.581** | **2.022** | **78,3** | **1.528** | **59,2** | **1.495** | **57,9** | **1.868** | **1.767** | **94,6** | **1.868** | **100,0** | **1.818** | **97,3** | **1.841** | **98,6** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 25**

**CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | | Td2+ | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 516 | 61 | 11,8 | 157 | 30,4 | 105 | 20,3 | 51 | 9,9 | 15 | 2,9 | 328 | 63,6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 212 | 31 | 14,6 | 72 | 34,0 | 39 | 18,4 | 11 | 5,2 | 2 | 0,9 | 124 | 58,5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 137 | 12 | 8,8 | 40 | 29,2 | 31 | 22,6 | 7 | 5,1 | 12 | 8,8 | 90 | 65,7 |
| 4 | | PARANGIA | 110 | 10 | 9,1 | 22 | 20,0 | 18 | 16,4 | 6 | 5,5 | 2 | 1,8 | 48 | 43,6 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 150 | 3 | 2,0 | 37 | 24,7 | 22 | 14,7 | 14 | 9,3 | 28 | 18,7 | 101 | 67,3 |
| 6 | | POLEBUNGING | 96 | 5 | 5,2 | 14 | 14,6 | 2 | 2,1 | 6 | 6,3 | 3 | 3,1 | 25 | 26,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 139 | 12 | 8,6 | 45 | 32,4 | 33 | 23,7 | 3 | 2,2 | 1 | 0,7 | 82 | 59,0 |
| 8 | | LOWA | 147 | 13 | 8,8 | 52 | 35,4 | 30 | 20,4 | 1 | 0,7 | 4 | 2,7 | 87 | 59,2 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 162 | 7 | 4,3 | 26 | 16,0 | 14 | 8,6 | 4 | 2,5 | 5 | 3,1 | 49 | 30,2 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 207 | 29 | 14,0 | 51 | 24,6 | 62 | 30,0 | 31 | 15,0 | 20 | 9,7 | 164 | 79,2 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 282 | 63 | 22,3 | 44 | 15,6 | 22 | 7,8 | 14 | 5,0 | 1 | 0,4 | 81 | 28,7 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 157 | 30 | 19,1 | 53 | 33,8 | 25 | 15,9 | 5 | 3,2 | 1 | 0,6 | 84 | 53,5 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 149 | 33 | 22,1 | 37 | 24,8 | 10 | 6,7 | 1 | 0,7 | 0 | 0,0 | 48 | 32,2 |
| 14 | BUKI | BUKI | 117 | 1 | 0,9 | 8 | 6,8 | 17 | 14,5 | 9 | 7,7 | 10 | 8,5 | 44 | 37,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2.581** | **310** | **12,0** | **658** | **25,5** | **430** | **16,7** | **163** | **6,3** | **104** | **4,0** | **1.355** | **52,5** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 26**

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN) | IMUNISASI Td PADA WUS TIDAK HAMIL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6.042 | 78 | 1,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2.485 | 45 | 1,8 | 10 | 0,4 | 6 | 0,2 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.601 | 28 | 1,7 | 5 | 0,3 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 4 | | PARANGIA | 1.282 | 15 | 1,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.754 | 15 | 0,9 | 6 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1.123 | 10 | 0,9 | 3 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.629 | 35 | 2,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | | LOWA | 1.729 | 8 | 0,5 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1.889 | 9 | 0,5 | 23 | 1,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2.424 | 51 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3.286 | 21 | 0,6 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1.830 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1.743 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,1 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.374 | 3 | 0,2 | 10 | 0,7 | 8 | 0,6 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **30191** | **318** | **1,05** | **69** | **0,23** | **22** | **0,07** | **10** | **0,03** | **6** | **0,02** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 27**

**PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) | IMUNISASI Td PADA WUS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Td1 | | Td2 | | Td3 | | Td4 | | Td5 | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6.042 | 139 | 2,3 | 157 | 2,6 | 105 | 1,7 | 51 | 0,8 | 15 | 0,2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2.485 | 76 | 3,1 | 82 | 3,3 | 45 | 1,8 | 13 | 0,5 | 2 | 0,1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.601 | 40 | 2,5 | 45 | 2,8 | 32 | 2,0 | 9 | 0,6 | 13 | 0,8 |
| 4 | | PARANGIA | 1.282 | 25 | 2,0 | 22 | 1,7 | 18 | 1,4 | 6 | 0,5 | 2 | 0,2 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.754 | 18 | 1,0 | 43 | 2,5 | 23 | 1,3 | 15 | 0,9 | 29 | 1,7 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1.123 | 15 | 1,3 | 17 | 1,5 | 4 | 0,4 | 7 | 0,6 | 4 | 0,4 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.629 | 47 | 2,9 | 46 | 2,8 | 33 | 2,0 | 3 | 0,2 | 1 | 0,1 |
| 8 | | LOWA | 1.729 | 21 | 1,2 | 57 | 3,3 | 30 | 1,7 | 1 | 0,1 | 4 | 0,2 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1.889 | 16 | 0,8 | 49 | 2,6 | 14 | 0,7 | 5 | 0,3 | 5 | 0,3 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2.424 | 80 | 3,3 | 51 | 2,1 | 62 | 2,6 | 31 | 1,3 | 20 | 0,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3.286 | 84 | 2,6 | 50 | 1,5 | 23 | 0,7 | 15 | 0,5 | 1 | 0,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1.830 | 30 | 1,6 | 53 | 2,9 | 28 | 1,5 | 6 | 0,3 | 1 | 0,1 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1.743 | 33 | 1,9 | 37 | 2,1 | 10 | 0,6 | 1 | 0,1 | 2 | 0,1 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.374 | 4 | 0,3 | 18 | 1,3 | 25 | 1,8 | 10 | 0,7 | 11 | 0,8 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **30.191** | **628** | **2,1** | **727** | **2,4** | **452** | **1,5** | **173** | **0,6** | **110** | **0,4** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 28**

**JUMLAH IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN DAN MENGONSUMSI TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | TTD (90 TABLET) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN | % | IBU HAMIL YANG MENGONSUMSI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 516 | 374 | 72,5 | 374 | 72,5 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 212 | 88 | 41,5 | 88 | 41,5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 137 | 75 | 54,7 | 75 | 54,7 |
| 4 | | PARANGIA | 110 | 55 | 50,0 | 55 | 50,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 150 | 66 | 44,0 | 66 | 44,0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 96 | 51 | 53,1 | 51 | 53,1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 139 | 107 | 77,0 | 107 | 77,0 |
| 8 | | LOWA | 147 | 77 | 52,4 | 77 | 52,4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 162 | 100 | 61,7 | 100 | 61,7 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 207 | 149 | 72,0 | 149 | 72,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 282 | 274 | 97,2 | 274 | 97,2 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 157 | 110 | 70,1 | 110 | 70,1 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 149 | 74 | 49,7 | 74 | 49,7 |
| 14 | BUKI | BUKI | 117 | 41 | 35,0 | 41 | 35,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2.581** | **1.641** | **63,6** | **1.641** | **63,6** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 29**

**PESERTA KB AKTIF METODE MODERN MENURUT JENIS KONTRASEPSI,DAN PESERTA KB AKTIF MENGALAMI EFEK SAMPING, KOMPLIKASI KEGAGALAN DAN DROP OUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PUS | PESERTA KB AKTIF METODE MODERN | | | | | | | | | | | | | | | | | | EFEK SAMPING BER-KB | % | KOMPLIKASI BER-KB | % | KEGAGALAN BER-KB | % | DROP OUT BER-KB | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KONDOM | % | SUNTIK | % | PIL | % | AKDR | % | MOP | % | MOW | % | IMPLAN | % | MAL | % | JUMLAH | % | | | | | | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4.966 | 182 | 4,7 | 2.081 | 54,1 | 384 | 10,0 | 377 | 9,8 | 4 | 0,1 | 101 | 2,6 | 414 | 10,8 | 304 | 7,9 | 3.847 | 77,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 432 | 11,2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2.042 | 29 | 2,3 | 752 | 59,4 | 100 | 7,9 | 69 | 5,4 | 3 | 0,2 | 71 | 5,6 | 243 | 19,2 | 0 | 0,0 | 1.267 | 62,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 242 | 19,1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.316 | 137 | 17,2 | 318 | 39,8 | 120 | 15,0 | 55 | 6,9 | 0 | 0,0 | 20 | 2,5 | 148 | 18,5 | 0 | 0,0 | 798 | 60,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 165 | 20,7 |
| 4 | | PARANGIA | 1.054 | 69 | 10,5 | 300 | 45,8 | 74 | 11,3 | 37 | 5,6 | 1 | 0,2 | 20 | 3,1 | 154 | 23,5 | 0 | 0,0 | 655 | 62,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 237 | 36,2 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.441 | 29 | 2,5 | 713 | 61,5 | 245 | 21,1 | 52 | 4,5 | 0 | 0,0 | 17 | 1,5 | 103 | 8,9 | 0 | 0,0 | 1.159 | 80,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 5,5 |
| 6 | | POLEBUNGING | 923 | 12 | 2,3 | 330 | 63,2 | 85 | 16,3 | 33 | 6,3 | 0 | 0,0 | 12 | 2,3 | 50 | 9,6 | 0 | 0,0 | 522 | 56,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 184 | 35,2 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.339 | 67 | 6,6 | 447 | 44,1 | 132 | 13,0 | 24 | 2,4 | 1 | 0,1 | 27 | 2,7 | 316 | 31,2 | 0 | 0,0 | 1.014 | 75,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 2,5 |
| 8 | | LOWA | 1.421 | 57 | 5,3 | 599 | 55,5 | 226 | 20,9 | 18 | 1,7 | 0 | 0,0 | 7 | 0,6 | 173 | 16,0 | 0 | 0,0 | 1.080 | 76,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15 | 1,4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1.553 | 4 | 0,4 | 402 | 42,4 | 182 | 19,2 | 11 | 1,2 | 0 | 0,0 | 7 | 0,7 | 343 | 36,1 | 0 | 0,0 | 949 | 61,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 203 | 21,4 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1.992 | 0 | 0,0 | 930 | 68,7 | 82 | 6,1 | 34 | 2,5 | 0 | 0,0 | 14 | 1,0 | 294 | 21,7 | 0 | 0,0 | 1.354 | 68,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 92 | 6,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2.701 | 5 | 0,3 | 1.125 | 62,6 | 377 | 21,0 | 26 | 1,4 | 0 | 0,0 | 23 | 1,3 | 241 | 13,4 | 0 | 0,0 | 1.797 | 66,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 185 | 10,3 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1.504 | 4 | 0,4 | 791 | 77,3 | 78 | 7,6 | 7 | 0,7 | 0 | 0,0 | 5 | 0,5 | 138 | 13,5 | 0 | 0,0 | 1.023 | 68,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 64 | 6,3 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1.432 | 12 | 1,1 | 742 | 69,2 | 66 | 6,2 | 20 | 1,9 | 1 | 0,1 | 16 | 1,5 | 216 | 20,1 | 0 | 0,0 | 1.073 | 74,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 159 | 14,8 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.129 | 33 | 4,7 | 297 | 42,1 | 214 | 30,3 | 15 | 2,1 | 0 | 0,0 | 21 | 3,0 | 112 | 15,9 | 14 | 2,0 | 706 | 62,5 | 22 | 3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 207 | 29,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **24.813** | **640** | **3,7** | **9.827** | **57,0** | **2.365** | **13,7** | **778** | **4,5** | **10** | **0,1** | **361** | **2,1** | **2.945** | **17,1** | **318** | **1,8** | **17.244** | **69,5** | **22** | **0,1** | **2** | **0,01** | **0** | **0,0** | **2.274** | **13,2** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amenore Laktasi

**TABEL 30**

**PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS 4 TERLALU (4T) DAN ALKI YANG MENJADI PESERTA KB AKTIF MENURUT KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PUS | PUS 4T | % | PUS 4T PADA KB AKTIF | % | PUS ALKI | % | PUS ALKI PADA KB AKTIF | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4.966 | 950 | 19,1 | 628 | 66,1 | 143 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2.042 | 408 | 20,0 | 155 | 38,0 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.316 | 151 | 11,5 | 45 | 29,8 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 4 | | PARANGIA | 1.054 | 564 | 53,5 | 61 | 10,8 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.441 | 229 | 15,9 | 110 | 48,0 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 6 | | POLEBUNGING | 923 | 280 | 30,3 | 119 | 42,5 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.339 | 268 | 20,0 | 50 | 18,7 | 268 | 0,2 | | 0,0 |
| 8 | | LOWA | 1.421 | 284 | 20,0 | 17 | 6,0 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1.553 | 311 | 20,0 | 126 | 40,5 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1.992 | 85 | 4,3 | 27 | 31,8 | 66 | 0,0 | | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2.701 | 1.033 | 38,2 | 122 | 11,8 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1.504 | 482 | 32,0 | 143 | 29,7 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1.432 | 541 | 37,8 | 99 | 18,3 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.129 | 343 | 30,4 | 229 | 66,8 | 0 | 0,0 | | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **24.813** | **5.929** | 23,9 | **1.931** | 32,6 | **477** | 0,0 | **0** | 0,0 |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan :

ALKI : Anemia, LiLA<23,5, Penyakit Kronis, dan IMS

4 Terlalu (4T), yaitu : 1) berusia kurang dari 20 tahun; 2) berusia lebih dari 35 tahun; 3) telah memiliki anak hidup lebih dari 3 orang;anak dengan lainnya kurang dari 2 tahun, atau 4) jarak kelahiran antara satu

**TABEL 31**

**CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU BERSALIN | PESERTA KB PASCA PERSALINAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | KONDOM | % | SUNTIK | % | PIL | % | AKDR | % | MOP | % | MOW | % | IMPLAN | % | MAL | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 410 | 9 | 2,2 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 46 | 11,1 | 0 | 0,0 | 12 | 2,9 | 19 | 4,6 | 328 | 78,8 | 416 | 101,5 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 154 | 1 | 1,7 | 10 | 16,9 | 0 | 0,0 | 9 | 15,3 | 0 | 0,0 | 4 | 6,8 | 35 | 59,3 | 0 | 0,0 | 59 | 38,3 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 75 | 3 | 7,3 | 18 | 43,9 | 5 | 12,2 | 4 | 9,8 | 0 | 0,0 | 3 | 7,3 | 8 | 19,5 | 0 | 0,0 | 41 | 54,7 |
| 4 | | PARANGIA | 57 | 1 | 2,8 | 12 | 33,3 | 0 | 0,0 | 5 | 13,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18 | 50,0 | 0 | 0,0 | 36 | 63,2 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 95 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 1 | 8,3 | 3 | 25,0 | 0 | 0,0 | 12 | 12,6 |
| 6 | | POLEBUNGING | 51 | 2 | 13,3 | 5 | 33,3 | 2 | 13,3 | 2 | 13,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 26,7 | 0 | 0,0 | 15 | 29,4 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 103 | 0 | 0,0 | 15 | 20,8 | 1 | 1,4 | 3 | 4,2 | 0 | 0,0 | 1 | 1,4 | 52 | 72,2 | 0 | 0,0 | 72 | 69,9 |
| 8 | | LOWA | 101 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 109 | 1 | 3,0 | 13 | 39,4 | 4 | 12,1 | 3 | 9,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 12 | 36,4 | 0 | 0,0 | 33 | 30,3 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 172 | 0 | 0,0 | 49 | 62,8 | 2 | 2,6 | 9 | 11,5 | 0 | 0,0 | 4 | 5,1 | 14 | 17,9 | 0 | 0,0 | 78 | 45,3 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 250 | 0 | 0,0 | 50 | 52,6 | 6 | 6,3 | 1 | 1,1 | 0 | 0,0 | 1 | 1,1 | 37 | 38,9 | 0 | 0,0 | 95 | 38,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 121 | 1 | 1,2 | 65 | 76,5 | 6 | 7,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13 | 15,3 | 0 | 0,0 | 85 | 70,2 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 102 | 0 | 0,0 | 11 | 68,8 | 0 | 0,0 | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 6,3 | 2 | 12,5 | 0 | 0,0 | 16 | 15,7 |
| 14 | BUKI | BUKI | 68 | 0 | 0,0 | 4 | 7,8 | 0 | 0,0 | 3 | 5,9 | 0 | 0,0 | 5 | 9,8 | 5 | 9,8 | 34 | 66,7 | 51 | 75,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.868** | **18** | **1,8** | **260** | **25,7** | **27** | **2,7** | **88** | **8,7** | **0** | **0,0** | **32** | **3,2** | **224** | **22,2** | **362** | **35,8** | **1.011** | **54,1** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 32

JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN
MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN | BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI | | JUMLAH KOMPLIKASI KEBIDANAN | | | | | | | | | | | JUMLAH KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN | JUMLAH KOMPLIKASI DALAM PERSALINAN | JUMLAH KOMPLIKASI PASCA PERSALINAN (NIFAS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | KURANG ENERGI KRONIS (KEK) | ANEMIA | PERDARAHAN | TUBERKULOSIS | MALARIA | INFEKSI LAINNYA | PREKLAMPSIA / EKLAMSIA | DIABETES MELITUS | JANTUNG | COVID-19 | PENYEBAB LAINNYA | | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 516 | 103 | 101 | 98 | 66 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 212 | 42 | 42 | 99 | 43 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | | | |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 137 | 27 | 18 | 66 | 9 | 58 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |
| 4 | | PARANGIA | 110 | 22 | 17 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 150 | 30 | 7 | 23 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | | POLEBUNGING | 96 | 19 | 5 | 26 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 139 | 28 | 6 | 22 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |
| 8 | | LOWA | 147 | 29 | 11 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPI | 162 | 32 | 15 | 46 | 9 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 207 | 41 | 39 | 94 | 49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 282 | 56 | 20 | 35 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 157 | 31 | 2 | 6 | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 13 | PASIMASUNGGU | UJUNG JAMPEA | 149 | 30 | 6 | 20 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 14 | BUKI | BUKI | 117 | 23 | 10 | 43 | 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2.581** | **516** | **299** | **58** | **434** | **400** | **14** | **0** | **0** | **1** | **11** | **0** | **0** | **0** | **76** | **0** | **0** | **0** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 33**

**JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI NEONATAL**
**MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI | | | JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | BBLR | | ASFIKSIA | | INFEKSI | | TETANUS NEONATORUM | | KELAINAN KONGENITAL | | COVID-19 | | LAIN-LAIN | | TOTAL | |
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 216 | 192 | 408 | 32 | 29 | 61 | 26 | 42,5 | 1,0 | 1,6 | 36,0 | 58,8 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 | 102,9 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 81 | 76 | 157 | 12 | 11 | 24 | 20 | 84,9 | 2,0 | 8,5 | 3,0 | 12,7 | 0 | 0,0 | 2,0 | 8,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 | 114,6 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 49 | 26 | 75 | 7 | 4 | 11 | 2 | 17,8 | 1,0 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 26,7 |
| 4 | | PARANGIA | 27 | 30 | 57 | 4 | 5 | 9 | 3 | 35,1 | 1,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | 46,8 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 48 | 48 | 96 | 7 | 7 | 14 | 3 | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 20,8 |
| 6 | | POLEBUNGING | 31 | 20 | 51 | 5 | 3 | 8 | 6 | 78,4 | 1,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 91,5 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 56 | 47 | 103 | 8 | 7 | 15 | 11 | 71,2 | 8,0 | 51,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 123,0 |
| 8 | | LOWA | 63 | 38 | 101 | 9 | 6 | 15 | 11 | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 72,6 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 63 | 49 | 112 | 9 | 7 | 17 | 11 | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 | 65,5 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 81 | 87 | 168 | 12 | 13 | 25 | 7 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 27,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 133 | 112 | 245 | 20 | 17 | 37 | 14 | 38,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3,0 | 8,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 46,3 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 79 | 67 | 146 | 12 | 10 | 22 | 1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 4,6 |
| 13 | PASIMASUNGGU T | UJUNG JAMPEA | 56 | 46 | 102 | 8 | 7 | 15 | 1 | 6,5 | 1,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 13,1 |
| 14 | BUKI | BUKI | 31 | 35 | 66 | 5 | 5 | 10 | 8 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 | 80,8 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.014** | **873** | **1.887** | **152** | **131** | **283** | **124** | **43,8** | **15** | **5,3** | **39** | **13,8** | **0** | **0,0** | **5** | **1,8** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **183** | **64,7** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 34**

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, POST NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KEMATIAN | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LAKI - LAKI | | | | | PEREMPUAN | | | | | LAKI - LAKI + PEREMPUAN | | | | |
| | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | | NEONATAL | POST NEONATAL | BALITA | | |
| | | | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL | | | BAYI | ANAK BALITA | JUMLAH TOTAL |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *21* | *22* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | | LOWA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | | 16 | 4 | 20 | 1 | 21 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | 23 | 5 | 28 | 1 | 29 |
| **ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)** | | | **15,8** | | **19,7** | **1,0** | **20,7** | **8,0** | | **9,2** | **0,0** | **9,2** | **12,2** | | **14,8** | **0,5** | **15,4** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

**TABEL 35**

**JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) | | | | | | | | PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BBLR DAN PREMATURITAS | ASFIKSIA | TETANUS NEONATORUM | INFEKSI | KELAINAN KONGENITAL | COVID-19 | KELAINAN CARDIOVASKULAR DAN RESPIRATORI | LAIN-LAIN | KONDISI PERINATAL | PNEUMONIA | DIARE | KELAINAN KONGENITAL JANTUNG | KELAINAN KONGENITAL LANNYA | MENINGITIS | PENYAKIT SARAF | DEMAM BERDARAH | LAIN-LAIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **8** | **5** | **0** | **6** | **1** | **0** | **0** | **3** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 36**

**JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIARE | DEMAM BERDARAH | PNEUMONIA | KELAINAN KONGENITAL JANTUNG | PD3I | PENYAKIT SARAF | KELAINAN KONGENITAL LAINNYA | TENGGELAM, CEDERA, KECELAKAAN | INFEKSI PARASIT | COVID-19 | LAIN-LAIN |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **1** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 37**

**BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DAN PREMATUR MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | BAYI BARU LAHIR DITIMBANG | | | | | | BAYI BBLR | | | | | | PREMATUR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 216 | 192 | 408 | 192 | 88,9 | 4 | 2,1 | 196 | 48,0 | 17 | 8,9 | 15 | 375,0 | 32 | 16,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 81 | 76 | 157 | 76 | 93,8 | 2 | 2,6 | 78 | 49,7 | 13 | 17,1 | 8 | 400,0 | 21 | 26,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 49 | 26 | 75 | 26 | 53,1 | 0 | 0,0 | 26 | 34,7 | 1 | 3,8 | 1 | #DIV/0! | 2 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 27 | 30 | 57 | 30 | 111,1 | 1 | 3,3 | 31 | 54,4 | 0 | 0,0 | 3 | 300,0 | 3 | 9,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 48 | 48 | 96 | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 48 | 50,0 | 1 | 2,1 | 3 | #DIV/0! | 4 | 8,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 31 | 20 | 51 | 20 | 64,5 | 0 | 0,0 | 20 | 39,2 | 3 | 15,0 | 3 | #DIV/0! | 6 | 30,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 56 | 47 | 103 | 47 | 83,9 | 1 | 2,1 | 48 | 46,6 | 7 | 14,9 | 3 | 300,0 | 10 | 20,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | 0 | LOWA | 63 | 38 | 101 | 38 | 60,3 | 0 | 0,0 | 38 | 37,6 | 7 | 18,4 | 3 | #DIV/0! | 10 | 26,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 63 | 49 | 112 | 49 | 77,8 | 3 | 6,1 | 52 | 46,4 | 5 | 10,2 | 8 | 266,7 | 13 | 25,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 81 | 87 | 168 | 87 | 107,4 | 2 | 2,3 | 89 | 53,0 | 3 | 3,4 | 8 | 400,0 | 11 | 12,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 133 | 112 | 245 | 112 | 84,2 | 4 | 3,6 | 116 | 47,3 | 6 | 5,4 | 5 | 125,0 | 11 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 79 | 67 | 146 | 67 | 84,8 | 0 | 0,0 | 67 | 45,9 | 6 | 9,0 | 3 | #DIV/0! | 9 | 13,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIN | UJUNG JAMPEA | 56 | 46 | 102 | 46 | 82,1 | 1 | 2,2 | 47 | 46,1 | 1 | 2,2 | 0 | 0,0 | 1 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 31 | 35 | 66 | 35 | 112,9 | 2 | 5,7 | 37 | 56,1 | 4 | 11,4 | 5 | 250,0 | 9 | 24,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.014** | **873** | **1.887** | **873** | **86,1** | **20** | **2,3** | **893** | **47,3** | **74** | **8,5** | **68** | **340,0** | **142** | **15,9** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 38**

**CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | KUNJUNGAN NEONATAL 1 KALI (KN1) | | | | | | KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) | | | | | | BAYI BARU LAHIR YANG DILAKUKAN SCREENING HIPOTIROID KONGENITAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 216 | 192 | 408 | 216 | 100,0 | 192 | 100,0 | 408 | 100,0 | 216 | 100,0 | 192 | 100,0 | 408 | 100,0 | 37 | 17,1 | 38 | 19,8 | 75 | 18,4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 81 | 76 | 157 | 81 | 100,0 | 76 | 100,0 | 157 | 100,0 | 76 | 93,8 | 76 | 100,0 | 152 | 96,8 | 22 | 27,2 | 19 | 25,0 | 41 | 26,1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 49 | 26 | 75 | 49 | 100,0 | 26 | 100,0 | 75 | 100,0 | 49 | 100,0 | 26 | 100,0 | 75 | 100,0 | 14 | 28,6 | 12 | 46,2 | 26 | 34,7 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 27 | 30 | 57 | 27 | 100,0 | 30 | 100,0 | 57 | 100,0 | 23 | 85,2 | 30 | 100,0 | 53 | 93,0 | 5 | 18,5 | 8 | 26,7 | 13 | 22,8 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 48 | 48 | 96 | 48 | 100,0 | 48 | 100,0 | 96 | 100,0 | 44 | 91,7 | 43 | 89,6 | 87 | 90,6 | 11 | 22,9 | 12 | 25,0 | 23 | 24,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 31 | 20 | 51 | 31 | 100,0 | 20 | 100,0 | 51 | 100,0 | 30 | 96,8 | 20 | 100,0 | 50 | 98,0 | 3 | 9,7 | 2 | 10,0 | 5 | 9,8 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 56 | 47 | 103 | 56 | 100,0 | 47 | 100,0 | 103 | 100,0 | 56 | 100,0 | 44 | 93,6 | 100 | 97,1 | 18 | 32,1 | 12 | 25,5 | 30 | 29,1 |
| 8 | 0 | LOWA | 63 | 38 | 101 | 63 | 100,0 | 38 | 100,0 | 101 | 100,0 | 60 | 95,2 | 38 | 100,0 | 98 | 97,0 | 7 | 11,1 | 10 | 26,3 | 17 | 16,8 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 63 | 49 | 112 | 63 | 100,0 | 49 | 100,0 | 112 | 100,0 | 59 | 93,7 | 49 | 100,0 | 108 | 96,4 | 8 | 12,7 | 5 | 10,2 | 13 | 11,6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 81 | 87 | 168 | 81 | 100,0 | 87 | 100,0 | 168 | 100,0 | 75 | 92,6 | 80 | 92,0 | 155 | 92,3 | 15 | 18,5 | 18 | 20,7 | 33 | 19,6 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 133 | 112 | 245 | 133 | 100,0 | 112 | 100,0 | 245 | 100,0 | 108 | 81,2 | 102 | 91,1 | 210 | 85,7 | 14 | 10,5 | 8 | 7,1 | 22 | 9,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 79 | 67 | 146 | 66 | 83,5 | 58 | 86,6 | 124 | 84,9 | 59 | 74,7 | 47 | 70,1 | 106 | 72,6 | 5 | 6,3 | 1 | 1,5 | 6 | 4,1 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 56 | 46 | 102 | 56 | 100,0 | 46 | 100,0 | 102 | 100,0 | 56 | 100,0 | 45 | 97,8 | 101 | 99,0 | 11 | 19,6 | 10 | 21,7 | 21 | 20,6 |
| 14 | BUKI | BUKI | 31 | 35 | 66 | 31 | 100,0 | 35 | 100,0 | 66 | 100,0 | 31 | 100,0 | 34 | 97,1 | 65 | 98,5 | 15 | 48,4 | 5 | 14,3 | 20 | 30,3 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.014** | **873** | **1.887** | **1.001** | **98,7** | **864** | **99,0** | **1.865** | **98,8** | **942** | **92,9** | **826** | **94,6** | **1.768** | **93,7** | **185** | **18,2** | **160** | **18,3** | **345** | **18,3** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 39**

**BAYI BARU LAHIR MENDAPAT IMD* DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI < 6 BULAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BAYI BARU LAHIR | | | BAYI USIA < 6 BULAN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | MENDAPAT IMD | | JUMLAH | DIBERI ASI EKSKLUSIF | |
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 68 | 61 | 89,7 | 203 | 183 | 90,1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 7 | 7 | 100,0 | 72 | 3 | 4,2 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 5 | 5 | 100,0 | 21 | 4 | 19,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 8 | 6 | 75,0 | 36 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 6 | 6 | 100,0 | 43 | 43 | 100,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5 | 2 | 40,0 | 25 | 7 | 28,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 7 | 7 | 100,0 | 36 | 4 | 11,1 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 16 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 4 | 2 | 50,0 | 111 | 82 | 73,9 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 20 | 20 | 100,0 | 54 | 50 | 92,6 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 17 | 13 | 76,5 | 79 | 12 | 15,2 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 10 | 10 | 100,0 | 21 | 0 | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 2 | 2 | 100,0 | 46 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 4 | 4 | 100,0 | 35 | 17 | 48,6 |
| | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **163** | **145** | **89,0** | **798** | **405** | **50,8** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini

**TABEL 40**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI | | | PELAYANAN KESEHATAN BAYI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 226 | 244 | 470 | 226 | 100,0 | 208 | 85,2 | 434 | 92,3 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 96 | 97 | 193 | 68 | 70,8 | 63 | 64,9 | 131 | 67,9 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 59 | 65 | 124 | 33 | 55,9 | 25 | 38,5 | 58 | 46,8 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 47 | 53 | 100 | 33 | 70,2 | 29 | 54,7 | 62 | 62,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 67 | 69 | 136 | 67 | 100,0 | 61 | 88,4 | 128 | 94,1 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 42 | 45 | 87 | 42 | 100,0 | 40 | 88,9 | 82 | 94,3 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 62 | 65 | 127 | 61 | 98,4 | 36 | 55,4 | 97 | 76,4 |
| 8 | 0 | LOWA | 66 | 68 | 134 | 66 | 100,0 | 61 | 89,7 | 127 | 94,8 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 71 | 76 | 147 | 47 | 66,2 | 73 | 96,1 | 120 | 81,6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 89 | 99 | 188 | 89 | 100,0 | 86 | 86,9 | 175 | 93,1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 132 | 124 | 256 | 132 | 100,0 | 107 | 86,3 | 239 | 93,4 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 69 | 73 | 142 | 53 | 76,8 | 59 | 80,8 | 112 | 78,9 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 67 | 68 | 135 | 46 | 68,7 | 48 | 70,6 | 94 | 69,6 |
| 14 | BUKI | BUKI | 53 | 54 | 107 | 52 | 98,1 | 55 | 101,9 | 107 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.146** | **1.200** | **2.346** | **1.015** | **88,6** | **951** | **79** | **1.966** | **83,8** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 41**

**CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (*UCI*) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | DESA/KELURAHAN *UCI* | % DESA/KELURAHAN *UCI* |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 5 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 6 | 100,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 7 | 100,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 5 | 5 | 100,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 5 | 100,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5 | 5 | 100,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 5 | 100,0 |
| 8 | 0 | LOWA | 7 | 5 | 71,4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 7 | 100,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 8 | 100,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 7 | 77,8 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 4 | 66,7 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 6 | 100,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 7 | 7 | 100,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **88** | **82** | **93,2** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 42

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP | | | BAYI DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | HB0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BCG | | | | | |
| | | | | | | < 24 Jam | | | | | | 1 - 7 Hari | | | | | | HB0 Total | | | | | | | | | | | |
| | | | L | P | L+P | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 216 | 192 | 408 | 216 | 100,0 | 192 | 100,0 | 408 | 100,0 | 2 | 0,9 | 2 | 1,0 | 4 | 1,0 | 218 | 100,9 | 194 | 101,0 | 412 | 101,0 | 216 | 100,0 | 192 | 100,0 | 408 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 81 | 76 | 157 | 71 | 87,7 | 59 | 77,6 | 130 | 82,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 71 | 87,7 | 59 | 77,6 | 130 | 82,8 | 71 | 87,7 | 61 | 80,3 | 132 | 84,1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 49 | 26 | 75 | 39 | 79,6 | 26 | 100,0 | 65 | 86,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 79,6 | 26 | 100,0 | 65 | 86,7 | 40 | 81,6 | 26 | 100,0 | 66 | 88,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 27 | 30 | 57 | 25 | 92,6 | 30 | 100,0 | 55 | 96,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 25 | 92,6 | 30 | 100,0 | 55 | 96,5 | 25 | 92,6 | 26 | 86,7 | 51 | 89,5 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 48 | 48 | 96 | 48 | 100,0 | 38 | 79,2 | 86 | 89,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 48 | 100,0 | 38 | 79,2 | 86 | 89,6 | 47 | 97,9 | 38 | 79,2 | 85 | 88,5 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 31 | 20 | 51 | 20 | 64,5 | 20 | 100,0 | 40 | 78,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 64,5 | 20 | 100,0 | 40 | 78,4 | 25 | 80,6 | 23 | 115,0 | 48 | 94,1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 56 | 47 | 103 | 50 | 89,3 | 47 | 100,0 | 97 | 94,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 50 | 89,3 | 47 | 100,0 | 97 | 94,2 | 50 | 89,3 | 37 | 78,7 | 87 | 84,5 |
| 8 | 0 | LOWA | 63 | 38 | 101 | 29 | 46,0 | 24 | 63,2 | 53 | 52,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 46,0 | 24 | 63,2 | 53 | 52,5 | 63 | 100,0 | 38 | 100,0 | 101 | 100,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 63 | 49 | 112 | 63 | 100,0 | 49 | 100,0 | 112 | 100,0 | 1 | 1,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0,9 | 64 | 101,6 | 49 | 100,0 | 113 | 100,9 | 63 | 100,0 | 49 | 100,0 | 112 | 100,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 81 | 87 | 168 | 79 | 97,5 | 75 | 86,2 | 154 | 91,7 | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 2 | 1,2 | 80 | 98,8 | 76 | 87,4 | 156 | 92,9 | 73 | 90,1 | 72 | 82,8 | 145 | 86,3 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 133 | 112 | 245 | 97 | 72,9 | 99 | 88,4 | 196 | 80,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,8 | 2 | 0,8 | 97 | 72,9 | 101 | 90,2 | 198 | 80,8 | 119 | 89,5 | 122 | 108,9 | 241 | 98,4 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 79 | 67 | 146 | 73 | 92,4 | 54 | 80,6 | 127 | 87,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 73 | 92,4 | 54 | 80,6 | 127 | 87,0 | 71 | 89,9 | 55 | 82,1 | 126 | 86,3 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 56 | 46 | 102 | 38 | 67,9 | 39 | 84,8 | 77 | 75,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 67,9 | 39 | 84,8 | 77 | 75,5 | 54 | 96,4 | 46 | 100,0 | 100 | 98,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 31 | 35 | 66 | 29 | 93,5 | 26 | 74,3 | 55 | 83,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 29 | 93,5 | 26 | 74,3 | 55 | 83,3 | 28 | 90,3 | 38 | 108,6 | 66 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | | 1.014 | 873 | 1.887 | 877 | 86,5 | 778 | 89,1 | 1.655 | 87,7 | 4 | 0,4 | 5 | 0,6 | 9 | 0,5 | 881 | 86,9 | 783 | 89,7 | 1.664 | 88,2 | 945 | 93,2 | 823 | 94,3 | 1.768 | 93,7 |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 43**

**CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI *(SURVIVING INFANT)* | | | BAYI DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DPT-HB-Hib3 | | | | | | POLIO 4* | | | | | | CAMPAK RUBELA | | | | | | IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | | | |
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L+P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 226 | 244 | 470 | 255 | 112,8 | 222 | 91,0 | 477 | 101,5 | 237 | 104,9 | 226 | 92,6 | 463 | 98,5 | 237 | 104,9 | 219 | 89,8 | 456 | 97,0 | 237 | 104,9 | 219 | 89,8 | 456 | 97,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 96 | 97 | 193 | 45 | 46,9 | 54 | 55,7 | 99 | 51,3 | 49 | 51,0 | 58 | 59,8 | 107 | 55,4 | 81 | 84,4 | 78 | 80,4 | 159 | 82,4 | 81 | 84,4 | 78 | 80,4 | 159 | 82,4 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 59 | 65 | 124 | 30 | 50,8 | 41 | 63,1 | 71 | 57,3 | 33 | 55,9 | 43 | 66,2 | 76 | 61,3 | 29 | 49,2 | 37 | 56,9 | 66 | 53,2 | 29 | 49,2 | 36 | 55,4 | 65 | 52,4 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 47 | 53 | 100 | 34 | 72,3 | 21 | 39,6 | 55 | 55,0 | 30 | 63,8 | 24 | 45,3 | 54 | 54,0 | 32 | 68,1 | 22 | 41,5 | 54 | 54,0 | 32 | 68,1 | 22 | 41,5 | 54 | 54,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 67 | 69 | 136 | 51 | 76,1 | 47 | 68,1 | 98 | 72,1 | 55 | 82,1 | 44 | 63,8 | 99 | 72,8 | 54 | 80,6 | 53 | 76,8 | 107 | 78,7 | 54 | 80,6 | 53 | 76,8 | 107 | 78,7 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 42 | 45 | 87 | 17 | 40,5 | 21 | 46,7 | 38 | 43,7 | 20 | 47,6 | 20 | 44,4 | 40 | 46,0 | 25 | 59,5 | 26 | 57,8 | 51 | 58,6 | 25 | 59,5 | 26 | 57,8 | 51 | 58,6 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 62 | 65 | 127 | 41 | 66,1 | 26 | 40,0 | 67 | 52,8 | 41 | 66,1 | 26 | 40,0 | 67 | 52,8 | 58 | 93,5 | 32 | 49,2 | 90 | 70,9 | 58 | 93,5 | 32 | 49,2 | 90 | 70,9 |
| 8 | 0 | LOWA | 66 | 68 | 134 | 51 | 77,3 | 36 | 52,9 | 87 | 64,9 | 30 | 45,5 | 24 | 35,3 | 54 | 40,3 | 54 | 81,8 | 44 | 64,7 | 98 | 73,1 | 49 | 74,2 | 47 | 69,1 | 96 | 71,6 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 71 | 76 | 147 | 65 | 91,5 | 51 | 67,1 | 116 | 78,9 | 65 | 91,5 | 52 | 68,4 | 117 | 79,6 | 58 | 81,7 | 63 | 82,9 | 121 | 82,3 | 58 | 81,7 | 63 | 82,9 | 121 | 82,3 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 89 | 99 | 188 | 73 | 82,0 | 73 | 73,7 | 146 | 77,7 | 63 | 70,8 | 68 | 68,7 | 131 | 69,7 | 84 | 94,4 | 81 | 81,8 | 165 | 87,8 | 84 | 94,4 | 81 | 81,8 | 165 | 87,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 132 | 124 | 256 | 154 | 116,7 | 136 | 109,7 | 290 | 113,3 | 156 | 118,2 | 148 | 119,4 | 304 | 118,8 | 151 | 114,4 | 116 | 93,5 | 267 | 104,3 | 132 | 100,0 | 115 | 92,7 | 247 | 96,5 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 69 | 73 | 142 | 49 | 71,0 | 44 | 60,3 | 93 | 65,5 | 44 | 63,8 | 34 | 46,6 | 78 | 54,9 | 91 | 131,9 | 75 | 102,7 | 166 | 116,9 | 53 | 76,8 | 44 | 60,3 | 97 | 68,3 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 67 | 68 | 135 | 53 | 79,1 | 41 | 60,3 | 94 | 69,6 | 53 | 79,1 | 41 | 60,3 | 94 | 69,6 | 58 | 86,6 | 52 | 76,5 | 110 | 81,5 | 58 | 86,6 | 52 | 76,5 | 110 | 81,5 |
| 14 | BUKI | BUKI | 53 | 54 | 107 | 30 | 56,6 | 35 | 64,8 | 65 | 60,7 | 29 | 54,7 | 30 | 55,6 | 59 | 55,1 | 37 | 69,8 | 38 | 70,4 | 75 | 70,1 | 37 | 69,8 | 38 | 70,4 | 75 | 70,1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.146** | **1.200** | **2.346** | **948** | **82,7** | **848** | **70,7** | **1.796** | **76,6** | **905** | **79,0** | **838** | **69,8** | **1.743** | **74,3** | **1.049** | **91,5** | **936** | **78,0** | **1.985** | **84,6** | **987** | **86,1** | **906** | **75,5** | **1.893** | **80,7** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3

**TABEL 44**

**CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)**
**MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BADUTA | | | BADUTA DIIMUNISASI | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DPT-HB-Hib4 | | | | | | CAMPAK RUBELA 2 | | | | | |
| | | | | | | L | | P | | L + P | | L | | P | | L + P | |
| | | | L | P | L+P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 435 | 380 | 815 | 122 | 28,0 | 104 | 27,4 | 226 | 27,7 | 134 | 30,8 | 111 | 29,2 | 245 | 30,1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 96 | 98 | 194 | 47 | 49,0 | 51 | 52,0 | 98 | 50,5 | 58 | 60,4 | 75 | 76,5 | 133 | 68,6 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 74 | 57 | 131 | 33 | 44,6 | 34 | 59,6 | 67 | 51,1 | 36 | 48,6 | 33 | 57,9 | 69 | 52,7 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 61 | 36 | 97 | 38 | 62,3 | 23 | 63,9 | 61 | 62,9 | 38 | 62,3 | 26 | 72,2 | 64 | 66,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 114 | 89 | 203 | 81 | 71,1 | 60 | 67,4 | 141 | 69,5 | 80 | 70,2 | 59 | 66,3 | 139 | 68,5 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 54 | 40 | 94 | 32 | 59,3 | 15 | 37,5 | 47 | 50,0 | 30 | 55,6 | 19 | 47,5 | 49 | 52,1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 88 | 69 | 157 | 45 | 51,1 | 49 | 71,0 | 94 | 59,9 | 65 | 73,9 | 54 | 78,3 | 119 | 75,8 |
| 8 | 0 | LOWA | 117 | 78 | 195 | 34 | 29,1 | 29 | 37,2 | 63 | 32,3 | 25 | 21,4 | 28 | 35,9 | 53 | 27,2 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 129 | 135 | 264 | 82 | 63,6 | 82 | 60,7 | 164 | 62,1 | 75 | 58,1 | 80 | 59,3 | 155 | 58,7 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 181 | 164 | 345 | 74 | 40,9 | 65 | 39,6 | 139 | 40,3 | 93 | 51,4 | 77 | 47,0 | 170 | 49,3 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 198 | 154 | 352 | 39 | 19,7 | 32 | 20,8 | 71 | 20,2 | 48 | 24,2 | 43 | 27,9 | 91 | 25,9 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 73 | 48 | 121 | 34 | 46,6 | 36 | 75,0 | 70 | 57,9 | 34 | 46,6 | 43 | 89,6 | 77 | 63,6 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 125 | 97 | 222 | 59 | 47,2 | 41 | 42,3 | 100 | 45,0 | 59 | 47,2 | 41 | 42,3 | 100 | 45,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 74 | 61 | 135 | 45 | 60,8 | 30 | 49,2 | 75 | 55,6 | 25 | 33,8 | 26 | 42,6 | 51 | 37,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1.819** | **1.506** | **3.325** | **765** | **42,1** | **651** | **43,2** | **1.416** | **42,6** | **800** | **44,0** | **715** | **47,5** | **1.515** | **45,6** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 45**

**CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BAYI 6-11 BULAN | | | ANAK BALITA (12-59 BULAN) | | | BALITA (6-59 BULAN) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH BAYI | MENDAPAT VIT A | | JUMLAH | MENDAPAT VIT A | | JUMLAH | MENDAPAT VIT A | |
| | | | | S | % | | S | % | | S | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 191 | 173 | 90,6 | 1.878 | 1.556 | 82,9 | 2.069 | 1.729 | 83,6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 57 | 57 | 100,0 | 537 | 537 | 100,0 | 594 | 594 | 100,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 33 | 33 | 100,0 | 230 | 207 | 90,0 | 263 | 240 | 91,3 |
| 4 | | PARANGIA | 24 | 20 | 83,3 | 197 | 177 | 89,8 | 221 | 197 | 89,1 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 58 | 47 | 81,0 | 381 | 329 | 86,4 | 439 | 376 | 85,6 |
| 6 | | POLEBUNGING | 28 | 28 | 100,0 | 227 | 227 | 100,0 | 255 | 255 | 100,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 46 | 46 | 100,0 | 389 | 389 | 100,0 | 435 | 435 | 100,0 |
| 8 | | LOWA | 34 | 24 | 70,6 | 374 | 294 | 78,6 | 408 | 318 | 77,9 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 61 | 61 | 100,0 | 533 | 495 | 92,9 | 594 | 556 | 93,6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 100 | 81 | 81,0 | 717 | 580 | 80,9 | 817 | 661 | 80,9 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 43 | 43 | 100,0 | 551 | 550 | 99,8 | 594 | 593 | 99,8 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 59 | 44 | 74,6 | 424 | 409 | 96,5 | 483 | 453 | 93,8 |
| 14 | BUKI | BUKI | 39 | 39 | 100,0 | 289 | 289 | 100,0 | 328 | 328 | 100,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **773** | **696** | **90,0** | **6.727** | **6.039** | **89,8** | **7.500** | **6.735** | **89,8** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.

Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

**TABEL 46**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN BALITA (USIA 0-59 BULAN) | SASARAN ANAK BALITA (USIA 12-59 BULAN) | BALITA MEMILIKI BUKU KIA | | BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | | BALITA DILAYANI SDIDTK | | BALITA DILAYANI MTBS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2284 | 2284 | 398 | 17,43 | 736 | 32,22 | 10 | 0,44 | 2226 | |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 939 | 896 | 939 | 100,00 | 320 | 34,08 | 896 | 100,00 | 243 | |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 605 | 578 | 255 | 42,15 | 125 | 20,66 | 0 | 0,00 | 214 | |
| 4 | 0 | PARANGIA | 485 | 463 | 485 | 100,00 | 255 | 52,58 | 463 | 100,00 | 129 | |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 663 | 634 | 663 | 100,00 | 549 | 82,81 | 0 | 0,00 | 361 | |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 424 | 405 | 424 | 100,00 | 218 | 51,42 | 405 | 100,00 | 16 | |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 616 | 588 | 92 | 14,94 | 248 | 40,26 | 588 | 100,00 | 117 | |
| 8 | 0 | LOWA | 653 | 624 | 653 | 100,00 | 581 | 88,97 | 624 | 100,00 | 289 | |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 714 | 680 | 714 | 100,00 | 643 | 90,06 | 0 | 0,00 | 499 | |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 917 | 846 | 598 | 65,21 | 587 | 64,01 | 146 | 17,26 | 47 | |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1243 | 1127 | 335 | 26,95 | 931 | 74,90 | 0 | 0,00 | 267 | |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 692 | 645 | 348 | 50,29 | 403 | 58,24 | 0 | 0,00 | 5 | |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 659 | 628 | 72 | 10,93 | 132 | 20,03 | 0 | 0,00 | 211 | |
| 14 | BUKI | BUKI | 519 | 496 | 408 | 78,61 | 277 | 53,37 | 0 | 0,00 | 159 | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **11413** | **7714** | **6384** | **82,76** | **6005** | **52,62** | **3132** | **40,60** | **4783** | **#DIV/0!** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 47**

**JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | BALITA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH SASARAN BALITA (S) | | | DITIMBANG | | | | | |
| | | | | | | JUMLAH (D) | | | % (D/S) | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | 4.870 | | | 4.584 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94,1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | 756 | | | 568 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75,1 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | 361 | | | 316 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87,5 |
| 4 | 0 | PARANGIA | | | 521 | | | 516 | #DIV/0! | #DIV/0! | 99,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | 493 | | | 436 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,4 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | | | 307 | | | 267 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | 579 | | | 371 | #DIV/0! | #DIV/0! | 64,1 |
| 8 | 0 | LOWA | | | 297 | | | 264 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88,9 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | 645 | | | 505 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78,3 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | 1.636 | | | 1.378 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84,2 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | 1.091 | | | 767 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70,3 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | 1.489 | | | 1.294 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86,9 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | 1.010 | | | 746 | #DIV/0! | #DIV/0! | 73,9 |
| 14 | BUKI | BUKI | | | 742 | | | 584 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **14.797** | **0** | **0** | **12.596** | **#DIV/0!** | **#DIV/0!** | **85,1** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 48**

**STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA YANG DITIMBANG | BALITA BERAT BADAN KURANG (BB/U) | | JUMLAH BALITA YANG DIUKUR TINGGI BADAN | BALITA PENDEK (TB/U) | | JUMLAH BALITA YANG DIUKUR | BALITA GIZI KURANG (BB/TB : < -2 s.d -3 SD) | | BALITA GIZI BURUK (BB/TB: < -3 SD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 4.584 | 158 | 3,4 | 1.755 | 205 | 11,7 | 1.753 | 62 | 3,5 | 4 | 0,2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 568 | 96 | 16,9 | 437 | 111 | 25,4 | 437 | 22 | 5,0 | 2 | 0,5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 316 | 34 | 10,8 | 302 | 75 | 24,8 | 302 | 12 | 4,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | | PARANGIA | 516 | 30 | 5,8 | 224 | 56 | 25,0 | 224 | 8 | 3,6 | 1 | 0,4 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 436 | 73 | 16,7 | 423 | 99 | 23,4 | 423 | 23 | 5,4 | 23 | 5,4 |
| 6 | | POLEBUNGING | 267 | 33 | 12,4 | 229 | 64 | 27,9 | 229 | 12 | 5,2 | 12 | 5,2 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 371 | 69 | 18,6 | 391 | 96 | 24,6 | 391 | 25 | 6,4 | 13 | 3,3 |
| 8 | | LOWA | 264 | 79 | 29,9 | 435 | 88 | 20,2 | 435 | 18 | 4,1 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 505 | 86 | 17,0 | 523 | 91 | 17,4 | 523 | 16 | 3,1 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1.378 | 1.166 | 84,6 | 1.307 | 46 | 3,5 | 680 | 89 | 13,1 | 14 | 2,1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 767 | 142 | 18,5 | 419 | 124 | 29,6 | 450 | 67 | 14,9 | 11 | 2,4 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1.294 | 22 | 1,7 | 273 | 30 | 11,0 | 273 | 7 | 2,6 | 3 | 1,1 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 746 | 122 | 16,4 | 446 | 122 | 27,4 | 446 | 57 | 12,8 | 11 | 2,5 |
| 14 | BUKI | BUKI | 584 | 47 | 8,0 | 284 | 46 | 16,2 | 283 | 6 | 2,1 | 1 | 0,4 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **12.596** | **2.157** | **17,1** | **7.448** | **1.253** | **16,8** | **6.849** | **424** | **6,2** | **95** | **1,4** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 49

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA SERTA USIA PENDIDIKAN DASAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PESERTA DIDIK SEKOLAH | | | | | | | | | USIA PENDIDIKAN DASAR (KELAS 1-9) | | | SEKOLAH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KELAS 1 SD/MI | | | KELAS 7 SMP/MTS | | | KELAS 10 SMA/MA | | | | | | SD/MI | | | SMP/MTS | | | SMA/MA | | |
| | | | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH PESERTA DIDIK | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % | JUMLAH | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 512 | 475 | 92,8 | 506 | 489 | 96,6 | 965 | 952 | 98,7 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1.074 | 183 | 17,0 | 587 | 133 | 22,7 | 313 | 129 | 41,2 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 93 | 93 | 100,0 | 124 | 124 | 100,0 | 167 | 167 | 100,0 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 77 | 68 | 88,3 | 68 | 64 | 94,1 | 123 | 77 | 62,6 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 108 | 108 | 100,0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 61 | 61 | 100,0 | 81 | 81 | 100,0 | 38 | 38 | 100,0 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 106 | 75 | 70,8 | 122 | 112 | 91,8 | 60 | 60 | 100,0 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 104 | 104 | 100,0 | 80 | 80 | 100,0 | 67 | 31 | 46,3 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 176 | 160 | 90,9 | 139 | 122 | 87,8 | 78 | 54 | 69,2 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 163 | 133 | 81,6 | 168 | 137 | 81,5 | 142 | 127 | 89,4 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 129 | 107 | 82,9 | 83 | 79 | 95,2 | 51 | 46 | 90,2 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 949 | 177 | 18,7 | 396 | 57 | 14,4 | 84 | 36 | 42,9 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 109 | 105 | 96,3 | 108 | 102 | 94,4 | 144 | 135 | 93,8 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 92 | 92 | 100,0 | 94 | 92 | 97,9 | 57 | 57 | 100,0 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **3.753** | **1.941** | **51,7** | **2.556** | **1.672** | **65,4** | **2.289** | **1.909** | **83,4** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 50**

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TUMPATAN GIGI TETAP | PENCABUTAN GIGI TETAP | JUMLAH KUNJUNGAN | RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN | JUMLAH KASUS GIGI | JUMLAH KASUS DIRUJUK | % KASUS DIRUJUK |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 274 | 393 | 216 | 0,7 | 0 | 115 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 37 | 26 | 0,0 | 0 | | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 1 | 14 | 228 | 0,1 | 0 | | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 60 | 209 | 0,0 | 0 | 6 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 46 | 138 | 0,0 | 0 | 16 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/ KOTA)** | | | **275** | **550** | **817** | **0,5** | **0** | **137** | **#DIV/0!** |

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

Keterangan: pelayanan kesehatan gigi meliputi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas

**TABEL 51**

**PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH SD/MI | JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL | % | JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI | % | JUMLAH MURID SD/MI | | | MURID SD/MI DIPERIKSA | | | | | | MURID SD/MI PERLU PERAWATAN | | | MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN | | | | | |
| | | | | | | | | L | P | L + P | L | % | P | % | L + P | % | L | P | L + P | L | % | P | % | L + P | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 15 | | 0,0 | | 0,0 | 1.620 | 1.429 | 3.049 | | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 13 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 8 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 4 | 0 | PARANGIA | 9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 7 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 12 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 11 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 8 | 0 | LOWA | 9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 13 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 13 | PASIMASUNGGU | UJUNG JAMPEA | 9 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| 14 | BUKI | BUKI | 10 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### | | | 0 | | ##### | | ##### | 0 | ##### |
| **JUMLAH (KAB/ KOTA)** | | | **146** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **1.620** | **1.429** | **3.049** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#####** | **0** | **#####** | **0** | **#####** |

Sumber: Bidang Yankes Dinkes Kab. Kepulauan Selayar

**TABEL 52**

**PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | | | MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | | | | | | BERISIKO | | | | | | |
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6.269 | 7.084 | 13.353 | 6.269 | 100,0 | 7.084 | 100,0 | 13.353 | 100,0 | 537 | 8,6 | 729 | 10,3 | 1.266 | 9,5 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3.904 | 3.950 | 7.854 | 446 | 11,4 | 1.529 | 38,7 | 1.975 | 25,1 | 208 | 46,6 | 442 | 28,9 | 650 | 32,9 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 2.088 | 2.092 | 4.180 | 2.088 | 100,0 | 2.092 | 100,0 | 4.180 | 100,0 | 752 | 36,0 | 926 | 44,3 | 1.678 | 40,1 |
| 4 | | PARANGIA | 1.451 | 2.663 | 4.114 | 189 | 13,0 | 451 | 16,9 | 640 | 15,6 | 85 | 45,0 | 290 | 64,3 | 375 | 58,6 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.835 | 1.885 | 3.720 | 1.093 | 59,6 | 1.885 | 100,0 | 2.978 | 80,1 | 427 | 39,1 | 1.615 | 85,7 | 2.042 | 68,6 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1.426 | 1.427 | 2.853 | 757 | 53,1 | 991 | 69,4 | 1.748 | 61,3 | 195 | 25,8 | 445 | 44,9 | 640 | 36,6 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 2.001 | 2.168 | 4.169 | 354 | 17,7 | 1.116 | 51,5 | 1.470 | 35,3 | 174 | 49,2 | 508 | 45,5 | 682 | 46,4 |
| 8 | | LOWA | 2.592 | 2.876 | 5.468 | 542 | 20,9 | 870 | 30,3 | 1.412 | 25,8 | 236 | 43,5 | 512 | 58,9 | 748 | 53,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2.217 | 2.443 | 4.660 | 2.161 | 97,5 | 2.345 | 96,0 | 4.506 | 96,7 | 400 | 18,5 | 604 | 25,8 | 1.004 | 22,3 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2.105 | 2.177 | 4.282 | 191 | 9,1 | 1.064 | 48,9 | 1.255 | 29,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 4.533 | 4.594 | 9.127 | 252 | 5,6 | 643 | 14,0 | 895 | 9,8 | 129 | 51,2 | 318 | 49,5 | 447 | 49,9 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2.180 | 2.250 | 4.430 | 202 | 9,3 | 697 | 31,0 | 899 | 20,3 | 92 | 45,5 | 259 | 37,2 | 351 | 39,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 2.307 | 2.477 | 4.784 | 1.367 | 59,3 | 2.477 | 100,0 | 3.844 | 80,4 | 783 | 57,3 | 1.619 | 65,4 | 2.402 | 62,5 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.955 | 2.024 | 3.979 | 367 | 18,8 | 1.302 | 64,3 | 1.669 | 41,9 | 134 | 36,5 | 686 | 52,7 | 820 | 49,1 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **36.863** | **40.110** | **76.973** | **16.278** | **44,2** | **24.546** | **61,2** | **40.824** | **53,0** | **4.152** | **25,5** | **8.953** | **36,5** | **13.105** | **32,1** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 53**

**CALON PENGANTIN (CATIN) MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH CATIN TERDAFTAR DI KUA ATAU LEMBAGA AGAMA LAINNYA | | | CATIN MENDAPATKAN LAYANAN KESEHATAN | | | | | | CATIN PEREMPUAN ANEMIA | | CATIN PEREMPUAN GIZI KURANG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | | | | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *15* | *16* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 57 | 57 | 114 | 57 | 100 | 57 | 100 | 114 | 100 | 22 | 38,6 | 14 | 24,6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 111 | 111 | 222 | 111 | 100 | 111 | 100 | 222 | 100 | 9 | 8,1 | 17 | 15,3 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 15 | 15 | 30 | 15 | 100 | 15 | 100 | 30 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | | PARANGIA | 8 | 8 | 16 | 8 | 100 | 8 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 27 | 27 | 54 | 27 | 100 | 27 | 100 | 54 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 6 | 6 | 12 | 6 | 100 | 6 | 100 | 12 | 100 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 40 | 40 | 80 | 40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 100 | 6 | 15,0 | 7 | 17,5 |
| 8 | | LOWA | 26 | 26 | 52 | 26 | 100 | 26 | 100 | 52 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 31 | 31 | 62 | 31 | 100 | 31 | 100 | 62 | 100 | 6 | 19,4 | 0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 51 | 51 | 102 | 51 | 100 | 51 | 100 | 102 | 100 | 0 | 0,0 | 6 | 11,8 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 21 | 21 | 42 | 21 | 100 | 21 | 100 | 42 | 100 | 0 | 0,0 | 3 | 14,3 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 13 | 13 | 26 | 13 | 100 | 13 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 23 | 23 | 46 | 23 | 100 | 23 | 100 | 46 | 100 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **429** | **429** | **858** | **429** | **100,0** | **429** | **100,0** | **858** | **100,0** | **43** | **10,0** | **49** | **11,4** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 54**

**CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA LANJUT (60TAHUN+) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | | | MENDAPAT SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR | | | | | |
| | | | L | P | L+P | L | % | P | % | L+P | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 1.179 | 1.387 | 2.566 | 673 | 57,1 | 779 | 56,2 | 1.452 | 56,6 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 796 | 924 | 1.720 | 211 | 26,5 | 321 | 34,7 | 532 | 30,9 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 700 | 706 | 1.406 | 494 | 70,6 | 516 | 73,1 | 1.010 | 71,8 |
| 4 | | PARANGIA | 605 | 797 | 1.402 | 214 | 35,4 | 339 | 42,5 | 553 | 39,4 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 530 | 611 | 1.141 | 471 | 88,9 | 553 | 90,5 | 1.024 | 89,7 |
| 6 | | POLEBUNGING | 497 | 463 | 960 | 337 | 67,8 | 432 | 93,3 | 769 | 80,1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 455 | 893 | 1.348 | 355 | 78,0 | 575 | 64,4 | 930 | 69,0 |
| 8 | | LOWA | 543 | 955 | 1.498 | 392 | 72,2 | 610 | 63,9 | 1.002 | 66,9 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 472 | 582 | 1.054 | 361 | 76,5 | 417 | 71,6 | 778 | 73,8 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 772 | 1.166 | 1.938 | 292 | 37,8 | 297 | 25,5 | 589 | 30,4 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 655 | 912 | 1.567 | 270 | 41,2 | 581 | 63,7 | 851 | 54,3 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 590 | 845 | 1.435 | 137 | 23,2 | 202 | 23,9 | 339 | 23,6 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 409 | 521 | 930 | 277 | 67,7 | 317 | 60,8 | 594 | 63,9 |
| 14 | BUKI | BUKI | 675 | 698 | 1.373 | 220 | 32,6 | 356 | 51,0 | 576 | 42,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **8.878** | **11.460** | **20.338** | **4.704** | **53,0** | **6.295** | **54,9** | **10.999** | **54,1** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 55**

## PUSKESMAS YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA
### KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
### TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL | MELAKSANAKAN ORIENTASI P4K | MELAKSANAKAN KELAS IBU BALITA | MELAKSANAKAN KELAS SDIDTK | MELAKSANAKAN MTBS | MELAKSANAKAN KEGIATAN KESEHATAN REMAJA | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 7 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 10 | MELAKSANAKAN PENJARINGAN KESEHATAN KELAS 1, 7, 10 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | V | V | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | V | V | V | X | V | V | V | V | V | V |
| 4 | 0 | PARANGIA | V | V | X | V | V | V | V | V | V | V |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | V | V | X | V | V | V | V | X | X | X |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | 0 | LOWA | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | V | V | X | V | V | V | V | V | V | V |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | V | V | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | V | V | X | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | X | X | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | V | V | X | X | V | V | V | V | V | V |
| 14 | BUKI | BUKI | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **13** | **13** | **6** | **9** | **14** | **14** | **14** | **13** | **13** | **13** |
| **PERSENTASE** | | | **92,9** | **92,9** | **42,9** | **64,3** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **92,9** | **92,9** | **92,9** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
catatan: diisi dengan tanda "V"

**TABEL 56**

**JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | | | | | KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 204 | 112 | 54,9 | 92 | 45,1 | 204 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 85 | 39 | 45,9 | 46 | 54,1 | 85 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 48 | 28 | 58,3 | 20 | 41,7 | 48 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 55 | 43 | 78,2 | 12 | 21,8 | 55 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 52 | 24 | 46,2 | 28 | 53,8 | 52 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 30 | 13 | 43,3 | 17 | 56,7 | 30 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 88 | 42 | 47,7 | 46 | 52,3 | 88 | 0 |
| 8 | | LOWA | 8 | 5 | 62,5 | 3 | 37,5 | 8 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 38 | 20 | 52,6 | 18 | 47,4 | 38 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 45 | 22 | 48,9 | 23 | 51,1 | 45 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 29 | 17 | 58,6 | 12 | 41,4 | 29 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 76 | 30 | 39,5 | 46 | 60,5 | 76 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 43 | 22 | 51,2 | 21 | 48,8 | 43 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 30 | 19 | 63,3 | 11 | 36,7 | 30 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **831** | **436** | **52,5** | **395** | **47,5** | **831** | **0** |
| **JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS** | | | **2.414** | | | | | | |
| **% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR** | | | | | | **34,4** | | | |
| **PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT)** | | | | | | | | **496** | |
| **CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS (%)** | | | | | | | | **167,5** | |
| **CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)** | | | | | | | | | **0,0** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 57

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI*) | | | JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS YANG DITEMUKAN DAN DIOBATI*) | | | ANGKA KESEMBUHAN (*CURE RATE*) TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS | | | | | | ANGKA PENGOBATAN LENGKAP (*COMPLETE RATE*) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | | | | | | ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN (*SUCCESS RATE/SR*) SEMUA KASUS TUBERKULOSIS | | | | | | JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | | | |
| | | | L | P | L + P | L | P | L + P | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 65 | 66 | 131 | 72 | 69 | 141 | 2 | 3,1 | 1 | 1,5 | 3 | 2,3 | 43 | 59,7 | 48 | 69,6 | 91 | 64,5 | 45 | 62,5 | 49 | 71,0 | 94 | 66,7 | 2 | 1,4 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 15 | 12 | 27 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 50,0 | 8 | 57,1 | 16 | 53,3 | 8 | 50,0 | 8 | 57,1 | 16 | 53,3 | 2 | 6,7 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 6 | 13 | 18 | 11 | 29 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 7 | 38,9 | 4 | 36,4 | 11 | 37,9 | 8 | 44,4 | 4 | 36,4 | 12 | 41,4 | 3 | 10,3 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 15 | 9 | 24 | 16 | 10 | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 31,3 | 7 | 70,0 | 12 | 46,2 | 5 | 31,3 | 7 | 70,0 | 12 | 46,2 | 1 | 3,8 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 11 | 8 | 19 | 15 | 11 | 26 | 9 | 81,8 | 6 | 75,0 | 15 | 78,9 | 2 | 13,3 | 2 | 18,2 | 4 | 15,4 | 11 | 73,3 | 8 | 72,7 | 19 | 73,1 | 2 | 7,7 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5 | 2 | 7 | 9 | 2 | 11 | 3 | 60,0 | 2 | 100,0 | 5 | 71,4 | 1 | 11,1 | 0 | 0,0 | 1 | 9,1 | 4 | 44,4 | 2 | 100,0 | 6 | 54,5 | 2 | 18,2 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 18 | 15 | 33 | 18 | 16 | 34 | 13 | 72,2 | 9 | 60,0 | 22 | 66,7 | 2 | 11,1 | 2 | 12,5 | 4 | 11,8 | 15 | 83,3 | 11 | 68,8 | 26 | 76,5 | 1 | 2,9 |
| 8 | 0 | LOWA | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 2 | 25,0 | 0 | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0,0 | 3 | 21,4 | 3 | 12,5 | 2 | 20,0 | 9 | 64,3 | 11 | 45,8 | 2 | 20,0 | 12 | 85,7 | 14 | 58,3 | 1 | 4,2 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 21 | 10 | 31 | 22 | 11 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 40,9 | 7 | 63,6 | 16 | 48,5 | 9 | 40,9 | 7 | 63,6 | 16 | 48,5 | 5 | 15,2 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 5 | 71,4 | 3 | 60,0 | 8 | 66,7 | 5 | 71,4 | 3 | 60,0 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 8 | 5 | 13 | 11 | 5 | 16 | 1 | 12,5 | 0 | 0,0 | 1 | 7,7 | 7 | 63,6 | 3 | 60,0 | 10 | 62,5 | 8 | 72,7 | 3 | 60,0 | 11 | 68,8 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 75,0 | 1 | 20,0 | 4 | 44,4 | 3 | 75,0 | 1 | 20,0 | 4 | 44,4 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **194** | **164** | **358** | **226** | **180** | **406** | **29** | **14,9** | **21** | **12,8** | **50** | **14,0** | **94** | **41,6** | **96** | **53,3** | **190** | **46,8** | **123** | **54,4** | **117** | **65,0** | **240** | **59,1** | **19** | **4,7** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis ditemukan dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus penemuan kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap

Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

**TABEL 58**

**PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA | BALITA BATUK ATAU KESUKARAN BERNAPAS | | | PERKIRAAN PNEUMONIA BALITA | REALISASI PENEMUAN PENDERITA PNEUMONIA PADA BALITA | | | | | | | | BATUK BUKAN PNEUMONIA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH KUNJUNGAN | DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR (DIHITUNG NAPAS / LIHAT TDDK*) | PERSENTASE YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR | | PNEUMONIA | | PNEUMONIA BERAT | | JUMLAH | | | % | | | |
| | | | | | | | | L | P | L | P | L | P | L + P | | L | P | L + P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2.767 | 375 | 375 | 100,0 | 105 | 16 | 16 | 0 | 1 | 16 | 17 | 33 | 31,5 | 201 | 144 | 345 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1.134 | 199 | 199 | 100,0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 103 | 96 | 199 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 722 | 55 | 55 | 100,0 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14,6 | 30 | 30 | 60 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 801 | 26 | 26 | 100,0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,3 | 13 | 17 | 30 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 803 | 274 | 274 | 100,0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,3 | 139 | 134 | 273 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 490 | 88 | 88 | 100,0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,4 | 39 | 48 | 87 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 752 | 229 | 229 | 100,0 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 17,5 | 150 | 74 | 224 |
| 8 | 0 | LOWA | 763 | 117 | 117 | 100,0 | 29 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24,2 | 65 | 48 | 113 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 863 | 136 | 136 | 100,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 72 | 64 | 136 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1.039 | 37 | 37 | 100,0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 | 14 | 25 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1.392 | 48 | 48 | 100,0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 | 13 | 48 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 779 | 49 | 46 | 93,9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,4 | 25 | 23 | 48 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 763 | 87 | 87 | 100,0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 46 | 41 | 87 |
| 14 | BUKI | BUKI | 670 | 68 | 68 | 100,0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,9 | 31 | 43 | 74 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **13.738** | **1.788** | **1.785** | **99,8** | **521** | **28** | **25** | **0** | **1** | **28** | **26** | **54** | **10,4** | **960** | **789** | **1.749** |
| **Prevalensi pneumonia pada balita (%)** | | | **3,79** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jumlah Puskesmas yang melakukan tatalaksana Standar minimal 60%** | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | |
| **Persentase Puskesmas yang melakukan tatalaksana standar minimal 60%** | | | | | | **100,0%** | | | | | | | | | | | | |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Persentase perkiraan kasus pneumonia pada balita berbeda untuk setiap provinsi, sesuai hasil riskesdas

**TABEL 59**

**JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KELOMPOK UMUR | KASUS H I V | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L+P | PROPORSI KELOMPOK UMUR |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | ≤ 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 5 - 14 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 15 - 19 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 20 - 24 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | 25 - 49 TAHUN | 7 | 2 | 9 | 100,0 |
| 6 | ≥ 50 TAHUN | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | **7** | **2** | **9** | |
| **PROPORSI JENIS KELAMIN** | | **77,8** | **22,2** | | |
| **Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV** | | | | | **2854** |
| **Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar** | | | | | **2022** |
| **Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar** | | | | | **70,8** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 60**

**PRESENTASE ODHIV BARU MENDAPATKAN PENGOBATAN MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | ODHIV BARU DITEMUKAN | ODHIV BARU DITEMUKAN DAN MENDAPAT PENGOBATAN ARV | PERSENTASE ODHIV BARU MENDAPAT PENGOBATAN ARV |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 1 | 1 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 4 | 3 | 75 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 1 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 2 | 1 | 50 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 1 | 1 | 100 |
| | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **9** | **7** | **1** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 61**

**KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH TARGET PENEMUAN | | DIARE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DILAYANI | | | | MENDAPAT ORALIT | | | | MENDAPAT ZINC | |
| | | | | | | SEMUA UMUR | | BALITA | | SEMUA UMUR | | BALITA | | BALITA | |
| | | | | SEMUA UMUR | BALITA | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 27.588 | 745 | 464 | 441 | 59,2 | 111 | 23,9 | 330 | 74,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 11.345 | 306 | 117 | 83 | 27,1 | 40 | 34,2 | 42 | 50,6 | 0 | 0,0 | 1 | 2,5 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7.225 | 195 | 59 | 204 | 104,6 | 35 | 59,3 | 169 | 82,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 6.007 | 162 | 80 | 68 | 41,9 | 16 | 20,0 | 32 | 47,1 | 1 | 6,3 | 5 | 31,3 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 7.886 | 213 | 135 | 249 | 116,9 | 52 | 38,5 | 211 | 84,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5.127 | 138 | 71 | 115 | 83,1 | 17 | 23,9 | 27 | 23,5 | 0 | 0,0 | 3 | 17,6 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 7.519 | 203 | 73 | 172 | 84,7 | 49 | 67,1 | 110 | 64,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 8 | 0 | LOWA | 7.591 | 205 | 73 | 79 | 38,5 | 21 | 28,8 | 34 | 43,0 | 0 | 0,0 | 11 | 52,4 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 8.627 | 233 | 115 | 85 | 36,5 | 21 | 18,3 | 14 | 16,5 | 4 | 19,0 | 10 | 47,6 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10.395 | 281 | 134 | 86 | 30,6 | 9 | 6,7 | 77 | 89,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 16.777 | 453 | 162 | 415 | 91,6 | 54 | 33,3 | 33 | 8,0 | 4 | 7,4 | 8 | 14,8 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 8.060 | 218 | 109 | 76 | 34,9 | 17 | 15,6 | 59 | 77,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 7.903 | 213 | 91 | 83 | 38,9 | 18 | 19,8 | 65 | 78,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 6.490 | 175 | 62 | 137 | 78,2 | 29 | 46,8 | 108 | 78,8 | 0 | 0,0 | 1 | 3,4 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **138.540** | **3.741** | **1.745** | **2.293** | **61,3** | **489** | **28,0** | **1.311** | **57,2** | **9** | **1,8** | **39** | **8,0** |
| **ANGKA KESAKITAN DIARE PER 1.000 PENDUDUK** | | | | **270** | **843** | | | | | | | | | | |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Ket: - Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS
- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah, namun jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita

**TABEL 62**

## DETEKSI DINI HEPATITIS B PADA IBU HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH IBU HAMIL DIPERIKSA | | | % BUMIL DIPERIKSA | % BUMIL REAKTIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | REAKTIF | NON REAKTIF | TOTAL | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 516 | 10 | 424 | 434 | 84,1 | 2 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 212 | 4 | 153 | 157 | 74,1 | 3 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 137 | 0 | 75 | 75 | 54,7 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 110 | 0 | 54 | 54 | 49,1 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 150 | 0 | 70 | 70 | 46,7 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 96 | 2 | 42 | 44 | 45,8 | 5 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 139 | 2 | 94 | 96 | 69,1 | 2 |
| 8 | 0 | LOWA | 147 | 3 | 99 | 102 | 69,4 | 3 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 162 | 5 | 111 | 116 | 71,6 | 4 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 207 | 2 | 187 | 189 | 91,3 | 1 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 282 | 9 | 194 | 203 | 72,0 | 4 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 157 | 3 | 70 | 73 | 46,5 | 4 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 149 | 2 | 93 | 95 | 63,8 | 2 |
| 14 | BUKI | BUKI | 117 | 2 | 47 | 49 | 41,9 | 4 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **2.581** | **44** | **1.713** | **1.757** | **68,1** | **3** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 63**

**JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU REAKTIF HBsAg dan MENDAPATKAN HBIG**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg Reaktif | JUMLAH BAYI YANG LAHIR DARI IBU HBsAg REAKTIF MENDAPAT HBIG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | < 24 Jam | | ≥ 24 Jam | | TOTAL | |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 8 | 8 | 100 | 0 | 0,0 | 8 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3 | 2 | 67 | 1 | 33,3 | 3 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 3 | 3 | 100 | 0 | 0,0 | 3 | 100 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,0 | 3 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1 | 1 | 100 | 0 | 0,0 | 1 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 3 | 3 | 100 | 0 | 0,0 | 3 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 2 | 2 | 100 | 0 | 0,0 | 2 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **23** | **19** | **83** | **4** | **17,4** | **23** | **100** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 64**

**KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAUSI BASILER (PB)/ KUSTA KERING | | | MULTI BASILER (MB)/ KUSTA BASAH | | | PB + MB | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 12 | 12 | 24 | 15 | 6 | 21 | 27 | 18 | 45 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **12** | **12** | **24** | **24** | **9** | **33** | **36** | **21** | **57** |
| **PROPORSI JENIS KELAMIN** | | | **50,0** | **50,0** | | **72,7** | **27,3** | | **63,2** | **36,8** | |
| **ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/*NEW CASE DETECTION RATE*) PER 100.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | **51,5** | **29,1** | **40,1** |

**TABEL 65**

**KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PENDERITA KUSTA | CACAT TINGKAT 0 | | CACAT TINGKAT 2 | | PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN | | PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 |
| | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 45 | 45 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,7 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **57** | **57** | **100,0** | **0** | **0,0** | **3** | **5,3** | **0** |
| **ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK** | | | | | | **0,0** | | | | |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 66**

**JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, USIA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS TERDAFTAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAUSI BASILER/KUSTA KERING | | | MULTI BASILER/KUSTA BASAH | | | JUMLAH | | |
| | | | ANAK | DEWASA | TOTAL | ANAK | DEWASA | TOTAL | ANAK | DEWASA | TOTAL |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 3 | 21 | 24 | 0 | 21 | 21 | 3 | 42 | 45 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **3** | **21** | **24** | **0** | **33** | **33** | **3** | **54** | **57** |
| **ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | | | **4,0** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 67**

**PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT/RFT) MENURUT TIPE, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KUSTA (PB) TAHUN 2022 | | | KUSTA (MB) TAHUN 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JML PENDERITA BARU[a] | JML PENDERITA RFT | RFT RATE PB (%) | JML PENDERITA BARU[b] | JML PENDERITA RFT | RFT RATE MB (%) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 2 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 2 | 100,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100,0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU T | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1** | **1** | **100,0** | **13** | **13** | **100,0** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2020 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b= Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2021, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

**TABEL 68**

**JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN | JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5.489 | 1 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3.468 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1.192 | 0 |
| 4 | | PARANGIA | 1.193 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1.471 | 0 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1.470 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 1.718 | 0 |
| 8 | | LOWA | 1.718 | 1 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2.047 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 2.412 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3.541 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 2.109 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 1.610 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1.392 | 0 |
| | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **30.830** | **2** |
| **AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN** | | | | **6,5** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 69**

**JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS PD3I | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIFTERI | | | | PERTUSIS | | | TETANUS NEONATORUM | | | | HEPATITIS B | | | SUSPEK CAMPAK | | |
| | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | JUMLAH KASUS | | | | | |
| | | | L | P | L+P | L | L | P | L+P | L | P | L+P | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 30 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **44** | **44** | **23** | **25** | **48** |
| **CASE FATALITY RATE (%)** | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | | | **#DIV/0!** | | | | | | |
| **INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK** | | | | | | | | | | | | | | | | | **16,2** | **17,6** | **33,8** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 70**

## KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI < 24 JAM
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KLB DI DESA/KELURAHAN | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH | DITANGANI <24 JAM | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1 | 1 | 100,0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **1** | **1** | **100,0** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 71**

**JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | JENIS KEJADIAN LUAR BIASA | YANG TERSERANG | | WAKTU KEJADIAN (TANGGAL) | | | JUMLAH PENDERITA | | | KELOMPOK UMUR PENDERITA | | | | | | | | | | | JUMLAH KEMATIAN | | | JUMLAH PENDUDUK TERANCAM | | | *ATTACK RATE (%)* | | | CFR (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | JUMLAH KEC | JUMLAH DESA/KEL | DIKETAHUI | DITANGGU-LANGI | AKHIR | L | P | L+P | 0-7 HARI | 8-28 HARI | 1-11 BLN | 1-4 THN | 5-9 THN | 10-14 THN | 15-19 THN | 20-44 THN | 45-54 THN | 55-59 THN | 60-69 THN | 70+ THN | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* | *31* | *32* | *33* | *34* |
| 1 | Campak | 1 | 1 | 31/08/2023 | 02/09/2023 | 25/10/2023 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 1.212 | 2.363 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Sumber: Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 72**

## KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JUMLAH KASUS | | | MENINGGAL | | | *CFR* (%) | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0 | LOWA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| **JUMLAH KASUS (KAB/KOTA)** | | | **34** | **34** | **68** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK*** | | | **47,9** | | | | | | | | |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 73**

**KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | MALARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSPEK | KONFIRMASI LABORATORIUM | | | %KONFIRMASI LABORATORIUM | POSITIF | | | PENGOBATAN STANDAR | % PENGOBATAN STANDAR | MENINGGAL | | | *CFR* | | |
| | | | | MIKROSKOPIS | *RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT)* | TOTAL | | L | P | L+P | | | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 29 | 25 | 4 | 29 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 33 | 0 | 33 | 33 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 10 | 0 | 10 | 10 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 68 | 4 | 64 | 68 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 53 | 0 | 53 | 53 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 59 | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 22 | 3 | 19 | 22 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0 | LOWA | 59 | 0 | 59 | 59 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 18 | 0 | 18 | 18 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 14 | 5 | 9 | 14 | 100,0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | #DIV/0! | 0,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 261 | 0 | 261 | 261 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 51 | 40 | 11 | 51 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 36 | 0 | 36 | 36 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | 26 | 0 | 26 | 26 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | 12 | 0 | 12 | 12 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **751** | **77** | **674** | **751** | **100,0** | **9** | **1** | **10** | **10** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **ANGKA KESAKITAN (*ANNUAL PARASITE INCIDENCE*) PER 1.000 PENDUDUK** | | | | | | | | | | **0,1** | | | | | | | | |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 74**

**PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDERITA KRONIS FILARIASIS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | KASUS KRONIS TAHUN SEBELUMNYA | | | KASUS KRONIS BARU DITEMUKAN | | | KASUS KRONIS PINDAH | | | KASUS KRONIS MENINGGAL | | | JUMLAH SELURUH KASUS KRONIS | | |
| | | | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024
Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

**TABEL 75**

**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN | | | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LAKI-LAKI | | PEREMPUAN | | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |
| | | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 669 | 894 | 1.563 | 669 | 100 | 894 | 100 | 1.563 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 153 | 263 | 416 | 153 | 100 | 263 | 100 | 416 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 806 | 825 | 1.631 | 806 | 100 | 825 | 100 | 1.631 | 100 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 441 | 779 | 1.220 | 441 | 100 | 779 | 100 | 1.220 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 976 | 1.062 | 2.038 | 976 | 100 | 1.062 | 100 | 2.038 | 100 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 223 | 232 | 455 | 223 | 100 | 232 | 100 | 455 | 100 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 784 | 852 | 1.636 | 784 | 100 | 852 | 100 | 1.636 | 100 |
| 8 | 0 | LOWA | 1.721 | 432 | 2.153 | 1.721 | 100 | 432 | 100 | 2.153 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 673 | 727 | 1.400 | 673 | 100 | 727 | 100 | 1.400 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 92 | 250 | 342 | 92 | 100 | 250 | 100 | 342 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1.398 | 1.468 | 2.866 | 1.398 | 100 | 1.468 | 100 | 2.866 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 465 | 680 | 1.145 | 465 | 100 | 680 | 100 | 1.145 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 793 | 879 | 1.672 | 793 | 100 | 879 | 100 | 1.672 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 731 | 805 | 1.536 | 731 | 100 | 805 | 100 | 1.536 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **9.925** | **10.148** | **20.073** | **9.925** | **100** | **10.148** | **100** | **20.073** | **100** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 76**

**PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS (DM) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 244 | 244 | 100,0 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 504 | 352 | 69,8 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 85 | 85 | 100,0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 74 | 57 | 77,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 71 | 71 | 100,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 165 | 165 | 100,0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 384 | 174 | 45,3 |
| 8 | 0 | LOWA | 480 | 173 | 36,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 75 | 75 | 100,0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 68 | 17 | 25,0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 756 | 73 | 9,7 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 180 | 127 | 70,6 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 88 | 24 | 27,3 |
| 14 | BUKI | BUKI | 81 | 81 | 100,0 |
| | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **3.255** | **1.718** | **52,8** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 77

CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS)
MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS MELAKSANAKAN KEGIATAN DETEKSI DINI IVA & SADANIS* | PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN | PEMERIKSAAN IVA | | PEMERIKSAAN SADANIS | | IVA POSITIF | | CURIGA KANKER LEHER RAHIM | | KRIOTERAPI | | IVA POSITIF DAN CURIGA KANKER LEHER RAHIM DIRUJUK | | TUMOR/BENJOLAN | | CURIGA KANKER PAYUDARA | | TUMOR DAN CURIGA KANKER PAYUDARA DIRUJUK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | BENTENG | BENTENG | V | 903 | 9 | 1,0 | 894 | 99,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | V | 915 | 6 | 0,7 | 367 | 40,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | V | 1.054 | 10 | 0,9 | 20 | 1,9 | 1 | 10,0 | 1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 1 | 50,0 | 2 | 10,0 | 2 | 10,0 | 1 | 25,0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | V | 1.881 | 0 | 0,0 | 425 | 22,6 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,2 | 1 | 100,0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | V | 1.175 | 0 | 0,0 | 325 | 27,7 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 2 | 0,6 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | V | 1.032 | 0 | 0,0 | 450 | 43,6 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | V | 671 | 27 | 4,0 | 294 | 43,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **7** | **7.631** | **52** | **0,7** | **2.775** | **0,4** | **1** | **1,9** | **2** | **3,8** | **0** | **0,0** | **2** | **66,7** | **4** | **0,1** | **3** | **0,1** | **4** | **57,1** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan: IVA: Inspeksi Visual dengan Asam asetat

* diisi dengan checklist (V)

**TABEL 78**

**PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SASARAN ODGJ BERAT | PELAYANAN KESEHATAN ODGJ BERAT | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SKIZOFRENIA | | | PSIKOTIK AKUT | | | TOTAL | | | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |
| | | | | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | 0-14 th | 15 - 59 th | ≥ 60 th | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 18 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 19 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 19 | 100 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 22 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 | 2 | 22 | 100 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 100 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 100 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 2 | 11 | 100 |
| 8 | 0 | LOWA | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 3 | 18 | 100 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 100 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 100 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 23 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 | 2 | 23 | 100 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 100 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 14 | BUKI | BUKI | 17 | 0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 17 | 100 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **196** | **0** | **132** | **17** | **5** | **38** | **4** | **5** | **170** | **21** | **196** | **100** |

Sumber: Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 79**

**PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH SARANA AIR MINUM | SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/ DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR (AMAN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 13 | 5 | 38,46153846 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 24 | 12 | 50 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 5 | 15 | 5 | 33,33 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5 | 15 | 2 | 13,33 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 21 | 1 | 4,76 |
| 8 | 0 | LOWA | 7 | 29 | 16 | 55,17 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 7 | 2 | 28,57 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 5 | 1 | 20 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 10 | 3 | 30 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 8 | 1 | 12,5 |
| 14 | BUKI | BUKI | 7 | 15 | 12 | 80 |
| | | | | | | |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | 88 | 184 | 61 | 33,15 |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 80

JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS
KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KK | JUMLAH KK PENGGUNA | | | | | | KK SBS | | KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK | | PERSENTASE KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKSES SANITASI AMAN | AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | AKSES LAYAK BERSAMA | AKSES BELUM LAYAK | BABS TERTUTUP | BABS TERBUKA | JUMLAH | % | JUMLAH | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 6216 | 0 | 5911 | 305 | 0 | 0 | 0 | 6216 | 100 | 6216 | 100 | 0,00 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 3659 | 0 | 2192 | 1467 | 0 | 0 | 0 | 3659 | 100 | 3659 | 100 | 0,00 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 1970 | 0 | 1720 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1970 | 100 | 1970 | 100 | 0,00 |
| 4 | | PARANGIA | 2137 | 0 | 1975 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2137 | 100 | 2137 | 100 | 0,00 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 1733 | 0 | 1545 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1733 | 100 | 1733 | 100 | 0,00 |
| 6 | | POLEBUNGING | 1317 | 0 | 1226 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 100 | 1317 | 100 | 0,00 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 2289 | 0 | 1515 | 774 | 0 | 0 | 0 | 2289 | 100 | 2289 | 100 | 0,00 |
| 8 | | LOWA | 2342 | 0 | 911 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 100 | 2342 | 100 | 0,00 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 2286 | 0 | 1344 | 942 | 0 | 0 | 0 | 2286 | 100 | 2286 | 100 | 0,00 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 5348 | 0 | 2268 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 100 | 5348 | 100 | 0,00 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 3085 | 0 | 1610 | 1475 | 0 | 0 | 0 | 3085 | 100 | 3085 | 100 | 0,00 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 1960 | 0 | 605 | 1355 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 100 | 1960 | 100 | 0,00 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMU | UJUNG JAMPEA | 2026 | 0 | 1025 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 2026 | 100 | 2026 | 100 | 0,00 |
| 14 | BUKI | BUKI | 1915 | 0 | 1701 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1915 | 100 | 1915 | 100 | 0,00 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | | | 38283 | 0 | 25548 | 12735 | 0 | 0 | 0 | 38283 | 100 | 38283 | 100 | 0,00 |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

Keterangan : KK = Kepala Keluarga, SBS = Stop Buang Air Besar Sembarangan

**TABEL 81**

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/ KELURAHAN | JUMLAH KK | SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS) | | KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS) | | KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT) | | KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT) | | KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT) | | DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM | | KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT) | | KK AKSES RUMAH SEHAT | |
| | | | | | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 5 | 6423 | 5 | 100 | 5843 | 90,97 | 6423 | 100 | 5076 | 79,03 | 5076 | 79,03 | 0 | 0 | 6423 | 100,00 | 5234 | 81,49 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 6 | 2763 | 6 | 100 | 719 | 26,02 | 0 | 0 | 1602 | 57,98 | 955 | 34,56 | 6 | 100 | 0 | 0,00 | 139 | 5,03 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 7 | 2295 | 7 | 100 | 1962 | 85,49 | 1988 | 86,62 | 1819 | 79,26 | 1640 | 71,46 | 0 | 0 | 1924 | 83,83 | 1844 | 80,35 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 5 | 2101 | 5 | 100 | 2101 | 100 | 2101 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 5 | 2321 | 5 | 100 | 2321 | 100 | 2321 | 100 | 2321 | 100 | 876 | 37,74 | 0 | 0 | 2081 | 89,66 | 876 | 37,74 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 5 | 1535 | 5 | 100 | 1397 | 91,01 | 1504 | 97,98 | 325 | 21,17 | 463 | 30,16 | 4 | 80 | 0 | 0,00 | 1245 | 81,11 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 5 | 2094 | 5 | 100 | 1567 | 74,83 | 2094 | 100 | 1401 | 66,91 | 1117 | 53,34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1362 | 65,04 |
| 8 | 0 | LOWA | 7 | 2209 | 7 | 100 | 1958 | 88,64 | 2021 | 91,49 | 1985 | 89,86 | 1567 | 70,94 | 7 | 100 | 1794 | 81,21 | 1794 | 81,21 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 7 | 2286 | 7 | 100 | 1832 | 80,14 | 2020 | 88,36 | 2020 | 88,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 8 | 3325 | 8 | 100 | 2659 | 79,97 | 2626 | 78,98 | 2399 | 72,15 | 2201 | 66,20 | 1 | 12,5 | 1898 | 57,08 | 2394 | 72,00 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 9 | 3771 | 9 | 100 | 3771 | 100 | 3394 | 90,00 | 972 | 25,78 | 2434 | 64,55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 6 | 2128 | 6 | 100 | 782 | 36,75 | 1776 | 83,46 | 524 | 24,62 | 589 | 27,68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 6 | 2179 | 6 | 100 | 2179 | 100 | 2179 | 100 | 1036 | 47,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1036 | 47,54 |
| 14 | BUKI | BUKI | 7 | 2020 | 7 | 100 | 1168 | 57,82 | 2020 | 100 | 2020 | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **88** | **37450** | **88** | **100** | **30259** | **80,80** | **32467** | **86,69** | **23500** | **62,75** | **16918** | **45,17** | **18** | **20,45** | **14120** | **37,70** | **15924** | **42,52** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Kk Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Rumah Tangga (Pkurt)

**TABEL 82**

**PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | TFU TERDAFTAR | | | | | TFU YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR (IKL) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEKOLAH | | PUSKESMAS | PASAR | TOTAL | SARANA PENDIDIKAN | | | | PUSKESMAS | | PASAR | | TOTAL | |
| | | | | | | | | SD/MI | | SMP/MTs | | | | | | | |
| | | | SD/MI | SMP/MTs | | | | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % | ∑ | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 13 | 6 | 1 | 1 | 21 | 13 | 100 | 6 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 21 | 100 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 15 | 6 | 1 | 1 | 23 | 9 | 60 | 5 | 83,33 | 1 | 100 | 0 | 0 | 15 | 65,22 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 25 | 13 | 81,25 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 9 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 14 | 100 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 12 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 50 | 1 | 33,33 | 1 | 100 | 1 | 100 | 9 | 52,94 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 80 | 5 | 100 | 1 | 100 | 0 | #DIV/0! | 14 | 87,50 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 90,9 | 2 | 66,67 | 1 | 100 | 0 | 0 | 13 | 72,22 |
| 8 | 0 | LOWA | 11 | 5 | 1 | 2 | 19 | 9 | 81,8 | 4 | 80 | 1 | 100 | 1 | 50 | 15 | 78,95 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 13 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 76,9 | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 77,78 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 100 | 3 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 93,33 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 13 | 7 | 1 | 4 | 25 | 11 | 84,6 | 1 | 14,29 | 1 | 100 | 0 | 0 | 13 | 52 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 10 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 100 | 5 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 16 | 88,89 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIM | UJUNG JAMPEA | 9 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | 100 | 4 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 14 | 82,35 |
| 14 | BUKI | BUKI | 14 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 100 | 1 | 20 | 1 | 100 | 1 | 50 | 17 | 77,27 |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **158** | **62** | **14** | **25** | **259** | **136** | **86,1** | **46** | **74,19** | **14** | **100** | **6** | **24** | **202** | **77,99** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

TABEL 83

## PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN
## KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR
## TAHUN 2023

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JASA BOGA | | | RESTORAN | | | TPP TERTENTU | | | DEPOT AIR MINUM | | | RUMAH MAKAN | | | KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN | | | SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN | | | TPP MEMENUHI SYARAT | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | LAIK HSP | | TERDAFTAR | TTP Memenuhi Syarat | |
| | | | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % | | JUMLAH | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *22* | *23* | *24* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 26 | 25 | 96,15 | 27 | 8 | 29,63 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 53 | 33 | 62,26 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100,00 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100 | 11 | 8 | 72,73 | 28 | 23 | 82,14 | 0 | 0 | #DIV/0! | 44 | 36 | 81,82 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 12 | 12 | 100,00 | 7 | 7 | 100 | 6 | 6 | 100 | 25 | 25 | 100,00 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 5 | 100,00 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 6 | 6 | 100 | 4 | 4 | 100,00 | 9 | 5 | 55,56 | 4 | 4 | 100 | 23 | 19 | 82,61 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 55 | 45 | 81,82 | 10 | 9 | 90 | 73 | 54 | 73,97 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 17 | 9 | 52,94 | 25 | 25 | 100,00 | 34 | 34 | 100 | 22 | 22 | 100 | 98 | 90 | 91,84 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 109 | 76 | 69,72 | 0 | 0 | #DIV/0! | 110 | 77 | 70,00 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 13 | 13 | 100 | 20 | 20 | 100,00 |
| 14 | BUKI | BUKI | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! |
| **JUMLAH (KAB/KOTA)** | | | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **0** | **0** | **#DIV/0!** | **75** | **58** | **77,33** | **79** | **57** | **72,15** | **246** | **194** | **78,86** | **55** | **54** | **98,18** | 455 | 363 | **79,78** |

Sumber: Bidang Kesmas Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 84**

**KASUS COVID-19 MENURUT MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS KONFIRMASI | SEMBUH | MENINGGAL | ANGKA KESEMBUHAN (RR) | ANGKA KEMATIAN (CFR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | 0 | PARANGIA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | 0 | LOWA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | BUKI | BUKI | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | | | | | | | |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

NIHIL

Sumber : Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 85**

**KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**
**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**
**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | 0-4 TAHUN | | 5-6 TAHUN | | 7-14 TAHUN | | 15-59 TAHUN | | ≥ 60 TAHUN | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | | | | | | | | | | | | |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | | | | | | | | | | | | |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | 0 | LOWA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TI | UJUNG JAMPEA | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

NIHIL

Sumber : Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 86**

**CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 1 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA 6-11 TAHUN (ANAK) | | | USIA 12-17 TAHUN (REMAJA) | | | USIA 18-59 TAHUN (MASYARAKAT UMUM) | | | USIA ≥ 60 TAHUN (LANSIA) | | | CAKUPAN TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2677 | 0 | 0 | 3182 | 1 | 0,03 | 10064 | 20 | 0,20 | 2722 | 0 | 0 | 18645 | 21 | 0,11 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1127 | 0 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 3761 | 4 | 0,11 | 1145 | 0 | 0 | 7372 | 4 | 0,05 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 700 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 6846 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 590 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 5413 | 0 | 0 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 821 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 4932 | 4 | 0,08 | 835 | 0 | 0 | 7564 | 4 | 0,05 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 500 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4624 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 739 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 4437 | 2 | 0,05 | 752 | 0 | 0 | 6807 | 2 | 0,03 |
| 8 | 0 | LOWA | 736 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 833 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 7666 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1011 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 6069 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 9311 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1300 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 9967 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 772 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 6104 | 0 | 0 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 758 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 6181 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 650 | 0 | 0 | 773 | 2 | 0,26 | 3899 | 1 | 0,03 | 661 | 0 | 0 | 5983 | 3 | 0,05 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 13214 | 0 | 0 | 15708 | 3 | 0,02 | 66929 | 31 | 0,05 | 13436 | 0 | 0 | 109287 | 34 | 0,03 |

Sumber : Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

**TABEL 87**

**CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 2 MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS**

**KABUPATEN/KOTA KEPULAUAN SELAYAR**

**TAHUN 2023**

| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | USIA 6-11 TAHUN (ANAK) | | | USIA 12-17 TAHUN (REMAJA) | | | USIA 18-59 TAHUN (MASYARAKAT UMUM) | | | USIA ≥ 60 TAHUN (LANSIA) | | | CAKUPAN TOTAL | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % | SASARAN | HASIL VAKSINASI | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* |
| 1 | BENTENG | BENTENG | 2677 | 0 | 0 | 3182 | 6 | 0,19 | 10064 | 44 | 0,44 | 2722 | 3 | 0,11 | 18645 | 53 | 0,28 |
| 2 | BONTOHARU | BONTOSUNGGU | 1127 | 0 | 0 | 1339 | 3 | 0,22 | 3761 | 14 | 0,37 | 1145 | 0 | 0 | 7372 | 17 | 0,23 |
| 3 | BONTOMATENE | BONTOMATENE | 700 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 4602 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 6846 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | PARANGIA | 590 | 0 | 0 | 701 | 0 | 0 | 3522 | 1 | 0,03 | 600 | 0 | 0 | 5413 | 1 | 0,02 |
| 5 | BONTOMANAI | BARUGAIA | 821 | 0 | 0 | 976 | 0 | 0 | 4932 | 4 | 0,08 | 835 | 0 | 0 | 7564 | 4 | 0,05 |
| 6 | 0 | POLEBUNGING | 500 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 4624 | 0 | 0 |
| 7 | BONTOSIKUYU | BONTOSIKUYU | 739 | 0 | 0 | 879 | 0 | 0 | 4437 | 2 | 0,05 | 752 | 0 | 0 | 6807 | 2 | 0,03 |
| 8 | 0 | LOWA | 736 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 6804 | 0 | 0 |
| 9 | PASIMASUNGGU | BENTENG JAMPEA | 833 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 4996 | 0 | 0 | 847 | 0 | 0 | 7666 | 0 | 0 |
| 10 | PASIMARANNU | PASIMARANNU | 1011 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 6069 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 0 | 9311 | 0 | 0 |
| 11 | TAKABONERATE | PASITALLU | 1300 | 0 | 0 | 1545 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 9967 | 0 | 0 |
| 12 | PASILAMBENA | PASILAMBENA | 772 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 3630 | 1 | 0,03 | 785 | 0 | 0 | 6104 | 1 | 0,02 |
| 13 | PASIMASUNGGU TIMUR | UJUNG JAMPEA | 758 | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 6181 | 0 | 0 |
| 14 | BUKI | BUKI | 650 | 0 | 0 | 773 | 2 | 0,26 | 3899 | 3 | 0,08 | 661 | 0 | 0 | 5983 | 5 | 0,08 |
| **TOTAL KAB/KOTA** | | | 13214 | 0 | 0 | 15708 | 11 | 0,07 | 66929 | 69 | 0,10 | 13436 | 3 | 0,02 | 109287 | 83 | 0,08 |

Sumber : Bidang P2P Dinkes Kab. Kepulauan Selayar, 2024

# TENTANG KAMI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu unsur pelaksana teknik Pekerjaan umum yang bertugas membantu Bupati dalam menye lenggarakan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan Abd. Kadir Kasim Nomor 7 Bontoharu, 92812 Sulawesi – Selatan Tlp. (0414) 21080 Fax. (0414) 21083.

# STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas:

a. Seksi Irigasi dan Rawa;

b. Seksi Penyediaan Air Baku;

c. Seksi Sungai dan Pantai.

4. Bidang Bina Marga, terdiri atas:

a Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten;

b Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa;

c Seksi Pemeliharaan Jalan.

5 Bidang Cipta Karya, terdiri atas:

a Seksi Bangunan Gedung;

b Seksi Air Bersih;

c Seksi Drainase dan Air Limbah.

6. Bidang Bintek dan Peralatan, terdiri atas:

a. Seksi Peralatan;

b. Seksi Pengujian Mutu;

c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

7. Bidang Penataan Ruang;

a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

b. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan

c. Seksi Pengendalian Tata Ruang;

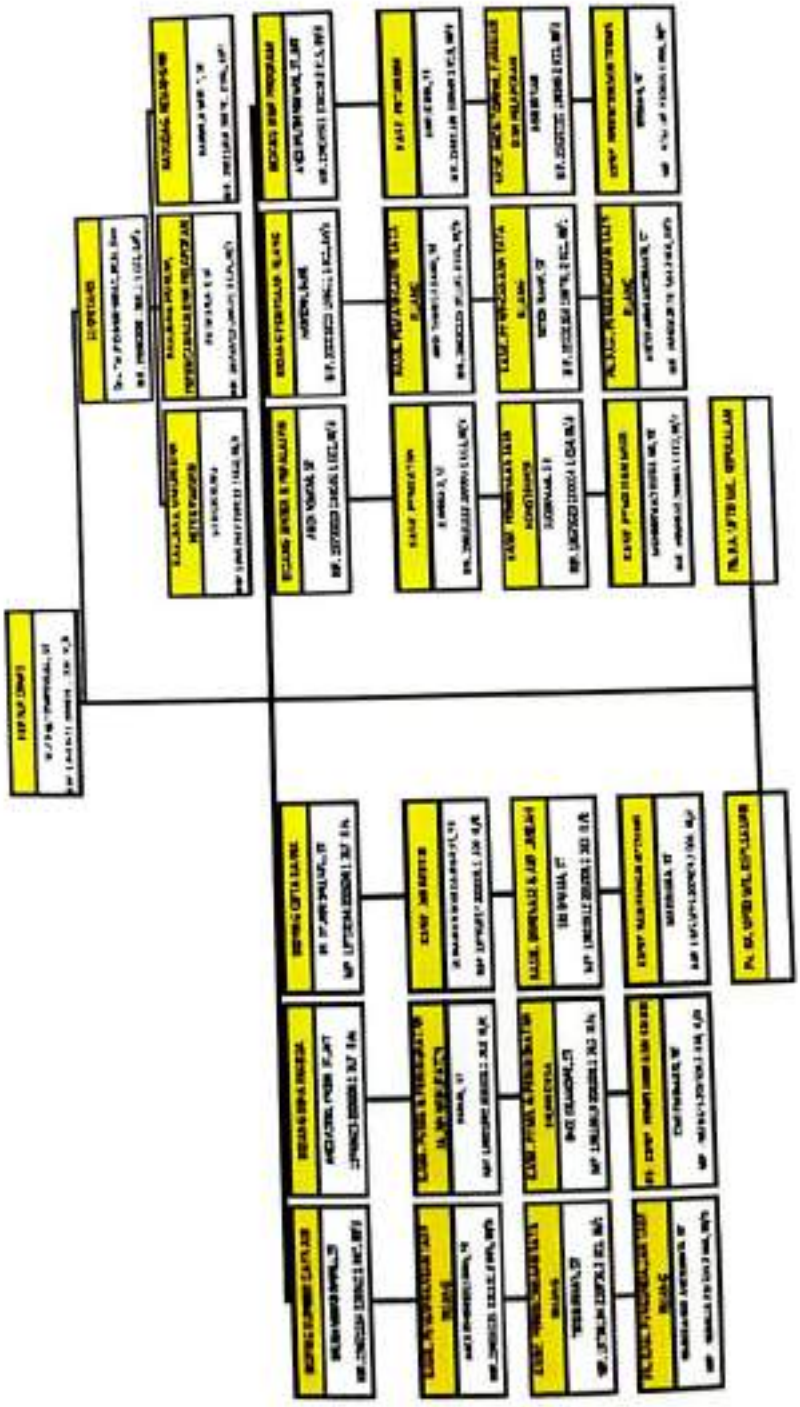
8. Bidang Bina Program, terdiri atas:

a. Seksi Program;

b. Seksi Perencanaan Teknis; dan

c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

# VISI MISI



**Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka dirumuskan visi dan misi sebagai berikut:**

**Visi:**

***TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN KETATARUANGAN YANG HANDAL, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN MENUJU PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KAB. KEPULAUAN SELAYAR***

**Misi:**

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan;
b. Menyediakaninfrastruktur air baku, irigasi, sungai dan pantai yang memadai dan berwawasan lingkungan;
c. Menyediakan infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
d. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum yang memenuhi standar baku dan kesehatan manusia;
e. Meningkatkan sarana dan prasarana sanitasi yang terpadu dan menggunakan metode yang ramah lingkungan serta sesuai standar teknis;
f. Menyediakan Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan;

g. Meningkatkan fungsi peralatan workshop dan laboratorium dalam mendukung kehandalan infrastruktur pekerjaan umum;

h. Meningkatkan kompetensi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan pekerjaan konstruksi yang efektif dan efisien;

i. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;

j. Meningkatkan kualitas cakupan pelayanan dasar infrastruktur pekerjaan umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

k. Mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan infrastruktur antara wilayah kecamatan daratan dan wilayah kecamatan kepulauan;

l. Penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat;

m. Semua pembangunan harus berbasis penataan runag.

# TUPOKSI

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

i. menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

j. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas adalah unsur pelaksana teknis di bidang administrasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan semua bidang

di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan;

h. melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

i. melaksanakan fasilitas penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan; dan

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. **Sub bagian Umum dan Kepegawaian:**
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7) melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
8) melaksanakan pembinaan sumber daya manusia aparatur;
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
10) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan:**

Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hukum.

Kepala sub bagian hukum dan perencanaan mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7) melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8) melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan;
9) melaksanakan kegiatan sosialisasi di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

12) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Sub Bagian Keuangan:**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Kepala Sub bagian keuangan mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan keuangan;

7) menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran;

8) menyiapkan laporan pertanggungjawaban dan neraca keuangan;

9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

10) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. **Bidang Sumber Daya Air**

Kepala bidang sumber daya air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Sumber Daya Air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Air;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Sumber Daya Air;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sumber Daya Air;
d. pelaksanaan administrasi di bidang Sumber Daya Air dan
e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Bidang tugasnya.

Uraian tugas Bidang Sumber Daya Air, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melaksanakan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan dan kelembagaan dalam pengelolaan Sumber daya Air;

g. melaksanakan manajemen pembangunan prasarana Sumber daya Air;

h. melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air;

i. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan /operasional /pemeliharaan prasarana pengelolaan sungai dan pantai;

j. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan /operasional /pemeliharaan prasarana pengelolaan air baku;

k. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan /operasional/pemeliharaan prasarana pengelolaan irigasi dan rawa;

l. melakukan penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air;

m. melakukan penyelenggaraan pengendalian daya rusak air;

n. melakukan penyelenggaraan Konferensi Sumber Daya Air;

o. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Irigasi dan Rawa**

Seksi Irigasi dan Rawa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis irigasi dan rawa.

Kepala seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Irigasi dan Rawa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) melakukan pengembangan dan rehabilitasi prasarana irigasi dan rawa;
7) melakukan operasional dan pemeliharaan prasarana irigasi dan rawa;
8) melakukan pembinaan perkumpulan petani pemakai air;

9) menyelenggarakan pengendalian daya rusak air pada jaringan irigasi;

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Irigasi dan Rawa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Penyediaan Air Baku**

Seksi Penyediaan Air Baku dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas di Bidang Sumber Daya Air dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyediaan air baku.

Kepala seksi Penyediaan Air Baku mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Penyediaan Air Baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyediaan Air Baku untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) mengidentifikasi dan menginventarisasi ketersediaan air baku;

7) menyusun rencana pengelolaan air baku;

8) melakukan pembangunan prasarana pengelolaan air baku;

9) menyelenggarakan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamat Air;

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyediaan Air Baku dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Sungai dan Pantai**

Seksi sungai dan pantai adalah sub unit pada bidang sumber daya air, di pimpin oleh seorang kepala seksi sungai dan pantai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sumber daya air.

Kepala Seksi sungai dan pantai mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Sungai dan Pantai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Sungai dan Pantai untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan sungai dan pantai;

7) melakukan pembangunan prasarana pengelolaan sungai dan perlindungan pantai;

8) melakukan operasional dan pemeliharaan prasarana sungai dan pantai;

9) menyelenggarakan pengendalian daya rusak air pada sungai dan pantai;

10) melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian aliran sungai dan wilayah pantai;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Sungai dan Pantai dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

12) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Bidang Bina Marga**

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bina marga Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga;

d. pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Marga; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Marga, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;

g. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan kelas jalan menurut status dan fungsinya;

h. melaksanakan pengaturan pemanfaatan ruang jalan yang terdiri dari Daerah Pengawasan Jalan, Daerah Milik Jalan dan daerah Manfaat Jalan;

i. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

j. melaksanakan dokumentasi/leger jalan dan pengembangan sistem jaringan jalan;

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Marga dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. melaksakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten**

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten.

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) melaksanakan penyusunan rencana penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;
7) melaksanakan penyusunan rancangan penetapan kelas jalan menurut fungsinya;
8) melaksanakan penyusunan rancangan pengaturan pemanfaatan daerah jalan, baik Ruang Pengawasan Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Manfaat Jalan;
9) melaksanakan perencanaan teknis dan pengawasan pada pembangunan peningkatan jalan;

10) melaksanakan pengembangan sistem jaringan jalan dan dokumentasi/leger jalan;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kabupaten dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

12) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa**

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan desa.

Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) melakukan penyusunan rencana penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa;

7) melakukan penyusunan rancangan penetapan kelas jalan menurut fungsinya;

8) melakukan penyusunan rancangan pengaturan pemanfaatan daerah jalan, baik daerah Pengawasan Jalan, Daerah Milik Jalan dan Daerah Manfaat Jalan;

9) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pada pembangunan peningkatan jalan;

10) melakukan pengembangan sistem jaringan jalan dan dokumentasi/leger jalan;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

12) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Pemeliharaan Jalan**

Seksi Pemeliharaan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan jalan.

Kepala seksi pemeliharaan jalan mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemeliharaan Jalan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) melakukan penyusunan perencanaan umum (program) pemeliharaan jalan dan jembatan;

7) melakukan perencanaan teknis pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan jalan dan jembatan;

8) melakukan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;

9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

10) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan cipta karya
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya;

d. pelaksanaan administrasi di Bidang Cipta Karya; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Cipta Karya, meliputi:

a. menyusun rencana kegaitan Bidang Cipta Karya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Cipta Karya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis bangunan gedung;

g. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis sarana dan prasarana air bersih;

h. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis drainase dan air limbah;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Cipta Karya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Bangunan Gedung**

Seksi Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya

dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bangunan gedung.

Kepala Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Bangunan Gedung sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Bangunan Gedung untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) menyusun rencana dan program kerja kegiatan pengelolaan bangunan gedung;
7) menyiapkan bahan rumusan rencana program jangka panjang dan rencana program jangka menengah Seksi Bangunan Gedung;
8) melakukan peraturan dan pembinaan bangunan gedung;
9) melakukan pengelolaan dan pembangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan publik;
10) melakukan perencanaan dan pengawasan teknis pelaksanaan bangunan gedung;
11) melakukan evaluasi hasil kerja perencanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

12) melakukan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

13) monitoring dan pengendalian pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan gedung publik;

14) melakukan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah;

15) melakukan pendaftaran, pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan dan penaksiran gedung pemerintah dan bangunan publik;

16) menyusun kebijakan penetapan teknis konstruksi bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

17) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Bangunan Gedung dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

**B. Seksi Air Bersih**

Seksi Air Bersih dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis air bersih.

Kepala Seksi Air Bersih mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Air Bersih sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Air Bersih untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) melakukan pengaturan dan pembinaan pemanfaatan air bersih;

7) melakukan pembinaan dan konservasi air bersih;

8) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana air bersih;

9) melakukan pembinaan pengelolaan air bersih perkotaan dan air bersih di pedesaan;

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Air Bersih dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Drainase dan Air Limbah**

Seksi Drainase dan Air Limbah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis drainase dan air limbah.

Kepala Seksi Drainase dan Air Limbah mempunyai tugas:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Drainase dan Air Limbah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Drainase dan Air Limbah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) melakukan pengaturan dan pemanfaatan drainase dan air limbah;

7) melakukan pembinaan dan konservasi drainase dan air limbah;

8) melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana drainase dan air limbah;

9) melakukan pembinaan pengelolaan drainase dan air limbah;

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Drainase dan Air Limbah dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

11) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Bidang Bintek dan Peralatan**

Bidang Bintek dan Peralatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bintek dan Peralatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Bintek dan Peralatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Bintek dan Peralatan;

b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bintek dan Peralatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bintek dan Peralatan;

d. pelaksanaan administrasi di Bidang Bintek dan Peralatan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bintek dan Peralatan, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bintek dan Peralatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bintek dan Peralatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan program pengadaan dan pemeliharaan peralatan;

g. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengujian mutu pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi;

h. menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pembinaan jasa konstruksi; dan

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bintek dan Peralatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Peralatan**

Seksi Peralatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bintek dan Peralatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peralatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Peralatan meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Peralatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Peralatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) menyusun dan membuat daftar inventarisasi peralatan dan membuat rencana operasi peralatan;
7) menyelenggarakan administrasi penyerahan dan pengambilan peralatan dan melakukan pengawasan operator;
8) membuat pelaporan hasil pemeriksaan peralatan;

9) mengoordinasikan dengan masing-masing bidang terkait di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

10) melakukan pemeriksaan peralatan secara periodik;

11) menyelenggarakan pengadaan dan perbaikan peralatan;

12) menyediakan suku cadang peralatan;

13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Peralatan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

14) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Pengujian Mutu**

Seksi Pengujian Mutu dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bintek dan Peralatan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengujian mutu.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengujian Mutu, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengujian Mutu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengujian Mutu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) menyusun perencanaan pengujian bahan bangunan dan konstruksi;

7) melakukan pendataan ketersediaan bahan bangunan;

8) merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis *quality control* bagi pengguna dan penyedia jasa konstruksi;

9) melakukan pengendalian mutu pekerjaan jasa konstruksi di bidang Bina Marga, dan Cipta Karya;

10) melakukan administrasi dan sewa menyewa alat laboratorium;

11) melakukan operasional dan pemeliharaan alat laboratorium;

12) menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan laboratorium bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

13) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan pengujian laboratorium bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengujian Mutu dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

15) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi**

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bintek dan Peralatan dalam melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan jasa konstruksi.

Uraian tugas Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Jasa Konstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Jasa Konstruksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
g. melakukan pengaturan dan pembinaan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan konstruksi;
h. melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi;
i. melakukan pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
j. merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pengguna dan penyedia barang/jasa;
k. melakukan pelaporan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi;
l. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Jasa konstruksi dan memberi saran pertimbangan

kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**7. Bidang Penataan Ruang**

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penataan ruang.

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang Penataan Ruang;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penataan Ruang;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penataan Ruang;
d. pelaksanaan administrasi di bidang Penataan Ruang; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Penataan Ruang meliputi:

a. menyusun rencana kegaitan Bidang Penataan Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penataan Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyusun rencana tata ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang;

g. melaksanakan pengaturan Tata Ruang mencakup ruang daratan, ruang lautan, ruang udara yang menjadi kewenangan ruang wilayah yuridiksi;

h. melakasanakan peruntukan, penatagunaan tanah dan pasir;

i. menyusun rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;

j. memantau dan pengawasan pemanfaatan ruang di daratan dan di lautan;

k. melakukan pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam penataan ruang;

l. melakukan pemanfaatan Standar Pelayanan Minimal di bidang penataan ruang;

m. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penataan Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Perencanaan Tata Ruang**

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan tata ruang.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang, meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyiapkan pedoman/standar teknis penyusunan tata ruang;

g. menyiapkan data dan informasi rencana tata ruang;

h. menyusun rencana strategis pembangunan di bidang penataan ruang;

i. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Teknis Ruang kawasan perkotaan, pedesaan, fungsional dan tertentu;

j. menyusun rencana penataan dan alokasi elemen penunjang pembentuk ruang;

k. melakukan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan tata ruang;

l. memberikan saran/masukan dalam rangka pengesahan Site Plan;

m. menyebarluaskan dan sosialisasi produk rencana tata ruang;

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan perumusan rencana tata ruang;

o. melakukan pengawasan dan evaluasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**B. Seksi Pemanfaatan Ruang**

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan tata ruang.

Uraian tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pemanfaatan Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemanfaatan Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6) menyusun petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan ruang dan tata guna lahan;

7) menyiapkan pedoman/standar teknis pemanfaatan ruang dan tata guna lahan;

8) memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia sesuai daya dukung lingkungan;

9) menyusun neraca penggunaan lahan;

10) melakukan studi kelayakan dan rencana tindak terhadap kawasan yang akan dikembangkan;

11) melakukan pengembangan kawasan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Rencana Teknis Ruang, Rencana Tata Bangunan Lingkungan, kawasan fungsional dan tertentu ke dalam rencana pembangunan lima tahun daerah dan program tahunan beserta pemanfaatannya;

12) melakukan pembinaan teknis dalam pengesahan site plan;

13) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pelibatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang;

14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

15) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**C. Seksi Pengendalian Tata Ruang**

Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian tata ruang.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengendalian Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengendalian Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) menyiapkan pedoman/standar teknis pengendalian tata ruang;
7) menyusun petunjuk teknis pembinaan dan bimbingan teknis pengendalian tata ruang;
8) membina teknis dan pengawasan perizinan, peruntukan penggunaan lahan dan site plan;
9) melakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pemanfaatan tata ruang secara terpadu dan konsisten;
10) menyiapkan pedoman/standar teknis pengendalian pemanfaatan tata ruang;
11) melakukan sosialisasi pengendalian pemanfaatan tata ruang;
12) memberikan saran/masukan dalam rangka penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan tata ruang;
13) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan tata ruang;

14) melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pelibatan masyarakat dalam rangka pengendalian pemanfaatan tata ruang;

15) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengendalian Tata Ruang dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**8. Bidang Bina Program**

Bidang Bina Program dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bina program.

Kepala Bidang Bina Program mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis Bidang Bina Program;
b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Bina Program;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Program;
d. pelaksanaan administrasi di Bidang Bina Program; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Bina Program meliputi:

a. menyusun rencana kegaitan Bidang Bina Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Bina Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan penghimpunan, penyusunan, pengintegrasian data dan informasi dalam pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program dari unit kerja terkait dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

g. melakukan pembuatan dan perumusan rencana kegiatan dan program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana program dan kegiatan tahunan dan lima tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

i. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Bina Program dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

j. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**A. Seksi Program**

Seksi Program dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Program dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan program.

Uraian tugas Kepala Seksi Program, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program dinas;
7) merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
8) melakukan analisis, evaluasi dan pengendalian dalam melaksanakan program dinas;
9) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Program dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
10) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Seksi Perencanaan Teknis**

Seksi Perencanaan Teknis dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Program dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan teknis.

Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perencanaan Teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi serta menyusun program dan anggaran
7) menyusun dan menyiapkan manual prosedur dan standar pedoman untuk pelaksanaan program;
8) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perencanaan Teknis dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
9) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Bina Program dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi:

1) menyusun rencana kegiatan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5) mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6) melakukan monitoring dan pengumpulan data terhadap pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan;
7) menghimpun hasil monitoring dan pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan;
8) menyusun rencana kerja di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan;
9) menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian, monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di bidang Bina Program;
10) melakukan koordinasi dengan unit kerja dinas dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11) menyusun pelaporan dan dokumen anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

12) menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtis
realisasi kinerja dinas;

13) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksana
kegiatan bidang tugasnya;

14) mengoordinasikan rencana dan program sektoral tahunan
masing-masing Bidang;

15) menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Se
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan memb
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bah
perumusan kebijakan; dan

16) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahk
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

# PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016 –2021 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran
   b. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
   c. Penunjang Operasional UPTD Kep. Wil. I
   d. Penunjang Operasional UPTD Kep. Wil. II
   e. Pelaksanaan Hari Bakti PU
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
d. Pengadaan Meubelair
e. Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan dan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Penyusunan Laporan keuangan
b. Penyusunan Laporan Aset
c. Penyusunan Tim Tindak Lanjut LHP OPD
d. Penyusunan LAKIP

6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten
b. Pembangunan Jembatan

7. Program Rehabilitasi/pemeliharan Jalan dan Jembatan
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
   b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
   c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan

8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

9. Program Pemrograman dan Penganggaran, Perencanaan Teknis dan Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum.
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Perencanaan Dan Penganggaran
   b. Penyusunan Database Infrastruktur Pekerjaan Umum
   c. Pengumpulan Data Teknis Dan Informasi Sebagai Acuan Perencanaaan Teknis Dan Penelitian.
   d. Perencanaan Teknis
   e. Penilaian Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum

10. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya.
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. Pembangunan Jaringan Irigasi
   b. Peningkatan Jaringan Irigasi
   c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
   d. O & P Jaringan Irigasi

11. Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya.
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
    b. Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya

12. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku
    b. Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa

13. Program Pengendalian Banjir
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai
    b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Pengaman Pantai

14. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Pembangunan Talud Penahan Tanah
    b. Pembangunan Pengaman Tebing Sungai

15. Program Pembangunan Saluran Drainase Dan Air Limbah
Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah
    b. Pembangunan Saluran Drainase

16. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
    Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih
    b. Pembangunan Distribusi Air Minum
17. Program Pembangunan Sarana Prasarana Publik
    Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pemerintah
    b. Pembangunan Sarana Prasarana Masyarakat Umum
18. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Konstruksi
    Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Survey Harga Bahan Dan Material Konstruksi Sesuai Dengan Harga Setiap Lokasi
    b. Peningkatan Pelayanan Uji Laboratorium
    c. Peningkatan Pelayanan Peralatan Penunjang Pekerjaan Konstruksi
    d. Pembinaan Jasa Konstruksi
19. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang
    Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
    a. Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang
    b. Sosialisasi IMB Dan Sempadan
    c. Pengawasan Dan Penertiban Pemanfaatan Ruang

20. Program Pemanfaatan Ruang

Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Kebijakan Pemanfaatan Ruang

21. Program Perencanaan Tata Ruang

Program diatas memiliki kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang

# PROFIL KESEKRETARIATAN

Sub Bagian Kesekretariatan secara Umum tidak melakukan Kegiatan/Program Fisik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa Pengelolaan Administrasi Umum, Administrasi Kepegawaian, perlengkapan, penyusunan Program dan Keuangan, Hubungan masyarakat dan Protokol Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berikut Struktur organisasi sekretariat:

Sekretaris

***Drs. Taufiq Nurharas, M. Ec.Dev***

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

***Sitti Ciknong***

Kepala Sub Bagian Hukum dan Perencanaan

***Patmawati, ST***

Kepala Sub Bagian Keuangan

***Karmila Santy, SE***

Adapun Kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Penginputan Data Pegawai**
   a. Pegawai ASN 56 Orang
   b. Pegawai Non ASN 104 Orang
2. **Menginput Data Kenaikan Pangkat / DUK**
3. **Menginput Kenaikan Gaji Berkala**

**4. Menginput Data Asset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Sub Bagian Hukum dan Perencanaan melaksanakan tugas sebagai Pencatutan/Penginputan Program/Kegiatan dan pelaporan. Sedangkan Kegiatan Sub Bagian Keuangan adalah mengelola keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan dan menginput data Kemajuan Penggunaan Keuangan tersebut dalam bentuk Realisasi Fisik Keuangan (RFK).

**PROFIL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

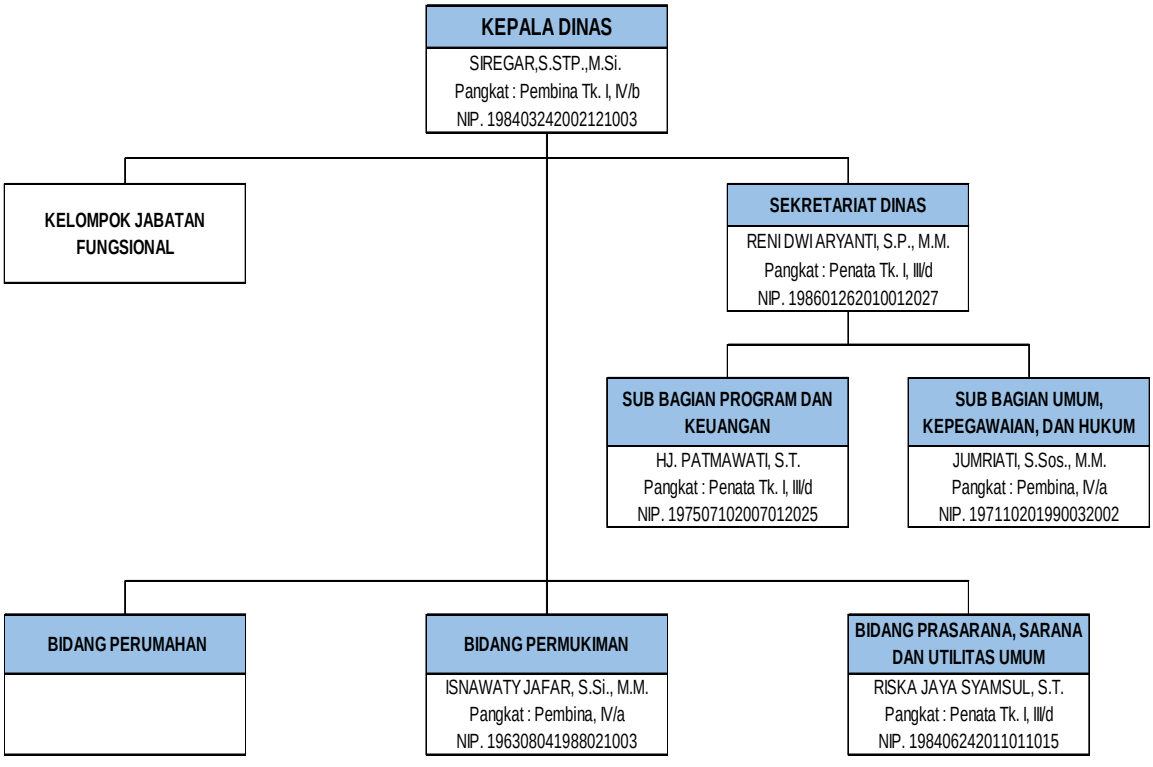
DPKP sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi :

- Sub Urusan Perumahan, kewenangan kabupaten/kota mencakup (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- Sub Urusan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
- Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), kewenangan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan PSU perumahan.
- Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kewenangan kabupaten/kota mencakup sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terletak pada titik koordinat -5.90973,121.36036, yang beralamat di Jl. Kemiri No. 27 Telp. (0414) 21313 Benteng Kepulauan Selayar, Email : diperkimdpkp@gmail.com. Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, meliputi :
    1. Subbagian Program dan Keuangan
    2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Perumahan
d. Bidang Permukiman
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
f. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan, Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kawasan permukiman,
b. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU),
c. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang verifikasi dan sertifikasi,
d. Pelaksanaan administrasi dinas, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi.

**PROFIL SATUAN POLISI PAMONG**
**PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

## A. SEJARAH SINGKAT SATPOL PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



## B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Secara Geofrafis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 6,12□Sdan120,47□E yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 4 Selayar.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulaun Selayar sebagai instansi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diberikan kepada Kabupaten. Perangkat Daerah ini berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pmong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulaun Selayar.

OPD ini dipimpin Oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh satu Sekretariat dan Tiga Bidang teknis yakni Bidang Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dan Bidang Pemadam Kebakaran. Adapun rencana strategis perangkat daerah ini diarahkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang tertib

dan tentram, sebagaimana yang tercantum dalam visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

***'TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB MELALUIOPTIMALISASI PENEGAKAN PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN BUPATI, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA BAHAYA BENCANA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN'.***

## C. SUMBER DAYA APARATUR

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Sementara, jumlah Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini terbatas. Kualitas SDM aparatur yang kurang menunjang operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Jumlah Sumber Daya Aparatur saat ini (Kondisi Juli 2025) :

1. PNS : 50 Orang
2. PPPK : 38 Orang
3. Non ASN : 349 Orang

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

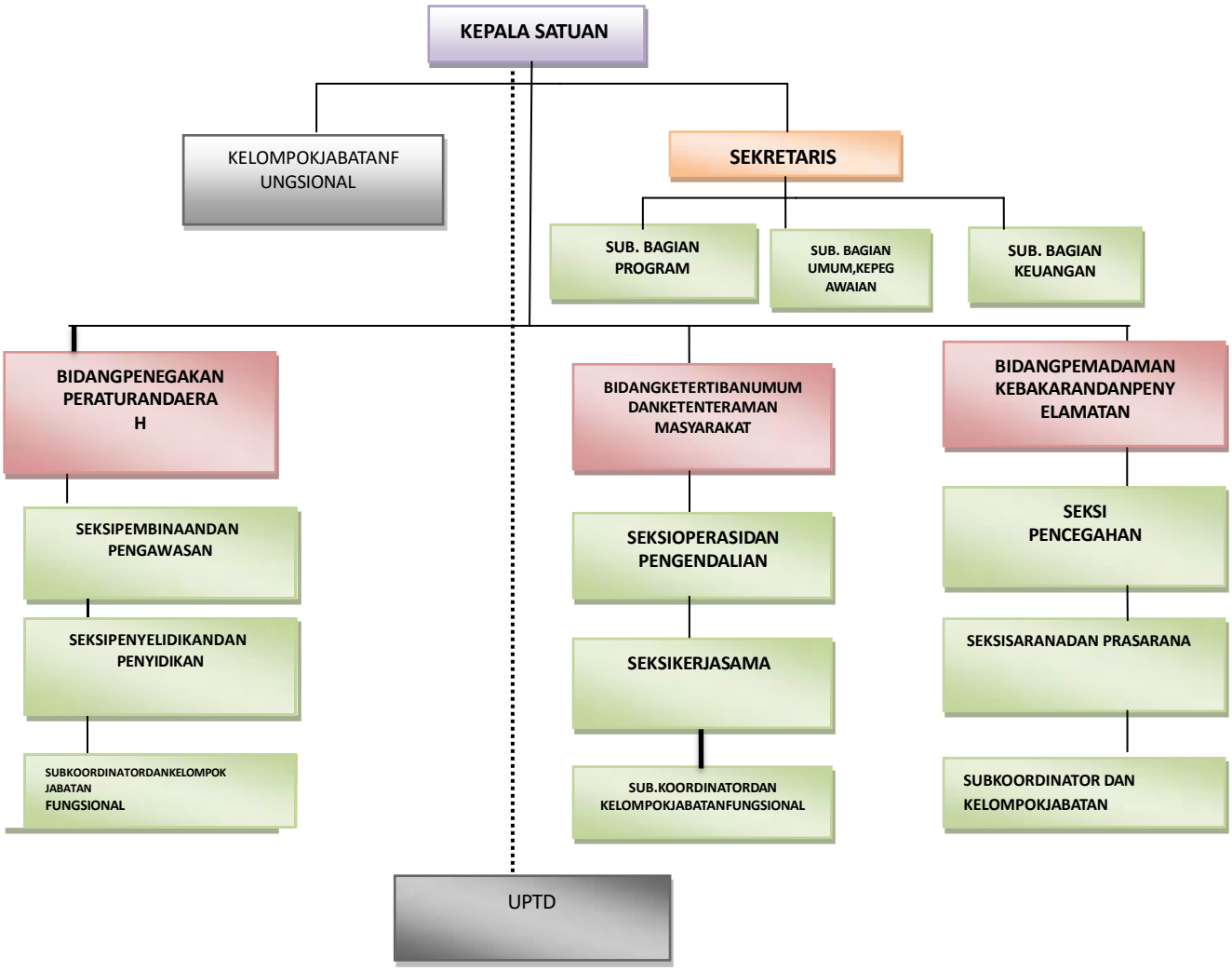
Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat sebagaimana amanat undang- undang, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

**a. StrukturOrganisasi**

Secara bagan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :



**PROFIL DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**




**Dinas Sosial Kabupten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan Sosial No. 1 Parrappa Kelurahn Bontobangun Kecamatan Bontoharu website resmi adalah https://dinsos.kepulauanselayarkab.go.id.**

## A. Gambaran Umum

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab menangani masalah sosial. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dijalankan, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung oleh Kementerian Sosial melalui program dan kegiatan. Sasaran startegis kementerian sosial antara lain : 1) meninkatkan taraf kesejahteraab sosial penduduk miskin dan rentan. 2) meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelengara kesejateraan sosial yang professional. 3) mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan public.

Selain itu, dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar bekerjasama dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah terkait penanganan urusan sosial. Prioritas Pembangunan Kesejateraan Sosial dalam renstra tahun 2021 – 2026 diantaranya adalah peningkatan dan pelayanan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS).

## B. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Visi Dinas Sosial

   Visi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah “Terwujudnya Pelayan Prima dan Ketahanan Sosial menuju Kemandirian Masyarakat”.

2. Misi Dinas Sosial

Misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

a. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
b. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya dan pengangguran
c. Peningkatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan
d. Pemberdayaan dan Penggalangan Potensi sumber daya untuk kesejahteraan sosial serta peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
e. Peningkatan kualutas pelayanan, kualitas hidup dan kesejahteraan penyandam masalah sosial.

## C. Motto Dinas Sosial

Motto Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah *Piisseki* (Kenali), *Ampiki* (Dekati), *Kasusaangi* (Layani) dan *Katutui* (Lindungi)

## D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

1. Tugas Dinas Sosial

Dinas Sosial bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, dan penanggulangan masalah sosial di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar

2. Fungsi Dinas Sosial

   a. Perencanaan dan Pengelolaan Program Sosial yaitu Menyusun rencana, mengelola anggaran, dan melaksanakan program-program sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
   b. Pelayanan Sosial yaitu Memberikan bantuan sosial dan pelayanan sosial untuk warga yang membutuhkan, seperti bantuan untuk fakir miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak terlantar.
   c. Pemberdayaan Masyarakat yaitu Mengembangkan program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya di kalangan kelompok rentan.
   d. Penanggulangan Kemiskinan yaitu Mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

E. **Struktur Organisasi**

1. Kepala Dinas Sosial adalah Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan semua kegiatan di Dinas Sosial.
2. Sekretariat adalah Menangani urusan administrasi dan keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yaitu Mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan Menangani program-program yang fokus pada pengurangan kemiskinan. .

4. Bidang Rehabilitasi Sosial adalah Menangani program-program yang fokus pada Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
5. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial adalah Mengelola perlindungan dan Janiman Sosial bagi kelompok rentan, Penanganan Korban Bencana

# PROFIL

# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

# PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK

# DAN KELUARGA BERENCANA

# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2023

# PROFIL

# DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Tipe A dan terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Email : bppkbkep.selayar@gmail.com , Tlp. (0414) 21195, dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyaraakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.


KE 4:8 SELAYAR
4:8

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

**Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar**

**1.Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk pelaksanaan tugasnya tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Selayar melalui Sekretaris Daerah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja yang terukur.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

**2. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Program

2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

3. Sub. Bagian Keuangan.

III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

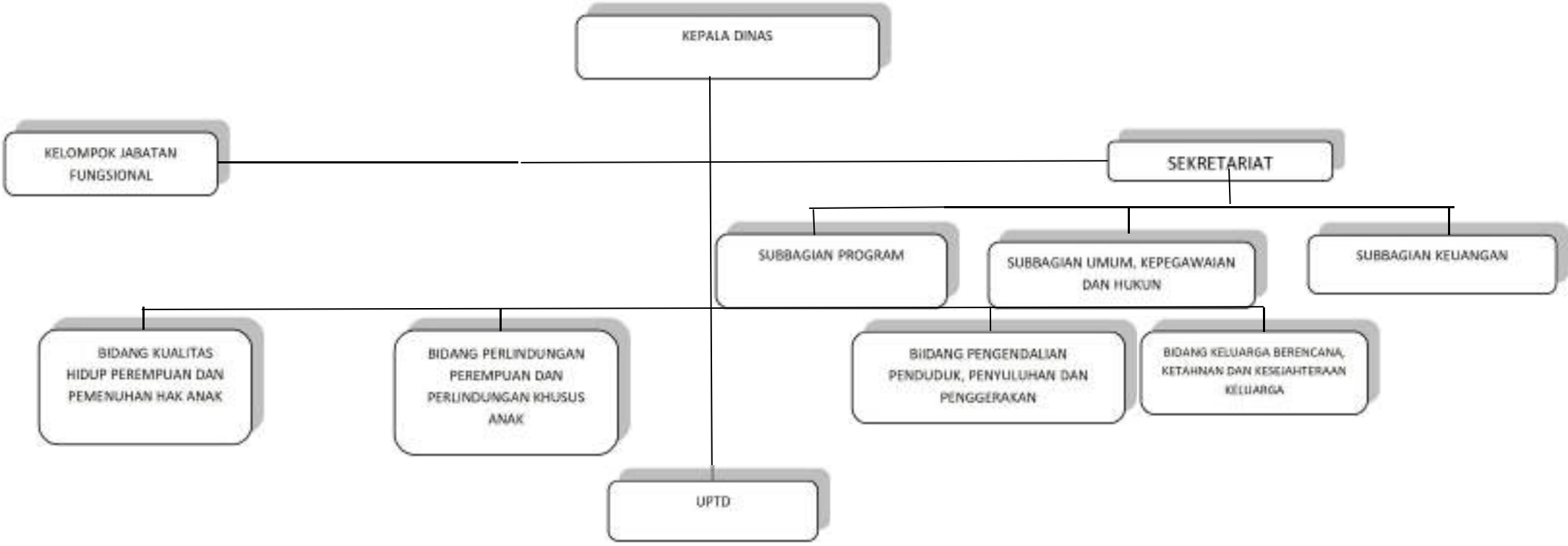
VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

VII. UPTD

VIII. JabatanFungsional.

Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**4. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana didukung oleh 38 orang Pegawai Negeri Sipil dari berbagai latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat diklasifikasikan ke dalam 5 golongan, meliputi : SLTA, D-3, S-1 dan S-2 dan S-3.

**a. Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan Ruang**

| No | Golongan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2. | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 |
| 3 | Pembina (IV/a) | 3 |
| 3. | Penata Tingkat I (III/d) | 12 |
| 4. | Penata (III/c) | 0 |
| 5. | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 2 |
| 6. | Penata Muda (III/a) | 6 |
| 7. | Pengatur Tingkat I (II/d) | 4 |
| 8. | Pengatur (II/c) | 0 |
| 9. | Pengatur (II/b) | 0 |
| 10. | Pengatur Muda(II/a) | 0 |
| JUMLAH | | **30** |

**b. Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | S3 | 1 |
| 2. | S2 | 2 |
| 3. | S1 | 19 |
| 4. | D III | 0 |
| 5. | SMA | 8 |
| JUMLAH | | **30** |

**c. Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Golongan | Jenis kelamin | |
|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | perempuan |
| 1. | IV | 1 | 5 |
| 2. | III | 5 | 15 |
| 3. | II | 2 | 2 |
| | JUMLAH | **8** | **22** |

Penyuluh KB sebagai Pegawai Pusat Sebanyak 17 orang terdiri atas S1 4 orang, D3 1 orang, SMA 12 orang. Penyuluh PTT sebanyak 30 orang terdiri atas S1 5 orang, D3 1 orang dan SMA 24 orang. Staf PTT sebanyak 19 orang terdiri atas S1 12 orang, D3 1 orang dan SMA 6 orang.

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu

4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

**Visi dan Misi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan tahun ketiga dalam RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJPD dan RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, substansi RPJM Nasional 2015-2019, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah :

**“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”**

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritim sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh

karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar. Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah local dan penguatan lembaga adat; pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, DP3AP2KB mendukung pencapaian misi ke-1, misi ke-2 dan misi ke-3. **Misi ke-1** : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Tujuan 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah, sasaran 1 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan, yaitu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

**Misi ke-2** : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, tujuan 2 : Meningkatkan Kapasitas dan Pasilitas Perdesaan, sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan, yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). **Misi ke-3** : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, tujuan 3 : Meningkatnya Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia,

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemenuhan Dasar Masyarakat, yaitu Program Pembinaan Keluaraga Berencana (KB)

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka ditetapkan beberapa tujuan antara lain :

a. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera

b. Mewujudkan ketahanan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana

c. Mewujudkan kesetaraan gender dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

. **Jumlah Aparatur Sipil Negara, Data Jabatan Struktural, Data Jabatan Fungsional, Jumlah Tenaga Kontrak dan Jabatan Struktural yang belum Terisi.**

## 1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

**Tabel. Jumlah Aparatur Sipil Negara**

| Jabatan | Struktural | Fungsional | Ket. |
|---|---|---|---|
| Eselon II/a | 0 orang | | |
| Eselon II/B | 1 orang | | |
| Eselon III/A | 1 orang | | |
| Eselon III/B | 4 orang | | |
| Eselon IV/A | 6 orang | | |
| Eselon IV/B | 1 orang | | |
| Fungsional | | 5 orang | |
| | | 17 Orang Pegawai Pusat | Penyuluh Keluarga Berencana (KB) |
| | | 8 Orang P3K Pegawai Pusat | Penyuluh Keluarga Berencana (KB) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pelaksana | 12 orang | | |
| **Jumlah** | **25** | **30** | |

.

## 2. Data Jabatan Struktural

**Tabel. Jabatan Struktural**

| No. | Nama | Jabatan | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | Drs. ANDI MASSAILE<br>Nip. 19650806 199402 1 003 | Kepala Dinas DP3AP2KB | |
| 2 | Hj. ANDI REZKY ANGRIANY, S.Pd.,M.M.<br>Nip. 19750426 200003 2 009 | Sekertaris Dinas DP3AP2KB | |
| 3 | MARLINA ,SE<br>Nip. 19670817 200003 2 006 | Kepala Bidang Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan | |
| 4 | UTAMI REZKI, SH<br>Nip. 19720118 2000604 2 016 | Kabid. KB, Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga | |
| 5 | ANDI IRMAYANI, SP<br>Nip. 19851028 200803 2 002 | Kabid. Perlindungan Perempuan & Perlindungan Khusus Anak | |
| 6 | NURFACHRIANSYAH ILYAS, SKM.,M.Kes<br>Nip. 19840602 201101 1 014 | Kabid. Kualitas Hidup Perempuan & Pemenuhan Hak Anak | |
| 7 | Dra. SITTI NURSIAH<br>Nip. 19690812 200701 2 036 | Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | NUR MAYASARI, S.Pt<br>Nip. 19801128 201001 2 006 | Kepala Sub. Bagian Program | |
| 9 | ANDI HAMDANA, SE<br>Nip. 19690403 199303 2 010 | Kepala Sub. Bagian Keuangan | |
| 10 | ILHAM, S.Pd.I<br>Nip. 19661104 198603 1 006 | Kepala UPT Wilayah III | |
| 11 | M. TAHIR, S.IP<br>Nip. 19740705 200701 1 050 | Kepala UPT Wilayah II | |
| 12 | Hj. NURHADI MANDAI, S.Pd<br>Nip. 19660504 198603 2 015 | Kepala UPT Wilayah IV | |
| 13 | YUSRIADI, SE<br>Nip. 19801106 201001 1 003 | Kepala UPT Wilayah VII | |
| 14 | KAMIRUDDIN<br>Nip. 19770815 200906 1 001 | Pengelola Kepegawaian | |
| 15 | GAZALI<br>Nip. 19730608 200906 1 001 | Pengadministrasi Kepegawaian | |
| 16 | BAHTIAR, A.Md<br>Nip. 19730307 201502 1 001 | Pengelola Kepegawaian UPTD PK & KB Wilayah V | |

### 3. Data Jabatan Fungsional

**Tabel. 1. Jabatan Fungsional**

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | SUHARMIYANI, S.STP<br><br>Nip. 19911107 201206 2 001 | Fungsional Analisis Kebijakan | |
| 2 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda<br><br>Dr. NURSIAH, S.Ag., M.Si<br><br>Nip. 19700609 200604 2 013 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda | |
| 3 | ISNAWATI, S.Sos<br><br>Nip. 19740729 200604 2 019 | Fungsional Pekerja Sosial Muda | |
| 4 | IRNAWATI, S.Pi<br><br>Nip. 19831019 201101 2 012 | Fungsional Analisis Kebijakan | |
| 5 | ANDI OPU, SE<br><br>Nip. 19740104 200701 2 015 | Fungsional Penata Kependudukan & KB Muda | |
| 6 | ANDI SOFIYANTI, S.Ag<br><br>Nip. 19770308 201101 2 008 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng | Pegawai Pusat |
| 7 | DARMAWATI, SH<br><br>Nip. 19730314 201407 2 003 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu | Pegawai Pusat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | M. TABRIS. S<br><br>Nip. 19660810 198803 1 015 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomanai | Pegawai Pusat |
| 9 | NURNIAH. M, AMKL<br><br>Nip. 19730405 200604 2 024 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu | Pegawai Pusat |
| 10 | ROSDIANA, S.Ag<br><br>Nip. 19730117 201101 2 001 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne | Pegawai Pusat |
| 11 | SUWARSI NOVIANTI, SE<br><br>Nip. 19800307 201407 2 003 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontoharu | Pegawai Pusat |
| 12 | AMBO RAPPE. M<br><br>Nip. 19760912 201001 1 012 | Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Kec. Pastim | Pegawai Pusat |
| 13 | ANDI TAWAKKAL<br><br>Nip. 19820621 201410 1 001 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne | Pegawai Pusat |
| 14 | ASMARANI<br><br>Nip. 19721219 201407 2 003 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec, Bontomanai | Pegawai Pusat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | BAHYANI<br>Nip. 19700109 201212 2 001 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne | Pegawai Pusat |
| 16 | Hj. NURHAYATI<br>Nip. 19660620 201212 2 002 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Taka Bonerate | Pegawai Pusat |
| 17 | MUHAMMAD ANSAR<br>Nip. 19740702 201407 1 003 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng | Pegawai Pusat |
| 18 | NASMAWATI<br>Nip. 19701008 201407 2 001 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasimasunggu | Pegawai Pusat |
| 19 | NURDIN<br>Nip. 19670211 200701 1 018 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Pasilambena | Pegawai Pusat |
| 20 | RAHMIATI<br>Nip. 19820329 200801 2 021 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Benteng | Pegawai Pusat |
| 21 | SUPARMAN, SP<br>Nip. 19800130 201502 1 001 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontosikuyu | Pegawai Pusat |
| 22 | Penyuluh Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne | Penyuluh | Pegawai |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | SURYANI<br><br>Nip. 19680513 201410 2 002 | Keluarga Berencana Kec. Bontomate'ne | Pusat |

**Tabel. 2. Jabatan Fungsional Umum Pelaksana**

| No. | Nama | Jabatan Fungsional | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | RISNAWATI. DP, S.IP<br><br>Nip. 19840511 201407 2003 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | |
| 2 | Hj. NURNIATI. A<br><br>Nip. 19700425 199003 2 006 | Pengadministrasi Umum | |
| 3 | SITTI NURAENI<br><br>Nip. 19680303 199103 2 019 | Pengadministrasi Umum | |
| 4 | HUSNI LAEGO, S.Sos<br><br>Nip. 19880122 202203 2 002 | Analisis Advokasi & Komunikasi, Informasi & Edukasi | |
| 5 | SILVY SUTRI INSANI ASIS, S.Sos<br><br>Nip. 19970307 202203 2 009 | Analisis Perlindungan Perempuan | |
| 6 | NURSYAMSI, S.Sos<br><br>Nip. 19980411 202203 2 011 | Analisis Perlindungan Perempuan | |
| 7 | SABARIAH<br><br>Nip. 19670102 200604 2 017 | Pengadministrasi Keuangan | |
| 8 | HARTATI<br><br>Nip. 19690204 200906 2 001 | Pengadministrasi Keuangan | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | SYAMSIRAWATI<br><br>Nip. 19830710 200903 2 003 | Pengadministrasi Kepegawaian | |

**Tabel. 2. P3K PENYULUH KB PUSAT**

| No. | Nama | Jabatan | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | JUMRAWATI, S.Sos<br><br>Nip. 197205172022212001 | PKB Ahli Pertama | |
| 2 | SABDA ALAM, SKM<br><br>Nip. 199104202022211002 | PKB Ahli Pertama | |
| 3 | MUSLIADI, S.E<br><br>Nip. 199102242022211003 | PKB Ahli Pertama | |
| 4 | ANDI TAZKIR SAIFUL, S.Pd<br><br>Nip. 198207012022211001 | PKB Ahli Pertama | |
| 5 | SULASTRI, S.IP<br><br>Nip. 199103312022212001 | PKB Ahli Pertama | |
| 6 | ANDI ULFAWATI REZKI, A.Md.Keb<br><br>Nip. 199201032022212008 | PKB Terampil | |
| 7 | WIWI APRIANI, A.Md.Keb.<br><br>Nip. 199404102022212005 | PKB Terampil | |
| 8 | ANDI GUNAWAN, ST<br><br>Nip. 198707312023211018 | PKB Ahli Pertama | |

## 4. Jumlah Tenaga Kontrak / Pekerja Harian Lepas (PHL)

| No. | Nama | Jabatan | KET. |
|---|---|---|---|
| 1 | ISRAWATI IDRIS, SP | PHL | |
| 2 | ITA SAHARA, SE | PHL | |
| 3 | JUMRIATI, SE | PHL | |
| 4 | FAJRIANI, SE | PHL | |
| 5 | NUR NENENG SAFITRI, S.Pd | PHL | |
| 6 | NELLY HAMDANA, S.Sos | PHL | |
| 7 | SITTI AISAH | PHL | |
| 8 | KASMIATI, S.A.P | PHL | |
| 9 | RIDAWATI, A.Md | PHL | |
| 10 | MUHAMMAD IKBAL, S.Pd | PHL | |
| 11 | NUR MAYA | PHL | Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB |
| 12 | FITRIANI | PHL | |
| 13 | RESTIA YULIANA, S.A.P | PHL | |
| 14 | SRI WAHYUNI. S | PHL | |
| 15 | HUJRANA. R,S.Pd | PHL | |
| 16 | BASNIA, S.A.P | PHL | |
| 17 | DESY SELFIANI, SKM | PHL | |
| 18 | RISKA ASTRIWANA KARIM | PHL | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | DESI YULIANA PUTRI | PHL | |
| 20 | IRWAN SAPUTRA | PHL | |
| 21 | SATRIANI, S.Pd | PHL/ PENYULUH KB | |
| 22 | NUR INSANA, S.Kep. NS | PHL/ PENYULUH KB | |
| 23 | NUR RAHMAN HASFAR, S. Sos | PHL/ PENYULUH KB | |
| 24 | SULFIANI, S.M | PHL/ PENYULUH KB | |
| 25 | HASMIATI, S.M | PHL/ PENYULUH KB | |
| 26 | ANUGRAH PUTRA, S.Kom | PHL/ PENYULUH KB | |
| 27 | CITRAWATI | PHL/ PENYULUH KB | |
| 28 | TALLASIANG | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB |
| 29 | NOFALIA | PHL/ PENYULUH KB | |
| 30 | NIRMAWATI | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh KB |
| 31 | DARMAWATI | PHL/ PENYULUH KB | |
| 32 | ERMI SAHARA | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh |
| 33 | SELVA ATRIANI KALSUM SUDMAYADI | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh |
| 34 | ISNAWATI | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh |
| 35 | PEDI KRISTAL FIKRAM | PHL/ PENYULUH KB | |
| 36 | NURHAERANI | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh |
| 37 | ROSNANI NINGSI | PHL/ PENYULUH KB | |
| 38 | NIRWANA | PHL/ PENYULUH KB | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | NUR ABIDIN JAMAL | PHL/ PENYULUH KB | |
| 40 | NURMUFIDAH | PHL/ PENYULUH KB | |
| 41 | SITTI HUBAYA | PHL/ PENYULUH KB | Lulus P3K Pusat / Penyuluh |
| 42 | ROSMIDA | PHL/ PENYULUH KB | |
| 43 | ANDI ZULFIANA | PHL/ PENYULUH KB | |
| 44 | MUSDALIFAH | PHL/ PENYULUH KB | |
| 45 | BAU NARRU | PHL/ PENYULUH KB | |
| 46 | NASRULLAH | PHL/ PENYULUH KB | |

**5**. **Jabatan yang Belum Terisi**

| No. | Nama Jabatan | Jumlah | KET. |
|---|---|---|---|
| **1** | **Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum** | | |
| 1 | Operator Layanan Operasional | 1 | |
| **2** | **Sub. Bagian Program** | | |
| 1 | Penelaah Teknis Kebijakan | 1 | |
| 2 | Pengolah Data dan Informasi | 1 | |
| 3 | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | 1 | |
| **3** | **Kepala Sub Bagian Keuangan** | | |
| 1 | Operator Layanan Operasional | 1 | |
| | Bendahara | | |
| | Pengelola Gaji | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **Bidang Pemberdayaan Perempuan** | | |
| | Pengadministrasi Perkantoran | 1 | |
| **5** | **Bidang Perlindungan Anak** | | |
| 1 | Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1 | |
| 2 | Pengadministrasi Perkantoran | 1 | |
| **6** | **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | |
| 1 | Penelaah Teknis Kebijakan | 1 | |
| 2 | Pengadministrasi Perkantoran | 1 | |

**6. Jabatan Fungsional yang Belum Terisi**

| No. | Nama Jabatan Fungsional | Jumlah | KET. |
|---|---|---|---|
| **1** | **Bidang Pemberdayaan Perempuan** | | |
| | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Muda | 2 | |
| **2** | **Bidang Perlindungan Anak** | | |
| | Fungsional Pekerja Sosial Muda | 2 | |
| **3** | **Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan** | | |
| | Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **4** | **Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** | | |
| | Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda | 3 | |

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

## 2.1. CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN IKK KELUARAN/OUTPUT TAHUN 2023

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci | | Rumus | Elemen Data | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| | | 289 | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG | Jumlah lembaga pemerintah<br>---------- x 100%<br>Jumlah Lembaga pemerintah yg sudah dilatih PUG | - | - | *Bid. Pemberdayaan Perempuan* | *Tidak di Anggarkan* |
| | | 290 | Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota | Jumlah lembaga pemerintah<br>---------- x 100%<br>Jumlah Perangkat Daerah yg sudah dievaluasi melalui analisis gender | - | - | *Bid. Pemberdayaan Perempuan* | *Tidak di Anggarkan* |
| | | 291 | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | | *Jumlah Media Massa* | *4* | *Bid. PA* | |
| | | 292 | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal | | - | - | *Bid. Perlindungan Anak* | *Belum ada Layanan Anak yang memiliki SPM di Kab. Kep. Selayar* |
| | | 293 | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani | Jumlah Korban Kekerasan anak yang dilayani<br>---------- x 100%<br>Jumlah Korban kekerasan anak ditingkat provinsi | ( 12 x 100%)<br>*12* | *100%* | *Bid. PA* | |
| | | 294 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan | | *Jumlah Layanan Anak 7 Lembaga* | *7* | *Bid. Perlindungan Anak* | |
| | | 295 | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota | | - | - | | *Dinas Sosial* |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci | | Rumus | Elemen Data | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (APBD kab/kota) | | | | | |
| | | 296 | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang Perempuan Tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan | Jumlah ormas pr yang sudah dilatih x 100%<br>Jumlah seluruh ormas yang ada | - | - | *Bid. Pemberdayaan Perempuan* | *Tidak di Anggarkan* |
| | | 297 | Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih | Jumlah kader pr yang sudah dilatih x 100%<br>Jumlah seluruh kader pr | - | - | *Bid. Pemberdayaan Perempuan* | *Tidak di Anggarkan* |
| | | 298 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan | Jumlah lembaga layanan PP yg sudah dilatih x 100%<br>Jumlah seluruh lembaga layanan yg aktif | - | - | *Bid. PP* | *Tidak di Anggarkan* |
| | | 299 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota | | *1. P2TP2A*<br>2. PUSPAGA | *2* | *Bid. Pemberdayaan Perempuan* | |
| | | 300 | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | | - | - | - | *Belum ada kebijakan* |
| | | 301 | Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi | | - | - | - | *Blm ada lembaga di Kep. selayar* |
| | | 302 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani | Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan<br>---------- x 100 %<br>Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan | 10 x 100%<br>10 | *100%* | | |
| **2.** | | | | | | | | |
| | | 336 | Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan | - | 1 Dok | 1 | Bid. KB | |
| | | 337 | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun | - | | *≥ 20* | *Bid. Dalduk* | |
| | | 338 | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) | Jumlah Kelahiran Remaja Kelompok Umur 15-19 Tahun x 100% | 4.405 x 100%<br>13245 | 33,25 | Bid. Dalduk | |

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci | | Rumus | Elemen Data | Capaian Kinerja | Sumber Data | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jumlah kelompok umur 15 – 19 | | | | |
| | | 339 | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) | Jumlah Masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi & KIE) ---------- x 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi KIE) | 15.222 x 100% *12.997* | 1,171% | Bid. Dalduk | |
| | | 340 | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | Jumlah stakholder & mitra kerja yang berperan aktif dalam pengelolaan program KKBPK x 100% Jumlah sasaran stakholder pemangku kepentingan & mitra kerja | 21 x 100% 9 | 2,33% | Bid. Dalduk | |
| | | 341 | Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP | Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ---------- x 100% Jumlah Faskes | 17 x 100% 17 | 100% | Bid. Dalduk | |
| | | 342 | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah MKJP ---------- x 100% Jumlah PUS | 3.901 x 100% 13.422 | 29,06 | Bid. Dalduk | |
| | | 343 | Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif | | Pokja Kampung KB | 88 | Bid. Dalduk | |
| | | 344 | Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan | Jumlah Peserta KB Persalinan menurut metode kontrasepsi cara moderen ---------- x 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan | 1.690 x 100 % 2.643 | 63,94 | Bid. Dalduk | Siga |
| | | 345 | Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah | | 80 x 100 % *13.422* | 0,059 | Bid. Dalduk | Siga |
| | | 346 | Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) | Jumlah Peserta KB pada keluarga penerima PBI ---------- x 100% Jumlah Keluarga PBI | 8.655 x 100 % 10.233 | 84,57 | Bid. Dalduk | ***Siga*** |

2.2 . Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Output

| No. | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci | | Rumus | Elemen Data | Capaian Kinerja | Sumber Data | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** | | | | | | | |
| | | 47 | Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD<br>---------- x 100%<br>Jumlah Seluruh Belanja Langsung APBD | 901313110529 x 100%<br>1136008538012 | ***0,543*** | PP | |
| | | 48 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi<br>---------- x 100%<br>Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) | 12 x 100%<br>40450 | 0,00029 | *Bid. Perlindungan Anak* | |
| | | 49 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan<br>---------- x 100.000<br>Jumlah penduduk Perempuan | 10 x 100.000%<br>*72193* | 0,00013 | *PP* | |
| **2** | **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** | | | | | | | |
| | | 66 | TFR (Angka Kelahiran Total) | | | 1,9 | Bid. Dalduk | |
| | | 67 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern<br>---------- x 100%<br>Jumlas Pasangan Usia Subur | 13422 x 100%<br>20345 | 65,97 | Siga 2023 | PUS Peserta KB Modern & Tradisional |
| | | 68 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani<br>---------- x 100%<br>Jumlah Pasangan Usia Subur | 2611 x 100%<br>20534 | 12,71 | Siga 2023 | PUS bukan Peserta KB |

**DATA PENGUKURAN SASARAN BALITA DENGAN STATUS GIZI TINGGI BADAN MENURUT UMUR**

**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023**

| NO. | KECAMATAN | PUSKESMAS | DESA/KELURAHAN | BALITA | | | BALITA STUNTING | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SASARAN | TERUKUR | TDK TERUKUR | JMLH | % (Terukur) | % (Sasaran) |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | Bontomate'ne | Parangia | Bungaiya | 74 | 66 | 8 | 19 | 28.79 | 89.19 |
| | | | Pamatata | 32 | 31 | 1 | 8 | 25.81 | 96.88 |
| | | | Kayu Bauk | 30 | 28 | 2 | 6 | 21.43 | 93.33 |
| | | | Tanete | 89 | 78 | 11 | 15 | 19.23 | 87.64 |
| | | | Menara Indah | 30 | 30 | 0 | 9 | 30.00 | 100.00 |
| | **Total** | | | **255** | **233** | **22** | **57** | **24.46** | **91.37** |
| | Bontomate'ne | Bontomatene | Onto | 62 | 54 | 8 | 16 | 29.63 | 87.10 |
| | | | Bontona Saluk | 60 | 49 | 11 | 12 | 20.00 | 79.03 |
| | | | Barat Lambongan | 51 | 47 | 4 | 11 | 21.57 | 92.16 |
| | | | Tamalanrea | 43 | 40 | 3 | 4 | 9.30 | 93.02 |
| | | | Batangmata | 54 | 42 | 12 | 6 | 11.11 | 77.78 |
| | | | Batangmata Sapo | 39 | 33 | 6 | 12 | 30.77 | 84.62 |
| | | | Maharayya | 47 | 42 | 5 | 15 | 31.91 | 89.36 |
| | **Total** | | | **356** | **307** | **49** | **76** | **24.76** | **86.24** |
| 2 | Buki | Buki | Buki | 36 | 34 | 2 | 6 | 17.65 | 94.44 |
| | | | Lalang Bata | 55 | 45 | 10 | 6 | 13.33 | 81.82 |
| | | | Balang Butung | 39 | 35 | 4 | 6 | 17.14 | 89.74 |
| | | | Buki Timur | 41 | 40 | 1 | 10 | 25.00 | 97.56 |
| | | | Bontolempangan | 60 | 51 | 9 | 7 | 13.73 | 85.00 |
| | | | Mekar Indah | 68 | 64 | 4 | 12 | 18.75 | 94.12 |
| | | | Kohala | 46 | 42 | 4 | 5 | 11.90 | 91.30 |
| | **Total** | | | **345** | **311** | **34** | **52** | **16.72** | **90.14** |
| 3 | Bontomanai | Barugaia | Barugaia | 77 | 70 | 7 | 16 | 22.86 | 90.91 |
| | | | Jambuia | 74 | 70 | 4 | 11 | 15.71 | 94.59 |
| | | | Bonea Timur | 85 | 75 | 10 | 27 | 36.00 | 88.24 |
| | | | Parak | 156 | 146 | 10 | 31 | 21.23 | 93.59 |
| | | | Bontomarannu | 92 | 81 | 11 | 18 | 22.22 | 88.04 |
| | **Total** | | | **484** | **442** | **42** | **103** | **23.30** | **91.32** |
| | Bontomanai | Polebunging | Polebunging | 64 | 61 | 3 | 15 | 24.59 | 95.31 |
| | | | Bonea Makmur | 61 | 54 | 7 | 21 | 38.89 | 88.52 |
| | | | Kaburu | 50 | 47 | 3 | 11 | 23.40 | 94.00 |
| | | | Bontokoraang | 28 | 25 | 3 | 7 | 28.00 | 89.29 |
| | | | Mare-mare | 58 | 51 | 7 | 12 | 23.53 | 87.93 |
| | **Total** | | | **261** | **238** | **23** | **66** | **27.73** | **91.19** |
| 4 | Benteng | Benteng | Benteng | 737 | 708 | 29 | 74 | 10.45 | 96.07 |
| | | | Benteng Utara | 396 | 344 | 52 | 46 | 13.37 | 86.87 |
| | | | Benteng Selatan | 688 | 649 | 39 | 85 | 13.10 | 94.33 |
| | | | Putabangun | 141 | 135 | 6 | 23 | 17.04 | 95.74 |
| | | | Bontolebang | 63 | 56 | 7 | 11 | 19.64 | 88.89 |
| | **Total** | | | **2025** | **1892** | **133** | **239** | **12.63** | **93.43** |
| 5 | Bontoharu | Bontosunggu | Bontosunggu | 136 | 136 | 0 | 38 | 27.94 | 100.00 |
| | | | Bontotangnga | 110 | 110 | 0 | 29 | 26.36 | 100.00 |
| | | | Bontoborusu | 89 | 89 | 0 | 22 | 24.72 | 100.00 |
| | | | Kel. Bontobangun | 99 | 99 | 0 | 17 | 17.17 | 100.00 |
| | | | Kahu-kahu | 116 | 116 | 0 | 26 | 22.41 | 100.00 |
| | | | Kalepadang | 95 | 95 | 0 | 9 | 9.47 | 100.00 |
| | **Total** | | | **645** | **645** | **0** | **141** | **21.86** | **100.00** |
| 6 | Bontosikuyu | Bontosikuyu | Patikarya | 88 | 86 | 2 | 20 | 23.26 | 97.73 |
| | | | Laiyolo | 84 | 81 | 3 | 16 | 19.75 | 96.43 |
| | | | Laiyolo Baru | 49 | 46 | 3 | 9 | 19.57 | 93.88 |
| | | | Harapan | 142 | 139 | 3 | 34 | 24.46 | 97.89 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Patilereng | 64 | 62 | 2 | 26 | 41.94 | 96.88 |
| | **Total** | | | **427** | **414** | **13** | **105** | **25.36** | **96.96** |
| | Bontosikuyu | Lowa | Lowa | 69 | 62 | 7 | 9 | 14.52 | 89.86 |
| | | | Appatanah | 65 | 57 | 8 | 12 | 21.05 | 87.69 |
| | | | Binanga Sombaiya | 78 | 69 | 9 | 14 | 20.29 | 88.46 |
| | | | Lantibongan | 89 | 80 | 9 | 24 | 30.00 | 89.89 |
| | | | Bahuluang | 20 | 18 | 2 | 4 | 22.22 | 90.00 |
| | | | Tambolongan | 73 | 64 | 9 | 8 | 12.50 | 87.67 |
| | | | Polassi | 83 | 74 | 9 | 15 | 20.27 | 89.16 |
| | **Total** | | | **477** | **424** | **53** | **86** | **20.28** | **88.89** |
| 7 | Pasimasunggu | Ujung Jampea | Ujung | 46 | 46 | 0 | 8 | 17.39 | 100.00 |
| | Timur | | Lembang Baji | 72 | 70 | 2 | 12 | 17.14 | 97.22 |
| | | | Bontomalling | 113 | 111 | 2 | 39 | 35.14 | 98.23 |
| | | | Bontobulaeng | 98 | 97 | 1 | 36 | 37.11 | 98.98 |
| | | | Bontojati | 70 | 67 | 3 | 18 | 26.87 | 95.71 |
| | | | Bontobaru | 62 | 61 | 1 | 18 | 29.51 | 98.39 |
| | **Total** | | | **461** | **452** | **9** | **131** | **28.98** | **98.05** |
| 8 | Pasimasunggu | Benteng Jampea | Labuang Pamajang | 91 | 78 | 13 | 8 | 10.26 | 85.71 |
| | | | Ma'minasa | 66 | 58 | 8 | 13 | 22.41 | 87.88 |
| | | | Kembangragi | 195 | 149 | 46 | 22 | 14.77 | 76.41 |
| | | | Massungke | 94 | 81 | 13 | 22 | 27.16 | 86.17 |
| | | | Teluk Kampe | 68 | 55 | 13 | 13 | 23.64 | 80.88 |
| | | | Bontosaile | 64 | 58 | 6 | 8 | 13.79 | 90.63 |
| | | | Tanamalala | 54 | 43 | 11 | 8 | 18.60 | 79.63 |
| | **Total** | | | **632** | **522** | **110** | **94** | **18.01** | **82.59** |
| 9 | Takabonerate | Pasitallu | Pasitallu | 55 | 52 | 3 | 18 | 34.62 | 94.55 |
| | | | Kayuadi | 100 | 59 | 41 | 27 | 45.76 | 59.00 |
| | | | Batang | 102 | 81 | 21 | 28 | 34.57 | 79.41 |
| | | | Nyiur Indah | 120 | 58 | 62 | 29 | 50.00 | 48.33 |
| | | | Rajuni | 64 | 58 | 6 | 3 | 5.17 | 90.63 |
| | | | Latondu | 29 | 28 | 1 | 6 | 21.43 | 96.55 |
| | | | Jinato | 43 | 38 | 5 | 6 | 15.79 | 13.95 |
| | | | Tambuna | 50 | 44 | 6 | 4 | 9.09 | 88.00 |
| | | | Tarupa | 53 | 37 | 16 | 7 | 18.92 | 69.81 |
| | **Total** | | | **616** | **455** | **161** | **128** | **28.13** | **73.86** |
| 10 | Pasimarannu | Pasimarannu | Bonerate | 107 | 99 | 8 | 6 | 6.06 | 92.52 |
| | | | Komba-komba | 60 | 32 | 28 | 1 | 3.13 | 53.33 |
| | | | Sambali | 100 | 88 | 12 | 8 | 9.09 | 88.00 |
| | | | Lambego | 71 | 52 | 19 | 4 | 7.69 | 73.24 |
| | | | Lamantu | 118 | 101 | 17 | 9 | 8.91 | 85.59 |
| | | | Bonea | 94 | 73 | 21 | 8 | 10.96 | 77.66 |
| | | | Majapahit | 146 | 130 | 16 | 5 | 3.85 | 89.04 |
| | | | Batu Bingkung | 140 | 125 | 15 | 4 | 3.20 | 89.29 |
| | **Total** | | | **836** | **700** | **136** | **45** | **6.43** | **83.73** |
| 11 | Pasilambena | Pasilambena | Kalaotoa | 83 | 69 | 14 | 16 | 23.19 | 83.13 |
| | | | Karumpa | 45 | 40 | 5 | 0 | 0.00 | 88.89 |
| | | | Garaupa | 61 | 54 | 7 | 0 | 0.00 | 88.52 |
| | | | Garaupa Raya | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | | | Lembang Matene | 66 | 48 | 18 | 15 | 31.25 | 72.73 |
| | | | Pulo Madu | 55 | 39 | 16 | 4 | 10.26 | 70.91 |
| | **Total** | | | **344** | **284** | **60** | **35** | **12.32** | **82.56** |
| | **TOTAL KABUPATEN** | | | **8164** | **7319** | **845** | **1358** | **18.55** | **89.65** |

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala Puji kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.sehingga Buku Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

menyusun buku profil Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang Lingkungan Hidup. Buku ini berisi seluruh informasi mengenai Dinas Lingkungan Hidup mulai dari tugas dan fungsi, struktur organisasi, sarana dan prasarana yang dimiliki, data-data serta capaian kinerja, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya buku profil ini diharapkan masyarakat luas dapat mengenali Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku profil ini, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Kepala Dinas Lingkungan hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar

**H. MUHAMMAD HASDAR, SKM.,M.Kes**
**Pangkat : Pembina Utama Muda**
**NIP : 19620906 198302 1 007**

**DAFTAR ISI**

- PENDAHULUAN
- SEJARAH PEMBENTUKAN ORGANISASI
- STRUKTUR ORGANISASI
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI

**BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



- SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN
- SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
- SEKSI PENGADUAN , PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

**BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH , LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS**

- SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
- SEKSI LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
- SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP



**BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**



- SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN P KERUSAKAN LINGKUNGAN



- SEKSI PEMULIHAN PENCEMARAN DAN
- KERUSAKAN LINGKUNGAN
- SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

**PETA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**




- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang

pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.




**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 12 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar No. 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar.




**Dinas Lingkungan Hidup**

- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

## STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan dalam suatu peraturan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Jabtan Fungsional
3. Sekretariat Dinas terdiri dari

- Subbagian Program
- Subbagaian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- Subbagian Keuangan

4. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Seksi Perencanaan Lingkungan
- Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan

5. Bidang Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Peningkatan Kapasitas

- Seksi Pengelolaan Sampah
- Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

6. Bidang Pengelolaan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

- Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Seksi Pemuliahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

7. UPTD Laboratorium


KEPALA DINAS
H.MUHAMMAD HASDAR,SKM.,M.Kes
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS
NUZAKKIR MUIN.SP
SUB BAGIAN PROGRAM
BAU SAHRA, SE
SUB BAGIAN UMUM,KEPEGAWAIN& HUKUM
RISNAWATI, SE
SUB BAGIAN KEUANGAN
ANDI NURLINA, SE
BIDANG PENATAAN & PENAATAN PPLH
ANDI MARTINA, SE
SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN
ANDI LINMAS, SE
SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN
EKA PRIDA WATI, S.Si,M.Si
SEKSI PENGADUAN, PENYELESAIAN SENGKETA & PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
MUKHTAR KAMAL,SP
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN
MURNIATI.,S.Sos,M.Si
SEKSI PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN
ANDI JULYANA,SP
SEKSI PEMULIHAN PENCEMARAN & KERUSAKAN LINGKUNGAN
ERNIWATI, S.Pd
UPTD
BIDANG PENAATAN & PENINGKTAN KAPASITAS LINGKUNGAN
ELLYA LEWA, S.Sos
SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH
BAKHTIAR SATUANG, S.Pd
SEKSI LIMBAH B3
SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
WALIYANTI P

BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 KONDISI UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 $km^2$ (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 122.055 jiwa. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilyah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng, Bontoharu, Bontomanai, Buki, Bontomatene dan Bontosikuyu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Takabonerate, Pasimarannu, dan Pasilambena.

***LETAK GEOGRAFIS***

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 11 kecamatan, 7 kelurahan, dan 67 desa. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi

dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan.

**Batas Wilayah:**

Secara geografis, Kabuipaten Kepulauan Sealayar berada pada koordinat (letak astronomit) 5º42 '- 7º 35' Lintang Selatan dan 120º15' - 122º30 bujur timur yang berbatasan dengan:




Berdasarkan letaknya,*Selat Selayar* dilintasi pelayaran nusantara baik ke timur maupun ke barat, bahkan sudah menjadi pelayaran internasional. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan "kepulauan" yang berada diantara jalur alternative perdagangan internasional yang

menjadikan Daerah ini secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasionak untuk melayani Kawasan Timur Indonesia> maupun pada skala internasional guna melayani Negara-negara di kawasan Asia

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2017, Tambahan Lembar Negara Nomor 6056;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republikm Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47 );
12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 3);

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud : Adapun maksud disusunya Profil ini adalah sebagai media informasi dan pengenalan kepada masyarakat tentang Tugas Pokok dan Fungs Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tujuan : Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Lingkungan Hidup.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



**TUGAS**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Lingkungan Hidup.

**FUNGSI**

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup
c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan

**DASAR HUKUM**

**1.** UU No. 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
**2.** Perpres No. 18 Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri LHK No. P. 74 / MENLHK / SETJEN / 1/8|2016 tentang pedoman Numenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang LH dan urusan pemerintahan Bidang Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL

6. Peraturan Daerah No. 64 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Peraturan Bupati.

## Unit usaha

Dinas Lingkungan Hidup memiliki Unit Usaha yang dikelola, yaitu Bank Sampah dan Retribusi Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu komponen dari Dinas Lingkungan Hidup yang sejak tahun 2021 berkomitmen untuk berkontribusi pendapatan Asli Daerah.

Kemudian pendapatan dari Retribusi Sampah yang selama ini berkontribusi terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

# BAB III

# BIDANG PENAATAN DAN PENATAAN PPLH



**Bidang  Penataan dan Penaatan PPLH berikut:**

Kebijakan daerah berupa peraturan Daerah yang tersedia dalam pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup sebanyak 6 buah.

- Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan:
- Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 tentang tentang Pengawasan Kualitas Air:
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah:
- Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Ruang Terbuka Hijau:
- Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah RT dan sejenis Sampah RT;
- Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2019 tentan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salah satu ukuran keberhasilan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan adalah ketaatan pemrakarsa usaha atau kegiatan yang dapat diawasi masalah ketaatanya dalam melaksanakan rekomendasi lingkungan pada Tahun 2021 sebanyak 23 usaha atau kegiatan dengan rincian usaha atau kegitan sebanyak 1 buah. Usaha atau kegiatan yang belum taat sebanyak 22 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**

| No. | Jeni usaha/kegiatan | Lokasi | Pemilik | Fakta dan temuan lapangan | Analisi yuridis/ kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hotel | Jl.Jend. Ahmad Yani | CV. Rayhan Square | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 2. | PLTD | Jl. Poros Lembang Matene | PT. PLN | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Taat |
| 3. | Penginapan | Jl. Pesona Selayar Regency Parappa | Andi Nur Diyana, ST.,M.Si | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 4. | Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug | Kel. Putabangun | Masriki | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 5. | Kesehatan | Jl. Dr. Muchtar No.2 | Kepala Dinas Kesehatan | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 6. | Kesehatan | Jl. Poros Bandara Aroeppala | Kepala Dinas Kesehatan | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 7. | Penambangan Batuan Jenis Tanah Urug | Jl. Poros Bandara Aroeppala | H. Andi Baso Dewarang | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Pariwisata | Jl. Poros Tile-tile | A.A.Gede Eka Putra | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 9. | Pariwisata | Jl. Poros Tile-tile | Yusril Mahendra | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 10. | Kesehatan | Jl. K. Abdul Kadir Kasim | Direktur Rumah Sakit | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 11. | Kesehatan | Jl. Poros Benteng Pamatata | Kepala Dinas Kesehatan | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 12. | Kesehatan | Desa Buki | Kepala Dinas Kesehatan | Sudah memiliki dokumen lingkungan | Belum Taat |
| 13. | Kesehatan | Kel. Batangmata | Kepala Dinas Kesehatan | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 14. | PLTD | Kec. Pasimasunggu | PT. PLN | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 15. | PLTD | Kec. Bontoharu | PT. PLN | Sudah memiliki dokumen lingkungan | Belum Taat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | dan izin lingkungan | |
| 16. | Industri minyak Atsiri, bumbu masak dan penyedap rasa | Dusun Kassa Bumbung Desa Bungaiya | Daniel Stassen | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 17. | Café | Jl. MT.Haryono | Irham Yulandi, S,Kep | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 18. | Laundry | Jl. Sutoyo | Andi Armunanto | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 19. | Café | JL. W.R. Supratman | Muh. Nuzul Hidayat | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 20. | SPBU | Jl. Poros Bandara H. Aroeppala | Andi Putriana | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 21. | Rumah Makan | Jl. Metro | Muh. Taris | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |
| 22. | Asphalt Mixing Plant (AMP) | Kel.Bontobangun | Herry Wisal | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Penambangan Batu Gunung dan Material | Dusun Baera Desa Bontotangnga | Arfandi | Sudah memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan | Belum Taat |

**TUGAS**

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**SEKSI**

1. **Seksi Perencanaan Lingkungan**
2. **Seksi Kajian Dampak Lingkungan**
3. **Seksi Pengaduan, Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan**

**FUNGSI**

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha dan / atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : p 102 / MENLHK / SETJEN / KUM .1 /12 / 2016 tentang pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi usaha dan / atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang pengawasan Dokumen Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang tatalaksana penilaian dan pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta penerbitan izin lingkungan.

## SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**SDM** ——— ***Sumber Daya Manusia***

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 296 orang yang terdiri dari 33 Orang PNS dan 563 Orang Non PNS, dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan**

| Golongan/ Ruang | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| IV/a | | 2 | 2 |
| IV/b | 1 | | 1 |
| III/a | 2 | 2 | 4 |
| III/b | | 1 | 1 |
| III/c | | 2 | 2 |
| III/d | 4 | 8 | 12 |
| II/b | 2 | | 2 |
| II/c | 2 | | 2 |
| II/d | 1 | 2 | 3 |
| I/c | 1 | | 1 |
| Kontrak Bupati | | | |
| Sukarela | | | |
| **Jumlah** | | | |

**Tabel 2. Klasifikasi PNS menurut Jabatan**

| Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Esolon III A | 1 | | 1 |
| Esolon III B | | 3 | 3 |

**Tabel 3. Klasifikasi PNS menurut Kualifikasi Pendidikan**

| Kualifikasi Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Sarjana (S2) | | 4 | 4 |
| Sarjana (S1) | 7 | 12 | 19 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| D3 | | 1 | 1 |
| D1 | | 1 | 1 |
| SMA | 7 | | 7 |
| SD | 1 | | 1 |

**Tabel 4. Klasifikasi Non PNS menurut Jabatan**

| JABATAN | JUMLAH |
|---|---|
| Staf Subag. Umum, Kepegawaian dan Hukum | 8 |
| Staf Subag. Keuangan | 21 |
| Staf Subag Program | 3 |
| Staf Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan | 1 |
| Staf Seksi Perencanaan Lingkungan | 1 |
| Staf Seksi Kajian Dampak Lingkungan | 1 |
| Staf Seksi Pencegahan dan Penanggulanagn, dan Kerusakan Lingkungan | 1 |
| Staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup | 2 |
| Staf Unit Pelaksana Tekni Laboratorium | 5 |
| Staf Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | 1 |
| Staf Seksi Peningkatan Kapasitas LH | 1 |
| Staf Seksi Pengelolaan Sampah | 1 |
| Staf Seksi Limbah B3 | 1 |

## SARAPRAS

| No. | Jenis Data | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Komputer | | Unit |
| 2. | Kendaraan Roda 2 | | Unit |
| 3. | Kendaraan Roda 3 | | Unit |
| 4. | GPS | | Unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Borehole Camera | | Unit |
| 6. | AWLR | | Unit |

## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH



Pengawasan Penataan PPLH di Sunari Beach Resort

*Pengawasan Penataan PPLH di UPTD Puskesmas Bontosunggu*

*Kegiatan Analisis Peta D3TL di P3E Makassar*

Pengawasan Penataan PPLH di UPTD Puskesmas Buki



## SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN

### KEGIATAN SEKSI PERENCANAAN LINGKUNGAN

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas
2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi
4. perencanaan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
5. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas
6. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
7. Melakukan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam ;

8. Melakukan penyusunan dokumen RPPLH
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ;
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH ;
11. Melakukan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
12. Melakukan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
13. Melakukan penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (pendapatan domestik bruto dan produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif dan disinsentif, pendanaan lingkungan hidup) ;
14. Melakukan singkronisasi RPPLH Nasional , pulau / kepulauan dan ecoregion ;
15. Melakukan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
16. Melakukakn penyusunan status lingkungan hidup daerah ;
17. Melakukan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
18. Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
19. Melakukan penyusunan KLHS kabupaten ;
20. Melakukan pengesahan KLHS ;

21. Melakukan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
22. Melakukan fasilitas pembinaan penyelenggaraan KLHS ;
23. Melakukan pemantauan dan evaluasi KLHS ;
24. Menyusun perjanjian Kinerja dan laporan monitoring Kinerja Seksi Perencanaan Lingkungan
25. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan , pemgendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan
26. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas ;
27. Menilai Kinerja pegawai aparatur sipil negaraa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
28. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Perencanaan Lingkungan , dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
29. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Jumlah Dan Jenis Izin PPLH Yang Dibutuhkan**

Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulaun Selayar sampai Tahun 2021 sebanyak 6 (enam) buah. Pada Tahun 2021, usaha atau kegiatan sudah wajib memiliki dokumen lingkungan yang didalamnya sudah memuat izin lingkungan. PLTS Hybrid selayar pada Tahun 2021 telah memiliki dokumen lingkungan sehingga secara langsung sudah memiliki izin limbah B3. untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel**
**Usaha dan/ atau kegiatan yang mempunyai Izin Limbah B3**

| No | Nama | Jenis | Izin Limbah B3 | Nomo Izin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | UPT Puskesmas Benteng | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. | Nomor 002/VII/Tahun 2019 |
| 2. | UPT Puskesmas Benteng | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Izin Pembungan dan Pengolahan Limbah Cair | Nomor 002/VII/Tahun 2019 |
| 3. | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar | | Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. | Nomor 001/VI/Tahun 2020, Tanggal 15 Juni 2020 |
| 4. | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar | | Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan | Nomor 56/II/Tahun 2018, Tanggal 1 Februari 2018 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Berbahaya dan Beracun. | |
| 5. | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar | | Izin Pembungan dan Pengolahan Limbah Cair | Nomor 001/X/Tahun 2018, Tanggal 10 Oktober |
| 6. | PLTS Hybrid Selayar | | Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. | Berupa Dokumen Lingkungan UKL-UPL |

Berdasarakan tabel, bahwa terdapat 6 unit usaha atau kegiatan yang memilki izin limbah B3 sampai Tahun 2021 yaitu 2 unit fasilitas kesehatan, 1 unit PLTS dan 3 unit PT PLN. Namun masih ada jenis usaha atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang pengangkutan limbah B3 dari tempat penyimpanan sementara limbah B3 ke tempat pengelolaan limbah B3 belum ada. Sehingga untuk usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 seperto oli bekas, kain baju, dan jenis limbah B3 lainnya. hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan pemrosesan selanjutnya.

**IZIN PPLH**

1. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3
2. Izin Pembangunan Limbah Cair s/d tahun
3. Izin Pemanfaatan Limbah Cair s/d tahun

Perbandingan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel**
**Dokumen Lingkungan Tahun 2016 s/d 2021**

| No. | Tahun | Jumlah Dokumen Lingkungan | | | | Jumlah Izin Lingkungan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SPPL | UKL-UPL | AMDAL | DPLH | |
| 1. | 2016 | 439 | 2 | - | - | 2 |
| 2. | 2017 | 114 | 11 | - | - | 7 |
| 3. | 2018 | 75 | 5 | - | - | 5 |
| 4. | 2019 | 297 | 11 | - | - | 10 |
| 5. | 2020 | 161 | 11 | 1 | - | 11 |
| 6. | 2021 | 93 | 8 | - | 4 | 8 |

Informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 disusun sebagai langkah awal dalam memenuhi kewajiban pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan informasi Lingkungan Hidup. Tujuan utamanya adalah untuk menilai, menentukan perioritas permasalahan, membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta menerapkan pembangunan berkelanjutan.

## SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN

### *KEGIATAN SEKSI KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN*

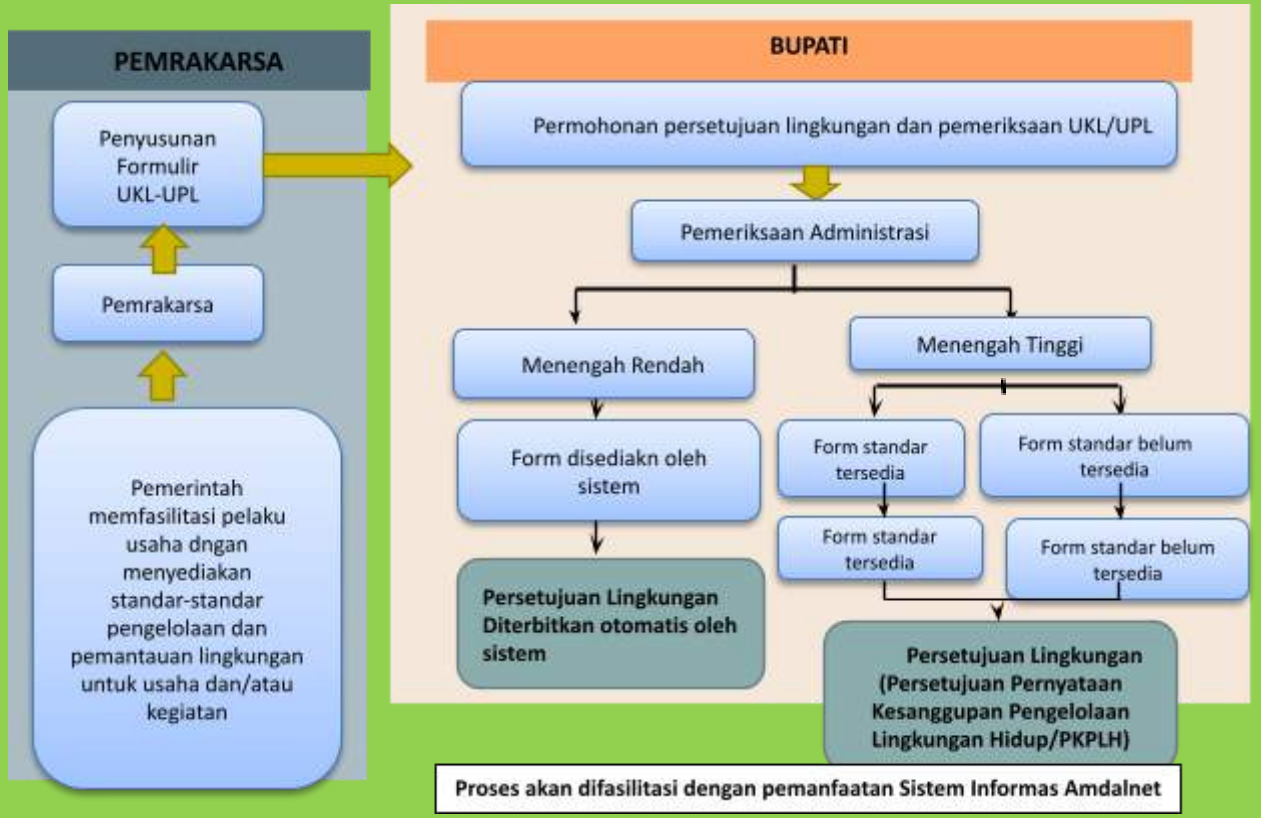
1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan pengelolaan LH (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Neraca Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DD-DT) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2. Penilaian dan pemeriksaan dokumen AMDAL dan UKL-UPL.
   - Penilaian AMDAL

   Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup yang akan menilai Dokumen AMDAL terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berjumlah 21 orang.
   - Pemeriksaan UKL-UPL
   - Tim pemeriksaan UKL-UPL terdiri dari
     - Instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
     - Instansi penerbit persetujuan teknis bagi pemenuhan baku mutu lingkungan hidup,

pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
- Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

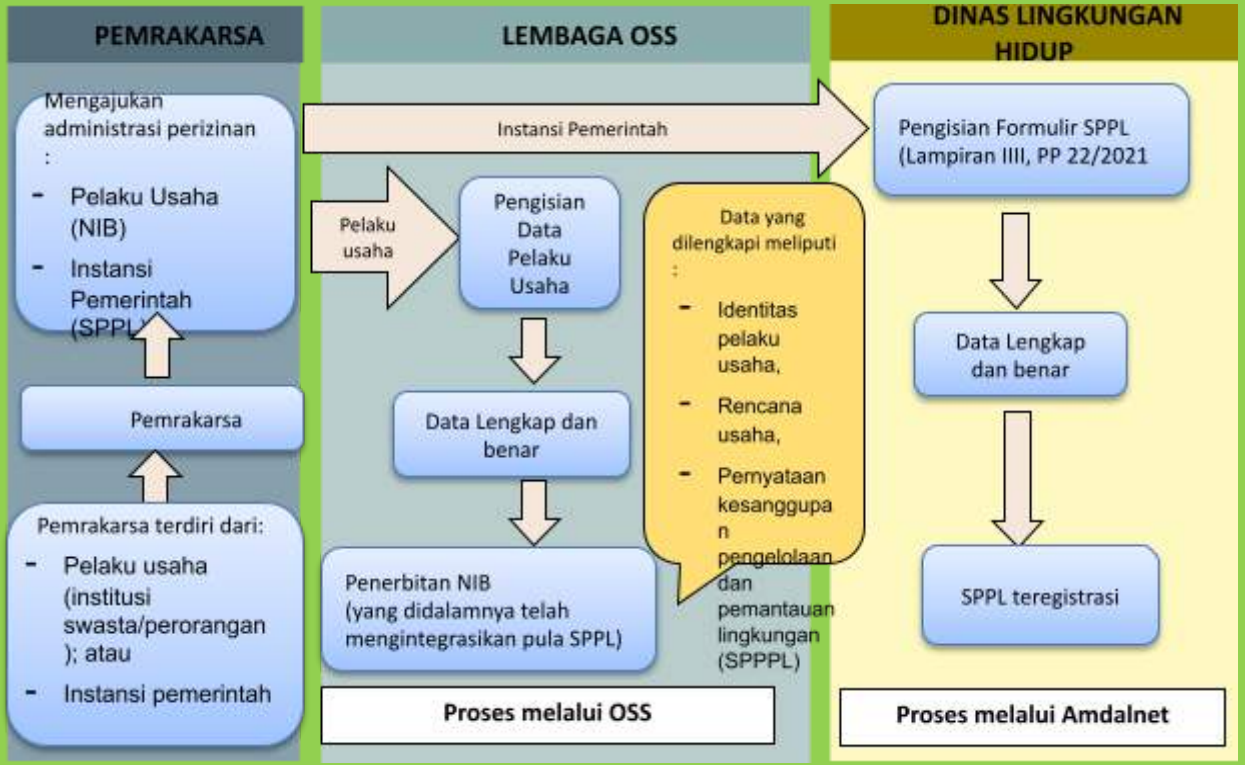
a. Kesesuaian Lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dengan rencana tata ruang;
b. Persetujuan awal terkait rencana usaha dan / atau kegiatan;
c. Persetujuan teknis
d. Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL, apabila penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan AMDAL;
e. Kesesuaian sistematika dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen ANDAL dan dokumen RKL-RPL

- Pemeriksaan UKL-UPL

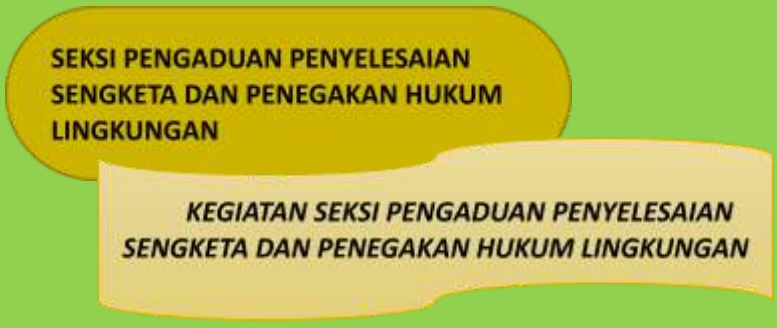


3. Verifikasi SPPL dan pendaftaran SPPL

   - Pemeriksaan SPPL



4. Penerbitan rekomendasi dan izin lingkungan.
5. Pencetakan peraturan perundangan di bidang lingkungan.
6. Pembinaan penyusunan dokumen Lingkungan Hidup.




1. Menyususn rencana kegiatan Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan penegakan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam Lingkungan Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;

5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
7. Melakukan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
8. Melakukan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
9. Melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
10. Melakukan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas tindak lanjut pengaduan;
11. Melakukan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan ;
12. Melakukan sosialisasi tata cara pengaduan;
13. Melakukan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin PPLH;
14. Melakukan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH;
15. Melakukan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH;

16. Melakukan pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPHL;
17. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
18. Melakukan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum lingkungan;
19. Melakukan pelaksanaan penegakan hokum atas pelanggaran PPLH;
20. Melakukan pelaksanaan penyidikan perkara pelangaran lingkugan hidup;
21. Melaksanakan penanganan barang bukti dan penanganan barang bukti dan penanganan hokum pidana secara terpadu;
22. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
23. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
24. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
25. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

26. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Lingkungan Hidup, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

# BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS

# BAB IV

## BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( limabah B3 ) adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung B3. B3 adalah zat,energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan dapat mebahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

### TUPOKSI *TUGAS POKOK FUNGSI*

**TUGAS**

Membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas.

**SEKSI**

1. **Seksi Pengelolaan Sampah**
2. **Seksi Limbah Bahan Berbahaya**

### 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

**FUNGSI**

**a.** Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah, limba bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;

**b.** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;

**c.** Pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas; dan

**d.** Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah
2. Peraturan menteri pekerjaan umum No. 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

**Tabel**

| NO. | PEGAWAI | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | PNS | 34 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Staf | 3 |
| 3. | Bank Sampah | 24 |
| 4. | Sopir Mobil | 13 |
| 5. | Operator Alat Berat | 2 |
| 6. | Sopir Motor Sampah | 22 |
| 7. | Petugas Operasional TPA | 12 |
| 8. | Penyapu | 103 |
| 9. | Tenaga Teknis | 40 |

## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENINGKATAN KAPASITAS

*Sosialisasi Pembatasan Sampah Plastik sekali Pakai di Kelurahan Benteng Selatan.*



*Kerjabakti di Jalan Metro (Depan Bank Sampah Tanadoang)*





*Kerja bakti di Pasar tpi*



*Gerakan Jum'at Bersih*

**SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH**

**KEGIATAN SEKSI PENGELOLAAN SAMPAH**

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

6. Melakukan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten;
7. Melakukan penetapan target perguruan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
8. Melakukan perumusan kebijakan pengurangan sampah;
9. Melakukan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen / industry;
10. Melakukan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
11. Melakukan pembinaan pendaurulangan sampah;
12. Melakukan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
13. Melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
14. Melakukan perumusan kebijakan penanganan sampah kabupaten;
15. Melakukan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
16. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
17. Melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan sampah;

18. Melakukan penetapan lokasi tempat-tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah sementara terpadu dan tempat pembuangan akhir sampah;
19. Melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping;*
20. Melakukan penyusanan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
21. Melakukan pemberian kompensasi dampak negative kegiatan pemrosesan akhir sampah;
22. Melakukan pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
23. Melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
24. Melakukan kebijakan perizinan pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
25. Melakukan perumusan kebijkan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
26. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

27. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pengelolaan Sampah;
28. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengelolaan sampah;
29. Melakukaan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
30. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, serta memberi saran pertimbangan kepada ppimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
32. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan ses.uai dengan bidang tugasnya




1. Menyusun Rencana Kegiatan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
7. Melakukan pelaksanaan kajian teknis perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten;
8. Melakukan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten;
9. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3;
10. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten;
11. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten;

12. Melakukan kajian teknis pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
13. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
14. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis limbah B3;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. Menila kerja pegawai aparatul sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan Tugas kedinasan lain yang dioperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

## SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

### KEGIATAN SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelkasanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Melakukan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;
7. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH;

8. Melakukan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
9. Melakukan pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
10. Melakukan pembentukan panitia pengakuan MHA;
11. Melakukan penyusanan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
12. Melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
13. Melakukan fasilitas kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
14. Melakukan penyiapan modal peningkatan kapasitas atau peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
15. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas atau peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
16. Melakukan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
17. Melakukan pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

18. Melakukan pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
19. Melakukan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
20. Melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
21. Melakukan penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
22. Melakukan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
23. Melakukan pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
24. Melakukan penyusunan kebijakan tatacara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
25. Melakukan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
26. Melakukan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
27. Melakukan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional;
28. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
29. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

30. Melakukan koordinasi dan konsultasi dangan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
31. Menilai kinerja pegawai aparatul sipil segara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
33. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

# BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB**
**V**




**TUGAS**

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

**SEKSI**

1. **Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
2. **Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**
3. **Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup**

**FUNGSI**

a. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
c. Pelaksanaan administrasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

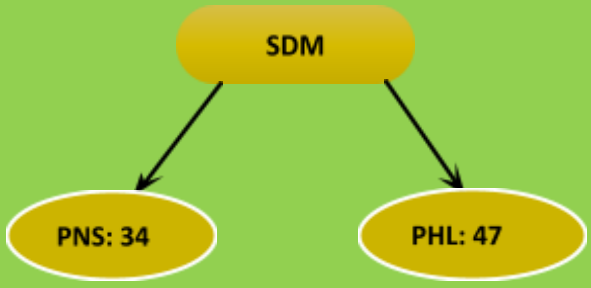
**DASAR HUKUM**

a. Undang- undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
b. Undang- undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4377.
c. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 )

d. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
e. Peraturan pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 );
f. Peraturan pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5103 );
g. Peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 05 / PRT / M / 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruan terbuka hijau di kawasan perkotaan;
h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9.

j. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahunn 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sselayar Tahun 2012 Nomor 28);




SARAPRAS

| No. | Sarana Prasarana | Jumlah | Stauan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kendaraan Roda 2 | | |
| 2. | Kendaraan roda 3 | | |
| 3. | Kendaraan Roda 4 | | |

## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP



*Pengambilan sampel dan uji fisik air sumur vetran*



*Pengambilan passive sampler di kawasan transportasi ( TERMINAL BENTENG, JL. PAJLAWAN)*





Pemasangan passivesample di kawasan pemukiman ( JL. JEND. SUDIRMAN )

Pemasangan passive sampler di kawasan transportasi ( TERMINAL BENTENG, JL. PAHLAWAN )



Pemasangan passive sampler di kawasan industry ( PLTD TANGKALA )



Pengambilan passive sampler di kawasan industry ( PLTD TANGKALA )



Pengambilan sampel di uji fisik Laundry Restu



Pengambilan sampel di uji fisik air sungai ( JLN. POROS NGAPALAKO )



*Pengambilan sampel dan uji fisik air laut Pelabuhan Benteng*



*Pengambilan sampel di uji fisik air limbah Aspal MIXING PLAN ( AMP )*

*Pengujian fisik air laut ( JLN. POROS PATTUMBUKANG)*








**Tabel**
**Hasil Uji Kualitas Air Sumur**

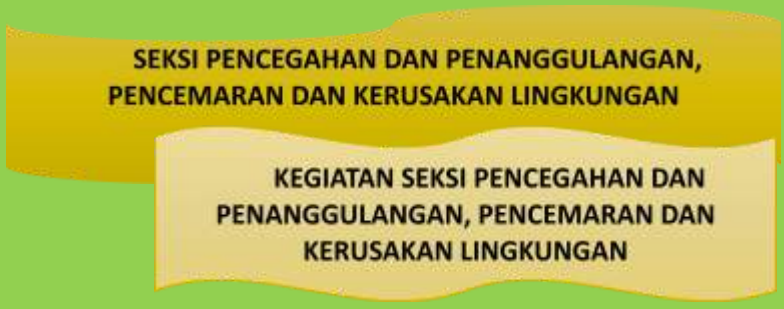
| Lokasi | Parameter | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Suhu | TDS | Ph | No 3 | COD | Besi | Amonia | Cu | Zn |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Tabel**
**Hasil Uji Kualitas Air Laut**

| Lokasi | Parameter | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Temperatur | TSS | pH | Salintas | COD | No 3 | Besi | Amonia | Cu | Zn |
| Pelabuhan Benteng | 29,3 | - | 8,51 | 36 | - | - | - | - | - | - |
| Jln.Poros Patumbukang | 3,02 | 11 | 8,65 | 39 | - | -11,1 | - | - | - | - |

Kondisi saat ini Kualitas Air Laut di Kabupaten Kepulauan Selayar masih memnuhi baku mutu lingkungan untuk beberapa pramater seperti Suhu dan pH. Namun TSS ( Kandungan Zat Tersuspensi ) Pelabuhan Patumbukang tergolong tinggi yaitu 11 ppm artinya Zat padat yang

masuk kedalam perairan tinggi sehingga dapat menjadikan indikator awal adanya pencemaran.




1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
6. Melakukan pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Melakukan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
8. Melakukan penentuan buku mutu lingkungan;
9. Melakukan pelaksanaan penanggulanagan pencemaran (Pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi
10. Melakukan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
11. Melakukan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
12. Melakukan pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
13. Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium lLingkungan);

14. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pencegahan dan Penanggulanagn, Pencemaran dab Kerusakan Lingkungan;
15. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan;
16. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB /KOTA (PENANAMAN MANGROVE DI KAMPUNG PENYU DESA BARUGAIYA**









**SEKSI PEMULIAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

## *KEGIATAN SEKSI PEMULIHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN*

1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
8. Melakukan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
9. Melakukan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
10. Melakukan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
11. Melakukan pelaksanaan inventaris GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
12. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
13. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalaian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;

14. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesusi ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB /KOTA (PEMBERSIHAN PANTAI DARI UNSUR PENCEMAR)**











SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

## KEGIATAN SEKSI PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP

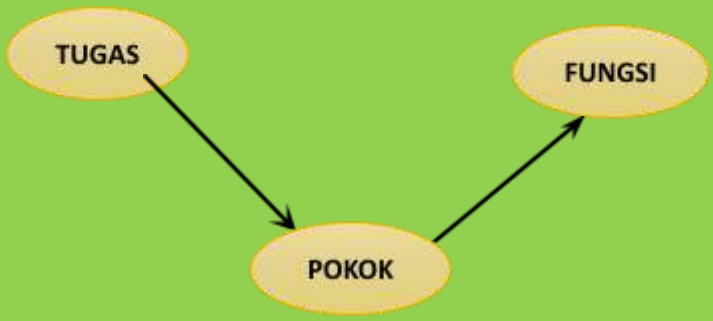
1. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendestribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam Lingkungan Seksi Pemelih araan Lingkungan Hiudup untuk Mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
7. Melakukan pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
8. Melakukan pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
9. Melakukan pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
10. Melakukan pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
11. Melakukan perencanaan konservasi keaneka ragaman hayati;

12. Melakukan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan penegndalian kerusakan keaneka ragaman hayati;
13. Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
14. Melakukan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
15. Melakukan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
16. Melakukan pengelolaan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
17. Melakukan pengelolaan kebun raya;
18. Melakukan pengelolaan RTH;
19. Melakukan pengelolaan taman keaneka ragaman hayati lainnya;
20. Melakukan pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keaneka ragaman hayati;
21. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati;
22. Menyusun perjanjian kinerja dan laporan monitoring kinerja pemeliharaan lingkungan hidup;

23. Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
24. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
25. Melihat kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

**UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**TUPOKSI**




## Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi

**Tugas Pokok**

Melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelaksanaan pengujian parameter kualitas lingkungan dan melaksanakan penyusunan SOP laboratorium Dinas Lingkungn Hidup.

**Fungsi**

Fungsi Laboratorium ini adalah;

1. Menetapkan tugas dan fungsi personal sesuai dengan kompetensinya
2. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personal
3. Monitoring dan evaluasi standar pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan serta pengelolaan limbah laboratorium
4. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja

5. Pelaksanaan pengambilan, perlakuan, transportasi dan penyimpanan uji parameter kualitas ingkungan
6. Pelaksanaan preparasi, pengujian dan analisis parameter kualitas lingkungan
7. Validasi klaim ketidakpastian pengujian
8. Perawatan dan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan
9. Pelaksanaan dokemntasi sistem manajemen mutu sesuai laboratorium
10. Penanganan pengaduan hasil pengujian
11. Melaksanakan pekerjaan pembuatan modal simulasi pengendalian pencemaran lingkungan
12. Membantu dalam melakasnakan pengawasan terhadap industri dengan mengambil sampel dan data-data lain.

## Tujuan Didirikannya UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

1. Agar pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentang lingkungan hidup;
2. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat meningkatka perannya dalam membantu pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pengujian air bersih, air baku, air limbah, tanah, udara ambient dan udara emisi tidak bergerak;
4. Untuk meningkatkan kapabilitas dan kompotensi UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;
5. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat dijadikan percontohan lainnya dalam melakukan monitoring tingkat pencemaran lingkungan diwilayahnya;

6. Agar UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dapat dijadikan Laboratorium rujukan.

## Sumber Daya Pegawai, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana

1. Sumber Daya Pegawai

   Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup

| No. | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | S2 | |
| 2. | S1 | |
| 3. | D3 | |
| 4. | SMA | |
| 5. | SMP | |
| | | |

Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Golongan Pangkat

| NO. | GOLONGAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Golongan IV | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Golongan III | |
| 3. | Golongan II | |
| 4. | TKS | |
| | | |

Kualifikasi Pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup berdasrkana Jabatan

| NO. | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |

**Pelatihan / Kompotensi Laboratorium**

Pelatihan yang pernah dilaksanakan dan diikuti oleh pegawai UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup;

1.
2.

**Sarana dan Prasarana**

**1, Sarana**

a. Laboratorium

- 

b. Administrasi

- Ruang Keapala UPTD
- Ruang Alat Kualitas Udara
- Ruang Rapat
-

**2. Prasarana**

Pengelolaan peralatan Laboratorium sangat diperlukan untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Adapun peralatan-peralatan yang telah dimiliki UPTD Laboratorium dalam melaksanakan operasional Laboratorium adalah;

**a. Perkantoran**

- Meja Kerja
- Kursi kerja
- Meja Rapat
- Kursi Rapat
- Leptop
- Komputer
- Printer
- AC

**b. Peralatan Laboratorium**

**Alat Kualitas Air**
**Alat Kualitas udara**
**Alat Kualitas Tanah**

## KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Pengambilan Sampel uji kualitas sungai di Tabang
Pemasangan Alat Uji Kualitas Udara Di Daerah Pemukiman



*Pemasangan Alat Uji Kualita Udara di Daerah Pemukiman*

Peamsangan Alat Uji Kualitas Udara di Daerah Terminal



DLH Kabupaten Kep. Selayar



Perkantoran



Pemukiman



Transportasi

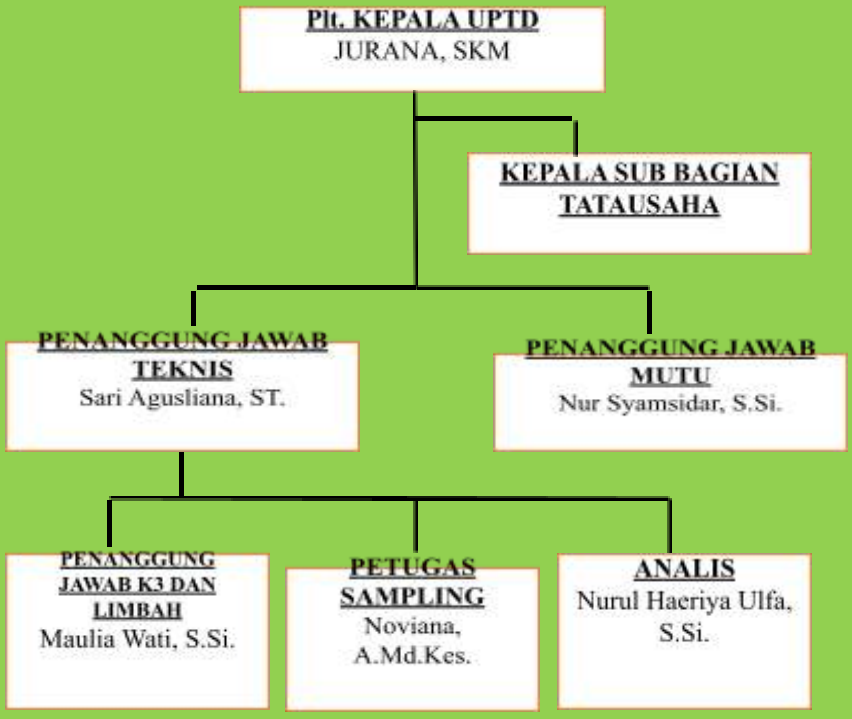


Industri

## JABATAN TEKNIS YANG TERSEDIA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI UPTD LABORATORIUM

UPTD Laboratorium Dina Lingkungan Hidup saat ini telah memiliki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya yaitu:

Struktur Organisasi



**DAFTAR PEGAWAI UPTD LABORATORIUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

| NO. | NAMA / NIP | PANGKAT/ GOLONGAN | JABATAN | TUGAS/FUNGSI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURANA, SKM 198807272015032008 | Penata Muda Tingkat 1 III/ b | Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | Bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan evaluasi operasional teknis laboratorium |
| 2 | MASLINDA, S.E 197601162007012017 | Penata Muda III/ a | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | Membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan data dan pelayanan administrasi laboratorium |
| 3 | NUR SYAMSIDAR, S.Si | - | Tenaga Teknis (Manager Mutu) Unit Pelaksana Teknis Laboratoriu | Bertanggung jawab dalam penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan aturan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | m Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | SNI Laboratorium |
| 4 | SARI AGUSLIANA, S.T | - | Tenaga Teknis (Manager Teknis) Unit Pelaksana Teknis Laboratoriu m Dinas Lingkungan Hidup Kabupataen Kepulauan Selayar | Bertanggung jawab dalam memastikan penerapan aspek operasional teknis dan kelengkapan laboratorium |
| 5 | NURUL HAERIYA ULFA, S.Si | - | Tenaga Teknis (Analis) Unit Pelaksana Teknis Laboratoriu m Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | Bertanggung jawab terhadap pengujian contoh uji (sampel) menggunakan metode yang sudah di tetapkan sesuai dengan aturan SNI laboratorium |
| 6 | NOVIANA WATI, S.Si | - | Tenaga Teknis (Petugas | Bertanggung jawab dalam melaksanakan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sampling) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | pengambilan sampel sesuai dengan intruksi metode sampling |
| 7 | MAULIA WATI, S.S i | - | Tenaga Teknis (K3 dan Limbah) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar | Bertanggung jawab dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam laboratorium serta mengevaluasi tindakan berbahaya dalam laboratorium |













## A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah ada sejak adanya otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dulu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan dengan seiring perjalanan waktu mengalami beberapa perubahan nama / nomenklatur, dan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475), maka selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2013 tentang Perubahan keadaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 tahun 2008.

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara geografi terletak di Kecamatan Benteng, Kecamatan yang ada di Ibu Kota Kabupaten.

## 1. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2011 merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan.Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Membantu Bupati dalam pelayanan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Mengadakan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

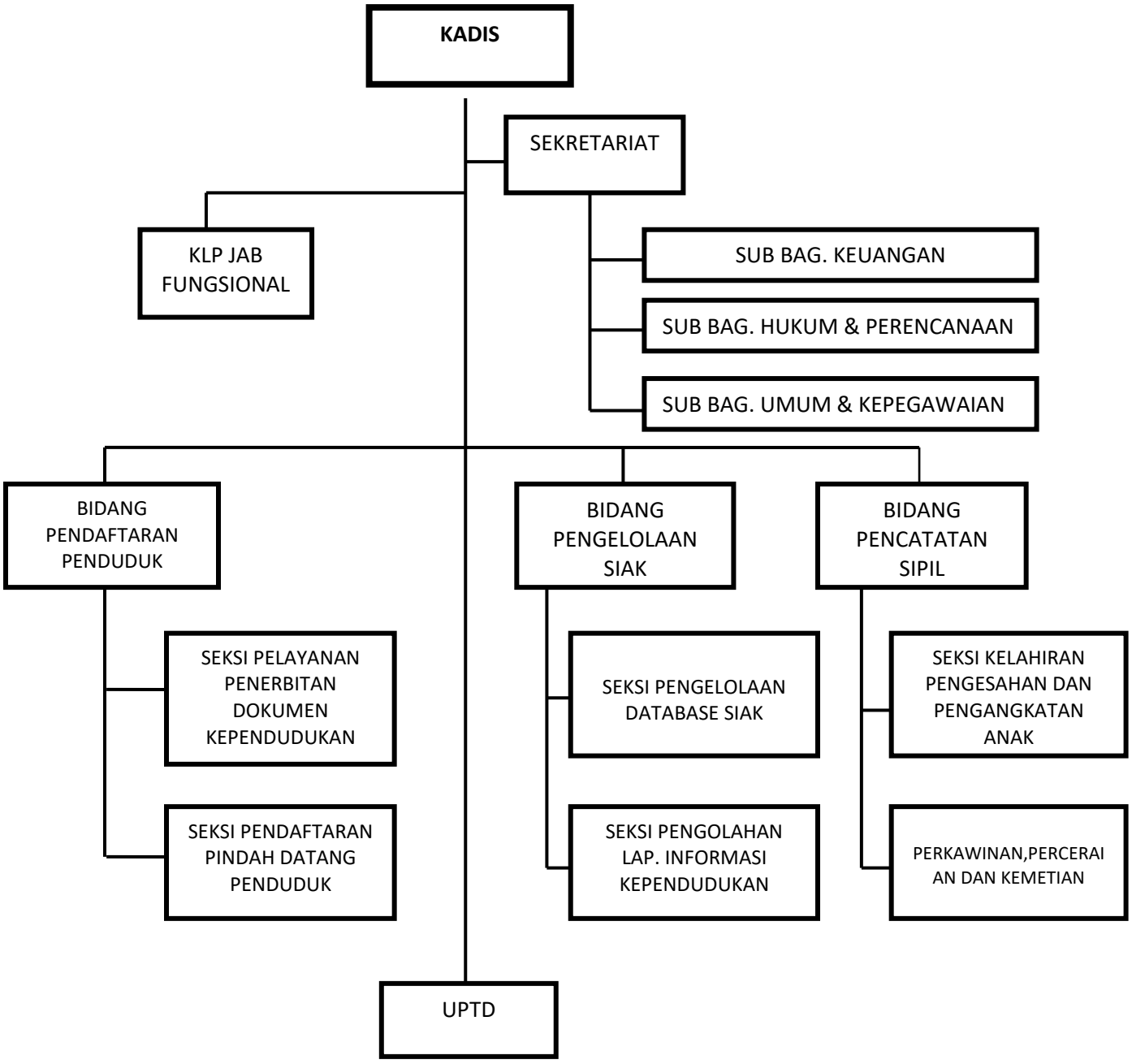
1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Hukum dan Perencanaan;
   c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi :
   a. Seksi Pendaftaran Pindah Datang Penduduk;
   b. Seksi Pelayanan Peneribitan Dokumen Kependudukan
   ( KK, KTP dan Boiodata Penduduk ).
4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :

a. Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak
b. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian

5. Bidang Pengelolaaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK ) membawahi :
   a. Seksi Pengelolaan data SIAK;
   b. Seksi Pengolahan Laporan Informasi Kependudukan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. UPT.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Adapun tugas pokok dan fungsi masing – masing bagian organisasi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

   Tugas pokok Kepala Dinas adalah membantu Bupati dalam pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. Pembinaan Umum, Pembinaan teknis, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Penyuluhan;
   b. Pemamfaatan, Pengawasan, dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan;
   c. Pelaksanaan Koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan program,pelaksanaan dan pengawasan program; dan
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Sekretariat

   Tugas pokok Ssekretaris adalah melaksanakan penatausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana serta urusan hukum dan perundang – undangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi :

   a. Pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas;
   b. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan kepustakaan.
   c. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

d. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan pada bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. Proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
g. Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan Dinas;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawain

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

  a. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan Dinas;
  b. Melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  c. Melaksanakan pembinaan SDM aparatur, dan;
  d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Sub Bagian Hukum dan Perencanaan

  Sub Bagian Hukum dan Perencanaan, mempunyai tugas:

  a. Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang – undangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  b. Melaksanakan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan;
  d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

e. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
**f.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

- Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan administrasi kebutuhan keuangan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan dan neraca di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Melaksanakan koordinasi tugas – tugas kebendaharaan, dan;
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

**3. Bidang Pendaftaran Penduduk**

Tugas Pokok Bidang Pendaftaran Penduduk adalah melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas, dalam penyiapan perumusan dan penyerasian program, kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan bidang pendaftaran penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokok bidang pendaftaran penduduk mempunyai fungsi ;

a. Penyiapan perumusan kebijakan kependudukan;
b. Sosialisasi dan bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;
c. Pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan;

d. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
e. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk;
g. Pengawasan dan penyelenggarakan pendaftaran penduduk;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Seksi Pendaftran Pindah Datang Penduduk

Kepala Seksi Pendaftran Pindah datang Penduduk mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pendaftaran perubahan alamat dan pindah datang penduduk;
b. Melaksanakan pendaftaran pindah datang antar Negara;
c. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk rentang administrasi kependudukan;
d. Menyelenggarakan administrasi kependudukan;
e. Melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran, perubahan alamat dan pindah datang penduduk;
f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pendaftaran penduduk yang bertrangsmigrasi dan pendataan penduduk rentang administrasi kependudukan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP, dan Biodata Penduduk )

Kepala Seksi Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan ( KK, KTP dan Biodata Penduduk ) mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk;

b. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penerbitan KK, KTP, dan Biodata Penduduk;
c. Melaksanakan penerbitan/pencetakan dokumen kependudukan ( KK, KTP dan Biodata Penduduk);
d. Melaksanakan penatausahaan dokumen kependudukan ( KK, KTP, dan Biodata Penduduk );
e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
f. Melaksanakan sosialisasi tentang dokumen kependudukan ( KK, KTP, dan Biodata Penduduk); dan
**g.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan**.**

**4. Bidang Pencatatan Sipil**

Tugas pokok Bidang Pencatatan Sipil adalah melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang penyiapan administrasi, pengelolaan pelayanan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan pencatatan sipil di daerah;
b. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pencatatan sipil
c. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil;
e. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak

  Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran, Pengesahan Anak dan Pengakuan Anak, mempunyai tugas :

  a. Melaksanakan pelayanan administrasi pencatatan kelahiran, pengesahan anak dan pengakuan anak;
  b. Melaksanakan penerbitan dokumen hasil pencatatan kelahiran, pengesahan anak dan pengakuan anak;
  c. Melaksanakan penatausahaan dokumen hasil pencatatan kelahiran, pengesahan anak dan pengakuan anak;
  d. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencatatan sipil, pengakuan anak dan pengesahan anak;
  e. Melaksanakan koordinasi dengann pihak terkait mengenai pencatatan kelahiran , pengesahan anak dan pengakuan anak;
  f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan pencatatan kelahiran, pengesahan anak dan pengakuan anak;
  ***g.*** Melaksanakan tugas kain yang diberikan pimpinan`

- Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian

  Kepala Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Kematian, mempunyai tugas :

  a. Melaksanakan pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;
  b. Melaksanakan penerbitan dokumen pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;
  c. Melaksanakan penatausahaan dokumen pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;
  d. Melaksanakan sosialisasi kepada masayarakat tentang pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;

e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;
f. Melaksanakan koordinasi dan pihak terkait dalam bidang pencatatan perkawinan, perceraian dan kematian;
g. Malaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

**5. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK*)***

Tugas Pokok Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah melaksanakan sebagai fungsi Kepala Dinas dalam Pengolahan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK)

Dalam melaksanakan tugas pokok, bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten;
b. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
c. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
e. Evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
f. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
g. Pengawasan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Seksi Pengelolaan Database SIAK

  Kepala Seksi Pengelolaan Database SIAK mempunyai tugas :

  a. Melaksanakan perekaman data kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  b. Melaksanakan Penerbitan Nomor Induk Penduduk melalui SIAK;
  c. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data SIAK;
  d. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi database SIAK;
  e. Melaksanakan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
  f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
  h. Seksi pengelolaan laporan informasi kependudukan

- Seksi Pengelohan Data Informasi Kependudukan

  Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan mempunyai tugas :

  a. Melaksanakan Pengelolaan Laporan Informasi Kependudukan Skala Kabupaten;
  b. Melaksanakan Pelaporan Informasi Administrasi Kependudukan Secara Skala;
  c. Melaksanakan Penyajian dan Pesiminasi Data dan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## 2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sebanyak 68 orang sesuai kondisi akhir tahun 2016, terdiri dari 25 orang berstatus PNS , 7 Orang tenaga kontrak dan 36 orang tenaga Sukarela dengan klasifikasi menurut golongan/ruang, tingkat pendidikan, dan jabatan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Klarifikasi Pegawai Menurut Golongan**

| NO | Golongan/ Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Golongan IV/c | 1 Orang |
| 2. | Golongan IV/b | 2 Orang |
| 3. | Golongan IV/a | 2 orang |
| 4. | Golongan III/d | 6 Orang |
| 5. | Golongan III/c | 3 Orang |
| 6 | Golongan III/b | 1 orang |
| 7 | Golongan III/a | 2 orang |
| 8 | Golongan II/c | 3 orang |
| 9 | Golongan II/b | 2 orang |
| 10 | Golongan II/a | 3 orang |
| 11 | Kontrak Bupati | 7 orang |
| 12 | Sukarela | 36 orang |

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 didominasi tenaga sukarela yaitu sebanyak 62%, sementara PNS hanya 38 % di tahun 2016.

**Tabel 1.2**

**Klarifikasi Pegawai Menurut Jabatan**

| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Eselon II-b | 1 Orang |
| Eselon III-a | 1 Orang |
| Eselon III-b | 3 Orang |
| Eselon IV-a | 8 Orang |
| Staf PNS | 12 Orang |
| Staf Non PNS | 43 orang |

**Tabel 1.3**

**Klarifikasi Pegawai Menurut Kualisifikasi Pendidikan**

| Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Sarjana S2 | 1 Orang |
| Sarjana S1 | 30 Orang |
| Sarjana Muda | 2 Orang |
| SMA | 35 Orang |

**Tabel 1.4**

**Klarifikasi Pegawai Menurut Konsentrasi Pendidikan**

| Konsentrasi Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Sains | 1 Orang |
| Pertanian | 4 Orang |
| Ilmu Administrasi | 3 Orang |
| Manajemen | 17 Orang |
| Pendidikan Agama Islam | 1 Orang |
| Tehnik | 2 Orang |

| | |
|---|---|
| Ilmu Pendidikan | 1 Orang |
| SMA Sederajat | 36 Rang |

### 3. Sarana dan Prasarana

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Klarifikasi Pegawai Menurut Konsentrasi Pendidikan**

| No | Nama Barang | Jumlah Barang | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Gedung | 1 Buah | |
| 2 | Mobil Jabatan | 2 Unit | |
| 3 | Kendaraan Roda Dua | 13 Unit | |
| 4 | Meja | 28 Buah | 15 Rusak Berat |
| 5 | Kursi | 139 Buah | 29 Rusak Berat |
| 6 | Lemari | 12 Buah | 2 Rusak Berat |
| 7 | Laptop | 14 Buah | 2 Rusak Berat |
| 8 | Kamera | 5 Buah | 5 Rusak |
| 9 | Mesin Laminating | 1 Buah | 1 Rusak |
| 10 | Server | 4 Buah | 2 Rusak |
| 11 | Komputer | 22 Set | 19 Rusak Berat |
| 12 | Meja Komputer | 12 Buah | 6 Rusak Berat |
| 13 | AC | 13 Unit | 1 Rusak Berat |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 5 Unit di Kec |
| 14 | Printer | 25 Unit | 22 Rusak Berat |
| 15 | Scanner | 8 Buah | |
| 16 | Genset | 6 Buah | 1 Rusak Berat<br>5 Buah di Kec. |
| 17 | Rak Besi | 6 Unit | |
| 18 | Mesin Ketik Elektronik | 1 Unit | |
| 19 | Brangkas | 1 Buah | |
| 20 | Proyektor | 1 Buah | |

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sarana dan prasarana belum memadai untuk dijadikan standar pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat/Stakeholder

**4. Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja yang tersedia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 3.465.952.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan = Rp. 100.000.000,-
b. Belanja Tidak langsung = RP. 1.580.050.000,-
c. Belanja Langsung = RP. 1.785.902.000,-

**Adapun perincian anggaran belanja langsung adalah :**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **509.142.000,-** |
| | a. Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran | 114.700.000,- |
| | b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 31.500.000,- |
| | c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 7.442.000,- |
| | d. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Keluar Daerah | 355.500.000,- |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **176.760.000,-** |
| | a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 20.000.000,- |
| | b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | 30.000.000,- |
| | c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas | 46.250.000,- |

| | | |
|---|---|---|
| | Operasional | |
| | d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 15.000.000,- |
| | e. Pengadaan Meubeleur | 22.500.000,- |
| | f. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua | 18.000.000,- |
| | g. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 25.000.000,- |
| **3.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **25.000.000,-** |
| | a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | 25.000.000,- |
| **4.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **60.000.000,-** |
| | a. Pendidikan dan Pelatihan Formal | 60.000.000,- |
| **5.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan** | **125.000.000,-** |
| | a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 40.000.000,- |
| | b. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur (SOP) | 30.000.000,- |
| | c. Penyusunan Renstra SKPD | 20.000.000,- |
| | d. Penyusunan Aset SKPD | 15.000.000,- |
| | e. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | 20.000.000,- |
| **6.** | **Program Penataan Administrasi Kependudukan** | **890.000.000,-** |
| | a. Intensifikasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 100.000.000,- |
| | b. Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam Sistem Informasi administrasi Kependudukan | 120.000.000,- |

| | | |
|---|---|---|
| | c. Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | 84.220.500,- |
| | d. Penerbitan Akta Keliling Bagi Anak Indonesia | 85.000.000,- |
| | e. Penerbitan KTP-Elektronik | 105.000.000,- |
| | f. Pembangunan dan Pengeporasian SIAK Secara Terpadu | 115.000.000,- |
| | g. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan | 100.000.000,- |
| | h. Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan | 40.000.000,- |
| | i. Sosialisasi PERDA Administrasi Kependudukan | 30.000.000,- |
| | j. Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil | 110.779.500,- |
| **JUMLAH** | | **1.785.902.000,-** |

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

## 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan selayar Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturam Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## 21. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PMD

### 2.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian disingkat DIS.PMD mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

### 2.1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

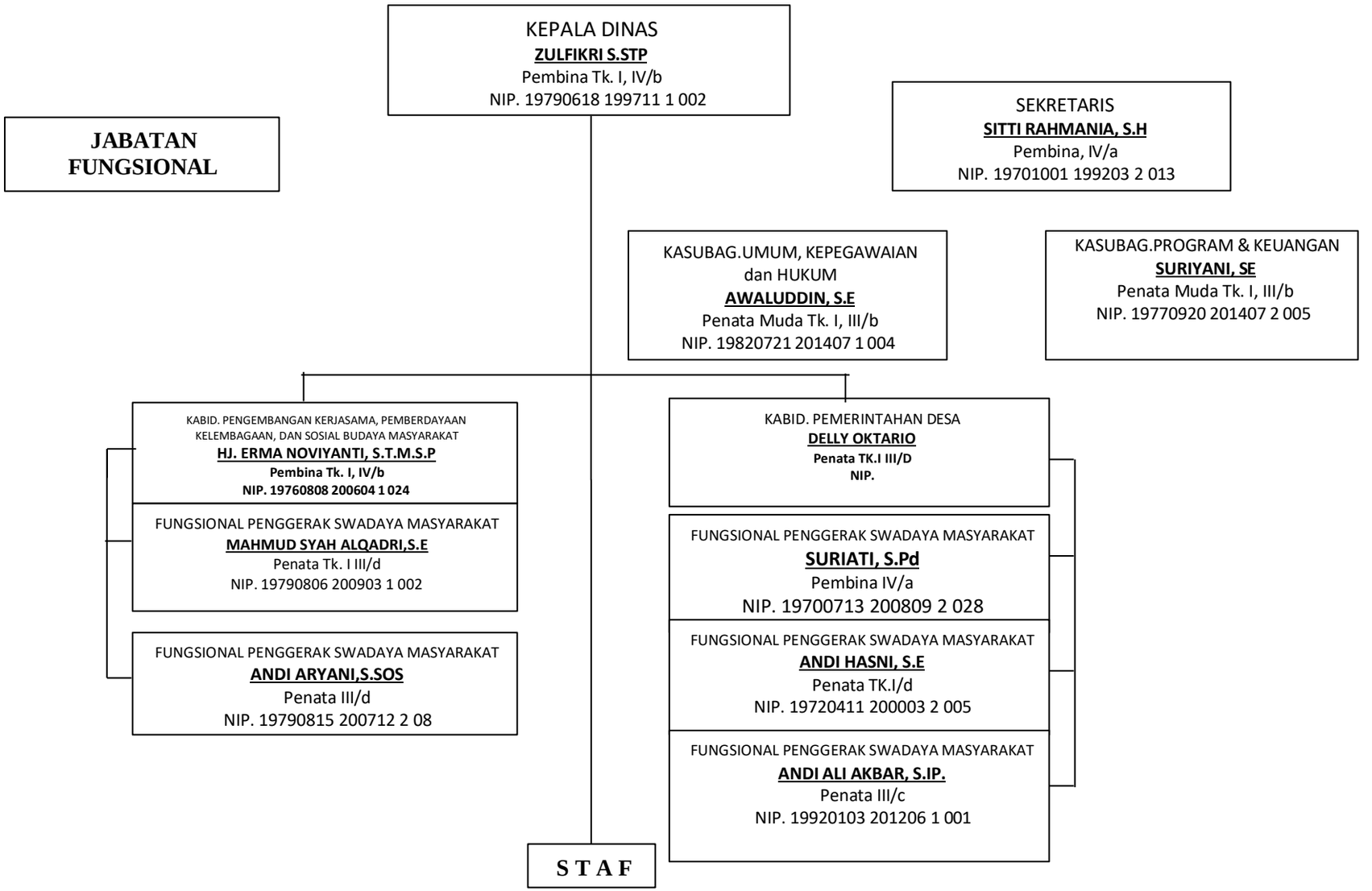
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**2.1.3 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

# STRUKTUR ORGANISASI
# DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
# TAHUN 2025



#### 2.1.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistibusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masayarakat dan desa;
g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, serta usaha ekonomi desa ;
h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan Dinas ;
i. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang bina pemerintahan desa, pengembangan kerjasama desa, kelembagaan dan

sosial budaya masyarakat, pembangunan, sumber daya alam dan ekonomi desa.

k. menyelenggarakan koordinasi, fasiitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaklaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemerintahan desa;

l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengembangan kerjsama;

m. menyelenggarakan koordinasi, fasiitasi , pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.

n. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;

o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekini dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

p. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa;

q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsukutasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi;

r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;

s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. 1.3.2 Sekretaris**.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan fungsi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;

c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;

d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi aparatur sipil negara lingkup Dinas ; dan

e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

f. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, singkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilakasanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan Tugas;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;

l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

m. melaksanakan dan mengoordinasikan adaministrsai pengadaan dan penghapusan barang;

n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;

o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan;

s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

v. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

**2.1.3.3 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;

h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;

i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;

j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;

k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi

pelaksanaan program dan kegiatan;

l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;

m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;

n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan peundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;

s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;

t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;

u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembagan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturam perundang-undangan;

w. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

x. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasa sesuai dengan bidang tugasnya;

#### 2.1.3.4 Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan informasi, perjanjian kinerja serta penyusunan laporan keuangan. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk Pelaksanaan Tugas :
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
f. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
i. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
j. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
k. menyiapkan bahan dan melakukan peamntauan evaluasi kinerja;
l. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengelola adaministrasi keuangan Dinas;
m. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
n. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
o. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;

p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
r. menyusun laporan realisasi fisik keuangan/anggaran;
s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
t. memfasilitasi penjaringan inovasi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
u. mengoordinasikan pelakasanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
v. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan keuangan;
x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas;
y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
z. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
aa. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 2.1.3.5 Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
c. pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan administrasi bina pemerintahan desa; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Bina Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa;
h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
i. melaksanakan koordinasi dan fasiltasi pelaksanaan produk hukum desa;
j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan atau melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status, penetapan batas desa;

m. menyiapkan bahan, mengoodinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;

n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;

o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan kode desa;

p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan desa;

q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan desa;

r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi desa;

s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kelembagaan pemerintahan desa;

t. melakukan fasilitasi pembinaan badan permusyawaratan desa;

u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;

v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa dalam peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat desa;

w. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset desa;

y. melakukan perencanaan dan anggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;

z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;

aa. melakukan penataan dan pemanfaatan aset desa;

bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;

cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

dd. menilai kinerja pegawai aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan;

ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.3.6 Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat**

Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Kerjasama Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat ;
d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan

e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masayarakat;
h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara;
i. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama antar desa dengan lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan, dan kedaruratan;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, kerjasama, dan sosial budaya masyarakat meliputi pengembangan desa dan desa

adat, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

k. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan , pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan orientasi pengembangan kapasitas pembina desa, aparatur desa dan perangkat desa di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa;
p. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
q. Melaksanakan fasilitasi pembinaan, pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, pembangunan dan non lembaga pemerintah;
r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan kemasyarakata;

s. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pelaporan pekan inovasi perkembangan desa;
t. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan desa adat dibidang pemerintahan, kewilayahan, dan lembaga kemasayakatan;
u. Melaksanakan penyiapan bahan analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;
v. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
w. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;
x. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan penyusunan profil desa dan desa adat;
y. Mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
z. Menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan tekonolgi perdesaan;
aa. Mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan tekonolgo tepat guna;
bb. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
cc. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
dd. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
ee. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2.2 Sumber Daya Dinas PMD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sumber daya manusia sejumlah 18 orang PNS terdiri dari 9 orang laki-laki dan 9 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 100%. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 72,2% PNS atau sebanyak 13 orang PNS berpendidikan sarjana, 11,11% atau sebanyak 2 orang PNS berpendidikan DIII (Diploma), 16,66% atau sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 94,74% atau 18 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 5,26% atau 1orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/c.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hingga saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sebanyak 17 PNS orang dengan jenis jabatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025**

| NO | JABATAN | JENIS JABATAN | JUMlAH |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas PMD | Pimpinan Tinggi Pratama | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas PMD | Administrator | 1 |
| 3 | Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa | Administrator | 1 |
| 4 | Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya | Administrator | 1 |
| 4 | Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum | Pengawas | 1 |
| 5 | Kasubag. Program dan Keuangan | Pengawas | 1 |
| 4 | Penggerak Swadaya Masyarakat | Fungsional | 5 |
| 5 | Pengadministrasi Perkantoran | Pelaksana | 6 |
| 6 | Penelaah Teknis Kebijakan | Pelaksana | 2 |
| 7 | Pengelola Data dan Informasi | Pelaksana | 2 |
| 8 | Penata Layanan Operasional | Pelaksana | 4 |
| | Jumlah | | 25 |

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2**
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2025**

| NO | PENDIDIKAN | GOLONGAN | | | | | | | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | IX | KONTRAK | SUKARELA | |
| 1 | SD | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 2 | SLTP | - | - | - | - | | | - | - | - |
| 3 | SLTA | - | 1 | 1 | - | 4 | | 11 | - | 16 |
| 4 | D III | - | - | 2 | - | | | 1 | - | 3 |
| 5 | S1 | - | - | 9 | 2 | | 4 | 11 | - | 26 |
| 6 | S2 | - | - | - | 2 | | | - | - | 2 |
| 7 | S3 | - | - | - | - | | | - | - | - |

Sedangkan jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah seperti pada tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.3**
**Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025**

| NO | JABATAN | JUMlAH (Orang) |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | 1 |
| 2 | Sekretaris Dinas | 1 |
| 3 | Kepala Bidang | 2 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 |
| 5 | Jabatan Fungsional | 5 |
| 7 | Staf PNS/PPPK | 13 |
| 9 | Staf Kontrak (PHL) | 23 |
| **Jumlah** | | 47 |

### 2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sarana / prasarana dengan susunan Perlengkapan sebagai berikut :

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 2.3 :

**Tabel 2.4**
**Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat**
**Tahun 2025**

| No. | Nama Barang | Satuan | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1 | Gedung Kantor | 1 Unit | Layak |
| 2 | Mobil | 2 Unit | Layak |
| 3 | Motor | 8 unit | Layak |
| 4 | Komputer Pc | 6 Unit | Layak |
| 5 | Laptop | 15 Unit | Layak |
| 6 | AC | 10 Unit | Layak |
| 7 | Meja Rapat | 1 buah | Layak |
| 8 | Meja Tulis | 23 buah | Layak |
| 9 | Meja ½ Biro | 28 buah | Layak |
| 12 | Kursi Putar | 15 Buah | Layak |
| 13 | Meja 1 Biro | 20 buah | Layak |
| 14 | Lemari Arsip merk aktif | 2 buah | Layak |
| 15 | Lemari arsip merk brother | 4 buah | Layak |
| 16 | Kursi Rapat Merk Futura | 72 buah | Layak |
| 17 | Sofa | 6 Unit | Layak |
| 18 | Alat-alat studio | 1 set | Layak |
| 19 | Lemari Arsip merk Frontline | 3 Buah | Layak |
| 20 | Televisi | 3 Unit | Layak |
| 21 | Kamera | 1 Unit | Layak |
| 22 | Printer | 10 Buah | Layak |
| 23 | Kulkas | 3 Buah | Layak |

## 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Tugas dan Fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang mejadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas maka kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarkat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 rata-rata mencapai target bahkan ada beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator tidak terlaksana, dikarenakan terbatasnya anggaran daerah khusunya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian Kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 90 ahun 2019 dapat dilihat pada tabel- tabel yang memuat indikator kinerja yang berbeda antara periode 2020-2021 dan Periode 2022 -2026. untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa indikator sasaran salah satu diantaranya adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran antara lain persentase desa mandiri, desa berkembang dan tertinggal, diselenggarkan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022–2026,

**Tabel 2.5**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar**
**Tahun 2020 dan Tahun 2021-2024**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Dinas PMD Tahun ke | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (11) | (12) | (16) | (17) |
| 1. | Persentase aparatur pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100% |
| 2. | Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | | | 20 | 7 | LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD | LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD | 0 | 0 |
| 3. | Jumlah kelompok binaan PKK | | | | 81 | 99 | 81 | 99 | 100% | 100% |
| 4. | Jumlah Posyandu yang aktif | | | | 100 | 99 | 100% (303 Posyandu) | 100% (305 Posyandu) | 100 | 93% |
| 5. | Persentase BUMDES yang aktif | | | | 75% | 99% | 43,59% | 43,59% | 94% | 100 % |
| 6. | Jumlah Desa yang memanfaatkan Tekonologi Tepat Guna | | | | 10 Desa (Kelompok) | 10 Desa (Kelompok) | 10 Desa (Kelompok) | 10 Desa (Kelompok) | 100% | 100% |
| 7. | Transmigrsai Lokal (KK) | | | | 20 KK | 20 KK | 0 (Belum ada lokasi transmigrasi | 0 (Belum ada lokasi transmigrasi | 0 | 0 |
| 8. | Persentase Desa Mandiri | | | | 3 Desa (16,05%) | 6 Desa (24,69%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Persentase Desa Berkembang | | | | 10 Desa (58,01%) | 6 Desa (65,43%) | 5 Desa | 9 Desa | 50% | 150% |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Dinas PMD Tahun ke | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| 10 | Persentase Desa Tertinggal | | | | 0 | 0 | Terjadi penurunan persentase sebesar 3,7% (Tahun 2019 : 37 Desa , 45,67% , Tahun 2020 : 34 Desa , 41,97%) | Terjadi penurunan persentase sebesar 11,11 % (Tahun 2021 : 25 Desa, 30,86 %, Tahun 2020, 41,97% | | |

**Tabel 2.5**
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar**
**Tahun 2022- 2024**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Dinas PMD Tahun ke | | | Realisasi Tahun ke- | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) | (12) | (13) | (16) | (17) | (18) |
| 1. | Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100% | 0 |
| 2. | Persentase Peningkatan Kerjasama Desa | | | | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 0 | 8,6% | 0 | 0 | 232 % | 0 |
| 3. | Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya | | | | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 100% | 100% | 100% |

Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 ini mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa indikator Tahun 2020 sampai 2021 dan Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mempunyai indikator yang berbeda. Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar smenunjukkan sebagian indikator sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi target, adapun indikator yang tidak terlaksana disebabkan karena keterbatasan anggaran diantaranya yaitu : Cakupan Penyelenggaran Penataan Desa yang difasiitasi sampai pada tahun 2023 sebesar 100%, namun pada tahun 2024 indikator tidak terlaksana, Persentase Peningkatan Kerjasama Desa pada Tahun 2023 sebesar 8,6 %, dari hasil fasilitasi kerjasama antar desa maka terbentuk satu kerjasama desa yakni terbentuknya BUMDesma (BUMDES BERSAMA) yang melibatkan 8 Desa. Cakupan Administrasi Desa hingga pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 81 Desa, yang meliputi pembinaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan semakin meningkatnya sistem yang digunakan oleh pemerintah salah satunya aplikasi SISKEUDES. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sampai pada Tahun 2024 sebesar 33,33 % atau 100%. Pada Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan Peningkatan Kapasitas LKD, selain diadakan pembinaan kedesa-desa, dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap LKD dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Capaian didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

**Tabel 2.6**
**Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024**

| Indikator | Satuan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa | % | 3,75 | 10 | 27,16 | 38,27 | 48,14 |

Tingginya Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa menandakan semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarkatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Sejak tahun 2019, status desa swasembada diganti menjadi desa maju dan mandiri untuk Indeks Desa Membangun (IDM). Perentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2020 sebesar 3,75 persen, pada tahun 2021 meningkat menjadi 10 persen dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 10 persen dan pada tahun 2023 dan tahun 2024 masing- masing meningkat menjadi 38,27 dan 48,14.

**Tabel 2.7**
**Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024**

| No | Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Desa Mandiri | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 |
| 2 | Desa Maju | 3 | 8 | 22 | 17 | 17 |
| 3 | Desa Berkembang | 41 | 46 | 44 | 42 | 36 |
| 4 | Desa Tertinggal | 34 | 25 | 12 | 8 | 6 |
| 5 | Desa Sangat Tertinggal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2020-2024), dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah status desa mandiri, desa maju, desa berkembang serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

IDM (Indeks Desa Membangun) disusun dari tiga pilar utama yaitu Indeks Sosial, Indeks Ekonomi, dan Indeks Lingkungan yang terdiri dari 22 variabel dan 52 indikator dengan perhitungan tertentu. Rentang skor pengukuran status desa dalam IDM dari 0,27–0,92. Klasifikasi status masing-masing desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: (1) Desa Sangat Tertinggal: < 0,491; (2) Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599; (3) Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707; (4) Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815; (5) Desa Mandiri: > 0,815.

Dalam melihat skor dan ambang batas IDM, terdapat tiga status desa yang masuk dalam kondisi rentan. Mulai dari dari status Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Rentan dalam arti, jika ada salah satu skor indikator yang bergeser, maka dengan seketika semakin menurun, misalnya dari status Desa Berkembang akan menjadi Desa Tertinggal atau Desa Sangat Tertinggal.

Status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal memiliki nilai skor dan situasi yang berbeda. Dengan status desa yang seperti ini diharapkan pendekatan kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah juga berbeda dengan desa lainnya. Status desa tertinggal dan sangat tertinggal dikarenakan minimnya atau desa tidak memiliki fasilitas dasar, seperti pasar, jalan dan kondisinya, fasilitas kesehatan dan tenaganya.

Status Desa Berkembang adalah nilai tengah, dan rentan. Faktor-faktor tertentu akan dapat membuat statusnya turun, tapi juga bisa naik menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri. Agar posisinya bisa naik menjadi Desa Maju, sebuah Desa Berkembang harus mampu mengolah daya potensi desa, mengelola informasi yang baik untuk warga, memiliki inovasi dan prakarsa, dan kewirausahaan.

Setelah mendapat status Desa Maju, desa itu diharapkan menjadi Desa Mandiri jika fasilitas dasar desa sudah terpenuhi. Sebuah Desa Mandiri harus mampu mengelola potensi desa yang dimiliki, memiliki inovasi dan kewirausahaan desa. Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Berikut basis data desa berdasarkan status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun terakhir (tabel 2.5):

**Tabel 2.8**
**Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar**
**Tahun 2023-2024**

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai IKS | | Nilai IKE | | IKL | | NILAI IDM | | STATUS IDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 1 | Bontoharu | Bontosunggu | 0,8514 | 0,87 | 0,8167 | 0,82 | 0,9333 | 0,93 | 0,8671 | 0,8729 | MANDIRI | MANDIRI |
| 2 | Bontoharu | Bontoborusu | 0,6914 | 0,7 | 0,7333 | 0,63 | 0,4667 | 0,73 | 0,6305 | 0,6879 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 3 | Bontoharu | Bontolebang | 0,6229 | 0,62 | 0,5833 | 0,58 | 0,6667 | 0,67 | 0,6243 | 0,6243 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 4 | Bontoharu | Bontotangnga | 0,8686 | 0,87 | 0,8833 | 0,88 | 0,6667 | 0,87 | 0,8062 | 0,8748 | MAJU | MANDIRI |
| 5 | Bontoharu | Kahu-Kahu | 0,7086 | 0,71 | 0,6 | 0,6 | 0,6667 | 0,53 | 0,6584 | 0,614 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 6 | Bontoharu | Kalepadang | 0,7714 | 0,76 | 0,7667 | 0,77 | 0,5333 | 0,53 | 0,6905 | 0,6867 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 7 | Bontomatene | Pamatata | 0,7771 | 0,93 | 0,75 | 0,82 | 0,8667 | 0,87 | 0,7979 | 0,8697 | MAJU | MANDIRI |
| 8 | Bontomatene | Tanete | 0,9257 | 0,93 | 0,8667 | 0,87 | 0,6667 | 0,67 | 0,8197 | 0,8197 | MANDIRI | MANDIRI |
| 9 | Bontomatene | Bongaiyya | 0,7543 | 0,75 | 0,7667 | 0,77 | 0,9333 | 0,93 | 0,8181 | 0,8181 | MANDIRI | MANDIRI |
| 10 | Bontomatene | Kayu Bauk | 0,8114 | 0,81 | 0,7833 | 0,78 | 0,6 | 0,6 | 0,7316 | 0,7316 | MAJU | MAJU |
| 11 | Bontomatene | Barat lambongan | 0,8286 | 0,59 | 0,9333 | 0,87 | 0,6667 | 0,67 | 0,8095 | 0,7073 | MAJU | MAJU |
| 12 | Bontomatene | Bontona Saluk | 0,8343 | 0,83 | 0,9167 | 0,92 | 1 | 1 | 0,917 | 0,917 | MANDIRI | MANDIRI |
| 13 | Bontomatene | Onto | 0,8629 | 0,86 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 0,921 | 0,921 | MANDIRI | MANDIRI |
| 14 | Bontomatene | Maharayya | 0,8514 | 0,86 | 0,95 | 0,8 | 1 | 0,87 | 0,9338 | 0,8432 | MANDIRI | MANDIRI |
| 15 | Bontomatene | Menara Indah | 0,84 | 0,84 | 0,4667 | 0,47 | 0,8667 | 0,87 | 0,7244 | 0,7244 | MAJU | MAJU |
| 16 | Bontomatene | Tamalanrea | 0,8057 | 0,81 | 0,8667 | 0,87 | 0,9333 | 0,93 | 0,8686 | 0,8686 | MANDIRI | MANDIRI |
| 17 | Bontomanai | Parak | 0,8171 | 0,89 | 0,4167 | 0,93 | 0,6667 | 0,87 | 0,6335 | 0,8971 | BERKEMBANG | MANDIRI |
| 18 | Bontomanai | Barugaia | 0,9486 | 0,95 | 0,8667 | 0,87 | 0,9333 | 0,93 | 0,9162 | 0,9162 | MANDIRI | MANDIRI |

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai IKS | | Nilai IKE | | IKL | | NILAI IDM | | STATUS IDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 19 | Bontomanai | Jambuiya | 08547 | 0,6857 | 0,4333 | 0,4333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6486 | 0,6375 | BERKEMBANG | MANDIRI |
| 20 | Bontomanai | Mare-Mare | 0,6514 | 0,6171 | 0,5667 | 0,3833 | 0,6 | 0,6 | 0,606 | 0,8503 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 21 | Bontomanai | Polebunging | 0,7771 | 0,7829 | 0,5 | 0,4833 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6479 | 0,7392 | BERKEMBANG | MANDIRI |
| 22 | Bontomanai | Bonea Makmur | 0,7429 | 0,6743 | 0,5667 | 0,5167 | 0,6 | 0,6 | 0,6365 | 0,6365 | BERKEMBANG | MAJU |
| 23 | Bontomanai | Bontomarannu | 0,8 | 0,72 | 0,6333 | 0,4333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7 | 0,9027 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 24 | Bontomanai | Bonea Timur | 0,7143 | 0,7543 | 0,6667 | 0,65 | 0,8 | 0,6667 | 0,727 | 0,7365 | MAJU | MANDIRI |
| 25 | Bontomanai | Bonto Koraang | 0,76 | 0,68 | 0,4833 | 0,4333 | 0,6667 | 0,6 | 0,6367 | 0,6367 | BERKEMBANG | MAJU |
| 26 | Bontomanai | Kaburu | 0,7886 | 0,8 | 0,6 | 0,4833 | 0,4667 | 0,6667 | 0,6184 | 0,7073 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 27 | Bontosikuyu | Harapan | 0,8343 | 0,76 | 0,9333 | 0,8167 | 0,7333 | 0,5333 | 0,8337 | 0,8521 | MAJU | MAJU |
| 28 | Bontosikuyu | Patikarya | 0,7486 | 0,6571 | 0,8667 | 0,6667 | 0,8667 | 0,4667 | 0,8273 | 0,844 | MANDIRI | MANDIRI |
| 29 | Bontosikuyu | Patilereng | 0,84 | 0,6743 | 0,7667 | 0,6667 | 0,8667 | 0,8667 | 0,8244 | 0,8244 | MANDIRI | MANDIRI |
| 30 | Bontosikuyu | Laiyolo Baru | 0,7371 | 0,6857 | 0,8 | 0,5 | 0,8667 | 0,8667 | 0,8013 | 0,8013 | MAJU | MANDIRI |
| 31 | Bontosikuyu | Laiyolo | 0,7829 | 0,6743 | 0,7667 | 0,65 | 0,6 | 0,6 | 0,7165 | 0,7749 | MAJU | MAJU |
| 32 | Bontosikuyu | Lantibongan | 0,7314 | 0,6514 | 0,5833 | 0,6167 | 0,6 | 0,6667 | 0,6383 | 0,6554 | BERKEMBANG | MAJU |
| 33 | Bontosikuyu | Binanga Sombaiya | 0,7943 | 0,76 | 0,5667 | 0,5 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6759 | 0,8408 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 34 | Bontosikuyu | Lowa | 0,8457 | 0,7371 | 0,8 | 0,5667 | 0,8 | 0,6 | 0,8152 | 0,843 | MAJU | MANDIRI |
| 35 | Bontosikuyu | Appatanah | 0,8343 | 0,6571 | 0,7167 | 0,4833 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7392 | 0,7392 | MAJU | MANDIRI |
| 36 | Bontosikuyu | Tambolongan | 0,7829 | 0,6 | 0,5667 | 0,35 | 0,6667 | 0,5333 | 0,6721 | 0,6663 | BERKEMBANG | MAJU |
| 37 | Bontosikuyu | Polassi | 0,68 | 0,5829 | 0,5 | 0,4333 | 0,6667 | 0,4 | 0,6156 | 0,6137 | TERTINGGAL | BERKEMBANG |
| 38 | Bontosikuyu | Khusus Bahuluang | 0,7714 | 0,6629 | 0,5833 | 0,3 | 0,8667 | 0,6667 | 0,7405 | 0,7627 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 39 | Pasimasunggu | Kembang Ragi | 0,8171 | 0,7029 | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,6667 | 0,739 | 0,871 | BERKEMBANG | MAJU |

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai IKS | | Nilai IKE | | IKL | | NILAI IDM | | STATUS IDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 40 | Pasimasunggu | Ma'minasa | 0,6629 | 0,5943 | 0,6833 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6487 | 0,683 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 41 | Pasimasunggu | Tanamalala | 0,7429 | 0,5829 | 0,5333 | 0,4333 | 0,6 | 0,6667 | 0,6273 | 0,6965 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 42 | Pasimasunggu | Labuang Pamajang | 0,7429 | 0,6571 | 0,5667 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,6365 | 0,6921 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 43 | Pasimasunggu | Bontosaile | 0,6743 | 0,6514 | 0,6667 | 0,4 | 0,6 | 0,6667 | 0,6584 | 0,666 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 44 | Pasimasunggu | Teluk Kampe | 0,64 | 0,6286 | 0,7 | 0,5333 | 0,6 | 0,6 | 0,6581 | 0,6644 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 45 | Pasimasunggu | Labuang Pamajang | 0,5657 | 0,5771 | 0,5667 | 0,4833 | 0,6 | 0,6667 | 0,6022 | 0,6098 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 46 | Pasimarannu | Bonerate | 0,8286 | 0,8057 | 0,7333 | 0,6 | 0,9333 | 0,6667 | 0,8317 | 0,8486 | MANDIRI | MANDIRI |
| 47 | Pasimarannu | Majapahit | 0,7543 | 0,7657 | 0,5167 | 0,5167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6459 | 0,7443 | BERKEMBANG | MAJU |
| 48 | Pasimarannu | Batu Bingkung | 0,7143 | 0,6857 | 0,4333 | 0,3667 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6048 | 0,6065 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 49 | Pasimarannu | Bonea | 0,72 | 0,7143 | 0,4167 | 0,4167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6011 | 0,6233 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 50 | Pasimarannu | Lambego | 0,8343 | 0,7771 | 0,5167 | 0,5167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6725 | 0,6725 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 51 | Pasimarannu | Komba-Komba | 0,6286 | 0,6286 | 0,4 | 0,4 | 0,6667 | 0,6667 | 0,5651 | 0,5392 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |
| 52 | Pasimarannu | Sambali | 0,7314 | 0,7429 | 0,45 | 0,3833 | 0,6667 | 0,6667 | 0,616 | 0,616 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 53 | Pasimarannu | Lamantu | 0,7543 | 0,7829 | 0,5833 | 0,45 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6681 | 0,6649 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 54 | Taka Bonerate | Kayuadi | 0,7771 | 0,76 | 0,5 | 0,5 | 0,5333 | 0,5333 | 0,6035 | 0,6035 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 55 | Taka Bonerate | Batang | 0,7371 | 0,6857 | 0,5333 | 0,35 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6457 | 0,6865 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 56 | Taka Bonerate | Nyiur Indah | 0,6514 | 0,6629 | 0,5333 | 0,4667 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6171 | 0,6171 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 57 | Taka Bonerate | Tambuna | 0,6971 | 0,5886 | 0,4833 | 0,25 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6157 | 0,6213 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 58 | Taka Bonerate | Jinato | 0,6914 | 0,6343 | 0,5667 | 0,4667 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6416 | 0,6416 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 59 | Taka Bonerate | Rajuni | 0,6914 | 0,6457 | 0,4667 | 0,4667 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6083 | 0,6159 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 60 | Taka Bonerate | Latondu | 0,6343 | 0,6057 | 0,4333 | 0,2833 | 0,6 | 0,6 | 0,5559 | 0,5465 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |
| 61 | Taka Bonerate | Tarupa | 0,6547 | 0,64 | 0,4833 | 0,4167 | 0,4667 | 0,4667 | 0,5319 | 0,5319 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai IKS | | Nilai IKE | | IKL | | NILAI IDM | | STATUS IDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2013 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 62 | Taka Bonerate | Khusus Pasitallu | 0,6343 | 0,5886 | 0,4333 | 0,3333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,5781 | 0,6003 | TERTINGGAL | BERKEMBANG |
| 63 | Pasilambena | Kalaotoa | 0,7143 | 0,6171 | 0,55 | 0,45 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6437 | 0,6437 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 64 | Pasilambena | Garaupa | 0,6171 | 0,5657 | 0,4333 | 0,45 | 0,6667 | 0,5333 | 0,5724 | 0,6198 | TERTINGGAL | BERKEMBANG |
| 65 | Pasilambena | lembang Matene | 0,8114 | 0,6914 | 0,3333 | 0,35 | 0,6667 | 0,7333 | 0,6038 | 0,6676 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 66 | Pasilambena | Pulo Madu | 0,5257 | 0,4114 | 0,2833 | 0,2167 | 0,6667 | 0,4667 | 0,4919 | 0,4919 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |
| 67 | Pasilambena | Karumpa | 0,7371 | 0,56 | 0,3667 | 0,3167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,5902 | 0,5971 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |
| 68 | Pasilambena | Garaupa Raya | 0,68 | 0,5371 | 0,4167 | 0,2167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,5878 | 0,5895 | TERTINGGAL | TERTINGGAL |
| 69 | Pasimasunggu Timur | Bontobulaeng | 0,6686 | 0,5771 | 0,7 | 0,6833 | 0,4667 | 0,6 | 0,6117 | 0,6117 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 70 | Pasimasunggu Timur | Bontobaru | 0,7486 | 0,6857 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6667 | 0,6495 | 0,6495 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 71 | Pasimasunggu Timur | Bontomalling | 0,72 | 0,68 | 0,55 | 0,3667 | 0,6667 | 0,6 | 0,6456 | 0,6456 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 72 | Pasimasunggu Timur | Lembang Baji | 0,7143 | 0,6057 | 0,4833 | 0,4 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6214 | 0,6214 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 73 | Pasimasunggu Timur | Bonto Jati | 0,7257 | 0,6914 | 0,6667 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6641 | 0,6641 | BERKEMBANG | BERKEMBANG |
| 74 | Pasimasunggu Timur | Ujung | 0,6971 | 0,7257 | 0,6167 | 0,4333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6602 | 0,7586 | BERKEMBANG | MAJU |
| 75 | Buki | Buki | 0,8114 | 0,7086 | 0,7333 | 0,6667 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7371 | 0,7744 | MAJU | MAJU |
| 76 | Buki | lalang Bata | 0,84 | 0,6971 | 0,85 | 0,6167 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7856 | 0,7856 | MAJU | MAJU |
| 77 | Buki | Balang Butung | 0,8 | 0,68 | 0,6667 | 0,5 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7111 | 0,7187 | MAJU | MAJU |
| 78 | Buki | Kohala | 0,8743 | 0,7143 | 0,6167 | 0,5 | 0,6667 | 0,6667 | 0,7192 | 0,7192 | MAJU | MAJU |
| 79 | Buki | Bontolempangan | 0,92 | 0,7371 | 0,9667 | 0,5333 | 0,9333 | 0,6667 | 0,94 | 0,9419 | MANDIRI | MANDIRI |

| No. | Kecamatan | Desa | Nilai IKS | | Nilai IKE | | IKL | | NILAI IDM | | STATUS IDM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| 80 | Buki | Mekar Indah | 0,92 | 0,76 | 0,75 | 0,5833 | 0,9333 | 0,9333 | 0,8678 | 0,8678 | MANDIRI | MANDIRI |
| 81 | Buki | Buki Timur | 0,8171 | 0,6514 | 0,7667 | 0,5833 | 0,6667 | 0,6 | 0,7502 | 0,7502 | MAJU | MAJU |

*Sumber Data : Indeks Desa Membangun DISPMD Tahun 2024*

**Tabel 2.9**
**Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan**
**Di Kabupaten Kepulauan Selayar**
**Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa Tahun 2024**

| NO. | KECAMATAN | DESA | NAMA BUMDES | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKTIF | TIDAK AKTIF |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* |
| 1 | BONTOHARU | BONTOTANGNGA | Tatanan Baru | √ | - |
| 2 | | BONTOSUNGGU | BUMDes Lestari | √ | - |
| 3 | | KALEPADANG | Usaha Ekonomi Rakyat | √ | - |
| 4 | | BONTOBORUSU | Maccini Sombala | - | √ |
| 5 | | KAHU-KAHU | Je'ne Kahu-Kahu | - | √ |
| 6 | | BONTOLEBANG | Gusung Jaya | √ | - |
| 7 | BONTOSIKUYU | HARAPAN | Berkah Harapan | √ | - |
| 8 | | LOWA | Benteng Sudu-Sudu | √ | - |
| 9 | | APPATANAH | Sipakullong | √ | - |
| 10 | | LAIYOLO BARU | Laybar Jaya | | √ |
| 11 | | LANTIBONGAN | Baji'minasa | √ | - |
| 12 | | PATIKARYA | Terang Surya | √ | - |
| 13 | | PATILERENG | Baloka Mandiri | √ | - |
| 14 | | BINANGA SOMBAIYA | Jaya Bhineka | √ | - |
| 15 | | LAIYOLO | Batu Putih | √ | |
| 16 | | TAMBOLONGAN | Bonto Bulaeng | √ | - |
| 17 | | POLASSI | Surya Mandiri | √ | - |
| 18 | | KHUSUS BAHULUANG | Jaya Abadi | √ | - |
| 19 | BONTOMANAI | POLEBUNGONG | Karya Bersama | - | √ |
| 20 | | MARE-MARE | Panca Usaha | √ | - |
| 21 | | BONEA MAKMUR | Harapan | - | √ |

| NO. | KECAMATAN | DESA | NAMA BUMDES | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKTIF | TIDAK AKTIF |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* |
| 22 | | JAMBUIYA | Abadi Jaya | √ | - |
| 23 | | BONTOMARANNU | Marannu | √ | - |
| 24 | | BONEA TIMUR | Bintang Timur | √ | - |
| 25 | | BARUGAIYA | Baruga Bersatu | √ | - |
| 26 | | PARAK | Mitra Jaya | √ | - |
| 27 | | BONTOKORAANG | Masagena | √ | |
| 28 | | KABURU | Bukit Harapan | √ | - |
| 29 | BUKI | BUKI | Buki Mandiri | - | √ |
| 30 | | LALANG BATA | Pesona Bakti | - | √ |
| 31 | | BALANG BUTUNG | Karya Bersama | - | √ |
| 32 | | KOHALA | Minasatekne | √ | - |
| 33 | | BONTOLEMPANGAN | Assamaturu | √ | - |
| 34 | | MEKAR INDAH | Semangat Baru | √ | - |
| 35 | | BUKI TIMUR | Buki Mandiri | √ | - |
| 36 | BONTOMATENE | BARAT LAMBONGAN | Tanjung Harapan | √ | - |
| 37 | | BONTONA SALUK | Sejahtera | √ | - |
| 38 | | PAMATATA | Tanah Pesisir | √ | - |
| 39 | | ONTO | Passiana' | √ | - |
| 40 | | MAHARAYYA | Suka Maju | - | √ |
| 41 | | TANETE | Bumdes Tanete | √ | - |
| 42 | | MENARA INDAH | Mercusuar Mandiri | - | √ |
| 43 | | BUNGAIYA | Pesona Mandiri | √ | - |
| 44 | | KAYU BAUK | Kaili Mandiri | √ | - |
| 45 | | TAMALANREA | Semangat Baru | √ | - |
| 46 | PASIMASUNGGU | KEMBANG RAGI | Kembang Ragi Jaya | √ | - |
| 47 | | MAMINASA | Baji' Minasa | - | √ |
| 48 | | TANAMALALA | Sentosa | - | √ |
| 49 | | LABUANG PAMAJANG | Teluk Harapan | √ | - |

| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA BUMDES | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKTIF | TIDAK AKTIF |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* |
| 50 | | MASSUNGKE | Mitra Sejati | √ | - |
| 51 | | BONTOSAILE | Cahaya Maju | √ | - |
| 52 | | TELUK KAMPE | Anugrah Jaya | √ | - |
| 53 | PASIMASUNGGU TIMUR | BONTOBULAENG | Maju Bersama | √ | - |
| 54 | | BONTOBARU | Baji' Pa'mai | - | √ |
| 55 | | BONTOMALLING | Usaha Baru | - | √ |
| 56 | | LEMBANG BAJI | Bonesialla | - | √ |
| 57 | | BONTOJATI | Maju Bersama | √ | - |
| 58 | | UJUNG | Cahaya Ujung | - | √ |
| 59 | PASILAMBENA | KALAOTOA | Kalaotoa Jaya | √ | - |
| 60 | | LEMBANG MATENE | Muda Mandiri | √ | - |
| 61 | | GARAUPA | Mandiri Bersama | √ | - |
| 62 | | PULO MADU | Bumi Putra Mandiri | - | √ |
| 63 | | KARUMPA | Karya Mandiri | √ | - |
| 64 | | GARAUPA RAYA | Berkah Abadi | √ | - |
| 65 | TAKABONERATE | KAYUADI | Masoong Baji | - | √ |
| 66 | | JINATO | Sifamase Mase | - | √ |
| 67 | | TARUPA | Harapan Maju | - | √ |
| 68 | | NYIUR INDAH | Passengkaang | √ | - |
| 69 | | LATONDU | Sipatuo | - | √ |
| 70 | | RAJUNI | Tunas Mulia | - | √ |
| 71 | | BATANG | Passamaturukang | √ | - |
| 72 | | TAMBUNA | Pasir Putih | - | √ |
| 73 | | KHUSUS PASITALLU | Barakke' | √ | - |
| 74 | PASIMARANNU | BONEA | Taka Bassi | - | √ |
| 75 | | BATU BINGKUNG | Anugerah Sejahtera | √ | - |
| 76 | | LAMBEGO | Kalao Lambego | √ | - |

| NO | KECAMATAN | DESA | NAMA BUMDES | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AKTIF | TIDAK AKTIF |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *6* | *7* |
| 77 | | MAJAPAHIT | Abadi | √ | - |
| 78 | | BONERATE | Karya Mandiri | √ | - |
| 79 | | KOMBA-KOMBA | Kembang Mekar | √ | - |
| 80 | | SAMBALI | Batu Payung | √ | - |
| 81 | | LAMANTU | Pasimarannu Sejahtera | √ | - |

Berdasarkan Tabel diatas Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2024, telah teridentifikasi BUMDes yang aktif sebanyak 57 bumdes , dimana pada tahun sebelumnya hanya sebanyak 44 bumdes yang aktif, sedangkan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif.

**Tabel 2.9**
**Persentase Status Desa Yang Meningkat Statusnya di Kabupaten Kepulauan Selayar**

| No | STATUS DESA | Tahun | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % |
| 1 | Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,70 | 14 | 17,28 | 22 | 27,17 |
| 2 | Maju | 3 | 3,7 | 8 | 9,87 | 22 | 27,16 | 17 | 20,99 | 17 | 20,99 |
| 3 | Berkembang | 41 | 50,6 | 46 | 60,5 | 44 | 54,32 | 42 | 51,85 | 36 | 44,44 |
| 4 | Tertinggal | 34 | 41,9 | 25 | 30,86 | 12 | 14,81 | 8 | 9,88 | 6 | 7,41 |
| 5 | Sangat Tertinggal | 3 | 3,7 | 2 | 2,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | 81 | 100 | 81 | 100 | 81 | 100 | 81 | 100 | 81 | 100 |

Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, di lihat dari Persentase Peningkatan Status Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yakni desa yang berstatus desa mandiri ditahun 2020 sebesar 0 hingga pada tahun 2024 sudah mencapai 37,17% atau 22 Desa, persentase desa maju ditahun 2020 sebesar 3,7 % hingga pada tahun 2022 mencapai 27,16 %, di tahun 2023 ada beberapa desa maju yang meningkat statusnya menjadi desa mandiri sehingga persentase desa maju sebesar 20,99%. Sama halnya dengan persentase desa berstatus desa berkembang capaian ditahun 2024 sebesar 44,44 % dikarenakan ada beberapa desa yang meningkat statusnya menjadi Desa berkembang dan desa mandiri, Persentase desa berstatus desa tertinggal ditahun 2020 sebesar 41,9% atau 34 Desa hingga

pada tahun 2024 persentase status desa tertinggal tersisa 7,4 persen atau 6 desa, begitupun dengan persentase status desa Sangat Tertinggal ditahun 2020 sebesar 3,7% atau 3 desa dan sejak tahun 2022 sudah tidak terdapat desa yang berstatus desa sangat tertinggal.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat menuju kesejahteraan keluarga. Pada setiap tahun dilaksanakan pembinaan khusus dan terpadu melalui desa/kelurahan binaan baik oleh tingkat kecamatan/kabupaten, terutama bagi 88 desa/kelurahan yang menjadi lokasi desa/kelurahan binaan secara berjenjang. Dari 88 desa/kelurahan atau 88 kelompok binaan PKK yang ada, persentase keaktifan sebesar 100 %. Ruang lingkup pembinaan TP.PKK baik desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten adalah pelaksanaan 10 program pokok PKK dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan program program pembangunan daerah/pusat. Distribusi kelompok binaan PKK dan persentase PKK aktif berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.10**
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pasimarannu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Pasilambena | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Pasimasunggu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Taka bonerate | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Bontosikuyu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7 | Bontoharu | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Benteng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Bontomanai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Bontomatene | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Buki | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Jumlah | | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| **Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK** | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

**Tabel 2.11**
**Persentase PKK Aktif Menurut Kecamatan**
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pasimarannu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pasilambena | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Pasimasunggu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Taka bonerate | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Bontosikuyu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Bontoharu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Benteng | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Bontomanai | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Bontomatene | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Buki | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Persentase PKK Aktif** | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di kabupaten Kepulauan selayar

**Tabel. 2.12**
**Persentase Posyandu Aktif Menurut Kecamatan**
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024**

| No | Kecamatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pasimarannu | 100,00 | 100,00 | 58,82 | 0,00 | 86,96 |
| 2 | Pasilambena | 100,00 | 100,00 | 35,29 | 84,62 | 0,00 |
| 3 | Pasimasunggu | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 33,33 | 0,00 |
| 4 | Taka bonerate | 100,00 | 100,00 | 84,62 | 10,00 | 0,00 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 0,00 | 10,00 |
| 6 | Bontosikuyu | 100,00 | 100,00 | 45,83 | 51,35 | 45,83 |
| 7 | Bontoharu | 100,00 | 100,00 | 73,08 | 72,00 | 72,00 |
| 8 | Benteng | 95,45 | 100,00 | 41,67 | 40,74 | 40,74 |
| 9 | Bontomanai | 97,37 | 100,00 | 62,50 | 72,73 | 65,85 |
| 10 | Bontomatene | 100,00 | 100,00 | 58,82 | 62,50 | 82,35 |
| 11 | Buki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 63,64 |
| **Persentase Posyandu Aktif** | | 99,30 | 100,00 | 61,36 | 45,21 | 46,56 |

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

**Tabel. 2.13**
**Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan**
**Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024**

| KEL/DESA | RT | | RW | | PKK | | POSYANDU | | LPM | | K.TARUNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KAYU BAUK | | 7 | | 7 | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 |
| TANETE | | 12 | | 6 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| MENARA INDAH | | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | - | | - |
| PAMATATA | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| MAHARAYYA | | 5 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| ONTO | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| BARAT LAMBONGANG | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| BONGAYYA | | - | | 12 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| TAMALANREA | | 8 | | 6 | | 1 | | 2 | | 1 | | - |
| BONTONASALUK | | 7 | | 7 | | 1 | | 6 | | - | | - |
| BATANGMATA | 16 | | 8 | | 1 | | 2 | | 1 | | | |
| BATANGMATA SAPO | 8 | | 8 | | 1 | | 3 | | 1 | | | |
| BONTOLEMPANGAN | | 7 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| BUKI | | 10 | | 5 | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| KOHALA | | 12 | | 7 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| LALANGBATA | | - | | 8 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| BALANG BUTUNG | | 14 | | 14 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| BUKI TIMUR | | 7 | | 6 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| MEKAR INDAH | | 11 | | 6 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| JAMBUIYA | | - | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| BONEA MAKMUR | | 12 | | 6 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| BARUGAIA | | 6 | | 5 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| POLEBUNGING | | 13 | | 9 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| BONEA TIMUR | | - | | 10 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| MARE-MARE | | 2 | | 7 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| KABURU | | - | | 5 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| PARAK | | - | | 7 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| BONTOKORAANG | | 5 | | 5 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| BONTOMARANNU | | 6 | | 10 | | 1 | | 5 | | - | | 1 |
| BONTOSUNGGU | | 5 | | 5 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| BONTOBORUSU | | 12 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| BONTOLEBANG | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |

| KEL/DESA | RT | | RW | | PKK | | POSYANDU | | LPM | | K.TARUNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D |
| BONTOTANGNGA | | 7 | | 5 | | 1 | | 5 | | - | | 1 |
| KAHU-KAHU | | 8 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| KAHU-KAHU | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| KALEPADANG | | 12 | | 7 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| PUTABANGUN | 10 | - | 8 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | | 1 | - |
| BONTO BANGUN | 19 | - | 9 | | 1 | | 4 | | 1 | | - | - |
| LOWA | | 4 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| PATILERENG | | 10 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LAIYOLO BARU | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| BINANGA SOMBAYYA | | 8 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| LAIYOLO | | 6 | | 6 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| PATIKARYA | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| LANTIBONGANG | | 10 | | 8 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| APPATANAH | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| HARAPAN | | 8 | | 8 | | 1 | | 8 | | 1 | | 1 |
| TAMBOLONGANG | | 10 | | 5 | | 1 | | 5 | | - | | 1 |
| POLASSI | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| KHUSUS BAHULUANG | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| RAJUNI | | 7 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| TAMBUNA | | 4 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| LATONDU | | 6 | | - | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| KAYUADI | | 3 | | - | | 1 | | 4 | | - | | - |
| TARUPA | | 6 | | 6 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| NYIUR INDAH | | 3 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| JINATO | | 3 | | 3 | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| KHUSUS PASITALLU | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | - | | - |
| BATANG | | 16 | | 8 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| BONTOSAILE | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | 1 | | - |
| MA'MINASA | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| MASSUNGKE | | 8 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| TANAMALALA | | 3 | | 5 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LABUANG PAMAJANG | | 8 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| TELUK KAMPE | | 6 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| KEMBANGRAGI | | 6 | | 6 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| BONTOBULAENG | | 14 | | 8 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| BONTOBARU | | 7 | | 6 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LEMBANG BAJI | | 5 | | 5 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| MASSUNGKE | | 8 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| TANAMALALA | | 3 | | 5 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LABUANG PAMAJANG | | 8 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | 1 |
| TELUK KAMPE | | 6 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| KEMBANGRAGI | | 6 | | 6 | | 1 | | 5 | | - | | - |
| BONTOBULAENG | | 14 | | 8 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| BONTOBARU | | 7 | | 6 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LEMBANG BAJI | | 5 | | 5 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |

| KEL/DESA | RT | | RW | | PKK | | POSYANDU | | LPM | | K.TARUNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D | K | D |
| BONTOMALLING | | 8 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| BONTOJATI | | 2 | | 8 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| UJUNG | | 8 | | 4 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| BONERATE | | 6 | | - | | 1 | | 3 | | - | | - |
| MAJAPAHIT | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | - |
| BATUBINKUNG | | 4 | | 4 | | 1 | | 4 | | - | | 1 |
| BONEA | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LAMBEGO | | 0 | | 6 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| KOMBA-KOMBA | | 6 | | 3 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| SAMBALI | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| LAMANTU | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | | - | | 1 |
| KALAOTOA | | 0 | | 8 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| GARAUPA | | 4 | | 4 | | 1 | | 3 | | 1 | | 1 |
| LEMBANGMATENE | | 4 | | 4 | | 1 | | 2 | | - | | - |
| PULAU MADU | | 10 | | 7 | | 1 | | 6 | | - | | - |
| KARUMPA | | 12 | | 6 | | 1 | | 3 | | - | | - |
| GARAUPA RAYA | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| GARAUPA RAYA | | 3 | | 3 | | 1 | | 3 | | - | | 1 |
| BENTENG | 37 | | 17 | | 1 | | 7 | | 1 | | 1 | |
| BENTENG UTARA | 26 | | 10 | | 1 | | 6 | | 1 | | - | |
| BENTENG SELATAN | 30 | | 12 | | 1 | | 7 | | 1 | | 1 | |

## Tabel 2.14
## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
## Tahun 2022-2024

| No | Uraian **) | Anggaran pada tahun Ke- | | | | | Realisasi pada tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rp 622.177.591 | | | | | Rp 569.943.529 | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 151.200.000 | | | | | Rp 138.812.890 | | | | | | |
| 3 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Rp 14.725.000 | | | | | Rp 13.753.000 | | | | | | |
| 6 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Rp 32.125.500 | | | | | Rp 32.125.500 | | | | | | |
| 7 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Rp 40.000.000 | | | | | Rp 40.000.000 | | | | | | |
| 8 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan | Rp 181.071.890 | | | | | Rp 180.012.540 | | | | | | |
| 10 | Program peningkatan peran perempuan di perdesaan | Rp 537.101.000 | | | | | Rp 537.101.000 | | | | | | |
| 11 | Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna | Rp 3.985.990 | | | | | Rp 3.985.990 | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | |

| No | Uraian **) | Anggaran pada tahun Ke- | | | | | Realisasi pada tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 18 |
| 12 | Program Pembangunan, Pengembangan Rehabilitasi Baruga Sayang | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Program pengembangan wilayah transmigrasi | Rp 5.438.000 | | | | | Rp. 1.550.120 | | | | | | |
| 14. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | | Rp. 3.621.166.560 | Rp 2,574.730.485 | Rp 255.671.500 | RP 3.831.800.000 | | Rp 3.404.847.403 | Rp 2.499.256.202 | Rp 2.478.983.642 | Rp 3.604.542.416 | | |
| 15 | Program Penataan Desa | | Rp. 25.000.000 | Rp 28.870.000 | Rp 5.759.000 | 0 | | Rp. 21.571.600 | Rp 27.355.000 | Rp 5.629.200 | 0 | | |
| 16 | Program Peningkatan Kerjasama Desa | | Rp. 8.770.00 | Rp 81.095.000 | Rp 54.212.000 | 0 | | Rp. 7.016.000 | Rp 77.612.800 | Rp 42.315.600 | 0 | | |
| 17 | Program Administrasi Pemerintahan Desa | | Rp. 413.692.000 | Rp 409.989.000 | Rp 1.014.779.800 | Rp 245.858.300 | | Rp. 385.843.500 | Rp 392.590.751 | Rp 945.034.600 | Rp 1.184.141.700 | | |
| 18. | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | | Rp. 988.187.000 | Rp 1.382.882.000 | Rp 1.448.848.700 | Rp 1,184.141.700 | | Rp . 977.044.040 | Rp 1.341.681.710 | Rp 1.424.966.500 | Rp 1.179.999.000 | | |
| | **T O T A L** | Rp 1.587.827.971 | Rp 5.066.815.560 | Rp 4.477.566.485 | Rp 5.074.271.000 | Rp 3.831.800.000 | Rp 1.517.284.569 | Rp 4.645.511.542 | Rp 4.338.496.463 | Rp 4.896.929.542 | Rp 3.604.542.416 | | |

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kelompok sasaran menjadi target koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah semua perangkat daerah yang diklasifikasikan menjalankan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat yang dijadikan sebagai kerangka kebijakan program pemberdayaan masyarakat termasuk 81 Desa di 11 Kecamatan beserta semua aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,Posyandu,dan Karang Taruna, Badan Usaha Milik Desa, Masyarakat Penggiat Tekonolgi Tepat Guna).

### a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang menghambat pelaksanaan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

1. Keterbatasan akses dan konektifitas terutama daerah terpencil memastikan semua desa dan masyarakat dapat mengakses layanan dan program pemberdayaan secara merata.
2. Ketersediaan transportasi antar pulau dapat menjadi kendala dalam distribusi sumber daya, pelatihan dan pengawasan program pemberdayaan.
3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa, penyusunan program
4. Pelu adanya pelatihan program berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa
5. Penguatan partisipasif masyarakat untuk berpartisi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desanya dan pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lokal secara berkelanjutan untuk membangun kemandirian desa.
6. Memastikan program pemberdayaan yang diluncurkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan sfesifik setiap desa, mengingat keragaman kondisi geografis dan sosial serta enyelaraskan program-program Dinas PMD dengan rencana pembangunan daerah dan pemerintah pusat .
7. Akses teknologi dan informasi yang belum merata sehingga dapat menghambat pemanfaatan tekonolgi untuk administrasi, pelaporan dan komunikasi .

8. Mendigitalkan proses administrasi dan layanan ditingkat desa sehingga lebih efisien dan transparan.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan tentang desa yang dijadikan dasar untuk memudahkan pembinaan dan pengawasn terhadap desa.
2. Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat di pedesaan
3. Telah terbentuk berbagai Lembaga Kemasyarakatan di setiap desa
4. Tersedianya dana desa dan alokasi dana desa yang diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik ditingkat desa
5. Adanya Komitmen Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah desa.
6. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan.
7. Komitmen pemerintah terhadap penyelenggaraan Program pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan.
8. Komitmen Pemerintah terhadap penyelenggaraan program pembangunan berkelanjutan untuk membangun dan menginplementasikan program yang memiliki dampak jangka panjang yang dapat diukur sesuai dengan potensi daerah

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama beberapa tahun terkahir telah diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan yang dijadikan dasar dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan lima tahun kedepan, adapun masalah yang dihadapi antara lain :

a. Terbatasnya sumber daya manusia di desa yang mampu mengelola BUMDes
b. Masih terdapat BUMDes yang statusnya tidak aktif dan belum berbadan hukum
c. Masih adanya inovasi TTG (Teknologo Tepat Guna ) yang tidak teridentifikasi
d. Masi terdapat desa yang berstatus tertinggal sebanyak 6 desa;
e. Kurangnya kapasitas pemerintah desa untuk melakukan kerjasama antar desa maupun pihak ketiga;
f. Belum optimalnya peran kelembagaan desa dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat;
g. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam;
h. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup;
i. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan .

Selanjutnya jika diuraikan pada masing-masing permasalahan yang dihadapi yakni :

1) Bidang Bina Pemerintahan Desa

a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seoerti PP N0. 33 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut belun bisa dilaksanakan secara optimal;
b. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa;
c. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah terkait pembinaan, penataan dan kelembagaan desa
d. Masih adanya Data Profil Desa/Kelurahan yang belum terupdate secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/kelurahan;

2) Bidang Pengembangan Kerjasama, Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

a. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola

lembaga masyarakat ditingkat;

b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDesa melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
c. Potensi sumber daya alam yang tersedia diperdesaan belum didukung dengan penerapan teknologi tepat guna;

3) Sekretariat Dinas PMD

a. Belum terkoordinasinya penyusunan rencana, program dan anggaran serta tugas antar bidang;
b. Belum maksimalnya dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama dan arsip;
c. Belum terkoordinasinya penyusunan laporan bulanan, triwulanan tahunan beserta data laporan sekretariat dan antar bidang;
d. Belum tersusunnya informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas yang tersistem;
e. Belum adanya mekanisme inventarisasi dan pengelolaan barag/aset milik daerah secara terupdate dalam sistem aplikasi;
f. Penilaian atau evaluasi kinerja staf belum dijalankan secara optimal;
g. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarka hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar serta uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi yakni :

TABEL

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar**

| No | Masalah Pokok | Masalah Pokok | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Masih terdapat desa tertinggal yang perlu ditingkatkan statusnya berdasarkan IDM Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Selayar masih terdapat desa yang berstatus Desa Tertinggal sebanyak 6 Desa | Masih kurangya fasilitasi dan pembinaan terhadap Pemerintahan Desa | 1. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait UU no. 6 Tahun 2014 sebagaimana di ubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024<br>2. Belum Optimalnya Kinerja aparat pemerintah kabupaten terkait pembinaan, penataan kelembagaan desa<br>3. Data profil desa yang belum |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | terupdate secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan.<br>4. Konektivitas dengan desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi<br>5. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemerintahan desa |
| | | Masih minimnya fasiltasi dan pembinaan terhadap pengembangan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat desa | 1. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga masyarakat ditingkat desa |
| | | Minimnya fasilitasi dan pembinaan terhadap pembangunan, SDA dan usaha ekonomi | 1. Pengelolaan kelembagaan ekonomi mikro (BUMDes dan pasar desa ) belum maksimal<br>2. Masih rendahnya kapasitas SDM pengelola lembaga masyarakat tingkat desa<br>3. Belum optimalnya manajemen pengelolaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) |

## 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, bahwa Visi pembangunan daerah adalah ***" Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera",*** *sedangkan Misi Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:*

1. **Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang akuntabel dan adaptif**

   Misi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampian kerja melalui " Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur" yang menghasilkan ASN kreatif. Inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan inovasi daerah.

2. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat .**

   Misi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan dan

kerja dalam melalui " Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat" yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

3. **Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah.**

   Misi dilaksanakan untuk meningkatkanPengelolaan Perekonomian Daerah untuk membentuk paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah menjadi produk akhir yang berkualitas melalui " Program Hilirisasi Sumber Daya Alam" atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin dan untuk meningkatkan produk daerah melalui " Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat" dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. .

4. **Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan.** Misi ini dilaksanakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam pada masing-masing desa melalui " Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan", dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah .

5. **Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah**

   Misi dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi diseluruh wilayah kabupaten melalui "Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi" dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antar pulau dan kesatuan wilayah kabupaten.

6. **Meningkatkan Pembinaan Sosial Budaya dan Agama**

   Misi dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan

pembinaan kelembagaan sosial, budaya dan agama serta pembinaan masyarakat dan penyandang sosial.

7. **Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

   Misi dilaksanakan untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara linkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui Program Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup" dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

   Dari Visi-Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 didukung dengan17 (Tujuh Belas) program prioritas sebagai berikut :

   1. Membangung desa, menata kota
   2. Kemandirian pangan ;
   3. Pelayanan kesehatann gratis dengan BPJS
   4. Penguatan PAUD-PT melalui program Bantuan Gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai SLTP
   5. Penguatan kesejahteraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
   6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
   7. Pengentasan kemiskinan;
   8. Penguatan fiskal daerah;
   9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
   10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
   11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
   12. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM;
   13. Penguatan Idiologi dan wawasan kebangsaan;
   14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembaruan kebangsaan;

15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olahraga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Adapun Program prioritas berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Desa, Menata Kota.** Dimana program membangun desa merupakan lanjutan Program Gerbang Sari adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan :
   a. Huluisasi SDA Berbasis Perwilayahan Komunitas, membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani, dan Desa Koperasi;
   b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan " Petik-Olah-Jual sebagai Produk akhir untuk dipasarkan;
   c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital.
2. Kemandirian Pangan melalui Program Kemandirian Daerah
3. Penguatan Pendidikan PAUD -PT
4. Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan bebas RTLH
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
7. Hilirisasi ekonomi sumber alam berbasis UMKM;
8. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
9. Pembinaan kerukunan antar umat beragam dan pembaruan kebangsaan;
10. Pelestarian seni budaya, dan peningkatan prestasi olahraga.

Adapun program lanjutan pembangunan pemerintah daerah periode tahun 2021-2025 sebagai modal pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode 2025-2030 sebanyak 13 (tiga belas) program. Salah satu progam yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu melanjutkan pembinaan BUMDes mengelola destinasi pariwisata untuk menggerakkan

perekonomian masyarakat di desa wisata sebagai modal investasi sektor pariwisata.

Terkait Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke-4 dari 7 Misi Utama yaitu **Meningkatkan Pengeloaan Sumber Daya Perdesaan** dengan fokus pada tujuan ke-4 yaitu Meningkatkan Kemandirian Perdesaan dengan sasaran Persentase Desa Mandiri yang diukur melalui indeks desa yang terdiri dari 6 dimensi Komponen yaitu 1) Layanan Dasar, 2) Sosial, 3) Ekonomi, 4) Lingkungan, 5) Aksebilitas, 6) Tata Kelola Pemerintahan.

## 3.2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

### 3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi keenam Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Membangun dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan** , serta Agenda Prioritas Nasional ke-13 yaitu Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2025-2029 adalah: **"Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.**

Adapun Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Meningkatkan daya saing perdesaan yang berketahanan dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian ekonomi ;
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
6. Peningkatan kualitas transmigrasi

Visi Kemendes PDTT mencerminkan Tujuan jangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berjati diri dalam berbagai aspek dengan gotong royong sebagai dasar utama. Adapun langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut pada kurun waktu 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan daya saing perdesaan
   Fokus pada pengembangan potensi lokal, inovasi, dam akses pasar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
2. Tata kelola pemerintahan yang efisien
   Memastikan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, akuntable sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
3. Kualitas hidup masyarakat desa
   Menjamin akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktu yang layak.
4. Pemberdayaan masyarakat desa
   Memberikan dukungan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan usaha sendiri, memanfaatkan potensi lokal, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
   Menyediakan dukungan khusus bagi daerah-daerah tertinggal mengatasi berbagai hambatan dan mencapai tujuan yang pesat.
6. Peningkatan kualitas transmigrasi
   Memastikan proses transmigrasi berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat transmigran dan daerah tujuan transmigrasi.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2025-2029 adalah mendorong munculnya pusat-pusat

pertumbuhan baru dengan :

1. Mewujudkan kemandirian desa yang diukur dengan persentase desa melalui indeks desa;
2. Mendukung pertumbuhan wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), dan mendorong pertumbuhan ekonomu di wliayah tersebut;
3. Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru diberbagi wilayah, yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa juga menjadi salah satu fokus utama, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing;
5. Melakukan penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa untuk program BLT Desa;
6. Mendorong desa untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim termasuk melalui penggunaan energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### 3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat tujuan ke-3 "**Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif"** dengan sasaran ke-9 "**Meningkatnya Pembangunan Perdesaan**" yang dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 maka Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu

1. Peningkatan status Desa Mandiri dan Pengentasan status Desa;

2. Peningkatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), dan Pemanfaatan Tekonologi Tepat Guna Perdesaan;
3. Penguatan dan Pembentukan lembaga ekonomi Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih
4. Penguatan Kapasitas pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
5. Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasayarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Memfasilitasi Kabupaten dalam rangka penataan Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
2. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten;
3. Memfasilitasi Pengembangan kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan penggiat Tekonologi Tepat Guna Perdesaan.

## 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas

prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten antara lain :

a. Pemanfaatan ruang secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antara lain :

    1. Memanfaatkan kawasan pertanian pangan yang terdiri atas sawah lahan basah yang terdapat di Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Bontosikuyu serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur, Pasimasunggu, Bontosikuyu, Bontomanai, dan Kecamatan Bontoharu yang digunakan untuk tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani Mengembangkan kawasan pariwisata yang diarahkan pada pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan budaya lokal. Selain Taman Nasional Taka

Bonerate kawasan pariwisata juga terdapat di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;

2. Memanfaatkan kawasan peternakan dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha ternak yang digolongkan atas dua jenis usaha yaitu ternak besar/kecil terdiri atas Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing dan Domba sedangkan ternak unggas antara lain Ayam Buras, Ras dan Itik, yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimarannu seluas 4.062 (empat ribu enam puluh dua) hektar;
3. Mengembangkan sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya yang terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomatene;

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antara lain :

1. Mengarahkan pembangunan Infrastrukur seperti pembangunan jalan, irigasi dan fasilitas umum lainnya secara terencana sehingga lebih memudahkan aksebikitas masyarakat berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pasar serta meningkatkan konektivitas antar wilayan untuk mendukung kegiatan ekonomi;
2. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengarahkan investasi terhadap sektor-sektor yang relevan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Mengatur pemanfaatan ruang yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung sektor pariwisata

yang berbasis lingkungan;

4. Mengatur penataan ruang yang mendukung terciptanya permukiman yang layak, ruang terbuka hijau dan fasilitas yang memadai.
5. Melibatkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Peningkatan pertahanan keamanan wilayah dengan melakukan peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan sebagaiman dimaksud antara lain :

1. Mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan, termasuk yang terkait dengan pertahanan kemanan dengan menentukan lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas pertahanan.
2. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan membatasi jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang diberbagai kawasan yang bertujuna untul mencegah aktivitas yang dapat mengancam keamanan.
3. Memberikan arahan pembangunan yang mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan
4. Melakukan pengaturan zonasi dan pengendalian ruang yang dapat membantu mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perebutan daya atau persaingan pemanfaatan ruang.
5. Memanfaatkan ruang yang berkelanjutan dan berdaya guna, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keamanan wilayah.

d. Pembangunan Sektoral yang terpadu terhadap RTRW dapat dilihat dari berbagai aspek :

1. Mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan, seperti ekowisata, dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian lokal khususnya pertanian organik dan perikanan.
2. Membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan

bandara harus terencana dengan baik dengan memempertimbangkan aksebilitas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, pertanian dan perikanan.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, dan kelautan, sangat penting untuk mendukung pembangunan terpadu.
4. Meningkatkan ekonomi lokal terutama di tingkat desa, dapat didorong melalui pengembangan potensi lokal seperti kerajinan tangan, produk pertanian unggulan dan hasil laut yang dipasarkan melalui berbagai saluran termasuk pariwisata dan e-commerce.
5. Membangun sektor terpadu dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk pengeloaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana.

e. Peningkatan sektor unggulan yang difokuskan pada peningkatan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Mengembangkan potensi besar yang ada di Kepulauan Selayar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil, perikanan serta menjaga kelestarian sumber daya laut.
2. Mengembangkan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang didukung oleh potensi sumber daya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar , sektor Perikanan;
3. Mengembangkan potensi pariwisata bahari wisata pantai, pulau-pulau kecil dan Taman Nasional Takabonerate di Kecamatan Takabonerate dengan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal;
4. Meningkatkan produksi pertanian, diverifikasi tanaman,

dan pengembangan produk pertanian unggulan.

5. Mengembangkan wilayah kepulauan yang berbasis pada potensi bahari dan maritim, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas antar pulau, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

f. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan ruang yang optimal antara lain:

1. Menyoroti beberapa sektor kunci untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu perikanan, pariwisata, pertanian dan pertambangan.

2. Mengembangkan wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi fokus utama.

3. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomu tidak hanya pada satu sektor atau wilayah yang merata ke seluruh wilayah kepulauan.

4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarkat Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan.

5. Mendorong inovasi dan sinergi pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya inovatif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu program **" Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (Gemerlap)" .**

g. Mengarahkan lokasi investasi yang dijadikan landasan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menentukan lokasi investasi pembangunan

h. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan daerah yang meliputi beberapa aspek antar lain :

1. Menyelaraskan kebijakan pembangunan diberbagai sektor (pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur) harus sejalan dengan arahan yang terdapat dalam RTRW

2. Memanfaatkan ruang secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi

sumber daya alam yang ada;

3. Mengendalikan terhadap pemanfaatan ruang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya pelaksanaan RTRW.

Berdasarkan Peraturan Daerah Priovinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentan Rencana Tata Ruang Wliayah Privinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042 , telah menetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah adminidtratif Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepuluan Selayar; dan;
b. Kawasan Industri Perikanan terpadu dipesisir pantai Teluk Bone meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan terdiri atas :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :

a. kawasan strategis provinsi
b. kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis kabupaten meliputi :

a. kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
b. kawasan industri perikanan terpadu Kabupaten Kepulauan

Selayar.

Memperhatikan kepentingan sektor tersebut diatas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene.

### 3.3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Percepatan pertambahan jumlah penduduk selalu diimbangi dengan percepatan pembangunan, dan percepatan pembangunan berbanding lurus dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian maka pembangunan yang tidak mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan tentu akan mempengaruhi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH). Lingkungan hidup adalah modal pembangunan, modal pembangunan itu harus dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung agar kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alamnya tetap terjaga dengan baik. Tren seperti ini sulit karena yang banyak terjadi daerah-daerah dengan gampang membuka lahan pertanian untuk pembangunan aktifitas perdagangan dan jasa tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, hal inilah yang menyebabkan sebagian keadaan Sumber daya Alam potensinya menurun.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Untuk membuat Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan dan Penyedia Air Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan Metode distribusi Grid.

**3.Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air**

Perhitungan DDLH penyedia air dianalisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan tahapan sebagai berikut1) perhitungan ketersediaan air, 2) perhitungan kebutuhan air untuk dan domestik, 3) perhitungan ambang batas penduduk dimana 4) penentuan status DDLH penyedia air disetiap Grid. Adapun total ketersediaan air di Kepulauan Selayar sesuai dengan SK No 146 MENHLK 1.2.2023. Pendistribusian air disetiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dihitung menggunakan Indeks Jasa Ekosistem Penyedia Air (IJEPA) sebagai bobot pendistribusian. Perhitungan kebutuhan air terbagi menjadi dua jenis yaitu kebtuhan air untuk lahan dihitung berdasarkan jenis pentupan lahan yang diperhitungkan kebutuhan airnya adalah sawah pertanian lahan kering, perkebunan dan tambak dan kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan kebutuhan untuk hidup layak perkapita sebesar 43.2 $m^3$/tahun. Perhitungan kebutuhan air domestik, kebutuhan per kapita dikali 2 sebagai safety factor.

Berdasarkan hasil analisis total ketersediaan air Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahum 2023 sampai tahun 2029 masih cukup untuk memenuhi semua kebutuhan air baik domestik maupun lahan. Hasil analisis yang menunjukkan ketersediaan dan kebutuhan air terbanyak dan terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kecamatan dengan ketersediaan air terbanyak pafa tahun 2023 adalah Kecamatan Bontosikuyu sebesar 594.579.402,10 $m^3$/tahun dengan nilai kebtuhan air total (domestik dan lahan) hanya sebesar 206.942.308.05 $m^3$/tahun, sehingga selisih antara ketersediaan dan kebutuhan sebesar 387.637.094.06 $m^3$/tahun. Sementara itu kecamatan dengan ketersediaan air terendah pada tahun 2023 adalah Kecamatan Benteng sebesar 16.311.717.,65 $m^3$/tahun dengan nilai kebutuhan sebesar 21.911.013,94 $m^3$/tahun, sehingga terjadi defist air sebesar 5.599.296,30 $m^3$/tahun. Sedangkan pada proyeksi tahun 2029 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kebutuhan air (domestik dan lahan) sebesar 942.056.364,67 $m^3$/tahun dengan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 2.294.101.888,41 $m^3$/tahun yang berarti status DDLH penyedia air dominan belum terlampaui.

**Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Air**

Perhitungan DDLH penyedia pangan dengan pendekatan kuatitatif dilakukan melalui perhitungan selisih dan perbandingan ketersediaan dan kebutuhan untuk masing-masing jasa ekosistem. Perhitungan ketersediaan pangan berdasarkan jumlah produksi dalam satu tahun, yang dikonversi ke satuan kilo kalori (Kkal) didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan dengan menggunakan Indeks Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (IJEPBP) sebagai bobot pendistribusian. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk disetiap grid yang dikalikan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu besarnya kebutuhan energi bahan pangan individu untuk melakukan pekerjaan yaitu sebesar 2.150 Kkal/orang/hari.

Berdasarkan data pada tahun 2023 dan 2029 ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah total ketesediaan pangan di tahun 2023 mencapai 7.181.010.874 Kkal dan kebutuhan pangan domestik sebesar 305.515.004 dan menghasilkan surplus sebesar 6.875.495.869 Kkal. Kecamatan Pasumasunggu adalah kecamatan yang memiliki ketersediaan pangan tertinggi sebesar 1.013.827.215 Kkal dengan selisih surplus sebesar 984.662.464 Kkal, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kecamatan Pasimasunggu sebesar 29.164.751 Kkal. Selain itu Kecamatan Bontosikuyu memiliki ketersediaan pangan sebesar 1.195.304.158 Kkal, dengan surplus sebesar 1.160.839.657 Kkal. Kecamatan Benteng merupakan satu-satunya kecamatan mengalami defisit sebesar 22.107.290 Kkal. Sedangkan tahun 2029 situasi pangan Kabupaten Kepulauan Selayar semakin membaik dengan totall ketersediaan pangan tetap tinggi mencapai 7.181.010.874 Kkal dan kebutuhan pangan meningkat menjadi 367.447.905 Kkal, Surplus yang diperoleh sebesar meningkat menjadi 6.813.562.968 Kkal. Pada tahun 2029 Kecamatan pasimasunggu merupakan kecamatan memiliki ketersediaan pangan tertinggi sebesar 1.195.304.158 dan surplus dan selisih sebesar 1.150.926.007 Kkal. Kecamatan Benteng kembali mengalami defisit yang lebih besar di tahun 2029 sebesar 23.216.690 Kkal, hal ini menandakan tantangan yang terus berlanjut meskipun sebagian besar wilayah kecamatam lain

mengalami surplus yang signifikan.

**Kinerja Layanan Jasa Ekosistem**

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*).

Jasa Ekosistem merupakan manfaat (JE) merupakan manfaat atau layanan yang digunakan diberikan oleh suatu ekosistem kepada manusi dan lingkungan. Terdapat tujuh jenis jasa ekosistem yang dinilai yang dikategororikan menjadi lima klasifikasi parameter yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Ada beberapa Jasa Ekositem yang berkaitan :

1. **Jasa Ekositem Penyedia Air**

   Ekositem memberikan manfaat penyediaan air yaituketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun penyedia jasa air sangat dpengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air *(akuifer)* serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan. Berikut hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia air dengan kategori Jasa Ekosistem Penyedia Air memiliki sebaran yang bervariasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KATEGORI JASA PENYEDIA AIR YANG MEMILIKI SEBARAN YANG BERVARIASI BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

| No | Kategori | Kecamatan | Luas Area (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Rendah | Bontoharu | 314,88 |
| | | Buki | 39,17 |
| 2 | Rendah | Pasimarannu | 17,165,91 |
| | | Benteng | 322,33 |
| 3 | Sedang | Bontosikuyu | 11.360,54 |
| | | Pasilambena | 5,37 |
| 4 | Tinggi | Bontosikuyu | 515,38 |
| | | Bontomanai | 1,89 |
| 5 | Sangat Tinggi | Bontomanai | 4,59 |
| | | Bontoharu | 21,19 |

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Tabel diatas hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia air memiliki sebaran bervariasi dibeberapa kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana Jasa Ekosistem Penyedia Air terdiri dari beberapa kategori yaitu kategori sangat rendah, terdapat di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Buki, kategori rendah terdapat di Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Benteng, kategori sedang terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasilambena, Kategori Tinggi terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomanai, dan Kategori sangat tinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai dan Bontoharu.

## 2. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Jasa Ekoistem yang menyediakan pangan terutama berasal dari sektor pertanian dan perikanan, hasil pangan peternakan, hasil laut, termasuk pangan dari hutan . Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan) baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Berdasarkan hasil analisis, distribusi jasa ekosistem penyedia pangan, kategori Jasa Ekosistem Penyedia Pangan memiliki signifikan antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

TABEL

**KATEGORI JASA PENYEDIA PANGAN YANG MEMILIKI SEBARAN YANG BERVARIASI BERDASARKAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

| No | Kategori | Kecamatan | Luas Area (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Rendah | Benteng | 168,77 |
| | | Buki | 16,34 |
| 2 | Rendah | Pasimarannu | 5.221,45 |
| | | Buki | 106,04 |
| 3 | Sedang | Bontosikuyu | 16.096 |
| | | Pasimasunggu Timur | 726,11 |
| 4 | Tinggi | Bontomatene | 10.621,97 |
| | | Benteng | 3,50 |
| 5 | Sangat Tinggi | Pasimasunggu | 1.125,38 |
| | | Taka Bonerate | 6,28 |

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

### 3. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Kondisi Hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya.

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hydrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (prestipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air pengendalian banjir dan pemeliharaan ketetersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan. Berdasarkan hasil analisis, distribusi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air, kategori Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir menunjukkan siginifikan antar kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**KATEGORI JASA EKOSISTEM PENGATURAN TATA ALIRAN AIR DAN BANJIR BERDASARKAN LUAS WILAYAH DI KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

| No | Kategori | Kecamatan | Luas Area (ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sangat Rendah | Pasilambena | 7.822,22 |
| | | Bontoharu | 72,07 |
| 2 | Rendah | Pasimarannu | 5.019,64 |
| | | Taka Bonerate | 465,47 |
| 3 | Sedang | Bontosikuyu | 16.282,43 |
| | | Pasilambena | 5,37 |
| 4 | Tinggi | Pasimarannu | 5.752,24 |
| | | Bontoharu | 0,79 |
| 5 | Sangat Tinggi | Bontomatene | 2.376.89 |
| | | Pasimasunggu | 17,71 |

Sumber Data: KHLS RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas kategori jasa ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi atas beberapa kategori yaitu kategori sangat rendah dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Pasilambena sedangkan luas area terkecil terdapat di Kecamatan Bontoharu , Kategori Rendah dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Pasimarannu dan luas area terkecil terdapat di Kecamatan Taka Bonerate, Kategori Sedang dengan luas area terbesar terdapat di Kecamatan Bontisikuyu.

Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi

lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);
3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial

kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung ditumpangtindihkan (*overlay*) untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

### 2.2.2 Penentuan isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan dengan kondisi yang objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah sejalan sampai saat ini.

Analisis isu -isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KabupatennKepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman aparatur dan pengurus/pengelola lembaga kemasyarakatan didesa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pemberdayaan masyarakat desa;
2. Belum optimalnya penggunaan jaringan internet di beberapa desa;

3. Masuh terdapat desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Masih rendahnya pembinaan SDM (pengetahuan dan keterampilan) aparatur pemerintah desa diantaranya ketersediaan data profil desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan intervensi pembangunan yang akan dilaksanakan;
5. Adanya kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih;
6. Adanya kebijakan pengembangan posyandu erabaru;
7. Sarana dan prasarana diperdesaan yang belum merata;
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diperdesaan.

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKA T DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DPMD | PERMASALAHAN DPMD | ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DPMD | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DPMD | | | ISU STRATEGIS DPMD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL | |
| Potensi Pengembangan Desa | Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas dalam mengelola potensi desa | Pengelolaan sumber daya alam ditingkat desa | Pembangunan yang berkelanjutan khususnya yang berkaitan dengan desa dan masyarakat perdesaan | Program MBG, Potensi Desa Wisata dan Ketahanan Pangan | Meningkatnya Kulaitas Sumber Daya Manusia | Masih rendahnya pemahaman Aparatur dan pengurus/pengelola Lembaga Kemasyarakatan di desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mendukung pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa |
| | Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Di desa | Minimnya akses internet dibeberapa wilayah yang berdampak pada Pengelolaan data informasi desa | Tansformasi digital | Digitalisasi Desa | - Digitalisasi Desa melalui penggunaan CMS (Cash Management System<br>- Pengeloaan Keuangan Desa | Belum optimalnya penggunaan jaringan internet dibeberapa desa |
| Pemberdayaan Masyarakat desa | Masih kurangnya kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi khususnya Undang-undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 | Keterbatasan SDM | | | | - Masih terdapat desa berstatus desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar<br>- Masih rendahnya pembinaan SDM (pengetahuan dan Keterampilan ) Aparatur Pemerintah Desa diantaranya ketersediaan data profil desa sebagai bahan dasar perencanaan desa yang sangat membantu dalam menentukan intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan<br>- Adanya Kebijakan Pembentukan Koperasi Merah Putih<br>- Adanya Kebijakan Pengembangan Posyandu Era Baru |
| Potensi infrastruktur Desa | Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sosial dan ekonomi masyarakat | Pembangunan infrastruktur di Desa | | Penipisan Sumber Daya Alam | Krisis air bersih | Sarana dan prasarana dipedesaan yang belum merata |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelembagaan dan Sumber Daya | Masih perlunya peningkatan kolaborasi antar dinas/badan terkait dalam peningkatan kinerja DPMD | Tata Kelola Pemerintahan khususnya pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | Belum optimalnya penyelengaraan pemberdayaan masyarakat perdesaan |

# PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang transportasi. Dengan wilayah yang berbentuk kepulauan, keberadaan sektor perhubungan menjadi sangat vital untuk menjamin kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta mendukung sektor pariwisata dan perekonomian.

## Identitas Instansi

| | |
|---|---|
| Nama | : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar |
| Alamat | : Jl. R.E. Martadinata No. 9, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan |
| Kode Pos | : 92812 |
| Telepon/Fax | : (0414) 22587 |
| Email | : dishubkepselayar@gmail.com |
| Media Sosial | : Instagram (@dishubkepselayar), Facebook (Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar) |
| Koordinat | : -6.1186318 Bujur Timur dan 120.4574719 Lintang Selatan. |

## Dasar Hukum

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana Dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Tipe B.

## Visi dan Misi

Visi : ***"KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA"***

Misi:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.

## Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

1. Meningkatkan Kelancaran Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dan Wilayah Kepulauan; dan
2. Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Fasilitas Transportasi antarwilayah;
2. Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan;
3. Meningkatnya Nilai SAKIP;
4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintahan Perangkat Daerah sesuai SAP; dan
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

## Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evalusi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan admininstrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
    a. Subbagian Program

   b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
   c. Subbagian Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
   a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
   b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
   a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
   b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
   a. UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
   b. UPTD Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
   c. UPTD Terminal dan Perparkiran;
   d. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
   e. UPTD Pelabuhan Laut Lokal.

## Sumber Daya dan Infrastruktur

Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Perhubungan terdiri dari ASN sebanyak 49 orang, P3K sebanyak 2 orang, dan PHL sebanyak 117 orang.
Infrastruktur Dinas Perhubungan antara lain :

1. Terminal Angkutan Jalan 1 Unit
2. Fasilitas Perlengkapan Jalan
   - Rambu Lalu Lintas 259 Unit
   - Guardrail 9 Unit
   - LPJU 1.972 Unit
   - Deliniator 1 Unit
3. Tambatan Perahu 59 Unit (26 unit kondisi baik dan 33 unit kondisi rusak)

## Program dan Layanan Publik

1. Program Mudik Gratis bagi mahasiswa dan pelajar bekerja sama dengan BUMN;
2. Pelayanan terminal angkutan jalan;
3. Pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum;
4. Pengaturan lalu lintas dan keselamatan jalan; dan
5. Layanan  pelabuhan pengumpan lokal di wilayah kepulauan.







# PROFIL

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN


DISKOMINFO-SP KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Benteng Selayar

E-mail :
- kominfo@kepulauanselayarkab.go.id
- ppid.selayar1@gmail.com

Website :
- kepulauanselayarkab.go.id
- https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id/

Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kominfo, statistik dan persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disingkat Kominfo-SP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik, sistem pengendalian ini merupakan pengelolaan informasi dan layanan internet pemerintah, meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi daerah, megelola data daerah, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan memfasilitasi keterbukaan informasi publik sesuai peraturan yang berlaku serta mengembangkan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Gambar 1.1**

**FOTO KANTOR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**









Gambar 1.1

Diskominfo-SP Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di Koordinat -6,1209480, 120,4668632, dengan alamat email kominfo@kepulauanselayarkab.go.id, dan kominfoselayar@gmail.com. Diskominfo-SP memiliki laman website sebagai bahan informasi yaitu **Kabupaten Kepulauan Selayar** https://kepulauanselayarkab.go.id, **PPID Kepulauan Selayar** https://ppid.kepulauanselayarkab.go.id, Satu Data https://sdi.kepulauanselayarkab.go.id. Selain itu Diskominfo-SP juga memiliki media sosial sebagai sumber informasi seperti Facebook **Pemkab Kepulauan Selayar** https://www.facebook.com/kominfoselayar, **Ppid Kabupaten Kepulauan Selayar** https://www.facebook.com/share/1BHTWfWcpv/, Instagram **Pemkab Kepulauan Selayar** https://www.instagram.com/kepulauan_selayar/, **Ppid Kabupaten Kepulauan Selayar** https://www.instagram.com/ppid.kab.kepulauan.selayar01/, Tiktok **Pemkab Kepulauan Selayar** https://www.tiktok.com/@pemkabkep.selayarhumas, twitter/X **Pemkab Kepulauan Selayar** https://x.com/KominfoSelayar **Ppid Kab. Kepulauan Selayar** https://x.com/ppidselayar Snack Video **PEMKAB. Kepulauan Selayar** https://www.snackvideo.com/@humaskominfose, TTE (Sistem Tanda Tangan Elektronik) http://tte.kepulauanselayarkab.go.id, Youtube **Pemkab Kepulauan Selayar** https://www.youtube.com/@kabupatenkepulauanselayar.

2. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

❖ Tugas Pokok

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

❖ Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika,Statistik dan persandian;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan persandian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya;

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, meliputi :
    1) Sub Bagian Program;
    2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
    3) Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Statistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Persandian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai Fungsi :

1) Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
4) Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait Tugas dan Fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai Tugas :

1) Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan Tugas.
2) Menditribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas.
3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dina suntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas.
4) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5) Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :

1) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
2) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
3) pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
4) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
5) pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
6) pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
7) pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
8) pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris meliputi :

1) menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2) memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
3) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4) melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas;
5) melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

Sekretaris membawahi tiga subbagian yaitu Subbagian Program, Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, dan Subbagian Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran,

pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Uraian tugas subbagian Program meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
c) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
d) menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
e) memfasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
f) menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
g) menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

2. Subbagian Umum, Kepegawain dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan. Uraian tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum meliputi :

a) menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d) menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e) melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitas, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;

3. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekratariat dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. Uraian tugas Subbagian Keuangan meliputi :

a) menyusun rencanan kegiatan Subbagian keuangan sebagai pedoman dalam palaksanaan tugas;
b) menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan serta memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
d) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hubungan masyarakat, infromasi dan komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
4) Pelaksanaan administrasi di Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Hubungan Masyarakat, Informasi dan Komunikasi Publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. melakukan pengumpulan bahan informasi dari perangkat daerah instansi vertikal, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
c. melakukan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
d. melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
e. melakukan layanan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
f. melakukan pelayanan informasi publik untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
g. melakukan pelayanan pengaduan masyarakat;
h. melakukan fasilitasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi perangkat daerah;

D. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Aplikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Aplikasi dan Informatika. Adapun fungsinya sebagai berikut :

1) Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi dan informatika;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi dan infromatika;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi dan informatika;
4) Pelaksanaan administrasi di bidang aplikasi dann informatika;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Aplikasi dan Informatika memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Aplikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. melaksanakan pelayanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet;
c. melaksanakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik serta suplemen yang terintegrasi;
d. melaksanakan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi Smart City;
e. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
f. melakukan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;

E. BIDANG STATISTIK

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang statistik. Adapun fungsi dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan teknis bidang statistik;
2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang statistik;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistic;
4) Pelaksanaan administrasi di bidang statistic dan
5) Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik mempunyai uraian tugasnya sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Statistik sebagai pedoman pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Statistik untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. melakukan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan daerah.
e. melakukan validasi data yang bersumber dari seluruh perangkat daerah, badan pusat statstik, dan instansi lainnya.
f. menyusun dan mempublikasikan data statistik daerah baik secara manual/dokumen maupun secara elektronik.

F. BIDANG PERSANDIAN

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang persandian. Adapun fungsinya sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang persandian;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang persandian
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persandian;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang persandian;dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang persandian.

Bidang Persandian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Persandian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
b. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
c. menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak sandi, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi;
d. melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaaatan, dan penghancuran informasi berklasifikasi;
e. melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan seminar;

G. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

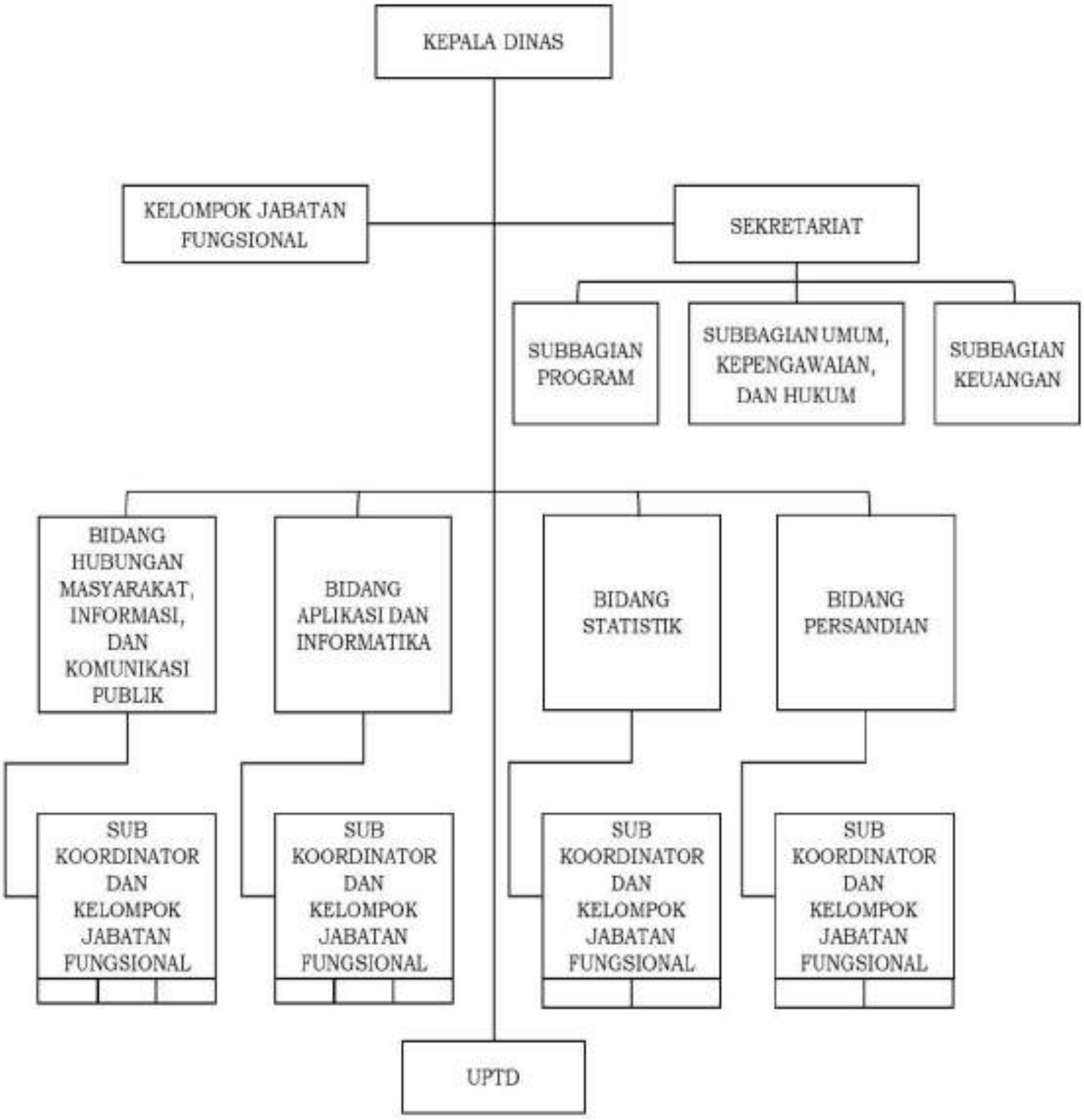
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk Sub Koordinator. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang Tugas dan Fungsi jabatan administrator masing-masing.

Sub Koordinator melaksanakan Tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian Fungsi.

Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar



3. Sumber Daya Diskominfo-SP

Jumlah Pegawai di Dinas Kominfo-SP Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai Bulan Desember 2024 Sebanyak 27 Orang

| No | Nama/Nip | Pangkat/Gol. | Jabatan | | | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JPT | Administrator | Pengawas | Pelaksana | |
| 1 | Hj. Andi Dwiyanti Musrifah, S.E.,M.M. 197605022014072002 | Penata Tk.I, III/d | √ | | | | Plt. Kadis |
| 2 | Hj. Andi Dwiyanti Musrifah, S.E.,M.M. 197605022014072002 | Penata Tk.I, III/d | | √ | | | Sekretaris |
| 3 | Mutmainnah, S.T 197810252007012020 | Penata Tk.I, III/d | | | √ | | Kasubag |
| 4 | A.A.S. Rakhmat, S.Ap. 197509132007011013 | Penata Muda Tk.I, III/b | | | √ | | Kasubag |
| 5 | Nita Sari, S.H. 198112142015032001 | Penata , III/c | | | √ | | Kasubag |
| 6 | Mar'awati, S.Stp. 199408232016092001 | Penata, III/c | | √ | | | Kabid |
| 7 | Andi Chitra Opu, S.Pd. 197301232007011015 | Pembina Tk.I, IV/b | | √ | | | Kabid |
| 8 | A.Sandra Esty Abriani, S.E 198309232009032007 | Penata, III/c | | √ | | | |
| 9 | Hasanuddin Hamid,ST,M.Han 197804122007011002 | Penata Tk.I , III/d | | √ | | | |
| 10 | Nurwahidin, S.Sos 198308242015031003 | Penata Muda Tk I, III/b | | | √ | | |
| 11 | Muhammad Alif, S.Kom 197505132009031003 | Penata Tk.I, III/d | | | √ | | |
| 12 | Andi Afdal Ahsari, ST 198412042010011028 | Penata , III/c | | | √ | | |
| 13 | Iswar Tita Adinata, S.Sos 198405052010011013 | Penata , III/c | | | √ | | |
| 14 | Andi Jaelani.S.P 196711151998031006 | Penata Tk.I, III/d | | | √ | | |
| 15 | Hidayat, ST 197706122014071005 | Penata Muda III/a | | | √ | | |
| 16 | Zaenal Arisin, S.Kom | | | | √ | | PPPK |
| 17 | Yusniati, S.IP.MPA. 198506222011012016 | Penata Tk I, III/d | | | √ | | |
| 18 | Ira, S.P.,M.M. 198502252008012010 | Penata Muda Tk I, III/b | | | √ | | |
| 19 | Suhrawardi 198007022008011015 | Pengatur Tk I, IId | | | | √ | |
| 20 | Asmin Salmin, S.Ag 197201262007011010 | Penata, III/c | | | | √ | |
| 21 | Andi Marwiyah, S.Si,M.M 196903221997032008 | Pembina, IV/a | | | | √ | |
| 22 | Firman 197700322007011016 | Penata Muda/ IIIa | | | | √ | |
| 23 | Ridwan 196909262007011019 | Penata Muda/ IIIa | | | | √ | |
| 24 | Mahmulianto, S.Kom | | | | | √ | PPPK |
| 25 | Heni Anggriati Abd. Rasyid 198612092014072003 | Pengatur Muda Tk I, II/b | | | | √ | |
| 26 | Abdul Rachman Azis 197201131990031005 | Penata, III/c | | | | √ | |
| 27 | Nur Jannah 197806052007012032 | Penata Muda/ IIIa | | | | √ | |
| Jumlah | | | 1 | 5 | 12 | 9 | |

Sumber Daya Manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.3.1 : Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai**

| Status Pegawai | Jumlah |
|---|---|
| ASN / PNS | 27 |
| PHL ( Pegawai Harian Lepas) | 58 |

**Tabel 1.3.2 : Jumlah pegawai berdasarkan Golongan**

| Golongan | Jumlah |
|---|---|
| IV | 3 |
| III | 22 |
| II | 2 |
| I | - |

**Tabel 1.3.3 : Jumlah pegawai berdasarkan jabatan**

| Eselon | Jumlah |
|---|---|
| II | 1 |
| III | 5 |
| IV | 3 |
| Fungsional | 7 |

**Tabel 1.3.4 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| S3 | - |
| S2 | 6 |
| S1 | 13 |
| DIV | - |
| D3 | - |
| SLTA | 7 |
| SMP | - |
| SD | - |

**Tabel 1.3.5 : Jumlah Pegawai berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki**

| Disiplin Ilmu | Jumlah |
|---|---|
| S1 Hukum | 2 Orang |
| S1 Ekonomi | 3 Orang |
| S1 Tekhnik | 3 Orang |
| S1 Sosial | 3 Orang |
| S1 Adm. Pemerintahan | 2 Orang |
| S1 Pemerintahan DN | 1 Orang |
| S1 Ilmu Pemerintahan | 1 Orang |
| S1 Komunikasi | 1 Orang |
| S1 Agama Islam | 1 Orang |
| S1 Perikanan | 1 Orang |
| S1 Komputer | 1 Orang |

4. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut :

| No. | Sarana/ Prasaran | Jumlah (Unit) | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Gedung Kantor | 1 | |
| 2. | Sepeda Motor | 13 | |
| 3. | Lemari Besi | 1 | |
| 4. | Lemari Buku Arsip | 1 | |
| 5. | Kursi Rapat | 1 | |
| 6. | Kursi Tamu | 4 | |
| 7. | Meja Kerja | 6 | |
| 8. | Kursi Kerja | 5 | |
| 9. | Lemari Es | 1 | |
| 10. | Ac Unit | 8 | |
| 11. | Televisi | 1 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | P.C Unit/ Komputer Pc | 6 | |
| 13. | Lap Top | 14 | |
| 14. | Printer | 12 | |
| 15. | Mobil Jabatan | 2 | |
| 16. | Mobil Oprasional | 1 | |
| 17. | Kursi Putar | 4 | |
| 18. | Meja Rapat | 1 | |
| 19. | Kamera | 3 | |
| 20. | Note Book | 2 | |
| 21. | Alat Rumah Tangga Lain-Lain | 8 | |
| 22. | Tripot | 1 | |
| 23. | Megaphone | 1 | |
| 24. | Papan Visual/Papan Nama | 1 | |
| 25. | Alat Studio Lainnya/Drone | 1 | |
| 26. | Lensa Kamera | 2 | |
| 27. | Alat Komunikasi Radio | 3 | |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dan terakhir diubah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Merujuk pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat paerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait seperti: Renstra Kementrian Inverstasi; Renstra Kementrian Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan; Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dokumen terkait lainnya.

Rencana Strategis Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 di susun ini adalah sebagai pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Perencanaan strategis ini adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk dimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun renstra ini meliputi: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, top-down, dan bottom up. Dokumen ini disusun sebagai landasan operasional dalam melaksanakan kebijakan, Program dan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi dan mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan penanaman modal, yang pada gilirannya mampu menggerakan kegiatan perekonomian masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan, hal inilah yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas PMPTSPT Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Rencana strategis ini di susun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan (Renja) dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 1.2. Gambaran Umum Dinas PMPTSP

Dinas PMPTSP sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki gambaran berikut:

a) Peringkat : B

b) Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani Mal Pelayanan Publik (MPP)Benteng Kab. Kepulauan Selayar

c) Email : dpmptsptk.selayar@gmail.com

d) Titik koordinat : **S** 6,11924, **E** 120,467141

e) Foto kantor


MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# BAB II
# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki kedudukan yang di atur dalam Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47), dimana tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sebagaimana mewujudkan visi dan misi Kabupaten kepulauan Selayar serta menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementrian sebagimana tertuang dalam Renstra tahun 2021 s/d 2026. Dinas PMPTSP.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) sesuai kebijkasanaan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyiapkan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP);
3. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;

4. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris terdiri dari;

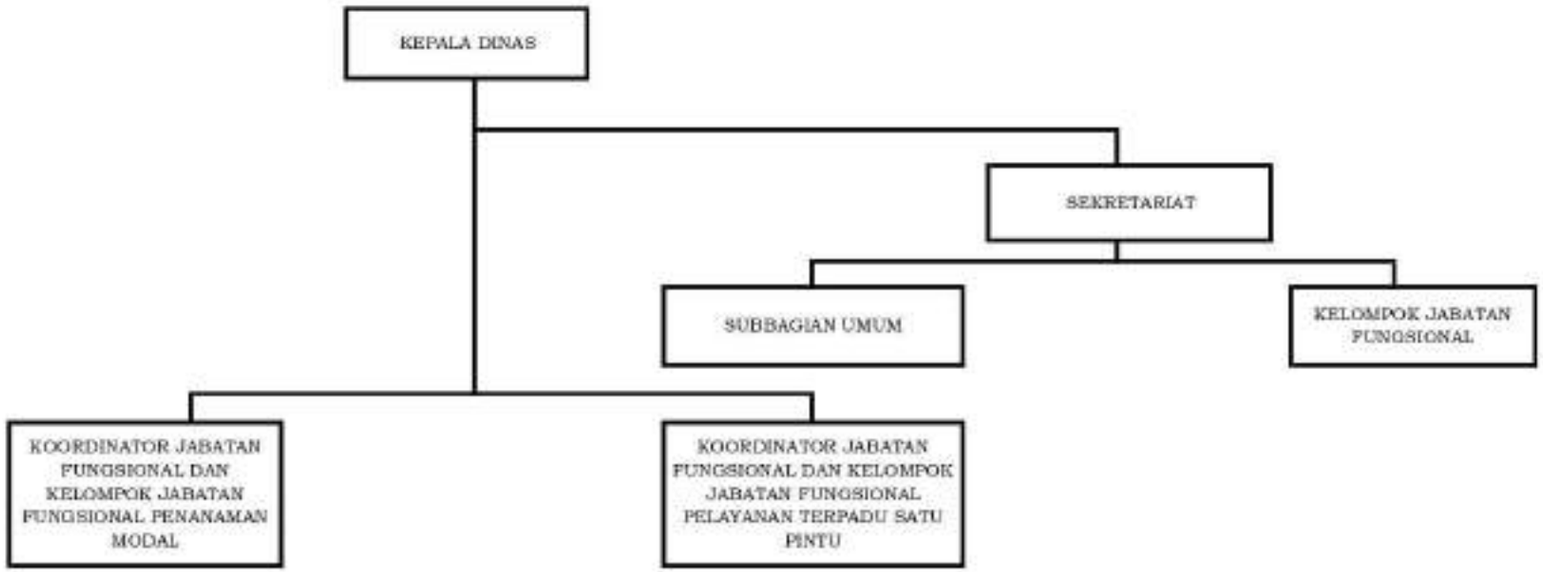
   Subbagian Umum,
3. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
5. Kelompok Jabatan Fungsional;

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 48 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

**PERUBAHAN**

**Gambar 2.2**

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**




**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. BASLI ALI**

Dinas PMPTSP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, merupakan kesatuan dalam mewujudkan visi, misi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

## 2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia Dinas PMPTSP Kabupaten Kepulauan Selayar keadaan pada Januari 2023 berjumlah 24 orang PNS, - orang CPNS, 28 orang PHL, dan 4 orang Tenaga Sukarela (lihat Tabel 2.1.) di bawah ini:

**Tabel 2.1**
**Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas PMPTSP**

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas | 1 orang |
| 2. | Sekretaris | 1 orang |
| 3. | Kepala Sub. Bagian Umum | 1 orang |
| 4. | Koordinator Jabatan Fungsional | 2 orang |
| 5. | Jabatan Fungsional Tertentu | 7 orang |
| 6 | Jabatan Fungsional Umum | 14 orang |
| 7. | Staff Non PNS | 28 orang |

*Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari, 2023*

**Tabel 2.2**
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat Dinas PMPTSP**

| No. | Pangkat | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 1 |
| 3 | Eselon IV | 1 |

*Sumber data: Data Subbagian Umum Dinas PMPTSP, Januari, 2023*

Dinas PMPTSP memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah memiliki aparatur yang memiliki Eselon II yang diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.3**
**Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang**
**Dinas PMPTSP**

| No | Golongan/Ruang | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | **I/a** | **- orang** |
| **2** | **I/b** | **- orang** |
| **3** | **I/c** | **- orang** |
| **4** | **I/d** | **- orang** |
| **5** | **II/a** | **- orang** |
| **6** | **II/b** | **- orang** |
| **7** | **II/c** | **- orang** |
| **8** | **II/d** | **4 orang** |

| | | |
|---|---|---|
| **9** | **III/a** | **1 orang** |
| **10** | **III/b** | **2 orang** |
| **11** | **III/c** | **3 orang** |
| **12** | **III/d** | **9 orang** |
| **13** | **IV/a** | **3 orang** |
| **14** | **IV/b** | **1 orang** |
| **15** | **IV/c** | **1 orang** |
| **16** | **Pegawai Harian Lepas** | **24 orang** |
| **17** | **Petugas kebersihan** | **4 orang** |

*Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis.* PMPTSP*, Januari, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/c yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**
**Jumlah Pegawai Dinas PMPTSP Berdasarkan Tingkat Pendidikan**
**Januari 2023**

| No. | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Strata Dua (S2) | 4 orang |
| 2 | Strata Satu (S1) | 13 orang |
| 3 | Diploma 3 (D3) | 1 orang |
| 4 | SLTA | 8 orang |

*Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis.* PMPTSP*, Januari, 2023*

Berdasarkan komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) adalah SLTA, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan yang dapat dijabarkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5**
**Jumlah Pejabat Struktural menurut tingkat penjenjangan (Diklat)**
**Januari 2023**

| No. | Diklat Penjenjangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sespa/Spamen/PIM II | 1 orang |
| 2 | Spadya/Spama/PIM III | 2 orang |
| 3 | Spada/Adum/PIM IV | - orang |
| | Jumlah | 3 orang |

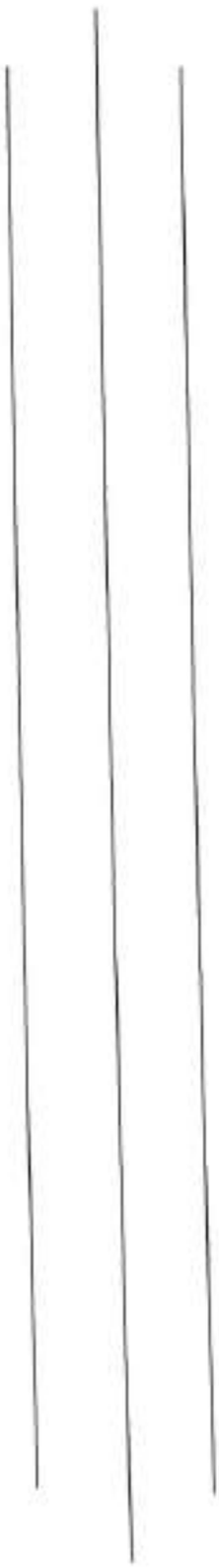
*Sumber data: Data Subbagian Umum, Dis.* PMPTSP*, Januari, 2023*

## 2.2. Daftar nama pegawai dinas PMPTSP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si<br>19660507 198603 1 022 | Pembina Utama Muda, IV/c | L | | | | |
| 2. | ANDI TORIPUJI, SE, M.Si<br>NIP. 19730917 200701 2 016 | Pembina, IV/a | P | | | | |
| 3. | SUNANDAR, SE<br>NIP. 19810614 201407 1 001 | Penata Muda Tk. I, III/b | L | | | | |
| 4. | ANDI NUR HAWATI, S.H<br>NIP.19790710 200701 2 024 | Penata Tk.I, III/d | P | | | | |
| 5. | MUHAMMAD SAING, S.Pd.,M.Pd<br>NIP. 19870705 201903 1 005 | Penata Muda Tk. I, III/b | L | | | | |
| 6. | TI'NO<br>NIP. 196604221990032010 | Penata Muda, III/a | P | | | | |
| 7. | HARTIWI DAMAYANTI, S.Pd<br>NIP. 19940210 201903 2 011 | Penata Muda, III/a | P | | | | |
| 8. | INSANG SURYANI<br>NIP. 197806022007012019 | Pengatur Tk. I, II/d | P | | | | |
| 9. | ANDI NUR HIDAYAH<br>NIP. 19830318 200903 2 008 | Pengatur Tk. I, II/d | P | | | | |
| 10. | MARHAENI<br>NIP. 19820410 201406 2 001 | Pengatur Muda, Tk.I, II/c | P | | | | |
| 11. | Drs. SALEWANG<br>NIP. 19670314 199803 1 008 | Pembina Tk.I, IV/b | L | | | | |
| 12. | ANDI ARIPIN, S.P<br>NIP.19730605 200604 1 021 | Penata Tk.I, III/d | L | | | | |
| 13. | NURLINDA, ST<br>NIP. 19790701 200903 2 003 | Penata Tk.I, III/d | P | | | | |
| 14. | AKHMAD ALWY<br>NIP. 19681005 199103 1 012 | Penata Tk.I, III/d | L | | | | |
| 15. | IRMAWATI, ST<br>NIP. 19791128 201001 2 015 | Penata Muda Tk. I, III/b | P | | | | |
| 16. | NUR HASRUL<br>NIP.197405172008011012 | Pengatur Tk. I, II/d | L | | | | |
| 17. | ANDI IRWAN, S.A.P<br>NIP. 19771213 200701 1 017 | Penata, III/c | L | | | | |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | | | | | | | |
| 18. | Hj. NUR IKHLAS, ST<br>NIP. 19761128 200502 2 004 | Pembina, IV/a | P | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | SITTI RAHMAWATI, ST<br>NIP. 19761022 201001 2 005 | Penata Tk.I, III/d | **P** | | | | |
| 20. | ABD. NASIR, A.Md.Kom<br>NIP. 1986011 200903 1 002 | Penata, III/c | **L** | | | | |
| 21. | NUR FAJAR TAUFIQ, S.Kom<br>NIP. 19830814 201001 1 016 | Penata Tk.I, III/d | **L** | | | | |
| 22. | JAUDAH<br>NIP. 19700702 200701 2 023 | Pengatur Tk.I, II/d | **p** | | | | |
| 23. | NURBAETY SUDDIN, SE<br>NIP. 19680913 200604 2 011 | Penata Tk. I, III/d | **P** | | | | |
| 24. | NURYATI,SE<br>NIP. 19770504 200903 2 006 | Penata Tk.I, III/d | **P** | | | | |
| 25. | MUHAMMAD SADLI, SE<br>NIP. 19731216 199402 1 003 | Penata Tk.I, III/d | **L** | | | | |
| 26. | NUR SALEH NURDIN<br>NIP. 19660517 198603 1 007 | Pembina, IV/a | **L** | | | | |

# PROFIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
# TAHUN 2024



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk dan ridho-Nya sehingga penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 merupakan gambaran kondisi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang disajikan dalam bentuk data. Selain sebagai sumber data dan informasi, Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan kedepannya.

Oleh karena itu, diharapkan data-data yang disajikan dalam Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Terimakasih tak terhingga kepada seluruh pegawai yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa profil ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kedepannya diharapkan dapat terus ditingkatkan serta dilakukan upaya penyempurnaan.

Selayar,  Pebruari 2024

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

H. SALAHUDDIN, S.Sos

DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | ..... | i |
| DAFTAR ISI | ..... | ii |
| DAFTAR TABEL | ..... | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | ..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | ..... | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum | ..... | 1 |
| 1.3. Tujuan Penyusunan Profil | ..... | 3 |
| 1.4. Sistimatika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 | ..... | 3 |
| BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | 6 |
| 2.1. Sejarah Singkat | ..... | 6 |
| 2.2. Domisili | ..... | 6 |
| 2.3. Maksud dan Tujuan | ..... | 7 |
| 2.4. Kedudukan | ..... | 7 |
| 2.5. Susunan dan Struktur Organisasi | ..... | 7 |
| 2.6. Tugas dan fungsi | ..... | 8 |
| 2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural | ..... | 11 |
| 2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | ..... | 11 |
| 2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan | ..... | 14 |
| 2.10. Data Perpustakaan | ..... | 14 |
| 2.11. Data Pegawai Yang Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | ..... | 16 |
| BAB III. PENUTUP | ..... | 17 |
| Lampiran-Lampiran | | |

DAFTAR TABEL


| | | Halaman |
|---|---|---|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Pebruari 2024 ..... | 12 |
| Tabel 2.2 | Rekapitulasi Data Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Pebruari 2024 ..... | 12 |
| Tabel 2.3 | Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Bulan Pebruari 2024 ..... | 13 |
| Tabel 2.4 | Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 ..... | 13 |
| Tabel 2.5 | Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Per Kecamatan ..... | 14 |
| Tabel 2.6 | Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah ..... | 15 |
| Tabel 2.7 | Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca .... | 15 |
| Tabel 2.8 | Rekapitulasi Pejabat Negara dalam Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Menyampaikan LHKPN Periodik 2023 ..... | 16 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penyediaan data dan informasi oleh Pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Hal inilah yang mendasari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, yang diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran mengenai sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, domisili, kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, profil singkat pejabat struktural, SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Layanan perpustakaan yang dilaksanakan dan rekapitulasi Pejabat Negara yang menyampaikan LHKPN.

## 1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### 1.3. Tujuan Penyusunan Profil

Tujuan penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar serta tersedia data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.4. Sistimatika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latal Belakang

Memberikan gambaran singkat tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan secara singkat tentang landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Tujuan Penyusunan Profil

Menjelaskan tujuan penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistimatika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

Memberikan gambaran struktur penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Sejarah Singkat

Menguraikan sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.2. Domisili

Menguraikan alamat lengkap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021.

2.4. Kedudukan

Menguraikan tentang kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.5. Susunan dan Struktur Organisasi

Menguraikan tentang susunan dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.6. Tugas dan Fungsi

Menguraikan tentang tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural

Menguraikan profil singkat pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menguraikan tentang Sumber Daya Manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan

Menguraikan tentang jenis layanan perpustakaan dan promosi perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.10. Data Perpustakaan

Menguraikan tentang perpustakaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.11. Data Pegawai Yang Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Menguraikan tentang Data Pegawai yang berada dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

BAB III. PENUTUP

Memuat kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

## 2.1. Sejarah Singkat

Perkembangan yang demikian pesatnya membuat masyarakat semakin tak bisa dipisahkan dari informasi, sadar atau tidak manusia sebagai mahluk sosial akan selalu membutuhkan informasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi, salah satunya juga adalah dengan membaca.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar didirikan atas bantuan Bapak H. Tenri Abeng, MBA yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN, dan diresmikan juga oleh beliau pada tanggal 26 Juni 1999, dan diperdakan tanggal 7 Juli 1999 Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum. Kantor Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 dengan gedung berlantai 2 (dua) terletak di pusat Benteng ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Diawal berdirinya Kantor Perpustakaan adalah sebuah Kantor yang bergabung dengan Arsip Daerah pada waktu itu, dengan adanya gedung sendiri Perpustakaan, maka sejak itu perpustakaan berubah nama dari Perpustakaan Anak Kukang menjadi Perpustakaan Umum Daerah, namun Tahun 2006 Kantor Perpustakaan berada dibawah naungan Diknas dan berubah menjadi UPTD Perpustakaan, dan Tahun 2009 Kantor Perpustakaan berubah nama lagi menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip dan kembali berdiri sendiri dimana langsung bertanggungjawab kepada Bupati. Kemudian pada Tahun 2017 berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak berubah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020 sampai saat ini.

## 2.2 Domisili

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdomisili di Benteng ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan kode pos 92812, URL Website : http://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id, E-mail : perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com

## 2.3. Maksud dan Tujuan

Kelembagaan dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 berbunyi :

**Maksud** penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas.

Pasal 3 berbunyi :

**Tujuan** penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjabarkan Tugas dan Fungsi jabatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah pada Dinas.

## 2.4. Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## 2.5. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI**
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**




## 2.6. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas mempunyai **Tugas** membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

   Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai **Fungsi :**

   a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai Fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran Dinas;
b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil Negara lingkup Dinas;
e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan umum, pengelolaan arsip, persuratan, kerumah tanggaan, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

3. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan; dan
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan; dan
e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan Fungsinya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural

Profil singkat pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar keadaan Pebruari 2024 yaitu :

1. Kepala Dinas

   Nama : H. Salahuddin, S.Sos

   Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/ IV/c

2. Sekretaris

   Nama : Dra. Hj. Andi Mulyani

   Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I/ IV/b

3. Kepala Bidang Perpustakaan

   Nama : Andi Herliati, S.P, M.M

   Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV/a

4. Kepala Bidang Kearsipan

   Nama : Andi Citrawati, S.T

   Pangkat/ Golongan : Pembina/ IV/a

5. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

   Nama : Raden Rachmawati, A.Md.Pi

   Pangkat/ Golongan : Penata/ III/c

6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

   Nama : Fakhruddin, S.E

   Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk. I/ III/b

## 2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pegawai sebanyak 48 Orang yaitu 23 orang PNS dan 25 orang PHL (keadaan bulan Pebruari 2024).

Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bulan : Pebruari 2024

| No. | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | S2 | 1 orang | 1 orang | 2 orang |
| 2. | S1 | 6 orang | 6 orang | 12 orang |
| 3. | D3 | - | 3 orang | 3 orang |
| 4. | D2 | - | 3 orang | 3 orang |
| 5. | SLTA | - | 2 orang | 2 orang |
| 6. | SLTP | 1 orang | - | 1 orang |
| 7. | SD | - | - | - |
| | **Jumlah** | **8 orang** | **15 orang** | **23 orang** |

Tabel 2.2

Rekapitulasi Data Pegawai Harian Lepas (PHL)

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Bulan : Pebruari 2024

| No. | Tingkat Pendidikan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | S2 | - | - | - |
| 2. | S1 | 3 orang | 10 orang | 13 orang |
| 3. | D3 | - | - | - |
| 4. | D2 | - | 3 orang | 3 orang |
| 5. | SLTA | 4 orang | 5 orang | 9 orang |
| 6. | SLTP | - | - | - |
| 7. | SD | - | - | - |
| | **Jumlah** | **7 orang** | **18 orang** | **25 orang** |

3. Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Bulan : Pebruari 2024

| No. | Pangkat/Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1. | Pembina Utama Muda/ IV/c | 1 orang | - | 1 orang |
| 2. | Pembina Tk. I/ IV/b | - | 2 orang | 2 orang |
| 3. | Pembina/ IV/a | 1 orang | 2 orang | 3 orang |
| 4. | Penata Tk. I/ III/d | 3 orang | 3 orang | 6 orang |
| 5. | Penata/ III/c | - | 1 orang | 1 orang |
| 6. | Penata Muda Tk. I/ III/b | 2 orang | 2 orang | 4 orang |
| 7. | Penata Muda/ III/a | - | 2 orang | 2 orang |
| 8. | Pengatur Tk. I/ II/d | - | 3 orang | 3 orang |
| 9. | Pengatur/ II/c | 1 orang | - | 1 orang |
| | **Jumlah** | **8 orang** | **15 orang** | **23 orang** |

Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2024

| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jenis Kelamin** | | **Jumlah** | **Keterangan** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Laki-Laki** | **Perempuan** | | |
| 1. | S2 | - | 1 orang | 1 orang | **1 orang kualifikasi Non Perpustakaan** |
| 2. | S1 | 4 orang | 9 orang | 13 orang | **5 orang kualifikasi Perpustakaan** (1 org laki-laki dan 4 org perempuan), **8 orang kualifikasi Non Perpustakaan** (3 org laki-laki, 5 org perempuan) |
| 3. | D3 | - | - | - | |
| 4. | D2 | - | 4 orang | 4 orang | **4 orang kualifikasi perpustakaan** |
| 5. | SLTA | 2 orang | 2 orang | 4 orang | **4 orang kualifikasi Non Perpustakaan** |
| | **Jumlah** | **6 orang** | **16 orang** | **22 orang** | **9 org kualifikasi Perpustakaan dan 13 org kualifikasi Non Perpustakaan** |

## 2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan

a. Layanan Perpustakaan

Kegiatan layanan perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain

1. Layanan Sirkulasi
2. Layanan Referensi
3. Layanan Perpustakaan Keliling (Mobil Pustaka dan Kapal Pustaka)
4. Layanan Titip Pinjam Bahan Pustaka
5. Layanan Keanggotaan Perpustakaan
6. Layanan Ruang Baca dan Bermain Anak

b. Promosi Perpustakaan

Kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Kerjasama dengan pihak ketiga
2. Menyebarkan brosur.

## 2.10. Data Perpustakaan

a. Perpustakaan Desa/Kelurahan

Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 88 Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan
Per Kecamatan

| No. | Lokasi | Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Bontomatene | 12 | |
| 2. | Kecamatan Buki | 7 | |
| 3. | Kecamatan Bontomanai | 10 | |
| 4. | Kecamatan Benteng | 3 | |
| 5. | Kecamatan Bontoharu | 8 | |
| 6. | Kecamatan Bontosikuyu | 12 | |
| 7. | Kecamatan Pasimasunggu | 7 | |
| 8. | Kecamatan Pasimasunggu Timur | 6 | |
| 9. | Kecamatan Pasilambena | 6 | |
| 10. | Kecamatan Pasimarannu | 8 | |
| 11. | Kecamatan Taka Bonerate | 9 | |
| | **Jumlah** | **88** | |

b. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 234 sekolah (SD 153, SLTP 61, SLTA 20).

Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah

| No. | Lokasi | Perpustakaan Sekolah | | | | Jumlah Perpustakaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SD | SLTP | SLTA | Perguruan Tinggi | |
| 1. | Kec. Bontomatene | 17 | 6 | 2 | | 25 |
| 2. | Kec. Buki | 14 | 5 | 1 | | 20 |
| 3. | Kec. Bontomanai | 22 | 8 | 2 | | 32 |
| 4. | Kec. Benteng | 10 | 5 | 6 | | 21 |
| 5. | Kec. Bontoharu | 16 | 5 | 2 | | 23 |
| 6. | Kec. Bontosikuyu | 22 | 8 | 2 | | 32 |
| 7. | Kec. Pasimasunggu | 10 | 5 | 1 | | 16 |
| 8. | Kec. Pasimasunggu Timur | 9 | 4 | 1 | | 14 |
| 9. | Kec. Pasilambena | 10 | 5 | 1 | | 16 |
| 10. | Kec. Pasimarannu | 10 | 3 | 1 | | 14 |
| 11. | Kec. Taka Bonerate | 13 | 7 | 1 | | 21 |
| | **Jumlah** | **153** | **61** | **20** | | **234** |

c. Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/ Taman Baca)

Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 27 Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca.

Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat
(Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca)

| No. | Lokasi | Jumlah Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Bontomatene | - | |
| 2. | Kecamatan Buki | 7 | |
| 3. | Kecamatan Bontomanai | 2 | |
| 4. | Kecamatan Benteng | 10 | |
| 5. | Kecamatan Bontoharu | 9 | |
| 6. | Kecamatan Bontosikuyu | 1 | |
| 7. | Kecamatan Pasimasunggu | - | |
| 8. | Kecamatan Pasimasunggu Timur | - | |
| 9. | Kecamatan Pasilambena | - | |
| 10. | Kecamatan Pasimarannu | - | |
| 11. | Kecamatan Taka Bonerate | - | |
| | Jumlah | 29 | |

## 2.11. Data Pegawai Yang Menyampaikan LHKPN

Pejabat Negara yang berada dalam Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyampaikan LHKPN Periodik 2023 sebanyak 5 orang.

Rekapitulasi Pejabat Negara yang berada dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang menyampaikan LHKPN Periodik 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Rekapitulasi Pejabat Negara dalam Lingkup
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
Yang Menyampaikan LHKPN Periodik 2023

| No. | Eselon | Jumlah | Periode Pelaporan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eselon II-B | 1 orang | 2023 | |
| 2. | Eselon III-A | 1 orang | 2023 | |
| 3. | Eselon III-B | 2 orang | 2023 | |
| 4. | Bendahara Pengeluaran | 1 orang | 2023 | |
| | Jumlah | 5 orang | | |

# BAB III
# PENUTUP

Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 ini diharapkan menghasilkan data statistik yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Tersusunnya Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

# BUKU PROFIL
# DINAS PERIKANAN
# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
# TAHUN 2021










PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERIKANAN
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT atas ijin-Nya penyusunan buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat, terutama dalam mendukung suksesnya Program Pembangunan Daerah khususnya perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun-tahun mendatang.

Buku ini disusun sebagai bahan referensi dan memberikan gambaran tentang kondisi umum, potensi wilayah, fasilitas dan komoditas unggulan terkait perikanan di wilayah kepulauan selayar.

Dengan tersusunnya buku ini kami harapkan akan memberikan sumbangsih yang besar dalam perkembangan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Benteng, November 2022

Kepala Dinas,

**Ir. Makkawaru**
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 19630120 198910 1 003



## DAFTAR ISI

*Halaman*


**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**DAFTAR TABEL** ..... iv

**DAFTAR GAMBAR** ..... vi

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1

A. Latar Belakang ..... 1

B. Dasar Hukum ..... 1

C. Maksud dan Tujuan ..... 2

**BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN** ..... 3

A. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan ..... 3

B. Struktur Organisasi ..... 3

C. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan ..... 6

D. Sarana dan Prasarana Kantor ..... 6

**BAB III. POTENSI PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** ..... 9

A. Sumberdaya Perikanan ..... 9

B. Sumberdaya Manusia ..... 12

**BAB IV. KONDISI EKSISTING SEKTOR PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR** **14**

A. Perikanan Tangkap ..... 14

a. Produksi Perikanan Tangkap ..... 14

b. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap ..... 18

c. Jumlah Trip Nelayan ..... 19

d. Sarana Perikanan Tangkap ..... 20

B. Perikanan Budidaya ..... 22

a. Produksi Perikanan Budidaya ..... 22

b. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Budidaya ..... 24

c. Luas Lahan Budidaya ..... 35

C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ..... 26

a. Produksi Olahan Hasil Perikanan ..... 26

b. Jumlah Pelaku Usaha Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan ..... 27

D. Garam ..... 27

a. Produksi Garam ..... 27
b. Kelompok Usaha Garam Rakyat ..... 28
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 29
A. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan ..... 29
1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap ..... 29
a. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Nelayan Kecil..... 29
b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap ..... 30
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya ..... 30
a. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembudidaya..... 30
b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya ..... 32
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ..... 33
B. Rencana Pembangunan Sektor Perikanan ..... 34
1. Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)..... 34
2. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan ..... 37
a. Asuransi Nelayan ..... 37
b. Sertifikat Tanah Nelayan ..... 37
BAB VI. PENUTUP..... 38
A. Kesimpulan..... 38
B. Rekomendasi..... 38

## DAFTAR TABEL

*Halaman*


| | | |
|---|---|---|
| Tabel 2.1. | Jumlah pegawai Dinas Perikanan Tahun 2021 | 6 |
| Tabel 2.2. | Daftar Aset (Tanah dan Bangunan) Tahun 2021 | 6 |
| Tabel 2.3. | Peralatan Kantor Dinas Perikanan Tahun 2021 | 8 |
| Tabel 3.1. | Potensi Sumberdaya Pesisir Kepulauan Selayar | 10 |
| Tabel 3.2. | Pemanfaatan Potensi Budidaya menurut jenis dan sebarannya | 11 |
| Tabel 3.3. | Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan Tahun 2020 dan 2021 | 12 |
| Tabel 3.4. | Jumlah Sumberdaya Manusia (Nelayan, pembudidaya dan Pengolah dan Pemasar) Tahun 2021 | 13 |
| Tabel 4.1. | Produksi Perikanan Tangkap Menurut Jenisnya Tahun 2015 – 2021 | 14 |
| Tabel 4.2. | Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan Tahun 2016 - 2021 | 17 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Nelayan dan RTP Nelayan Tahun 2021 | 18 |
| Tabel 4.4. | Jumlah Trip Berdasarkan Jenis API dan Armada Tahun 2021 | 19 |
| Tabel 4.5. | Jumlah Armada Nelayan Perikanan Tangkap berdasarkan jenisnya Tahun 2021 | 20 |
| Tabel 4.6. | Alat Penangkapan Ikan menurut jenis Tahun 2021 | 21 |
| Tabel 4.7. | Jumlah Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 4.8. | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenisnya Tahun 2021 | 22 |
| Tabel 4.9. | Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor Tahun 2021 | 23 |
| Tabel 4.10. | Perbandingan Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 sampai 2021 | 23 |
| Tabel 4.11. | Jumlah RTP Pembudidaya per kecamatan Tahun 2021 | 24 |
| Tabel 4.12. | Luas Lahan Budidaya berdasarkan jenis pembesarannya Tahun 2021 | 25 |
| Tabel 4.13. | Produksi Olahan Hasil Perikanan menurut jenisnya tahun 2019 - 2021 | 26 |
| Tabel 4.14. | Jumlah RTP Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan menurut Kecamatan dan Jenis Olahan Tahun 2021 | 27 |
| Tabel 4.15. | Produksi Garam Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 | 27 |
| Tabel 4.16. | Nilai Produksi Garam Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 | 28 |

Tabel 4.17. Kelompok Usaha Garam Tahun 2021 ..... 28
Tabel 5.1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Tahun 2019 sampai Tahun 2021..... 30
Tabel 5.2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Tahun 2019 sampai Tahun 2021..... 32
Tabel 5.3. Daftar Penerima Asuransi Nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021..... 37
Tabel 5.4. Daftar Penerima Sertifikat Tanah Nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021..... 37

# DAFTAR GAMBAR

*Halaman*


Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan..... 5
Gambar 2.2. Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ..... 7
Gambar 3.1. Arus Lintas Indonesia (ARLINDO) ..... 9
Gambar 3.2. Aktifitas Nelayan di Desa Tambolongan ..... 11
Gambar 4.1. Produksi Perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar ..... 17
Gambar 4.2. Beberapa Jenis armada Nelayan Kepulauan Selayar..... 18
Gambar 4.3. Beberapa Jenis armada Nelayan Kepulauan Selayar..... 20
Gambar 4.4. Keramba Jaring Apung di Kec. Taka Bonerate ..... 24
Gambar 4.5. Aktifitas Pembudidaya di Bontoharu..... 25
Gambar 4.6. Produk Olahan Hasil Perikanan (Abon Ikan) ..... 27
Gambar 5.1. Kegiatan Peningkatan SDM Nelayan Kecil Tahun 2021 ..... 29
Gambar 5.2. Kegiatan Peningkatan SDM Pembudidaya Tahun 2021..... 30
Gambar 5.3. Kegiatan – kegiatan pada Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2021 ..... 33
Gambar 5.4. Master Plan KIPT Hangkoang..... 36
Gambar 5.5. Desain Pengelolaan Sentra Bisnis Perikanan Terpadu Berbasis Kawasan ..... 36

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Sumber daya perikanan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi Daerah maka dibutuhkan penanganan yang baik dalam pengelolaannya.

Perencanaan yang baik merupakan faktor utama yang mendukung proses pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kegiatan, penyusunan perencanaan seharusnya dilakukan dengan matang dan penuh pertimbangan sehingga diharapkan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan bisa dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Dengan adanya data dan informasi yang termuat dalam buku ini diharapkan akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan kedepannya.

## B. Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026
4. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

## C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayan ini adalah sebagai upaya untuk memberikan data lebih dapat dipertanggungjawabkan sebagai acuan untuk perencanaan kedepannya. Untuk mendukung perencanaan strategis Dinas Perikanan maka dibutuhkan data dan informasi yang akurat dan aktual, sehingga tujuan dari penyusunan buku profil ini adalah sebagai media dalam penyajian data dan informasi terkait kondisi perikanan di kepulauan selayar, dalam hal ini yang menjadi wewenang Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun data dan informasi tersebut tentunya dapat dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kedepannya baik oleh internal Dinas Perikanan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN

## A. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
2. Melaksanaan kebjakan urusan pemerintahan bidang perikanan.
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perikanan.
4. Melaksanakan fungsi administrasi di lingkup Dinas Perikanan.
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, struktur organisasi Dinas Perikanan adalah :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, meliputi :

   1. Sub Bagian Program.
   2. Sub Bagian Keuangan.
   3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum.

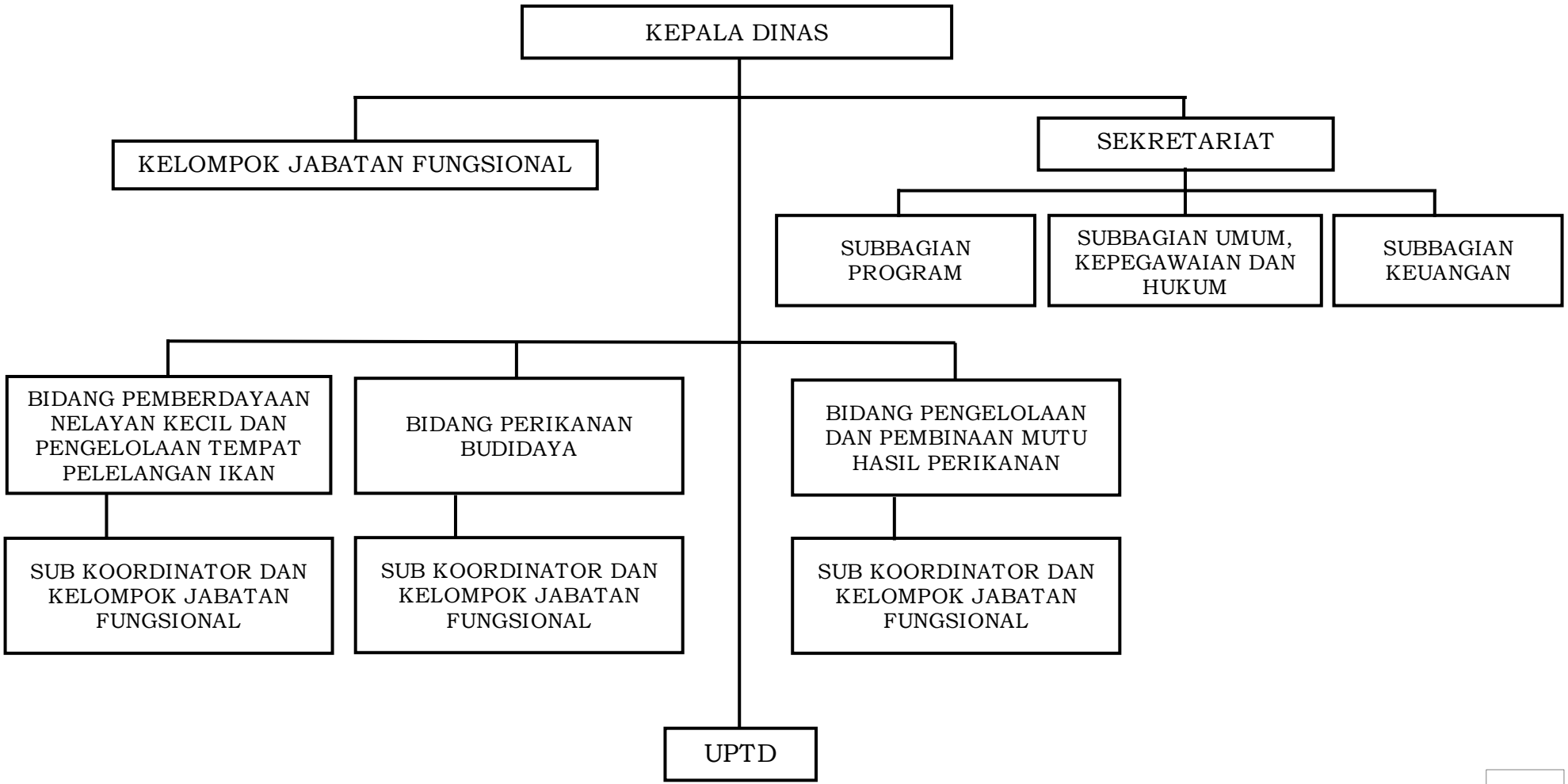
III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

IV. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

V. Bidang Pengelolaan dan Pembinaan Mutu Hasil Perikanan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional

VI. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 2.1**
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan
(Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 135 Tahun 2021)








## C. Jumlah Pegawai

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Tahun 2022

| No | Pegawai | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 20 | 17 | 37 |
| 2 | Pegawai Harian Lepas | 24 | 30 | 54 |
| Jumlah | | 44 | 47 | 91 |

## D. Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 2.2
Daftar Aset (Tanah dan Bangunan) Tahun 2021

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | Letak/ Alamat | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 150.00 | Jl. Burunga-Kawau,Desa Garaupa,Kec.Pasilambena | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 2 | Tanah Bangunan Kantor Pemerintah | 571.81 | Jl. D.R.Samratulangi, Kec.Benteng | Kantor Dinas Perikanan |
| 3 | Tanah Bangunan Gedung Pelelangan Ikan | 500.00 | PPI Bonehalang (Jl. H. Abdullah, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng) | TPI dan Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 4 | Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga | 49.00 | Dusun Parangiya Desa Tanete Kec. Bontomatene | Tanah Bangunan Pos Pengawas |
| 5 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 1,000.00 | Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu | Tanah Bangunan Sarana Panen Hatchery Baloiya |
| 6 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 150.00 | Desa Rajuni Kec.Takabonerate | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 7 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 400.00 | Desa Appattanah Kec. Bontosikuyu | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 8 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 300.00 | Dusun Tadu Desa Lembang Metene Kecamatan Pasilambena | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 9 | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya (dst) | 118.75 | TPI /PPI Bonehalang, Jl. KH Ahmad Dahlan Komp. TPI/PPI Bonehalang Kec. Benteng | Tanah Bangunan Cold Storage Kawasan TPI PPI |
| 10 | Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium | 12,028.00 | Padang Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu | Tanah Tambak Perikanan |
| 11 | Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan | 200.00 | Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 12 | Tanah Padang Alang-Alang | 49.00 | Dusun Tile-tile Desa Patikarya Kec. Bontosikuyu | Tanah Bangunan Pondok Wisata |
| 13 | Tanah Lapangan Apel/Upacara | 52,137.25 | Jl. KH. Ahmad Dahlan Komp. TPI/PPI Bonehalang Kec. Benteng | Tanah Lapangan Apel/Upacara |
| 14 | Tanah Kampung | 500.00 | Borong-borong, Desa Mekar Indah Kec. Buki | Tanah Bangunan Pabrik Es |
| 15 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | | TPI Bonehalang Kec. Benteng | Gedung Pabrik |

| No | Jenis Barang / Nama Barang | Luas (M2) | Letak/ Alamat | Keterangan Penggunaan |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Bangunan Gedung Pabrik Permanen | | Kompleks TPI Bonehalang Kec. Benteng | Bangunan Cold Storage (TPI) |
| 17 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | Kompleks TPI Bonehalang Kec. Benteng | Pabrik Es |
| 18 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | PPI Bonehalang Kec. Benteng | Pabrik Es |
| 19 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | PPI Bonehalang Kec. Benteng | Pembangunan Pabrik Pakan Ikan |
| 20 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | Kompleks TPI Bonehalang Kec. Benteng | Gedung Cold Strorage |
| 21 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | Kayuadi Kec. Takabonerate | Pabrik Es |
| 22 | Bangunan Gedung Pabrik Lain-lain (dst) | | Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu | Pabrik Es |

Gambar 2.2
Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar





Tabel 2.3
Peralatan Kantor Dinas Perikanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

| No. | Uraian | Satuan | Jumlah | Kondisi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Baik | Rusak | Rusak Berat |
| **1.** | **Peralatan Kantor :** | | | | | |
| | - Meja Kerja | Unit | 23 | √ | | |
| | - Kursi | Unit | 100 | √ | | |
| | - Lemari (kayu) | Unit | 6 | √ | | |
| | - Brangkas | Unit | 1 | √ | | |
| | - Kursi Tamu | Unit | 3 | √ | | |
| | - Laptop + Komputer | Unit | 47 | √ | | |
| | - Printer | Unit | 29 | √ | | |
| | - Meja Rapat | Unit | 2 | √ | | |
| | - Kamera | Unit | 1 | √ | | |
| | - Scanner | Unit | 2 | √ | | |
| | - Infocus + Layar | Unit | 2 | √ | | |
| | - Sound system | Unit | 1 | √ | | |
| | - TV + AC | Unit | 17 | √ | | |
| **2.** | **Kendaraan :** | | | | | |
| | - Mobil Jabatan | Unit | 1 | √ | | |
| | - Mobil Dinas | Unit | 4 | √ | | |
| | - Motor Dinas | Unit | 32 | √ | | |

# BAB III

# POTENSI PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## A. Sumber Daya Perikanan

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 $km^2$ dengan panjang garis pantai sekitar 670 km dengan jumlah pulau kecil sebanyak 130 pulau dan luas wilayah laut seluas 9.146,66 $km^2$ sehingga sangat potensial untuk pengembangan di bidang perikanan.

Kabupaten Kepulauan Selayar diapit oleh selat Makassar di sebelah barat laut, teluk bone di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan laut flores di sebelah selatan. Perairan kepulauan selayar termasuk dalam jalur lintasan sistem arus lintas Indonesia (ARLINDO) dimana pada jalur tersebut menjadi tempat penyebaran dan migrasi ikan, merupakan bagian dari siklus arus antar samudera dimana sumber dan massa air yang dihantarkannya berasal dari samudera pasifik menuju samudera hindia, maka dinamika arus yang terjadi juga mempengaruhi kondisi biologis di perairan kepulauan selayar. Arus inilah yang mendistribusikan bermacam unsur biologis yang berasal dari dua samudera besar sehingga akan berpengaruh pada keanekaragaman hayati laut.




Gambar 3.1
Arus Lintas Indonesia

Arus lintas samudera ini pun berperan dalam fenomena migrasi kelompok ikan Pelagis besar yang bersifat oseanik dan bernilai ekonomis penting dimana mempunyai sifat migrasi jauh (*highly migratory species*) sehingga menjadikan perairan kepulauan selayar yang dilewati arus dua samudera ini memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Begitu juga dengan keanekaragaman kelompok mamalia laut bersifat pelagis (besar).

Kondisi ini pun akan membangkitkan *upwelling*, yaitu fenomena yang terjadi dimana tiupan angin di permukaan laut dan pergerakan arus di bawah laut menyebabkan air bawah laut yang bermassa jenis lebih besar akan bergerak menuju permukaan laut yang membawa nutrisi yang sangat dibutuhkan *fitoplankton* di permukaan sehingga memperkaya biomassa di kawasan tersebut. Hal ini akan menarik perhatian ikan-ikan untuk berada di sekitar tempat tersebut karena ketersediaan makanan yang melimpah serta terjadinya konsentrasi klorofil pada daerah tersebut. Namun demikian dengan keanekaragaman hayati laut yang tinggi tersebut dalam pengelolaannya tetap harus didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan perikanan yang berkelanjutan.

Tabel 3.1
Potensi Sumberdaya Pesisir Kepulauan Selayar

| No | Sumber Daya | Jumlah | Luas / Area (Ha) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *Total (Ha)* | Baik | Sedang | Rusak |
| 1 | Mangrove | 555.00 | 528.00 | 24.00 | 3.00 |
| 2 | Terumbu Karang | 55,493.38 | 19,803.78 | 20,186.20 | 15,503.40 |
| 3 | Lamun | 8,971.59 | 8,971.59 | - | - |
| Jumlah | | 65.019,97 | 29.303,37 | 20,210.20 | 15,506.40 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

Gambar 3.2
Aktifitas nelayan di Desa Tambolongan



Tabel 3.2
Pemanfaatan Potensi Budidaya Menurut Jenis dan Sebarannya Per Kecamatan
Tahun 2021

| No. | Kecamatan | Kolam | | Tambak | | Rumput Laut | | Keramba | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Potensi (Ha) | Pemanfaatan Lahan (Ha) | Potensi (Ha) | Pemanfaatan Lahan (Ha) | Potensi (Ha) | Pemanfaatan Lahan (Ha) | Potensi (Ha) | Pemanfaatan Lahan (Ha) |
| 1 | Pasimarannu | - | - | - | - | 863 | 153 | - | - |
| 2 | Pasilambena | - | - | - | - | 1413 | - | 47.1 | 0.018 |
| 3 | Pasimasunggu | - | - | 169.77 | 56.87 | 468 | - | 803.71 | 0.01 |
| 4 | Takabonerate | - | - | 5.87 | - | 1026 | - | 0.03 | 0.03 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | - | - | 324.89 | 185.47 | 485 | - | - | - |
| 6 | Bontosikuyu | 0.262 | - | 127.97 | 41.47 | 2654 | 22.12 | 619.85 | 0.01 |
| 7 | Bontoharu | 0.137 | 0.012 | 190.57 | 123.31 | 850 | - | 138.57 | 0.105 |
| 8 | Benteng | 0.024 | - | 0.99 | - | - | - | - | - |
| 9 | Bontomanai | 0.096 | 0.048 | 4.63 | 1.48 | 612 | - | - | - |
| 10 | Bontometene | 0.02 | - | - | - | 2106 | 2.71 | 119.48 | - |
| 11 | Buki | - | - | 0.55 | - | 954 | - | - | - |
| Total | | 0.54 | 0.06 | 825.24 | 408.6 | 11431 | 177.83 | 1728.74 | 0.17 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 3.3
Produksi Perikanan Tangkap, Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan
Tahun 2020 dan 2021

| No | Produksi | Tahun (ton) | |
|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 |
| 1 | Produksi Perikanan Tangkap | 18.729,2 | 20.883,80 |
| 2 | Produksi Perikanan Budidaya | 837,36 | 522,79 |
| 3 | Produksi Olahan Hasil Perikanan | 121,84 | 222 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

## B. Sumberdaya Manusia

Dengan wilayah yang sebagian besar berupa perairan maka Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tentu memiliki jumlah pelaku usaha perikanan yang cukup banyak, baik nelayan, pembudidaya maupun pengolah dan pemasar sehingga perlu didorong untuk memanfaatkan potensi dengan metode–metode ramah lingkungan dan berkelanjutan salah satunya dengan peningkatan SDM pelaku usaha perikanan. Peningkatan SDM dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, bimtek, sosialisasi dan lainnya. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha perikanan akan meningkat.

Tabel 3.4
Jumlah Sumberdaya Manusia (Nelayan, Pembudidaya dan pengolah hasil perikanan) Tahun 2021

| No | Uraian | Jumlah RTP | Ket. |
|---|---|---|---|
| 1 | Perikanan Tangkap | 7.207 | |
| 2 | Perikanan Budidaya | 705 | |
| 3 | Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan | 123 | RTP/Individu |
| Jumlah Total | | 8.035 | |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

# BAB IV

# KONDISI EKSISTING SEKTOR PERIKANAN

# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## A. Perikanan Tangkap

a. Produksi Perikanan Tangkap

Tabel 4.1
Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kepulauan Selayar menurut Jenis
Tahun 2015-2021

| No | Jenis Ikan | Produksi (ton) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1 | Teri | 752.5 | 728.9 | 334.9 | 258.4 | 532.2 | 421.2 | 559.2 |
| 2 | Belanak | 188.4 | 183 | 156.4 | 156.8 | 193.6 | 140.8 | 154.1 |
| 3 | Bentong | 0 | 67.3 | 56 | 41.1 | 37 | 62.2 | 41.4 |
| 4 | Cendro | 718.1 | 612.8 | 611.7 | 615.1 | 429.2 | 603.8 | 354.1 |
| 5 | Talang-Talang | 396.5 | 390.4 | 394.2 | 382.4 | 274 | 247.1 | 259.6 |
| 6 | Ikan Terbang | 62.9 | 79.8 | 48 | 56 | 199.4 | 92 | 237.1 |
| 7 | Japuh | 461.4 | 497.4 | 211 | 162.3 | 297.8 | 220.8 | 231.8 |
| 8 | Julung-Julung | 687.1 | 654.5 | 607.3 | 623 | 626.8 | 554.8 | 594.2 |
| 9 | Banyar | 663.5 | 705.5 | 519.6 | 534.9 | 427.6 | 370.7 | 349.2 |
| 10 | Kembung | 491.4 | 559.6 | 534.7 | 555.6 | 498.9 | 461.6 | 394.7 |
| 11 | Layang | 392.5 | 415.1 | 408.5 | | | | |
| | Layang Deles | | | | 293.1 | 136.7 | 100.9 | 77.2 |
| | Layang Biru | | | | 606.9 | 772.4 | 307.8 | 499.4 |
| 12 | Siro | 210.7 | 209.7 | 199 | 176.1 | 208.4 | 164.5 | 231.6 |
| 13 | Selar | 280.4 | 279.5 | 275.1 | | | | |
| | Selar komo | | | | 124.8 | 106.3 | 95.6 | 93.8 |
| | Selar kuning | | | | 132.2 | 364.9 | 88.7 | 69.4 |
| 14 | Sunglir | 34.5 | 40.3 | 27.3 | 22.2 | 1000.8 | 217.2 | 493.4 |
| 15 | Tembang | 853.3 | 773.1 | 365 | 285.4 | 450.2 | 264.8 | 356.1 |
| 16 | Tetengkek | 439.6 | 420 | 391.8 | 397.7 | 391 | 408.6 | 387.4 |
| **Total Kelompok Ikan Pelagis Kecil** | | 6,632.8 | 6,616.9 | 5,140.5 | 5,424.0 | 6,947.2 | 4,823.1 | 5,383.7 |
| 1 | Tuna Mata Besar | 17.2 | 15 | 15.7 | 10.2 | 52.3 | 44 | 50.9 |
| 2 | Tuna Gigi Anjing | 117.7 | 141.9 | 137.0 | 112.4 | 108.7 | 85.4 | 98.8 |
| 3 | Madidihang/Y.fin Tuna | 86 | 125.5 | 138.2 | 115.8 | 549.2 | 438.6 | 529.0 |
| 4 | Tongkol Abu – Abu | 277.6 | 272.2 | 267.4 | 899.4 | 427.7 | 208.1 | 125.2 |

| No | Jenis Ikan | Produksi (ton) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 5 | Tongkol Como | 534.9 | 702.2 | 523.4 | 930.5 | 655.8 | 436.3 | 374.6 |
| 6 | Tongkol Krai | 269.4 | 331.7 | 322.4 | 996.3 | 694.4 | 341.2 | 432.2 |
| 7 | Lisong | 334.5 | 353.6 | 349.8 | 334 | 257.5 | 158.7 | 209.6 |
| 8 | Slengseng | 244.6 | 288.1 | 268.5 | 258.5 | 259.4 | 189.6 | 243.3 |
| 9 | Cakalang | 673.2 | 669.4 | 640.1 | 702.5 | 648.3 | 480.8 | 517.5 |
| 10 | Lemadang | 117.1 | 140.8 | 136.7 | 119.9 | 208.7 | 214.1 | 203.3 |
| 11 | Ikan Layaran | 6.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 18 | 27.7 | 17.1 |
| 12 | Setuhuk Biru | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 10.3 | 5.2 |
| 13 | Setuhuk Hitam | 8 | 36.2 | 38.3 | 39 | 6.6 | 10.9 | 6.4 |
| 14 | Setuhuk Loreng | 4.6 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 2.0 | 6.2 | 1.9 |
| 15 | Tenggiri | 185.3 | 214.4 | 182.1 | 178.4 | 160.5 | 143.9 | 137.4 |
| 16 | Tenggiri Papan | 33 | 50.1 | 30.4 | 29.1 | 48.3 | 17.6 | 44.3 |
| 17 | Cucut | 294 | 327.3 | 333.1 | | | | |
| | Cucut lanyam (FAL) | | | | 70.2 | 15.8 | 22.2 | 10.5 |
| | Cucut Selendang (BSH) | | | | 0.2 | | | |
| | Cucut lainnya (SKH) | | | | 245.5 | 93.7 | 133.4 | 68.9 |
| **Total Kelompok Ikan Pelagis Besar** | | 3,203.2 | 3,669.7 | 3,385.5 | 5,043.7 | 4,212.3 | 2,969.0 | 3,076.1 |
| 1 | Ikan Manyung | 155.3 | 140.8 | 121.7 | 7.8 | 16.6 | 1.9 | |
| 2 | Lolosi Biru | 2.1 | 16.4 | 15.4 | 17.1 | 7.1 | 6.2 | 1.3 |
| 3 | Kuwe | 595.1 | 915.3 | 739.7 | 702.8 | 958.1 | 556.3 | 592.4 |
| 4 | Bawal Putih | 157.2 | 151.5 | 140.6 | 141.5 | 95 | 203.5 | 112.4 |
| 5 | Gerot – Gerot | 571.9 | 558.4 | 502.2 | 475 | 580.8 | 279.8 | 227 |
| 6 | Kapas-Kapas | 6.1 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 8.1 | 10.4 | 9.3 |
| 7 | Peperek | 772.4 | 759.9 | 361.9 | 292.2 | 338.7 | 225.7 | 246.3 |
| 8 | Lencam | 2,238.5 | 2,363.7 | 2,111.2 | 2068.1 | 3,754.7 | 1952.7 | 1976.9 |
| 9 | Kakap Putih | 71.9 | 60.7 | 60.6 | 56.9 | 24.6 | 36.2 | 20.5 |
| 10 | Kakap Merah | 1,181.8 | 962.8 | 919.4 | 893.6 | 1,600.5 | 921.2 | 978.9 |
| 11 | Pinjalo | 194.5 | 293.7 | 283.6 | 263.8 | 166.0 | 248.7 | 215.4 |
| 12 | Kurisi | 272.7 | 262.9 | 248.7 | 249.2 | 282.5 | 286.3 | 229.5 |
| 13 | Biji Nangka | 388.2 | 376.8 | 320.0 | 311.5 | 367.9 | 219.2 | 226 |
| 14 | Biji Nangka krng | 88.7 | 83.3 | 71.7 | 69.4 | 81.9 | 70.9 | 100.8 |
| 15 | Swanggi/ Mata Besar | 34.1 | 33.5 | 31.6 | 26.2 | 18.2 | 19.2 | 17.7 |
| 16 | Alu-Alu | 254.2 | 263.4 | 237.5 | 228.7 | 376.4 | 202.5 | 212.9 |
| 17 | Kerong-Kerong | 46.4 | 45.4 | 36.5 | 37.5 | 35.2 | 29.3 | 30.7 |
| 18 | Layur | 180.7 | 192.2 | 193.3 | 183.7 | 96.4 | 123.4 | 98 |

| No | Jenis Ikan | Produksi (ton) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 19 | Pari | 57.2 | 46.4 | 49.4 | | | | |
| | Pari kembang/ Pari macan (PSL) | | | | 9.8 | 7.3 | 6.7 | 3.3 |
| | Pari lainnya | | | | 39.5 | 6.4 | 16.8 | 12.1 |
| **Total Ikan Demersal** | | 7,269.0 | 7,534.4 | 6,451.7 | 6,081.4 | 8,822.4 | 5,416.9 | 5,311.4 |
| 1 | Ekor Kuning | 13.3 | 21.4 | 13.5 | 19.8 | 78.5 | 60.2 | 55.9 |
| 2 | Kerapu Karang/Macan | 1,469.9 | 1,068.6 | 991.6 | 966.0 | 1,603.5 | 896.2 | 965.9 |
| 3 | Kerapu Bebek | 35.7 | 34.8 | 37.4 | 35.9 | 9.1 | 27.7 | 17.3 |
| 4 | Kerapu Balong | 1,084.1 | 818.8 | 760.5 | 749.0 | 1,060.6 | 677.0 | 697.5 |
| 5 | Kerapu Sunu | 915.6 | 855.7 | 786.3 | 761.6 | 1,012.2 | 629.2 | 685.8 |
| 6 | Baronang Lingkis | 665.9 | 661 | 554.4 | 573.5 | 702.3 | 410.4 | 471.1 |
| 7 | Baronang Kuning | 267.7 | 266.6 | 213.4 | 210.5 | 251.6 | 194.2 | 211.9 |
| 8 | Ikan Baronang | 249.6 | 265.3 | 230.8 | 209.6 | 345.3 | 195.8 | 221.8 |
| 9 | Kakak Tua | 73.2 | 74 | 66.6 | 87 | 229.6 | 144.1 | 202.5 |
| **Total Kelompok Ikan Karang** | | 4,775.0 | 4,066.2 | 3,654.5 | 3,612.9 | 5,292.7 | 3,234.8 | 3,529.7 |
| 1 | Udang Putih/Jerbung | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 4.5 | 4.0 | 2.7 |
| 2 | Udang Barong | 36 | | - | 6.9 | | 3.0 | |
| 3 | Udang Lainnya | | | | 0.3 | | | |
| 4 | Udang Lobster | | 39.6 | 33.2 | | | | |
| | Lobster mutiara | | | | | 1.7 | 1.4 | 8.7 |
| | Lobster bamboo | | | | 20.2 | 14.5 | 9.3 | 12.8 |
| | Lobster batik | | | | | 2.7 | 3.5 | 9.9 |
| | Lobster batu | | | | | 0.3 | | 4.1 |
| 5 | Kepiting | 25.5 | 25.4 | 28.1 | 31.8 | 24.3 | 18.8 | 18.5 |
| 6 | Rajungan | 54.1 | 52.5 | 43.7 | 36.5 | 20.9 | 25.8 | 16.9 |
| **Total Kelompok Ikan Berkulit Keras** | | 116.8 | 118.7 | 105.9 | 96.7 | 68.9 | 65.8 | 73.6 |
| 1 | Cumi – Cumi | 834.4 | 819 | 416.8 | 374.4 | 1681.9 | 1036.1 | 2861.5 |
| 2 | Sotong | 40.3 | 45.5 | 31.8 | 49.3 | 30.2 | 40.1 | 26.4 |
| 3 | Gurita | 42.1 | 53.6 | 38.8 | 77.5 | 430.9 | 120.9 | 50.9 |
| **Total Kelomok Binatang Lunak** | | 916.8 | 918.1 | 487.4 | 501.2 | 2,143.0 | 1,197.1 | 2,938.8 |
| 1 | Teripang | 117.3 | 116.8 | 107.3 | 96.2 | 156.7 | 66.2 | 80.1 |
| 2 | Ikan Lainnya | 1,124.9 | 1051.8 | 819.4 | 736.4 | 625.1 | 956.3 | 490.4 |
| **Total Kelompok Lain** | | 1,242.2 | 1,168.6 | 926.7 | 832.6 | 781.8 | 1,022.5 | 570.5 |
| **TOTAL** | | 24,155.8 | 24,092.6 | 20,152.2 | 21,592.5 | 28,268.3 | 18,729.2 | 20,883.8 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

Gambar 4.1
Produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Tabel 4.2
Produksi Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016 sampai 2021

| No | Kecamatan | Produksi (Ton) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pasimarannu | 2,656.8 | 3,062.0 | 3,279.5 | 4,193.4 | 2,778.4 | 2,416.43 |
| 2 | Pasilambena | 4,370.0 | 1,600.7 | 1,714.4 | 2,354.5 | 1,560.1 | 1,900.24 |
| 3 | Pasimasunggu | 2,129.6 | 1,147.5 | 1,229.0 | 2,182.6 | 1,446.1 | 1,414.31 |
| 4 | Taka Bonerate | 5,486.5 | 4,429.4 | 4,744.1 | 6,460.9 | 4,280.6 | 4,636.22 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 1,032.3 | 823.1 | 881.6 | 954.2 | 632.2 | 901.90 |
| 6 | Bontosikuyu | 2,906.6 | 3,421.3 | 3,673.0 | 4,275.0 | 2,832.4 | 3,142.49 |
| 7 | Bontoharu | 2,743.8 | 2,484.1 | 2,660.6 | 4,033.1 | 2,673.1 | 3,085.56 |
| 8 | Benteng | 231.9 | 167.7 | 179.6 | 185.1 | 122.7 | 215.75 |
| 9 | Bontomanai | 649.9 | 581.8 | 623.2 | 715.8 | 472.3 | 777.16 |
| 10 | Bontomatene | 1,293.6 | 1,989.5 | 2,130.8 | 2,289.6 | 1,517.8 | 1,975.87 |
| 11 | Buki | 591.6 | 445.1 | 476.7 | 624.1 | 413.5 | 417.87 |
| Total | | 24,092.6 | 20,152.2 | 21,592.5 | 28,268.3 | 18,729.2 | 20,883.80 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

b. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap

Tabel 4.3
Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tahun 2021

| No. | Kecamatan | RTP | Nelayan |
|---|---|---|---|
| 1 | Benteng | 113 | 167 |
| 2 | Bontoharu | 1029 | 1579 |
| 3 | Bontomanai | 269 | 411 |
| 4 | Bontomatene | 678 | 1044 |
| 5 | Bontosikuyu | 1085 | 1662 |
| 6 | Buki | 165 | 221 |
| 7 | Taka Bonerate | 1602 | 2452 |
| 8 | Pasimasunggu | 487 | 748 |
| 9 | Pasimasunggu Timur | 313 | 478 |
| 10 | Pasimarannu | 812 | 1278 |
| 11 | Pasilambena | 654 | 1005 |
| Jumlah | | 7.207 | 11,045 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

Gambar 4.2
Beberapa Armada Nelayan Kepulauan Selayar





c. Jumlah Trip Berdasarkan Jenis API dan Armada

Tabel 4.4
Jumlah Trip Berdasarkan Jenis API dan Armada Tahun 2021

| Jenis Alat Penangkapan Ikan | | Tanpa Perahu | Perahu Tanpa Motor | | | | | Motor Tempel | | | Kapal Motor | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sub Jumlah | Jukung | Perahu Papan | | | Sub Jumlah | < 5 GT | > 5 GT | Sub Jumlah | < 5 GT | 5-10 GT | ≥ 10 GT |
| | | | | | Kecil | Sedang | Besar | | | | | | | |
| **Jumlah Trip** | | 42,275 | 99,003 | 12,922 | 53,351 | 32,730 | - | 480,367 | 480,367 | - | 467,753 | 450,463 | 17,290 | - |
| Jaring angkat | Bagan perahu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,484 | 18,964 | 1,520 | - |
| | Bagan tancap | - | - | - | - | - | - | 4,144 | 4,144 | - | - | - | - | - |
| Jaring insang | Jaring insang tetap/Jaring lion bun | 19,667 | 19,539 | 5,211 | 12,886 | 1,442 | - | 39,838 | 39,838 | - | 62,914 | 62,914 | - | - |
| | Jaring insang hanyut/Jaring insang oseanik | - | 6,930 | - | - | 6,930 | - | 215,502 | 215,502 | - | 106,057 | 106,057 | - | - |
| Perangkap | Bubu | 8,862 | 16,198 | 4,746 | 3,346 | 8,106 | - | 23,996 | 23,996 | - | 22,161 | 22,161 | - | - |
| | Sero | 10,276 | 12,676 | - | 8,700 | 3,976 | - | 26,353 | 26,353 | - | - | - | - | - |
| | Muro ami | 3,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,212 | 12,895 | 7,317 | - |
| Pancing | Pancing ulur | - | 43,660 | 2,965 | 28,419 | 12,276 | - | 170,534 | 170,534 | - | 234,031 | 227,472 | 6,559 | - |
| | Pancing cumi | - | 17,456 | 12,795 | 2,156 | 2,505 | - | 12,888 | 12,888 | - | - | - | - | - |
| | Rawai dasar | - | - | - | - | - | - | 5,716 | 5,716 | - | 23,347 | 23,347 | - | - |
| | Tonda | - | - | - | - | - | - | 15,912 | 15,912 | - | 76,300 | 76,300 | - | - |
| | Pancing layang-layang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,167 | 12,167 | - | - |
| Alat penjepit, melukai | Tombak (Garpu) | - | - | - | - | - | - | 2,201 | 2,201 | - | - | - | - | - |
| | Ladung | - | - | - | - | - | - | 648 | 648 | - | 7,941 | 7,941 | - | - |
| | Panah | 27,215 | - | - | - | - | - | 32,381 | 32,381 | - | 41,814 | 41,814 | - | - |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021



d. Sarana Perikanan Tangkap

Tabel 4.5
Jumlah Armada Nelayan Perikanan Tangkap Berdasarkan Jenisnya Tahun 2021

| No | Kecamatan, Desa/kelurahan | Nelayan Tanpa Perahu | Perahu Tanpa Motor | Motor Tempel | | | | Kapal Motor | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | < 5 GT | 5-10 GT | 10-20 GT | > 20 GT | < 5 GT | 5-10 GT | 10-20 GT | > 20 GT | |
| 1 | Pasimarannu | 751 | 91 | 178 | - | - | - | 253 | 4 | - | - | |
| 2 | Pasilambena | 518 | 13 | 240 | - | - | - | 230 | 2 | 2 | - | |
| 3 | Pasimasunggu | 257 | 6 | 212 | - | - | - | 271 | 2 | - | - | |
| 4 | Taka Bonerate | 1,377 | 72 | 145 | - | - | - | 777 | 57 | 19 | 5 | |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 182 | 28 | 78 | - | - | - | 188 | - | 2 | - | |
| 6 | Bontosikuyu | 608 | 56 | 369 | - | - | - | 610 | 14 | 4 | 1 | |
| 7 | Bontoharu | 306 | 34 | 834 | 0 | 0 | 0 | 545 | 56 | 1 | 3 | |
| 8 | Benteng | 42 | 11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4 | 1 | 1 | |
| 9 | Botomanai | 68 | 136 | 36 | 0 | 0 | 0 | 148 | 4 | 0 | 19 | |
| 10 | Bontomatene | 365 | 85 | 389 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 1 | 1 | |
| 11 | Buki | 46 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 5 | 6 | |
| Jumlah | | 4,520 | 541 | 2.590 | - | - | - | 3.355 | 146 | 35 | 36 | |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021







Tabel 4.6
Alat Penangkapan Ikan (API) menurut Jenis Tahun 2021

| No | Kecamatan | Jaring Lingkar | Pukat Tarik | Pukat Hela | Pengganuk | Jaring Angkat (*Lift Nets*) | API Dijatuhkan | Jaring Insang (*Gill Nets*) | Perangkap (*Traps*) | Pancing | Penjepit dan Melukai | Lainnya | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1 | 586 | 80 | 371 | 1.278 |
| 2 | Pasilambena | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 177 | 7 | 581 | 47 | 189 | 1.005 |
| 3 | Pasimasunggu | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 203 | 1 | 378 | 15 | 146 | 748 |
| 4 | Taka Bonerate | 91 | 7 | 7 | 0 | 25 | 0 | 280 | 59 | 1000 | 151 | 833 | 2.453 |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 173 | 3 | 202 | 17 | 68 | 478 |
| 6 | Bontosikuyu | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 342 | 88 | 583 | 314 | 299 | |
| 7 | Bontoharu | 13 | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 364 | 19 | 983 | 27 | 66 | |
| 8 | Benteng | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 106 | 6 | 4 | |
| 9 | Botomanai | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 118 | 2 | 268 | 7 | 3 | |
| 10 | Bontomatene | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 358 | 54 | 440 | 93 | 66 | |
| 11 | Buki | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 32 | 2 | 128 | 6 | 24 | |
| **Total** | | 162 | 15 | 25 | 1 | 181 | 20 | 2319 | 238 | 5255 | 763 | 2069 | |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021



Tabel 4.7
Jumlah Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2021

| No | Kecamatan | Pendaratan Ikan | Tempat Pelelangan Ikan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 8 | | |
| 2 | Pasilambena | 6 | | |
| 3 | Pasimasunggu | 9 | | |
| 4 | Taka Bonerate | 13 | 1 | |
| 5 | Pasimasunggu Timur | 5 | | |
| 6 | Bontosikuyu | 14 | | |
| 7 | Bontoharu | 7 | | |
| 8 | Benteng | 3 | 1 | |
| 9 | Bontomanai | 2 | | |
| 10 | Bontomatene | 8 | | |
| 11 | Buki | 2 | | |
| Jumlah | | 77 | 2 | |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

## B. Perikanan Budidaya

a. Produksi Perikanan Budidaya

Tabel 4.8
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis (ton) Tahun 2021

| No | Kecamatan | Udang Windu | Udang Vanname | Udang Api-Api | Lobster | Bandeng | Lele | Kerapu | Kwee | Rumput Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | | | | | | | | | 328.99 |
| 2 | Pasilambena | | | | | | | | | |
| 3 | Pasimassunggu | 0.64 | 3.27 | | | 5.92 | | | | |
| 4 | Takabonerate | | | | | | | | | |
| 5 | Pasimassunggu Timur | 6.84 | 3.65 | 0.15 | | 24.08 | | | | |
| 6 | Bontosikuyu | 0.75 | 10.63 | | 0.55 | 4.38 | | | 1.41 | 26.78 |
| 7 | Bontoharu | 1.53 | 22.18 | 1.16 | 8.46 | 18.16 | | 49.48 | | |
| 8 | Benteng | | | | | | 0.16 | | | |
| 9 | Bontomanai | | | | | 0.15 | | | | |
| 10 | Bontomatene | | 0.15 | | | | | | | 3.36 |
| 11 | Buki | | | | | | | | | |
| Jumlah | | 9.75 | 39.88 | 1.31 | 9.01 | 52.68 | 0.16 | 49.48 | 1.41 | 359.13 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 4.9
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Subsektor
di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Kecamatan | Produksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Budidaya Laut | Tambak | Kolam | Jaring Apung | Jumlah |
| 1 | Pasimarannu | 328.99 | | | | 328.99 |
| 2 | Pasilambena | | | | | |
| 3 | Pasimasunggu | | 9.82 | | | 9.82 |
| 4 | Taka Bonerate | | | | | |
| 5 | Pasimasunggu Timur | | 34.71 | | | 34.71 |
| 6 | Bontosikuyu | 26.78 | 15.76 | | 0.55 | 43.09 |
| 7 | Bontoharu | | 42.34 | 0.69 | 59.34 | 102.36 |
| 8 | Benteng | | | 0.16 | | 0.16 |
| 9 | Bontomanai | | 0.15 | | | 0.15 |
| 10 | Bontomatene | 3.36 | | 0.15 | | 3.51 |
| 11 | Buki | | | | | |
| Jumlah | | 359.13 | 102.77 | 1.00 | 59.89 | 522.78 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 4.10
Perbandingan Produksi Perikanan Budidaya Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2016 sampai Tahun 2021

| No | Jenis Budidaya | Produksi (Ton) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
| 1 | U.Windu | 53.00 | 16.01 | 7.96 | 9.08 | 9.63 | 9.75 |
| 2 | U.Vanname | 134.20 | 57.17 | 66.9 | 58.13 | 39.69 | 39.88 |
| 3 | U.Api-api | 1.80 | 1.07 | 0.55 | 0.99 | 0.76 | 1.31 |
| 4 | U. Galah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 5 | Lobster | 0.24 | 0.12 | | 3.66 | 7.96 | 9.01 |
| 6 | Bandeng | 81.50 | 28.51 | 47.1 | 48.33 | 52.14 | 52.68 |
| 7 | Lele | 4.70 | 3.74 | 1.02 | 1.39 | 0.57 | 0.16 |
| 8 | Kerapu | 13.70 | 7.73 | 2.28 | 52.43 | 84.20 | 49.48 |
| 9 | Kwee | 5.96 | 8.45 | 1.71 | 3.36 | 0.37 | 1.41 |
| 10 | Nila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | R. Laut (SP.) | 88.70 | 0 | 0 | 0 | 130.94 | 54.54 |
| 12 | R. Laut (E.Cottoni) | 81.50 | 333.4 | 365.5 | 395.74 | 511.12 | 304.59 |
| Total | | 465.30 | 456.20 | 493.02 | 573.12 | 837.36 | 522.78 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

Gambar 4.4
Keramba Jaring Apung di Kec. Taka Bonerate





b. Jumlah Pelaku Usaha Budidaya

Tabel 4.11
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Pembudidaya Per Kecamatan
Tahun 2021

| No | Kecamatan | Budidaya Laut | Tambak | Kolam | Jaring Apung | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasimarannu | 156 | | | | 156 |
| 2 | Pasilambena | | | | | |
| 3 | Pasimasunggu | | 60 | | | 60 |
| 4 | Taka Bonerate | | | | | |
| 5 | Pasimasunggu Timur | | 174 | | | 174 |
| 6 | Bontosikuyu | 116 | 40 | | 1 | 157 |
| 7 | Bontoharu | | 66 | 3 | 63 | 132 |
| 8 | Benteng | | | 1 | | 1 |
| 9 | Bontomanai | | 1 | 3 | | 4 |
| 10 | Bontomatene | 20 | | 1 | | 21 |
| 11 | Buki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 292 | 341 | 8 | 64 | 705 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

c. Luas Lahan Budidaya

Tabel 4.12
Luas Lahan Budidaya berdasarkan Jenis Pembesarannya
Tahun 2016 – 2021

| No | Jenis Pembesaran | Luas Lahan (m2) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Jaring Apung Laut | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 2,247 | 2,000 | 1,700 |
| 2 | Kolam Air Tenang | 5,800 | 5,700 | 500 | 202 | 1,900 | 600 |
| 3 | Rumput Laut | 1,353,000 | 1,353,000 | 1,260,000 | 4,699,162 | 2,667,250 | 1,778,300 |
| 4 | Tambak Intensif | 4,206,000 | 4,226,000 | 4,255,900 | 144,000 | 144,000 | 144,177 |
| 5 | Tambak Sederhana | | | | 3,433,000 | 3,433,000 | 3,503,790 |
| 6 | Tambak Semi Intensif | | | | 438,000 | 438,000 | 438,000 |
| Jumlah | | 5,566,800 | 5,566,700 | 5,517,900 | 8,716,611 | 6,686,150 | 5,866,567 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

Gambar 4.5
Aktifitas Pembudidaya di Kecamatan Bontoharu



## C. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

a. Produksi Olahan Hasil Perikanan

Tabel 4.13
Produksi Olahan Hasil Perikanan menurut Jenisnya
Tahun 2019 – 2021

| No | Uraian | Tahun 2019 (Ton) | Tahun 2020 (Ton) | Tahun 2021 (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermentasi dan Peragian (Terasi) | 24,327.00 | 4,719.75 | 3,568.90 |
| 2 | Pelumatan daging dan Surimi (Bakso Ikan, Nugget Ikan dan Otak-Otak, bolu-bolu ikan, amplang ikan) | 108.75 | 2,338.32 | 5,246.94 |
| 3 | Pembekuan | - | 0 | 0 |
| 4 | Pemindangan | - | 0 | 0 |
| 5 | Penanganan produk segar dan Dingin | - | 0 | 0 |
| 6 | Pengalengan | - | 0 | 0 |
| 7 | Pengasapan dan Pemanggangan | - | 0 | 0 |
| 8 | Penggaraman dan Pengeringan (Ikan Kering dan Teripang kering) | 138,941.95 | 153,107.24 | 290,232.30 |
| 9 | Pengolahan lainnya (Abon Ikan) | 2,368.60 | 670.00 | 849.00 |
| 10 | Pereduksian dan Ekstraksi | - | 0 | 0 |
| **Jumlah** | | **165,746.30** | **160,835.30** | **299,897.14** |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan



b. Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Tabel 4.14
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Pengolah dan Pemasar
menurut Kecamatan dan Jenis Olahan Tahun 2021

| No | Kecamatan | Jenis Olahan | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Terasi | Abon | Bakso | Ikan Kering dan Teripang Kering |
| 1 | Pasimarannu | | | 5 | |
| 2 | Pasilambena | | | 3 | 33 |
| 3 | Pasimassunggu | | | | |
| 4 | Takabonerate | | | | 17 |
| 5 | Pasimassunggu Timur | | | | |
| 6 | Bontosikuyu | | | | 28 |
| 7 | Bontoharu | 3 | 1 | | 14 |
| 8 | Benteng | | | | |
| 9 | Bontomanai | | | | 9 |
| 10 | Bontomatene | | | | 2 |
| 11 | Buki | | 2 | | 6 |
| Jumlah | | 3 | 3 | 8 | 109 |




Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

## D. Garam

a. Produksi Garam

Tabel 4.15
Produksi Garam Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2021

| No | Lokasi | Produksi (Ton) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Bontotangnga, Kec. Bontoharu | 47.41 | 0 | 35 | 17.01 | 9 | 0 |
| 2 | Bontosunggu, Kec. Bontoharu | 7.54 | 21.25 | 80.41 | 139.20 | 35 | 3.15 |
| Jumlah Total | | 54.95 | 21.25 | 115.71 | 156.21 | 43.10 | 3.15 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

Tabel 4.16
Nilai Produksi Garam Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2021

| No | Lokasi | Nilai Rupiah (1000) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Bontotangnga, Kec. Bontoharu | 42,669 | 0 | 176,500 | 17,806 | 10,200 | 0 |
| 2 | Bontosunggu, Kec. Bontoharu | 6,786 | 85,000 | 402,071 | 158,960 | 41,520 | 3,150 |
| Jumlah Total | | 49,455 | 85,000 | 578,570.85 | 176,765.60 | 51,720.00 | 3,150 |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan

b. Kelompok Usaha Garam Rakyat

Tabel 4.17
Kelompok Usaha Garam berdasarkan metode yang digunakan
Tahun 2021

| No | Nama Kelompok | Alamat | Metode |
|---|---|---|---|
| 1 | Saribattang | Bontoharu | Tunnel dan Tradisional |
| 2 | Pasiturukang | Bontoharu | Tradisional |
| 3 | Garam Jaya | Bontoharu | Geo Membrane dan Tradisional |
| 4 | Passe'reang | Bontoharu | Tradisional |

Sumber : Data Statistik Dinas Perikanan Tahun 2021

# BAB V

# PROGRAM DAN KEGIATAN

## A. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

   a. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Nelayan Kecil

      Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan SDM nelayan kecil antara lain dengan adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan bidang kelautan dan perikanan. Beberapa yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 antara lain pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, Pelatihan penanganan ikan di atas kapal, sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan Perikanan

Gambar 5.1
Kegiatan Peningkatan SDM Nelayan Kecil



b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tabel 5.1
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Tahun 2019 - 2021

| No | Jenis Sarpras | Satuan | Jumlah | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Cold Box | Unit | 11 | 34 | 61 | 106 |
| 2 | Kapal 5 GT | Paket | | | 21 | 21 |
| 3 | Sampan Fiber | Unit | 100 | 75 | 15 | 190 |
| 4 | Perahu ikan lebih kecil dari 3 GT | Paket | 28 | 17 | | 45 |
| 5 | Sero | Unit | 7 | 5 | | 12 |
| 6 | Mesin Katinting, Mesin 9 Pk – 24 PK | Unit | 34 | 29 | 32 | 95 |
| 7 | Alat Penangkap Ikan Ramah Lingkungan | Unit | | 94 | 127 | 221 |
| 8 | Fish Finder | Unit | 29 | 7 | 9 | 45 |
| 9 | Bubu | Unit | | | 166 | 166 |
| 10 | Senter Selam | Unit | 130 | | | 130 |
| Jumlah | | | 339 | 261 | 431 | 1.031 |

**2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

a. Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembudidaya

Kegiatan Peningkatan SDM pembudidaya yang telah dilakukan selama tahun 2021 adalah Pelatihan Teknik dan Metode Budidaya.

Gambar 5.2
Kegiatan Peningkatan SDM Pembudidaya











b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Tabel 5.2
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Tahun 2019 - 2021

| No | Jenis Sarpras | Satuan | Jumlah | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Jaring Keramba | Unit | 16 | 4 | 15 | 35 |
| 2 | Keramba Jaring Apung | Unit | | 3 | | 3 |
| 3 | Bibit Galah | Ekor | 58.400 | | | 58.400 |
| 4 | Pakan | Kg | 14.386 | | | 14.386 |
| 5 | Kolam Terpal | Unit | 10 | | | 10 |
| 6 | Mesin Alkon | Unit | 4 | 14 | 4 | 22 |
| 7 | Bak Percontohan Udang | Unit | 8 | | | 8 |
| 8 | Mesin Pompa | Unit | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | Kincir | Unit | 26 | | | 26 |
| 10 | Pintu Monik | Unit | 3 | | | 3 |
| 11 | Bibit Vaname | Ekor | 350.000 | 2.700.000 | | 3.050.000 |
| 12 | Pakan Udang Vaname | Kg | | 25.998 | | 25.998 |
| 13 | Jaring Sampling | Unit | | | 50 | 50 |
| 14 | Paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana | Paket | | 1 | | 1 |
| 15 | Pembangunan dan rehabilitasi sarpras | | | | 1 | 1 |
| 16 | Rehabilitasi Saluran Tambak | Paket | 1 | | | 1 |
| 17 | Bibit Bandeng | ekor | 47.000 | | | 47.000 |
| 18 | Pencontohan Ikan Hias (DAK) | Paket | 1 | | | 1 |
| 19 | Bibit Lele | Ekor | 12.000 | | | 12.000 |
| 20 | Kolam Percontohan ikan air tawar | Paket | 1 | | | 1 |
| 21 | Percontohan Semi Intensif | Paket | 1 | | | 1 |
| 22 | Sarpras Budidaya Rumput Laut | Paket | 5 | | | 5 |
| 23 | Tali PE no. 10 | Kg | | 455 | 199 | 654 |
| 24 | Tali PE no. 4 | Kg | | 455 | 199 | 654 |
| 25 | Tali PE no. 2 | roll | | 210 | 96 | 306 |
| 26 | Tali PE no. 1 | Pak | | 210 | 96 | 306 |
| 27 | Pelampung Utama | Unit | | 175 | | 175 |
| 28 | Pelampung Jalur | Unit | | 1.750 | | 1.750 |
| 29 | Bibit Rumput Laut | Kg | | | 2.207.500 | 2.207.500 |

### 3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah bimtek GMP, SSOP dan PPNT, kegiatan lomba masak serba ikan dan sosialisasi Gemarikan.

Gambar 5.3
Kegiatan-kegiatan pada program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



## B. Rencana Pengembangan Sektor Perikanan

### 1. Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT)

Perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang kaya akan potensi sumber daya perikanan yang sampai saat ini pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan lokal Kabupaten Kepulauan Selayar maupun Nelayan Kabupaten lain. Produksi Perikanan berupa hasil tangkapan Nelayan baik nelayan lokal maupun Nelayan dari Kabupaten lain biasanya didaratkan pada Pendaratan Ikan yang jauh dari lokasi penangkapan yang berakibat menurunnya kualitas tangkapan dan pada akhirnya nilai jual hasil tangkapan pun ikut turun sementara biaya operasional kegiatan penangkapan ikan meningkat, hal ini juga menyebabkan tingginya intensitas penjualan ikan di atas kapal (transhipment). Banyaknya nelayan luar dengan armada dan alat tangkap yang lebih maju melakukan kegiatan penangkapan pada wilayah kepulauan selayar sehingga muncul konflik/kecemburuan sosial antara nelayan lokal dan nelayan dari daerah lain.

Permasalahan utama yang menjadi alasan tidak terdaratkannya produksi tangkapan di Selayar, disebabkan oleh belum adanya kawasan pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan, sehingga tidak memberikan kepastian harga dan pasar bagi nelayan, sehingga upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan adalah Menciptakan kondisi investasi yang kondusif dan peluang pasar lokal

dan regional yang dapat menampung produksi sehingga dapat mendorong peningkatan hasil tangkapan

Latar belakang tersebut di atas antara lain melahirkan gagasan untuk mendekatkan lokasi penangkapan ikan dengan pendaratan hasil tangkapan ikan yang menjadi program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni menjadikan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia. Yang ditopang oleh 3 program prioritas salah satunya melekat di Dinas Perikanan yakni menjadikan Selayar sebagai Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Kabupaten Kepulauan Selayar berlokasi di Hangkoang, Desa Lowak, Kecamatan Bontosikuyu. Dengan adanya Kawasan Industri Perikanan Terpadu ini akan membuka lapangan pekerjaan baru yang secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan KIPT ini bisa dan akan terwujud dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Pusat, BUMN atau Swasta serta sinergitas semua Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

Adapun progress pembangunan KIPT sampai tahun 2021 masih dalam tahap penyediaan dokumen perencanaan kawasan KIPT berupa studi kelayakan dan master plan (Gambar 5.4)

Gambar 5.4
Masterplan KIPT Hangkoang




Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, 1 (satu) Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang dan 4 (empat) Sub Sentra pendukung pada 4 (empat) kecamatan kepulauan yaitu Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.

Gambar 5.5
Desain Pengelolaan Sentra Bisnis Perikanan Terpadu Berbasis Kawasan



## 2. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan

### a. Asuransi Nelayan

Tabel 5.3
Daftar Penerima Asuransi Nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 – 2021

| No | Kecamatan | Penerima Asuransi Nelayan (Orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pasimarannu | - | 117 | 20 | 35 | - | - |
| 2 | Pasilambena | - | 332 | 2 | 42 | - | - |
| 3 | Pasimasunggu | 33 | 277 | 116 | - | - | - |
| 4 | Taka Bonerate | - | 1,523 | 525 | - | - | - |
| 5 | Pasimasunggu Timur | - | 190 | 79 | - | - | - |
| 6 | Bontosikuyu | 105 | 1,095 | 104 | 194 | - | - |
| 7 | Bontoharu | 181 | 926 | 131 | 267 | - | - |
| 8 | Benteng | 3 | 42 | 21 | 41 | - | - |
| 9 | Bontomanai | 29 | 180 | 54 | 51 | - | - |
| 10 | Bontomatene | 46 | 615 | 87 | 164 | - | - |
| 11 | Buki | 27 | 122 | 34 | 14 | - | - |
| Total | | 424 | 5,419 | 1,173 | 808 | - | - |

### b. Sertifikat Tanah Nelayan

Tabel 5.4
Daftar Penerima Sertifikat Tanah Nelayan Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2016 - 2021

| No | Kecamatan | Penerima Sertifikat Tanah Nelayan (Orang) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Pasimarannu | - | - | 93 | - | - | 39 |
| 2 | Pasilambena | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Taka Bonerate | 116 | - | - | - | - | - |
| 5 | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | 5 |
| 7 | Bontoharu | - | - | - | - | - | 18 |
| 8 | Benteng | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Bontomanai | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Bontomatene | - | - | - | - | - | 34 |
| 11 | Buki | 84 | - | - | - | - | - |
| Total | | 200 | 0 | 93 | 0 | 0 | 96 |

# BAB VI

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Buku Profil Dinas Perikanan Kabupaten Selayar tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi referensi berbagai pihak untuk peningkatan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan khususnya di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya di seluruh stekholder yang berkompetensi menggunakan data ini yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan kedepannya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat terutama melalui kebijakan-kebijakan dalam lingkup kelautan dan perikanan.

## B. Rekomendasi

Buku Profil ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan serta penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan kedepannya, khususnya dalam menyusun aktifitas-aktifitas pada sub kegiatan, sehingga akan meningkatkan kualitas perencanaan dan proses pelaksanaannya.

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL OPD

Selayar
Heavenly Park

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Selayar

pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id

humas.disparbudkepselayarkab@gmail.com

## GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bertempat di Jalan Jend. Sudirman No. 4 Benteng dengan titik koordinat lokasi berada diantara 6° 07' 06.3" LS / 120° 27'31.2" BT, kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu situs dan bangunan cagar budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 603 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi dan Gedung Dinas Kepariwisataan sebagai Situs dan Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten. Sebagai unsur pelaksana urusan pariwisata dan kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk kedalam kantor tipe A yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, SDM dan Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan.

### Tugas Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam pelaksanaannya, Disparbud berperan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun serta melaksanakan program pembangunan pariwisata dan kebudayaan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta menyelenggarakan administrasi kedinasan. Selain itu, Disparbud juga berfungsi sebagai motor penggerak dalam pengembangan destinasi wisata, pelestarian nilai-nilai budaya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi kreatif. Melalui tugas pokok ini, Disparbud berkomitmen untuk mendorong kemajuan pariwisata dan kebudayaan sebagai sektor unggulan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

### Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DISPARBUD)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar menjalankan fungsi strategis dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata dan

kebudayaan daerah. Fungsi tersebut meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan serta pengelolaan program dan kegiatan, hingga evaluasi dan pelaporan kinerja. Selain itu, Disparbud juga berperan dalam mengelola administrasi kedinasan serta menjalin koordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Melalui fungsi ini, Disparbud hadir untuk memastikan pengembangan pariwisata dan kebudayaan berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tabel 1

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas

| Jabatan | Tugas Pokok | Fungsi | Uraian Tugas |
|---|---|---|---|
| Kepala Dinas | Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan. | Perumusan & pelaksanaan kebijakan; evaluasi & pelaporan; administrasi kedinasan; fungsi lain sesuai arahan pimpinan. | Rencana kerja, distribusi tugas, koordinasi, evaluasi, tanda tangan naskah dinas, kerja sama lintas lembaga, menilai ASN, memberi saran kebijakan. |
| Sekretaris Dinas | Membantu Kepala Dinas dalam koordinasi dan administrasi. | Koordinasi seluruh bidang; pengelolaan program, laporan, hukum; urusan umum, kepegawaian & keuangan. | Rencana kegiatan, pelayanan administrasi, mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan, menyiapkan laporan sekretariat. |
| Subbagian Program | Menyusun program, anggaran, data, monitoring & evaluasi. | Perencanaan strategis; pengelolaan data informasi; evaluasi kinerja. | Rencana kegiatan, memfasilitasi renstra & renja, laporan evaluasi, inovasi daerah, koordinasi perencanaan. |
| Subbagian Umum, Kepegawaian & Hukum | Mengelola ketatausahaan, kepegawaian, hukum, aset & rumah tangga. | Administrasi umum; pengelolaan kepegawaian; penyusunan regulasi. | Surat-menyurat, arsip, aset, dokumentasi, pelatihan ASN, regulasi, disiplin ASN. |
| Subbagian Keuangan | Mengelola keuangan, penatausahaan, akuntansi & pembukuan. | Pengelolaan anggaran; pelaporan keuangan; retribusi daerah. | Laporan keuangan (bulanan, semester, tahunan), verifikasi dokumen, gaji ASN, tanggapan hasil audit. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bidang Pemasaran Pariwisata | Merumuskan & melaksanakan kebijakan teknis pemasaran pariwisata. | Promosi & kerjasama; penyediaan data; evaluasi pemasaran. | Program pemasaran, promosi dalam & luar negeri, data & informasi pariwisata, kemitraan pariwisata. |
| Bidang Destinasi Pariwisata | Merumuskan & melaksanakan kebijakan teknis destinasi. | Pengelolaan daya tarik wisata; pengembangan destinasi; pengawasan usaha wisata. | Pengelolaan destinasi & usaha pariwisata, sarana-prasarana, pemberdayaan masyarakat, investasi, standarisasi usaha. |
| Bidang SDM & Ekonomi Kreatif | Mengembangkan SDM pariwisata & mendukung ekonomi kreatif. | Pelatihan & sertifikasi; penguatan ekosistem ekonomi kreatif; perlindungan karya kreatif. | Pelatihan dasar, sertifikasi, riset & pendanaan ekonomi kreatif, ruang kreatif, fasilitasi HKI. |
| Bidang Kebudayaan | Merumuskan & melaksanakan kebijakan teknis kebudayaan. | Pelestarian tradisi & seni; perlindungan cagar budaya; pengembangan sejarah & museum. | Pengelolaan lembaga adat, tradisi, kesenian, cagar budaya, permuseuman, sejarah lokal, SDM kebudayaan. |
| Kelompok Jabatan Fungsional | Melaksanakan kegiatan sesuai keahlian fungsional. | Mendukung penyelenggaraan tugas sesuai bidang profesi. | Tugas teknis fungsional (pamong budaya, adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif, pranata hubungan masyarakat, dan analis kebijakan). |

## SUMBER DAYA APARATUR
## DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33 pegawai, sedangkan untuk pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 38 pegawai sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 71 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

**Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

| No. | Jenjang pendidikan | ASN | | | NON ASN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah pegawai | persentase terhadap ASN (%) | Persentase terhadap seluruh pegawai | jumlah pegawai | persentase terhadap Non ASN (%) | Persentase terhadap seluruh pegawai |
| 1 | S2 | 7 | 21,21 | **9,86** | - | - | **0,00** |
| 2 | S1 | 17 | 51,52 | **23,94** | 14 | 36,84 | **19,72** |
| 3 | D-III | 3 | 9,09 | **4,23** | 1 | 2,63 | **1,41** |
| 4 | D-II | - | - | **0,00** | 9 | 23,68 | **12,68** |
| 5 | SMA | 6 | 18,18 | **8,45** | 14 | 36,84 | **19,72** |
| | **JUMLAH** | **33** | **100** | **46,48** | **38** | **100** | **53,52** |

*Sumber : DISPARBUD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari Pangkat / Golongan Ruang dari 31 pegawai yang termasuk dalam IV sebanyak 5 pegawai (15,15%), golongan III sebanyak 23 pegawai (69,70%) dan golongan II sebanyak 5 pegawai (15,15%), Dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

| Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| No. | Pangkat/Golongan Ruang | Jumlah Pegawai | Persentase terhadap Pegawai ASN (%) |
| 1 | **Golongan IV** | **5** | **15,15** |
| | Pembina Tk. I / IVb | 2 | 6,06 |
| | Pembina / IVa | 3 | 9,09 |
| 2 | **Golongan III** | **23** | **69,70** |
| | Penata Tk. I / IIId | 13 | 39,39 |
| | Penata / IIIc | 3 | 9,09 |
| | Penata Muda Tk. I / IIIb | 6 | 18,18 |
| | Penata Muda / IIIa | 1 | 3,03 |
| 3 | **Golongan II** | **5** | **15,15** |
| | Pengatur Tk. I / IId | 4 | 12,12 |
| | Pengatur / IIc | - | - |
| | Pengatur Muda Tk. I / IIb | 1 | 3,03 |
| | **JUMLAH** | **33** | **100** |

*Sumber : DISPARBUD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

Dari sisi kedudukan organisasi, dari 31 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3%) yang menduduki jabatan eselon II, 5 pegawai (15%) yang menduduki jabatan eselon III, 3 pegawai (12%) yang menduduki eselon IV, 12 pegawai (36%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu serta 11 pegawai (33%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, Dimana secara detail dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4

| Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2025 | | | |
|---|---|---|---|
| **No.** | **Jabatan** | **Jumlah Pegawai** | **Persentase terhadap Pegawai ASN (%)** |
| 1 | Eselon II | 1 | 3 |
| 2 | Eselon III | 5 | 15 |
| 3 | Eselon IV | 4 | 12 |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 12 | 36 |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | 11 | 33 |
| | **Jumlah** | **33** | **100** |

*Sumber : DISPARBUD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

# PETA JABATAN
# DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
# KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**Kepala Dinas**
**Kelas 14**

**Sekretaris**
Kelas 12

**Kelompok Jabatan Pengawas**

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF. Penyuluh Hubungan Masyarakat Pertama | 8 | 4 | 4 | - |
| JF. Pamong Budaya Pertama | 8 | 0 | 4 | -4 |

**Kepala Subbagian Program**
**Kelas 9**

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 1 | -1 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 0 | 1 | -1 |

**Kepala subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**
**Kelas 9**

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 1 | 3 | -2 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 3 | -2 |

**Kepala Subbagian Keuangan**
**Kelas 9**

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 0 | 3 | -3 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 1 | 2 | -1 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 2 | 3 | -1 |

**Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**
Kelas 11

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 2 | 2 | - |

**Kepala Bidang Destinasi Pariwisata**
Kelas 11

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda | 9 | 2 | 4 | -2 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 0 | 2 | -2 |

**Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif**
Kelas 11

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF. Analis Kebijakan Muda | 10 | 1 | 3 | -2 |
| JF. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda | 9 | 2 | 3 | -1 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 2 | -1 |

**Kepala Bidang Kebudayaan**
Kelas 11

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| JF. Analis Kebijakan Muda | 10 | 1 | 1 | 0 |
| JF. Pamong Budaya Muda | 9 | 1 | 3 | -2 |
| JF. Pamong Budaya Pertama | 8 | 0 | 2 | -2 |
| Penelaah Teknis Kebijakan | 7 | 2 | 3 | -1 |
| Pengolah Data dan Informasi | 6 | 0 | 2 | -2 |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 1 | 2 | -1 |

**KEPALA UPTD MUSEUM NEKARA**
**Kelas 9**

**KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**
**Kelas 8**

| Jabatan | Kelas | B | K | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kurator | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Konservator | 7 | 0 | 1 | -1 |
| Edukator | 7 | 1 | 1 | - |
| Pengadministrasi Perkantoran | 5 | 0 | 1 | -1 |

# PROFIL DINAS TAHUN 2021

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dalam upaya untuk menginformasikan kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2021.

Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, program dan kegiatan, serta capaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Profil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.

Benteng, Februari 2022

**Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,**

**I S M A I L.**
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 004

## DAFTAR ISI


Halaman

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... ii

Daftar Tabel ..... iii

Daftar Grafik ..... iv

Profil Pimpinan ..... v

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1
B. Maksud dan Tujuan ..... 2
C. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ..... 2

**BAB II PERENCANAAN STRATEGIS**

A. Rencana Strategis ..... 37
B. Lingkungan Strategis..... 39
C. Permasalahan Utama..... 40
D. Program dan Kegiatan ..... 43

**BAB III PROTENSI DINAS**

A. Sumber Daya Aparatur 48
B. Sarana dan Prasarana 52
C. Keuangn 60

**BAB IV POTENSI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

A. Potensi Tanaman Pangan..... 64
B. Potensi Tanaman Hortikultura ..... 76
C. Potensi Tanaman Perkebunan ..... 120
D. Potensi Peternakan ..... 139
E. Potensi Ketahanan Pangan ..... 146
F. Potensi Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan 155
G. Potensi Penyuluhan ..... 156

**BAB V PENUTUP .....** 192



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Ir. ISMAIL |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Selayar, 26 Mei 1963 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-02-2022 |
| 2 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-05-2021 |
| 3 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 11-11-2019 |
| 4 | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 03-01-2017 |
| 5 | Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan | 19-02-2014 |
| 6 | Kabid Peternakan<br>Dinas Pertanian dan Kehutanan | 03-01-2009 |
| 7 | Kabid Peternakan<br>Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan | 19-05-2006 |
| 8 | Kasi Bina Usaha Tani Peternakan<br>Dinas Pertanian dan Kehutanan | 15-01-2001 |
| 9 | Kasi Produksi Dinas Peternakan Kabupaten Selayar | 15-11-1999 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |
| 1 | S1 Peternakan UNHAS makassar | 1989 |
| 2 | SMA Negeri Selayar | 1983 |
| 3 | SMP Negeri 1 Benteng | 1980 |
| 4 | SD Negeri Tabang | 1976 |
| Diklat Kepemimpinan | | |
| 1 | Diklat PIM III | 2006 |
| 2 | Diklat PIM IV | 1998 |



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | AGUSSALIM, S.P |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Selayar, 17 Juli 1965 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-05-2021 |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 03-09-2019 |
| 3 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 21-01-2019 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |
| 1 | S1 Penyuluh dan Komunikasi Pertanian UNISMUH Makassar | 2010 |
| 2 | Sekolah Pertanian Pembangunan Boronglowe Gowa | 1985 |
| 3 | SMP Negeri 1 Benteng | 1982 |
| 4 | SD Negeri Benteng IV | 1979 |

| Diklat Kepemimpinan/Teknis | | |
|---|---|---|
| 1 | Diklat PIM IV | 2008 |
| 2 | Pelatihan Akuntansi Pemerintahan | 2012 |
| 3 | TOT Teknologi Maju Buah-Buahan | 2007 |



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MUHAMMAD AGUS, S.Pt |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Selayar, 01 Juni 1967 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Bidang ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-05-2021 |
| 2 | Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 21-01-2019 |
| 3 | Kabid Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 03-01-2017 |
| 4 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 19-02-2014 |
| 5 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 27-01-2011 |
| 6 | Kasubid Tata Penyuluhan Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan | 13-02-2007 |
| 7 | Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kehutanan | 05-04-2004 |
| 8 | Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Kehutanan | 02-12-2002 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |
| 1 | S1 Peternakan UNHAS Makassar | 1992 |
| 2 | D1 Peternakan UNHAS Makassar | 1992 |
| 3 | SMA Negeri Selayar | 1987 |
| 4 | SMP Negeri 3 Benteng | 1984 |
| 5 | SD Negeri 12 Parak | 1981 |
| Diklat Kepemimpinan | | |
| 1 | Diklat PIM III | 2018 |
| 2 | Diklat PIM IV | 2002 |
| Diklat Teknis | | |
| 1 | Uji Kompetensi Tingkat Pertama/Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | 2018 |
| 2 | Pelatihan Kewirausahaan (Enterpreneurship) Penyuluh Pertanian | 2010 |
| 3 | Pelatihan Bagi Pendamping LM3 (Tanaman Pangan) | 2009 |
| 4 | Pelatihan Teknologi Peternakan dan Pertanian | 2007 |
| 5 | Teknologi Produksi Pakan Ternak | 2006 |
| 6 | Pelatihan Petugas Lapangan Surveilans dan Monitoring Avian Influenza, Rabies, dan Antrax di Sulawesi | 2005 |
| 7 | Diklat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak | 2002 |
| 8 | Pelatihan Usaha Daur Ulang Sampah | 2002 |



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MUHAMMAD SYAMSIR, S.Pt. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Selayar, 06 Oktober 1981 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 23-11-2021 |
| 2 | Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-05-2021 |
| 3 | Kepala Seksi Pengembangan Ternak Non Rumanansia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 03-01-2017 |
| 4 | Kepala Seksi Budidaya Non Rumanansia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 12-03-2015 |
| 5 | Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 13-01-2015 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | S1 Produksi Ternak UNHAS Makassar | 2004 |
| 2 | SMUN Negeri 1 Bontomatene | 1999 |
| 3 | SMP Negeri Batangmata | 1993 |
| 4 | SD Negeri Barat Lambongan | 1988 |
| Diklat Kepemimpinan | | |
| 1 | Diklat PIM IV | 2015 |



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | RATNA NUR, S.Pt. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Panreng Sidrap, 20 November 1977 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 23-11-2021 |
| 2 | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 27-08-2021 |
| 3 | Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 07-05-2021 |
| 4 | Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 30-05-2018 |
| 5 | Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 03-01-2017 |
| 6 | Kepala Seksi Ketersediaan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan | 12-03-2015 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |
| 1 | S1 Produksi Ternak UNHAS Makassar | 2002 |
| 2 | SMAN 157 Rappang Sidrap | 1996 |
| 3 | SMPN 1 Manisa, Baranti Sidrap | 1993 |
| 4 | SDN 7 Benteng, Baranti Sidrap | 1990 |
| Diklat Kepemimpinan | | |
| 1 | Diklat PIM IV | 2016 |



**DATA PERSONAL**

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | RENI DWI ARYANTI, S.P |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Selayar, 26-01-1986 |
| Agama | : | Islam |

**RIWAYAT JABATAN**

| No | Jabatan | T.M.T |
|---|---|---|
| 1 | Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 05-05-2021 |
| 2 | Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 06-01-2020 |

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

| No | Keterangan Pendidikan/Pelatihan | Tahun |
|---|---|---|
| Pendidikan Umum | | |
| 1 | Institut Pertanian Bogor | 2009 |
| 2 | SMA Negeri 1 Benteng | 2004 |
| 3 | SLTP Negeri 1 Benteng | 2001 |
| 4 | SD Inpres Perumnas Tamalanrea 2 | 1998 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

- **Latar Belakang**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020melaksanakan isu-isu strategis yakni Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun terakhir ini. Maka, sebagai acuan untuk mengarahkan peningkatan produksi dan produktivitas di lingkupPertanian dan Ketahanan Pangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021. Dalam dokumen perencanaan strategis tersebut telah memuat indikator kinerja dan target yang diurai pertahun serta rencana indikasi pendanaannya.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangansebagai unit kerja pemerintah daerah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, dimana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dan laporan kinerja tersebut harus didukung dengan data kinerja dari tahun ke tahun secara berkelanjutan sebagai database pertanian.

- **Maksud dan Tujuan**

  Maksud penyusunan Data Potensi dan Profil Dinas adalah sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan dan perangkuman data kinerja.

  Adapun tujuan penyusunan Data Potensi dan Profil Dinas adalah untuk memudahkan pengelolaan data kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- **Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**




  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812. E-mail programdistankp@gmail.com.

### *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan*

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian dan ketahanan pangan.

1. **Kepala Dinas**

   Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalammenyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

   Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

   1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
   4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
   5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok Kepala Dinas meliputi:

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
5. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
7. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
8. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
9. melaksanakan administrasi Dinas;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sekretaris**

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretaris Dinas melaksanakan fungsi:

1. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
2. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
3. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
4. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
5. penyelenggaraan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
6. penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
7. penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretaris Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas;
13. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
5. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
6. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
7. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
8. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
9. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
10. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
11. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
12. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
13. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
14. melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
15. melaksanakan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;

16. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
17. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
18. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
19. melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
20. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
21. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
22. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
23. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
25. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Program** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas Kepala Subbagian Program meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan dinas;
7. memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat Daerah;
8. menyusun program dan kegiatan dinas dalam dokumen perencanaan;
9. menyusun dokumen evaluasi Dinas;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dinas;
11. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
12. memfasilitasi penjaringan inovasi Daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;
13. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi Dinas;
14. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
16. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Program serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Subbagian Keuangan** dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
8. melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
9. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
10. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
11. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
12. menyusun laporan Prognosis Realisasi Anggaran;
13. menyusun laporan keuangan akhir tahun;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
4. pelaksanaan administrasi bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
7. menyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

8. menyusun perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
10. melakukan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
11. melakukan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
12. melakukan bimbingan pascapanen dan pengolahan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Perbenihan dan Produksi** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perbenihan dan produksi.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbenihan dan produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbenihan dan Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perbenihan dan produksi;
7. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;
8. menyiapkan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih;
9. menyiapkan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
10. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
11. menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi;
12. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
13. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
14. menyiapkan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
15. menyiapkan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
16. menyiapkan bahan bimbingan teknis perbenihan dan produksi;
17. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
18. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
19. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Perlindungan Tanaman** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Uraian tugas Kepala Seksi Perlindungan Tanaman, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perlindungan Tanaman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan;
7. menyiapkan bahan pengamatan, pengendalian dan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tumbuhan;
8. mengelola data organisme pengganggu tumbuhan;
9. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan organisme pengganggu tumbuhan;
10. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
11. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
12. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perlindungan Tanaman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
7. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
8. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan;
9. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaranan hasil pertanian;

10. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Ketahanan Pangan**

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang ketahanan pangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan telmis bidang ketahanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan ketahanan pangan;
7. melaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
8. melaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan distribusi dan cadangan pangan;
9. melaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
10. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan;
11. menyusun perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang Ketahanan Pangan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang ketahanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melakukan pengkajian, penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
7. melakukan pendampingan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
8. melakukan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
9. menganalisis dan mengkaji ketersediaan pangan Daerah;
10. melakukan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
11. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan dan penghitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
12. mengembangkan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
13. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
14. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan Pangan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan cadangan pangan;

Uraian tugas Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang distribusi dan cadangan pangan;
7. melakukan analisis dan kajian di bidang distribusi dan cadangan pangan;
8. melakukan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
9. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
10. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;

11. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi dan cadangan pangan;
12. melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
13. melakukan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga:
14. menganalisis dan mengkaji distribusi dan cadangan pangan daerah;
15. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
16. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
17. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ketahanan pangan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. melakukan analisis dan kajian di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
8. melakukan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
9. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
10. melakukan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
11. melakukan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
12. melakukan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
13. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
14. melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
15. melakukan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
16. melakukan pengembangan pangan pokok lokal;
17. melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
18. memberikan rekomendasi/sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
19. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
20. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

21. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan prasarana, sarana dan penyuluhan;
7. mengembanganken potensi pengelolaan lahan dan irigasi serta memberian bimbingan pembiayaan pertanian;
8. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
9. melaksanakan penyuluhan pertanian;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
11. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan;
12. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang lahan, irigasi dan pembiayaan.

Uraian tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Lahan, Irigas, dan Pembiayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan bidang lahan, irigasi dan pembiayaan;
7. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
8. melakukan pengembangan prasarana pertanian;
9. melakukan pembangunan prasarana pertanian;
10. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
11. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
12. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan pertanian;
13. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian;
14. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang lahan, irigasi, dan pembiayaan;
15. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

16. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Lahan, Irigasi, dan Pembiayaan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pupuk, Pestisida dan Alsintan;
7. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
8. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
9. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
10. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, dan alsintan;

11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Penyuluhan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan.

Uraian tugas Kepala Seksi Penyuluhan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Penyuluhan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, ketenagaan, dan metode, serta informasi penyuluhan;
7. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa;
8. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa;
9. melakukan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
10. melakukan pembentukan Badan Usaha Milik Petani;
11. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan;

12. menyiapkan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
13. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
14. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
15. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;
16. menyusun dan mengelola database penyuluhan;
17. menyiapkan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
18. menyiapkan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
19. menyiapkan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
20. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penyuluhan;
21. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
22. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Penyuluhan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
24. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
5. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
7. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan;

8. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
9. memberikan bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak dan perkebunan;
10. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
11. melaksanakan pengawasan peredaran dan pengunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
12. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
13. melaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
14. memfasilitasi kajian rekomendasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
15. memberikan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Peternakan;
16. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
17. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
18. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
20. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Perbibitan dan Produksi** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang perbibitan dan produksi.

Uraian tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Perbibitan dan Produksi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang perbibitan dan produksi;
7. menyiapkan bahan pengawasan produksi dan mutu Peternakan, pakan, benih/bibit HPT;
8. menyiapkan bahan pengujian benih/bibit HPT;
9. menyiapkan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan dan tumbuhan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
10. melakukan bimbingan perbibitan, produksi dan pakan ternak;
11. menyiapkan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
12. melakukan pengembangan lahan penggembalaan umum;
13. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang perbibitan dan produksi;
14. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
15. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

17. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang kesehatan hewan dan kesmavet.

Uraian tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
7. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
8. menyiapkan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
9. menyiapkan bahan penetapan persyaratan teknis Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan penerbitan keterangan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
10. melakukan fasilitasi unit pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
11. menyiapkan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
12. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
13. menyiapkan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;

14. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
15. melakukan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan;
16. melakukan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan;
17. menetapkan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
18. melakukan pengujian kesehatan masyarakat veteriner;
19. menyiapkan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
20. menyiapkan bahan pencegahan penularan zoonosis;
21. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan dan kesmavet;
22. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan dan kesmavet;
23. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
24. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
25. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
26. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
27. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan** dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peternakan dalam menyiapkan bahan koordinasi dan perumusan, serta melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
7. menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
8. menyiapkan kebutuhan alat pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
9. menyiapkan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan di bidang peternakan;
10. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
11. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaranan hasil peternakan;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

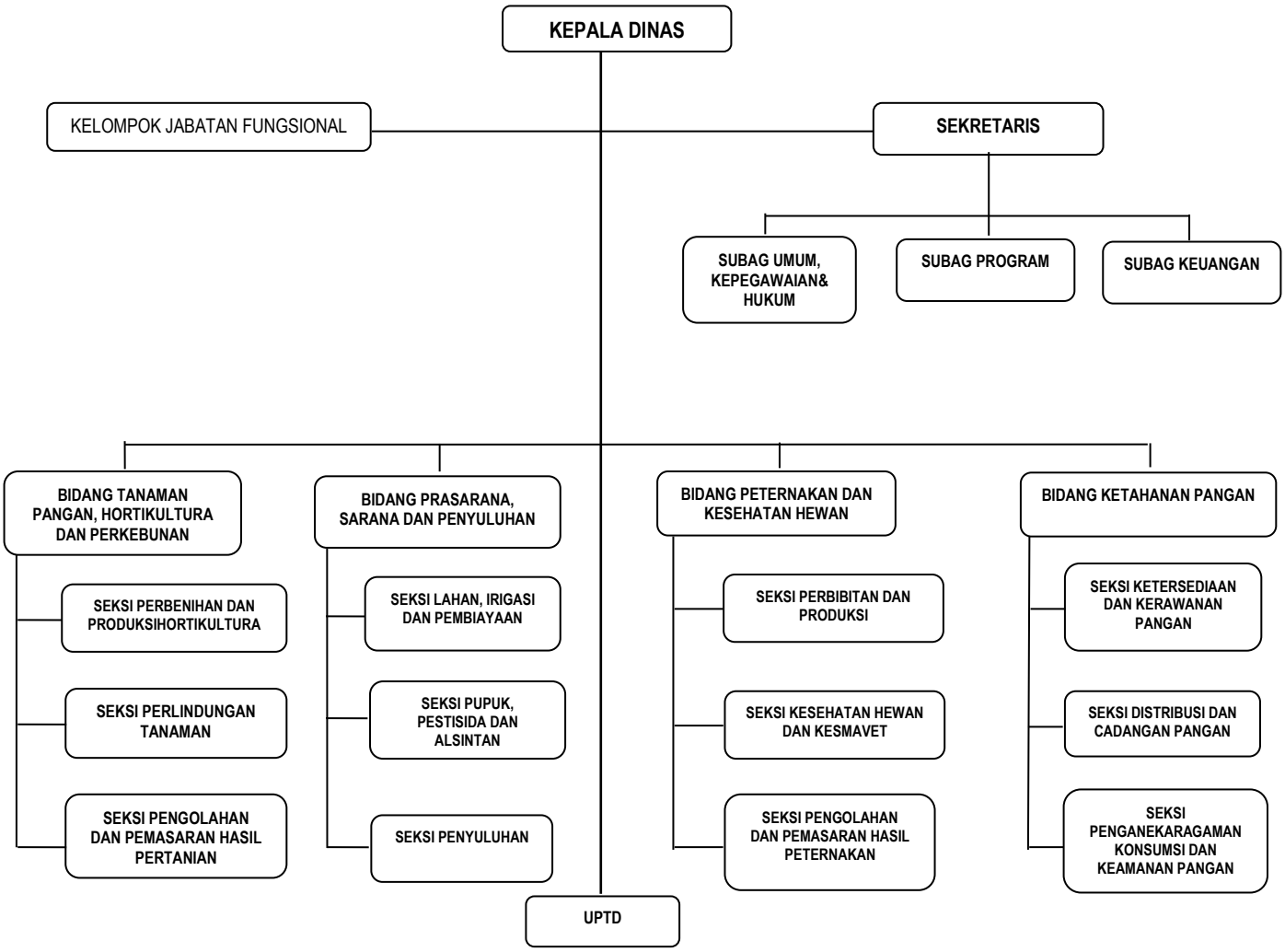
13. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Struktur Organisasi Dinas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2020, Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
   - Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
   - Subbagian Program; dan
   - Subbagian Keuangan.
3. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:
   - Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
   - Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
   - Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
4. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas:
   - Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
   - Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
   - Seksi Penyuluhan.
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
   - Seksi Perbenihan dan Produksi;
   - Seksi Perlindungan Tanaman; dan
   - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
   - Seksi Perbibitan dan Produksi;
   - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet; dan
   - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
7. UPTD
8. Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
KabupatenKepulauan Selayar
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020)



# BAB II

# PERENCANAAN STRATEGIS

## A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perecanaan yang memuat harapan yang akan dicapai oleh organiasi selama kurun waktu lima tahun. Adapun Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 adalah "**Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Budaya**".

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka misi yang diemban adalah:

- Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
- Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
- Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata.
- Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.
- Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis Pada Ekonomi Kerakyatan.
- Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal melalui Strategi Kebudayaan.

Bertolak dari visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar,maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**1. Tujuan**

Tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah **"Meningkatkan Kesejahteraan Petani"** .

**2. Sasaran**

Mengacu pada tujuan yang ingin dicapai,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan satu sasaran yaitu "**Meningkatnya kesejahteraan petani"**

**3. Strategi**

Berdasarkansasaran tersebut, maka strategi yang ditempuh sebagai berikut:

- Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah;
- Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sektor;
- Meningkatkan kualitas manajemen aparatur pemerintah daerah termasuk didalamnya penerapan punishment dan reward;
- Meningkatkan akses petani miskin terhadap sumber-sumber ekonomi;
- Meningkatkan daya beli masyarakat;
- Meningkatkan kapasitas inftrastruktur air dan irigasi;
- Melaksanakan revolusi tani; dan
- Melaksanakan pemurnian dan pembiakan ternak sapi.

## B. Lingkungan Strategis

Keberhasilan Pembangunan suatu Negara berkembang seperti Indonesia sangat tergantung pada upaya pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. Kontribusi sector Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan terhadap pendapatan daerah, penyedia lapangan dan kesempatan kerja cukup besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dari ekspor non migas.

Penerimaan pendapatan tersebut lebih banyak diperoleh dari produk dasar atau segar (primer) walaupun relative memberikan nilai tambah sangat kecil. Menyadari nilai tambah yang diperoleh dari pengembangan produk olahan (hilir) jauh lebih tinggi dari produk primer, maka pendekatan pembangunan pertanian kedepan diarahkan pada pengembangan produk (*product development*) melalui pengembangan agroindustri yang berdaya saing.

Permasalahan yang sering timbul antara lain penguasaan data informasi *dilapangan*, kelembagaan, sumber daya manusia, sarana alat dan mesin pengolahan dan penguasaan teknologi pengendalian mutu hasil. Pengembangan agroindustri pedesaan, diarahkan bagi terwujudnya system pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi dan terintegrasi dengan industri ikutannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, mulai dari hilir sampai kehulu. Seperti Perencanaan sistem, pembinaan sistem, penyediaan peralatan dan mesin, pengolahan, modal kerja, pelatihan kerjasama kemitraan, pengendalian dan pendampingan secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan tersebut, arah pembangunan pertanian dilakukan melalui dari pendekatan produksi kependekatan bisnis. Pembangunan pertanian bukan semata– mata pembangunan komoditas secara parsial melainkan terkait dengan pembangunan wilayah, yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani.

## C. Permasalahan Utama

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Dampak Perubahan Iklim

   Perubahan iklim memberikan dampak terhadap kenaikan suhu dan perubahan curah hujan, sehingga sangat berpengaruh pada sector pertanian.

   Dampak negative perubahan iklim terhadap pengelolaan air sangat dirasakan berupa kekeringan, banjir dan pola hujan yang sulit diprediksi serta tidakteratur.

   Kekeringan dapat meningkatkan persentase puso lahan dan banjir dapat merusak jaringan irigasi, terutama jaringan tersier yang merupakan jalur pembagi air antara petak–petak sawah. Dan pola hujan yang tidak teratur menyebabkan kerusakan tanaman dan tingginya OPT.

   Secara teknis, kerentanan tanaman pangan sangat berhubungan dengan system penggunaan lahan dan sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, tanaman dan varietas. Oleh sebab itu, kerentanan pangan terhadap pola curah hujan akan berimbas pada luas areal tanaman dan panen, produktifitas dan kualitas hasil.

   Kejadian iklim ekstrim, terutama El–Nino atau El–Nina, antara lain menyebabkan: (a) kegagalan panen, penurunan IP yang berujung pada penurunan produktifitas dan produksi; (b) kerusakan sumber daya lahan pertanian; (c) peningkatan frekuensi, luas dan bobot/intensitas kekeringan; (d) peningkatan kelembaban; dan (e) peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).

Sehingga masalah utama ini perlu diantisipasi dengan membuat sumur–sumur resapan, sumur, bangunan pompa air, pembangunan irigasi terseir serta pencegahan dan pemberantasan OPT di lapangan. Karena sector pertanian merupakan sektor penting dalam menyediakan bahan pangan dan menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

2. Sistem Alih Teknologi Masih Kurang

Sistem adopsi atau alih teknlogi dinilai masih kurang karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) ditingkat petani. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, system penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan. Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks, akibat dorongan fungsi penyuluhan ditingkat lapangan masih kurang.

3. Kualitas dan Mentalitas Petani Rendah

Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan rendahnya pendidikan dan keterampilan petani serta kurang dikembangkannya kearifan lokal. Sedangkan rendahnya mentalitas petanian atara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu, banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah.

Masalah ini harus diatasi dengan pendekatan penyetaraan pendidikan petani melalui pelatihan keterampilan berusaha tani dan peningkatan SDM aparat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan,dan penyuluhan.

Disamping itu, berbagai upaya penguatan kapasitas petani dalam hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan dalam pemasaran dan manajemen usaha.

4. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait dan Birokrasi

   Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh keterpaduan diantara sub system pendukungnya, mulai dari sub system hulu (industry agro–input, agro–kimia, agro–otomotif), subsystem budidaya usaha tani (on farm), sub system hilir (pengolahan dan pemasaran) serta sub system pendukung (keuangan, pendidikan, dan transportasi).

   Keterkaitan antar sub system sangat erat, namun penanganannya terkait dengan kebijakan berbagai sektor. Sementara itu, Departemen Pertanian hanya memiliki kewenangan dalam aspek budidaya/usahatani. Berbagai kebijakan yang terkait. Dengan produk pertanian sering tidakharmonis dari hulu hingga ke hilir, seperti kasus penanganan impor produk pertanian (paha ayam, daging illegal, benih kapas transgenik).

   Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama ekonomi nasioanal, maka koordinasi antar instansi menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu perbaikan menejemen pembangunan pertanian dengan mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.

5. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak Kepada Petani

   Salah satu factor penting yang menentukan kelanjutan dan kemampuan daya saing usaha pertanian adalah adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini

kebijakan makro ekonomi, baik fiskal, moneter, perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi keberlanjutan dan kemampuan daya saing usaha pertanian.

Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor petanian, antara lain: (1) penerapan pajak ekspor komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong industry pengolahan produk pertanian dalam negeri; (2) kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk petani; (3) alokasi dana APBD untuk pembangunan sektor pertanian kurang memadai; (4) beberapa daerah menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada komoditas pertanian, sehingga mengurangi daya saing dan menjadi penghambat dalam investasi di sector pertanian; (5) pembangunan sarana dan prasarana lebih besar diperkotaan dibanding dengan perdesaan; dan (6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih oleh Negara maju membuat petani kita tidak mampu bersaing. Untuk itu diperlukan advokasi kebijakan dengan instansi terkait, dan dukungan legislatif dan stakeholders lainnya.

## D. Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan kumpulan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 ini lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2020 karena adanya recofusing anggaran untuk menanggulangi pandemic Covid-19. Adapun program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
   a) Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

2). Program Pembinaan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
   a) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
      - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
      - Pemantauan Stok, Pasakan dan Harga Pangan
   b) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten'Kota
      - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
   c) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
      - Pemberdayaan Masyakarat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

3). Program Penanganan Kerawanan Pangan
   a) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
      - Penyusunan, Pemutakhiran, dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
   b) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan
   a) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
      - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Pelaksaaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
   c) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
      - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
   e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
   a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
      - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, TEknologi dan Spesifik Lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Lainnya
   b) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
      - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
   c) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
   d) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
      - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   a) Pembangunan Prasarana Pertanian
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
      - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya

- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

8) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   a) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
   b) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
      - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
9) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
   a) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
      - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
10) Program Penyuluhan Pertanian
   a) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
      - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

# BAB III

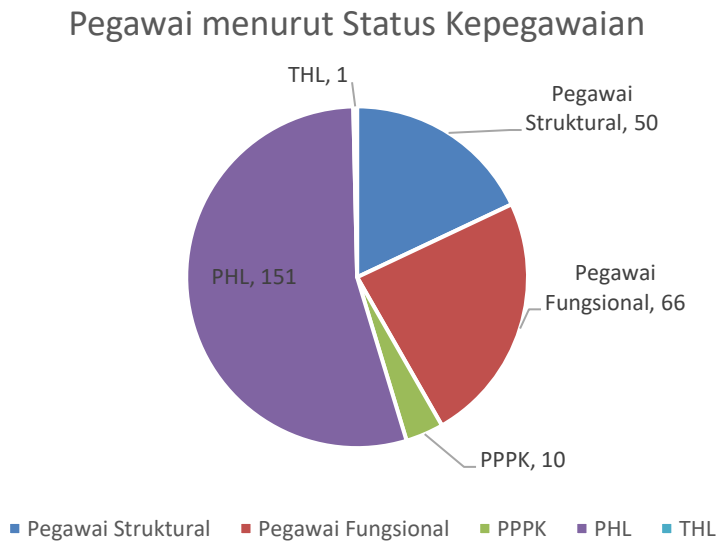
# POTENSI DINAS

## 1. Sumber Daya Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Jumlah pegawai di Dinas Pertanian dan KetahananPangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun2021 mencapai orang yang terdiri dari 116 Orang yang berstatus PNS dan 151 Orang yang berstatus Non PNS.Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 didominasi tenaga Non PNS yakni sebanyak 70,56 %, sementara level manajerial hanya 29,44% Untuk lebih jelasnya, status kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Klasifikasi Pegawai menurut Status Kepegawaian**

| Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|
| | Laki-Laki | Perempuan | |
| Pegawai Organik | 59 | 57 | 116 |
| Pegawai Struktural | 30 | 20 | 50 |
| Pegawai Fungsional | 29 | 37 | 66 |
| PPPK | 5 | 5 | 10 |
| THL | - | 1 | 1 |
| PHL | 66 | 85 | 151 |
| Pegawai Sukarela | - | - | 0 |
| **Jumlah** | **189** | **205** | **394** |

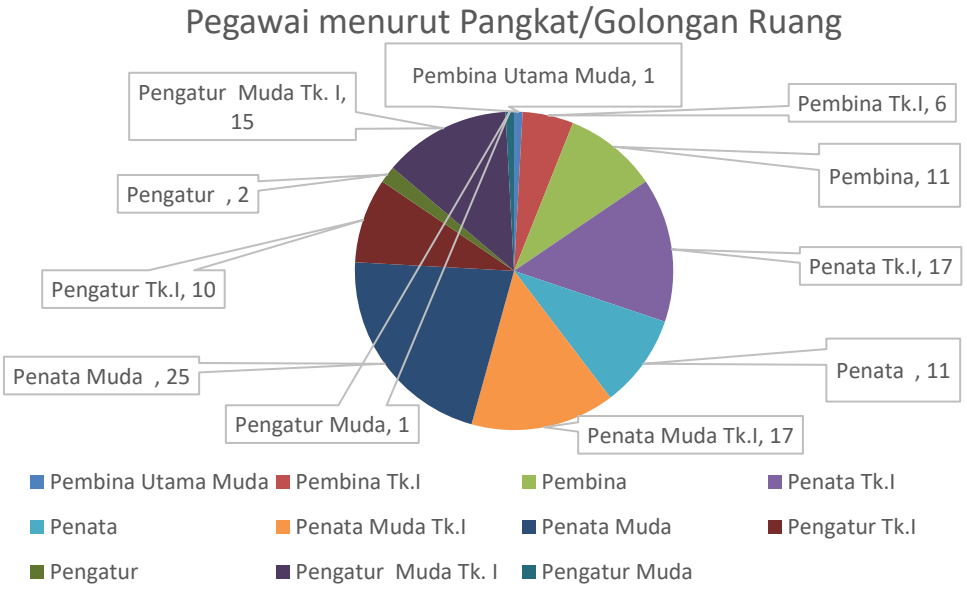



Gambar 2. Klasifikasi pegawai menurut status kepegawaian

Selanjutnya Keadaan Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 dapat diklasifikasikan menurut pangkat/golongan/ruang, jabatan, pendidikan, dan umur, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2. Klasifikasi Pegawai menurut Pangkat/Golongan Ruang**

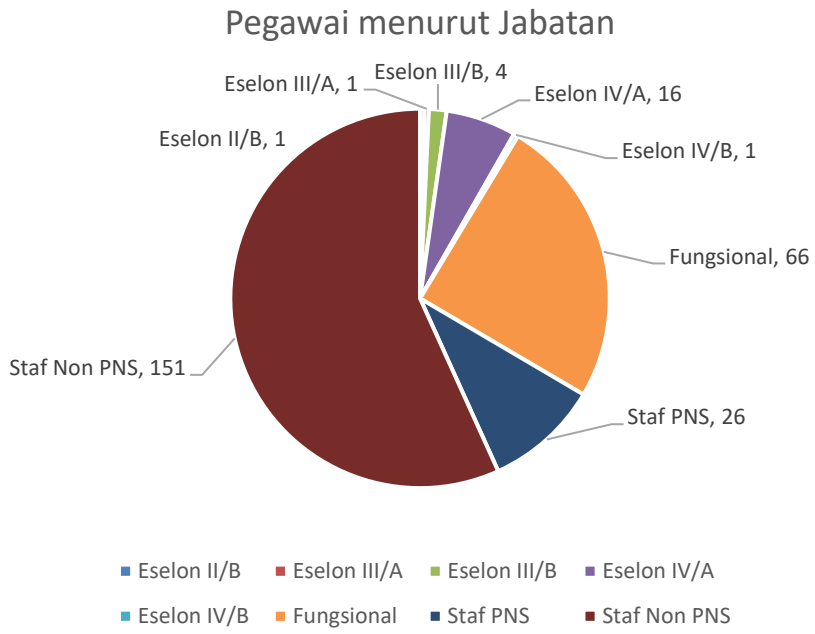
| No. | Pangkat | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Pria | Wanita | |
| 1. | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Pembina Tk. I | IV/b | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Pembina | IV/a | 7 | 4 | 11 |
| 4. | Penata Tk. I | III/d | 6 | 11 | 17 |
| 5. | Penata | III/c | 4 | 7 | 11 |
| 6. | Penata Muda Tk. I | III/b | 6 | 11 | 17 |
| 7. | Penata Muda | III/a | 13 | 12 | 25 |
| 8. | Pengatur Tk. I | II/d | 4 | 6 | 10 |
| 9. | Pengatur | II/c | 2 | 0 | 2 |
| 10. | Pengatur Muda Tk. I | II/b | 11 | 4 | 15 |
| 11. | Pengatur Muda | II/a | 1 | 0 | 1 |
| | **Jumlah** | | **57** | **59** | **116** |




Gambar 3. Klasifikasi pegawai menurut pangkat/golongan ruang

**Tabel 3.Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan**

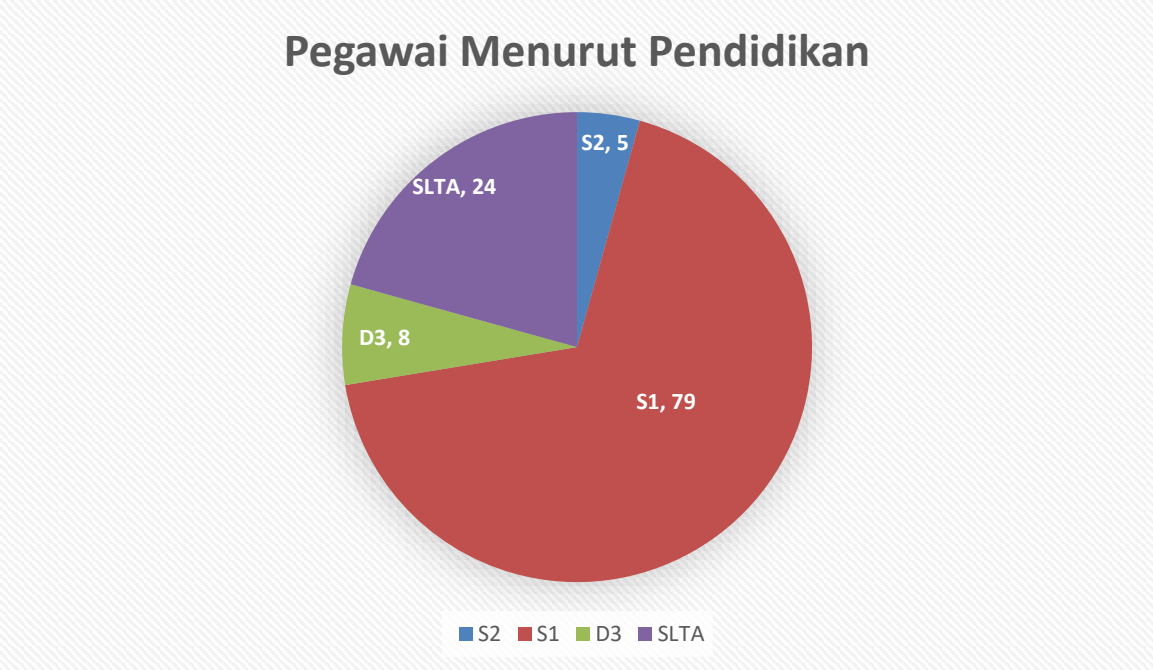
| NO | JABATAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | |
| 1. | Eselon II/B | 1 | - | 1 orang |
| 2. | Eselon III/A | 1 | - | 1 orang |
| 3. | Eselon III/B | 2 | 2 | 4 orang |
| 4. | Eselon IV/A | 5 | 11 | 16 orang |
| 5. | Eselon IV/B | - | 1 | 1 orang |
| 6. | Fungsional | 37 | 29 | 66 orang |
| 7. | Staf PNS | 12 | 14 | 26 orang |
| 8. | Staf Non PNS | 66 | 85 | 151 orang |
| Jumlah | | 124 | 142 | 266 orang |




Gambar 4. Kalsifikasi pegawai menurut jabatan

**Tabel 4. Klasifikasi Pegawaimenurut Pendidikan**

| NO | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JENIS KELAMIN | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| | | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | |
| 1. | MAGISTER (S2) | 3 | 2 | 5 orang |
| 2. | SARJANA (S1) | 34 | 45 | 79 orang |
| 3. | SARJANA MUDA (DIII) | 3 | 5 | 8 orang |
| 4. | SLTA | 17 | 7 | 24 orang |
| **Jumlah** | | | | **116 orang** |




Gambar 5. Klasifikasi pegawai menurut pendidikan

## 2. Sarana dan Prasarana

Adapunsarana dan prasarana penunjang kegiatan yang merupakan asset/modal pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat diuraikan pada tabel berikut :

Selain personil aparatur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sejumlah asset secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Tanah

Aset tanah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari Kebun Pertanian di Kecamatan Bontoharu, Tanah Pertanian di Kel. Bontobangun, Tanah Perkebunan di Desa Bontomarannu, Tanah untuk bangunan gedung kantor di Kecamatan Benteng, Tanah bangunan Rumah Potong Hewan di Matalalang Kecamatan Bontoharu, dan Kinak Kambing di Desa Bungaiya. Aset tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.2.6. Aset Tanah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Tanah | Letak/Alamat | Luas (m2) |
|---|---|---|---|
| **1** | Kebun Pertanian | Jln. Poros Bandara Aroeppala Tanabau Desa Bontosunggu Kec. Bontoharu | 40.000 |
| **2** | Tanah Pertanian | Jln. Poros Bandara Aroeppala Kampung Padang Distrik Bontobangun | 200.000 |
| **3** | Tanah Perkebunan | Bontomarannu | 6.679 |
| **4** | Tanah Kantor Dinas Pertanian dan Kehutanan | Jln. DR Sam Ratulangi No. 26 Benteng | 728 |
| **5** | Kantor Ex. Pertanian Rakyat | Jln. Bina Karya | 1.800 |
| **6** | Gudang Distanhut | Jln . Jend Ahmad Yani Benteng | 642 |
| **7** | Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya | Matalalang Bontoharu | 55.166 |
| **8** | Kinak | Desa Bungaiya | 440.000 |

b. Alat Angkutan

Alat angkutan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kendaraan dinas/ operasional roda empat 2 (dua) unit, dan kendaraan dinas/ operasional roda dua, dan alat angkut apung berupa joloro. Aset alat angkutan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.7. Aset Alat – alat Angkutan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Angkutan | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Mobil | 2 |
| **2** | Sepeda Motor | 83 |
| **3** | Alat Angkut Apung Penumpang Lain-lain | 2 |

c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Aset alat-alat bengkel dan alat ukur berupa alat ukur kadar air yang digunakan untuk mengukur kandungan air gabah, jagung dan biji-bijian lainnya. Selain alat ukur kadar air terdapat pula GPS, pada bidang pertanian GPS terkait dengan navigasi kendaraan pertanian, pemetaan kawasan dan lahan pertanian maupun pembangunan dan aplikasi dari suatu sistem informasi pertanian. Aset alat-alat bengkel dan alat ukur pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.8. Aset Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Alat Ukur Kadar Air (Moisture Meter) | 3 |
| **2** | ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) | 1 |
| **3** | Global Positioning System (GPS) | 2 |

d. Alat-alat Pertanian

Aset alat-alat pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain berupa handtraktor mini, traktor tangan, alat panen (power thresher), mesin pemotong padi, dan alat pasca panen. Alat-alat pertanian tersebut digunakan dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Aset alat-alat pertanian dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.9. Aset Alat-alat Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Pertanian | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Handtraktor mini (mini tiller) | 13 |
| **2** | Traktor Tangan dengan peralatannya | 2 |
| **3** | Traktor Tangan dengan peralatannya | 22 |
| **4** | Alat Panen/Pengolahan Lain-lain | 2 |
| **5** | Alat Panen/Pengolahan Lain-lain (Mesin Pemotong Padi) | 4 |
| **6** | Alat Processing Lain-lain | 1 |
| **7** | Alat Pasca Panen Lain-lain | 1 |

e. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan rumah tangga merupakan peralatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat kantor dan rumah tangga dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.10. Aset Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) | 1 |
| **2** | Mesin Absen (Time Recorder) | 1 |
| **3** | Lemari Besi | 7 |
| **4** | Rak Besi/Metal | 2 |
| **5** | Filling Besi/Metal | 10 |
| **6** | Brand kas | 1 |
| **7** | Lemari kayu | 2 |
| **8** | Papan Pengumunan | 1 |
| **9** | Alat Pemotong Kertas | 1 |
| **10** | Genset | 1 |
| **11** | Mesin Pompa Air | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| **12** | Lemari Kayu | 12 |
| **13** | Kursi Besi/Metal | 44 |
| **14** | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | 2 |
| **15** | Meja Rapat | 163 |
| **16** | Kursi Rapat | 377 |
| **17** | Kursi Tamu | 1 |
| **18** | Kursi Putar | 15 |
| **19** | Meja Komputer | 10 |
| **20** | Meja Biro | 67 |
| **21** | Kursi Plastik | 2 |
| **22** | Kursi Kerja | 6 |
| **23** | Meja Baca | 30 |
| **24** | Rak TV | 1 |
| **25** | Dinding/Sekat Kayu | 2 |
| **26** | Mesin Potong Rumput | 1 |
| **27** | Lemari Es | 3 |
| **28** | AC Unit | 15 |
| **29** | AC Split | 11 |
| **30** | Kipas Angin | 7 |
| **31** | Alat Pendingin Lain-lain | 1 |
| **32** | Televisi | 8 |
| **33** | Microphone | 1 |
| **34** | Alat Rumah Tangga Lain-lain | 1 |
| **35** | P.C Unit/ Komputer PC | 10 |
| **36** | Lap Top | 76 |
| **37** | Note Book | 23 |
| **38** | Personal Komputer Lain-lain | 1 |
| **39** | Keyboard | 1 |
| **40** | Printer | 58 |
| **41** | Scanner | 2 |
| **42** | Harddisk Eksternal | 3 |
| **43** | Webcam | 3 |
| **44** | Speaker aktif Komputer | 3 |
| **45** | Modem | 1 |
| **46** | Radio Access Point | 1 |
| **47** | Wireless Access Point | 2 |
| **48** | Meja Kerja Pejabat Eselon II | 1 |
| **49** | Meja Kerja Pejabat Eselon III | 4 |
| **50** | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 1 |
| **51** | Meja Kerja | 47 |
| **52** | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 2 |
| **53** | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 7 |
| **54** | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 11 |
| **55** | Kursi Kerja Pejabat Lain-lain | 10 |
| **56** | Lemari Buku untuk Perpustakaan | 10 |
| **57** | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | 66 |
| **58** | Lemari Arsip Pejabat Lain-Lain | 1 |

f. Alat-alat Studio dan Komunikasi

Alat-alat studio dan komunikasi berupa kamera, proyektor, sound system, loudspeaker, handycam, wireless, dan lain-lain digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Aset alat-alat studio dan komunikasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.11. Aset Alat – alat Studio dan Komunikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Studio dan Komunikasi | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Camera + Attachment (Hanya Lensa) | 2 |
| **2** | Proyektor + Attachment | 9 |
| **3** | Talk Back Unit | 1 |
| **4** | Professional Sound System | 1 |
| **5** | Digital Audio Tape Recorder | 1 |
| **6** | Peralatan studio Visual Lain-lain | 2 |
| **7** | Handycam | 3 |
| **8** | Camera Electronic | 16 |
| **9** | LoudSpeaker | 1 |
| **10** | Sound System | 9 |
| **11** | Facsimile | 1 |
| **12** | Handphone | 1 |
| **13** | Wireless Amplifier | 10 |
| **14** | Peralatan studio lain-lain | 7 |

g. Alat – alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium berupa mixer berfungsi sebagai pencampur bahan pakan ternak, selain itu terdapat pula grinder dan alat laboratorium lainnya berfungsi menunjang kegiatan bidang pertanian dan peternakan. Aset alat-alat laboratorium dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.12. Aset Alat-alat Laboratorium Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Laboratorium | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Mixer | 1 |
| **2** | ALat Lab. Proses Pengolahan Lain-Lain | 2 |
| **3** | Mesin Spining | 1 |
| **4** | Alat Lab. Pertanian Lain-Lain | 7 |
| **5** | Grinder | 1 |

h. Alat – alat Kedokteran/ Kesehatan

Alat-alat kedokteran/kesehatan merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan hewan dan penanganan ternak. Aset alat-alat kesehatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.13. Aset Alat-alat Kesehatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Alat-Alat Kedokteran/Kesehatan | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain | 24 |
| **2** | Post Mortem Set Vet Care | 1 |
| **3** | Original Dart Tranquilizer | 12 |
| **4** | Kandang Jepit Portable | 2 |

i. Gedung dan Bangunan

Aset gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dalam kondisi siap pakai. Aset gedung dan bangunan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.14. Aset Gedung dan Bangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Gedung dan Bangunan | Letak/Alamat |
|---|---|---|
| **1** | Bangunan Kantor | Jl. Dr.Sam Ratulangi, Kel. Btg Selatan |
| **2** | Perkerasan Halaman | Jl. Dr.Sam Ratulangi, Kel. Btg Selatan |
| **3** | Bangunan Rumah Kompos | |
| **4** | Lantai Jemur | |
| **5** | Bangunan Kantor | Jl. Poros Bandara Kel. Bontobangun |
| **6** | Bangunan Kantor UPTD Kepulauan | |
| **7** | Pembanguan Gudang Saprodi dan Peralatan | |
| **8** | Gudang Saprodi | Benteng |
| **9** | Rehabilitasi Gedung Kantor | |
| **10** | Pembangunan Puskeswan IB | |

| | | |
|---|---|---|
| **11** | Pembangunan Lumbung Pangan | Kec. Pasimasunggu |
| **12** | Pembangunan Lumbung Pangan | Kec. Pasimasunggu Timur |
| **13** | Pagar Bangunan | |
| **14** | Pemagaran Gudang Saprodi | |
| **15** | Revitalisasi Alat Tungku Pyrolisis | Barugaiya |
| **16** | Sumur Tani | Benteng |
| **17** | Sekat Ruangan | Benteng |
| **18** | Bangunan Pagar Kantor | Benteng |
| **19** | Bangunan Tempat Parkir | Benteng |
| **20** | Dinding Tungku Penepung Arang | Barugaiya |
| **21** | Pembangunan Dinding dan Pintu Bangunan | Barugaiya |
| **22** | Pipa Saluran Air dan Bak Penampungan Air | Barugaiya |
| **23** | Tambahan Pemagaran Keliling | |
| **24** | Pembuatan Gazebo | |
| **25** | Pemagaran keliling RPH | Matalalang |
| **26** | Pembangunan gudang pestisida wil. Kep. | |
| **27** | Pembangunan gudang pestisida wil. Dar. | |
| **28** | Kandang ternak dan peralatannya | Desa Tanamalala |
| **29** | Pengadaan Kandang Jepit (DAK) | Bontoharu |
| **30** | Pintu gerbang dan papan nama RPH | Matalalang |
| **31** | Renovasi puskeswan Benteng | Benteng |
| **32** | Pos Jaga Binanga Bakka | Bontosaile |
| **33** | Pos Jaga Kembangmiati | Komba-komba |
| **34** | Gedung Pemotongan Hewan Permanen | RPH Matalalang |
| **35** | Tempat Penggiringan Hwean (Gang Way) | RPH Matalalang |
| **36** | Pos Penyuluhan | Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu |
| **37** | Pos Penyuluhan | Desa Bonerate Kec. Pasimarannu |
| **38** | Pos Penyuluhan | Desa Kayuadi Kec. Takabonerate |
| **39** | Kantor BP | Bontomanai |
| **40** | Kantor BP | Bontoharu |
| **41** | Kantor BP | Bontomatene |
| **42** | Kantor BP | Buki |
| **43** | Kantor BP | Benteng |
| **44** | Kantor BP | Bontosikuyu |
| **45** | Gedung BP | Pasimasunggu |
| **46** | Gedung BP | Pasimarannu |
| **47** | Gedung BP | Pasilambena |
| **48** | Lumbung Pangan | |
| **49** | Lumbung Pangan | |
| **50** | Lumbung Pangan | |
| **51** | Lumbung Pangan | |
| **52** | Lumbung Pangan | |

| | | |
|---|---|---|
| **53** | Lumbung Pangan | |
| **54** | Poddock | Tanamalala |
| **55** | Asrama Permanen | |
| **56** | Asrama Permanen | |
| **57** | Asrama Permanen | |
| **58** | Asrama Permanen | |
| **59** | Flat/Rumah Lain-Lain | |
| **60** | Pagar BP | |
| **61** | Pagar BP | |
| **62** | Pagar BP | |
| **63** | Pagar BP | |
| **64** | Pagar BP | |
| **65** | Pagar BP | |
| **66** | Pagar BP | |
| **67** | Pagar BP | |
| **68** | Pagar BP | |
| **69** | Pagar BP | |
| **70** | Pagar BP | |
| **71** | Pagar BP | |
| **72** | Pagar BP | |
| **73** | Pagar BP | |
| **74** | Pagar Pembatas Ranch | |

j. Jalan dan Jaringan

Aset jalan meliputi jalan khusus komplek (jalan tani area peternakan), jalan lingkungan/ halaman (jalan tani area Rumah Potong Hewan), jalan khusus lain-lain dan jalan usaha tani (jalan tani area pertanian dan perkebunan).

Aset Irigasi berupa cek dam, irigasi air tanah dangkal, irigasi air tanah dalam, instalasi air bersih untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

Aset jaringan/instalasi meliputi instalasi listrik RPH dan Puskeswan, instalasi air bersih Puskeswan, instalasi biogas RPH dan pembangkit listrik tenaga surya di Kec. Pasimasunggu. Aset jalan dan jaringan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.2.15. Aset Jalan dan Jaringan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Jalan dan Jembatan | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Jalan Khusus Komplek | 1 |
| **2** | Jalan Khusus Lain-Lain | 3 |
| **3** | Jalan Lingkungan/Halaman | 4 |
| **4** | Jalan Produksi | 2 |
| **4** | Jalan Usaha Tani | 675 |

| No | Bangunan Air / Irigasi | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain | 3 |
| **2** | Saluran Muka | 2 |
| **3** | Saluran Induk | 2 |
| **4** | Saluran Tersier | 2 |
| **5** | Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain | 1 |
| **6** | Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain | 1 |
| **7** | Checkdam/Penahan Sedimen | 9 |
| **8** | Lain-Lain (JIAP dangkal, JIAP dalam, dll) | 23 |
| **9** | Instalasi Air Tanah Dangkal Lain-lain | 1 |
| **10** | Instalasi Air Bersih Lain-lain | 3 |
| No | **Bangunan Jaringan/Instalasi** | **Jumlah** |
| **1** | Pembangkit Listrik Tenaga Surya | 1 |
| **2** | Pengadaan Instalasi air bersih Puskeswan Bontoharu | 1 |
| **3** | Pengadaan jaringan instalasi listrik puskeswan Bontoharu, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu | 1 |
| **4** | Pengadaan instalasi listrik RPH, Kel. Bontobangun, Kec. Bontoharu | 2 |
| **5** | Pembangunan Instalasi biogas rumah potong hewan, Kec. Bontoharu | 1 |

k. Aset Lainnya

Asset lainnya berupa sapi bali di Tanamalala sampai tahun 2020 sebanyak 640 ekor.

Tabel. 2.2.16. Aset Lainnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021

| No | Aset Tetap Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|
| **1** | Sapi Bali di Tanamalala | 640 |

## 3. Keuangan

Alokasi anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami fluktuasi dengan tingkat realilasi anggaran cenderung meningkat.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2016**

| URAIAN | TAHUN 2016 | |
|---|---|---|
| | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **Pendapatan** | 5.500.000,- | 12.217.000,- |

| | | |
|---|---|---|
| **Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)** | 5.765.100.000,- | 4.597.654.577,- |
| **Belanja Langsung** | 19.456.649.650,- | 16.276.137.874,- |
| **JUMLAH Belanja** | 25.221.749.650,- | 20.873.792.451,- |

**Tabel 17. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTahun 2017**

| URAIAN | TAHUN 2017 | |
|---|---|---|
| | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **Pendapatan** | 5.500.000,- | 12.930.000,- |
| **Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)** | 5.756.100.000,- | 4.597.654.577,- |
| **Belanja Langsung** | 19.456.649.650,- | 16.276.137.874,- |
| **JUMLAH Belanja** | 25.221.749.650,- | 23.352.436.403,- |

**Tabel 18. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganTahun 2018**

| URAIAN | TAHUN 2018 | |
|---|---|---|
| | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **Pendapatan** | 5.500.000,- | 12.370.000,- |
| **Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)** | **8.840.100.000,-** | **5.736.924.956,-** |
| **Belanja Langsung** | **23.596.082.000,-** | **22.948.338.635,-** |
| **JUMLAH Belanja** | **32.436.182.000,-** | **28.685.263.591,-** |

**Tabel 19. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2019**

| URAIAN | TAHUN 2019 | |
|---|---|---|
| | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **Pendapatan** | 12.500.000,- | 17.725.000,- |
| **Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)** | **10.496.601.900,-** | **10.362.128.398,-** |
| **Belanja Langsung** | **17.562.790.675,-** | **15.815.041.226,-** |
| **JUMLAH Belanja** | **28.059.392.575,-** | **26.177.169.624,-** |

**Tabel 20. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020**

| URAIAN | TAHUN 2020 | |
|---|---|---|
| | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** |
| **Pendapatan** | 16.650.000,- | 13.247.500,- |
| **Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai)** | **10.245.600.000,-** | **9.542.053.469,-** |
| **Belanja Langsung** | **13.299.959.331,-** | **13.069.998.643,-** |
| **JUMLAH Belanja** | **23.545.559.331,-** | **22.612.052.112,-** |

**Tabel 21. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021**

| URAIAN | TAHUN 2020 | |
|---|---|---|
| | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **Pendapatan** | 16.041.200,- | 12.811.500,- |
| **Belanja Operasi** | **18.528.069.300,-** | **18.322.337.384,-** |
| **Belanja Modal** | **6.299.781.450,-** | **6.036.157.949,-** |
| **JUMLAH Belanja** | **24.827.850.750,-** | **24.358.495.333,-** |

Selanjutnya anggaran yang ada dikelola oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangandengan menggunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sangat terbatas. Anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) maupun rencana kinerja (Renja).

Adapun sumber anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan PanganKabupaten Kepulauan Selayar bersumberkan dari Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 22. Sumber Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2020 - 2021**

| NO. | URAIAN | TAHUN 2020 | | Tahun 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) |
| **1.** | Dana Alokasi Umum (DAU) | 12.522.709.331 | 12.389.998.643 | 21.928.367.000 | 21.462.046.778 |
| **2.** | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 777.250.000 | 680.000.000 | 2.899.483.750 | 2.899.368.750 |
| | **JUMLAH** | **13.299.959.331** | **13.069.998.643** | **24.827.850.750** | **24.361.415.528** |

# BAB IV

# POTENSI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kepulauan Selayar merupakan salah satu pulau kecil yang tersebar di Indonesia yang letaknya sangat strategis karena berada di titik tengah garis khatulistiwa.Kepulauan Selayar terletak antara 5$^{o}$42" – 7$^{o}$35" LS dan 120$^{o}$15" – 122$^{o}$30" BT dengan ketinggian wilayah tertinggi 608 mdpl dan terendah 106,25 mdpl. Juga memiliki suhu rata-rata 28,8$^{o}$C dengan kelembaban udara 82,18 %.

Kepulauan Selayar terdiri dari 130 pulau dengan rincian 34 pulau berpenghuni dan 96 pulau tidak berpenghuni, dengan luas wilayah 10.503,69 km$^{2}$ yang meliputi luas daratan 1.357,03 km$^{2}$ dan luas wilayah perairan laut 9.146,66 km$^{2}$.

Kepulauan Selayar termasuk kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Bulukumba;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perairan Teluk Bone;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perairan Selat Makassar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Kepulauan Selayar dengan ibukota Benteng. Secara geografis, Kota Benteng terletak antara 4$^{0}$ – 8$^{0}$Lintang Selatan dan 120$^{0}$2700" – 120$^{0}$2850" Bujur Timur. Wilayah Kota Benteng memiliki tipelogi sebagai wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 3 meter dpl yang beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 14$^{0}$ – 26$^{0}$ celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 82% - 86%. Luas wilayah administrasi perkotaan sebesar 712 Ha dengan jumlah penduduk di wilayah administratif sebanyak 24.054 jiwa. Sedangkan luas ruang terbuka hijau publik hanya sebesar 1.857,51Ha.

Ditinjau dari letaknya, maka perubahan iklim memberikan dampak terhadap kenaikan suhu dan perubahan curah hujan. Sehingga membawa dampak negatif bagi sektor pertanian yang merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditangani secara menyeluruh.

Melihat kondisi geografis, cuaca dan iklim yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka bidang pertanian, perkebunan dan peternakan mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena saat ini telah ditunjang oleh adanya perhatian pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

- **Sumber Daya Pertanian**

## A. Potensi Tanaman Pangan

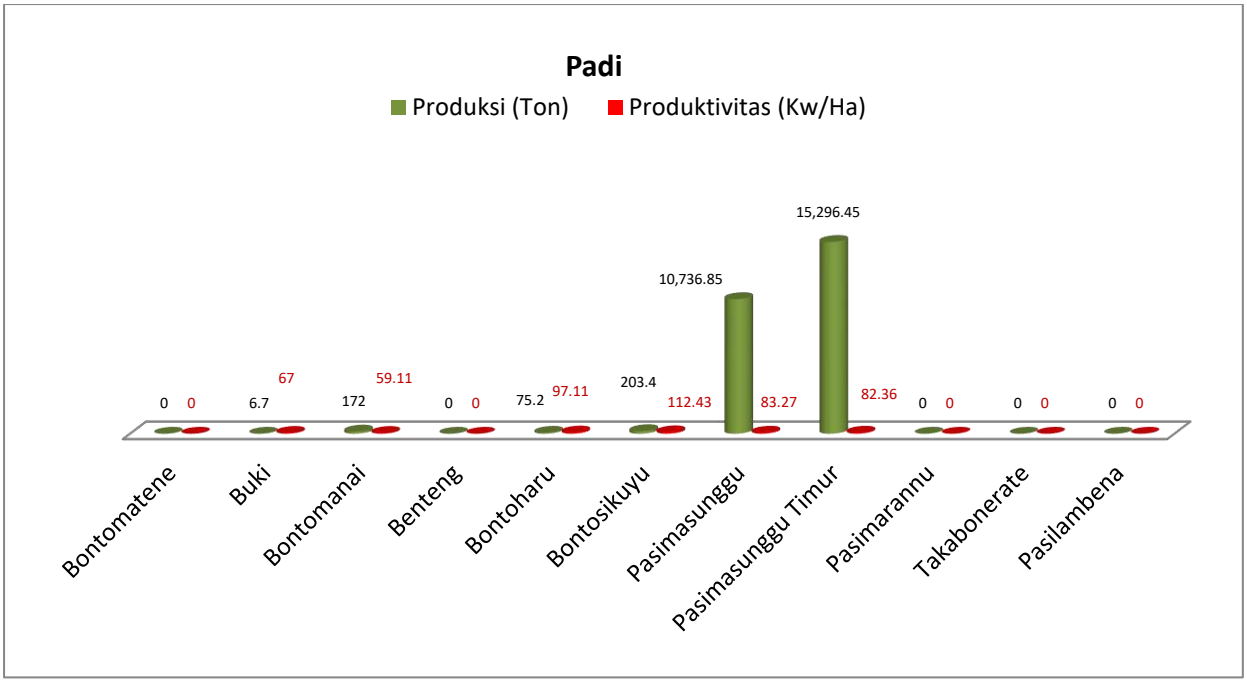
1. Padi

**Perkembangan Padi Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | 5.260 | 4.808 | 26.862 | 55,00 | 5.031 | |
| **2.** | 2017 | 5.398 | 5.000 | 37.715 | 75,43 | 5.260 | |
| **3.** | 2018 | 5.877 | 5.877 | 39.523 | 67,25 | 5.034 | |
| **4.** | 2019 | 4.345 | 4.368 | 34.979 | 79,79 | 5.877 | |
| **5.** | 2020 | 4.027 | 3.983 | 26.477,38 | 66,48 | 4.345 | |
| **6.** | 2021 | 4.661,80 | 3.216.60 | 26.490,60 | 82,35 | 4.328 | |

**Potensi Padi menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | 0,50 | 1,00 | 6,70 | 67,00 | 3,00 | |
| **3.** | Bontomanai | 46,40 | 29,10 | 172,00 | 59,11 | 28,00 | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 13,80 | 13,30 | 75,20 | 97,11 | 10,00 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 13,40 | 26,50 | 203,40 | 112,43 | 37,00 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 1.349,40 | 1.289,40 | 10.736,85 | 83,27 | 2.256,00 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 3.238,30 | 1.857,30 | 15.296,45 | 82,36 | 1.994,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **4.661,80** | **3.216.60** | **26.490,60** | **116,42** | **4.328** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman padi terdapat peningkatan sebesar 23,87% dimana di tahun 2020produktifitas padi mencapai 67,25 kw/ha sedangkan tahun 2021 mencapai 116,42 kw/ha. Tabel potensi padi per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan luas panen3.216,60 ha tanaman padi di Pasimasunggu Timur mampu mencapai produksi sebanyak 26.490,60 ton.

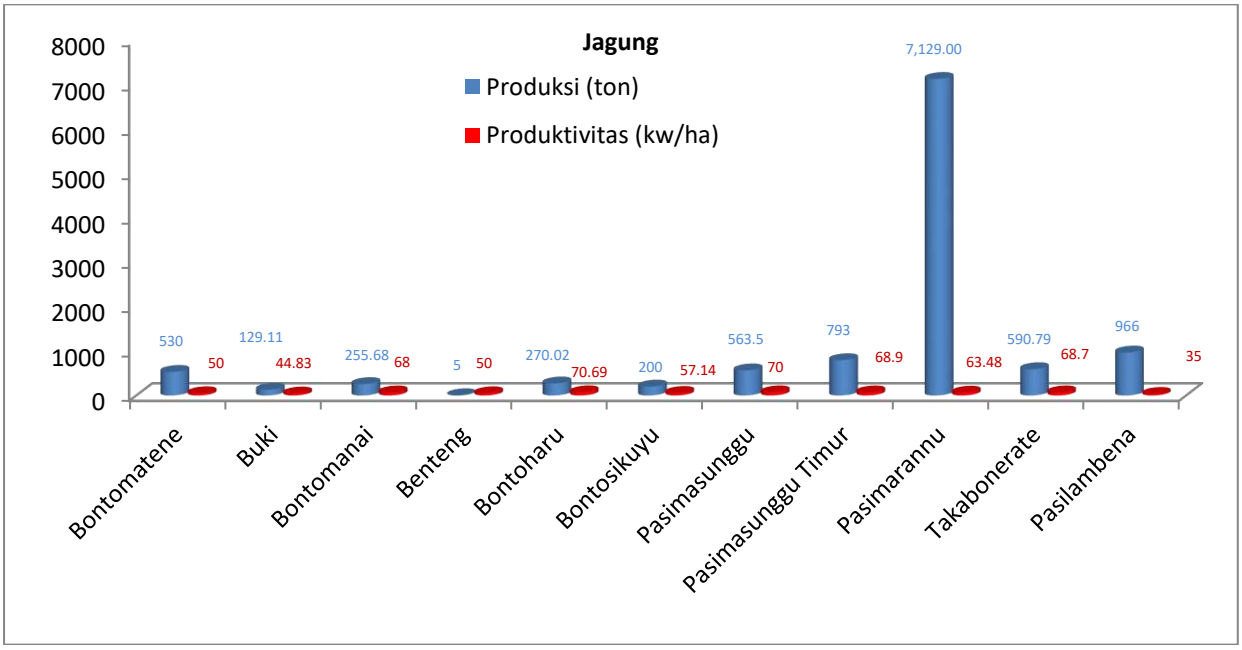
2. Jagung

**Perkembangan Jagung Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | 2.976 | 2.976 | 13.411,89 | 45,50 | 3.034 | |
| **2.** | 2017 | 2.482 | 2.347 | 18,914 | 80,59 | 3.162 | |
| **3.** | 2018 | 1.805 | 1.691 | 11.634,34 | 68,80 | 2.385 | |
| **4.** | 2019 | 764 | 1.036 | 7.127,94 | 68,80 | 1.805 | |
| **5.** | 2020 | 1.463 | 869 | 5.144,72 | 59,20 | 764 | |
| **6.** | 2021 | 2.631,30 | 1.927,20 | 11,432,10 | 59,32 | 1.463,00 | |

**Potensi Jagung menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 91,00 | 106,00 | 530,00 | 50,00 | 79,00 | |
| **2.** | Buki | 27,70 | 28,80 | 129,11 | 44,83 | 44,00 | |
| **3.** | Bontomanai | 30,70 | 37,60 | 255,68 | 68,00 | 33,00 | |
| **4.** | Benteng | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 50,00 | - | |
| **5.** | Bontoharu | 42,10 | 38,20 | 270,02 | 70,69 | 66,00 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 28,60 | 35,00 | 200,00 | 57,14 | 88,00 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 75,50 | 80,50 | 563,50 | 70,00 | 12,00 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 118,10 | 115,10 | 793,00 | 68,90 | 217,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | 1.185,50 | 1.123,00 | 7.129,00 | 63,48 | 583,00 | |
| **10.** | Takabonerate | 203,00 | 86,00 | 590,79 | 68,70 | 26,00 | |
| **11.** | Pasilambena | 827,10 | 276,00 | 966,00 | 35,00 | 315,00 | |
| Total | | **2.631,30** | **1.927,20** | **11,432,10** | **59,32** | **1.463,00** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas tanaman jagung mengalami peningkatan dari tahun 2020sebesar 59,20 ku/ha menjadi 59,32 ku/ha di tahun 2021 atau meningkat sebesar 0,20%. Kondisi ini disebabkan karena berkurangnya di tahun 2021. Kecamatan Pasimarannuadalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan

yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas panen1.123 hadan mampu mencapai produksi sebanyak 27.129 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 63,48 kw/ha.

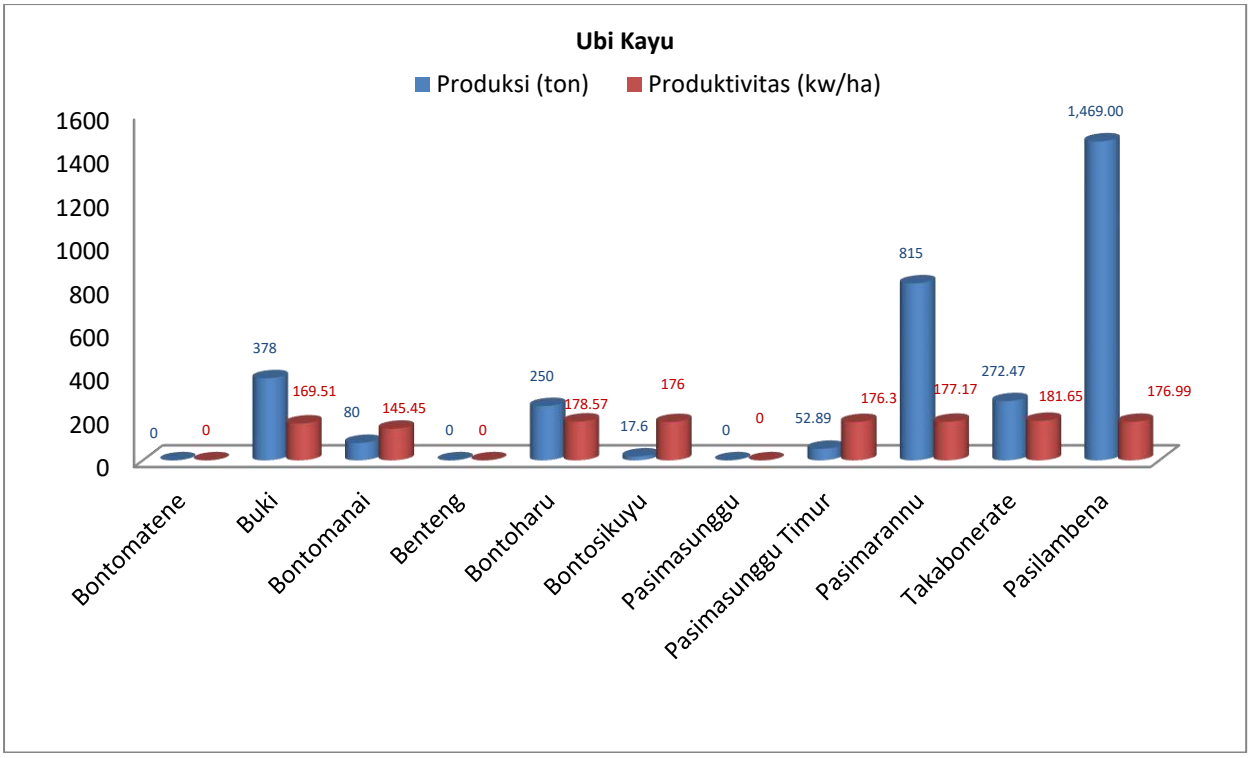
3. Ubi Kayu

**Perkembangan Ubi Kayu Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | 357 | 351 | 5.916,80 | 168,57 | 502 | |
| **2.** | 2017 | 332 | 319 | 5.630,22 | 176,50 | 357 | |
| **3.** | 2018 | 237 | 232 | 4.159,04 | 179,27 | 332 | |
| **4.** | 2019 | 265 | 244 | 4.285,36 | 175,63 | 237 | |
| **5.** | 2020 | 189 | 127 | 2.242,39 | 176,57 | 265 | |
| **6.** | 2021 | **154,40** | **189,80** | **3.334,96** | **175,71** | **189,00** | |

**Potensi Ubi Kayu menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | 1,00 | |
| **2.** | Buki | 8,40 | 22,30 | 378,00 | 169,51 | 22,00 | |
| **3.** | Bontomanai | 52,00 | 5,50 | 80,00 | 145,45 | 5,00 | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 16,00 | 14,00 | 250,00 | 178,57 | 4,00 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 5,00 | 1,00 | 17,60 | 176,00 | 1,00 | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | 3,00 | 52,89 | 176,30 | 10,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | - | 46,00 | 815,00 | 177,17 | 48,00 | |
| **10.** | Takabonerate | 12,00 | 15,00 | 272,47 | 181,65 | 49,00 | |
| **11.** | Pasilambena | 61,00 | 83,00 | 1.469,00 | 176,99 | 49,00 | |
| **Total** | | **154,40** | **189,80** | **3.334,96** | **175,71** | **189,00** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produksi tanaman ubi kayumengalami peningkatan pada tahun 2021sebanyak 48,72%.Tingkat produksi ubi kayu tahun 2021 mencapai 3.334,96 ton dengan luas panen tanaman ubi kayu yaitu 154,40 ha dan tingkat produktivitas mencapai 175,71 kw/ha. Kecamatan Pasilambena adalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu mencapai 1.469 ton dengan tingkta produktivitas 176,99 kw/ha.

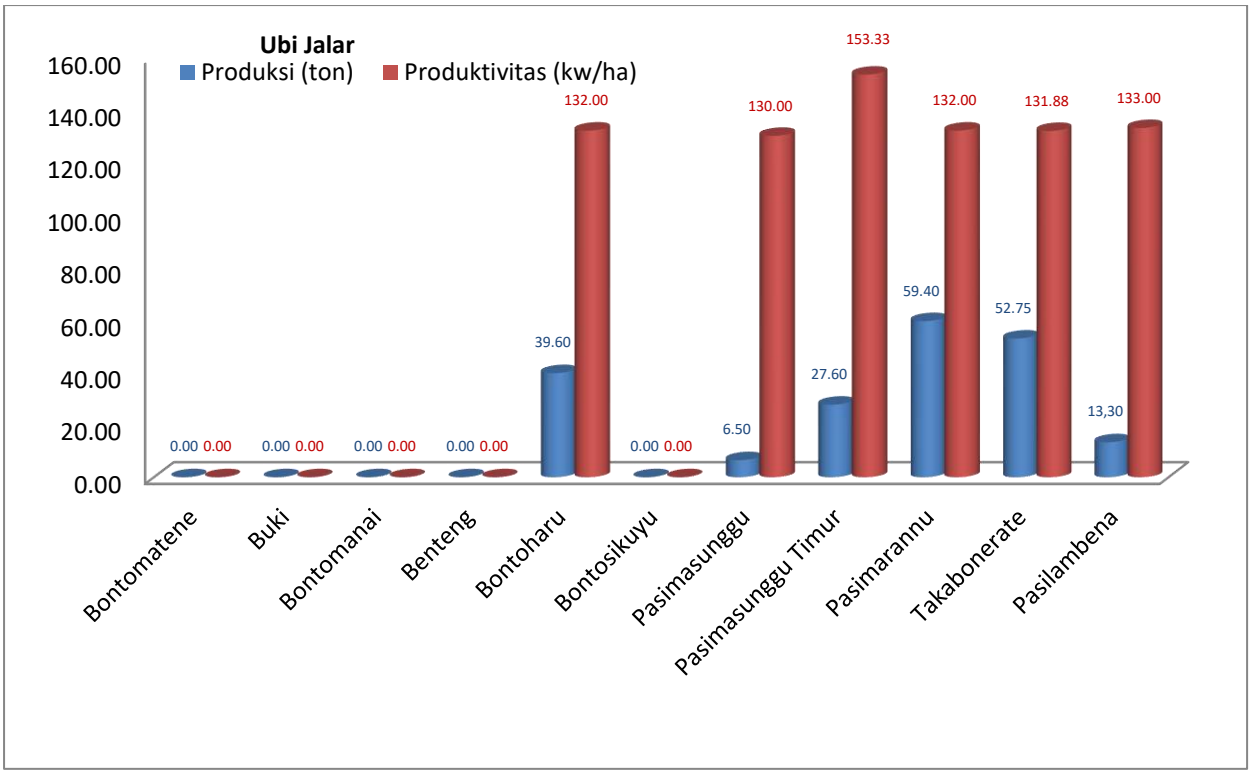
4. Ubi Jalar

**Perkembangan Ubi Jalar Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **106,00** | **106,00** | **1.351,40** | **127,49** | **128,00** | |
| **2.** | 2017 | **103,00** | **64,00** | **843,81** | **131,84** | **106,00** | |
| **3.** | 2018 | **34,00** | **34,00** | **448,51** | **131,91** | **103,00** | |
| **4.** | 2019 | **35,00** | **43,00** | **564,49** | **131,28** | **34,00** | |
| **5.** | 2020 | **22,00** | **33,00** | **434,43** | **131,65** | **35,00** | |
| **6.** | 2021 | **12,80** | **14,80** | **199,15** | **134,56** | **22,00** | |

**Potensi Ubi JalarMenurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | - | - | - | - | - | |
| **3.** | Bontomanai | 0,50 | - | - | - | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 3,00 | 3,00 | 39,60 | 132,00 | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | 0,50 | 0,50 | 6,50 | 130,00 | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 3,30 | 1,80 | 27,60 | 153,33 | 13,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | - | 4,50 | 59,40 | 132,00 | 5,00 | |
| **10.** | Takabonerate | 4,00 | 4,00 | 52,75 | 131,88 | 3,00 | |
| **11.** | Pasilambena | 1,50 | 1,00 | 13,30 | 133,00 | 1,00 | |
| **Total** | | **12,80** | **14,80** | **199,15** | **134,56** | **22,00** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas tanaman ubi jalar mengalami peningkatan sebesar sebanyak 2,21 kw/ha. Meskipun terlihat tingkat produksi pada tahun 2020 masih lebih banyak yaitu mencapai 434,43 ton dengan luas panen tanaman ubijalar yaitu 33 ha sehingga produktivitas mencapai 131,65 kw/ha dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tingkat produksinya turun menjadi 199,15 ton dengan luas panen sebesar 14,80 ha tetapi menghasilkan produktivitas sebesar 134,56 kw/ha. Berkurangnya areal luas tanam pada tahun 2021 tidak menurunkan tingkat produktivitasnya. Terdapat beberapa kecamatan yang tidak melakukan penanaman di tahun ini sehingga berpengaruh terhadap luas tanam secara keseluruhan. Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah kecamatan dengan tingkat produktivitas tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tingkat produktivitas yang mencapai 153,33 kw/ha.

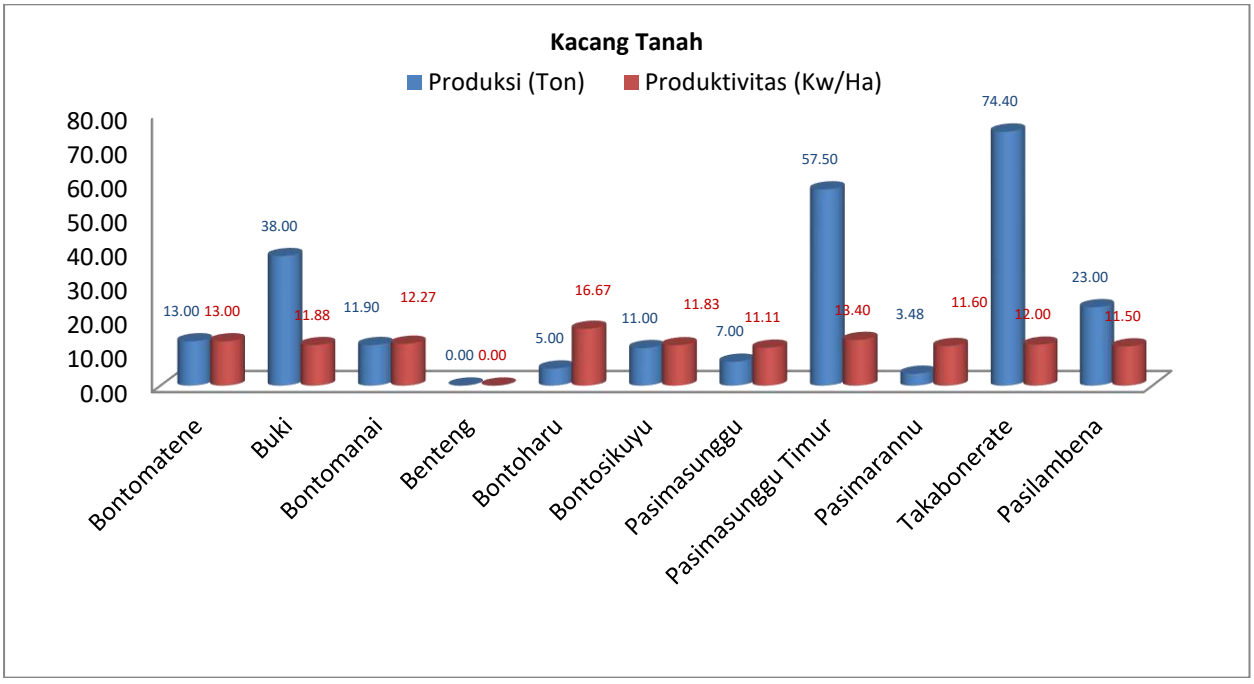
5. Kacang Tanah

**Perkembangan Kacang Tanah Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **516,00** | **516,00** | **499,02** | **9,67** | **563,00** | |
| **2.** | 2017 | **474,00** | **377,00** | **433,38** | **11,50** | **516,00** | |
| **3.** | 2018 | **286,00** | **286,00** | **328,00** | **11,47** | **474,00** | |
| **4.** | 2019 | **179,00** | **295,00** | **336,89** | **11,42** | **286,00** | |
| **5.** | 2020 | **341,00** | **279,00** | **319,16** | **11,44** | **179,00** | |
| **6.** | 2021 | **145,00** | **198,20** | **244,28** | **12,32** | **341,00** | |

**Potensi Kacang Tanah Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 6,00 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | 15,00 | |
| **2.** | Buki | 13,30 | 32,00 | 38,00 | 11,88 | 41,00 | |
| **3.** | Bontomanai | 2,70 | 9,70 | 11,90 | 12,27 | 11,00 | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 16,67 | 4,00 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 5,80 | 9,30 | 11,00 | 11,83 | 28,00 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 6,30 | 6,30 | 7,00 | 11,11 | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 49,90 | 42,90 | 57,50 | 13,40 | 115,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | 3,00 | 3,00 | 3,48 | 11,60 | - | |
| **10.** | Takabonerate | 35,00 | 62,00 | 74,40 | 12,00 | 103,00 | |
| **11.** | Pasilambena | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 11,50 | 24,00 | |
| Total | | **145,00** | **198,20** | **244,28** | **12,32** | **341,00** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas kacang tanah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 11,44 kw/ha menjadi 7,69 kw/ha tahun 2021 atau meningkat sebesar 7,14 %. Tingkat produksi pada tahun 2021 mencapai 244,28 ton dengan luas panen tanaman kacang tanah yaitu 198,20 ha.

Adapun potensi tanaman kacang tanah per Kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Takabonerate adalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan luas tanam 35 ha dan luas panen 62 ha tanaman kacang tanah di Kecamatan Takabonerate mampu mencapai produksi sebanyak 74,40 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 12,00 kw/ha.

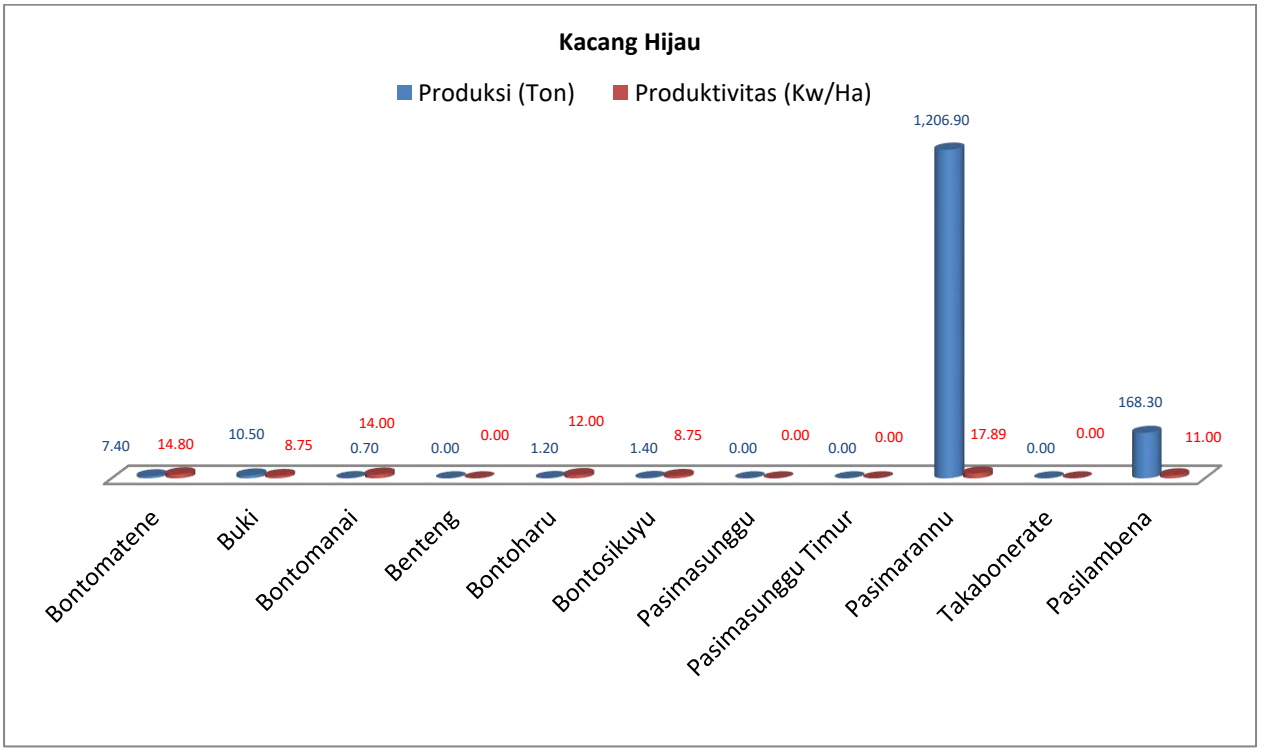
6. Kacang Hijau

**Perkembangan Kacang Hijau Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **471,00** | **471,00** | **797,20** | **16,93** | **166,00** | |
| **2.** | 2017 | **453,00** | **377,00** | **491,25** | **13,03** | **471,00** | |
| **3.** | 2018 | **290,00** | **290,00** | **378,01** | **13,03** | **453,00** | |
| **4.** | 2019 | **352,00** | **361,00** | **470,75** | **13,04** | **290,00** | |
| **5.** | 2020 | **230,00** | **281,00** | **366,49** | **13,04** | **352,00** | |
| **6.** | 2021 | **897,40** | **847,60** | **1.396,40** | **16,47** | **230,00** | |

**Potensi Kacang Hijau Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 14,80 | 4,00 | |
| **2.** | Buki | 0,30 | 12,00 | 10,50 | 8,75 | 20,00 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 14,00 | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 12,00 | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 8,75 | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | 5,00 | |
| **9.** | Pasimarannu | 736,00 | 674,50 | 1.206,90 | 17,89 | 49,00 | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | 153,00 | 153,00 | 168,30 | 11,00 | 152,00 | |
| **Total** | | **897,40** | **847,60** | **1.396,40** | **16,47** | **230,00** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa produktivitas kacang hijaupada tahun 2020 yaitu 13,04 kw/ha meningkat menjadi 16,47 kw/ha pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 26,30 %.Adapun potensi kacang hijau per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Pasimarannu adalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan luas panen 674,50 ha tanaman kacang hijau di Kecamatan Pasimarannu mampu mencapai produksi sebanyak 1.206,90 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 17,89 kw/ha.

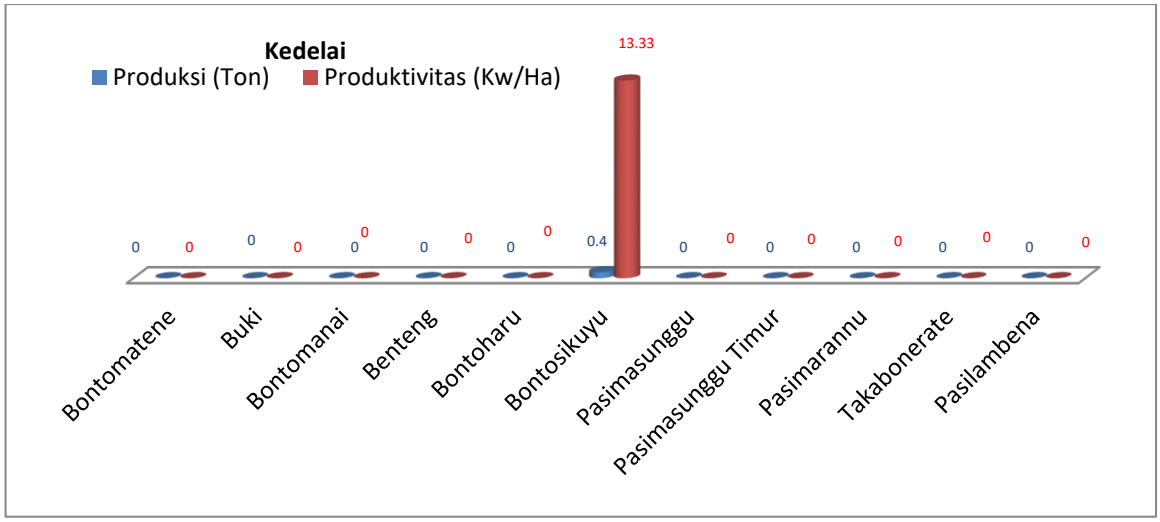
7. Kedelai

Perkembangan Kedelai Tahun 2021

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2021 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 13,33 | - | |

**Potensi Kedelai Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | - | - | - | - | - | |
| **3.** | Bontomanai | - | - | - | - | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 13,33 | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **0,30** | **0,30** | **0,40** | **13,33** | **-** | |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat kita ketahui bahwa tanaman kedelai untuk tahun 2021 ini hanya terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan dengan luas tanam dan luas panen 0,30 ha dengan produksi yang dihasilkan sebesar 0,40 ton sehingga tingkat produktivitasnya sebesar 13,33 kw/ha.

8. Porang

Perkembangan Porang Tahun 2021

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2021 | 31,80 | - | - | - | - | |

**Potensi Porang Menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | - | - | - | - | - | |
| **3.** | Bontomanai | 9,50 | - | - | - | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 22,30 | - | - | - | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **31,80** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman porang untuk tahun 2021 masih dalam tahap penanaman dengan luas tanam 31,80 hektar yang berlokasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontosikuyu. Komoditas ini baru dibudidayakan atau dikembangkan di tahun ini sehingga belum menghasilkan atau berproduksi.

## B. Potensi Tanaman Hortikultura

### ➢ Buah-Buahan

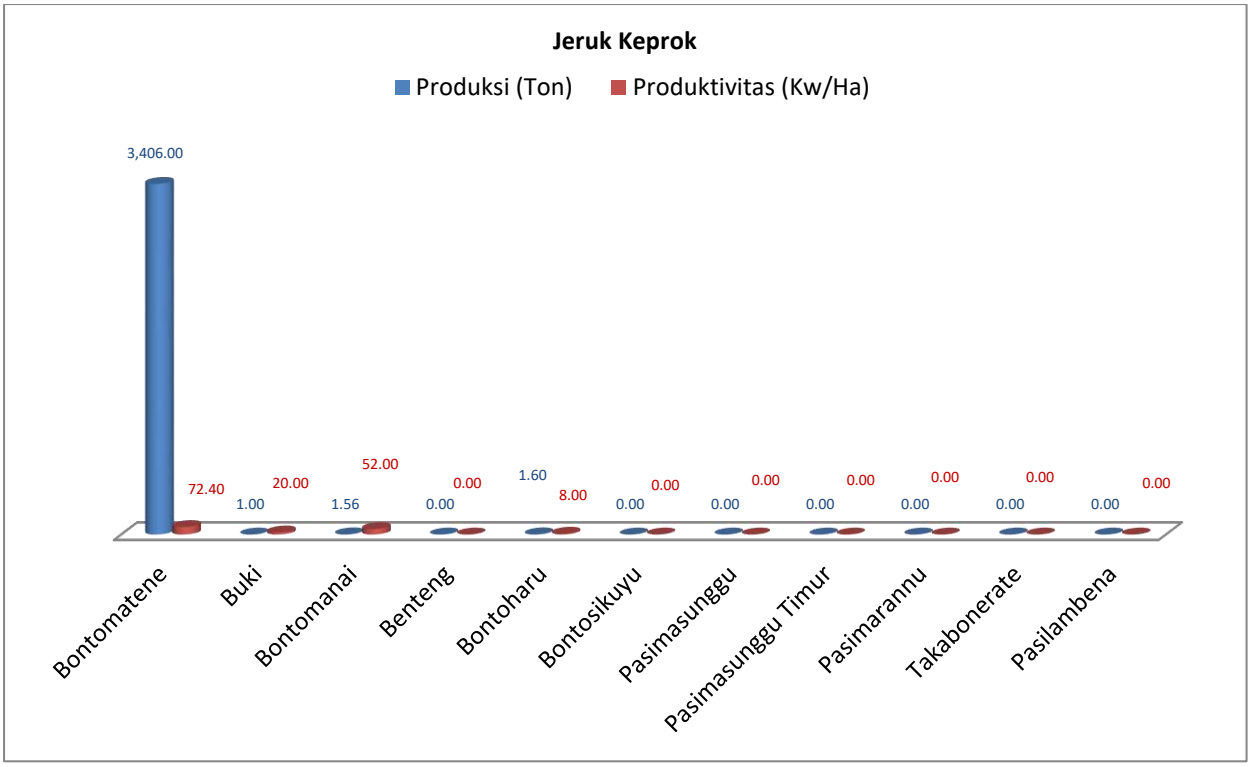
1. Jeruk Keprok

**Perkembangan Jeruk Keprok Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | 1.944,42 | 548,11 | 4.599,64 | 83,92 | 1.983,00 | |
| **2.** | 2017 | 1.933 | 383,58 | 1.937,49 | 50,51 | 1.944,42 | |
| **3.** | 2018 | 1.930,93 | 262,80 | 1.797,58 | 68,40 | 1.760,37 | |
| **4.** | 2019 | 1.830,52 | 475,56 | 3.219,84 | 67,71 | 1.930,93 | |
| **5.** | 2020 | 1.831,43 | 448,10 | 3.228,80 | 72,06 | 1.830,52 | |
| **6.** | 2021 | 1.885,65 | 473,25 | 3.410,16 | 72,06 | 5.134,00 | |

**Potensi Jeruk Keprok menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 761,04 | 470,45 | 3.406,00 | 72,40 | 4.048,72 | |
| **2.** | Buki | 101,05 | 0,50 | 1,00 | 20,00 | 95,74 | |
| **3.** | Bontomanai | 507,79 | 0,30 | 1,56 | 52,00 | 489,99 | |
| **4.** | Benteng | 0,64 | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 98,19 | 2,00 | 1,60 | 8,00 | 95,06 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 412,62 | - | - | - | 393,92 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 3,42 | - | - | - | 8,50 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 0,08 | - | - | - | 0,08 | |
| **9.** | Pasimarannu | 1,00 | - | - | - | 1,27 | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **1.885,65** | **473,25** | **3.410,16** | **72,06** | **5.134,00** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi jeruk keprok di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebesar 5,62%,jumlah produksi mencapai 3.410,16 ton dengan produktifitas 72,06 ku/ha. Adapun potensi tanaman jeruk keprok per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi jeruk keprok ada di Kecamatan Bontomatene dengan luas panen 470,45 ha danmampu mencapai produksi sebesar3.406 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 72,40 kw/ha. Untuk kecamatan di kepulauan budidaya tanaman jeruk keprok ini belum dikembangkan.

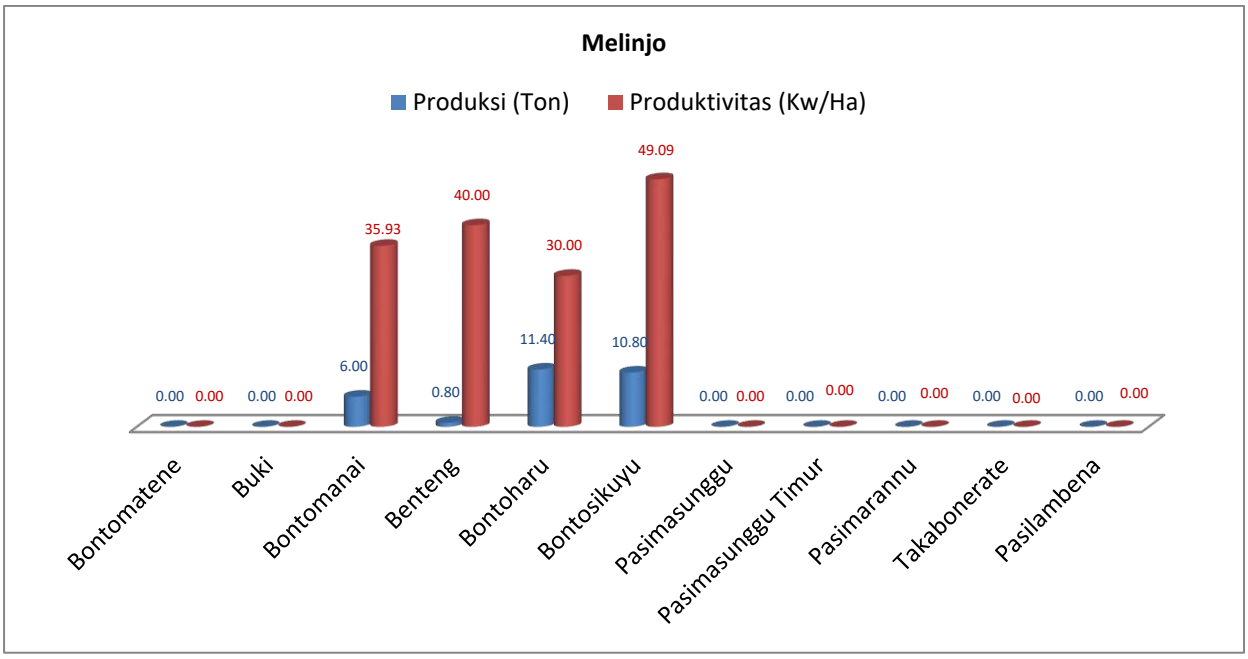
2. Melinjo

**Perkembangan Melinjo Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **90,70** | **44,76** | **411,14** | **91,85** | **144,54** | |
| **2.** | 2017 | **80,51** | **21,42** | **54,47** | **25,43** | **90,70** | |
| **3.** | 2018 | **74,34** | **15,11** | **64,81** | **42,89** | **80,51** | |
| **4.** | 2019 | **72,78** | **18,13** | **84,27** | **46,48** | **74,34** | |
| **5.** | 2020 | **72,35** | **8,38** | **27,10** | **32,34** | **72,78** | |
| **6.** | 2021 | **71,24** | **7,87** | **29,00** | **36,85** | **72,35** | |

**Potensi Melinjo menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 20,97 | - | - | - | 20,97 | |
| **2.** | Buki | 2,02 | - | - | - | 2,02 | |
| **3.** | Bontomanai | 20,73 | 1,67 | 6,00 | 35,93 | 20,94 | |
| **4.** | Benteng | 0,18 | 0,20 | 0,80 | 40,00 | 0,18 | |
| **5.** | Bontoharu | 26,04 | 3,80 | 11,40 | 30,00 | 26,94 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 1,30 | 2,20 | 10,80 | 49,09 | 1,30 | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **71,24** | **7,87** | **29,00** | **36,85** | **72,35** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkatproduksi tanaman melinjo mengalami peningkatansebesar 1,90 ton atau 7,01 % pada tahun 2021. Untuk tahun 2020 produksi mencapai 27,10 tonsedangkan tahun 2021sebesar 29,00 ton dengan produktivitas sebesar 36,85 kw/ha. Tabel potensi melinjo per kecamatan menunjukkan bahwa Kecamatan Bontoharu adalah kecamatan dengan tingkat produksi tertinggi di bandingkan dengan seluruh

kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan luas panen 3,80 ha dan produksi sebanyak 11,40 ton.

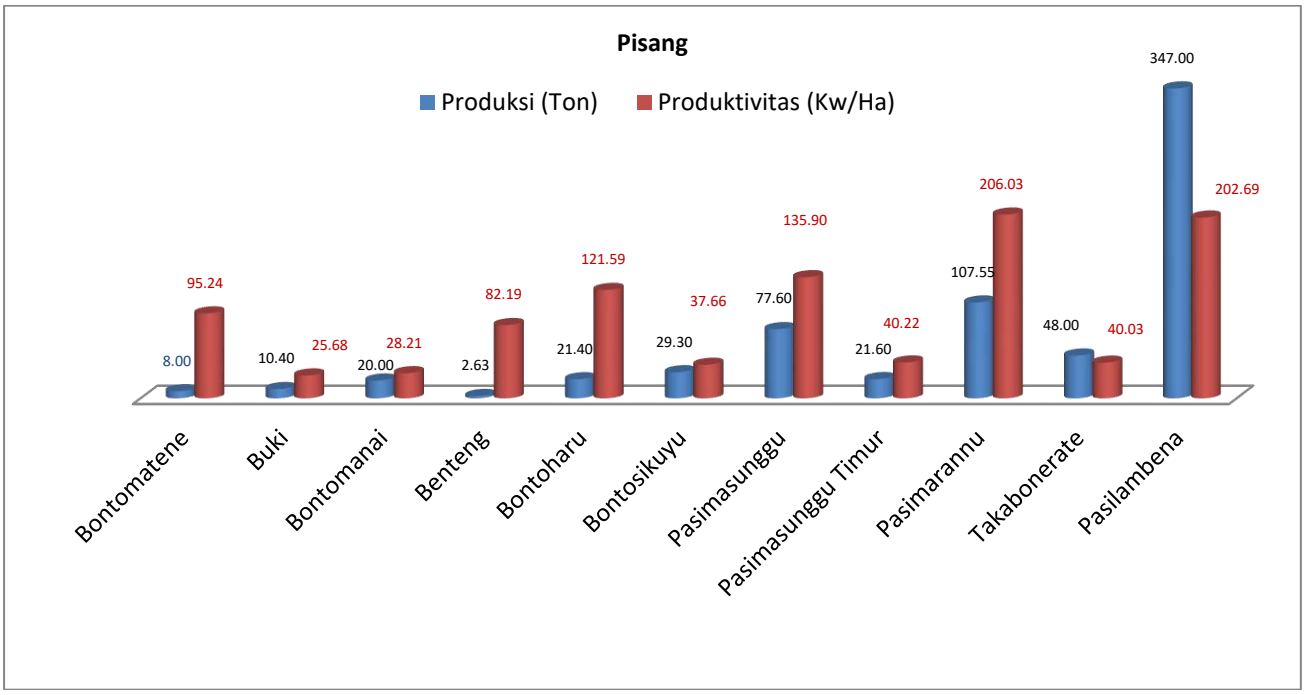
3. Pisang

**Perkembangan Pisang Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **61,64** | **44,45** | **576,35** | **129,66** | **66,27** | |
| **2.** | 2017 | **59,72** | **45,88** | **434,94** | **94,80** | **61,46** | |
| **3.** | 2018 | **61,99** | **25,97** | **592,80** | **228,26** | **59,72** | |
| **4.** | 2019 | **55,95** | **48,15** | **817,10** | **169,70** | **61,99** | |
| **5.** | 2020 | **61,00** | **64,54** | **696,80** | **107,96** | **55,95** | |
| **6.** | 2021 | **121,41** | **67,25** | **693,48** | **103,12** | **61,00** | |

**Potensi Pisang menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 9,26 | 0,84 | 8,00 | 95,24 | 9,26 | |
| **2.** | Buki | 2,67 | 4,05 | 10,40 | 25,68 | 3,53 | |
| **3.** | Bontomanai | 4,78 | 7,09 | 20,00 | 28,21 | 6,80 | |
| **4.** | Benteng | 0,39 | 0,32 | 2,63 | 82,19 | 0,39 | |
| **5.** | Bontoharu | 1,28 | 1,76 | 21,40 | 121,59 | 1,55 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 68,85 | 7,78 | 29,30 | 37,66 | 11,29 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 3,07 | 5,71 | 77,60 | 135,90 | 2,90 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 2,10 | 5,37 | 21,60 | 40,22 | 2,20 | |
| **9.** | Pasimarannu | 7,69 | 5,22 | 107,55 | 206,03 | 3,14 | |
| **10.** | Takabonerate | 8,54 | 11,99 | 48,00 | 40,03 | 7,01 | |
| **11.** | Pasilambena | 12,78 | 17,12 | 347,00 | 202,69 | 12,93 | |
| **Total** | | **121,41** | **67,25** | **693,48** | **103,12** | **61,00** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman pisang di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020sebesar 3,32 ton atau sekitar 0,48%. Dimana pada tahun 2021 inijumlah produksi hanya mencapai 693,48 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 103,12 kw/ha. Adapun potensi tanaman pisang per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi pisang ada di Kecamatan Pasilambena dengan luas panen 17,12 ha dan produksi mencapai347,00 ton.

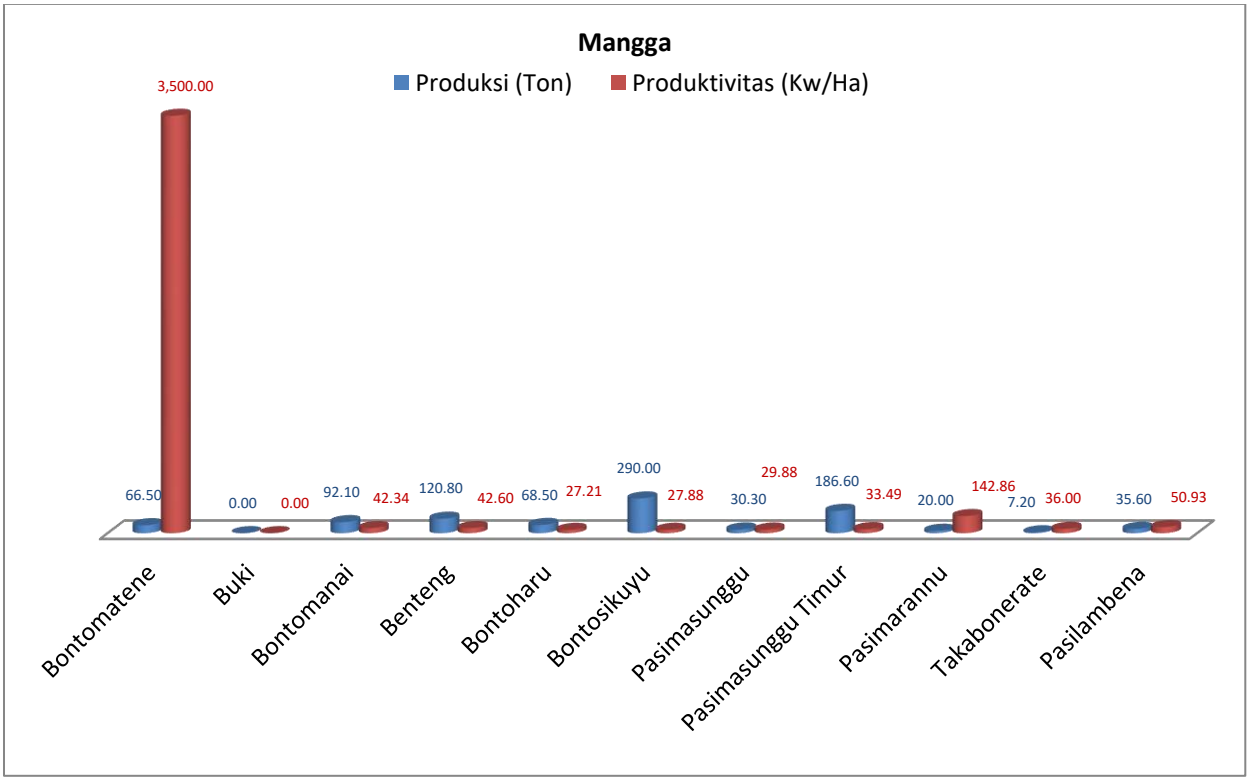
4. Mangga

**Perkembangan Mangga Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **1.326,29** | **370,22** | **4.399,24** | **118,83** | **1.369,70** | |
| **2.** | 2017 | **1.365,00** | **304,54** | **1.406,04** | **46,17** | **1.326,29** | |
| **3.** | 2018 | **1.380,51** | **220,06** | **873,65** | **39,70** | **1.356** | |
| **4.** | 2019 | **4.884,47** | **313,96** | **1.505,19** | **47,94** | **1.380,51** | |
| **5.** | 2020 | **4.885,27** | **238,04** | **871,20** | **36,60** | **4.884,47** | |
| **6.** | 2021 | **4.939,27** | **255,74** | **917,60** | **35,88** | **4.885,27** | |

**Potensi Mangga menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 325,47 | 0,19 | 66,50 | 3.500,00 | 313,76 | |
| **2.** | Buki | 156,76 | - | - | - | 117,10 | |
| **3.** | Bontomanai | 3.839,09 | 21,75 | 92,10 | 42,34 | 3.839,16 | |
| **4.** | Benteng | 24,17 | 28,36 | 120,80 | 42,60 | 24,24 | |
| **5.** | Bontoharu | 92,52 | 25,17 | 68,50 | 27,21 | 100,56 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 232,82 | 104,02 | 290,00 | 27,88 | 204,89 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 77,26 | 10,14 | 30,30 | 29,88 | 88,03 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 81,04 | 55,72 | 186,60 | 33,49 | 76,36 | |
| **9.** | Pasimarannu | 42,69 | 1,40 | 20,00 | 142,86 | 44,48 | |
| **10.** | Takabonerate | 34,51 | 2,00 | 7,20 | 36,00 | 40,88 | |
| **11.** | Pasilambena | 29,94 | 6,99 | 35,60 | 50,93 | 35,89 | |
| **Total** | | **4.939,27** | **255,74** | **917,60** | **35,88** | **4.885,27** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanamanmangga pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 46,4 ton atau sekitar 5,33 %. Dengan jumlah produksi yang mencapai 917,60 ton dan produktivitas sebesar 36,60 kw/ha dari luas panen 255,74 ha. Adapun potensi tanaman mangga per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi mangga terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas panen 104,02 ha dan produksi mencapai 290,00 ton dengan tingkat produktivitas 27,88 kw/ha.

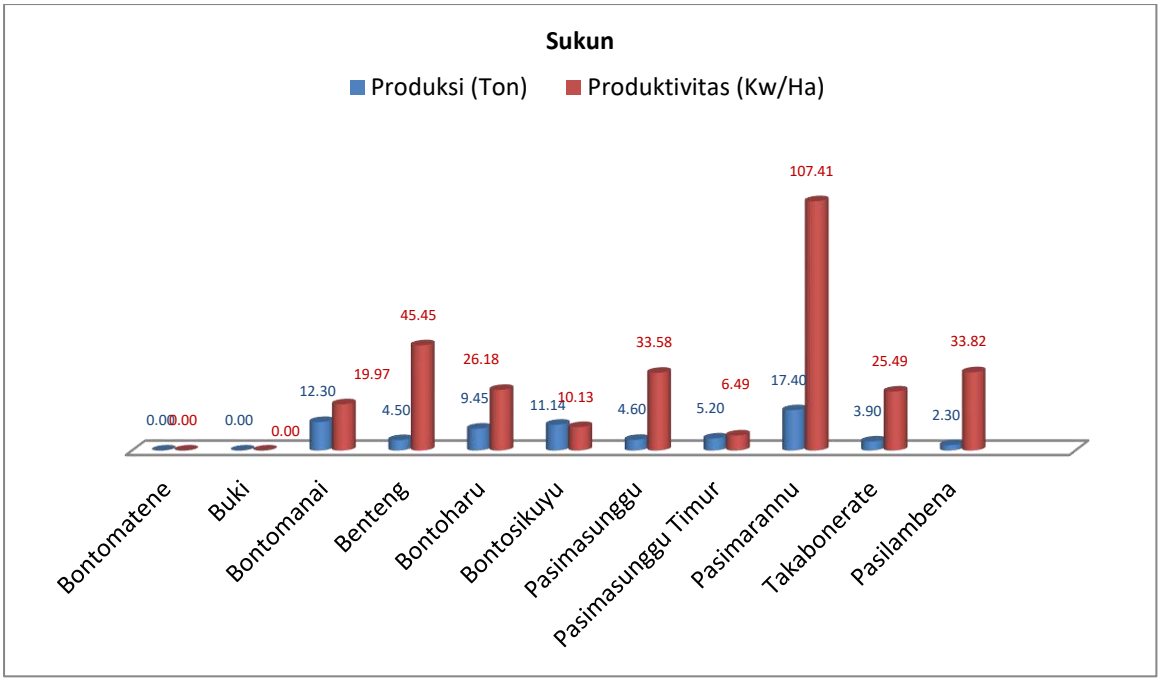
5. Sukun

**Perkembangan Sukun Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **190,95** | **41,78** | **255,10** | **61,06** | **202,63** | |
| **2.** | 2017 | **199,62** | **36,24** | **105,22** | **29,03** | **190,95** | |
| **3.** | 2018 | **256,85** | **16,12** | **85,31** | **52,92** | **199,62** | |
| **4.** | 2019 | **317,12** | **54,33** | **162,83** | **29,97** | **256,85** | |
| **5.** | 2020 | **308,33** | **47,80** | **149,50** | **31,28** | **317,12** | |
| **6.** | 2021 | **286,37** | **34,97** | **70,79** | **20,24** | **308,33** | |

**Potensi Sukun menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 24,98 | - | - | - | 24,98 | |
| **2.** | Buki | 30,91 | - | - | - | 30,98 | |
| **3.** | Bontomanai | 51,23 | 6,16 | 12,30 | 19,97 | 51,37 | |
| **4.** | Benteng | 12,01 | 0,99 | 4,50 | 45,45 | 12,02 | |
| **5.** | Bontoharu | 38,20 | 3,61 | 9,45 | 26,18 | 40,30 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 42,56 | 11,00 | 11,14 | 10,13 | 43,62 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 11,10 | 1,37 | 4,60 | 33,58 | 13,21 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 30,83 | 8,01 | 5,20 | 6,49 | 30,83 | |
| **9.** | Pasimarannu | 6,85 | 1,62 | 17,40 | 107,41 | 11,68 | |
| **10.** | Takabonerate | 23,30 | 1,53 | 3,90 | 25,49 | 33,92 | |
| **11.** | Pasilambena | 14,40 | 0,68 | 2,30 | 33,82 | 15,42 | |
| **Total** | | **286,37** | **34,97** | **70,79** | **20,24** | **308,33** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman sukun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 78,71 ton atau sekitar 52,65 %. Dimana jumlah produksi hanya mencapai 70,79 ton dan produktivitas sebesar 20,24 kw/ha. Adapun potensi tanaman sukun per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi sukun terdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 1,62 ha dan produksi mencapai 17,40 ton sehingga diperoleh tingkat produktivitas sebesar 107,41 kw/ha.

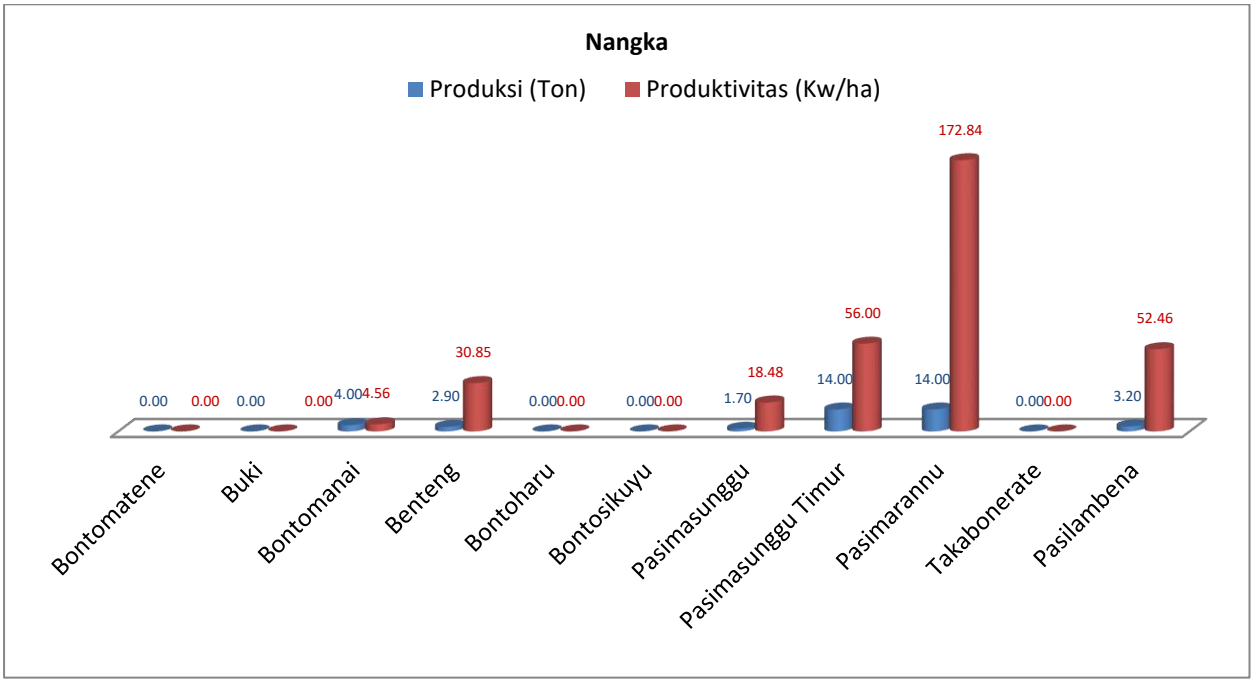
6. Nangka

**Perkembangan Nangka Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **89,02** | **22,28** | **183,01** | **82,14** | **92,43** | |
| **2.** | 2017 | **87,13** | **12,53** | **57,15** | **45,61** | **89,02** | |
| **3.** | 2018 | **85,69** | **6,40** | **30,39** | **47,49** | **87,13** | |
| **4.** | 2019 | **85,36** | **8,39** | **28,06** | **33,45** | **85,69** | |
| **5.** | 2020 | **84,42** | **28,76** | **179,60** | **62,45** | **85,36** | |
| **6.** | 2021 | **82,50** | **14,55** | **39,80** | **27,35** | **84,42** | |

**Potensi Nangka menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 29,03 | - | - | - | 29,03 | |
| **2.** | Buki | 10,65 | - | - | - | 10,74 | |
| **3.** | Bontomanai | 9,13 | 8,77 | 4,00 | 4,56 | 9,13 | |
| **4.** | Benteng | 0,29 | 0,94 | 2,90 | 30,85 | 0,33 | |
| **5.** | Bontoharu | 7,39 | - | - | - | 8,46 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 16,40 | - | - | - | 16,40 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 3,71 | 0,92 | 1,70 | 18,48 | 4,01 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 2,76 | 2,50 | 14,00 | 56,00 | 2,76 | |
| **9.** | Pasimarannu | 1,17 | 0,81 | 14,00 | 172,84 | 1,24 | |
| **10.** | Takabonerate | 0 70 | - | - | - | 0,70 | |
| **11.** | Pasilambena | 1,27 | 0,61 | 3,20 | 52,46 | 1,62 | |
| Total | | **82,50** | **14,55** | **39,80** | **27,35** | **84,42** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman nangka pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 139,8 ton atau sebesar 77,84 %. Jumlah produksi hanya mencapai 39,80 ton dan produktivitas sebesar 27,35 kw/ha. Adapun potensi tanaman nangka per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi

nangkaterdapat di Kecamatan Pasimarannudengan luas panen 0,81 ha dan produksi mencapai 14,00 ton dengan tingkat produktivitas sebsar 172,84 kw/ha.

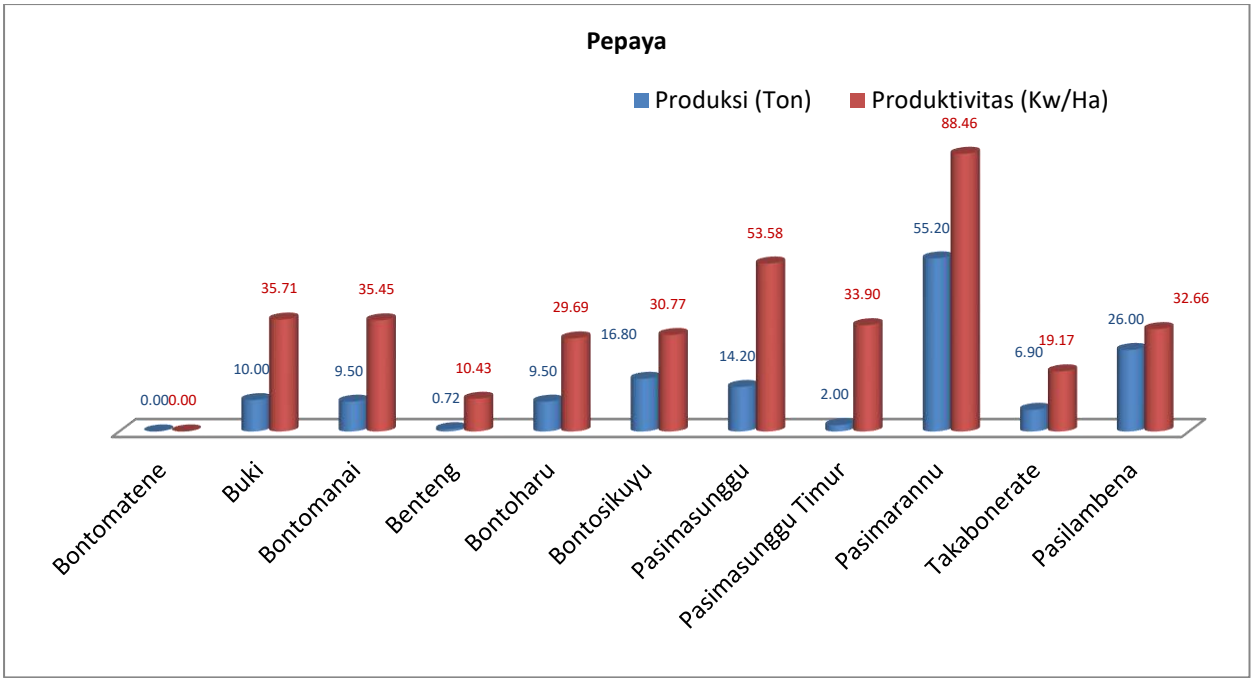
7. Pepaya

**Perkembangan Pepaya Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **45,26** | **35,81** | **664,73** | **185,63** | **45,33** | |
| **2.** | 2017 | **42,13** | **38,58** | **142,32** | **36,89** | **45,26** | |
| **3.** | 2018 | **47,43** | **20,70** | **162,91** | **78,70** | **42,13** | |
| **4.** | 2019 | **46,33** | **36,19** | **247,72** | **68,45** | **47,43** | |
| **5.** | 2020 | **42,31** | **47,09** | **179,70** | **38,16** | **46,33** | |
| **6.** | 2021 | **44,08** | **35,87** | **150,82** | **42,05** | **42,31** | |

**Potensi Pepaya menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 4,14 | - | - | - | 4,14 | |
| **2.** | Buki | 2,52 | 2,80 | 10,00 | 35,71 | 2,91 | |
| **3.** | Bontomanai | 1,31 | 2,68 | 9,50 | 35,45 | 1,36 | |
| **4.** | Benteng | 1,48 | 0,69 | 0,72 | 10,43 | 1,48 | |
| **5.** | Bontoharu | 3,89 | 3,20 | 9,50 | 29,69 | 0,94 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 9,91 | 5,46 | 16,80 | 30,77 | 10,15 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 2,87 | 2,65 | 14,20 | 53,58 | 1,29 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 0,44 | 0,59 | 2,00 | 33,90 | 0,44 | |
| **9.** | Pasimarannu | 1,90 | 6,24 | 55,20 | 88,46 | 4,03 | |
| **10.** | Takabonerate | 7,62 | 3,60 | 6,90 | 19,17 | 9,30 | |
| **11.** | Pasilambena | 8,00 | 7,96 | 26,00 | 32,66 | 6,27 | |
| Total | | **44,08** | **35,87** | **150,82** | **42,05** | **42,31** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman pepaya pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 28,88 ton atau sekitar 16,07 %.Jumlah produksi hanya mencapai 150,82 ton dan produktivitas sebesar 42,05 kw/ha. Adapun potensi tanaman pepaya per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi pepayaterdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 6,24 ha dan produksi mencapai 55,20 ton sehingga diperoleh produktivitas sebesar 88,46 kw/ha.

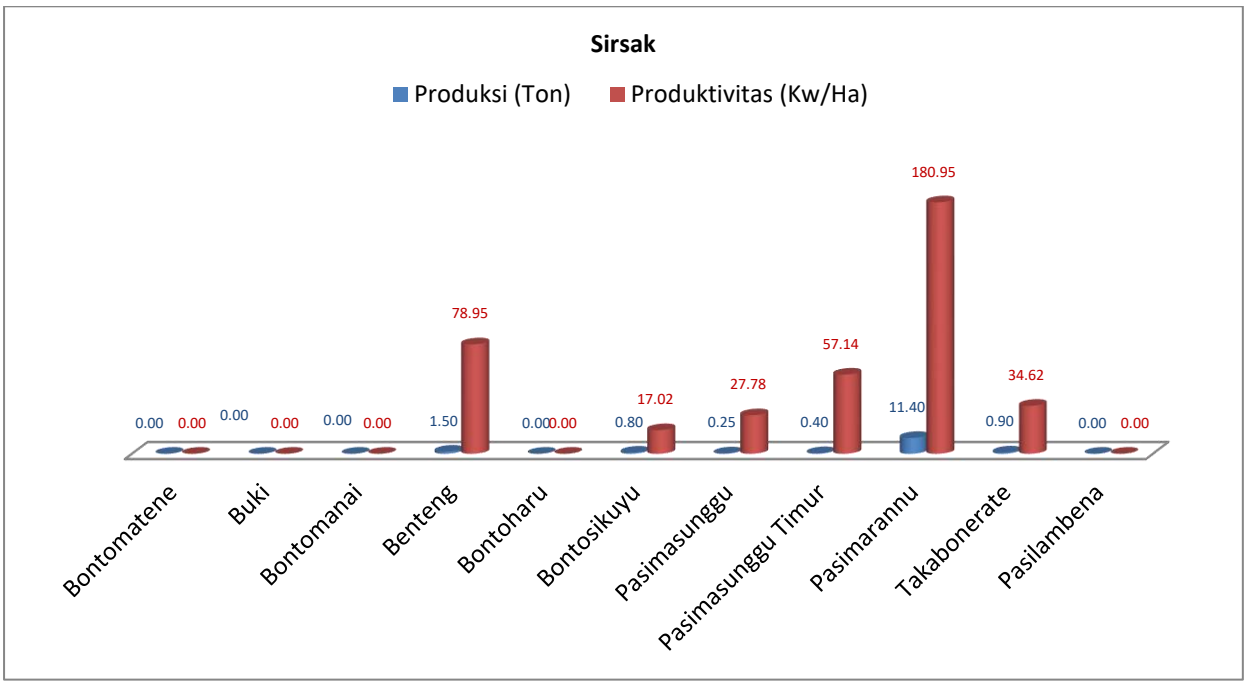
8. Sirsak

**Perkembangan Sirsak Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **4,05** | **2,69** | **12,62** | **46,90** | **4,14** | |
| **2.** | 2017 | **4,00** | **2,02** | **9,25** | **45,81** | **4,05** | |
| **3.** | 2018 | **3,91** | **1,33** | **7,40** | **55,65** | **4,00** | |
| **4.** | 2019 | **3,75** | **1,68** | **7,15** | **42,54** | **3,91** | |
| **5.** | 2020 | **3,44** | **2,19** | **14,19** | **64,79** | **3,75** | |
| **6.** | 2021 | **3,31** | **1,71** | **15,25** | **89,18** | **3,44** | |

**Potensi Sirsak menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 0,78 | - | - | - | 0,78 | |
| **2.** | Buki | 0,25 | - | - | - | 0,25 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,14 | - | - | - | 0,14 | |
| **4.** | Benteng | 0,08 | 0,19 | 1,50 | 78,95 | 0,08 | |
| **5.** | Bontoharu | 0,15 | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,33 | 0,47 | 0,80 | 17,02 | 0,40 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 0,20 | 0,09 | 0,25 | 27,78 | 0,20 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 0,15 | 0,07 | 0,40 | 57,14 | 0,15 | |
| | Pasimarannu | 0,34 | 0,63 | 11,40 | 180,95 | 0,21 | |
| **10.** | Takabonerate | 0,71 | 0,26 | 0,90 | 34,62 | 0,71 | |
| **11.** | Pasilambena | 0,18 | - | - | - | 0,16 | |
| **Total** | | **3,31** | **1,71** | **15,25** | **89,18** | **3,44** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman sirsak pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 1,06 ton atau sebesar7,47 %. Dengan jumlah produksi mencapai 15,25 ton dan produktivitas sebesar 89,18 kw/ha. Adapun potensi tanaman sirsak per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi sirsak terdapat di

Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 0,63ha dan produksi mencapai 11,40 ton sehingga tingkat produktivitasnya sebesar 180,95 kw/ha

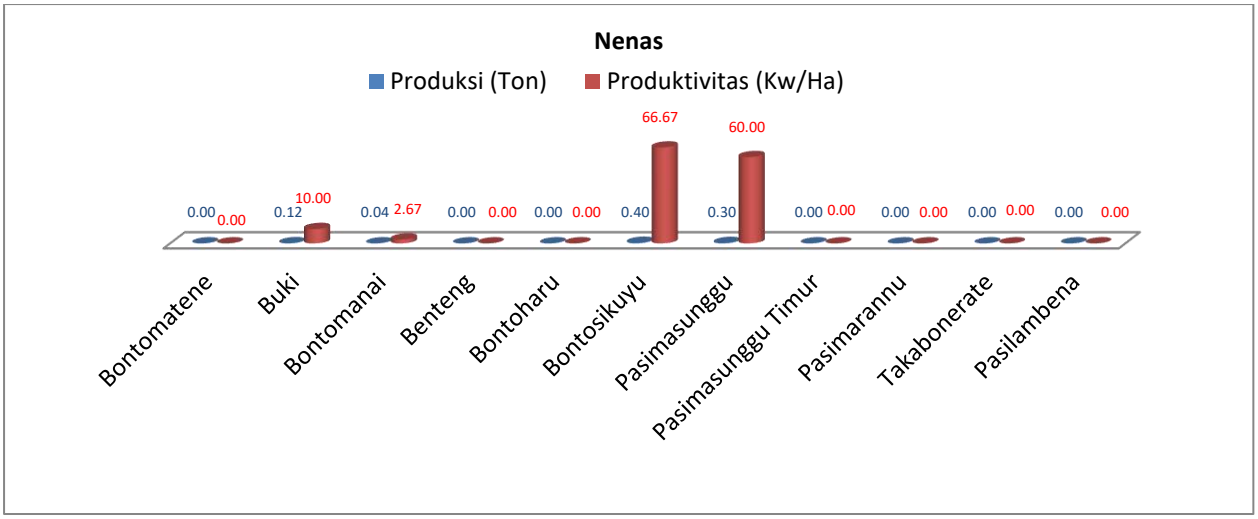
9. Nenas

**Perkembangan Nenas Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **1,99** | **1,21** | **8,93** | **73,77** | **2,13** | |
| **2.** | 2017 | **1,96** | **1,24** | **7,18** | **57,88** | **1,99** | |
| **3.** | 2018 | **1,76** | **0,69** | **3,52** | **51,05** | **1,96** | |
| **4.** | 2019 | **1,91** | **1,19** | **7,25** | **60,89** | **1,76** | |
| **5.** | 2020 | **1,93** | **0,66** | **3,20** | **48,48** | **1,91** | |
| **6.** | 2021 | **1,75** | **0,38** | **0,86** | **22,63** | **1,93** | |

**Potensi Nenas menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 0,64 | - | - | - | 0,64 | |
| **2.** | Buki | 0,27 | 0,12 | 0,12 | 10,00 | 0,29 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,29 | 0,15 | 0,04 | 2,67 | 0,29 | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,45 | 0,06 | 0,40 | 66,67 | 0,51 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 0,10 | 0,05 | 0,30 | 60,00 | 0,10 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | 0,10 | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **1,75** | **0,38** | **0,86** | **22,63** | **1,93** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman nenas pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 sebesar 2,34 ton atau sebesar 73,13 %. Penurunan produksi ini juga disebabkan adanya beberapa kecamatan yang tidak menanam komoditi tersebut. Jumlah produksi hanya 0,86 ton dan produktivitas sebesar 22,63 kw/ha. Adapun potensi tanaman nenas per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas panen 0,06 ha dan produksi mencapai 0,40 ton sehingga diperoleh produktivitas sebesar 66,67 kw/ha.

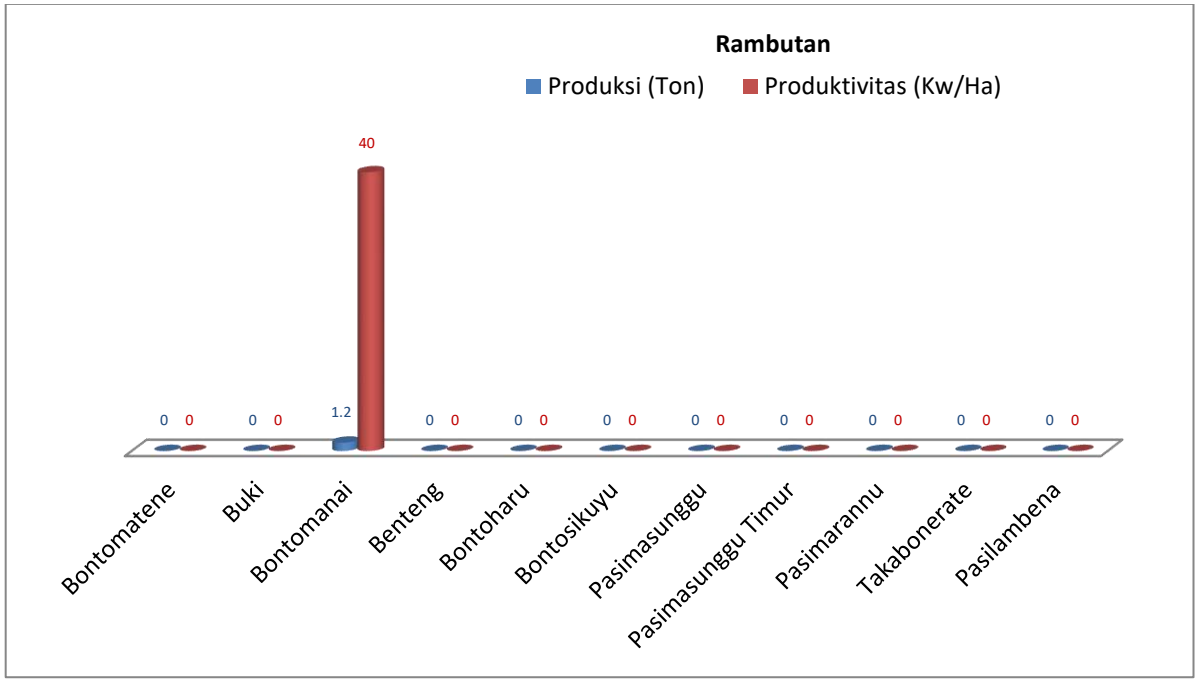
10. Rambutan

**Perkembangan Rambutan Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2016 | **21,54** | **0,46** | **0,46** | **10,00** | **21,54** | |
| **2.** | 2017 | **10,24** | **0,20** | **0,20** | **10,00** | **21,54** | |
| **3.** | 2018 | **46,84** | **0,20** | **0,50** | **25,00** | **10,24** | |
| **4.** | 2019 | **60,89** | **0,32** | **0,60** | **18,75** | **46,84** | |
| **5.** | 2020 | **68,96** | **0,14** | **0,50** | **35,71** | **60,89** | |
| **6.** | 2021 | **90,85** | **0,30** | **1,20** | **40,00** | **68,96** | |

**Potensi Rambutan menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 0,78 | - | - | - | 0,78 | |
| **2.** | Buki | 8,59 | - | - | - | 4,25 | |
| **3.** | Bontomanai | 14,53 | 0,30 | 1,20 | 40,00 | 14,73 | |
| **4.** | Benteng | 0,63 | - | - | - | 0,65 | |
| **5.** | Bontoharu | 0,33 | - | - | - | 0,37 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 13,89 | - | - | - | 5,07 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 34,92 | - | - | - | 38,96 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 11,00 | - | - | - | 4,15 | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | 6,18 | - | - | - | | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **90,85** | **0,30** | **1,20** | **40,00** | **68,96** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman rambutan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 0,7 ton atau sekitar 140 %, dengan jumlah produksi sebesar 1,20 ton dan produktivitas sebesar 40,00kw/ha. Adapun potensi tanaman rambutan per kecamatan menunjukkan bahwa tanamanrambutan hanya terdapat di

Kecamatan Bontomanai dengan luas tanam 90,85 ha, luas panen 0,30 ha dan produksi mencapai 1,20 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 40,00 kw/ha.

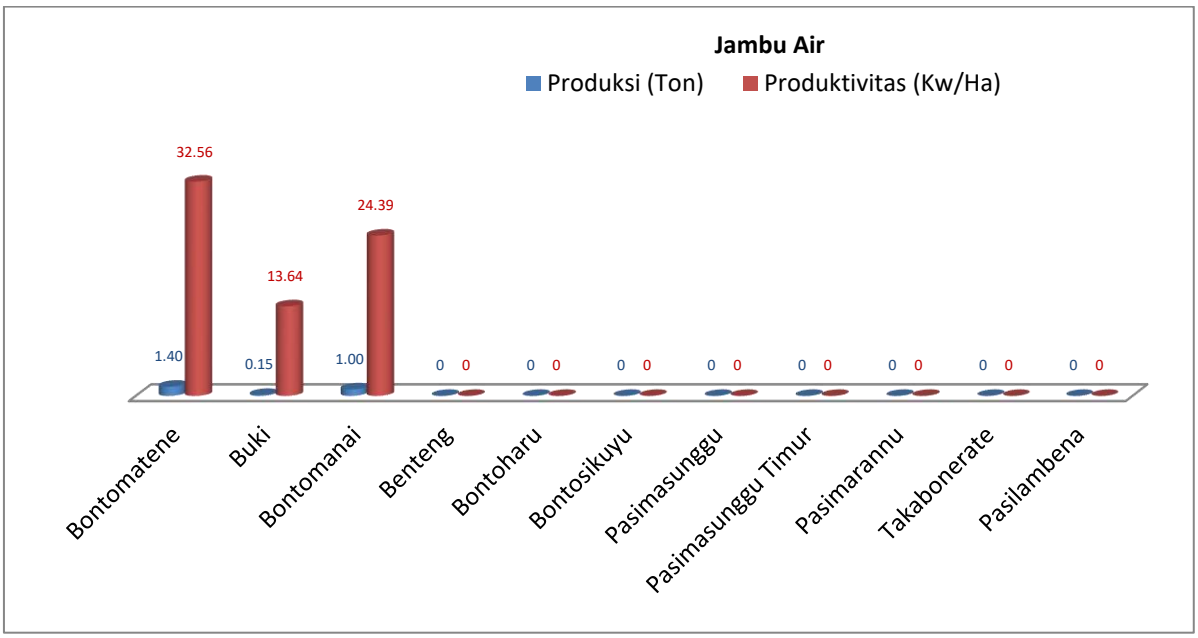
11. Jambu Air

**Perkembangan Jambu Air dari Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **6,71** | **3,24** | **4,69** | **14,48** | **6,22** | |
| **2.** | 2021 | **6,58** | **0,95** | **2,55** | **26,84** | **6,71** | |

**Potensi Jambu Air menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 2,34 | 0,43 | 1,40 | 32,56 | 2,34 | |
| **2.** | Buki | 1,01 | 0,11 | 0,15 | 13,64 | 1.01 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,91 | 0,41 | 1,00 | 24,39 | 0,91 | |
| **4.** | Benteng | 0,39 | - | - | - | 0,41 | |
| **5.** | Bontoharu | 0,36 | - | - | - | 0,36 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,92 | - | - | - | 0,92 | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | 0,65 | - | - | - | 0,76 | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **6,58** | **0,95** | **2,55** | **26,84** | **6,71** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman jambu air pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 2,14 ton atau sekitar 45,63 %, dengan jumlah produksi sebesar 2,55 ton dan produktivitas sebesar 26,84 kw/ha. Adapun potensi tanaman jambu air per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tanaman jambu air tertinggi terdapat di Kecamatan Bontommatene dengan luas tanam 2,34 ha, luas panen 0,43 ha dan produksi mencapai 1,40 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 32,56 kw/ha.

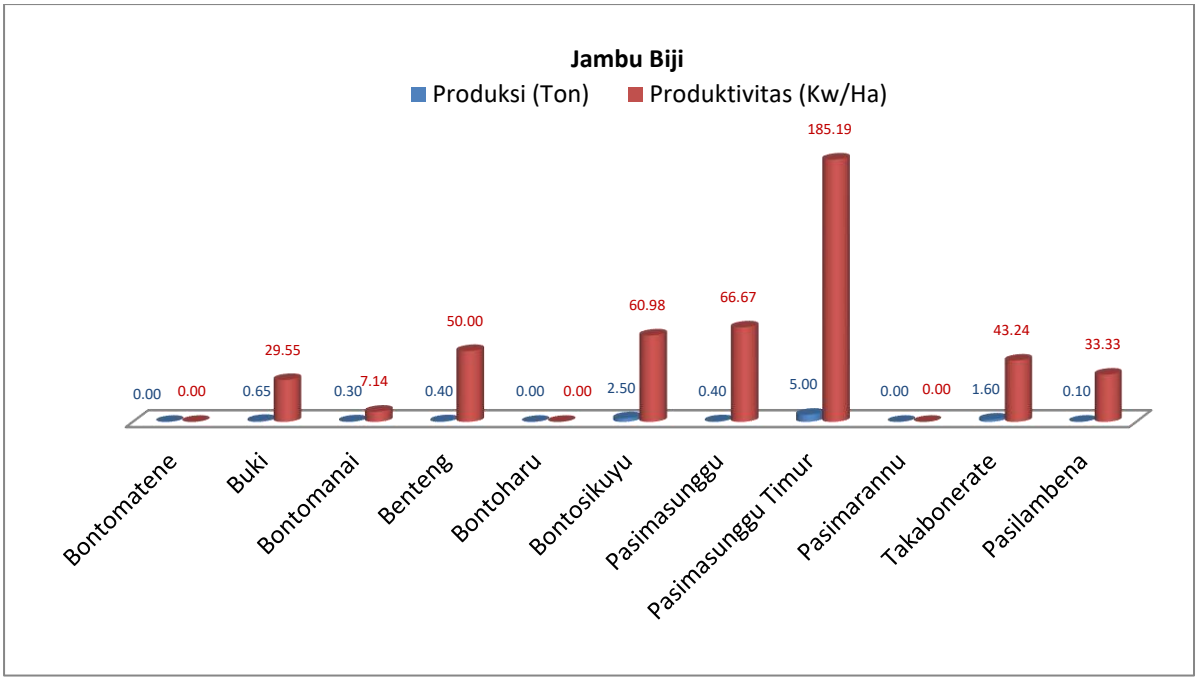
12. Jambu Biji

**Perkembangan Jambu Biji Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **7,81** | **3,47** | **17,90** | **51,59** | **8,00** | |
| **1.** | 2021 | **7,67** | **1,86** | **10,95** | **58,87** | **7,81** | |

**Potensi Jambu Biji menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 3,78 | - | - | - | 3,78 | |
| **2.** | Buki | 1,25 | 0,22 | 0,65 | 29,55 | 1,25 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,58 | 0,42 | 0,30 | 7,14 | 0,58 | |
| **4.** | Benteng | 0,05 | 0,08 | 0,40 | 50,00 | 0,05 | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,23 | 0,41 | 2,50 | 60,98 | 0,23 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 0,26 | 0,06 | 0,40 | 66,67 | 0,27 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 0,30 | 0,27 | 5,00 | 185,19 | 0,31 | |
| **9.** | Pasimarannu | 0,20 | - | - | - | 0,20 | |
| **10.** | Takabonerate | 0,80 | 0,37 | 1,60 | 43,24 | 0,97 | |
| **11.** | Pasilambena | 0,22 | 0,03 | 0,10 | 33,33 | 0,17 | |
| Total | | **7,67** | **1,86** | **10,95** | **58,87** | **7,81** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman jambu biji pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 6,95 ton atau sekitar 38,83 %, dengan jumlah produksi sebesar 10,95 ton dan produktivitas sebesar 58,87 kw/ha. Adapun potensi tanaman jambu biji per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tanaman jambu biji tertinggi terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan luas tanam 0,30 ha, luas panen 0,27 ha dan produksi mencapai 5,00 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 185,19 kw/ha.

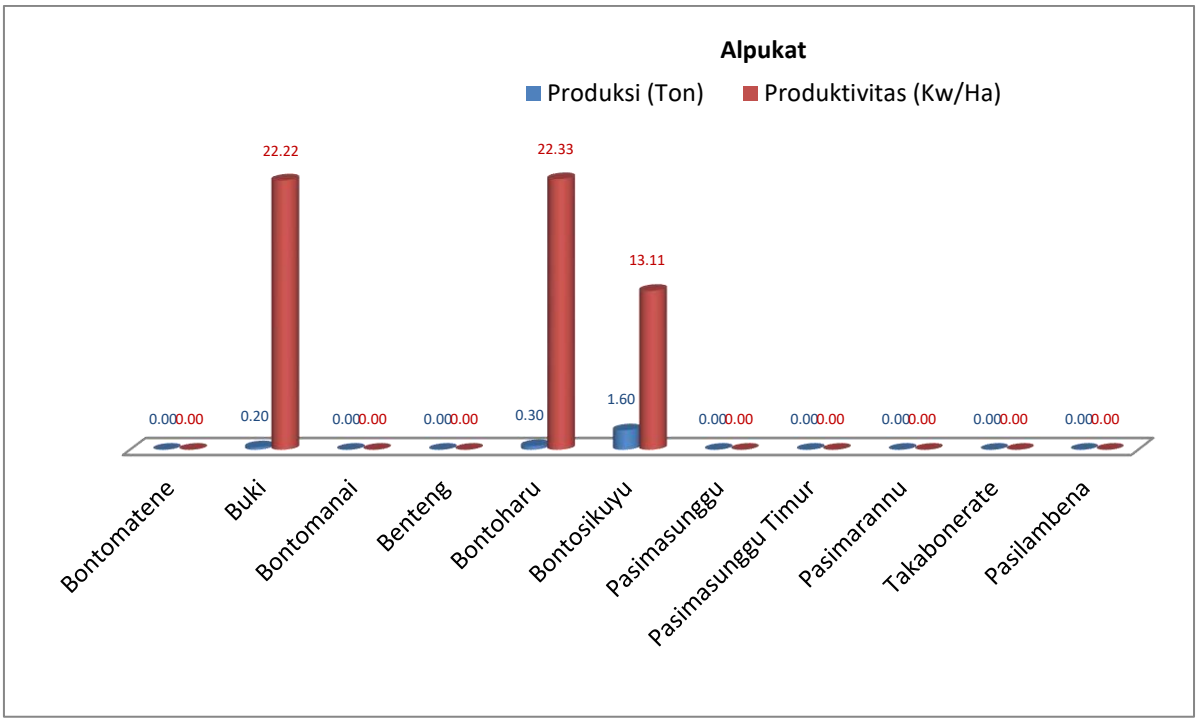
13. Alpukat

**Perkembangan Alpukat Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **10,57** | **1,51** | **4,00** | **26,49** | **1,69** | |
| **2.** | 2021 | **1,66** | **1,40** | **2,10** | **15,00** | **10,57** | |

**Potensi Alpukat menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 0,34 | - | - | - | 0,34 | |
| **2.** | Buki | 0,35 | 0,09 | 0,20 | 22,22 | 0,35 | |
| **3.** | Bontomanai | 0,25 | - | - | - | 0,25 | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 0,09 | 0,09 | 0,30 | 22,33 | 9,00 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 0,63 | 1,22 | 1,60 | 13,11 | 0,63 | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| | Total | **1,66** | **1,40** | **2,10** | **15,00** | **10,57** | |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman alpukat pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 1,90 ton atau sekitar 47,50 %, dengan jumlah produksi sebesar 2,10 ton dan produktivitas sebesar 15,00 kw/ha. Adapun potensi tanaman alpukat per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tanaman alpukat tertinggi terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas tanam 1,66 ha, luas panen 1,40 ha dan produksi mencapai 2,10 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 15,00 kw/ha.

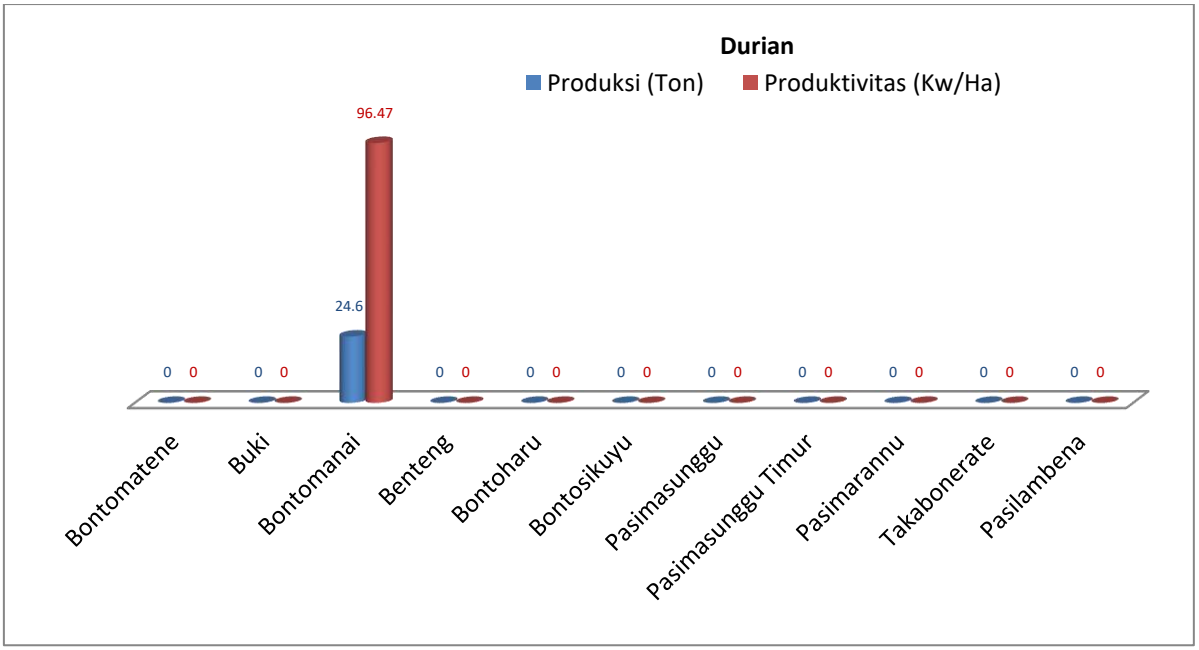
14. Durian

**Perkembangan Durian Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **66,92** | **1,06** | **11,50** | **108,49** | **48,42** | |
| **2.** | 2021 | **85,26** | **2,55** | **24,60** | **96,47** | **66,92** | |

**Potensi Durian menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 8,76 | - | - | - | 8,76 | |
| **2.** | Buki | 14,25 | - | - | - | 8,79 | |
| **3.** | Bontomanai | 27,94 | 2,55 | 24,60 | 96,47 | 22,57 | |
| **4.** | Benteng | 1,82 | - | - | - | 1,94 | |
| **5.** | Bontoharu | 1,38 | - | - | - | 0,58 | |
| **6.** | Bontosikuyu | 23,56 | - | - | - | 16,89 | |
| **7.** | Pasimasunggu | 4,22 | - | - | - | 7,39 | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 3,33 | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **85,26** | **2,55** | **24,60** | **96,47** | **66,92** | |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi tanaman durian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 13,10 ton atau sekitar 113,91 %, dengan jumlah produksi sebesar 24,60 ton dan produktivitas sebesar 96,47 kw/ha. Adapun potensi tanaman alpukat per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tanaman alpukat yang menghasilkan atau berbuah hanya terdapat di Kecamatan Bontomanai dengan luas tanam 85,26 ha, luas panen 2,55 ha dan produksi mencapai 24,60 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 96,47 kw/ha. Sedangkan untuk kecamatan lainnya masih dalam tahap penanaman.

15. Manggis

**Perkembangan Manggis Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **20,93** | - | - | - | **21,29** | |
| **2.** | 2021 | **20,04** | - | - | - | **20,93** | |

**Potensi Manggis menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 0,46 | - | - | - | 0,46 | |
| **2.** | Buki | 0,12 | - | - | - | 0,12 | |
| **3.** | Bontomanai | 17,19 | - | - | - | 17,63 | |
| **4.** | Benteng | 0,81 | - | - | - | 1,00 | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 1,46 | - | - | - | 1,72 | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| | Total | **20,04** | **-** | **-** | **-** | **20,93** | |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui, bahwa untuk tahun 2021 tanaman manggis masih dalam tahap pertumbuhan dan belum menghasilkan /berbuah dengan luas tanam 20,04 ha dan tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontosikuyu.

16. Buah Naga

**Perkembangan Buah Naga Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2021 | **35,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

**Potensi Buah Naga menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 2,00 | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | 15,00 | - | - | - | - | |
| **3.** | Bontomanai | 15,00 | - | - | - | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | 3,50 | - | - | - | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| | Total | **35,50** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman buah naga belum menghasilkan atau berbuah dengan luas tanam 35,50 ha dan tersebar di Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Buki, Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontosikuyu.

17. Lengkeng

**Perkembangan Lengkeng Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2021 | **40,38** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

**Potensi Lengkeng menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| **2.** | Buki | - | - | - | - | - | |
| **3.** | Bontomanai | 38,00 | - | - | - | - | |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - | |
| **5.** | Bontoharu | 2,38 | - | - | - | - | |
| **6.** | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| **7.** | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| **9.** | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| **10.** | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| **11.** | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| Total | | **40,38** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui, bahwa tanaman legkeng masih dalam tahap pertumbuhan dan belum menghasilkan/berbuah. Adapu luas tanam 40,38 ha dengan lokasi di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontoharu.

➢ Sayur-Sayuran

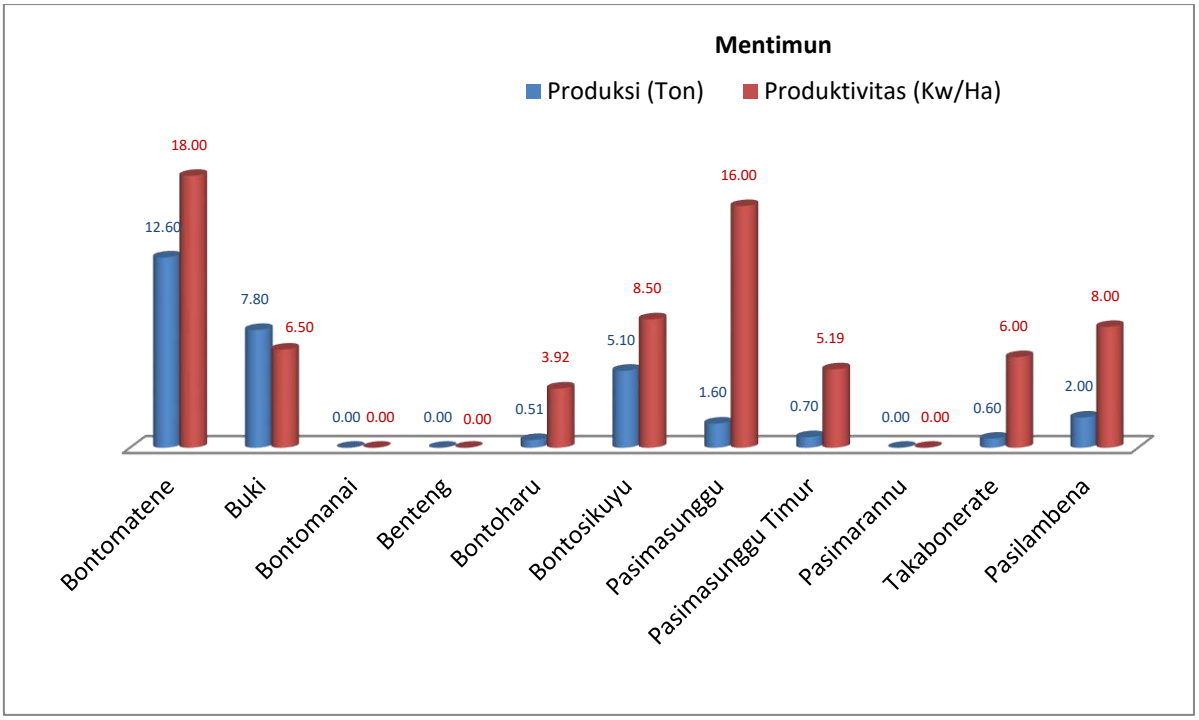
1. Mentimun

**Perkembangan Mentimun Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **22,00** | **27,00** | **28,80** | **10,67** | **56,00** | |
| **2.** | 2021 | **33,35** | **32,15** | **30,91** | **9,61** | **22,00** | |

**Potensi Mentimun menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontomatene | 8,00 | 7,00 | 12,60 | 18,00 | 3,00 |
| **2.** | Buki | 6,00 | 12,00 | 7,80 | 6,50 | 13,00 |
| **3.** | Bontomanai | - | - | - | - | - |
| **4.** | Benteng | - | - | - | - | - |
| **5.** | Bontoharu | 0,30 | 1,30 | 0,51 | 3,92 | 2,00 |
| **6.** | Bontosikuyu | 9,00 | 6,00 | 5,10 | 8,50 | - |
| **7.** | Pasimasunggu | 1,00 | 1,00 | 1,60 | 16,00 | - |
| **8.** | Pasimasunggu Timur | 1,35 | 1,35 | 0,70 | 5,19 | - |
| **9.** | Pasimarannu | 0,20 | - | - | - | 3,00 |
| **10.** | Takabonerate | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 6,00 | 1,00 |
| **11.** | Pasilambena | 6,50 | 2,50 | 2,00 | 8,00 | - |
| Total | | **33,35** | **32,15** | **30,91** | **9,61** | **22,00** |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi tanaman mentimun pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 2,11 ton atau sekitar 7,33 %, dengan jumlah produksi sebanyak 30,91 ton dan produktivitas sebesar 9,61 kw/ha. Adapun potensi tanaman mentimun per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tanaman mentimun tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomatene dengan luas tanam 8,00 ha, luas panen 7,00 ha dan produksi mencapai 12,60 ton sehingga diperoleh produktivitas sebsar 18,00 kw/ha.

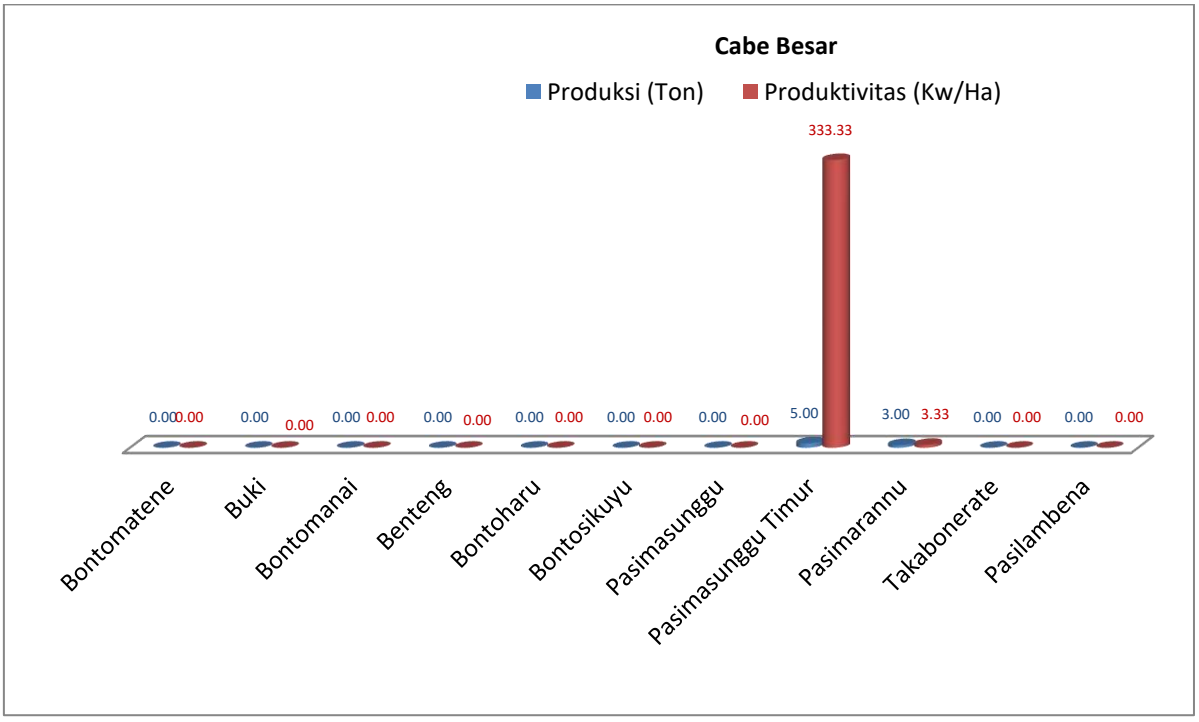
2. Cabe Besar

**Perkembangan Cabe Besar Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | 2020 | **16,00** | **18,00** | **13,20** | **7,33** | **24,00** | |
| **2.** | 2021 | **8,65** | **9,15** | **8,00** | **8,74** | **16,00** | |

**Potensi Cabe Besar menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 0,15 | 0,15 | 5,00 | 333,33 | 5,00 | |
| 9. | Pasimarannu | 8,50 | 9,00 | 3,00 | 3,33 | 9,00 | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **8,65** | **9,15** | **8,00** | **8,74** | 16,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa produksi tanaman cabe besar untuk tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,2 ton atau sekitar 39,39 %. Jumlah produksi hanya mencapai 8,00 ton dan produktivitas sebesar 8,74 kw/ha. Tanaman cabe besar ini hanya di tanam dan dihasilkan pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pasimasunggu Timur dan Pasimarannu

dengan produksi tertinggi ada di kecamatan Pasimasunggu Timur, dengan luas panen 0,15 ha dari luas tanam tanam 0,15 ha, maka menghasilkan produksi sebanyak 5,00 ton dan produktivitas sebesar 333,33 kw/ha.

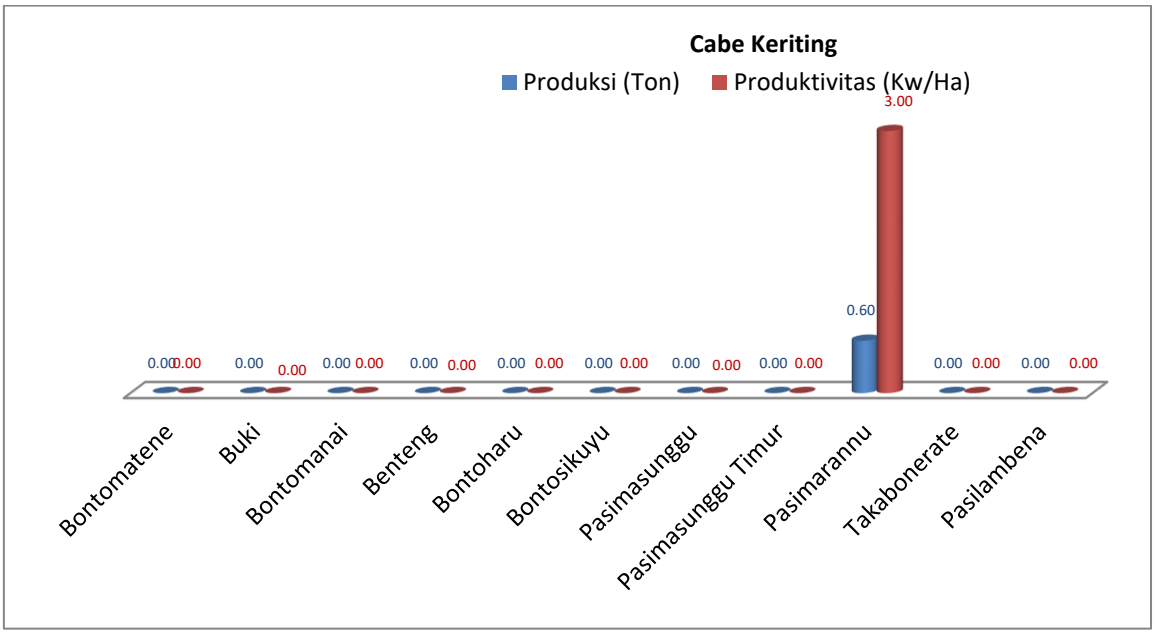
3. Cabe Keriting

**Perkembangan Cabe Keriting Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2021 | **2,00** | **2,00** | **0,60** | **3,00** | - | |

**Potensi Cabe Keriting menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | 2,00 | 2,00 | 0,60 | 3,00 | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **2,00** | **2,00** | **0,60** | **3,00** | - | |



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman cabe keriting untuk tahun 2021 mampu menghasilkan produksi sebanyak 0,60 ton dan produktivitas sebesar 3,00 kw/ha. Tanaman cabe keriting ini hanya di tanam dan dihasilkan di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 2,00 ha dari luas tanam tanam 2,00 ha.

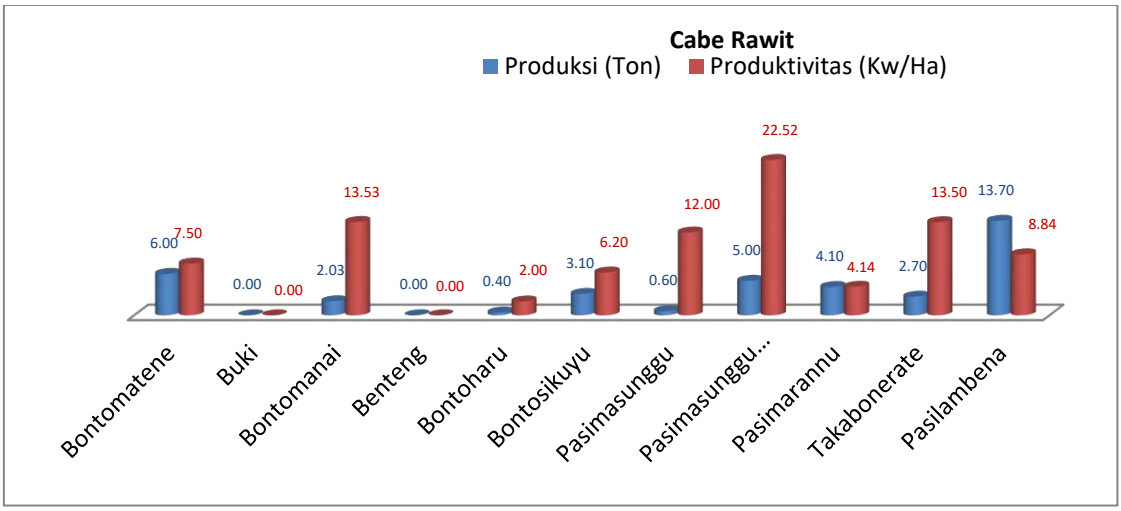
2. Cabe Rawit

**Perkembangan Cabe Rawit Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **37,00** | **47,00** | **28,51** | **6,07** | **37,00** | |
| 2. | 2021 | **59,32** | **46,62** | **37,63** | **8,07** | **37,00** | |

**Potensi Cabe Rawit menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,50 | 1,00 | |
| 2. | Buki | 5,00 | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | 3,00 | 1,50 | 2,03 | 13,53 | 5,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | - | 2,00 | 0,40 | 2,00 | 3,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 7,00 | 5,00 | 3,10 | 6,20 | 2,00 | |
| 7. | Pasimasunggu | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 12,00 | 4,00 | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 2,22 | 2,22 | 5,00 | 22,52 | 7,00 | |
| 9. | Pasimarannu | 8,10 | 9,90 | 4,10 | 4,14 | 9,00 | |
| 10. | Takabonerate | 2,00 | 2,00 | 2,70 | 13,50 | 1,00 | |
| 11. | Pasilambena | 22,50 | 15,50 | 13,70 | 8,84 | 5,00 | |
| **Total** | | **59,32** | **46,62** | **37,63** | **8,07** | 37,00 | |



Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman cabe rawit untuk tahun 2021 mengalami peningkatan produksi dari tahun 2020 sebesar 9,12 ton atau sekitar 31,99 %. Jumlah produksi mencapai 37,63 ton dan produktivitas sebesar 8,07 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Pasilambena dengan luas panen 15,50 ha dari luas tanam tanam 22,50 ha, maka menghasilkan produksi sebanyak 13,70 ton dan produktivitas sebesar 8,84 kw/ha.

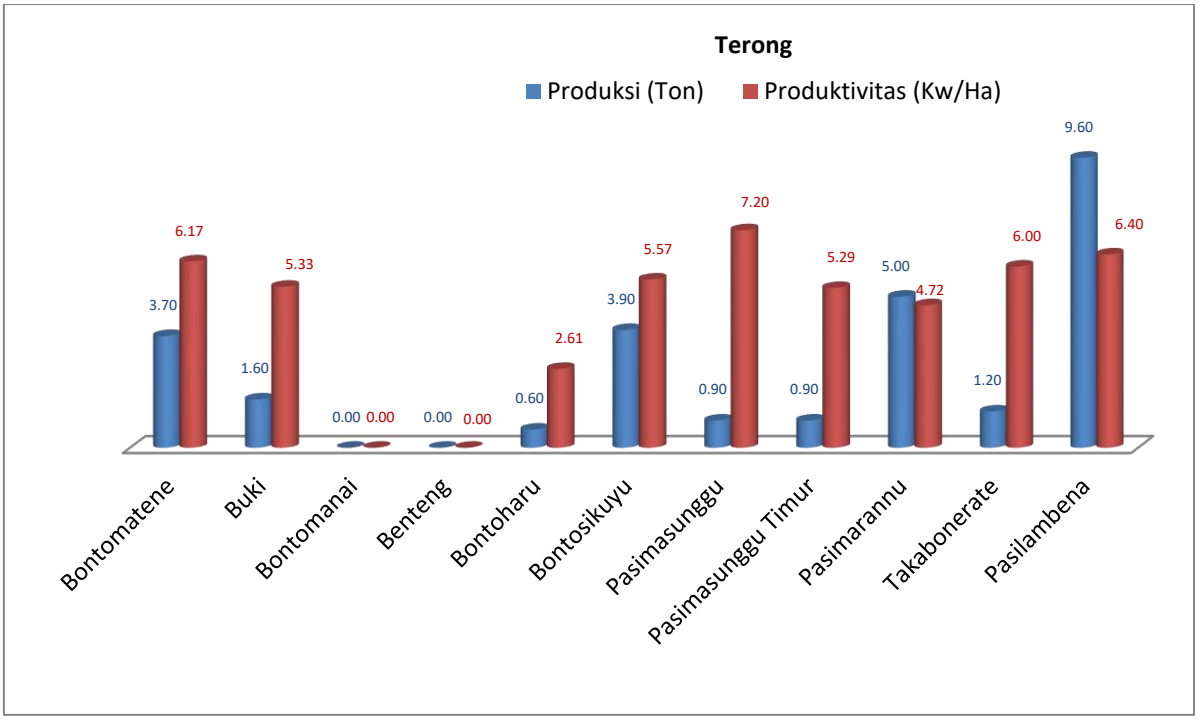
3. Terung

**Perkembangan Terung Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **26,00** | **43,00** | **31,90** | **7,42** | **73,00** | |
| 2. | 2021 | **53,05** | **48,85** | **27,40** | **5,61** | **26,00** | |

**Potensi Terong menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 7,00 | 6,00 | 3,70 | 6,17 | 3,00 | |
| 2. | Buki | - | 3,00 | 1,60 | 5,33 | 5,00 | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | 1,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 0,30 | 2,30 | 0,60 | 2,61 | 3,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 10,00 | 7,00 | 3,90 | 5,57 | 1,00 | |
| 7. | Pasimasunggu | 1,25 | 1,25 | 0,90 | 7,20 | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 1,70 | 1,70 | 0,90 | 5,29 | - | |
| 9. | Pasimarannu | 9,80 | 10,60 | 5,00 | 4,72 | 6,00 | |
| 10. | Takabonerate | 1,00 | 2,00 | 1,20 | 6,00 | 6,00 | |
| 11. | Pasilambena | 22,00 | 15,00 | 9,60 | 6,40 | 1,00 | |
| **Total** | | **53,05** | **48,85** | **27,40** | **5,61** | 26,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman terung untuk tahun 2021 mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 sebesar 4,50 ton atau sekitar 14,11 %. Jumlah produksi mencapai 27,40 ton dan produktivitas sebesar 5,61 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Pasilambena dengan luas panen 15,00 ha dari luas tanam tanam 22,00 ha, maka menghasilkan produksi sebanyak 9,60 ton dan produktivitas sebesar 6,40 kw/ha.

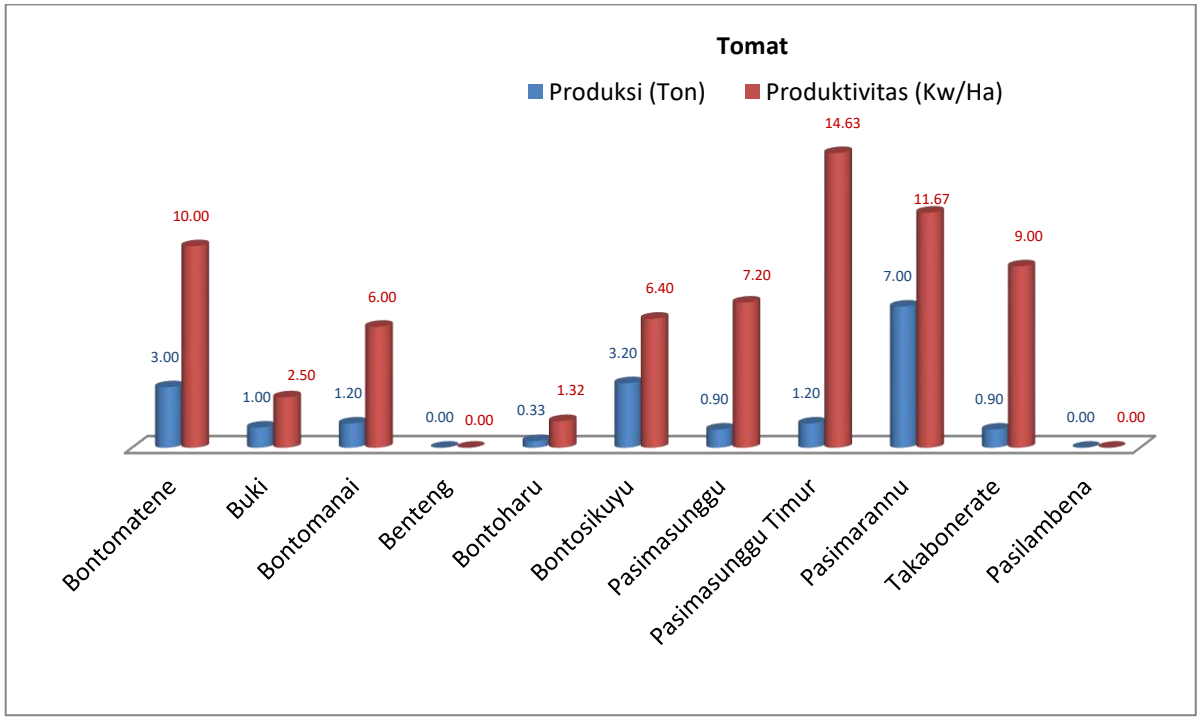
4. Tomat

**Perkembangan Tomat Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **25,00** | **40,00** | **32,10** | **8,02** | **79,00** | |
| 2. | 2021 | **24,67** | **25,57** | **18,73** | **7,32** | **25,00** | |

**Potensi Tomat menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | |
| 2. | Buki | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 2,50 | 6,00 | |
| 3. | Bontomanai | - | 2,00 | 1,20 | 6,00 | 3,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 1,60 | 2,50 | 0,33 | 1,32 | 2,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 8,00 | 5,00 | 3,20 | 6,40 | 2,00 | |
| 7. | Pasimasunggu | 1,25 | 1,25 | 0,90 | 7,20 | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 0,82 | 0,82 | 1,20 | 14,63 | - | |
| 9. | Pasimarannu | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 11,67 | 7,00 | |
| 10. | Takabonerate | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 9,00 | 2,00 | |
| 11. | Pasilambena | 4,00 | - | - | - | 1,00 | |
| **Total** | | **24,67** | **25,57** | **18,73** | **7,32** | 25,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman tomat untuk tahun 2021 mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 sebesar 13,37 ton atau sekitar 41,65 %. Jumlah produksi mencapai 18,73 ton dan produktivitas sebesar 7,32 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 6,00 ha dari luas tanam tanam 5,00 ha, maka

menghasilkan produksi sebanyak 7,00 ton dan produktivitas sebesar 11,67 kw/ha.

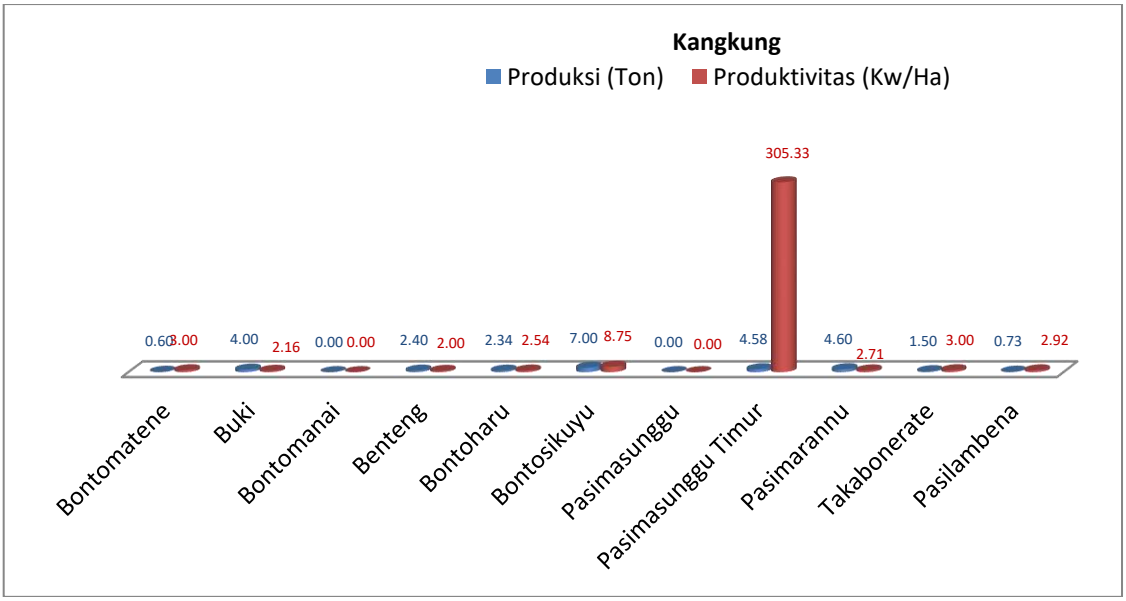
5. Kangkung

**Perkembangan Kangkung Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **54,00** | **63,00** | **16,80** | **2,67** | **88,00** | |
| 2. | 2021 | **71,75** | **74,35** | **27,75** | **3,73** | **54,00** | |

**Potensi Kangkung menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 5,00 | 2,00 | 0,60 | 3,00 | 1,00 | |
| 2. | Buki | 12,50 | 18,50 | 4,00 | 2,16 | 12,00 | |
| 3. | Bontomanai | 0,50 | - | - | - | 7,00 | |
| 4. | Benteng | 12,00 | 12,00 | 2,40 | 2,00 | 5,00 | |
| 5. | Bontoharu | 5,70 | 9,20 | 2,34 | 2,54 | 11,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 11,00 | 8,00 | 7,00 | 8,75 | | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | 4,00 | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 0,15 | 0,15 | 4,58 | 305,33 | | |
| 9. | Pasimarannu | 16,40 | 17,00 | 4,60 | 2,71 | 7,00 | |
| 10. | Takabonerate | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 3,00 | 5,00 | |
| 11. | Pasilambena | 3,50 | 2,50 | 0,73 | 2,92 | 2,00 | |
| **Total** | | **71,75** | **74,35** | **27,75** | **3,73** | 54,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman kangkung untuk tahun 2021 mengalami peningkatan produksi dari

tahun 2020 sebesar 10,95 ton atau sekitar 65,18 %. Jumlah produksi mencapai 27,75 ton dan produktivitas sebesar 3,73 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas panen 8,00 ha dari luas tanam tanam 11,00 ha, maka menghasilkan produksi sebanyak 7,00 ton dan produktivitas sebesar 8,75 kw/ha.

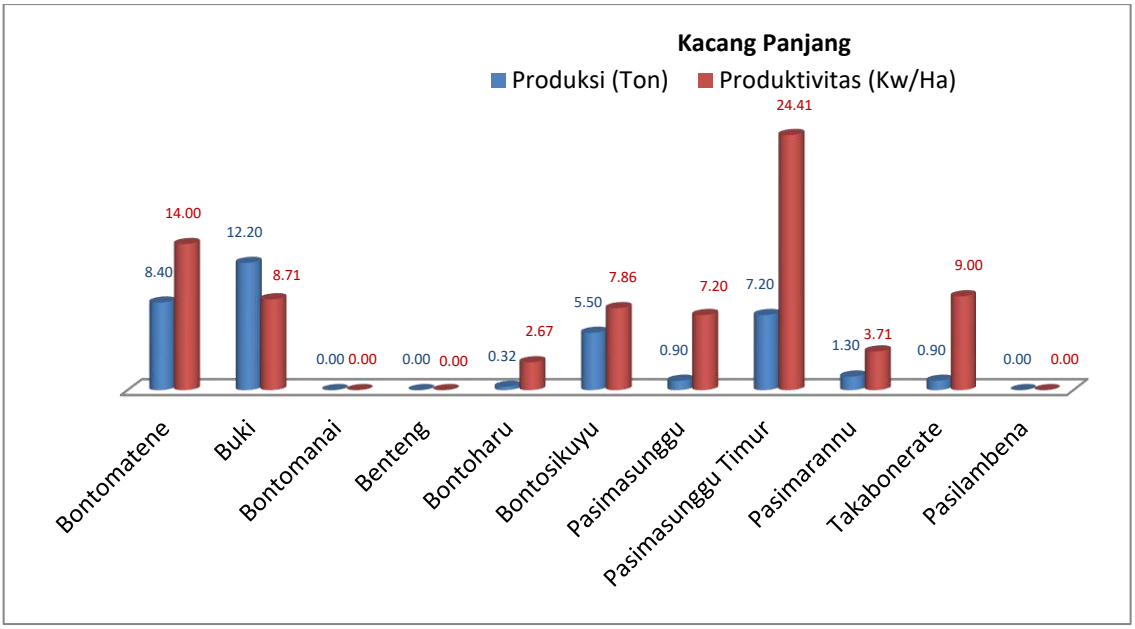
6. Kacang Panjang

**Perkembangan Kacang Panjang Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **26,00** | **46,00** | **36,00** | **7,83** | **62,00** | |
| 2. | 2021 | **39,40** | **36,90** | **36,72** | **9,95** | **26,00** | |

**Potensi Kacang Panjang menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 14,00 | 2,00 | |
| 2. | Buki | 11,00 | 14,00 | 12,20 | 8,71 | 14,00 | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | 1,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 1,30 | 1,20 | 0,32 | 2,67 | - | |
| 6. | Bontosikuyu | 9,00 | 7,00 | 5,50 | 7,86 | - | |
| 7. | Pasimasunggu | 1,25 | 1,25 | 0,90 | 7,20 | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 2,95 | 2,95 | 7,20 | 24,41 | - | |
| 9. | Pasimarannu | 3,90 | 3,50 | 1,30 | 3,71 | 3,00 | |
| 10. | Takabonerate | 2,00 | 1,00 | 0,90 | 9,00 | 4,00 | |
| 11. | Pasilambena | 2,00 | - | - | - | 2,00 | |
| **Total** | | **39,40** | **36,90** | **36,72** | **9,95** | 26,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman kacang panjang untuk tahun 2021 mengalami peningkatan produksi dari tahun 2020 sebesar 0,72 ton atau sekitar 2,00 %. Jumlah produksi mencapai 36,72 ton dan produktivitas sebesar 9,95 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Buki dengan luas panen 14,00 ha dari luas tanam tanam 11,00 ha, maka menghasilkan produksi sebanyak 12,20 ton dan produktivitas sebesar 8,71 kw/ha.

7. Bayam

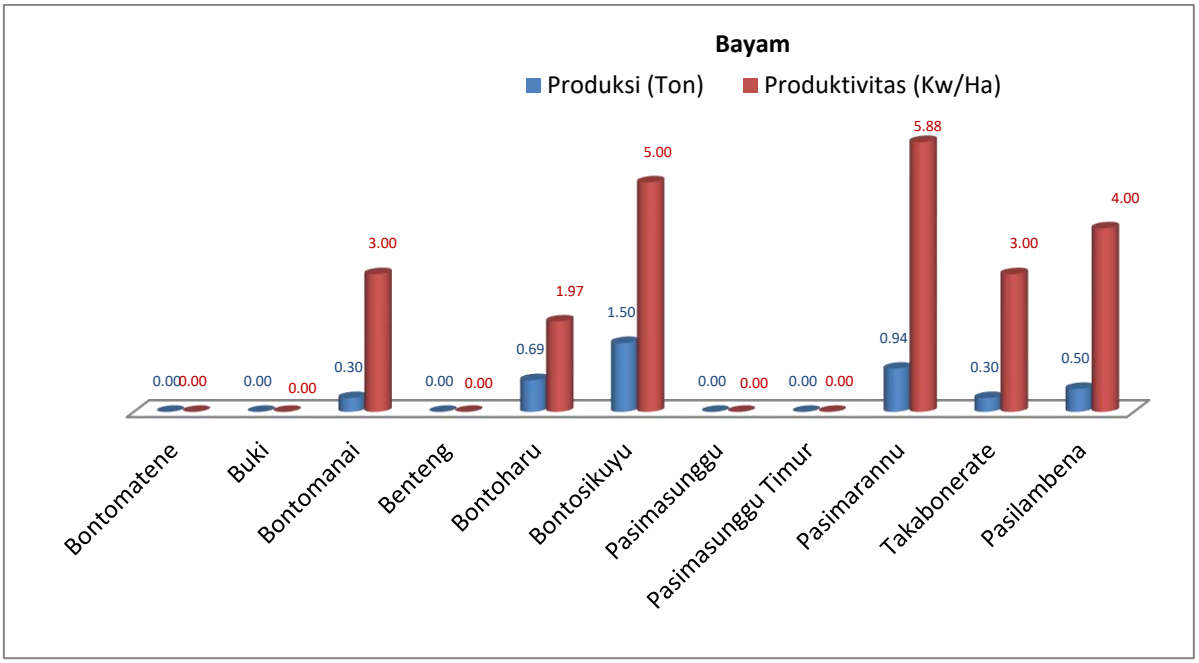
**Perkembangan Bayam Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **42,00** | **58,00** | **13,10** | **2,26** | **73,00** | |
| 2. | 2021 | **10,60** | **11,35** | **4,23** | **3,73** | **42,00** | |

**Potensi Bayam menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | 23,00 | |
| 3. | Bontomanai | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 3,00 | 9,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 2,75 | 3,50 | 0,69 | 1,97 | 4,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 5,00 | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | 0,60 | 1,60 | 0,94 | 5,88 | 4,00 |
| 10. | Takabonerate | 1,00 | 1,00 | 0,30 | 3,00 | 2,00 |
| 11. | Pasilambena | 2,25 | 1,25 | 0,50 | 4,00 | - |
| **Total** | | **10,60** | **11,35** | **4,23** | **3,73** | 42,00 |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman bayam untuk tahun 2021 mengalami penurunan produksi dari tahun 2020 sebesar 8,87 ton atau sekitar 67,71 %. Jumlah produksi hanya mencapai 4,23 ton dan produktivitas sebesar 3,73 kw/ha. Adapun produksi tertinggi untuk semua kecamatan terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dengan luas panen 3,00 ha dari luas tanam tanam yang sama, maka menghasilkan produksi sebanyak 1,50 ton dan produktivitas sebesar 5,00 kw/ha.

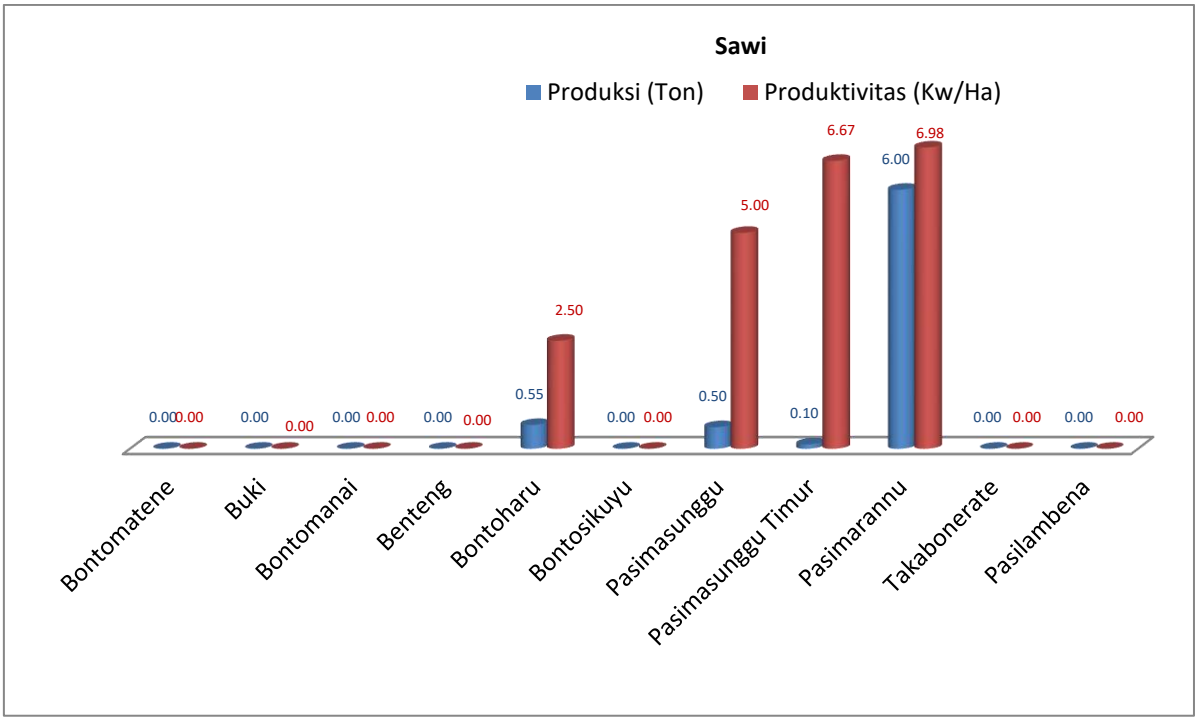
8. Sawi

**Perkembangan Sawi Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **16,00** | **19,00** | **11,30** | **5,95** | **28,00** | |
| 2. | 2021 | **11,65** | **11,95** | **7,15** | **5,98** | **16,00** | |

**Potensi Sawi menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | 0,50 | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | 3,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 1,20 | 2,20 | 0,55 | 2,50 | 3,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 5,00 | 2,00 | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 6,67 | | |
| 9. | Pasimarannu | 8,80 | 8,60 | 6,00 | 6,98 | 8,00 | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **11,65** | **11,95** | **7,15** | **5,98** | 16,00 | |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa potensi tanaman sawi mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebanyak 4,15 ton atau sekitar 36,73 %. Jumlah produksi ditahun ini sebanyak 7,15 ton dan produktivitas 5,98 kw/ha. Adapun

produksi tertinggi untuk semua kecamatan ada pada Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 8,80 ha dari luas tanam 8,60 ha sehingga dihasilkan produksi sebanyak 6,00 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 6,98 kw/ha.

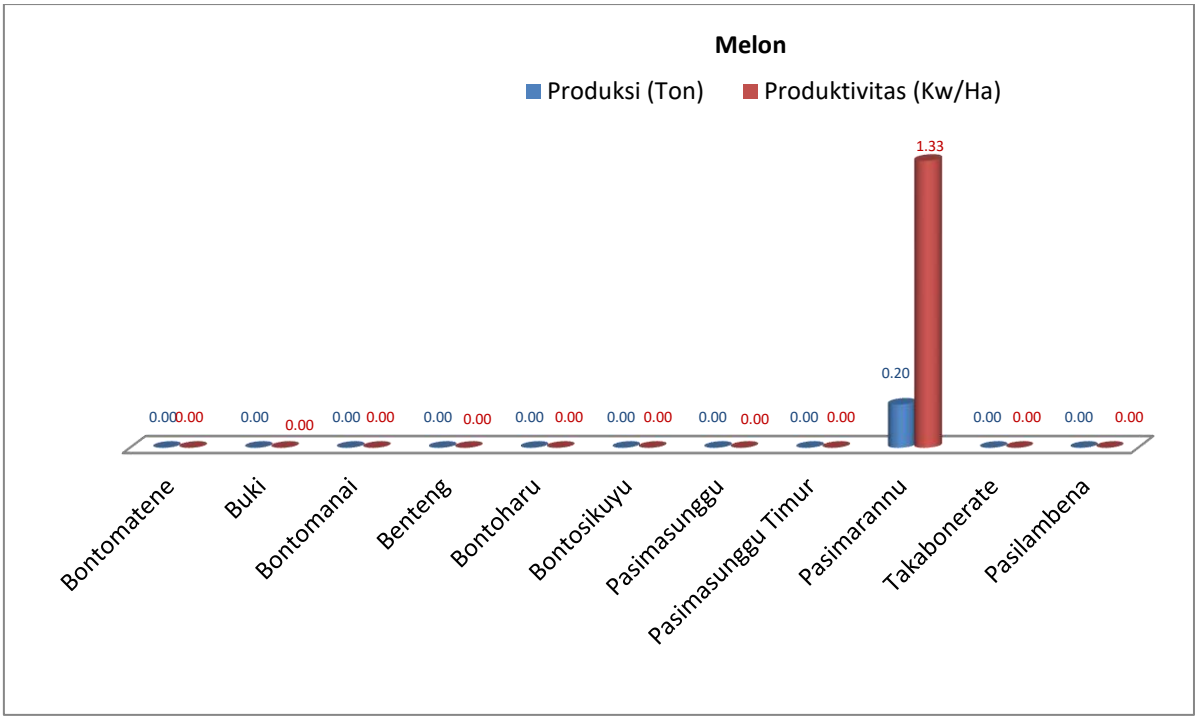
9. Melon

**Perkembangan Melon Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **1,00** | **1,00** | **0,30** | **-** | **-** | |
| 2. | 2021 | **1,50** | **1,50** | **0,20** | **1,33** | **-** | |

**Potensi Melon menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | 1,50 | 1,50 | 0,20 | 1,33 | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **1,50** | **1,50** | **0,20** | **1,33** | - | |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa potensi melon mengalami penurunan produksi pada tahun 2021 sebanyak 0,1 ton atau sekitar 33,33%. Tanaman Melon ini hanya terdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen dan luas tanam yang sama yaitu 1,50 ha sehingga menghasilkan produksi sebanyak 0,20 dan tingkat produktivitas sebesar 1,33 kw/ha.

10. Semangka

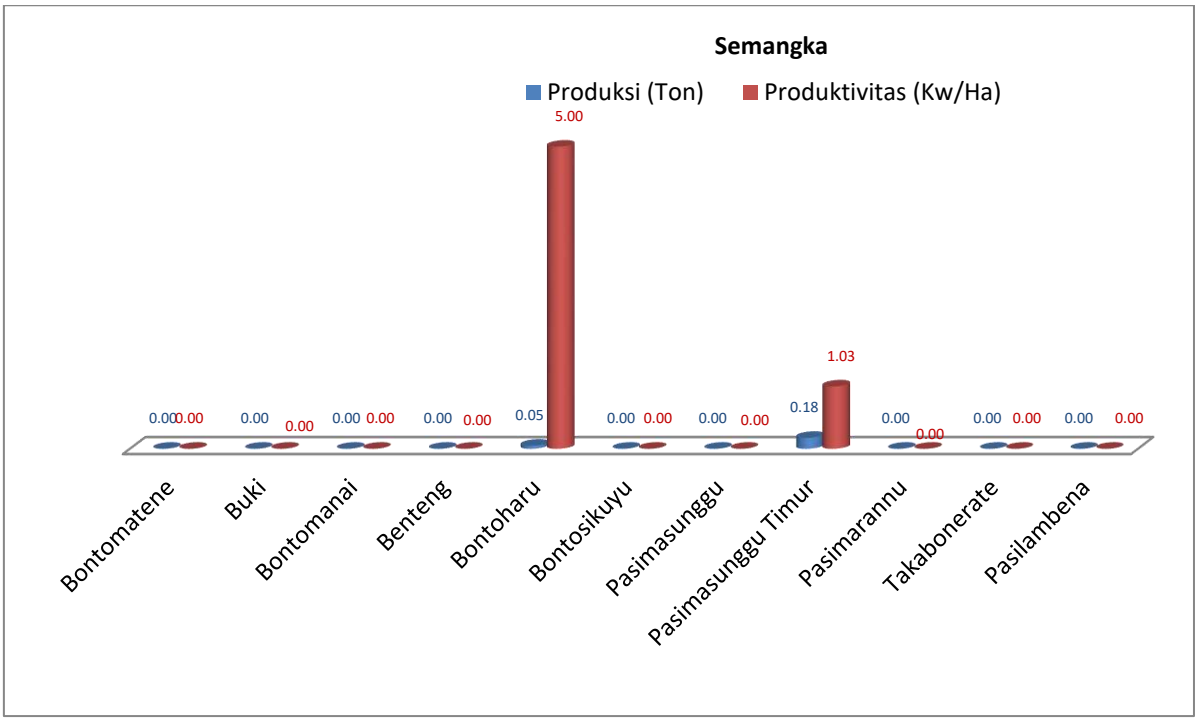
**Perkembangan Semangka Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **2,00** | **2,00** | **1,10** | **5,50** | - | |
| 2. | 2021 | **1,85** | **1,85** | **0,23** | **1,24** | **1,00** | |

**Potensi Semangka menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 5,00 | - | |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu | 1,75 | 1,75 | 0,18 | 1,03 | 1,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Timur | | | | | |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **1,85** | **1,85** | **0,23** | **1,24** | 1,00 |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa potensi tanaman semangka untuk produksi pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0,87 ton atau sekitar 79,09 %. Jumlah produksi hanya mencapai 0,23 ton dengan produktivitas 1,24 kw/ha. Adapun tanaman semangka hanya terdapat di Kecamatan Bontoharu dan Pasimasunggu Timur dengan produksi tertinggi ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan luas panen dan luas tanam yang sama yaitu 1,75 ha sehingga produksi yang dihasilkan sebanyak 0,18 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 1,03 kw/ha.

11. Labu Siam

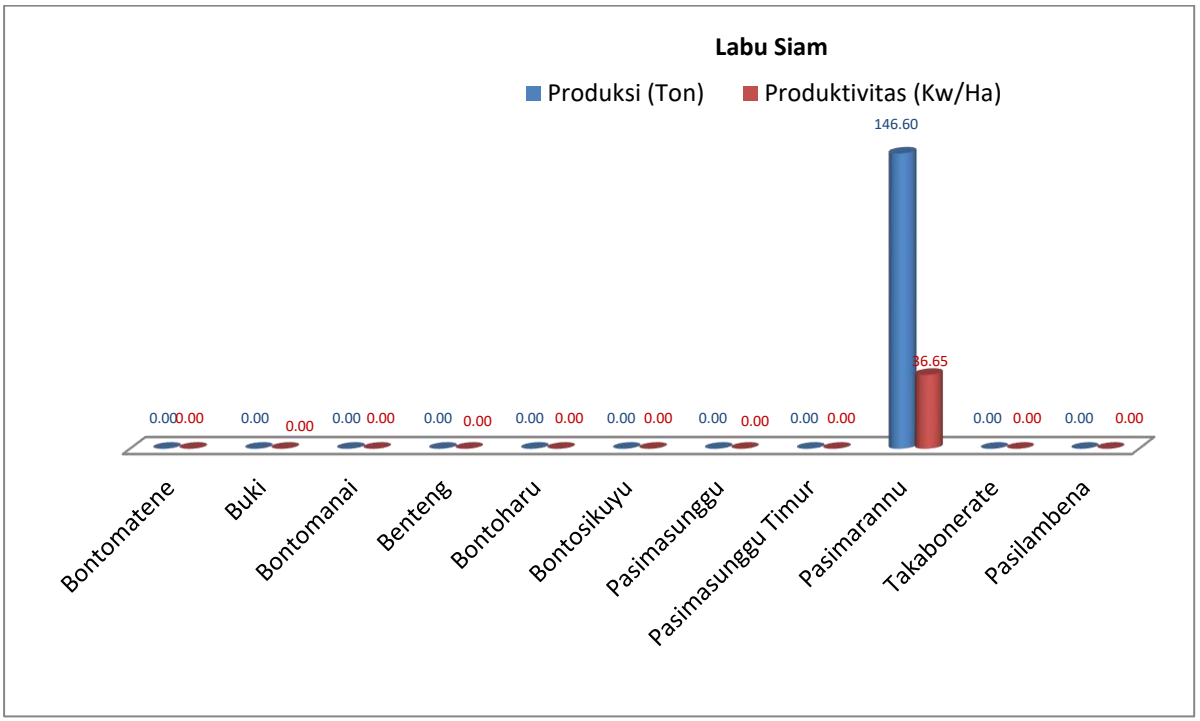
**Perkembangan Labu Siam Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam | Luas Panen | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | (Ha) | (Ha) | | | Tanam (Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **22,00** | **17,00** | **67,41** | **39,65** | **45,00** |
| 2. | 2021 | **22,00** | **40,00** | **146,60** | **36,65** | **22,00** |

**Potensi Labu Siam menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | 22,00 | 40,00 | 146,60 | 36,65 | 22,00 | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **22,00** | **40,00** | **146,60** | **36,65** | 22,00 | |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa potensi labu siam mengalami peningkatan produksi sebesar 79,19

ton atau sekitar 117,48 % dari tahun 2020. Jumlah produksi mencapai 146,60 ton dengan tingkat produktivitas 36,65 kw/ha. Adapun tanaman labu siam ini hanya terdapat di Kecamatan Pasimarannu dengan luas panen 40,00 ha dari luas tanam 22,00 sehingga menghasilkan produksi sebanyak 146,60 ton dan produktivitas sebesar 36,65 kw/ha,

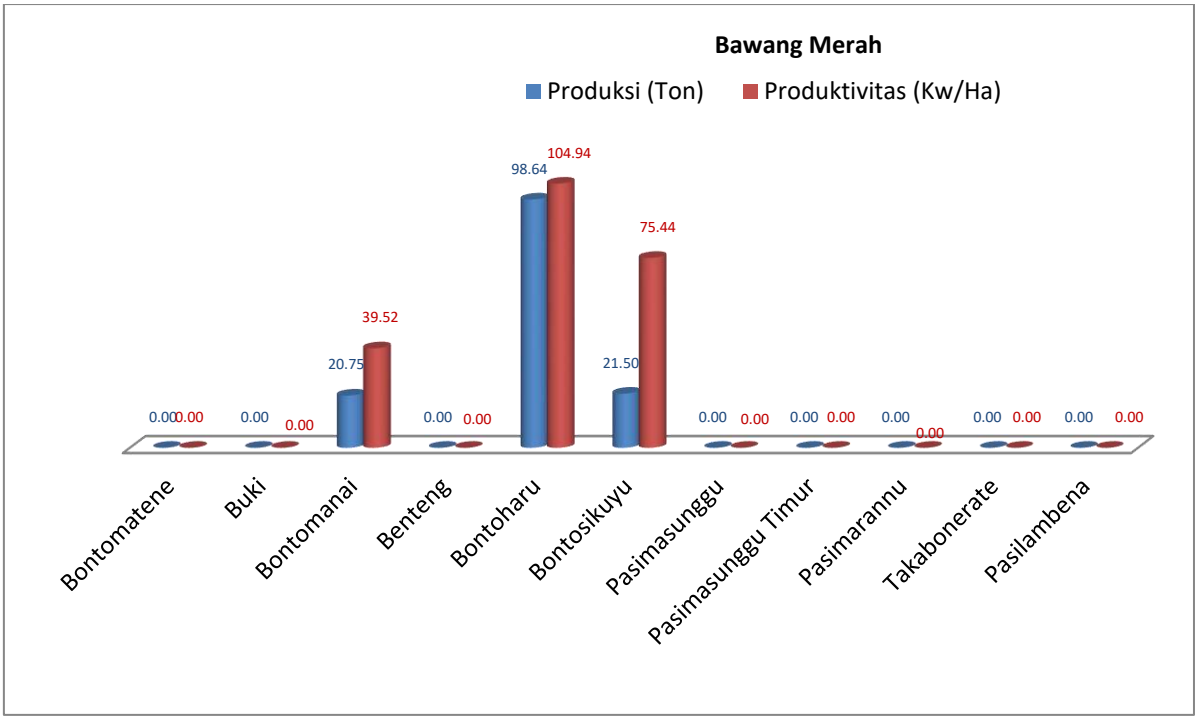
12. Bawang Merah

**Perkembangan Bawang Merah Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **6,00** | **5,00** | **12,50** | **25,00** | **5,00** | |
| 2. | 2021 | **20,70** | **17,50** | **140,89** | **80,51** | **4,00** | |

**Potensi Bawang Merah menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | 2,00 | |
| 3. | Bontomanai | 5,25 | 5,25 | 20,75 | 39,52 | 1,00 | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 12,60 | 9,40 | 98,64 | 104,94 | 1,00 | |
| 6. | Bontosikuyu | 2,85 | 2,85 | 21,50 | 75,44 | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **20,70** | **17,50** | **140,89** | **80,51** | 4,00 | |




Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi tanaman bawang merah mengalami peningkatan produksi yang sangat signifikan pada tahun 2021 sebanyak 128,39 ton atau sekitar 1.027,12 % dari tahun 2020. Jumlah produksi sebanyak 140,89 ton dan produktivitas sebesar 80,51. Adapun produksi tertinggi untuk seluruh kecamatan terdapat pada Kecamatan Bontoharu dengan luas panen 9,40 ha dari luas tanam 12,60 ha sehingga produksi yang dicapai sebanyak 98,64 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 104,94 kw/ha.

13. Kembang Kol

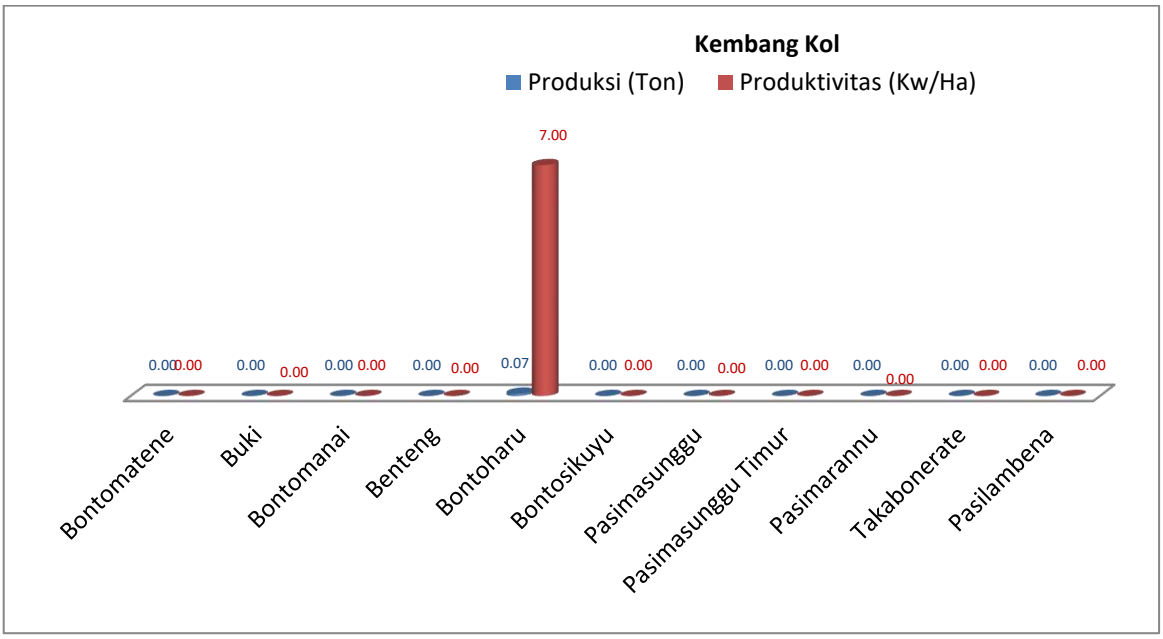
**Perkembangan Kembang Kol Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2021 | **0,10** | **0,10** | **0,07** | **7,00** | - | |

**Potensi Kembang Kol menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Bontoharu | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 7,00 | - |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **0,10** | **0,10** | **0,07** | **7,00** | - |




Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui nahwa potensi tanaman kembang kol hanya terdapat di Kecamatan Bontoharu dengan luas panen 0,10 ha dari luas tanam yang sama dengan produksi 0,07 ton sehingga diperoleh produktivitas sebesar 7,00 kw/kg.

14. Buncis

**Perkembangan Buncis Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | - | - | - | - | - | |
| 2. | 2021 | **0,50** | - | - | - | - | |

**Potensi Buncis menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | 0,05 | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **0,50** | **-** | **-** | **-** | - |

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa potensi tanaman buncis hanya terdapat di Kecamatan Buki dengan luas tanam 0,5 ha.

15. Stroberi

**Perkembangan Stroberi Tahun 2020 dan Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Potensi Area Tanam (Ha) | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| 2. | 2021 | **1,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

**Potensi Stroberi menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kw/Ha) | Potensi Area Tanam | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | - | - | - | - | - | |
| 2. | Buki | - | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | 1,00 | - | - | - | - | |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | - | |
| 6. | Bontosikuyu | - | - | - | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - | |
| **Total** | | **1,00** | **-** | **-** | **-** | - | |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanaman stroberi belum menghasilkan atau berbuah. Adapun luas tanam 1,00 ha dan hanya terdapat di Kecamatan Bontomanai.

## C. Potensi Tanaman Perkebunan

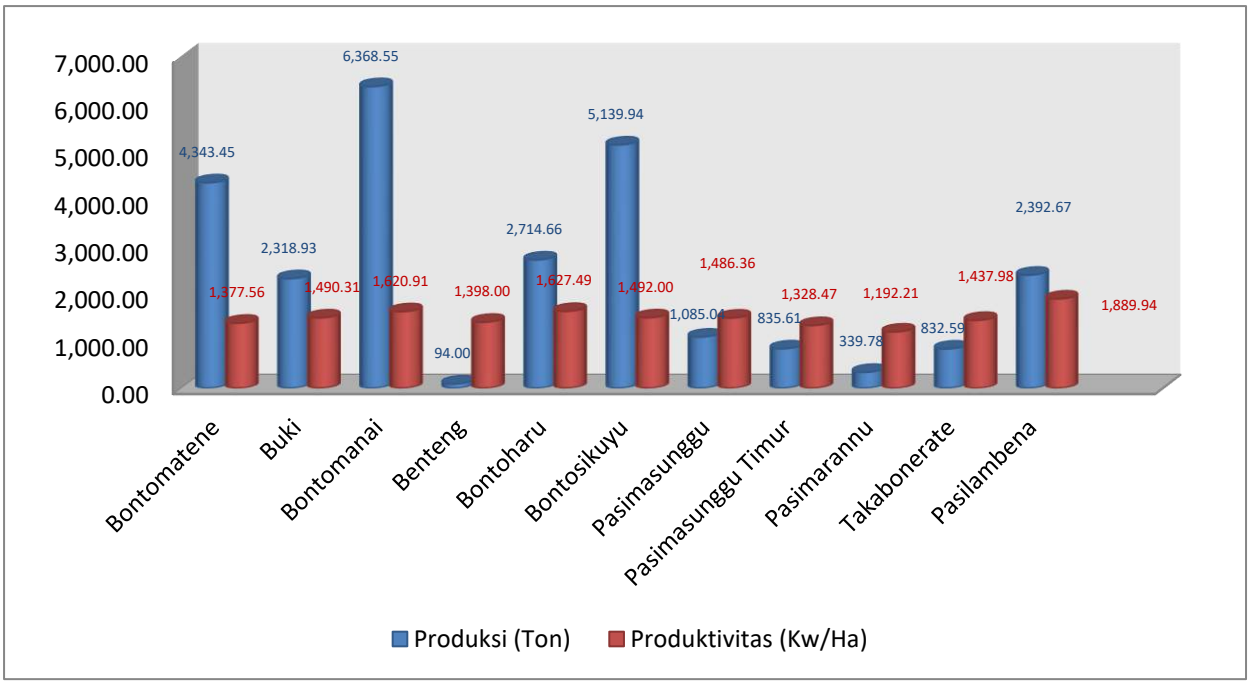
1. Kelapa Dalam

**Perkembangan Kelapa Dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | **19.416** | **16.805** | **24,937,21** | **1.484** |
| 2. | 2017 | **19.405,50** | **16.943** | **24.979,20** | **1.474** |
| 3. | 2018 | **19.547** | **17.138** | **25.055,63** | **1,462** |
| 4. | 2019 | **19.526** | **17.314** | **24.202,01** | **1.398** |
| 5. | 2020 | **19.511** | **17.314** | **23.981,90** | **1.385** |
| 6. | 2021 | **19.512** | **17.307** | **26.464,90** | **1.529,14** |

**Potensi Kelapa Dalam menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 3.479 | 3.153 | 4.343,45 | 1.377,56 | 2.850 |
| 2. | Buki | 1.716 | 1.556 | 2.318,93 | 1.490,31 | 1.271 |
| 3. | Bontomanai | 4.441 | 3.929 | 6.368,55 | 1.620,91 | 4.189 |
| 4. | Benteng | 68,00 | 67,00 | 94,00 | 1.398 | 491 |
| 5. | Bontoharu | 1.801 | 1.668 | 2.714,66 | 1.627,49 | 2.038 |
| 6. | Bontosikuyu | 3.871 | 3.445 | 5.139,94 | 1.492,00 | 3.796 |
| 7. | Pasimasunggu | 945 | 730 | 1.085,04 | 1.486,36 | 991 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 883 | 629 | 835,61 | 1.328,47 | 791 |
| 9. | Pasimarannu | 306 | 285 | 339,78 | 1.192,21 | 367 |
| 10. | Takabonerate | 646 | 579 | 832,59 | 1.437,98 | 627 |
| 11. | Pasilambena | 1.356 | 1.266 | 2.392,67 | 1.889,94 | 1.050 |
| **Total** | | **19.512** | **17.307** | **26.464,90** | **1.529,14** | **18.461** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi Kelapa Dalam di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebanyak 2.483 ton atau sekitar 10,35 %. Produksi Kelapa Dalam di tahun 2021 mencapai 26.464,90 ton dengan luas areal tanam 19.512 ha dan luas panen 17.307 ha dengan tingkat produktivitas 1.529,14 kg/ha. Adapun potensi tanaman Kelapa Dalam per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi Kelapa Dalam terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dengan luas tanam 4.441 Ha dan luas panen 3.929 ha, tanaman Kelapa Dalam di Kecamatan Bontomanai mampu mencapai produksi sebanyak 6.368,55 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 1.620,91 kg/ha. Adapun wujud produksi dari kelapa dalam ini adalah dalam bentuk kopra.

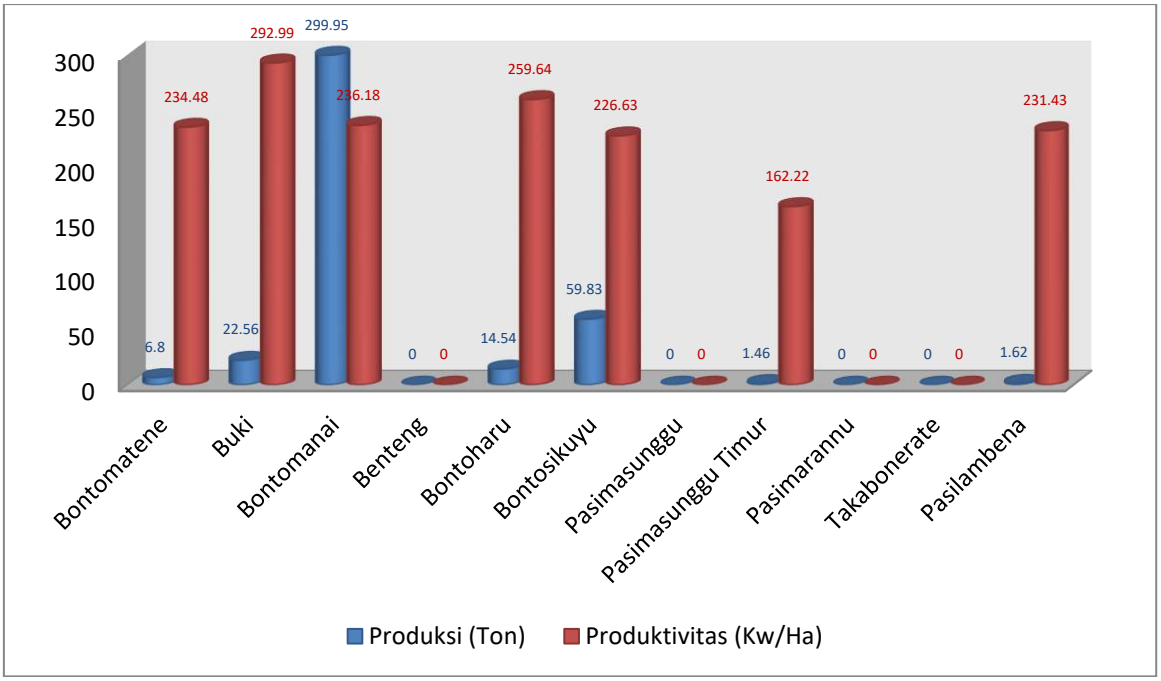
2. Pala

**Perkembangan Pala Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | **1.738** | **959** | **279,31** | **291** |
| 2. | 2017 | **1.880** | **967** | **282,01** | **292** |
| 3. | 2018 | **2.033** | **1.010** | **285,78** | **283** |
| 4. | 2019 | **2.433** | **1.687** | **396,39** | **235** |
| 5. | 2020 | **2.463** | **1.712** | **400,34** | **234** |
| 6. | 2021 | **2.463** | **1.712** | **406,76** | **237,59** |

**Potensi Pala menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 43,00 | 29,00 | 6,80 | 234,48 | 69 |
| 2. | Buki | 194,00 | 77,00 | 22,56 | 292,99 | 154 |
| 3. | Bontomanai | 1.528,00 | 1.270,00 | 299,95 | 236,18 | 2.449 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | 92,00 | 56,00 | 14,54 | 259,64 | 110 |
| 6. | Bontosikuyu | 455,00 | 264,00 | 59,83 | 226,63 | 424 |
| 7. | Pasimasunggu | 41,50 | - | - | - | 8 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 99,50 | 9,00 | 1,46 | 162,22 | 81 |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | 10,00 | 7,00 | 1,62 | 231,43 | 11 |
| **Total** | | **2.463** | **1.712** | **406,76** | **237,59** | **3.306** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi pala pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 6,42 ton atau sekitar 1,60 %. Produksi tanaman pala di tahun 2021 mencapai 406,76 ton dari luas areal tanam 2.463 ha dan luas panen 1.712 ha dengan tingkat produktivitas 237,59 kg/ha. Adapun potensi tanaman pala per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi pala terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dengan luas tanam 1.528 Ha dan luas panen 1.270ha, tanaman pala di Kecamatan Bontomanai mampu mencapai

produksi sebanyak 299,95 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 236,18 kg/ha. Wujud produksi dari tanaman pala ini berupa biji kering.

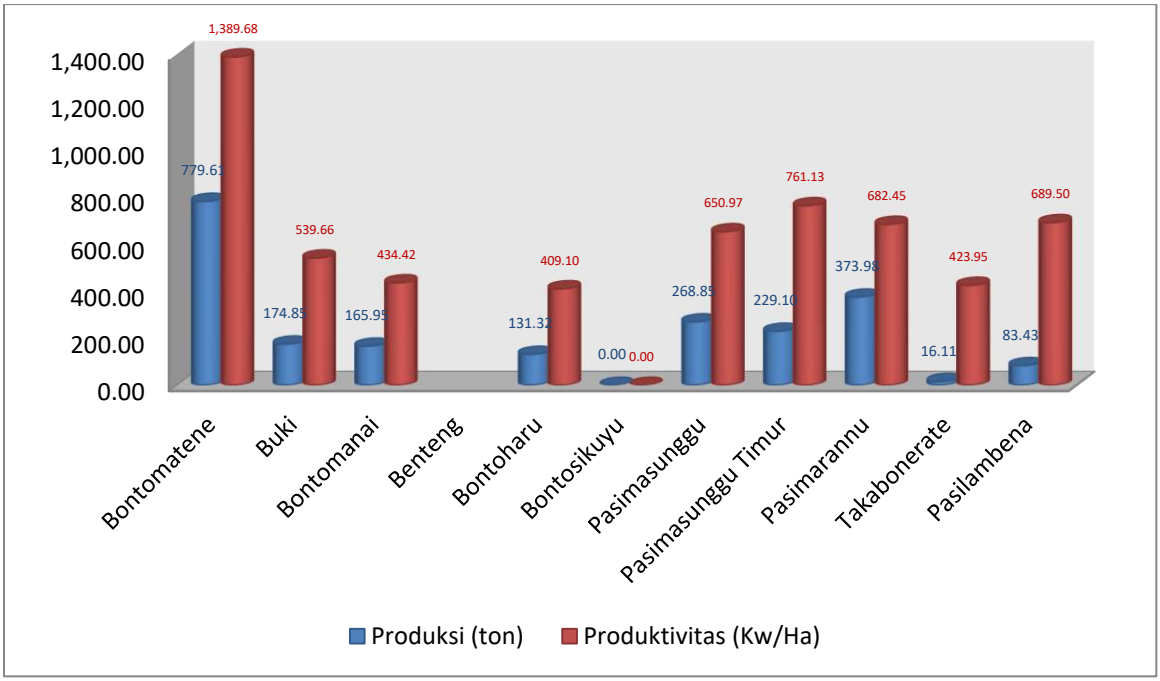
3. Jambu Mete

**Perkembangan Jambu Mente Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | **3.714,50** | **3.576** | **1.919,40** | **537** |
| 2. | 2017 | **3.708** | **3.612,50** | **2.011,29** | **557** |
| 3. | 2018 | **3.708** | **3.612,50** | **2.090,17** | **579** |
| 4. | 2019 | **3.708** | **3.614,50** | **1.976,10** | **547** |
| 5. | 2020 | **3.793** | **3.609,00** | **2.020,42** | **560** |
| 6. | 2021 | **3.801** | **3.609,00** | **2.414,56** | **669,04** |

**Potensi Jambu Mente menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 574,00 | 561,00 | 779,61 | 1.389,68 | 775 |
| 2. | Buki | 340,00 | 324,00 | 174,85 | 539,66 | 612 |
| 3. | Bontomanai | 393,00 | 382,00 | 165,95 | 434,42 | 725 |
| 4. | Benteng | - | - | | | |
| 5. | Bontoharu | 343,00 | 321,00 | 131,32 | 409,10 | 444 |
| 6. | Bontosikuyu | 611,00 | 600,00 | - | - | |
| 7. | Pasimasunggu | 417,00 | 413,00 | 268,85 | 650,97 | 537 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 306,00 | 301,00 | 229,10 | 761,13 | 384 |
| 9. | Pasimarannu | 565,00 | 548,00 | 373,98 | 682,45 | 680 |
| 10. | Takabonerate | 42,00 | 38,00 | 16,11 | 423,95 | 49 |
| 11. | Pasilambena | 210,00 | 121,00 | 83,43 | 689,50 | 272 |
| **Total** | | **3.801** | **3.609,00** | **2.414,56** | **669,04** | **5.296** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi jambu mete di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebanyak 394,14 ton atau sekitar 19,51 %. Produksi jambu mete di tahun 2020 mencapai 2.414,56 ton dari luas areal tanam 3.801 ha dan luas panen 3.609 ha dengan tingkat produktivitas 669,04 kg/ha. Adapun potensi tanaman jambu mete per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomatene. Dari luas tanam 574 ha dan luas panen 561ha, mampu mencapai produksi sebanyak 779,61ton dengan tingkat produktivitas mencapai 1.389,68 kg/ha. Adapun wujud produksi dari jambu mete ini berupa gelondong kering.

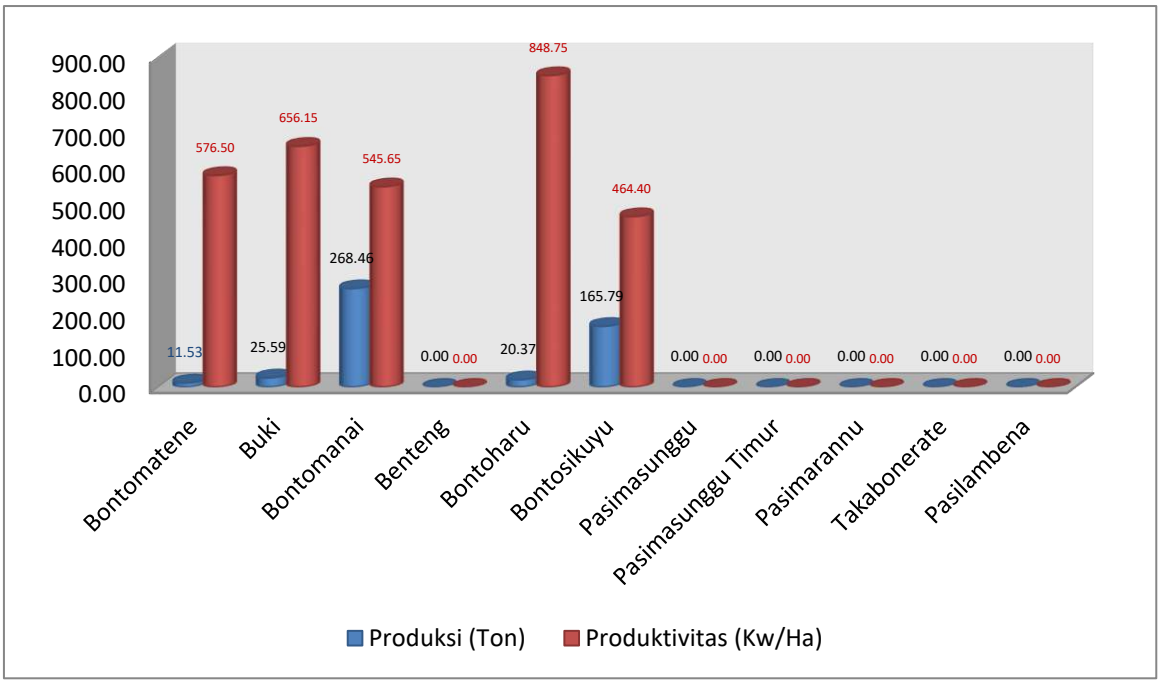
4. Cengkeh

**Perkembangan Cengkeh Tahun 2016 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2016 | 1.213 | 817 | 178,35 | 218 |
| 2. | 2017 | 1.273 | 817 | 102,49 | 125 |
| 3. | 2018 | 1.316 | 942 | 535,10 | 568 |
| 4. | 2019 | 1.304 | 932 | 488,72 | 524 |
| 5. | 2020 | 1.351 | 940 | 491,24 | 523 |
| 6. | 2021 | 1.351 | 932 | 491,74 | 527,62 |

**Potensi Cengkeh menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 37,00 | 20,00 | 11,53 | 576,50 | 89 |
| 2. | Buki | 61,00 | 39,00 | 25,59 | 656,15 | 60 |
| 3. | Bontomanai | 707,00 | 492,00 | 268,46 | 545,65 | 560 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 33,00 | 24,00 | 20,37 | 848,75 | 35 |
| 6. | Bontosikuyu | 513,00 | 357,00 | 165,79 | 464,40 | 750 |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | 1.351 | 932 | 491,74 | 527,62 | **1.494** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi cengkeh di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebanyak 0,50 ton atau sekitar 0,10 %. Produksi cengkeh di tahun 2021 mencapai 491,74 ton dari luas areal tanam 1.351 ha dan luas panen 932 ha dengan tingkat produktivitas 527,62 kg/ha. Adapun potensi tanaman cengkeh per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dari luas tanam seluas 707 ha dan luas panen 492 ha, mampu

mencapai produksi sebanyak 268,46 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 545,65 kg/ha. Wujud produksi dari komodistas cengkeh berupa bunga kering.

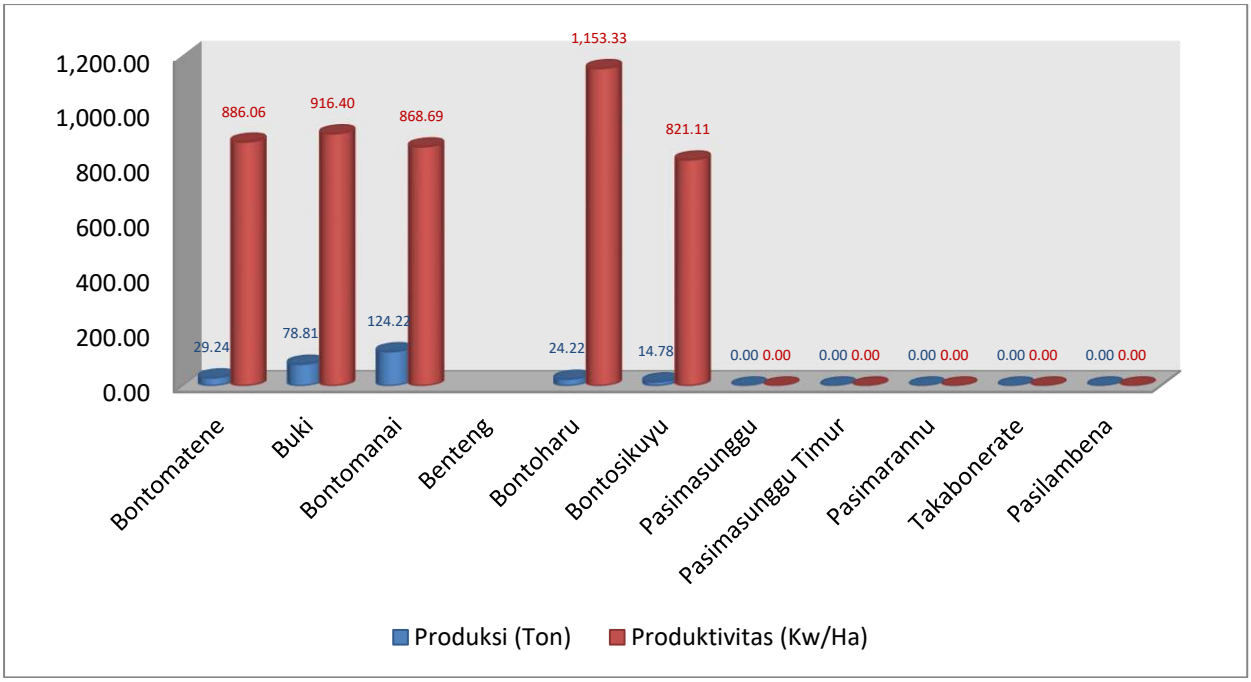
5. Kenari

**Perkembangan Kenari Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **329** | **257** | **248,03** | **965** |
| 2. | 2019 | **326** | **301** | **251,92** | **837** |
| 3. | 2020 | **326** | **301** | **251,93** | **837** |
| 4. | 2021 | **326** | **301** | **271,27** | **901,24** |

**Potensi Kenari menurut Kecamatan Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 41,00 | 33,00 | 29,24 | 886,06 | 115 |
| 2. | Buki | 91,00 | 86,00 | 78,81 | 916,40 | 168 |
| 3. | Bontomanai | 152,00 | 143,00 | 124,22 | 868,69 | 213 |
| 4. | Benteng | - | - | | | |
| 5. | Bontoharu | 23,00 | 21,00 | 24,22 | 1.153,33 | 50 |
| 6. | Bontosikuyu | 19,00 | 18,00 | 14,78 | 821,11 | 102 |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | |
| **Total** | | **326** | **301** | **271,27** | **901,24** | **648** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kenari pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebanyak 19,34 ton atau sekitar 7,68 %. Produksi kenari tahun 2021 mencapai 271,27 ton dari luas areal tanam 326 ha dan luas panen 301 ha dengan tingkat produktivitas 901,24 kg/ha. Adapun potensi tanaman kenari per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dari luas tanam seluas 152 ha dan luas panen 143 ha, mampu mencapai produksi sebanyak 124,22 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 868,69 kg/ha. Adapun wujud produksi dari komoditas kenari ini berupa biji kering.

6. Lada

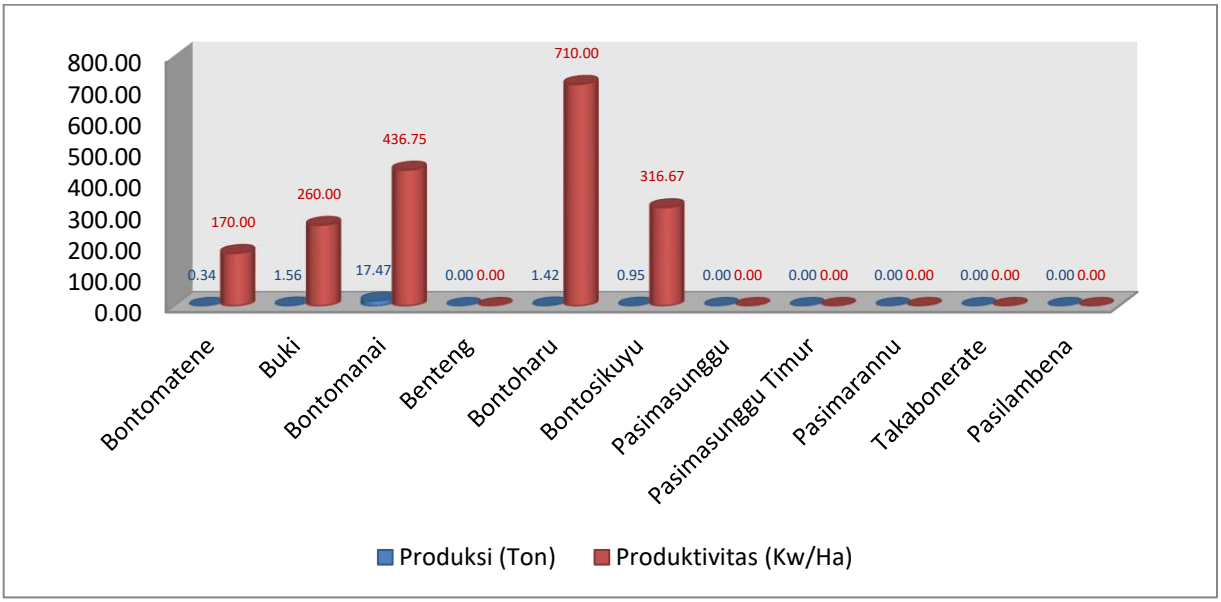
**Perkembangan Lada Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.. | 2018 | **96,00** | **83,00** | **11,71** | **141** |
| 2. | 2019 | **95,00** | **63,00** | **20,86** | **331** |
| 3. | 2020 | **81,00** | **53,00** | **20,87** | **394** |
| 4. | 2021 | **81,00** | **53,00** | **21,74** | **410,19** |

**Potensi Lada menurut Kecamatan Tahun 2020**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 2,00 | 2,00 | 0,34 | 170,00 | 36 |
| 2. | Buki | 9,00 | 6,00 | 1,56 | 260,00 | 46 |
| 3. | Bontomanai | 63,00 | 40,00 | 17,47 | 436,75 | 271 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 3,00 | 2,00 | 1,42 | 710,00 | 56 |
| 6. | Bontosikuyu | 4,00 | 3,00 | 0,95 | 316,67 | 46 |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **81,00** | **53,00** | **21,74** | **410,19** | **455** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi lada pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebanyak 0,87 ton atau sekitar 4,17 %. Produksi lada tahun 2021 mencapai 21,74 ton dari luas areal tanam 81 ha dan luas panen 53 ha dengan tingkat produktivitas 410,19 kg/ha. Adapun potensi tanaman lada per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dari luas tanam seluas 63 ha dan luas panen 40 ha, mampu mencapai produksi sebanyak 17,47 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 436,75 kg/ha. Adapun wujud produksi dari tanaman lada berpa biji lada.

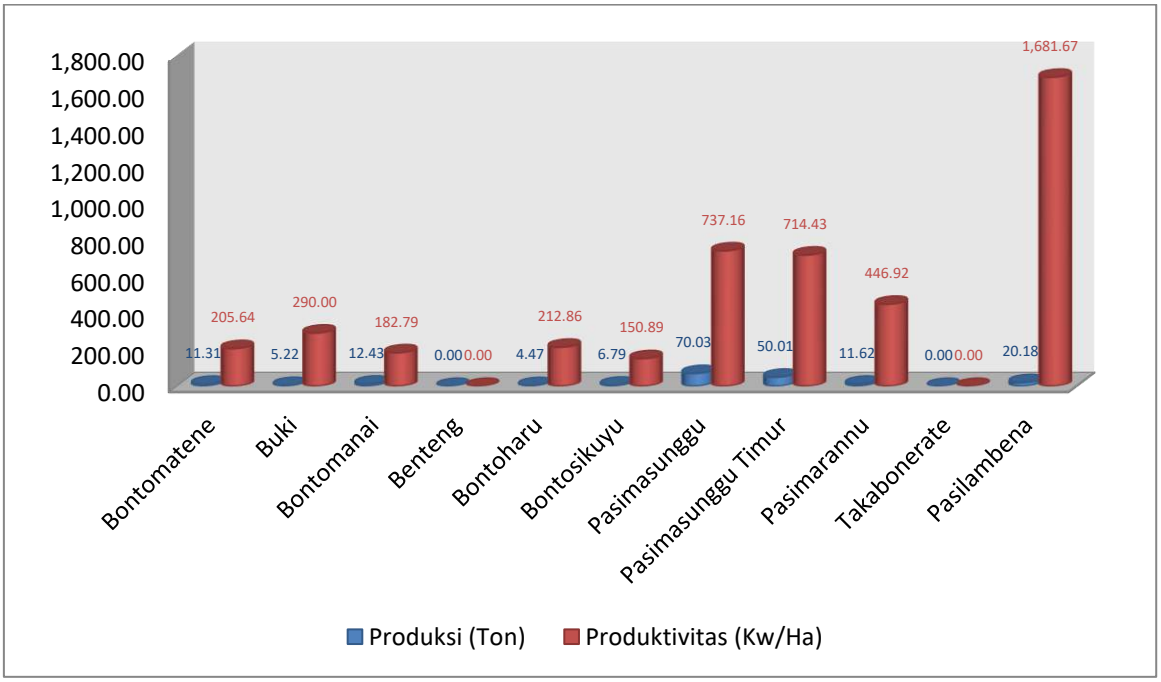
7. Kakao

## Perkembangan Kakao Tahun 2018 s/d Tahun 2021

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **616,00** | **543,00** | **165,92** | **306** |
| 2. | 2019 | **591,00** | **465,00** | **165,06** | **355** |
| 3. | 2020 | **554,00** | **410,00** | **180,60** | **440** |
| 4. | 2021 | **553,00** | **410,00** | **192,06** | **468,44** |

## Potensi Kakao menurut Kecamatan Tahun 2021

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 85,00 | 55,00 | 11,31 | 205,64 | 180 |
| 2. | Buki | 24,00 | 18,00 | 5,22 | 290,00 | 72 |
| 3. | Bontomanai | 96,00 | 68,00 | 12,43 | 182,79 | 185 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 30,00 | 21,00 | 4,47 | 212,86 | 113 |
| 6. | Bontosikuyu | 67,00 | 45,00 | 6,79 | 150,89 | 164 |
| 7. | Pasimasunggu | 111,50 | 95,00 | 70,03 | 737,16 | 119 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 77,00 | 70,00 | 50,01 | 714,43 | 99 |
| 9. | Pasimarannu | 33,50 | 26,00 | 11,62 | 446,92 | 26 |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | 28,00 | 12,00 | 20,18 | 1.681,67 | 59 |
| **Total** | | **553,00** | **410,00** | **192,06** | **468,44** | **1.017** |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kakao pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020sebanyak 11,46 ton atau sekitar 6,35 %. Produksi kakao tahun 2021 mencapai 192,06 ton dari luas areal tanam 553 ha dan luas panen 410 ha dengan tingkat produktivitas 468,44 kg/ha. Adapun potensi tanaman kakao per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Pasimasunggu. Dari luas tanam sekitar 111,50 ha dan luas panen 95 ha, mampu mencapai produksi sebanyak 70,03 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 737,16 kg/ha. Adapun wujud produksi dari tanaman ini berupa biji kering.

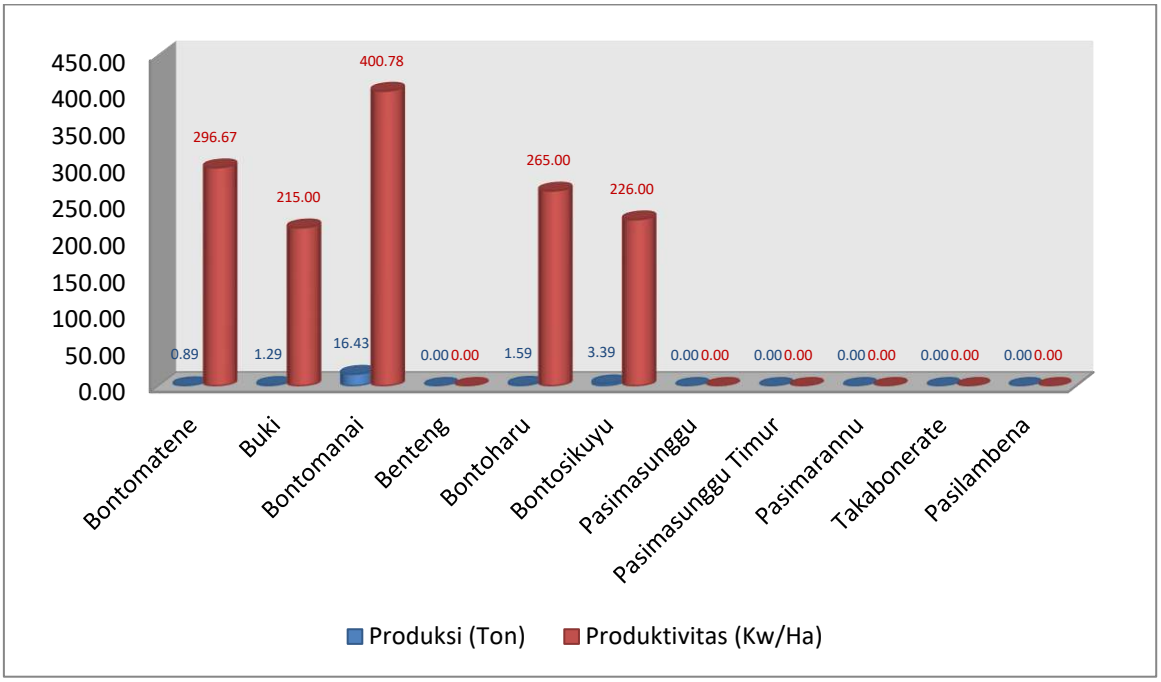
8. Vanili

**Perkembangan Vanili Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **62,00** | **26,00** | **11,55** | **444** |
| 2. | 2019 | **112,00** | **37,00** | **13,93** | **376** |
| 3. | 2020 | **113,00** | **71,00** | **17,94** | **253** |
| 4. | 2021 | **113,00** | **71,00** | **23,59** | **332,28** |

**Potensi Vanili menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 12,00 | 3,00 | 0,89 | 296,67 | 32 |
| 2. | Buki | 13,00 | 6,00 | 1,29 | 215,00 | 38 |
| 3. | Bontomanai | 51,00 | 41,00 | 16,43 | 400,78 | 50 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 11,00 | 6,00 | 1,59 | 265,00 | 14 |
| 6. | Bontosikuyu | 23,00 | 15,00 | 3,39 | 226,00 | 18 |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | - |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 2,00 | - | - | - | 7 |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | 1,00 | - | - | - | 2 |
| **Total** | | **113,00** | **71,00** | **23,59** | **332,28** | **161** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi vanili pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 5,65 ton atau sekitar 31,49 %. Produksi vanili tahun 2021 mencapai 23,59ton dari luas areal tanam 113 ha dan luas panen 71 ha dengan tingkat produktivitas 332,28 kg/ha. Adapun potensi tanaman vanili per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontomanai. Dari luas tanam sekitar 51 ha dan luas panen 41 ha, mampu mencapai produksi sebanyak 16,43 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 400,78 kg/ha. Adapun wujud produksinya berupa polong kering.

9. Kemiri

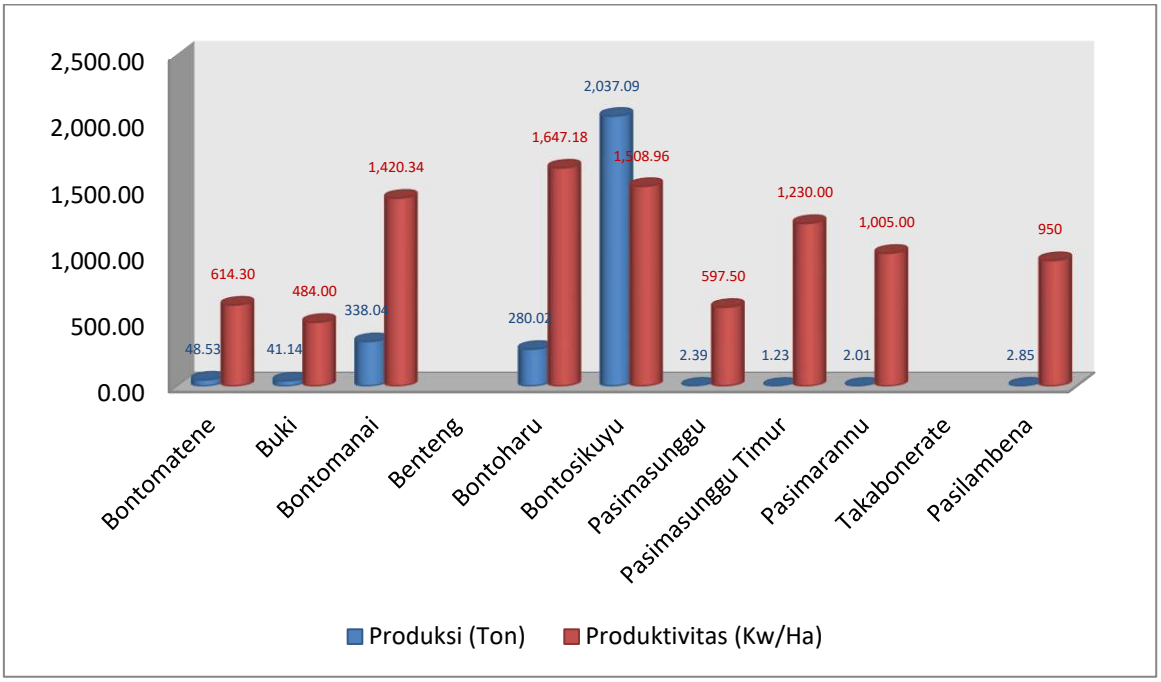
**Perkembangan Kemiri Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **2.008** | **1.918** | **2.729,97** | **1.423** |
| 2. | 2019 | **1.986** | **1.934** | **2.758,20** | **1.426** |
| 3. | 2020 | **1.986** | **1.932** | **2.676,03** | **1.385** |
| 4. | 2021 | **1.986** | **1.932** | **2.753,30** | **1.425,10** |

**Potensi Kemiri menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 82,00 | 79,00 | 48,53 | 614,30 | 117 |
| 2. | Buki | 88,00 | 85,00 | 41,14 | 484,00 | 192 |
| 3. | Bontomanai | 247,00 | 238,00 | 338,04 | 1.420,34 | 320 |
| 4. | Benteng | - | - | | | |
| 5. | Bontoharu | 183,00 | 170,00 | 280,02 | 1.647,18 | 230 |
| 6. | Bontosikuyu | 1.376,00 | 1.350,00 | 2.037,09 | 1.508,96 | 1.201 |
| 7. | Pasimasunggu | 4,00 | 4,00 | 2,39 | 597,50 | 30 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 1,00 | 1,00 | 1,23 | 1.230,00 | 4 |
| 9. | Pasimarannu | 2,00 | 2,00 | 2,01 | 1.005,00 | 39 |
| 10. | Takabonerate | - | - | | | |
| 11. | Pasilambena | 3,00 | 3,00 | 2,85 | 950,00 | 39 |
| **Total** | | **1.986** | **1.932** | **2.753,30** | **1.425,10** | **2.172** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kemiri pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun

2020sebanyak 77,27 ton atau sekitar 2,89 %. Produksi kemiri tahun 2021 sebanyak 2.753,30 ton dari luas areal tanam 1.986 ha dan luas panen 1.932 ha dengan tingkat produktivitas 1.425,10 kg/ha. Adapun potensi tanaman kemiri per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi terdapat di Kecamatan Bontosikuyu. Dari luas tanam sekitar 1.376 ha dan luas panen 1.350 ha, mampu mencapai produksi sebanyak 2.037,09 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 1.508,96 kg/ha.

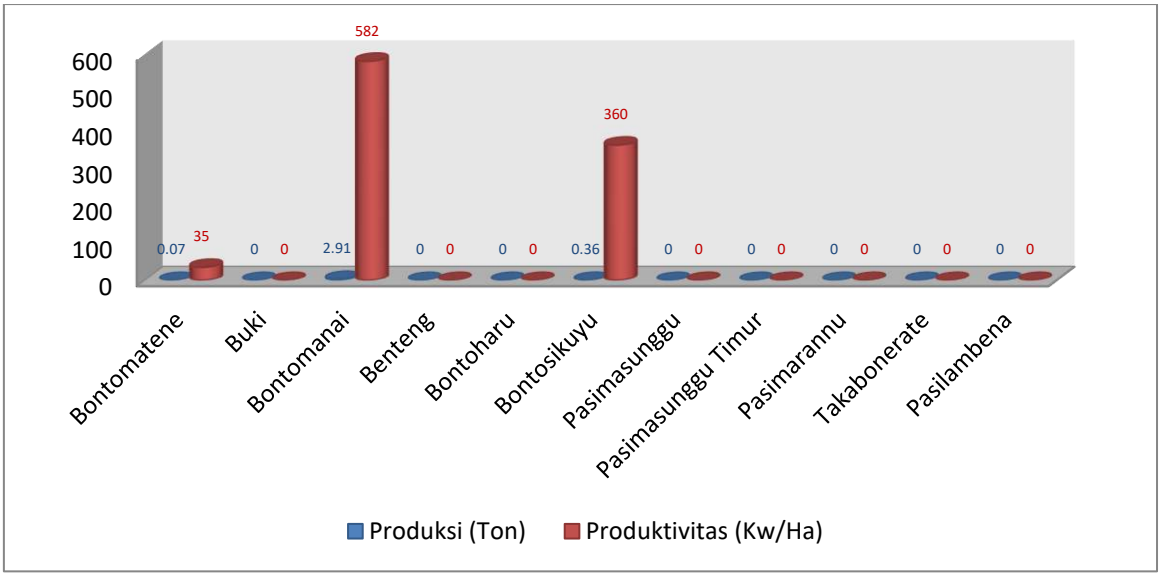
10. Kopi

**Perkembangan Kopi Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **9,00** | **8,00** | **1,33** | **166,00** |
| 2. | 2019 | **9,00** | **8,00** | **3,37** | **421,00** |
| 3. | 2020 | **9,00** | **8,00** | **3,34** | **418,00** |
| 4. | 2021 | **9,00** | **8,00** | **3,34** | **417,50** |

**Potensi Kopi menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 2,00 | 2,00 | 0,07 | 35,00 | 14 |
| 2. | Buki | - | - | - | - | |
| 3. | Bontomanai | 6,00 | 5,00 | 2,91 | 582,00 | 20 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | |
| 5. | Bontoharu | - | - | - | - | |
| 6. | Bontosikuyu | 1,00 | 1,00 | 0,36 | 360,00 | 74 |
| 7. | Pasimasunggu | - | - | - | - | |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | |
| **Total** | | **9,00** | **8,00** | **3,34** | **417,50** | **108** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kopi di tahun 2021 sama dengan jumlah produksi pada tahun 2020. Dimana jumlah produksinya sebanyak 3,34 ton. Sedangkan dari tingkat produktivitas mengalami penurunan sekitar 0,12 %. Adapun potensi tanaman kopi per Kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi kopi ada di Kecamatan Bontomanai. Dengan luas tanam 6 Ha dan luas panen 5 Ha, tanaman kopi di Kecamatan Bontomanai mampu mencapai produksi sebanyak 2,91 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 582 kg/ha. Adapun wujud produksi dari komoditas kopi ini berupa kopi berasan.

11. Asam Jawa

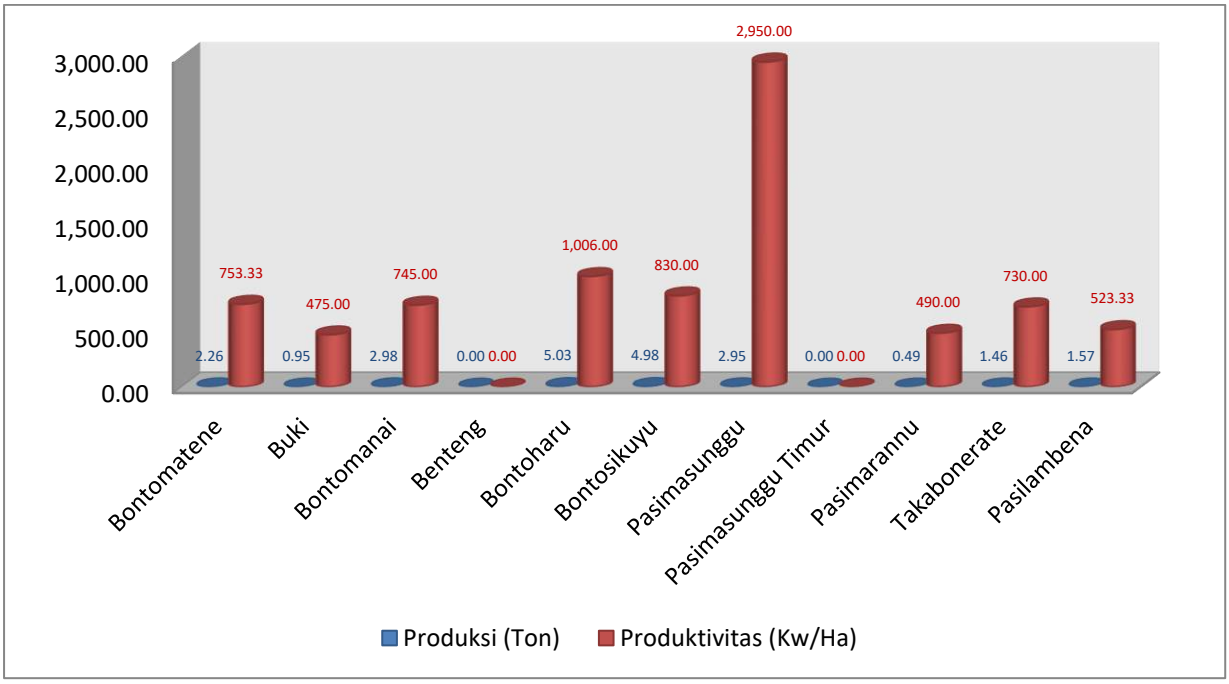
**Perkembangan Asam Jawa Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **30,50** | **23,00** | **8,50** | **370** |
| 2. | 2019 | **30,50** | **25,00** | **10,21** | **408** |
| 3. | 2020 | **30,50** | **29,00** | **20,00** | **690** |
| 4. | 2021 | **30,50** | **28,00** | **22,67** | **809,64** |

**Potensi Asam Jawa menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 3,00 | 3,00 | 2,26 | 753,33 | 121 |
| 2. | Buki | 2,00 | 2,00 | 0,95 | 475,00 | 16 |
| 3. | Bontomanai | 4,00 | 4,00 | 2,98 | 745,00 | 49 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Bontoharu | 5,00 | 5,00 | 5,03 | 1.006,00 | 52 |
| 6. | Bontosikuyu | 6,00 | 6,00 | 4,98 | 830,00 | 111 |
| 7. | Pasimasunggu | 3,00 | 1,00 | 2,95 | 2.950,00 | 10 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 1,00 | 1,00 | - | - | 4 |
| 9. | Pasimarannu | 1,50 | 1,00 | 0,49 | 490,00 | 10 |
| 10. | Takabonerate | 2,00 | 2,00 | 1,46 | 730,00 | 6 |
| 11. | Pasilambena | 3,00 | 3,00 | 1,57 | 523,33 | 11 |
| **Total** | | **30,50** | **28,00** | **22,67** | **809,64** | **390** |



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi asam jawa di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 2,67 ton atau sekitar 13,35 %. Jumlah produksi yang mencapai 22,67 ton dari luas tanam 30,50 ha dan luas panen sekitar 28 ha sehingga diperoleh produktivitas 809,64 kg/ha. Adapun potensi tanaman asam jawa per Kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi asam jawa ada di Kecamatan Bontoharu. Dengan luas tanam 5 Ha dan luas panen yang sama, tanaman asam jawa di Kecamatan Bontoharu mampu mencapai produksi sebanyak 5,03 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 1.006 kg/ha. Adapun wujud produksinya berupa biji kering.

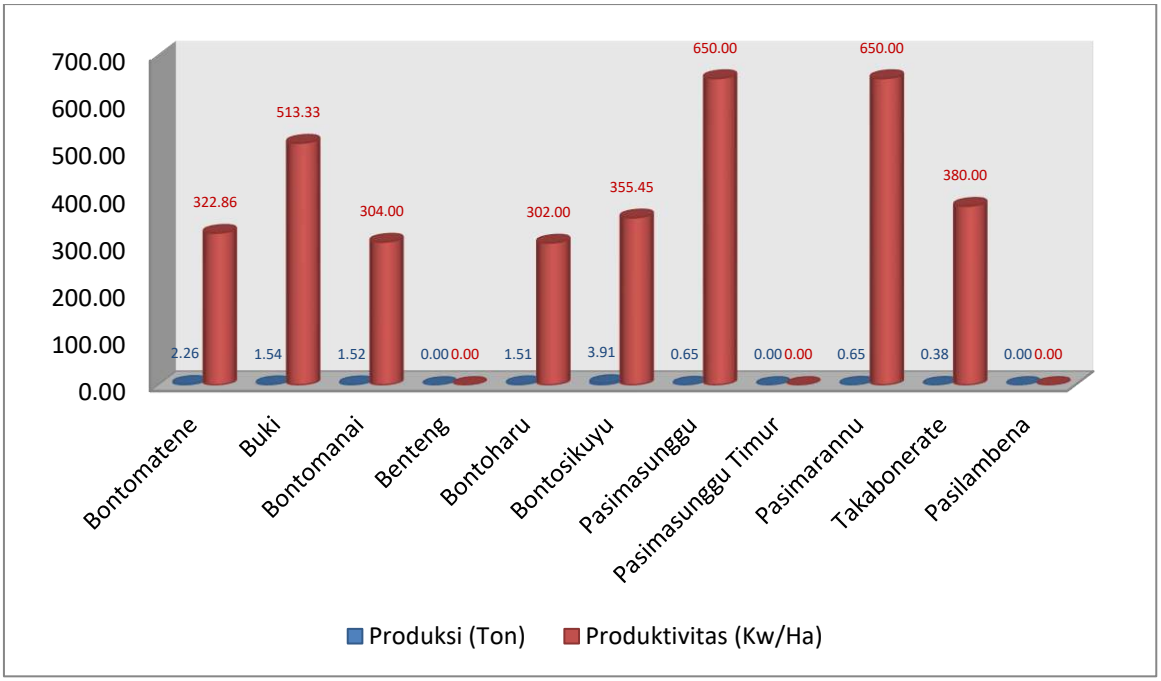
12. Kapok

**Perkembangan Kapok Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **34,00** | **34,00** | **7,21** | **212** |
| 2. | 2019 | **34,00** | **34,00** | **8,21** | **241** |
| 3. | 2020 | **36,00** | **34,00** | **12,12** | **356** |
| 4. | 2021 | **36,00** | **34,00** | **12,42** | **365,29** |

**Potensi Kapok menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 7,00 | 7,00 | 2,26 | 322,86 | 68 |
| 2. | Buki | 3,00 | 3,00 | 1,54 | 513,33 | 46 |
| 3. | Bontomanai | 5,00 | 5,00 | 1,52 | 304,00 | 29 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 5,00 | 5,00 | 1,51 | 302,00 | 81 |
| 6. | Bontosikuyu | 11,00 | 11,00 | 3,91 | 355,45 | 73 |
| 7. | Pasimasunggu | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 650,00 | 7 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | - | - | - | - | - |
| 9. | Pasimarannu | 3,00 | 1,00 | 0,65 | 650,00 | 6 |
| 10. | Takabonerate | 1,00 | 1,00 | 0,38 | 380,00 | 4 |
| 11. | Pasilambena | - | - | - | - | - |
| **Total** | | **36,00** | **34,00** | **12,42** | **365,29** | **314** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi kapok di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 0,30 ton atau sekitar 2,48 %. Jumlah produksi yang mencapai 12,42 ton dari luas tanam 36 ha dan luas panen 34 ha maka menghasilkan produktivitas 365,29 kg/ha. Adapun potensi tanaman kapok per kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi kapok ada di Kecamatan Bontosikuyu. Dengan luas tanam 11 Ha dan luas panen yang sama, tanaman kapok di Kecamatan Bontosikuyu mampu mencapai produksi sebanyak 3,91 ton dengan tingkat produktivitas mencapai 355,45 kg/ha. Adapun wujud produksinya berupa serat berbiji

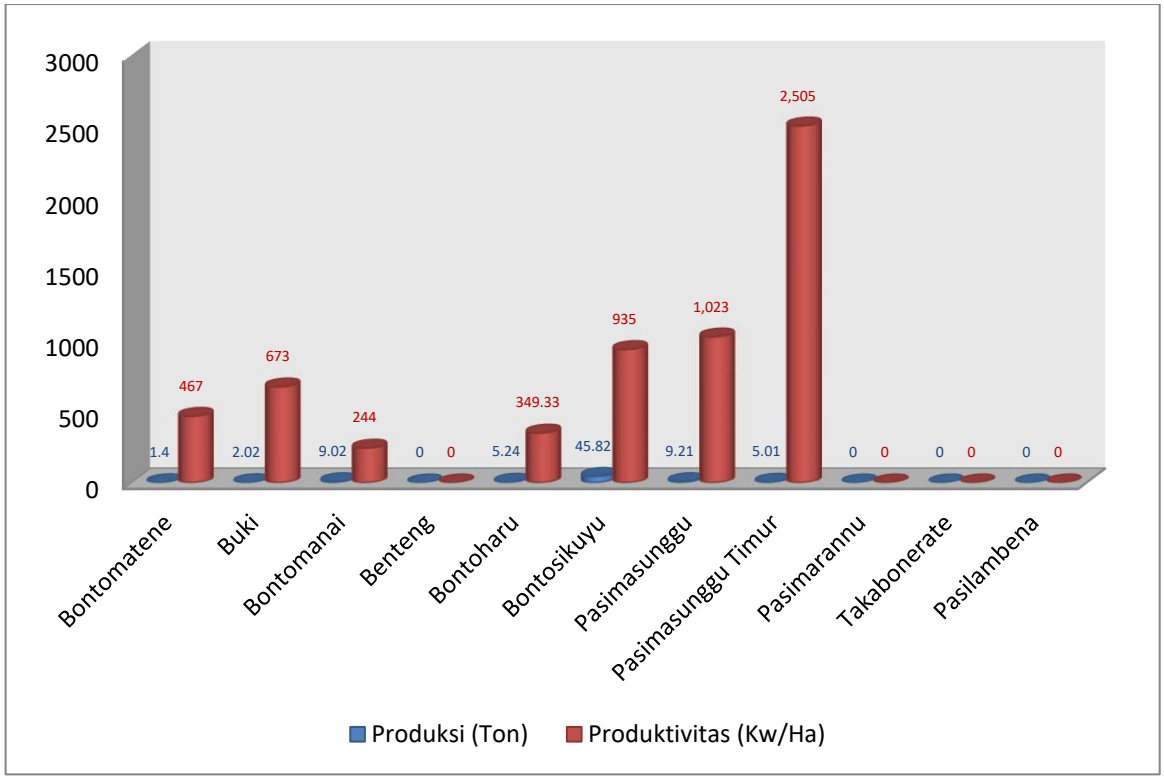
13. Aren

**Perkembangan Aren Tahun 2018 s/d Tahun 2021**

| No | Tahun | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018 | **34,00** | **34,00** | **7,21** | **212** |
| 2. | 2019 | **147,00** | **124,00** | **65,73** | **530** |
| 3. | 2020 | **151,00** | **118,00** | **77,72** | **659** |
| 4. | 2021 | **151,00** | **118,00** | **81,12** | **687,46** |

**Potensi Aren menurut Kecamatan Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 4,00 | 3,00 | 0,79 | 263,33 | 8 |
| 2. | Buki | 4,00 | 3,00 | 2,02 | 673,33 | 16 |
| 3. | Bontomanai | 43,00 | 37,00 | 9,02 | 243,78 | 152 |
| 4. | Benteng | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontoharu | 20,00 | 15,00 | 9,19 | 612,67 | 72 |
| 6. | Bontosikuyu | 54,00 | 49,00 | 45,88 | 936,33 | 188 |
| 7. | Pasimasunggu | 15,00 | 9,00 | 9,21 | 1.023,33 | 37 |
| 8. | Pasimasunggu Timur | 6,00 | 2,00 | 5,01 | 2.505,00 | 20 |
| 9. | Pasimarannu | - | - | - | - | - |
| 10. | Takabonerate | - | - | - | - | - |
| 11. | Pasilambena | 5,00 | - | - | - | 12 |
| **Total** | | **151,00** | **118,00** | **81,12** | **687,46** | **505** |




Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah produksi aren di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 3,40 ton atau sekitar 4,37 %. Jumlah produksi yang

mencapai 81,12 dari luas tanam 151 ha dan luas panen 118 ha sehingga menghasilkan produktivitas 687,46 kg/ha. Adapun potensi tanaman aren per Kecamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi aren ada di Kecamatan Bontosikuyu. Dengan luas tanam 54 ha dan luas panen 49 ha, tanaman aren di Kecamatan Bontosikuyu mampu mencapai produksi sebanyak 45,88 ton dengan tingkat produktivitas yang mencapai 936,33 kg/ha. Adapun wujud produksinya berupa gula merah.

## D. Potensi Peternakan

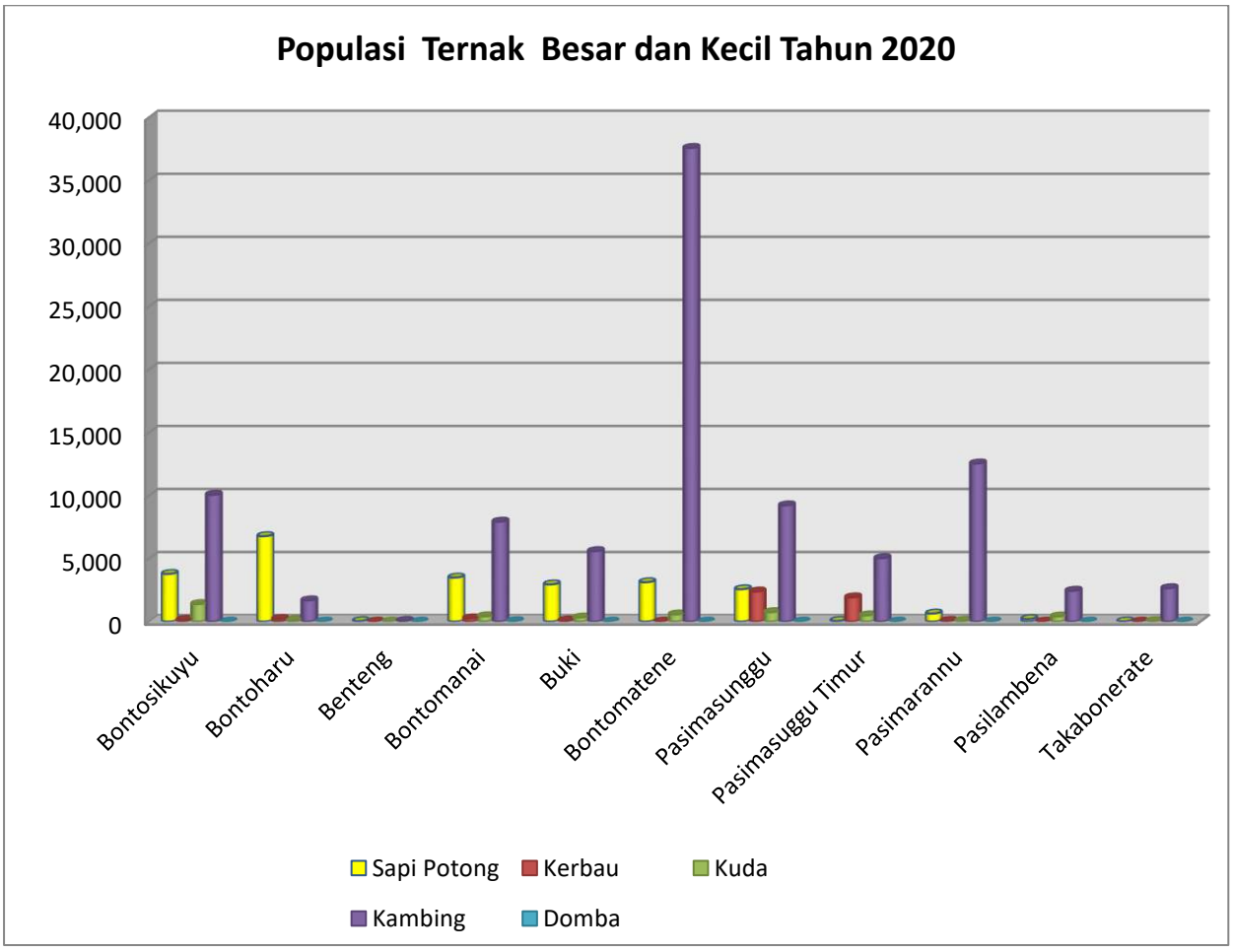
1. Pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat permunian Sapi Bali

- Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana pendukung dalam mengembangkan pusat pemurnian sapi bali terus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2016 dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti ternak sapi bali, kandang, tempat penggiringan ternak (*gan way)* dan pada tahun 2017 telah dibangun kandang penanganan ternak dan sarana air. Tahun 2018 telah dibangun pagar, pos jaga dan jalan tani. Tahun 2019 dilaksanakan pemagaran areal/ lokasi instalasi perbibitan ternak, paddock sebagai kandang penanganan ternak, pembangunan JIAT sebagai sumber air untuk penanganan ternak dan pengadaan jolloro untuk transport alat dan bahan untuk pengembangan ternak. Pada tahun 2021 telah dilakukan pembangunan pagar pembatas ranch di Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu berupa pemasangan pagar kawat duri tinggi 1,8 meter dan panjang 171,04 meter dengan pemasangan pintu pagar sebanyak 2 buah. Namun tidak dipungkiri bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena keterbatasan anggaran.

2. Populasi Ternak Besar dan Ternak Kecil

**Populasi dan Jenis Ternak Tahun 2021**

| No | Kecamatan | Jenis Ternak | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sapi Potong | Kerbau | Kuda | Kambing | Domba |
| 1. | Bontosikuyu | 3.787 | 139 | 1.392 | 10.059 | - |
| 2. | Bontoharu | 6.779 | 213 | 123 | 1.687 | - |
| 3. | Benteng | 44 | - | - | 58 | - |
| 4. | Bontomanai | 3.497 | 255 | 425 | 7.928 | 32 |
| 5. | Buki | 2.955 | 93 | 328 | 5.595 | - |
| 6. | Bontomatene | 3.127 | 5 | 569 | 37.571 | - |
| 7. | Pasimasunggu | 2.573 | 2.391 | 751 | 9.223 | - |
| 8. | Pasimasuggu Timur | 56 | 1.927 | 497 | 5.036 | - |
| 9. | Pasimarannu | 644 | 60 | 64 | 12.542 | - |
| 10. | Pasilambena | 205 | - | 411 | 2.452 | - |
| 11. | Takabonerate | 21 | - | 41 | 2.653 | - |
| | **Total** | **23.688** | **5.083** | **4.601** | **94.804** | **32** |

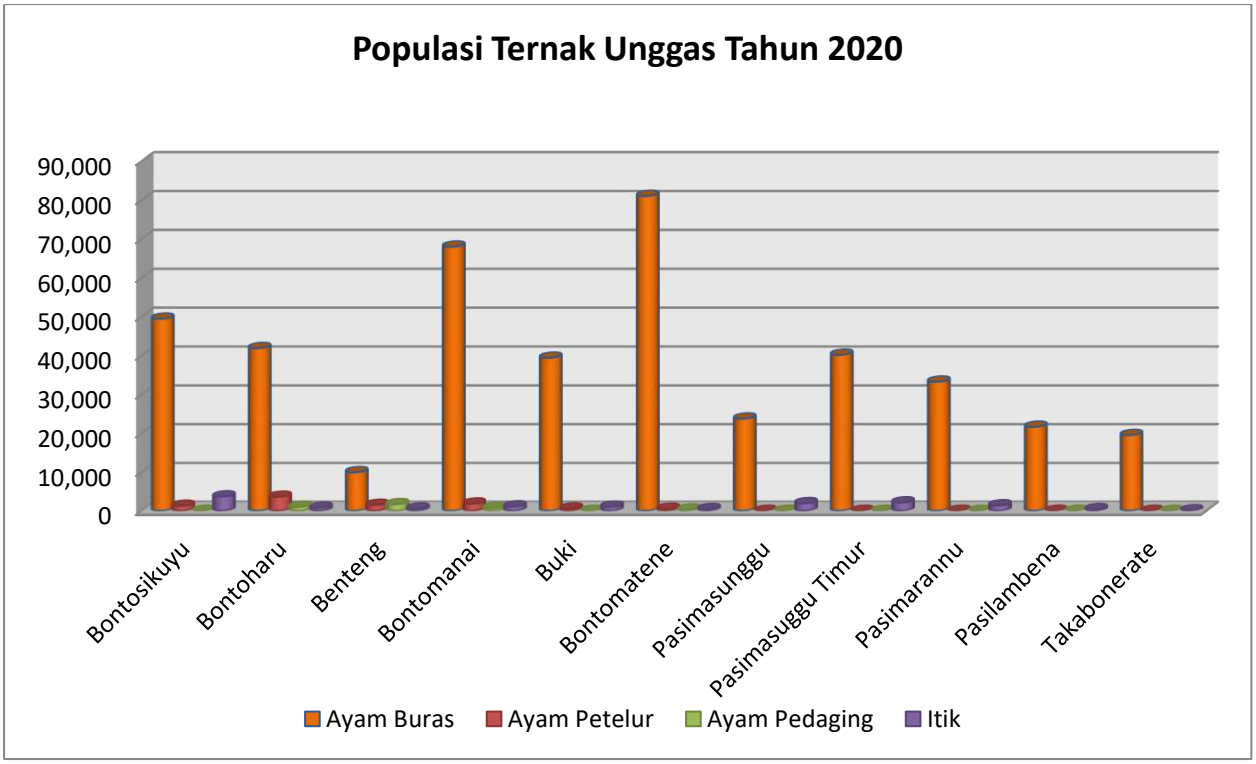


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi sapi potong pada tahun 2021tertinggi ada di Kecamatan Bontoharu yaitu mencapai 6.779 ekor dari total keseluruhan sapi potong yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang mencapai 23.688 ekor. Sedangkan untuk kerbau, populasi terbesar ada di Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 2.391 ekor. Populasi kuda terbanyak ada di Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 1.392 ekor. Populasi kambing terbanyak ada di kecamatan Bontomatene yang mencapai 37.571 ekor dan yang terakhir untuk populasi domba hanya terdapat di kecamatan Bontomanai sebanyak 32 ekor.

4. Populasi Ternak Unggas

Populasi dan Jenis Ternak Unggas Tahun 2021

| No | Kecamatan | Jenis Unggas | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ayam Buras | Ayam Petelur | Ayam Pedaging | Itik |
| 1. | Bontosikuyu | 49.508 | 1.309 | - | 3.717 |
| 2. | Bontoharu | 41.948 | 3.632 | 1.063 | 816 |
| 3. | Benteng | 9.968 | 1.540 | 1.718 | 604 |
| 4. | Bontomanai | 68.053 | 1.878 | 724 | 1.146 |
| 5. | Buki | 39.459 | 609 | - | 1.066 |
| 6. | Bontomatene | 81.093 | 548 | 366 | 484 |
| 7. | Pasimasunggu | 23.801 | - | - | 1.978 |
| 8. | Pasimasuggu Timur | 40.218 | - | - | 2.178 |
| 9. | Pasimarannu | 33.310 | - | - | 1.418 |
| 10. | Pasilambena | 21.687 | - | - | 448 |
| 11. | Takabonerate | 19.545 | - | - | 139 |
| | **Total** | **428.589** | **9.516** | **3.871** | **13.994** |




Dari tabel diatas dapat dilihat bahwapopulasi untuk ternak unggas jenis ayam buras banyak terdapat di kecamatan Bontomatene sekitar 76.762 ekor, populasi tertinggi ayam petelurada di kecamatan Bontomanai sebanyak 4.387 ekor, populasi ayam pedaging di kecamatan Bontoharusebanyak 8.672 ekor dan populasi itik banyak terdapat di kecamatan Bontosikuyu sebanyak 5.128 ekor. Ternak unggas jenis ayam buras adalah yang terbanyak populasinya dari keseluruhan jenis ternak unggas yang mencapai 425.185 ekor.

Perkembangan Populasi ternak dari tahun 2016 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perkembangan Populasi Ternak (ekor) tahun 2016 – 2021

| No. | Jenis Ternak | Jumlah Populasi ( tahun) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Sapi Potong | 18.060 | 18.894 | 19.996 | 21.823 | 23.528 | 23.688 |
| 2. | Kerbau | 4.674 | 4.648 | 4.727 | 4.847 | 4.974 | 5.083 |
| 3. | Kuda | 3.856 | 3.869 | 3.975 | 4.108 | 4.293 | 4.601 |
| 4. | Kambing | 81.465 | 80.089 | 86.730 | 90.582 | 97.204 | 94.804 |
| 5. | Domba | 46 | 56 | 41 | 35 | 32 | 32 |
| 6. | Ayam Buras | 271.014 | 270.111 | 315.621 | 285.766 | 425.174 | 428.589 |
| 7. | Ayam Ras Pedaging | 8.968 | 12.027 | 9.019 | 11.030 | 15.116 | 3.871 |
| 8. | Ayam Ras Petelur | 13.371 | 16.770 | 17.226 | 15.897 | 20.818 | 9.516 |
| 9. | Itik | 6.886 | 9.525 | 8.240 | 7.643 | 17.521 | 13.994 |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang terdiri atas sapi potong, kerbau, kuda dan kambing dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Untuk tahun 2021 populasi keempat jenis ternak diatas juga mengalami peningkatan dari tahun 2020. Dimana untuk sapi potong peningkatannya sebanyak 160 ekor atau sekitar 0,68 %, kerbau mengalami peningkatan sebanyak 109 ekor atau sekitar 2,14%. Untuk populasi ternak kuda mengalami peningkatan sebanyak 308 ekor atau sekitar 6,69%. Adapun ternak kambing populasinya menurun sebanyak 2.400 ekor atau sekitar 2,53%.Sedangkan untuk domba tidak mengalami perubahan yaitu 32 ekor.

Ternak unggas pada tahun 2021 rata-rata mengalami penurunan populasi kecuali ternak ayam buras mengalami peningkatan populasi. Terjadinya penurunan populasi ayam ras pedaging dikarenakan tidak adanya restocking ayam pedaging di tahun 2021 akibat pandemi

dimana peternakan ayam pedaging lesu, meskipun permintaan/demand akan daging ayam meningkat. Menurunnya populasi ini juga disebabkan karena adanya kenaikan harga pakan ayam sehingga peternak tidak melakukan restocking.

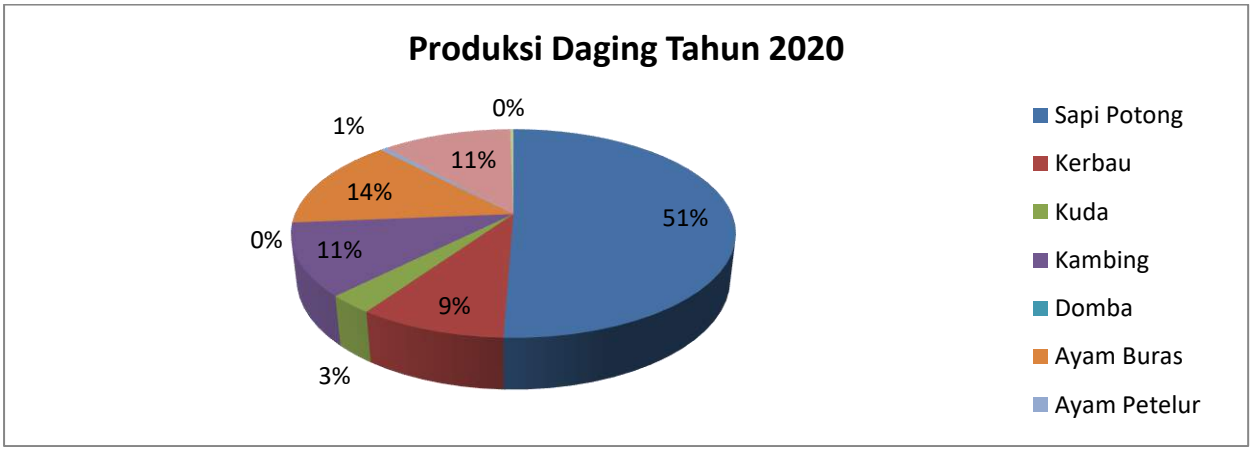
5. Produksi Daging dan Telur

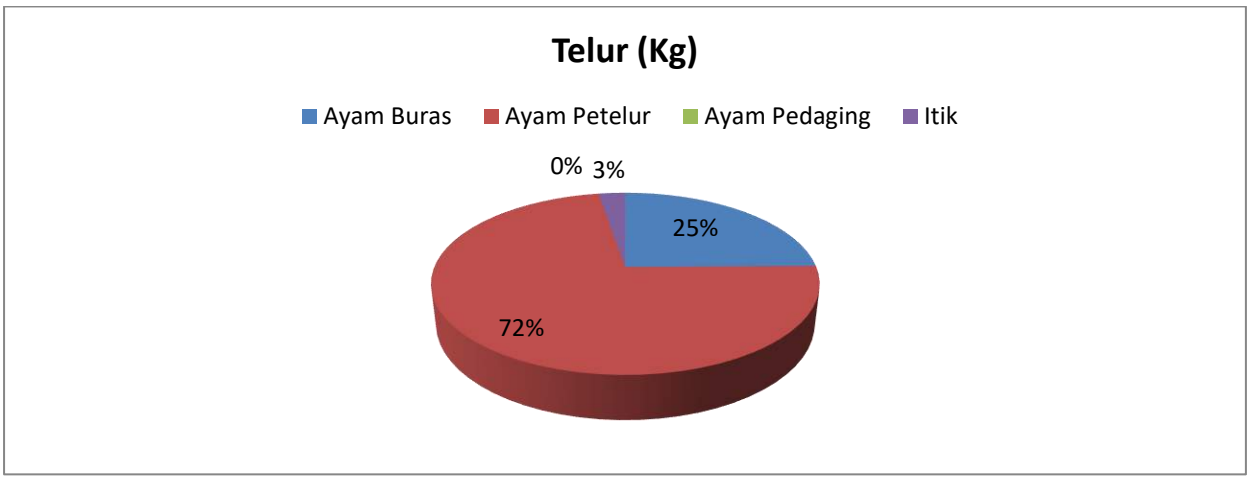
**Produksi Daging dan Telur Tahun 2020**

| No | Jenis Ternak | Produk Ternak | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Daging | Karkas | Jeroan | Telur (Kg) | Telur (Butir) |
| 1. | Sapi Potong | 201.732 | 157.603 | 44.127 | - | - |
| 2. | Kerbau | 54.957 | 42.935 | 12.022 | - | - |
| 3. | Kuda | 16.050 | 13.375 | 2.675 | - | - |
| 4. | Kambing | 27.767 | 22.213 | 5.553 | - | - |
| 5. | Domba | 38 | 31 | 8 | - | - |
| 6. | Ayam Buras | 60.453 | 54.957 | 5.496 | 4.680.219 | 275.307 |
| 7. | Ayam Petelur | 16.270 | 14.791 | 1.466 | 1.707.345 | 113.823 |
| 8. | Ayam Pedaging | | 59.788 | 6.294 | - | - |
| 9. | Itik | 888 | 807 | 86 | 1.123.770 | 112.377 |

**Produksi Daging dan Telur Tahun 2021**

| No | Jenis Ternak | Produk Ternak | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Daging | Karkas | Jeroan | Telur (Kg) | Telur (Butir) |
| 1. | Sapi Potong | 233.992 | 282.806 | 51.186 | - | - |
| 2. | Kerbau | 41.862 | 32.705 | 9.157 | - | - |
| 3. | Kuda | 13.200 | 11.000 | 2.200 | - | - |
| 4. | Kambing | 51.776 | 213.777 | 21.378 | - | - |
| 5. | Domba | - | - | - | - | - |
| 6. | Ayam Buras | 65.646 | 59.679 | 5.968 | 102.115 | 729.681 |
| 7. | Ayam Petelur | 2.747 | 2.498 | 250 | 298.660 | 3.337.034 |
| 8. | Ayam Pedaging | 51.989 | 47.263 | 4.726 | | |
| 9. | Itik | 1.304 | 1.186 | 119 | 10.913 | 125.289 |






Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan produksi daging dan telur pada tahun 2020 dan tahun 2021 dimana untuk ternak besar dan kecil produk ternak tertinggi berasal dari ternak sapi potong, diikuti oleh kambing, kemudian kerbau dan terakhir ternak kuda. Adapun untuk ternak unggas, produk ternak dari daging, karkas dan jeroan untuk tahun 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dimana produk ternak dari ayam buras menduduki peringkat teratas. Sedangkan produk ternak tertinggi berupa telur dihasilkan oleh ayam ras petelur sekitar 298.660 kg atau setara 3.337.034 butir.

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak adalah salah satu bagian dari manajemen pelayanan kesehatan hewan, merupakan program pemerintah dalam upayanya untuk memberikan jaminan terhadap status kesehatan ternak sebagai prasyarat untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan mewujudkan kesiapsiagaan terhadap munculnya kejadian penyakit ternak baik yang menular khususnya yang dapat menular kepada manusia (zoonosis) ataupun tidak, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang tepat sasaran dalam mewujudkan pencapaian status kesehatan ternak yang dapat meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dalam rangka peningkatan pencapaian populasi ternak skala rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam waktu yang akan datang.

Pelayanan Kesehatan Hewan (pengawasan, pengobatan dan pencatatan penyakit hewan) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan di 11 Kecamatan. Target sasaran pelayanan kesehatan hewan adalah ternak masyarakat, kelompok ternak, kemitraan dan hewan kesayangan. Jenis kegiatan yang di laksanakan yaitu memberikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan kepada hewan dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi. Metode yang diterapkan yaitu pelayanan aktif, semi aktif dan pelayanan pasif pada masyarakat. Pelayanan Pasif adalah pelayanan yang dilakukan dimana pemilik hewan membawa hewan ke PUSKESWAN. Pelayanan semi aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Petugas dengan cara mendatangi lokasi setelah mendapatkan laporan dari pemilik hewan. Pelayanan aktif adalah pelayanan yang dilakukan oleh Petugas di tempat Pelayanan Kesehatan Hewan atau kelompok ternak pada lokasi tertentu. Hal ini sejalan dengan program inovasi yang telah diluncurkan oleh Bidang Peternakan yaitu POSTER TANADOANG.

## E. Potensi Ketahanan Pangan

Tingkat ketahanan pangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam mengetahui tingkat pencapaian sasaran berkurangnya penduduk miskin. Karena ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercerm in dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.

Pembangunan pangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan urusan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian. Sehingga diperlukan upaya dan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat ditunda, khususnya dari

sektor pertanian berupa ketahanan pangan yang merupakan syarat utama untuk mencapai derajat kesehatan dan kesejahteraan.

Untuk mencapai ketahanan pangan, maka diperlukan ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitas sehari-hari sepanjang waktu. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain, yang berfungsi menjamin pasokan pangan dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang berdasarkan sumbangan energinya baik secara absolute maupun relative terhadap total energy penyediaan atau konsumsi pangan penduduk baik kualitas, kuantitas maupun keberagamannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek social, ekonomi, agama dan cita rasa.

Adapun situasi konsumsi dan keragaman pangan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan konsumsi Energi dan Protein serta besarnya skor PPH dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .22. Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2021

| Kelompok Pangan | Berat Pangan Gram/Kapita /Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kkal | % | %AKE*) | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH |
| Padi-padian | 356,7 | 1.465 | 66,7 | 68,1 | 0,5 | 33,3 | 34,1 | 25,0 | 25,0 |
| Umbi-umbian | 25,7 | 32 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 0,7 |
| Pangan hewani | 141,7 | 195 | 8,9 | 9,1 | 2,0 | 17,8 | 18,2 | 24,0 | 18,2 |
| Minyak dan Lemak | 23,7 | 212 | 9,7 | 9,9 | 0,5 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 4,9 |
| Buah/Biji Berminyak | 7,9 | 42 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kacang-kacangan | 10,9 | 29 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 10,0 | 2,7 |
| Gula | 27,0 | 99 | 4,5 | 4,6 | 0,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,3 |
| Sayur dan Buah | 178,5 | 85 | 3,9 | 3,9 | 5,0 | 19,3 | 19,7 | 30,0 | 19,7 |
| Lain-lain | 71,9 | 37 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - |
| Total | | 2.299 | 100,0 | 106,9 | | 84,3 | 90,1 | 100,0 | 74,6 |

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa situasi konsumsi dan keragaman pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan konsumsi energy dan protein diperoleh PPH sebesar 74,6 %.

Ini menunjukkan bahwa konsumsi padi-padian masih mendominasi dimana skor PPHnya setara dengan skor maksimal.

Sedangkan kelompok sayur dan buah masih kurang dimana skor maksimal 30 tetapi hanya tercapai 19,7. Demikian pula untuk kelompok pangan hewani masih kurang dari skor yang diharapkan dimana skor maksimal 24,0 tetapi hanya mencapai 18,2.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar belum memenuhi criteria " Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman".

Berdasarkan tingkat ketersediaan pangan untuk bahan makanan Kabupaten Kepulauan Selayar menurut analisa Neraca Bahan Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Ketersediaan Pangan (Kg)

| Jenis Bahan Makanan | Perubahan Stoc | Produksi | Impor | Ekspor | Penyediaan Dalam Daerah | Pakan | Bibit | Tercecer | Bahan Makanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepung Gandum | 0 | 0 | 3.630.600 | 0 | 3.630.600 | 0 | 0 | 10.529 | 3.620.071 |
| Gabah | 0 | 26.490.000 | 0 | 0 | 26.490.000 | 529.800 | 205.660 | 1.335.096 | 0 |
| Beras | (148.795) | 15.144.939 | 3.448.867 | 659.533 | 18.083.068 | 30.741 | 0 | 452.077 | 17.4600.250 |
| Jagung | 0 | 11.432.100 | 0 | 0 | 11.432.100 | 8.002.470 | 36.100 | 571.605 | 2.821.925 |
| Jagung Muda | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Ubi Jalar | 0 | 199.150 | 615.220 | 0 | 814.370 | 16.287 | 0 | 81.437 | 716.646 |
| Ubi Kayu | 0 | 3.334.960 | 0 | 0 | 3.334.960 | 66.699 | 0 | 71.035 | 3.197.226 |
| Gula Pasir | 0 | 0 | 1.564.630 | 0 | 1.564.630 | 0 | 0 | 15.333 | 1.549.297 |
| Gula Mangkok | 0 | 81.120 | 235.300 | 0 | 316.420 | 0 | 0 | 0 | 316.420 |

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan beras yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Kepulauan Selayar setelah di ekspor dan menerima impor dari daerah lain tersisa jadi bahan makanan sebesar 17.600.250kg. Jumlah ketersediaan untuk dikonsumsi adalah 128,40 kg/kap/tahun, angka ini dinilai mencukupi karena standar kebutuhan konsumsi rill

sebesar 114,1 kg/kap/tahun. Sedangkan jumlah ketersediaan jagung sebanyak 2.821.925 kg, dengan ketersediaan jagung untuk dikonsumsi sebesar 20,59kg/kap/tahun dan sudah memenuhi standar kebutuhan konsumsi rill sebesar 10,8 kg/kap/tahun.

Selanjutnya perkembangan ketersediaan 149nergy dan protein serta lemak yang terkandung didalam bahan makanan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein
Tahun 2012 – 2021

| TAHUN | ENERGI | PROTEIN | LEMAK |
|---|---|---|---|
| | Ketersediaan (kkal/kap/hari) | Ketersediaan (kkal/kap/hari) | Ketersediaan (kkal/kap/hari) |
| 2012 | 2.880 | 110,17 | 71,93 |
| 2013 | 2.767 | 102,11 | 41,82 |
| 2014 | 2.919 | 110,72 | 53,19 |
| 2015 | 2.933 | 100,41 | 99,16 |
| 2016 | 3.036 | 99,23 | 99,64 |
| 2017 | 3,039 | 90,44 | 92,77 |
| 2018 | 3.182 | 94,39 | 94,20 |
| 2019 | 3,281 | 94,78 | 105,52 |
| 2020 | 3.118 | 95,32 | 105,70 |
| 2021 | 6.552 | 204,97 | 203,67 |

Data di atas menunjukkan ketersediaan energi tahun 2021 sebanyak 6.552 kkal/kap/hari atau sebesar 273% dari standar nasional ketersediaan energy yaitu 2.400 kkal/kap/hari. Adapun ketersediaan energy untuk bahan pangan nabati sebesar 2.993 kkal/kap/hari dan ketersediaan energy untuk bahan pangan hewani sebesar 304 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein sebesar 204,97 gram/kap/hari atau sebesar 325,34 % dari standar nasional ketersediaan protein sebesar 63 gram/kap/hari. Ketersediaan protein untuk bahan pangan nabati sebesar 65,64 gram/kap/hari dan ketersediaan protein untuk bahan pangan hewani sebesar 36,68 gram/kap/hari. Hal ini menjelaskan bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 sudah melebihi kebutuhan penduduk secara keseluruhan.

Selanjutnya ketersediaan data informasi harga meliputi data primer (wawancara) dan data sekunder pada 10 pasar kecamatan dan dilakukan oleh 10 orang petugas yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas. Komoditas yangdipantau meliputi: beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, daging sapi murni, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, minyak goreng, terigu, cabe, bawang putih dan bawang merah.

Pengumpulan data dilakukan oleh petugas di setiap lokasi pasar kecamatan untuk memantau perkembangan harga, pasokan dan akses terhadap 8 (delapan) komoditi pangan strategis secara rutin. Sehinggahasil analisa pemantauan/pengumpulan data dan informasi perkembangan harga pangan tingkat konsumen serta coefisien varian (CV) selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 25. Stabilitas Harga Pasar tahun 2021

| Bulan | Minggu | Beras (Kg) | Bawang Merah (Kg) | Daging Sapi (Kg) | Daging Ayam (Kg) | Telur Ayam Ras (Kg) | Minyak Goreng (Liter) | Gula Pasir (Kg) | Cabe Merah Besar (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 1 | 10.000 | 35.000 | 110.000 | 37.000 | 28.000 | 16.000 | 16.000 | 45.000 |
| | 2 | 10.000 | 35.000 | 110.000 | 36.000 | 25.000 | 16.000 | 15.000 | 48.000 |
| | 3 | 10.200 | 30.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | 45.000 |
| | 4 | 10.200 | 33.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 16.000 | 15.000 | 40.000 |
| Februari | 5 | 10.200 | 33.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 6 | 10.200 | 29.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 38.000 |
| | 7 | 10.300 | 28.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 33.000 |
| | 8 | 10.200 | 30.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 38.000 |
| Maret | 9 | 10.200 | 30.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 50.000 |
| | 10 | 10.000 | 31.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 48.000 |
| | 11 | 10.000 | 30.000 | 110.000 | 33.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 42.000 |
| | 12 | 10.000 | 34.000 | 110.000 | 32.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 45.000 |
| April | 13 | 10.000 | 35.000 | 110.000 | 34.000 | 24.000 | 15.000 | 16.000 | 45.000 |
| | 14 | 10.000 | 35.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 43.000 |
| | 15 | 10.100 | 35.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 40.000 |
| | 16 | 10.000 | 35.000 | 120.000 | 36.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 42.000 |
| Mei | 17 | 9.800 | 35.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 14.000 | 15.000 | 45.000 |
| | 18 | 9.800 | 35.000 | 110.000 | 35.000 | 26.000 | 15.000 | 15.000 | 43.000 |
| | 19 | 9.800 | 35.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 38.000 |
| | 20 | 9.800 | 32.000 | 110.000 | 36.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 35.000 |
| Juni | 21 | 9.700 | 28.000 | 110.000 | 36.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 30.000 |
| | 22 | 9.800 | 27.000 | 110.000 | 35.000 | 24.000 | 14.000 | 15.000 | 30.000 |
| | 23 | 9.500 | 26.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 14.000 | 15.000 | 27.000 |
| | 24 | 9.400 | 25.000 | 110.000 | 36.000 | 25.000 | 14.000 | 15.000 | 25.000 |
| Juli | 25 | 9.800 | 28.000 | 110.000 | 35.000 | 25.000 | 15.000 | 16.000 | 35.000 |
| | 26 | 9.800 | 28.000 | 115.000 | 35.000 | 24.000 | 15.000 | 16.000 | 35.000 |
| | 27 | 9.800 | 25.000 | 120.000 | 36.000 | 23.000 | 15.000 | 16.000 | 35.000 |
| | 28 | 9.700 | 26.000 | 120.000 | 35.000 | 23.000 | 15.000 | 16.000 | 36.000 |
| Agustus | 29 | 9.800 | 24.000 | 110.000 | 33.000 | 24.000 | 15.000 | 17.000 | 35.000 |
| | 30 | 9.800 | 22.000 | 110.000 | 33.000 | 23.000 | 16.000 | 17.000 | 25.000 |
| | 31 | 9.800 | 26.000 | 110.000 | 32.000 | 23.000 | 16.000 | 16.000 | 25.000 |
| | 32 | 9.800 | 25.000 | 110.000 | 33.000 | 23.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 |

| Bulan | Minggu | Beras (Kg) | Bawang Merah (Kg) | Daging Sapi (Kg) | Daging Ayam (Kg) | Telur Ayam Ras (Kg) | Minyak Goreng (Liter) | Gula Pasir (Kg) | Cabe Merah Besar (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 33 | 9.700 | 25.000 | 110.000 | 35.000 | 22.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 |
| | 34 | 9.900 | 25.000 | 110.000 | 33.000 | 24.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 |
| | 35 | 10.000 | 25.000 | 110.000 | 33.000 | 23.000 | 16.000 | 17.000 | 15.000 |
| | 36 | 10.000 | 25.000 | 110.000 | 33.000 | 22.500 | 16.000 | 17.000 | 14.000 |
| Oktober | 38 | 9.800 | 28.000 | 110.000 | 33.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 |
| | 39 | 9.700 | 25.000 | 120.000 | 30.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 |
| | 40 | 9.700 | 27.000 | 120.000 | 31.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 |
| | 41 | 9.700 | 25.000 | 120.000 | 32.000 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 18.000 |
| November | 42 | 9.800 | 25.000 | 120.000 | 30.000 | 22.000 | 18.000 | 16.000 | 20.000 |
| | 43 | 9.700 | 25.000 | 120.000 | 30.000 | 21.000 | 18.000 | 16.000 | 23.000 |
| | 44 | 9.500 | 25.000 | 120.000 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 30.000 |
| | 45 | 9.200 | 25.000 | 120.000 | 30.000 | 19.000 | 22.000 | 16.000 | 35.000 |
| Desember | 46 | 9.300 | 25.000 | 120.000 | 32.000 | 22.000 | 21.000 | 15.000 | 38.000 |
| | 47 | 9.200 | 25.000 | 120.000 | 32.000 | 22.000 | 21.000 | 15.000 | 38.000 |
| | 48 | 9.300 | 35.000 | 120.000 | 34.000 | 23.000 | 21.000 | 15.000 | 40.000 |
| | 49 | 9.300 | 33.000 | 120.000 | 32.000 | 24.000 | 21.000 | 15.000 | 42.000 |
| Rata-Rata | | 9.819 | 28.625 | 113.021 | 33.729 | 23.667 | 16.083 | 15.813 | 33.396 |
| Standar deviasi | | 275,72 | 3.933,62 | 4.582,53 | 1.910,10 | 1.860,37 | 2.050,77 | 606,92 | 10.073,64 |
| CV (%) | | 3 | 14 | 4 | 6 | 8 | 13 | 4 | 30 |
| Target CV (%) | | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 25 |
| Capaian (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -55,02 | 100 | 79,34 |

Capaian Stabilitas harga 8 komoditas =
(100%+100%+100%+100%+100%+(-55,02%)+100%+79,34)/8 komoditas = 78

Koefisien variasi (CV) adalah perbandingan antara simpanan baku harga (STD) dengan harga rata-rata (average) di tingkat konsumen yang dinyatakan dengan persentase (%). Koefisien variasi harga pangan (beras, bawang merah, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah) digunakan untuk sebaran harga di tingkat konsumen pada suatu wilayah dan rata-rata harga. Harga beras ditingkat konsumen dikatakan stabil apabila CV<5%, harga bawang merah CV<25%, harga daging sapi CV<10%, daging ayam CV<10%, telur ayam ras < 10%, minyak goring <5%, gula pasir <5% dan cabe merah besar <25%.

a. Koefisien variasi harga beras

   Berdasarkan data panel harga pangan pada tabel di atas, rata-rata harga beras medium sebesar Rp. 9.819/kg. Sementara koefisien variasi harga beras mediaum ditingkat (eceran) adalah sebesar 3%. Kondisi tersebut mengindikasikan, bahwa harga beras medium ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien variasi harganya masih dibawah 5%.

b. Koefisien variasi harga bawang merah

   Berdasarkan data panel harga pangan pada tabel, rata-rata harga bawang merah sebesar Rp. 28.625/kg. Sementara koefisien variasi harga bawang merah ditingkat (eceran) adalah sebesar 14%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga bawang merah ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien variasi harganya dibawah 25%.

c. Koefisien variasi harga daging sapi

   Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui, rata-rata harga daging sapi sebsar Rp. 113.021/kg. Sementara koefisien variasi harga daging sapi ditingkat (eceran) adalah sebesar 4%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga daging sapi ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien harganya masih dibawah 10%.

d. Koefisien variasi harga daging ayam

   Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui bahwa rata-rata harga telur ayam ras sebesar Rp. 33.729/kg. Sementara koefisien variasi harga daging ayam ditingkat (eceran) adalah sebesar 6%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga daging ayam ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien variasi harganya masih dibawah 10%.

e. Koefisien variasi harga telur ayam ras

   Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui bahwa rata-rata harga telur ayam ras sebesar Rp. 23.667/kg. Sementara koefisien variasi harga telur ayam ras ditingkat (eceran) adalah sebesar 8%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga telur ayam ras ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien variasi harganya masih dibawah 10%.

f. Koefisien variasi harga minyak goreng

Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui bahwa rata-rata hargaminyak goreng sebesar Rp. 16.083/kg. Sementara koefisien variasi harga minyak goreng ditingkat (eceran) adalah sebesar 13%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga minyak goreng ditingkat konsumen relative tidak stabil, karena koefisien variasi harganya ditas 5%.

g. Koefisien variasi harga gula pasir

Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui bahwa rata-rata harga gula pasir sebesar Rp. 15.813/kg. Sementara koefisien variasi harga gula pasir ditingkat (eceran) adalah sebesar 4%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga gula pasir ditingkat konsumen relative stabil, karena koefisien variasi harganya dibawah 5%.

h. Koefisien variasi harga cabe merah besar

Berdasarkan data panel harga pangan dapat diketahui bahwa rata-rata harga cabe merah besar sebesar Rp. 33.396/kg. Sementara koefisien variasi harga cabe merah besar ditingkat (eceran) adalah sebesar 30%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga cabe merah besar ditingkat konsumen relative tidak stabil, karena koefisien variasi harganya diatas 25%.

Kemudian distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Pemantauan di setiap lokasi pasar kecamatan, terminal dan pelabuhan serta ditingkat pedagang grosir dan pedagang pengecer, untuk melihat kondisi pasokan pangan (jumlah pembelian/kulakan) apakah dalam kondisi cukup atau kurang; harga pangan (harga saat pembelian/kulakan) apakah naik atau stabil dan ketersediaan aktual pangan (stok komoditas pangan untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan) apakah cukup atau kurang.

Kegiatan Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan volume stok cadangan pangan dikelompok lumbung pangan untuk menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang menglami kerawanan pangan, meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam pengelolaan cadangan pangan dan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan. Adapun 8 kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diberdayakan dan sudah mendapatkan bantuan social serta dipantau dan dibina oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- LPM Labuang Biropa Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu
- LPM Rajuni Sejahtera Desa Rajuni Kecamatan Takaonerate
- LPM Minasa Sayang Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu.
- LPM Nusa Indah Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu
- LPM Padaidi Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur
- LPM Bina Sejahtera Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur
- LPM Damai Sejahtera Desa batang Kecamatan Takabonerate
- LPM Sumber Makmur Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu

## F. Potensi Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan

Sarana prasarana pertanian diadakan untuk menunjang kegiatan pertanian/perkebunan dan peternakan sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi.Adapun pengadaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan pada tahun 2021 ini meliputi pengadaan sarana dan prasarana pertanian berupa kawat duri, jarring pengaman kebun, bak fiber, handtraktor, handsprayer. Pengadaan sarana produksi pertanian dan perkebunan berupa pengadaan bibit tanaman berupa bibit

tanaman jeruk keprok, bibit tanaman pucuk merah. Bibit padi inbrida, bibit durian, bibit mangga, bibit rambutan, bibit lengkeng serta pengadaan pupuk, pestisida dan racun rumput.

Adapun pengadan prasarana pertanian meliputi pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi tani berpa pembangunan JIAT Dangkal, sumur tanah dangkal dan sumur tani yang merupakan pemanfaatan air permukaan (sungai, mata air) dimana lokasi yang bersangkutan mempunyai potensi air baik kuantitas dan kualitasnya.Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas air untuk mendukung komoditas tanaman pangan/hortikultura, sawah, perkebunan serta meningkatkan ketersediaan air sebagai suplai pada lahan tanaman pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Disamping itu juga diadakan pembangunan Jalan Usaha Tani yang memudahkan dan memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi produk pertanian/perkebunan.

## G. Potensi Penyuluhan Pertanian

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi pertanian/perkebunan/peternakan melaksanakan beberapa kegiatan yaitu : 1).Penyusunan Programa Penyuluhan. Programa penyuluhan merupakan rencana kegitan penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, baik itu pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Penyusunan programa penyuluhan ini menjadi acuan/pedoman di dalam pelaksanaan kerja-kerja penyuluh pertanian di masing-masing desa pada tahun berikutnya.2) Pengembangan Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. Pengembangan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian sangat dibutuhkan karena penyuluhan pertanian merupakan suatu proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya

lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.Dari kegiatan ini dihasilkan satu sistem informasi penyuluhan yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas kerja sesuai kriteria mutu yang telah ditetapkan. Penyuluh Pertanian yang bertugas di lapangan dituntut agar memiliki kemampuan untuk melakukan paling tidak tiga fungsi penyuluhan, yaitu mampu melakukan transfer teknologi (technology transfer), fasilitasi (facilitation) dan penasehat (advisory work); Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyuluh pertanian perlu menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian. Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, khususnya lembaga penyuluhan pertanian, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian (termasuk di dalamnya adalah para penyuluh pertanian) mampu membangun usaha dari sub sistem hulu, on farm, sampai dengan sub sistem hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam pembangunan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan petani agar mampu menjalin kemitraan usaha yang berorientasi pasar serta mampu menerapkan prinsip-prinsip agribisnis dalam manajemen usahanya. Pada tahun 2021 ada 10 BPP yang dibina dan dievaluasi. Pembinaan dan evaluasi BPP dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter tujuan didirikannya BPP tersebut.

Perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian sampai tahun 2021dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Data Kelembagaan Kelompok Tani Tahun 2022

| No | Kecamatan | Jumlah Kelompok Tani | | | Gapoktan | Jumlah Poktan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tanaman | Hortikultura | Perkebunan | | |

| | | Pangan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontomatene | 13 | 39 | 37 | 12 | 130 |
| 2. | Buki | 55 | 60 | 64 | 7 | 76 |
| 3. | Bontomanai | 2 | 4 | 14 | 10 | 107 |
| 4. | Benteng | 3 | 8 | 4 | 3 | 26 |
| 5. | Bontoharu | 31 | 41 | 41 | 8 | 94 |
| 6. | Bontosikuyu | 18 | 28 | 55 | 12 | 119 |
| 7. | Takabonerate | 21 | 5 | 0 | 3 | 26 |
| 8. | Pasimasunggu | 76 | 2 | 5 | 7 | 86 |
| 9 | Pasimasunggu Timur | 78 | 5 | 6 | 6 | 96 |
| 10 | Pasimarannu | 60 | 0 | 61 | 7 | 64 |
| 11 | Pasilambena | 21 | 5 | 16 | 6 | 42 |

5). Pembuatan Demplot. Demplot atau Demontration Plot merupakan suatu metode penyuluhan pertanian kepada petani, dengan cara membuat lahan percontohan, agar petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemontrasikan.Kegiatan ini bertujuan untuk memperlihatkan secara nyata kepada masyarakat tentang cara dan/atau hasil penerapan teknologi pertanian yang sangat menguntungkan. 6) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra dinas pertanian setempat, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan programa pada tiap-tiap tingkat administrasi pemerintahan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung pemberdayaan penyuluh pertanian yang meliputi pertemuan rutinseluruh penyuluh pertanian yang digunakan sebagai operasional pelaksanaan tugas sehari hari dilapangan. Dari pertemuan rutin seluruh penyuluh ini diharapakan sistem penyelenggaraan penyuluhan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara garis besar keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di tahun 2021 sepertipeningkatan produksi dan produktivitas pertanian/perkebunan, peningkatan populasi dan produk peternakan tidak terlepas dari adanya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan adanya kerjasama dari berbagai pihak, serta

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

**I. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.**

Pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui kegiatan:

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatannya yaitu :
   a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan.

      Lumbung pangan merupakan lembaga cadangan pangan di daerah perdesaan yang berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Adapun tujuan dari kegaiatan ini yaitu untuk meningkatkan volume persediaan/stok cadangan pangan di kelompok lumbung pangan, serta menjamin akses dan kecukupan pangan bagi anggotanya terutama yang mengalami kerawanan pangan, disamping itu dapat meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota kelompok dalam mengelolah cadangan pangan serta untuk meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan.

      Terdapat 8 (delapan) kelompok Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang diberdayakan dan sudah mendapatkan dana bantuan social yaitu kelompok lumbung pangan masyarakat Labuang Biropa Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu, LPM Rajuni Sejahtera Desa Rajuni Kecamatan Takaonerate, LPM Minasa Sayang Desa Ma'minasa Kecamatan Pasimasunggu, LPM Nusa Indah Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu, LPM Padaidi Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur, LPM Bina Sejahtera Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur, LPM Damai

Sejahtera Desa Batang Kecamatan Takabonerate, dan LPM Sumber Makmur Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu.

**II. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggali dan meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Adapun penjabaran program ini melalui kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan. Adapun sub kegiatannya yaitu :

  a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan. Kegiatan ini merupakan pemantauan harga komoditi unggulan pertanian yang berfluktuasi dari tingkat produsen, pengumpul besar dan tingkat eksportir. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mengoptimalisasi permintaan informasi harga pangan dan meningkatkan pengolahan informasi harga pasar dan laporan statistik pangan yang lebih akurat. Adapun penyediaan informasi harga pangan sedangkan untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan bertujuan untuk memberikan gambaran ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan disuatu daerah. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusun 1 laporan'dokumen Neraca Bahan Makanan.

  b. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan bertujuan untuk memantau dan menggambarkan perkembangan ketersediaan, kebutuhan dan harga pasar untuk 11 komoditas strategis yang dengan jenis komoditi yaitu beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng gula pasir, cabe rawit, cabe keriting, bawang merah dan bawang putih. Pemantauan ketersediaan dan harga pasar dilakukan setiap minggu dan tersusun 1 laporan ketersediaan dan harga untuk 11 komoditi strategis.

- Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatannya yaitu Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan meningkatkan pemberdayan masyarakat miskin melalui padat karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah rumah tangga miskin di 3 (tiga) kecamatan dan 10 (sepuluh) desa yaitu Desa Komba-Komba, Desa Lambego, Desa Bonerate, Desa Sambali pada Kecamatan Pasimarannu. Desa Garaupa, Desa Lembang Matene, Desa Garaupa Raya di Kecamatan Pasilambena dan Desa Kayuadi, Desa Nyiur Indah dan Desa Rajuni di Kecamatan Taka Bonerate.
- Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi. Sub kegiatannya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local. Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Tujuan dari kegiatan ini yaitu disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat dan produktif. Data kelompok pemanfaatan optimalisasi p ekarangan ini yaitu KWT Sejati Desa Barat lambongan Kecamatan Bontomatene, KWT Hijau Daun Desa Lalang Bata Kecamatan Buki, KWT Lorong Bambu II Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng, KWT Melati Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu, KWT Melati Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena, KWT Passamaturukang Desa Bonto Baru Kecamatan Pasimasunggu Timur dan KWT Terkini Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai.

**III. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan. Adapun sub kegiatannya yaitu penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan.

  Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari bebrbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokka ke dalam 6 prioritas. Dimana prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relative lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah desa yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya pada wilayah prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut dari 88 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2021 maka diperoleh 12 desa (prioritas 1), 14 desa (prioritas 2), 15 desa (prioritas 3), 8 desa (prioritas 4), 26 desa (prioritas 5) dan 13 desa (prioritas 6).
- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau wilayah yang termasuk rawan pangan sehingga dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ditekankan pada penyebab uatama kerentanan pangan. Adapun program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan : 1). Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumber pangan local, 2) aapembukaan lahan pertanian baru, 3) Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja,

padat karya , pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bantuan sosiala, serta pembangunan UMKM untuk menggerakkan ekonomi wilayah, 4) peningkatan akses air bersih, 5) Penyediaan tenaga kesehatan yang merata dengan memperhatikan jumlah penduduk di desa tersebut.

**IV. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Melalui kegiatan :

- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten Kota. Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya terpenuhinya pangan segar yang bebas dari kontaminasi oleh bahan mikrobiologis, pestisida dan logam berat yang membahayakan kesehatan, melakukan pengujian pangan segar serta menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari pengembilan sampel yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari pelaku utama (petani) maupun pedagang pengepul di pasar di wilayah Kecamatan Benteng dan Bontoharu diuji di Laboratorium yang telah terakreditasi yang berlokasi di Kota Maros Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode pengujian QuEChERS dan parameter yang diuji adalah residu pestisida, uji kandungan mineral, logam berat dan pengujian mikrobiologi maka diperoleh hasil pengujian dimana kandungan residu *matidation, sipermetrin* dan *sihalotrin* tidak terdapat pada sampel terung, kandungan residu *profenopos, matidation, sipermetrin* dan *siflutrin* tidak terdapat pada sampel tomat, kandungan residu *khlorpirifos, prefonopos, sipermetrin* dan *siflutrin* tidak terdapat pada sampel sawi hijau, kandungan residu *metidation, khlorpirifos, sihalotrin* dan *sipermetrin*tidak terditeksi pada sampel cabe keriting dan kandungan residu *khlorpirifos, siflutrin* dan *sihalotrin* tidak terditeksi dalam sampel kubis. Hasil ini menandakan bahwa bahwa penggunaan pestisida pada tanaman

sayuran masih sesuai dengan dosis anjuran dan tanaman yang dijadikan sampel aman untuk dikonsumsi.

**V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**

Melalui kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat , Daerah. Adapun sub kegiatannya yaitu :
  a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan pada lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam RKA/DPA SKPD. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Renja Tahun 2021, Renstra, RKA/DPA, RKA/DPPA Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan masing-masing 1 dokumen.
  b. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kegiatan ini merupakan pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP), LPPD dan LKPJ tahun 2021 masing-masing 1 dokumen/laporan.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Parangkat Daerah. Kegiatan ini merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan dalam hal keuangan atau adanya ketersediaan dokumen pelaporan keuangan pada Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun sub kegiatannya yaitu :

a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kegiatan ini meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 116 orang.
b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Kegiatan ini meliputi pelayanan jasa administrasi keuangan yaitu pencatatan dan pengadministrasian serta pemeriksaan keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun hasil kegiatan ini yaitu adanya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan.
c. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan/ anggaran pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2021. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 1 dokumen laporan Akhir Keuangan (Neraca Keuangan)

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. melalui sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Dimana dalam kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan kebutuhan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk tahun 2021. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam kegiatan ini terdapat 1 (satu) orang yang mengikuti pelatihan administrator (PKA) dan 5 (lima) orang mengikiti Bimbingan Teknik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas ASN.
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan tujuan tersedianya produk spanduk, jilid dan fotocopy selama pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan.
b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan berupa langganan Koran sebanyak 6 (enam) jenis
c. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan dalam sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya. Kegiatan ini meliputi pengadaan sarana pendukung Konstratani pada 7 (tujuh) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
  a. Penyediaan jasa surat menyurat
  b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan yaitu :
  a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan. Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas dengan rincian untuk motor tipe I sebanyak 55 unit, motor tipe III sebanyak 15 unit, mobil tipe IV sebanyak 1 unit dan mobil tipe VII sebanyak 1 unit.
  b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Kegiatan ini meliputi pemelihraan
  c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

VI. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Melalui kegiatan :

- Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
  a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Kegiatan ini mencakup pengawasan penggunaan sarana pasca panen serta penyusunan harga pasar komoditi pertanian.
  b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Adapun Kegiatan ini berupa pengadaan sarana pertanian meliputi :
     1. Kawat Duri

        Pengadan kawat duri sebanyak 746 gulung dengan penerima manfaat yaitu :
        - KWT Bunga Seroja Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu sebanyak 200 gulung
        - KWT Matahari Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu sebanyak 200 gulung.
        - Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 150 gulung
        - Poktan Buttu Bersatu Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 196 gulung.

     2. Jaring Pengaman Kebun

        Pengadaan jaring pengaman kebun sebanyak 380 gulung dengan penerima manfaat sebagai berikut :
        - Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 35 gulung
        - Poktan Harapan Baru Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai sebanyak 35 gulung
        - Poktan Karya Baru Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai sebanyak 35 gulung
        - Poktan Lembang Desa Lantinbongan Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 35 gulung
        - Poktan Lestari Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 35 gulung

- Poktan Mekar Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai sebanyak 35 gulung
- Poktan Pa'baeang Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 30 gulung
- Poktan Sakkuruyya Desa Kayu Bauk Kecamatan Bontomatene sebanyak 35 gulung
- Poktan Samaturu Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene sebanyak 35 gulung
- Poktan Siparannu Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 35 gulung
- Pokta Topuriti Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai sebanyak 35 gulung.

3. Bak Fiber

   Pengadaan bak fiber sebanyak 37 unit dengan penerima manfaat sebagai berikut :

   - Gapoktan Bahari Jaya Desa Kahu-Kahu Kecamatan Bontoharu sebanyak 7 unit
   - Gapoktan Binanga Indah Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 7 unit
   - Gapoktan Padang Sikuyu Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 7 gulung
   - Gapoktan Tunas Bontotangnga Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu sebanyak 7 unit
   - Poktan Mekar Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai sebanyak 5 unit
   - Poktan Tunas Baru Desa Onto Kecamatan Bontomatene sebanyak 4 unit.

4. Handtraktor

   Pengadaan handtraktor sebanyak 7 unit dengan penerima manfaat yaitu :

- Poktan Baruga Nan Jaya Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit
- Poktan Lembah Harapan Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 1 unit
- Poktan Mata Air Desa Labuang Pamajang Desa Pasimasunggu sebanyak 1 unit
- Poktan Mutiara Hijau Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit
- Poktan Parang Kadieng Bersatu Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit
- Poktan Penga I Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 1 unit
- Poktan Harapan Kita Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 1 unit.

5. Handsprayer

   Pengadaan Handsprayer sebanyak 11 buah dengan penerima manfaat Gapoktan Tamalanrea Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai.

6. Pestisida

   Pengadaan pestisida spesifikasi Decis 2,5 EC sebanyak 315 liter dengan penerima manfaat yaitu :

   - Poktan Balang Bajang Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena sebanyak 75 liter
   - Poktan Bonto Bandai Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 80 liter
   - Poktan Labuang Ba'du Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena sebanyak 80 liter
   - Poktan Lembang-Lembang Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 80 liter

7. Pupuk Organik

Pengadaan pupuk organik Spesifikasi Eco Farming (pupuk super aktif) sebanyak 260 dos dengan penerima manfaat yaitu :

- Gapoktan Bina Bersama Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 65 dos
- Gapoktan Makmur Jaya Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 65 dos
- Poktan Suka Damai Desa Onto Kecamatan Bontomatene sebanyak 65 dos
- Poktan Tunas Baru Desa Onto Kecamatan Bontomatene sebanyak 65 dos

8. Racun Rumput

   Pengadaan racun rumput spesifikasi Roundup Biosorb 486 As sebanyak 630 liter dengan penerima manfaat yaitu :

   - Poktan Balang Bajang Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena sebanyak 120 liter
   - Poktan Bonto Bandai Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 100 liter
   - Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan Bontomatene sebanyak 90 liter
   - Poktan Labuang Ba'du Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena sebanyak 120 liter
   - Poktan Lembang-Lembang Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 100 liter
   - Poktan Siparannu Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 100 liter

- Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

  a. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman

     1. Pengadaan bibit jeruk keprok.

Pengadaan bibit jeruk keprok sebanyak 6.444 pohon dengan penerima manfaat yaitu : Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan Bontomatene sebanyak 684 pohon, Poktan Kaloro Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 1.280 pohon, Poktsn Dara Indra Permai Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 640 pohon, Poktan Nyiur Melambai Desa Barugaiya Kecamatan Bontomanai sebanyak 640 pohon, Gapoktan Amanah Desa Onto Kecamatan Bontomatene sebanyak 640 pohon, Gapoktan A'bulo Sipappa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai sebanyak 1.280 pohon, Gapoktan Lalang Bata Desa Lalang Bata Kecamatan Buki sebanyak 640 pohon dan Gapoktan Tunas Harapan Desa Buku Kecamatan Buki sebanyak 640 pohon.

2. Pengadaan bibit pucuk merah

   Pengadaan bibit pucuk merah sebanyak 2.000 pohon dengan penerima manfaat yaitu Akhmad Anshar S.T.M.M Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu sebanyak 500 pohon Ahmad Ashar, S.Sos Kelurahan Benteng Kecamanatan Benteng sebanyak 600 pohon, Ahmad Munir, S.P.W.K Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng sebanyak 500 pohon dan Fitrah Arfandi, S.STP Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng sebanyak 400 pohon

3. Pengadaan Padi Inbrida

   Pengadaan padi ibrida sebanyak 6.925 kg dengan penerima manfaat sebagai berikut

   - Kecamatan Pasimasunggu Timur
     - Poktan Bunga Tani Desa Bontomalling 200 kg
     - Poktan Sinar Harapan Desa Bontomalling 200 kg
     - Poktan Tamamelong Desa Bontomalling 200 kg
     - Desa Parang Kadieng Desa Bontomalling 200 kg
     - Desa Lembang Kahu-Kahu Desa Ujung 200 kg
     - Poktan Sama Lewa Desa Ujung 200 kg

- Poktan Buhung Kalimbajo Desa Ujung 200 kg
- Poktan Baturijang Timur Desa Ujung 200 kg
- Poktan Bina Sejahtera Desa Lembang Baji 200 kg
- Poktan Pulau Bahagia Desa Lembang Baji 200 kg
- Poktan Lembah Biru Desa Lembang Baji 200 kg
- Poktan Baji Pa'mai Desa Bontobaru 200 kg
- Poktan Cahaya Baru Desa Bontobaru 200 kg
- Poktan Bonto Tallu Desa Bontomalling 200 kg

- Kecamatan Pasimasunggu
  - Poktan Cahaya Baru Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Sejahtera Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Karya Subur Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Mattiro Deceng Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Borong Jati Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Pasir Hitam Desa Bontosaile 200 kg
  - Poktan Bajiminasa Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Harapan Jaya Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Lembang Parang Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Delima Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Sinar Pagi Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Ere Mata Desa Teluk Kampe 200 kg
  - Poktan Kayuanging Jaya Desa Masungke 200 kg
  - Poktan Bonto Kalimbu Desa Masungke 200 kg
  - Poktan Buhung Sanrang Desa Kembang Ragi 200 kg
  - Poktan Mekar Jaya Desa Kembang Ragi 200 kg
  - Poktan Mawar Indah Desa Labuang Pamajang 200 kg
  - Poktan Minasa Bahagia Desa Labuang Pamajang 200 kg
  - Poktan Parang Tassulung Desa Labuang Pamajang 200 kg
  - Poktan Pa'rasanganta Desa Labuang Pamajang 200 kg
- Kecamatan Bontomanai
  - Poktan Cahaya Harapan Desa Polebunging 125 kg.

4. Pengadaan Bibit Durian

   Pengadaan bibit durian sebanyak 4.878 pohon dengan penerima manfaat yaitu :

   - Gapoktan Assamaturu Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 830 pohon
   - Poktan Bissorang Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai sebanyak 928 pohon
   - Poktan Mekar Desa Lalang Bata Kecamatan Buki sebanyak 830 pohon, Poktan Toha'le Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 830 pohon
   - Poktan Sumber Resqy Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 830 pohon
   - Poktan Bina Karya Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 140 pohon
   - Gapoktan Harapan Baru Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 70 pohon
   - Gapoktan Jujur Jaya Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai 140 pohon
   - Poktan A'rera Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng 70 pohon
   - KWT Matahari Kelurahan Puabangun Kecamatan Bontoharu 70 pohon
   - Poktan Beringin Jaya II Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 70 pohon
   - Poktan Sinar Sejahtera Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu 70 pohon.

5. Pengadaan Bibit Mangga

   Pengadaan bibit mangga sebanyak 15.050 pohon dengan penerima manfaat sebagai berikut :

   - Gapoktan Harapan Baru Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai 335 pohon

- Gapoktan Makmur Jaya Desa Lantimbongan Kecamatan Bontosikuyu 1.600 pohon
- Poktan Sumber Resky Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu 347 pohon
- Poktan Balang Beru Desa Maharayya Kecamatan Bontomatene 335 pohon
- Poktan Bontotallu Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur 335 pohon
- Poktan Harapan Desa Lalang Bata Kecamatan Buki 335 pohon
- Poktan Ingin Mandiri Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 335 pohon
- Poktan Bina Sejahtera Desa Kohala Kecamatan Buki 335 pohon
- Poktan Mandiri Desa Lalang Bata Kecamatan Buki 335 pohon
- Poktan Mandiri Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene 335 pohon
- Poktan Mekar Desa Lalang Bata Kecamatan Buki 300 pohon
- Poktan Nirannuang III Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai 713 pohon
- Poktan Nurul Takwa Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 335 pohon
- Poktan Suka Maju I Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu 335 pohon
- Poktan Tamangoso Jaya Desa Bungaiya Kecamatana Bontomatene 335 pohon
- Poktan Tana Toa Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 335 pohon
- Poktan Tunas Muda Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene 335 pohon
- Poktan Ingin Maju Desa Tanete Kecamatan Bontomatene 335 pohon

- Poktan Bina Usaha Desa lalang Bata Kecamatan Buki 1.233 pohon
- Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu 822 pohon
- Desa Bina Karya Desa Bontomarannu Kecamatan Bontontomanai 1.311 pohon
- Poktan Pattung Desa Lantinbongan Kecamatan Bontosikuyu 890 pohon
- Poktan Tunas Harapan Desa lalang Bata Kecamatan Buki 822 pohon
- Poktan Tunas Harapan Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 1.011 pohon
- Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kecamatan Buki 1.311 pohon

6. Pengadaan Bibit Rambutan

   Pengadaa bibit rambutan sebanyak 8.436 pohon dengan penerima manfaat sebagai berikut :

   - Gapoktan Assamaturu Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur 568 pohon
   - Poktan Ingin Mandiri Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 568 pohon
   - Poktan Mandiri Desa lalang Bata Kecamatan Buki 564 pohon
   - Poktan Nirannuang II Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai 568 pohon
   - Poktan Tunas Muda Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur 568 pohon
   - Gapoktan Makmur Jaya Desa Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu 1.120 pohon
   - Poktan Baji Minasa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 1.120 pohon

- Poktan Baji' Pa'mai Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate 770 pohon
- Poktan Toha'le Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu 1.120 pohon
- Poktan Parang Tassulung Desa Labuang P amajang Kecamatan Pasimasunggu 700 pohon

7. Pengadaan Bibit Lengkeng

   Pengadaan bibit lengkeng sebanyak 714 pohon dengan penerima manfaat yaitu : Gapoktan Jujur Jaya Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai 238 pohon, KWT Teratai Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu 238 pohon, dan Poktan Harapan Desa Bonea Makmur kecamatan Bontomanai 238 pohon

8. Pengadaan Pupuk Kompos

   Pengadaan Pupuk kompos sebanyak 5.050 dengan penerima manfaat sebagai berikut :

   - Gapoktan A'bulo Sipappa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 750 kg
   - Poktan Nyiur Melambai Desa Barugaiya Kecamatan Bontomanai 350 kg
   - Poktan Dara Indah Permai Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu 350 kg
   - Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan Bontomatene 350 kg
   - Poktan Kaloro Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu 750 kg
   - Gapoktan Amanah Desa Onto Kecamatan Bontomatene 350 kg
   - Gapoktan A'munte Sibatu Kelurahan Batangmata Sapo Kecamatan Bontomatene 350 kg
   - Poktan Parabaji Desa Tanete Kecamatan Bontomatene 350 kg
   - Gapoktan Lalang Bata Desa Lalang Bata Kecamatan Buki350 kg
   - Gapoktan Tunas Harapan Desa Buki Kecamatan Buki 350 kg

- Poktan Bangga Suka Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomate'ne 750 kg

b. Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman berupa Pengadaan Alat Pertanian, Bahan Kimia, dan Pupuk

- Pengadaan Alat Pertanian dan bahan kimia untuk intensifikasi tanaman perkebunan berupa Pupuk An-Organik (NPK), Pupuk Kompos, Pestisida dan Handsprayer.

  Pengadaan alat pertanian dan bahan kimia ini terdiri atas hand sprayer sebanyak 4 buah, NPK Tablet sebanyak 1.851 kg, gramoxone 8 liter, Regent 4 liter supremo 8 liter dan pupuk kompos sebanyak 1.506. Adapun penerima manfaat dari pengadaan diatas adalah Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kecamatan Buki, Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu, Poktan Dara Indah Permai Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu dan Poktan Palentukan Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu.

- Pengadaan Bibit Pala

  Pengadaan bibit pala sebanyak 20.125 pohon dengan peneriman manfaat yaitu Gapoktan Assamaturu Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur 800 pohon, Gapoktan Harapan Jaya Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena 800 pohon, Gapoktan Makmur Jaya Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur 800 pohon, Poktan Bontotiro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki. 1.775 pohon, Poktan Marannu Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 1.775 pohon, Poktan Sejahtera Desa Lalangbata Kecamatan Buki 1.775 pohon, Poktan Tana Toa Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 1.775 pohon, Gapoktan Harapan Baru Desa Bonea makmur Kecamatan Bontomanai 900 pohon, Poktan A'rera Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 950 pohon, Poktan Bina Karya Desa

Bontomarannu Kecamatan Bontomanai 950 pohon, Poktan Cahaya Harapan Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 1.900 pohon, Poktan Nirannuang III Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai 2.725 pohon, Poktan Pantai Timur Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu 950 pohon, Poktan Persatuan Ummat Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu 400 pohon Poktan Sinar Sejahtera Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu 950 pohon dan Poktan Tunas Harapan Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai 900 pohon..

- Pengadaan Bibit Cengkeh

  Pengadaan bibi cengkeh sebanyak 5.635 pohon dengan penerima manfaat yaitu Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kecamatan Buki 1.127 pohon, Gapoktan Tamalanrea Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai 1.127 pohon, Poktan Bontobulaeng Desa Bontolempangan Kecamatan Buki 1.127 pohon, Poktan Juluatia Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai dan Poktan Samaturu Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai 1.127 pohon.

- Pengadaan Jambu Mete, Kawat Duri, Kompos dan Gramoxone untuk kegiatan perluasan tanaman perkebunan berupa bibit jambu mete 540 pohon, Kawat duri 80 rol, pupuk kompos4.4.635 kg dan gramoxon 170 liter dengan penerima manfaat yaitu Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu.

- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak. Kegiatan ini berupa pengadaan kawat duri sebanyak 45 rol, bibiit rumput odot sebanyak 2.136 stek dan patok kayu sebanyak 200 batang. Adapun penerima manfaat dari

kegiatan ini adalah Gapoktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu.

- Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan sub kegiatan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain dimana kegiatan ini berupa :

a. pengadaan ayam ras petelur sebanyak 1.850 ekor dan pakan 4.200 kg dengan penerima manfaat dari kegaiatan ini yaitu Poktan Bangkit Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu.
b. Pengadaan bibit ayam kampung super sebanyak 625 ekor dan pakan 200 kg dengan penerima manfaat Gapoktan Mandiri Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena
c. Pengadaan bibit kambing jantan PE sebanyak 4 ekor dan bibit kambing betina lokal sebanyak 40 ekor dengan penerima manfaat Poktan Mai Topo Asa Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu.
d. Pengadaan bibit sapi betina sebanyak 23 ekor dengan penerima manfaat Gapoktan Kembang Ragi Jaya Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 7 ekor, Gapoktan Maju Bersama Desa Binangan Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 9 ekor dan Gapoktan Makmur Jaya Desa Lantibongan Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 7 ekor.
e. Pengadaan eartag sapi sebanyak 31 buah dan eartag kambing sebanyak 55 buah dan diberikan kepada kelompok penerima manfaat bibit sapi dan bibit kambing.

**VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Melalui kegiatan :

- Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan sub kegiatannya yaitu ;

a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

- Pembangunan JIAT Dangkal Poktan Mutiara Hijau Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur
- Pembangunan sumur tanah dangkal Gapoktan Wiratama Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai
- Pembangunan sumur tani Poktan Tee Bangke Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sebagai prasarana transportasi kawasan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi dan hasil produk pertanian. Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal dapat dilalui kendaraan dan dapat saling berpapasan. Ruas jalan usahatani sebagai berikut :
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Hulu Desa harapan Kecamatan Bontosikuyu dengan panjang 288 meter
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Maja-Maja – Tuka Batu Dusun Timoro Desa Laiyolo Baru Kcamatan Bontosikuyu dengan panjang 139 meter
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Pa'garangan – Lebo' Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu dengan panjang 309 meter
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Huluk- Bonto Saring Boo Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu dengan panjang 327 meter
   - Pemangunan jalan usaha tai ruas Katti-Katti DesaLowa Kecamatan Bontosikuyu dengan panjang 290 meter
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Balangpangi – Batu Saraung Dusun Balangpangi Desa Bontokoraang Kcamatan Bontomanai demgan panjang 203 meter
   - Pembangunan jalan usaha tani ruas Pubojo – Pantai Timur Dusun Teko Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai dengan panjang 298 meter

- Pembangunan jalan usaha tani rabat beton ruas Paccendolang Lembang – Timbula Dusun Gojamg Selatan Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai dengan panjang 140 meter
- Perintisan jalan usaha tani Bontobaru Desa Bontomaranu Kecamatan Bontomanai dengan panjang meter
- Pembangunan jalan saha tani ruas Kalatta/Tanabau – Balang Lohe Desa Barugaiya Kcamatan Bontoanai dengan panjang 285meter
- Perintisan jalan usaha tani ruas Pakar – Bakkara Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai dengan panjang 320,5 meter
- Pembangunan jalan usaha tani rabat beton ruas Balang Pangi Desa Baho Rea Desa Balang Butung Kecamatan Bui dengan panjang 167,5 mter
- Pembangunan/perintisan jalan usaha tani ruas Batu Meong – Ruku Lohe Dusun Bontodatara Desa Lalang Bata Kecamatan Buki dengan panjang 426 meter
- Perintisan jalan usaha tani ruas Talang – Suttia Desa Buki Timur Kecamatan Buki dengan panjang 290 meter
- Pembangunan jalan usaha tai ruas Samba –Kadieng Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene dengan panjang 335 meter
- Pembangunan jalan usaha tani ruas Nangka Toa – Tompi Dusun Tajuia Desa Bungaiya Kecaatan Bontomatene dengan panjang 336 meter
- Perintisan jalan usaha tani ruas Kassa Bumbung – Kassi leleng Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene dengan panjang 444 meter
- Perintisan jalan usaha tani ruas Tanete – Kayu Bauk Bingka Lengo Desa Kayu Bauk Kecamatan Bontomatene dengan panjang 470 meter

- Pembangunan jalan usaha tani rabat beton ruas Tanaberu – Pattalassang Desa Bontona Salk Kecamatan Bontomatene dengan panjang 150, 5 meter
- Pembangunan jalan usaha tani ruas Balang Rilaeng – Topala desa Tante Kecaatan Bontomatene dengan panjang 142meter
- Pembangunan jalan usaha tani ruas Liang Tinggi – Lessoro dengan panjang 780 meter
- Pembangunan jalan usaha tani ruas desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan panjang meter
- Pembangunan jalan usaha tani ruas Pao Etang – Lembongan Desa Bontobaru Kcamatan Pasimasunggu Timur dengan panjang 165 meter
- Perintisan jalan usaha tani Dusun Laut Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu dengan panjang 295 meter.

c. Pembangunan, Rehabiltasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi ruang data dan informasi beserta pengadaan sarana dan prasarana untuk 7 BPP yaitu BPP Bontosikuyu, BPP Benteng/Bontoharu, BPP Bontomanai, BPP Bontomatene, BPP Pasimasunggu, BPP Pasimarannu dan BPP Pasilambena.
d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya berupa :
   - Pembangunan jaringan irigasi air tanah sebanyak 1 unit dengan penerima manfaat Poktan Tunas Hijau Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu
   - Pembagunan kandang sapi 1 unit dengan penerima manfaat Poktan Bontopanappasa Desa Bontobangun Kecamatan Bontoharu.
   - Pembangunan pagar pembatas ranch di Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu berupa pemasangan pagar kawat duri tinggi 1,8

meter dan panjang 171,04 meter dengan pemasangan pintu pagar sebanyak 2 buah

**VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Sasaran dari program ini adalah terwujudnya sosialisasi percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular rabies dan brucellosis di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis. Kegiatan ini berupa sosialisasi percepatan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya penyakit hewan menular rabies dan brucellosis dan peningkatan pengetahuan PPL dan peternak dalam pengendalian dan penaggulangan penyakit hewan menular khususnya penyakit rabies yang menjadi skala prioritas dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelaksanaan sosialisasi ini yaitu di Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai dengan peserta sosialisasi yaitu ketua gapoktan dan unsure petugas penyuluh pertanian di kecamatan Bontomate'ne dan Unsur peternak dan petugas penyuluh pertanian di kecamatan Bontomanai.
- Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner. Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan obat-obatan (antibiotic, analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antiallergenic dan antiparasiter), vitamin, vaksin serta

feed additive dan peralatan kesehatan hewan/ternak terdiri dari handscoen, masker, ketamil enjection, vet oxy SB injection, xyla injection, aquades sterile, vetadryl injection, gusanex spray, vet oxy LA injection, ornipural solution, albenol 100 oral, verm O bolus, cyperkiller 25 wp, sulpidon injection, ivomec super injection, sulfa strong injection, verm O kaplet, tetes mata oxy, tympanol SB, Glucortin injection, istam, primadine sedangkan untuk vaksin yaitu vaksin ND, vaksin rabies, vaksin purevax, dan biodin injection, calcidex injection, bsanplex injection vitol 140 injection, hematodine injection.

**Jumlah Jenis Penyakit Hewan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021**

| Kecamatan | Jenis Penyakit | Jenis Hewan |
|---|---|---|
| Bontomatene | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Kambing, Sapi |
| | Scabies | Kambing |
| | Thelaziasis | Sapi |
| | Enteritis | Sapi |
| | Infestasi Ektoparasit | Kambing, Sapi |
| Buki | Helminthiasis | Sapi |
| | Thelaziasis | Sapi |
| Bontomanai | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Kerbau, Sapi |
| | Scabies | Kambing |
| | Thelaziasis | Sapi |
| | Enteritis | Kambing |
| | Infestasi Ektoparasit | Kambing, Sapi |
| | Indigesti | Kambing |
| Benteng | Coryza | Ayam |
| Bontoharu | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Kerbau, Sapi |
| | Scabies | Kambing |

| | | |
|---|---|---|
| | Thelaziasis | Sapi |
| | Enteritis | Sapi |
| | Infestasi Ektoparasit | Sapi |
| | Indigesti | Sapi |
| Bontosikuyu | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Sapi |
| | Scabies | Kambing |
| | Thelaziasis | Kambing, Sapi |
| | Enteritis | Sapi |
| | Infestasi Ektoparasit | Sapi |
| Pasimasunggu | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Kambing, Sapi |
| | Scabies | Kambing |
| | Thelaziasis | Sapi |
| | Infestasi Ektoparasit | Kambing, Sapi |
| Pasimasunggu Timur | Helminthiasis | Kambing, Sapi |
| | Defisiensi Vitamin dan Mineral | Kambing, Sapi |
| | Scabies | Kambing |
| | Thelaziasis | Sapi |
| | Infestasi Ektoparasit | Sapi |
| | Pink Eye | Sapi |
| Takabonerate | Helminthiasis | Kambing |
| | Scabies | Kambing |
| Pasilambena | Helminthiasis | Sapi |
| Pasimarannu | Helminthiasis | Kambing |
| | Infestasi Ektoparasit | Kambing |
| | Scabies | Kambing |
| **Jumlah** | **9 Jenis Penyakit** | **3 Jenis Ternak** |

## IX. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota dengan sub kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Pengendalian OPT ini adalah tindakan untuk mencegah

kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh OPT baik hama, gulma, serangga pengganggu sehingga dapat menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil panen serta peeurunan kualitas mutu produk panen. Kegiatan ini meliputi penyaluran ke masyarakat yang terdiri atas : alat perangkap lalat buah 110 buah , sarung tangan 70 buah, regent 15 liter,perangkap tikus 24 buah, nordox 56 WP 15 bungkus, roundup biosorp 486 LS 20 liter, sidatan 35 liter, termiban 400 EC 5 liter, alcohol 70 % 1 liter, masker 100 buah.

**AREA PENGENDALIAN OPT**
**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**
**TAHUN 2021**

| No | Kecamatan/ Jenis Komoditi | Jenis Komoditi | Luas Komoditi (Ha) | Luas Serangan (Ha) | Luas Pengendalian (Ha) | Cara pengendalian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontoharu | **Kelapa** | **1.801** | | | |
| | | - Orytes sp | | 15,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 1,00 | 1,00 | Mekanis |
| | | - Rayap | | 10,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Tupai | | 30,00 | 1,00 | Mekanis |
| | | - Babi Hutan | | 1,00 | 0,25 | Mekanis |
| | | **Cengkeh** | **33,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 3,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 6,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Mati Ranting | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Cacar Daun | | 6,00 | 0,50 | Sanitasi |
| | | **Pala** | **92,00** | | | |
| | | - Thrips | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Jambu Mete** | **339,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Kutu Aphids | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tupai | | 4,50 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Rayap | | 10,00 | 2,00 | Mekanis, sanitasi |
| | | **Kakao** | **30,00** | | | |
| | | - Busuk Buah | | 1,50 | - | |
| | | - Tupai | | 1,50 | - | |
| | | **Mangga** | **14,38** | | | |
| | | - Lalat Buah | | 10,00 | 0,50 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **52,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 2,00 | 1,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 1,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Kacang Tanah** | **3,00** | | | |
| | | - Tikus | | 1,50 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Padi** | **5,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 1,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| 2. | Bontomatene | **Kelapa** | **3.479** | | | |
| | | - Orytes sp | | 26,00 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 2,00 | 0,25 | Mekanis |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Rayap | | 10,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tupai | | 61,50 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Babi Hutan | | 1,00 | 0,25 | Mekanis |
| | | **Cengkeh** | **33,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 3,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 4,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Mati Ranting | | 5,00 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Cacar Daun | | 5,00 | 0,50 | Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Jambu Mete** | **339,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 6,50 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Penyakit Blendok | | 5,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 15,50 | 3,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Jeruk Keprok** | **990,30** | | | |
| | | - Phythopthora | | 30,00 | - | |
| | | - Diplodia | | 25,00 | 3,00 | Mekanis, Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Mangga** | **448,67** | | | |
| | | - Lalat Buah | | 15,00 | 2,00 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **17,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 0,50 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| 3 | Bontomanai | **Kelapa** | **4.441** | | | |
| | | - Orytes sp | | 29,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 2,00 | - | |
| | | - Rayap | | 12,00 | - | |
| | | - Tupai | | 61,50 | - | |
| | | - Babi Hutan | | 1,00 | 0,50 | Mekanis |
| | | **Cengkeh** | **33,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 4,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 6,00 | 1,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | - Mati Ranting | | 5,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Cacar Daun | | 13,00 | 0,50 | Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Pala** | **1.528** | | | |
| | | - Thrips | | 5,00 | 5,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Jambu Mete** | **393,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 6,50 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi, Kimiawi |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | - | |
| | | - Kutu Aphids | | 3,00 | - | |
| | | - Tupai | | 6,50 | - | |
| | | - Rayap | | 15,50 | 1,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Kakao** | **96,00** | | | |
| | | - Busuk Buah | | 3,00 | - | |
| | | - Tupai | | 3,00 | - | |
| | | **Jeruk Keprok** | **651,65** | | | |
| | | - Phythopthora | | 30,00 | - | |
| | | - Diplodia | | 25,00 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Cabai** | | | | |
| | | - Lalat Buah | | 1,50 | 0,50 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **8,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 0,50 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 3,00 | 2,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Kacang Tanah** | **9,00** | | | |
| | | - Tikus | | 3,50 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Padi** | **8,50** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 2,00 | 1,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 0,50 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| 4 | Buki | **Kelapa** | **1.716** | | | |
| | | - Orytes sp | | 16,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 2,00 | 0,25 | Mekanis |
| | | - Rayap | | 14,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tupai | | 35,00 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Babi Hutan | | 1,00 | 0,25 | Mekanis |
| | | **Cengkeh** | **61,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 4,00 | 0,75 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 6,00 | 1,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | - Mati Ranting | | 5,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Cacar Daun | | 13,25 | - | |
| | | **Pala** | **194,00** | | | |
| | | - Thrips | | 2,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Jambu Mete** | **340,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 3,00 | - | |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | - | |
| | | - Kutu Aphids | | 3,00 | - | |
| | | - Tupai | | 4,50 | - | |
| | | - Rayap | | 10,00 | 1,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Kakao** | **24,00** | | | |
| | | - Busuk Buah | | 3,00 | - | |
| | | - Tupai | | 3,00 | - | |
| | | **Jeruk Keprok** | **127,65** | | | |
| | | - Phythopthora | | 30,00 | - | |
| | | - Diplodia | | 25,00 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Cabai** | | | | |
| | | - Lalat Buah | | 1,50 | 0,50 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **32,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 2,00 | 0,75 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 1,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Kacang Tanah** | **9,00** | | | |
| | | - Tikus | | 2,50 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Padi** | **8,50** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 0,25 | 0,25 | Mekanis, Kimiawi |
| 5 | Bontosikuyu | **Kelapa** | **3.871** | | | |
| | | - Orytes sp | | 17,00 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 1,00 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Rayap | | 10,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Tupai | | 34,50 | 0,50 | Mekanis |
| | | - Babi Hutan | | 1,00 | 0,25 | Mekanis |
| | | **Cengkeh** | **513,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 4,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Rayap | | 6,00 | 1,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | - Mati Ranting | | 5,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Cacar Daun | | 11,00 | 0,50 | Sanitasi |
| | | **Jambu Mete** | **611,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 2,00 | 0,50 | Mekanis, sanitasi, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Kimiawi |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | 0,25 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Kutu Aphids | | 1,50 | - | |
| | | - Tupai | | 4,50 | - | |
| | | - Rayap | | 15,50 | 1,50 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Jeruk Keprok** | **530,74** | | | |
| | | - Phythopthora | | 25,00 | - | |
| | | - Diplodia | | 30,00 | 1,00 | Mekanis, Sanitasi, Kimiawi |
| | | **Mangga** | **292,99** | | | |
| | | - Lalat Buah | | 15,00 | 0,50 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **29,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 2,00 | 1,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 4,00 | 2,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Kacang Tanah** | **8,00** | | | |
| | | - Tikus | | 3,50 | 2,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Padi** | **21,00** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 2,00 | 1,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 2,50 | 2,00 | Mekanis, Kimiawi |
| 6 | Pasimasunggu | **Kelapa** | **945,00** | | | |
| | | - Orytes sp | | 16,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 2,00 | - | |
| | | - Rayap | | 13,00 | - | |
| | | - Babi Hutan | | 1,50 | 0,50 | Mekanis |
| | | **Pala** | **41,50** | | | |
| | | - Thrips | | 3,00 | - | |
| | | **Jambu Mete** | **417,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 3,00 | - | |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | - | |
| | | - Kutu Aphids | | 3,00 | - | |
| | | - Rayap | | 17,00 | 1,50 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Kakao** | **111,50** | | | |
| | | - Busuk Buah | | 3,00 | - | |
| | | - Penggerek Buah Kakao | | 7,50 | - | |
| | | **Mangga** | **125,88** | | | |
| | | - Lalat Buah | | 10,00 | 0,50 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **70,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 2,00 | 1,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 1,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Padi** | **1.211** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 5,00 | 2,50 | Mekanis, Kimiawi |
| 7 | Pasimasunggu Timur | **Kelapa** | **883,00** | | | |
| | | - Orytes sp | | 15,00 | 0,50 | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Kutu Kebul | | 2,00 | - | Mekanis, Sanitasi |
| | | - Rayap | | 15,00 | 0,50 | |
| | | - Babi Hutan | | 1,50 | 0,50 | Mekanis |
| | | **Pala** | **99,50** | | | |
| | | - Thrips | | 3,00 | 0,25 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Jambu Mete** | **306,00** | | | |
| | | - Helopeltis sp | | 3,00 | - | |
| | | - Penyakit Blendok | | 3,00 | 0,25 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Kutu Aphids | | 3,00 | 0,50 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Rayap | | 19,00 | 3,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Kakao** | **111,50** | | | |
| | | - Busuk Buah | | 3,00 | - | |
| | | - Penggerek Buah Kakao | | 7,50 | 2,00 | Mekanis, sanitasi, Kimiawi |
| | | **Mangga** | **109,19** | | | |
| | | - Lalat Buah | | 10,00 | 1,00 | Perangkap Anti Lap |
| | | **Jagung** | **106,00** | | | |
| | | - Ulat Grayak | | 3,00 | 2,00 | Mekanis, Kimiawi |
| | | - Tikus | | 1,00 | 0,50 | Mekanis, Kimiawi |
| | | **Padi** | **1,778** | | | |
| | | - Penggerek Batang | | 6,00 | 5,00 | Mekanis, Kimiawi |

## X. Program Penyuluhan Pertanian

Tujuan penyuluhan pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku pembangunan pertanian yang kompoten sehingga mampu mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan lingkungan lebih sehat. Adapun kegiatan dari program ini yaitu :

- Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan sub kegiatannya yaitu :
  a. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan di BPP diantaranya penyediaan ATK di 10 BPP dan memfasilitasi pertemuan rutin BPP. Dimana pertemuan rutin ini diadakan setiap bulan per BPP.. Adapun 10 BPP yang terfasilitasi yaitu BPP Bontosikuyu, BPP Bontoharu/Benteng, BPP Bontomanai, BPP Buki, BPP Bontomatene, BPP Pasimasunggu, BPP Pasimasunggu Timur, BPP Pasimarannu, BPP Takabonerate dan BPP Pasilambena.
  b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan demplot di 5 (lima) BPP yaitu BPP Benteng/Bontoharu, BPP

Bontosikuyu, BPP Pasimasunggu, BPP Pasimasunggu Timur dan BPP Pasimarannu.

Disamping itu bertujuan untuk memfasilitasi pertemuan rutin admin Simluhtan dan Konstratani dimana untuk tahun 2021 hanya terlaksana sebanyak 6 kali pertemuan.

# BAB V
# PENUTUP

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan dibidang pertanian yang menjadi kewenangan. Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris DaerahDinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan pada Dinas Pertaniandan KetahananPangan Kabupaten Kepulauan Selayar telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentinganya dapat terus diakomodir dalam Perencanaan serta Program Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulaun Selayar dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Beberapa kekurangan seperti kesesuaian antara penyelesaian Anggaran dengan Fisik kegiatan seharusnya tetap dijadikan acuan dalam menentukan kinerja di masa yang akan datang sehingga apa yang telah

dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bisa selalu dipedomani untuk panduan langkah selanjutnya.

Untuk dapat meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangandimasa mendatang,maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain dengan :

1. Peningkatan kualitas indikator kinerja dan target sesuai dengan RPJMD 2016-2021 kedalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2016-2021, serta penerapan penganggaran berbasis kinerja;
2. Penyusunan rencana aksi kinerja dalam rangka mengendalikan kinerja;
3. Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi secara berkala(bulanan/triwulan/semesteran);
4. Peningkatan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan transparansi data dan informasi kepada publik untuk mendapatkan umpan balik;
6. Pemanfaatan informasi yang disajikan dalam LAKIP untuk peningkatan kinerja;
7. Peningkatan pengadaan sarana prasarana pertanian berbasis teknologi;
8. Penambahan kualitas dan kuantitas aparatur penyuluh melalui pelaksanaan Diklat teknis dan fungsional serta pengangkatan pegawai baru;
9. Penataan dan penyempurnaan pedoman teknis penyelenggaraan urusanpertanian, khususnya berkenaan dengan kegiatan yang mempunyai dampak secara langsung kepada masyarakat;

10. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

Benteng, Februari 2022
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Kab. Kepulauan Selayar,

**I S M A I L**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 004

## 1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 $Km^2$. Terdiri atas wilayah daratan dengan luas 1.357,03 $Km^2$. Dan luas wilayah laut 9.146,66 $Km^2$. Dengan panjang garis pantai yaitu 670 Km.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada garis lintang -6,117331 dan garis bujur 120,462907 yang berlokasi di Jl. K.H. Dewantara No. 18, Benteng, Kabupaten Kepualauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. *Telepon (0414) 21028, FAX. 21732*, Email : *perindagkabselayar@gmail.com*

Gambaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar berikut ini






Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah

tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan 2 (Dua) urusan pemerintahan di 2 (Dua) kementrian yakni urusan wajib, bidang urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan urusan pilihan, bidang urusan perdagangan.

## 1.3. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan, salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta perubahan nomenklatur.

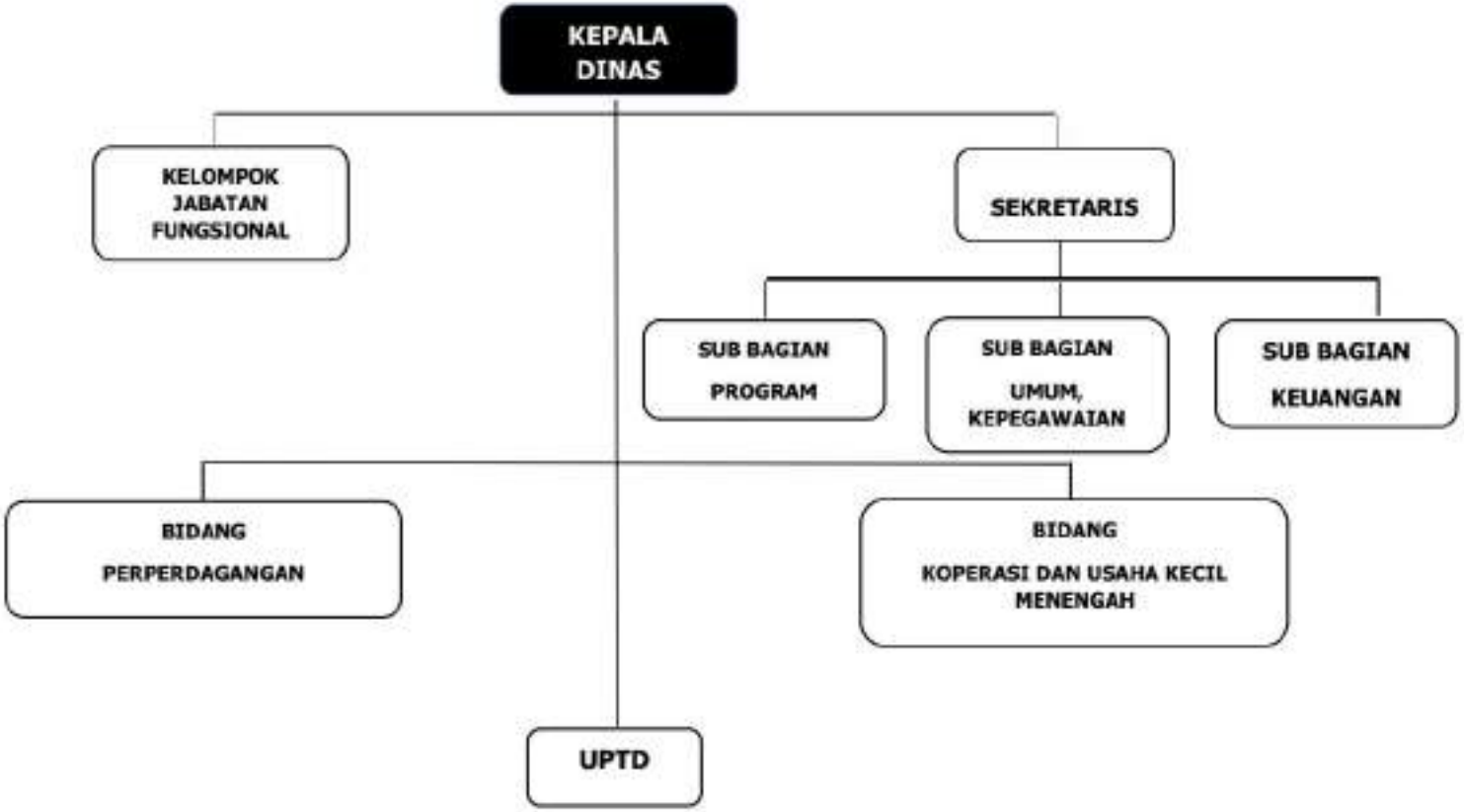
Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana yang tercantum pada lampiran Undang-undang 9 Tahun 2015 tersebut, sehingga diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
    2. Sub Bagian Program;
    3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Perindustrian,
d. Bidang Perdagangan,
e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
f. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Gambar 1.2

Struktur Organisasi



## 1.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Serta Jumlah Perjabat Struktural

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar didukung oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, untuk lebih jelas ada pada data terlampir.

- **Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| NO. | Pendidikan | PNS | PHL | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 8 Org | - | 8 Org |
| 2 | S1 | 13 Org | 20 Org | 33 Org |
| 3 | D.III | 1 Org | - | 1 Org |
| 4 | D.II | - | - | - |
| 5 | SMA | 5 Org | 12 Org | 17 Org |
| 6 | SD | - | 3 Org | 3 Org |
| | **Total** | **27 Org** | **35 Org** | **62 Org** |

- **Data Pegawai Berdasarkan Pangkat**

| No | Pangkat | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pembina Utama Muda | 2 orang |
| 2 | Pembina Tk. 1 | 0 orang |
| 3 | Pembina | 3 orang |
| 4 | Penata Tk. 1 | 8 orang |
| 5 | Penata | 4 orang |
| 6 | Penata Muda Tk. 1 | 6 orang |
| 7 | Penata Muda | 2 orang |
| 8 | Pengatur Tk. 1 | 1 orang |
| 9 | Pengatur Muda Tk. 1 | 1 orang |
| **Jumlah** | | **27 orang** |

- **Data Pegawai Berdasarkan Golongan**

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Golongan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | IV | III | II | |
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org | - | - | 1 Org |
| 2 | Sekretariat | 1 Org | 5 Org | 1 Org | 7 Org |
| 3 | Perdagangan | 2 Org | 7 Org | 1 Org | 10 Org |
| 4 | Koperasi dan UKM | 1 Org | 3 Org | - | 4 Org |
| 5 | UPT Pengelolaan Pasar | - | 2 Org | - | 2 Org |
| | **Total** | **5 Org** | **17 Org** | **2 Org** | **24 Org** |

- **Jumlah Pejabat Struktural**

| No | Dinas/Bidang/Seksi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Kepala Dinas | 1 Org |
| 2 | Sekretaris | 1 Org |
| 3 | Kepala Bidang | 2 Org |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 3 Org |
| | **Total** | **7 Org** |

# PROFIL DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## 1.1 Gambaran Umum Disperinnaker

Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan disingkat DISPERINNAKER adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan DISPERINNAKER diatur dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomr 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan.

**Gambar 1.1**

**FOTO KANTOR DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN**









**PELAYANAN KARTU PENCARI KERJA (AK-1)**

## 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Disperinnaker

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusaan pemerintahan bidang Peridustrian, urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Dinas Perindustrian dan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan
b. Pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan ketenagakerjaan
d. Pelaksanaan administrasi Dinas
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

**2. Sekretaris**

Tugas Sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam ingkup Dinas dan fungsi sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah :

a. Pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporam dan hokum;
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

- **Kepala Sub Bagian Program**

  Tugas Kepala Sub Bagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran , pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

- **Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawiaan dan Hukum**

  Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalahmembantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan perundang – undangan.

- **Kepala Sub Bagian Keuangan**

- Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

**3. Kepala Bidang Perindustrian**

Tugas Kepala Bidang Perindustrian adalah membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perindustrian, energy dan sumber daya mineral dan fungsi Kepala Bidang Perindustrian adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, energy dan sumber daya mineral
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian, energy dan sumber daya mineral
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindsutrian, energy dan sumber daya mineral
d. Pelaksanaan administrasi di bidang perindustrian; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Kepala Bidang Ketenagakerjaan**

Tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan adalah membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketenagakerjaan. Dan fungsi Kepala Bidang Ketenagakerjaan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan
c. Pelaksanaan evalausi dan pelaporan di bidang ketenagakerjaan
d. Pelaksanaan administrasi di bidang ketenagakerjan, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**5. Kepala UPT Balai Latihan Kerja**

Tugas Kepala UPT BLK membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja dan fungsi Kepala UPT BLK adalah :

a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja
b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja
d. Pelaksanaan administrasi UPT
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas trekait Tugas dan Fungsinya.

- **Sub Bagian Tata Usaha**

  Tugas Sub Bagian Tata Usaha Adalah membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

**6. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

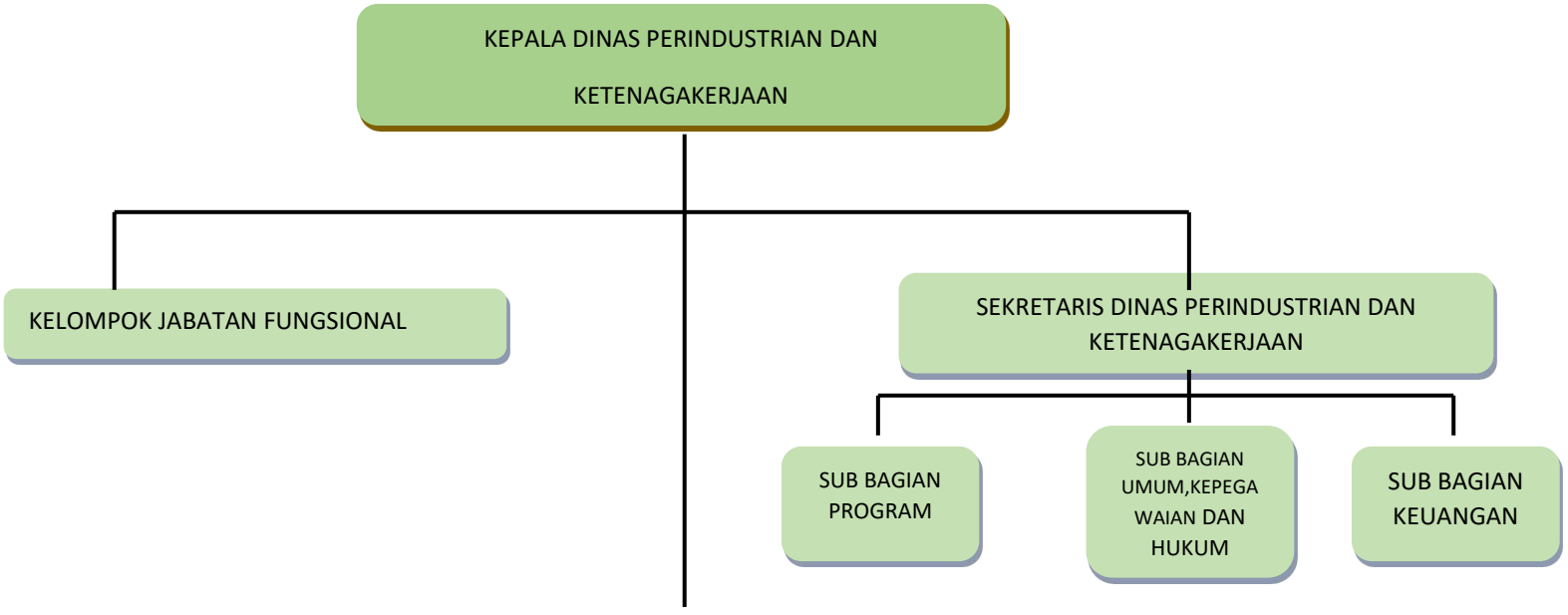
## II. STRUKTUR ORGANISASI

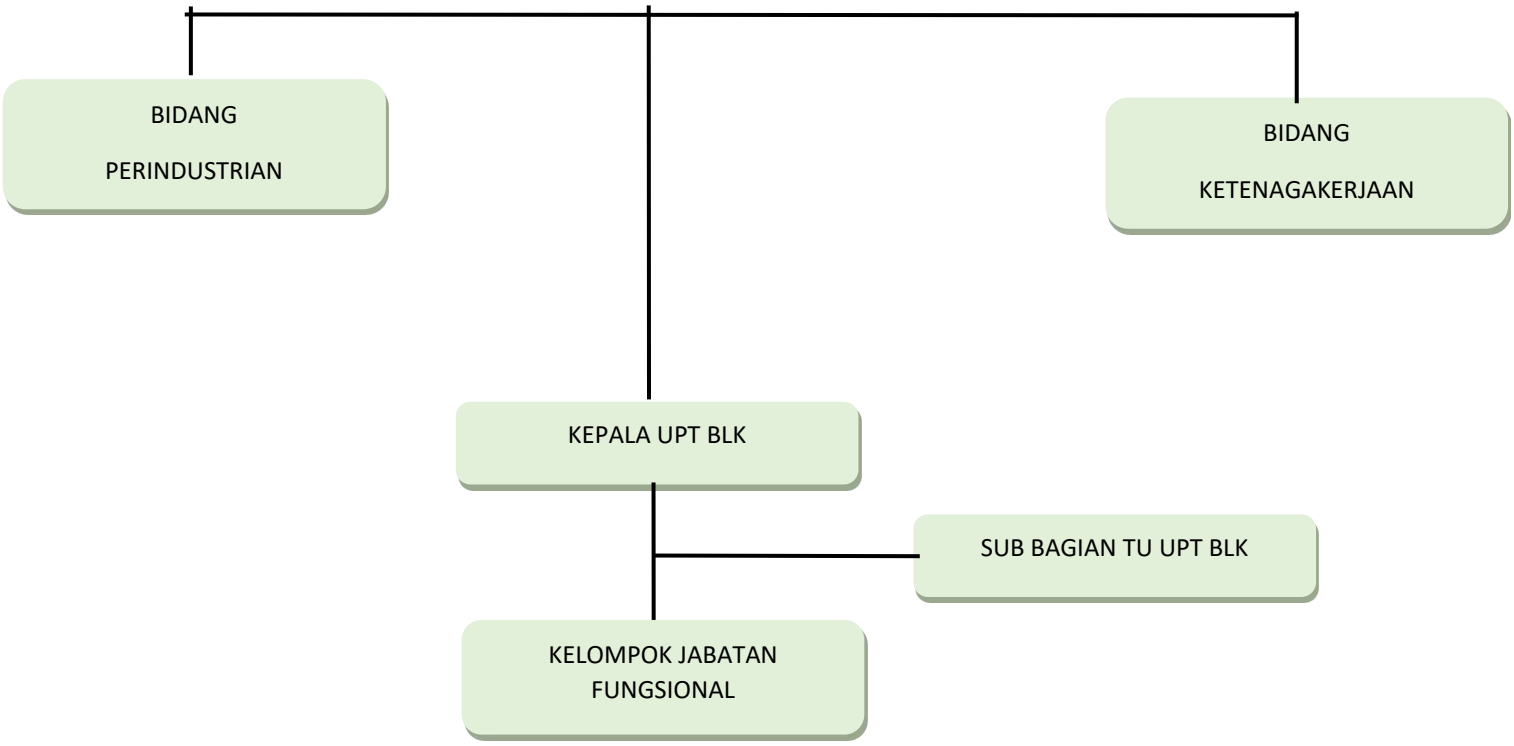
Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sealayar adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Perindsutrian dan Ketenagakerjaan. Dengan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari
   - Sub Bagian Program
   - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
   - Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perindustrian
d. Bidang Ketenagakerjaan
e. Kelompok Jabatan Fungsional
f. UPT Balai Latihan Kerja, Terdiri dari
   - Sub Bagian Tata Usaha
   - Kelompok Jabataan Fungsional / Instruktur

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN KETENAGAKERJAAN






## II. 1 SUMBER DAYA DISPERINNAKER

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kepulauan Sealayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Agustus 2025 sebanyak 41 Orang, dengan klasifikasi menurut pendidikan/golongan jumlah jabatan structural, Jabatan Fungsional, jabatan pelaksana dan PHL.

**Tabel 2.1**

**KUALIFIKASI PEGAWAI ASN MENURUT PENDIDIKAN**

| NO. | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | S2 | 5 | 25% |
| 2. | S1/DIV | 12 | 60% |
| 3. | D3 | 1 | 5% |
| 4. | SLTA | 2 | 10% |
| **TOTAL** | | **20** | **100** |

Tabel 2.1 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Disperinnaker mayoritas Adalah S1/DIV yaitu sebanya 12 orang atau 60%, selanjutnya yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang atau 25%, selanjutnya berpendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau 10 %, selanjutnya berpendidikan D3 sebanyak 1 orang atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendididikan Disperinnaker sudah memadai

**Tabel 2.2**

**KUALIFIKASI PEGAWAI ASN MENURUT GOLONGAN**

| NO. | GOLONGAN/RUANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | IVb | 2 | 10% |
| 2. | IVa | 3 | 15% |
| 3. | IIId | 8 | 40% |
| 4. | IIIc | 2 | 10% |
| 5. | IIIb | 1 | 5% |
| 6. | IIIa | 2 | 10% |
| 7. | IIc | 1 | 5% |
| 8 | IX | 1 | 5% |
| **TOTAL** | | **20** | **100** |

**Tabel 2.3**

**KUALIFIKASI JABATAN STRUKTURAL**

| NO. | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | KEPALA DINAS | 1 | 13% |
| 2. | SEKRETARIS | - | - |
| 3. | KEPALA BIDANG | 2 | 25% |
| 4. | KEPALA SUBBAGIAN | 4 | 50% |
| 5. | KEPALA UPT BLK | 1 | 13% |
| **TOTAL** | | **8** | **100** |

**Tabel 2.4**

**KUALIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL**

| NO. | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | PEJABAT FUNGSIONAL | 5 | 100% |
| **TOTAL** | | **5** | **100** |

**Tabel 2.5**

**KUALIFIKASI JABATAN PELAKSANA**

| NO. | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | JABATAN PELAKSANA | 7 | 100% |
| **TOTAL** | | **7** | **100** |

**Tabel 2.6**

**KUALIFIKASI PEGAWAI HARIAN LEPAS**

| NO. | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | PHL | 21 | 100% |
| **TOTAL** | | **21** | **100** |

# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL OPD

## (BAPPERIDA)
## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

## KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

# GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

## Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Tipe kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah tipe A, hal ini terwujud dari uraian tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, email : bapperidaselayar@gmail.com dan website : https://bapperida.kepulauanselayarkab.go.id serta dengan titik koordinat X -6,120087 dan Y -120.466638.

## Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
b. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkenlanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian penerapan invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkenlanjutan serta pelaksanaan penyusunan rencana induk peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat**

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawian
d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi

***Sekretariat terdiri dari :***

***1. Sub Bagian Program***

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja.

***2. Sub Bagian Keuangan***

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

***3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum***

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan.

**Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan**

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan**

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan.

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang perencanaan perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**Bidang Riset dan Inovasi Daerah**

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah.

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah
3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang riset dan inovasi daerah
4. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang bidang riset dan inovasi daerah
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah
6. Pelaksanaan administrasi di bidang riset dan inovasi daerah

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukankegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ditentuka berdasarkan kebutuhan dan beban kerja

Jenis dan jenang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUMBER DAYA APARATUR
## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Berdasarkan data kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 31 pegawai, sedangkan untuk pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) sebanyak 30 pegawai sehingga jumlah total pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 61 pegawai.

Jumlah dan komposisi pegawai ASN dan Non ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 berdasarkan jenjang Pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Jumlah ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

| No | Jenjang Pendidikan | ASN | | | Non ASN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Pegawai | Persentase terhadap ASN | Persentase terhadap seluruh pegawai | Jumlah Pegawai | Persentase terhadap Non ASN | Persentase terhadap seluruh pegawai |
| 1 | S3 | 2 | 06,45 % | 03,27 % | - | - | - |
| 2 | S2 | 12 | 38,70 % | 19,67 % | - | - | - |
| 3 | S1 | 13 | 41,93 % | 21,31 % | 23 | 76,66 % | 37,70 % |
| 4 | D-III | - | - | - | 1 | 3,33 % | 01,63 % |
| 5 | SMA | 4 | 12,90 % | 06,55 % | 6 | 20 % | 09,83 % |
| | **Jumlah** | **31** | **100 %** | **50,81 %** | **30** | **100 %** | **49,19 %** |

*Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

Selanjutnya untuk pegawai ASN bila dilihat dari Pangkat / Golongan Ruang dari 31 pegawai yang termasuk dalam IV sebanyak 11 pegawai (35%), golongan III sebanyak 18 pegawai (58%) dan golongan II sebanyak 2 pegawai (6%), Dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2025

| No | Pangkat / Golongan Ruang | Jumlah Pegawai | Persentase terhadap Pegawai ASN (%) |
|---|---|---|---|
| **1** | **Golongan IV** | **11** | **35 %** |
| | Pembina Utama Muda / IV.c | 1 | 3 % |
| | Pembina Tk. I / IV.b | - | 0 % |
| | Pembina / IV.a | 10 | 32 % |
| **2** | **Golongan III** | **18** | **58 %** |
| | Penata Tk. I / III.d | 7 | 23 % |
| | Penata / III.c | 4 | 13 % |
| | Penata Muda Tk. I / III.b | 4 | 13 % |
| | Penata Muda / III.a | 3 | 10 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | **Golongan II** | **2** | **6 %** |
| | Pengatur Tk. I / II.d | - | 0 % |
| | Pengatur / II.c | 2 | 6 % |
| | Pengatur Muda Tk. I / II.b | - | 0 % |
| | Pengatur Muda / II.a | - | 0 % |
| | **Jumlah** | **31** | **100 %** |

*Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

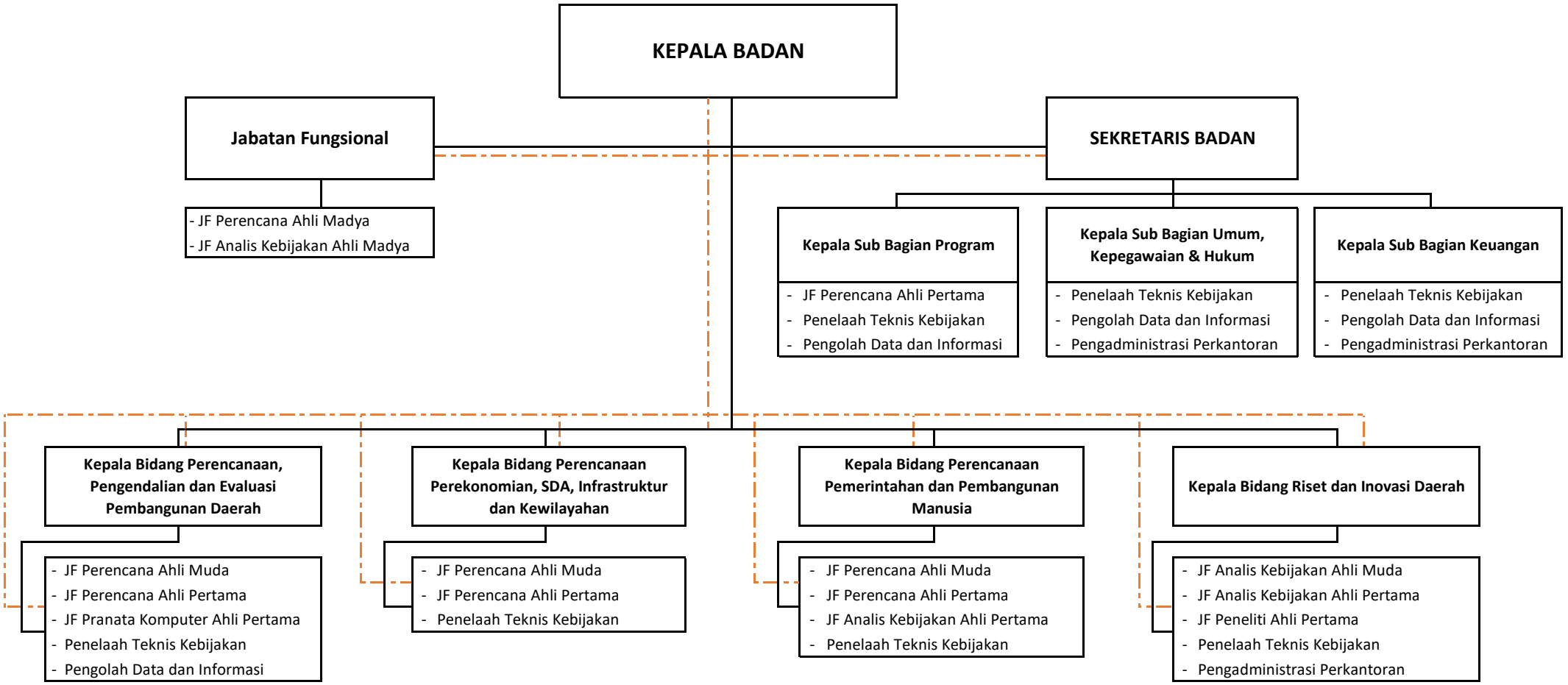
Dari sisi kedudukan organisasi, dari 31 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (3%) yang menduduki jabatan eselon II, 5 pegawai (16%) yang menduduki jabatan eselon III, 3 pegawai (10%) yang menduduki eselon IV, 11 pegawai (35%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu serta 11 pegawai (35%) yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional umum, Dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Tahun 2025

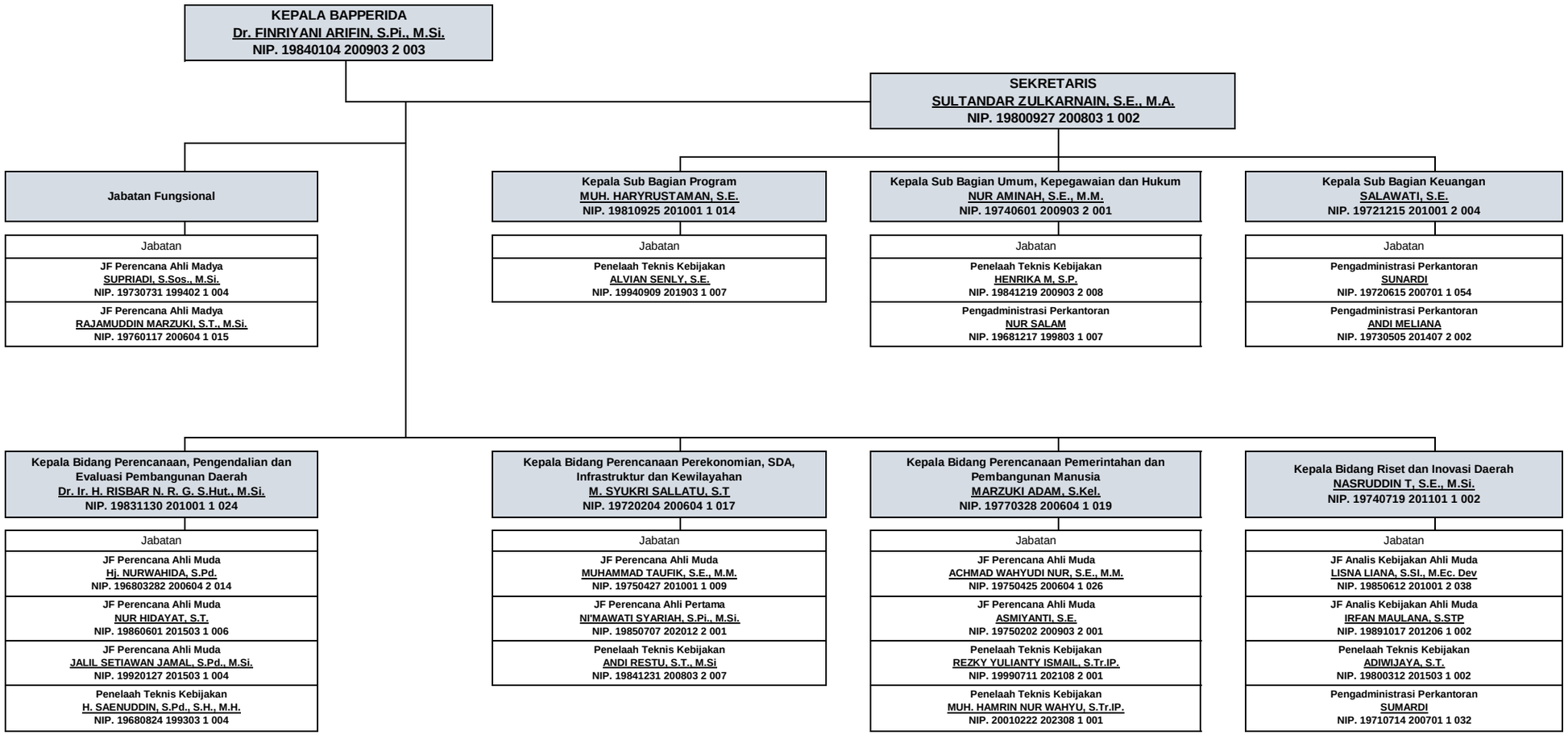
| No | Jabatan | Jumlah Pegawai | Persentase terhadap Pegawai ASN (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eselon II | 1 | 3 % |
| 2 | Eselon III | 5 | 16 % |
| 3 | Eselon IV | 3 | 10 % |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 11 | 35 % |
| 5 | Jabatan Fungsional Umum | 11 | 35 % |
| | Jumlah | 31 | 100 % |

*Sumber : BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025*

Peta Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar



# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



**Nama OPD/Kantor** : Badan penggelola keuangan dan Pendapatan Daerah.

**Alamat** : Jln Ahmad Yani No 1 Benteng Selayar

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah .

## TUGAS DAN FUNGSI

berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

**Tugas Pokok :**

Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

**Fungsi :**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Badan Penggelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
3. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang pengelolan pendapatan
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan;
5. Merumuskan kebijakan urusan pemerintah bidang pengelolaan barang milik daerah ( BMD )
6. pelaksanaan administrasi Badan; dan
7. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait Tugas dan fungsinya.

## VISI DAN MISI

Visi dan Misi ini tertuang dalam rencana Strategis Badan penggelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 visi misi ini memberikan gambaran terhadap keinginan BPKPD kabupaten Kepulauan Selayar ke depan dan hal-hal yang akan di lakukan untuk mewujudkannya.

**Visi :**

Kabupaten kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia. Yang bermaksud :

**Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.**

**Misi :**

Mengembangkan Tata Kelolah Pemerintahan Yang Akuntabel dan trasparan. Yang bermaksud :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Meningkatkan pengendalian dan pengelolaan barang milik daerah (BMD)

**JENIS PELAYANAN**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang keuangan dan pengawasan kelembagaannya maka berikut ini kondisi pelayanan yang di laksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Pelayanan Asistensi penyusunan rencana Kerja dan anggaran ( RKA-SKPD
2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Perubahan Dokumen
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD )
5. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja OPD-SKPD
6. Pelayanan Verifikasi SPM
7. Pelayanan Penerbitan SP2D
8. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
9. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos
10. Pelayanan Penerimaan Kas
11. Pelayanan Peminjaman Surat-Surat berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito )
12. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD
13. Pelayanan Pembayaran Retribusi ijin pemakaian Tempat-tempat yang di kuasai oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
14. Pelayanan Pendaftaran bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan ( BPHTB )
15. Pelayanan pajak air tanah
16. Pelayanan pendaftaran pajak bumi dan bangunan ( PBB-P2 )
17. Pelayanan pajak mineral bukan logam dan batuan
18. Pelayanan pajak hiburan
19. Pelayanan pajak hotel
20. Pelayanan pajak makanan dan minuman
21. Pelayanan pajak reklame

**SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung oleh 52 orang pegawai negeri sipil dari berbagai latar belakang pendidikan berdasarkan tingkat pendidikan dapat di klasifikasikan sbb

**Data Jumlah Pegawai**

| No | Klasfikasi Pegawai | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai ASN | 46 |
| 2 | Pegawai P3K | 2 |
| 3 | Pegawai Non ASN | 96 |
| | **Jumlah** | **144** |

**Berdasarkan golongan dan ruang**

| No | Golongan | Jumlah Orang |
|---|---|---|
| 1 | Pembina Utama Muda ( IV/c ) | |
| 2 | Pembina TK. 1 ( IV/b ) | 1 |
| 3 | Pembina ( IV/a ) | 5 |
| 4 | Penata TK 1 ( III/d ) | 12 |
| 5 | Penata ( III/ c ) | 9 |
| 6 | Penata Muda TK 1 ( III/b ) | 7 |
| 7 | Penata Muda ( III/a ) | 11 |
| 8 | Pengatur TK 1( II/d ) | 1 |
| 9 | Pengatur ( II/c ) | 0 |
| 10 | Pengatur ( II /b ) | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | P3K ( Fungsional Tertentu ) | 2 |
| **Jumlah** | | **48** |

**Berdsarkan tingkat pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah Orang |
|---|---|---|
| 1 | S2 | 13 |
| 2 | S1 | 23 |
| 3 | D3 | 2 |
| 4 | SMA | 10 |
| **Jumlah** | | **48** |

Dengan demikian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah mempunyai cukup sumber daya manusia yang memadai dengan di tunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan.

**Inovasi & Sistem Informasi**

- BPKPD telah mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi **SIMPADA** (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) untuk mempermudah pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.
- Melalui portal web, publik dapat mengakses berbagai informasi dan dokumentasi pelayanan publik, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

**Informasi Publik & Transparansi**

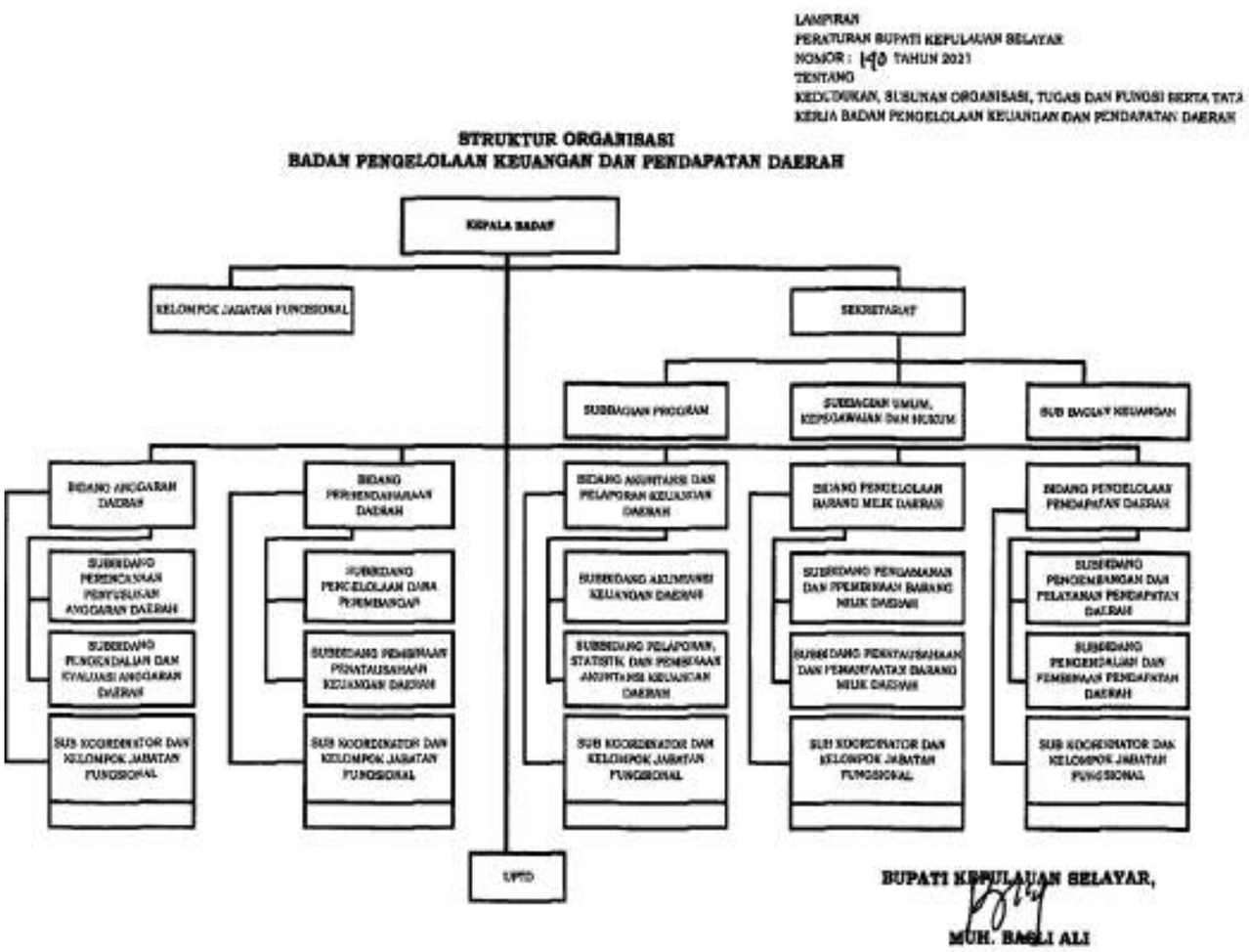
- Informasi berkala seperti **Organisasi PPID Pembantu**, **Opini BPK atas LHP Tahun 2024**, keputusan penyelenggaraan kontrak, daftar informasi publik (DIP), dan laporan keuangan tersedia dan dapat diunduh publik.
- Standar informasi yang tersedia *setiap saat* seperti peraturan daerah/bupati, standar barang dan jasa, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.
- Portal PPID Kabupaten Kepulauan Selayar mengelola permohonan informasi, termasuk pengajuan keberatan, dan mendokumentasikan berbagai laporan publik (misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Realisasi Anggaran, dan fisik).

**Prestasi dan Data Terkait**

- **Realisasi Pajak Daerah 2022:** BPKPD berhasil melampaui target pajak daerah di tahun 2022, mencapai realisasi sekitar **102,99%** dari target. Selayarnews.com
- **Capaian Pendapatan Asli Daerah** (PAD) pada kuartal I 2024 masih rendah dibanding target: sekitar Rp 8,015 miliar dari target Rp 95 miliar (± 8,44 %) pada periode itu. detikcom

**Kontak & Media**

- **Alamat:** Jl. Jend. Ahmad Yani, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
- **Portal web resmi:** bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id bpkpd.kepulauanselayarkab.go.id
- **PPID / Informasi publik:** e-PPID Kabupaten Kepulauan Selayar ppid.kepulauanselayarkab.go.id



**PROFIL BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

## 1.1 Gambaran Umum BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan BKPSDM diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Tugas & Fungsi dan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Gambar 1.1**
**FOTO KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**




BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah Tipe A yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di koordinat -

6.1208390 Lintang Selatan dan 120.4666590 Bujur Timur, dengan alamat email bkppd@kepulauanselayarkab.go.id. BKPSDM memiliki laman website sebagai bahan informasi yaitu https://bkd.kepulauanselayarkab.go.id/ .Selain itu, BKPSDM juga memiliki sosial media sebagai sumber informasi yaitu Facebook (BKPSDM Kepulauan Selayar) dan Instagram (@bkpsdmkepulauanselayar).

## 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM

1. Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembanagn sumber daya manusia;
d. Pelaksanaan administrasi Badan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

 Kepala Subbagian Program

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

 Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

 Kepala Subbagian Keuangan

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargan;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengambangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten kepulauan selayar adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Program;
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :

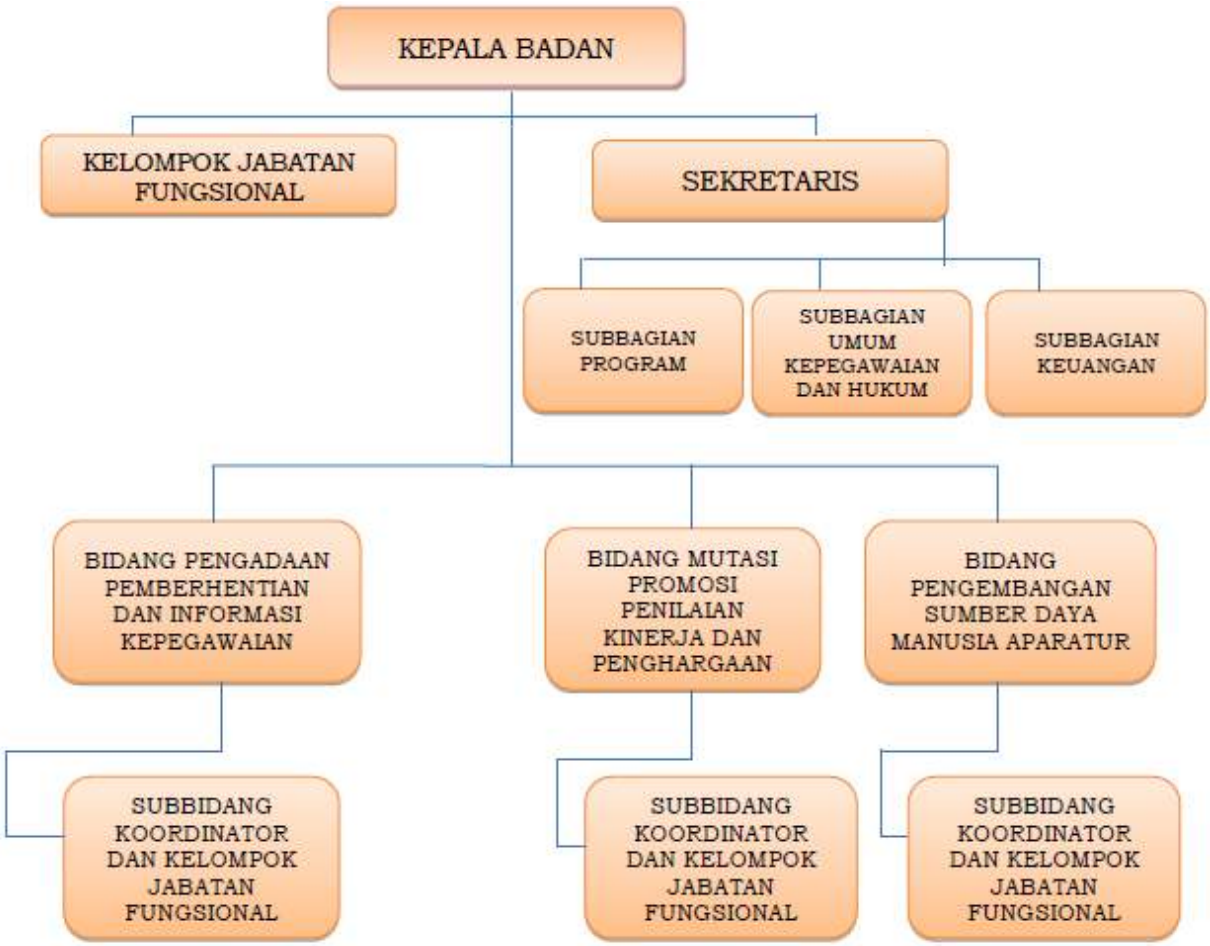
d. Bidang Mutasi Promosi Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR




## 1.3 Sumber Daya BKPSDM

Jumlah pegawai di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2022 sebanyak 42 orang, dengan klasifikasi menurut pendidikan dan pangkat/golongan serta jumlah pejabat struktural.

**Tabel 1.1**
**KLASIFIKASI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 5 | 11,90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | S1/DIV | 23 | 54,76 |
| 3 | D3 | 4 | 9,53 |
| 4 | SLTA | 10 | 23,81 |
| **TOTAL** | | **42** | **100** |

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BKPSDM mayoritas berpendidikan S1/DIV yaitu sebanyak 23 orang atau 54.76%, selanjutnya yang berpendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau 23.81%, selanjutnya yang berpendidikan S2 yaitu sebanyak 5 orang atau 11.90% dan berpendidikan D3 yaitu sebanyak 4 orang atau 9.53%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan pegawai BKPSDM sudah memadai.

**Tabel 1.2**
**KUALIFIKASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

| NO | GOLONGAN/RUANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan IV/d | - | 0 |
| 2 | Golongan IV/c | 1 | 2,38 |
| 3 | Golongan IV/b | - | 0 |
| 4 | Golongan IV/a | 3 | 7,14 |
| 5 | Golongan III/d | 10 | 23,81 |
| 6 | Golongan III/c | 5 | 11,91 |
| 7 | Golongan III/b | 4 | 9,52 |
| 8 | Golongan III/a | 7 | 16,67 |
| 9 | Golongan II/d | 4 | 9,52 |
| 10 | Golongan II/c | 6 | 14,29 |
| 11 | Golongan II/b | 2 | 4,76 |
| 12 | Golongan II/a | - | 0 |
| **TOTAL** | | **42** | **100** |

**Tabel 1.3**
**KUALIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL**

| NO | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | KEPALA BADAN | 1 | 12,5 |
| 2 | SEKRETARIS | 1 | 12,5 |
| 3 | KEPALA BIDANG | 3 | 37,5 |
| 4 | KEPALA SUBBAGIAN | 3 | 37,5 |
| **TOTAL** | | **8** | **100** |

# PROFIL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## 1.1. Gambaran Umum SKPD

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan suasana aman nyaman dan kondusif sangat dibutuhkan. Pembangunan dan keamanan yang kondusif serta terkendali bagaikan 2 sisi mata uang, sisi satu tak ada arti tanpa sisi lainnya.

Dengan Pertimbangan, Peran dan tanggung jawab Pemerintah, maka telah ditetapkan organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Selayar dengan struktur organisasi type B dengan komposisi Kepala Badan dan sekretaris serta 3 Bidang.

## 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kepulauan Selayardapat kami sampaikan sebagai berikut :

### 1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**2. Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

**3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan politik;
b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e. pelaksanaan administrasi di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sehubungan dengan Tupoksi ini berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang akan dan mungkin akan dihadapi. Hal-hal tersebut antara lain:

Gangguan Kantibmas dalam pelaksanaan/proses pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, termasuk gangguan pembangunan perpolitikan, pengendalian kantibmas serta gangguan lain yang berhubungan dengan konflik Ras.

Untuk melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

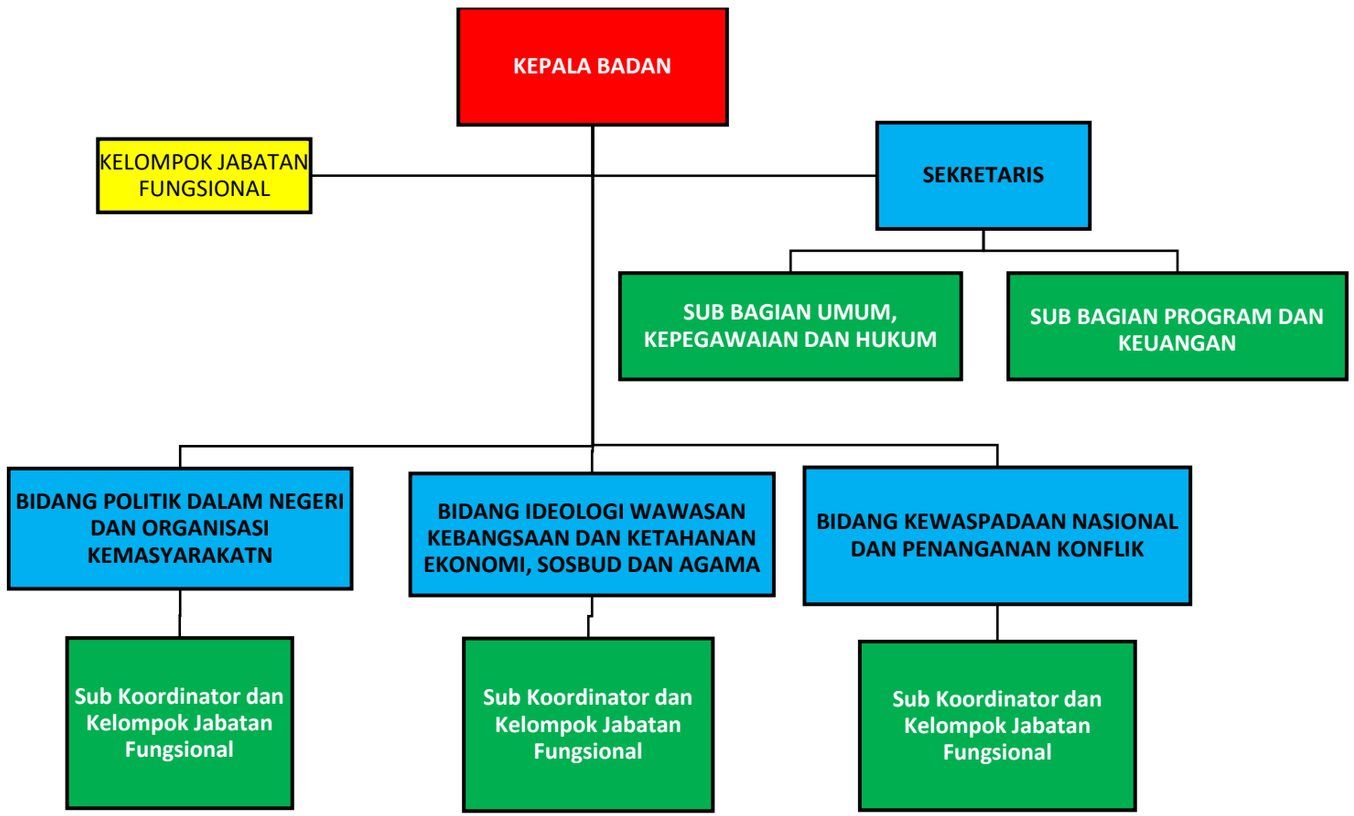
a. Kepala Badan.
b. Sekretaris, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

d. Bidang Politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing kelompok jabatan fungsional dapat membentuk sub koordinator.

Adapun struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupataen Kepulauan Selayar terlihat dalam gambar berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**
**(Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2021)**



Adapun Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Jalan Kemiri No, 27 Benteng kode pos 92812 yang terletak pada koordinat -6.11511,120.46343.





### 1.3. Jumlah aparatur sipil negara, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

Untuk Kondisi SDM dapat digambarkan sebagai berikut:

| No. | Jabatan Struktural | Jumlah | Pangkat / Gol. | Jumlah | Pendidikan | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kepala Badan | 1 orang | Pembina Utama Muda | 1 orang | S2 | 1 orang | |
| 2. | Sekretaris | 1 orang | Pembina TK. I | 1 orang | S 2 | 1 orang | |
| 3. | Kepala Bidang | 3 orang | Pembina | 1 orang | S2 | 1 orang | |
| | | | Penata TK. I | 1 orang | S2 | 1 orang | |
| | | | Pembina | 1 orang | S1 | 1 orang | |
| 4. | Kasubag. | 2 orang | Penata TK. I | 1 orang | S 1 | 1 orang | |
| | | | Penata | 1 orang | D3 | 1 orang | |
| 5. | Fungsional | 4 orang | Penata TK. I | 3 orang | S 1 | 3 orang | |
| | | | Penata | 1 orang | S 1 | 1 orang | |
| 6. | Staf | 4 Orang | Penata Tk. I | 1 orang | S1 | 1 orang | |
| | | | Penata Muda | 1 orang | SLTA | 1 orang | |
| | | | Pengatur | 2 orang | SLTA | 2 orang | |
| 7. | PPPK | 1 Orang | IX | 1 Orang | S1 | 1 Orang | |
| | | 16 orang | | 16 orang | | 16 orang | |

Tabel di atas, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Kesbangpol yang dinilai semakin kompleks.

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL OPD

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Situs Web Kami
bpbd.kepulauanselayarkab.go.id

# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang tinggi, selain itu seiring dengan berjalannya waktu dan munculnya globalisasi yang telah mengakibatkan terkikisnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, angin kencang, gelombang laut ekstrim), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak), serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia), bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia (konflik sosial).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Kepulauan Selayar diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas-luasnya bagi keterlibatan iklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Pergeseran tersebut bergerak mengikuti laju semangat kesetaraan *gender*, non partisan yang berkeadilan. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menghadapi bencana.

## 1.2. Dasar-Dasar Hukum

Landasan hukum Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

# GAMBARAN PELAYANAN
# BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

## 2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

### 2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 142 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dan sekaligus mempunyai fungsi pengordinasian, pengkomandoan dan pelaksana dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1) Kepala Pelaksana Badan
2) Sekretariat, meliputi :
   a. Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan
   c. Subbagian Keuangan
3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional ; dan
6) Kelompok Jabatan Fungsional

Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

**1) Kepala Pelaksana Badan**

Kepala Pelaksana Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Kepala Pelaksana Badan dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang penanggulangan bencana daerah;
d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Badan meliputi :

- Menyusun rencana kerja Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Badan;
- Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Menyelenggarakan pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- Menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
- Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Pelaksana Badan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Menyelenggarakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2) Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Pelaksana mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana;
b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;

e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang- undangan badan penanggulangan bencana daerah;
f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja badan;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Subbagian Umum, Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja.
- Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

Uraian tugas Sekretaris meliputi :

- Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran badan penanggulangan bencana daerah;
- Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akutansi dan pelaporan keuangan;
- Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengolaan asset, dan dokumentasi;
- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup badan;
- Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang–undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- melakasanakan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- melaksanakan penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup Badan;
- melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi ;

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pencegahan dan ke siapsiagaan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Uraian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- merumuskan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan penanggulangan bencana;
- melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana;
- melaksanakan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesisapsiagaan dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4) Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik Dipimpin oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kedaruratan dan logistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang kedaruratan dan logistik.

Uraian tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah badan;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana daerah;
- melaksanakan tanggap kedaruratan dan logistik;

- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kedaruratan dan logistik dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk mengetahui perkembangan

pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- merumuskan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana;
- melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6) Kelompok Jabatan Fungsional**

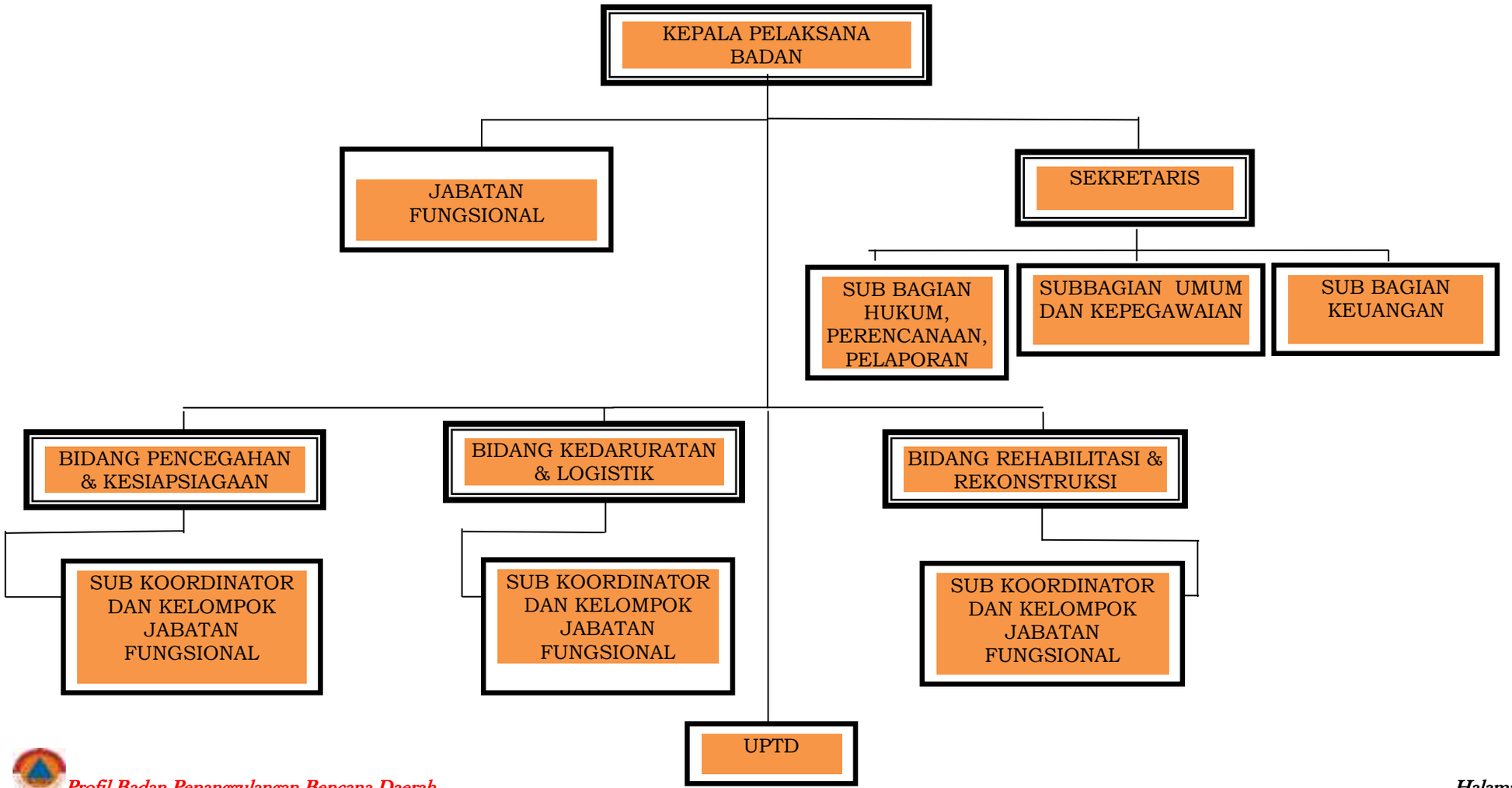
Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan

administrator masing masing.

**GAMBAR 2.1**
**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**
**KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



### 2.1.2. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan profesionalisme yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasi utama dalam upaya untuk mencapai tujuan dimana potensi yang dimilikinya diarahkan untuk merealisasikan Visi dan Misi antara lain :

1. **Jumlah ketersediaan SDM (ASN dan PHL) BPBD Kab.Kep. Selayar**

Tabel 2.1. Potensi Sumber Daya Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

| No | Pangkat / Gol. | Jumlah | Pendidikan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pembina Utama Madya | 1 Orang | S2 | Kepala Pelaksana |
| 2. | Pembina Tk. I | 1 Orang | S2 | Sekretaris |
| 3. | Pembina | 2 Orang | S1, S2 | Kabid. / Kasubag. |
| 4. | Penata TK. I | 6 Orang | S1/S2 | Kabid./Kasubag./ Fungsional Tertentu |
| 5. | Penata Muda Tk. I | 3 Orang | S1/S2 | Fungsional Pelaksana |
| 6. | Penata Muda | 2 Orang | S1/SMA | Fungsional Pelaksana |
| 7. | Pengatur Tk I | 1 Orang | SMA | Fungsional Pelaksana |
| 8. | Pengatur | 1 Orang | SMA | Fungsional Pelaksana |
| 9. | PPPK/IX | 2 Orang | S1 | Penata PB Ahli Pertama |
| 10. | - | 68 Orang | S1, DII, SMA | Pegawai Harian Lepas (PHL) |
| | **Jumlah** | **87 orang** | | |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya aparatur belum cukup memadai dengan total pegawai sebanyak 87 orang, melihat kenyataan yang ada di lapangan masih membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan/skill yang secara teknis mampu menyikapi persoalan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dinilai semakin kompleks.

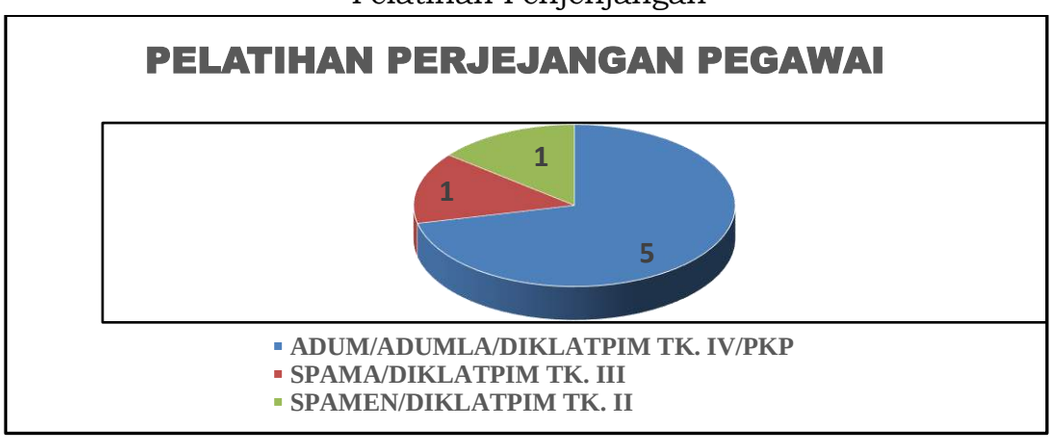
## 2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

| No. | Nama Pelatihan Penjenjangan | Jumlah |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | ADUM/ADUMLA/DIKLATPIM TK. IV | 5 Orang |
| 2 | SPAMA/ DIKLATPIM TK. III | 1 Orang |
| 3 | SPAMEN/DIKLATPIM TK. II | 1 Orang |
| **Jumlah** | | **7 Orang** |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.1. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan




Berdasarkan tabel 2.2. dan grafik 2.1. menunjukkan bahwa sumber daya aparatur yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan masih 7 orang atau sekitar 70 % dari total pejabat sebanyak 10 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

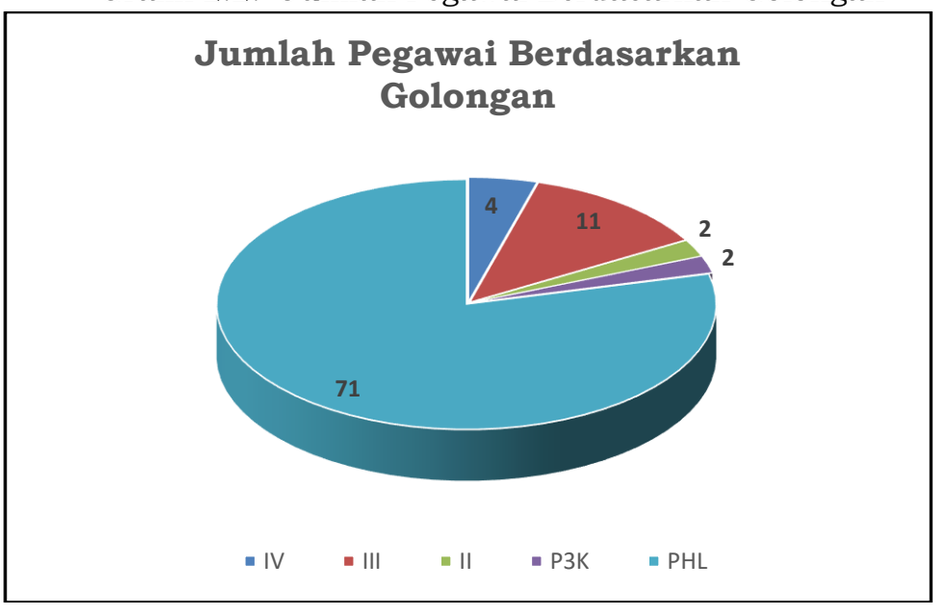
## 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jumlah |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | IV | 4 Orang |
| 2 | III | 11 Orang |
| 3 | II | 2 Orang |
| 4 | PPPK | 2 Orang |
| 5 | PHL | 68 Orang |
| **Jumlah** | | **87 Orang** |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan




Berdasarkan tabel 2.3. dan grafik 2.2. menunjukkan terdapat 8 jabatan struktural dengan golongan ruang IV dan III, dan terdapat pula jabatan fungsional tertentu sebanyak 2 orang dengan golongan ruang III, dan golongan ruang II terdapat 2 orang ASN, dan terdapat 2 orang PPPK dengan golongan ruang IX, serta Pekerja Harian Lepas (PHL) sebanyak 68 orang dengan total ASN dan PHL sebanyak 87 orang pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar.

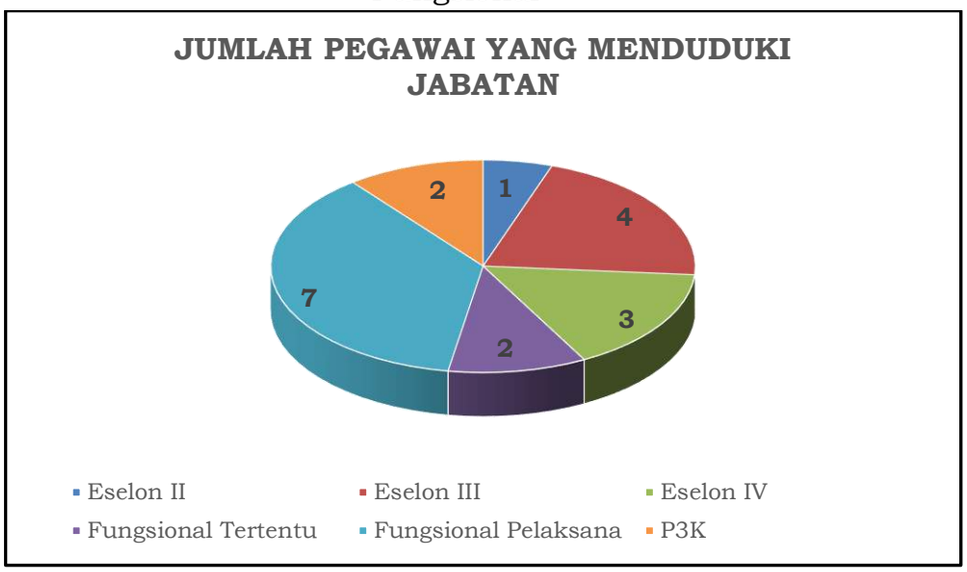
**4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Fungsional**

Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional

| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Eselon II | 1 Orang |
| 2 | Eselon III | 4 Orang |
| 3 | Eselon IV | 3 Orang |
| 4 | Fungsional Tertentu | 2 Orang |
| 5 | Fungsional Pelaksana | 7 Orang |
| 6 | PPPK | 2 Orang |
| **Jumlah** | | **19 Orang** |

Sumber: Sekretariat BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Grafik 2.3. Jumlah Pegawai Yang Menduduki Eselon dan Fungsional




Berdasarkan tabel 2.4. dan Grafik 2.3. menunjukkan bahwa terdapat 1 orang yang menduduki jabatan eselon II sebagai Kepala Pelaksana BPBD, dan terdapat 4 orang yang menduduki jabatan eselon III sebagai Sekretaris dan Kepala Bidang, dan terdapat 3 orang yang menduduki jabatan eselon IV sebagai Kasubag. dan 2 orang dengan jabatan Fungsional Tertentu dan 7 Orang dengan jabatan Fungsional Pelaksana dan 2 orang dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga total ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 19 orang.

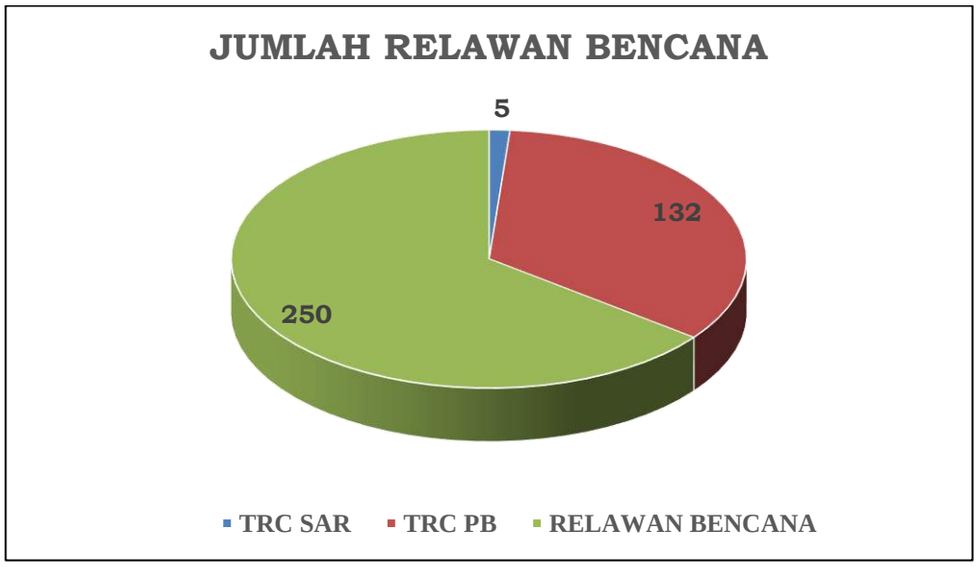
### 5. Relawan Bencana

Tabel. 2.5. Jumlah Relawan Bencana

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Tim SAR | 5 Orang |
| 2 | TRC PB | 132 Orang |
| 3 | Relawan Bencana (RB) | 250 Orang |
| **Jumlah** | | **387 Orang** |

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Tabel. 2.4. Jumlah Relawan Bencana




Berdasarkan tabel 2.5 dan grafik 2.4. menunjukkan bahwa terdapat 5 orang sebagai Relawan Tim SAR, dan terdapat 132 orang sebagai relawan TRC PB, dan terdapat 250 orang sebagai relawan bencana Desa yang telah mengikuti pelatihan mitigasi dan pencegahan bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 6. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, disamping ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel. 2.6. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana (kendaraan operasional)

| *No.* | *Uraian* | *Jumlah* | *Tahun Perolehan* | *Kondisi* | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *Baik* | *Rusak Ringan* | *Rusak Berat* |
| 1 | Mobil Dapur Lapangan Izusu NKR BNPB | 1 Unit | 2011 | √ | | |
| 2 | Mobil Rescue Ford RDC | 1 Unit | 2011 | √ | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | STD<br>Colt L 300 | 1 Unit | 2018 | √ | | |
| 3 | Mobil<br>Operasional | 1 Unit | 2018 | √ | | |
| 4 | Politilene | 2 unit | 2016 | √ | | |
| 5 | Motor<br>Lapangan<br>Trail<br>Kawasaki LX | 2 Unit<br>2 unit | 2011<br>2016 | √<br>√ | | |
| 6 | Motor Dinas<br>lainnya | 20 Unit | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>2014<br>2016<br>2017 | √<br>√<br>√<br>√<br>√<br>√<br>√ | | |
| | ***JUMLAH*** | **30 Unit** | | **30** | **0** | **0** |

Sumber: BPBD Kab. Kep. Selayar, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.6 menunjukkan jumlah aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar berupa kendaraan operasional, dapat dilihat terdapat 32 unit kendaraan operasional, dari total tersebut 28 unit aset dengan kondisi baik dengan persentase 87,5 %, dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat sebanyak 4 unit dengan persentase 12,5 %, dan tidak terdapat aset dengan kondisi rusak ringan dengan persentase 0 %. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan aset di lingkungan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun berikutnya.

**7. Peralatan Kebencanaan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan sarana dan prasarana peralatan kebencanaan pada gudang BPBD yang berlokasi di Jalan Muh.Kareng Bonto No. 30 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dan dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada yang dapat dilihat pada tabel 2.2.7 dibawah ini :

Tabel. 2.7. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana
Penanggulangan bencana (peralatan kebencanaan)

| No | Uraian | Jumlah | | Tahun Perolehan | Kondisi | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Tenda Pengungsi | 4 | Peti | 2011 | | √ | |
| 2 | Tenda Dome/Tenda Keluarga | 5 | Buah | 2011 | √ | | |
| 3 | Multi Purpose Solar Cell | 13 | Buah | 2015 | √ | | |
| 4 | Baju Pelampung | 233<br><br>410 | Buah<br><br>Buah | 2008<br>2009<br>2015 | | √ | |
| 5 | Pesawat telepon Rig2 M Band | 1 | Buah | 2008 | | | √ |
| 6 | Tandu | 2 | Buah | 2007 | | | √ |
| 7 | Vellbad | 160 | Buah | 2009<br>2016 | √ | √ | √ |
| 8 | Field Bad BNPB | 10 | Buah | 2011 | | | √ |
| 9 | Tangga Aluminium/Katrol | 2 | Buah | 2011 | | | √ |
| 10 | Tenda peleton | 2 | Buah | 2011 | √ | | |
| 11 | Tenda Posko | 1 | Buah | 2011 | √ | | |
| 12 | Tenda Regu | 3 | Buah | 2011 | √ | | |
| 13 | Tenda Keluarga BNPB | 4 | Buah | 2011 | √ | | |
| 14 | BNPB water treatment | 1 | Unit | 2011 | √ | | |
| 15 | Chain Saw | 5<br>8 | Buah<br>Buah | 2019<br>2021 | √<br>√ | √<br>√ | √ |
| 16 | Garmin GPS | 1 | Buah | 2014 | | | √ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sargon Alas Tenda | 6 | Lembar | 2015 | | | √ |
| 18 | Hoda Generation Set | 1 | Buah | 2014 | √ | | |
| 19 | Senter HiD Seachlight | 1 | Buah | 2011 | | | √ |
| 20 | RIG Pesawat Radio | 1 | Buah | 2011 | | | √ |
| 21 | HT ALINCO | 15 | Buah | 2008 | | | √ |
| 22 | Faximili Panasonic | 1 | Buah | 2011 | | | √ |
| 23 | Toa Mega Phone | 1 | Buah | 2011 | | | √ |
| 24 | Sony Handycam | 1 | Buah | 2011 | √ | | |
| 25 | Camera Digital | 1 | Buah | 2010/2014 2017 | √ | | |
| 26 | Mesin Kapal Djiangdong JD 300 | 2 | Buah | 2014 | | | √ |
| 27 | Peralatan Deteksi Gempa | 1 | Unit | 2015 | √ | | |

Sumber : Data Inventaris Peralatan pada Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Kab. Kep. Selayar Tahun 2025.

Berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan Sarana dan prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki alat peringatan dini *(Early Warning System*). *Early Warning System* atau Sistem Peringatan Dini Bencana merupakan

elemen yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peringatan dini bencana sebagai salah satu bagian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mengambil tindakan dan respon cepat dan tepat yang sesuai untuk melakukan penyelamatan dan menghindari korban jiwa serta mengurangi dampak bencana tersebut. Sistem Peringatan Dini bencana digunakan baik pada saat kejadian bencana maupun pra bencana. Pada kondisi pra bencana, sistem peringatan dini berfungsi sebagai tindakan antisipatif sebelum kejadian bencana.

Dengan menilik dan mempertimbangkan risiko bencana yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar yang potensi bencana tsunami dengan kategori risiko tinggi maka sistem peringatan dini yang ada yaitu :

- *Early Warning System (EWS)* Gempa Bumi dan Tsunami BMKG

  *EWS* Gempa Bumi dan Tsunami ini merupakan alat EWS yang dipinjam pakaikan oleh BMKG kepada BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar berupa *Warning Receiver System -New Generation (WRS NewGen),* merupakan sistem *Real-Time* penerima informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dengan menggunakan perangkat *recommended hardware* berupa *smart display* dan terkoneksi secara online dengan sistem diseminasi di Pusat InaTEWS-BMKG.

  Keunggulan dari alat *WRS NewGen* ini adanya informasi gempa bumi real-time yang disertai visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak), dan hal ini merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebaran informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang dapat memberikan informasi secara cepat. Sebagai tambahan informasi *smart display* ini disupport dengan *operating system Linux*, aplikasi *WRS client*, dan *browser* untuk membukan informasi seperti *google chrome* dan *mozilla firefox.*

  Adapun informasi fitur informasi yang ditampilkan seperti :

  a. Bunyi *alarm* (saat menerima informasi atau

peringatan);

b. Informasi gempa bumi *real-time* dari BMKG secara otomatis disertai dengan visualisasi penjalaran gelombang P dan S (gelombang merusak);
c. Informasi gempa bumi M diatas 5, peringatan dini *tsunami* dan gempa bumi dirasakan yang dikirim sesuai dengan SOP BMKG sertai *Pop Up Window* dalam bentuk teks dan peta;
d. Data historis informasi gempa bumi *real time* selama 20 hari terakhir, historis informasi gempa bumi M diatas 5, historis peringatan dini tsunami dan historis gempa dirasakan;
e. *Shake Map* (peta guncangan);
f. Berbasis *Cloud*;
g. Info skala MMI; dan
*h. Glossary*.

Gambar 2.2 Alat Peringatan Dini WRS Ina-TEWS (*Warning Receiver System* Indonesia *Tsunami Early Warning System*).




### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi terjadinya bencana yang cukup tinggi dimana wilayah Kepulauan Selayar memiliki topografi lautan, pegunungan, dataran rendah, topografi yang bervariasi

utamanya dataran rendah mengakibatkan tiap tahunnya mengalami bencana angin kencang, gelombang laut ekstrim (gelombang pasang), banjir dan kebakaran.

Ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk angin kencang terjadi dalam periodik 1 tahunan, dan gelombang laut ekstrim (gelombang pasang) terjadi setiap tahunnya, dan masih terdapat beberapa bencana lainnya yang terjadi Kabupaten Kepulauan Selayar seperti adanya tanah longsor, banjir, dan kebakaran.

Bencana alam tersebut juga berpotensi terjadi dan akan mengakibatkan kerugian materil maupun non materil sehingga sebelum bencana tersebut terjadi maka perlu dilakukan perencanaan untuk pengurangan risiko bencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8. Data capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Kecamatan/Kelurahan/Desa/Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I.** | **Penanggulangan Bencana** | | | | | |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | | | | | |
| | - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota | - | - | - | Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) daerah rawan bencana | ✓ Kec. Bontosikuyu (Sosialisasi penanggulangan bencana alam dan pencegahan penyebaran Covid-19) | 11 Kec. di seluruh wilayah Kab.Kep. Selayar (Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pengoptimalan Posko Penanganna Covid-19) | ✓ Kec. Pasilambena<br>✓ Kec. Takaboneratе (Pendataan daerah rawan bencana dan pengambilan titik koordinat) | ✓ Kec. Pasimasunggu<br>✓ Kec. Pasimasunggu Timur<br>✓ Kec. Pasimarannu<br>✓ Kec. Pasilambena<br>✓ Kec. Bontomatene<br>✓ Kec. Buki<br>✓ Kec. Bontomanai<br>✓ Kec. Bontoharu<br>✓ Kec. Bontosikuyu (Pendataan Aplikasi INARISK Personal | ✓ Kec. Bontoharu<br>✓ Kec. Bontosikuyu<br>✓ Kec. Buki<br>✓ Kec. Pasilambena<br>✓ Kec. Pasimarannu (Sosialisasi Tatap muka) |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | |
| | - Penguatan kapasitas kawasan terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan (Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi, titik kumpul dan Rambu Informasi Bencana & pembuatan peta risiko bencana) | ✓ Kel. Putabangun<br>✓ Desa Patikarya<br>✓ Desa Menara Indah<br>✓ Desa Parak<br>✓ Desa Mekar Indah | - | ✓ Desa Harapan | ✓ Desa Buki<br>✓ Desa Barugaia<br>✓ Desa Garaupa Raya | ✓ Desa Batang<br>✓ Desa Bontosunggu |
| | - Pengelolaan Risiko Bencana (Pemangkasan/ penebangan pohon yang berpotensi bencana | - | - | ✓ Kec. Benteng | ✓ Kec. Benteng | ✓ Kec. Benteng |
| | - Pelatihan | - | Kec. Benteng | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana | | | | | |
| | Pelayanan Penanganan Pasca Bencana | | | | | |
| | - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana | ✓ Kec. Benteng : 11 orang<br>✓ Kec. Bontomanai : 12 orang<br>✓ Kec. Bontomatene : 5 orang<br>✓ Kec.Bontosikuyu : 5 orang<br>✓ Kec. Buki : 14 orang<br>✓ Kec. Bontoharu : 5 orang<br>✓ Kec. Pasimasunggu : 7 orang<br>✓ Kec. Pasimasunggu Timur : 8 orang | ✓ Kec. Benteng : 7 orang<br>✓ Kec. Bontomanai : 10 orang<br>✓ Kec. Bontomatene : 8 orang<br>✓ Kec.Bontosikuyu : 13 orang<br>✓ Kec. Buki : 24 orang<br>✓ Kec. Bontoharu : 3 orang<br>✓ Kec. Pasimasunggu : 2 orang<br>✓ Kec. Pasilambena: 4orang | ✓ Kec. Benteng : 11 orang<br>✓ Kec. Bontomanai : 5 orang<br>✓ Kec. Bontomatene : 7 orang<br>✓ Kec. Bontosikuyu : 15 orang<br>✓ Kec. Buki : 7 orang<br>✓ Kec. Bontoharu : 7 orang<br>✓ Kec. Pasimasunggu : 1 orang<br>✓ Kec. Pasilambena : 3 orang | ✓ Kec. Benteng : 7 orang<br>✓ Kec. Bontomanai : 21 orang<br>✓ Kec. Bontomatene : 12 Orng<br>✓ Kec. Bontosikuyu : 7 orng<br>✓ Kec. Buki : 6 orng<br>✓ Kec. Bontoharu : 14 orng | ✓ Kec. Benteng : 12 orang<br>✓ Kec. Bontomanai : 9 orang<br>✓ Kec. Bontomatene : 6 orang<br>✓ Kec. Bontosikuyu : 2 orang<br>✓ Kec. Buki : 2 orang<br>✓ Kec. Bontoharu : 5 orang<br>✓ Kec. Pastim : 1 orang<br>✓ Kec. Takaboneraterate : 2 orang |

Berdasarkan tabel 2.8. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan dengan jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pelayanan penanganan pascabencana.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilihat pada tabel Data kejadian dan Penanganan Bencana tahun 2020-2024 dibawah ini :

Tabel 2.9. Data Kejadian dan penanganan Bencana di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

| Tahun | Kejadian Bencana | Lokasi Bencana | Jumlah korban yg terdampak bencana (KK/Jiwa) | Jumlah Kejadian | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 2020 | Angin Kencang (Cuaca Ekstrim) | Tersebar di 6 Kecamatan | 10 KK | 10 kali | |
| | Kebakaran | Tersebar di 6 Kecamatan | 17 KK | 6 kali | |
| 2021 | Angin Kencang (cuaca ekstrim) | Tersebar di 6 Kecamatan | 4 KK | 27 kali | |
| | Banjir | Tersebar di 4 Kecamatan | 7 KK | 8 kali | |
| | Kebakaran | Tersebar di 2 Kecamatan | 1 KK | 2 kali | |
| | Tanah Longsor | Tersebar di 1 Kecamatan | 1 KK | 1 kali | |
| 2022 | Angin Kencang (cuaca ekstrim) | Tersebar di 7 Kecamatan | 157 Jiwa | 236 kali | |
| | Banjir | Tersebar di 3 Kecamatan | 68 Jiwa | 4 kali | |
| | Kebakaran | Tersebar di 4 Kecamatan | 52 Jiwa | 5 kali | |
| | Tanah Longsor | Tersebar di 4 Kecamatan | 2 Jiwa | 5 kali | |
| | Laka Laut | Tersebar di 4 Kecamatan | 23 Jiwa | 5 kali | |
| | Bencana lainnya (orang hilang, tersambar petir) | Tersebar di 2 Kecamatan | 2 Jiwa | 2 kali | |
| 2023 | Angin Kencang (cuaca ekstrim) | Tersebar di 10 Kec. | 212 Jiwa | 93 Kali | |
| | Banjir | Tersebar di 2 Kecamatan | 34 Jiwa | 2 kali | |
| | Kebakaran | Tersebar di 6 Kecamatan | 43 Jiwa | 33 kali | |
| | Laka Laut | Tersebar di 3 Kecamatan | 27 Jiwa | 5 kali | |
| 2024 | Angin Kencang (cuaca ekstrim) | Tersebar di 8 Kecamatan | 133 Jiwa | 36 Kali | |
| | Banjir | Tersebar di 2 Kecamatan | 15 Jiwa | 2 Kali | |
| | Kebakaran | Tersebar di 6 Kecamatan | 52 Jiwa | 13 Kali | |
| | Kekeringan | Tersebar di 1 Kecamatan | 806 Jiwa | 1 kali | |
| | Laka Laut | Tersebar di 4 Kecamatan | 61 Jiwa | 5 kali | |
| | Bencana lainnya (orang hilang, orang tenggelam, tersambar petir) | Tersebar di 6 Kecamatan | 13 Jiwa | 8 kali | |

Sumber : Data Bidang kedaruratan dan Logistik BPBD Selayar

Berdasarkan tabel 2.9. menunjukkan bahwa Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sub urusan kebencanaan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan menangani kejadian bencana yang terjadi disetiap tahunnya, dimana jenis bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah bencana angin kencang akibat cuaca ekstrim.

## Tabel 2.10.
## Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
## Kabupaten Kepulauan Selayar

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi | Target SPM | | | | | Target IKK | | | | | Target Renstra OPD Tahun ke - | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke - | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke - | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* |
| 1. | Persentase layanan informasi rawan bencana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,49 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,83 % | 99,49 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,83 % |
| 2. | Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,94 % | 98,27 % | 99,94 % | 99,98 % | 99,23 % | 99,94 % | 98,27 % | 99,94 % | 99,98 % | 99,23 % |
| 3. | Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 62,10 % | 82,49 % | 97,92 % | 99,94 % | 99,97 % | 62,10 % | 82,49 % | 97,92 % | 99,94 % | 99,97 % |
| 4. | Persentase layanan kebencanaan pada masyarakat (pra bencana tanggap darurat | | | | | | | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 80,91 % | 90,81 % | 98,95 % | 99,96 % | 99,75 % | 80,91 % | 90,81 % | 98,95 % | 99,96 % | 99,75 % |
| 5. | Persentase layanan pengurangan risiko bencana pada masyarakat | | | | | | | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,72 % | 99,13 % | 99,97 % | 99,99 % | 99,53 % | 99,72 % | 99,13 % | 99,97 % | 99,99 % | 99,53 % |
| 6. | Persentase korban bencana yang tertangani | | | | | | | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 62,10 % | 82,49 % | 97,92 % | 99,94 % | 99,97 % | 62,10 % | 82,49 % | 97,92 % | 99,94 % | 99,97 % |
| 7. | Persentase penanganan pasca bencana | | | | | | | | | | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,97 % | 5,78 % | 99,95 % | 99,19 % | 99,93 % | 99,97 % | 5,78 % | 99,95 % | 99,19 % | 99,93 % |

Dari tabel 2.10. menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada akhir periode yaitu tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan informasi rawan bencana dengan capaian kinerja 100%
2. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian kinerja 100%
3. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian kinerja 100%
4. Capaian kinerja yang mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator layanan penanganan pascabencana dengan capaian kinerja 100%
5. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator : Layanan penanganan pascabencana, capaian kinerja sebesar 5,78% di tahun 2021 dikarenakan pada kegiatan penanganan pascabencana (pembangunan tanggul/bronjong) pendanaan hanya sampai tahap perencanaan karena anggarannya terinput pada anggaran perubahan, sehingga pengerjaan fisik kegiatan dilaksanakan ditahun berikutnya karena menjadi dana luncuran.

Benteng, 09 September 2025

**KEPALA PELAKSANA BPBD,**

**Drs. AHMAD ALIEFYANTO MM.Pub**
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.1970726 199101 1 002

# PROFIL KECAMATAN BENTENG

## 1.1 Gambaran Umum Kantor Kecamatan Benteng

Kecamatan Benteng terletak di tengah-tengah daratan Pulau Selayar sekaligus berkedudukan sebagai Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Beralamat di Jl. R.E. Martadinata No.03 Benteng (0414)21050, Email kantorcamatbenteng@gmail.com. Kondisi Tofografi Kecamatan Benteng sebagian besar dataran dan sebagian lainya terdiri dari perbukitan khususnya untuk wilayah begian Timur Kota Benteng. Luas wilayah Kecamatan tercatat 7.12 Km atau 712 Ha, Adapun batas wilayah Kecamatan Benteng sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontoharu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoharu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bontoharu dan Laut Plores

Wilayah administratif pemerintahan Kecamatan Benteng terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kelurahan yaitu Keluhan Benteng, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Benteng Selatan.

**Gambar 1.1**
**FOTO KANTOR KECAMATAN BENTENG**



## 1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Benteng

### 1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Camat menyelengarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### 2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi meliputi :

a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
b. pengoordinasian penyusnan program, pelaporan dan hukum;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi dua subbagian yaitu Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, Subbagian Program dan Keuangan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

#### 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

**Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja serta mengelola administrasi hukum.

Uraian Tugas Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum meliputi:

a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbag umum, kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Melakukan pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
g. Melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
h. Melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
i. Melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
j. Memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
k. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
m. Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
o. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
p. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan
q. Melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2) Subbagian Program, dan Keuangan**

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan. Uraian Tugas Subbagian Program dan Keuangan meliputi :

Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

a. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
b. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbag umum, Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
c. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
d. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
e. Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
f. Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
g. Melakukan pengelolaan surat, pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Camat;
h. Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Camat;
i. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi Realisasi Anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
j. Menyusun neraca keuangan Camat;
k. Melakukan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
l. Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
m. Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
n. Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Pemerintahn mempunyai Uraian Tugas meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
h. melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
j. melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
k. menyiapkan rekomendasi dan perijinan tertentu;
l. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Uraian Tugas meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi ketenteraman dan ketertiban umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
g. melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
h. melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;
k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
l. menyiapkan rekomendasi dan perijinan tertentu;
m. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
n. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai Uraian Tugas meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
i. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
j. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
l. memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan;
m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
p. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
q. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
r. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
s. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
t. menyiapkan rekomendasi dan perijinan tertentu;
u. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
v. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Uraian Tugas meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
g. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
h. mengordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
i. mengordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
j. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
h. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan mempunyai Uraian Tugas meliputi :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
j. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
f. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desadan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
g. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## II. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Benteng, sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 139 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar, yang merupakan hasil

penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka struktur organisasi Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

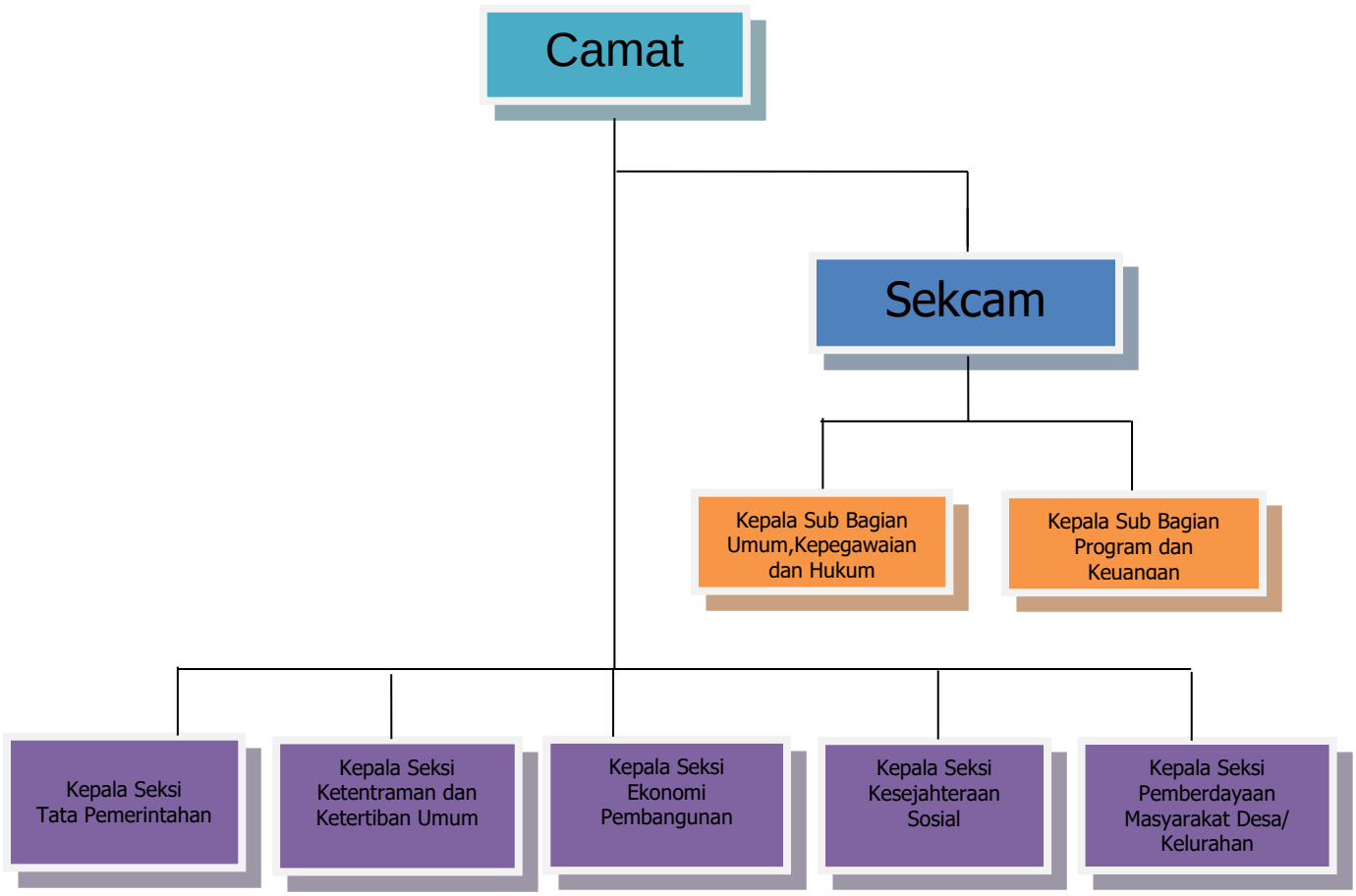
a. Camat;
b. Sekretaris Camat;
    - Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
    - Kasubag. Hukum, Perencanaan dan Pelaporan;
c. Kasi Tata Pemerintahan;
d. Kasi Kesejahteraan Sosial;
e. Kasi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:

Gambar

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR




## II.1 Sumber Daya Kecamatan Benteng

Jumlah pegawai di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Agustus 2025 sebanyak 13 orang, dengan klasifikasi menurut pendidikan dan pangkat/golongan serta jumlah pejabat struktural.

**Tabel 2.1**
**KLASIFIKASI PEGAWAI ASN MENURUT PENDIDIKAN**

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | S2 | 1 | 7,69 |
| 2 | S1/DIV | 10 | 76,92 |
| 3 | D3 | 0 | 0,00 |
| 4 | SLTA | 2 | 15,38 |
| **Total** | | **13** | **100** |

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai ASN Kecamatan Benteng mayoritas berpendidikan S1/DIV yaitu sebanyak 10 orang atau 76,92%, selanjutnya yang berpendidikan S2 yaitu 1 orang atau 7,69% dan SLTA yaitu 9 orang atau 15,38%, selanjutnya yang berpendidikan D3 tidak ada atau 0.00%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan pegawai BKPSDM sudah memadai.

**Tabel 2.2**
**KUALIFIKASI PEGAWAI ASN MENURUT GOLONGAN**

| NO | GOLONGAN/RUANG | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Golongan IV/d | 0 | 0,00 |
| 2 | Golongan IV/c | 0 | 0,00 |
| 3 | Golongan IV/b | 1 | 7,69 |
| 4 | Golongan IV/a | 0 | 0,00 |
| 5 | Golongan III/d | 3 | 23,08 |
| 6 | Golongan III/c | 5 | 38,46 |
| 7 | Golongan III/b | 2 | 15,38 |
| 8 | Golongan III/a | 1 | 7,69 |
| 9 | Golongan II/d | 0 | 0,00 |
| 10 | Golongan II/c | 0 | 0,00 |
| 11 | Golongan II/b | 1 | 7,69 |
| 12 | Golongan II/a | 0 | 0,00 |
| 13 | Golongan IX | 0 | 0,00 |
| 14 | Golongan V | 0 | 0,00 |
| **Total** | | **13** | **100** |

**Tabel 2.3**
**KUALIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL**

| NO | JABATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Camat | 1 | 11,11 |
| 2 | Sekcam | 1 | 11,11 |
| 3 | Kepala Seksi | 5 | 55,56 |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 2 | 22,22 |
| **Total** | | **9** | **100** |

# PROFIL KANTOR KECAMATAN BONTOMANAI

## I. Gambaran Umum

Kecamatan Bontomanai, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bontomanai berada di Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Kecamatan Bontomanai dengan luas wilayah 136,42 $Km^2$ merupakan satu Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terletak di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jarak ± 18 km dari pusat Ibu Kota Kabupaten, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Buki
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar

Wilayahnya meliputi 10 (sepuluh) Desa yaitu Desa Barugaiya Desa Polebunging, Desa Bontomarannu, Desa Bontokoraang, Desa Parak, Desa Bonea Timur, Desa Bonea Makmur, Desa Jambuia, Desa Kaburu, dan Desa Mare-Mare.

## II. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Bontomanai

a. **Camat**

Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi darah;
- Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
- pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai Tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasidan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi, Sekretaris Camat juga mempunyai tugas yang terdiri dari :

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang; dan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Sekretaris Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

1) **Sub Bagian Program dan Keuangan.**

   Sub Bagian Program dan Keuanagan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi Program, administrasi, serta pelaporan keuangan.

   Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuanagan mempunyai tugas :

   - menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   - mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
   - menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   - mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
   - Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
   - Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
   - Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
   - Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
   - Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
   - Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan

kecamatan;

- Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelola administrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
- melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

- melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
- melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugasyaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah

kerjanya;

- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama PPNS;
- melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
- Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi

kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
- mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
- mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/ Kelurahan;
- melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;

- Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakn teknis di bidang ekonomi dan pembangunan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
- memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga

non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## III. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sangat jelas Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan.

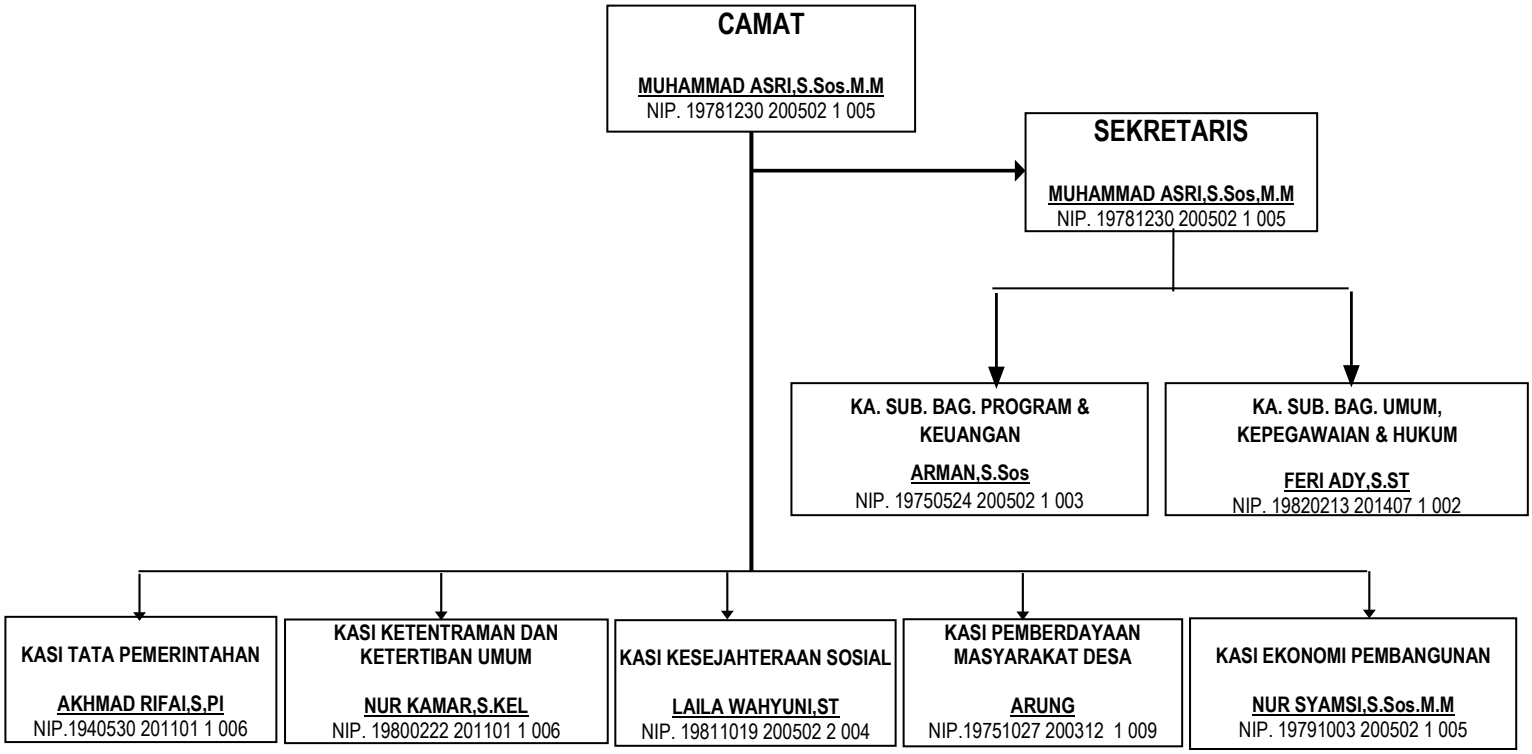
Dalam menjalankan tupoksinya harus didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai antara lain adalah Sumber Daya Manusia yang handal dan terdidik serta profesionalisme dan juga sarana pendukung yang lengkap yang terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
f. Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Seksi Ekonomi Pembangunan

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BONTOMANAI
KABUPATEN KEPULAUANSELAYAR




## IV. Sumber Daya BKPSDM

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Bontomanai didukung oleh 30 ( Tiga Puluh ) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam Tabel berikut :

**Tabel**
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai Berdasarkan Struktural**

| Tingkat Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Eselon III A | - |
| Eselon III B | 1 orang |
| Eselon IV A | 5 orang |
| Eselon IV B | 2 orang |
| Staf PNS dan PHL | 22 orang |
| **Jumlah** | **30 orang** |

**Tabel**
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai**
**Berdasarkan Golongan Ruang**

| Golongan Ruang | Jumlah |
|---|---|
| IV | 1 orang |
| III | 14 orang |
| II | 1 orang |
| PHL | 15 orang |
| THL | - |
| **Jumlah** | **30 orang** |

**Tabel**
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai**
**BerdasarkanTingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| S2 | 2 orang |
| S1 | 13 orang |
| Diploma IV | - |
| Diploma III | - |
| SMU | 15 orang |
| SMP | - |
| **Jumlah** | **31 orang** |

**Tabel**
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Bontomanai**
**Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

| Pendidikan Penjenjangan | Jumlah |
|---|---|
| Diklat Pim II | - |
| Diklat Pim III | 1 orang |
| Diklat Pim IV | 4 orang |
| **Jumlah** | 5 orang |

Polebunging, 15 September 2025
Plt. **Camat Bontomanai**

**MUHAMMAD ASRI, S.Sos.,M.M**
Pangkat : Pembina
Nip. 19781230 200502 1 005

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKI**

Kecamatan Buki, merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2007. Kepala OPD Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pusat Pemerintahan Kecamatan Buki berada di Baruia, Desa Buki, Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Wilayah Yuridiksi meliputi 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Buki, Desa Lalang Bata, Desa Bonto Lempangan, Desa Balang Butung, Desa Kohala, Desa Buki Timur dan Desa Mekar Indah.

Dalam usaha meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatandiwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana sangat jelas Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kecamatan. Dalam menjalankan tupoksinya harus didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai antara lain adalah Sumber Daya Manusia yang handal dan terdidik serta profesionalisme dan juga sarana pendukung yang lengkap.

Berdasarkan tingkat capaian pelaksanaan Renstra Kecamatan Buki periode sebelumnya secara umum dapat dikatakan bahwa Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan sudah baik yaitu

1. Mengadakan pembinaan danpengawasan kepada Aparat Kecamatan danDesauntukmeningkatkandisiplindalamkegiatansehari–hari;
2. Memberikan kesempatan kepada aparat Kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan yang dilaksanakan pemerintahdaerah;
3. Pembinaan kelengkapan administrasidesa;
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan diDesa;

Disamping Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan diatas, juga dibidang Pembangunan yaitu :

1. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa dan melaksanakan MusrenbangKecamatan;
2. Monitoring hasil pembangunan di desa yang berasal dari APBD dan APBN;

Dari tingkat capaian kinerja yang dicapai diatas belum maksimal karenamasihbanyakhambatan–hambatanyangdihadapiyaitu

1. Jumlahstafcukupmemadainamunsecarakualitasmasihterbatas;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yangberkelanjutan.

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KecamatanBuki

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan BukiKepulauan Selayar, ada perubahan Kepala Sub Bagian sehingga perlu diubah atau direvisi mengenai Tugas Pokok dan Fungsi.

### 2.1.1. Tugas

a. **Camat**

Camat mempunyai tugas Pokok melaksanakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan diwilayahnya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan urusan Pemerintahan bidang urusan otonomi darah;
- pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomidaerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomidaerah;
- pelaksanaan administrasi Kecamatan;dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinansesuai bidang tugasnya.

Disamping mempunyai fungsi untukpenyelenggaraan pemerintahan, Camat juga mempunyai Tugas yaitu:

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahanumum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaanmasyarakat;mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertibanumum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan PeraturanBupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayananumum;
- mengoordinasikanpelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkatkecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ataukelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahkabupaten;
- melaksanakan koordinasidan konsultasi dengan

lembaga pemerintahdan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

**b. Sekretaris**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud, Sekretaris menyelenggarakanfungsi:

- pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- pengoordinasian urusan umum dankepegawaian;
- pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;dan
- pelaksanaan tugaskedinasan lain sesuai bidang

tugasnya. Disamping mempunyai fungsi, Sekretaris Camat juga mempunyai tugas yang terdiri dari:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskahdinas;

- mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan programkerja;
- melaksanakan pembinaan organisasi dantatalaksana;
- mengelola administrasiumum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
- mengelola administrasikeuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparaturkecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;dan
- Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saranpertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Sekretaris Camat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

1) **Sub Bagian Program danKeuangan.**

Sub Bagian Program dan Keuanagan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, mengelola administrasiProgram, administrasi, serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuanagan mempunyai tugas :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;

- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi,memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
- Melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
- Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- Menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
- Melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
- Melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
- Melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
- Menyusun neraca keuangan kecamatan;
- Melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- Melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan kecamatan;
- Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- Melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan

Kecamatan;

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Subbagian hukum, Perencanaan dan pelaporan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, serta mengelolaadministrasi hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai fungsi :

- menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi,memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;

- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumenkepegawaian;
- melakukanpelayanan teknis administrasiKecamatan;
- melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraanrapat-rapat;
- melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan Keprotokolan;
- memeliharakebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
- melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- Mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

**c. SeksiTata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,

maka Kasi Pemerintahan mempunyai Tugasyaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindunganmasyarakat;
- melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan;
- melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahanDesa/Kelurahan;
- melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan PemerintahanDesa/Kelurahan;
- melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayahkerjanya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

**d. Seksi Ketentraman dan KetertibanUmum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam

mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertibanumum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu:

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikandanmemberipetunjukpelaksanaantugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
- melakukan fasilitasi sistim keamananlingkungan;
- Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertibanumum;
- memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersamaPPNS;
- melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman danketertiban;
- Melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
- Melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
- Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

**e. Seksi KesejahteraanSosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial

  dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapatsesuai bidangtugasnya;
- Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
- Melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan;
- mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaansosial;
- mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraansosial;

- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

**f. Seksi Ekonomi danPembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;
- Menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
- Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

- Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
- Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
- memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
- melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
- memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;
- memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
- Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
- Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
- Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
- Mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
- Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;dan
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan

- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

**g. Kasi Pemberdayaan Masyarakat danDesa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai yaitu :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam mengetahui perkembangan pelaksanaantugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskahdinas;
- mengikuti rapat sesuai bidangtugasnya;
- melakukan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat meliputi fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan pengembangan Masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;
- melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan

kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan PemerintahDaerah;

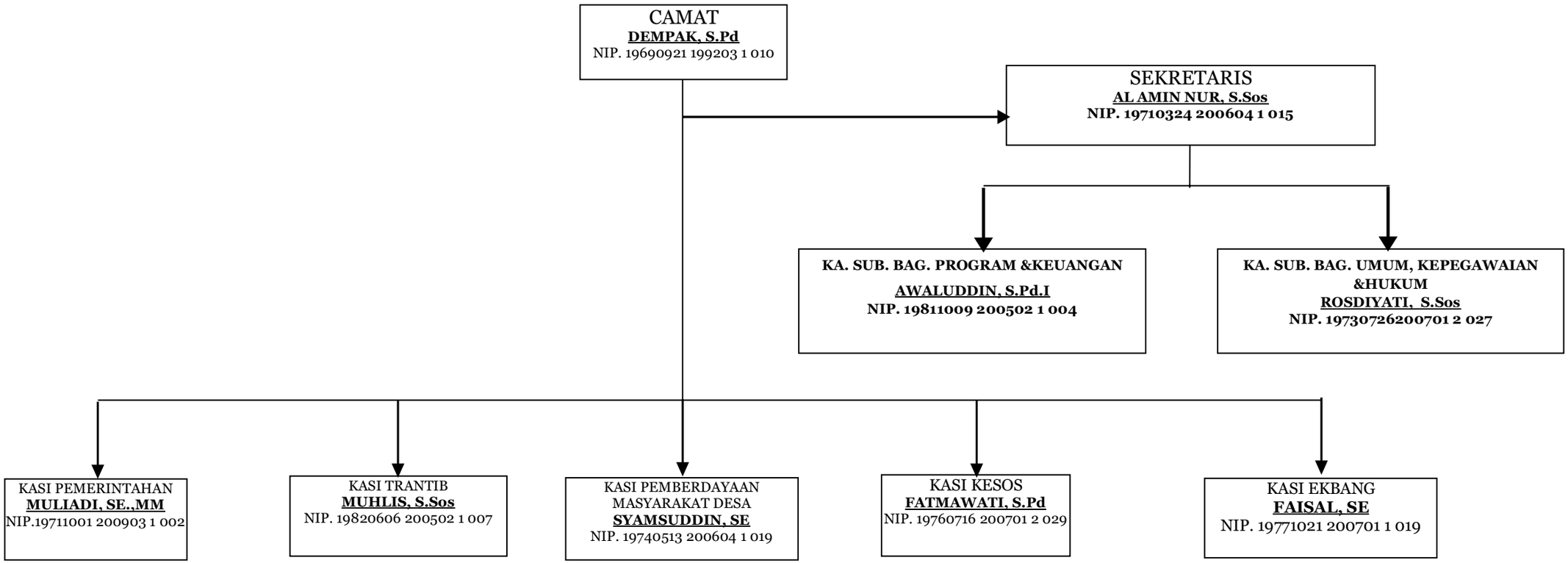
- menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalahsosial;
- memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
- Mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan
- melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidangtugasnya.

*Gambar 1*

**BAGAN STRUKTUR**

**ORGANISASI KECAMATAN**

**BUKI**




*Sumber: Perbup.Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 81 Tahun 2020*

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan

### 2.2.1 Sarana dan Prasarana Kecamatan

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupunkualitas.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan BukidapatdilihatpadaTabel2.1dibawahini:

**Tabel2.1**
**Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Buki**

| No. | Jenis | Sumber | Tahun Perolehan | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sarana | | | | |
| | - Sepeda Motor | APBD | 2008,2010,2011, 2014,2015,2016 ,2017 | 10 Unit | 2 RB |
| | - Mesin Ketik | APBD | 2008, 2010 | 2 Unit | 2 RB |
| | - Lemari Arsip | APBD | 2010, 2014,2017 | 5 Buah | Layak |
| | - Filling Kabinet Besi | APBD | 2008, 2009, 2010 | 6 Buah | Layak |
| | - BajuLakbu | APBD | 2008 | 10Lembar | 1 RB |
| | - Fiber ( Air ) | APBD | 2008 | 1 buah | Layak |
| | - Meja Rapat | APBD | 2013 | 1 buah | Layak |
| | - Meja Kerja | APBD | 2008, 2009,2017 | 32 buah | Layak |
| | - Kursi Pimpinan | APBD | 2017 | 1 buah | Layak |
| | - Kursi Rapat Besi | APBD | 2008, 2009, 2010, 2013,2019 | 95 buah | Layak |
| | - Kursi Lipat | APBD | 2009 | 10unit | Layak |
| | - Bangku ruang tunggu | APBD | 2010 | 1 buah | Layak |
| | - Kursi Tamu | APBD | 2010,2017 | 6 buah | Layak |
| | - Kursi Plastik | APBD | 2008, 2009, 2011 | 137 buah | 95 RB |
| | - AC Split | APBD | 2010, 2017, 2018,2020 | 4buah | 1 RB |
| | - Kipas Angin | APBD | 2010 | 5 buah | Layak |
| | - Sound System | APBD | 2008, 2012 | 2Set | Layak |

| No. | Jenis | Sumber | Tahun Perolehan | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - Ampipier | APBD | 2017 | 1 buah | Layak |
| | - TV Monitor | APBD | 2020 | 1 buah | Layak |
| | - Lapangan Tenis Meja | APBD | 2011 | 1 Buah | Layak |
| | - Hard Disk Eksternal | APBD | 2013 | 1 buah | Layak |
| | - Komputer PC | APBD | 2008, 2010 | 6 unit | 6 RB |
| | - Lap top | APBD | 2008, 2013, 2014,2016,2018 ,2019,2020 | 10 unit | 5 unit RB |
| | - Note Book | APBD | 2010, 2011, 2013, 2014 | 11 Unit | 4 RB |
| | -Printer | APBD | 2008, 2009, 2013, 2014,2019,2020 | 16 Unit | 9 RB |
| | - Kursi Pejabat | APBD | 2008, 2009 | 13 Buah | 3 RB |
| | - Meja Plastik | APBD | 2008, 2009 | 11 Buah | 11 RB |
| | - Proyektor Attachment | APBD | 2012 | 1 Buah | RB |
| | - Off Air TV Monitor | APBD | 2009, 2010 | 2 Unit | Layak |
| | - Kamera Digital | APBD | 2008 | 1 Buah | Layak |
| | -Generator | APBD | 2008,2017 | 2 Unit | 1 RB |
| | - Instalasi Listrik | APBD | 2008 | 1 Unit | Layak |
| | - Sarana air bersih(Jet Pump) | APBD | 2020 | 1Paket | Layak |
| **2.** | Prasarana | | | | |
| | - Gedung Kantor | | 2008 | 1 Unit | Layak |
| | - Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | | 2008 | 1 Unit | Layak |
| | - Bangunan Rumah Negara Gol II | | 2008 | 1 Unit | Layak |
| | - Bangunan Tempat Parkir | | 2015 | 1 Unit | Layak |
| | - Rumah Dinas | | 2008 | 1 Unit | Layak |
| | - Ruang Pertemuan PKK | | 2008 | 1 Unit | Layak |

*Sumber : Data Asset Desember 2020*

### 2.2.2 Sumber DayaManusia

Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan dalam pencapaian tujuan pemerintah kecamatan secara efektif dan efisien harus didukung dengan keberadaan pegawai yangcukupmemadaibaikdarisegikualitasmaupunkuantitas.

Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Buki didukung oleh 41 ( Empat Puluh Satu ) orang pegawai sebagaima digambarkan dalam Tabel 2.2, Tabel 2.3, Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 berikut ini.

***Tabel 2.2***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Struktural**

| Tingkat Jabatan | Jumlah |
|---|---|
| Eselon III A | 1 orang |
| Eselon III B | 1 orang |
| Eselon IV A | 5 orang |
| Eselon IV B | 2 orang |
| Staff*) | 29 orang |
| **Jumlah** | **38 orang** |

*Termasuk PNS dan Tenaga Non-PNS

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020*

***Tabel 2.3***

**Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki Berdasarkan Golongan Ruang**

| Golongan Ruang | Jumlah |
|---|---|
| IV | 1 orang |
| III | 9 orang |
| II | 5 orang |
| PHL | 23 orang |
| THL | - orang |
| **Jumlah** | **38 orang** |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020*

***Tabel 2.4***
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki**
**BerdasarkanTingkat Pendidikan**

| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| S2 | 1 orang |
| S1 | 14 orang |
| Diploma IV | - |
| Diploma III | 4 |
| SMU | 19 orang |
| SMP | - |
| **Jumlah** | **38 orang** |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020*

***Tabel 2.5***
**Susunan Kepegawaian Kecamatan Buki**
**Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan**

| Pendidikan Penjenjangan | Jumlah |
|---|---|
| Diklat Pim II | 1 orang |
| Diklat Pim III | |
| Diklat Pim IV | 6 orang |
| **Jumlah** | 7 orang |

*Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Buki Desember 2020*

## 2.3 Kinerja Pelayanan KecamatanBuki

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 220 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan. dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi yang akan dilaksanakan Kecamatan Buki untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel
b. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan darah yang efektif & efesien
c. MeningkatnyaKualitas Pelyanan Publik.
d. Terpeliharanya Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat.
e. MeningkatnyaKinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
f. Berkurangnya Penduduk miskin
g. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
h. MeningkatnyaKualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran

perempuan dalam pembangunan.

i. Meningkatnya Prestasi Olah raga bagi pemuda & Masyarakat
j. MeningkatnyaKecintaan dan kebanggaan sebagai orang selayar.
k. Meningkatnya daya saing dan produktifitas ekonomi kerakyatan

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buki selama 5 Tahun berjalan adalah sebagaimana tabel 2.6 di bawah ini:

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**
**NOMOR 80 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KECAMATAN BONTOMATENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN BONTOMATENE.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Camat adalah Camat Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok.
9. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Bontomatene.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 3**

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjabarkan Tugas dan Fungsi jabatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB III
## KEDUDUKAN

**Pasal 4**

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB IV
## SUSUNAN ORGANISASI

**Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
   a. Camat.
   b. Sekretariat, meliputi:
      1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
      2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
   c. Seksi Tata Pemerintahan.
   d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
   e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
   f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
   g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
   h. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V
## TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

### Bagian Kesatu
### Camat

**Pasal 6**

(1) Camat mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.



Dipindai dengan CamScanner

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai Fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan urusan pemerintahan umum;
g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
o. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;



Dipindai dengan CamScanner

p. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;

q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

s. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**

**Sekretaris**

**Pasal 7**

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.

(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai Fungsi:

a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;

b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;

c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;

d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;



Dipindai dengan CamScanner

f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana;
h. mengelola administrasi umum;
i. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
j. mengelola administrasi keuangan;
k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan;
l. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 1**

**Subbagian Program dan Keuangan**

**Pasal 8**

(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan angguran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Kecamatan;



Dipindai dengan CamScanner

g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan Kecamatan;
l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
n. menyusun neraca keuangan Kecamatan;
o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
p. melakukan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Dipindai dengan CamScanner

**Paragraf 3**

**Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum**

**Pasal 9**

(1) Subbagian Umum, kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;

g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;

h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;

i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;

j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;

k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup Kecamatan;

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan



Dipindai dengan CamScanner

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**

**Seksi Tata Pemerintahan**

**Pasal 16**

(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

h. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

j. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Dipindai dengan CamScanner

n. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**

**Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

**Pasal 11**

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;

g. melakukan fasilitasi sistim keamanan lingkungan;

h. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

i. melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;

k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

l. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis terkait ketenteraman dan ketertiban umum;

m. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, dan perizinan tempat usaha berdasarkan perundang-undangan;



Dipindai dengan CamScanner

n. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**

**Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

**Pasal 12**

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;



Dipindai dengan CamScanner

h. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. melakukan pendataan, evalunsi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
j. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
q. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
r. memantau dan mengendalikan kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan dan pemukiman;
s. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan serta pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
t. mengumpulkan dan mengelolah data di bidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
v. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Dipindai dengan CamScanner

x. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**

**Seksi Kesejahteraan Sosial**

**Pasal 13**

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;

h. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;

i. mengoordinasikan kegiatan di bidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;

j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



Dipindai dengan CamScanner

n. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

o. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh**

**Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Pasal 14**

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;

i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;

j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemerintahan;

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;



Dipindai dengan CamScanner

l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB VI

## JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 15

(1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan pejabat fungsional pada Kecamatan Bontomatene dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## TATA KERJA

### Bagian Kesatu

### Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

### Pasal 16

(1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subtagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Bontomatene melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

(3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Bontomatene mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bontomatene.



Dipindai dengan CamScanner

**Bagian Kedua**

**Pengendalian dan Evaluasi, Serta Pelaporan dan Pengawasan**

**Pasal 17**

(1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan wajib memenuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing masing.

(3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 18**

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional pada Kecamatan Bontomatene berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada Kecamatan Bontomatene berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Dipindai dengan CamScanner

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 14 Desember 2020
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 14 Desember 2020
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**MARJANI SULTAN**

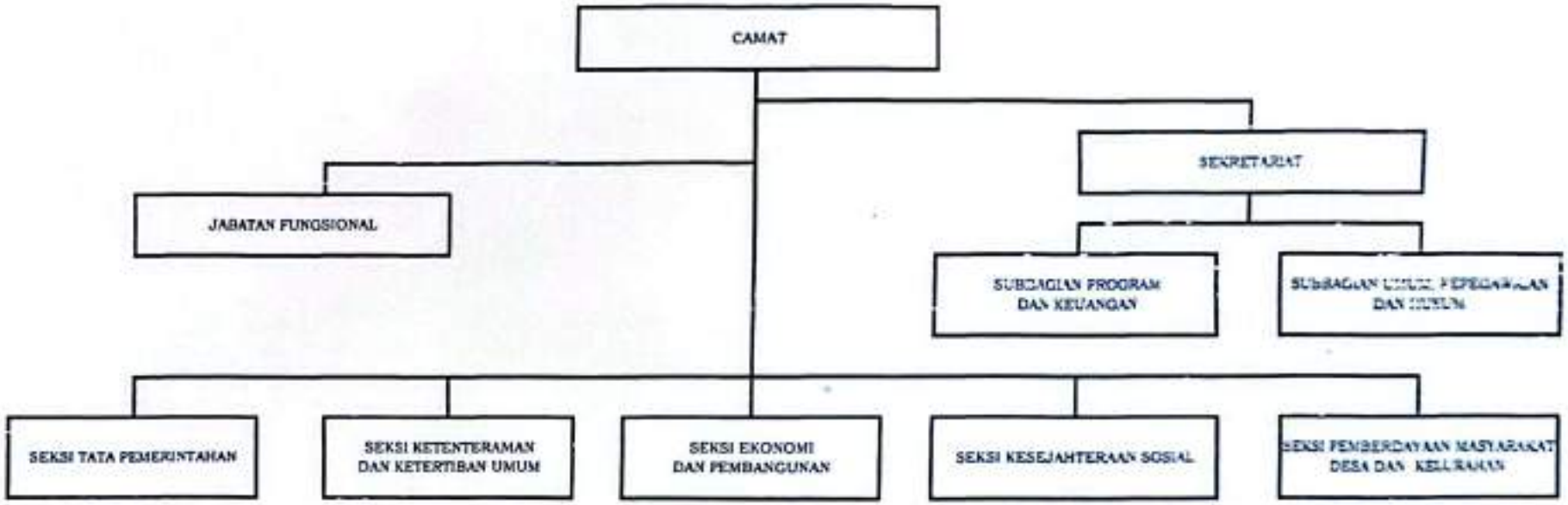
**BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020 NOMOR 528**



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 80 TAHUN 2020
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN BONTOMATENE

**STRUKTUR ORGANISASI**
**KECAMATAN BONTOMATENE**




**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**MUH. BASLI ALI**

Dipindai dengan CamScanner

# PROFIL

# KECAMATAN BONTOHARU




2023

## KAB. KEPULAUAN SELAYAR

# PROFIL
# Kecamatan Bontoharu
# 2023

| | | |
|---|---|---|
| KECAMATAN | : | BONTOHARU |
| KABUPATEN | : | KEPULAUAN SELAYAR |
| PROVINSI | : | SULAWESI SELATAN |
| BULAN | : | DESEMBER |
| TAHUN | : | 2023 |

# KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas penerbitan Buku dengan judul ***"Profil Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023"***. Buku ini sangat bermanfaat dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan penyajian informasi data yang mendetail seputar kondisi Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

Melalui buku ini, kami dapat menginformasikan kepada masyarakat luas, investor, pemerhati Ekonomi ataupun Sosial Budaya tentang potensi yang dimiliki Kecamatan Bontoharu dalam upaya peningkatan dalam segala aspek, baik itu dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Data data yang disajikan dalam buku ini adalah data sekunder yang berasal data berbagai instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar serta hasil pendataan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Bontoharu dan pemerintah kelurahan/desa se Kecamatan Bontoharu.

Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan sampai terbitnya buku ***"Profil Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023"*** ini, semoga buku ini bermamfaat bagi kita bersama demi perkembangan daerah tercinta kita ini dimasa mendatang. Sekian.

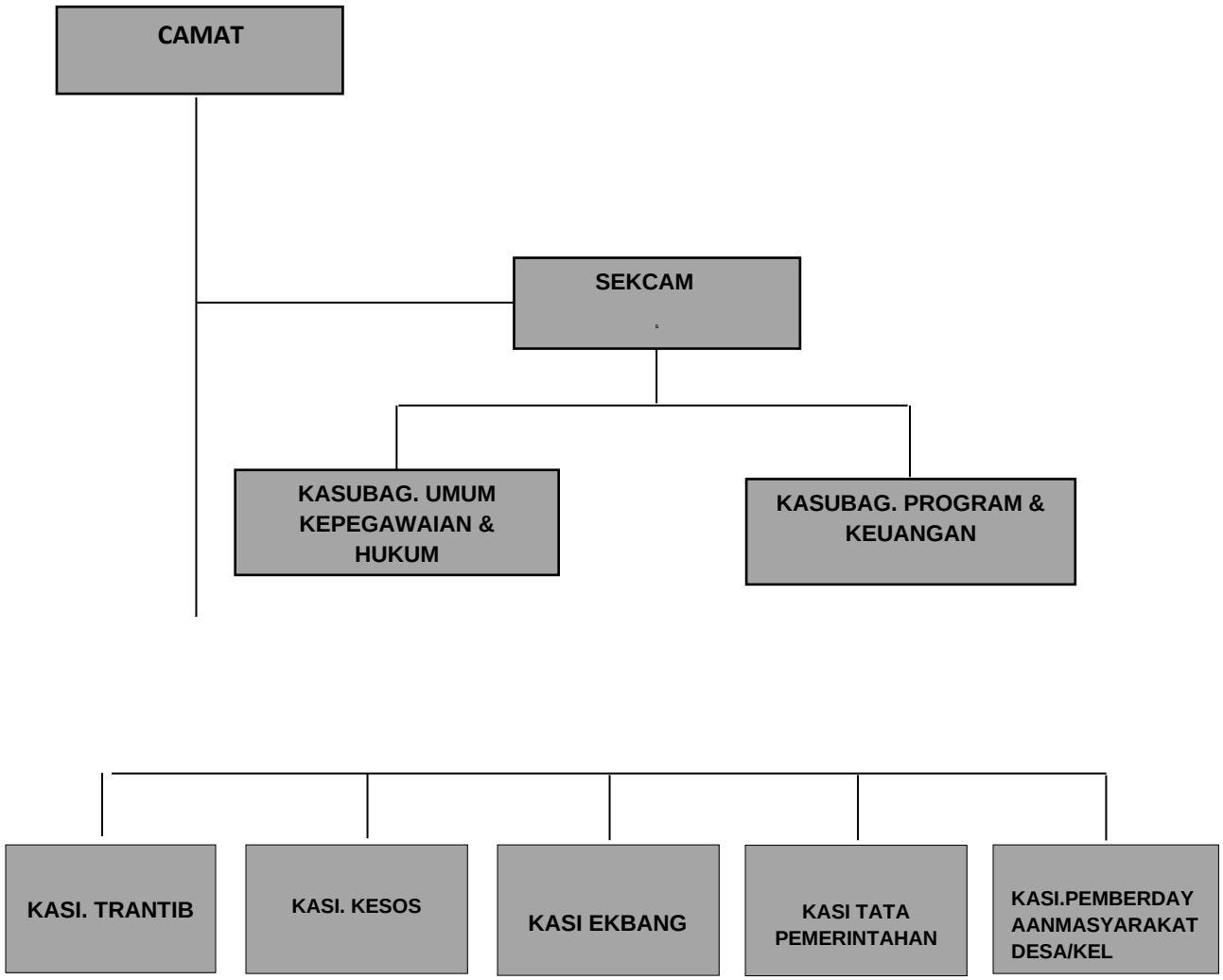
***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Matalalang, 2023

**CAMAT BONTOHARU,**

**A.BATARA GAU, SE**

## STRUKTUR ORGANISASI
## KECAMATAN BONTOHARU



## SEJARAH BERDIRINYA KERAJAAN BONTOBANGUN

Sesuai lontara dari kerajaan Bontobangun, bahwa pada zaman dahulu di daratan Pulau Selayar dikuasai oleh 4 (empat) orang lalaki atau Raja/Opu, yaitu:

1. Lalaki Ri Bontobangun berkuasa penuh di Selayar bagian tengah
2. Lalaki Ri Laiyolo berkuasa penuh di Selayar bagian selatan
3. Lalaki Ri Buki berkuasa penuh di Selayar bagian Utara
4. Lalaki Ri Putabangun berkuasa penuh di Selayar bagian timur

Lalaki Ri Bontobangun atau Raja di Bontobangun, diketahui bahwa pusat pemerintahannya terdiri dari dari 2 (dua) tempat atau istana yang masing-masing dikelilingi oleh pagar batu/emba, yaitu:

1. Dipuncak gunung Bontobangun (Kampung Tangnga-tangnga) sebagai pusat pemerintahan Opu Bontobangun ke I, ke II sampai Opu Raja ke XXV. Opu Bontobangun ke II sampai Opu Bontobangun XXV sudah tidak terbaca lagi dan kabur
2. Bekas istana atau perkampungan masih ada
3. Kampung Matalalang yang pertama kali memindahkan pusat pemerintahan dari puncak gunung Bontobangun dan membangun Istana Emba pagar batu ditanah miliknya sendiri di Matalalang ialah Opu Bontobangun yang ke XXVI yang bernama **Manyandarang Daeng Makleok** di gelar Opu Bingkung (Opu tersebut pernah jatuh dari kudanya dan patah tangannya).

Lalaki atau Raja/Opu Bontobangun yang pertama kali memerintah Bontobangun ialah Upo Latinting Lase dalam tahun 1260-1300, beliau ini adalah cucu langsung dari Opu Tampa Balusu Raja Luwuk atau Pajungia Ri Luwuk. Dan bila dibandingkan dengan masa pemerintahan di Jawa Timur dapat diduga bahwa pemerintahan Opu Bontobangun Latinting Lase sekitar tahun 1260-1300 sezaman dengan pemerintahan Kartanegara pada tahun 1260-1292 Raja Singosari yang terakhir.

Urutan nama-nama Raja Bontobangun yang tinggal didalam istana Emba pagar batu dikampung Matalalang:

1. Manyandarang Daeng Makleok yang bergelar Opu Bingkung urutan Opu yang ke XXVI, beliau ini yang mula-mula memindahkan pusat pemerintahan Opu Bontobangun ke Kampung Matalalang, dan membangun Istana Emba pagar batu, yang memerintah pada tahun 1844-1847.
2. Setelah Opu Manyandarang Daeng Makleok meninggal dunia digantikanlah putranya yang bernama Abdurahman Daeng Sirua Opu Raja ke 27 yang memerintah pada tahun 1847-1866. Setelah Opu Abdurahman Daeng Sirua meninggal dunia di gantikanlah oleh menantunya yang juga sebagai kemanakannya suami dari putrinya yang bernama Ati Mala Karaeng

Bontolebang yang bernama Umar Daeng Macora, oleh karena kehendak rakyat dan hukum adat di Bontobangun, Opu Umar Daeng Macora tidak boleh menolak sekalipun saat beliau menjadi Opu di Barang-barang Desa Lowa sekarang.

3. Umar Daeng Macora adalah Raja ke 28, beliau memerintah di Bontobangun kurang lebih 35 tahun, didalam menjalankan pemerintahannya sebagai Opu Bontobangun bersama istrinya Ati Mala Karaeng Bontolebang, beliau dikaruniai 2 orang putra yang bernama Massairang Karaeng Mangatta dan Ammatau Karaeng Muntu dan memerintah pada tahun 1866-1894. Setelah Umar Daeng Macora sudah tua beliau mengangkat putranya yang bernama Massairang Karaeng Mangatta menjadi Opu Lolo (sama halnya dgn jabatan wakil Bupati) dan beliau inilah yang memegang pucuk pimpinan pemerintahan di Bontobangun dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah Umar Daeng Macora meninggal dunia, maka atas persetujuan rakyat dan adat Bontobangun di angkatlah Massairang Karaeng Mangatta menjadi Opu/Raja Bontobangun menggantikan almarhum ayahnya.
4. Massairang Karaeng Mangatta adalah Raja ke 29 yang memerintah di Bontobangun pada tahun 1895-1936
5. Setelah Opu Massairang Karaeng Mangatta meninggal dunia digantikanlah oleh anaknya yang tertua yang bernama Muhammad Opu Patta Bundu Opu/Raja yang terakhir memerintah

Struktur pemerintahan kerajaan Bontobangun adalah sistem Monarkhi Absolute atau Ragent Happen yang dipimpin langsung oleh Raja/Opu yang dibantu oleh beberapa aparat lainnya, seperti:

1. Opu/Raja (seperti halnya Bupati)
2. Opu Lolo (seperti halnya Wakil Bupati)
3. Punggawa (
4. Gallarang (Pembantu utama dari Gelarang)
5. Khadi ( pejabat keagamaan)
6. Imam (pembantu dari khadi yang mengurus mesjid)
7. Katte
8. Bidal

Pemerintahan Opu Bontobangun Massairang Karaeng Mangatta dan pemerintahan Bontobangun Muhammad Opu Patta Bundu kala itu masing-masing membawahi 23 orang personil Gallarang yang membantu kelancaran pemerintahan disetiap wilayah atau kampung, yaitu:

(1) Gallarang Ri Tangnga, (2) Gallarang Iraja Lebo, (3) Gallarang Palemba, (4) Gallarang Kalebonto, (5) Gallarang Bontosaile (kolo-kolo), (6) Gallarang Bitombang, (7) Gallarang Lurah, (8) Gallarang Dongan-dongan, (9) Gallarang

Pallengu, (10) Gallarang Tabang, (11) Gallarang Parappa, (12) Gallarang Lurah Kapetta, (13) Gallarang Padang, (14) Gallarang Baera, (15) Gallarang Dongkalang, (16) Gallarang Paoiya, (17) Gallarang Kahu-kahu, (18) Gallarang Gusung, (19) Gallarang Lalemang, (20) Gallarang Bajumaling, (21) Gallarang Reaya, (22) Gallarang Pagonting dan (23) Gallarang Tile-tile.

Kerajaan Bontobangun memiliki benda-benda kebesaran, yaitu:

1. Sebuah Sondri atau keris emas (Gaukang)
2. Sebuah payung kerajaan yang berwarna kuning
3. Memiliki bendera Bate macan dan bendera lainnya yang bertuliskan huruf Arab Allah yang tak berbaris
4. 3 buah tombak kerajaan
5. 1 buah Gong, 2 buah Gendang, dan 3 buah Kannong-kannong
6. 1 buah Lengu atau perisai

Sebuah kerajaan harus memiliki bendera seperti halnya kerajaan Bontobangun memiliki bendera sakti yaitu bendera bate macan dan bendera bate lainnya bertuliskan tulisan Arab Allah Muhammad yang tidak pakai baris. Keistimewaan bendera bate macan ini apabila ada pesta kerajaan Bontobangun seperti Sossoro Gaukang (Mencuci benda kerajaan) kalau bendera itu sedang berkibar ada burung elang atau burung apa saja yang lewat diatasnya maka burung itu akan jatuh dan mati.

Makna bendera kerajaan tersebut adalah bahwa untuk mendirikan sebuah kerajaan harus ada Passapu Dendang Rilangit Kasokmakdulang Anging, yang artinya kalau kita melihat langit akan tampak tidak ada diatasnya dan tidak ada pula memiliki tiang penyangga dan dalam makna lain Bate atau bendera yang sedang berkibar berarti ada suatu negara atau suatu bentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang Raja/Opu.

Sahnya seorang Opu atau Raja disuatu kerajaan kalau yang bersangkutan itu memiliki lambang panji-panji dan gaukang, kalau dikerajaan Bontobangun lambnag atau gaukangnya adalah sebuah sondrik atau keris emas yang digelar Oja-ojayya.

Raja-raja atau Opu-opu yang memerintah sejak dahulu kala sampai sekarang ini :

1. Latinting Lase memerintah pada tahun 1260-1300
2. Manyandarang Daeng Maleok Opu Bingkung pada tahun 1844-1847
3. Abdurahman Daeng Sirua pada tahun 1847-1866
4. Umar Daeng Macora pada tahun 1866-1894
5. Massairang Karaeng Mangatta pada tahun 1895-1933, Opu Lolo pada tahun 1894, pensiun 1936

6. Muhammad Opu Patta Bundu pada tahun 1936-1950, sesudah itu diangkat pula jadi Kepala Distrik dan pensiun

Menjelang bangsa Indonesia memploklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tersisa 10 orang Opu atau Raja yang berdaulat diwilayah masing-masing sampai saat penyerahan kedaulatan pemerintahan kerajaan kepada NKRI untuk mewujudkan Indonesia Raya, yaitu:

1. Andi Parenrengi Karaeng Sagala Opu Tanete
2. Baso Bira Daeng Mangutungi Opu Batangmata
3. Said Karaeng Tuang Opu Onto
4. Abdurahman Daeng Mangasi Opu Buki
5. Patta Bau Karaeng Cinrapole Opu Bonea
6. Muhammad Opu Patta Bundu Opu Bontobangun
7. Abdul Razak Karaeng Rappo Opu Balla Bulo
8. Patta Arung Daeng Mangawing Opu Barang-barang
9. Andi Mulia Karaeng Palili Alang Opu Laiyolo
10. Yusuf Daeng Gappa Opu Bonerate

Setelah Opu Bontobangun Muhammad Opu Patta Bundu menyerahkan kedaulatan pemerintahan kepada NKRI yang terkecuali perangkat gaukang dan panji-panji serta kebesaran lainnya, terutama istana tempat tinggal raja (embayya) di Matalalang tidak diserahkan kepada NKRI atau pemerintah, karena perangkat kerajaan dan istana tempat tinggal raja adalah milik leluhur pribadi raja itu sendiri secara vertikal atau turun temurun, mulai dari Opu Manyandarang Daeng Makleok sampai kepada Muhammad Opu Patta Bundu Opu Bontobangun terakhir yang menempati dan memiliki serta menguasai penuh istana Emba pagar batu di Matalalang sebagai miliknya sampai sekarang ini.

*Narasumber : Andi Arman BA Patta Karaeng.*

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Untuk dapat menilai suatu tingkat perkembangan pembangunan baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan diperlukan suatu data analisis yang dapat merangkum dan menjabarkan segala perkembangan yang terjadi serta menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam mengeluarkan kebijakan guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya**.**

Untuk maksud tersebut diatas maka Pemerintah Kecamatan Bontoharu dengan berpedoman pada panduan teknis pengolahan data profil melakukan penyusunan profil Kecamatan dengan maksud memberikan gambaran secara menyeluruh akan kondisi daerah setempat sekaligus sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan - perbaikan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data potensi Kecamatan ini pula dapat diketahui atau dirumuskan beberapa hal, yaitu :

- Tingkatan Potensi Umum Kecamatan
- Potensi Pengembangan
- Tipologi Kecamatan
- Kendala – kendala pengembangan Kecamatan secara menyeluruh

Penyusunan Profil Kecamatan disamping untuk memberikan gambaran potensi secara menyeluruh terkait pembangunan baik yang akan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bontoharu namun juga dilakukan untuk menentukan tipologi Kecamatan Bontoharu sesuai potensi yang dimilikinya. Dari hasil penyusunan ini diharapkan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Kecamatan Bontoharu yang benar - benar terarah, terpadu dan berkelanjutan bagi penanganan setiap permasalahan baik sosial, ekonomi, politik yang muncul ditengah masyarakat sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Bontoharu.

## B. Pengertian Data Dasar Profil

Data dasar Profil Kecamatan adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi

dan permasalahan di Wilayah Kecamatan. dimaksudkan sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan kecamatan sesuai karakternya secara menyeluruh, yaitu gambaran tentang potensi yang meliputi alam, penduduk, kelembagaan, sarana/prasarana dan permasalahan yang dihadapi,baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter Kecamatan maupun yang timbul sebagai akibat bentuk dari kegiatan perkembangan pembangunan.

## C. Sumber Data Dasar Profil Kecamatan

Data dasar profil Kecamatan diperoleh dari sumber aslinya sebagai hasil pencatatan (registrasi) di tingkat Desa/Kelurahan. Disamping itu data dasar profil Kecamatan juga bersumber dari hasil perhitungan dan pengukuran yang dilakukan baik oleh aparat Kecamatan, maupun yang dilakukan oleh pihak instansi tingkat Kabupaten dan pihak lain yang kegiatannya diselenggarakan di tingkat Kecamatan.

## D. Status dan Kegunaan Data Dasar Profil

a. Status Data Dasar Profil Kecamatan
   1. Merupakan intervensi atau hak milik Kecamatan ;
   2. Merupakan himpunan data dasar Kecamatan;
   3. Merupakan wahana pencatatan data Kecamatan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan karakter yang terdapat pada Kecamatan.

b. Kegunaan Data Dasar Profil Kecamatan
   1. Sebagai bahan untuk meningkatkan fungsi partisipatif masyarakat dalam rangka lebih mengoptimalkan pembangunan Wilayah Kecamatan dan taraf hidup masyarakat;
   2. Sebagai bahan dasar penataan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pembangunan;
   3. Sebagai bahan pengelolaan pada musyawarah rencana pembangunan Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi, serta pengembangan rencana atau program masuk Kecamatan yang dikelola oleh Instansi Sektor

yang bidang kegiatannya ada kaitannya dengan pembangunan di Wilayah Kecamatan;

4. Sebagai alat evaluasi dan penentuan kebijaksanaan pembangunan Tingkat Pusat;
5. Bahan dasar untuk penilaian potensi dan tingkat perkembangan Kecamatan, sekaligus sebagai alat untuk mengetahui masalah yang menjadi penghambat laju pertumbuhan pembangunan termasuk pemecahannya;
6. Sebagai alat atau bahan pelayanan data/informasi bagi setiap pengguna data/informasi.

## E. Tujuan Penyusunan Data Dasar Profil

a. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang karakteristik Kecamatan melalui potensinya, tingkat perkembangannya dan masalah -masalah yang dihadapi dalam rangka pengembangan pembangunan;

b. Untuk menyamakan persepsi dari berbagai pemeran pembangunan tentang data dasar dan hasilnya diharapkan dapat memberikan iklim yang mendorong bagi terciptanya koordinasi dan keterpaduan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

## F. Ruang Lingkup Data Potensi

Ruang Lingkup Data Potensi Kecamatan Bontoharu terdiri dari variabel yaitu :

**1. Indikator Sumber Daya Alam, meliputi ;**

a. Potensi Umum meliputi batas dan luas wilayah, dan letak.
b. Kesuburan Tanah
c. Potensi Perkebunan
d. Potensi Kehutanan
e. Potensi Peternakan
f. Potensi Perikanan

**2. Sumber Daya Manusia, meliputi ;**

a. Jumlah Penduduk

b. Agama dan Aliran kepercayaan

c. Kewarga Negaraan

**3. Kelembagaan meliputi ;**

a. Lembaga Sosial Kemasyarakatan

b. Partai Politik

c. Lembaga Pendidikan

e. Lembaga Keamanan / Ketertiban

**4. Sarana dan Prasarana meliputi;**

a. Peribadatan

b. Kesehatan

c. Pendidikan

d. Energi dan Penerangan

e. Hiburan dan Wisata

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KECAMATAN

## 2. Visi Dan Misi Kecamatan Bontoharu

### A. Visi

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:"***Mewujudkan Kecamatan Bontoharu yang sukses dalam Pelayanan*****".**

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Bontoharu sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Selayar Yang Maju, Sejahtera dan Religius.

### B. Misi

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai "*Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius"*, yaitu :

1. Menciptakan prosedur pelayanan efisien dan efektif demi kepuasan masyarakat.
2. Terciptanya system koordinasi yang baik, guna mewujudkan sikap sensitive dan responsive terhadap penanganan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat.
4. Membangun system koordinasi yang mantap demi terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2. **Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

**B. Tugas Pokok Kecamatan**

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

**C. Fungsi Kecamatan**

Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan.

# BAB III
# DATA POTENSI KECAMATAN BONTOHARU

## 1. LETAK GEOGRAFIS

### *A. BATAS DAN LUAS WILAYAH*

Kecamatan Bontoharu merupakan Kecamatan yang memiliki 8 desa / Kelurahan, 5 Desa/Kelurahan berada di wilayah daratan Selayar sedangkan 3 desa lainnya berada di wilayah Kepulauan yaitu Pulau Gusung. Dari 8 desa tersebut, 2 diantaranya merupakan Kelurahan namun belum berstatus kota yaitu Kelurahan Putabangun dan Kelurahan Bontobangun dimana Kelurahan Bontobangun adalah ibukota Kecamatan ini yang berkedudukan di Matalalang dengan luas Wilayah Kecamatan tercatat **129, 75 KM$^2$**.

Sebelah Utara Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bontosikuyu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

**Batas dan Luas Wilayah Kecamatan Bontoharu**

| No | Batas Wilayah | Luas ( Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Utara : Kecamatan Bontomanai | **129,75** |
| 2 | Selatan : Kecamatan Bontosikuyu | |
| 3 | Barat : Selat Makassar | |
| 4 | Timur : Laut Flores | |

**Luas Wilayah menurut kelas ketinggian dari permukaan laut masing-masing desa/kelurahan**

| No. | Nama Kelurahan / Desa | Luas ($KM^2$) | Kelas Ketingian dari permukaan laut ( $M^2$) |
|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | **34,36** | **0 – 25** |
| 2. | Putabangun | **34,86** | **0 – 25** |
| 3. | Kalepadang | **17,55** | **0 – 25** |
| 4. | Bontotangnga | **12,80** | **0 – 25** |
| 5. | Bontosunggu | **12,88** | **0 – 25** |
| 6. | Bontoborusu | **10,00** | **0 –25** |
| 7. | Kahu – Kahu | **10,04** | **0 –25** |
| 8. | Bontolebang | **3,31** | **0 –25** |

**Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut desa**

| No. | Nama Kelurahan / Desa | Ibu Kota Kecamatan | Jarak (km) | Ibu Kota Kabupaten | Jarak (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | Bontobangun | **0** | Benteng | **3** |
| 2. | Putabangun | Bontobangun | **6** | Benteng | **3** |
| 3. | Kalepadang | Bontobangun | **8** | Benteng | **4** |
| 4. | Bontotangnga | Bontobangun | **4** | Benteng | **7** |
| 5. | Bontosunggu | Bontobangun | **7** | Benteng | **10** |
| 6. | Bontoborusu | Bontobangun | **9** | Benteng | **11** |
| 7. | Kahu – Kahu | Bontobangun | **10** | Benteng | **12** |
| 8. | Bontolebang | Bontobangun | **6** | Benteng | **3** |

**Letak & Klasifikasi Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Kelurahan / Desa | Letak Desa | | Klasifikasi Desa | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pantai | Bukan Pantai | Swadaya | Swakarya | Swasembada |
| 1. | Bontobangun | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Putabangun | - | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | 1 | 1 | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | 1 | 1 | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 1 | - | 1 | - | - |
| 6. | Bontoborusu | 1 | - | 1 | - | - |
| 7. | Kahu - Kahu | 1 | - | 1 | - | - |
| 8. | Bontolebang | 1 | - | 1 | - | - |
| | **Jumlah** | 5 | **3** | 8 | - | - |

**Kontur Tanah dan Potensi Desa Kecamatan Bontoharu**

| No. | Kelurahan / Desa | Kontur Tanah | Potensi Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Kelurahan Bontobangun | Pegunungan | Pertanian, Perkebunan |
| 2. | Kelurahan Putabangun | Pegunungan | Pertanian, Perkebunan |
| 3. | Kalepadang | Dataran, Pegunungan | Pertanian, Perkebunan |
| 4. | Bontotangnga | Pegunungan | Pertanian, Perkebunan |
| 5. | Bontosunggu | Pantai, Dataran | Nelayan, Pertanian |
| 6. | Bontoborusu | Pantai, Pegunungan | Nelayan, Perkebunan |
| 7. | Kahu – Kahu | Pantai, Pegunungan | Nelayan, Perkebunan |
| 8. | Bontolebang | Pantai | Nelayan |

## 2. PEMERINTAHAN DAN POLITIK

### *A. PEMERINTAHAN*

Kecamatan Bontoharu adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Selayar. Secara administratif Kecamatan Bontoharu dibagi menjadi 8 (delapan) Desa yang terdiri dari 5 Desa / Kelurahan daratan (Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa Bontosunggu ) dan 3 Desa Kepulauan (Desa Bontoborusu, Desa Kahu – Kahu, dan Desa Bontolebang )

**Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Bontoharu**

| No. | Nama Desa / Kelurahan | Ibu Kota Desa | Luas Wilayah ($km^2$) | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lingk/Dusun | RT | RK/RW |
| 1. | Bontobangun | Matalalang | 34,36 | 7 | 18 | 8 |
| 2. | Putabangun | Tabang Baru | 34,86 | 5 | 8 | 8 |
| 3. | Kalepadang | Palemba | 17,55 | 5 | 8 | 8 |
| 4. | Bontotangnga | Tanabau | 12,80 | 5 | 8 | 6 |
| 5. | Bontosunggu | Padang | 12,88 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Bontoborusu | Manarai | 10,00 | 4 | 4 | 8 |
| 7. | Kahu – Kahu | Kahu – Kahu Tengah | 10,04 | 3 | 4 | 8 |
| 8. | Bontolebang | Gusung Barat | 5,61 | 3 | 3 | 3 |

**Jumlah Dusun di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap desa/kelurahan**

| No. | Nama Desa/ Kelurahan | Lingkungan / Dusun | Jumlah Lingkungan Dusun |
|---|---|---|---|
| 1. | **Bontobangun** | - LingkunganTangnga - Tangnga<br>- LingkunganKampung Beru<br>- LingkunganParappa<br>- Lingkungan Biring Balang<br>- Lingkungan Bontosaile<br>- Lingkungan Bitombang<br>- Lingkungan Lura Gantarang | 7 |
| 2. | **Putabangun** | - Lingkungan Balangsembo<br>- Lingkungan Tabang Baru<br>- Lingkungan Tabang<br>- Lingkungan Pallengu<br>- Lingkungan Dongan – Dongan/ Rea-Rea | 5 |
| 3. | **Kalepadang** | - Dusun Iraja Lebo<br>- Dusun Palemba<br>- Dusun Kalebonto<br>- Dusun Palemba Timur<br>- Dusun Padangngoge | 5 |
| 4. | **Bontotangnga** | - Dusun Baera Utara<br>- Dusun Baera Selatan<br>- Dusun Subur<br>- Dusun Tanabau<br>- Dusun Tanah Harapan | 5 |
| 5. | **Bontosunggu** | - Dusun Bontomanai<br>- Dusun Padang Utara<br>- Dusun Padang Selatan<br>- Dusun Padang Tengah<br>- Dusun Galung | 5 |
| 6. | **Bontoborusu** | - Dusun Dongkalang<br>- Dusun Buloiya<br>- Dusun Paoiya<br>- Dusun Manarai | 4 |
| 7. | **Kahu – Kahu** | - Dusun Dopa<br>- Dusun Kahu – Kahu Selatan<br>- Dusun Kahu – Kahu Utara<br>- Kahu – Kahu Tengah | 4 |
| 8. | **Bontolebang** | - Dusun Gusung Barat<br>- Dusun Gusung Timur<br>- Dusun Gusung Lengu | 3 |

***B. POLITIK***

**Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif di Kecamatan Bontoharu**

| No Urut | Nama Partai Politik | Jumlah Pengurus | Kantor | Kegiatan | Ruang Lingkup Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | NASDEM | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 2 | PKB | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 3 | PKS | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 4 | PDIP | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 5 | GOLKAR | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 6 | GERINDRA | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 7 | DEMOKRAT | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 8 | PAN | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 9 | PPP | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 10 | HANURA | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 14 | PBB | | 1 | Politik | Kecamatan |
| 15 | PKPI | | 1 | Politik | Kecamatan |

**D. KEPENDUDUKAN**

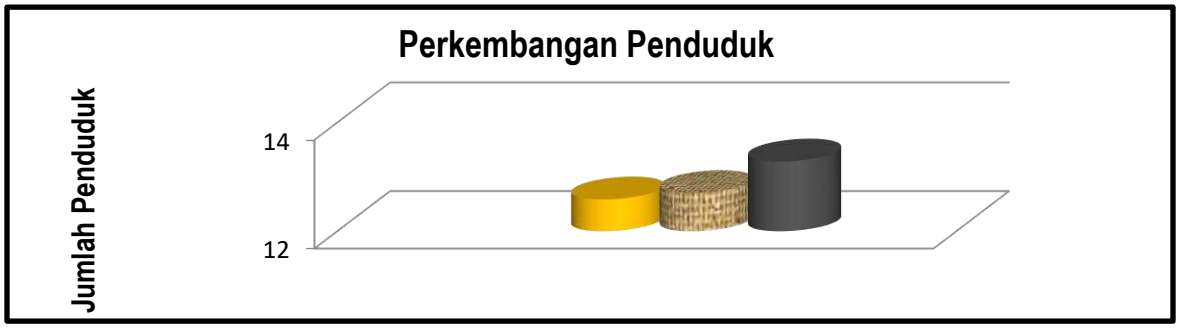
Jumlah penduduk Tahun 2023 Kecamatan Bontoharu tercatat **14.178** jiwa yang terdiri dari **7.066** Laki –laki dan **7.112** perempuan. Dengan luas wilayah **129,75** $km^2$.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Namun ada satu desa yaitu Desa Bontolebang dimana jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling besar yaitu Desa Bontolebang yang mencapai 246,22 jiwa/ $km^2$ mengingat luas wilayahnya yang kecil hanya 3,31 $km^2$ sedangkan jumlah penduduknya 998 jiwa.

**Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontoharu**

| No | Nama Desa / Kelurahan | Tahun |
|---|---|---|
| | | 20233 |
| 1 | Bontobangun | 2.475 |
| 2 | Putabangun | 1.939 |
| 3 | Kalepadang | 1.706 |
| 4 | Bontotangnga | 1.666 |
| 5 | Bontosunggu | 1.766 |
| 6 | Bontoborusu | 1.607 |
| 7 | Kahu – Kahu | 2.029 |
| 8 | Bontolebang | 990 |
| | **Jumlah** | **14.178** |

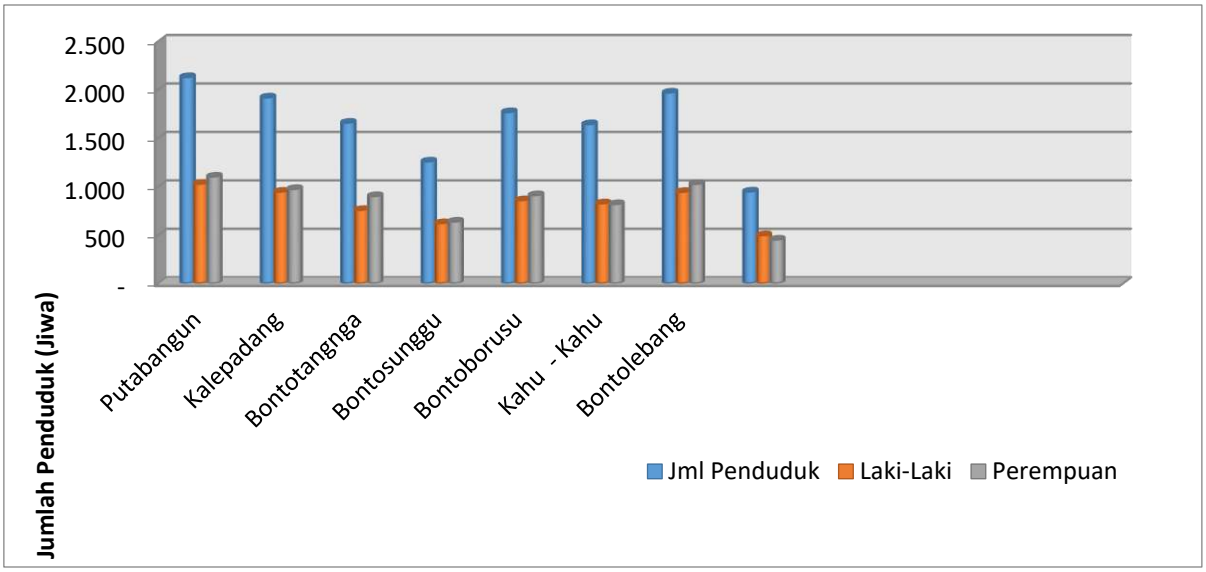
**Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontoharu**



**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa | Penduduk | | Jumlah | Sex Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Bontobangun | 1.201 | 1.274 | 2.475 | |
| 2. | Putabangun | 962 | 957 | 1.939 | |
| 3. | Kalepadang | 863 | 843 | 1.706 | |
| 4. | Bontotangnga | 840 | 816 | 1.666 | |
| 5. | Bontosunggu | 852 | 914 | 1.766 | |
| 6. | Bontoborusu | 818 | 789 | 1.607 | |
| 7. | Kahu – Kahu | 1.000 | 1.029 | 2.029 | |
| 8. | Bontolebang | 510 | 480 | 990 | |
| | **Jumlah** | **7.066** | **7.112** | **14.178** | |

**Grafik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bontoharu**



**Luas Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | Luas ($km^2$) | Rumah Tangga | Penduduk | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 34,36 | 618 | 2.481 | 43,34 |
| 2. | Putabangun | 34,86 | 564 | 1.971 | 60,25 |
| 3. | Kalepadang | 17,55 | 414 | 1.714 | 102,43 |
| 4. | Bontotangnga | 12,80 | 454 | 1.604 | 107,81 |
| 5. | Bontosunggu | 12,88 | 472 | 1.800 | 136,33 |
| 6. | Bontoborusu | 10,00 | 437 | 1.617 | 147,00 |
| 7. | Kahu – kahu | 10,04 | 482 | 2.053 | 178,78 |
| 8. | Bontolebang | 3,31 | 271 | 983 | 246,22 |
| | **Jumlah** | **129,75** | **3.712** | **14.223** | |

**Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa / Kelurahan | WNI | | | WNA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P |
| 1. | Bontobangun | 1.206 | 1.288 | 2.494 | - | - | - |
| 2. | Putabangun | 1.004 | 990 | 1.994 | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | 805 | 819 | 1.624 | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | 806 | 788 | 1.594 | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 877 | 923 | 1.812 | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | 848 | 779 | 1.627 | - | - | - |
| 7. | Kahu – kahu | 973 | 1.041 | 2.014 | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | 515 | 462 | 982 | - | - | - |
| | **Jumlah** | **7.034** | **7.090** | **14.129** | **-** | **-** | **-** |

**JumlahPenduduk menurut Status Pekerjaan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa | Penduduk | |
|---|---|---|---|
| | | Bekerja | Tidak Bekerja |
| 1. | Bontobangun | 520 | 36 |
| 2. | Putabangun | 491 | 10 |
| 3. | Kalepadang | 375 | 48 |
| 4. | Bontotangnga | 429 | 32 |
| 5. | Bontosunggu | 428 | 40 |
| 6. | Bontoborusu | 361 | 61 |
| 7. | Kahu – kahu | 443 | 85 |
| 8. | Bontolebang | 243 | 24 |
| | **Jumlah** | **3.290** | **336** |

**Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa | Penduduk | |
|---|---|---|---|
| | | Kawin | Janda/Duda/Belum Kawin |
| 1. | Bontobangun | 486 | 128 |
| 2. | Putabangun | 410 | 111 |
| 3. | Kalepadang | 321 | 102 |
| 4. | Bontotangnga | 339 | 122 |
| 5. | Bontosunggu | 369 | 103 |
| 6. | Bontoborusu | 310 | 116 |
| 7. | Kahu – kahu | 398 | 135 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Bontolebang | 209 | 63 |
| | **Jumlah** | **2.842** | **880** |

**Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | 5 - <10 Tahun | 10 - <25 Tahun | 25 - <60 Tahun | 60 Tahun ke Atas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 218 | 522 | 976 | 198 |
| 2. | Putabangun | 181 | 493 | 818 | 167 |
| 3. | Kalepadang | 220 | 421 | 674 | 176 |
| 4. | Bontotangnga | 167 | 422 | 728 | 133 |
| 5. | Bontosunggu | 243 | 550 | 743 | 140 |
| 6. | Bontoborusu | 153 | 490 | 635 | 181 |
| 7. | Kahu – kahu | 168 | 545 | 883 | 133 |
| 8. | Bontolebang | 142 | 261 | 425 | 54 |
| | **Jumlah** | **1.492** | **3.704** | **5.882** | **1.177** |

**Usia :**

| N | PEREMPUAN | | | | | | | | | LAKI-LAKI | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | Kel. P | Kel. B | D. Lbng | D.Khu" | D.Brusu | D. Bsngu | D.Kpdg | D. Btnga | Total | Kel .P | Kel .B | D.Lbng | D.Khu" | D.Brusu | D.Bsngu | D.Kpdg | D.Btnga | Total |
| 0-12 bln | 2 | 2 | 6 | 11 | 9 | 30 | 10 | 3 | 73 | 10 | 0 | 3 | 13 | 7 | 20 | 10 | 8 | 71 |
| 1 thn | 6 | 14 | 7 | 2 | 9 | 22 | 8 | 3 | 71 | 9 | 17 | 7 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 | 66 |
| 2 | 16 | 14 | 7 | 3 | 5 | 22 | 9 | 12 | 88 | 9 | 21 | 9 | 2 | 7 | 27 | 10 | 13 | 98 |
| 3 | 14 | 15 | 3 | 3 | 11 | 20 | 9 | 4 | 79 | 19 | 14 | 8 | 6 | 12 | 17 | 18 | 9 | 103 |
| 4 | 13 | 28 | 6 | 3 | 17 | 8 | 10 | 11 | 96 | 16 | 23 | 11 | 1 | 12 | 25 | 12 | 13 | 113 |
| 5 | 9 | 22 | 3 | 2 | 13 | 9 | 10 | 13 | 81 | 10 | 24 | 10 | 5 | 12 | 15 | 16 | 16 | 108 |
| 6 | 13 | 26 | 9 | 12 | 10 | 11 | 14 | 16 | 111 | 13 | 32 | 9 | 10 | 7 | 18 | 16 | 20 | 125 |
| 7 | 11 | 18 | 8 | 15 | 11 | 10 | 13 | 11 | 97 | 20 | 26 | 8 | 14 | 9 | 7 | 25 | 11 | 120 |
| 8 | 20 | 24 | 3 | 19 | 7 | 15 | 10 | 12 | 110 | 20 | 28 | 16 | 17 | 13 | 11 | 13 | 9 | 127 |
| 9 | 17 | 29 | 9 | 23 | 10 | 22 | 16 | 11 | 137 | 20 | 32 | 16 | 12 | 6 | 21 | 22 | 12 | 141 |
| 10 | 17 | 17 | 18 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | 129 | 17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 17 | 25 | 10 | 139 |
| 11 | 18 | 24 | 6 | 19 | 16 | 17 | 16 | 16 | 132 | 24 | 15 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 19 | 120 |
| 12 | 13 | 35 | 13 | 26 | 15 | 20 | 23 | 11 | 156 | 12 | 30 | 14 | 24 | 9 | 19 | 21 | 12 | 141 |
| 13 | 26 | 31 | 3 | 18 | 15 | 21 | 24 | 10 | 148 | 18 | 29 | 9 | 13 | 17 | 20 | 22 | 14 | 142 |
| 14 | 12 | 36 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 148 | 15 | 25 | 7 | 25 | 13 | 25 | 17 | 23 | 150 |
| 15 | 19 | 18 | 6 | 12 | 27 | 15 | 16 | 12 | 125 | 25 | 15 | 8 | 29 | 20 | 15 | 22 | 22 | 156 |
| 16 | 18 | 26 | 14 | 23 | 18 | 12 | 18 | 21 | 150 | 30 | 17 | 15 | 27 | 13 | 12 | 21 | 17 | 152 |
| 17 | 24 | 24 | 15 | 22 | 20 | 11 | 15 | 19 | 150 | 20 | 23 | 17 | 18 | 17 | 13 | 27 | 18 | 153 |
| 18 | 18 | 19 | 7 | 25 | 24 | 15 | 29 | 15 | 152 | 23 | 23 | 11 | 36 | 28 | 13 | 19 | 19 | 172 |
| 19 | 14 | 18 | 9 | 27 | 12 | 11 | 10 | 11 | 112 | 13 | 17 | 16 | 28 | 17 | 11 | 22 | 21 | 145 |
| 20 | 18 | 22 | 11 | 29 | 19 | 21 | 22 | 14 | 156 | 22 | 18 | 12 | 21 | 23 | 17 | 24 | 18 | 155 |
| 21 | 16 | 15 | 7 | 26 | 22 | 15 | 14 | 23 | 138 | 18 | 14 | 8 | 16 | 21 | 17 | 20 | 18 | 132 |
| 22 | 22 | 27 | 11 | 21 | 15 | 16 | 14 | 15 | 141 | 18 | 12 | 4 | 10 | 12 | 14 | 20 | 26 | 116 |
| 23 | 19 | 14 | 8 | 27 | 13 | 13 | 11 | 16 | 121 | 17 | 16 | 7 | 25 | 14 | 14 | 11 | 9 | 113 |
| 24 | 6 | 20 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 11 | 104 | 19 | 15 | 10 | 19 | 15 | 15 | 8 | 14 | 115 |
| 25 | 15 | 23 | 5 | 16 | 10 | 14 | 11 | 9 | 103 | 18 | 15 | 10 | 19 | 14 | 17 | 11 | 20 | 124 |
| 26 | 14 | 11 | 7 | 15 | 12 | 15 | 7 | 7 | 88 | 13 | 18 | 6 | 18 | 17 | 11 | 14 | 12 | 109 |
| 27 | 16 | 17 | 3 | 29 | 12 | 14 | 14 | 13 | 118 | 18 | 23 | 8 | 26 | 16 | 13 | 12 | 9 | 125 |
| 28 | 14 | 16 | 6 | 23 | 10 | 14 | 8 | 7 | 98 | 22 | 11 | 7 | 12 | 8 | 14 | 16 | 11 | 101 |
| 29 | 12 | 21 | 6 | 10 | 5 | 15 | 13 | 7 | 89 | 10 | 14 | 3 | 25 | 9 | 15 | 10 | 10 | 96 |
| 30 | 13 | 14 | 5 | 26 | 9 | 15 | 9 | 12 | 103 | 14 | 21 | 6 | 21 | 14 | 22 | 11 | 14 | 123 |
| 31 | 14 | 25 | 3 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 106 | 15 | 11 | 10 | 26 | 16 | 17 | 9 | 9 | 113 |
| 32 | 9 | 19 | 6 | 18 | 15 | 18 | 22 | 11 | 118 | 15 | 31 | 2 | 39 | 17 | 17 | 22 | 11 | 154 |
| 33 | 16 | 17 | 5 | 26 | 6 | 11 | 16 | 20 | 117 | 9 | 20 | 6 | 12 | 19 | 13 | 9 | 13 | 101 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 20 | 3 | 20 | 7 | 13 | 8 | 14 | 102 | 15 | 22 | 8 | 10 | 19 | 13 | 13 | 10 | 110 |
| 35 | 13 | 26 | 7 | 25 | 11 | 12 | 11 | 11 | 116 | 17 | 10 | 8 | 28 | 12 | 17 | 12 | 12 | 116 |
| 36 | 18 | 20 | 7 | 22 | 12 | 12 | 7 | 19 | 117 | 13 | 14 | 4 | 16 | 9 | 12 | 9 | 9 | 86 |
| 37 | 17 | 20 | 15 | 11 | 13 | 11 | 11 | 6 | 104 | 10 | 17 | 3 | 12 | 13 | 13 | 14 | 23 | 105 |
| 38 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 14 | 7 | 16 | 92 | 12 | 15 | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 9 | 98 |
| 39 | 18 | 16 | 6 | 28 | 9 | 11 | 4 | 16 | 108 | 8 | 12 | 7 | 21 | 12 | 13 | 10 | 16 | 99 |
| 40 | 14 | 16 | 9 | 19 | 8 | 14 | 16 | 8 | 104 | 14 | 12 | 6 | 26 | 12 | 13 | 11 | 10 | 104 |
| 41 | 16 | 17 | 5 | 17 | 11 | 13 | 6 | 11 | 96 | 16 | 23 | 6 | 18 | 8 | 8 | 9 | 10 | 98 |
| 42 | 11 | 18 | 3 | 11 | 9 | 14 | 12 | 10 | 88 | 11 | 17 | 5 | 10 | 11 | 7 | 10 | 12 | 83 |
| 43 | 14 | 15 | 6 | 12 | 6 | 15 | 13 | 11 | 92 | 17 | 15 | 3 | 16 | 8 | 13 | 10 | 13 | 95 |
| 44 | 12 | 25 | 12 | 10 | 1 | 18 | 13 | 16 | 107 | 15 | 23 | 7 | 19 | 7 | 12 | 16 | 13 | 112 |
| 45 | 11 | 23 | 4 | 12 | 10 | 20 | 16 | 8 | 104 | 20 | 22 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 14 | 118 |
| 46 | 17 | 17 | 6 | 11 | 4 | 13 | 11 | 14 | 93 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 75 |
| 47 | 15 | 16 | 6 | 5 | 7 | 13 | 11 | 17 | 90 | 12 | 12 | 8 | 15 | 4 | 8 | 7 | 10 | 76 |
| 48 | 19 | 21 | 9 | 10 | 15 | 14 | 8 | 12 | 108 | 14 | 15 | 8 | 13 | 15 | 7 | 11 | 15 | 98 |
| 49 | 13 | 12 | 11 | 12 | 6 | 19 | 5 | 13 | 91 | 11 | 22 | 5 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 85 |
| 50 | 21 | 16 | 4 | 11 | 7 | 16 | 11 | 12 | 98 | 14 | 10 | 10 | 15 | 5 | 9 | 10 | 4 | 77 |
| 51 | 25 | 27 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 11 | 102 | 19 | 14 | 3 | 14 | 14 | 15 | 7 | 13 | 99 |
| 52 | 13 | 13 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 71 | 15 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 93 |
| 53 | 8 | 13 | 5 | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 66 | 9 | 11 | 5 | 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | 65 |
| 54 | 9 | 17 | 9 | 4 | 4 | 8 | 6 | 9 | 66 | 5 | 19 | 8 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 74 |
| 55 | 10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 9 | 21 | 9 | 83 | 10 | 9 | 8 | 19 | 8 | 8 | 15 | 5 | 82 |
| 56 | 7 | 15 | 3 | 12 | 4 | 12 | 2 | 7 | 62 | 11 | 16 | 5 | 11 | 7 | 10 | 5 | 15 | 80 |
| 57 | 10 | 15 | 6 | 1 | 5 | 10 | 8 | 6 | 61 | 10 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 11 | 11 | 74 |
| 58 | 8 | 12 | 4 | 13 | 10 | 10 | 6 | 8 | 71 | 6 | 17 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 63 |
| 59 | 7 | 11 | 4 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 54 | 9 | 17 | 3 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 67 |
| 60 | 12 | 14 | 7 | 12 | 9 | 5 | 8 | 1 | 68 | 9 | 8 | 7 | 2 | 10 | 9 | 15 | 7 | 67 |
| 61 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 39 | 5 | 5 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 14 | 46 |
| 62 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 35 | 8 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 44 |
| 63 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 31 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 39 |
| 64 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 47 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 42 |
| 65 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | 49 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 42 |
| 66 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 14 | 48 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 36 |
| 67 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 8 | 9 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 38 |
| 68 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 31 |
| 69 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| 70 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 28 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 34 |
| 71 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 21 |
| 72 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 31 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 |
| 73 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 74 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 |
| 75 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 34 | 20 | 104 | 19 | 5 | 0 | 7 | 11 | 2 | 7 | 13 | 64 |
| Total | 952 | 1275 | 471 | 950 | 740 | 928 | 834 | 803 | 6953 | 979 | 1203 | 511 | 1035 | 806 | 886 | 899 | 852 | 7181 |

## 3. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL LAINNYA

### *A. PENDIDIKAN*

Pembangunan bidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Salah satu indikator penilaian untuk maju dan berkembangnya suatu daerah dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia melalui pendidikannya. Tabel dibawah ini memberikan gambaran terhadap hal tersebut.

**Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 5 | 10 | 120 | 23 |
| 2. | Putabangun | 2 | 4 | 40 | 3 |
| 3. | Kalepadang | 3 | 6 | 67 | 12 |
| 4. | Bontotangnga | 2 | 4 | 56 | 8 |
| 5. | Bontosunggu | 2 | 4 | 65 | 10 |
| 6. | Bontoborusu | 2 | 4 | 49 | 7 |
| 7. | Kahu – Kahu | 2 | 4 | 39 | 8 |
| 8. | Bontolebang | 1 | 2 | 20 | 4 |
| **Jumlah** | | **19** | **38** | **456** | **75** |

**Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontobangun | 4 | 24 | 217 | 77 |
| **2.** | Putabangun | 3 | 18 | 264 | 55 |
| **3.** | Kalepadang | 2 | 12 | 244 | 34 |
| **4.** | Bontotangnga | 1 | 6 | 135 | 22 |
| **5.** | Bontosunggu | 1 | 6 | 327 | 19 |
| **6.** | Bontoborusu | 1 | 6 | 196 | 22 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 1 | 6 | 271 | 21 |
| **8.** | Bontolebang | 1 | 6 | 145 | 15 |
| Jumlah | | **14** | **84** | **1.799** | **265** |

**Jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontobangun | 2 | 12 | 98 | 37 |
| **2.** | Putabangun | 1 | 6 | 175 | 24 |
| **3.** | Kalepadang | 1 | 6 | 185 | 18 |
| **4.** | Bontotangnga | - | - | - | - |
| **5.** | Bontosunggu | 1 | 6 | 327 | 19 |
| **6.** | Bontoborusu | 1 | 6 | 196 | 22 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 1 | 6 | 271 | 21 |
| **8.** | Bontolebang | 1 | 6 | 145 | 15 |
| Jumlah | | **8** | **48** | **1.397** | **156** |

**Jumlah Sekolah Dasar (SD) Inpres di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 2 | 12 | 129 | 40 |
| 2. | Putabangun | 2 | 12 | 99 | 31 |
| 3. | Kalepadang | 1 | 6 | 69 | 16 |
| 4. | Bontotangnga | 1 | 6 | 135 | 22 |
| 5. | Bontosunggu | 1 | | - | - |
| 6. | Bontoborusu | - | - | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | 1 | 8 | 215 | 38 |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - |
| Jumlah | | **8** | **44** | **647** | **147** |

**Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 2 | 6 | 146 | 20 |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | 1 | 3 | 178 | 23 |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 1 | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | 1 | 3 | 169 | 15 |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | 1 | 3 | 57 | 7 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | **6** | **15** | **550** | **65** |

**Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontobangun | 1 | 6 | 145 | 17 |
| **2.** | Putabangun | - | - | - | - |
| **3.** | Kalepadang | - | - | - | - |
| **4.** | Bontotangnga | - | - | - | - |
| **5.** | Bontosunggu | - | - | - | - |
| **6.** | Bontoborusu | - | - | - | - |
| **7.** | Kahu – Kahu | 1 | 6 | 62 | 12 |
| **8.** | Bontolebang | - | - | - | - |
| Jumlah | | **2** | 12 | 207 | **29** |

**Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontobangun | 1 | 3 | 37 | 18 |
| **2.** | Putabangun | - | - | - | - |
| **3.** | Kalepadang | 1 | 3 | 84 | 15 |
| **4.** | Bontotangnga | 1 | 3 | 37 | 18 |
| **5.** | Bontosunggu | - | - | - | - |
| **6.** | Bontoborusu | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - |
| Jumlah | | **3** | **9** | **158** | **51** |

**Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | - | - | - | - |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | 1 | 6 | 95 | 17 |
| 5. | Bontosunggu | - | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | 1 | 6 | 93 | 15 |
| 7. | Kahu – Kahu | 1 | 6 | 58 | 10 |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **2** | **12** | **246** | **25** |

**Jumlah Kepala Keluarga menurut Status Pendidikan Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | Tidak Tamat SD | Tamat SD/SLTP | Tamat SLTA | Tamat AK/PT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 79 | 298 | 135 | 94 |
| 2. | Putabangun | 34 | 45 | 367 | 51 |
| 3. | Kalepadang | 84 | 236 | 72 | 31 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Bontotangnga | 98 | 249 | 72 | 42 |
| 5. | Bontosunggu | 6 | 373 | 68 | 21 |
| 6. | Bontoborusu | 90 | 276 | 39 | 17 |
| 7. | Kahu – kahu | 236 | 260 | 26 | 6 |
| 8. | Bontolebang | 169 | 84 | 10 | 4 |
| | **Jumlah** | **796** | **1.821** | **789** | **266** |

## A. Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan di bidang kesehatan biasa dilihat dari dua aspek yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia.Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Bontoharu tahun 2023 terdiri dari 2 Puskesmas dan 32 Posyandu.

Selanjutnya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang ada di Kecamatan Bontoharu yaitu : Dokter umum 3 orang, Bidan 25 orang, dan Dukun Bayi kurang lebih 20 orang.

Berikutnya dalam hal pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor KB baru di Kecamatan Bontoharu Tahun 2023 terdiri dari : 21 orang memakai IUD, 92 orang memakai IMP, 913 orang memakai Suntikan 182 orang memakai PIL, dan 253 orang memakai kondom

**Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut Tiap Desa/Kelurahan**

| No | Desa / Kelurahan | Tenaga Kesehatan | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Dokter | Bidan | Dukun Bayi |
| 1. | Bontobangun | - | 3 | 3 |
| 2. | Putabangun | - | 1 | 1 |
| 3. | Kalepadang | - | 1 | 3 |
| 4. | Bontotangnga | - | 3 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **5.** | Bontosunggu | 2 | 82 | 2 |
| **6.** | Bontoborusu | - | 3 | 3 |
| **7.** | Kahu – Kahu | - | 1 | 4 |
| **8.** | Bontolebang | - | - | 2 |
| | Jumlah | **2** | **94** | **20** |

**Jumlah Puskesmas dan Posyandu di Kecamatan Bontoharu**

| NO | Kelurahan / Desa | Puskesmas | | Puskesmas Pembantu | Posyandu |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Inpres** | **Non Inpres** | | |
| **1.** | Bontobangun | - | - | 1 | 4 |
| **2.** | Putabangun | - | - | 1 | 4 |
| **3.** | Kalepadang | - | - | 1 | 5 |
| **4.** | Bontotangnga | - | - | 1 | 5 |
| **5.** | Bontosunggu | - | 1 | - | 3 |
| **6.** | Bontoborusu | - | - | 1 | 4 |
| **7.** | Kahu – Kahu | - | - | 1 | 4 |
| **8.** | Bontolebang | - | - | 1 | 3 |
| | Jumlah | | **1** | **7** | **32** |

**Jumlah Kelahiran pada Rumah Sakit dan Puskesmas di Kecamatan Bontoharu Menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Desa | Kelahiran | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | **Hidup** | **Meninggal** | |
| **1.** | Bontobangun | 34 | 1 | 35 |
| **2.** | Putabangun | - | - | - |
| **3.** | Kalepadang | 32 | - | 32 |
| **4.** | Bontotangnga | 19 | - | 19 |
| **5.** | Bontosunggu | 32 | - | 32 |
| **6.** | Bontoborusu | 33 | 1 | 34 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 24 | 2 | 26 |
| **8.** | Bontolebang | - | -- | - |
| | Jumlah | **174** | **4** | **178** |

**Jumlah Persalinan yang ditangani oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Dukun di Kecamatan Bontoharu Menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Kelurahan / Desa | Persalinan | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | **Tenaga Kesehatan** | **Dukun** | |
| **1.** | Bontobangun | 34 | 1 | 35 |
| **2.** | Putabangun | - | - | - |
| **3.** | Kalepadang | 27 | 5 | 32 |
| **4.** | Bontotangnga | 19 | - | 19 |
| **5.** | Bontosunggu | 32 | 2 | 34 |
| **6.** | Bontoborusu | 31 | 3 | 34 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 23 | 3 | 26 |
| **8.** | Bontolebang | - | - | - |

| Jumlah | 166 | 14 | 180 |
|---|---|---|---|

**Jumlah Peserta KB Baru dirinci tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Target | Peserta Baru | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IUD | MOW | MOP | IMP | PIL | KONDOM | SUNTIK |
| 1. | Bontobangun | | 16 | 13 | 3 | 34 | 37 | 25 | 119 |
| 2. | Putabangun | | 7 | 9 | 0 | 25 | 16 | 119 | 78 |
| 3. | Kalepadang | | 0 | 5 | 4 | 11 | 14 | 17 | 92 |
| 4. | Bontotangnga | | 5 | 4 | 0 | 7 | 18 | 52 | 117 |
| 5. | Bontosunggu | | 3 | 9 | 1 | 4 | 30 | 21 | 158 |
| 6. | Bontoborusu | | 1 | 5 | 0 | 13 | 13 | 0 | 98 |
| 7. | Kahu – Kahu | | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 13 | 192 |
| 8. | Bontolebang | | 2 | 0 | 11 | 1 | 49 | 10 | 62 |
| | Jumlah | | **34** | **47** | **22** | **98** | 191 | **257** | **916** |

**Jumlah Pasangan Usia Subur di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Pasangan usia subur | PUS Menurut Kelompok Umur | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | <20 Tahun | 20-29 Tahun | 30-49 Tahun |
| 1. | Bontobangun | 616 | 12 | 78 | 259 |
| 2. | Putabangun | 513 | 8 | 72 | 239 |
| 3. | Kalepadang | 228 | 6 | 55 | 166 |
| 4. | Bontotangnga | 274 | 13 | 62 | 199 |
| 5. | Bontosunggu | 294 | 10 | 75 | 209 |
| 6. | Bontoborusu | 246 | 8 | 66 | 172 |
| 7. | Kahu – Kahu | 289 | 9 | 54 | 222 |
| 8. | Bontolebang | 167 | 7 | 304 | 119 |
| | Jumlah | **2.627** | **73** | **766** | **1.585** |

**Jumlah Klinik KB, PKB dan Sub KB dirinci tiap Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Klinik KB | PPLKB | PKB | PPKBD | Sub PPKBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | - | - | - | - | - |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | - | - | - | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | **1** | - | **-** | **-** | **-** |

## C. SOSIAL LAINNYA

Masalah sosial lainnya seperti agama, Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama.Tempat peribadatan umat Islam berupa Mesjid pada tahun 2023 masing masing sejumlah 42 Bangunan dan Musholla 5 Bangunan. Tempat peribadatan Kristen berupa Gereja, Bangunan sementara untuk tempat ibadah Hindu dan Budha belum ada dalam wilayah Kecamatan Bontoharu

**Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Kelurahan / Desa | Tempat Ibadah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mesjid | Mushalla | Gereja | Pura | Kelenteng |
| **1.** | Bontobangun | 9 | 2 | - | - | - |
| **2.** | Putabangun | 7 | 2 | - | - | - |
| **3.** | Kalepadang | 5 | - | - | - | - |
| **4.** | Bontotangnga | 5 | - | - | - | - |
| **5.** | Bontosunggu | 4 | | - | - | - |
| **6.** | Bontoborusu | 4 | - | - | - | - |
| **7.** | Kahu – Kahu | 4 | - | - | - | - |
| **8.** | Bontolebang | 3 | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | 41 | 4 | - | - | - |

**Jumlah Rohaniawan menurut Agama di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Kelurahan / Desa | Rohaniawan Islam | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ulama | Muballigh | Khatib | Penyuluh |
| **1.** | Bontobangun | - | 4 | 10 | 3 |
| **2.** | Putabangun | - | - | 6 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | Kalepadang | - | - | 12 | - |
| **4.** | Bontotangnga | - | - | 9 | 1 |
| **5.** | Bontosunggu | - | - | 5 | 2 |
| **6.** | Bontoborusu | - | - | 10 | - |
| **7.** | Kahu – Kahu | - | - | 14 | - |
| **8.** | Bontolebang | - | - | 9 | - |
| | **Jumlah** | - | 4 | 75 | 8 |

**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Kelurahan / Desa | Jenis Permasalahan Sosial | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anak terlantar | Penyandang Cacat | Bekas Narapidana | Lanjut Usia terlantar | Wanita Rawan Sosial Ekonomi |
| **1.** | Bontobangun | 6 | 10 | 19 | 87 | 6 |
| **2.** | Putabangun | 26 | 46 | 10 | 60 | 2 |
| **3.** | Kalepadang | 20 | 20 | 2 | 32 | 10 |
| **4.** | Bontotangnga | 8 | 14 | 11 | 30 | 27 |
| **5.** | Bontosunggu | 4 | 2 | 12 | 37 | 26 |
| **6.** | Bontoborusu | 30 | 32 | 20 | 31 | 18 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 58 | 61 | 3 | 36 | 18 |
| **8.** | Bontolebang | 28 | 30 | 2 | 52 | 7 |
| | **Jumlah** | 180 | 215 | 79 | 355 | 114 |

**BanyaknyaPenyandang Cacat menurut Jenisnya dirinci tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Jenis Penyandang Cacat | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tuna Rungu ( Bisu/Tuli ) | Tuna Netra ( Buta ) | Tuna Grahita (Lemah Mental ) | Tuna Daksa (Lemah Fisik) | Tuna Laras (WTS) |
| **1.** | Bontobangun | 3 | 4 | - | 3 | - |
| **2.** | Putabangun | 3 | 7 | 9 | 20 | - |
| **3.** | Kalepadang | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
| **4.** | Bontotangnga | 2 | 2 | 5 | 5 | - |
| **5.** | Bontosunggu | 1 | - | 3 | - | - |
| **6.** | Bontoborusu | 2 | 2 | 3 | - | - |
| **7.** | Kahu – Kahu | 3 | 2 | - | - | - |
| **8.** | Bontolebang | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| | Jumlah | **20** | **23** | **23** | **36** | **-** |

**Banyaknya Fasilitas Lapangan Olahraga dirinci tiap Desa/ Kelurahan Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa | Sepak Bola | Bola Volly | Tennis | Bulu Tangkis | Tennis Meja | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Bontobangun | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| **2.** | Putabangun | - | 2 | - | 2 | 1 | - |
| **3.** | Kalepadang | - | - | - | 1 | - | - |
| **4.** | Bontotangnga | - | 2 | - | - | 1 | - |
| **5.** | Bontosunggu | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| **6.** | Bontoborusu | - | 6 | - | 1 | - | -- |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | Kahu – Kahu | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| **8.** | Bontolebang | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - |
| | Jumlah | **4** | **19** | **1** | **9** | **7** | **-** |

## 4. POTENSI PERTANIAN

Berdasarkan data Profil Kecamatan Bontoharu Tahun 2023, dapat diperoleh gambaran bahwa kecamatan Bontoharu termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas wilayah kecamatan Bontoharu kurang lebih 129,75 $km^2$ yang digunakan untuk berbagai macam peruntukan seperti pemukiman, perkebunan, pekarangan, ladang, tegalan, hutan dan lain - lain. Luas wilayah kecamatan kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan sesuai dengan Tabel di bawah ini :

**Luas Peruntukan Lahan di Kecamatan Bontoharu Tahun 2023**

| No | Jenis dan Peruntukan Lahan | Luas (ha) | Prosentase (%) | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Pertanian tanaman pangan | | | |
| | - Lahan sawah/Irigasi Sederhana | 124,00 | 0,81 | |
| | - Lahan kering | 1.203,00 | 7,88 | |
| **2** | Kebun/hutan rakyat | 1.047,50 | 6,86 | |
| **3** | Pekarangan | 447,00 | 2,93 | |
| **4** | Kawasan hutan | 8.592,27 | 56,25 | |
| **5** | Tambak dan kolam | 139,75 | 0,91 | |
| **6** | Lahan tidak diusahakan | 1.179,00 | 7,72 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Pemukiman | 1.018 | 6,66 |
| **8** | Lain-lain | 1.524,48 | 9,98 |
| | **Jumlah** | **15,275,00** | **100,00** |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

Tabel di atas menggambarkan, bahwa peruntukan lahan paling luas digunakan adalah pada kawasan hutan seluas 8.580,71 ha dengan prosentase 56,25 % dari total keseluruhan luas wilayah.

**1. Karakteristik Lahan dan Iklim**

Kecamatan Bontoharu sebagai daerah dataran rendah memiliki keragaman jenis tanah, dimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Perincian Luas dan Jenis Tanah di Kecamatan Bontoharu Tahun 2023**

| No | Jenis Tanah | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|---|---|---|---|
| **1** | Aluvial | 1.504,00 | 12,40 |
| **2** | Kompleks renzina dan regosol | 2.315,00 | 19,40 |
| **3** | Mediteran coklat tua | 3.210,00 | 26,04 |
| **4** | Latosol | 925,34 | 7,60 |
| **5** | Regosol | 2.125,00 | 17,36 |
| **6** | Kompleks mediteran litosol | 2.083,34 | 17,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **7** | Lain – Lain | 3.112,32 | 20,38 |
| | Jumlah | **15.275,00** | **100,00** |

*Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023*

Dari tabel di atas, nampak jenis tanah mediteran terluas sebanyak 3.210,00 Ha atau 26,04% dimana jenis tanah tersebut sangat cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura dari jenis buah-buahan.

Kemudian iklim musim di Kecamatan Benteng Bontoharu terbagi dua musim yaitu musim barat jatuh pada periode Oktober sampai Maret dimana pada musim barat ombaknya besar pada bagian barat Pulau Selayar, dan musim kemarau atau musim timur jatuh pada periode April sampai September dimana pada musim timur ombaknya besar pada bagian timur Pulau Selayar. Berdasarkan perhitungan tersebut maka Kecamatan Benteng Bontoharu memiliki tipe iklim E, karena nilai Q berada pada 1,000<Q<1,670 (agak kering).

## 2. Komoditas Unggulan Menurut Subsektor

**B**eberapa komoditas unggulan yang terdapat di kecamatan Benteng - Bontoharu berdasarkan hasil identifikasi terangkum berdasarkan jenis dan produksinya adalah sebagai berikut:

**Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kecamatan Bontoharu Tahun 2023**

| No | Jenis Tanaman | Luas Tanam (ha) | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktifitas (ton/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Padi Sawah | 50,82 | 20,82 | 79,95 | 3,84 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | Padi Ladang | 28,45 | 11,70 | 29,25 | 2,50 |
| **3** | Jagung | 187,75 | 109,65 | 186,41 | 1,70 |
| **4** | Ubi Jalar | 19,50 | 13,85 | 16,15 | 1,17 |
| **5** | Ubi Kayu | 48,72 | 33,72 | 62,95 | 1,87 |
| **6** | Kacang Tanah | 24,70 | 18,60 | 46,50 | 2,50 |
| **7** | Kacang Hijau | 6,95 | 6,95 | 7,01 | 1,01 |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Luas Panen dan Produksi Tanaman Hortikultura di Kecamatan Bontoharu**

| No | Jenis Tanaman | Luas Tanam (ha) | Luas Panen (ha) | Produksi (ton) | Produktifitas (ton/ha) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Pisang | 78,71 | 27,25 | 325,50 | 11,94 |
| **2** | Mangga | 22,18 | 15,45 | 72,3 | 4,68 |
| **3** | Sayur-Sayuran | 19,99 | 19,99 | 34,61 | 1,731 |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Luas Areal, Produksi dan Petani Tanaman Perkebunan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Jenis Tanaman | Luas Areal (ha) | Produksi (ton) | Produktifitas (ton/ha) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Kelapa Dalam | 1.400,56 | 2.773,11 | 1,98 |
| **2** | Jambu Mete | 442,90 | 797,22 | 1,80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3** | Kemiri | 94,3 | 57,35 | 0,61 |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Luas dan Produksi Komoditas Kehutanan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Jenis Tanaman | Luas Areal (ha) | Produksi ($m^3$) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Jati | 187,79 | - | |
| **2** | Bitti | 60,70 | - | |
| **3** | Bambu | 14,12 | - | |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Jumlah dan Klasifikasi Kelompok Tani di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa/Kelurahan | Klasifikasi Kelompok Tani | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pemula | Lanjut | Madya | Utama | Jumlah |
| **1** | Putabangun | 9 | 1 | - | - | 10 |
| **2** | Bontobangun | 10 | - | - | - | 10 |
| **3** | Bontotangnga | 13 | - | - | - | 13 |
| **4** | Bontosunggu | 7 | - | - | - | 7 |
| **5** | Bontoborusu | 8 | - | - | - | 8 |
| **6** | Bontolebang | 5 | - | - | - | 5 |
| **7** | Kalepadang | 8 | 1 | - | - | 9 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | Kahu-kahu | 6 | - | - | - | 6 |
| | | **Jumlah** | | | | 68 |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Nama dan Kelas Kemampuan Gapoktan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Nama Gapoktan | Desa/Kelurahan | Kelas Kemampuan Gapoktan |
|---|---|---|---|
| **1** | Tunas Hijau Putabangun | Putabangun | Pemula |
| **2** | Topayya | Bontobangun | Pemula |
| **3** | Tunas Bontotangnga | Bontotangnga | Pemula |
| **4** | Mentari | Bontosunggu | Pemula |
| **5** | Sukamaju | Bontoborusu | Pemula |
| **6** | Bontolebang Bersatu | Bontolebang | Pemula |
| **7** | Bahari Jaya | Kahu-kahu | Pemula |
| **8** | Kalepadang Bersatu | Kalepadang | Pemula |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

**Tujuan Khusus Program Kegiatan Penyuluhan Pertanian Tahun 2023**

| No | Tujuan | Meningkat | |
|---|---|---|---|
| | | Dari | Menjadi |
| **1** | Produktivitas tanaman padi sawah | 3,84 ton/ha | 4,50 ton/ha |
| **2** | Produktivitas tanaman padi ladang/gogo | 2,50 ton/ha | 3,40 ton/ha |
| **3** | Produktifitas tanaman jagung | 1,70 ton/ha | 2,50 ton/ha |
| **4** | Produktifitas tanaman kacang tanah | 2,50 ton/ha | 3,20 ton/ha |
| **5** | Produktifitas tanaman sayur - sayuran | 1,73 ton/ha | 2,03 ton/ha |
| **6** | Produktifitas tanaman kelapa dalam | 1,98 ton/ha | 2,5 ton/ha |
| **7** | Produktifitas tanaman jambu mente | 1,80 ton/ha | 2,25 ton/ha |
| **8** | Laju pertambahan populasi ternak sapi | 2.250 ekor | 5.360 ekor |
| **9** | Laju pertambahan populasi ternak ayam buras | 7.219 ekor | 8.301 ekor |

*Sumber : Data Sekunder Setelah Diolah, 2023*

## 5. POTENSI PETERNAKAN

Kajian potensi peternakan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat populasi dan keaneka ragaman ternak yang dikembangkan masyarakat Kecamatan Bontoharu dengan tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemeliharaan ternak.

Kepemilikan usaha peternakan masih dikuasai oleh perorangan Dalam hal lahan pengembalaan / peternakan. Pemeliharaan ternak di Wilayah Kecamatan

Bontoharu sedikit agak rumit mengingat Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemeliharaan hewan ternak, belum mengatur dengan jelas, sehingga masih banyak hewan ternak yang berkeliaran baik itu di jalanan maupun di lahan pertanianorang lain. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah dan volume ternak yang dapat diusahakan. Pengandangan artinya bahwa ternak-ternak bervolume besar seperti Sapi, kambing dan sebagainya yang memerlukan tempat pengembalaan / lahan yang cukup besar tidak dapat lagi dilepas begitu saja. namun demikian bukan berarti bahwa peternakan skala rumah tangga tidak dapat dilakukan, tetap saja bisa selama memperhitungkan tingkat populasi dan unsur estetika termasuk kebersihan lingkungan.

Berikut data perkembangan ternak dilihat dari jenis hewan di Kecamatan Bontoharu pada masing-masing desa

**Populasi Ternak Besar dirinci menurut Jenis Dari tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa / Kelurahan | Jenis Hewan Ternak | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sapi | Kerbau | Kuda |
| 1. | Bontobangun | 749 | 11 | 3 |
| 2. | Putabangun | 508 | 26 | 1 |
| 3. | Kalepadang | 679 | 28 | 23 |
| 4. | Bontotangnga | 724 | 8 | 5 |
| 5. | Bontosunggu | 88 | 2 | 2 |
| 6. | Bontoborusu | 17 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | 19 | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | - |
| **Jumlah** | | **2.784** | **75** | **34** |

**Populasi Ternak Kecil dirinci menurut Jenis Dari tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa / Kelurahan | Jenis Hewan Ternak | |
|---|---|---|---|
| | | Kambing | Domba |
| 1. | Bontobangun | 126 | - |
| 2. | Putabangun | 148 | - |
| 3. | Kalepadang | 196 | - |
| 4. | Bontotangnga | 125 | - |
| 5. | Bontosunggu | 145 | - |
| 6. | Bontoborusu | 112 | - |
| 7. | Kahu – Kahu | 108 | - |
| 8. | Bontolebang | 199 | - |
| | Jumlah | **1.159** | **-** |

**Populasi Ternak Unggas dirinci menurut Jenis Dari tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No. | Desa / Kelurahan | Jenis Hewan Ternak | |
|---|---|---|---|
| | | Ayam | Itik |
| 1. | Bontobangun | 427 | 42 |
| 2. | Putabangun | 382 | 79 |
| 3. | Kalepadang | 1.021 | - |
| 4. | Bontotangnga | 334 | 7 |
| 5. | Bontosunggu | 367 | 32 |
| 6. | Bontoborusu | 978 | - |
| 7. | Kahu – Kahu | 729 | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | Bontolebang | 178 | 109 |
| | Jumlah | **4.416** | **269** |

6. **POTENSI KEHUTANAN**

Potensi Kehutanan yang ada di Kecamatan Bontoharu masih belum terkelola dengan baik mengingat luas lahan yang tersedia, disamping itu kebanyakan berfungsi sebagai hutan campuran.

**Jenis Hutan yang ada di Kecamatan Bontoharu**

| NO | JENIS HUTAN | LUAS (Ha) | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Mangrove | 4,50 | Desa Bontosunggu | Baik |
| | | 6,90 | Desa Bontolebang | |
| | | 0,95 | Kelurahan Bontobangun | |
| **2** | Hutan Campuran | | | |
| | JUMLAH | 10,235 | | |

***KONDISI HUTAN***

| KONDISI HUTAN | BAIK | RUSAK | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Hutan Bakau/Mangrove | 10,235 Ha | 0 Ha | **10,235 Ha** |
| Hutan Produksi | 0 Ha | 0 Ha | **0 Ha** |
| Hutan Lindung | 0 Ha | 0 Ha | **0 Ha** |
| Hutan Suaka Margasatwa | 0 Ha | 0 Ha | **0 Ha** |
| Hutan Suaka Alam | 0 Ha | 0 Ha | **0 Ha** |

***DAMPAK YANG TIMBUL DARI PENGOLAHAN HUTAN***

| | |
|---|---|
| Pencemaran Udara | ~~Ada~~/Tidak |
| Pencemaran Air | ~~Ada~~/Tidak |
| Longsor/Erosi | Ada/~~Tidak~~ |
| Bising | ~~Ada~~/Tidak |
| Kerusakan Biota/Plasma Muftah Hutan | ~~Ada~~/Tidak |
| Kemusnahan Flora, Fauna dan Satwa Langka | ~~Ada~~/Tidak |
| Hilangnya Sumber Mata Air | ~~Ada~~/Tidak |

| | |
|---|---|
| Kebakaran Hutan | ~~Ada~~/Tidak |
| Terjadinya Kekeringan/Sulit Air | ~~Ada~~/Tidak |
| Berubahnya Fungsi Hutan | ~~Ada~~/Tidak |
| Terjadinya Lahan Kritis | ~~Ada~~/Tidak |
| Hilangnya Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) | ~~Ada~~/Tidak |
| Musnahnya Habitat Binatang Hutan | ~~Ada~~/Tidak |

***MEKANISME PEMASARAN HASIL HUTAN***

| | |
|---|---|
| Dijual Langsung ke Konsumen | Ya / ~~Tidak~~ |
| Dijual ke Pasar | ~~Ya / Tidak~~ |
| Dijual Melalui KUD | ~~Ya / Tidak~~ |
| Dijual Melalui Tengkulak | ~~Ya / Tidak~~ |
| Dijual Melalui Pengecer | ~~Ya / Tidak~~ |
| Dijual ke Lumbung Desa/Kelurahan | ~~Ya / Tidak~~ |
| Tidak Dijual | Ya / ~~Tidak~~ |

## 7. POTENSI PERIKANAN

**Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut Desa/Kelurahan**

| No. | Kelurahan / Desa | Perahu tanpa Motor | | | Perahu Motor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jukung | Kecil | Sedang | Besar | In Board | Out Board |
| 1. | Bontobangun | - | 14 | 5 | - | - | - |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | 5 | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 14 | 43 | 25 | 14 | - | - |
| 6. | Bontoborusu | 20 | 49 | 40 | 26 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | 18 | 45 | 32 | 21 | - | - |
| 8. | Bontolebang | 13 | 34 | 26 | 19 | - | - |
| | **Jumlah** | 65 | 190 | 138 | 80 | - | - |

**Jumlah Produksi Ikan di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut Desa/Kelurahan**

| No. | Kelurahan / Desa | Produksi Ikan (Ton) |
|---|---|---|
| | | 2023 |
| 1. | Bontobangun | 735,5 |
| 2. | Putabangun | - |
| 3. | Kalepadang | - |
| 4. | Bontotangnga | - |
| 5. | Bontosunggu | 58,61 |
| 6. | Bontoborusu | 27,53 |
| 7. | Kahu – Kahu | 17,75 |
| 8. | Bontolebang | 41,34 |
| | **Jumlah** | 880,73 ton |

**Jumlah Produksi Ikan menurut sector perikanan di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut Desa/Kelurahan**

| No. | Kelurahan / Desa | Produksi (Ton) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tambak | Rawa | Perairan Umum | Laut |
| 1. | Bontobangun | 430 | - | - | 230,5 |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 30 | - | - | 76,9 |
| 6. | Bontoborusu | - | - | - | 7,53 |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | 5,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Bontolebang | - | - | - | 39,3 |
| | **Jumlah** | 460 | - | - | 359,98 |

**Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut Desa/Kelurahan**

| No. | Kelurahan / Desa | Jaring Angkat | | Pancing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bagan Tancap | Bagan Perahu | Tetap | Gillnet Dasar | Hanyut |
| 1. | Bontobangun | 7 | 10 | - | - | - |
| 2. | Putabangun | - | - | - | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 30 | 75 | - | 27 | 39 |
| 6. | Bontoborusu | 26 | 49 | - | 39 | 26 |
| 7. | Kahu - Kahu | 19 | 36 | - | 46 | 31 |
| 8. | Bontolebang | 15 | 29 | - | 42 | 20 |
| | **Jumlah** | 97 | 199 | - | 154 | 116 |

## 8. POTENSI KELEMBAGAAN

**Jumlah Kelembagaan di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Desa | LPM | Pemuda | P2A | PKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Putabangun | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Kalepadang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Bontotangnga | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Bontosunggu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Bontoborusu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Kahu – Kahu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Bontolebang | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Jumlah | **8** | **8** | **8** | **8** |

## 9. USAHA JASA PERDAGANGAN

**Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Badan Hukum di Kecamatan Bontoharu dirinci menurut tiap Desa/Kelurahan**

| No | Desa | Jenis Kualifikasi | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PT | CV | FIRMA | BUMN/ BUMD | Koperasi | Per Orangan | |
| 1. | Bontobangun | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 2. | Putabangun | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Bontosunggu | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | - | 5 | - | - | - | - | 5 |

**Jumlah Sarana Pemasaran dirinci menurut Jenisnya dan tiap Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa | Pasar | Toko | Warung | Kedai | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | - | 43 | - | - | - |
| 2. | Putabangun | - | 27 | 4 | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | 26 | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | 21 | 2 | - | - |
| 5. | Bontosunggu | 1 | 47 | - | - | - |
| 6. | Bontoborusu | - | 24 | 2 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | 28 | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | 14 | 2 | - | - |
| | Jumlah | 1 | 230 | 10 | - | - |

**Banyaknya Usaha Jasa Perorangan dirinci menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | Tukang Cukur | Tukang Jahit | Tukang Kayu | Tukang Patri | Bengkel Sepeda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | - | 1 | 3 | - | 4 |
| 2. | Putabangun | - | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3. | Kalepadang | - | 1 | 5 | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | 2 | 4 | - | 1 |
| 5. | Bontosunggu | 2 | 2 | 3 | - | 1 |
| 6. | Bontoborusu | - | 5 | 2 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | 8 | 6 | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | 1 | 3 | - | - |
| | Jumlah | 2 | 22 | 30 | 2 | 8 |

**Banyaknya Usaha Jasa Perorangan dirinci menurutDesa / Kelurahan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | Servis Spd Motor | Servis Mobil | Servis Radio / TV | Servis Lainnya | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Bontobangun | 3 | 2 | - | - | 5 |
| 2. | Putabangun | 1 | - | - | - | 1 |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 5. | Bontosunggu | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 6. | Bontoborusu | - | - | - | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 6 | 3 | - | - | 9 |

**Jumlah KUD dan Non KUD dirinci tiap Desa / Kelurahan Di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | KUD | | Non KUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Anggota | Jumlah | Anggota |
| 1. | Bontobangun | - | - | 3 | 104 |
| 2. | Putabangun | - | - | 1 | 106 |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | 1 | 77 |
| 5. | Bontosunggu | - | - | 2 | 97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Bontoborusu | - | - | 2 | 82 |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | 1 | 22 |
| Jumlah | | - | - | **10** | **488** |

**Jumlah Usaha Koperasi dirinci menurut Jenisnya tiap Desa / Kelurahan Di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kelurahan / Desa | Non KUD | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | KUD | Simpan Pinjam | Gol. Fungsional | Perkebunan Rakyat | Perikanan |
| 1. | Bontobangun | - | - | 3 | - | - |
| 2. | Putabangun | - | - | 1 | - | - |
| 3. | Kalepadang | - | - | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Bontosunggu | - | - | 2 | - | - |
| 6. | Bontoborusu | - | - | 2 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | - | - | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | - | 1 | - | - |
| Jumlah | | - | - | **10** | - | - |

## 1. PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

**Jumlah Unit Usaha,Tenaga Kerja dan Investasi dirinci menurut Kelompok Industri di Kecamatan Bontoharu**

| No | Kode Industri | Kelompok Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Investasi ( Rp. 000 ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 31 | Industri makanan, Minuman dan Tembakau | 278 | 359 | 1.233.246 |
| 02. | 32 | Industri Tekstil, Pakaian jadi, Permadani dan Kulit. | 5 | 7 | 8.776 |
| 03. | 33 | Industri Kayu dan Barang-barang dari Kayu termasuk Perabot Rumah Tangga | 20 | 57 | 137,858,5 |
| 04. | 34 | Industri Kertas dan Barang-barang dari kertas , Percetakan dan Penerbitan | - | - | - |
| 05. | 35 | Industri Kimia, Minyak bumi,batu bara, karet dan Plastik. | - | - | - |
| 06. | 36 | Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara | 20 | 69 | 65.810 |
| 07. | 37 | Industri Logam dasar | - | - | - |
| 08. | 38 | Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya | 19 | 39 | 223.279,5 |
| 09. | 39 | Industri pengolahan lainnya | 16 | 25 | |
| **Bontoharu : 2023** | | | 358 | 790 | 1.692.688 |

**Nilai Produksi, Nilai Bahan Baku dan Nilai Tambah**
**Dirinci menurut kelompok Industri di Kecamatan Bontoharu**
**( Rp. 000 )**

| No | Kode Industri | Kelompok Industri | Nilai Produksi | Nilai Bahan Baku | Nilai Tambah |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 31 | Industri makanan, Minuman dan Tembakau | 3.258.775 | 1.616.510 | 1.642.265 |
| 02. | 32 | Industri Tekstil, Pakaian jadi, Permadani dan Kulit. | 22.192 | 10.736 | 11.456 |
| 03. | 33 | Industri Kayu dan Barang-barang dari Kayu termasuk Perabot Rumah Tangga | 504.175 | 278.777 | 225.398 |
| 04. | 34 | Industri Kertas dan Barang-barang dari kertas , Percetakan dan Penerbitan | - | - | - |
| 05. | 35 | Industri Kimia, Minyak bumi,batu bara, karet dan Plastik. | - | - | - |
| 06. | 36 | Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara | 343.760 | 146.264 | 197.516 |
| 07. | 37 | Industri Logam dasar | 873.400 | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **08.** | 38 | Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya | 770.700,5 | 22.265 | 69.097 |
| **09.** | 39 | Industri pengolahan lainnya | 136.374 | 44.822 | 57.033 |
| | | | | | |
| | | **Bontoharu : 2022** | 5.909.376,5 | 2.119.374 | 5.155.497 |
| | | | | | |

**Banyaknya Rumah Tangga yang Mendapatkan Aliran Listrik Dirinci menurut Sumbernya dan tiap Desa/ Kelurahan**

| No | Desa / Kelurahan | PLN | NON PLN | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Generator | Tenaga Surya | |
| **1.** | Bontobangun | 350 | 144 | - | 494 |
| **2.** | Putabangun | 266 | 172 | - | 438 |
| **3.** | Kalepadang | - | 354 | - | 354 |
| **4.** | Bontotangnga | - | 330 | - | 330 |
| **5.** | Bontosunggu | 396 | - | - | 396 |
| **6.** | Bontoborusu | - | 359 | - | 359 |
| **7.** | Kahu – Kahu | - | 413 | - | 413 |
| **8.** | Bontolebang | - | 217 | - | 217 |
| Jumlah | | **912** | **2.384** | **-** | **3.296** |

**Banyaknya Pengusaha / Usaha Generator Pelanggan Listrik Non PLN dirinci menurut Desa / Kelurahan**

| No | Desa / Kelurahan | Jumlah Usaha | Jumlah Generator | Jumlah Pelanggan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1.** | Bontobangun | 2 | 2 | 144 |
| **2.** | Putabangun | 1 | 1 | 172 |
| **3.** | Kalepadang | 4 | 4 | 354 |
| **4.** | Bontotangnga | 2 | 2 | 330 |
| **5.** | Bontosunggu | - | - | - |
| **6.** | Bontoborusu | 2 | 2 | 358 |
| **7.** | Kahu – Kahu | 2 | 2 | 413 |
| **8.** | Bontolebang | 2 | 2 | 219 |
| Jumlah | | 15 | 15 | 1.990 |

## 2. KEAMANAN

**Jumlah Kasus pidana yang dirinci menurut Jenisnya Di Kecamatan Bontoharu**

| No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Konflik Sara | - |
| 2 | Perkelahian | 10 |
| 3 | Penculikan / Perampokan | 4 |
| 3 | Perjudian | - |
| 4 | Narkoba | - |
| 5 | Pembunuhan | - |
| 6 | Pemerkosaan | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | - |
| 8 | Lain-lain | 19 |

### 3. SARANA DAN PRASARANA

**Transportasi Darat dan Laut di Kecamatan Bontoharu**

| No | Jenis Prasarana | Jumlah | Volume | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelabuhan | 6 | | |
| 2 | Jembatan | 11 | | |
| 3 | Perahu bermotor | 573 | | |
| 4 | Perahu | 167 | | |
| 5 | Kapal Very | - | | |
| | Jumlah | 757 | | |

### 10. POTENSI PARIWISATA

Tempat wisata yang merupakan daya tarik wisatawan mancanegara selain Taka Bonerate adalah tempat menyelam (diving) di Pantai Liang Tarrusu desa Bontoborusu dengan alam bawah laut yang cukup bagus dan eksotis

Tujuan utama para wisatawan yang berkunjung karena pasir putih dan pemandangan laut yang begitu indah. Selain itu para wisatawan kebanyakan juga berkunjung ketempat wisata budaya yaitu Gong Nekara yang terdapat di Ibukota Kecamatan Bontoharu Kelurahan Bontobangun

**JumlahTempat Wisata menurut Jenis Wisata di Kecamatan Bontoharu dirinci tiap Desa/Kelurahan**

| No. | Desa / Kelurahan | Wisata Sejarah | Wisata Bahari | Wisata Budaya | Wisata Alam/ Tirta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bontobangun | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Putabangun | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Kalepadang | 1 | - | - | - |
| 4. | Bontotangnga | - | - | - | - |
| | | | | | |
| 5. | Bontosunggu | 1 | - | 2 | - |
| 6. | Bontoborusu | - | 3 | - | - |
| 7. | Kahu – Kahu | - | 2 | - | - |
| 8. | Bontolebang | - | 2 | - | - |

**Potensi Wisata Dan Hiburan di Kecamatan Bontoharu**

| No | Desa / Kelurahan | Nama Obyek Wisata | Kondisi | Jarak dari Kota ( km ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bontobangun | • Wisata Bahari Pantai Lembang. | | |
| | | • Wisata Budaya Gong Nekara | Baik | |
| | | • Wisata Sejarah Benteng Bontobangun<br>• Wisata Sejarah Perkampungan Tua Bitombang | | |
| | | • Wisata Alam Topa.<br>• Meriam Lato’ | | |
| 2 | Putabangun | • Wisata Tirta Air Terjun Balang Kalambu.<br>• Wisata Tirta Air Lasassa’ Dongan-dongan | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Makam We Tenri Dio | |
| 3 | Bontotangnga | • Sumur Tua Kajammeng<br>• Liang Benteng (Goa)<br>• Kuburan Tua Tossuraiya | |
| 4 | Bontosunggu | • Wisata Budaya Jangkar Raksasa | 11 |
| | | • Wisata Budaya Meriam Kuno | |
| 5 | Bontoborusu | • Pantai Liang Tarrusu | 10 |
| | | • Pantai Liang Kareta | 10 |
| 6 | Kahu –Kahu | • Pantai Balojaha | |
| | | • Wisata Bahari Pantai Je'neiya<br>• Liang Bodong | |
| 7 | Kalepadang | • Sumur Cinta (Sumur Jodoh) | |
| 8 | Bontolebang | • Wisata Bahari Hutan Mangrove<br>• Wisata Bahari Keramba<br>• Wisata Bahari Ujung Lola<br>• Pantai Bonelambere | |

# POTENSI WISATA KECAMATAN BONTOHARU

## 1. GONG NEKARA



*BagianAtas Gong Nekara*

Gong Nekara adalah gong perunggu buatan kebudayaan Dong Son, yang terdapat di delta Sungai Merah Vietnam Utara. Gong ini diproduksi pada sekitar 600 tahun sebelum masehi atau sebelumnya, sampai abad ketiga Masehi. Dengan menggunakan metode pengecoran logam yang telah hilang (lost wax method), gong ini oleh para peneliti sejarah dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari budaya pengerjaan logam. Gong Nekara ini mempunyai 3 fungsi pada masanya, yakni fungsi Keagamaan, Sosial Budaya, dan Politik. Fungskeagamaan yaitu sebagai alat komunikasi, upacara, dan simbol. Sementara fungsi sosial budaya yaitu sebagai simbol status sosial, perangkat upacara dan karya



*Bangunan Penyimpanan Gong Nekara*



## 4. PERKAMPUNGAN TUA BITOMBANG



Perkampungan Tua Bitombang adalah salah satu obyek wisata yang berada di Kelurahan Bontobangun, kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini terletak sekitar 7 km dari Benteng. Hal ini cukup unik karena topografi tanahnya tidak rata sehingga memiliki rumah tiang yang sangat tinggi untuk 13 -15 meter di belakang (dapur), sedangkan di sisi depan lebih rendah, tinggi hanya 2-3 meter.

Tiang rumah adalah kayu berkualitas tinggi (Bitty/Holasa) yang dapat bertahan selama ratusan tahun. Lebih unik adalah bahwa sebagian besar penduduk desa yang berusia di atas 90 tahun tapi masih kuat untuk bekerja. Tak heran jika desa ini kemudian dianggap memiliki berkah (Barakka). Tiang sangat tinggi rumah mungkin memiliki hubungan dengan usia warganya.



## 5. MERIAM LATO’

Lato' adalah sebuah meriam yang dianggap sebagai Gaukang (benda mistis yang dijadikan dasar pendirian sebuah kerajaan) di Kerajaan Bontobangun.

Hanya saja, menurut H. A. Radja Pintjara Karaeng Bonto Sunggu pada lokakarya 30 November 2004, meria`m ini tidak termasuk Gaukang, hanya lebih dipercaya sebagai titisan leluhur.







1. **Pantai Tola'**

Pantai Tola terletak di Lingkungan Lura Gantarang, Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu. Keindahan Alamnya dapat menjadi salah satu alternatif tujuan wisata bagi Turis manca negara maupun turis lokal yang ingin menikmati santai bersama keluar











**2. Pantai Balojaha Desa Kahu-kahu**

**3. PotensiWisata Liang Kereta Di DesaBontoborusu**

Lokasi Wisata Liang Kereta terletak di sebelah Barat Desa Bontoborusu yang bisa dijangkau melalui 2 jalur yakni penyeberangan melalui Padang atau Desa Bontoborusu menggunakan Perahu sewaan dari Masyarakat atau melalui Darat berjalan kaki menyusuri jalan yang belum memadai yang ditempuh dengan waktu 1 jam perjalanan. Keindahan Pantai dan pasirnya cukup memukau dan sangat indah sehingga sekalipun memerlukan energy untuk mencapai tempat tersebut tetapi terbayarkan dengan keindahan dan keelokan pantainya.





4. **Jangkar Raksasa**



5. **Pantai Je'neiya**



6. **Pantai Liang Tarrusu**





7. **Hutan Mangrove Desa Bontolebang**



8. **Hutan Mangrove Matalalang**



9. **Keramba/Budidaya Ikan**



10. **Wisata Bahari Ujung Lola**



**11. Pantai Bonelambere**



**12. Air Terjun Balang Kalambu**



**13. Air Terjun Lasassa'**



**14. Pantai Balojaha**



**15. Liang Bodong**



# BAB IV
# P E N U T U P

Data Dasar Profil Kecamatan Bontoharu merupakan sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi dan permasalahan di Wilayah Kecamatan, yang dimaksudkan sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan kecamatan sesuai karakaternya secara menyeluruh, yaitu gambaran tentang potensi yang meliputi alam, penduduk, kelembagaan, sarana/prasarana dan permasalahan yang dihadapi,baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter Kecamatan maupun yang timbul sebagai akibat bentuk dari kegiatan perkembangan pembangunan.

Oleh karena itu, Data Dasar Profil yang kami buat menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah khususnya pada wilayah pemerintahan kami di kecamatan Bontoharu dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, Data Dasar Profil akan memberikan gambaran secara menyeluruh Kecamatan Bontoharu yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah khususnya di Kecamatan Bontoharu.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Untuk dapat menilai suatu tingkat perkembangan pembangunan baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan diperlukan suatu data analisis yang dapat merangkum dan menjabarkan segala perkembangan yang terjadi serta menjadi acuan bagi Pemerintah setempat dalam mengeluarkan kebijakan guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan baik sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya**.**

Untuk maksud tersebut diatas, maka Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu dengan berpedoman pada panduan teknis pengolahan data profil melakukan penyusunan profil Kecamatan dengan maksud memberikan gambaran secara menyeluruh akan kondisi daerah setempat sekaligus sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan - perbaikan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari data potensi Kecamatan ini pula dapat diketahui atau dirumuskan beberapa hal, yaitu :

- Tingkatan Potensi Umum Kecamatan
- Potensi Pengembangan
- Tipologi Kecamatan
- Kendala - kendala pengembangan Kecamatan secara menyeluruh

Penyusunan Profil Kecamatan disamping untuk memberikan gambaran potensi secara menyeluruh terkait pembangunan baik yang akan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu namun juga dilakukan untuk menentukan tipologi Kecamatan Bontosikuyu sesuai potensi yang dimilikinya. Dari hasil penyusunan ini diharapkan adanya suatu kebijakan dari Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu yang benar - benar terarah, terpadu dan berkelanjutan bagi penanganan setiap permasalahan baik sosial, ekonomi, politik yang muncul ditengah masyarakat sesuai Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu.

## B. Pengertian Data Dasar Profil

Data dasar Profil Kecamatan adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi dan permasalahan di Wilayah Kecamatan.

Dimaksudkan sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan Kecamatan sesuai karakternya secara menyeluruh, yaitu gambaran tentang potensi yang meliputi alam, penduduk, kelembagaan, sarana/prasarana dan permasalahan yang dihadapi, baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter Kecamatan maupun yang timbul sebagai akibat bentuk dari kegiatan perkembangan pembangunan.

## C. Sumber Data Dasar Profil Kecamatan

Data dasar profil Kecamatan diperoleh dari sumber aslinya sebagai hasil pencatatan (registrasi) di tingkat Kelurahan/Desa. Disamping itu data dasar profil Kecamatan juga bersumber dari hasil perhitungan dan pengukuran yang dilakukan baik oleh aparat Kecamatan, maupun yang dilakukan oleh pihak instansi tingkat Kabupaten dan pihak lain yang kegiatannya diselenggarakan di Tingkat Kecamatan.

## D. Status dan Kegunaan Data Dasar Profil

a. Status Data Dasar Profil Kecamatan
   1. Merupakan intervensi atau hak milik Kecamatan ;
   2. Merupakan himpunan data dasar Kecamatan;
   3. Merupakan wahana pencatatan data Kecamatan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan karaktar yang terdapat pada Kecamatan.

b. Kegunaan Data Dasar Profil Kecamatan
   1. Sebagai bahan untuk meningkatkan fungsi partisipatif masyarakat dalam rangka lebih mengoptimalkan pembangunan Wilayah Kecamatan dan taraf hidup masyarakat;
   2. Sebagai bahan dasar penataan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan pembangunan;
   3. Sebagai bahan pengelolaan pada musyawarah rencana pembangunan Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten dan Tingkat Propinsi, serta pengembangan rencana atau program masuk Kecamatan yang dikelolah oleh Instansi Sektor yang bidang kegiatannya ada kaitannya dengan pembangunan di Wilayah Kecamatan;

4. Sebagai alat evaluasi dan penentuan kebijaksanaan pembangunan Tingkat Pusat;
5. Bahan dasar untuk penilaian potensi dan tingkat perkembangan Kecamatan, sekaligus sebagai alat untuk mengetahui masalah yang menjadi penghambat laju pertumbuhan pembangunan termasuk pemecahannya;
6. Sebagai alat atau bahan pelayanan data / informasi bagi setiap pengguna data / informasi.

## E. Tujuan Penyusunan Data Dasar Profil

a. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang karakteristik Kecamatan melalui potensinya, tingkat perkembangannya dan masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka pengembangan pembangunan;
b. Untuk menyamakan persepsi dari berbagai pemeran pembangunan tentang data dasar dan hasilnya diharapkan dapat memberikan iklim yang mendorong bagi terciptanya koordinasi dan keterpaduan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan.

## F. Ruang Lingkup Data Potensi

Ruang Lingkup Data Potensi Kecamatan Bontosikuyu terdiri dari variabel yaitu :

- Letak Geografis;
- Pemerintahan dan Politik;
- Kependudukan;
- Pendidikan, Kesehatan dan Sosial lainnya;
- Pertanian;
- Peternakan
- Kehutanan
- Perikanan
- Parawisata
- Kelembagaan
- Usaha Jasa Perdagangan
- Keamanan
- Perindustrian dan Energi;
- Sarana dan Prasarana;

Komponen tersebut diatas, pada intinya adalah merupakan kumpulan data dasar yang tentu saja masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dimasa-masa yang akan datang perlu adanya upaya-upaya penyempurnaan yang lebih baik, agar hasil pengolahan data dasar profil Kecamatan tersebut benar-benar dapat memberi manfaat langsung bagi para pengguna data dan informasi, dengan demikian diharapkan perencanan dan pengambilan kebijakan pembangunan dapat dilakukan secara tepat dan akurat.

## G. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kecamatan Bontosikuyu antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya dukungan infrastuktur yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti jalan lingkar dari Dusun Timoro Desa Laiyolo Baru ke Pattumbukang Desa Lowa.
2. Pengawasan terhadap Illegal Logging dan Illegal Fishing belum terlaksana secara optimal.
3. Masih terdapat hewan ternak yang berkeliaran di pinggir jalan yang sangat menghalangi arus lalu lintas dan mengganggu / merusak perkebunan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka prioritas pemerintah yang diprioritaskan pada upaya penyadaran perilaku dan perubahan pada pola pikir masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan kongkrit untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain, ditempuh melalui pola pendekatan sebagai berikut :

1. Adanya dukungan infrastruktur sehingga jalan tembus dari Dusun Timoro Desa Laiyolo Baru ke Pattumbukang Desa Lowa dapat dilalui kendaraan.
2. Perlunya pengawasan yang lebih efektif sehingga pelaku Illegal dapat ditekan seminimal mungkin.
3. Perlunya sosialisasi disetiap Desa tentang Perda No. 20 Tahun 2009 sehingga Perda tersebut lebih memasyarakat. Dengan demikian masyarakat akan lebih mengetahui tentang pemeliharaan ternak dan sanksi atau denda yang telah ditetapkan.

# BAB II
# GAMBARAN UMUM KECAMATAN

## 1. Visi Dan Misi Kecamatan Bontosikuyu

### a. Visi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Bontosikuyu yang memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat 5 ( Lima ) Tahun kedepan, maka kecamatan Bontosikuyu menetapkan visi sebagai berikut "Terwujudnya masyarakat Bontosikuyu ASSAMATURU dalam penyelenggaraan Pemerintahan".

Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan Bontosikuyu sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius.

### b. Misi

Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai *Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius*, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan peningkatan pelayanan umum masyarakat tingkat desa dan kecamatan yang efektif dan efesien.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang berkualitas dalam urusan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat.
3. Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Pembinaan Kesatuan Bangsa.
4. Menciptakan sistem koordinasi kerukunan ummat beragama di Wilayah Kecamatan Bontosikuyu.

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

## A. Tugas Pokok Kecamatan

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

## B. Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

### 3. Susunan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar, mempunyai Sumber Daya Aparatur dilihat dari Tingkat Kepangkatan, Pendidikan dan yang menduduki jabatan Struktural adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan :

| NO. | TINGKAT KEPANGKATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Pembina / Golongan IV | 2 |
| 2. | Penata / Golongan III | 10 |
| 3. | Pengatur / Golongan II | 1 |
| 4. | Juru / Golongan I | - |

2. Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan :

| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Sarjana (S.2) | - |
| 2. | Sarjana (S.1) | 10 |
| 3. | Diploma | - |
| 4. | SLTA | 3 |
| 5. | SLTP | - |

3. Keadaan Pegawai menurut Jabatan Struktural/Fungsional :

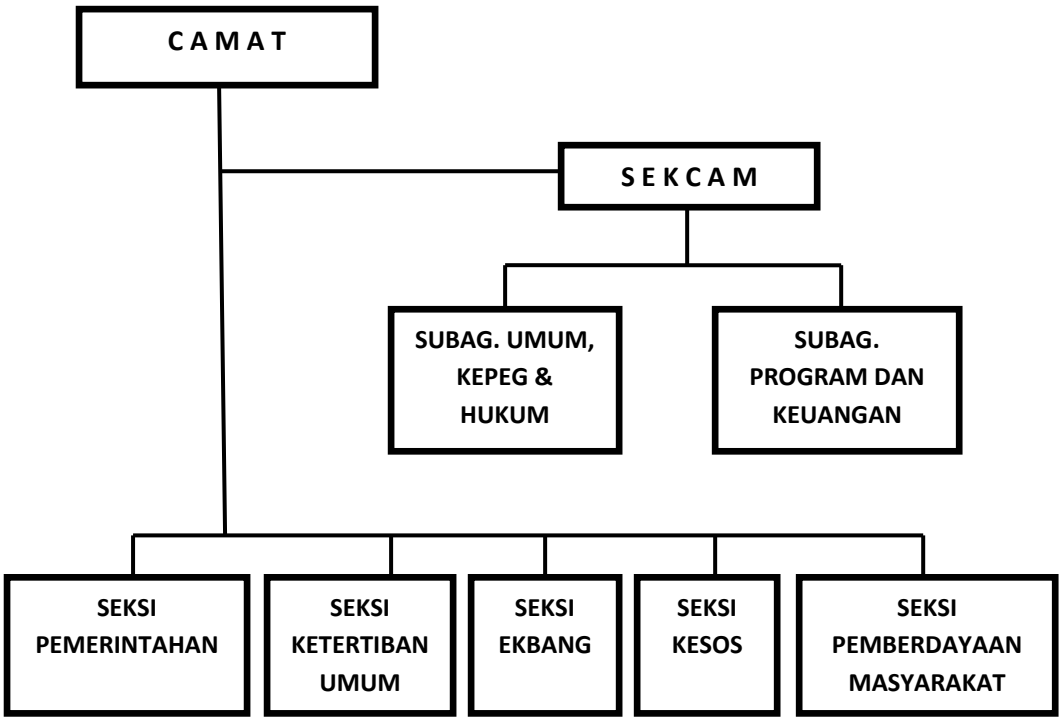
| NO. | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Esalon III A | 1 |
| 2. | Esalon III B | 1 |
| 3. | Esalon IV A | 11 |
| 4. | Esalon IV B | - |

### 4. Bagan Struktur Organisasi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Bontosikuyu, sesuai dengan Peraturan Bupati Selayar Nomor 80 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Perbup. No. 80 Tahun 2016



# BAB III

## DATA POTENSI KECAMATAN BONTOSIKUYU

### 1. LETAK GEOGRAFIS

#### A. Batas dan Luas wilayah

Kecamatan Bontosikuyu yang berada pada arah selatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan kecamatan yang terluas wilayahnya diantara semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulau Selayar dengan nama Ibukota Pariangan berkedudukan di Desa Harapan. Kondisi topografi Kecamatan Bontosikuyu sebagian besar terdiri dari perbukitan untuk wilayah bagian timur dan wilayah bagian barat sebagian datar dan sebagian perbukitan dengan luas Wilayah Kecamatan tercatat 248,22 Ha.

Wilayah Administratif Pemerintahan Kecamatan Bontosikuyu terbagi atas 12 (Dua Belas) wilayah Desa dan terdiri dari Desa Daratan (Desa Patilereng, Desa Patikarya, Desa Harapan, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Binanga Sombaiya, Desa Lantibongan, Desa Lowa dan Desa Appatanah) dan Desa Kepulauan (Desa Bahuluang, Desa Tambolongan dan Desa Polassi).

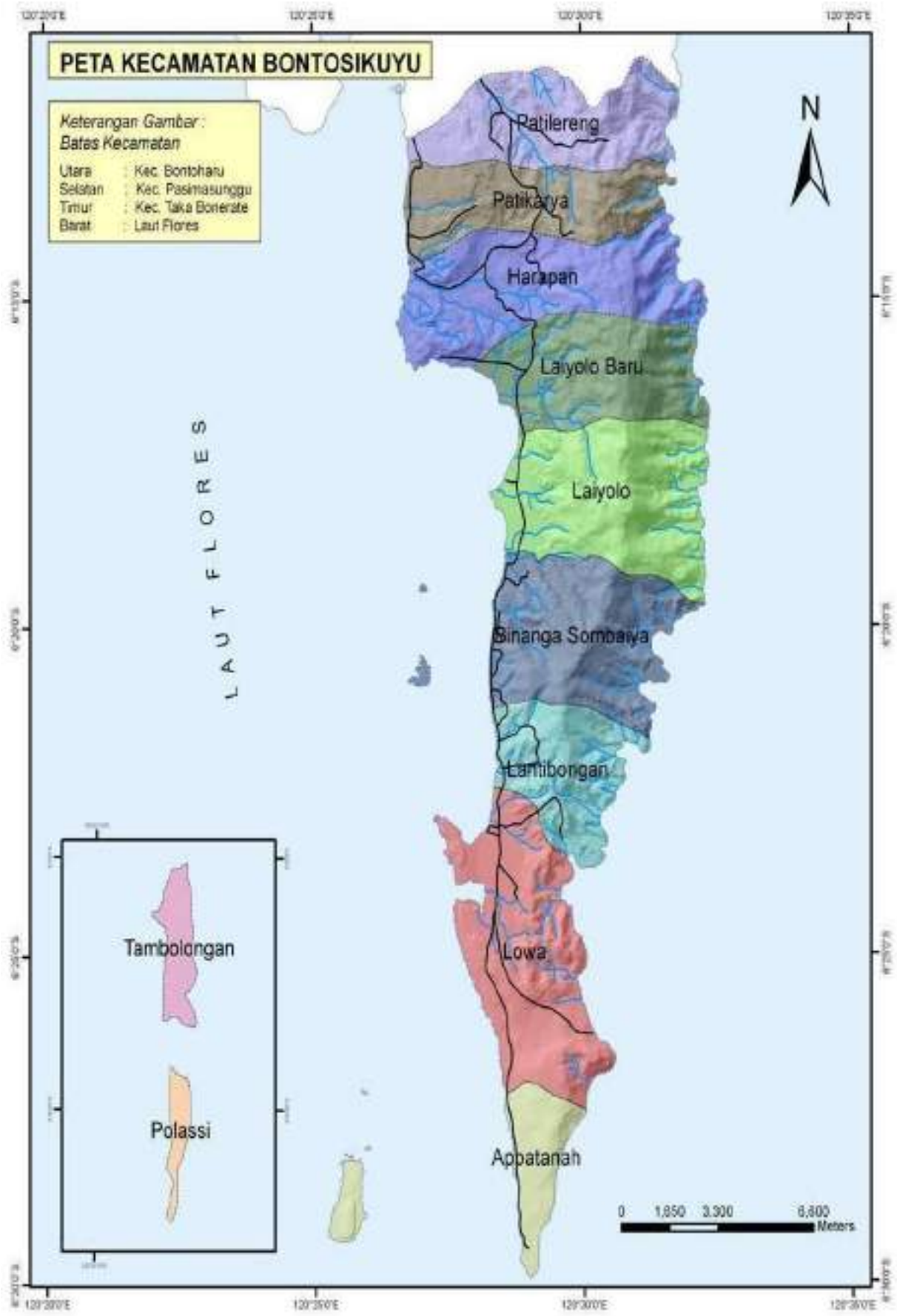
Tabel I.a
Batas dan Luas Wilayah Kecamatan Bontosikuyu

| No | Batas Wilayah | Luas ( Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Utara : Kecamatan Bontoharu | 248,22 |
| 2 | Selatan : Kecamatan Pasimasunggu | |
| 3 | Barat : Laut Flores | |
| 4 | Timur : Kecamatan Taka Bonerate | |

Tabel I.b
Luas, Jarak dan Ketinggian menurut Desa Kecamatan Bontosikuyu

| No. | Nama Desa | Luas ($km^2$) | Jarak (km) | | Ketinggian dari Permukaan Laut (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dari Ibu Kota Kec. | Dari Ibu Kota Kab. | |
| 1. | Polassi | 3.25 | 71 | 90 | >25 |
| 2. | Tambolongan | 9.73 | 50 | 70 | 0-25 |
| 3. | Appatanah | 11.75 | 30 | 50 | 0-25 |
| 4. | Lowa | 24.55 | 20 | 40 | >25 |
| 5. | Lantibongan | 15.45 | 17 | 36 | >25 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 29.82 | 12 | 32 | >25 |
| 7. | Laiyolo | 27.77 | 8 | 27 | >25 |
| 8. | Laiyolo Baru | 18.96 | 4 | 23 | >25 |
| 9. | Harapan | 27.00 | 0 | 19 | >25 |
| 10. | Patikarya | 20.04 | 5 | 14 | >25 |
| 11. | Patilereng | 14.81 | 14 | 12 | >25 |
| 12. | Bahuluang | 2.37 | 40 | 60 | 0-25 |

## B. Peta Kecamatan



## 2. PEMERINTAHAN DAN POLITIK

### A. Pemerintahan

Kecamatan Bontosikuyu adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Secara administratif dibagi menjadi 12 (dua belas) Desa yang terdiri dari Desa daratan (Desa Patilereng, Desa Patikarya, Desa Harapan, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Binanga Sombaiya, Desa Lantibongan, Desa Lowa dan Desa Appatanah) dan Desa Kepulauan (Desa Bahuluang, Desa Tambolongan dan Desa Polassi).

Tabel II.a
Jumlah Pegawai yang bertugas di Kecamatan Bontosikuyu
Menurut Instansi Pemerintah/BUMN

| No. | Nama Instansi | Jumlah Pegawai | |
|---|---|---|---|
| | | PNS | PTT/HONORER |
| 1. | Kantor Camat | 13 | 18 |
| 2. | Dikbud Kecamatan | - | - |
| 3. | Puskesmas | 24 | 64 |
| 4. | DP3AP2KB | 2 | 4 |
| 5. | Kantor Urusan Agama (KUA) | 4 | 2 |
| 6. | Balai Penyuluh Pertanian | 9 | 14 |
| 7. | Pelabuhan Pattumbukang | 3 | 5 |
| 8. | Perusahaan Listrik Negara (PLN) | 3 | - |
| | Jumlah | 70 | 99 |

Tabel II.b
Stuktur Organisasi Desa dirinci menurut Desa Kecamatan Bontosikuyu

| No. | Nama Desa | Ibu Kota Desa | Jumlah | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dusun | RK/RW | RT |
| 1. | Polassi | Bontobarakka | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Tambolongan | Matalalang | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Appatanah | Kanawe | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Lowa | Barang-Barang | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Lantibongan | Tombangangia | 4 | 4 | 5 |
| 6. | Binanga Sombaiya | Binanga Benteng | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Laiyolo | Pa'garangan | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Laiyolo Baru | Laiyolo | 4 | 4 | 4 |
| 9. | Harapan | Pariangan | 8 | 8 | 8 |
| 10. | Patikarya | Tile-Tile | 4 | 4 | 8 |
| 11. | Patilereng | Lembang Jaya | 3 | 4 | 10 |
| 12. | Bahuluang | Bahuluang | 2 | 2 | 4 |
| | **Jumlah** | | 47 | 48 | 65 |

Tabel II.c
Nama Dusun dirinci menurut Desa di Kecamatan Bontosikuyu

| No. | Nama Desa | Dusun | Jumlah Dusun |
|---|---|---|---|
| 1 | Polassi | - Dusun Bontobarakka<br>- Dusun Letta<br>- Dusun Timoro | 3 |
| 2 | Tambolongan | - Dusun Lappe<br>- Dusun Tangnga-Tangnga<br>- Dusun Lemba<br>- Dusun Batu Palangka | 4 |
| 3 | Appatanah | - Dusun Kanawe<br>- Dusun Bungin<br>- Dusun Balabara | 3 |
| 4 | Lowa | - Dusun Tongke-Tongke<br>- Dusun Podang<br>- Dusun Barang-Barang | 3 |
| 5 | Lantibongan | - Dusun Turungan<br>- Dusun Biring Balang<br>- Dusun Tombangangia<br>- Dusun Kenang-Kenang | 4 |
| 6 | Binanga Sombaiya | - Dusun Ujung Loe<br>- Dusun Bahorea<br>- Dusun Binanga Benteng<br>- Dusun Bajo | 4 |
| 7 | Laiyolo | - Dusun Baringan<br>- Dusun Bontotallasa<br>- Dusun Padangoge<br>- Dusun Pa'garangan<br>- Dusun Lebo | 5 |
| 8 | Laiyolo Baru | - Dusun Pangkajene<br>- Dusun Kilotepo<br>- Dusun Laiyolo<br>- Dusun Timoro | 4 |
| 9 | Harapan | - Dusun Siholung<br>- Dusun Balang Kajeng<br>- Dusun Balang Bo'dong<br>- Dusun Pariangan Selatan<br>- Bontoala<br>- Lopi-Lopi<br>- Ballabulo<br>- Dodaiyah | 8 |
| 10 | Patikarya | - Dusun Tile-Tile Utara<br>- Tile-Tile Selatan<br>- Lembangia<br>- Bontote'ne | 4 |
| 11 | Patilereng | - Dusun Lembang Jaya<br>- Dusun Reaiya<br>- Dusun Lalemang | 3 |
| 12 | Bahuluang | - Dusun Karang Indah<br>- Dusun Pasir Putih | 2 |

## B. Politik

Partisipasi masyarakat Kecamatan Bontosikuyu dapat dikatakan cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase wajib pilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat Legislatif Tahun …. yaitu berkisar lebih %.

Tabel II.b.1
Jumlah Partai Politik di Kecamatan Bontosikuyu
Tahun 2023

| No | Nama Partai Politik | Jumlah Pengurus | Kantor | Kegiatan | Ruang Lingkup Kegiatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PDIP | | - | Politik | Kecamatan |
| 2 | DEMOKRAT | | - | Politik | Kecamatan |
| 3 | GOLKAR | | - | Politik | Kecamatan |
| 4 | PKB | | - | Politik | Kecamatan |
| 5 | HANURA | | - | Politik | Kecamatan |
| 6 | PKS | | - | Politik | Kecamatan |
| 7 | GERINDRA | | - | Politik | Kecamatan |
| 8 | PPP | | - | Politik | Kecamatan |
| 9 | NASDEM | | - | Politik | Kecamatan |
| 10 | PAN | | - | Politik | Kecamatan |
| 11 | PARTAI BURUH | | - | Politik | Kecamatan |
| 12 | | | - | Politik | Kecamatan |
| **Jumlah** | | | **-** | | |

Tabel II.b.2
Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 2023

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Desa | Jumlah Dusun | Jumlah Partai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bontosikuyu | 12 | 47 | 11 |

*Sumber : PPK Kecamatan Bontosikuyu*

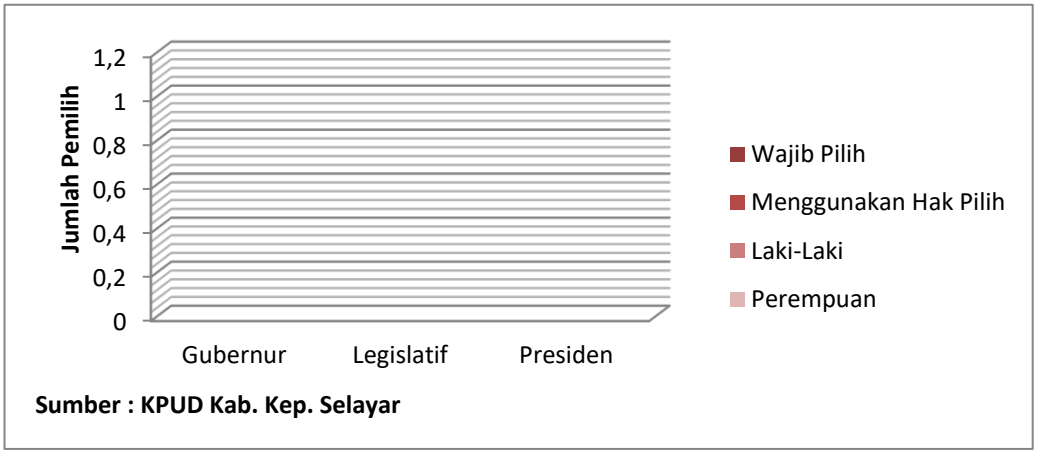
Tabel II.b.3
Jumlah Anggota DPRD Perwakilan Wilayah
Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2019 - 2023

| No. | Nama Partai | Laki – laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | NASDEM | 1 | - | 1 |
| 2. | Golkar | 1 | 1 | 2 |
| 3. | HANURA | 1 | - | 1 |
| 4. | DEMOKRAT | 1 | - | 1 |
| 5. | PAN | 1 | - | 1 |
| | Jumlah | 5 | 1 | 6 |

Tabel II.b.4
Jumlah Wajib Pilih di Kecamatan Bontosikuyu menurut Pemilu

| No. | Pemilu | PEMILIH | | | Jumlah yang menggunakan Hak Pilih | Prosentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | Jumlah | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pilkada | | | | | |
| 2. | Pemilu Legislatif | | | | | |
| 3. | Pemilu Presiden | | | | | |

Grafik II.b.4
Jumlah Wajib Pilih di Kecamatan Bontosikuyu Menurut Pemilu




**Sumber : KPUD Kab. Kep. Selayar**

Tabel II.b.5
Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih 2023

| No. | Nama Desa | TPS | Pemilih | | | | | | TPS | Pemilu Presiden | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PILKADA | | | Pemilu Legislatif | | | | | | |
| | | | L | P | Jumlah | L | P | Jumlah | | L | P | Jumlah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Patilereng | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Patikarya | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Harapan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Laiyolo Baru | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Laiyolo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Bin.Sombaiya | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Lantibongan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Lowa | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Appatanah | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Tambolongan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Polassi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Jumlah | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

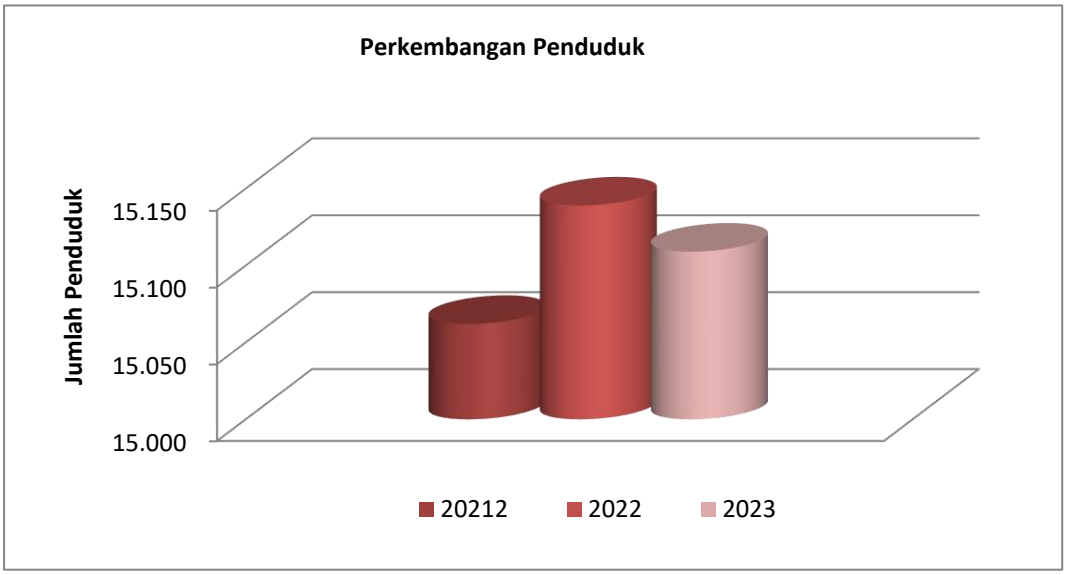
## 3. KEPENDUDUKAN

Kantor Kecamatan Bontosikuyu sebagai pusat pelayanan Pemerintahan, Perekonomian/Perdagangan, Informasi dan kegiatan sosial politik oleh karena itu aktivitas penduduk cukup tinggi diantara semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2023. Kecamatan Bontosikuyu memiliki penduduk 15.139 jiwa.

Tabel III.a
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| No. | Nama Desa | Tahun | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Polassi | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 2. | Tambolongan | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| 3. | Appatanah | 844 | 848 | 835 |
| 4. | Lowa | 1.300 | 1.310 | 1.320 |
| 5. | Lantibongan | 1.218 | 1.208 | 1.185 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1.401 | 1.371 | 1.381 |
| 7. | Laiyolo | 1.482 | 1.493 | 1.480 |
| 8. | Laiyolo Baru | 968 | 974 | 979 |
| 9. | Harapan | 2.590 | 2.560 | 2.538 |
| 10. | Patikarya | 1.453 | 1.454 | 1.458 |
| 11. | Patilereng | 1.026 | 1.034 | 1.041 |
| 12. | Bahuluang | 293 | 293 | 293 |
| | **Jumlah** | **15.139** | **15.109** | **15.074** |

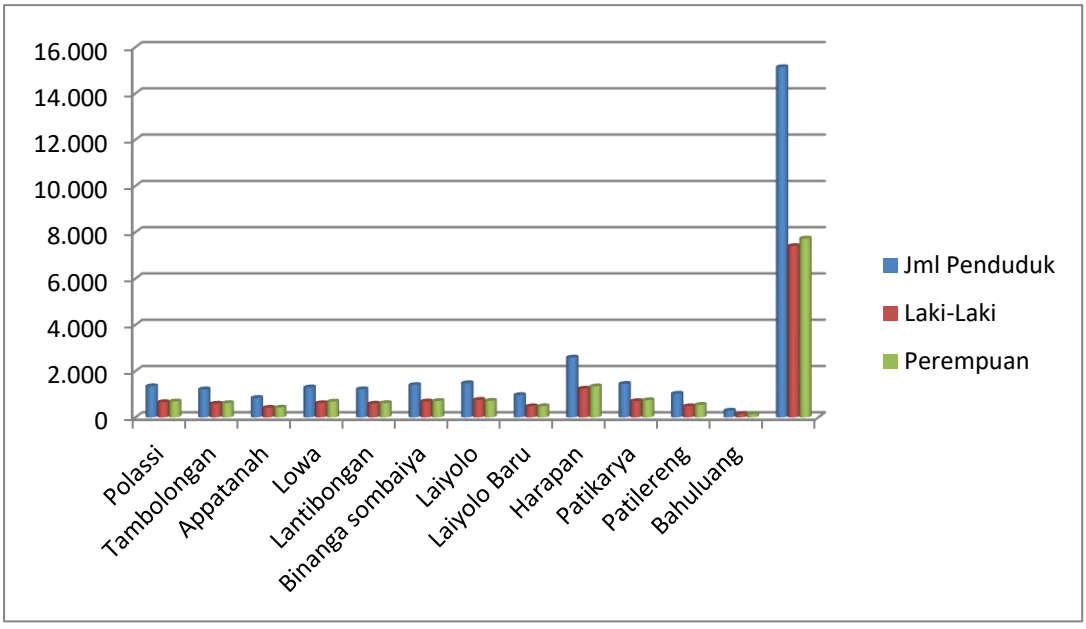
Grafik III.a
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontosikuyu



Tabel III.b
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Penduduk | | Jumlah | Sex Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | 661 | 689 | 1.350 | 95,9 |
| 2. | Tambolongan | 594 | 620 | 1.214 | 95,8 |
| 3. | Appatanah | 416 | 419 | 835 | 97,7 |
| 4. | Lowa | 633 | 687 | 1.320 | 90,3 |
| 5. | Lantibongan | 579 | 606 | 1.185 | 96,1 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 682 | 699 | 1.381 | 97,3 |
| 7. | Laiyolo | 768 | 712 | 1.480 | 105,5 |
| 8. | Laiyolo Baru | 493 | 486 | 979 | 99,6 |
| 9. | Harapan | 1.223 | 1.315 | 2.538 | 92,7 |
| 10. | Patikarya | 710 | 748 | 1.458 | 94,8 |
| 11. | Patilereng | 494 | 547 | 1.041 | 89,3 |
| 12. | Bahuluang | 150 | 143 | 293 | 104,9 |
| | **Jumlah** | **7.403** | **7.671** | **15.074** | 95,8 |

Grafik III.b
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023



Tabel III.c
Luas dan Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Luas ($km^2$) | Rumah Tangga | Penduduk | Kepadatan Per $km^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | 3.25 | 327 | 1.350 | 415,4 |
| 2. | Tambolongan | 9.73 | 319 | 1.214 | 124,8 |
| 3. | Appatanah | 11.75 | 205 | 835 | 71,8 |
| 4. | Lowa | 24.55 | 302 | 1.320 | 52,9 |
| 5. | Lantibongan | 15.45 | 313 | 1.185 | 78,8 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 29.82 | 378 | 1.381 | 46,9 |
| 7. | Laiyolo | 27.77 | 381 | 1.480 | 53,4 |
| 8. | Laiyolo Baru | 18.96 | 246 | 979 | 51,05 |
| 9. | Harapan | 27.00 | 666 | 2.538 | 95,9 |
| 10. | Patikarya | 20.04 | 352 | 1.458 | 72,5 |
| 11. | Patilereng | 14.81 | 259 | 1.041 | 69,3 |
| 12. | Bahuluang | 2.37 | 81 | 293 | 107,3 |
| | **Jumlah** | **248.22** | **3.498** | **15.074** | **60,99** |

Tabel III.d
Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan dan Jenis Kelamin
Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | WNI | | | WNA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | P | L + P | L | P | L + P |
| 1. | Polassi | 661 | 689 | 1.350 | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 594 | 620 | 1.214 | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 416 | 419 | 835 | - | - | - |
| 4. | Lowa | 633 | 687 | 1.320 | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 579 | 606 | 1.185 | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 682 | 699 | 1.381 | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 768 | 712 | 1.480 | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 493 | 486 | 979 | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1.223 | 1.315 | 2.538 | - | - | - |
| 10. | Patikarya | 710 | 748 | 1.458 | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 494 | 547 | 1.041 | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | 150 | 143 | 293 | - | - | - |
| | **Jumlah** | **7.403** | **7.671** | **15.074** | **-** | **-** | **-** |

## 4. PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL LAINNYA

### A. Pendidikan

Pembangunan bidang Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut.

Salah satu indikator penilaian untuk maju dan berkembangnya suatu daerah dapat dilihat dari potensi sumber daya manusia melalui pendidikannya. Table dibawah ini memberikan gambaran terhadap hal tersebut.

Tabel IV.a
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid , Guru Taman Kanak-Kanak (TK) dan RA
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 4 | 8 | 55 | 14 |
| 3. | Appatanah | 1 | 2 | 21 | 3 |
| 4. | Lowa | 1 | 2 | 30 | 4 |
| 5. | Lantibongan | 1 | 3 | 45 | 4 |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 2 | 4 | 75 | 9 |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 2 | 17 | 9 |
| 9. | Harapan | 3 | 6 | 85 | 14 |
| 10. | Patikarya | 2 | 4 | 40 | 8 |
| 11. | Patilereng | 2 | 4 | 51 | 10 |
| 12. | Bahuluang | 1 | 2 | 20 | 4 |
| **Jumlah** | | **18** | **37** | **439** | **79** |

Tabel IV.b
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | 1 | 8 | 210 | 13 |
| 2. | Tambolongan | 2 | 12 | 142 | 24 |
| 3. | Appatanah | 1 | 6 | 10 | 12 |
| 4. | Lowa | 2 | 12 | 112 | 26 |
| 5. | Lantibongan | 1 | 6 | 128 | 113 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 2 | 12 | 100 | 24 |
| 7. | Laiyolo | 2 | 13 | 185 | 37 |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 6 | 55 | 16 |
| 9. | Harapan | 2 | 12 | 416 | 39 |
| 10. | Patikarya | 2 | 12 | 165 | 31 |
| 11. | Patilereng | 2 | 12 | 114 | 25 |
| 12. | Bahuluang | 1 | 6 | 43 | 14 |
| **Jumlah** | | **19** | **117** | **1.789** | **274** |

Tabel IV.c
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Negeri
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | 1 | 8 | 220 | 11 |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 1 | 6 | 75 | 12 |
| 4. | Lowa | 2 | 12 | 112 | 27 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | 6 | 105 | 13 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 6 | 54 | 13 |
| 9. | Harapan | 1 | 6 | 416 | 24 |
| 10. | Patikarya | 2 | 12 | 166 | 31 |
| 11. | Patilereng | 1 | 6 | 117 | 17 |
| 12. | Bahuluang | 1 | 6 | 40 | 14 |
| **Jumlah** | | **11** | **68** | **1.331** | 162 |

Tabel IV.d
Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri yang lulus
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | 14 | 19 | 33 | 100 |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 7 | 8 | 15 | 100 |
| 4. | Lowa | 2 | 2 | 4 | 100 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 5 | 2 | 7 | 100 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 2 | 10 | 12 | 100 |
| 9. | Harapan | 17 | 21 | 38 | 100 |
| 10. | Patikarya | 10 | 22 | 32 | 100 |
| 11. | Patilereng | 6 | 6 | 12 | 100 |
| 12. | Bahuluang | 8 | 1 | 9 | 100 |
| **Jumlah** | | **74** | **94** | **169** | **100** |

Tabel IV.e
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Inpres
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 2 | 12 | 152 | 23 |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 1 | 6 | 128 | 13 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | 6 | 58 | 12 |
| 7. | Laiyolo | 2 | 12 | 138 | 26 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1 | 6 | 42 | 9 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 1 | 6 | 114 | 9 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **8** | **49** | **648** | **105** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.f
Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD) Inpres yang lulus
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 25 | 16 | 41 | 100 |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 4 | 15 | 19 | 100 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | 4 | 5 | 100 |
| 7. | Laiyolo | 16 | 6 | 22 | 100 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 5 | 4 | 9 | 100 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 6 | 10 | 16 | 100 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **69** | **61** | **130** | **100** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.g
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Sekolah Dasar (SD) Swasta
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | - | - | - | - |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.h
Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Madrasah Ibtidaiyah
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | 6 | 84 | 20 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1 | 6 | 27 | 7 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | 2 | 12 | 111 | 27 |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.i
Jumlah Siswa Madrasah Ibtidaiyah yang lulus
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 4 | 9 | 13 | 100 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 2 | 5 | 7 | 100 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **6** | **14** | **20** | **100** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.j
Jumlah Sekolah. Kelas, Murid dan Guru Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | 1 | 3 | 63 | 9 |
| 2. | Tambolongan | 1 | 3 | 79 | 15 |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 1 | 6 | 159 | 33 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 1 | 4 | 115 | 12 |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 3 | 25 | 14 |
| 9. | Harapan | 1 | 12 | 242 | 42 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | 1 | 3 | 19 | 6 |
| **Jumlah** | | **7** | **34** | **702** | **131** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.k
Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri yang lulus di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 10 | 9 | 19 | 100 |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 20 | 33 | 53 | 100 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | | | | 100 |
| 8. | Laiyolo Baru | 3 | 4 | 7 | 100 |
| 9. | Harapan | 65 | 27 | 92 | 100 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **92** | **71** | **171** | **100** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.l
Jumlah Sekolah. Kelas, Murid dan Guru Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Swasta
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.m
Jumlah Sekolah. Kelas, Murid dan Guru Madrasah Tsanawiyah
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 1 | 3 | 30 | 5 |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **1** | **3** | **30** | **5** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.n
Jumlah Siswa Madrasah Tsanawiyah yang lulus
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| | | | | | |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

Tabel IV.o
Jumlah Sekolah. Kelas, Murid dan Guru Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Sekolah | Kelas | Murid | Guru |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 1 | 8 | 124 | 23 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1 | 10 | 310 | 26 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **2** | **18** | **434** | **49** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu.

Tabel IV.p
Jumlah Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang lulus
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Siswa | | Jumlah Siswa | Presentase Kelulusan (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Laki-Laki | Perempuan | | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 42 | 54 | 96 | 98 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **42** | **54** | **96** | **98** |

Sumber UPT Diknas Bontosikuyu

## B. Kesehatan

Keberhasilan Pembangunan di bidang kesehatan biasa dilihat dari dua aspek yaitu sarana kesehatan dan sumber daya manusia. Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023 terdiri dari 2 Puskesmas dan 24 Posyandu.

Selanjutnya sumber daya manusia di bidang kesehatan yang ada di Kecamatan Bontosikuyu yaitu : Dokter umum 3 orang, Dokter Gigi 2 orang, Bidan 35 orang, Perawat 19 orang, Tenaga Kesehatan Lainnya 31 orang dan Dukun Bayi kurang lebih 25 orang.

Berikutnya dalam hal pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), jumlah akseptor KB baru di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023 sebanyak 138 orang terdiri dari yaitu : 5 orang memakai IUD, 26 orang memakai IMP, 86 orang memakai Suntikan, 19 orang memakai PIL, dan 2 orang memakai kondom.

Tabel IV.b.1
Jumlah Petugas Kesehatan, Dokter, Bidan, Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Dokter | Bidan | Perawat | Tenaga Kesehatan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | 4 | 1 | - |
| 2. | Tambolongan | - | 1 | - | - |
| 3. | Appatanah | - | 2 | 1 | - |
| 4. | Lowa | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | 2 | 2 | - |
| 7. | Laiyolo | - | 2 | 1 | 2 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | 2 | 2 | - |
| 9. | Harapan | 3 | 26 | 16 | 24 |
| 10. | Patikarya | - | 2 | 1 | - |
| 11. | Patilereng | - | 4 | 1 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **3** | **46** | **27** | **42** |

Sumber Puskesmas se- Bontosikuyu

Tabel IV.b.2
Jumlah Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Posyandu
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Puskesmas | Pustu | Poskes | Posyandu/ Postimbang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | 1 | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Appatanah | - | 1 | - | - |
| 4. | Lowa | 1 | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | 1 | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | 1 | 1 | - |
| 7. | Laiyolo | - | 1 | - | 5 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | 1 | 1 | 4 |
| 9. | Harapan | 1 | - | 2 | 8 |
| 10. | Patikarya | - | 1 | 1 | 4 |
| 11. | Patilereng | - | 1 | 1 | 3 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **2** | **9** | **7** | **24** |

Sumber Puskesmas se- Bontosikuyu

Tabel IV.b.3
Jumlah Kelahiran pada Puskesmas di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Kelahiran | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Hidup | Meninggal | |
| 1. | Polassi | 20 | - | 20 |
| 2. | Tambolongan | 22 | - | 22 |
| 3. | Appatanah | 20 | - | 20 |
| 4. | Lowa | 20 | - | 20 |
| 5. | Lantibongan | 19 | - | 19 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 20 | - | 20 |
| 7. | Laiyolo | 24 | - | 24 |
| 8. | Laiyolo Baru | 11 | - | 11 |
| 9. | Harapan | 28 | - | 28 |
| 10. | Patikarya | 10 | - | 10 |
| 11. | Patilereng | 15 | - | 16 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| **Jumlah** | | **209** | **-** | **210** |

Sumber Puskesmas se Kecamatan

Tabel IV.b.4
Jumlah Persalinan yang ditangani oleh Tenaga Kesehatan dan Tenaga Dukun
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Persalinan | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Tenaga Kesehatan | Dukun | |
| 1. | Polassi | 20 | - | 20 |
| 2. | Tambolongan | 22 | - | 22 |
| 3. | Appatanah | 21 | - | 21 |
| 4. | Lowa | 20 | - | 20 |
| 5. | Lantibongan | 19 | - | 19 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 20 | - | 20 |
| 7. | Laiyolo | 24 | - | 24 |
| 8. | Laiyolo Baru | 11 | - | 11 |
| 9. | Harapan | 28 | - | 28 |
| 10. | Patikarya | 10 | - | 10 |
| 11. | Patilereng | 16 | - | 16 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| **Jumlah** | | **211** | | **211** |

Sumber Puskesmas se Kecamatan

Tabel IV.b.5
Jumlah Penderita Penyakit Menular yang dapat mewabah
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Penyakit | Jumlah | | Presentase |
|---|---|---|---|---|
| | | Penderita | Meninggal | |
| 1. | Diare | 70 | - | - |
| 2. | Disentri | - | - | - |
| 3. | Susp. Thypoid | - | - | - |
| 4. | Rabies/Kasus Gigitan | - | - | - |
| 5. | TB | - | - | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Jumlah** | | **70** | **-** | **-** |

Sumber Puskesmas se Kecamatan.

Tabel IV.b.6
Jumlah Penduduk yang diimunisasi per jenis Vaksinasi
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap desa Tahun 2023

| NO | Desa | BCG | DPT | | | POLIO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 x | 1 x | 2 x | 3 x | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x |
| 1. | Polassi | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 18 | 21 | 17 |
| 2. | Tambolongan | 18 | 16 | 9 | 17 | 17 | 17 | 12 | 10 |
| 3. | Appatanah | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 14 | 15 | 9 |
| 4. | Lowa | 24 | 21 | 10 | 20 | 25 | 22 | 19 | 20 |
| 5. | Lantibongan | 22 | 20 | 18 | 22 | 22 | 18 | 22 | 19 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 28 | 28 | 28 | 25 | 29 | 30 | 26 | 26 |
| 7. | Laiyolo | 21 | 19 | 22 | 18 | 21 | 19 | 22 | 18 |
| 8. | Laiyolo Baru | 13 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 11 |
| 9. | Harapan | 40 | 24 | 38 | 33 | 40 | 24 | 38 | 33 |
| 10. | Patikarya | 20 | 20 | 17 | 21 | 20 | 20 | 17 | 21 |
| 11. | Patilereng | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12. | Bahuluang | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 |
| **Jumlah** | | **249** | **207** | **215** | **225** | **250** | **213** | **225** | **207** |

Sumber Puskesmas se Kecamatan.

Tabel IV.b.7
Jumlah Penduduk yang diimunisasi per jenis Vaksinasi
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap desa Tahun 2023

| NO | Desa | DT | Tta | TTIH | | TT.C Pengantin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x |
| 1. | Polassi | 35 | 42 | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 24 | 47 | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 11 | 18 | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 19 | 19 | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 30 | 34 | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 28 | 33 | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 32 | - | - | - | 7 | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 20 | - | - | - | 6 | - |
| 9. | Harapan | 51 | - | - | - | 16 | - |
| 10. | Patikarya | 37 | - | - | - | 7 | - |
| 11. | Patilereng | 15 | - | - | - | 5 | - |
| 12. | Bahuluang | 7 | 5 | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **309** | **198** | **-** | **-** | **41** | **-** |

Tabel IV.b.8
Sasaran TT WUS / Capeng
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | TT | | | | | Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TT 1 | TT 2 | TT 3 | TT 4 | TT 5 | |
| 1. | Polassi | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | - |
| 2. | Tambolongan | 9 | 4 | 7 | 7 | 6 | - |
| 3. | Appatanah | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | - |
| 4. | Lowa | 11 | 5 | 6 | 5 | 5 | - |
| 5. | Lantibongan | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 7 | 8 | 14 | 8 | 8 | - |
| 7. | Laiyolo | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | - |
| 9. | Harapan | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | - |
| 10. | Patikarya | 1 | 3 | 11 | 4 | - | - |
| 11. | Patilereng | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | - |
| 12. | Bahuluang | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | - |
| **Jumlah** | | **77** | **56** | **67** | **58** | **53** | **-** |

Tabel IV.b.9
Target dan Pencapaian Peserta KB Baru
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Target | Baru | | | Aktif | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IUD | MOW | INFLAN | IUD | MOW | INFLAN |
| 1. | Polassi | 38 | - | - | - | - | - | 3 |
| 2. | Tambolongan | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 29 | - | - | 3 | - | 2 | 26 |
| 4. | Lowa | 10 | - | - | 2 | 1 | - | 36 |
| 5. | Lantibongan | 23 | - | - | 3 | - | - | 23 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 44 | 1 | - | 9 | 3 | 5 | 56 |
| 7. | Laiyolo | 46 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 39 |
| 8. | Laiyolo Baru | 27 | - | - | - | 6 | 3 | 3 |
| 9. | Harapan | 51 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 22 |
| 10. | Patikarya | 34 | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 17 |
| 11. | Patilereng | 40 | 1 | - | 5 | 3 | 3 | 10 |
| 12. | Bahuluang | 10 | - | - | - | - | - | 4 |
| **Jumlah** | | **394** | **5** | **4** | **28** | **31** | **30** | **239** |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

Tabel IV.b.10
Target dan Pencapaian Peserta KB Aktif
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | 2019 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Target | Pencapaian | Presentase |
| 1. | Polassi | 140 | 157 | 112,14 |
| 2. | Tambolongan | 100 | 166 | 166 |
| 3. | Appatanah | 80 | 100 | 125 |
| 4. | Lowa | 70 | 124 | 177,14 |
| 5. | Lantibongan | 100 | 155 | 155 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 170 | 194 | 114,11 |
| 7. | Laiyolo | 108 | 164 | 151,85 |
| 8. | Laiyolo Baru | 90 | 118 | 131,11 |
| 9. | Harapan | 300 | 324 | 108 |
| 10. | Patikarya | 130 | 154 | 118,46 |
| 11. | Patilereng | 140 | 69 | 49,28 |
| 12. | Bahuluang | 30 | 30 | 100 |
| **Jumlah** | | **1.408** | **1.755** | **124,64** |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

Tabel IV.b.11
Jumlah Peserta KB Baru
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap desa Tahun 2023

| NO | Desa | Target | Peserta Baru | | | | | | | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IUD | MOW | MOP | IMP | PIL | KONDOM | SUNTIK | |
| 1. | Polassi | 38 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 6 |
| 2. | Tambolongan | 42 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 7 |
| 3. | Appatanah | 29 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 |
| 4. | Lowa | 10 | - | - | - | 2 | 3 | - | 10 | 15 |
| 5. | Lantibongan | 23 | - | - | - | 2 | 1 | - | 7 | 10 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 44 | 1 | - | - | 9 | 2 | - | 6 | 18 |
| 7. | Laiyolo | 46 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 14 | 18 |
| 8. | Laiyolo Baru | 27 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 9. | Harapan | 51 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 12 | 18 |
| 10. | Patikarya | 34 | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 9 | 14 |
| 11. | Patilereng | 40 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 13 |
| 12. | Bahuluang | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 5 |
| **Jumlah** | | **384** | **5** | **3** | **-** | **26** | **19** | **2** | **86** | **141** |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

Tabel IV.b.12
Jumlah Aksektor Aktif Metode Kontrasepsi yang dipakai
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Target | Peserta Aktif | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | IUD | MOW | MOP | IMP | PIL | KONDOM | SUNTIK |
| 1. | Polassi | | | | | | | | |
| 2. | Tambolongan | | | | | | | | |
| 3. | Appatanah | | | | | | | | |
| 4. | Lowa | | | | | | | | |
| 5. | Lantibongan | | | | | | | | |
| 6. | Binanga Sombaiya | | | | | | | | |
| 7. | Laiyolo | | | | | | | | |
| 8. | Laiyolo Baru | | | | | | | | |
| 9. | Harapan | | | | | | | | |
| 10. | Patikarya | | | | | | | | |
| 11. | Patilereng | | | | | | | | |
| 12. | Bahuluang | | | | | | | | |
| **Jumlah** | | | | | | | | | |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

Tabel IV.b.13
Jumlah Klinik KB, PKB dan Sub KB
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap desa Tahun 2023

| NO | Desa | Klinik KB | PPLKB | PKB | PPKBD | Sub PPKBD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | - | - | 1 | 3 |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | 1 | 4 |
| 3. | Appatanah | - | - | - | 1 | 3 |
| 4. | Lowa | 1 | - | - | 1 | 3 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | 1 | 4 |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | 1 | 4 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | 1 | 5 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | 1 | 4 |
| 9. | Harapan | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 10. | Patikarya | - | - | - | 1 | 4 |
| 11. | Patilereng | - | - | - | 1 | 3 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | 1 | 2 |
| **Jumlah** | | **2** | **1** | **-** | 12 | **47** |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

Tabel IV.b.14
Jumlah Klinik KB, PKB dan Sub KB
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Prasejahtera | | KSI | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Alasan Ekonomi | Bukan als Ekonomi | Alasan Ekonomi | Bukan als Ekonomi | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Sumber UPT BPPKB Bontosikuyu

## C. Sosial Lainnya

Masalah sosial lainnya seperti agama Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. tempat peribadatan umat islam berupa mesjid dan mushalla pada tahun 2019 masing masing sejumlah 35 Bangunan dan Musholla 5 Bangunan tempat peribadatan Kristen berupa Gereja ada 1 Bangunan sementara untuk tempat ibadah Hindu dan Budha tidak ada.

Tabel IV.c.1
Jumlah Penyandang Cacat menurut jenis
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Tuna Rungu (Bisu/Tuli) | Tuna Netra (Buta) | Tuna Grahita (Lemah Mental) | Tuna Daksa (Lemah Fisik) | Tuna Laras (WTS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 1 | 4 | - | - | - |
| 4. | Lowa | 3 | - | - | 2 | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 4 | - | - | 1 | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 5 | - | 2 | 4 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **17** | **7** | **6** | **11** | **-** |

Sumber Desa se Kec.Bontosiukuyu

Tabel IV.c.2
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Islam | Kristen | | Hindu | Budha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Katolik | Protestan | | |
| 1. | Polassi | 1.350 | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 1.214 | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 787 | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 1.286 | - | 11 | - | - |
| 5. | Lantibongan | 1.234 | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1.402 | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 1.367 | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 942 | 4 | - | - | - |
| 9. | Harapan | 2.640 | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | 1.434 | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Patilereng | 1.036 | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | 293 | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **15.000** | **4** | **11** | **-** | **-** |

*Sumber KUA Kecamatan Bontosikuyu*

Tabel IV.c.3
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Agama di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Tempat Ibadah | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mesjid | Musholla | Gereja | Vihara | Kelenteng |
| 1. | Polassi | 4 | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | 7 | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 2 | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 4 | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 5 | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 5 | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 7 | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 5 | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 9 | 3 | 1 | - | - |
| 10. | Patikarya | 5 | 1 | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 5 | 1 | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | 2 | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **60** | **5** | **1** | **-** | **-** |

*Sumber KUA Kecamatan Bontosikuyu*

Tabel IV.c.4
Jumlah Rohaniawan menurut Agama di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Rohaniawan Islam | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ulama | Muballigh | Khatib | Penyuluh | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | | **-** | **-** | **-** |

*Sumber KUA Kecamatan Bontosikuyu*

Tabel IV.c.5
Jumlah Jemaah haji di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Tahun | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | |
| 1. | Polassi | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | 1 | 1 |
| 4. | Lowa | 1 | - | 1 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 2 | - | 2 |
| 9. | Harapan | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Patikarya | 1 | - | 1 |
| 11. | Patilereng | - | 2 | 2 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| **Jumlah** | | **6** | **5** | **11** |

*Sumber KUA Kecamatan Bontosikuyu*

Tabel IV.c.6
Jumlah Penerima, Pemberi dan Jenis Hewan Qurban di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Yang Berqurban | Yang Menerima | Jumlah Hewan Qurban | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kerbau | Sapi | Kambing |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | | **-** | **-** |

*Sumber KUA Kecamatan Bontosikuyu*

Tabel IV.c.7
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jenis Permasalahan Sosial | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Anak terlantar | Penyandang Cacat | Bekas Narapidana | Lanjut Usia terlantar | Wanita Rawan Sosial Ekonomi |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | |
| 3. | Appatanah | - | 8 | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | 8 | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | | 11 | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | 11 | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | - | 38 | - | - | - |

Tabel IV.c.8
Jumlah Potensi Sosial di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jenis Potensi Sosial | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PSM/Satgas Sosial | Organisasi Sosial | Karang Taruna | Kader Kepemimpinan Wanita |
| 1. | Polassi | - | - | 1 | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | 1 | - |
| 3. | Appatanah | - | - | 1 | - |
| 4. | Lowa | - | 7 | 1 | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | 1 | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | 1 | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | 1 | - |
| 9. | Harapan | - | - | 1 | - |
| 10. | Patikarya | - | - | 1 | 3 |
| 11. | Patilereng | - | - | 1 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | 1 | - |
| **Jumlah** | | **-** | **7** | **12** | **4** |

Jumlah Potensi Olah Raga di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Sepak Bola | Bola Volly | Tennis | Bulu Tangkis | Tennis Meja | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2. | Tambolongan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 3. | Appatanah | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 4. | Lowa | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 5. | Lantibongan | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | 2 | - | - | 1 | - |
| 7. | Laiyolo | 3 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 9. | Harapan | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - |
| 10. | Patikarya | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 11. | Patilereng | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 12. | Bahuluang | 1 | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **10** | **13** | - | **12** | **11** | **-** |

## 5. POTENSI PERTANIAN

Kondisi tanah di Kecamatan Bontosikuyu terbagi dua jenis yang yakni antara bagian barat dan timur. Untuk bagian barat khususnya di daerah pesisir berdasarkan sebarannya dapat dikategorikan menjadi dua jenis yakni tanah yang menurut kalisifikasinya tergolong jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi, Kondisi tersebut sangat rawan dan dapat merubah garis bentuk pantai secara alamiah, sedang dibagian timur cenderung berbentuk lempungan dan berwarna kehitam-hitaman. Hal ini mendorong pengembangan lahan utamanya untuk jenis tanaman jangka pendek dan jenis tanaman jangka panjang.

Tabel V.a
Luas Tanah Sawah menurut Jenis Pengairannya di Kecamatan Tahun 2023

| NO | Jenis Pengairan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1. | Pengairan Teknis | - |
| 2. | Pengairan Setengah Teknis | - |
| 3. | Pengairan Sederhana/PU dan Non PU | - |
| 4. | Tadah Hujan | - |
| 5. | Pasang Surut | - |
| 6. | Tambak Sawah Lainnya | - |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.b
Luas Tanah Kering menurut Penggunaannya
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Pengairan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1. | Pekarangan/Tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya | 329,27 |
| 2. | Tanah Tegal/Kebun/Ladang/Huma | 4548,902 |
| 3. | Pengembalaan/Padang Rumput | 1044 |
| 4. | Tambak | 156 |
| 5. | Kolam/Tebak/Empang | - |
| 6. | Tanah sementara tidak diusahakan | - |
| 7. | Hutan Rakyat | 1.415 |
| 8. | Hutan Negara | - |
| 9. | Perkebunan Negara/Swasta | - |
| 10. | Tanah Lainnya | - |
| | **Jumlah** | **7.492** |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.c
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan dirinci menurut Jenis Tanaman
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Tanaman | Luas Panan (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1. | Padi Ladang | 2.00 | 16.00 |
| 2. | Jagung | 196.75 | 220.56 |
| 3. | Ubi Jalar | 9.25 | 40.95 |
| 4. | Ubi Kayu | 31.05 | 68.87 |
| 5. | Kacang Tanah | 125.00 | 216 |
| 6. | Padi Sawah | 1.00 | 700 |
| 7. | Pisang | 81.85 | 89.28 |
| 8. | Sayuran | 13.25 | 17.74 |
| 9. | Mangga | 8.3 | 33.29 |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.d

Luas Tanah Kering menurut penggunaanya di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap desa Tahun 2023

| No. | Nama Desa | Pekarangan/ Tanah untuk bangunan halaman sekitar | Tanah Tegal/Ladang /Huma/Kebun | Tanah Pengembalaan /Padang Rumput | Tambak | Kolam/ Tebak/ Empang | Tanah yang sementara tidak di usahakan | Tanah untuk tanaman kayu huta | Hutan Negara | Tanah Perkebunan Negara. Rakyat dan Swasta | Tanah Perkebuna Peroranga n | Luas Tanah Kering seluruh nya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 10 Ha | 80 Ha | - | - | - | 12 Ha | - | - | 5 Ha | 71 Ha | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **10 Ha** | **80 Ha** | **-** | **-** | **-** | **12 Ha** | **-** | **-** | **5 Ha** | **71 Ha** | **-** |

Tabel V.e
Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Sayuran dirinci menurut Jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Tanaman | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayam | - | - | - |
| 2. | Labu Manis | - | - | - |
| 3. | Ketimun | - | - | - |
| 4. | Terong | 1 Ha | - | 1,5 |
| 5. | Lombok | - | - | - |
| 6. | Tomak | - | - | - |
| 7. | Kangkung | - | - | - |
| 8. | Kacang Panjang | - | - | - |
| 9. | Kacang Tunggak | - | - | - |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.f
Jumlah Pohon dan Produksi Buah-Buahan dirinci menurut Jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Tanaman | Luas Tanam (Ha) | Luas Panen (Ha) | Produksi (Ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jeruk Keprok | - | 22,75 | 106 |
| 2. | Jeruk Nipis | - | 195 | 282,96 |
| 3. | Mangga | - | 8.3 | 33.29 |
| 4. | Durian | - | - | - |
| 5. | Nenas | - | - | - |
| 6. | Pisang | - | 81.85 | 89.28 |
| 7. | Nangka | - | 5,5 | 21,8 |
| 8. | Melinjo | - | 25 | 43,81 |
| 9. | Pepaya | - | 0.20 | 0.50 |
| 10. | Jambu Air | - | - | - |
| 11. | Jambu Bol | - | 4,75 | 4,69 |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.g
Luas Areal, Produksi dan Petani Tanaman Perkebunan dirinci menurut Jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2023

| NO | Jenis Tanaman | Luas Areal (Ha) | | | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TBM | JML | TTR | | |
| 1. | Kelapa Dalam | 4.081,00 | 503.827 | - | 5.134,84 | - |
| 2. | Kelapa Hibrida | - | - | - | - | - |
| 3. | Kopi | - | - | - | - | - |
| 4. | Cengkeh | 288,00 | 44,928 | - | 80,80 | - |
| 5. | Kakao | - | - | - | - | - |
| 6. | Jambu Mente | 612,00 | 124.848 | - | 193,80 | - |
| 7. | Lada | - | - | - | - | - |
| 8. | Pala | 167,50 | 16.750 | - | 1,36 | - |
| 9. | Kapok | - | - | - | - | - |
| 10. | Panili | - | - | - | - | - |
| 11. | Kemiri | 1.393,00 | - | - | 2.184,53 | - |
| 12. | Kenari | - | - | - | - | - |
| 13. | Kapas | - | - | - | - | - |
| 14. | Sagu | - | - | - | - | - |
| 15. | Asam Jawa | - | - | - | - | - |
| 16. | Aren Anau | - | - | - | - | - |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.h
Jumlah Produksi dan Jumlah Petani (KK) Tanaman Perkebunan menurut jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Kelapa Dalam | | Kelapa Hibrida | | Kopi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
| 1. | Polassi | 154 | - | 2,20 | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | 10,50 | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 135 | - | 88 | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 44,17 | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 174,60 | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 151,23 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | 562.290 | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | | | | | | |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.i
Jumlah Produksi dan Jumlah Petani (KK) Tanaman Perkebunan menurut jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Cengkeh | | Kakao | | Jambu Mente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | 17,50 | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 10,66 | - | - | - | 44,08 | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 79,20 | - | - | - | 110,50 | - |
| 9. | Harapan | 70,5 | - | - | - | 76,75 | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | 200 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.j
Jumlah Produksi dan Jumlah Petani (KK) Tanaman Perkebunan menurut jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Lada | | Pala | | Kapok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | 2,5 | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.k
Jumlah Produksi dan Jumlah Petani (KK) Tanaman Perkebunan menurut jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Panili | | Kemiri | | Kenari | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | 70,00 | | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | 31,67 | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | 42,00 | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | 0,72 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | - | - | 143,67 | - | 0,72 | - |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

Tabel V.l
Jumlah Produksi dan Jumlah Petani (KK) Tanaman Perkebunan menurut jenisnya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Asam Jawa | | Aren | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Produksi (Ton) | Petani (KK) | Produksi (Ton) | Petani (KK) |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Sumber Dinas Pertanian dan Kehutanan

## 6. POTENSI PETERNAKAN

Kajian potensi peternakan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat populasi dan keanekaragaman ternak yang dikembangkan masyarakat Kecamatan Bontosikuyu dengan tanpa menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemeliharaan ternak.

Berikut data perkembangan ternak dilihat dari jenis hewan di Kecamatan Bontosikuyu pada masing-masing Desa :

Tabel VI.a
Populasi Ternak Besar dirinci menurut Jenis
di Kecamatan Bontosikuyu tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Jenis Hewan Ternak | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Sapi | Kerbau | Kuda |
| 1. | Polassi | 10 | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - |
| 4. | Lowa | 166 | 17 | 5 |
| 5. | Lantibongan | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 152 | - | 45 |
| 7. | Laiyolo | 103 | 1 | 15 |
| 8. | Laiyolo Baru | 100 | 12 | 10 |
| 9. | Harapan | - | - | - |
| 10. | Patikarya | 195 | 3 | 6 |
| 11. | Patilereng | 150 | 52 | 12 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| | **Jumlah** | **739** | **85** | **93** |

Sumber Desa se-Kecamatan Bontosikuyu

Tabel VI.b
Populasi Ternak Kecil dirinci menurut Jenis
di Kecamatan Bontosikuyu tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Jenis Hewan Ternak | |
|---|---|---|---|
| | | Kambing | Domba |
| 1. | Polassi | 50 | - |
| 2. | Tambolongan | - | - |
| 3. | Appatanah | 120 | - |
| 4. | Lowa | 109 | - |
| 5. | Lantibongan | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 50 | - |
| 7. | Laiyolo | 29 | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 30 | - |
| 9. | Harapan | - | - |
| 10. | Patikarya | 146 | - |
| 11. | Patilereng | 152 | 5 |
| 12. | Bahuluang | - | - |
| | **Jumlah** | **686** | **5** |

Sumber Desa se-Kecamatan Bontosikuyu

Tabel VI.c
Populasi Ternak Unggas dirinci menurut Jenis
di Kecamatan Bontosikuyu tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Jenis Unggas | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Ayam Kampung | Ayam Ras Petelur | Itik |
| 1. | Polassi | 100 | - | 20 |
| 2. | Tambolongan | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - |
| 4. | Lowa | 582 | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | 350 | - | - |
| 7. | Laiyolo | 783 | 200 | 37 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | 20 |
| 9. | Harapan | - | - | - |
| 10. | Patikarya | 499 | - | - |
| 11. | Patilereng | 1.502 | - | 7 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| | **Jumlah** | **3.816** | **200** | **84** |

Sumber Desa se-Kecamatan Bontosikuyu

Kepemilikan usaha peternakan masih dikuasai oleh usaha perorangan dalam hal lahan pengembalaan / peternakan di Kecamatan Bontosikuyu sedikit agak rumit mengingat Perda Nomor 20 Tahun 2009 tentang pemeliharaan hewan ternak, dengan pertimbangan estetika mencantumkan untuk tidak melepas hewan ternak. Secara otomatis semua ternak termasuk pengandangan harus dilakukan. artinya bahwa ternak-ternak bervolume besar seperti Sapi, Kambing dan sebagainya yang memerlukan tempat pengembalaan / lahan yang cukup besar tidak dapat lagi dilepas begitu saja. namun demikian bukan berarti bahwa peternakan skala rumah tangga tidak dapat dilakukan, tetap saja bisa selama memperhitungkan tingkat populasi dan unsur estetika termasuk kebersihan lingkungan.

## 7. POTENSI KEHUTANAN

Potensi Kehutanan yang ada di Kecamatan Bontosikuyu masih belum terkelola dengan baik mengingat luas lahan yang tersedia, disamping itu kebanyakan berfungsi sebagai hutan campuran.

Tabel VII.a
Jenis Hutan yang ada di Kecamatan Bontosikuyu

| NO | JENIS HUTAN | LUAS (Ha) | LOKASI | KONDISI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangrove | - | - | - |
| 2 | Hutan Campuran | - | - | - |
| **JUMLAH** | | **-** | **-** | **-** |

## 8. POTENSI PERIKANAN

Kecamatan Bontosikuyu adalah salah satu daerah yang menjadi prioritas pengembangan usaha perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar hal ini dibuktikan dengan dibangunnya pelabuhan Pattumbukan. Hal ini semestinya sangat membantu para nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan namun karena keterbatasan skill, peralatan dan prasarana sehingga hal ini belum berjalan maksimal

Tabel VIII.a
Jumlah Kapal Penangkap Ikan di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Perahu tanpa Motor | | | Perahu Motor | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jukung | Kecil | Sedang | Besar | In Board | Out Board |
| 1. | Polassi | 5 | 100 | 50 | 50 | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | 25 | 1 | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | 50 | - | - | 89 |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | 25 | - | - | 10 | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | 3 | - | 1 | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **5** | **128** | **125** | **52** | **10** | **89** |

Tabel VIII.b
Jumlah Produksi Ikan di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Produksi Ikan (kg) | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | |
| 1. | Polassi | 5 | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 300 | - | 300 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1,5 | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | 7 | 7 |
| 8. | Laiyolo Baru | 500 | - | 500 |
| 9. | Harapan | - | - | - |
| 10. | Patikarya | 45 | - | 45 |
| 11. | Patilereng | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - |
| | **Jumlah** | **851,5** | 7 | **858,5** |

Tabel VIII.c
Jumlah Produksi Ikan menurut sektor perikanan di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Produksi (Ton) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tambak | Rawa | Perairan Umum | Laut |
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 3,5 | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **3,5** | **-** | **-** | **-** |

Tabel VIII.d
Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Perangkap | | | | | | Pancing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J I H | Pancing Ulur | Bagan Perahu | Muroami | J I L | Payang | Tetap | Tonda |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - | - | | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | 10 | - | - | 15 | - | 4 | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - | | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **1** | **10** | **-** | **-** | **15** | **-** | **26** | **10** |

Tabel VIII.e
Jumlah Alat Penangkap Ikan menurut Jenis di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut desa Tahun 2023

| No. | Desa | Jaring Angkat | | Pancing | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bagan Tancap | Bagan Perahu | Tetap | Gillnet Dasar | Hanyut |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | 12 | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | 4 | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | 22 | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **28** | **-** | **-** |

## 9. POTENSI PARAWISATA

Tabel IX.a
Jumlah Tempat Wisata menurut Jenis Wisata di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| No. | Desa | Wisata Keagamaan | Wisata Pantai | Wisata Budaya | Lainnya Musium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | 1 | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | 1 | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | 8 | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | 2 | - | - |

## 10. KELEMBAGAAN

Tabel X.a
Jumlah Kelembagaan Desa di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | BPD | Pemuda | P2A | PKK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | 1 | 1 | - | 1 |
| 2. | Tambolongan | 1 | - | - | 1 |
| 3. | Appatanah | 1 | - | - | 1 |
| 4. | Lowa | 1 | - | - | 1 |
| 5. | Lantibongan | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Laiyolo | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Laiyolo Baru | 1 | - | - | 1 |
| 9. | Harapan | 1 | 1 | - | 1 |
| 10. | Patikarya | 1 | - | - | 1 |
| 11. | Patilereng | 1 | - | - | 1 |
| 12. | Bahuluang | 1 | - | - | 1 |
| **Jumlah** | | **12** | **1** | **-** | **12** |

Tabel X.b
Jumlah Kader Pembangunan Desa (KPD) di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Dusun | Jumlah KPD | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2022 | 2023 |
| 1. | Polassi | 3 | 1 | 1 |
| 2. | Tambolongan | 4 | 1 | 1 |
| 3. | Appatanah | 3 | 1 | 1 |
| 4. | Lowa | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Lantibongan | 4 | 1 | 1 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 4 | 1 | 1 |
| 7. | Laiyolo | 5 | 1 | 1 |
| 8. | Laiyolo Baru | 4 | 1 | 1 |
| 9. | Harapan | 8 | 1 | 1 |
| 10. | Patikarya | 4 | 1 | 1 |
| 11. | Patilereng | 3 | 1 | 1 |
| 12. | Bahuluang | 2 | 1 | 1 |
| **Jumlah** | | **47** | **12** | **12** |

## 11. USAHA JASA PERDAGANGAN

Tabel XI.a
Jumlah Perusahaan Konstruksi menurut Badan Hukum
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jenis Kualifikasi | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PT | CV | FIRMA | BUMN/ BUMD | Koperasi | Per Orangan | |
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Tabel XI.b
Jumlah Sarana Pemasaran di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Pasar | Toko | Kios | Kedai | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | - | - | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | - | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | - | - | - | - |
| 4. | Lowa | 1 | - | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | 1 | - | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | - | - | - |
| 7. | Laiyolo | 1 | - | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1 | - | 27 | - | - |
| 10. | Patikarya | 1 | - | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | 18 | - | 1 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **5** | **-** | **45** | **-** | **1** |

Tabel XI.c
Jumlah Usaha KUD dan Non KUD di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | KUD | | Non KUD | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Anggota | Jumlah | Anggota | Jumlah | Anggota |
| 1. | Polassi | - | - | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 2. | Tambolongan | - | - | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 3. | Appatanah | - | - | 1 | 51 | 1 | 51 |
| 4. | Lowa | 1 | 402 | 1 | 22 | 2 | 424 |
| 5. | Lantibongan | - | - | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | - | 2 | 44 | 2 | 44 |
| 7. | Laiyolo | 1 | 187 | 1 | 23 | 2 | 210 |
| 8. | Laiyolo Baru | - | - | 1 | 46 | 1 | 46 |
| 9. | Harapan | 1 | 676 | 1 | 36 | 2 | 712 |
| 10. | Patikarya | - | - | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 11. | Patilereng | - | - | 1 | 30 | 1 | 30 |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **3** | **1.265** | **12** | **340** | **15** | **1.605** |

Tabel XI.d
Jumlah Usaha Koperasi dirinci menurut Jenisnya di Kecamatan Bontosikuyu
dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | KUD | Non KUD | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Serba Usaha | Golongan Fungsional | Perkebunan Rakyat | Perikanan |
| 1. | Polassi | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Tambolongan | - | 1 | - | - | - |
| 3. | Appatanah | - | 1 | - | - | - |
| 4. | Lowa | 1 | 1 | - | - | - |
| 5. | Lantibongan | - | 1 | - | - | - |
| 6. | Binanga Sombaiya | - | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Laiyolo | 1 | 1 | - | - | - |
| 8. | Laiyolo Baru | - | 1 | - | - | - |
| 9. | Harapan | 1 | 1 | - | - | - |
| 10. | Patikarya | - | 1 | - | - | - |
| 11. | Patilereng | - | - | - | 1 | - |
| 12. | Bahuluang | - | - | - | - | - |
| **Jumlah** | | **3** | **10** | **-** | **1** | **1** |

## 12. KEAMANAN

Tabel XII.a
Jumlah Porsonil Pertanahan Sipil (Hansip)
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci menurut tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | Jumlah Dusun | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1. | Polassi | 3 | 4 |
| 2. | Tambolongan | 4 | 8 |
| 3. | Appatanah | 3 | 2 |
| 4. | Lowa | 3 | 7 |
| 5. | Lantibongan | 4 | 6 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 4 | 6 |
| 7. | Laiyolo | 5 | 5 |
| 8. | Laiyolo Baru | 4 | 6 |
| 9. | Harapan | 8 | 14 |
| 10. | Patikarya | 4 | 8 |
| 11. | Patilereng | 3 | 6 |
| 12. | Bahuluang | 2 | 2 |
| **Jumlah** | | **47** | **74** |

Jumlah Pelanggaran Pidana di Kecamatan Bontosikuyu
Dirinci menurut jenisnya Tahun 2023

| No | Jenis | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Konflik Sara | - |
| 2 | Perkelahian | - |
| 3 | Penculikan / Perampokan | - |
| 3 | Perjuadian | - |
| 4 | Narkoba | - |
| 5 | Pembunuhan | - |
| 6 | Kejatahan Seksual | - |
| 7 | Kekerasan Dalam Rumah Tangga | - |
| 8 | Lain-lain | - |

## 13. PERINDUSTRIAN DAN ENERGI

Tabel XIII.a
Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Investasi
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Kode Industri | Kelompok Industri | Unit Usaha | Tenaga Kerja | Investasi (Rp.000) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Industri Makanan. Minuman dan Tembakau | 999 | 2.174 | 2.890.054 |
| 2. | 32 | Industri Tektil, Pakaian Jadi, Permadani dan Kulit | 10 | 14 | 17.552 |
| 3. | 33 | Industri Kayu dan Barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga | 23 | 74 | 204.553 |
| 4. | 34 | Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan | - | - | - |
| 5. | 35 | Industri kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastic | - | - | - |
| 6. | 36 | Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara | - | - | - |
| 7. | 37 | Industri logam dasar | - | - | - |
| 8. | 38 | Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya | 22 | 46 | 269.902 |
| 9. | 39 | Industri pengelohan lainnya | 77 | 121 | 14.794 |
| | | **Jumlah** | **1.131** | **2.429** | **3.396.855** |

Tabel XIII.b
Nilai produksi, Nilai Bahan baku dan Nilai Tambah
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Kode Industri | Kelompok Industri | Nilai Produksi | Nilai Bahan Baku | Nilai Tambah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Industri Makanan. Minuman dan Tembakau | 9.428.507 | 4.708.708 | 4.539.799 |
| 2. | 32 | Industri Tektil, Pakaian Jadi, Permadani dan Kulit | 44.385 | 21.410 | 22.915 |
| 3. | 33 | Industri Kayu dan Barang-barang dari kayu termasuk perabot rumah tangga | 572.185 | 310.127 | 262.058 |
| 4. | 34 | Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan | - | - | - |
| 5. | 35 | Industri kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastic | - | - | - |
| 6. | 36 | Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara | - | - | - |
| 7. | 37 | Industri logam dasar | - | - | - |
| 8. | 38 | Industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya | 75.800 | 18.500 | 57.300 |
| 9. | 39 | Industri pengelohan lainnya | 492.980 | 216.937 | 276.043 |
| | | **Jumlah** | **10.433.857** | **5.275.682** | **5.158.115** |

Tabel XIII.c
Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Aliran Listrik dirinci menurut sumbernya
di Kecamatan Bontosikuyu dirinci tiap Desa Tahun 2023

| NO | Desa | PLN | Non PLN | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Generator | Tenaga Surya | |
| 1. | Polassi | - | 336 | - | 336 |
| 2. | Tambolongan | - | 245 | - | 245 |
| 3. | Appatanah | - | 163 | - | 163 |
| 4. | Lowa | 221 | 165 | - | 386 |
| 5. | Lantibongan | 194 | 85 | - | 279 |
| 6. | Binanga Sombaiya | 239 | 105 | - | 344 |
| 7. | Laiyolo | 230 | 63 | - | 293 |
| 8. | Laiyolo Baru | 192 | 40 | - | 232 |
| 9. | Harapan | 574 | 46 | - | 620 |
| 10. | Patikarya | 253 | 87 | - | 340 |
| 11. | Patilereng | 218 | - | - | 218 |
| 12. | Bahuluang | - | 30 | - | 30 |
| **Jumlah** | | **2.121** | **1.365** | **-** | **3.486** |

## 14. POTENSI SARANA DAN PRASARANA

| No | Jenis Prasarana | Jumlah | Volume | Kondisi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelabuhan | 1 | 1 Ha | Baik |
| 2 | Jembatan | 5 | 25 m | Baik |
| 3 | Perahu kayu bermotor | 5 | 300 Org | Baik |
| 4 | Very | 1 | 1.000 Org | Baik |
| **Jumlah** | | | | |

# BAB IV
# P E N U T U P

Data Dasar Profil Kecamatan Bontosikuyu merupakan sekumpulan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi dan permasalahan di Wilayah Kecamatan. dimaksudkan sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan kecamatan sesuai karakaternya secara menyeluruh, yaitu gambaran tentang potensi yang meliputi alam, pemduduk, kelembagaan, sarana/prasarana dan permasalahn yang dihadapi, baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter Kecamatan maupun yang timbul sebagai akibat bentuk dari kegiatan perkembangan pembangunan.

Oleh karena itu, Data Dasar Profil yang kami buat menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah khususnya pada wilayah pemerintahan kami di kecamatan Bontosikuyu dalam memperbaiki proses internal masing-masing sehingga kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada gilirannya, Data Dasar Profil akan memberikan gambaran secara menyeluruh Kecamatan Bontosikuyu yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah khususnya di Kecamatan Bontosikuyu.

Pariangan, 27 Desember 2023

**CAMAT BONTOSIKUYU,**



**Drs. MUHAMMAD ARIS**
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19671029 199512 1 002

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM LAKIP

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 yang terurai pada pasal 3 yaitu Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Kecamatan Takabonerate dituntut untuk dapat memberikan pertanggungjawaban secara akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai bentuk akuntabilitas Kecamatan Takabonerate berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana diatur dalam

PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu pengungkapan informasi tentang kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes) dari setiap program yang telah ditentukan oleh Kecamatan Takabonerate. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan Strategis, Sistem Penganggaran dan Sistem Akuntasi Pemerintahan. Laporan Pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang meliputi berbagai sebagai berikut yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan disusun berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah.

Lakip dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada semua Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan perwujudan good governance adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks : (1) Kinerja sesuai Tupoksi; (2) Keuangan sesuai dengan Dokumen Anggaran yang telah disusun di awal tahun. Akuntabilitas Pemerintah yang dipercaya oleh Publik dan Stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan di era globalisasi saat ini terutama di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Semangat untuk mempercepat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di antaranya diwujudkan dengan kewajiban setiap tahun kerja di lingkungan Pemerintahan untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dan mutlak. Karena Pemerintah Kecamatan ditempatkan sebagai lini terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menangani masalah kemasyarakatan dan menjadi jembatan antara Bupati dan masyarakatnya. Inilah cita – cita Kecamatan Takabonerate dalam perwujudannya mengambil langkah serius dalam menempatkan Kecamatan Takabonerate pada posisi yang lebih baik kedepannya dan pada akhirnya tersusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Takabonerate sebagai suatu penyambung lidah antara masyarakat dengan Kepala Pemerintahannya.

## B. TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Takabonerate Tahun 2022 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayan prima kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan–kegiatan

perencanaan strategis di Wilayah Kecamatan Takabonerate yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang konduksif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Kecamatan Takabonerate adalah :

1. Untuk Mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada publik;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun kedepannya;
4. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja dimasa datang.
5. Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan Clean Goverenment menuju Good Governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Takabonerate sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan, Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Camat;**

Camat mempunyai tugas melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun uraian tugas diantaranya ;

1. Membina, mengkordinasikan, menyelenggarakan program dan kegiatan dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasiltas umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan;
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas;
9. Membina dan melaksanakan Kesekretariatan Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas;

- **Sekretaris Camat;**

Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan urusan penyusunan program, umum dan keuangan dan pelayanan tekhnis administatif.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan tekhnis administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
2. Merencanakan kegiatan pelayanan teknis administratif untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, Pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Merencanakan program kerja pemerintahan Kecamatan;
4. Membina, mengawasi dan mengendalikan perangkat Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintahan Daerah;
5. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
6. Memberikan petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
7. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas Pemerintahan Kecamatan kepada Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris Camat di bantu oleh staf yang sebagai berikut :

a. **Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
2. Merencanakan program kerja Sub Bagian Kepegawaian , umum dan perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang Kepegawaian, umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan dan melaksanakan investarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
4. Melaksanakan penyusunan data kepegawaian DP3 PNS, registrasi PNS dan DUK;
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan;
6. Merencanakan program kerja Sub Bagian keuangan Sekretariat Kecamatan meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan Sekretariat Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kecamatan;
7. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP );
8. Melakukan Verfikasi Laporan Pertanggungjawaban ( SPJ ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
9. Menyiapkan Surat Perintah Membayar ( SPM );
10. Melaksanakan Akuntansi Sekretariat Kecamatan;
11. Menyiapkan Laporan keuangan Sekretariat Kecamatan;
12. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga Sekretariat Kecamatan;
13. Membagi tugas dengan bawahan agar dapat diproses lebih lanjut;
14. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
15. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;

16, Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian kepada camat sebagai bahan evaluasi Camat;

17. Melaksnakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan Camat;

**b. Sub Bagian Program dan Keuangan**

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan program ;
2. Merencanakan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan perundang- undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
3. Menyusun Program kerja dan membuat Laporan Tahunan Kecamatan;
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut Temuan Pemeriksa Fungsional, laporan masyarakat dan pengawasan lainnya;
5. Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang Kecamatan;
6. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan dilingkup Kecamatan;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Kecamatan;
8. Memberi petunjuk kepada bawahan agar bawahan mengerti dan memahami tugasnya;
9. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasar hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
10. Melaporkan hasil kerja kepada Camat sebagai bahan evaluasi Camat;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya;

**c. Seksi - Seksi**

**1. Seksi pemerintahan**

Seksi Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian membantu Camat dalam Bidang Pemerintahan Umum meliputi Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan, melaksanakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pembinaan kehidupan politik dalam Negeri.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Menyusun Rencana Program Kerja sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas;
2) Menyelenggarakan fasilitas Pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
3) Menyelenggarakan fasilitas kerjasama antar Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
4) Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dalam penyusunan Peraturan Desa;

5) Melaksanakan kegiatan Administrasi kependudukan Inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kerja;
6) Menyelenggarakan koordinasi dengan Instansi kerja terkait;
7) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan Camat;

**2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

1) Melakukan usaha pengendalian aparat operasional, penentraman, penertiban, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan Operasional Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
2) Melakukan penyusunan program, pedoman dan petunjuk tehnis penentraman dan penertiban terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
3) Melakukan penyusunan program, pedoman petunjuk tehnis penentraman dan penertiban serta melakukan kerjasama dan koordinasi antar aparat ketertiban;
4) Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan peraturan perundang-undangan;
5) Menyelenggarakan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama ;
6) Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban ideology dan kesatuan Bangsa serta kemasyarakatan;
7) Melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau TNI mengenai program dan kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan;
8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan Camat;

**3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan program Bidang Perekonomian, Pengendalian dan Fasilitasi urusan perekonomian yang meliputi bidang pertanian, sumber daya alam dan lingkungan

hidup, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan perekonomian.

1) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
2) Pelaksanaan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
3) Pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
4) Pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
5) Fasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
6) Penyiapan rekomendasi perijinan tertentu;
7) Fasilitasi pengembangan perekonomian Desa / Kelurahan;
8) Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
9) Pemantauan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
10) Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa / Kelurahan;
11) Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
12) Pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
13) Fasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
14) Pengumpulan dan pengolahan data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;

### 4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan program bidang Kesejahteraan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan sosial, kemasyarakatan dan bina mental keagamaan, serta melaksanakan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial,

bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial.

1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
2) Menyelenggarakan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
3) Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
4) Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
5) Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
6) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan umum serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

1) Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
2) Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah;
3) Penginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
4) Fasilitasi pembinaan Generasi Muda, Olahraga dan Seni Budaya;
5) Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
6) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

## a. LINGKUNGAN STRATEGIS

### 2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

**SKPD Kecamatan Takabonerate dalam pelaksanaan program kegiatan baik rutin maupun pembangunan di dukung oleh :**

- **Keadaan Pegawai menurut Tingkat Kepangkatan**

| No | TINGKAT KEPANGKATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Pembina / Golongan IV | 1 |
| 2 | Penata / Golongan III | 7 |
| 3 | Pengatur / Golongan II | 7 |
| 4 | Juru / Golongan I | |

- **Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan**

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Sarjana S 2 | 1 |
| 2 | Sarjana S 1 | 5 |
| 3 | Diploma | 1 |
| 4 | SLTA | 8 |
| 5 | SLTP | 0 |

- **Keadaan Pegawai menurut jabatan Struktural/ Fungsional**

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Eselon III a | 1 |
| 2 | Eselon III b | 1 |
| 3 | Eselon IV a | 4 |
| 4 | Eselon IV b | 1 |

## DAFTAR PEGAWAI KECAMATAN TAKABONERATE

| No. | NAMA / NIP. | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | PEND. TERAKHIR | JAB. / GOL. | UNIT KERJA | JABATAN | STATUS JABATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M.<br>Nip. 19651213 198603 1 245 | Selayar | 13/12/1965 | S2 | IV/a | Kantor Kec. Takabonerate | Camat | PNS |
| 2. | AHMAD, SKM.<br>NIP. 19811220 200212 2 002 | Kayuadi Selayar | 01/10/2016 | S1 | III/d | Kantor Kec. Takabonerate | Sekcam | PNS |
| 3. | FADLIYATI, SE<br>Nip. 19811220 200212 2 002 | Kayuadi | 20/12/1981 | S1 | III/d | Kantor Kec. Takabonerate | Kepala Seksi Pemberdayaan Desa | PNS |
| 4. | MUHAMMAD RAMLAN, SE<br>Nip. 19760518 200604 1 023 | Kayuadi | 18/05/1976 | S1 | III/d | Kantor Kec. Takabonerate | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | PNS |
| 5. | PIRAWATI, S.Kom<br>Nip.19790603 201001 2 004 | Kayuadi | 03/06/1979 | S1 | III/b | Kantor Kec. Takabonerate | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial | PNS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | MUH. FAJAR A.R. A,Md.Komp.<br>Nip. 19830117 200803 1 002 | Benteng Selayar | 17/01/1983 | D III | III/b | Kantor Kec. Takabonerate | Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan | PNS |
| 7. | NURBAENI, S.Pd<br>Nip.19810907 200701 2 014 | Kayuadi Selayar | 07/09/1981 | S 1 | III/c | Kantor Kec. Takabonerate | Kepala Sub Bagian program dan Keuangan | PNS |
| 8. | NURBAYA<br>Nip.19700103 199503 2 004 | Kayuadi | 03/10/1970 | SMA | III /c | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial | PNS |
| 9. | MUH. SADLAN<br>Nip. 19760925 199810 1 001 | Kayuadi | 09/25/1976 | SMA | II/d | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Desa | PNS |
| 10. | SUPRIADI<br>NIP. 196806112009061003 | Kayuadi | 11/06/1966 | SMA | II/d | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan | PNS |
| 11. | MARLINA<br>NIP. 19830804 201407 2 006 | Ujung Pandang | 08/04/1983 | SMA | II/c | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadministrasi Keuangan pada bagian Program dan Keuangan | PNS |
| 12. | MUHAMMAD ASRUL<br>NIP. 19790715 201101 1 012 | Kayuadi | 07/15/1979 | SMA | II/c | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi | PNS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 13. | RAHIMUDDIN<br>NIP. 19671101 200701 1 021 | Kayuadi | 01/11/1967 | SMA | II/d | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan | PNS |
| 14. | BASTIAR<br>Nip.19850907 201001 1 009 | Kayuadi | 07/09/1985 | SMA | II/c | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum | PNS |
| 15. | A. HARTAWAN BASRAM<br>NIP. 19691211 200701 1 030 | Barang-barang | 11/12/1969 | SMA | II/c | Kantor Kec. Takabonerate | Pengadminstrasi Umum pada Seksi Bagian Program dan Keuangan | PNS |
| 16. | MULIATI, SE | Se One Malangka | 12/04/1987 | S1 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 17. | MUH. KASENG. S.Hut. | Kayuadi | 03/01/1992 | S1 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| | | | | | | | | |
| 18. | MARDIYAH,M. S.Kom. | Benteng | 09/04/1998 | S1 | - | Kantor Kec. | Staf Seksi Ekonomi dan | Pekerja |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Selayar | | | | Takabonerate | Pembangunan | Harian Lepas (PHL) |
| 19. | SUHARNIANTI, S.M. | Kadieng | 10/10/1996 | S1 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 20. | SYAHRUL KHAN, S.M. | Kayuadi | 07/09/1998 | S1 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Umum Kepegawaian dan Hukum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 21. | AHDIN, SE | Selayar | 12/07/1997 | S1 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 22. | KAMARUDDIN, A.Ma. | Kayuadi Selayar | 10/06/1994 | D2 | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Kesejahteraan Sosial | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 23. | NURHAYATI | Baruia Selayar | 20/6/1983 | SMA | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Umum Kepegawaian dan Hukum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | MIRAYANTI | Kayuadi | 19/10/1997 | SMA | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 25. | RAHMAT | Mase-mase | 13/04/1983 | SMA | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Tata Pemerintahan | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 26. | DG. SINAI | Kayuadi | 15/11/1977 | SMA | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Umum Kepegawaian dan Hukum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 27. | SUKAWATI | Kayuadi | 07/02/1987 | SMA | - | Kantor Kec. Takabonerate | Staf Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Pekerja Harian Lepas (PHL) |
| 28. | APRIA NINGSIH | Jinato | 25/10/1998 | SMA | - | Kantor Kec.Takabonerate | Staf Seksi Kesejahteraan Sosial | Pekerja Harian Lepas (PHL) |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | MUH. ARSYAD | Cinimabela Selayar | 06/12/1991 | SMA | - | Kantor Kec.Takabonerate | Sopir | Pekerja Harian Lepas (PHL) |

## 2.2. Sarana dan Prasarana

Data Asset Pemerintahan Kecamatan Takabonerate

| No | Uraian | Keadaan | | | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | RR | RB | | |
| 1 | Tanah Lokasi Perkantoran | baik | | | 1 Unit | Kantor dan rumah dinas |
| 2 | Kendaraan roda 2 ( Motor ) | 5 Baik | 1 | 2 | 8 Unit | Kantor Camat dan sekretariat Kecamatan |
| 3 | Kendaraab Roda 4 ( Mobil ) | Baik | | | 1 Unit | Sekretariat Kecamatan di Benteng Selayar |
| 4 | Perkakas Bengkel Lain | | | | 2 | |
| 5 | Brand Kas | | | | 1 | |
| 6 | Alat Kantor Lainnya | | | | 1 | |
| 7 | Lemari Kayu | | | | 3 | |
| 8 | Meja Rapat | | | | 2 | |
| 9 | Meja Makan | | | | 1 | |
| 10 | Kursi Putar | | | | 11 | |
| 11 | Sofa | | | | 4 | |
| 12 | Lemari Pakaian | | | | 3 | |
| 13 | Kursi Plastik | | | | 178 | |
| 14 | Tempat Tidur Busa | | | | 4 | |
| 15 | Kursi Kerja | 20 Baik | 5 RR | 8 RB | 33 | |
| 16 | Gordyn | B | | | 1 | |
| 17 | Jam Mekanis | B | | | 2 | |
| 18 | Ac Unit | B | | | 1 | |
| 19 | Kipas Angin | B | | | 4 | |
| 20 | Kompor Gas | B | | | 3 | |
| 21 | Alat Dapur Lainnya | B | | | 1 | |
| 22 | Tabung Gas | 1 Baik | | 2RB | 3 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Televisi | | RR | | 2 | |
| 23 | Mimbar/Podium | | RR | | 1 | |
| 24 | P.c. Unit Komputer Fc | | RR | | 1 | |
| 25 | Laptop | 6 Baik | | 5 RB | 11 | |
| 26 | Printer | 2 Baik | | 3 RB | 5 | |
| 27 | Scanner | | | RB | 1 | |
| 28 | Meja Kerja | | RR | | 14 | |
| 29 | Lemari Arsip | | RR | | 7 | |
| 30 | Camera Elektronik | B | | | 1 | |
| 31 | Mkicrophone | | | RB | 2 | |
| 32 | Sound System | | RR | | 4 | |
| 33 | Alat Komuniasi Radio Vhf dan lain-lain | B | | | 1 | |
| 34 | Antena SHF/ Parabola portable | | | RB | 2 | |
| 35 | CCTV | | RR | | 1 | |
| 36 | Kapal Laut/ Joloro | | | RB | 1 | |

## 2.3. Keuangan

Kecamatan Takabonerate dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Takabonerate secara optimal. Dalam Dokumen Rencana Strategis kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepualauan Selayar Tahun 2022, kebijakan umum pengelolaan keuangan Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

Jumlah Anggaran Kecamatan Takabonerate Tahun 2022 sebesar Rp 1.797.627.304,-( Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah) atau setara dengan 93,27 % dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagaimana Tabel dibawah ini :

## REALISASI KEUANGAN

| No | Uraian | Anggaran ( Rp) | Realisasi ( Rp ) | Presentase % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **Belanja** | **Rp. 1.685.722.304** | **Rp. 1.573.327.489** | **93,33 %** |
| 5.1 | Belanja Operasi | Rp. 1.660.514.304 | Rp. 1.554.429.489 | 93,61 % |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | Rp. 1.215.763.000 | Rp. 1.201.787.639 | 98,85 % |
| 5.1.02 | Belanja Barang | Rp 444.751.304 | Rp 352.641.850 | 79,29 % |
| 5.2 | Belanja Modal | Rp. 25.208.000 | Rp. 18.898.000 | 74,94 % |
| 5.2.02 | Belanja Belanja Peralatan dan Mesin | Rp . 25.208.000 | Rp . 18.898.000 | 74,94 % |
| **Jumlah 5.1 + 5.2** | | Rp. 1.554.429.489 | Rp. 18.898.000 | **93,61%** |

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Takabonerate tahun 2021 bahwa Jumlah Anggaran Awal adalah sebesar **Rp. 1.797.627.304** dan setelah mengalami Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) menjadi sebesar **Rp. 1.685.722.304**, indokator tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Takabonerate berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020.

## DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Rp . 3.375.000 |
| | | 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | Rp . 6.673.000 |
| | | 3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | Rp. 6.850.000 |
| | | 4. Evaluasi kinerja perangkat daerah | Rp. 3.375.000 |
| | | 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- | Rp. 1.200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | undangan<br>6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>8. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya<br>9. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>10. Pemeliharaan aset tetap lainnya<br>11.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | <br>Rp. 97.066.000<br>Rp. 25.208.000<br>Rp. 9.781.804<br>Rp. 53.910.000<br>Rp. 10.000.000 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik | 1. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan | Rp. 32.640.000 |
| 3 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa<br>2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Rp. 27.775.000<br>Rp. 49.040.000 |
| 4 | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp. 8.150.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | **1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**<br>**2. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa**<br>**3. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya** | **Rp . 6.000.000**<br>**Rp. 29.430.500**<br>**Rp. 8.500.000** |

# BAB II

# PERENCANAAN STRATEGIS

## A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategi merupakan jalan dari pelaksanaan program maupun kegiatan disuatu lembaga maupun instansi yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Negara maupun Kepala Daerah sebagai suatu proses otonomi daerah dimana Renacana Strategis Kecamatan Takabonerate sejalan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

### 1. Tujuan

Tujuan ( goal ) adalah merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( Lima ) tahun kedepan. Untuk merealisasikan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Takabonerate, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

a. Meninggkatkan kepuasan masyarakat terhadap kegaiatan-kegiatan yang di koordinasikan oleh pemerintah Kecamatan Takabonerate
b. Meningkatkan efektifitas koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan dalam bidang pemerintahan, ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, ketentraman dan Ketertiban umum.

Menyikapi dinamika perkembangan serta tuntutan akan pelayanan prima dari masyarakat, maka diperlukan peran dan fungsi setiap unit kerja pemerintah daerah yang semakin optimal dengan bertumpu pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, peranan setiap unit kerja pada saat ini sangat strategis sebagai fasilitator, moderator dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat.

### 2. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Takabonerate yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun.

Sebagimana visi dan misi yang telah ditetapkan , untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan pemerintah Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang saling berkaitan adapun tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas Kecamatan;
2. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah dengan melibatkan semua stakeholder;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan secara optimal;
6. Meningkatkan efektifitas koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Takabonerate;
7. Meningkatkan efektifitas pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

### 3. Strategi

Kecamatan Takabonerate dalam menetapkan visinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 – 2027 merupakan dokumen dalam perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Program dan kegiatan Daerah. Rencana Strategis secara sistematis mengedepankan isu - isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 – 2027 dengan sasaran sebagai berikut :

1. Adanya Standar prima dalam pelayanan kepada masyarakat .
2. Program masyarakat baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
3. Aparatur Pemerintah di Kecamatan maupun Aparatur Desa.
4. Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang akuntabel.

## B. RENCANA KEGIATAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan memalui berbagai kegiatan tahunan

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan Agenda Penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam satu tahun yang bersangkutan indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaianya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan an sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) tahun 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ).

### 1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang akan dilakukan untuk menjalankan misi diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kantor Kecamatan Takabonerate, maka program-program yang telah dilaksanakan tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
c. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
d. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

### 2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

**Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang telah dilaksnakan Pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :**

**a. Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota**

- **Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**
- **Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD**
- **Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD**
- **Evaluasi kinerja perangkat daerah**
- **Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan**
- **Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**
- **Pengadaan mebel**
- **Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau banguna lainnya**
- **Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik**
- **Pemeliharaan aset tetap lainnya**
- **Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya**

**b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

- **Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**

**c. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**

- **Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa**
- **Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan**

**d. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**

- **Sinegritas dengan kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan**

**e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

- **Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional**
- **Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional**

# BAB III
# AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

## A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan strategis Kecamatan Takabonerate. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan ( Input ) dan keluaran ( Output ). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program / kegiatan yang dianggap penting dang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber, yaitu data internal yang dimiliki Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate dan data eksternal berasaldari luar Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate yang merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.

## B. EVALUASI KINERJA

Secara umum Satuan Kerja Kecamatan Takabonerate telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Takabonerate Tahun 2022 -2027.

**Realisasi pencapaian program dan kegiatan pada tahun 2018 pada Satuan Kerja kecamatan Takabonerate memiliki pencapaian kinerja baik sebagai berikut :**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan dengan baik dan efektif , dengan alokasi anggaran Rp. 1.524.186.804 dengan rincian kinerja kegiatan :**

   - **Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan output tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah dalam jumlah 2 dokumen.**
   - **Kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan output tersusunnya dokumen RKA-SKPD dalam jangka waktu 2 bulan.**
   - **Kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan output tersusunnya dokumen DPA-SKPD dalam jangka waktu 3 bulan.**
   - **Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan output tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah dalam jumlah 12 paket.**
   - **Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan output tersedianya bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu 3 bulan.**
   - **Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan output tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan jumlah 12 paket.**
   - **Kegiatan pengadaan saran dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan dengan output tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dengan jumlah 12 paket.**
   - **Kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dengan output tersedianya komunikasi,air dan listrik dengan jumlah 12 paket.**
   - **Kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya dengan output tersedianya pemeliharaan aset tetap lainnya dengan jumlah 12 paket.**
   - **Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan output tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan jumlah 12 paket.**

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan alokasi anggaran Rp. 32.640.000 dengan rincian sebgai berikut :

- Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan output terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan jangka waktu 12 bulan.

3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan bertujuan untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dengan alokasi anggaran Rp. 76.815.000- dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan output terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah dengan jumlah 12 paket.
- Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan output terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan jumlah 12 paket.

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bertujuan untuk meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan alokasi anggaran Rp.8.150.000 dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan output terlaksananya sinegritas dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan jangka waktu 12 bulan.

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Penngawasan Pemerintahan Desa bertujuan untuk menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengawasan dengan Pemerintahan Desa dengan alokasi Anggaran Rp.43.930.500 dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedayagunaan Aset Desa dengan output tersedianya fasilitasi Pengelolaan Keuangan

dan Pendayagunaan Aset Desa di Wilayah Kecamatan dengan jumlah 1 paket

- Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa dengan output terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah guna mewujudkan Pembangunan Desa dengan jumlah 1 paket
- Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan output terlaksananya koordinasi pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan dengan jumlah 1 paket

## AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pemerintah Kecamatan Takabonerate merupakan pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa rekomendasi , koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitas di Kecamatan Takabonerate secara optimal. Dalam Dokumen Rencana Stategis Kecamatan Takabonerate diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Kecamatan Takabonerate tahun 2022 bahwa jumlah anggaran awal adalah sebesar Rp. 1.797.627.304 dan setelah perubahan Rp. 1.685.722.304, indikator dan tolak ukur kinerja Kantor Kecamatan Takabonerate berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada masing-masing tabel program dan kegiatan berikut ini :

**Tabel. 1.0**

**1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**(1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah**

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 3.375.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 3.375.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen | 100 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya dokumen perencanaan perangkat daerah | 100 % |

**Tabel. 1.01**

(2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 6.673.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. . 6.673.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Tersusunnya dokumen RKA-SKPD | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya dokumen RKA-SKPD | 100 % |

**Tabel. 1.02**

(3) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 6.850.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 6.350.000 | 92,7% |
| ❖ Keluaran | : | Tersusunnya dokumen DPA-SKPD | 92,7% |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya dokumen DPA-SKPD | 92,7% |

**Tabel. 1.03**

(4) Evaluasi kinerja perangkat daerah

Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 3.375.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 3.375.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Tersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 % |

(5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

**Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ **Masukan** | : | **Dana DPA-SKPD : Rp. 1.200.000** | **Presentase ( % )** |
| ❖ **Realisasi** | | **Rp. 1.200.000** | **100 %** |
| ❖ **Keluaran** | : | **Tersedianya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** | **100 %** |
| ❖ **Hasil** | : | **Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan** | **100 %** |

**(6) Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

**Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ **Masukan** | : | **Dana DPA-SKPD : Rp. 97.066.000** | **Presentase ( % )** |
| ❖ **Realisasi** | | **Rp. 33.200.000** | **34,2 %** |
| ❖ **Keluaran** | : | **Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** | **34,2 %** |
| ❖ **Hasil** | : | **Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD** | **34,2 %** |

**(7) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya**

**Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ **Masukan** | : | **Dana DPA-SKPD : Rp. 25.208.000** | **Presentase ( % )** |
| ❖ **Realisasi** | | **Rp. 0** | **0 %** |
| ❖ **Keluaran** | : | **Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya** | **0 %** |
| ❖ **Hasil** | : | **Terwujudnya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya** | **0 %** |

**(8) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik**

**Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 9.781.804 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 9.198.350 | 94% |
| ❖ Keluaran | : | Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 94 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 94 % |

**(9) Pemeliharaan aset tetap lainnya**

**Kegiatan pemeliharaan aset tetap lainnya dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 53.910.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 50.110.000 | 92,9% |
| ❖ Keluaran | : | Tersedianya pemeliharaan aset | 92,9% |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya pemeliharaan aset | 92,9% |

**(10) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya**

**Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dilaksanakan melalui indikator kinerja sebagai berikut :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 10.000.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 9.990.000 | 99,9% |
| ❖ Keluaran | : | Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 99,9% |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 99,9% |

**Tabel. 2.00**

**2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

**(1) Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**

**Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp.32.640.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 32.640.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Terpenuhinya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 % |

**Tabel. 3.00**

**3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**(1) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 27.775.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 27.775.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Tersedianya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa | 100 % |

**(2) Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dilaksanakan melalui indikator kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 49.040.000 | Presentase ( % ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Realisasi | | Rp. . 49.040.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Tersedianya Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 100 % |

**Tabel. 4.00**

**4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

**(1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan dilaksanakan melalui kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 8.150.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 8.150.000 | 100 % |
| ❖ Keluaran | : | Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujutnya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 % |

**Tabel 5.00**

**5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

**(1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Wilayah Kecamatan dilaksanakan melalui Indikator Kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 6.000.000 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 6.000.000 | 100% |
| ❖ Keluaran | : | Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 100% |

**Tabel. 5.01**

**(2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Indikator Kinerja sbb :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❖ Masukan | : | Dana DPA-SKPD : Rp. 29.430.500 | Presentase ( % ) |
| ❖ Realisasi | | Rp. 6.430.000 | 21,8 % |
| ❖ Keluaran | : | Tersedianya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 21,8 % |
| ❖ Hasil | : | Terwujudnya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 21,8 % |

**HASIL ANALISIS PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) INDIKATOR KINERJA MASUKAN, KELUARAN DAN HASIL KEGIATAN KECAMATAN TAKABONERATE KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022**

| No | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | % PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | MASUKAN | KELUARAN | HASIL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** | | | |
| | 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 100 | 100 | 100 |
| | 2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD | 100 | 100 | 100 |
| | 3. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD | 100 | 92,7 | 92,7 |
| | 4. Evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 | 100 | 100 |
| | 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 100 | 100 | 100 |
| | 6. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 | 34,2 | 34,2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau banguna lainnya<br>8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik<br>9. Pemeliharaan aset tetap lainnya<br>10. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | -<br>100<br>100<br>100 | -<br>94<br>92,9<br>99,9 | -<br>94<br>92,9<br>99,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | **Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**<br>a. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan<br>a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa<br>b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100<br>- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | **Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**<br>a. Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakatdi wilayah kecamatan | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**<br>a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa<br>b. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100<br>100 | 100<br>21,8 | 100<br>21,8 |

## BAB IV
## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Takabonerate merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Takabonerate Tahun Anggaran 2022.

**Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kecamatan Takabonerate Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Takabonerate telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Takabonerate Tahun 2018 secara Keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.**

**Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2018 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik antara lain :**

1. **Pembinaan Kualitas SDM aparatur yang belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan;**
2. **Belum sepenuhnya ada petunjuk yang lengkap tentang pelaksanaan dan petunjuk tehnis, maupun pedoman tugas-tugas bidang tertentu yang dilimpahkan kepada Camat, sehingga berdampak terhadap proses kegiatan pelayanan masyarakat ;**
3. **Ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana / tidak terlaksana sesuai rencana, hal ini lebih disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran, personil dan sarana prasarana yang ada.**

**Menyikapi kondisi sebagaimana diatas, maka pemecahannya yang perlu segera dilaksanakan adalah :**

1. **Secara intern perlu segera dipahami tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di Unit kerja Kecamatan, karena dengan adanya peningkatan pemahaman TUPOKSI sesuai dengan struktur organisasi diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat ;**
2. **Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik yang ada di Kecamatan maupun Desa, maka telah ada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat dan tugas-tugas pembinaan yang bisa ditangani langsung oleh Kecamatan maupun Desa, namun hal ini masih dirasa kurang optimal dalam mengakomodir terhadap tugas dan fungsi Camat. Mengingat didalam Peraturan Bupati tersebut sangat dibatasi kewenangannya dan masih belum menyeluruh ( dalam hal ini termasuk Peralatan/Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi( P 3 D ).**
3. **Mengkoordinir pelaksanaan program-program dari Badan / Dinas / Kantor terkait, dengan pelaksanaan tugas Camat dan Desa di wilayah Kecamatan Takabonerate.**

**Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.**

**Kayuadi, 31 Desember 2022**
**CAMAT TAKABONERATE,**

**ANDI CACO AMRAS, S.T.,M.M.**
**Pangkat : Pembina**
**Nip. 19751010 200604 1 025**

9/12/2025

# PROFIL

## Kecamatan Pasimasunggu

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2025

## 1. Gambaran Umum Kecamatan Pasimasunggu

Kecamatan Pasimassunggu terdiri dari 7 Desa dan memiliki luas wilayah sekitar 131,80 km². Desa dengan wilayah terluas di kecamatan tersebut adalah Desa Ma'Minasa dengan luas sekitar 34,06 km² dan Desa dengan wilayah terkecil adalah Desa Massungke dengan luas sekitar 16,33 km². Kecamatan Pasimassunggu berjarak kurang lebih 97 km dari Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Benteng.

### a. Tugas, fungsi dan Struktur Kecamatan Pasimasunggu

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasimasunggu mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasimasunggu :

1) Tugas

A. CAMAT

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk pelaksanaan tugasnya Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Camat meliputi :

- menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan pelaksanaan Tugas Camat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SEKRETARIS

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
2. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
3. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
4. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;

- melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- mengelola administrasi umum;
- melaksanakan pembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
- mengelola administrasi keuangan;
- melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
- melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Camat membawahi Sub bagian yang terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
g. melakukan pelayanan teknis administrasi Kecamatan;
h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
j. memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;
n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
p. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;

q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
v. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Subbagian Program dan Keuangan serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai Tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksnaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

f. Memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
g. Melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
h. Melakukan pembinaan Desa/Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
i. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
j. Melakukan inventarisasi asset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
k. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
l. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai Tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
g. Melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
h. Melakukan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
i. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
j. Memfasilitasi penegakan Peraturan daerah bersama PPNS;
k. Melakukan pengamanan kebijakan Peraturan daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;
l. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
m. Melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 75 Tahun 2016, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai Tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegitan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. Melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
i. Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
j. Memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. Menyiapkan rekomendasi perijinan tertentu;
l. Memfasilitasi pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan;
m. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekomomian;
n. Memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah daerah;
o. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;

p. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
q. Memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
r. Memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
s. Mengumpulkan dan mengelola data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
t. Menyiapkan rekomendasi dan perizinan tertentu;
u. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;
v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan social.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai Tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
g. Melakukan pembinaan dibidang mental dan keagamaan;
h. Mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
i. Mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
j. Melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial;
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## G. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

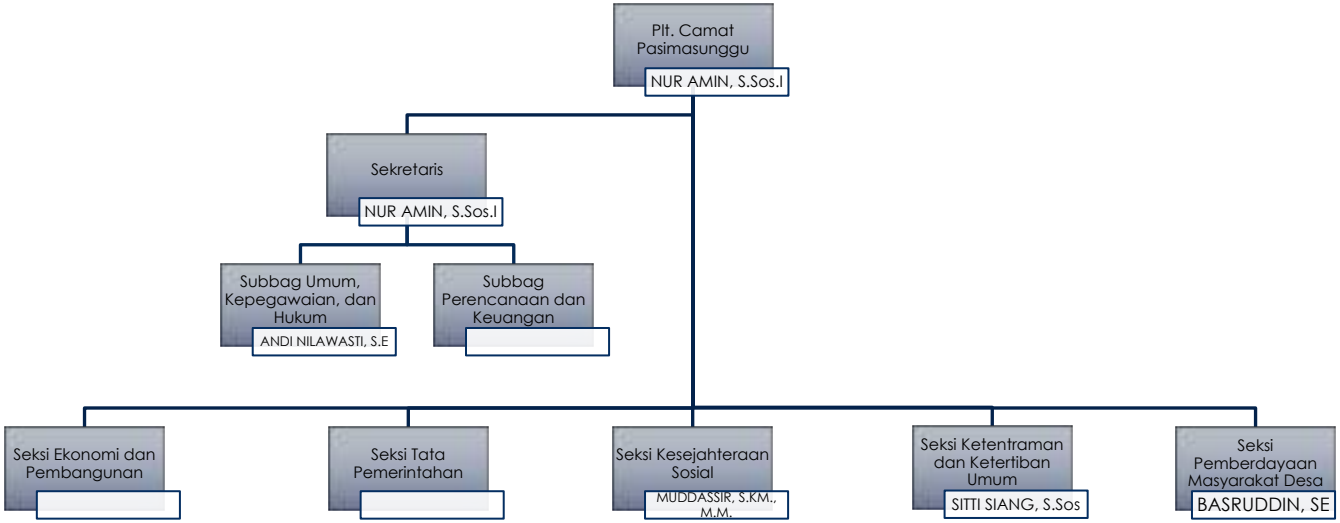
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Desa sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. Melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
h. Menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
i. Memfasilitasi pembinaan generasi muda, olahraga dan seni budaya;
j. Melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
k. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2) Fungsi Kecamatan
   1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
   2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;

3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

3) Struktur Organisasi

# STRUKTUR ORGANISASI




**Gambar 2.1.1.** Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu

**b. Sumber Daya**

1) Sumber Daya Manusia

Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

**Tabel 2.1.3**.
Data PNS Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar
Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | | PROSENTASE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | CPNS | PNS | CPNS |
| **1** | S2 | 2 | 0 | 11,11% | 0 |
| **2** | S1 | 6 | 0 | 33,33 % | 0 |
| **3** | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | SLTA | 10 | 0 | 33,33 % | 0 |
| **5** | STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 18 | 0 | 100 % | 0 |

Tingkat Pendidikan PNS di kecamatan pasimasunggu di dominasi oleh SLTA sebanyak 10 orang Strata Dua 2 orang dan Strata Satu sebanyak 6 orang.

**Tabel 2.1.4.**
Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

| No | Gol. Ruang | Tingkat Pendidikan Formal (orang) | | | | | | | | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | |
| **1** | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **2** | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | IV/a | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| **4** | III/d | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| **5** | III/c | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| **6** | III/b | -- | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| **7** | III/a | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **8** | II/d | - | - | - | | - | 2 | - | - | 2 |
| **9** | II/c | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| **10** | II/b | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **11** | II/a | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| **Jumlah** | | 2 | 6 | - | - | - | 10 | - | - | 18 |

Tingkat Pendidikan terbagi dalam beberapa golongan dimulai dari Golongan II/a hingga Golongan IV/a

# PROFIL

KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2025

# PROFIL KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR

## Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa;

Adapun uraian tugas Pemerintah Kecamatan, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Uraian Tugas Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur

| No | Tugas Umum Pemerintahan | Uraian Tugas |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat | a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musrembang di tingkat desa dan kecamatan;<br>b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur baik yang dilakukan oleh unit |

| | | |
|---|---|---|
| | | kerja pemerintah maupun swasta;<br>d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan; dan<br>e. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat; |
| 2 | Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; | a. Melakukan koordinasi dengan Aparat Keamanan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan Pasimasunggu Timur untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban;<br>c. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; |
| 3. | Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; | a. Melakukan koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;<br>b. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati. |
| 4. | Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; | a. Melakukan koordinasi dengan SKPD/ instansi vertikal yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;<br>b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam melaksanakan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum;<br>c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan sarana dan fasilitas umum di wilayah kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati. |
| 5. | Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat | a. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan |

| | | |
|---|---|---|
| | kecamatan; | kegiatan pemerintahan;<br>b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;<br>c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;<br>d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati. |
| 6. | Membina penyelenggaraan pemerintahan desa; | a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;<br>b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa;<br>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa;<br>d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa;<br>e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati. |
| 7. | Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa | a. Melakukan perencanaan pelayanan masyarakat lingkup kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>b. Melakukan percepatan pencapaian standar Pelayanan Minimal dalam lingkup Kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;<br>d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur;<br>e. Melaporkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Pasimasunggu Timur kepada Bupati. |

Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor  Tahun 2020, selain menyelenggarakan tugas umum pemerintahan tersebut di atas, juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

a. Perizinan;
b. Rekomendasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan; dan
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi pemerintah kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Adapun susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

a. Camat;
b. Sekretaris Camat;
c. Kepala Seksi Pemerintahan
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
e. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.
g. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

(1) Camat mempunyai Tugasmembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangurusan otonomi daerahyang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CamatmempunyaiFungsi:
   a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
   b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
   c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
   d. pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
   e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menyusun rencana kegiatan Kecamatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
   b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
   c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
   d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
   f. melaksanakanurusan pemerintahan umum;
   g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
   l. melaksanakan pembinaan di bidang mental dan keagamaan
   m. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

n. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
o. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
p. melaksanakan Tugas yang dilimpahkan oleh Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
q. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;

r. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
s. menyusun laporan pelaksanaan TugasCamat dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai Tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Kecamatan.
(2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyaiFungsi:
   a. pengoordinasian pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Kecamatan;
   b. pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
   c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
   d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
   e. pelaksanaanFungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.
(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan program kerja;
g. melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
h. mengelola administrasi umum;
i. melaksanakanpembinaan dan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
j. mengelola administrasi keuangan;
k. melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur kecamatan;
l. melaksanakan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
n. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
o. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

(2) Uraian Tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan

Keuanganuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan penyiapan bahan dan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
g. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan kecamatan;
h. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
i. menyusun rencana pelaksanaan dan perhitungan anggaran;
j. melakukan verifikasi dan fasilitasi kebendaharaan;
k. melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan kecamatan;
l. melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
m. menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang meliputi realisasi anggaran bulanan, semesteran dan tahunan;
n. menyusun neraca keuangan kecamatan;
o. melakukan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
p. melakukan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
q. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
r. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
s. melakukan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
t. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
u. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;

v. menyusun laporan pelaksanaan TugasSubbagian Program dan Keuanganserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
w. melakukanTugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) SubbagianUmum, Kepegawaian, dan Hukumdipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pengelolaan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pemeliharaan dokumen kepegawaian;
g. melakukanpelayanan teknis administrasi Kecamatan;
h. melakukan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan dan penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat;
i. melakukan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris Kecamatan dan keprotokolan;
j. memeliharakebersihan, keindahan dan ketertiban kantor;
k. melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
l. melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
m. mengajukan pertimbangan hukum dalam lingkup kecamatan;

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
p. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukumdan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Tata Pemerintahandipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisbidang pemerintahan.
(2) Uraian Tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahansebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Tata Pemerintahanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. memfasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
g. melakukan pelayanan administrasi kependudukan, fasilitasi penyelenggaraan pertanahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
h. melakukan pembinaan desa/kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
i. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
j. melakukan inventarisasi aset atau kekayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Daerah serta kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
k. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknisdi bidang pemerintahan;

l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
m. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
f. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Tata Pemerintahandan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidangketenteraman dan ketertiban umum.

(2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumsebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban;
g. melakukan fasilitasi sistem keamanan lingkungan;
h. melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan;
i. melakukan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
j. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama penyidik pegawai negeri sipil;
k. melakukan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban;

l. melakukan penyusunan program, pedoman, petunjuk teknis penetraman terhadap pengaduan masyarakat dan melakukan upaya penyelesaian sengketa;
m. melakukan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi, dokumentasi, perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan;
n. melakukan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
o. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
r. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umumserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ekonomi dan pembangunan.
(2) Uraian Tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Ekonomi dan Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan bidang perekonomian meliputi perindustrian dan perdagangan, koperasi, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

g. menyiapkan bahan penerbitan dan penandatanganan izin mendirikan bangunan rumah tinggal sesuai dengan ketentuan;
h. melakukan fasilitasi bidang pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
i. melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan statistik pertanian secara periodik;
j. melakukan pendataan obyek dan subyek pajak, retribusi serta pendataan lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. memfasilitasi pengawasan dan pengendalian bidang sumber daya alam meliputi perhutanan, kepariwisataan, pertambangan dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
l. memfasilitasi pengembangan perekonomian desa/kelurahan;
m. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian;
n. memantau pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
o. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan;
p. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan;
q. memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan jembatan dan pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang;
r. memantau dan pengendalian kegiatan bidang pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan dan jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman;
s. memfasilitasi pengelolaan bidang pengembangan sumber daya air, prasarana jalan, jembatan dan perumahan, pemukiman sesuai dengan rencana tata ruang;
t. mengumpulkan dan mengelolah data dibidang pengembangan jalan dan jembatan, perumahan, pemukiman serta penyehatan lingkungan;
u. melakukan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pembangunan;

v. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pengedalian evaluasi kebijakan teknis di bidang ekonomi dan pembangunan;
w. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
x. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
y. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Ekonomi dan Pembangunanserta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
z. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camat dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

(2) Uraian tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Kesejahteraan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapatsesuai bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial;
h. melakukan pembinaan di bidang mental dan keagamaan ;
i. mengoordinasikan kegiatan dibidang rehabilitasi kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan perlindungan sosial serta pengembangan dan pemberdayaan sosial;
j. mengoordinasikan pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;

h. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
j. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
k. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
l. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

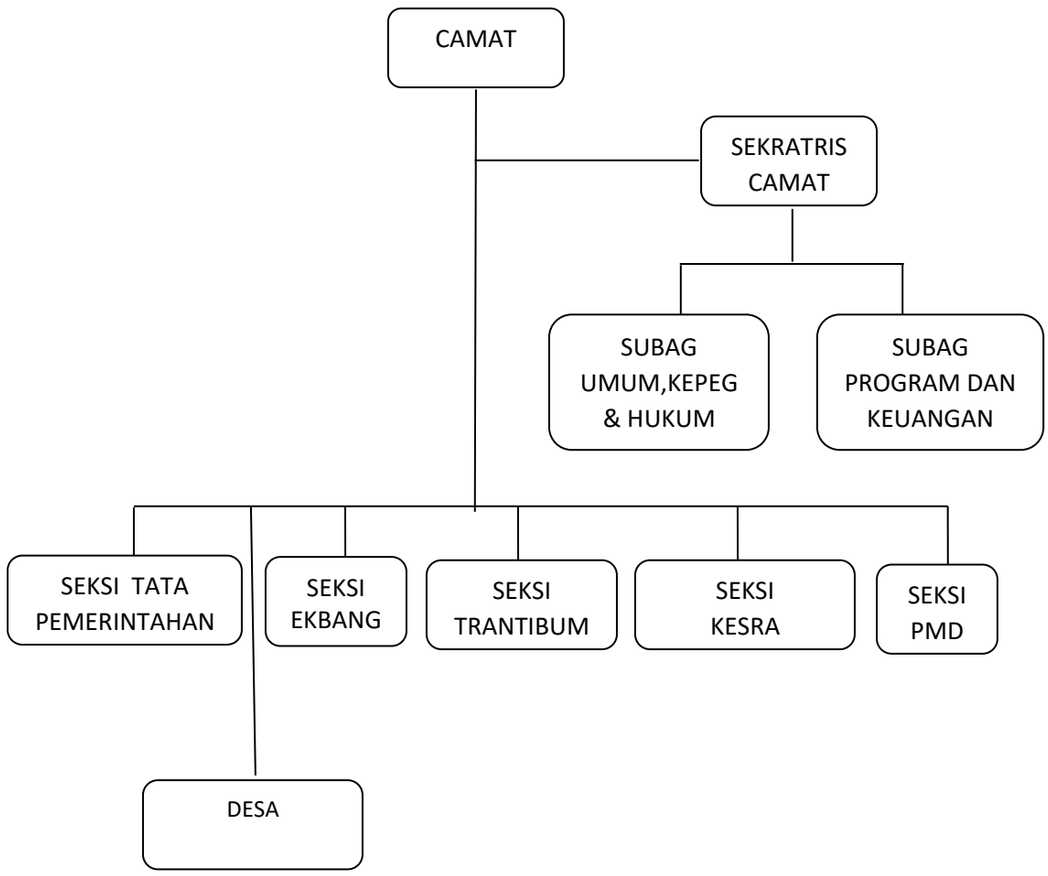
(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahandipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai Tugasmembantu Camatdalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Uraian tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahansebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapatsesuai bidang tugasnya;
f. melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat meliputi fasilitasi pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengembangan masyarakat Kelurahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
g. melakukan fasilitasi dan pelayanan kesejahteraan sosial meliputi fasilitasi sosial, ketenagakerjaan, transmigrasi, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan kehidupan keagamaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;

h. menginventarisasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan masalah sosial;
i. memfasilitasi pembinaan generasi muda, olah raga dan seni budaya;
j. mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, pengedalian dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
l. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undang;
f. menyusun laporan pelaksanaan TugasKepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahandan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
g. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam menjalan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional, serta seluruh personil dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmelaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
(3) Camat, Sekretaris Camat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkungan Kecamatan Pasimasunggu Timurmengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur




## 2.1. Sumberdaya

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 34 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Honorer, dan Pol PP. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

| No | PEGAWAI | JUMLAH (ORANG) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | PNS | 13 | 34,21 |
| 2. | KONTRAK | 22 | 55,26 |
| 3. | HONORER | 1 | 5,26 |
| 4. | Pol PP | 2 | 5,26 |
| | JUMLAH | 38 | 100 |

Selanjutnya, berdasarkan jabatan struktural, kondisi pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Kecamatan Pasimasunggu Timur yang menduduki Jabatan dan Staf tahun 2021

| N0 | Jabatan/Staf | Jumlah (orang ) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Eselon III/a | 1 | |
| 2. | Eselon III/b | 1 | |
| 3. | Eselon IV/a | 4 | |
| 4. | Eselon IV/b | 1 | |
| 5. | Jabatan Fungsional Umum | - | |
| 6. | Staf Pelaksana | 6 | |
| | Jumlah | 13 | |

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

| N0 | Golonga | Jumlah (orang ) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | IV | 2 | 7,69 |
| 2. | III | 7 | 61,53 |
| 3. | II | 4 | 30,76 |
| 4 | I | 0 | 0 |
| | Jumlah | 13 | 100 |

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka status pendidikan dengan Strata-2 sebesar 7,69 %, Strata-1 sebesar 46,15 %, Diploma-3 sebesar 7,69 %, sedangkan tingkat SLTA sebesar 38,46 %. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.5

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

| N0 | Pendidikan | Jumlah (orang ) | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Strata-2 ( S2 ) | 1 | 7,69 |
| 2. | Strata-1 ( S1 ) | 7 | 46,15 |
| 3. | Sarjana Muda/ D3 | 1 | 7,69 |
| 4 | SLTA/SMK | 4 | 38,46 |
| 5 | SLTP | 0 | |
| | Jumlah | 13 | 100 |

Selanjutnya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur juga telah diberikan kewenangan untuk mengelola aset daerah sekaligus merupakan fasilitas kerja bagi aparat pemerintah di kecamatan.

**Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur**

Dalam sub bahasan ini, yang akan digambarkan adalah kinerja yang telah dicapai Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur pada periode 2025 - 2029. Berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029, Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur 2025 - 2029

| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | | |
|---|---|---|
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka reformasi birokrasi | • Jumlah RW tertib administrasi | 1 dokumen |
| | • Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun (profil kecamatan dan<br>• tipologi) | 2 dokumen |
| | • Pembinaan Desa (desa terbaik) | 2 kegiatan / tahun |
| | • SOP bidang pemerintahan yang tersusun | 2 SOP |
| Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan sistem manajemen kinerja | • SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan | 3 SOP |
| | • Analisis tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun | 3 dokumen |
| | • % PNS yang mendapat hukuman disiplin | 0% |
| | • Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam setahun | 100% |
| Memantapkan Sistem Pelayanan Publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (T-2) | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat | • % wajib KTP yang memiiki KTP | 95 |
| | • Indeks Kualitas Masyarakat | 75 (interval IKM : 60 – 80) |
| | • Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun | 5 SOP |
| Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan wawasan kebangsaan masyarakat | • Terbinanya kader Posyandu dan PKK | 2 kegiatan / pertahun |
| | • % Sekolah yang menerapkan UKS | 70 |
| | • Jumlah insiden akbat konflik agama | 0 |
| | • Jumlah rumah ibadah yang terfasilitasi mendapat bantuan | 3 buah |
| | • SOP lingkup pendidikan yang tersusun | 2 |
| Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal kewilayahan | | |
| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| Meningkatkan aktivitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan | • Jumlah UKM yang aktif | 3 unit |
| | • Jumlah Koperasi aktif | 1 unit |
| | • SOP bidang Ekbang tersusun | 1 SOP |
| | • Jumlah program kemitraan yang terjalin | 2 program |
| Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah dan pengelolaan sampah dengan 3 R *(reduce, Reuse, Recycle)* | • Jumlah pohon yang tertanam di kecamatan | 1500 pohon |
| | • Jumlah Kawasan Konservasi Laut Kecamatan (KKLK) yang terkelola | 1 KKLK |
| | • SOP bidang Lingungan Hidup yang tersusun | 2 SOP |
| Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat | • % penurunan pelanggaran K3 | 30% |
| | • % penurunan illegal logging | 40% |
| | • % penurunan illegal fishing | 40% |
| | • SOP bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun | 1 SOP |

## 2.2. Tantangan dan Peluang Pelayanan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur

### *1. Tantangan*

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

**a. Masih Banyaknya Rumah tangga yang belum memperoleh Akses Layanan Listrik**

Pemenuhan energi listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih dilakukan melalui swadaya masyarakat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap pelayanan energi listrik masih terbatas terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat electrivikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih rendah yaitu berada pada posisi 15% dari jumlah rumah tangga yang ada (10725 RT).

Tabel 2.13

Tingkat Electrivikasi di Kecamatan Pasimasunggu Timur
Tahun 2023

| No | Desa | Jumlah RT | RT ber-listrik | Tingkat Electrivikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Bontobaru | 1033 | 1033 | 100 |
| 2. | Bontojati | 1476 | 1476 | 100 |
| 3. | Bontobulaeng | 1786 | 1786 | 100 |
| 4. | Ujung | 1059 | 1059 | 100 |
| No | Desa | Jumlah RT | RT ber-listrik | Tingkat Electrivikasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Bontomalling | 1510 | 1510 | 100 |
| 6. | Lembang Baji | 1093 | 1093 | 100 |
| Kecamatan Pasimasunggu Timur | | 10725 | 10725 | 10725 |

Sumber : Profil Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2021

**b. Sistem pertanian masyarakat yang relatif masih bersifat subsisten**

Aktivitas masyarakat terutama pada sektor pertanian umumnya masih bersifat subsisten (hanyat terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga), belum dikembangkan dengan skala ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pasar, khususnya pasar di tingkat regional maupun nasional.

Kondisi ini menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat rendah dan perputaran investasi masyarakat juga relatif rendah.

**c. Masih terbatasnya pelayanan sarana transportasi antar pulau**

Sebagai kecamatan yang berada di wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 2 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke Ibukota Kabupaten, menyebabkan aparat pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasimasunggu Timur namun berdomisili dari daratan Selayar, terkadang lalai dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi antar pulau guna mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang dari dan ke Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**d. Kualitas Tenaga kerja yang tersedia relatif masih rendah**

Berdasarkan data yang ada pada Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, diketahui bahwa angka pengangguran tercatat sebesar 24,82%. Penyebab terjadinya pengangguran antara lain tingkat pendidikan yang rendah, serta lapangan kerja yang diminati para pencari kerja relatif terbatas. Selain itu, kapasitas dan kemampuan tenaga kerja yang ada juga relatif rendah, sehingga tidak dapat terserap ke dalam sektor-sektor ekonomi yang ada di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

Tabel 2.14

Tingkat Pengangguran di Kecamatan Pasimasunggu Timur

| No | Desa | Angkatan Kerja | Bekerja | Pencari Kerja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bontobaru | 376 | 310 | 66 |
| 2 | Bontojati | 544 | 327 | 217 |
| 3 | Bontobulaeng | 516 | 472 | 44 |
| 4 | Ujung | 617 | 506 | 111 |
| 5 | Bontomalling | 548 | 388 | 160 |
| 6 | Lembang Baji | 505 | 473 | 32 |
| Kecamatan Pasimasunggu Timur | | 4243 | 3190 | 693 |
| Tingkat Pengangguran | | | | 24.82 |

Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2022

**e. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya alam baik darat maupun laut;**

Potensi sumberdaya alam di Kecamatan Pasimasunggu Timur masih sangat besar baik potensi yang ada di wilayah darat maupun di wilayah laut. Namun jika dilihat dari produksi yang dihasilkan dari pemanfaatan potensi dimaksud, tergambar bahwa tingkat pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ada belum optimal.

Tabel 2.15

Potensi Komoditas Unggulan
di Kecamatan Pasimasunggu Timur

| No | Jenis Komoditas | Luas Lahan Pengembangan (Ha) | Produksi | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Padi | 1520 | 2875 | Ton / Tahun |
| 2 | Jambu Mete | 274 | 105 | Ton / Tahun |
| 3 | Kelapa | 1087 | 904 | Ton / Tahun |
| 4 | Kerbau | 1500 | 1105 | Ekor |
| 5 | Sapi | 2500 | 15000 | Ekor |
| 6 | Kambing | 1000 | 30000 | Ekor |
| 7 | Ayam | 1000 | 30000 | Ekor |
| 8 | Udang Sitto | 1000 | 30000 | Ekor |
| 9 | Ikan | 30000 | 5750 | Ton / Tahun |
| Sumber : Profile Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur, 2025 | | | | |

***2. Peluang***

Adapun peluang yang dimiliki Kecamatan Pasimasunggu Timur, adalah :

a. Potensi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang masih melimpah dengan nilai jual yang tinggi terutama di pasar global;
b. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kasar secara memadai;
c. Sebagian besar penduduk dari kelompok laki-laki usia produktif, umumnya perantau seingga berpotensi memiliki kekuatan jaringan yang kuat baik dari aspek ekonomi maupun sosial;
d. Terdapat beberapa lokasi yang potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata;
e. Komitmen Bupati Terpilih 2021 – 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis utama ekonomi daerah.

**Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur**

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, antara lain :

***1. Akses yang relatif jauh dari Ibukota Kabupaten***

Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan termasuk pemerintah desa, seringkali terganggu akibat jarak yang relatif jauh. Selain karena terpisah dengan laut yang terkadang karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, juga karena akses komunikasi yang masih sering mengalami gangguan.

***2. Masih terbatasnya SDM Aparat Kecamatan***

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab II mengenai gambaran pelayanan Kecamatan Pasimasunggu Timur, bahwa ketersediaan SDM Aparat masih jauh dari memadai. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari beberapa pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 8.628 jiwa tentunya membutuhkan ketersediaan SDM Aparat dengan jumlah yang memadai.

Kondisi SDM Aparat saat ini yang berjumlah 35 orang dengan beban tugas yang berat menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Pasimasunggu Timur.

**3. Masih rendahnya kualitas koordinasi di setiap sektor pemerintahan**

Dengan adanya keterbatasan Sumberdaya Aparatur Pemerintah di Kecamatan Pasimasunggu Timur, telah berdampak pada kualitas dan hubungan koordinasi antar sektor pemerintahan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari kinerja beberapa urusan pemerintahan meliputi : pendidikan, kesehatan, energi dan sumberdaya mineral, perhubungan, telekomunikasi, dan sektor-sektor lainnya relatif

masih rendah terlebih jika dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

**4. Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**

Penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat berdayaguna dan berhasilguna, apabila mendapat dukungan dan partisipasi aktif dari segenap komponen masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam memberikan partisipasinya pada setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Pasimasunggu Timur, disimpulkan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Hal ini disebabkan antara lain : tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat dirasakan sangat tinggi, sehingga untuk menyisihkan waktu dalam rangka terlibat dalam berbagai aktifitas pemerintahan dan pembangunan sangat sulit.

## 3.1. Telaah Program Bupati Kepulauan Selayar Terpilih 2021 – 2026

Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dalam pencapaian tujuan pembangunan terdapat sinkronisasi.Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan Pasimasunggu Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dirumuskan sebagai berikut :

***“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.***

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanaan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutaan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauaan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.

   Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunaan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutaan denganmemperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

## 3. 3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi Sulawesi Selatan

### 3.3.1 Telaah Renstra K/L Kemantrian Dalam Negeri

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggaran dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun factor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkatkan kualitas administrafi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasimasunggu Timur.

### 3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 – 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepiulauan Selayar 2021-2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
   a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
   b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
   d Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
   e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

   Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :
   a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
   b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
   c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
   d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
   e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
   a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
   b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
   c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
   d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
   e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
   f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
   g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

   Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :
   a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
   b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
   c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
   d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
   a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
   b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
   c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
   d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
   e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

   Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa
   a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
   b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
   c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
   d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
   e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program

Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT.Gerbagsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbagsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

## 3. 4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kapulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulaluan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten.

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana
d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten
l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

(1) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
   a. Mengembangan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
   b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
   c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
   e. Mengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
   f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
   g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki.

(2) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
   a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;

b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;

(3) Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
c. Menyusunan program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.

(4) Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan

e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.

(5) Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :

a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).

(6) Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan
d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.

(7) Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi,

dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

(8) Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :

a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;
b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.

(9) Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

(10) Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :

a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.

b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

(11). Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :

a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan kaeadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan

menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

(12). Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :

a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibu kota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru. Dengan adanya tambahan dua PKLp diharapkan jangkauan pelayanan pusat-pusat kegiatan tersebut dapat lebih efektif.Skala pelayanan PKL dan PKLp masing-masing meliputi beberapa kecamatan sehingga dengan adanya keempat pusat kegiatan ini, jangkauan pelayanannya dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

## 3. 5. Penentuan Isu-Isu Stategis

Issue strategis yang berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Pasimasunggu Timur timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan exsternal.

a. Issue-issue internal dilingkungan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Timur antara lain :

1) SDM yang belum profesional.

2) Prasarana belum lengkap.

3) Sistem kerja yang belum optimal.

b. Issue-issue eksternal strategis antara lain :

1) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antar golongan .

2) Perkembangan/Penataan Permukiman yang asri.

3) Peningkatan Potensi pengembangan Jasa Perdagangan.

4) Akses Informasi terpadu belum tersedia.

5) Masih banyak terdapat tumpang tindih lahan.

6) Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

7) Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

8) Belum terciptanya suasana lingkungan yang bersih dan indah

9) Belum adanya sarana promosi yang representative.

10) Adminsitrasi kependudukan masih belum termanagemen dengan baik

11) Tidak ada Peran perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat

12) Belum tersedianya lapangan olah raga yang memadai

3.1 ANALISA

Perencanaan stategik instansi Pemerintah memerlukan intergrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber

Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun exsternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

a. Kekuatan ( Strengths )

a. Tersedianya dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

b. Tersedianya jumlah SDM.yang relative cukup mamdai

c. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan ulama.

b. Kelemahan ( Weakness )

a. Pelayanan masih belum prima

b. Aparatur belum profesional

c. Belum tersedianya personil tramtib / satpol PP

d. Belum adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Kecamatan dan Desa

c. Peluang ( Opportunites )

a. Berkembangnya permukiman yang dihuni oleh masyarakat terdidik.

b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan.

c. Berkembangnya sarana perdagangan tingkat ekonomi masyarakat

d. Kondisi masyarakat yang Heterogen.

e. Tersedianya lahan pertanian / perkebunan dan permukiman.

d. Ancaman ( Threats )

a. Keamanan dan Ketertiban disebabkan sengketa lahan

b. Kesenjangan kesempatan kerja antara penduduk lokal dan pendatang

c. Banjir

3.2 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pasimasunggu Timur , faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.

2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.

3. Tersedianya sarana tramtib.

4. Tersediannya sarana evakuasi korban bencana

5. Tersedianya sarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

6. Tersedianya sarana pendidikan Kejuruan ( SLTA) yang berkualitas dalam rangka menyiapkan SDM yang siap pakai

7. Adanya sarana Kesehatan yang refresntatif

8. Tersedianya sarana Telekomunikasi perdesaan

9. Adanya kesadaran terhadap pentingnya tramtib.

10. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.

11. Tersedianya mekanisme proses pelayanan Perekaman E-KTP.

12. Tersosialisasai perda-perda

13. Tersedianya data umum yang akurat.

14. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.

15. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi dan teknolgi

16. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.

17. Tersedia bantuan dan akses permodalan.

18. Tersedianya sarana promosi.

19. Tersedianya aparat pemerintahan desa yang berkualitas

ISU INTERNAL

a. Kekuatan

1. S D M

- Untuk melaksanakan tugas pemerintahan, Kecamatan Pasimasunggu Timur dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub bagian , dan Staf

2. Anggaran

- Dalam melaksanakan segala kegiatan pemerintahan, tentu tidak terlepas dengan dukungan anggaran yang cukup sebagaimana volume kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran

3.Infrastruktur

- Untuk menunjang keselamatan, Kesehatan, dan kenyamanan kerja dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Infrastruktur Kecamatan masih memenuhi syarat.

b. Kelemahan

1. S D M

Dengan melihat jenjang pendidikan yang menjadi kelemahan adalah masih belum meratanya yang menerima jenjang pendidikan Non Formal seperti Diklat- diklat yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah.

2. Anggaran

- Dengan semakin banyaknya Volume kegiatan pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih perlu ada penyesuaian anggaran yang cukup.

3. Inprastruktur

- Dengan berkembangnya penduduk di Kecamatan Pasimasunggu Timur, maka infrastruktur yang ada perlu peningkatan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

ISU EKSTERNAL

a. Peluang :

1. Ekonomi

a. Pertambangan Mineral Logam dan Non Logam

Dalam rangka pengembangan sumber daya alam kecamatan Pasimasunggu Timur Pertambangan Mineral merupakan salah satu pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

b. Perkebunan

Dalam rangka pengembangan perkebunan telah diadakan penyuluhan secara intensif oleh Petugas. Perkebunan yang ada yaitu Sawah Perkebunan Kelapa dan perkebunan Jambu Mente. Perkebunan saat ini menjadi pilar peningkatan ekonomi di masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur.

c. Pertanian

Usaha-usaha yang dicapai dalam pembangunan pertanian di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur menunjukkan perkembangan yang cukup baik,sebagaian besar petani telah melaksanakan pola tanam dan pengairan yang semakin baik.

1d. Peternakan

Dalam rangka pengembangan budi daya ternak telah diadakan Bantuan Hewan Ternak Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan maksud memasyarakatkan beternak utamanya bagi Masyarakat di Pedesaan untuk tambahan dalam meningkatkan pendapatan. Hampir sebagian masyarakat di desa-desa kecamatan Pasimasunggu Timur mempunyai ternak yaitu ternak Kerbau, sapi dan kambing.

e. Pariwisata

Dalam rangka pengembangan pariwisata, di Kecamatan Pasimasunggu Timur berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat Pariwisata alam Air Terjun dan Pantai pasir putih berpotensi Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Kondisi Sosial dan Budaya masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur sampai saat ini sangat bersahabat saling mendukung, saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Sehingga mudah menerima dan mau mengadopsi untuk menuju kebaikan

b. Ancaman

1. Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur yang sebagian besar bergerak dibidang Perdagangan dan Perkebunan apabila terjadi gejolak Ekonomi yang tidak diinginkan terutama masalah harga komuditi pertanian, maka Masyarakat Kecamatan Pasimasunggu Timur akan mudah terpengaruh.

2. Bencana Alam

Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur rentan terhadap bahaya banjir terutama di daerah bantaran sungai. Bahaya longsor juga rentan terjadi di Wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur Terutama Di Daerah arah Menuju Lereng Bukit.

3. Pengaruh Regional dan Global

Pengaruh Regional dan Global yang menjadi ancaman pada masyarakan Kecamatan Pasimasunggu Timur adalah dengan mengingat kegiatan usaha dan SDM serta pengalaman yang dimiliki masih relatip minim dan cenderung belum mampu dalam diversifikasi usaha maka yang terjadi kegiatan usahanya akan jalan ditempat. Sehingga sangat perlu untuk peningkatan SDM baik melalui jalur formal maupun non formal.

**CAMAT PASIMASUNGGU TIMUR,**

**MUHAMMAD RUSTAN R, S.Pd**
Pangkat : Pembina IV/a
Nip. 197303071993081002

# BAB I
# PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, adalah merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menggunakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian lokal serta untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah berdasarkan sumber daya yang ada serta tetap dikonstruksikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berangkat dari asumsi di atas, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah suatu rangkaian dari bagian yang tidak terpisahkan dengan tugas-tugas Kecamatan yang merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Kecamatan dibentuk di Wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah, berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimana Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan pada tingkat Kecamatan, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai beberapa kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan. Kewenangan tersebut berupa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi kecamatan itu sendiri. Perubahan fungsi kecamatan memungkinkan dilaksanakannya beberapa kegiatan yang sifatnya lintas sektor sebagai perpanjangan jalur koordinasi dengan dinas-dinas terkait.

Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 telah banyak memberikan perkembangan yang cukup signifikan namun bukan berarti kegiatan yang dilaksanakan tidak berlanjut lagi.Hasil yang telah diperoleh diharapkan ada peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis kecamatan sebagai tindaklanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tingkat Kabupaten.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kecamatan Pasimarannu menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepada Bupati dengan memperhatikan kondisi wilayah dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam Wilayah Kecamatan.

## 1.1. Gambaran Umum OPD

Gambar 1

Kantor Kecamatan Pasimarannu



Pasimarannu adalah salah satu dari sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pasimarannu berjarak sekitar 119 mil dari Kota Benteng dengan waktu tempuh perjalanan laut ± 12 Jam. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasimarannu dilaksanakan di Kantor

Kecamatan yang bearalamat di Jln. Majapahit No. 356 Bonerate Kode Pos 92862 (email : kecamatanpasimarannubonerate@gmail.com). Titik Koordinat Kantor Kecamatan Pasimarannu : **-7.359951,121.086003.** Kecamatan Pasimarannu terdiri dari 8 (delapan) Desa dan 26 (dua puluh enam) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut, yaitu :

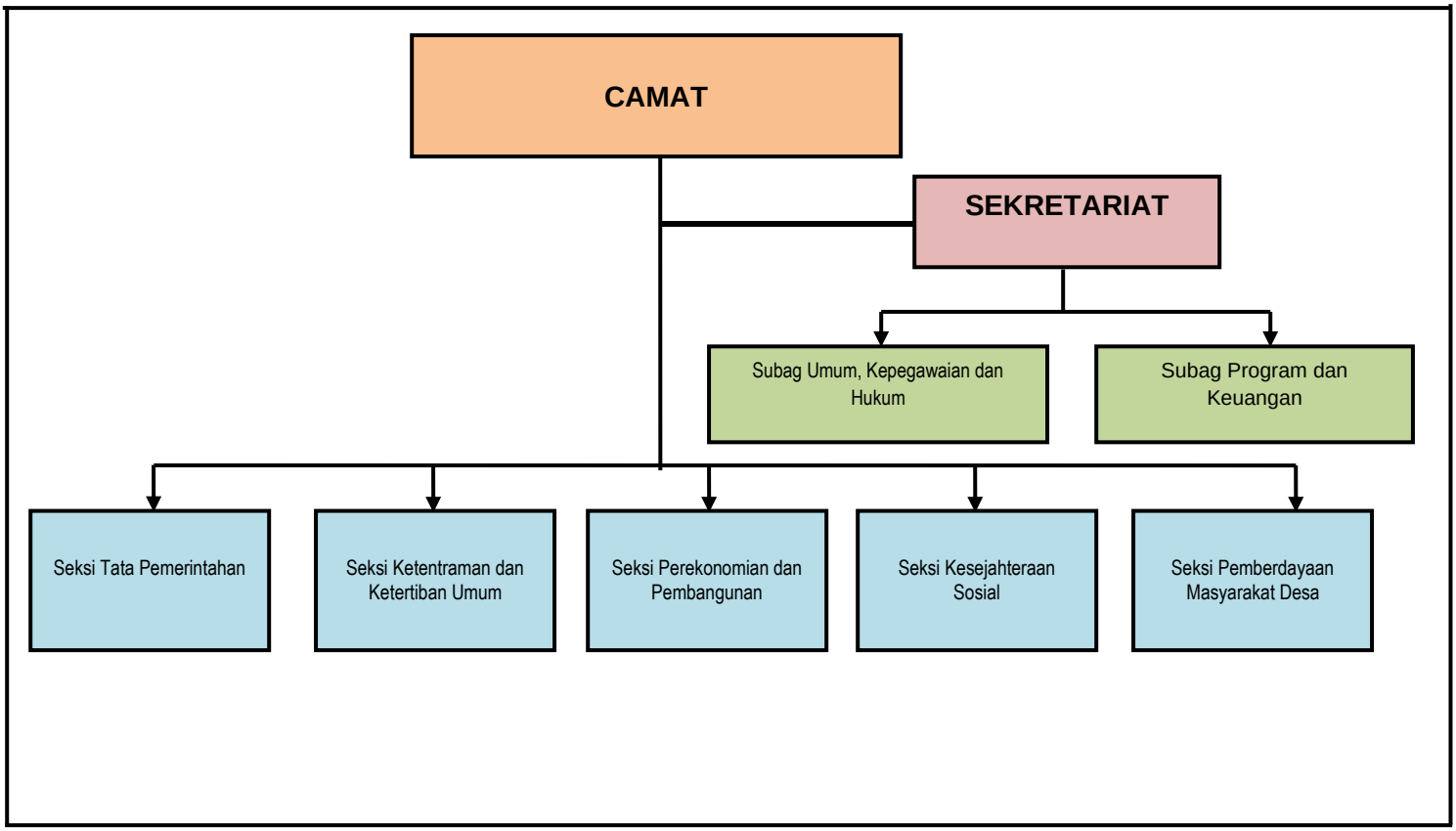
| No. | Desa | Jml KK | Lk | Pr | Jml |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bonerate | 487 | 724 | 783 | 1507 |
| 2. | Majapahit | 778 | 1115 | 1275 | 2390 |
| 3. | Lamantu | 435 | 716 | 773 | 1489 |
| 4. | Batu Bingkung | 441 | 691 | 692 | 1383 |
| 5. | Bonea | 372 | 496 | 590 | 1086 |
| 6. | Sambali | 367 | 597 | 621 | 1218 |
| 7. | Lambego | 274 | 457 | 507 | 964 |
| 8. | Komba-Komba | 207 | 365 | 340 | 705 |
| Jumlah | | 3.362 | 5.161 | 5.581 | 10.742 |

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Pasimarannu dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun susunan Organisasi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut :

Gambar 2

Struktur Organisasi Kecamatan Pasimarannu




Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, dijelaskan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (pasal 4). Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksudkan dalam pasal 4 tersebut, kecamatan sebagaimana diuraikan pasal 4 mempunyai tugas dan fungsi :

(1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyeleggarakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

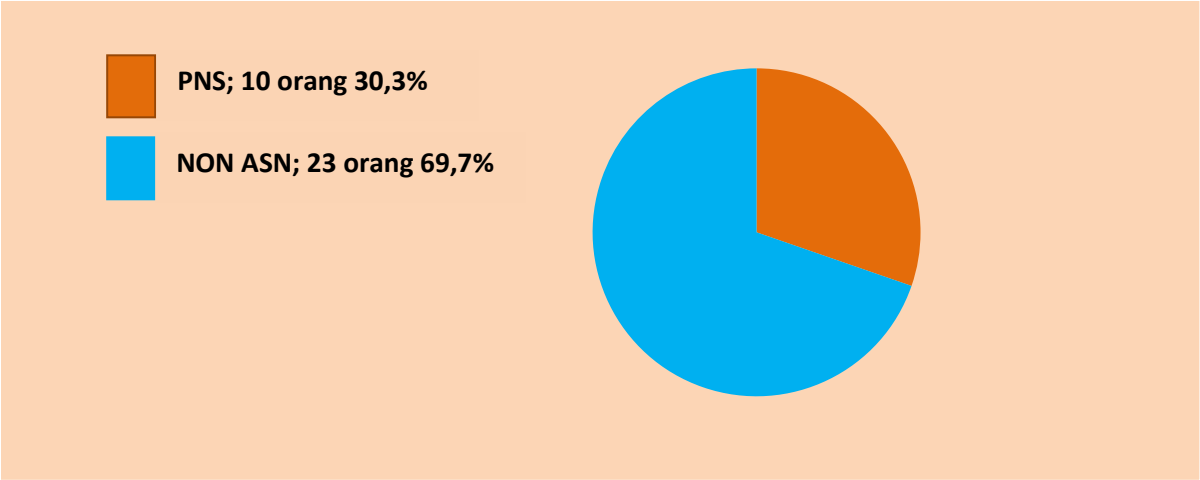
(2) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang urusan otonomi daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah;
d. Pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.

Sumber Daya Manusia menjadi kunci kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerja sama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada 1 (satu) sumber, yaitu Manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam penulisan ini antara lain jumlah pegawai, tingkat pendidikan dan kepangkatan. Dilihat dari perspektif Sumber Daya Manusia sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Kecamatan Pasimarannu didukung sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang terdiri dari 10 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 23 0rang berstatus Non ASN.

Gambar 3
Kondisi SDM Kecamatan Pasimarannu
Berdasarkan Status Kepegawaian




Tabel 1
Data Pegawai Kecamatan Pasimarannu
Tahun 2021

| NO. | NAMA PEGAWAI / NIP | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | **SYAMSIL, S.Sos**<br>Pangkat : Pembina, IV/a<br>NIP : 19680204 198903 1 009 | CAMAT |
| | | |
| 2. | **RAHMAT KARYADI YUSUF, S.Pi, M.M**<br>Pangkat : Pembina, IV/a<br>NIP : 19790205 200604 1 021 | SEKRETARIS |
| 3. | **ABD. HAMID, S.KM**<br>Pangkat : Penata, III/c<br>NIP : 19730110 199403 1 003 | KASI<br>KESEJAHTERAAN<br>SOSIAL |
| 4. | **SAMSUDDIN, S.T**<br>Pangkat : Penata, III/c<br>NIP : 19760218 200003 1 004 | KASI KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM |
| 5. | **ANDI ABRIADIE, S.Sos.** | KASUBAG PROGRAM DAN |

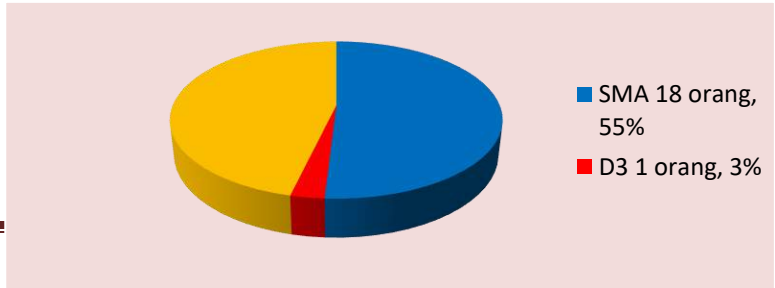
| | | |
|---|---|---|
| | Pangkat : Penata Muda Tk. I, III/b<br>NIP : 19661005 199103 1 010 | KEUANGAN |
| 6. | **RAIL, SE**<br>Pangkat : Penata Muda, III/a<br>NIP : 19750815 200906 1 002 | KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM |
| 7. | **MUHAMMAD KASIM, A.Md**<br>Pangkat : Pengatur Tk. I, II/d<br>NIP : 19780328 201212 1 001 | STAF |
| 8. | **MUH. TAHIR, P.**<br>Pangkat : Pengatur Muda Tk. I, II/b<br>NIP : 19711021 200701 1 021 | STAF |
| 9. | **ROSDALINA**<br>Pangkat : Pengatur Muda, II/a<br>NIP : 19740721 201001 2 002 | STAF |
| 10. | **BASRI**<br>Pangkat : Pengatur, II/d<br>NIP : 19690701 200906 1 006 | STAF |
| 11. | **NUR LAELA** | PHL |
| 12. | **SUKMAWAN** | PHL |
| 13. | **ROSMAWATI, S.Pd** | PHL |
| 14. | **UCIARNI, S.Pd.I** | PHL |
| 15. | **ARIFIN ADAM** | PHL |
| 16. | **ABDULLAH** | PHL |
| 17. | **HAPSARI** | PHL |
| 18. | **SAMIATI** | PHL |
| 19. | **NURJANNAH** | PHL |

| | | |
|---|---|---|
| 20. | **NURHAYATI** | PHL |
| 21. | **MULIANA, SE** | PHL |
| 22. | **FARIDAWATI ASIS, SE** | PHL |
| 23. | **MUH. NUR ASLI** | PHL |
| 24. | **SITI HAJAR, SE** | PHL |
| 25. | **MIKIAL, SE** | PHL |
| 26. | **NUR HIDAYAH, S.Sos** | PHL |
| 27. | **NORMAN QADDAS, S.Kom** | PHL |
| 28. | **SALFIANA, S.E** | PHL |
| 29. | **ISHAK, S.E** | PHL |
| 30. | **NUR FITRAH** | PHL |
| 31. | **MULIATI** | HONORER |
| 32. | **HIJRIANTI, SE** | HONORER |
| 33. | **HUMAIDA TUZZAHRA, S.Ak** | HONORER |

Dari total jumlah SDM tersebut, 18 orang atau 55% berpendidikan S.1, 1 orang atau 3% berpendidikan D3, dan 14 orang atau 42% berpendidikan SMA.

Gambar 4

Komposisi SDM Kecamatan Pasimarannu Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sementara itu, dari sembilan jabatan struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, hanya lima jabatan struktural yang terisi yaitu Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan. Empat jabatan lainnya masih lowong hingga saat ini.

Tabel 2

Jumlah Jabatan Struktural Kecamatan Pasimarannu Tahun 2021

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | ESELON | | | | JUMLAH | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IIIa | IIIb | IVa | IVb | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Terisi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 2. | Lowong | - | - | 4 | - | 4 | |
| **J u m l a h** | | | | | | **9** | |

Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan harus memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

# BAB II

# HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Unsur Kewilayahan** | **Kecamatan Pasimarannu** | **Renja Tahun 2022** | I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 100 % | 97,88 % | | | |
| | | | | | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | | | |
| | | | | | Rp. 1.620.075.400,00 | Rp. 1.581.583.684,00 | | | |
| | | | | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 24.697.000,00 | Rp. 24.697.000,00 | | | |
| | | | | a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 100 %<br>2 Dokumen | 100 %<br>2 Dokumen | | | |
| | | | | | Rp. 12.306.000,00 | Rp. 12.306.000,00 | | | |
| | | | | b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 100 %<br>2 Dokumen | 100 %<br>2 Dokumen | | | |
| | | | | | Rp. 12.391.000,00 | Rp. 12.391.000,00 | | | |
| | | | | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 96 % | | | |
| | | | | | Rp. 982.604.000,00 | Rp. 944.112.284,00 | | | |

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 %<br>12 Bulan | 96 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 977.453.000,00 | Rp. 938.961.284,00 | | | |
| | | | | b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 100 %<br>3 Dokumen | 100 %<br>3 Dokumen | | | |
| | | | | | Rp. 5.151.000,00 | Rp. 5.151.000,00 | | | |
| | | | | 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 5.322.000,00 | Rp. 5.322.000,00 | | | |
| | | | | a. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 5.322.000,00 | Rp. 5.322.000,00 | | | |
| | | | | 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 428.398.400,00 | Rp. 428.398.400,00 | | | |
| | | | | a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %<br>1 Unit | 100 %<br>1 Unit | | | |
| | | | | | Rp. 168.683.000,00 | Rp. 168.683.000,00 | | | |

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 4.407.400,00 | Rp. 4.407.400,00 | | | |
| | | | | c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 7.080.000,00 | Rp. 7.080.000,00 | | | |
| | | | | d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 248.228.000,00 | Rp. 248.228.000,00 | | | |
| | | | | 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 121.294.000,00 | Rp. 121.294.000,00 | | | |
| | | | | a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 16.302.000,00 | Rp. 16.302.000,00 | | | |
| | | | | b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 104.992.000,00 | Rp. 104.992.000,00 | | | |

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 57.760.000,00 | Rp. 57.760.000,00 | | | |
| | | | | a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 10.010.000,00 | Rp. 10.010.000,00 | | | |
| | | | | b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 3.100.000,00 | Rp. 3.100.000,00 | | | |
| | | | | c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %<br>2 Unit | 100 %<br>2 Unit | | | |
| | | | | | Rp. 44.650.000,00 | Rp. 44.650.000,00 | | | |
| | | | | II. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | | | |
| | | | | | Rp. 185.003.000,00 | Rp. 185.003.000,00 | | | |

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 185.003.000,00 | Rp. 185.003.000,00 | | | |
| | | | | a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100 %<br>8 Desa | 100 %<br>8 Desa | | | |
| | | | | | Rp. 35.794.000,00 | Rp. 35.794.000,00 | | | |
| | | | | b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |
| | | | | | Rp. 149.209.000,00 | Rp. 149.209.000,00 | | | |
| | | | | III. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | | | |
| | | | | | Rp. 9.600.000,00 | Rp. 9.600.000,00 | | | |
| | | | | 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum******) | 100 % | 100 % | | | |
| | | | | | Rp. 9.600.000,00 | Rp. 9.600.000,00 | | | |
| | | | | a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia | 100 %<br>12 Bulan | 100 %<br>12 Bulan | | | |

| NO | URUSAN PEMERINTA-HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan******) | Rp. 9.600.000,00 | Rp. 9.600.000,00 | | | |

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

| NO | URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5=(4/3)*100 | 6 |
| 1 | **Urusan Kewilayahan** | | | | | |
| | **Kecamatan Pasimarannu** | | | | | |
| | 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan | % | 100 | 73 | 73 | |
| | 2. Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan | % | 100 | 91 | 91 | |
| | 3. Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan | % | 100 | 85 | 85 | |

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

| NO | URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5=(4/3)*100 | 6 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

| No. | UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Sisa Anggaran (Rp) | Capaian RealisasiAnggaran (%) | Jumlah Indikator Kinerja Program | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%) | Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan | Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6=(4/3)*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Urusan Kewilayahan** | | | | | | | | |
| . | Kecamatan Pasimarannu | Rp. 1.814.678.400,- | Rp. 1.776.186.684,- | Rp. 38.491.716,- | 97,88 | 3 | 99,29 | 8 | 99,5 |

2.1.5. Inovasi

| NO | URAIAN INOVASI | MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI | HASIL/ MANFAAT | KET. |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

| No. | Nama Penghargaan | Tingkat | | | | Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Internasional | Nasional | Provinsi | Kabupaten | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah

| No | Kebijakan Strategis | Dasar Hukum | | Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Nomor/ Tanggal Pengesahan | Tentang | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

| No. | Rekomendasi DPRD | Tindak Lanjut | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |

| No. | Rekomendasi DPRD | Tindak Lanjut | Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | | | |

BAB III

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

## 3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan Yang Dilaksanakan

*Kecamatan Pasimarannu tidak menyelenggarakan urusan/kegiatan yang dimaksud.*

## 3.2. Hambatan – Hambatan

***Permasalahan***

Pada Tahun 2022 Pandemi Covid-19 masih berlangsung. Hampir seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dua tahun sebelumnya. Nyaris pada saat bersamaan kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Masyarakat tidak lagi mampu secara normal untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Demikian halnya di pelayanan Kantor Kecamatan Pasimarannu, seluruh kegiatan administrasi cenderung mengalami penurunan pelayanan masyarakat. Hal ini diakibatkan adanya kekhawatiran masyarakat akan penularan covid-19.

Secara umum permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pasimarannu adalah sebagai berikut:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang belum optimal;
2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah.

***Solusi***

Kecamatan Pasimarannu mencoba untuk memahami kondisi perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Ini

dilakukan untuk memberikan dukungan moril maupun materil serta usaha-usaha dalam meningkatkan perekonomian pada kondisi sekarang ini.

Penanganan Covid-19 di Kecamatan Pasimarannu telah dilakukan bersama stakeholder terkait dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan vaksinasi. Hal ini diharapkan dapat menurunkan kehawatiran masyarakat Pasimarannu dalam melakukan aktifitas termasuk didalamnya mendapatkan pelayanan maksimal di Kantor Kecamatan Pasimarannu.

Dukungan APBD 2022 yang ada dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna demi mencapai target organisasi yang diharapkan. Aktifitas pemerintahan diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pembangunan daerah. Melalui pendekatan kebutuhan diharapkan APBD pada tahun berikutnya lebih dapat mengakomodasi keperluan kewilayahan.

Secara umum solusi yang dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan Dukungan Sumber Daya Manusia;
2. Mengefektifkan fasilitas yang tersedia guna menyelesaikan program dan kegiatan kecamatan;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya peran wanita dan berusaha menjaga hubungan dengan Tokoh Masyarakat , Agama, Pemuda yang ada di Wilayah Kecamatan Pasimarannu.

# BAB IV
# PENUTUP

Dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Kecamatan Pasimarannu telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Laporan ini dibuat secara partisipatif, dengan berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kecamatan Pasimarannu Tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kecamatan Pasimarannu demi terciptanya tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlu ada komunikasi dan kerjasama agar dalam penyelesaian program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dibuat secara kontinyu untuk mengetahui jumlah anggaran yang digunakan dan terealisasinya dalam setiap program dan kegiatan khususnya di Kecamatan Pasimarannu.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi motifasi untuk mencapai tujuan akhir bersama Amien.

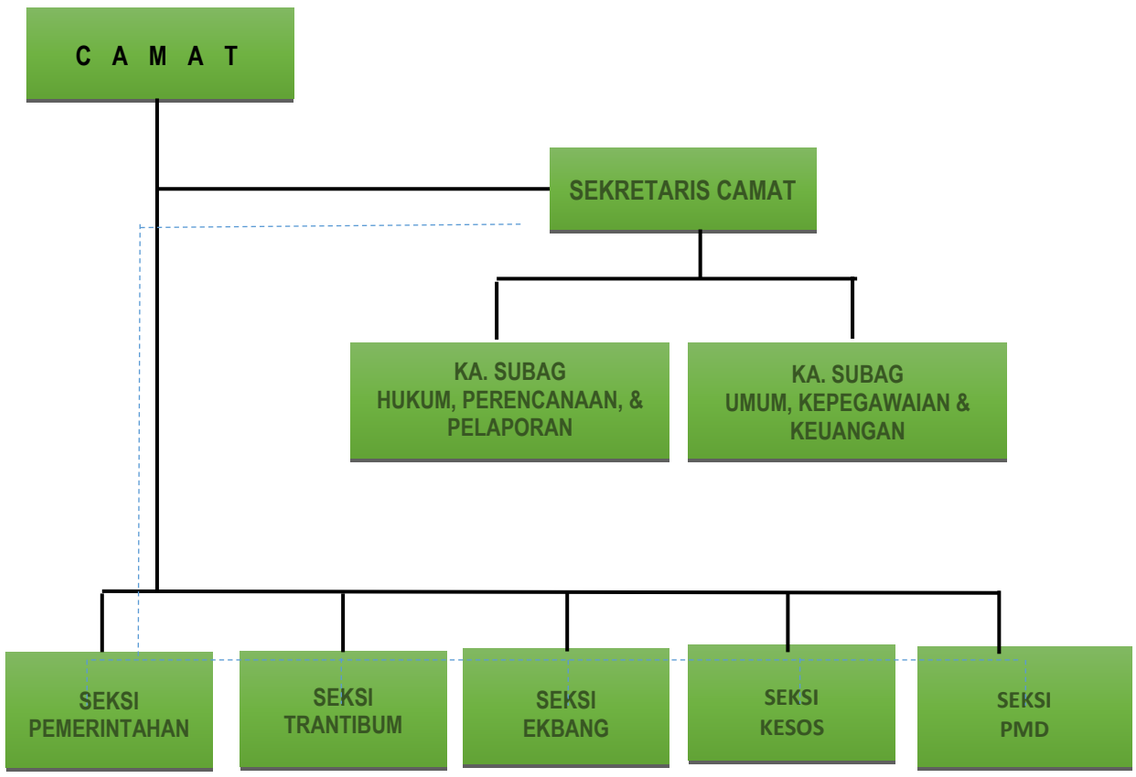
CAMAT PASIMARANNU,

**SYAMSIL, S.Sos**
Pangkat : Pembina
NIP : 19680204 198903 1 009

**Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasilambena**

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Perbup. No. 29 Tahun 2009




Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

| No | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH | | PROSENTASE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | CPNS | PNS | CPNS |
| **1** | S2 | 1 | 0 | 11.11 % | 0 |
| **2** | S1 | 8 | 0 | 33.33 % | 0 |
| **3** | D3 | 1 | 0 | 22.22 % | 0 |
| **4** | SLTA | 3 | 0 | 33.33 % | 0 |
| **5** | STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | **13** | **0** | **100 %** | **0** |

| No | Gol. Ruang | Tingkat Pendidikan Formal (orang) | | | | | | | | JML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | S2 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | |
| **1** | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| **2** | IV/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | IV/a | 1 | | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **4** | III/d | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| **5** | III/c | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| **6** | III/b | -- | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| **7** | III/a | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | II/d | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| **9** | II/c | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| **10** | II/b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **11** | II/a | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| | **Jumlah** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **14** |

e. Penjabaran Pelaksanaan Program yang dilaksanakan Kecamatan Pasilambena Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Tahun 2022 mengelolah 6 program yang didalamnya terdapat 12 kegiatan.

Penjabaran program / kegiatan tersebut, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Maksud dari Kegiatan perencanaan, penganggaran kinerja perangkat Daerah adalah untuk meujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | **Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | ***15,823,000*** | ***15,823,000*** | ***100*** |
| | 1 | Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD | 4,335,000 | 4,335,000 | 100 |
| | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6,668,000 | 6,668,000 | 100 |
| | 3 | Koordinasi dan PenyusunanLaporan dan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 4,820,000 | 4,820,000 | 100 |
| | 4 | | | | |

Capaian kinerja 100% Adapun sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai indikatorkinerja dapat dipastikan tercapainya. Adapun kelompok sasaran seluruh ASN Kecamatan Pasilambena pada khususnya.

2. Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

   Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah ,salah asatu program untuk menunjang tertib

administrasi dalam penggunaan Barang Milik Daerah untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***2*** | ***PAdministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*** | ***6,320,000*** | ***6,195,000*** | ***99,80*** |
| | 5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *6,320,000* | *6,195,000* | 99,80 |

Optimalisasi penggunaan anggaran pada program ini dimaksudkan untuk membantu Tertib administrasi tentang pengelolaan dan penggunaan inventaris Barang milik daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Program Kegiatan Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah agar terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***3*** | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***4,765,000*** | ***4,765,000*** | ***100*** |
| | 6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | *4,765,000* | *4,765,000* | 100 |

Terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan

4. Administrasi Umum perangkat Daearah

5. Program Administrasi Umum perangkat Daearah

   merupakan program rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa kegiatan yang masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran ini adalah

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***4*** | ***Program Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***215,803,333*** | ***215,371,700*** | ***99,80*** |
| | 7 Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna Kantor | 1,662,500 | 1,662,500 | 100 |
| | 8 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,000,000 | 5,791,200 | 96,52 |
| | 9 Penyedia bahan Logistik Kantor | 21,003,833 | 21,003,8330 | 100 |
| | 10 Penyedia bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2,460,000 | 2,460,000 | 100 |
| | 11 Fasilitas Kunjungan Tamu | 21,240,000 | 21,40,000 | 100 |
| | 12 Penyelenggara Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2,880,000 | 1,800,000 | 62.50 |

Kegiatan ini tidak mendapat kendala karena hanya berupa kegiatan belanja modal pakaian khusus saja.

5.. Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat menunjang aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dalam beberapa sub. Kegiatan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***5*** | ***Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | | *83,511,600* | *77,796.464* | *93,16* |
| | 13 | Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,486,000 | 15,919,664 | 74,09 |
| | 14 | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,000,000 | 15,000,000 | 100 |
| | 15 | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor | 47,025,600 | 46,876,800 | 99,68 |

Dalam pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Daerah maupun pihak penyedia. Tanpa koordinasi tentu tujuan yang menjadi sasaran kegiatan tidak tercapai dengan maksimal dan se-efisien mungkin. Adapun hasil (Outcome) atau dampak yang diharapkan tersedianya kebutuhan penunjang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional pada Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***6*** | ***Program Pemeliharaan Barang Milik daerah*** | | **44,420,000** | **40,938,000** | ***92,16*** |
| | | | | | |
| | 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 44,420,000 | 40,938,000 | 92,16 |

Kegaitan ini merupakan kegiatan Yang Bersifat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor.

7. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***7*** | ***Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | | ***4,640,000*** | ***560,000*** | ***12,07*** |
| | 17 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *4,640,000* | *560,000* | 12,07 |

8. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***8*** | *Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | **20,000,000** | **20,000,000** | *100* |
| | 18 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika SertaPemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 |

9. Program Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Sebagai obyek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa harus memberi serangkaian informasi yang diperlukan dan melakukan upaya yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | *Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | **7,379,000** | **7,379,000** | **100** |
| | 19 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisifatif | 3,349,000 | 3,349,000 | 100 |
| | 20 | Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan | 3,940,000 | 3,940,000 | 100 |

10. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

    Program Pemberdayaan masyarkat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9** | *Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | **130,567,567** | **120,539,00** | **92,32** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembanguna Desa | 6,567,000 | 6,567,000 | 100 |
| 20 | Singkronisasi Program Keraja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 124,000,000 | 113,972,000 | 90,30 |

# PROFIL

# UPT. RSUD K.H. HAYYUNG

# KEPULAUAN SELAYAR

# TAHUN 2023



## PEMERINTAH KABUPATEN

## KEPULAUAN SELAYAR

## TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena atas rahmat-Nyalah maka " PROFIL UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR " dapat diselesaikan pada waktunya.

Profil UPT. RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR berisi tentang gambaran, VISI dan MISI RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, kebijakan, hasil kegiatan, capaian kinerja, permasalahan dan solusinya.

Tersusunnya Profil ini, tidak terlepas dari adanya kerjasama dan bantuan berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terimakasih atas segala bantuannya.

Harapan kami semoga Profil UPT. RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penilaian penyelenggaraan pelayanan publik.

Benteng, Januari 2023

Direktur UPT. RSUD KH. Hayyung
Kepulauan Selayar,

**dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS**
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19770312 200604 1 020

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah salah satu unsur yang sangat penting dari mutu kehidupan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal yang diwujudkan antara lain dengan pembangunan sarana pelayanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan secara berkesinambungan telah dimulai sejak dicanangkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama tahun 1969 yang secara nyata telah berhasil mengembangkan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan yang berdampak pada peningkatan kualitas atau derajat kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat banyak hal yang perlu dilakukan, salah satu diantaranya menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan langsung menyentuh pada lapisan masyarakat paling bawah dan yang paling diperlukan oleh masyarakat dan sangat penting hal ini dikarenakan pelayanan kesehatan yang dilakukan akan memberikan perlindungan kesehatan kepada warga masyarakat khususnya yang kurang mampu serta memberikan pelayanan kesehatan pada daerah dengan kondisi geografis sulit.

Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat tehnologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di Rumah Sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar rumah sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, rumah sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Sebagai lembaga pemerintahan yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun profil instansinya masing-masing dalam rangka pemenuhan informasi mengenai struktur pemerintahan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran melalui program dan kegiatan. Profil disusun untuk mengetahui visi, misi, keadaan, tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga dapat diketahui tanggung jawab dari suatu SKPD dalam setiap tahun anggaran.

Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar menyusun profil instansinya dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi kepada semua stakeholders yang berkompeten untuk mengetahui kesinambungan antara fungsi yang dimaksud di atas dengan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar.

## 1. Sejarah

Berdasarkan SK MENKES RI No. 368/MENKES/SK/IV/2008 tanggal 15 April 2008 maka RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar ditingkatkan kelasnya dari kelas D ke kelas C, begitupula namanya berubah menjadi Rumah Sakit Umum K. H. Hayyung Kabupaten kepulauan Selayar Pada tanggal 12 Juni 2012. Pada tanggal 13 Januari 2012 RSUD K.H. HAYYUNG Kabupaten Kepulauan Selayar telah berhasil memperoleh sertifikat akreditasi penuh tingkat dasar oleh Tim Komite Akreditasi Rumah Sakit untuk 5 jenis pelayanan, antara lain: pelayanan administrasi, pelayanan medis, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan dan pelayanan rekam medis, dan sekarang sementara dalam proses pendampingan untuk memperoleh akreditasi 12 pelayanan atau akreditasi versi 2012. Dan Tanggal 21 Desember 2016 kembali RSUD K.H. Hayyung memperoleh sertifikat Akreditasi Versi 2012 dengan Lulus Perdana.

Tanggal 20 Oktober 2008, RSUD K.H. HAYYUNG Kabupaten Kepulauan Selayar mendapat penghargaan Piala Citra Pelayanan Prima tahun 2008 kepada Unit Pelayanan Publik dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dengan predikat nilai terbaik.

Sejak berdirinya RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar telah mengalami beberapa pergantian direktur sebagai berikut :

1. dr. Muh. Ridwan Tahun 2007 - 2010
2. dr. H. Marwan Ganoko, Sp.PK Tahun 2011
3. dr. Hj. Saribulan Arifin, MM Tahun 2011 – Tahun 2014
4. dr. Rachmawati Syahrir, Sp. KK, M. Kes Tahun 2015 – Tahun 2016
5. dr. H. Husaini, M. Kes Tahun 2016 – Tahun 2017
6. dr. Hazairin, Sp. B, FICS Tahun 2017 - sekarang

## 2. Landasan Hukum

Berdasarkan Dasar Hukum terkait dengan Operasional RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar, adalah sebagai berikut :

1. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

23. Permenkeu RI Nomor 7 tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU;
24. Permenkeu RI Nomor 8 tahun 2006 tentang KewenanganPengadaan Barang/Jasa BLU;
25. Permenkeu RI Nomor 9 tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU;
26. Permenkeu RI Nomor 10 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLU;
27. Permendagri RI Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

## B. V I S I

VISI RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar adalah ***" Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Rumah Sakit yang Melayani dengan Hati dan Memberikan yang terbaik untuk Mendukung Kabupaten Kepulauan Selayar Maju, Sejahtera dan Religius "***

Penjelasan :

a. Rumah sakit terunggul di Sulawesi Selatan dalam tipe yang sama
b. Dalam pemberian pelayanan kesehatan berdasarkan prosedur tetap, kompetensi dan etika profesi.
c. Terunggul dalam Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Visi ini perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Visi adalah harapan yang hendak diwujudkan pada masa yang akan datang atau periode 5 tahun mendatang, visi tersebut harus mampu mengilhami semua anggota organisasi dan mampu memotivasi serta membangkitkan semangat dan rangsangan bagi seluruh anggotanya untuk dapat meraih atau mencapainya.

RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar sebagai satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan fungsinya sebagai rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kepulauan Selayar.

Oleh karena sebagai rumah sakit milik Pemerintah maka diharapkan selain dapat memberikan pelayanan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan juga diharapkan RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar mampu mewujudkan kemandirian dalam pengelolaannya.

## C. MISI

Dari visi tersebut diatas dijabarkan kedalam **Misi** sebagai berikut:

1. Memberikan Pelayanan Prima
2. Meningkatkan kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
3. Melaksanakan dan mengembangkan Manajemen Rumah Sakit

Penjelasan istilah:

1. Memberikan Pelayanan Prima

   Adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas berdasarkan kaidah-kaidah medis dengan memberikan sentuhan hati dalam rangka penerapan basis kepuasan pelanggan dan pencapaian standar pelayanan minimal

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana
   - Pemenuhan jumlah dan kualitas gedung
   - Pemenuhan jumlah dan kualitas peralatan medis dan non medis
   - Pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM
   - Peningkatan ketrampilan SDM
   - Penerapan dan peningkatan sistem informasi
3. Melaksanakan dan mengembangkan Manajemen Rumah Sakit

   Pengembangan manajemen rumah sakit melalui :
   - Penerapan PPK-BLUD
   - Standarisasi pelayanan Kesehatan

# BAB II

# PROFIL LAYANAN RSUD K.H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR

## 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Setiap unit organisasi pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang akan menunjang pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Direktur, Bagian, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi pada Rumah Sakit Umum (Kelas C) Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut :

Rumah Sakit Umum adalah unsur pembantu Bupati sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang Rumah Sakit Umum, dipimpin oleh seorang Direktur yang disebut Direktur Rumah Sakit Umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis koordinatif melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Rumah Sakit Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan pelayanan serta penunjang kegiatan pada Rumah Sakit Umum;
2. Pelayanan medik dan keperawatan;
3. Pelayanan medik dan non medik;
4. Pelayanan rujukan;
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparat pelayanan;
6. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum;
7. Pengawasan dan penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang kesehatan;
8. Pelayanan fungsi sosial dengan memperhatikan akidah ekonomi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya di bidang pelayanan kesehatan.

## 2.2 Struktur Organisasi

UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur
2. Bagian Administrsi Umum dan Keuangan, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja
   c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Pelayanan Medik, Kepegawaian dan Kebidanan terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Medik
   b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan
4. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
   a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik
   b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
5. Bidang Pengembangan Pelayanan, terdiri dari :
   a. Seksi Pengembangan Sistem Layanan
   b. Seksi Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

### 1. Direktur

Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kepulauan Selayar mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengawasi tugas Rumah Sakit Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Direktur Rumah Sakit Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi tugas dan fungsih unsure organisasi;
2. Pelaksanaan penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangannya;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsih rumah sakit;
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tugas dan fungsih unsure organisasi;
5. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan fungsih lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsihnya.

## 2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Bagian administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan administrasi umum dan keuangan, melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana serta memimpin koordinasi dengansatuan organisasi dalam lingkup Rumah Sakit dalam rangka Evaluasi kinerja Rumah Sakit.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Ketatausahaan
2. Pelaksanaan Kerumah Tanggaan.
3. Pelaksaan Pelayanan Hukum dan Kemitraan
4. Pelaksanaan Kehumasan
5. Pelaksanaan Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi
6. Pelaksaan perencanaan Anggaran
7. Pelaksanaan Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
8. Pelaksanaan Akuntansi
9. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian
10. Pelaksanaan Fungsih lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

### 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala bagian Administrasi dan keuangan dalam merencanakan, Mengordinasi dan melakukan kegiatan dan urusan umum dan kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umumdan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanan tugas
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian umumdan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menanda tangani naskah dinas
5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
6. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya

## 2.2. Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja

Sub Bagian dan Evaluasi Kinerja dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dalam mengumpulkan bahan, menyusun perencanaan dalam membentuk program dan kegiatan, penyajian data dan menyusun laporan kinerja rumah sakit;

Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi Kinerja mempunyai Tugas :

1. Menyusun Rencana Kegiatan Sub Bagian Program dan evaluasi Kinerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. dalam Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub bagian Program dan evaluasi Kinerja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
5. melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksana perubahan anggaran, rencana kerja anggaran, rencana kerja perubahan anggaran, rencana bisnis anggaran dan rencana strategik bisnis;
6. melakukan penyusunan rencana strategic, rencana kerja, laporan kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja rumah sakit, manajemen resiko, reformasi birokrasi, perjanjian kinerja,laporan kinerja badan layanan umum daerah, serta laporan tahunan rumah sakit;
7. menyusun profil rumah sakit;
8. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan evaluasi kinerja rumah sakit;
9. menyusun rancangan surat keputusan kebijakan dan peraturan rumah sakit;
10. menyusun laporan melalui aplikasi yang berhubungan dengan perencanaan dan pelaporan;
11. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### 2.3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu kepala bagian administrasi dan keuangan dalam melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan asset

Adapun tugas dari Sub Bagian Keuangan dan Aset:

1. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan dan asset sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan dan asset untuk mengetahui perkembangan pelaksaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan mendatangani naskah dinas;
5. Melakukan penerimaan, penyimpanan dan penatausaan seluruh pendapatan rumah sakit sebagai pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah;
6. Melakukan penatausahaan pengelolaan gaji pegawai negeri sipil dan pegawai badan layanan umum daerah;
7. Melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data keuangan;
8. Melakukan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen pelaksana anggaran
9. Melakukan, mengelola dan mengawasi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan dari program jaminan kesehatan nasional;
10. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
11. Melakukan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya

## 3. Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan

Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh Kepala Bisang yang mempunyai tugas membantu direktur dalam merencanakan, melaksanakan, mengordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik, keperawatan, dan kebidanan;

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pelayanan medic, keperawatan dan kebidanan mempunyai fungsih:

1. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan
2. Pengordinasian dan pelaksanaan pelanan medis, keperawatan dan kebidanan
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan medis,keperawatan dan kebidanan
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan
5. Pelaksanaan fungsih lain yang diperintahkan oleh atasan sesui dengan tugas dan fungsihnya.

**3.1. Seksi Pelayanan Medik**

Seksi pelayanan medic dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan dalam merencankan, merancang dan mengordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan medik.

Adapun uraian tugasnya meliputi:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan seksi pelayanan medic sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pelayanan medic untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun indicator kinerja dan indicator mutu pelayanan medis;
6. Mengkoordinir pelayanan medis;
7. Melakukan kendali mutu, kendali biaya, dalam pelayanan medis;
8. Menerapkan budaya keselamatan pasien pada pelayanan medis;
9. Menyusun indicator kinerja dan indicator mutu pelayanan medis;
10. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**3.2. Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan**

Seksi Pelayanan Keperawatan dan kebidanan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medik, Keperawatan dan Kebidanan dalam merencanakan, melakukan, mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;

Adapun Uraian Tugasnya meliputi:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menyusun standar praktek keperawatan dan kebidanan yang terdiri dari standar

operasional prosedur dan standar asuhan keperawatan dan/atau asuhan kebidanan;

3. Melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya dalam pelayanan keperawatan dan kebidanan;
4. Menerapkan budaya keselamatan pasien pada pelayanan keperawatan dan kebidanan;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun standar asuhan keperawatan dan standar operasional prosedur keperawatan;
6. Mengawasi, mengendalikan dan menilai penerapan kebijakan keperawatan tata tertib dan etika keperawatan;
7. Menyusun falsafah keperawatan yang disesuaikan dengan falsafah rumah sakit;
8. Melakukan kendali mutu, kendali biaya dan capaian kinerja serta keselamatan pasien pelayanan keperawatan dan kebidanan;
9. Melakukan estimasi kebutuhan tenaga keperawatan serta menetapkan standar ketenagaan;
10. Memfasilitasi pelaksanaan kredensialing keperawatan dan kebidanan serta penyusunan rencana kerja keperawatan;
11. Melakukan pengawasan terhadap penerapan etika profesi;
12. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan asuhan dan keperawatan dan kebidanan;
13. Menciptakan dan melaksanakan system prosedur evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan pada unit-unit keperawatan dan kebidanan;
14. Mengembangkan peraturan dan prosedur yang mengatur pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
15. Melakukan koordinasi dengan unsur lain dalam lingkup rumah sakit dan luar rumah sakit;
16. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**4.Bidang Pelayanan Penunjang**

Bidang pelayanan penunjang dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu direktur dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pelayanan Penunjang melaksanakan fungsih sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan penunjang;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang;
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien dibidang pelayanan penunjang;
4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang dibidang pelayanan penunjang;

5. Pelaksanaan fungsih lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsihnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. Mengkordinir penyusunan regulasi terkait teknis pelayanan penunjang medis dan non medis;
4. Melaksanakan reviu pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan penunjang;
5. Melaksanakan pengawasan pelayanan penunjang medis yang meliputi pelayanan radiologi, persediaan farmasi, laboratorium, fisioterapi, bank darah, gizi, kesehatan lingkungan, laundry/binatu, keselamatan kerja, pemeliharaan sarana, pemulasaran jenazah, central sterile supply department;
6. Mengkoordinir dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis dibidang pelayanan penunjang;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugasnya.

**4.1 Seksi Pelayanan Penunjang Medik**

Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam merencanakan, melakukan, mengordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan penunjang medic.

Adapun tugasnya meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan medic sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Menuyusun standar operasional prosedur dalam pelaksaan kegiatan;
3. Menyusun indicator kinerja dan indicator mutu pelayanan penunjang medik;
4. Menyusun regulasi terkait teknis pelayanan penunjang medic;
5. Mengkoordinir pelayanan penunjang medis yang meliputi pelayanan radiologi, persediaan farmasi, laboratorium, fisioterapi, bank darah, gizi, pemulasaran jenazah, dan sentral sterile supply department;
6. Melakukan kendali mutu kendali biaya dalam pelayanan penunjang medis;
7. Menerapkan budaya keselamatan pasien pada pelayanan penunjang medis;
8. Melakukan evaluasi kendali biaya, capaian mutu dan capaian kinerja serta keselamatan pasien;
9. Menghimpun dan mengetahui seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait standar pelayanan penunjang medis;
10. Menyusun laporan pelakanaan tugas dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

**4.2 Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis**

Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dalam merencanakan, Melakukan, Mengkoordinir, dan mengevaluasi pelaksanaan Non medis.

Adapun uraian tugasnya adalah:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan non medis sebagai pedoman dalam pelaksaan tugas;
2. Menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksaan kegiatan pelayanan non medis;
3. Menyusun indicator kinerja dan indicator mutu pelayanan medis;
4. Menyusun regulasi terkait pelayanan non medis;
5. Mengkoordinir pelayanan penunjang non medis yang meliputi pelayanan laundry, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, promosi kesehatan rumah sakit, dan pelayanan non medis lainnya serta Central Sterilized Suppy Departement;
6. Mengkoordinir pelaksaan kegiatan pelayanan laundry/binatu;
7. Mengkoordinir pelaksaan kegiatan pengelolaan makanan/ gizi;
8. Melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana dan alat kesehatan;
9. Melakukan pengelolan informasi dan komunikasi;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja rumah sakit;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan instalasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
12. Menghimpun dan mematuhi seluruh ketentuan perauran perundang-undangan terrkait standar pelayanan non medis;
13. Menyusun laporan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

**5.Bidang Pengembangan Pelayanan**

Bidang Pengembangan Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kajian dan pengembangan palayanan.dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengembangan Layanan melaksanakan fungsih sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencanan pengembangan pelayanan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan pelayanan;
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamtan pasien dibidang pengembangan pelayanan;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai fungional, teknis dan structural; dan

5. Pelaksanaan fungsih lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsihnya.

**5.1 Seksi Pengembangan Sistem Layanan**

Seksi Pengembangan Sistem Layanan di pimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Layanan dalam merencanakan, melakukan, dan mengkoordinasikan pengembangan system layanan rumah sakit.

Dan adapun uraian tugasnya:

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan system layanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksaan tugas dalam lingkungan Seksi Pengembangan Sistem Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
3. Melakukan koordinasi dengan layanan rekam medis
4. Menyusun Standar Operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan system layanan;
5. Mengumpul data dan mengolah data untuk proses kajian pengembangan system layanan rumah sakit;
6. Melakukan promosi kesehatan dan produk pelayanan kepada masyarakat;
7. Membuat dan menyiapkan dokumen penawaran pelayanan kesehatan rumah sakit, melakukan komunikasi dan penjajakan dengan pihak lain terkait pelayanan rumah sakit melakukan kebijakan dan standar pelayanan akreditasi rumah sakit;
8. Menyusun program pengembangan dan penelitian terkait pengembangan system layanan;
9. Menyusun laporan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**5.2 Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia**

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan penyusunan standar kebutuhan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai rumah sakit.

Adapun uraian tugasnya :

1. Menyusun rencana kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. Mendistribusikan pelaksanakan tugas;

3. Menyusun rancangan, mengoreksi, dan menanda tangani naskah dinas;
4. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sumber daya manusia;
5. Menyusun dokumen pola ketenagaan
6. Melakukan koordinasi dan pengawasan masa berlaku perizinan terkait layanan rumah sakit;
7. Melakukan program kesehatan pegawai, meliputi pemeriksaan pegawai baru, dan pemeriksaan kesehatan berkala;
8. Mengkoordinir dan melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis sumber daya manusia;
9. Menyusun laporan hasil pelaksaan tugas kepala seksi pengembangan sumber daya manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

**BAB III**

# Kondisi SKPD Tahun 2022

## A. Manajemen

### 1. Keadaan Kepegawaian

Jumlah keadaan tenaga keseluruhan yang ada di RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 adalah 559 orang (192 PNS, 367 Kontrak) dan dengan rincian sebagai berikut :

**Data Kepegawaian RSUD Per 31 Desember 2022**

**DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**

1. DOKTER
   - Dokter Spesialis Dasar : 3
   - Dokter Spesialis Penunjang : 4
   - Dokter Spesialis Lainnya : 1
   - Dokter Umum : 12
   - Dokter Gigi : 1
2. PERAWAT
   - Perawat umum : 72
   - Perawat Gigi : 2
3. KEBIDANAN
   - Bidan : 19
4. TENAGA FARMASI
   - Asisten Apoteker : 1
   - Apoteker : 15
5. TENAGA KESEHATAN MASYRAKAT
   - Kesehatan Masyarakat : 12
   - Sanitarian : 1
   - Tenaga Ahli Gizi : 8
6. TENAGA KETERAPIAN FISIK
   - Fisioterapi : 1
   - Terapi Okupasi : -
   - Terapi wicara : -
   - Akupunturis : -
7. TENAGA Ketekhnisan Medis
   - Radiografer : 5
   - Terapi Radioterapis : -
   - Tehnis Elektromedias : 1
   - Tehnisi Gigi : -
   - Analisi Kesehatan : 11
   - Perekam Informasi kesehatan : 5
8. TENAGA NON KESEHATAN : 19

**DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) RSUD K. H. HAYYUNG KEPULAUAN SELAYAR**

9. DOKTER
   - Dokter Spesialis Dasar : -
   - Dokter Spesialis Penunjang : -

- Dokter Spesialis Lainnya : -
- Dokter Umum : -
- Dokter Gigi : -

10. PERAWAT
    - Perawat umum : 114
    - Perawat Gigi : -
11. KEBIDANAN
    - Bidan : 70
12. TENAGA FARMASI
    - Asisten Apoteker : 3
    - Apoteker : 11
13. TENAGA KESEHATAN MASYRAKAT
    - Kesehatan Masyarakat : 3
    - Sanitarian : 2
    - Tenaga Ahli Gizi : 1
14. TENAGA KETERAPIAN FISIK
    - Fisioterapi : 3
    - Terapi Okupasi : -
    - Terapi wicara : -
    - Akupunturis : -
15. TENAGA Ketekhnisan Medis
    - Radiografer : 7
    - Terapi Radioterapis : -
    - Tehnis Elektromedias : 1
    - Tehnisi Gigi : 1
    - Analisi Kesehatan : 11
    - Perekam Informasi kesehatan : 3
16. TENAGA NON KESEHATAN : 114

*Sumber Data : Kepegawaian RSUD K. H. Hayyung Kepulauan Selayar*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa :

1. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit pada pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa untuk rumah sakit tipe C harus memiliki tenaga medis, yaitu :
   a. 9 (sembilan) dokter umum untuk pelayanan medik dasar
   b. 2 (dua) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut
   c. 2 (dua) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar (Penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan obgin)
   d. 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan spesialis penunjang (Anastesiologi, radiologi dan patologi klinik)
   e. 1 (satu) dokter ahli gigi spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis gigi mulut.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa RSUD K.H. Hayyung masih sangat membutuhkan tenaga medis utamanya dokter spesialis untuk jenis pelayanan medik spesialis dasar, utamanya dokter spesialis obgyn, Spesialis anak dan Spesialis Penyakit Dalam karena masih mengharapkan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNHAS dan dokter WKDS dari Kementerian Kesehatan.

2. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa sebagian besar pagawai yang ada pada RSUD K.H. Hayyung masih berstatus pegawai Non PNS/Kontrak.

**Sarana dan Prasarana**

**a. Gedung**

Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar terletak di atas tanah seluas ± 4 Ha meliputi Gedung Kantor, Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, Unit Rawat Bersalin, Unit Gawat Darurat (UGD), Operasi Kamar Bedah (OKB), ICU, Laboratorium/Fisioterapi, Radiologi, Instalasi Gizi, Workshop, Apotik, CSSD, Loundry, Gudang Farmasi, Pemulasaran Jenazah, UTD RS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit) dan Gedung Aula Rumah Sakit.

Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar dibangun sejak tahun 2003 rencana penuntasan pembangunan disesuaikan dengan Site Plan RSUD Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2022**

| No | Uraian Kegiatan | Tahun Anggaran | Sumber Dana | | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DAU | DAK | |
| 1 | Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan | 2022 | | Rp.399.303.635 | Selesai |
| 2 | Pengembangan Rumah Sakit | 2022 | | Rp.12.074.0189.188 | Selesai |
| 3 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas kesehatan di Kab/Kota | 2022 | Rp. 363.550.000 | | Selesai |

Dari data diatas dapat diliat bahwa hampir setiap tahun RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar mendapatkan dana untuk peningkatan sarana dan prasarana namun masih sangat terbatas, olehnya itu diharapkan ke depan agar tetap dianggarkan pengadaan sarana dan prasarana.

**JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT TAHUN 2022**

| NO | NAMA RUANGAN | VIP | KELAS I | KELAS II | KELAS III | ISOLASI | Non Kelas | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perawatan Bedah | 3 tt | 4 tt | 5 tt | 10 tt | - | | 22 tt |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Perawatan Jeruk | 5 tt | 7 tt | 4 tt | - | 1 tt | | 17 tt |
| 3. | Perawatan Melinjo | - | - | - | 36 tt | | | 36 tt |
| 4. | Perawatan Kenari | - | 2 tt | 2 tt | 21 tt | | | 25 tt |
| 5. | Perawatan Delima | - | 3tt | 6 tt | 6 tt | 2 tt | | 17 tt |
| 6. | Perawatan Perinatologi | | | | | | 5 Box<br>8 tt | 5 Box<br>8 tt |
| 7. | ICU | | | | | | 4 tt | 4 tt |
| | | | | | | | | **134 tt** |

**b. Peralatan Medis**

Peralatan Medis dan penunjang medis yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar pada tahun 2022 di dapat dari dana DAU dan DAK.

Adapun alat kedokteran tersebut yang telah tersedia pada tahun 2022 – 2022 yakni:

1. Alat IGD
2. Alat Ruang Operasi
3. Alat Intensive Care Unit (ICU)
4. Alat Instalasi Rawat Inap Kelas III
5. Alat Instalai Rawat Jalan
6. Alat Radiologi
7. Alat Laboratorium
8. Alat CSSD
9. Alat UTDRS

Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana di rumah sakit dari tahun ke tahun serta adanya penambahan peralatan dan operasional peralatan tersebut akan dapat menjangkau sasaran pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan minimal di rumah sakit.

**c. Sumber Dana TA 2022**

| No | PROGRAM DAN KEGIATAN | SUMBER DANA | PAGU | | REALISASI KEUANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp | (%) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** | | **55.43.586.750,00** | **67.037.872.292,00** | **50.871.775.050,00** | **75.89 %** |
| | 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 14.915.738.250,00 | 14.293.533.000,00 | 14.261.004.155 | 99.77 % |
| | 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 312.595.500,00 | 564.630.715,00 | 529.086.287 | 93.70% |
| | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 12.592.184.000,00 | 12.046.184.000,00 | 11.608.163.866,00 | 96.00 % |
| | 4. Peningkatan Pelayanan BLUD | | 27.663.069.000,00 | 40.133.524.577,00 | 24.473.520.741,52 | 60.98 % |
| 2 | **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** | | **13.005.782.250,00** | **12.836.872.823,00** | **12.309.057.405,00** | **95.89 %** |
| | 1. Penyediaan Failitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | 13.005.782.250,00 | 12.473.322.823,00 | 12.065.451.755,00 | 96.73% |
| | 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | | 0 | 363.550.000,00 | 243.605.650,00 | 67.01% |
| | | | **68.489.369.000,00** | **79.874.745.115,00** | **56.281.392.176,70** | |

## d. Pengelolaan Rumah Sakit

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, pengelolaan rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang dilengkapi dengan penambahan instalasi yang menunjang kegiatan pelayanan secara paripurna dalam mencapai terlaksananya visi dan misi rumah sakit yang telah ditetapkan.

Pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat merupakan wujud dalam meningkatkan mutu/kualitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit. Hal tersebut dapat tercermin/terwujud dari mutu pelayanan medis dan administrasi secara cepat, mudah dan ramah sehingga memberi kepuasan dalam hal pemberian pelayanan serta penanganan kesehatan (penyakit) kepada pasien yang ditangani oleh dokter spesialis.

Adapun bentuk pelayanan yang diberikan yakni :

1. Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
2. Umum dan Kepegawaian
3. Program dan Evaluasi Kinerja
4. Keuangan dan Asset
5. Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan
6. Pelayanan Penunjang
7. Pengembangan Pelayanan
8. Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit
9. Rawat Inap Umum

10. Rawat Inap Kebidanan
11. Pelayanan Rawat Jalan
12. Bedah
13. Obstetri dan Ginekologi
14. Telinga Hidung Tenggorokan (THT)
15. Kulit dan Kelamin
16. Gigi dan Mulut
17. Pelayanan Unit Gawat Darurat
18. Apotik 24 Jam
19. Sentral Opname (SO)
20. Operasi Kamar Bedah (OKB)
21. Unit Transfusi Daerah Rumah Sakit (UTDRS)
22. Fisioterapi
23. Laboratorium
24. Instalasi Gizi
25. Radiologi
26. IPS-RS
27. Ruang Security
28. Genset Emergency
29. Pemulasaran Jenazah
30. CSSD
31. Loundry
32. Area Parkir Karyawan dan Pengunjung

Dari fasilitas serta pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar kepada masyarakat masih terdapat beberapa kekurangan diantaranya :

a. Penyelesaian pembangunan gedung Rumah Sakit yang belum rampung 100% karena keterbatasan anggaran.
b. Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar belum memiliki Dokter Spesialis Obgyn yang defenitif.
c. Perlunya peningkatan SDM Tenaga paramedis dan administrasi.
d. Dana operasional rumah sakit masih kurang.

Namun dari kekurangan tersebut Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar telah melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan yakni dengan terwujudnya janji perbaikan pelayanan publik dan melakukan kerjasama dengan Fakultas Kedokteran UNHAS untuk mengatasi masalah kekurangan dokter spesialis.

**Pelayanan**

**a. Rawat Jalan**

Data Kunjungan

**Data Kunjungan Tahun 2022-2022**

| URAIAN | TAHUN 2022 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| Kunjungan Baru | 7791 | 12485 |
| Kunjungan Lama | 17435 | 21219 |
| Total Kunjungan | 25226 | 33704 |
| Hari Buka Poli | 287 | 299 |
| Rata – rata Kunjungan baru/ hari | 27 | 112 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K.H. Hayyung*

**Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2022-2022**

| No | Jenis Pelayanan | 2022 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Baru | Lama | Baru | Lama |
| 1 | Penyakit Dalam | 1615 | 4162 | 879 | 5103 |
| 2 | Bedah | 899 | 1855 | 952 | 1711 |
| 3 | Kesehatan Anak (Balita) | 158 | 336 | 178 | 383 |
| 4 | Obstetri & Ginekologi (ibu hamil) | 1569 | 1734 | 2079 | 1699 |
| 5 | Keluarga Berencana | 977 | 922 | 1200 | 1197 |
| 6 | THT | 285 | 460 | 354 | 506 |
| 7 | Mata | 661 | 1407 | 569 | 1359 |
| 8 | UGD | 1441 | 1394 | 2038 | 2081 |
| 9 | Gigi dan Mulut | 120 | 159 | 140 | 314 |
| 10 | Saraf | 318 | 2422 | 384 | 3740 |
| 11 | Radiologi | 3928 | 721 | 3459 | 188 |
| 12 | Fisioterapi | 770 | 2372 | 253 | 2938 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K.H. Hayyung*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah kunjungan dari tahun 2022 ke tahun 2022 mengalami peningkatan. Jenis pelayanan yang paling banyak mendapatkan pelayanan yaitu

jenis pelayanan Penyakit Dalam dimana untuk kunjungan lama dengan jumlah 5103 dan baru sebanyak 879 dimana kunjung baru ini mengalami penurunan dari sekian jenis pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kepulauan Selayar, tetapi terdapat beberapa jenis pelayanan yang juga meningkat dimana hal tersebut terjadi karena tersedianya pelayanan dari dokter ahli yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

**10 Penyakit Utama Penderita Rawat Jalan Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Cerebral Infarction | 1074 |
| 2 | Epilepsi | 1068 |
| 3 | DM Tipe II | 948 |
| 4 | Low Back Pain | 813 |
| 5 | Uterus Kontraktil | 714 |
| 6 | HHD | 710 |
| 7 | Vaskular Headache | 602 |
| 8 | Neuropati | 581 |
| 9 | OA Genu Bilateral | 566 |
| 10 | Dyslipidemia | 552 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli Gigi dan Mulut Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Pulpitis Kronis | 286 |
| 2 | Abses Apikal | 138 |
| 3 | Pulpitis Akut | 45 |
| 4 | Impaksi | 36 |
| 5 | Periodontitis Akut | 33 |
| 6 | Periondotitis Kronis | 9 |
| 7 | Ginggiva | 9 |
| 8 | Hyperemi Pulpa | 5 |
| 9 | Persistensi | 3 |
| 10 | Dento Alveolar Abses (DAA) | 2 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli Mata Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Katarak | 387 |
| 2 | Myopia | 150 |
| 3 | Dry Eye Syndrome | 101 |
| 4 | Pseudofakia | 49 |
| 5 | Pterygium | 47 |
| 6 | Conjuntivitas | 46 |
| 7 | Presbiop | 32 |
| 8 | Trauma Oculi | 22 |
| 9 | Hypermetrop | 13 |
| 10 | Glaucoma | 13 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak Poli Bedah Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Tumor Mamma | 239 |
| 2 | Benigna Prostat Hypertropi (BPH) | 238 |
| 3 | Hernia Inguinalis Lateral (HIL) | 165 |
| 4 | Tumor Hemathorax | 76 |
| 5 | Tumor Colli | 42 |
| 6 | Appendicitis | 29 |
| 7 | Nephrolithiasis | 28 |
| 8 | Hemorhoid | 25 |
| 9 | Vesicolithiasis | 19 |
| 10 | Tumor Gluteus | 15 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli THT Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Otitis Ekterna | 201 |
| 2 | OMSK | 72 |
| 3 | Rhinosinusitis Kronik | 54 |
| 4 | Rhinitis | 41 |
| 5 | Keratosis Obsturan | 34 |
| 6 | Serumen Obsturan | 13 |
| 7 | Tonsilitis Kronik | 13 |
| 8 | Corpus Alenium | 11 |
| 9 | Keratosis | 9 |
| 10 | Otitis Media Supuratif Akut (OMSA) | 9 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli Kesehatan JiwaTahun 202**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Schizofrenia | 674 |
| 2 | Depresi Berat dengan Gejala Psikotik | 326 |
| 3 | Gangguan Afektif Bipolar | 298 |
| 4 | Depresi Ringan dengan Gejala Somatik | 228 |
| 5 | Depresi Sedang dengan Gejala Somatik | 225 |
| 6 | Psikotik Non Organik | 212 |
| 7 | Anxietas | 182 |
| 8 | Gangguan Mental dan Prilaku Akibat Disfungsi Otak dan Penyakit | 155 |
| 9 | Gangguan Anxietas Depresi | 62 |
| 10 | Gangguan Mental dan Perilaku Akibat Penggunaan Zat Multiple | 21 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli Obgyn Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Uterus Kontraktil | 714 |
| 2 | Presentase Bokong | 264 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Hyperemesis Gravidarum | 95 |
| 4 | Perdarahan Uterus Abnormal | 61 |
| 5 | Placenta Previa | 59 |
| 6 | Hipertensi Kehamilan | 52 |
| 7 | Letak lintang | 51 |
| 8 | Abortus Komplit | 47 |
| 9 | Mioma Uteri | 44 |
| 10 | Amenorhoe Sekunder | 40 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Poli Anak Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | BBLR | 15 |
| 2 | ISPA | 14 |
| 3 | Epilepsi | 13 |
| 4 | Nutrisional Marasmus | 13 |
| 5 | TB Paru | 11 |
| 6 | Penykit Jantung Rematik | 10 |
| 7 | Infeksi Saluran Kemih (ISK) | 8 |
| 8 | Cerebral Palsy | 7 |
| 9 | Tonsilopharingitis | 7 |
| 10 | Asma Bronchiale | 4 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada Rawat Inap Anak (Perawatan kenari) Tahun 202**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | DBD Grade II | 50 |
| 2 | Diare Akut Dehidrasi Ringan Sedang | 47 |
| 3 | CAP | 45 |
| 4 | Thonsillopharingitis Akut | 42 |
| 5 | Pharingitis Akut | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | Kejang Demam | 16 |
| 7 | Demam Thypoid | 15 |
| 8 | Leukocytosis | 12 |
| 9 | Kecacingan | 10 |
| 10 | Dispepsia | 4 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 Penyakit Terbanyak pada IGD Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Dyspepsia | 636 |
| 2 | Febris Pro Evaluasi | 478 |
| 3 | Multiple Trauma | 414 |
| 4 | Gastroenteritis Akut | 375 |
| 5 | Colic Abdomen | 371 |
| 6 | Dyspnea | 311 |
| 7 | Chest Pain | 148 |
| 8 | DM Type II | 72 |
| 9 | Hypertensi GR II | 72 |
| 10 | Abdominal Pain | 66 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**b. Rawat Inap**

Berikut ini kegiatan pelayanan Rawat Inap Tahun 2022 :

**Kegiatan Pelayanan Rawat Inap Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Pasien Masuk | Pasien Keluar Hidup | Pasien Keluar Mati | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | < 48 Jam | > 48 Jam | Jumlah |
| 1. | Penyakit Dalam | | | | | |
| 2. | Kesehatan Anak | | | | | |
| 3. | Obstetri | | | | | |
| 4. | Bedah | | | | | |
| 5. | Saraf | | | | | |
| 6. | Jiwa | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | THT | | | | | |
| 8. | ICU | | | | | |
| 9. | Perinatologi | | | | | |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Utama Penderita Rawat Inap Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Chronic Heart Failure (CHF) | 109 |
| 2 | Anemia Berat | 77 |
| 3 | Diare Akut Dehidrasi Ringan | 76 |
| 4 | DM Tipe II | 68 |
| 5 | CAP | 61 |
| 6 | Pneumonia | 51 |
| 7 | Gawat Janin | 49 |
| 8 | Abortus Inkomplit | 49 |
| 9 | Hernia Inguinalis | 47 |
| 10 | Oligohydramnion | 39 |

*Sumber Data : Unit Rekam Medis RSUD KH. Hayyung*

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh pasien rawat inap adalah *Chronic Hearth Failure* sebanyak 109 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah *Oligohydromnion* sebanyak 39 orang.

**10 (Sepuluh) Penyakit Utama Poli Interna Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | DM2NO | 948 |
| 2 | CHF | 762 |
| 3 | HHD | 710 |
| 4 | Dyslipidemia | 552 |
| 5 | CAD | 494 |
| 6 | Atypical chest pain | 316 |
| 7 | Graves Disease | 272 |
| 8 | Asma Bronchiale | 259 |
| 9 | Chronic Kidney Disease | 184 |
| 10 | Hipertensi | 146 |

**10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak poli Saraf Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Cerebral Infarction | 1074 |
| 2 | Epilepsi | 1068 |
| 3 | Low Back Pain | 813 |
| 4 | Vascular Headache | 602 |
| 5 | Neuropati | 581 |
| 6 | Osteoarthritis Genu | 566 |
| 7 | Hipertensi | 517 |
| 8 | Vertigo | 321 |
| 9 | Parkinson Disease | 158 |
| 10 | Frozen Shoulder | 101 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak poli Interna Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | DM2NO | 948 |
| 2 | CHF | 762 |
| 3 | HHD | 710 |
| 4 | Dyslipidemia | 552 |
| 5 | CAD | 494 |
| 6 | Atypical Chest Pain | 316 |
| 7 | Graves Disease | 272 |
| 8 | Asma Bronchiale | 259 |
| 9 | Chronic Kidney Disease | 184 |
| 10 | Hipertensi | 146 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**c. Kebidanan dan Persalinan**

**10 (Sepuluh) Penyakit Utama Penderita Rawat Inap Bersalin Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Abortus Inkomplit | 68 |
| 2 | Olygohydramnion | 42 |
| 3 | Pre Eklamsia Berat | 35 |
| 4 | Gawat Janin | 34 |
| 5 | CPDs | 27 |
| 6 | Retensio Plasenta | 14 |
| 7 | Ketuban Pecah Dini | 14 |
| 8 | Mioma Uteri | 10 |
| 9 | Blighted Ovum | 5 |
| 10 | Perdarahan Uterus Abnormal | 5 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Utama Penderita Rawat Inap Perawatan Bedah Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Hernia Inguinalis Lateral | 33 |
| 2 | Benigna Prostat Hyperplasi | 31 |
| 3 | Multiple Trauma | 28 |
| 4 | Kolik Abdomen | 17 |
| 5 | Tumor Mamma | 16 |
| 6 | Soft Tissue Tumor | 15 |
| 7 | Haemorhoid | 14 |
| 8 | Appendicitis | 11 |
| 9 | Ileus Obstruktif | 10 |
| 10 | Batu Saluran Kemih | 8 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Utama Penderita Rawat Inap Perawatan Kenari Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | DBD Grade III | 50 |
| 2 | Diare Akut Dehidrasi Ringan | 47 |
| 3 | CAP | 45 |
| 4 | Thonsilopharingitis Akut | 42 |
| 5 | Pharingitis Akut | 30 |
| 6 | Kejang Demam | 16 |
| 7 | Demam Thypoid | 15 |
| 8 | Leukocithosis | 12 |
| 9 | Kecacingan | 10 |
| 10 | Dydpepsia | 4 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak pasien Rawat Inap Perawatan Delima Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | Abortus Incomplit | 68 |
| 2 | Oligohydramnion | 42 |
| 3 | Pre Eklamsia Berat (PEB) | 35 |
| 4 | Gawat Janin | 34 |
| 5 | CPD | 27 |
| 6 | Retensio Plasenta | 14 |
| 7 | Ketuban Pecah Dini (KPD) | 14 |
| 8 | Mioma Uteri | 10 |
| 9 | Blighted Ovum | 5 |
| 10 | Pendarahan Uterus Abnormal | 5 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak pasien Rawat Inap Perawatan Melinjo Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | CHR CF III | 57 |
| 2 | Anemia Berat | 37 |
| 3 | Pneumonia | 25 |
| 4 | TB. Paru | 25 |
| 5 | DM2MO | 9 |
| 6 | Kolik Abdomen | 9 |
| 7 | Dyspepsia | 7 |
| 8 | Ulkus Diabetik | 7 |
| 9 | Low Back Pain (LBP) | 4 |
| 10 | Vascular Headache | 3 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

**10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak pasien Rawat Inap Perawatan Jeruk Tahun 2022**

| No. | Jenis Penyakit | Jumlah Penderita |
|---|---|---|
| 1 | DM Tipe III | 41 |
| 2 | Dyspepsia | 39 |
| 3 | CHF | 38 |
| 4 | Anemia | 32 |
| 5 | Dyspnoe | 25 |
| 6 | Hypertensi | 24 |
| 7 | Pneumonia | 23 |
| 8 | Kolik Abdomen | 16 |
| 9 | Atypical Chest Pain | 9 |
| 10 | Cerebral Infark | 8 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

Tingkat pemanfaatan RSUD KH. Hayyung oleh masyarakat dari tahun 2022 s/d 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

| NO | URAIAN | TAHUN | |
|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2022 |
| 1. | Jumlah Kunjungan Rawat Jalan | 25226 org | 27.748 org |
| 2. | Jumlah Kunjungan Rawat Inap | 2831org | 3.378 org |
| 3. | Jumlah Kunjungan Gawat Darurat | 3384 org | 4.638 org |
| 4. | Total Pasien Keluar | 2953 org | 4.208 org |
| | a. Hidup | 2877 org | 4.132 org |
| | b. Meninggal < 48 jam | 44 org | 32 org |
| | c. Meninggal > 48 jam | 32 org | 44 org |
| 5. | Total Lama Rawat | 20285 | 29.145 org |
| 6. | Jumlah Hari Perawatan | 25960 | 29.809 org |
| 7. | Jumlah Tempat Tidur | 117 unit | 134 |
| 8. | BOR ( Bed Occupancy Red ) | 61% | 61 % |
| 9. | AvLOS ( Average Lenght Of Stay ) | 7 hari | 7 Hari |
| 10. | TOI ( Turn Over Interval ) | 6 hari | 5 Hari |
| 11. | BTO ( Bed Turn Over ) | 25 kali | 31 Kali |
| 12. | GDR ( Gross Death Rate ) | 26 | 10 |
| 13. | NDR ( Net Death Rate ) | 11 | 18 |

*Sumber Data : Rekam Medis, Evaluasi dan Pelaporan RSUD K. H. Hayyung*

Dari table di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan dari tahun 2022 sebanyak 25.226 orang menjadi 27.748 orang pada tahun 2022, jumlah kunjungan Rawat Inap dari tahun 2022 sebanyak 2.831 orang meningkat di tahun 2022 sebanyak 3.378 orang, jumlah kunjungan Rawat Darurat dari tahun 2022 sebanyak 3.384 orang meningkat pada tahun 2022 sebanyak 4.638 orang hal ini disebabkan karena ketersediaan dokter spesialis yang sudah lengkap di rumah sakit dan pasien sudah tidak khawatir tehadap Covid 19 juga hal ini disebabkan adanya kesadaran dari pasien untuk berobat.

Penilaian tingkat keberhasilan pelayanan dirumah sakit biasanya dilihat dari berbagai segi yaitu tingkat pemanfaatan sarana, mutu dan tingkat efisiensi pelayanan. Beberapa indikator standar yang dipantau diantaranya adalah : BOR, LOS, TOI, BTO, GDR.

**BOR (Bed Occupancy Rate)** adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Persentase penggunaan tempat tidur merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran tinggi atau rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Tingkat pemanfaatan tempat tidur di RSUD K.H. Hayyung pada tahun 2022 adalah 61% (dengan 134 TT), Persentase pemakaian tempat tidur berada di angka ideal yaitu 60% (60%-85%).

**BTO (Bed Turn Over)** adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan wakru tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata – rata dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata – rata dipakai 40-50 kali. Pada tahun 2022 BTO rumah sakit 25 kali tidak mencapai angka ideal dan tahun 2022 frekuensi penggunaan TT

mengalami kenaikan menjadi 31 kali namun tetap tidak memenuhi angka ideal dikarenakan pengaturan jarak tempat tidur sesuai aturan BPJS yang mengakibatkan pengurangan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan.

**LOS (Lenght of Stay)** adalah rata – rata lama rawat (hari) seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum, nilai LOS yang ideal antara 6-9 hari. Tabel di atas memperlihatkan LOS RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar tahun 2022 yakni 7 hari dan pada tahun 2022 yakni 7 hari.

**TOI (Turn Over Interval)** adalah rata – rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah digunakan kembali. Idealnya, tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Pada tahun 2022 berada pada 5 hari dikarenakan adanya penambahan jumlah tempat tidur.

**GDR (Gross Death Rate)** adalah angka kematian keseluruhan pasien rawat inap yang keluar dari rumah sakit per 1000 pasien keluar hidup dan mati. GDR tidak melihat berapa lama pasien dirawat sampai meninggal dunia. Nilai ideal GDR adalah 45 per 1000 pasien keluar. Semakin kecil nilai GDR, semakin baik mutu rumah sakit. Nilai GDR di RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar pada tahun 2022 hanya sebesar 10 per 1000 pasien keluar dimana pada tahun 2022 nilai GDR rumah sakit adalah sebesar 26 per 1000 pasien keluar. Hal tersebut berarti nilai GDR rumah sakit pada tahun 2022 masih sesuai angka ideal GDR.

**NDR (Netto Death Rate)adalah** angka kematian pasien setelah dirawat ≥48 jam per 1000 pasien keluar hidup dan mati yang ada pada umumnya adalah kasus – kasus darurat. Nilai NDR yang ideal adalah <25 per 1000 pasien keluar. NDR rumah sakit pada tahun 2022 adalah 18 per 1000 pasien keluar yang artinya masih sesuai dengan angka NDR ideal.

Pada tahun 2022 jumlah tempat tidur yang ada di RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar sebanyak 134 tempat tidur, jumlah tempat tidur suatu rumah sakit dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah sakit tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jumlah tempat tidur pada RSUD K.H. Hayyung Kepulauan Selayar menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan rasio ideal tempat tidur adalah 1 berbanding 1000.

### d. Permasalahan dan Hambatan

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dialami RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar adalah peralatan-peralatan kedokteran dan sarana penunjang lainnya banyak yang masih harus ditingkatkan jika dibandingkan dengan Standar Rumah Sakit. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan medis tersebut. Kondisi bangunan gedung sebagian dalam keadaan kurang baik dan memerlukan

perawatan dan renovasi yang cukup besar dan secara terus menerus. Sementara itu dana untuk pemeliharaan semakin berkurang dan harga barang- barang semakin meningkat dengan amat cepat.

RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar sudah membuat perencanaan Master Plan rumah sakit pada tahun 2003, pembangunan dan pengembangan rumah sakit yang dilakukan sudah tidak sesuai lagi dengan master plan tersebut, hal ini disebabkan karena master plan yang ada sudah tidak sesuai dengan standar nasional rumah sakit.

Pola tarif yang berlaku di rumah sakit masih dibawah unit cost, sehingga semakin tinggi tingkat hunian maka subsidi rumah sakit menjadi semakin besar. Pola tarif baru yang baru masih sementara dalam proses untuk dijadikan Peraturan Daerah.

Disamping itu hambatan lainnya adalah :

a. Motivasi dan produktivitas SDM belum optimal
b. Kepatuhan terhadap SOP belum optimal
c. Utilisasi peralatan belum optimal
d. Sosialisasi program pemerintah (JKBM, Jamkesmas, Jampersal) belum maksimal
e. Pelayanan dan penggunaan bahan habis pakai dan obat belum efisien
f. Marketing & Public Realation belum professional
g. Belum terpenuhi rasio pengembangan SDM 5 hari per orang per tahun
h. Pengembangan karir staf belum proporsional
i. Remunerasi belum memadai

**e. Pemecahan Masalah**

Menetapkan target pencapaian melalui pelayanan prima dan bermutu secara kesinambungan dengan didukung tenaga profesional serta fasilitas peralatan sesuai kemajuan Iptekdok untuk mencapai Visi RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar yaitu Menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Rumah Sakit yang Melayani dengan Hati dan Memberikan yang terbaik untuk Mendukung Kabupaten Kepulauan Selayar Maju, Sejahtera dan Religius

# BAB III
# PENUTUP

Profil RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun 2022 merupakan refleksi dari RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar yang dapat dipakai untuk mengetahui gambaran umum serta pelayanan yang diberikan. Program dan kegiatan unggulan yang akan dilaksanakan oleh RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kepuluan Selayar akan pelayanan kesehatan.

Dengan tersusunnya Profil RSUD KH. Hayyung Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang ingin dicapai tahun 2022 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

Benteng, Januari 2022

Direktur RSUD KH. Hayyung
Kepulauan Selayar,

**dr. HAZAIRIN NUR, Sp. B, FICS**
Pangkat : Pembina
NIP. 19770312 200604 1 020